SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (5), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas rincian:

a. anggaran Pendapatan Negara;

b. anggaran Belanja Negara; dan

c. Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas rincian:

a. Penerimaan Perpajakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian:

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Pasal 4

(1) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas rincian:

a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga; dan

b. anggaran . . .

b. anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, kecuali anggaran program pengelolaan belanja lainnya.

(4) Rincian anggaran program pengelolaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian:

a. anggaran Transfer ke Daerah; dan

b. Dana Desa.

(2) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas rincian:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum;

c. Dana Alokasi Khusus Fisik;

d. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;

e. Dana Insentif Daerah; dan

f. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.

(3) Rincian . . .

(3) Rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(6) Rincian anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Dana Alokasi Khusus Nonfisik menjadi dasar bagi menteri teknis/pimpinan lembaga untuk menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada masing-masing jenis paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(7) Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai akibat dari:

a. perubahan data; dan/atau

b. kesalahan hitung,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana abadi investasi pemerintah di bidang Pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah) untuk:

a. pengembangan . . .

a. pengembangan pendidikan nasional;

b. penelitian;

c. kebudayaan; dan

d. perguruan tinggi.

(3) Ketentuan mengenai bentuk, skema, dan cakupan bidang yang dapat dibiayai menggunakan hasil pengelolaan dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

(1) Perubahan rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana;

c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana;

d. perubahan . . .

d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;

e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara;

f. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana;

g. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga, antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08;

h. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;

i. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2020 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2021 termasuk dalam rangka penyelesaian kegiatan/proyek yang diberikan penambahan waktu sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

j. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;

k. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

l. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga;

m. pergeseran . . .

m. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit eselon I yang sama;

n. Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*;

o. Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;

p. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;

q. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan selisih kurs;

r. perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan;

s. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;

t. pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;

u. penggunaan . . .

u. penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Negara yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau pemulihan ekonomi nasional pada Tahun Anggaran 2021,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan dan pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

a. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;

b. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2020 yang tidak terserap;

c. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau

d. pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah *closing date,*

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau pengubahan kementerian negara/lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran sebagai akibat pembentukan dan/atau pengubahan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

SK No 051935 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.409.581.016.340
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	683.774.638.899
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	45.769.986.630
1.1.1.1	Pendapatan PPh Minyak Bumi	21.064.609.219
1.1.1.2	Pendapatan PPh Gas Bumi	24.705.377.411
1.1.2	Pendapatan PPh Non-Migas	638.004.652.269
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	133.804.869.212
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	19.930.765.473
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	49.555.804.450
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	40.228.067.823
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.878.531.141
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	215.085.996.204
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	50.681.185.934
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	117.722.456.291
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	116.975.741
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	518.545.224.367
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	334.476.661.776
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	171.503.477.538
1.2.3	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	7.909.665.677
1.2.4	Pendapatan PPnBM Impor	4.614.488.272
1.2.5	Pendapatan PPN/PPnBM Lainnya	40.931.104
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	14.830.603.344
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	1.669.275.982
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	576.764.369
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	1.310.647.833
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	10.957.486.106
1.3.5	Pendapatan PBB Panas Bumi	285.454.384
1.3.6	Pendapatan PBB Lainnya	30.974.670
1.4	Pendapatan Cukai	180.000.000.000
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	173.780.900.000
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	155.900.000
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.563.200.000
1.4.4	Pendapatan Cukai Produk Plastik	500.000.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	12.430.549.730

SK No 051991 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	34.960.548.454
2.1	Pendapatan Bea Masuk	33.172.654.171
2.2	Pendapatan Bea Keluar	1.787.894.283
		1.444.541.564.794

Memorandum Item:	Jumlah
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:	11.747.292.280
a. Komoditas Panas Bumi	2.401.859.480
b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	9.342.594.280
c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum	2.813.270
d. Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni	25.250

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 051948 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SK No 051936 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
42	**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**	**298.204.166.025**
421	**PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM**	**104.108.834.374**
4211	Pendapatan Minyak bumi	57.934.230.000
42111	Pendapatan Minyak Bumi	57.934.230.000
421111	Pendapatan Minyak Bumi	57.934.230.000
4212	Pendapatan Gas Bumi	17.065.480.000
42121	Pendapatan Gas Bumi	17.065.480.000
421211	Pendapatan Gas Bumi	17.065.480.000
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	22.100.539.815
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	442.129.929
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi	46.368.629
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	395.761.299
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	21.658.409.886
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	16.769.717.062
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	934.692.000
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	1.975.951.961
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	88.954.862
421335	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	1.401.600.000
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	487.494.000
4214	Pendapatan Kehutanan	4.613.275.097
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.701.619.718
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.701.619.718
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.361.655.374
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.361.655.374

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	105.000.001
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	105.000.001
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.445.000.003
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.445.000.003
4215	Pendapatan Perikanan	957.190.166
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	354.235
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	164.068
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	190.167
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	956.835.931
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	956.835.931
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.438.119.293
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	1.318.541.343
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	1.318.541.343
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	31.721.228
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	25.331.133
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	6.390.094
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	87.856.721
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	87.856.721
422	**PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)**	**26.130.490.000**
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	26.130.490.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	25.567.950.000
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	11.960.082.000
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	13.607.868.000
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	562.540.000
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	562.540.000
424	**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM**	**58.790.144.843**
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	55.869.090.339
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	34.957.345.224
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	18.932.698.550
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	11.687.421.285
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	645.761.387
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	446.010
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	136.252.016
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.924.000.000
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	158.900
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	630.607.074
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	2.152.449.069
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.964.198.691
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	188.250.378
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.991.566.046

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	15.078.500
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	271.134.793
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	47.703.266
424136	Pendapatan Investasi	92.140.942
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	13.383.000.000
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	4.182.508.543
42414	Pendapatan dan Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	767.730.000
424141	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengelola Barang	767.730.000
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	28.502.598
42421	Pendapatan Hibah Terikat-Uang	16.415.885
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	1.848.000
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	15.000
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	14.552.885
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat-Uang	12.086.713
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	11.333.401
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	753.312
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	472.079.366
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	472.079.366
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	27.806.927
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	347.554.728
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	96.717.711
4244	Pendapatan dari Alokasi APBN	10.077.159

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	10.077.159
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	9.605.987
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	471.172
4249	Pendapatan BLU Lainnya	2.410.395.379
42491	Pendapatan BLU Lainnya	2.366.571.080
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.293.774.738
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	364.652
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	72.431.688
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	43.737.085
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	4.916.318
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	10.474.742
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	15.170.381
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	6.894.444
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	6.087.400
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	193.798
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	87.214
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	87.214
425	**PENDAPATAN PNBP LAINNYA**	**109.174.696.808**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	23.393.209.933
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	17.071.989.924
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	17.004.016.528
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	51.490.863
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	16.482.532
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	44.681.883
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.581
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	14.563.196
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	7.915.921
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	22.180.183
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	497.181.652
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	301.336.049
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	818.446
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	75.000
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	41.690.967
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	396.052
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	152.865.137
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	553.416.542
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	552.216.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	1.200.000
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	51.327.929
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	51.327.929
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	4.088.612.000
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	3.997.460.000
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	91.152.000
42517	Pendapatan dari Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.086.000.000
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	850.794.319
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	235.205.680
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	18.261.722.179
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	4.471.768.449
425211	Pendapatan Paspor	1.277.500.000
425212	Pendapatan Visa	447.750.000
425213	Pendapatan Izin Keimigrasiandan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	806.150.000
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	103.079.000
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	770.147.700
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	221.097.100
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	45.682.028
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	800.000.000
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	362.620

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	606.356.882
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	283.850.000
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	115.000.000
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	136.725.000
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	42.581.882
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	10.000.000
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	18.200.000
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	448.862.524
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	453.790
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.728.050
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	31.555.751
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.150.000
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	300.000
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	46.702.862
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	271.856.241
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	47.927.214
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	44.188.613
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	373.185.118

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	84.031.423
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	14.119.261
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	173.179.630
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	7.688.585
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	8.997.059
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	49.535.898
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	1.066.311
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	14.398.481
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	20.168.467
42525	Pendapatan Perizinan	1.323.324.901
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	1.201.758.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	13.658.700
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	34.370.900
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	46.783.000
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.548.468
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	22.205.833
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	9.331.912.355
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	731.392.950

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	787.933.210
425263	Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	2.644.935.500
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	2.585.424.975
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.794.229.720
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	35.069.050
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	187.199.450
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	565.727.500
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.127.119.491
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	7.070.000
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	7.070.000
425273	Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	305.224.045
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	242.351.175
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	25.013.490
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital	535.754.781
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	4.636.000
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	579.192.457
425281	Pendapatan Akreditasi	32.341.450
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.399.704

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	103.342.720
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	17.969.097
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	54.506.339
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	8.697.230
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	105.642.823
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	175.303.892
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	79.989.201
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	6.080.132.268
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan	2.330.019.696
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	339.848.854
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1.457.132.786
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	326.061.667
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	45.772.585
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	119.472.504
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	41.731.300
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	168.527.660

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	168.527.660
42533	Pendapatan Jasa Karantina	270.517.168
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	196.117.168
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	74.400.000
42534	Pendapatan Jasa Agraria	2.414.400.030
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	2.414.400.030
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan	896.667.712
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	852.000.000
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	44.667.712
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	4.639.714.134
42541	Pendapatan Pendidikan	3.966.127.977
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	107.349.983
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	3.702.880.872
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	44.495.673
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	111.401.448
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	301.321.470
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	285.069.842
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	16.251.628
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	361.541.664
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	89.194.523
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	22.784.668
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	128.366.109

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	7.140.116
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	108.356.845
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.140.750
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	4.558.652
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	10.723.022
425451	Pendapatan Museum	3.152.443
425459	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	7.570.579
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	27.310.126.503
42551	Pendapatan Jasa Transportasi	6.871.134.842
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.181.339.400
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	800.490.029
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	2.373.583.807
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	585.369.933
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	247.131.365
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	370.815.488
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	598.457.516
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	628.030.340
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	85.916.960
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	20.265.382.510
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	19.065.978.121
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.147.531.358
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	44.789.141

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	550.500
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	2.537.125
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	1.496.265
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	2.500.000
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	173.609.149
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	21.473.208
425532	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP RRI	81.950
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	106.206.776
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	45.847.215
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	395.343.509
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	199.094.754
425611	Pendapatan Wisata Alam	166.314.023
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.548.718
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	13.232.013
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	29.359.965
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	26.826.525
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	2.533.440
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	166.888.789
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	12.202.769
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	40.114.932
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	114.571.087
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	20.752.617.303
42571	Pendapatan Bunga	1.799.851.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.799.851.000
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption	5.800.000
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	5.800.000
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	10.803.000.000
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	8.000.000.000
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	2.803.000.000
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	73.364.580
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	66.364.580
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	7.000.000
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	7.554
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	7.554
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	115.054.109
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	27.000
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	69.494.000
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	45.533.109
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	7.218.395.989
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	220.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	287.500.000
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	6.710.895.989
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	736.028.806
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	2.128.806
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	715.000.000
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	18.900.000
42579	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi/ Tuntutan Perbendaharaan	1.115.262
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	991.550
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	102.701
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	21.011
4258	Pendapatan Denda	16.678.412
42581	Pendapatan Denda I	16.678.412
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.678.412
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	12.000.000
4259	Pendapatan Lain-lain	8.325.152.563
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	7.255.650.540
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	18.834.481
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.170.544

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	APBN 2021
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	645.515
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	7.233.000.000
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	300.000.000
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	300.000.000
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	875.862
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	875.862
42599	Pendapatan Lain-Lain II	768.626.159
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	64.534.596
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	704.091.563

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 051955 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2020 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

SK No 051937 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 001
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	119.495.107	622.684.089	8.692.488		750.871.684	767.113.419	783.842.407	801.073.319
001.01	Sekretariat Jenderal	77.866.831	76.543.974	8.292.488		162.703.293	167.070.933	171.569.616	176.203.293
01	PELAYANAN UMUM	77.866.831	76.543.974	8.292.488		162.703.293	167.070.933	171.569.616	176.203.293
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	77.866.831	76.543.974	8.292.488		162.703.293	167.070.933	171.569.616	176.203.293
001.01.WA	Program Dukungan Manajemen	77.866.831	76.543.974	8.292.488		162.703.293	167.070.933	171.569.616	176.203.293
1001	Pengelolaan Administrasi dan Reformasi Birokrasi		18.192.187	148.926		18.341.113	18.787.540	19.247.353	19.720.988
1002	Pengelolaan Administrasi Publikasi		862.820	696.754		1.559.574	1.565.780	1.572.174	1.578.754
1003	Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal	77.866.831	2.333.244	147.000		80.347.075	80.155.167	82.645.465	85.210.478
1004	Pengelolaan Administrasi Persidangan dan Sosialisasi		462.210			462.210	473.241	484.602	496.304
1005	Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Pimpinan		1.068.541			1.068.541	1.095.731	1.123.746	1.152.595
1006	Pengelolaan Administrasi Pengkajian Kemajelisan		790.528			790.528	795.460	800.539	805.772
1014	Pengelolaan Administrasi Sarana dan Prasarana Kantor		52.834.444	7.299.808		60.134.252	64.198.014	65.695.737	67.238.402
001.02	Majelis	41.628.276	546.140.115	400.000		588.168.391	600.042.486	612.272.791	624.870.026
01	PELAYANAN UMUM	41.628.276	546.140.115	400.000		588.168.391	600.042.486	612.272.791	624.870.026
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	41.628.276	546.140.115	400.000		588.168.391	600.042.486	612.272.791	624.870.026

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 001
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	41.628.276	546.140.115	400.000		588.168.391	600.042.486	612.272.791	624.870.026
1008	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR		76.094.487			76.094.487	76.651.219	77.224.646	77.815.286
5001	Pelaksanaan Kegiatan Publikasi/Peliputan		33.855.887	200.000		34.055.887	34.222.691	34.394.500	34.571.459
5002	Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR		307.386.157	200.000		307.586.157	315.005.716	322.647.857	330.519.269
5003	Pengkajian Kemajelisan		90.212.508			90.212.508	91.981.349	93.803.251	95.679.816
5004	Pengelolaan Administrasi Keuangan MPR	41.628.276	16.380.000			58.008.276	59.748.521	61.540.974	63.387.203
5728	Penganggaran MPR		22.211.076			22.211.076	22.432.990	22.661.563	22.896.993
JUMLAH RM						750.871.684			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 002
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.090.018.112	4.373.608.317	528.436.455		5.992.062.884	6.096.747.810	6.204.573.326	6.315.633.663
002.01	Sekretariat Jenderal	246.766.063	790.725.991	528.436.455		1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509
01	PELAYANAN UMUM	246.766.063	790.725.991	528.436.455		1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	246.766.063	790.725.991	528.436.455		1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509
002.01.WA	Program Dukungan Manajemen	246.766.063	790.725.991	528.436.455		1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509	1.565.928.509
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna		9.474.300			9.474.300	9.474.300	9.474.300	9.474.300
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah		2.921.639			2.921.639	2.921.639	2.921.639	2.921.639
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen		4.656.000			4.656.000	4.656.000	4.656.000	4.656.000
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan		8.299.000			8.299.000	8.299.000	8.299.000	8.299.000
5785	Pemberitaan Parlemen		150.356.259	4.513.741		154.870.000	154.870.000	154.870.000	154.870.000
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan		17.251.419	110.559		17.361.978	17.361.978	17.361.978	17.361.978
5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		3.448.184			3.448.184	3.448.184	3.448.184	3.448.184
5788	Pengelolaan SDM dan Organisasi		35.995.587	3.377.264		39.372.851	39.372.851	39.372.851	39.372.851
5789	Perumusan Perencanaan dan Keuangan	246.766.063	18.755.447			265.521.510	265.521.510	265.521.510	265.521.510
5790	Pengelolaan Barang Milik Negara		304.296.300	193.767.955		498.064.255	498.064.255	498.064.255	498.064.255

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 002
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor		135.911.655	192.054.971		327.966.626	327.966.626	327.966.626	327.966.626
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I		3.430.000			3.430.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II		5.121.565			5.121.565	5.121.565	5.121.565	5.121.565
5794	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		12.178.076			12.178.076	12.178.076	12.178.076	12.178.076
5795	Pengelolaan Data dan Informasi		31.431.590	134.507.715		165.939.305	165.939.305	165.939.305	165.939.305
5796	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan		18.095.500			18.095.500	18.095.500	18.095.500	18.095.500
5797	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		5.068.000			5.068.000	5.068.000	5.068.000	5.068.000
5798	Penyusunan Kajian APBN		5.331.720	3.000		5.334.720	5.334.720	5.334.720	5.334.720
5799	Penyusunan Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara		4.935.000			4.935.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000
5800	Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan		13.768.750	101.250		13.870.000	13.870.000	13.870.000	13.870.000
002.02	Dewan	843.252.049	3.582.882.326			4.426.134.375	4.530.819.301	4.638.644.817	4.749.705.154
01	PELAYANAN UMUM	843.252.049	3.582.882.326			4.426.134.375	4.530.819.301	4.638.644.817	4.749.705.154
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	843.252.049	3.582.882.326			4.426.134.375	4.530.819.301	4.638.644.817	4.749.705.154
002.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	843.252.049	3.582.882.326			4.426.134.375	4.530.819.301	4.638.644.817	4.749.705.154
4397	Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Penegakan Etik DPR		55.764.511			55.764.511	56.651.533	57.565.170	58.506.217

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 002
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5801	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI		340.499.779			340.499.779	341.418.909	342.365.620	343.340.733
5802	Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI		37.252.288			37.252.288	38.297.727	39.374.550	40.483.675
5803	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI		369.062.272			369.062.272	376.638.340	384.441.671	392.479.152
5804	Pengelolaan Kelembagaan oleh Pimpinan DPR		94.780.823			94.780.823	95.729.844	96.707.343	97.714.164
5805	Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional		110.284.183			110.284.183	111.017.242	111.772.304	112.550.024
5806	Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat		2.337.007.754			2.337.007.754	2.397.956.084	2.460.732.867	2.525.392.954
5807	Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan	843.252.049	238.230.716			1.081.482.765	1.113.109.622	1.145.685.292	1.179.238.235
JUMLAH RM						5.992.062.884			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 004
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.066.936.812	1.564.739.454	137.412.405		3.769.088.671	3.871.429.484	3.976.841.282	4.085.415.794
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan	2.066.936.812	1.564.739.454	137.412.405		3.769.088.671	3.871.429.484	3.976.841.282	4.085.415.794
01	PELAYANAN UMUM	2.066.936.812	1.564.739.454	137.412.405		3.769.088.671	3.871.429.484	3.976.841.282	4.085.415.794
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2.066.936.812	1.564.739.454	137.412.405		3.769.088.671	3.871.429.484	3.976.841.282	4.085.415.794
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	1.846.416.736	1.183.780.466	35.710.830		3.065.908.032	3.148.595.975	3.233.765.286	3.321.490.014
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	270.389.917	962.136.995	31.917.872		1.264.444.784	1.294.252.773	1.324.955.639	1.356.579.857
1153	Pengawasan oleh Inspektorat		14.662.495			14.662.495	14.948.168	15.242.411	15.545.492
1154	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah		5.066.193			5.066.193	5.115.263	5.165.805	5.217.866
1155	Pelayanan Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum		5.375.629			5.375.629	5.488.617	5.605.001	5.724.882
1156	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja		8.222.244			8.222.244	8.395.792	8.574.562	8.758.700
1157	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan		5.189.705			5.189.705	5.309.343	5.432.571	5.559.498
1158	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara		5.379.379			5.379.379	5.485.412	5.594.632	5.707.131
1159	Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara	1.564.484.990	59.509.953			1.623.994.943	1.672.547.055	1.722.555.738	1.774.064.680
1167	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	11.541.829	86.383.574	3.792.958		101.718.361	104.273.499	106.905.341	109.616.182
2039	Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara		31.854.299			31.854.299	32.780.053	33.733.586	34.715.726

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 004
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004.01.WA	Program Dukungan Manajemen	220.520.076	380.958.988	101.701.575		703.180.639	722.833.509	743.075.996	763.925.780
1032	Pelayanan Kehumasan dan Kerja Sama Internasional	801.878	47.188.084	680.197		48.670.159	49.744.963	50.852.030	51.992.318
1033	Manajemen SDM	219.718.198	85.760.444			305.478.642	315.224.276	325.262.290	335.601.447
1034	Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara		26.121.634			26.121.634	26.194.704	26.269.967	26.347.488
1152	Pengelolaan Prasarana, Sarana serta Pelayanan Umum		110.282.420	61.826.167		172.108.587	177.105.558	182.252.439	187.553.738
2045	Pelayanan Kesekretariatan Badan		79.454.535			79.454.535	81.463.197	83.532.116	85.663.105
2046	Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi		32.151.871	39.195.211		71.347.082	73.100.811	74.907.154	76.767.684
JUMLAH RM						3.762.401.703			
JUMLAH PNBP						6.686.968			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	MAHKAMAH AGUNG	7.248.801.219	2.308.362.816	1.681.783.351		11.238.947.386	11.250.447.189	11.262.290.868	11.274.491.999
005.01	Badan Urusan Administrasi	7.036.522.272	1.877.516.040	1.663.782.680		10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	7.036.522.272	1.877.516.040	1.663.782.680		10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992
03.04	PERADILAN	7.036.522.272	1.877.516.040	1.663.782.680		10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.036.522.272	1.877.516.040	1.663.782.680		10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992	10.577.820.992
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan		19.425.828			19.425.828	19.425.828	19.425.828	19.425.828
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		14.736.488			14.736.488	14.736.488	14.736.488	14.736.488
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	7.036.522.272	1.615.335.875			8.651.858.147	8.651.858.147	8.651.858.147	8.651.858.147
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung		12.831.868			12.831.868	12.831.868	12.831.868	12.831.868
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		6.975.240			6.975.240	6.975.240	6.975.240	6.975.240
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya		6.332.350			6.332.350	6.332.350	6.332.350	6.332.350
1070	Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah		201.878.391			201.878.391	201.878.391	201.878.391	201.878.391

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung								
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			1.663.782.680		1.663.782.680	1.663.782.680	1.663.782.680	1.663.782.680
005.02	Kepaniteraan	162.377.726	25.541.788	2.900.000		190.819.514	196.544.069	202.440.371	208.513.577
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	162.377.726	25.541.788	2.900.000		190.819.514	196.544.069	202.440.371	208.513.577
03.04	PERADILAN	162.377.726	25.541.788	2.900.000		190.819.514	196.544.069	202.440.371	208.513.577
005.02.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		11.026.581			11.026.581	11.357.371	11.698.090	12.049.030
1044	Peningkatan Penyelesaian Perkara		11.026.581			11.026.581	11.357.371	11.698.090	12.049.030
005.02.WA	Program Dukungan Manajemen	162.377.726	14.515.207	2.900.000		179.792.933	185.186.698	190.742.281	196.464.547
6242	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	162.377.726	14.515.207	2.900.000		179.792.933	185.186.698	190.742.281	196.464.547
005.03	Ditjen Badan Peradilan Umum	14.264.807	123.723.728	591.000		138.579.535	142.735.804	147.015.748	151.425.862
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	14.264.807	123.723.728	591.000		138.579.535	142.735.804	147.015.748	151.425.862
03.04	PERADILAN	14.264.807	123.723.728	591.000		138.579.535	142.735.804	147.015.748	151.425.862
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		90.206.458			90.206.458	92.911.546	95.696.783	98.567.333
1046	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum		7.166.995			7.166.995	7.381.997	7.603.451	7.831.547
1047	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)		50.000			50.000	51.500	53.045	54.636
1048	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi		50.000			50.000	51.500	53.045	54.636

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		82.939.463			82.939.463	85.426.549	87.987.242	90.626.514
005.03.WA	Program Dukungan Manajemen	14.264.807	33.517.270	591.000		48.373.077	49.824.258	51.318.965	52.858.529
6243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	14.264.807	33.517.270	591.000		48.373.077	49.824.258	51.318.965	52.858.529
005.04	Ditjen Badan Peradilan Agama	6.878.528	82.046.859	1.382.180		90.307.567	91.308.549	92.339.452	93.401.612
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.878.528	82.046.859	1.382.180		90.307.567	91.308.549	92.339.452	93.401.612
03.04	PERADILAN	6.878.528	82.046.859	1.382.180		90.307.567	91.308.549	92.339.452	93.401.612
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		51.337.500			51.337.500	52.338.482	53.369.385	54.431.545
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		48.225.109			48.225.109	49.199.404	50.202.814	51.236.656
1055	Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama		2.535.431			2.535.431	2.546.669	2.558.250	2.570.178
1056	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan		576.960			576.960	592.409	608.321	624.711
005.04.WA	Program Dukungan Manajemen	6.878.528	30.709.359	1.382.180		38.970.067	38.970.067	38.970.067	38.970.067
6244	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	6.878.528	30.709.359	1.382.180		38.970.067	38.970.067	38.970.067	38.970.067
005.05	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	7.034.445	21.912.759	265.991		29.213.195	29.213.195	29.213.195	29.213.195
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	7.034.445	21.912.759	265.991		29.213.195	29.213.195	29.213.195	29.213.195

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.04	PERADILAN	7.034.445	21.912.759	265.991		29.213.195	29.213.195	29.213.195	29.213.195
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		10.846.145			10.846.145	10.846.145	10.846.145	10.846.145
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		5.920.560			5.920.560	5.920.560	5.920.560	5.920.560
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		4.921.485			4.921.485	4.921.485	4.921.485	4.921.485
1061	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer		2.050			2.050	2.050	2.050	2.050
1062	Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)		2.050			2.050	2.050	2.050	2.050
005.05.WA	Program Dukungan Manajemen	7.034.445	11.066.614	265.991		18.367.050	18.367.050	18.367.050	18.367.050
6245	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	7.034.445	11.066.614	265.991		18.367.050	18.367.050	18.367.050	18.367.050
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	15.875.514	143.548.306	12.661.500		172.085.320	172.085.320	172.085.320	172.085.320
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	15.875.514	143.548.306	12.661.500		172.085.320	172.085.320	172.085.320	172.085.320
03.04	PERADILAN	15.875.514	143.548.306	12.661.500		172.085.320	172.085.320	172.085.320	172.085.320
005.06.WA	Program Dukungan Manajemen	15.875.514	143.548.306	12.661.500		172.085.320	172.085.320	172.085.320	172.085.320
1073	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan		39.300.422			39.300.422	39.300.422	39.300.422	39.300.422

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1074	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan		15.475.557			15.475.557	15.475.557	15.475.557	15.475.557
1075	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	15.875.514	35.709.806	12.661.500		64.246.820	64.246.820	64.246.820	64.246.820
1076	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan		53.062.521			53.062.521	53.062.521	53.062.521	53.062.521
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	5.847.927	34.073.336	200.000		40.121.263	40.739.260	41.375.790	42.031.441
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.847.927	34.073.336	200.000		40.121.263	40.739.260	41.375.790	42.031.441
03.04	PERADILAN	5.847.927	34.073.336	200.000		40.121.263	40.739.260	41.375.790	42.031.441
005.07.WA	Program Dukungan Manajemen	5.847.927	34.073.336	200.000		40.121.263	40.739.260	41.375.790	42.031.441
1077	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I		6.162.153			6.162.153	6.211.689	6.262.710	6.315.263
1078	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II		6.721.384			6.721.384	6.769.192	6.818.434	6.869.153
1079	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	5.847.927	9.279.524	200.000		15.327.451	15.737.759	16.160.370	16.595.682
5258	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III		6.721.506			6.721.506	6.788.835	6.858.184	6.929.615

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5259	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV		5.188.769			5.188.769	5.231.785	5.276.092	5.321.728
JUMLAH RM						11.238.947.386			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 006
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.236.933.560	1.811.217.702	3.545.168.224		9.593.319.486	9.896.610.806	10.193.496.310	10.499.299.703
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia	4.236.933.560	1.811.217.702	3.545.168.224		9.593.319.486	9.896.610.806	10.193.496.310	10.499.299.703
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	4.236.933.560	1.811.217.702	3.545.168.224		9.593.319.486	9.896.610.806	10.193.496.310	10.499.299.703
03.03	PEMBINAAN HUKUM	4.236.933.560	1.800.545.782	3.520.301.124		9.557.780.466	9.860.005.620	10.155.792.978	10.460.465.271
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		527.214.331			527.214.331	541.286.494	557.516.920	574.241.747
1087	Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.289.950			2.289.950			
1099	Operasi Inteliijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen		3.047.700			3.047.700	3.139.131	3.233.300	3.330.299
1100	Operasi Inteliijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.654.780			2.654.780	2.734.422	2.816.451	2.900.942
1101	Operasi Inteliijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.887.950			2.887.950	2.974.587	3.063.819	3.155.733
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		22.316.016			22.316.016	23.008.119	23.697.363	24.408.341
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		30.591.075			30.591.075	31.550.684	32.495.519	33.470.114
1104	Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen		1.472.256			1.472.256	1.516.421	1.561.907	1.608.762
1105	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		322.000			322.000	331.660	341.609	351.858

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 006
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1106	Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		12.954.000			12.954.000	13.342.620	13.742.897	14.155.183
1107	Penanganan Perkara Terorisme dan Lintas Negara di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		300.000			300.000	309.000	318.270	327.818
1108	Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		244.585.630			244.585.630	252.275.165	259.841.636	267.636.761
1109	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		28.026.233			28.026.233	28.867.012	29.733.013	30.625.003
1110	Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		7.610.850			7.610.850	7.839.172	8.074.341	8.316.569
1111	Pra-Penuntutan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		6.133.315			6.133.315	6.317.303	6.506.814	6.702.017
1112	Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.241.465			2.241.465	2.308.705	2.377.961	2.449.300
1113	Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		1.170.878			1.170.878	1.206.003	1.242.177	1.279.442

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 006
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1114	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		124.638.990			124.638.990	128.568.479	132.423.208	136.395.762
1115	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		22.172.003			22.172.003	22.837.156	23.522.260	24.227.922
1116	Pemberian Pertimbangan Hukum di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		859.500			859.500	885.285	911.842	939.197
1117	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		865.000			865.000	890.950	917.677	945.206
1118	Penanganan Perkara Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		676.700			676.700	697.001	717.908	739.446
1119	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		3.925.940			3.925.940	4.051.363	4.171.625	4.296.586
1120	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		4.270.940			4.270.940	4.399.065	4.531.027	4.666.961
1121	Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		702.000			702.000	723.060	744.751	767.094
1122	Penanganan Pra Penyidikan, Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Tindak		499.160			499.160	514.131	529.545	545.431

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 006
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pidana Khusus								
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.236.933.560	1.273.331.451	3.520.301.124		9.030.566.135	9.318.719.126	9.598.276.058	9.886.223.524
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Perrtimbangan Hukum, Kerja sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI diluar negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum		10.945.936			10.945.936	11.274.306	11.612.507	11.960.880
1081	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI		24.244.608			24.244.608	24.971.943	25.721.081	26.492.707
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	437.828.109	50.234.808			488.062.917	502.704.790	517.785.903	533.319.480
1083	Perencanaan yang meliputi Pengelolaan Data, Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja, Pemantauan dan Evaluasi, Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana serta Fasilitasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI		12.831.370			12.831.370	13.216.304	13.612.767	14.021.151
1084	Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan RI		38.651.166			38.651.166	39.810.697	41.005.000	42.235.145
1085	Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, Kesehatan, dan Pembinaan Rohani, serta Kerumah Tanggaan		72.806.906			72.806.906	74.991.097	77.240.811	79.558.028
1086	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan		21.750			21.750	22.402	23.073	23.765

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 006
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1088	Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi		72.286.996	65.059.034		137.346.030	141.466.400	145.710.387	150.081.698
1089	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia		2.262.150			2.262.150	2.329.998	2.399.876	2.471.876
1090	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	3.733.173.691	687.391.080			4.420.564.771	4.570.417.972	4.707.526.349	4.848.751.525
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI			3.455.242.090		3.455.242.090	3.558.899.332	3.665.666.299	3.775.636.114
1092	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah I		210.000			210.000	216.300	222.784	229.468
1093	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah II		210.000			210.000	216.300	222.784	229.468
1094	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah III		210.000			210.000	216.300	222.784	229.468
1095	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah IV		210.000			210.000	216.300	222.784	229.468
1096	Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah V		210.000			210.000	216.300	222.784	229.468

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 006
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		7.921.803			7.921.803	8.159.366	8.404.000	8.656.113
1098	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan		11.276.796			11.276.796	11.615.092	11.963.524	12.322.429
5006	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional		138.533.865			138.533.865	142.689.840	146.970.462	151.379.577
5007	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan		116.070.090			116.070.090	119.552.191	123.138.750	126.832.911
5008	Kesekretariatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	65.931.760	26.802.127			92.733.887	95.515.896	98.381.349	101.332.785
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA		10.671.920	24.867.100		35.539.020	36.605.186	37.703.332	38.834.432
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen		10.671.920	24.867.100		35.539.020	36.605.186	37.703.332	38.834.432
5276	Pemulihan Aset yang Menjadi Kewenangan Kejaksaan RI sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Koordinasi dengan Jaringan Kerjasama Pemulihan Aset Nasional maupun Transnasional		10.671.920	24.867.100		35.539.020	36.605.186	37.703.332	38.834.432
JUMLAH RM						9.507.742.486			
JUMLAH PNBP						85.577.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 007
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	475.904.329	1.356.087.770	109.066.023		1.941.058.122	2.019.242.803	2.031.596.015	2.044.516.235
007.01	Sekretariat Negara	432.306.191	1.188.948.048	104.477.283		1.725.731.522	1.727.245.549	1.728.804.998	1.730.411.235
01	PELAYANAN UMUM	432.306.191	1.188.948.048	104.477.283		1.725.731.522	1.727.245.549	1.728.804.998	1.730.411.235
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	432.306.191	1.188.948.048	104.477.283		1.725.731.522	1.727.245.549	1.728.804.998	1.730.411.235
007.01.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		589.185.819	53.382.029		642.567.848	642.567.848	642.567.848	642.567.848
1148	Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri		4.367.943			4.367.943	4.367.943	4.367.943	4.367.943
5953	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden		260.439.042	46.328.068		306.767.110	306.767.110	306.767.110	306.767.110
5956	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan, Pers, Media, dan Informasi kepada Wakil Presiden		67.736.577	4.007.000		71.743.577	71.743.577	71.743.577	71.743.577
5958	Penyusunan Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan		56.906.855			56.906.855	56.906.855	56.906.855	56.906.855
5959	Penyusunan Analisis Kebijakan Kepada Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan		1.246.480			1.246.480	1.246.480	1.246.480	1.246.480
5960	Penyusunan Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing		939.500			939.500	939.500	939.500	939.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 007
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6430	Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan		2.479.831			2.479.831	2.479.831	2.479.831	2.479.831
6431	Pelaksanaan Analisis dan Administrasi Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan		1.303.459			1.303.459	1.303.459	1.303.459	1.303.459
6432	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Lainnya		607.172			607.172	607.172	607.172	607.172
6433	Penyelenggaraan Dukungan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden serta Tugas Teknis Lainnya		156.226.890	2.046.961		158.273.851	158.273.851	158.273.851	158.273.851
6434	Penyelenggaraan Layanan Personel TNI dan Polri, Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dan Pengkoordinasian Pengamanan bagi Presiden dan Wapres beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintah		36.932.070	1.000.000		37.932.070	37.932.070	37.932.070	37.932.070
007.01.WA	Program Dukungan Manajemen	432.306.191	599.762.229	51.095.254		1.083.163.674	1.084.677.701	1.086.237.150	1.087.843.387
1126	Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan, Hukum, dan Reformasi Birokrasi Kementerian Sekretariat Negara		1.375.012			1.375.012	1.378.492	1.382.076	1.385.768
1128	Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara		853.106			853.106	853.106	853.106	853.106
1262	Pengelolaan Komplek Kemayoran		162.510.897	3.239.608		165.750.505	167.261.052	168.816.917	170.419.462
1263	Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno		152.743.831	3.268.518		156.012.349	156.012.349	156.012.349	156.012.349
6435	Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia dan		10.780.812	175.151		10.955.963	10.955.963	10.955.963	10.955.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 007
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN) Kementerian Sekretariat Negara								
6436	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Keuangan, dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	415.651.686	6.766.439			422.418.125	422.418.125	422.418.125	422.418.125
6437	Penyelenggaran Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan, dan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		2.482.395			2.482.395	2.482.395	2.482.395	2.482.395
6438	Penyelenggaraan Dukungan Sarana, Prasarana, Pelayanan Umum Lainnya, serta Pengelolaan TIK di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		145.118.241	40.629.479		185.747.720	185.747.720	185.747.720	185.747.720
6439	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Presiden	11.891.171	64.226.640	1.165.860		77.283.671	77.283.671	77.283.671	77.283.671
6440	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Wakil Presiden	4.022.970	46.248.255	2.198.000		52.469.225	52.469.225	52.469.225	52.469.225
6441	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Militer Presiden	740.364	6.656.601	418.638		7.815.603	7.815.603	7.815.603	7.815.603
007.06	Pasukan Pengamanan Presiden		94.634.190			94.634.190	95.578.681	96.551.507	97.553.520
01	PELAYANAN UMUM		94.634.190			94.634.190	95.578.681	96.551.507	97.553.520
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		94.634.190			94.634.190	95.578.681	96.551.507	97.553.520
007.06.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		90.297.447			90.297.447	91.241.938	92.214.764	93.216.777
5965	Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya Mantan		90.297.447			90.297.447	91.241.938	92.214.764	93.216.777

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 007
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Presiden dan Mantan Wakil Presiden serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah								
007.06.WA	Program Dukungan Manajemen		4.336.743			4.336.743	4.336.743	4.336.743	4.336.743
6442	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Paspampres		4.336.743			4.336.743	4.336.743	4.336.743	4.336.743
007.07	Dewan Pertimbangan Presiden	3.833.267	29.488.742	610.168		33.932.177	52.158.653	54.766.593	57.504.923
01	PELAYANAN UMUM	3.833.267	29.488.742	610.168		33.932.177	52.158.653	54.766.593	57.504.923
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	3.833.267	29.488.742	610.168		33.932.177	52.158.653	54.766.593	57.504.923
007.07.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		2.449.016	5.400		2.454.416	12.308.282	12.923.702	13.569.892
5966	Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi dalam rangka penyusunan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden		2.449.016	5.400		2.454.416	12.308.282	12.923.702	13.569.892
007.07.WA	Program Dukungan Manajemen	3.833.267	27.039.726	604.768		31.477.761	39.850.371	41.842.891	43.935.031
6443	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	3.833.267	27.039.726	604.768		31.477.761	39.850.371	41.842.891	43.935.031
007.10	Kantor Staf Presiden	39.764.871	43.016.790	3.978.572		86.760.233	144.259.920	151.472.917	159.046.557
01	PELAYANAN UMUM	39.764.871	43.016.790	3.978.572		86.760.233	144.259.920	151.472.917	159.046.557
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	39.764.871	43.016.790	3.978.572		86.760.233	144.259.920	151.472.917	159.046.557

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 007
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007.10.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		4.395.217			4.395.217	24.746.490	25.983.817	27.283.007
5969	Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Pengelolaan Isu Strategis, dan Komunikasi Politik		4.395.217			4.395.217	24.746.490	25.983.817	27.283.007
007.10.WA	Program Dukungan Manajemen	39.764.871	38.621.573	3.978.572		82.365.016	119.513.430	125.489.100	131.763.550
6444	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Kantor Staf Presiden	39.764.871	38.621.573	3.978.572		82.365.016	119.513.430	125.489.100	131.763.550
JUMLAH RM						1.562.894.562			
JUMLAH RMP						1.000.000			
JUMLAH PNBP						2.149.706			
JUMLAH BLU						321.762.854			
JUMLAH HLN						53.251.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	814.277.396	2.182.885.846	207.537.196		3.204.700.438	3.256.628.698	3.312.622.017	3.370.296.310
010.01	Sekretariat Jenderal	370.235.166	575.330.897	114.343.186		1.059.909.249	1.091.705.487	1.124.455.862	1.158.189.396
01	PELAYANAN UMUM	370.235.166	575.330.897	114.343.186		1.059.909.249	1.091.705.487	1.124.455.862	1.158.189.396
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	176.110.966	227.424.117	47.636.336		451.171.419	464.706.277	478.647.021	493.006.386
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	176.110.966	227.424.117	47.636.336		451.171.419	464.706.277	478.647.021	493.006.386
4255	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	6.583.307	10.720.000			17.303.307	17.822.376	18.356.999	18.907.713
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Internal Kementerian Dalam Negeri		12.675.003			12.675.003	13.055.219	13.446.817	13.850.220
6084	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Internal Kementerian Dalam Negeri	169.527.659	140.338.548	43.831.526		353.697.733	364.308.546	375.237.639	386.494.738
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Internal Kementerian Dalam Negeri		29.871.399	1.625.060		31.496.459	32.441.325	33.414.520	34.416.954
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Internal Kementerian Dalam Negeri		22.519.124	194.750		22.713.874	23.395.237	24.096.995	24.819.893
6087	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus		11.300.043	1.985.000		13.285.043	13.683.574	14.094.051	14.516.868
01.03	PELAYANAN UMUM	194.124.200	347.906.780	66.706.850		608.737.830	626.999.210	645.808.841	665.183.010
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	194.124.200	347.906.780	66.706.850		608.737.830	626.999.210	645.808.841	665.183.010
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN		667.398			667.398	687.402	708.028	729.261

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	194.124.200	268.547.270	66.667.850		529.339.320	545.219.253	561.575.720	578.422.968
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN		1.647.120	9.000		1.656.120	1.705.795	1.756.958	1.809.668
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN		11.164.725			11.164.725	11.499.557	11.844.491	12.199.809
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN		65.880.267	30.000		65.910.267	67.887.203	69.923.644	72.021.304
010.02	Inspektorat Jenderal	36.373.998	38.882.363	1.000.000		76.256.361	76.256.361	76.256.361	76.256.361
01	PELAYANAN UMUM	36.373.998	38.882.363	1.000.000		76.256.361	76.256.361	76.256.361	76.256.361
01.03	PELAYANAN UMUM	36.373.998	38.882.363	1.000.000		76.256.361	76.256.361	76.256.361	76.256.361
010.02.WA	Program Dukungan Manajemen	36.373.998	38.882.363	1.000.000		76.256.361	76.256.361	76.256.361	76.256.361
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	36.373.998	12.174.380	1.000.000		49.548.378	49.548.378	49.548.378	49.548.378
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah		162.881			162.881	162.881	162.881	162.881
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah		2.920.532			2.920.532	2.920.532	2.920.532	2.920.532
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD		2.365.975			2.365.975	2.365.975	2.365.975	2.365.975
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah,		20.258.595			20.258.595	20.258.595	20.258.595	20.258.595

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Khusus								
010.03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	37.700.973	184.822.999	790.000		223.313.972	230.013.269	236.913.576	244.020.977
01	PELAYANAN UMUM	37.700.973	184.822.999	790.000		223.313.972	230.013.269	236.913.576	244.020.977
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		147.681.418			147.681.418	157.731.056	162.462.940	167.336.835
010.03.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum		147.681.418			147.681.418	157.731.056	162.462.940	167.336.835
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya		6.280.000			6.280.000	6.468.376	6.662.405	6.862.280
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional		4.525.000			4.525.000	4.660.738	4.800.547	4.944.566
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan		136.876.418			136.876.418	146.601.942	150.999.988	155.529.989
01.03	PELAYANAN UMUM	37.700.973	37.141.581	790.000		75.632.554	72.282.213	74.450.636	76.684.142
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	37.700.973	37.141.581	790.000		75.632.554	72.282.213	74.450.636	76.684.142
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum		2.000.000			2.000.000	2.059.994	2.121.785	2.185.438
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	37.700.973	26.229.636	790.000		64.720.609	61.042.929	62.874.190	64.760.408
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum		7.170.324			7.170.324	7.385.429	7.606.990	7.835.200
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan		1.741.621			1.741.621	1.793.861	1.847.671	1.903.096

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umum								
010.04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	39.462.303	194.706.100	4.404.500		238.572.903	237.734.043	239.377.015	241.069.392
01	PELAYANAN UMUM	39.462.303	194.706.100	4.404.500		238.572.903	237.734.043	239.377.015	241.069.392
01.03	PELAYANAN UMUM	39.462.303	22.492.110	4.320.000		66.274.413	66.581.909	66.898.638	67.224.879
010.04.WA	Program Dukungan Manajemen	39.462.303	22.492.110	4.320.000		66.274.413	66.581.909	66.898.638	67.224.879
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah		1.635.700			1.635.700	1.674.776	1.715.032	1.756.497
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	39.462.303	16.156.410	4.320.000		59.938.713	60.162.590	60.393.183	60.630.700
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah		2.300.000			2.300.000	2.323.654	2.348.018	2.373.112
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah		2.400.000			2.400.000	2.420.889	2.442.405	2.464.570
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		150.586.300	84.500		150.670.800	149.194.659	150.181.211	151.197.422
010.04.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		150.586.300	84.500		150.670.800	149.194.659	150.181.211	151.197.422
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		122.935.900	84.500		123.020.400	121.028.593	121.483.997	121.953.074
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		24.750.400			24.750.400	25.238.602	25.741.462	26.259.454
6137	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional		2.900.000			2.900.000	2.927.464	2.955.752	2.984.894

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Trantibumlinmas								
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA		21.627.690			21.627.690	21.957.475	22.297.166	22.647.091
010.04.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		21.627.690			21.627.690	21.957.475	22.297.166	22.647.091
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi		21.627.690			21.627.690	21.957.475	22.297.166	22.647.091
010.05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	59.531.933	146.027.080	6.122.256		211.681.269	215.054.461	218.528.872	222.107.573
01	PELAYANAN UMUM	59.531.933	146.027.080	6.122.256		211.681.269	215.054.461	218.528.872	222.107.573
01.03	PELAYANAN UMUM	59.531.933	50.740.567	6.122.256		116.394.756	119.407.986	122.511.630	125.708.415
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	59.531.933	50.740.567	6.122.256		116.394.756	119.407.986	122.511.630	125.708.415
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa		3.500.000			3.500.000	3.578.713	3.659.788	3.743.300
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	59.531.933	43.269.445	6.122.256		108.923.634	111.800.571	114.763.830	117.816.006
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa		1.454.107			1.454.107	1.493.733	1.534.549	1.576.595
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa		2.517.015			2.517.015	2.534.969	2.553.463	2.572.514
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		95.286.513			95.286.513	95.646.475	96.017.242	96.399.158
010.05.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		95.286.513			95.286.513	95.646.475	96.017.242	96.399.158
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa		30.536.407			30.536.407	30.569.666	30.603.921	30.639.205

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa		12.304.274			12.304.274	12.630.977	12.967.489	13.314.121
6138	Penataan kelembagaan Desa		52.445.832			52.445.832	52.445.832	52.445.832	52.445.832
010.06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	41.961.040	174.000.245	2.401.950		218.363.235	218.363.235	218.363.235	218.363.235
01	PELAYANAN UMUM	41.961.040	174.000.245	2.401.950		218.363.235	218.363.235	218.363.235	218.363.235
01.03	PELAYANAN UMUM	41.961.040	36.297.289	2.070.300		80.328.629	80.328.629	80.328.629	80.328.629
010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	41.961.040	36.297.289	2.070.300		80.328.629	80.328.629	80.328.629	80.328.629
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah		4.800.000			4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	41.961.040	26.350.889	2.070.300		70.382.229	70.382.229	70.382.229	70.382.229
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah		2.322.000			2.322.000	2.322.000	2.322.000	2.322.000
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah		1.324.400			1.324.400	1.324.400	1.324.400	1.324.400
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		137.702.956	331.650		138.034.606	138.034.606	138.034.606	138.034.606
010.06.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		137.702.956	331.650		138.034.606	138.034.606	138.034.606	138.034.606
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah		12.050.000			12.050.000	12.050.000	12.050.000	12.050.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah		125.652.956	331.650		125.984.606	125.984.606	125.984.606	125.984.606
010.07	Ditjen Otonomi Daerah	41.603.662	51.399.682	5.400.000		98.403.344	98.403.344	98.403.344	98.403.344
01	PELAYANAN UMUM	41.603.662	51.399.682	5.400.000		98.403.344	98.403.344	98.403.344	98.403.344
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		34.300.000			34.300.000	34.300.000	34.300.000	34.300.000
010.07.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		34.300.000			34.300.000	34.300.000	34.300.000	34.300.000
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa		9.200.000			9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		8.338.800			8.338.800	8.338.800	8.338.800	8.338.800
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa		5.561.200			5.561.200	5.561.200	5.561.200	5.561.200
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah		11.200.000			11.200.000	11.200.000	11.200.000	11.200.000
01.03	PELAYANAN UMUM	41.603.662	17.099.682	5.400.000		64.103.344	64.103.344	64.103.344	64.103.344
010.07.WA	Program Dukungan Manajemen	41.603.662	17.099.682	5.400.000		64.103.344	64.103.344	64.103.344	64.103.344
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	41.603.662	13.099.682	5.200.000		59.903.344	59.903.344	59.903.344	59.903.344
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah		900.000			900.000	900.000	900.000	900.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah		1.100.000	200.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
010.08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.705.299	642.448.627	65.882.056		754.035.982	762.069.031	770.343.082	778.865.425
01	PELAYANAN UMUM	45.705.299	642.448.627	65.882.056		754.035.982	762.069.031	770.343.082	778.865.425
01.03	PELAYANAN UMUM	45.705.299	642.448.627	65.882.056		754.035.982	762.069.031	770.343.082	778.865.425
010.08.CP	Program Tata Kelola Kependudukan		617.442.868	64.207.815		681.650.683	689.199.515	696.974.834	704.983.444
1268	Pengelolaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan		489.175.573	62.176.286		551.351.859	558.374.764	565.608.363	573.058.983
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan		108.508.400			108.508.400	108.514.000	108.519.770	108.525.711
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		19.758.895	2.031.529		21.790.424	22.310.751	22.846.701	23.398.750
010.08.WA	Program Dukungan Manajemen	45.705.299	25.005.759	1.674.241		72.385.299	72.869.516	73.368.248	73.881.981
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.000.000			1.000.000	1.027.900	1.056.635	1.086.234
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.705.299	20.405.759	1.674.241		67.785.299	68.140.002	68.505.337	68.881.662
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.950.000			1.950.000	2.006.816	2.065.338	2.125.618
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.650.000			1.650.000	1.694.798	1.740.938	1.788.467
010.09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	35.010.076	43.990.000	1.700.000		80.700.076	83.121.002	85.614.473	88.182.864

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	PELAYANAN UMUM	35.010.076	43.990.000	1.700.000		80.700.076	83.121.002	85.614.473	88.182.864
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		27.700.000			27.700.000	28.530.941	29.386.765	30.268.333
010.09.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		27.700.000			27.700.000	28.530.941	29.386.765	30.268.333
1276	Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan Dan Pinjaman Daerah		4.900.000			4.900.000	5.046.986	5.198.375	5.354.323
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah		22.800.000			22.800.000	23.483.955	24.188.390	24.914.010
01.03	PELAYANAN UMUM	35.010.076	16.290.000	1.700.000		53.000.076	54.590.061	56.227.708	57.914.531
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	35.010.076	16.290.000	1.700.000		53.000.076	54.590.061	56.227.708	57.914.531
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah		850.000			850.000	875.500	901.758	928.810
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	35.010.076	13.290.000	1.700.000		50.000.076	51.500.064	53.045.026	54.636.372
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah		650.000			650.000	669.499	689.581	710.267
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah		1.500.000			1.500.000	1.544.998	1.591.343	1.639.082
010.11	Badan Penelitian dan Pengembangan	27.488.973	25.073.957	2.015.248		54.578.178	55.022.596	55.480.328	55.951.874
01	PELAYANAN UMUM	27.488.973	25.073.957	2.015.248		54.578.178	55.022.596	55.480.328	55.951.874
01.03	PELAYANAN UMUM	27.488.973	15.873.957	1.415.248		44.778.178	44.958.835	45.144.908	45.336.601
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen	27.488.973	15.873.957	1.415.248		44.778.178	44.958.835	45.144.908	45.336.601

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Penelitian dan Pengembangan		110.000			110.000	111.482	113.009	114.582
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan	27.488.973	14.898.957	1.415.248		43.803.178	43.973.039	44.147.990	44.328.226
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Penelitian dan Pengembangan		15.000			15.000	15.291	15.592	15.902
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Penelitian dan Pengembangan		850.000			850.000	859.023	868.317	877.891
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		9.200.000	600.000		9.800.000	10.063.761	10.335.420	10.615.273
010.11.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		9.200.000	600.000		9.800.000	10.063.761	10.335.420	10.615.273
1283	Pembinaan inovasi daerah		3.000.000	350.000		3.350.000	3.424.692	3.501.620	3.580.868
6142	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri		5.200.000	250.000		5.450.000	5.609.070	5.772.903	5.941.680
6143	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah		1.000.000			1.000.000	1.029.999	1.060.897	1.092.725
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.203.973	106.203.896	3.478.000		188.885.869	188.885.869	188.885.869	188.885.869
01	PELAYANAN UMUM	79.203.973	106.203.896	3.478.000		188.885.869	188.885.869	188.885.869	188.885.869
01.03	PELAYANAN UMUM	79.203.973	64.067.186	3.478.000		146.749.159	146.749.159	146.749.159	146.749.159
010.12.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		2.435.034			2.435.034	2.435.034	2.435.034	2.435.034
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi		2.435.034			2.435.034	2.435.034	2.435.034	2.435.034
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	79.203.973	61.632.152	3.478.000		144.314.125	144.314.125	144.314.125	144.314.125

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		150.000			150.000	150.000	150.000	150.000
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.203.973	57.770.833	3.478.000		140.452.806	140.452.806	140.452.806	140.452.806
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		2.100.000			2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.611.319			1.611.319	1.611.319	1.611.319	1.611.319
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		42.136.710			42.136.710	42.136.710	42.136.710	42.136.710
010.12.CM	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		42.136.710			42.136.710	42.136.710	42.136.710	42.136.710
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		42.136.710			42.136.710	42.136.710	42.136.710	42.136.710
JUMLAH RM						3.051.568.029			
JUMLAH PLN						108.531.606			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						32.600.803			
JUMLAH HLN						12.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.784.113.025	3.451.300.095	969.903.740		8.205.316.860	8.451.470.745	8.705.013.224	8.966.163.667
011.01	Sekretariat Jenderal	3.784.113.025	2.298.327.618	962.711.240		7.045.151.883	7.256.501.732	7.474.195.735	7.698.421.753
01	PELAYANAN UMUM	3.784.113.025	2.298.327.618	962.711.240		7.045.151.883	7.256.501.732	7.474.195.735	7.698.421.753
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	3.784.113.025	2.141.476.990	962.711.240		6.888.301.255	7.094.946.365	7.307.793.839	7.527.027.746
011.01.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		365.630.654			365.630.654	376.597.059	387.894.436	399.531.412
5640	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional di Perwakilan RI		365.630.654			365.630.654	376.597.059	387.894.436	399.531.412
011.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.784.113.025	1.775.846.336	962.711.240		6.522.670.601	6.718.349.306	6.919.899.403	7.127.496.334
6015	Pengelolaan Organisasi		33.414.998			33.414.998	34.417.418	35.449.926	36.513.425
6016	Pengelolaan SDM		256.661.073			256.661.073	264.360.806	272.291.568	280.460.305
6017	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		6.280.117			6.280.117	6.468.501	6.662.547	6.862.426
6019	Legislasi dan Litigasi		9.000.000			9.000.000	9.269.991	9.548.086	9.834.527
6023	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	3.784.113.025	1.470.490.148	962.711.240		6.217.314.413	6.403.832.590	6.595.947.276	6.793.825.651
01.03	PELAYANAN UMUM		156.850.628			156.850.628	161.555.367	166.401.896	171.394.007
011.01.AL	Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik		156.850.628			156.850.628	161.555.367	166.401.896	171.394.007
4439	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI di Perwakilan RI		156.850.628			156.850.628	161.555.367	166.401.896	171.394.007

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011.02	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika		23.032.783	250.000		23.282.783	23.981.125	24.700.492	25.441.502
01	PELAYANAN UMUM		23.032.783	250.000		23.282.783	23.981.125	24.700.492	25.441.502
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		23.032.783	250.000		23.282.783	23.981.125	24.700.492	25.441.502
011.02.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		18.412.270			18.412.270	18.964.507	19.533.385	20.119.390
6024	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika		18.412.270			18.412.270	18.964.507	19.533.385	20.119.390
011.02.WA	Program Dukungan Manajemen		4.620.513	250.000		4.870.513	5.016.618	5.167.107	5.322.112
1312	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Asia Pasifik dan Afrika		4.620.513	250.000		4.870.513	5.016.618	5.167.107	5.322.112
011.03	Ditjen Amerika dan Eropa		18.370.337	400.000		18.770.337	19.333.335	19.913.230	20.510.629
01	PELAYANAN UMUM		18.370.337	400.000		18.770.337	19.333.335	19.913.230	20.510.629
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		18.370.337	400.000		18.770.337	19.333.335	19.913.230	20.510.629
011.03.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		13.647.807			13.647.807	14.057.148	14.478.778	14.913.142
6025	Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Kawasan Amerika dan Eropa		13.647.807			13.647.807	14.057.148	14.478.778	14.913.142
011.03.WA	Program Dukungan Manajemen		4.722.530	400.000		5.122.530	5.276.187	5.434.452	5.597.487

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1318	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Amerika dan Eropa		4.722.530	400.000		5.122.530	5.276.187	5.434.452	5.597.487
011.04	Ditjen Kerja Sama Asean		19.744.317	202.500		19.946.817	20.545.153	21.161.447	21.796.280
01	PELAYANAN UMUM		19.744.317	202.500		19.946.817	20.545.153	21.161.447	21.796.280
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		19.744.317	202.500		19.946.817	20.545.153	21.161.447	21.796.280
011.04.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral		12.488.713			12.488.713	12.863.339	13.249.209	13.646.685
6020	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN		12.488.713			12.488.713	12.863.339	13.249.209	13.646.685
011.04.WA	Program Dukungan Manajemen		7.255.604	202.500		7.458.104	7.681.814	7.912.238	8.149.595
1323	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Kerja Sama ASEAN		7.255.604	202.500		7.458.104	7.681.814	7.912.238	8.149.595
011.05	Ditjen Kerjasama Multilateral		945.331.200	500.000		945.831.200	974.205.989	1.003.432.080	1.033.535.011
01	PELAYANAN UMUM		945.331.200	500.000		945.831.200	974.205.989	1.003.432.080	1.033.535.011
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		945.331.200	500.000		945.831.200	974.205.989	1.003.432.080	1.033.535.011
011.05.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral		938.303.429			938.303.429	966.452.399	995.445.893	1.025.309.243

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6021	Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral		938.303.429			938.303.429	966.452.399	995.445.893	1.025.309.243
011.05.WA	Program Dukungan Manajemen		7.027.771	500.000		7.527.771	7.753.590	7.986.187	8.225.768
1329	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Kerja Sama Multilateral		7.027.771	500.000		7.527.771	7.753.590	7.986.187	8.225.768
011.06	Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik		36.807.984	400.000		37.207.984	38.324.103	39.473.741	40.657.949
01	PELAYANAN UMUM		36.807.984	400.000		37.207.984	38.324.103	39.473.741	40.657.949
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		36.807.984	400.000		37.207.984	38.324.103	39.473.741	40.657.949
011.06.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		27.451.037			27.451.037	28.274.475	29.122.653	29.996.336
6026	Peningkatan Citra Positif indonesia di Dunia Internasional		27.451.037			27.451.037	28.274.475	29.122.653	29.996.336
011.06.WA	Program Dukungan Manajemen		9.356.947	400.000		9.756.947	10.049.628	10.351.088	10.661.613
1334	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik		9.356.947	400.000		9.756.947	10.049.628	10.351.088	10.661.613
011.07	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional		15.909.203	200.000		16.109.203	16.592.410	17.090.141	17.602.837
01	PELAYANAN UMUM		15.909.203	200.000		16.109.203	16.592.410	17.090.141	17.602.837
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		15.909.203	200.000		16.109.203	16.592.410	17.090.141	17.602.837

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011.07.AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional		11.088.735			11.088.735	11.421.345	11.763.961	12.116.871
6030	Optimalisasi Diplomasi Hukum dan Perjanjian Internasional		11.088.735			11.088.735	11.421.345	11.763.961	12.116.871
011.07.WA	Program Dukungan Manajemen		4.820.468	200.000		5.020.468	5.171.065	5.326.180	5.485.966
1338	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional		4.820.468	200.000		5.020.468	5.171.065	5.326.180	5.485.966
011.08	Ditjen Protokol dan Konsuler		72.297.065	5.000.000		77.297.065	79.615.877	82.004.289	84.464.408
01	PELAYANAN UMUM		72.297.065	5.000.000		77.297.065	79.615.877	82.004.289	84.464.408
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		72.297.065	5.000.000		77.297.065	79.615.877	82.004.289	84.464.408
011.08.AL	Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik		63.692.787	4.500.000		68.192.787	70.238.501	72.345.622	74.515.986
6028	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI Pusat		61.222.787	4.500.000		65.722.787	67.694.423	69.725.237	71.816.990
6029	Pelayanan Keprotokolan dan Fasilitas Diplomatik		2.470.000			2.470.000	2.544.078	2.620.385	2.698.996
011.08.WA	Program Dukungan Manajemen		8.604.278	500.000		9.104.278	9.377.376	9.658.667	9.948.422
1343	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Ditjen Protokol dan Konsuler		8.604.278	500.000		9.104.278	9.377.376	9.658.667	9.948.422
011.09	Inspektorat Jenderal		11.464.211	25.000		11.489.211	11.833.812	12.188.801	12.554.460
01	PELAYANAN UMUM		11.464.211	25.000		11.489.211	11.833.812	12.188.801	12.554.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		11.464.211	25.000		11.489.211	11.833.812	12.188.801	12.554.460
011.09.WA	Program Dukungan Manajemen		11.464.211	25.000		11.489.211	11.833.812	12.188.801	12.554.460
1348	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Inspektorat Jenderal		4.481.992	25.000		4.506.992	4.642.157	4.781.401	4.924.842
6022	Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		6.982.219			6.982.219	7.191.655	7.407.400	7.629.618
011.11	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan		10.015.377	215.000		10.230.377	10.537.209	10.853.268	11.178.838
01	PELAYANAN UMUM		10.015.377	215.000		10.230.377	10.537.209	10.853.268	11.178.838
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		10.015.377	215.000		10.230.377	10.537.209	10.853.268	11.178.838
011.11.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		6.070.500			6.070.500	6.252.551	6.440.090	6.633.266
6027	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri		6.070.500			6.070.500	6.252.551	6.440.090	6.633.266
011.11.WA	Program Dukungan Manajemen		3.944.877	215.000		4.159.877	4.284.658	4.413.178	4.545.572
1352	Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum dan Organisasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan		3.944.877	215.000		4.159.877	4.284.658	4.413.178	4.545.572
JUMLAH RM						7.890.896.432			
JUMLAH PNBP						314.420.428			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	57.037.543.000	42.027.770.828	38.230.575.627		137.295.889.455	138.285.954.726	139.331.364.564	140.408.137.817
012.01	Kementerian Pertahanan	850.763.000	1.515.179.306	17.107.235.873		19.473.178.179	19.448.283.931	19.448.283.931	19.448.283.931
02	PERTAHANAN	777.624.677	1.252.888.956	17.100.223.365		19.130.736.998	19.105.842.750	19.105.842.750	19.105.842.750
02.01	PERTAHANAN NEGARA	324.935.643	917.559.378	528.120.090		1.770.615.111	1.770.615.111	1.770.615.111	1.770.615.111
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	324.935.643	917.559.378	528.120.090		1.770.615.111	1.770.615.111	1.770.615.111	1.770.615.111
1354	Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara	22.589.517	55.502.401	467.979.711		546.071.629	546.071.629	546.071.629	546.071.629
1355	Pelaksanaan Administrasi Pembiayaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pelaporan Keuangan Pertahanan	16.851.155	13.920.068			30.771.223	30.771.223	30.771.223	30.771.223
1357	Pelayanan Bantuan Hukum	12.043.304	4.453.008			16.496.312	16.496.312	16.496.312	16.496.312
1358	Pelayanan Rehabilitasi dan Perumahsakitan	77.345.282	82.549.778	4.345.024		164.240.084	164.240.084	164.240.084	164.240.084
1359	Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan	74.413.584	272.866.367	20.579.603		367.859.554	367.859.554	367.859.554	367.859.554
1360	Dukungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UO Kemhan		14.685.611	24.906.348		39.591.959	39.591.959	39.591.959	39.591.959
1361	Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai UO Kemhan	18.469.889	17.229.852			35.699.741	35.699.741	35.699.741	35.699.741
1362	Dukungan Perencanaan Anggaran dan Keuangan UO Kemhan	16.527.323	364.935.821	7.293.938		388.757.082	388.757.082	388.757.082	388.757.082
1363	Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan dan Keprotokolan UO Kemhan	26.401.150	58.656.336	937.575		85.995.061	85.995.061	85.995.061	85.995.061
1365	Pelayanan Hubungan Masyarakat	15.814.071	11.793.504	1.108.294		28.715.869	28.715.869	28.715.869	28.715.869

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5366	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Instalasi Strategis Pertahanan	44.480.368	20.966.632	969.597		66.416.597	66.416.597	66.416.597	66.416.597
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	408.040.744	317.271.241	16.481.000.352		17.206.312.337	17.181.418.089	17.181.418.089	17.181.418.089
012.01.AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan		22.482.730			22.482.730			
1389	Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif		4.336.052			4.336.052			
1390	Kerja Sama Internasional		11.510.185			11.510.185			
1391	Perumusan Kebijakan Pengerahan Komponen Pertahanan Negara		3.155.528			3.155.528			
1393	Pengelolaan Wilayah Pertahanan		3.480.965			3.480.965			
012.01.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		2.164.392	16.368.203.831		16.370.368.223	16.367.956.705	16.367.956.705	16.367.956.705
1368	Kodifikasi Materiil Pertahanan		2.164.392	247.126		2.411.518			
1369	Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan			298.393.867		298.393.867	298.393.867	298.393.867	298.393.867
1370	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan			321.400.715		321.400.715	321.400.715	321.400.715	321.400.715
1371	Pengadaan Barang dan Jasa Alpalhan			13.056.035.351		13.056.035.351	13.056.035.351	13.056.035.351	13.056.035.351
1401	Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan			2.692.126.772		2.692.126.772	2.692.126.772	2.692.126.772	2.692.126.772
012.01.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan		103.105.674	12.367.328		115.473.002	115.473.002	115.473.002	115.473.002

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1402	Pembinaan Keveteranan		7.337.959			7.337.959	7.337.959	7.337.959	7.337.959
1403	Pembinaan Kesadaran Bela Negara		25.999.936	1.993.264		27.993.200	27.993.200	27.993.200	27.993.200
1408	Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan		25.264.280			25.264.280	25.264.280	25.264.280	25.264.280
1409	Pembinaan Kesehatan Pertahanan		11.105.311			11.105.311	11.105.311	11.105.311	11.105.311
1410	Pembinaan Materiil Pertahanan		2.738.767			2.738.767	2.738.767	2.738.767	2.738.767
1412	Pembinaan Sumber Daya Manusia		9.882.095			9.882.095	9.882.095	9.882.095	9.882.095
4242	Penyiapan Sumber Daya Pertahanan		20.777.326	10.374.064		31.151.390	31.151.390	31.151.390	31.151.390
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		3.631.069	89.769.284		93.400.353	93.400.353	93.400.353	93.400.353
1406	Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan		3.631.069	89.769.284		93.400.353	93.400.353	93.400.353	93.400.353
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	408.040.744	185.887.376	10.659.909		604.588.029	604.588.029	604.588.029	604.588.029
1366	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)		10.139.651	447.964		10.587.615	10.587.615	10.587.615	10.587.615
1372	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ranahan	55.549.091	13.496.203	1.006.122		70.051.416	70.051.416	70.051.416	70.051.416
1373	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	42.233.077	26.499.515			68.732.592	68.732.592	68.732.592	68.732.592
1374	Pengawasan terhadap Ditjen Renhan, Kuathan, Baranahan, Badiklat, Bainstrahan, Puslaik, Pusrehab dan Kantor Wilhan Wil Barat		189.000			189.000	189.000	189.000	189.000
1375	Pengawasan terhadap Setjen, Ditjen Strahan, Pothan, Balitbang,		189.000			189.000	189.000	189.000	189.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unhan, Pusdaton, Pus Lapbinkuhan dan Kantor Wilhan Wil Timur								
1376	Pengawasan terhadap Manset UO Mabes, UO TNI AU dan pengelolaan dana PNBP UO TNI AU		189.000			189.000	189.000	189.000	189.000
1377	Pengawasan terhadap Manset UO TNI AD, Pengelolaan Dana PNBP UO TNI AD		189.000			189.000	189.000	189.000	189.000
1383	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa		6.360.108			6.360.108	6.360.108	6.360.108	6.360.108
1384	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan		5.191.084			5.191.084	5.191.084	5.191.084	5.191.084
1385	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan		5.213.543			5.213.543	5.213.543	5.213.543	5.213.543
1387	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklat	66.947.020	23.293.263	419.387		90.659.670	90.659.670	90.659.670	90.659.670
1394	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Strahan	56.831.249	13.907.627	2.138.288		72.877.164	72.877.164	72.877.164	72.877.164
1395	Administrasi dan Pelaksanaan Anggaran		1.511.444			1.511.444	1.511.444	1.511.444	1.511.444
1397	Pengendalian Program dan Anggaran		2.828.164			2.828.164	2.828.164	2.828.164	2.828.164
1398	Perencanaan Pembangunan Pertahanan		2.732.124			2.732.124	2.732.124	2.732.124	2.732.124
1399	Perencanaan Program dan Anggaran		3.702.653			3.702.653	3.702.653	3.702.653	3.702.653
1400	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Renhan Kemhan	42.563.434	19.777.183	455.986		62.796.603	62.796.603	62.796.603	62.796.603

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1407	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pothan Kemhan	56.083.169	13.606.737	2.079.893		71.769.799	71.769.799	71.769.799	71.769.799
1413	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kuathan Kemhan	53.565.130	9.365.088	750.622		63.680.840	63.680.840	63.680.840	63.680.840
1559	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara		2.955.981			2.955.981	2.955.981	2.955.981	2.955.981
4237	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja UO Kemhan	10.504.678	8.638.739	701.500		19.844.917	19.844.917	19.844.917	19.844.917
4238	Pengelolaan Pertahanan Siber		3.062.098			3.062.098	3.062.098	3.062.098	3.062.098
4239	Penyusunan perancangan peraturan Perundang-undangan Bidang Pertahanan	11.626.420	3.978.217			15.604.637	15.604.637	15.604.637	15.604.637
4240	Pelaksanaan Kelaikan Sarana Pertahanan	12.137.476	4.564.353	400.000		17.101.829	17.101.829	17.101.829	17.101.829
4241	Pengawasan terhadap YKPP, PT. Asabri, Manset UO TNI AL dan Pengelolaan Dana PNBP UO TNI AL.		189.000			189.000	189.000	189.000	189.000
4243	Pengelolaan Kawasan Instalasi Strategis Pertahanan		1.093.754	2.260.147		3.353.901	3.353.901	3.353.901	3.353.901
4244	Pengelolaan Informasi Strategis Pertahanan		3.024.847			3.024.847	3.024.847	3.024.847	3.024.847
02.04	LITBANG PERTAHANAN	44.648.290	18.058.337	91.102.923		153.809.550	153.809.550	153.809.550	153.809.550
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		6.602.987	89.976.713		96.579.700	96.579.700	96.579.700	96.579.700
1378	Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan		3.045.000			3.045.000	3.045.000	3.045.000	3.045.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1379	Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan		819.944	59.440.055		60.259.999	60.259.999	60.259.999	60.259.999
1380	Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan		1.113.343	30.536.658		31.650.001	31.650.001	31.650.001	31.650.001
1381	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan		1.624.700			1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.624.700
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	44.648.290	11.455.350	1.126.210		57.229.850	57.229.850	57.229.850	57.229.850
1382	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balitbang	44.648.290	11.455.350	1.126.210		57.229.850	57.229.850	57.229.850	57.229.850
10	PENDIDIKAN	73.138.323	262.290.350	7.012.508		342.441.181	342.441.181	342.441.181	342.441.181
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	73.138.323	262.290.350	7.012.508		342.441.181	342.441.181	342.441.181	342.441.181
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	73.138.323	262.290.350	7.012.508		342.441.181	342.441.181	342.441.181	342.441.181
1386	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan	73.138.323	262.290.350	7.012.508		342.441.181	342.441.181	342.441.181	342.441.181
012.21	Markas Besar TNI	2.405.629.000	6.096.511.178	1.537.852.086		10.039.992.264	10.320.140.625	10.608.693.966	10.905.904.219
02	PERTAHANAN	2.405.629.000	6.096.511.178	1.537.852.086		10.039.992.264	10.320.140.625	10.608.693.966	10.905.904.219
02.01	PERTAHANAN NEGARA	2.405.629.000	6.096.511.178	1.537.852.086		10.039.992.264	10.320.140.625	10.608.693.966	10.905.904.219
012.21.AB	Program Penggunaan Kekuatan		3.071.729.480	124.532.665		3.196.262.145	3.285.532.625	3.377.481.308	3.472.188.472
1414	Operasi Militer Untuk Perang (OMP)		1.556.559.197	75.931.348		1.632.490.545	1.681.413.863	1.731.804.898	1.783.707.663
1415	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)		1.117.795.884	48.601.317		1.166.397.201	1.194.914.427	1.224.287.233	1.254.541.248
1416	Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi		27.079.344			27.079.344	27.891.722	28.728.474	29.590.328

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417	Operasi Intelijen Strategis		295.234.728			295.234.728	304.001.767	313.031.821	322.332.774
1418	Operasi SAR TNI		2.962.960			2.962.960	3.051.848	3.143.403	3.237.705
1419	Operasi Bantuan TNI		72.097.367			72.097.367	74.258.998	76.485.479	78.778.754
012.21.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit		352.910.858	651.043.538		1.003.954.396	1.030.780.898	1.058.412.249	1.086.872.529
1433	Pendidikan pertama (Dikma) dan penerimaan (Werving) TNI/PNS		134.801.255	26.575.306		161.376.561	164.630.236	167.981.529	171.433.356
1434	Pendidikan pengembangan/spesialisasi		107.384.208			107.384.208	110.037.890	112.771.199	115.586.501
1435	Latihan kesiapsiagaan operasi/Latgab/latma internasional		51.650.411			51.650.411	53.199.911	54.795.905	56.439.783
1436	Latihan pembinaan Balakpus TNI		4.631.804			4.631.804	4.770.754	4.913.878	5.061.292
1437	Latihan pratugas operasi		17.087.943			17.087.943	17.600.568	18.128.586	18.672.443
1438	Pembangunan sarana prasarana profesionalisme integratif		37.355.237	624.468.232		661.823.469	680.541.539	699.821.152	719.679.154
012.21.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		101.921.575	730.733.725		832.655.300	856.244.781	880.541.946	905.568.033
1421	Pemeliharaan Alut Integratif		10.000.000			10.000.000	10.300.000	10.609.000	10.927.270
1422	Pemeliharaan Non-Alut Integratif		15.000.000			15.000.000	15.450.000	15.913.500	16.390.905
1423	Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad rantis		45.000.000	132.623.622		177.623.622	180.927.329	184.330.149	187.835.054
1424	Pengadaan non-Alutsista/senjata			6.613.938		6.613.938	6.812.356	7.016.726	7.227.228
1425	Pengadaan munisi kaliber kecil		15.960.300			15.960.300	16.439.109	16.932.281	17.440.250

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1426	Pengadaan munisi khusus		442.200			442.200	455.466	469.129	483.203
1427	Pengadaan materiil khusus			1.402.011		1.402.011	1.444.071	1.487.393	1.532.015
1428	Pengadaan munisi kaliber besar		15.519.075			15.519.075	15.984.647	16.464.185	16.958.111
1429	Pengadaan senjata			15.502.365		15.502.365	15.967.435	16.446.459	16.939.852
1430	Pengadaan non-Alut			542.920.641		542.920.641	559.843.086	577.273.204	595.226.227
1431	Pembangunan Sarpras pendukung			31.671.148		31.671.148	32.621.282	33.599.920	34.607.918
012.21.WA	Program Dukungan Manajemen	2.405.629.000	2.569.949.265	31.542.158		5.007.120.423	5.147.582.321	5.292.258.463	5.441.275.185
1439	Administrasi dan perawatan personel integratif	2.405.629.000				2.405.629.000	2.477.784.716	2.552.105.377	2.628.655.754
1440	Operasional perkantoran		2.081.161.408	31.504.792		2.112.666.200	2.170.819.424	2.230.717.326	2.292.412.358
1441	Pemeliharaan/perawatan perkantoran integratif		451.844.722			451.844.722	460.973.306	470.375.768	480.060.311
1442	Perawatan sarana dan prasarana		31.113.046	37.366		31.150.412	32.013.384	32.902.254	33.817.796
1443	Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif		5.830.089			5.830.089	5.991.491	6.157.738	6.328.966
012.22	Markas Besar TNI AD	39.946.380.000	16.113.957.166	8.493.350.014		64.553.687.180	64.553.687.180	64.553.687.180	64.553.687.180
02	PERTAHANAN	39.946.380.000	16.113.957.166	8.493.350.014		64.553.687.180	64.553.687.180	64.553.687.180	64.553.687.180
02.01	PERTAHANAN NEGARA	39.946.380.000	12.426.285.954	8.448.402.184		60.821.068.138	60.821.068.138	60.821.068.138	60.821.068.138
012.22.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit		5.697.277.793	935.432.678		6.632.710.471	6.632.710.471	6.632.710.471	6.632.710.471
1466	Latihan Matra Darat		692.588.978			692.588.978	692.588.978	692.588.978	692.588.978

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1467	Latihan Bersama Internasional		64.608.000			64.608.000	64.608.000	64.608.000	64.608.000
1468	Pendidikan Pertama Matra Darat		807.070.860			807.070.860	807.070.860	807.070.860	807.070.860
1469	Pendidikan Pembentukan Matra Darat		113.430.295			113.430.295	113.430.295	113.430.295	113.430.295
1470	Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat		50.185.522			50.185.522	50.185.522	50.185.522	50.185.522
1471	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat		443.885.264			443.885.264	443.885.264	443.885.264	443.885.264
1472	Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat		100.063.030			100.063.030	100.063.030	100.063.030	100.063.030
1473	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat		3.425.445.844	935.432.678		4.360.878.522	4.360.878.522	4.360.878.522	4.360.878.522
012.22.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		7.489.408	6.697.489.189		6.704.978.597	6.704.978.597	6.704.978.597	6.704.978.597
1458	Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur			225.749.175		225.749.175	225.749.175	225.749.175	225.749.175
1459	Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)			388.089.246		388.089.246	388.089.246	388.089.246	388.089.246
1460	Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air			24.888.814		24.888.814	24.888.814	24.888.814	24.888.814
1461	Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi			164.207.198		164.207.198	164.207.198	164.207.198	164.207.198
1462	Pengadaan/Penggantian Material Alutsista			114.316.550		114.316.550	114.316.550	114.316.550	114.316.550
1463	Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista			4.031.184.620		4.031.184.620	4.031.184.620	4.031.184.620	4.031.184.620
1464	Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat		924.067	869.795.559		870.719.626	870.719.626	870.719.626	870.719.626

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1465	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat		6.565.341	879.258.027		885.823.368	885.823.368	885.823.368	885.823.368
012.22.WA	Program Dukungan Manajemen	39.946.380.000	6.721.518.753	815.480.317		47.483.379.070	47.483.379.070	47.483.379.070	47.483.379.070
1474	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat	39.946.380.000	162.811.383			40.109.191.383	40.108.544.163	40.108.544.163	40.108.544.163
1475	Penggiatan Fungsi Matra Darat		936.559.599			936.559.599	937.206.819	937.206.819	937.206.819
1476	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat		24.549.521			24.549.521	24.549.521	24.549.521	24.549.521
1477	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum		36.998.850			36.998.850	36.998.850	36.998.850	36.998.850
1478	Penyelenggaraan Administrasi Personel		69.765.949			69.765.949	69.765.949	69.765.949	69.765.949
1479	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran		50.363.140	815.480.317		865.843.457	865.843.457	865.843.457	865.843.457
1480	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal		5.029.438.296			5.029.438.296	5.029.438.296	5.029.438.296	5.029.438.296
1481	Penyelenggaraan Penpas dan Penum		54.930.640			54.930.640	54.930.640	54.930.640	54.930.640
1482	Penyelenggaraan Administrasi Umum		119.320.607			119.320.607	119.320.607	119.320.607	119.320.607
1483	Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan, Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan		173.567.262			173.567.262	173.567.262	173.567.262	173.567.262
1484	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		63.213.506			63.213.506	63.213.506	63.213.506	63.213.506
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN		3.687.671.212	44.947.830		3.732.619.042	3.732.619.042	3.732.619.042	3.732.619.042
012.22.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		1.549.549.647	21.658.712		1.571.208.359	1.571.208.359	1.571.208.359	1.571.208.359

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1447	Pemeliharaan/Perawatan Ranpur		149.081.496			149.081.496	149.081.496	149.081.496	149.081.496
1448	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang		118.485.976			118.485.976	118.485.976	118.485.976	118.485.976
1449	Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air		28.619.622			28.619.622	28.619.622	28.619.622	28.619.622
1450	Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal		950.059.246			950.059.246	950.059.246	950.059.246	950.059.246
1451	Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista		303.303.307			303.303.307	303.303.307	303.303.307	303.303.307
1455	Pemeliharaan dan Perawatan Kesatriaan dan Fasilitas Latihan/Tempur			21.658.712		21.658.712	21.658.712	21.658.712	21.658.712
012.22.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan		1.464.135.889			1.464.135.889	1.464.135.889	1.464.135.889	1.464.135.889
1452	Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat		1.153.952.350			1.153.952.350	1.153.952.350	1.153.952.350	1.153.952.350
1456	Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan		233.399.389			233.399.389	233.399.389	233.399.389	233.399.389
1457	Penyelenggaraan OMSP		76.784.150			76.784.150	76.784.150	76.784.150	76.784.150
012.22.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		80.249.988			80.249.988	80.249.988	80.249.988	80.249.988
1454	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat		80.249.988			80.249.988	80.249.988	80.249.988	80.249.988
012.22.WA	Program Dukungan Manajemen		593.735.688	23.289.118		617.024.806	617.024.806	617.024.806	617.024.806
1444	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat		407.021.000			407.021.000	407.021.000	407.021.000	407.021.000
1445	Kerja Sama Internasional Matra Darat		35.009.314			35.009.314	35.009.314	35.009.314	35.009.314

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1446	Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Matra Darat		11.819.313	11.449.976		23.269.289	23.269.289	23.269.289	23.269.289
1453	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat		139.886.061	11.839.142		151.725.203	151.725.203	151.725.203	151.725.203
012.23	Markas Besar TNI AL	8.814.100.000	9.003.199.707	6.676.483.470		24.493.783.177	25.228.594.335	25.985.450.832	26.765.013.832
02	PERTAHANAN	8.814.100.000	9.003.199.707	6.676.483.470		24.493.783.177	25.228.594.335	25.985.450.832	26.765.013.832
02.01	PERTAHANAN NEGARA	8.814.100.000	5.877.750.730	6.073.349.095		20.765.199.825	21.388.153.657	22.029.797.164	22.690.690.599
012.23.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit		1.463.810.533	378.126.746		1.841.937.279	1.897.194.810	1.954.110.398	2.012.733.618
1504	Werving dan Seleksi		32.144.948			32.144.948	33.109.293	34.102.569	35.125.647
1505	Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Laut			210.041.799		210.041.799	216.343.046	222.833.335	229.518.334
1506	Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut		135.516.427			135.516.427	139.581.727	143.769.182	148.082.260
1507	Pendidikan Pertama, Pengembangan Umum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta Pendidikan Pembentukan Matra Laut		446.044.005			446.044.005	459.425.117	473.207.794	487.404.011
1508	Penyelenggaraan Psychologi Matra Laut		5.188.135			5.188.135	5.343.765	5.504.077	5.669.199
1511	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Matra Laut		844.917.018	168.084.947		1.013.001.965	1.043.391.862	1.074.693.441	1.106.934.167
012.23.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		335.920.219	5.644.797.799		5.980.718.018	6.160.139.525	6.344.943.702	6.535.291.999
1496	Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut			2.165.508.606		2.165.508.606	2.230.473.845	2.297.388.057	2.366.309.693
1497	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta Hidros Matra Laut			17.701.700		17.701.700	18.232.751	18.779.733	19.343.125

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1498	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek Matra Laut			101.181.206		101.181.206	104.216.640	107.343.138	110.563.432
1499	Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amonisi Matra Laut		335.920.219	548.369.200		884.289.419	910.818.099	938.142.641	966.286.920
1500	Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut			1.997.139.300		1.997.139.300	2.057.053.479	2.118.765.082	2.182.328.033
1501	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil Non Alutsista Matra Laut			744.897.787		744.897.787	767.244.711	790.262.051	813.969.906
1503	Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut			70.000.000		70.000.000	72.100.000	74.263.000	76.490.890
012.23.WA	Program Dukungan Manajemen	8.814.100.000	4.078.019.978	50.424.550		12.942.544.528	13.330.819.322	13.730.743.064	14.142.664.982
1509	Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Laut		12.231.828			12.231.828	12.598.779	12.976.705	13.365.980
1510	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana Prasarana dan Pengelolaan LTGA		900.219.025			900.219.025	927.225.545	955.042.082	983.693.310
1512	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Matra Laut		19.808.756			19.808.756	20.402.924	21.014.931	21.645.356
1513	Penyelenggaraan Admin Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Matra Laut		34.473.321			34.473.321	35.507.498	36.572.673	37.669.790
1514	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Matra Laut		2.773.542.549	40.242.200		2.813.784.749	2.898.198.267	2.985.144.143	3.074.698.346
1515	Penyelenggaraan Penerangan Pasukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Matra Laut		6.765.000	10.182.350		16.947.350	17.455.770	17.979.443	18.518.826

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1516	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut	8.814.100.000	160.988.582			8.975.088.582	9.244.339.909	9.521.669.744	9.807.319.732
1517	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Matra Laut		13.500.000			13.500.000	13.904.998	14.322.146	14.751.811
1518	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut		9.917.565			9.917.565	10.215.081	10.521.529	10.837.174
1519	Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Laut		146.573.352			146.573.352	150.970.551	155.499.668	160.164.657
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN		3.125.448.977	603.134.375		3.728.583.352	3.840.440.678	3.955.653.668	4.074.323.233
012.23.AB	Program Penggunaan Kekuatan		575.515.741	81.350.030		656.865.771	676.571.602	696.868.656	717.774.727
1485	Penyelenggaraan Surta Hidros		62.538.699	28.783.500		91.322.199	94.061.816	96.883.651	99.790.152
1491	Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridiksi Nasional		436.782.785			436.782.785	449.886.200	463.382.771	477.284.250
1493	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut		29.649.500	52.566.530		82.216.030	84.682.510	87.222.932	89.839.646
1494	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut		46.544.757			46.544.757	47.941.076	49.379.302	50.860.679
012.23.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		2.535.693.224	487.093.585		3.022.786.809	3.113.470.395	3.206.874.425	3.303.080.595
1488	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut		85.090.785			85.090.785	87.643.508	90.272.801	92.980.943
1489	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut		30.877.526			30.877.526	31.803.850	32.757.929	33.740.658
1490	Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis		2.299.401.372	484.451.228		2.783.852.600	2.867.368.163	2.953.389.176	3.041.990.839
1495	Pemeliharaan/Perawatan Pesud		120.323.541	2.642.357		122.965.898	126.654.874	130.454.519	134.368.155

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012.23.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		3.300.000	21.001.250		24.301.250	25.030.276	25.781.176	26.554.610
1492	Litbanghan Matra Laut		3.300.000	21.001.250		24.301.250	25.030.276	25.781.176	26.554.610
012.23.WA	Program Dukungan Manajemen		10.940.012	13.689.510		24.629.522	25.368.405	26.129.411	26.913.301
1486	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut		7.777.512	5.733.388		13.510.900	13.916.226	14.333.668	14.763.686
1487	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut		3.162.500	7.956.122		11.118.622	11.452.179	11.795.743	12.149.615
012.24	Markas Besar TNI AU	5.020.671.000	9.298.923.471	4.415.654.184		18.735.248.655	18.735.248.655	18.735.248.655	18.735.248.655
02	PERTAHANAN	5.020.671.000	9.298.923.471	4.415.654.184		18.735.248.655	18.735.248.655	18.735.248.655	18.735.248.655
02.01	PERTAHANAN NEGARA	5.020.671.000	3.461.720.733	3.083.471.967		11.565.863.700	11.565.863.700	11.565.863.700	11.565.863.700
012.24.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit		954.479.258	782.215.982		1.736.695.240	1.736.695.240	1.736.695.240	1.736.695.240
1536	Latihan Matra Udara		171.641.921			171.641.921	171.641.921	171.641.921	171.641.921
1537	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara		210.000.000	270.000.000		480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000
1538	Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara			436.723.157		436.723.157	436.723.157	436.723.157	436.723.157
1539	Werving		17.566.133			17.566.133	17.566.133	17.566.133	17.566.133
1540	Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara		2.462.625	3.500.000		5.962.625	5.962.625	5.962.625	5.962.625
1544	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan		552.808.579	71.992.825		624.801.404	624.801.404	624.801.404	624.801.404
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		29.787.331	2.220.086.329		2.249.873.660	2.249.873.660	2.249.873.660	2.249.873.660

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1531	Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara			281.760.914		281.760.914	281.760.914	281.760.914	281.760.914
1532	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara			674.543.396		674.543.396	674.543.396	674.543.396	674.543.396
1533	Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Alat Komlek Lainnya			667.577.671		667.577.671	667.577.671	667.577.671	667.577.671
1534	Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat		29.787.331	324.213.892		354.001.223	354.001.223	354.001.223	354.001.223
1535	Pengadaan Peralatan Non Alutsista			271.990.456		271.990.456	271.990.456	271.990.456	271.990.456
012.24.WA	Program Dukungan Manajemen	5.020.671.000	2.477.454.144	81.169.656		7.579.294.800	7.579.294.800	7.579.294.800	7.579.294.800
1541	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara		6.283.006	63.000.000		69.283.006	69.283.006	69.283.006	69.283.006
1542	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		9.630.000			9.630.000	9.630.000	9.630.000	9.630.000
1543	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarana Prasarana serta Pengelolaan LTGA		253.779.536			253.779.536	253.779.536	253.779.536	253.779.536
1545	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan		209.025.267			209.025.267	209.025.267	209.025.267	209.025.267
1546	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum		7.610.022			7.610.022	7.610.022	7.610.022	7.610.022
1547	Penyelenggaraan Adiministrasi Perbekalan Umum dan Pemeliharaan dan Perawatan Perkantoran		1.623.806.192			1.623.806.192	1.623.806.192	1.623.806.192	1.623.806.192
1548	Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Udara		2.214.966			2.214.966	2.214.966	2.214.966	2.214.966
1549	Penyelenggaraan Penerangan Pasukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Matra Udara		4.813.300	15.300.000		20.113.300	20.113.300	20.113.300	20.113.300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1550	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara	5.020.671.000	333.586.937	2.869.656		5.357.127.593	5.357.127.593	5.357.127.593	5.357.127.593
1551	Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Matra Udara		26.704.918			26.704.918	26.704.918	26.704.918	26.704.918
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN		5.837.202.738	1.332.182.217		7.169.384.955	7.169.384.955	7.169.384.955	7.169.384.955
012.24.AB	Program Penggunaan Kekuatan		96.967.001	456.529.067		553.496.068	553.496.068	553.496.068	553.496.068
1520	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara		12.263.245			12.263.245	12.263.245	12.263.245	12.263.245
1522	Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan		58.145.000	259.088.000		317.233.000	317.233.000	317.233.000	317.233.000
1527	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara		11.716.591	176.658.579		188.375.170	188.375.170	188.375.170	188.375.170
1528	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara		7.947.165	11.282.488		19.229.653	19.229.653	19.229.653	19.229.653
1529	Penyelenggaraan Surta		6.895.000	9.500.000		16.395.000	16.395.000	16.395.000	16.395.000
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		5.699.036.847	693.681.309		6.392.718.156	6.392.718.156	6.392.718.156	6.392.718.156
1521	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya		4.912.278.518	693.681.309		5.605.959.827	5.605.959.827	5.605.959.827	5.605.959.827
1524	Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya		786.758.329			786.758.329	786.758.329	786.758.329	786.758.329
012.24.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		21.762.600	4.737.400		26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
1526	Litbanghan Matra Udara		21.762.600	4.737.400		26.500.000	26.500.000	26.500.000	26.500.000
012.24.WA	Program Dukungan Manajemen		19.436.290	177.234.441		196.670.731	196.670.731	196.670.731	196.670.731

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1523	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara		13.445.500	127.200.000		140.645.500	140.645.500	140.645.500	140.645.500
1525	Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara		5.990.790	50.034.441		56.025.231	56.025.231	56.025.231	56.025.231
JUMLAH RM						119.219.321.656			
JUMLAH PLN						7.337.796.250			
JUMLAH RMP						1.963.010.000			
JUMLAH PNBP						2.025.155.777			
JUMLAH PDN						2.692.126.772			
JUMLAH BLU						3.093.974.000			
JUMLAH PBS						964.505.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.180.996.101	7.166.653.062	2.609.979.190		16.957.628.353	17.317.476.552	17.688.117.351	18.069.884.899
013.01	Sekretariat Jenderal	3.959.730.608	409.944.553	233.634.179		4.603.309.340	4.832.382.480	5.068.327.918	5.311.352.330
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	3.959.730.608	409.944.553	233.634.179		4.603.309.340	4.832.382.480	5.068.327.918	5.311.352.330
03.03	PEMBINAAN HUKUM	3.959.730.608	409.944.553	233.634.179		4.603.309.340	4.832.382.480	5.068.327.918	5.311.352.330
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.959.730.608	409.944.553	233.634.179		4.603.309.340	4.832.382.480	5.068.327.918	5.311.352.330
1552	Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM		5.451.418			5.451.418	5.562.735	5.677.387	5.795.496
1553	Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM		46.780.417			46.780.417	48.399.397	50.066.922	51.784.509
1554	Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM		5.738.941			5.738.941	5.863.371	5.991.536	6.123.561
1555	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja		14.863.464			14.863.464	15.013.464	15.167.968	15.327.119
1556	Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM		8.529.772			8.529.772	8.656.136	8.786.293	8.920.357
1557	Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum dan HAM	3.639.684.661	97.308.771	48.022.825		3.785.016.257	3.991.745.026	4.204.675.663	4.423.994.229
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	315.972.297	211.317.728	146.710.909		674.000.934	692.339.976	711.229.302	730.685.822

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5849	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM	4.073.650	19.954.042	38.900.445		62.928.137	64.802.375	66.732.847	68.721.237
013.02	Inspektorat Jenderal	16.075.049	53.228.765	5.158.158		74.461.972	76.393.144	78.382.314	80.431.172
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	16.075.049	53.228.765	5.158.158		74.461.972	76.393.144	78.382.314	80.431.172
03.03	PEMBINAAN HUKUM	16.075.049	53.228.765	5.158.158		74.461.972	76.393.144	78.382.314	80.431.172
013.02.WA	Program Dukungan Manajemen	16.075.049	53.228.765	5.158.158		74.461.972	76.393.144	78.382.314	80.431.172
1563	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I		5.599.719			5.599.719	5.760.698	5.926.511	6.097.298
1564	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II		5.599.719			5.599.719	5.764.214	5.933.652	6.108.178
1565	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III		5.599.719			5.599.719	5.759.604	5.924.296	6.093.929
1566	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV		5.599.719			5.599.719	5.760.693	5.926.501	6.097.290
1567	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V		5.599.719			5.599.719	5.758.059	5.921.162	6.089.156
1568	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI		10.107.977			10.107.977	10.287.463	10.472.344	10.662.776
1569	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	16.075.049	15.122.193	5.158.158		36.355.400	37.302.413	38.277.848	39.282.545
013.03	Ditjen Administrasi Hukum Umum	36.751.332	514.610.437	180.493.741		731.855.510	741.349.541	751.128.377	761.200.998
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	36.751.332	514.610.437	180.493.741		731.855.510	741.349.541	751.128.377	761.200.998
03.03	PEMBINAAN HUKUM	36.751.332	514.610.437	180.493.741		731.855.510	741.349.541	751.128.377	761.200.998
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		296.078.353	86.808.209		382.886.562	392.380.593	402.159.429	412.232.050

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1572	Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional		52.606.135			52.606.135	53.069.821	53.547.416	54.039.349
1573	Administrasi Hukum Perdata		22.574.189			22.574.189	22.794.283	23.020.976	23.254.486
1574	Administrasi Hukum Pidana		7.358.206			7.358.206	7.536.609	7.720.364	7.909.653
1575	Administrasi Hukum Tata Negara		13.653.323			13.653.323	14.029.554	14.417.072	14.816.236
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		88.501.357			88.501.357	91.080.721	93.737.453	96.474.229
5850	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum		111.385.143	86.808.209		198.193.352	203.869.605	209.716.148	215.738.097
013.03.WA	Program Dukungan Manajemen	36.751.332	218.532.084	93.685.532		348.968.948	348.968.948	348.968.948	348.968.948
6230	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	11.274.769	11.340.184	6.361.608		28.976.561	28.976.561	28.976.561	28.976.561
6234	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU	25.476.563	207.191.900	87.323.924		319.992.387	319.992.387	319.992.387	319.992.387
013.05	Ditjen Pemasyarakatan	2.468.480.375	3.488.691.754	1.307.639.526		7.264.811.655	7.322.323.814	7.381.559.250	7.442.574.991
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.468.480.375	3.488.691.754	1.307.639.526		7.264.811.655	7.322.323.814	7.381.559.250	7.442.574.991
03.03	PEMBINAAN HUKUM	2.468.480.375	942.466.675	1.297.241.298		4.708.188.348	4.708.362.333	4.708.541.591	4.708.726.225
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		19.447.031			19.447.031	19.621.016	19.800.274	19.984.908
1577	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak		5.321.305			5.321.305	5.396.197	5.473.363	5.552.837
1578	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama		2.883.285			2.883.285	2.901.554	2.920.379	2.939.765

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1579	Penyelenggaraan Kegiatan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi		4.960.987			4.960.987	4.973.229	4.985.844	4.998.840
1580	Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi		2.404.492			2.404.492	2.421.744	2.439.517	2.457.825
1581	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara		1.420.311			1.420.311	1.444.499	1.469.419	1.495.091
1582	Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban		2.456.651			2.456.651	2.483.793	2.511.752	2.540.550
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.468.480.375	923.019.644	1.297.241.298		4.688.741.317	4.688.741.317	4.688.741.317	4.688.741.317
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	2.428.213.440	622.174.702	498.502.752		3.548.890.894	3.548.890.894	3.548.890.894	3.548.890.894
6235	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Administratif dan Fasilitatif Pelayanan Pemasyarakatan	40.266.935	300.844.942	798.738.546		1.139.850.423	1.139.850.423	1.139.850.423	1.139.850.423
03.05	LEMBAGA PEMASYARAKATAN		2.546.225.079	10.398.228		2.556.623.307	2.613.961.481	2.673.017.659	2.733.848.766
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.546.225.079	10.398.228		2.556.623.307	2.613.961.481	2.673.017.659	2.733.848.766
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		2.546.225.079	10.398.228		2.556.623.307	2.613.961.481	2.673.017.659	2.733.848.766
013.06	Ditjen Imigrasi	560.064.327	1.976.113.928	439.734.723		2.975.912.978	3.020.926.440	3.067.289.297	3.115.045.576
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	560.064.327	1.976.113.928	439.734.723		2.975.912.978	3.020.926.440	3.067.289.297	3.115.045.576
03.03	PEMBINAAN HUKUM	560.064.327	1.976.113.928	439.734.723		2.975.912.978	3.020.926.440	3.067.289.297	3.115.045.576
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		1.365.933.548	170.520.607		1.536.454.155	1.581.467.617	1.627.830.474	1.675.586.753
1584	Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan		663.472.761			663.472.761	683.124.448	703.365.690	724.214.167

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Imigrasi								
1585	Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian		13.275.904			13.275.904	13.625.978	13.986.547	14.357.945
1586	Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian		7.770.000			7.770.000	7.930.736	8.096.291	8.266.817
1587	Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian		81.752.791	3.430.543		85.183.334	87.427.854	89.739.681	92.120.942
1588	Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian		17.190.558			17.190.558	17.647.410	18.117.963	18.602.640
1589	Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian		217.713.381	167.090.064		384.803.445	396.606.925	408.764.520	421.286.847
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		364.758.153			364.758.153	375.104.266	385.759.782	396.737.395
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen	560.064.327	610.180.380	269.214.116		1.439.458.823	1.439.458.823	1.439.458.823	1.439.458.823
6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	519.413.380	395.819.017	181.427.826		1.096.660.223	1.096.660.226	1.096.660.226	1.096.660.226
6236	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi	40.650.947	214.361.363	87.786.290		342.798.600	342.798.597	342.798.597	342.798.597
013.07	Ditjen Kekayaan Intelektual	44.607.075	300.066.506	207.005.887		551.679.468	554.385.644	557.173.087	560.044.358
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	44.607.075	300.066.506	207.005.887		551.679.468	554.385.644	557.173.087	560.044.358
03.03	PEMBINAAN HUKUM	44.607.075	300.066.506	207.005.887		551.679.468	554.385.644	557.173.087	560.044.358
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		106.668.954	147.900.000		254.568.954	257.275.130	260.062.573	262.933.844
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri		4.541.686			4.541.686	4.580.692	4.620.869	4.662.251

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual		22.000.000			22.000.000	22.554.939	23.126.518	23.715.274
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis		6.445.914			6.445.914	6.628.735	6.817.040	7.011.000
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		7.089.870			7.089.870	7.228.956	7.372.213	7.519.775
1595	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa		4.005.607			4.005.607	4.067.599	4.131.446	4.197.217
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual		32.100.000	147.900.000		180.000.000	180.960.726	181.950.273	182.969.510
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		30.485.877			30.485.877	31.253.483	32.044.214	32.858.817
013.07.WA	Program Dukungan Manajemen	44.607.075	193.397.552	59.105.887		297.110.514	297.110.514	297.110.514	297.110.514
6237	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	44.607.075	193.397.552	59.105.887		297.110.514	297.110.514	297.110.514	297.110.514
013.08	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	17.113.340	33.206.565	2.486.420		52.806.325	53.013.468	53.226.835	53.446.733
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	17.113.340	33.206.565	2.486.420		52.806.325	53.013.468	53.226.835	53.446.733
03.03	PEMBINAAN HUKUM	17.113.340	33.206.565	2.486.420		52.806.325	53.013.468	53.226.835	53.446.733
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi		21.985.006			21.985.006	22.192.149	22.405.516	22.625.414
1598	Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan		1.071.161			1.071.161	1.075.892	1.080.770	1.085.797
1600	Litigasi Peraturan Perundang-Undangan		850.000			850.000	853.944	858.009	862.194

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1601	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan		7.540.646			7.540.646	7.552.809	7.565.343	7.578.254
1602	Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan		1.178.595			1.178.595	1.185.949	1.193.524	1.201.326
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		7.744.604			7.744.604	7.919.990	8.100.634	8.286.822
5851	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukamkesra		2.300.000			2.300.000	2.301.397	2.302.835	2.304.318
5852	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian		1.300.000			1.300.000	1.302.168	1.304.401	1.306.703
013.08.WA	Program Dukungan Manajemen	17.113.340	11.221.559	2.486.420		30.821.319	30.821.319	30.821.319	30.821.319
6233	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP	17.113.340	11.221.559	2.486.420		30.821.319	30.821.319	30.821.319	30.821.319
013.09	Ditjen Hak Asasi Manusia	14.526.551	32.381.048	2.558.000		49.465.599	49.652.562	49.845.170	50.043.629
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	14.526.551	32.381.048	2.558.000		49.465.599	49.652.562	49.845.170	50.043.629
03.03	PEMBINAAN HUKUM	14.526.551	32.381.048	2.558.000		49.465.599	49.652.562	49.845.170	50.043.629
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		16.902.374			16.902.374	17.089.337	17.281.945	17.480.404
1604	Diseminasi dan Penguatan HAM		1.232.506			1.232.506	1.252.861	1.273.843	1.295.450
1605	Pelayanan Informasi HAM		855.235			855.235	864.955	874.972	885.291
1606	Kerja Sama HAM		1.602.613			1.602.613	1.613.853	1.625.432	1.637.363
1607	Pelayanan Komunikasi Masyarakat		3.526.289			3.526.289	3.617.775	3.711.998	3.809.062

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah		8.568.719			8.568.719	8.613.151	8.658.931	8.706.140
5853	Analisa, Penyiapan dan Laporan Instrumen HAM		1.117.012			1.117.012	1.126.742	1.136.769	1.147.098
013.09.WA	Program Dukungan Manajemen	14.526.551	15.478.674	2.558.000		32.563.225	32.563.225	32.563.225	32.563.225
6238	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	14.526.551	15.478.674	2.558.000		32.563.225	32.563.225	32.563.225	32.563.225
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	16.822.442	93.184.522	9.541.674		119.548.638	119.548.638	119.548.638	119.548.638
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	16.822.442	93.184.522	9.541.674		119.548.638	119.548.638	119.548.638	119.548.638
03.03	PEMBINAAN HUKUM	16.822.442	93.184.522	9.541.674		119.548.638	119.548.638	119.548.638	119.548.638
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi		7.285.297			7.285.297	7.285.297	7.285.297	7.285.297
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		2.168.390			2.168.390	2.168.390	2.168.390	2.168.390
1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional		1.877.799			1.877.799	1.877.799	1.877.799	1.877.799
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		3.239.108			3.239.108	3.239.108	3.239.108	3.239.108
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		71.751.980	175.750		71.927.730	71.927.730	71.927.730	71.927.730
1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional		1.852.291	50.000		1.902.291	1.902.291	1.902.291	1.902.291
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		3.170.352			3.170.352	3.170.352	3.170.352	3.170.352
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		66.729.337	125.750		66.855.087	66.855.087	66.855.087	66.855.087
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	16.822.442	14.147.245	9.365.924		40.335.611	40.335.611	40.335.611	40.335.611

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	16.822.442	14.147.245	9.365.924		40.335.611	40.335.611	40.335.611	40.335.611
013.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	18.456.007	30.968.428	1.670.731		51.095.166	51.575.343	52.069.895	52.579.451
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	18.456.007	30.968.428	1.670.731		51.095.166	51.575.343	52.069.895	52.579.451
03.03	PEMBINAAN HUKUM	18.456.007	30.968.428	1.670.731		51.095.166	51.575.343	52.069.895	52.579.451
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	18.456.007	30.968.428	1.670.731		51.095.166	51.575.343	52.069.895	52.579.451
1619	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	18.456.007	13.550.460	1.670.731		33.677.198	33.784.290	33.894.594	34.008.232
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		6.960.192			6.960.192	7.053.164	7.148.909	7.247.601
5854	Penelitian dan Pengembangan Hukum		2.675.654			2.675.654	2.746.687	2.819.845	2.895.219
5855	Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia		2.528.655			2.528.655	2.595.279	2.663.897	2.734.591
5856	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan		3.138.692			3.138.692	3.232.617	3.329.356	3.429.017
5857	Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia		2.114.775			2.114.775	2.163.306	2.213.294	2.264.791
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	28.368.995	234.256.556	220.056.151		482.681.702	495.925.478	509.566.570	523.617.023

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	19.083.773	160.670.419	220.056.151		399.810.343	410.686.960	421.889.863	433.428.969
03.03	PEMBINAAN HUKUM	19.083.773	160.670.419	220.056.151		399.810.343	410.686.960	421.889.863	433.428.969
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	19.083.773	160.670.419	220.056.151		399.810.343	410.686.960	421.889.863	433.428.969
1621	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM		29.609.610			29.609.610	30.455.251	31.326.254	32.223.421
1622	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur		4.000.000			4.000.000	4.099.836	4.202.667	4.308.593
1623	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan		26.970.866			26.970.866	27.391.857	27.825.462	28.272.095
1624	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	16.871.684	22.047.186	210.059.292		248.978.162	256.423.054	264.091.285	271.989.580
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	2.212.089	78.042.757	9.996.859		90.251.705	92.316.962	94.444.195	96.635.280
10	PENDIDIKAN	9.285.222	73.586.137			82.871.359	85.238.518	87.676.707	90.188.054
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	9.285.222	73.586.137			82.871.359	85.238.518	87.676.707	90.188.054
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	9.285.222	73.586.137			82.871.359	85.238.518	87.676.707	90.188.054
1620	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan	9.285.222	73.586.137			82.871.359	85.238.518	87.676.707	90.188.054
JUMLAH RM						13.719.877.483			
JUMLAH PNBP						3.237.750.870			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	22.651.350.048	17.599.866.349	3.056.061.182		43.307.277.579	44.314.587.274	45.352.119.020	46.420.782.110
015.01	Sekretariat Jenderal	17.934.649.638	3.554.446.404	608.087.128		22.097.183.170	22.746.283.215	23.414.856.407	24.103.486.981
01	PELAYANAN UMUM	17.934.649.638	1.152.538.625	608.087.128		19.695.275.391	20.275.105.263	20.872.330.168	21.487.472.001
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	17.934.649.638	1.152.538.625	608.087.128		19.695.275.391	20.275.105.263	20.872.330.168	21.487.472.001
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	17.934.649.638	1.152.538.625	608.087.128		19.695.275.391	20.275.105.263	20.872.330.168	21.487.472.001
4750	Legislasi dan Litigasi		7.950.200			7.950.200	8.189.002	8.434.964	8.688.313
4751	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)		35.055.353			35.055.353	35.561.790	36.083.437	36.620.771
4753	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		1.000.832.841	439.869.857		1.440.702.698	1.474.312.657	1.508.930.969	1.544.587.912
4755	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		30.188.808	4.855.357		35.044.165	35.859.142	36.698.565	37.563.193
4757	Pengelolaan Organisasi dan SDM	17.934.649.638	73.753.790			18.008.403.428	18.548.035.727	19.103.857.063	19.676.353.061
4759	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		1.120.830			1.120.830	1.149.104	1.178.233	1.208.235
4761	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		3.636.803	163.361.914		166.998.717	171.997.841	177.146.937	182.450.516
10	PENDIDIKAN		2.401.907.779			2.401.907.779	2.471.177.952	2.542.526.239	2.616.014.980
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN		2.401.907.779			2.401.907.779	2.471.177.952	2.542.526.239	2.616.014.980
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen		2.401.907.779			2.401.907.779	2.471.177.952	2.542.526.239	2.616.014.980
4752	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)		2.289.417.899			2.289.417.899	2.358.688.072	2.430.036.359	2.503.525.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4754	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		47.134.449			47.134.449	47.134.449	47.134.449	47.134.449
4758	Pengelolaan Organisasi dan SDM		64.864.271			64.864.271	64.864.271	64.864.271	64.864.271
4760	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		491.160			491.160	491.160	491.160	491.160
015.02	Inspektorat Jenderal	46.295.291	42.827.152	3.236.585		92.359.028	94.960.578	97.640.195	100.400.227
01	PELAYANAN UMUM	46.295.291	42.827.152	3.236.585		92.359.028	94.960.578	97.640.195	100.400.227
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	46.295.291	42.827.152	3.236.585		92.359.028	94.960.578	97.640.195	100.400.227
015.02.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		1.496.549			1.496.549	1.540.898	1.586.579	1.633.631
4811	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		1.496.549			1.496.549	1.540.898	1.586.579	1.633.631
015.02.WA	Program Dukungan Manajemen	46.295.291	41.330.603	3.236.585		90.862.479	93.419.680	96.053.616	98.766.596
4738	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		15.139.191	2.876.585		18.015.776	18.637.947	19.278.794	19.938.870
4739	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		809.920			809.920	841.684	874.404	908.107
4740	Pengelolaan Organisasi dan SDM	46.295.291	5.773.977			52.069.268	53.473.217	54.919.290	56.408.744
4741	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		18.601.166	360.000		18.961.166	19.430.515	19.913.945	20.411.894
4742	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		1.006.349			1.006.349	1.036.317	1.067.183	1.098.981
015.03	Ditjen Anggaran	65.619.296	48.379.728	23.727.059		137.726.083	141.800.101	145.996.376	150.318.584
01	PELAYANAN UMUM	65.619.296	48.379.728	23.727.059		137.726.083	141.800.101	145.996.376	150.318.584

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	65.619.296	48.379.728	23.727.059		137.726.083	141.800.101	145.996.376	150.318.584
015.03.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara		13.825.962			13.825.962	14.242.279	14.671.087	15.112.792
4775	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		2.664.475			2.664.475	2.728.303	2.794.048	2.861.768
4776	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD		3.874.408			3.874.408	3.991.151	4.111.400	4.235.265
4777	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD		362.916			362.916	375.811	389.093	402.776
4778	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD		3.068.359			3.068.359	3.187.308	3.309.825	3.436.024
6200	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		772.789			772.789	794.691	817.251	840.488
6201	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKDD		1.718.521			1.718.521	1.763.403	1.809.633	1.857.258
6202	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD		1.364.494			1.364.494	1.401.612	1.439.837	1.479.213
015.03.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		5.003.733			5.003.733	5.146.850	5.294.281	5.446.140
4785	Pengawasan dan Penegakan Hukum		868.438			868.438	891.646	915.552	940.174
4786	Perumusan Kebijakan Administratif		2.758.514			2.758.514	2.837.122	2.918.106	3.001.526
6206	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		1.376.781			1.376.781	1.418.082	1.460.623	1.504.440
015.03.CE	Program Kebijakan Fiskal		579.000			579.000	596.370	614.261	632.688
4766	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		579.000			579.000	596.370	614.261	632.688
015.03.WA	Program Dukungan Manajemen	65.619.296	28.971.033	23.727.059		118.317.388	121.814.602	125.416.747	129.126.964

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4688	Legislasi dan Litigasi		11.448			11.448	11.791	12.145	12.509
4689	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		21.300.290	23.727.059		45.027.349	46.480.281	47.976.809	49.518.235
4690	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		290.148			290.148	300.143	310.439	321.042
4691	Pengelolaan Organisasi dan SDM	65.619.296	2.673.344			68.292.640	70.288.444	72.344.125	74.461.482
4692	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		389.912			389.912	401.606	413.654	426.065
4693	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		4.305.891			4.305.891	4.332.337	4.359.575	4.387.631
015.04	Ditjen Pajak	2.682.385.587	4.204.239.897	1.230.031.594		8.116.657.078	8.325.811.127	8.541.241.017	8.763.137.261
01	PELAYANAN UMUM	2.682.385.587	4.204.239.897	1.230.031.594		8.116.657.078	8.325.811.127	8.541.241.017	8.763.137.261
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2.682.385.587	4.204.239.897	1.230.031.594		8.116.657.078	8.325.811.127	8.541.241.017	8.763.137.261
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		1.435.025.641			1.435.025.641	1.476.389.177	1.518.992.775	1.562.876.657
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara		66.985.791			66.985.791	68.985.886	71.045.874	73.167.989
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		287.132.952			287.132.952	295.427.498	303.970.324	312.770.452
4793	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan		5.938.449			5.938.449	6.116.574	6.300.045	6.489.035
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum		893.854.194			893.854.194	920.682.310	948.315.171	976.777.615
4795	Perumusan Kebijakan Administratif		25.071.504			25.071.504	25.413.871	25.766.514	26.129.741
6209	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan		13.830.752			13.830.752	14.245.671	14.673.037	15.113.228

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6210	Pengawasan dan Penegakan Hukum		89.306.796			89.306.796	91.985.869	94.745.243	97.587.594
6211	Perumusan Kebijakan Administratif		52.905.203			52.905.203	53.531.498	54.176.567	54.841.003
015.04.CE	Program Kebijakan Fiskal		2.657.810			2.657.810	2.657.810	2.657.810	2.657.810
4771	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		2.657.810			2.657.810	2.657.810	2.657.810	2.657.810
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.682.385.587	2.766.556.446	1.230.031.594		6.678.973.627	6.846.764.140	7.019.590.432	7.197.602.794
4706	Legislasi dan Litigasi		3.323.697			3.323.697	3.423.407	3.526.106	3.631.888
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		2.285.986.468	353.843.146		2.639.829.614	2.717.823.573	2.798.157.763	2.880.903.063
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	2.682.385.587	268.497.130			2.950.882.717	3.038.665.376	3.129.083.167	3.222.213.676
4709	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		5.197.055			5.197.055	5.352.957	5.513.536	5.678.943
4710	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		203.311.168	876.188.448		1.079.499.616	1.081.250.672	1.083.054.260	1.084.911.956
6199	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		240.928			240.928	248.155	255.600	263.268
015.05	Ditjen Bea dan Cukai	919.759.182	1.928.649.788	473.846.883		3.322.255.853	3.418.691.407	3.518.020.801	3.620.330.828
01	PELAYANAN UMUM	919.759.182	1.928.649.788	473.846.883		3.322.255.853	3.418.691.407	3.518.020.801	3.620.330.828
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	919.759.182	1.928.649.788	473.846.883		3.322.255.853	3.418.691.407	3.518.020.801	3.620.330.828
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		794.047.125			794.047.125	816.695.053	840.022.396	864.049.825
4787	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		537.093.331			537.093.331	552.954.836	569.292.130	586.119.713

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4788	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan		3.528.095			3.528.095	3.634.003	3.743.088	3.855.452
4789	Pengawasan dan Penegakan Hukum		245.029.318			245.029.318	251.468.935	258.101.764	264.933.668
4790	Perumusan Kebijakan Administratif		1.738.220			1.738.220	1.790.880	1.845.123	1.900.992
6207	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi		6.423.561			6.423.561	6.604.762	6.791.405	6.983.647
6208	Perumusan Kebijakan Administratif		234.600			234.600	241.637	248.886	256.353
015.05.CE	Program Kebijakan Fiskal		17.887.443			17.887.443	18.300.294	18.725.546	19.163.559
4768	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional		13.437.818			13.437.818	13.752.886	14.077.417	14.411.686
4769	Komunikasi dan Edukasi		2.438.540			2.438.540	2.479.233	2.521.150	2.564.326
4770	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan		2.011.085			2.011.085	2.068.175	2.126.979	2.187.547
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	919.759.182	1.116.715.220	473.846.883		2.510.321.285	2.583.696.060	2.659.272.859	2.737.117.444
4694	Legislasi dan Litigasi		581.588			581.588	598.104	615.118	632.640
4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		938.148.531	379.732.268		1.317.880.799	1.356.831.682	1.396.951.214	1.438.274.788
4696	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		13.107.653			13.107.653	13.400.111	13.701.354	14.011.633
4697	Pengelolaan Organisasi dan SDM	919.759.182	85.145.280			1.004.904.462	1.032.968.234	1.061.874.558	1.091.648.101
4698	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		3.952.920			3.952.920	4.040.695	4.131.102	4.224.223
4699	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		75.779.248	94.114.615		169.893.863	175.857.234	181.999.513	188.326.059
015.06	Ditjen Perimbangan Keuangan	37.179.390	52.012.721	4.314.134		93.506.245	93.989.515	94.487.282	94.999.983

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	PELAYANAN UMUM	37.179.390	52.012.721	4.314.134		93.506.245	93.989.515	94.487.282	94.999.983
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	37.179.390	52.012.721	4.314.134		93.506.245	93.989.515	94.487.282	94.999.983
015.06.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara		19.229.029			19.229.029	19.229.029	19.229.029	19.229.029
4779	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		5.288.973			5.288.973	5.288.973	5.288.973	5.288.973
4780	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD		2.190.414			2.190.414	2.190.414	2.190.414	2.190.414
4781	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD		3.766.653			3.766.653	3.766.653	3.766.653	3.766.653
4782	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD		441.900			441.900	441.900	441.900	441.900
6203	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		5.175.452			5.175.452	5.175.452	5.175.452	5.175.452
6204	Monitoring dan Evaluasi Kinerja ANggaran Pusat dan TKDD		1.435.792			1.435.792	1.435.792	1.435.792	1.435.792
6205	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD		929.845			929.845	929.845	929.845	929.845
015.06.CE	Program Kebijakan Fiskal		2.836.351			2.836.351	2.836.351	2.836.351	2.836.351
4772	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		2.836.351			2.836.351	2.836.351	2.836.351	2.836.351
015.06.WA	Program Dukungan Manajemen	37.179.390	29.947.341	4.314.134		71.440.865	71.924.135	72.421.902	72.934.603
4728	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		17.998.659	1.923.950		19.922.609	20.395.794	20.883.174	21.385.176
4729	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		1.956.539	18.000		1.974.539	1.977.135	1.979.809	1.982.563
4730	Pengelolaan Organisasi dan SDM	37.179.390	2.419.728			39.599.118	39.600.738	39.602.406	39.604.125

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4731	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		183.037			183.037	188.906	194.951	201.177
4732	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		7.389.378	2.372.184		9.761.562	9.761.562	9.761.562	9.761.562
015.07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	31.925.799	53.287.905	9.023.006		94.236.710	96.249.573	98.322.923	100.458.444
01	PELAYANAN UMUM	31.925.799	53.287.905	9.023.006		94.236.710	96.249.573	98.322.923	100.458.444
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	31.925.799	53.287.905	9.023.006		94.236.710	96.249.573	98.322.923	100.458.444
015.07.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara		704.200			704.200	716.585	729.342	742.483
4783	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD		231.040			231.040	233.350	235.730	238.181
4784	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD		473.160			473.160	483.235	493.612	504.302
015.07.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		15.224.133			15.224.133	15.517.063	15.818.830	16.129.639
4807	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		1.755.029			1.755.029	940.948	1.003.392	1.067.708
4808	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		4.554.223			4.554.223	8.151.391	8.278.102	8.408.619
4809	Pengelolaan risiko Keuangan Negara		4.292.009			4.292.009	4.361.493	4.433.076	4.506.806
4810	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		57.982			57.982	58.416	58.864	59.326
6217	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		1.006.946			1.006.946	1.017.798	1.028.980	1.040.493
6218	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara		2.599.458			2.599.458			
6219	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		958.486			958.486	987.017	1.016.416	1.046.687

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015.07.CE	Program Kebijakan Fiskal		1.360.650			1.360.650	1.376.167	1.392.156	1.408.624
4773	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		686.540			686.540	695.075	703.871	712.928
4774	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan		674.110			674.110	681.092	688.285	695.696
015.07.WA	Program Dukungan Manajemen	31.925.799	35.998.922	9.023.006		76.947.727	78.639.758	80.382.595	82.177.698
4733	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		19.654.596	9.023.006		28.677.602	29.251.115	29.841.847	30.450.295
4734	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		11.156.180			11.156.180	11.236.910	11.320.070	11.405.720
4735	Pengelolaan Organisasi dan SDM	31.925.799	3.953.789			35.879.588	36.894.378	37.939.630	39.016.232
4736	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		325.183			325.183	332.497	340.034	347.797
4737	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		909.174			909.174	924.858	941.014	957.654
015.08	Ditjen Perbendaharaan	526.607.081	6.785.635.678	446.792.781		7.759.035.540	7.759.035.539	7.759.035.539	7.759.035.539
01	PELAYANAN UMUM	526.607.081	6.671.494.013	444.002.794		7.642.103.888	7.642.103.887	7.642.103.887	7.642.103.887
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	526.607.081	835.537.931	442.508.619		1.804.653.631	1.804.653.630	1.804.653.630	1.804.653.630
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		135.439.599			135.439.599	135.439.599	135.439.599	135.439.599
4802	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		4.049.642			4.049.642	4.049.642	4.049.642	4.049.642
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		3.549.085			3.549.085	3.549.085	3.549.085	3.549.085
4804	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		12.169.359			12.169.359	12.169.359	12.169.359	12.169.359

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4805	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		98.010			98.010	98.010	98.010	98.010
4806	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		293.750			293.750	293.750	293.750	293.750
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		73.015.104			73.015.104	73.015.104	73.015.104	73.015.104
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		18.987.849			18.987.849	18.987.849	18.987.849	18.987.849
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara		2.350.674			2.350.674	2.350.674	2.350.674	2.350.674
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		7.089.395			7.089.395	7.089.395	7.089.395	7.089.395
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		13.836.731			13.836.731	13.836.731	13.836.731	13.836.731
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	526.607.081	700.098.332	442.508.619		1.669.214.032	1.669.214.031	1.669.214.031	1.669.214.031
4711	Legislasi dan Litigasi		354.640			354.640	354.640	354.640	354.640
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		377.769.851	181.795.952		559.565.803	559.565.802	559.565.802	559.565.802
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		6.989.136			6.989.136	6.989.136	6.989.136	6.989.136
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	526.607.081	73.557.713			600.164.794	600.164.794	600.164.794	600.164.794
4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		3.009.078			3.009.078	3.009.078	3.009.078	3.009.078
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		238.417.914	260.712.667		499.130.581	499.130.581	499.130.581	499.130.581
01.03	PELAYANAN UMUM		5.835.956.082	1.494.175		5.837.450.257	5.837.450.257	5.837.450.257	5.837.450.257
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		5.835.956.082	1.494.175		5.837.450.257	5.837.450.257	5.837.450.257	5.837.450.257
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)		5.725.772.949			5.725.772.949	5.725.772.949	5.725.772.949	5.725.772.949

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4836	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		32.722.207	1.494.175		34.216.382	34.216.382	34.216.382	34.216.382
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM		75.102.178			75.102.178	75.102.178	75.102.178	75.102.178
4838	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		1.795.288			1.795.288	1.795.288	1.795.288	1.795.288
4839	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		563.460			563.460	563.460	563.460	563.460
04	EKONOMI		114.141.665	2.789.987		116.931.652	116.931.652	116.931.652	116.931.652
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		51.816.024	1.114.055		52.930.079	52.930.079	52.930.079	52.930.079
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		51.816.024	1.114.055		52.930.079	52.930.079	52.930.079	52.930.079
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)		17.204.873			17.204.873	17.204.873	17.204.873	17.204.873
4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		13.377.410	714.055		14.091.465	14.091.465	14.091.465	14.091.465
4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM		20.287.103			20.287.103	20.287.103	20.287.103	20.287.103
4723	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		946.638			946.638	946.638	946.638	946.638
4726	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi			400.000		400.000	400.000	400.000	400.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN		62.325.641	1.675.932		64.001.573	64.001.573	64.001.573	64.001.573
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		62.325.641	1.675.932		64.001.573	64.001.573	64.001.573	64.001.573
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)		19.406.230			19.406.230	19.406.230	19.406.230	19.406.230
4717	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		8.105.692	1.675.932		9.781.624	9.781.624	9.781.624	9.781.624
4721	Pengelolaan Organisasi dan SDM		34.813.719			34.813.719	34.813.719	34.813.719	34.813.719

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015.09	Ditjen Kekayaan Negara	268.379.321	395.326.767	88.943.216		752.649.304	771.851.690	791.630.489	812.003.345
01	PELAYANAN UMUM	268.379.321	395.326.767	88.943.216		752.649.304	771.851.690	791.630.489	812.003.345
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	268.379.321	395.326.767	88.943.216		752.649.304	771.851.690	791.630.489	812.003.345
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		81.580.470			81.580.470	83.719.952	85.923.832	88.194.140
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		3.326.015			3.326.015	3.487.421	3.653.730	3.825.126
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko		3.376.985			3.376.985	3.474.288	3.574.504	3.677.734
4798	Pengelolaan Aset		71.837.226			71.837.226	73.641.467	75.499.992	77.414.464
4799	Pengelolaan kas dan Pembiayaan Negara		1.120.242			1.120.242	1.142.023	1.164.458	1.187.569
4800	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara		475.568			475.568	492.242	509.417	527.108
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif		1.444.434			1.444.434	1.482.511	1.521.731	1.562.139
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	268.379.321	313.746.297	88.943.216		671.068.834	688.131.738	705.706.657	723.809.205
4700	Legislasi dan Litigasi		3.102.691			3.102.691	3.240.151	3.381.738	3.527.638
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		182.679.537	87.729.161		270.408.698	278.963.948	287.775.903	296.852.412
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		4.878.187			4.878.187	5.004.490	5.134.594	5.268.668
4703	Pengelolaan Organisasi dan SDM	268.379.321	109.516.474			377.895.795	385.760.839	393.861.844	402.205.887
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		2.025.159			2.025.159	2.114.327	2.206.224	2.300.921

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4705	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		11.544.249	1.214.055		12.758.304	13.047.983	13.346.354	13.653.679
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	94.500.663	412.316.830	127.860.050		634.677.543	653.085.671	672.046.170	691.575.663
01	PELAYANAN UMUM	78.684.077	324.766.810	29.463.050		432.913.937	445.303.267	458.064.398	471.208.533
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	78.684.077	324.766.810	29.463.050		432.913.937	445.303.267	458.064.398	471.208.533
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	78.684.077	324.766.810	29.463.050		432.913.937	445.303.267	458.064.398	471.208.533
4678	Legislasi dan Litigasi		125.202			125.202	128.957	132.825	136.809
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		74.645.083	29.463.050		104.108.133	106.739.452	109.449.727	112.241.370
4681	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		1.546.942			1.546.942	1.594.167	1.642.800	1.692.899
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	78.684.077	247.424.199			326.108.276	335.799.844	345.782.267	356.064.269
4685	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		460.872			460.872	474.335	488.206	502.491
4687	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		564.512			564.512	566.512	568.573	570.695
10	PENDIDIKAN	15.816.586	87.550.020	98.397.000		201.763.606	207.782.404	213.981.772	220.367.130
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	15.816.586	87.550.020	98.397.000		201.763.606	207.782.404	213.981.772	220.367.130
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	15.816.586	87.550.020	98.397.000		201.763.606	207.782.404	213.981.772	220.367.130
4680	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		22.177.286	98.397.000		120.574.286	124.184.106	127.902.220	131.731.880
4682	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		1.040.137			1.040.137	1.049.022	1.058.174	1.067.602

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM	15.816.586	64.311.227			80.127.813	82.527.267	84.998.708	87.544.300
4686	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		21.370			21.370	22.009	22.670	23.348
015.12	Badan Kebijakan Fiskal	36.936.710	70.882.494	6.202.982		114.022.186	117.378.886	120.836.282	124.397.451
01	PELAYANAN UMUM	36.936.710	70.882.494	6.202.982		114.022.186	117.378.886	120.836.282	124.397.451
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	36.936.710	70.882.494	6.202.982		114.022.186	117.378.886	120.836.282	124.397.451
015.12.CE	Program Kebijakan Fiskal		40.374.701			40.374.701	41.538.280	42.736.762	43.971.230
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional		8.673.561			8.673.561	8.926.194	9.186.407	9.454.431
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		10.982.879			10.982.879	11.288.924	11.604.144	11.928.834
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		14.475.704			14.475.704	14.893.332	15.323.489	15.766.563
4765	Komunikasi dan Edukasi		6.242.557			6.242.557	6.429.830	6.622.722	6.821.402
015.12.WA	Program Dukungan Manajemen	36.936.710	30.507.793	6.202.982		73.647.485	75.840.606	78.099.520	80.426.221
4672	Legislasi dan Litigasi		172.260			172.260	177.427	182.749	188.231
4673	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		20.760.289	6.202.982		26.963.271	27.952.551	28.971.505	30.021.041
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		5.409.299			5.409.299	5.458.466	5.509.105	5.561.267
4675	Pengelolaan Organisasi dan SDM	36.936.710	3.846.775			40.783.485	41.923.361	43.097.441	44.306.741
4676	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		126.070			126.070	129.850	133.746	137.758

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4677	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		193.100			193.100	198.951	204.974	211.183
015.13	Lembaga National Single Window	7.112.090	51.860.985	33.995.764		92.968.839	95.449.972	98.005.539	100.637.804
04	EKONOMI	7.112.090	51.860.985	33.995.764		92.968.839	95.449.972	98.005.539	100.637.804
04.90	EKONOMI LAINNYA	7.112.090	51.860.985	33.995.764		92.968.839	95.449.972	98.005.539	100.637.804
015.13.WA	Program Dukungan Manajemen	7.112.090	51.860.985	33.995.764		92.968.839	95.449.972	98.005.539	100.637.804
4743	Legislasi dan Litigasi		8.899.939			8.899.939	8.902.507	8.905.150	8.907.874
4744	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)		2.089.083			2.089.083	2.151.751	2.216.295	2.282.785
4745	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum		16.121.342	779.680		16.901.022	17.390.212	17.894.076	18.413.066
4746	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik		2.396.913			2.396.913	2.468.817	2.542.880	2.619.166
4747	Pengelolaan Organisasi dan SDM	7.112.090	3.356.494			10.468.584	10.777.113	11.094.904	11.422.231
4748	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		112.064			112.064	115.425	118.886	122.453
4749	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi		18.885.150	33.216.084		52.101.234	53.644.147	55.233.348	56.870.229
JUMLAH RM						34.800.256.579			
JUMLAH BLU						8.507.021.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.572.002.201	18.240.049.449	1.026.925.377		21.838.977.027	22.416.254.995	23.008.960.808	23.619.468.089
018.01	Sekretariat Jenderal	1.278.253.420	377.312.821	54.831.208		1.710.397.449	1.761.709.098	1.814.559.713	1.868.996.388
04	EKONOMI	1.278.253.420	377.312.821	54.831.208		1.710.397.449	1.761.709.098	1.814.559.713	1.868.996.388
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.278.253.420	377.312.821	54.831.208		1.710.397.449	1.761.709.098	1.814.559.713	1.868.996.388
018.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.278.253.420	377.312.821	54.831.208		1.710.397.449	1.761.709.098	1.814.559.713	1.868.996.388
1746	Penyelenggaraan Hukum Bidang Pertanian		7.751.000			7.751.000	7.983.504	8.222.989	8.469.667
1747	Koordinasi dan Kerjasama Luar Negeri Bidang Pangan dan Pertanian		13.103.000			13.103.000	13.496.080	13.900.924	14.317.945
1749	Pengelolaan Organisasi dan SDM		14.654.000			14.654.000	15.093.605	15.546.313	16.012.718
1753	Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	6.465.000	22.584.488	3.000.000		32.049.488	33.010.954	34.001.208	35.021.220
4576	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	1.256.638.420	231.402.668	12.899.383		1.500.940.471	1.545.968.542	1.592.347.289	1.640.117.645
4577	Pengelolaan Data, Informasi, Kehumasan, dan Perpustakaan Pertanian	15.150.000	87.817.665	38.931.825		141.899.490	146.156.413	150.540.990	155.057.193
018.02	Inspektorat Jenderal	23.742.100	129.586.731	11.253.000		164.581.831	169.519.162	174.604.590	179.842.733
04	EKONOMI	23.742.100	129.586.731	11.253.000		164.581.831	169.519.162	174.604.590	179.842.733
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	23.742.100	129.586.731	11.253.000		164.581.831	169.519.162	174.604.590	179.842.733
018.02.WA	Program Dukungan Manajemen	23.742.100	129.586.731	11.253.000		164.581.831	169.519.162	174.604.590	179.842.733

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1760	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	23.742.100	23.235.910	11.253.000		58.231.010	59.977.901	61.777.187	63.630.514
4578	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian		106.350.821			106.350.821	109.541.261	112.827.403	116.212.219
018.03	Ditjen Tanaman Pangan	50.483.974	4.814.452.300	50.000.000		4.914.936.274	5.050.381.677	5.189.888.211	5.333.582.754
04	EKONOMI	50.483.974	4.814.452.300	50.000.000		4.914.936.274	5.050.381.677	5.189.888.211	5.333.582.754
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	50.483.974	4.814.452.300	50.000.000		4.914.936.274	5.050.381.677	5.189.888.211	5.333.582.754
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		643.061.000	1.939.000		645.000.000	664.252.632	684.082.366	704.507.414
5885	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan		643.061.000	1.939.000		645.000.000	664.252.632	684.082.366	704.507.414
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		3.979.973.736	26.470.398		4.006.444.134	4.117.598.486	4.232.085.906	4.350.010.087
1761	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan		343.976.250	767.500		344.743.750	353.236.200	361.983.231	370.992.946
1762	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan		1.109.298.225	1.000.000		1.110.298.225	1.138.364.832	1.167.273.160	1.197.049.061
4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		2.253.246.286	3.707.421		2.256.953.707	2.323.156.697	2.391.344.967	2.461.580.038
4580	Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan		273.452.975	20.995.477		294.448.452	302.840.757	311.484.548	320.388.042
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	50.483.974	191.417.564	21.590.602		263.492.140	268.530.559	273.719.939	279.065.253
1766	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	50.483.974	191.417.564	21.590.602		263.492.140	268.530.559	273.719.939	279.065.253
018.04	Ditjen Hortikultura	27.204.236	1.105.002.175	10.000.000		1.142.206.411	1.142.206.411	1.142.206.411	1.142.206.411

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	27.204.236	1.105.002.175	10.000.000		1.142.206.411	1.142.206.411	1.142.206.411	1.142.206.411
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	27.204.236	1.105.002.175	10.000.000		1.142.206.411	1.142.206.411	1.142.206.411	1.142.206.411
018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		160.120.095			160.120.095	160.120.095	160.120.095	160.120.095
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		160.120.095			160.120.095	160.120.095	160.120.095	160.120.095
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		851.969.905			851.969.905	851.969.905	851.969.905	851.969.905
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		261.913.800			261.913.800	261.913.800	261.913.800	261.913.800
1773	Perlindungan Hortikultura		81.709.000			81.709.000	81.709.000	81.709.000	81.709.000
4581	Perbenihan Hortikultura		386.546.605			386.546.605	386.546.605	386.546.605	386.546.605
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura		121.800.500			121.800.500	121.800.500	121.800.500	121.800.500
018.04.WA	Program Dukungan Manajemen	27.204.236	92.912.175	10.000.000		130.116.411	130.116.411	130.116.411	130.116.411
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	27.204.236	92.912.175	10.000.000		130.116.411	130.116.411	130.116.411	130.116.411
018.05	Ditjen Perkebunan	78.000.000	1.479.325.234	54.315.463		1.611.640.697	1.659.988.642	1.709.784.698	1.761.077.657
04	EKONOMI	78.000.000	1.479.325.234	54.315.463		1.611.640.697	1.659.988.642	1.709.784.698	1.761.077.657
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	78.000.000	1.479.325.234	54.315.463		1.611.640.697	1.659.988.642	1.709.784.698	1.761.077.657
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		1.277.274.436	28.490.490		1.305.764.926	1.344.936.786	1.385.281.995	1.426.839.908
1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar		368.977.865			368.977.865	380.047.122	391.447.990	403.191.186

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan		47.423.337			47.423.337	48.845.955	50.310.836	51.820.120
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah		261.225.430			261.225.430	269.062.121	277.133.635	285.447.620
5889	Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan		352.806.208			352.806.208	363.390.116	374.290.947	385.519.458
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan		246.841.596	28.490.490		275.332.086	283.591.472	292.098.587	300.861.524
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	78.000.000	202.050.798	25.824.973		305.875.771	315.051.856	324.502.703	334.237.749
1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	78.000.000	202.050.798	25.824.973		305.875.771	315.051.856	324.502.703	334.237.749
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	144.094.189	1.729.151.545	259.608.790		2.132.854.524	2.196.839.271	2.262.741.867	2.330.623.487
04	EKONOMI	144.094.189	1.729.151.545	259.608.790		2.132.854.524	2.196.839.271	2.262.741.867	2.330.623.487
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	144.094.189	1.729.151.545	259.608.790		2.132.854.524	2.196.839.271	2.262.741.867	2.330.623.487
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		65.284.700	198.800		65.483.500	67.447.940	69.470.741	71.554.720
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak		65.284.700	198.800		65.483.500	67.447.940	69.470.741	71.554.720
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		1.466.252.406	248.203.499		1.714.455.905	1.765.889.123	1.818.864.361	1.873.429.910
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		136.488.000	19.019.500		155.507.500	157.381.518	162.102.660	166.965.662
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		193.295.716	112.969.900		306.265.616	303.157.430	312.251.824	321.619.234
1785	Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak		1.081.127.475	94.738.971		1.175.866.446	1.224.741.660	1.261.483.518	1.299.327.929

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1786	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		55.341.215	21.475.128		76.816.343	80.608.515	83.026.359	85.517.085
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	144.094.189	197.614.439	11.206.491		352.915.119	363.502.208	374.406.765	385.638.857
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	144.094.189	197.614.439	11.206.491		352.915.119	363.502.208	374.406.765	385.638.857
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	27.971.677	5.235.663.521	7.882.521		5.271.517.719	5.431.534.722	5.594.475.139	5.762.308.459
04	EKONOMI	27.971.677	5.235.663.521	7.882.521		5.271.517.719	5.431.534.722	5.594.475.139	5.762.308.459
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	27.971.677	5.235.663.521	7.882.521		5.271.517.719	5.431.534.722	5.594.475.139	5.762.308.459
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		4.967.685.498	736.000		4.968.421.498	5.129.294.947	5.283.169.502	5.441.663.905
1794	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		595.616.632	490.000		596.106.632	632.041.816	651.001.845	670.531.573
1795	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian		2.844.586.572	246.000		2.844.832.572	2.098.411.898	2.161.364.024	2.226.204.873
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		691.730.840			691.730.840	712.089.959	733.451.881	755.455.276
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida		628.583.053			628.583.053	1.473.720.180	1.517.930.150	1.563.467.886
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian		207.168.401			207.168.401	213.031.094	219.421.602	226.004.297
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	27.971.677	267.978.023	7.146.521		303.096.221	302.239.775	311.305.637	320.644.554
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	27.971.677	267.978.023	7.146.521		303.096.221	302.239.775	311.305.637	320.644.554
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	478.618.420	991.683.895	204.815.013		1.675.117.328	1.725.369.266	1.777.126.966	1.830.440.034

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	478.618.420	991.683.895	204.815.013		1.675.117.328	1.725.369.266	1.777.126.966	1.830.440.034
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	478.618.420	453.042.772	96.556.216		1.028.217.408	1.059.063.092	1.090.833.669	1.123.558.429
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	478.618.420	453.042.772	96.556.216		1.028.217.408	1.059.063.092	1.090.833.669	1.123.558.429
1809	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	478.618.420	453.042.772	96.556.216		1.028.217.408	1.059.063.092	1.090.833.669	1.123.558.429
04.10	LITBANG EKONOMI		538.641.123	108.258.797		646.899.920	666.306.174	686.293.297	706.881.605
018.09.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		538.641.123	108.258.797		646.899.920	666.306.174	686.293.297	706.881.605
1801	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian		173.635.139	84.090.797		257.725.936	265.457.302	273.419.594	281.621.973
4584	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Pertanian		113.651.936	5.918.000		119.569.936	123.156.943	126.851.462	130.656.913
4585	Penelitian dan Pengembangan Tanaman, Peternakan dan Veteriner		251.354.048	18.250.000		269.604.048	277.691.929	286.022.241	294.602.719
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	153.374.996	1.071.625.971	107.431.744		1.332.432.711	1.372.404.903	1.413.575.605	1.455.982.591
04	EKONOMI	153.374.996	807.154.121	7.947.334		968.476.451	997.530.118	1.027.454.877	1.058.278.299
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	153.374.996	807.154.121	7.947.334		968.476.451	997.530.118	1.027.454.877	1.058.278.299
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		651.397.539	6.792.503		658.190.042	677.935.350	698.272.472	719.220.471
1810	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian		117.648.239	6.792.503		124.440.742	128.173.653	132.018.185	135.978.582
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian		533.749.300			533.749.300	549.761.697	566.254.287	583.241.889

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	153.374.996	155.756.582	1.154.831		310.286.409	319.594.768	329.182.405	339.057.828
1813	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sdm Pertanian	153.374.996	155.756.582	1.154.831		310.286.409	319.594.768	329.182.405	339.057.828
10	PENDIDIKAN		264.471.850	99.484.410		363.956.260	374.874.785	386.120.728	397.704.292
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		264.471.850	99.484.410		363.956.260	374.874.785	386.120.728	397.704.292
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		264.471.850	99.484.410		363.956.260	374.874.785	386.120.728	397.704.292
5892	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian		264.471.850	99.484.410		363.956.260	374.874.785	386.120.728	397.704.292
018.11	Badan Ketahanan Pangan	21.475.203	739.197.723	6.328.320		767.001.246	790.011.006	813.706.771	838.116.738
04	EKONOMI	21.475.203	739.197.723	6.328.320		767.001.246	790.011.006	813.706.771	838.116.738
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	21.475.203	739.197.723	6.328.320		767.001.246	790.011.006	813.706.771	838.116.738
018.11.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		653.334.529			653.334.529	672.934.381	693.118.873	713.911.408
1814	Pemantapan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan		84.400.000			84.400.000	86.931.983	89.539.614	92.225.740
1815	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan		118.539.544			118.539.544	122.095.646	125.756.487	129.528.545
1816	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		450.394.985			450.394.985	463.906.752	477.822.772	492.157.123
018.11.WA	Program Dukungan Manajemen	21.475.203	85.863.194	6.328.320		113.666.717	117.076.625	120.587.898	124.205.330
1817	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	21.475.203	85.863.194	6.328.320		113.666.717	117.076.625	120.587.898	124.205.330

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018.12	Badan Karantina Pertanian	288.783.986	567.047.533	260.459.318		1.116.290.837	1.116.290.837	1.116.290.837	1.116.290.837
04	EKONOMI	288.783.986	567.047.533	260.459.318		1.116.290.837	1.116.290.837	1.116.290.837	1.116.290.837
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	288.783.986	567.047.533	260.459.318		1.116.290.837	1.116.290.837	1.116.290.837	1.116.290.837
018.12.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		207.455.516			207.455.516	207.455.516	207.455.516	207.455.516
4586	Penyelenggaraan Karantina Pertanian		207.455.516			207.455.516	207.455.516	207.455.516	207.455.516
018.12.WA	Program Dukungan Manajemen	288.783.986	359.592.017	260.459.318		908.835.321	908.835.321	908.835.321	908.835.321
1821	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian	288.783.986	359.592.017	260.459.318		908.835.321	908.835.321	908.835.321	908.835.321
JUMLAH RM						21.468.021.484			
JUMLAH PLN						163.448.446			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						135.726.206			
JUMLAH BLU						52.580.891			
JUMLAH PBS						19.200.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	778.178.997	2.070.167.352	333.038.552		3.181.384.901	4.181.060.047	4.258.630.620	4.338.557.073
019.01	Sekretariat Jenderal	63.087.354	148.164.146	9.517.875		220.769.375	490.101.548	504.804.181	519.948.235
04	EKONOMI	63.087.354	148.164.146	9.517.875		220.769.375	490.101.548	504.804.181	519.948.235
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	63.087.354	148.164.146	9.517.875		220.769.375	490.101.548	504.804.181	519.948.235
019.01.WA	Program Dukungan Manajemen	63.087.354	148.164.146	9.517.875		220.769.375	490.101.548	504.804.181	519.948.235
1824	Pelayanan Legislasi, Advokasi, dan Diseminasi		7.458.258			7.458.258	22.583.383	23.260.852	23.958.678
1825	Pengelolaan Pelayanan Umum dan Protokoleran serta Sarana dan Prasarana Perkantoran		58.765.885	5.409.250		64.175.135	126.772.376	130.575.492	134.492.738
1826	Pengelolaan Organisasi dan SDM		11.086.000			11.086.000	18.955.058	19.523.633	20.109.344
1827	Pengelolaan Keuangan dan BMN	51.525.180	7.746.430			59.271.610	70.016.623	72.117.068	74.280.564
1828	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan		15.861.737			15.861.737	76.364.174	78.655.056	81.014.697
1829	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	7.962.174	12.867.434	3.598.545		24.428.153	78.192.616	80.538.315	82.954.453
1831	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		18.327.448	42.180		18.369.628	55.399.542	57.061.479	58.773.315
4905	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.600.000	16.050.954	467.900		20.118.854	41.817.776	43.072.286	44.364.446
019.02	Ditjen Industri Agro	18.756.665	81.523.312	2.371.873		102.651.850	449.951.850	450.251.850	450.851.850
04	EKONOMI	18.756.665	81.523.312	2.371.873		102.651.850	449.951.850	450.251.850	450.851.850
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	18.756.665	81.523.312	2.371.873		102.651.850	449.951.850	450.251.850	450.851.850

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019.02.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		57.434.470			57.434.470	397.934.470	398.234.470	398.834.470
6044	Perbaikan Rantai Pasok Industri Agro		7.750.000			7.750.000	37.250.000	54.250.000	51.250.000
6045	Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Agro		12.000.000			12.000.000	137.300.000	85.200.000	69.000.000
6046	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Agro		7.000.000			7.000.000	94.100.000	115.000.000	133.000.000
6047	Pengembangan Standar Industri Agro		8.100.000			8.100.000	22.700.000	22.700.000	22.700.000
6048	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Agro		2.000.000			2.000.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
6049	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Agro		7.134.470			7.134.470	28.134.470	30.134.470	32.134.470
6050	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Agro		8.450.000			8.450.000	30.750.000	30.750.000	30.750.000
6051	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Agro		5.000.000			5.000.000	43.000.000	55.500.000	55.300.000
019.02.WA	Program Dukungan Manajemen	18.756.665	24.088.842	2.371.873		45.217.380	52.017.380	52.017.380	52.017.380
6037	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Agro	18.756.665	24.088.842	2.371.873		45.217.380	52.017.380	52.017.380	52.017.380
019.03	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	21.000.000	95.089.342	280.000		116.369.342	490.432.008	505.144.739	520.299.057
04	EKONOMI	21.000.000	95.089.342	280.000		116.369.342	490.432.008	505.144.739	520.299.057
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	21.000.000	95.089.342	280.000		116.369.342	490.432.008	505.144.739	520.299.057
019.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		74.792.764			74.792.764	430.819.183	443.743.592	457.055.863
6052	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		3.834.021			3.834.021	23.211.025	23.907.344	24.624.563

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6053	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		7.500.000			7.500.000	108.244.759	111.492.101	114.836.864
6054	Pengembangan Standar Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		7.083.320			7.083.320	12.515.193	12.890.633	13.277.340
6055	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		2.163.371			2.163.371	41.498.224	42.743.163	44.025.457
6056	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		6.994.982			6.994.982	24.541.506	25.277.745	26.036.074
6057	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		14.850.756			14.850.756	107.474.330	110.698.474	114.019.425
6058	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		21.250.000			21.250.000	41.199.985	42.435.979	43.709.051
6059	Perbaikan Rantai Pasok Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		2.966.314			2.966.314	27.844.179	28.679.497	29.539.878
6060	Penumbuhan Industri Substitusi Impor dan Hilirisasi Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil		5.150.000			5.150.000	38.109.997	39.253.294	40.430.891
6082	Pengelolaan Bahan Kimia dan Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia di Sektor Industri		3.000.000			3.000.000	6.179.985	6.365.362	6.556.320
019.03.WA	Program Dukungan Manajemen	21.000.000	20.296.578	280.000		41.576.578	59.612.825	61.401.147	63.243.194
6038	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	21.000.000	20.296.578	280.000		41.576.578	59.612.825	61.401.147	63.243.194

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019.04	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	24.518.210	87.398.342	2.500.000		114.416.552	499.550.376	514.536.643	529.972.636
04	EKONOMI	24.518.210	87.398.342	2.500.000		114.416.552	499.550.376	514.536.643	529.972.636
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	24.518.210	87.398.342	2.500.000		114.416.552	499.550.376	514.536.643	529.972.636
019.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		66.900.000			66.900.000	450.608.385	464.126.446	478.050.171
6061	Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		3.900.000			3.900.000	5.646.441	5.815.803	5.990.258
6062	Perbaikan Rantai Pasok Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		26.200.000			26.200.000	168.596.545	173.654.387	178.864.008
6063	Peningkatan dan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		6.769.360			6.769.360	50.636.859	52.155.947	53.720.625
6065	Pengembangan Standar Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		9.300.000			9.300.000	98.070.375	101.012.427	104.042.777
6067	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		230.640			230.640	236.900	244.004	251.324
6068	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		10.500.000			10.500.000	64.251.377	66.178.906	68.164.266
6070	Pelaksanaan Peta Jalan Revolusi Industry 4.0 Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		10.000.000			10.000.000	63.169.888	65.064.972	67.016.913
019.04.WA	Program Dukungan Manajemen	24.518.210	20.498.342	2.500.000		47.516.552	48.941.991	50.410.197	51.922.465

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6039	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	24.518.210	20.498.342	2.500.000		47.516.552	48.941.991	50.410.197	51.922.465
019.05	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	25.763.538	264.487.415	22.305.047		312.556.000	315.060.595	317.640.409	320.297.643
04	EKONOMI	25.763.538	264.487.415	22.305.047		312.556.000	315.060.595	317.640.409	320.297.643
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	25.763.538	264.487.415	22.305.047		312.556.000	315.060.595	317.640.409	320.297.643
019.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		224.228.123	19.289.607		243.517.730	244.828.417	246.178.485	247.569.078
6071	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka		224.228.123	19.289.607		243.517.730	244.828.417	246.178.485	247.569.078
019.05.WA	Program Dukungan Manajemen	25.763.538	40.259.292	3.015.440		69.038.270	70.232.178	71.461.924	72.728.565
6040	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka	25.763.538	40.259.292	3.015.440		69.038.270	70.232.178	71.461.924	72.728.565
019.06	Inspektorat Jenderal	19.779.464	20.274.166	590.000		40.643.630	82.399.936	84.871.835	87.417.966
04	EKONOMI	19.779.464	20.274.166	590.000		40.643.630	82.399.936	84.871.835	87.417.966
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	19.779.464	20.274.166	590.000		40.643.630	82.399.936	84.871.835	87.417.966
019.06.WA	Program Dukungan Manajemen	19.779.464	20.274.166	590.000		40.643.630	82.399.936	84.871.835	87.417.966
1841	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat I		2.000.000			2.000.000	8.239.993	8.487.181	8.741.791

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat II		2.000.000			2.000.000	8.239.992	8.487.179	8.741.789
1843	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat III		2.000.000			2.000.000	8.239.989	8.487.181	8.741.795
1844	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindsutrian Cakupan Tugas Inspektorat IV		2.000.000			2.000.000	8.239.992	8.487.182	8.741.798
6036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	19.779.464	12.274.166	590.000		32.643.630	49.439.970	50.923.112	52.450.793
019.07	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri	251.982.429	343.418.824	72.895.257		668.296.510	686.563.573	705.378.728	724.758.948
04	EKONOMI	251.982.429	343.418.824	72.895.257		668.296.510	686.563.573	705.378.728	724.758.948
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	251.982.429	343.418.824	72.895.257		668.296.510	686.563.573	705.378.728	724.758.948
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		85.901.637	10.057.750		95.959.387	98.711.433	101.546.003	104.465.818
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		70.001.637	2.157.750		72.159.387	74.212.356	76.326.891	78.505.021
6078	Pengembangan Industri Hijau		8.700.000			8.700.000	8.949.095	9.205.650	9.469.934
6079	Pengembangan Standar Industri		7.200.000	7.900.000		15.100.000	15.549.982	16.013.462	16.490.863
019.07.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		71.400.998	40.966.169		112.367.167	114.560.338	116.819.301	119.146.131

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6080	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri		71.400.998	40.966.169		112.367.167	114.560.338	116.819.301	119.146.131
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	251.982.429	186.116.189	21.871.338		459.969.956	473.291.802	487.013.424	501.146.999
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri	251.982.429	186.116.189	21.871.338		459.969.956	473.291.802	487.013.424	501.146.999
019.09	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	27.500.000	138.871.500	4.328.500		170.700.000	182.000.164	191.002.240	200.010.737
04	EKONOMI	27.500.000	138.871.500	4.328.500		170.700.000	182.000.164	191.002.240	200.010.737
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	27.500.000	138.871.500	4.328.500		170.700.000	182.000.164	191.002.240	200.010.737
019.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		122.578.500	2.178.500		124.757.000	128.499.624	132.354.519	136.325.141
6072	Penyediaan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal		8.421.500	2.178.500		10.600.000	10.917.970	11.245.478	11.582.842
6073	Peningkatan Kerjasama dan Investasi Bidang Industri		101.157.000			101.157.000	104.191.670	107.317.373	110.536.886
6074	Pengembangan Perwilayahan Industri		13.000.000			13.000.000	13.389.984	13.791.668	14.205.413
019.09.WA	Program Dukungan Manajemen	27.500.000	16.293.000	2.150.000		45.943.000	53.500.540	58.647.721	63.685.596
6041	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	27.500.000	16.293.000	2.150.000		45.943.000	53.500.540	58.647.721	63.685.596
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	325.791.337	890.940.305	218.250.000		1.434.981.642	984.999.997	984.999.995	985.000.001
10	PENDIDIKAN	325.791.337	890.940.305	218.250.000		1.434.981.642	984.999.997	984.999.995	985.000.001
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		46.934.365	32.750.000		79.684.365	67.470.254	69.140.278	66.231.449

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		46.934.365	32.750.000		79.684.365	67.470.254	69.140.278	66.231.449
4959	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri		46.934.365	32.750.000		79.684.365	67.470.254	69.140.278	66.231.449
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		526.979.224	3.900.000		530.879.224	206.792.997	162.924.997	133.657.757
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		526.979.224	3.900.000		530.879.224	206.792.997	162.924.997	133.657.757
4957	Pelatihan Vokasi Industri		526.979.224	3.900.000		530.879.224	206.792.997	162.924.997	133.657.757
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN		16.000.000			16.000.000	15.384.996	15.384.996	15.384.996
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		16.000.000			16.000.000	15.384.996	15.384.996	15.384.996
4960	Peningkatan Kompetensi ASN		16.000.000			16.000.000	15.384.996	15.384.996	15.384.996
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		155.361.022	180.100.000		335.461.022	136.852.370	144.966.396	153.169.237
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		155.361.022	180.100.000		335.461.022	136.852.370	144.966.396	153.169.237
4958	Pendidikan Tinggi Vokasi Industri		155.361.022	180.100.000		335.461.022	136.852.370	144.966.396	153.169.237
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	325.791.337	145.665.694	1.500.000		472.957.031	558.499.380	592.583.328	616.556.562
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	325.791.337	145.665.694	1.500.000		472.957.031	558.499.380	592.583.328	616.556.562
6043	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	325.791.337	145.665.694	1.500.000		472.957.031	558.499.380	592.583.328	616.556.562
JUMLAH RM						2.944.446.109			
JUMLAH PNBP						141.744.990			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH BLU						95.193.802			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	929.636.873	4.461.301.067	1.612.206.648		7.003.144.588	7.107.930.410	7.220.380.236	7.335.258.464
020.01	Sekretariat Jenderal	90.392.462	270.456.641	76.286.705		437.135.808	440.135.876	443.289.326	446.614.791
04	EKONOMI	90.392.462	270.456.641	76.286.705		437.135.808	440.135.876	443.289.326	446.614.791
04.90	EKONOMI LAINNYA	90.392.462	270.456.641	76.286.705		437.135.808	440.135.876	443.289.326	446.614.791
020.01.WA	Program Dukungan Manajemen	90.392.462	270.456.641	76.286.705		437.135.808	440.135.876	443.289.326	446.614.791
6359	Pengelolaan SDM, Organisasi dan Tata Laksana	90.392.462	24.984.588			115.377.050	117.184.899	119.028.905	120.909.792
6360	Perencanaan dan Penganggaran serta Pengelolaan Keuangan		33.789.228			33.789.228	33.789.228	33.789.228	33.789.228
6361	Pelayanan Umum dan Pengelolaan BMN		125.921.685	76.286.705		202.208.390	203.400.609	204.710.053	206.154.631
6362	Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Kerjasama, Legislasi dan Litigasi		85.761.140			85.761.140	85.761.140	85.761.140	85.761.140
020.02	Inspektorat Jenderal	28.137.623	98.575.475	5.000.000		131.713.098	136.713.098	146.713.098	156.713.098
04	EKONOMI	28.137.623	98.575.475	5.000.000		131.713.098	136.713.098	146.713.098	156.713.098
04.90	EKONOMI LAINNYA	28.137.623	98.575.475	5.000.000		131.713.098	136.713.098	146.713.098	156.713.098
020.02.WA	Program Dukungan Manajemen	28.137.623	98.575.475	5.000.000		131.713.098	136.713.098	146.713.098	156.713.098
6363	Pengelolaan Risiko, Pengawasan dan Pengendalian Internal Kementerian ESDM		59.434.359			59.434.359	59.434.359	59.434.359	59.434.359
6364	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Internal KESDM	28.137.623	39.141.116	5.000.000		72.278.739	77.278.739	87.278.739	97.278.739

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020.04	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	84.119.965	729.265.734	1.238.693.723		2.052.079.422	2.113.641.452	2.177.050.494	2.242.362.004
04	EKONOMI	84.119.965	729.265.734	1.238.693.723		2.052.079.422	2.113.641.452	2.177.050.494	2.242.362.004
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	84.119.965	729.265.734	1.238.693.723		2.052.079.422	2.113.641.452	2.177.050.494	2.242.362.004
020.04.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		644.710.673	1.229.494.968		1.874.205.641	1.930.431.583	1.988.344.409	2.047.994.748
6348	Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi		77.912.783			77.912.783	80.249.960	82.657.353	85.137.079
6349	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		566.797.890	1.229.494.968		1.796.292.858	1.850.181.623	1.905.687.056	1.962.857.669
020.04.WA	Program Dukungan Manajemen	84.119.965	84.555.061	9.198.755		177.873.781	183.209.869	188.706.085	194.367.256
1896	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Minyak dan Gas Bumi	84.119.965	84.555.061	9.198.755		177.873.781	183.209.869	188.706.085	194.367.256
020.05	Ditjen Ketenagalistrikan	49.446.549	93.282.802	32.252.399		174.981.750	177.461.982	180.016.619	182.647.918
04	EKONOMI	49.446.549	93.282.802	32.252.399		174.981.750	177.461.982	180.016.619	182.647.918
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	49.446.549	93.282.802	32.252.399		174.981.750	177.461.982	180.016.619	182.647.918
020.05.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		42.159.194			42.159.194	42.159.194	42.159.194	42.159.194
6350	Pengelolaan Ketenagalistrikan		42.159.194			42.159.194	42.159.194	42.159.194	42.159.194
020.05.WA	Program Dukungan Manajemen	49.446.549	51.123.608	32.252.399		132.822.556	135.302.788	137.857.425	140.488.724
1901	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan	49.446.549	51.123.608	32.252.399		132.822.556	135.302.788	137.857.425	140.488.724

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020.06	Ditjen Mineral dan Batubara	151.029.214	296.918.377	10.255.510		458.203.101	471.948.898	486.107.188	500.690.381
04	EKONOMI	151.029.214	296.918.377	10.255.510		458.203.101	471.948.898	486.107.188	500.690.381
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	151.029.214	138.293.625	8.685.510		298.008.349	306.948.478	316.156.874	325.641.578
020.06.WA	Program Dukungan Manajemen	151.029.214	138.293.625	8.685.510		298.008.349	306.948.478	316.156.874	325.641.578
1906	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Mineral dan Batubara	151.029.214	138.293.625	8.685.510		298.008.349	306.948.478	316.156.874	325.641.578
04.06	PERTAMBANGAN		158.624.752	1.570.000		160.194.752	165.000.420	169.950.314	175.048.803
020.06.JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara		158.624.752	1.570.000		160.194.752	165.000.420	169.950.314	175.048.803
6355	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		137.210.679	1.470.000		138.680.679	142.840.942	147.126.066	151.539.830
6356	Pengelolaan Penerimaan Negara Mineral dan Batubara		21.414.073	100.000		21.514.073	22.159.478	22.824.248	23.508.973
020.07	Dewan Energi Nasional	22.000.000	24.585.171	3.226.500		49.811.671	50.897.588	51.651.697	51.953.341
04	EKONOMI	22.000.000	24.585.171	3.226.500		49.811.671	50.897.588	51.651.697	51.953.341
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	22.000.000	24.585.171	3.226.500		49.811.671	50.897.588	51.651.697	51.953.341
020.07.WA	Program Dukungan Manajemen	22.000.000	24.585.171	3.226.500		49.811.671	50.897.588	51.651.697	51.953.341
1909	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Dewan Energi Nasional	22.000.000	16.756.779	3.226.500		41.983.279	43.069.196	43.823.305	44.124.949
6382	Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional		7.828.392			7.828.392	7.828.392	7.828.392	7.828.392
020.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	109.065.630	362.933.354	49.771.581		521.770.565	522.253.737	522.728.932	523.075.162

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	109.065.630	362.933.354	49.771.581		521.770.565	522.253.737	522.728.932	523.075.162
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	109.065.630	84.695.570	1.657.174		195.418.374	195.901.546	196.376.741	196.722.971
020.11.WA	Program Dukungan Manajemen	109.065.630	84.695.570	1.657.174		195.418.374	195.901.546	196.376.741	196.722.971
1914	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan ESDM	109.065.630	84.695.570	1.657.174		195.418.374	195.901.546	196.376.741	196.722.971
04.10	LITBANG EKONOMI		278.237.784	48.114.407		326.352.191	326.352.191	326.352.191	326.352.191
020.11.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		278.237.784	48.114.407		326.352.191	326.352.191	326.352.191	326.352.191
6357	Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM		59.032.957	35.847.134		94.880.091	94.880.091	94.880.091	94.880.091
6358	Pelayanan Jasa Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM		219.204.827	12.267.273		231.472.100	231.472.100	231.472.100	231.472.100
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	75.303.236	395.994.293	18.423.668		489.721.197	493.113.426	496.600.894	500.088.364
04	EKONOMI	61.085.582	293.007.509	10.142.483		364.235.574	367.627.803	371.115.271	374.602.741
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	61.085.582	84.880.413	6.500.000		152.465.995	155.858.224	159.345.692	162.833.162
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	61.085.582	84.880.413	6.500.000		152.465.995	155.858.224	159.345.692	162.833.162
1915	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	61.085.582	84.880.413	6.500.000		152.465.995	155.858.224	159.345.692	162.833.162
04.90	EKONOMI LAINNYA		208.127.096	3.642.483		211.769.579	211.769.579	211.769.579	211.769.579
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		176.207.074	3.642.483		179.849.557	179.849.557	179.849.557	179.849.557

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6345	Pelatihan Vokasi Sektor ESDM		176.207.074	3.642.483		179.849.557	179.849.557	179.849.557	179.849.557
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen		31.920.022			31.920.022	31.920.022	31.920.022	31.920.022
6398	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara		31.920.022			31.920.022	31.920.022	31.920.022	31.920.022
10	PENDIDIKAN	14.217.654	102.986.784	8.281.185		125.485.623	125.485.623	125.485.623	125.485.623
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	14.217.654	102.986.784	8.281.185		125.485.623	125.485.623	125.485.623	125.485.623
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		76.396.664	8.281.185		84.677.849	84.677.849	84.677.849	84.677.849
6344	Pendidikan Vokasi Sektor ESDM		76.396.664	8.281.185		84.677.849	84.677.849	84.677.849	84.677.849
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	14.217.654	26.590.120			40.807.774	40.807.774	40.807.774	40.807.774
6452	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Pendidikan Vokasi dan Sektor ESDM	14.217.654	26.590.120			40.807.774	40.807.774	40.807.774	40.807.774
020.13	Badan Geologi	163.604.319	756.023.066	82.971.354		1.002.598.739	1.004.032.576	1.005.509.449	1.007.030.630
04	EKONOMI	163.604.319	756.023.066	82.971.354		1.002.598.739	1.004.032.576	1.005.509.449	1.007.030.630
04.06	PERTAMBANGAN	163.604.319	756.023.066	82.971.354		1.002.598.739	1.004.032.576	1.005.509.449	1.007.030.630
020.13.FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi		628.491.900	75.134.636		703.626.536	703.626.536	703.626.536	703.626.536
6346	Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi		44.153.179	32.030.732		76.183.911	76.183.911	76.183.911	76.183.911
6347	Data, Informasi, Rekomendasi dan Layanan Geologi		584.338.721	43.103.904		627.442.625	627.442.625	627.442.625	627.442.625
020.13.WA	Program Dukungan Manajemen	163.604.319	127.531.166	7.836.718		298.972.203	300.406.040	301.882.913	303.404.094

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1928	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Geologi	163.604.319	127.531.166	7.836.718		298.972.203	300.406.040	301.882.913	303.404.094
020.14	BPH Migas	57.203.443	160.706.349	53.264.408		271.174.200	279.309.273	287.688.495	296.319.130
04	EKONOMI	57.203.443	160.706.349	53.264.408		271.174.200	279.309.273	287.688.495	296.319.130
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	57.203.443	160.706.349	53.264.408		271.174.200	279.309.273	287.688.495	296.319.130
020.14.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		76.238.591			76.238.591	78.525.677	80.881.422	83.307.854
6351	Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa		76.238.591			76.238.591	78.525.677	80.881.422	83.307.854
020.14.WA	Program Dukungan Manajemen	57.203.443	84.467.758	53.264.408		194.935.609	200.783.596	206.807.073	213.011.276
6366	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hilir Migas	57.203.443	84.467.758	53.264.408		194.935.609	200.783.596	206.807.073	213.011.276
020.15	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	52.448.000	1.250.347.767	42.060.800		1.344.856.567	1.347.251.135	1.349.717.547	1.352.257.953
04	EKONOMI	52.448.000	1.250.347.767	42.060.800		1.344.856.567	1.347.251.135	1.349.717.547	1.352.257.953
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	52.448.000	1.250.347.767	42.060.800		1.344.856.567	1.347.251.135	1.349.717.547	1.352.257.953
020.15.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		1.196.796.414	37.560.800		1.234.357.214	1.234.357.214	1.234.357.214	1.234.357.214
6352	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		66.501.264			66.501.264	66.501.264	66.501.264	66.501.264
6353	Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi		1.130.295.150	37.560.800		1.167.855.950	1.167.855.950	1.167.855.950	1.167.855.950
020.15.WA	Program Dukungan Manajemen	52.448.000	53.551.353	4.500.000		110.499.353	112.893.921	115.360.333	117.900.739

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4036	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang EBTKE	52.448.000	53.551.353	4.500.000		110.499.353	112.893.921	115.360.333	117.900.739
020.16	Badan Pengelola Migas Aceh	46.886.432	22.212.038			69.098.470	71.171.369	73.306.497	75.505.692
04	EKONOMI	46.886.432	22.212.038			69.098.470	71.171.369	73.306.497	75.505.692
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	46.886.432	22.212.038			69.098.470	71.171.369	73.306.497	75.505.692
020.16.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		4.338.750			4.338.750	4.468.882	4.602.943	4.741.036
6354	Pengelolaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Aceh		4.338.750			4.338.750	4.468.882	4.602.943	4.741.036
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	46.886.432	17.873.288			64.759.720	66.702.487	68.703.554	70.764.656
6365	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Hulu Migas Aceh	46.886.432	17.873.288			64.759.720	66.702.487	68.703.554	70.764.656
JUMLAH RM						6.088.116.531			
JUMLAH PNBP						496.165.821			
JUMLAH BLU						418.862.236			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.978.350.952	17.534.191.034	24.151.499.155		45.664.041.141	46.751.410.202	47.871.404.206	49.025.004.394
022.01	Sekretariat Jenderal	129.030.454	477.408.111	109.595.684		716.034.249	735.448.327	755.445.106	776.041.964
04	EKONOMI	129.030.454	477.408.111	109.595.684		716.034.249	735.448.327	755.445.106	776.041.964
04.08	TRANSPORTASI	129.030.454	477.408.111	109.595.684		716.034.249	735.448.327	755.445.106	776.041.964
022.01.WA	Program Dukungan Manajemen	129.030.454	477.408.111	109.595.684		716.034.249	735.448.327	755.445.106	776.041.964
1932	Legislasi dan Litigasi		16.222.489			16.222.489	16.222.489	16.222.489	16.222.489
1933	Pengelolaan Organisasi dan SDM		60.697.433			60.697.433	62.383.182	64.119.585	65.908.113
1937	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda Transportasi		10.955.100			10.955.100	11.284.646	11.624.084	11.973.720
1938	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran		5.449.486			5.449.486	5.612.964	5.781.352	5.954.791
1939	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		4.221.648	3.030.000		7.251.648	7.459.662	7.673.917	7.894.601
1940	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan		8.791.098	197.800		8.988.898	9.237.605	9.493.780	9.757.657
1941	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		70.727.163			70.727.163	72.585.191	74.498.999	76.470.233
4657	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	129.030.454	273.312.422	106.367.884		508.710.760	522.807.812	537.327.893	552.283.669
5877	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama		27.031.272			27.031.272	27.854.776	28.703.007	29.576.691
022.02	Inspektorat Jenderal	39.745.229	77.154.713	4.650.000		121.549.942	125.196.318	128.952.172	132.820.737
04	EKONOMI	39.745.229	77.154.713	4.650.000		121.549.942	125.196.318	128.952.172	132.820.737
04.08	TRANSPORTASI	39.745.229	77.154.713	4.650.000		121.549.942	125.196.318	128.952.172	132.820.737

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.02.WA	Program Dukungan Manajemen	39.745.229	77.154.713	4.650.000		121.549.942	125.196.318	128.952.172	132.820.737
4636	Pelaksanaan Pengawasan Internal		51.367.917			51.367.917	52.908.902	54.496.158	56.131.043
4663	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan		6.285.417			6.285.417	6.473.960	6.668.176	6.868.218
4664	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pengawasan	39.745.229	13.772.641	2.505.500		56.023.370	57.704.045	59.435.154	61.218.211
4665	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan		1.017.056	2.144.500		3.161.556	3.256.401	3.354.092	3.454.715
4669	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan		1.000.000			1.000.000	1.029.996	1.060.892	1.092.720
4818	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan		1.607.417			1.607.417	1.655.631	1.705.297	1.756.456
4820	Legislasi dan Litigasi Pengawasan		2.104.265			2.104.265	2.167.383	2.232.403	2.299.374
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	515.030.478	3.507.554.385	3.623.274.200		7.645.859.063	7.763.746.703	7.885.171.058	8.010.238.130
04	EKONOMI	515.030.478	3.507.554.385	3.623.274.200		7.645.859.063	7.763.746.703	7.885.171.058	8.010.238.130
04.08	TRANSPORTASI	515.030.478	3.507.554.385	3.623.274.200		7.645.859.063	7.763.746.703	7.885.171.058	8.010.238.130
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		2.958.229.878	3.557.278.489		6.515.508.367	6.622.903.313	6.733.520.183	6.847.455.544
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat		1.489.489.573	1.287.346.648		2.776.836.221	2.811.684.998	2.847.579.238	2.884.550.311
4638	Pelayanan Transportasi Darat		560.730.994	981.535.521		1.542.266.515	1.565.277.296	1.588.978.422	1.613.390.573
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat		455.171.666	1.069.658.561		1.524.830.227	1.562.576.548	1.601.455.310	1.641.500.419
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat		452.837.645	218.737.759		671.575.404	683.364.471	695.507.213	708.014.241

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	515.030.478	549.324.507	65.995.711		1.130.350.696	1.140.843.390	1.151.650.875	1.162.782.586
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat			3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	7.098.656	455.876.714	42.521.432		505.496.802	515.684.531	526.177.903	536.986.076
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	507.931.822	93.447.793	19.974.279		621.353.894	621.658.859	621.972.972	622.296.510
022.04	Ditjen Perhubungan Laut	1.928.217.911	4.577.595.269	4.922.381.633		11.428.194.813	11.771.035.654	12.124.163.697	12.487.888.022
04	EKONOMI	1.928.217.911	4.577.595.269	4.922.381.633		11.428.194.813	11.771.035.654	12.124.163.697	12.487.888.022
04.08	TRANSPORTASI	1.928.217.911	4.577.595.269	4.922.381.633		11.428.194.813	11.771.035.654	12.124.163.697	12.487.888.022
022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		3.293.564.816	4.815.714.551		8.109.279.367	8.352.555.932	8.603.131.531	8.861.225.165
4658	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut		639.343.844	1.173.696.072		1.813.039.916	1.867.307.172	1.923.326.288	1.981.025.903
4659	Pelayanan Transportasi Laut		2.025.408.270	144.214.616		2.169.622.886	2.409.811.544	2.482.105.889	2.556.569.065
4660	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut		46.548.209	3.256.832.062		3.303.380.271	3.227.381.435	3.324.202.817	3.423.928.852
4661	Penunjang Teknis Transportasi Laut		582.264.493	240.971.801		823.236.294	848.055.781	873.496.537	899.701.345
022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.928.217.911	1.284.030.453	106.667.082		3.318.915.446	3.418.479.722	3.521.032.166	3.626.662.857
4631	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut		45.296.929			45.296.929	46.655.800	48.055.448	49.497.105
4632	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut	1.928.217.911	1.183.243.186	106.667.082		3.218.128.179	3.314.668.917	3.414.107.079	3.516.530.034

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4633	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut		20.861.688			20.861.688	21.487.529	22.132.138	22.796.097
4634	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut		13.598.308			13.598.308	14.006.243	14.426.422	14.859.212
4635	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut		21.030.342			21.030.342	21.661.233	22.311.079	22.980.409
022.05	Ditjen Perhubungan Udara	848.332.061	3.242.768.439	6.467.527.667		10.558.628.167	10.875.384.853	11.201.645.054	11.537.693.335
04	EKONOMI	848.332.061	3.242.768.439	6.467.527.667		10.558.628.167	10.875.384.853	11.201.645.054	11.537.693.335
04.08	TRANSPORTASI	848.332.061	3.242.768.439	6.467.527.667		10.558.628.167	10.875.384.853	11.201.645.054	11.537.693.335
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		1.983.113.306	6.467.527.667		8.450.640.973	8.704.159.611	8.965.284.017	9.234.241.886
1960	Pelayanan Transportasi Udara		640.489.253	197.600		640.686.853	659.907.431	679.704.646	700.095.760
4645	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara		86.032.410	5.102.187.173		5.188.219.583	5.301.006.407	5.460.036.487	5.623.837.373
4646	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara		313.504.491	1.056.012.028		1.369.516.519	1.412.554.365	1.454.930.941	1.498.578.760
4647	Penunjang Teknis Transportasi Udara		943.087.152	309.130.866		1.252.218.018	1.330.691.408	1.370.611.943	1.411.729.993
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	848.332.061	1.259.655.133			2.107.987.194	2.171.225.242	2.236.361.037	2.303.451.449
4611	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	848.332.061	1.234.601.253			2.082.933.314	2.145.419.746	2.209.781.379	2.276.074.408
4613	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara		24.313.200			24.313.200	25.042.596	25.793.871	26.567.682
4614	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara		740.680			740.680	762.900	785.787	809.359
022.08	Ditjen Perkeretaapian	115.101.875	2.444.329.412	8.544.012.761		11.103.444.048	11.283.831.394	11.469.630.693	11.661.004.154

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	115.101.875	2.444.329.412	8.544.012.761		11.103.444.048	11.283.831.394	11.469.630.693	11.661.004.154
04.08	TRANSPORTASI	115.101.875	2.444.329.412	8.544.012.761		11.103.444.048	11.283.831.394	11.469.630.693	11.661.004.154
022.08.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		2.102.440.876	8.513.064.518		10.615.505.394	10.781.709.272	10.952.899.393	11.129.225.292
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian		353.054.239	3.350.596.160		3.703.650.399	3.719.944.178	3.736.726.789	3.754.012.874
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian		1.301.029.921	231.123.587		1.532.153.508	1.581.290.614	1.631.901.848	1.684.031.430
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		348.215.723	4.893.744.068		5.241.959.791	5.339.039.350	5.439.027.185	5.542.014.651
4644	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian		100.140.993	37.600.703		137.741.696	141.435.130	145.243.571	149.166.337
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	115.101.875	341.888.536	30.948.243		487.938.654	502.122.122	516.731.300	531.778.862
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian		12.715.886			12.715.886	13.611.845	14.534.701	15.485.259
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	115.101.875	312.562.992	30.948.243		458.613.110	471.396.656	484.563.880	498.126.201
4602	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian		2.121.719			2.121.719	2.185.369	2.250.927	2.318.452
4603	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian		12.310.910			12.310.910	12.685.917	13.072.189	13.470.058
4604	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian		2.177.029			2.177.029	2.242.335	2.309.603	2.378.892
022.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	30.816.569	155.447.503	11.729.099		197.993.171	198.180.612	198.373.685	198.572.552
04	EKONOMI	30.816.569	155.447.503	11.729.099		197.993.171	198.180.612	198.373.685	198.572.552

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.08	TRANSPORTASI	30.816.569	94.536.524	11.729.099		137.082.192	137.269.633	137.462.706	137.661.573
022.11.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		50.382.418	800.000		51.182.418	51.182.418	51.182.418	51.182.418
4662	Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi		50.382.418	800.000		51.182.418	51.182.418	51.182.418	51.182.418
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	30.816.569	44.154.106	10.929.099		85.899.774	86.087.215	86.280.288	86.479.155
4652	Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan		7.578.351	2.048.514		9.626.865	9.632.892	9.639.102	9.645.500
4653	Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan	30.816.569	28.951.108	8.880.585		68.648.262	68.829.676	69.016.539	69.209.008
4654	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan		2.485.530			2.485.530	2.485.530	2.485.530	2.485.530
4655	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan		5.139.117			5.139.117	5.139.117	5.139.117	5.139.117
04.10	LITBANG EKONOMI		60.910.979			60.910.979	60.910.979	60.910.979	60.910.979
022.11.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		60.910.979			60.910.979	60.910.979	60.910.979	60.910.979
1970	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi		60.910.979			60.910.979	60.910.979	60.910.979	60.910.979
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	346.886.675	2.927.756.354	267.107.566		3.541.750.595	3.647.999.248	3.757.435.648	3.870.158.407
04	EKONOMI	346.886.675	970.278.315	34.107.880		1.351.272.870	1.391.809.947	1.433.563.260	1.476.570.067
04.08	TRANSPORTASI	346.886.675	970.278.315	34.107.880		1.351.272.870	1.391.809.947	1.433.563.260	1.476.570.067
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	346.886.675	970.278.315	34.107.880		1.351.272.870	1.391.809.947	1.433.563.260	1.476.570.067
4626	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi		19.360.830			19.360.830	19.941.603	20.539.834	21.156.023
4627	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM	346.886.675	945.540.467	34.107.880		1.326.535.022	1.366.330.029	1.407.318.979	1.449.538.461

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Transportasi								
4628	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SDM Transportasi		2.702.379			2.702.379	2.783.448	2.866.944	2.952.950
4629	Legislasi dan Litigasi SDM Transportasi		1.412.591			1.412.591	1.454.961	1.498.602	1.543.563
4630	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama SDM Transportasi		1.262.048			1.262.048	1.299.906	1.338.901	1.379.070
10	PENDIDIKAN		1.957.478.039	232.999.686		2.190.477.725	2.256.189.301	2.323.872.388	2.393.588.340
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN		150.037.202	22.904.390		172.941.592	178.129.591	183.473.235	188.977.371
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		73.554.947	4.945.410		78.500.357	80.855.230	83.280.761	85.779.171
1975	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi		73.554.947	4.945.410		78.500.357	80.855.230	83.280.761	85.779.171
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen		76.482.255	17.958.980		94.441.235	97.274.361	100.192.474	103.198.200
1979	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan		76.482.255	17.958.980		94.441.235	97.274.361	100.192.474	103.198.200
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		1.807.440.837	210.095.296		2.017.536.133	2.078.059.710	2.140.399.153	2.204.610.969
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		1.807.440.837	210.095.296		2.017.536.133	2.078.059.710	2.140.399.153	2.204.610.969
3996	Pendidikan Transportasi		1.807.440.837	210.095.296		2.017.536.133	2.078.059.710	2.140.399.153	2.204.610.969
022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	25.189.700	124.176.848	201.220.545		350.587.093	350.587.093	350.587.093	350.587.093
04	EKONOMI	25.189.700	124.176.848	201.220.545		350.587.093	350.587.093	350.587.093	350.587.093
04.08	TRANSPORTASI	25.189.700	124.176.848	201.220.545		350.587.093	350.587.093	350.587.093	350.587.093
022.13.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		70.290.041	194.133.045		264.423.086	264.423.086	264.423.086	264.423.086

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4648	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek			6.273.100		6.273.100	6.273.100	6.273.100	6.273.100
4649	Pelayanan Transportasi Jabodetabek		40.422.599	98.115.372		138.537.971	138.537.971	138.537.971	138.537.971
4650	Keselamatan Transportasi Jabodetabek			24.034.788		24.034.788	24.034.788	24.034.788	24.034.788
4651	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek		29.867.442	65.709.785		95.577.227	95.577.227	95.577.227	95.577.227
022.13.WA	Program Dukungan Manajemen	25.189.700	53.886.807	7.087.500		86.164.007	86.164.007	86.164.007	86.164.007
4617	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek		5.776.770			5.776.770	5.776.770	5.776.770	5.776.770
4618	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Jabodetabek	25.189.700	39.321.931	7.087.500		71.599.131	71.599.131	71.599.131	71.599.131
4619	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek		6.165.750			6.165.750	6.165.750	6.165.750	6.165.750
4620	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek		2.622.356			2.622.356	2.622.356	2.622.356	2.622.356
JUMLAH RM						33.863.996.266			
JUMLAH PLN						807.116.574			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						3.794.796.026			
JUMLAH BLU						1.530.832.549			
JUMLAH PBS						5.667.299.726			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25.408.866.802	32.082.458.257	4.941.639.021	19.101.037.000	81.534.001.080	82.899.020.395	84.094.867.523	85.328.428.860
023.01	Sekretariat Jenderal	10.126.012.882	2.646.598.358	158.817.518	19.078.839.500	32.010.268.258	32.849.717.182	33.714.349.825	34.604.921.762
10	PENDIDIKAN	10.126.012.882	2.646.598.358	158.817.518	19.078.839.500	32.010.268.258	32.849.717.182	33.714.349.825	34.604.921.762
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		88.113.951	11.886.049		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi		88.113.951	11.886.049		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
4472	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi		88.113.951	11.886.049		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	10.112.852.673	2.530.708.120	144.498.969	19.078.839.500	31.866.899.262	32.705.451.618	33.569.160.801	34.458.781.553
023.01.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		239.356.678	1.995.831	9.628.223.300	9.869.575.809	10.158.768.108	10.456.636.172	10.763.440.286
4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah		239.356.678	1.995.831	9.628.223.300	9.869.575.809	10.158.768.108	10.456.636.172	10.763.440.286
023.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.299.592.200	704.031.200	19.451.200		8.023.074.600	8.241.960.640	8.467.413.262	8.699.629.471
4464	Layanan Pembiayaan Pendidikan Kesejahteraan Guru Non PNS	7.299.592.200	3.533.642			7.303.125.842	7.522.011.882	7.747.464.504	7.979.680.713
6393	Kebijakan Penguatan Karakter		88.064.388			88.064.388	88.064.388	88.064.388	88.064.388
6394	Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran		280.633.853	19.451.200		300.085.053	300.085.053	300.085.053	300.085.053
6395	Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara		35.707.559			35.707.559	35.707.559	35.707.559	35.707.559
6396	Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik		296.091.758			296.091.758	296.091.758	296.091.758	296.091.758

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi		149.368.293	300.000	9.450.616.200	9.600.284.493	9.902.814.058	10.214.419.506	10.535.373.125
4469	Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi		149.368.293	300.000	9.450.616.200	9.600.284.493	9.902.814.058	10.214.419.506	10.535.373.125
023.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.813.260.473	1.437.951.949	122.751.938		4.373.964.360	4.401.908.812	4.430.691.861	4.460.338.671
1981	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum	4.635.227	29.745.008	821.178		35.201.413	36.212.147	37.253.197	38.325.490
1982	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara	8.985.576	32.576.485	362.600		41.924.661	43.125.704	44.362.777	45.637.000
1983	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara	8.965.305	137.231.550	1.555.992		147.752.847	153.140.435	156.629.695	160.223.644
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	10.543.766	84.805.162	2.191.708		97.540.636	100.304.533	102.121.393	103.992.792
1985	Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian dan Pengadaan Barang dan Jasa	132.008.915	198.054.027	61.646.211		391.709.153	391.745.793	396.445.494	401.286.206
1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	7.681.979	330.580.643	6.532.893		344.795.515	350.778.036	355.368.236	360.096.187
1991	Penyediaan Data dan Statistik serta Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan	29.735.577	200.524.296	28.159.374		258.419.247	262.616.691	266.940.106	271.393.250
4079	Pengelolaan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara		47.635.942	1.974.499		49.610.441	49.610.441	49.610.441	49.610.441
4265	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	2.879.784	20.844.525	901.385		24.625.694	24.762.600	24.903.613	25.048.862

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4267	Pengelolaan Pengembangan Prestasi Satuan Pendidikan dan Peserta Didik	3.553.696	8.904.664	2.161.718		14.620.078	14.771.090	14.926.632	15.086.847
4268	Pengelolaan Kebijakan Penguatan Karakter	5.943.537	6.993.647	869.380		13.806.564	14.027.685	14.255.440	14.490.031
4269	Layanan Pembiayaan Pendidikan	6.036.328	166.560.735	4.625.000		177.222.063	181.423.405	185.750.788	190.208.004
5624	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8.751.154	88.431.810	10.950.000		108.132.964	110.787.168	113.520.965	116.336.833
6392	Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi	2.583.539.629	85.063.455			2.668.603.084	2.668.603.084	2.668.603.084	2.668.603.084
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	13.160.209	27.776.287	2.432.500		43.368.996	44.265.564	45.189.024	46.140.209
023.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.160.209	27.776.287	2.432.500		43.368.996	44.265.564	45.189.024	46.140.209
5173	Peningkatan Sensor Film	13.160.209	27.776.287	2.432.500		43.368.996	44.265.564	45.189.024	46.140.209
023.02	Inspektorat Jenderal	69.071.048	132.557.919	4.498.434		206.127.401	212.311.124	218.680.342	225.240.766
10	PENDIDIKAN	69.071.048	132.557.919	4.498.434		206.127.401	212.311.124	218.680.342	225.240.766
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	69.071.048	132.557.919	4.498.434		206.127.401	212.311.124	218.680.342	225.240.766
023.02.WA	Program Dukungan Manajemen	69.071.048	132.557.919	4.498.434		206.127.401	212.311.124	218.680.342	225.240.766
1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I		19.558.453			19.558.453	20.145.193	20.749.535	21.372.023
1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II		19.112.682			19.112.682	19.686.048	20.276.611	20.884.925
1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III		19.114.355			19.114.355	19.687.783	20.278.391	20.886.744
1996	Penguatan Audit Investigasi		9.351.900			9.351.900	9.632.450	9.921.416	10.219.060

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	69.071.048	45.319.260	4.498.434		118.888.742	122.455.355	126.128.970	129.912.828
4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV		20.101.269			20.101.269	20.704.295	21.325.419	21.965.186
023.03	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	707.774.215	3.891.089.182	71.307.457	14.197.500	4.684.368.354	4.824.898.004	4.969.642.067	5.118.730.503
10	PENDIDIKAN	707.774.215	3.891.089.182	71.307.457	14.197.500	4.684.368.354	4.824.898.004	4.969.642.067	5.118.730.503
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		400.853.482			400.853.482	412.879.022	425.265.292	438.023.252
023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		184.688.070			184.688.070	190.228.692	195.935.523	201.813.588
4272	Pembinaan PAUD		184.688.070			184.688.070	190.228.692	195.935.523	201.813.588
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		216.165.412			216.165.412	222.650.330	229.329.769	236.209.664
4459	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		216.165.412			216.165.412	222.650.330	229.329.769	236.209.664
10.02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	707.774.215	3.278.587.777	71.307.457	14.197.500	4.071.866.949	4.194.021.738	4.319.839.799	4.449.434.113
023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		1.799.605.168	235.000	14.197.500	1.814.037.668	1.868.458.634	1.924.512.187	1.982.247.516
2000	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama		715.128.295			715.128.295	736.582.125	758.679.566	781.439.937
2003	Pembinaan Sekolah Dasar		577.451.773		6.300.000	583.751.773	601.264.285	619.302.160	637.881.234
5626	Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus		251.091.402	235.000	4.400.000	255.726.402	263.398.105	271.299.945	279.438.912
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas		255.933.698		3.497.500	259.431.198	267.214.119	275.230.516	283.487.433

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		1.045.274.147			1.045.274.147	1.076.632.035	1.108.929.352	1.142.196.605
4460	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar		220.431.266			220.431.266	227.044.107	233.855.275	240.870.965
4461	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama		220.073.211			220.073.211	226.675.374	233.475.519	240.479.751
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas		604.769.670			604.769.670	622.912.554	641.598.558	660.845.889
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen	707.774.215	433.708.462	71.072.457		1.212.555.134	1.248.931.069	1.286.398.260	1.324.989.992
2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	707.774.215	433.708.462	71.072.457		1.212.555.134	1.248.931.069	1.286.398.260	1.324.989.992
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		211.647.923			211.647.923	217.997.244	224.536.976	231.273.138
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		211.647.923			211.647.923	217.997.244	224.536.976	231.273.138
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Atas		112.749.942			112.749.942	116.132.377	119.616.244	123.204.764
4463	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus		98.897.981			98.897.981	101.864.867	104.920.732	108.068.374
023.11	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan	127.220.891	659.325.285	74.364.130		860.910.306	886.737.165	913.338.756	940.738.834
10	PENDIDIKAN	127.220.891	659.325.285	74.364.130		860.910.306	886.737.165	913.338.756	940.738.834
10.09	LITBANG PENDIDIKAN	127.220.891	659.325.285	74.364.130		860.910.306	886.737.165	913.338.756	940.738.834
023.11.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		551.717.829	45.233.388		596.951.217	612.579.079	630.956.098	649.884.712
2027	Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan		106.624.943	43.768.388		150.393.331	152.671.618	157.251.695	161.969.229

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2029	Penyediaan Informasi Asesmen dan Pembelajaran		157.578.158			157.578.158	162.305.440	167.174.514	172.189.748
2031	Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi		203.118.631			203.118.631	209.212.168	215.488.487	221.953.134
5632	Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan		35.463.762	160.000		35.623.762	36.692.466	37.793.219	38.927.013
5633	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi		48.932.335	1.305.000		50.237.335	51.697.387	53.248.183	54.845.588
023.11.WA	Program Dukungan Manajemen	127.220.891	107.607.456	29.130.742		263.959.089	274.158.086	282.382.658	290.854.122
2032	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud	127.220.891	107.607.456	29.130.742		263.959.089	274.158.086	282.382.658	290.854.122
023.13	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	181.327.196	375.357.738	29.839.833		586.524.767	595.900.229	605.557.028	615.503.954
10	PENDIDIKAN	181.327.196	375.357.738	29.839.833		586.524.767	595.900.229	605.557.028	615.503.954
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	181.327.196	375.357.738	29.839.833		586.524.767	595.900.229	605.557.028	615.503.954
023.13.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		254.956.709			254.956.709	258.587.234	262.326.626	266.178.532
2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra		72.747.820			72.747.820	73.910.316	75.107.690	76.341.018
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra		105.448.951			105.448.951	106.996.544	108.590.565	110.232.432
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah		76.759.938			76.759.938	77.680.374	78.628.371	79.605.082
023.13.WA	Program Dukungan Manajemen	181.327.196	120.401.029	29.839.833		331.568.058	337.312.995	343.230.402	349.325.422
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	181.327.196	120.401.029	29.839.833		331.568.058	337.312.995	343.230.402	349.325.422

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023.15	Ditjen Kebudayaan	387.680.548	1.076.379.661	177.757.511		1.641.817.720	1.753.295.953	1.790.707.494	1.824.134.094
10	PENDIDIKAN	387.680.548	1.076.379.661	177.757.511		1.641.817.720	1.753.295.953	1.790.707.494	1.824.134.094
10.11	PENGEMBANGAN BUDAYA	387.680.548	1.071.353.921	177.757.511		1.636.791.980	1.748.270.213	1.785.681.754	1.819.108.354
023.15.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		744.863.985	82.856.360		827.720.345	928.901.024	959.186.499	983.158.523
4274	Pengembangan Film, Musik dan Media Baru		101.075.275			101.075.275	101.075.275	101.075.275	101.075.275
4275	Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan		72.265.963			72.265.963	72.265.963	72.265.963	72.265.963
4276	Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan		254.695.435			254.695.435	323.737.206	332.612.211	341.487.205
4277	Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan		49.747.083			49.747.083	49.747.083	49.747.083	49.747.083
5178	Pengelolaan Permuseuman		36.664.902	51.300.783		87.965.685	87.965.685	87.965.685	87.965.685
5179	Pelestarian Nilai Budaya		78.590.166			78.590.166	110.729.074	132.139.544	147.236.574
5181	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala		116.149.161	31.555.577		147.704.738	147.704.738	147.704.738	147.704.738
5184	Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat		35.676.000			35.676.000	35.676.000	35.676.000	35.676.000
023.15.WA	Program Dukungan Manajemen	387.680.548	326.489.936	94.901.151		809.071.635	819.369.189	826.495.255	835.949.831
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	387.680.548	326.489.936	94.901.151		809.071.635	819.369.189	826.495.255	835.949.831
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		5.025.740			5.025.740	5.025.740	5.025.740	5.025.740

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023.15.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan		5.025.740			5.025.740	5.025.740	5.025.740	5.025.740
5172	Pengembangan Galeri Nasional		5.025.740			5.025.740	5.025.740	5.025.740	5.025.740
023.16	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	267.003.672	2.531.840.466	64.303.315		2.863.147.453	2.970.025.034	2.978.076.587	3.005.997.103
10	PENDIDIKAN	267.003.672	2.531.840.466	64.303.315		2.863.147.453	2.970.025.034	2.978.076.587	3.005.997.103
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	267.003.672	2.531.840.466	64.303.315		2.863.147.453	2.970.025.034	2.978.076.587	3.005.997.103
023.16.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		2.176.134.718			2.176.134.718	2.283.012.299	2.291.063.852	2.318.984.368
4271	Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan		796.899.517			796.899.517	889.967.819	891.535.731	905.646.923
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1.041.551.555			1.041.551.555	1.055.360.834	1.061.844.475	1.075.653.799
5636	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD		91.220.115			91.220.115	91.220.115	91.220.115	91.220.115
5637	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dikdas		139.328.847			139.328.847	139.328.847	139.328.847	139.328.847
5638	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		107.134.684			107.134.684	107.134.684	107.134.684	107.134.684
023.16.WA	Program Dukungan Manajemen	267.003.672	355.705.748	64.303.315		687.012.735	687.012.735	687.012.735	687.012.735
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	267.003.672	355.705.748	64.303.315		687.012.735	687.012.735	687.012.735	687.012.735
023.17	Ditjen Pendidikan Tinggi	11.648.079.651	16.092.006.867	3.522.872.570		31.262.959.088	31.383.739.434	31.477.600.616	31.561.728.499
10	PENDIDIKAN	11.648.079.651	16.092.006.867	3.522.872.570		31.262.959.088	31.383.739.434	31.477.600.616	31.561.728.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	11.648.079.651	16.092.006.867	3.522.872.570		31.262.959.088	31.383.739.434	31.477.600.616	31.561.728.499
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi		14.987.715.781	3.517.232.266		18.504.948.047	18.622.511.877	18.707.795.677	18.785.490.523
4258	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan		385.624.485			385.624.485	398.892.248	414.478.439	430.791.812
4259	Pengembangan Kelembagaan		180.655.200	1.000.000		181.655.200	201.490.026	210.795.867	219.158.476
4260	Peningkatan Kualitas Sumber Daya		319.156.000			319.156.000	386.848.242	412.043.104	441.113.713
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri		4.033.057.516	150.117.246		4.183.174.762	4.190.988.170	4.202.102.804	4.213.843.175
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi		10.069.222.580	3.366.115.020		13.435.337.600	13.444.293.191	13.468.375.463	13.480.583.347
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	11.648.079.651	1.104.291.086	5.640.304		12.758.011.041	12.761.227.557	12.769.804.939	12.776.237.976
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	11.648.079.651	1.104.291.086	5.640.304		12.758.011.041	12.761.227.557	12.769.804.939	12.776.237.976
023.18	Ditjen Pendidikan Vokasi	1.894.696.699	4.677.302.781	837.878.253	8.000.000	7.417.877.733	7.422.396.270	7.426.914.808	7.431.433.345
10	PENDIDIKAN	1.894.696.699	4.677.302.781	837.878.253	8.000.000	7.417.877.733	7.422.396.270	7.426.914.808	7.431.433.345
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		1.706.685.831	18.000.000	8.000.000	1.732.685.831	1.737.204.368	1.741.722.906	1.746.241.443
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		1.706.685.831	18.000.000	8.000.000	1.732.685.831	1.737.204.368	1.741.722.906	1.746.241.443
4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan		1.706.685.831	18.000.000	8.000.000	1.732.685.831	1.737.204.368	1.741.722.906	1.746.241.443
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		357.345.669			357.345.669	357.345.669	357.345.669	357.345.669
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		357.345.669			357.345.669	357.345.669	357.345.669	357.345.669

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan		357.345.669			357.345.669	357.345.669	357.345.669	357.345.669
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	1.894.696.699	2.407.004.036	819.878.253		5.121.578.988	5.121.578.988	5.121.578.988	5.121.578.988
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		1.604.998.361	768.495.285		2.373.493.646	2.373.493.646	2.373.493.646	2.373.493.646
4263	Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi		449.386.157			449.386.157	449.386.157	449.386.157	449.386.157
4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri		260.719.815			260.719.815	260.719.815	260.719.815	260.719.815
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi		289.882.214	38.253.969		328.136.183	328.136.183	328.136.183	328.136.183
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		605.010.175	730.241.316		1.335.251.491	1.335.251.491	1.335.251.491	1.335.251.491
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen	1.894.696.699	802.005.675	51.382.968		2.748.085.342	2.748.085.342	2.748.085.342	2.748.085.342
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	1.894.696.699	802.005.675	51.382.968		2.748.085.342	2.748.085.342	2.748.085.342	2.748.085.342
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		206.267.245			206.267.245	206.267.245	206.267.245	206.267.245
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		206.267.245			206.267.245	206.267.245	206.267.245	206.267.245
4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi		206.267.245			206.267.245	206.267.245	206.267.245	206.267.245
JUMLAH RM						67.548.643.761			
JUMLAH PLN						995.587.939			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 023
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RMP						92.572.910			
JUMLAH PNBP						2.426.057.510			
JUMLAH BLU						8.930.658.203			
JUMLAH PBS						1.540.480.757			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.647.938.679	26.114.258.847	3.750.215.974	48.787.200.000	84.299.613.500	86.211.356.650	88.198.814.156	90.255.065.033
024.01	Sekretariat Jenderal	1.047.376.167	722.704.162	122.801.060	48.787.200.000	50.680.081.389	52.154.834.607	53.673.830.398	55.238.396.230
07	KESEHATAN	1.047.376.167	722.704.162	122.801.060	48.787.200.000	50.680.081.389	52.154.834.607	53.673.830.398	55.238.396.230
07.90	KESEHATAN LAINNYA	1.047.376.167	722.704.162	122.801.060	48.787.200.000	50.680.081.389	52.154.834.607	53.673.830.398	55.238.396.230
024.01.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				48.787.200.000	48.787.200.000	50.250.816.000	51.758.340.480	53.311.090.694
5610	Pembiayaan JKN/KIS				48.787.200.000	48.787.200.000	50.250.816.000	51.758.340.480	53.311.090.694
024.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.047.376.167	722.704.162	122.801.060		1.892.881.389	1.904.018.607	1.915.489.918	1.927.305.536
2033	Perumusan Produk Hukum dan Organisasi		8.494.945	503.860		8.998.805	9.228.570	9.465.224	9.709.003
2034	Pembinaan Administrasi Kepegawaian		24.489.121	725.428		25.214.549	25.214.549	25.214.549	25.214.549
2035	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara		12.668.153	350.000		13.018.153	13.374.796	13.742.116	14.120.492
2036	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan		73.587.870	2.804.120		76.391.990	77.691.297	79.029.574	80.408.024
2037	Pengelolaan Ketatausahaan Kementerian	1.047.376.167	122.103.930	9.295.220		1.178.775.317	1.186.515.937	1.194.488.771	1.202.700.813
2038	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		80.143.486	104.220.189		184.363.675	184.614.508	184.872.868	185.138.989
2040	Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri		9.444.091	322.000		9.766.091	9.868.764	9.974.522	10.083.459
2041	Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		267.809.158	150.000		267.959.158	268.034.744	268.112.600	268.192.796
2042	Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat		31.226.273	500.000		31.726.273	31.927.003	32.133.750	32.346.707

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2044	Pengelolaan Krisis Kesehatan		29.987.512	1.241.000		31.228.512	31.838.919	32.467.651	33.115.252
2049	Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia		39.354.936	2.236.243		41.591.179	41.629.751	41.669.479	41.710.401
4398	Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		16.336.572	351.000		16.687.572	16.825.896	16.968.370	17.115.130
5831	Peningkatan Analisis Determinan Kesehatan		7.058.115	102.000		7.160.115	7.253.873	7.350.444	7.449.921
024.02	Inspektorat Jenderal	44.876.244	32.914.889	11.329.600		89.120.733	91.794.304	94.548.047	97.384.482
07	KESEHATAN	44.876.244	32.914.889	11.329.600		89.120.733	91.794.304	94.548.047	97.384.482
07.90	KESEHATAN LAINNYA	44.876.244	32.914.889	11.329.600		89.120.733	91.794.304	94.548.047	97.384.482
024.02.WA	Program Dukungan Manajemen	44.876.244	32.914.889	11.329.600		89.120.733	91.794.304	94.548.047	97.384.482
2052	Peningkatan Pengawasan Internal atas Penerapan Tata Kelola - Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal		17.490.196			17.490.196	18.014.869	18.555.264	19.111.916
2056	Peningkatan Pengawasan melalui Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat		3.038.070			3.038.070	3.129.207	3.223.081	3.319.774
2073	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Inspektorat Jenderal	44.876.244	12.386.623	11.329.600		68.592.467	70.650.228	72.769.702	74.952.792
024.03	Ditjen Kesehatan Masyarakat	78.150.875	1.892.109.454	10.384.965		1.980.645.294	2.036.069.923	2.086.273.616	2.148.286.943
07	KESEHATAN	78.150.875	1.892.109.454	10.384.965		1.980.645.294	2.036.069.923	2.086.273.616	2.148.286.943
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		1.776.282.067	1.889.000		1.778.171.067	1.833.425.268	1.883.424.172	1.945.266.999
024.03.DD	Program Kesehatan Masyarakat		1.776.282.067	1.889.000		1.778.171.067	1.833.425.268	1.883.424.172	1.945.266.999

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2080	Pembinaan Gizi Masyarakat		749.167.553	1.064.000		750.231.553	776.988.213	804.348.746	832.354.271
2089	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga		89.575.033			89.575.033	95.849.603	102.136.166	108.440.284
5832	Pembinaan Kesehatan Keluarga		350.655.991			350.655.991	357.203.335	363.911.335	370.732.501
5833	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		256.614.892			256.614.892	261.624.199	266.645.955	270.233.921
5834	Penyehatan Lingkungan		330.268.598	825.000		331.093.598	341.759.918	346.381.970	363.506.022
07.90	KESEHATAN LAINNYA	78.150.875	115.827.387	8.495.965		202.474.227	202.644.655	202.849.444	203.019.944
024.03.WA	Program Dukungan Manajemen	78.150.875	115.827.387	8.495.965		202.474.227	202.644.655	202.849.444	203.019.944
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	78.150.875	115.827.387	8.495.965		202.474.227	202.644.655	202.849.444	203.019.944
024.04	Ditjen Pelayanan Kesehatan	2.560.218.741	13.443.051.435	2.443.829.433		18.447.099.609	18.564.800.617	18.686.033.013	18.810.902.552
07	KESEHATAN	2.560.218.741	13.443.051.435	2.443.829.433		18.447.099.609	18.564.800.617	18.686.033.013	18.810.902.552
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN		259.207.024	15.770.317		274.977.341	275.700.996	276.446.372	277.214.159
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		259.207.024	15.770.317		274.977.341	275.700.996	276.446.372	277.214.159
2087	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer		68.320.642			68.320.642	68.424.670	68.531.825	68.642.203
2090	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		144.448.400	15.770.317		160.218.717	160.608.365	161.009.703	161.423.085
5835	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional		10.088.806			10.088.806	10.129.364	10.171.133	10.214.174
5836	Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan		36.349.176			36.349.176	36.538.597	36.733.711	36.934.697

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.90	KESEHATAN LAINNYA	2.560.218.741	13.183.844.411	2.428.059.116		18.172.122.268	18.289.099.621	18.409.586.641	18.533.688.393
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		12.221.639.547	1.849.328.323		14.070.967.870	14.084.471.090	14.098.379.410	14.112.704.984
2051	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		222.565.495	448.851.000		671.416.495	684.919.715	698.828.035	713.153.609
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes		11.999.074.052	1.400.477.323		13.399.551.375	13.399.551.375	13.399.551.375	13.399.551.375
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.560.218.741	962.204.864	578.730.793		4.101.154.398	4.204.628.531	4.311.207.231	4.420.983.409
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	2.560.218.741	962.204.864	578.730.793		4.101.154.398	4.204.628.531	4.311.207.231	4.420.983.409
024.05	Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit	561.072.909	3.025.381.754	336.700.492		3.923.155.155	4.018.468.946	4.116.642.791	4.217.763.662
07	KESEHATAN	561.072.909	3.025.381.754	336.700.492		3.923.155.155	4.018.468.946	4.116.642.791	4.217.763.662
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN		52.178.904	660.000		52.838.904	54.022.922	55.242.463	56.498.613
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		52.178.904	660.000		52.838.904	54.022.922	55.242.463	56.498.613
5837	Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA		52.178.904	660.000		52.838.904	54.022.922	55.242.463	56.498.613
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		2.644.417.725	246.485.424		2.890.903.149	2.954.490.318	3.019.985.240	3.087.446.194
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		2.644.417.725	246.485.424		2.890.903.149	2.954.490.318	3.019.985.240	3.087.446.194
2058	Surveilans dan Karantina Kesehatan		329.351.347	5.288.800		334.640.147	334.907.494	335.182.901	335.466.604
2059	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik		179.671.496	2.039.980		181.711.476	184.057.008	186.472.904	188.961.368
2060	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung		1.876.453.443			1.876.453.443	1.927.911.777	1.980.913.851	2.035.506.168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2061	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		118.590.968	73.550		118.664.518	119.576.457	120.515.674	121.483.220
4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah		97.606.855	141.229.778		238.836.633	243.092.840	247.476.824	251.992.915
4250	Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		42.743.616	97.853.316		140.596.932	144.944.742	149.423.086	154.035.919
07.90	KESEHATAN LAINNYA	561.072.909	328.785.125	89.555.068		979.413.102	1.009.955.706	1.041.415.088	1.073.818.855
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	561.072.909	328.785.125	89.555.068		979.413.102	1.009.955.706	1.041.415.088	1.073.818.855
4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	561.072.909	328.785.125	89.555.068		979.413.102	1.009.955.706	1.041.415.088	1.073.818.855
024.07	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	40.443.245	3.270.294.359	56.464.235		3.367.201.839	3.456.070.527	3.588.960.797	3.721.879.948
07	KESEHATAN	40.443.245	3.270.294.359	56.464.235		3.367.201.839	3.456.070.527	3.588.960.797	3.721.879.948
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		3.215.284.113	52.238.964		3.267.523.077	3.356.319.985	3.489.138.472	3.621.985.840
024.07.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		3.215.284.113	52.238.964		3.267.523.077	3.356.319.985	3.489.138.472	3.621.985.840
2064	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian		10.043.045	430.000		10.473.045	10.658.186	10.846.279	11.048.814
2065	Peningkatan Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan		3.151.731.629	6.203.444		3.157.935.073	3.289.155.479	3.420.375.904	3.551.596.342
2067	Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian		19.924.473	839.122		20.763.595	21.336.550	21.912.161	22.490.393
5838	Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		21.755.779	198.000		21.953.779	22.508.534	23.075.443	23.650.383

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5839	Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		11.829.187	44.568.398		56.397.585	12.661.236	12.928.685	13.199.908
07.90	KESEHATAN LAINNYA	40.443.245	55.010.246	4.225.271		99.678.762	99.750.542	99.822.325	99.894.108
024.07.WA	Program Dukungan Manajemen	40.443.245	55.010.246	4.225.271		99.678.762	99.750.542	99.822.325	99.894.108
4814	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	40.443.245	55.010.246	4.225.271		99.678.762	99.750.542	99.822.325	99.894.108
024.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	188.818.796	430.442.409	199.409.790		818.670.995	839.578.724	845.002.747	853.410.865
07	KESEHATAN	188.818.796	430.442.409	199.409.790		818.670.995	839.578.724	845.002.747	853.410.865
07.05	LITBANG KESEHATAN		267.212.088	187.461.131		454.673.219	475.580.948	481.004.971	489.413.089
024.11.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		267.212.088	187.461.131		454.673.219	475.580.948	481.004.971	489.413.089
2069	Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan		109.009.170	110.677.418		219.686.588	222.538.920	222.199.081	226.126.424
2070	Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat		63.010.674	26.592.900		89.603.574	94.336.858	96.525.238	100.852.485
2071	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan		50.084.028	35.151.313		85.235.341	87.919.417	89.575.021	89.575.021
2072	Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan		45.108.216	15.039.500		60.147.716	70.785.753	72.705.631	72.859.159
07.90	KESEHATAN LAINNYA	188.818.796	163.230.321	11.948.659		363.997.776	363.997.776	363.997.776	363.997.776

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	188.818.796	163.230.321	11.948.659		363.997.776	363.997.776	363.997.776	363.997.776
4816	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	188.818.796	163.230.321	11.948.659		363.997.776	363.997.776	363.997.776	363.997.776
024.12	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	1.126.981.702	3.297.360.385	569.296.399		4.993.638.486	5.049.739.002	5.107.522.747	5.167.040.351
07	KESEHATAN	1.126.981.702	1.491.992.645	71.924.783		2.690.899.130	2.744.231.668	2.799.164.372	2.855.745.294
07.90	KESEHATAN LAINNYA	1.126.981.702	1.491.992.645	71.924.783		2.690.899.130	2.744.231.668	2.799.164.372	2.855.745.294
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		450.664.858	1.850.000		452.514.858	458.205.373	464.066.560	470.103.648
2075	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan		235.179.530	760.000		235.939.530	238.869.122	241.886.569	244.994.586
2078	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan		193.320.025	240.000		193.560.025	195.914.126	198.338.848	200.836.316
2084	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan		22.165.303	850.000		23.015.303	23.422.125	23.841.143	24.272.746
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		291.429.405	400.000		291.829.405	291.972.058	292.118.981	292.270.328
2076	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan		291.429.405	400.000		291.829.405	291.972.058	292.118.981	292.270.328
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.126.981.702	749.898.382	69.674.783		1.946.554.867	1.994.054.237	2.042.978.831	2.093.371.318
4399	Tata Kelola SDM		68.674.309			68.674.309	70.659.345	72.703.931	74.809.867
4817	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.126.981.702	681.224.073	69.674.783		1.877.880.558	1.923.394.892	1.970.274.900	2.018.561.451

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	PENDIDIKAN		1.805.367.740	497.371.616		2.302.739.356	2.305.507.334	2.308.358.375	2.311.295.057
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		1.805.367.740	497.371.616		2.302.739.356	2.305.507.334	2.308.358.375	2.311.295.057
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		1.805.367.740	497.371.616		2.302.739.356	2.305.507.334	2.308.358.375	2.311.295.057
2077	Pendidikan SDM Kesehatan		75.177.697	2.353.925		77.531.622	78.048.750	78.581.381	79.130.017
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi		1.067.293.797	494.717.691		1.562.011.488	1.564.262.338	1.566.580.748	1.568.968.794
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan		662.896.246	300.000		663.196.246	663.196.246	663.196.246	663.196.246
JUMLAH RM						69.476.024.864			
JUMLAH PLN						450.597.920			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						409.153.834			
JUMLAH BLU						13.963.836.882			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025	KEMENTERIAN AGAMA	38.369.274.719	21.387.315.575	5.033.913.178	2.170.883.350	66.961.386.822	67.335.320.407	68.090.671.496	68.868.701.326
025.01	Sekretariat Jenderal	1.253.776.820	852.245.402	174.024.773		2.280.046.995	2.334.133.657	2.390.144.137	2.447.837.582
09	AGAMA	1.253.248.820	847.857.577	174.024.773		2.275.131.170	2.329.165.009	2.385.121.082	2.442.758.487
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.836.000	100.484.199	276.250		102.596.449	106.264.176	107.063.205	107.886.322
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.836.000	100.484.199	276.250		102.596.449	106.264.176	107.063.205	107.886.322
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	1.836.000	2.370.000			4.206.000	4.220.479	4.235.392	4.250.754
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		98.114.199	276.250		98.390.449	102.043.697	102.827.813	103.635.568
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	1.251.412.820	747.373.378	173.748.523		2.172.534.721	2.222.900.833	2.278.057.877	2.334.872.165
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.251.412.820	747.373.378	173.748.523		2.172.534.721	2.222.900.833	2.278.057.877	2.334.872.165
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		12.468.982	208.000		12.676.982	12.776.199	12.799.432	12.823.363
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian		32.988.409	606.150		33.594.559	34.186.852	34.212.117	34.238.143
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.251.412.820	23.479.990	628.867		1.275.521.677	1.288.197.570	1.325.826.298	1.364.584.339
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		18.626.428	167.000		18.793.428	19.227.377	19.237.375	19.247.677
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan		37.466.705	952.847		38.419.552	38.831.814	38.855.595	38.880.098
2103	Pembinaan Administrasi Umum		597.039.131	167.984.088		765.023.219	800.874.560	818.307.605	836.265.704
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		25.303.733	3.201.571		28.505.304	28.806.461	28.819.455	28.832.841
10	PENDIDIKAN	528.000	4.387.825			4.915.825	4.968.648	5.023.055	5.079.095

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	528.000	4.387.825			4.915.825	4.968.648	5.023.055	5.079.095
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	528.000	4.387.825			4.915.825	4.968.648	5.023.055	5.079.095
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	528.000	4.387.825			4.915.825	4.968.648	5.023.055	5.079.095
025.02	Inspektorat Jenderal	51.227.430	113.458.621	5.438.904		170.124.955	170.814.612	171.524.962	172.256.624
09	AGAMA	51.227.430	54.103.489	5.438.904		110.769.823	110.875.490	110.984.327	111.096.429
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	51.227.430	54.103.489	5.438.904		110.769.823	110.875.490	110.984.327	111.096.429
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	51.227.430	54.103.489	5.438.904		110.769.823	110.875.490	110.984.327	111.096.429
2115	PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT WILAYAH I - IV		20.902.790			20.902.790	20.148.118	20.166.203	20.184.830
2119	PENGAWASAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT INVESTIGASI		3.361.890			3.361.890	3.449.999	3.540.751	3.634.226
2120	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	51.227.430	29.838.809	5.438.904		86.505.143	87.277.373	87.277.373	87.277.373
10	PENDIDIKAN		59.355.132			59.355.132	59.939.122	60.540.635	61.160.195
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		59.355.132			59.355.132	59.939.122	60.540.635	61.160.195
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen		59.355.132			59.355.132	59.939.122	60.540.635	61.160.195
2113	PENGAWASAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN		59.355.132			59.355.132	59.939.122	60.540.635	61.160.195
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	4.145.412.094	1.323.312.298	288.387.652		5.757.112.044	5.503.379.487	5.611.919.972	5.723.716.772

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	AGAMA	4.145.412.094	1.323.312.298	288.387.652		5.757.112.044	5.503.379.487	5.611.919.972	5.723.716.772
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	540.000.000	225.486.156	2.496.569		767.982.725	647.518.370	647.518.370	647.518.370
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	540.000.000	225.486.156	2.496.569		767.982.725	647.518.370	647.518.370	647.518.370
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		67.304.261	2.007.050		69.311.311	29.790.370	29.790.370	29.790.370
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	540.000.000	158.181.895	489.519		698.671.414	617.728.000	617.728.000	617.728.000
09.03	LITBANG AGAMA	3.605.412.094	397.713.219	7.895.141		4.011.020.454	4.026.256.749	4.134.797.234	4.246.594.034
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	3.605.412.094	397.713.219	7.895.141		4.011.020.454	4.026.256.749	4.134.797.234	4.246.594.034
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3.605.412.094	397.713.219	7.895.141		4.011.020.454	4.026.256.749	4.134.797.234	4.246.594.034
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA		700.112.923	277.995.942		978.108.865	829.604.368	829.604.368	829.604.368
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		700.112.923	277.995.942		978.108.865	829.604.368	829.604.368	829.604.368
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		554.721.830	256.770.538		811.492.368	763.875.368	763.875.368	763.875.368
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		145.391.093	21.225.404		166.616.497	65.729.000	65.729.000	65.729.000
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	29.681.019.207	16.807.536.055	3.975.715.954	2.059.724.150	52.523.995.366	52.985.336.552	53.460.526.364	53.949.982.454
10	PENDIDIKAN	29.681.019.207	16.807.536.055	3.975.715.954	2.059.724.150	52.523.995.366	52.985.336.552	53.460.526.364	53.949.982.454
10.02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		10.097.236.387	1.755.352.473	1.302.984.050	13.155.572.910	13.200.575.810	13.201.206.170	13.201.855.440
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		10.097.236.387	1.755.352.473	1.302.984.050	13.155.572.910	13.200.575.810	13.201.206.170	13.201.855.440

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		10.097.236.387	1.755.352.473	1.302.984.050	13.155.572.910	13.200.575.810	13.201.206.170	13.201.855.440
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	196.840.015	3.575.254.520	2.171.894.861	631.200.200	6.575.189.596	6.575.336.301	6.575.487.403	6.575.643.053
025.04.DK	Program Pendidikan Tinggi	196.840.015	3.575.254.520	2.171.894.861	631.200.200	6.575.189.596	6.575.336.301	6.575.487.403	6.575.643.053
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	196.840.015	3.515.948.520	2.171.894.861	631.200.200	6.515.883.596	6.516.030.301	6.516.181.403	6.516.337.053
4438	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Ma'had Ali		59.306.000			59.306.000	59.306.000	59.306.000	59.306.000
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	504.696.700	790.282.676	175.200	125.539.900	1.420.694.476	1.376.223.165	1.376.243.032	1.376.263.501
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		642.562.206	80.000	125.539.900	768.182.106	723.810.495	723.830.362	723.850.831
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam		642.562.206	80.000	125.539.900	768.182.106	723.810.495	723.830.362	723.850.831
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	504.696.700	147.720.470	95.200		652.512.370	652.412.670	652.412.670	652.412.670
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	435.882.500	114.629.870			550.512.370	550.412.670	550.412.670	550.412.670
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	68.814.200	33.090.600	95.200		102.000.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	28.979.482.492	2.344.762.472	48.293.420		31.372.538.384	31.833.201.276	32.307.589.759	32.796.220.460
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	5.438.179.386	753.011.592	2.837.129		6.194.028.107	6.194.127.807	6.194.127.807	6.194.127.807
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	5.438.179.386	353.165.087			5.791.344.473	5.791.344.473	5.791.344.473	5.791.344.473
4422	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		399.846.505	2.837.129		402.683.634	402.783.334	402.783.334	402.783.334

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	23.541.303.106	1.591.750.880	45.456.291		25.178.510.277	25.639.073.469	26.113.461.952	26.602.092.653
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	23.541.303.106	1.591.750.880	45.456.291		25.178.510.277	25.639.073.469	26.113.461.952	26.602.092.653
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.380.771.505	323.312.618	98.721.971	67.222.400	1.870.028.494	1.907.584.458	1.946.268.165	1.986.113.261
09	AGAMA	161.444.408	123.431.380	746.522		285.622.310	287.605.833	289.648.948	291.753.536
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	108.000.000	88.423.953			196.423.953	196.582.576	196.745.958	196.914.252
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	108.000.000	88.423.953			196.423.953	196.582.576	196.745.958	196.914.252
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	108.000.000	88.423.953			196.423.953	196.582.576	196.745.958	196.914.252
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	53.444.408	35.007.427	746.522		89.198.357	91.023.257	92.902.990	94.839.284
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	53.444.408	35.007.427	746.522		89.198.357	91.023.257	92.902.990	94.839.284
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	53.444.408	35.007.427	746.522		89.198.357	91.023.257	92.902.990	94.839.284
10	PENDIDIKAN	1.219.327.097	199.881.238	97.975.449	67.222.400	1.584.406.184	1.619.978.625	1.656.619.217	1.694.359.725
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	1.174.145.499	179.227.336	97.975.449	67.222.400	1.518.570.684	1.553.926.316	1.590.343.585	1.627.854.060
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		18.660.000	6.518.800	15.175.400	40.354.200	40.354.200	40.354.200	40.354.200
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		18.660.000	6.518.800	15.175.400	40.354.200	40.354.200	40.354.200	40.354.200
025.05.DK	Program Pendidikan Tinggi	17.736.000	83.305.459	74.994.299	52.047.000	228.082.758	228.082.758	228.082.758	228.082.758

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5101	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen	17.736.000	83.305.459	74.994.299	52.047.000	228.082.758	228.082.758	228.082.758	228.082.758
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.156.409.499	77.261.877	16.462.350		1.250.133.726	1.285.489.358	1.321.906.627	1.359.417.102
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.156.409.499	77.261.877	16.462.350		1.250.133.726	1.285.489.358	1.321.906.627	1.359.417.102
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	45.181.598	20.653.902			65.835.500	66.052.309	66.275.632	66.505.665
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	45.181.598	20.653.902			65.835.500	66.052.309	66.275.632	66.505.665
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	45.181.598	20.653.902			65.835.500	66.052.309	66.275.632	66.505.665
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	681.623.136	192.310.952	18.608.210	7.182.000	899.724.298	917.597.307	936.007.803	954.971.455
09	AGAMA	142.602.200	72.263.884	1.749.100		216.615.184	220.061.541	223.611.898	227.269.301
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	48.504.000	42.777.489			91.281.489	91.402.345	91.526.785	91.655.014
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	48.504.000	42.777.489			91.281.489	91.402.345	91.526.785	91.655.014
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	48.504.000	42.777.489			91.281.489	91.402.345	91.526.785	91.655.014
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	94.098.200	29.486.395	1.749.100		125.333.695	128.659.196	132.085.113	135.614.287
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	94.098.200	29.486.395	1.749.100		125.333.695	128.659.196	132.085.113	135.614.287
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	94.098.200	29.486.395	1.749.100		125.333.695	128.659.196	132.085.113	135.614.287
10	PENDIDIKAN	539.020.936	120.047.068	16.859.110	7.182.000	683.109.114	697.535.766	712.395.905	727.702.154

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	510.110.659	75.943.566	16.859.110	7.182.000	610.095.335	624.521.987	639.382.126	654.688.375
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		21.502.964	2.955.000	2.087.000	26.544.964	26.544.964	26.544.964	26.544.964
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		21.502.964	2.955.000	2.087.000	26.544.964	26.544.964	26.544.964	26.544.964
025.06.DK	Program Pendidikan Tinggi	6.195.000	31.396.538	9.815.000	5.095.000	52.501.538	52.501.538	52.501.538	52.501.538
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	6.195.000	31.396.538	9.815.000	5.095.000	52.501.538	52.501.538	52.501.538	52.501.538
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	503.915.659	23.044.064	4.089.110		531.048.833	545.475.485	560.335.624	575.641.873
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	503.915.659	23.044.064	4.089.110		531.048.833	545.475.485	560.335.624	575.641.873
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	28.910.277	44.103.502			73.013.779	73.013.779	73.013.779	73.013.779
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	28.910.277	44.103.502			73.013.779	73.013.779	73.013.779	73.013.779
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	28.910.277	44.103.502			73.013.779	73.013.779	73.013.779	73.013.779
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	484.270.166	260.460.718	28.733.361	30.286.800	803.751.045	819.041.238	834.790.589	851.013.016
09	AGAMA	63.395.728	98.023.372	420.182		161.839.282	163.677.180	165.579.594	167.539.274
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	20.400.000	79.796.042			100.196.042	100.421.656	100.654.016	100.893.376
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	20.400.000	79.796.042			100.196.042	100.421.656	100.654.016	100.893.376
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	20.400.000	79.796.042			100.196.042	100.421.656	100.654.016	100.893.376

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	42.995.728	18.227.330	420.182		61.643.240	63.255.524	64.925.578	66.645.898
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	42.995.728	18.227.330	420.182		61.643.240	63.255.524	64.925.578	66.645.898
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	42.995.728	18.227.330	420.182		61.643.240	63.255.524	64.925.578	66.645.898
10	PENDIDIKAN	420.874.438	162.437.346	28.313.179	30.286.800	641.911.763	655.364.058	669.210.995	683.473.742
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	411.248.546	135.533.593	28.313.179	30.286.800	605.382.118	618.829.913	632.672.215	646.930.188
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		34.532.201		289.800	34.822.001	34.893.816	34.967.783	35.043.969
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		34.532.201		289.800	34.822.001	34.893.816	34.967.783	35.043.969
025.07.DK	Program Pendidikan Tinggi	2.800.325	63.078.097	21.292.278	29.997.000	117.167.700	117.642.875	118.132.289	118.636.449
5104	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	2.800.325	63.078.097	21.292.278	29.997.000	117.167.700	117.642.875	118.132.289	118.636.449
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	408.448.221	37.923.295	7.020.901		453.392.417	466.293.222	479.572.143	493.249.770
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	408.448.221	37.923.295	7.020.901		453.392.417	466.293.222	479.572.143	493.249.770
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	9.625.892	26.903.753			36.529.645	36.534.145	36.538.780	36.543.554
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	9.625.892	26.903.753			36.529.645	36.534.145	36.538.780	36.543.554
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	9.625.892	26.903.753			36.529.645	36.534.145	36.538.780	36.543.554
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	134.739.171	127.971.905	3.482.100	6.468.000	272.661.176	277.499.398	282.483.195	287.617.034

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	AGAMA	22.736.302	52.046.165	2.494.600		77.277.067	77.920.465	78.583.184	79.265.861
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	14.184.000	39.939.039			54.123.039	54.331.816	54.546.870	54.768.450
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	14.184.000	39.939.039			54.123.039	54.331.816	54.546.870	54.768.450
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	14.184.000	39.939.039			54.123.039	54.331.816	54.546.870	54.768.450
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	8.552.302	12.107.126	2.494.600		23.154.028	23.588.649	24.036.314	24.497.411
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	8.552.302	12.107.126	2.494.600		23.154.028	23.588.649	24.036.314	24.497.411
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	8.552.302	12.107.126	2.494.600		23.154.028	23.588.649	24.036.314	24.497.411
10	PENDIDIKAN	112.002.869	75.925.740	987.500	6.468.000	195.384.109	199.578.933	203.900.011	208.351.173
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	95.661.869	58.384.893	987.500	6.468.000	161.502.262	165.230.124	169.070.293	173.026.031
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		28.891.000			28.891.000	29.212.150	29.542.934	29.883.606
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha		28.891.000			28.891.000	29.212.150	29.542.934	29.883.606
025.08.DK	Program Pendidikan Tinggi	1.230.499	7.016.374		6.468.000	14.714.873	14.735.180	14.756.098	14.777.642
5106	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Budha	1.230.499	7.016.374		6.468.000	14.714.873	14.735.180	14.756.098	14.777.642
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	94.431.370	22.477.519	987.500		117.896.389	121.282.794	124.771.261	128.364.783
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	94.431.370	22.477.519	987.500		117.896.389	121.282.794	124.771.261	128.364.783

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	16.341.000	17.540.847			33.881.847	34.348.809	34.829.718	35.325.142
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	16.341.000	17.540.847			33.881.847	34.348.809	34.829.718	35.325.142
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	16.341.000	17.540.847			33.881.847	34.348.809	34.829.718	35.325.142
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	364.089.913	829.198.667	400.012.592		1.593.301.172	1.619.136.079	1.645.747.601	1.673.159.286
09	AGAMA	364.089.913	829.198.667	400.012.592		1.593.301.172	1.619.136.079	1.645.747.601	1.673.159.286
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		489.649.469	383.857.656		873.507.125	880.853.032	888.419.146	896.212.663
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		489.649.469	383.857.656		873.507.125	880.853.032	888.419.146	896.212.663
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		8.922.470			8.922.470	7.608.700	7.718.806	7.832.248
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri		34.392.988	382.213.700		416.606.688	417.177.197	417.306.641	417.440.081
2148	Pembinaan Haji		246.219.093			246.219.093	230.975.453	237.389.237	243.995.690
2149	Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji		27.951.587	1.450.706		29.402.293	36.474.251	37.336.428	38.224.489
5310	Pelayanan Haji Luar Negeri		172.163.331	193.250		172.356.581	188.617.431	188.668.034	188.720.155
09.03	LITBANG AGAMA	364.089.913	339.549.198	16.154.936		719.794.047	738.283.047	757.328.455	776.946.623
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	364.089.913	339.549.198	16.154.936		719.794.047	738.283.047	757.328.455	776.946.623
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	364.089.913	339.549.198	16.154.936		719.794.047	738.283.047	757.328.455	776.946.623
025.11	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	178.113.390	485.628.035	29.401.936		693.143.361	702.450.542	712.036.990	721.911.241

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	AGAMA	178.113.390	309.220.307	13.419.260		500.752.957	509.694.310	518.903.951	528.390.066
09.03	LITBANG AGAMA		52.854.863	1.759.200		54.614.063	54.825.929	55.044.141	55.268.929
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen		52.854.863	1.759.200		54.614.063	54.825.929	55.044.141	55.268.929
2109	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an		11.622.236	1.759.200		13.381.436	13.485.885	13.593.456	13.704.271
2153	Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan		28.791.627			28.791.627	28.791.627	28.791.627	28.791.627
2154	Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi		12.441.000			12.441.000	12.548.417	12.659.058	12.773.031
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	178.113.390	256.365.444	11.660.060		446.138.894	454.868.381	463.859.810	473.121.137
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	178.113.390	256.365.444	11.660.060		446.138.894	454.868.381	463.859.810	473.121.137
2151	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi		101.191.768			101.191.768	102.237.447	103.314.487	104.423.918
2152	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan		55.616.440			55.616.440	55.930.332	56.253.630	56.586.654
2156	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	178.113.390	99.557.236	11.660.060		289.330.686	296.700.602	304.291.693	312.110.565
10	PENDIDIKAN		176.407.728	15.982.676		192.390.404	192.756.232	193.133.039	193.521.175
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN		176.407.728	15.982.676		192.390.404	192.756.232	193.133.039	193.521.175
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen		176.407.728	15.982.676		192.390.404	192.756.232	193.133.039	193.521.175

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2155	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan		30.787.849			30.787.849	31.029.069	31.277.523	31.533.450
2219	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan		249.817			249.817	254.753	259.838	265.074
5109	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan		128.312.962	15.982.676		144.295.638	144.296.085	144.296.545	144.297.021
5311	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan		17.057.100			17.057.100	17.176.325	17.299.133	17.425.630
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	14.231.887	71.880.304	11.385.725		97.497.916	98.347.077	99.221.718	100.122.601
09	AGAMA	14.231.887	71.880.304	11.385.725		97.497.916	98.347.077	99.221.718	100.122.601
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	14.231.887	71.880.304	11.385.725		97.497.916	98.347.077	99.221.718	100.122.601
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		40.762.480			40.762.480	40.762.480	40.762.480	40.762.480
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		28.339.676			28.339.676	28.339.676	28.339.676	28.339.676
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		5.500.001			5.500.001	5.500.001	5.500.001	5.500.001
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal		6.922.803			6.922.803	6.922.803	6.922.803	6.922.803
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	14.231.887	31.117.824	11.385.725		56.735.436	57.584.597	58.459.238	59.360.121
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	14.231.887	31.117.824	11.385.725		56.735.436	57.584.597	58.459.238	59.360.121
JUMLAH RM						59.158.740.103			
JUMLAH PLN						660.366.917			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RMP						18.436.000			
JUMLAH PNBP						1.740.884.041			
JUMLAH BLU						2.021.508.753			
JUMLAH PBS						3.361.451.008			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	455.421.452	3.938.988.032	1.327.295.951		5.721.705.435	5.807.572.972	5.894.453.418	5.982.001.680
026.01	Sekretariat Jenderal	64.053.851	214.486.210	65.753.133		344.293.194	354.621.849	365.260.260	376.218.034
04	EKONOMI	63.269.871	195.181.839	56.293.246		314.744.956	324.187.192	333.912.615	343.929.965
04.02	TENAGA KERJA	63.269.871	195.181.839	56.293.246		314.744.956	324.187.192	333.912.615	343.929.965
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	63.269.871	195.181.839	56.293.246		314.744.956	324.187.192	333.912.615	343.929.965
2157	Pembentukan, Pembaruan dan Penyelesaian Masalah Hukum		5.126.000			5.126.000	5.279.767	5.438.143	5.601.282
2158	Peningkatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	51.983.521	95.997.571			147.981.092	152.420.489	156.993.053	161.702.843
2159	Peningkatan Pengelolaan Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian		14.396.854			14.396.854	14.828.748	15.273.581	15.731.784
2160	Peningkatan Perencanaan Program dan Anggaran		4.971.000			4.971.000	5.120.118	5.273.697	5.431.902
2161	Peningkatan Pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Pelayanan Umum		3.380.000	56.004.246		59.384.246	61.165.769	63.000.724	64.890.742
2162	Peningkatan dan Pengelolaan Kerja Sama Luar Negeri		5.337.456			5.337.456	5.497.570	5.662.490	5.832.359
2163	Peningkatan dan Pengelolaan Hubungan Masyarakat		47.008.798			47.008.798	48.419.054	49.871.610	51.367.760
2165	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	11.286.350	18.964.160	289.000		30.539.510	31.455.677	32.399.317	33.371.293
10	PENDIDIKAN	783.980	19.304.371	9.459.887		29.548.238	30.434.657	31.347.645	32.288.069
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	783.980	19.304.371	9.459.887		29.548.238	30.434.657	31.347.645	32.288.069
026.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	783.980	19.304.371	9.459.887		29.548.238	30.434.657	31.347.645	32.288.069

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2238	Pelayanan Politeknik Ketenagakerjaan	783.980	19.304.371	9.459.887		29.548.238	30.434.657	31.347.645	32.288.069
026.02	Inspektorat Jenderal	18.572.960	39.927.977	802.500		59.303.437	61.082.460	62.914.802	64.802.270
04	EKONOMI	18.572.960	39.927.977	802.500		59.303.437	61.082.460	62.914.802	64.802.270
04.02	TENAGA KERJA	18.572.960	39.927.977	802.500		59.303.437	61.082.460	62.914.802	64.802.270
026.02.WA	Program Dukungan Manajemen	18.572.960	39.927.977	802.500		59.303.437	61.082.460	62.914.802	64.802.270
2167	Pengawasan Inspektorat I		5.884.819			5.884.819	6.061.351	6.243.171	6.430.472
2168	Pengawasan Inspektorat II		5.939.147			5.939.147	6.117.311	6.300.812	6.489.838
2169	Pengawasan Inspektorat III		5.965.934			5.965.934	6.144.900	6.329.220	6.519.104
2170	Pengawasan Inspektorat IV		6.171.977			6.171.977	6.357.123	6.547.816	6.744.258
2171	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	18.572.960	15.966.100	802.500		35.341.560	36.401.775	37.493.783	38.618.598
026.04	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	44.603.417	741.261.502	12.915.000		798.779.919	802.024.116	805.614.920	809.195.347
04	EKONOMI	44.603.417	741.261.502	12.915.000		798.779.919	802.024.116	805.614.920	809.195.347
04.02	TENAGA KERJA	44.603.417	741.261.502	12.915.000		798.779.919	802.024.116	805.614.920	809.195.347
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	44.603.417	741.261.502	12.915.000		798.779.919	802.024.116	805.614.920	809.195.347
2172	Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja	4.032.966	97.000.311	6.300.000		107.333.277	110.577.474	114.168.278	117.748.705

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2173	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		58.195.573			58.195.573	58.195.573	58.195.573	58.195.573
2174	Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri		90.283.650			90.283.650	90.283.650	90.283.650	90.283.650
2175	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja		356.074.133			356.074.133	356.074.133	356.074.133	356.074.133
2176	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja		26.129.600			26.129.600	26.129.600	26.129.600	26.129.600
2177	Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing		13.638.615			13.638.615	13.638.615	13.638.615	13.638.615
2178	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	40.570.451	99.939.620	6.615.000		147.125.071	147.125.071	147.125.071	147.125.071
026.05	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	26.166.480	112.843.473	3.000.000		142.009.953	143.425.204	144.882.911	146.384.386
04	EKONOMI	26.166.480	112.843.473	3.000.000		142.009.953	143.425.204	144.882.911	146.384.386
04.02	TENAGA KERJA	26.166.480	112.843.473	3.000.000		142.009.953	143.425.204	144.882.911	146.384.386
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	26.166.480	112.843.473	3.000.000		142.009.953	143.425.204	144.882.911	146.384.386
2179	Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial		15.034.000			15.034.000	15.034.000	15.034.000	15.034.000
2180	Peningkatan Penerapan Pengupahan		14.056.000			14.056.000	14.056.000	14.056.000	14.056.000
2181	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		13.842.000			13.842.000	13.842.000	13.842.000	13.842.000
2182	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi		17.862.000			17.862.000	17.862.000	17.862.000	17.862.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2183	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	26.166.480	37.843.473	3.000.000		67.009.953	68.425.204	69.882.911	71.384.386
5586	Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		14.206.000			14.206.000	14.206.000	14.206.000	14.206.000
026.08	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	55.316.367	145.662.836	28.208.766		229.187.969	236.063.311	243.144.658	250.438.938
04	EKONOMI	55.316.367	145.662.836	28.208.766		229.187.969	236.063.311	243.144.658	250.438.938
04.02	TENAGA KERJA	55.316.367	145.662.836	28.208.766		229.187.969	236.063.311	243.144.658	250.438.938
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	55.316.367	145.662.836	28.208.766		229.187.969	236.063.311	243.144.658	250.438.938
2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan		3.862.184			3.862.184	3.977.416	4.096.709	4.219.608
2198	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak		9.902.030			9.902.030	7.279.148	7.497.466	7.722.394
2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		7.033.325			7.033.325	7.244.296	7.461.552	7.685.407
2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		40.299.412	7.436.862		47.736.274	49.168.933	50.643.871	52.163.181
2201	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	35.374.594	38.377.701	10.853.511		84.605.806	87.876.858	90.513.049	93.228.414
5587	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan	19.941.773	46.188.184	9.918.393		76.048.350	80.516.660	82.932.011	85.419.934

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kerja (K3)								
026.11	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	22.776.390	91.422.145	41.432.018		155.630.553	157.031.951	158.488.113	159.991.280
04	EKONOMI	22.776.390	91.422.145	41.432.018		155.630.553	157.031.951	158.488.113	159.991.280
04.02	TENAGA KERJA	22.776.390	91.422.145	41.432.018		155.630.553	157.031.951	158.488.113	159.991.280
026.11.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	22.776.390	91.422.145	41.432.018		155.630.553	157.031.951	158.488.113	159.991.280
2202	Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan		7.242.159			7.242.159	7.290.959	7.341.118	7.392.682
2203	Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan		7.301.962	254.000		7.555.962	7.627.401	7.700.992	7.776.806
2204	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	22.776.390	27.740.922	4.278.018		54.795.330	55.347.137	55.918.261	56.509.375
4256	Pengembangan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan		41.958.050	36.900.000		78.858.050	79.541.700	80.255.686	80.991.404
5585	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja		7.179.052			7.179.052	7.224.754	7.272.056	7.321.013
026.13	Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	223.931.987	2.593.383.889	1.175.184.534		3.992.500.410	4.053.324.081	4.114.147.754	4.174.971.425
04	EKONOMI	36.134.404	106.255.201	167.619.426		310.009.031	310.009.031	310.009.031	310.009.031
04.02	TENAGA KERJA	36.134.404	106.255.201	167.619.426		310.009.031	310.009.031	310.009.031	310.009.031
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	36.134.404	106.255.201	167.619.426		310.009.031	310.009.031	310.009.031	310.009.031
2217	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas		12.000	159.681.519		159.693.519	159.693.519	159.693.519	159.693.519

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2221	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja		37.767.170			37.767.170	37.767.170	37.767.170	37.767.170
2223	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalattas	36.134.404	68.476.031	7.937.907		112.548.342	112.548.342	112.548.342	112.548.342
10	PENDIDIKAN	187.797.583	2.487.128.688	1.007.565.108		3.682.491.379	3.743.315.050	3.804.138.723	3.864.962.394
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL	187.797.583	2.487.128.688	1.007.565.108		3.682.491.379	3.743.315.050	3.804.138.723	3.864.962.394
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	187.797.583	2.487.128.688	1.007.565.108		3.682.491.379	3.743.315.050	3.804.138.723	3.864.962.394
4053	Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Binalattas		191.850.972	600.000		192.450.972	192.450.972	192.450.972	192.450.972
4055	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Binalattas		112.779.835			112.779.835	112.779.835	112.779.835	112.779.835
4056	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas Binalattas		1.026.715.445	1.006.965.108		2.033.680.553	2.033.680.553	2.033.680.553	2.033.680.553
4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas		102.041.613			102.041.613	102.041.613	102.041.613	102.041.613
4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas		47.064.641			47.064.641	47.064.641	47.064.641	47.064.641
4060	Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas		924.458.107			924.458.107	985.281.778	1.046.105.451	1.106.929.122
4473	Dukungan Manajemen Ditjen Binalattas	187.797.583	82.218.075			270.015.658	270.015.658	270.015.658	270.015.658

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RM						4.949.661.296			
JUMLAH PLN						125.246.000			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						646.798.139			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027	KEMENTERIAN SOSIAL	511.925.510	5.065.906.899	1.113.396.582	86.126.361.300	92.817.590.291	92.861.329.495	92.919.337.857	92.977.619.752
027.01	Sekretariat Jenderal	66.101.411	1.533.410.427	585.803.048		2.185.314.886	2.185.314.886	2.185.314.886	2.185.314.886
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	66.101.411	1.533.410.427	585.803.048		2.185.314.886	2.185.314.886	2.185.314.886	2.185.314.886
11.06	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL		1.342.077.165	76.150.000		1.418.227.165	1.418.227.165	1.418.227.165	1.418.227.165
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial		1.342.077.165	76.150.000		1.418.227.165	1.418.227.165	1.418.227.165	1.418.227.165
6318	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		1.342.077.165	76.150.000		1.418.227.165	1.418.227.165	1.418.227.165	1.418.227.165
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	66.101.411	191.333.262	509.653.048		767.087.721	767.087.721	767.087.721	767.087.721
027.01.WA	Program Dukungan Manajemen	66.101.411	191.333.262	509.653.048		767.087.721	767.087.721	767.087.721	767.087.721
6287	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		25.196.806			25.196.806	25.196.806	25.196.806	25.196.806
6288	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	66.101.411	143.844.766	509.653.048		719.599.225	719.599.225	719.599.225	719.599.225
6289	Pengelolaan Organisasi dan SDM		13.297.468			13.297.468	13.297.468	13.297.468	13.297.468
6290	Legislasi dan Litigasi		8.994.222			8.994.222	8.994.222	8.994.222	8.994.222
027.02	Inspektorat Jenderal	17.179.299	20.051.136	1.178.068		38.408.503	39.560.687	40.747.420	41.969.840
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	17.179.299	20.051.136	1.178.068		38.408.503	39.560.687	40.747.420	41.969.840
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	17.179.299	20.051.136	1.178.068		38.408.503	39.560.687	40.747.420	41.969.840
027.02.WA	Program Dukungan Manajemen	17.179.299	20.051.136	1.178.068		38.408.503	39.560.687	40.747.420	41.969.840
6291	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		11.162.510			11.162.510	11.497.349	11.842.232	12.197.494

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6292	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal		173.280			173.280	165.448	170.411	175.523
6293	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	17.179.299	8.226.886	1.178.068		26.584.253	27.408.476	28.230.686	29.077.609
6294	Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal		488.460			488.460	489.414	504.091	519.214
027.03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	26.104.509	280.916.851	26.608.000	72.578.000	406.207.360	406.240.723	406.275.069	406.310.475
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	26.104.509	280.916.851	26.608.000	72.578.000	406.207.360	406.240.723	406.275.069	406.310.475
11.03	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN		52.023.125	25.481.000		77.504.125	77.504.125	77.504.125	77.504.125
027.03.DQ	Program Perlindungan Sosial		52.023.125	25.481.000		77.504.125	77.504.125	77.504.125	77.504.125
6273	Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan		52.023.125	25.481.000		77.504.125	77.504.125	77.504.125	77.504.125
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	26.104.509	228.893.726	1.127.000	72.578.000	328.703.235	328.736.598	328.770.944	328.806.350
027.03.DQ	Program Perlindungan Sosial		200.661.778	200.000	72.578.000	273.439.778	273.473.141	273.507.487	273.542.893
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial		505.000			505.000	538.363	572.709	608.115
6274	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu		151.010.266	200.000		151.210.266	151.210.266	151.210.266	151.210.266
6275	Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi		17.588.112		14.000.000	31.588.112	31.588.112	31.588.112	31.588.112
6276	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat		31.558.400		58.578.000	90.136.400	90.136.400	90.136.400	90.136.400
027.03.WA	Program Dukungan Manajemen	26.104.509	28.231.948	927.000		55.263.457	55.263.457	55.263.457	55.263.457

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6296	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial		4.722.912			4.722.912	4.722.912	4.722.912	4.722.912
6297	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial	26.104.509	21.355.488	927.000		48.386.997	48.386.997	48.386.997	48.386.997
6298	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial		926.566			926.566	926.566	926.566	926.566
6299	Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial		1.226.982			1.226.982	1.226.982	1.226.982	1.226.982
027.04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	240.744.037	676.257.575	374.484.175		1.291.485.787	1.291.485.787	1.291.485.787	1.291.485.787
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	240.744.037	676.257.575	374.484.175		1.291.485.787	1.291.485.787	1.291.485.787	1.291.485.787
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT		170.521.096			170.521.096	170.521.096	170.521.096	170.521.096
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		170.521.096			170.521.096	170.521.096	170.521.096	170.521.096
6278	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		170.521.096			170.521.096	170.521.096	170.521.096	170.521.096
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA		104.385.357			104.385.357	104.385.357	104.385.357	104.385.357
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		104.385.357			104.385.357	104.385.357	104.385.357	104.385.357
6280	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		104.385.357			104.385.357	104.385.357	104.385.357	104.385.357
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA		92.090.235			92.090.235	92.090.235	92.090.235	92.090.235
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		92.090.235			92.090.235	92.090.235	92.090.235	92.090.235
6279	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak		92.090.235			92.090.235	92.090.235	92.090.235	92.090.235

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	240.744.037	309.260.887	374.484.175		924.489.099	924.489.099	924.489.099	924.489.099
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		186.581.400			186.581.400	186.581.400	186.581.400	186.581.400
6277	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan		186.581.400			186.581.400	186.581.400	186.581.400	186.581.400
027.04.WA	Program Dukungan Manajemen	240.744.037	122.679.487	374.484.175		737.907.699	737.907.699	737.907.699	737.907.699
6300	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial		6.130.152			6.130.152	6.130.152	6.130.152	6.130.152
6301	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial	240.744.037	105.107.244	374.484.175		720.335.456	720.335.456	720.335.456	720.335.456
6302	Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial		10.957.656			10.957.656	10.957.656	10.957.656	10.957.656
6303	Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial		484.435			484.435	484.435	484.435	484.435
027.05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	21.468.603	1.805.646.397	94.607.000	28.798.783.300	30.720.505.300	30.762.890.479	30.819.677.762	30.876.701.831
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	21.468.603	1.805.646.397	94.607.000	28.798.783.300	30.720.505.300	30.762.890.479	30.819.677.762	30.876.701.831
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.616.765.850	1.500.000	28.709.816.300	30.328.082.150	30.356.725.109	30.393.494.012	30.430.262.910
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial		1.616.765.850	1.500.000	28.709.816.300	30.328.082.150	30.356.725.109	30.393.494.012	30.430.262.910
6282	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan		1.616.765.850	1.500.000	28.709.816.300	30.328.082.150	30.356.725.109	30.393.494.012	30.430.262.910
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	21.468.603	188.880.547	93.107.000	88.967.000	392.423.150	406.165.370	426.183.750	446.438.921
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial		157.682.003	91.853.000	88.967.000	338.502.003	352.244.223	372.262.603	392.517.774
6281	Pencegahan dan Perlindungan Korban Bencana		157.682.003	91.853.000	88.967.000	338.502.003	352.244.223	372.262.603	392.517.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027.05.WA	Program Dukungan Manajemen	21.468.603	31.198.544	1.254.000		53.921.147	53.921.147	53.921.147	53.921.147
6304	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial		2.955.761			2.955.761	2.955.761	2.955.761	2.955.761
6305	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Perlindungan dan Jaminan Sosial	21.468.603	25.610.970	1.254.000		48.333.573	48.333.573	48.333.573	48.333.573
6306	Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial		1.235.324			1.235.324	1.235.324	1.235.324	1.235.324
6307	Legislasi dan Litigasi Perlindungan dan Jaminan Sosial		1.396.489			1.396.489	1.396.489	1.396.489	1.396.489
027.06	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	20.892.531	551.143.683	4.116.291	57.255.000.000	57.831.152.505	57.831.152.503	57.831.152.503	57.831.152.503
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	20.892.531	551.143.683	4.116.291	57.255.000.000	57.831.152.505	57.831.152.503	57.831.152.503	57.831.152.503
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		517.043.974		57.255.000.000	57.772.043.974	57.772.043.972	57.772.043.972	57.772.043.972
027.06.DQ	Program Perlindungan Sosial		517.043.974		57.255.000.000	57.772.043.974	57.772.043.972	57.772.043.972	57.772.043.972
6283	Pelayanan Akses Sumber Daya Ekonomi		10.832.900		135.000.000	145.832.900	145.832.900	145.832.900	145.832.900
6284	Penyelenggaraaan Program Sembako		506.211.074		57.120.000.000	57.626.211.074	57.626.211.072	57.626.211.072	57.626.211.072
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	20.892.531	34.099.709	4.116.291		59.108.531	59.108.531	59.108.531	59.108.531
027.06.WA	Program Dukungan Manajemen	20.892.531	34.099.709	4.116.291		59.108.531	59.108.531	59.108.531	59.108.531
6308	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Penanganan Fakir Miskin		4.371.270			4.371.270	4.371.270	4.371.270	4.371.270
6309	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum	20.892.531	25.850.214	4.116.291		50.859.036	50.859.036	50.859.036	50.859.036

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penanganan Fakir Miskin								
6310	Pengelolaan Organisasi dan SDM Penanganan Fakir Miskin		3.086.983			3.086.983	3.086.983	3.086.983	3.086.983
6311	Legislasi dan Litigasi Penanganan Fakir Miskin		791.242			791.242	791.242	791.242	791.242
027.11	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	119.435.120	198.480.830	26.600.000		344.515.950	344.684.430	344.684.430	344.684.430
10	PENDIDIKAN		13.254.273			13.254.273	5.095.994	5.095.994	5.095.994
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		13.254.273			13.254.273	5.095.994	5.095.994	5.095.994
027.11.WA	Program Dukungan Manajemen		13.254.273			13.254.273	5.095.994	5.095.994	5.095.994
6317	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial		13.254.273			13.254.273	5.095.994	5.095.994	5.095.994
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	119.435.120	185.226.557	26.600.000		331.261.677	339.588.436	339.588.436	339.588.436
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL		117.396.033			117.396.033	113.514.513	113.514.513	113.514.513
027.11.DQ	Program Perlindungan Sosial		110.873.101			110.873.101	109.421.581	109.421.581	109.421.581
6285	Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial		43.293.204			43.293.204	42.601.684	42.601.684	42.601.684
6286	Penyelenggaraan Diklat Pendamping Program Keluarga Harapan		67.579.897			67.579.897	66.819.897	66.819.897	66.819.897
027.11.WA	Program Dukungan Manajemen		6.522.932			6.522.932	4.092.932	4.092.932	4.092.932
6316	Penelitian dan Pengembangan		6.522.932			6.522.932	4.092.932	4.092.932	4.092.932
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	119.435.120	67.830.524	26.600.000		213.865.644	226.073.923	226.073.923	226.073.923
027.11.WA	Program Dukungan Manajemen	119.435.120	67.830.524	26.600.000		213.865.644	226.073.923	226.073.923	226.073.923

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6312	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badiklitpensos		2.357.634			2.357.634	1.473.792	1.473.792	1.473.792
6313	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Badiklitpensos	119.435.120	48.788.136	26.600.000		194.823.256	216.897.242	216.897.242	216.897.242
6314	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badiklitpensos		16.320.034			16.320.034	7.358.329	7.358.329	7.358.329
6315	Legislasi dan Litigasi Badiklitpensos		364.720			364.720	344.560	344.560	344.560
JUMLAH RM						92.810.153.628			
JUMLAH PNBP						7.436.663			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.011.861.690	5.194.977.138	750.275.955		7.957.114.783	8.193.283.654	8.435.802.710	8.685.607.783
029.01	Sekretariat Jenderal	130.939.762	414.715.871	853.607		546.509.240	562.904.189	579.790.674	597.184.246
04	EKONOMI	130.939.762	414.715.871	853.607		546.509.240	562.904.189	579.790.674	597.184.246
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	130.939.762	414.715.871	853.607		546.509.240	562.904.189	579.790.674	597.184.246
029.01.WA	Program Dukungan Manajemen	130.939.762	414.715.871	853.607		546.509.240	562.904.189	579.790.674	597.184.246
5367	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK		8.094.400			8.094.400	8.337.232	8.587.345	8.844.956
5368	Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK		34.494.562			34.494.562	35.782.760	36.856.192	37.961.865
5369	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi		51.493.227			51.493.227	53.043.170	54.634.429	56.273.451
5370	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK	92.634.056	224.401.693			317.035.749	326.546.751	336.343.039	346.433.295
5372	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri		12.804.909			12.804.909	13.189.051	13.584.715	13.992.250
5374	Pengendalian Pembangunan LHK Regional	38.305.706	54.195.280	853.607		93.354.593	96.155.062	99.039.477	102.010.626
5380	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK		5.000.000			5.000.000	5.149.978	5.304.435	5.463.559
5381	Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK		7.983.800			7.983.800	8.223.306	8.469.936	8.724.024
5382	Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan		5.047.500			5.047.500	5.198.914	5.354.858	5.515.497
5383	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang		4.096.400			4.096.400	4.219.288	4.345.850	4.476.222

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
5859	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		4.190.400			4.190.400	4.316.109	4.445.573	4.578.939
5860	Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2.913.700			2.913.700	2.742.568	2.824.825	2.909.562
029.02	Inspektorat Jenderal	30.121.768	45.504.630	4.987.326		80.613.724	83.032.101	85.523.025	88.088.709
04	EKONOMI	30.121.768	45.504.630	4.987.326		80.613.724	83.032.101	85.523.025	88.088.709
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	30.121.768	45.504.630	4.987.326		80.613.724	83.032.101	85.523.025	88.088.709
029.02.WA	Program Dukungan Manajemen	30.121.768	45.504.630	4.987.326		80.613.724	83.032.101	85.523.025	88.088.709
5384	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK	30.121.768	18.404.630	4.987.326		53.513.724	55.119.111	56.772.656	58.475.835
5385	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK		22.600.000			22.600.000	23.277.992	23.976.324	24.695.611
5389	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN		4.500.000			4.500.000	4.634.998	4.774.045	4.917.263
029.03	Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	105.856.340	228.704.156	7.715.198		342.275.694	352.543.459	363.119.144	374.012.589
04	EKONOMI	105.856.340	228.704.156	7.715.198		342.275.694	352.543.459	363.119.144	374.012.589
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	105.856.340	228.704.156	7.715.198		342.275.694	352.543.459	363.119.144	374.012.589
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		187.427.131	488.000		187.915.131	193.552.232	199.358.305	205.338.957
5397	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi		109.327.239	488.000		109.815.239	113.109.517	116.502.517	119.997.554

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5398	Peningkatan Usaha Hutan Produksi		24.856.291			24.856.291	25.601.930	26.369.929	27.161.011
5399	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan		12.073.715			12.073.715	12.435.876	12.808.927	13.193.176
5400	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		14.896.667			14.896.667	15.343.516	15.803.766	16.277.870
5401	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan		26.273.219			26.273.219	27.061.393	27.873.166	28.709.346
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen	105.856.340	41.277.025	7.227.198		154.360.563	158.991.227	163.760.839	168.673.632
5396	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	105.856.340	41.277.025	7.227.198		154.360.563	158.991.227	163.760.839	168.673.632
029.04	Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	205.064.351	1.669.631.680	302.637.529		2.177.333.560	2.239.386.216	2.303.299.461	2.369.131.315
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	205.064.351	1.669.631.680	302.637.529		2.177.333.560	2.239.386.216	2.303.299.461	2.369.131.315
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	205.064.351	1.669.631.680	302.637.529		2.177.333.560	2.239.386.216	2.303.299.461	2.369.131.315
029.04.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		10.137.954			10.137.954	10.345.433	10.559.104	10.779.248
5408	Pengendalian Kerusakan Perairan Darat		10.137.954			10.137.954	10.345.433	10.559.104	10.779.248
029.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		1.531.045.747	293.163.507		1.824.209.254	1.876.278.953	1.929.909.917	1.985.150.664
5404	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air		1.312.014.419	287.188.189		1.599.202.608	1.645.572.451	1.693.332.939	1.742.526.708
5405	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung		36.184.632	1.156.318		37.340.950	37.779.529	38.231.234	38.696.524

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5406	Penyelenggaraan Pengelolaan DAS		20.890.794	2.137.500		23.028.294	23.647.654	24.285.469	24.942.549
5407	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan		161.955.902	2.681.500		164.637.402	169.279.319	174.060.275	178.984.883
029.04.WA	Program Dukungan Manajemen	205.064.351	128.447.979	9.474.022		342.986.352	352.761.830	362.830.440	373.201.403
5403	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	205.064.351	128.447.979	9.474.022		342.986.352	352.761.830	362.830.440	373.201.403
029.05	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	772.232.515	902.792.984	250.355.754		1.925.381.253	1.983.140.123	2.042.629.159	2.103.907.241
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	772.232.515	902.792.984	250.355.754		1.925.381.253	1.983.140.123	2.042.629.159	2.103.907.241
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	772.232.515	902.792.984	250.355.754		1.925.381.253	1.983.140.123	2.042.629.159	2.103.907.241
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		14.260.927	312.024		14.572.951	15.010.067	15.460.196	15.923.978
5424	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial		14.260.927	312.024		14.572.951	15.010.067	15.460.196	15.923.978
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		544.768.913	228.713.810		773.482.723	796.685.513	820.582.308	845.199.183
5420	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam		74.111.554	4.961.520		79.073.074	81.444.992	83.887.774	86.404.370
5421	Pengelolaan Kawasan Konservasi		344.469.634	23.910.146		368.379.780	379.430.189	390.810.904	402.534.867
5422	Konservasi Spesies dan Genetik		86.166.542	152.366.315		238.532.857	245.688.557	253.058.557	260.650.231
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi		40.021.183	47.475.829		87.497.012	90.121.775	92.825.073	95.609.715
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen	772.232.515	343.763.144	21.329.920		1.137.325.579	1.171.444.543	1.206.586.655	1.242.784.080
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	772.232.515	343.763.144	21.329.920		1.137.325.579	1.171.444.543	1.206.586.655	1.242.784.080

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
029.06	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	160.181.306	237.804.287	12.317.992		410.303.585	423.340.794	436.040.459	449.121.580
04	EKONOMI	160.181.306	208.668.599	11.707.192		380.557.097	392.702.049	404.482.688	416.617.099
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	160.181.306	208.668.599	11.707.192		380.557.097	392.702.049	404.482.688	416.617.099
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		139.378.296			139.378.296	144.489.607	148.824.132	153.288.835
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		130.388.036			130.388.036	135.229.678	139.286.430	143.465.012
5435	Perencanaan Kawasan Hutan		8.990.260			8.990.260	9.259.929	9.537.702	9.823.823
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	160.181.306	69.290.303	11.707.192		241.178.801	248.212.442	255.658.556	263.328.264
5432	Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	160.181.306	69.290.303	11.707.192		241.178.801	248.212.442	255.658.556	263.328.264
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		29.135.688	610.800		29.746.488	30.638.745	31.557.771	32.504.481
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA		29.135.688	610.800		29.746.488	30.638.745	31.557.771	32.504.481
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		17.300.007	452.800		17.752.807	18.285.354	18.833.845	19.398.851
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan		17.300.007	452.800		17.752.807	18.285.354	18.833.845	19.398.851
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		11.835.681	158.000		11.993.681	12.353.391	12.723.926	13.105.630
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		11.835.681	158.000		11.993.681	12.353.391	12.723.926	13.105.630
029.07	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	207.944.105	83.565.343	25.508.384		317.017.832	326.527.997	336.323.139	346.412.774
04	EKONOMI	207.944.105	83.565.343	25.508.384		317.017.832	326.527.997	336.323.139	346.412.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	207.944.105	83.565.343	25.508.384		317.017.832	326.527.997	336.323.139	346.412.774
029.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		1.831.569			1.831.569	2.143.654	2.207.959	2.274.196
5393	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan		1.831.569			1.831.569	2.143.654	2.207.959	2.274.196
029.07.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		11.930.695	24.603.810		36.534.505	45.691.137	47.061.330	48.473.131
5391	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Bidang LHK		11.930.695	24.603.810		36.534.505	45.691.137	47.061.330	48.473.131
029.07.WA	Program Dukungan Manajemen	207.944.105	69.803.079	904.574		278.651.758	278.693.206	287.053.850	295.665.447
5390	Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	207.944.105	69.803.079	904.574		278.651.758	278.693.206	287.053.850	295.665.447
029.08	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	123.182.635	154.085.474	35.975.856		313.243.965	322.640.852	332.319.330	342.288.803
04	EKONOMI	123.182.635	63.098.945	4.912.080		191.193.660	196.929.330	202.837.047	208.922.136
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	123.182.635	63.098.945	4.912.080		191.193.660	196.929.330	202.837.047	208.922.136
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen	123.182.635	63.098.945	4.912.080		191.193.660	196.929.330	202.837.047	208.922.136
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	123.182.635	63.098.945	4.912.080		191.193.660	196.929.330	202.837.047	208.922.136
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		18.994.495			18.994.495	19.564.273	20.151.036	20.755.538
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM		18.994.495			18.994.495	19.564.273	20.151.036	20.755.538
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		5.520.000			5.520.000	5.685.560	5.856.020	6.031.689

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5443	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan		5.520.000			5.520.000	5.685.560	5.856.020	6.031.689
029.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		8.519.500			8.519.500	8.775.082	9.038.300	9.309.440
5444	Peningkatan Penyuluhan		8.519.500			8.519.500	8.775.082	9.038.300	9.309.440
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen		4.954.995			4.954.995	5.103.631	5.256.716	5.414.409
5440	Perencanaan dan Pengembangan SDM		4.954.995			4.954.995	5.103.631	5.256.716	5.414.409
10	PENDIDIKAN		71.992.034	31.063.776		103.055.810	106.147.249	109.331.247	112.611.129
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		44.936.224	31.063.776		76.000.000	78.279.925	80.628.210	83.047.032
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		44.936.224	31.063.776		76.000.000	78.279.925	80.628.210	83.047.032
5442	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan		44.936.224	31.063.776		76.000.000	78.279.925	80.628.210	83.047.032
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN		27.055.810			27.055.810	27.867.324	28.703.037	29.564.097
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		27.055.810			27.055.810	27.867.324	28.703.037	29.564.097
5441	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK		27.055.810			27.055.810	27.867.324	28.703.037	29.564.097
029.09	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42.279.348	316.569.564	4.613.000		363.461.912	374.365.614	385.595.964	397.163.728
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	42.279.348	316.569.564	4.613.000		363.461.912	374.365.614	385.595.964	397.163.728
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	42.279.348	316.569.564	4.613.000		363.461.912	374.365.614	385.595.964	397.163.728
029.09.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		271.372.203	482.000		271.854.203	280.009.731	288.409.553	297.061.738

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6031	Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan		50.384.449	80.000		50.464.449	51.978.334	53.537.436	55.143.502
6032	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan		220.987.754	402.000		221.389.754	228.031.397	234.872.117	241.918.236
029.09.WA	Program Dukungan Manajemen	42.279.348	45.197.361	4.131.000		91.607.709	94.355.883	97.186.411	100.101.990
5413	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42.279.348	45.197.361	4.131.000		91.607.709	94.355.883	97.186.411	100.101.990
029.10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.871.071	186.303.166	44.491.534		344.665.771	355.005.449	365.654.666	376.624.152
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	113.871.071	186.303.166	44.491.534		344.665.771	355.005.449	365.654.666	376.624.152
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	113.871.071	186.303.166	44.491.534		344.665.771	355.005.449	365.654.666	376.624.152
029.10.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		89.424.350	18.316.650		107.741.000	110.973.106	114.301.838	117.730.791
5429	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		13.322.500	138.500		13.461.000	13.864.810	14.280.730	14.709.139
5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi		30.180.000	6.650.000		36.830.000	37.934.871	39.072.781	40.244.933
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan		45.921.850	11.528.150		57.450.000	59.173.425	60.948.327	62.776.719
029.10.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		48.572.660	22.332.340		70.905.000	73.032.066	75.222.711	77.479.363
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan		48.572.660	22.332.340		70.905.000	73.032.066	75.222.711	77.479.363
029.10.WA	Program Dukungan Manajemen	113.871.071	48.306.156	3.842.544		166.019.771	171.000.277	176.130.117	181.413.998
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	113.871.071	48.306.156	3.842.544		166.019.771	171.000.277	176.130.117	181.413.998

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
029.11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	53.526.277	236.806.829	11.546.000		301.879.106	310.935.275	320.262.893	329.870.688
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	53.526.277	236.806.829	11.546.000		301.879.106	310.935.275	320.262.893	329.870.688
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	53.526.277	236.806.829	11.546.000		301.879.106	310.935.275	320.262.893	329.870.688
029.11.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		191.453.088	9.496.000		200.949.088	206.977.439	213.186.479	219.582.002
5446	Adaptasi Perubahan Iklim		5.940.000	60.000		6.000.000	6.179.978	6.365.347	6.556.296
5447	Mitigasi Perubahan Iklim		26.589.950	931.000		27.520.950	28.346.573	29.196.899	30.072.789
5448	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi		6.000.000			6.000.000	6.179.984	6.365.342	6.556.293
5449	Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim		5.000.000			5.000.000	5.149.993	5.304.473	5.463.597
5450	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		147.923.138	8.505.000		156.428.138	161.120.911	165.954.418	170.933.027
029.11.WA	Program Dukungan Manajemen	53.526.277	45.353.741	2.050.000		100.930.018	103.957.836	107.076.414	110.288.686
5445	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	53.526.277	45.353.741	2.050.000		100.930.018	103.957.836	107.076.414	110.288.686
029.12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Bahaya Beracun	27.353.647	241.668.596	2.946.088		271.968.331	280.127.200	288.530.886	297.186.749
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	27.353.647	241.668.596	2.946.088		271.968.331	280.127.200	288.530.886	297.186.749
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	27.353.647	241.668.596	2.946.088		271.968.331	280.127.200	288.530.886	297.186.749
029.12.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		192.579.412	1.748.588		194.328.000	200.157.709	206.162.352	212.347.173

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5452	Pengelolaan B3		9.004.000	96.000		9.100.000	9.372.972	9.654.146	9.943.760
5454	Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3		76.457.412	1.482.588		77.940.000	80.278.142	82.686.468	85.167.040
5455	Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3		17.730.000	170.000		17.900.000	18.436.981	18.990.083	19.559.776
5456	Pengelolaan Sampah		89.388.000			89.388.000	92.069.614	94.831.655	97.676.597
029.12.WA	Program Dukungan Manajemen	27.353.647	49.089.184	1.197.500		77.640.331	79.969.491	82.368.534	84.839.576
5451	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	27.353.647	49.089.184	1.197.500		77.640.331	79.969.491	82.368.534	84.839.576
029.13	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	39.308.565	476.824.558	46.327.687		562.460.810	579.334.385	596.713.910	614.615.209
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	39.308.565	476.824.558	46.327.687		562.460.810	579.334.385	596.713.910	614.615.209
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	39.308.565	476.824.558	46.327.687		562.460.810	579.334.385	596.713.910	614.615.209
029.13.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		444.181.372	44.380.355		488.561.727	503.218.366	518.314.459	533.863.802
6033	Pemantauan Kualitas Lingkungan		102.507.387	43.620.605		146.127.992	150.511.778	155.026.998	159.677.769
6034	Pengendalian Pencemaran Lingkungan		75.134.660	510.000		75.644.660	77.913.953	80.251.309	82.658.836
6035	Pemulihan Kerusakan Lingkungan		266.539.325	249.750		266.789.075	274.792.635	283.036.152	291.527.197
029.13.WA	Program Dukungan Manajemen	39.308.565	32.643.186	1.947.332		73.899.083	76.116.019	78.399.451	80.751.407
5457	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	39.308.565	32.643.186	1.947.332		73.899.083	76.116.019	78.399.451	80.751.407

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 029
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RM						6.430.850.750			
JUMLAH RMP						21.227.815			
JUMLAH PNBP						1.000.000.000			
JUMLAH HLN						323.140.508			
JUMLAH PBS						181.895.710			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.921.395.715	3.789.439.650	941.304.028		6.652.139.393	6.835.591.891	7.028.224.414	7.226.644.605
032.01	Sekretariat Jenderal	77.035.957	375.673.056	44.937.127		497.646.140	512.575.107	527.951.618	543.789.957
04	EKONOMI	77.035.957	375.673.056	44.937.127		497.646.140	512.575.107	527.951.618	543.789.957
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	77.035.957	375.673.056	44.937.127		497.646.140	512.575.107	527.951.618	543.789.957
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	77.035.957	375.673.056	44.937.127		497.646.140	512.575.107	527.951.618	543.789.957
2322	Legislasi, Litigasi dan Kerjasama		23.528.643			23.528.643	24.234.459	24.961.452	25.710.283
2323	Pengelolaan Organisasi dan SDM		13.562.500			13.562.500	13.969.354	14.388.397	14.820.036
2325	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN		51.819.444			51.819.444	53.373.817	54.974.650	56.623.817
2328	Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	77.035.957	215.848.314	29.830.277		322.714.548	332.395.901	342.367.601	352.638.565
2329	Pengelolaan Data dan Informasi		38.954.155	15.066.850		54.021.005	55.641.594	57.310.758	59.030.042
6453	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan		31.960.000	40.000		32.000.000	32.959.982	33.948.760	34.967.214
032.02	Inspektorat Jenderal	36.635.920	47.492.024	2.640.011		86.767.955	89.151.097	91.605.765	94.134.091
04	EKONOMI	36.635.920	47.492.024	2.640.011		86.767.955	89.151.097	91.605.765	94.134.091
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	36.635.920	47.492.024	2.640.011		86.767.955	89.151.097	91.605.765	94.134.091
032.02.WA	Program Dukungan Manajemen	36.635.920	47.492.024	2.640.011		86.767.955	89.151.097	91.605.765	94.134.091
2335	Pengawasan Akuntablitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP		35.490.114			35.490.114	36.391.753	37.320.437	38.277.013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2336	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	36.635.920	12.001.910	2.640.011		51.277.841	52.759.344	54.285.328	55.857.078
032.03	Ditjen Perikanan Tangkap	192.256.354	467.632.690	103.688.443		763.577.487	776.188.822	789.178.005	802.557.809
04	EKONOMI	192.256.354	467.632.690	103.688.443		763.577.487	776.188.822	789.178.005	802.557.809
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	192.256.354	467.632.690	103.688.443		763.577.487	776.188.822	789.178.005	802.557.809
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		262.053.221	89.838.353		351.891.574	353.290.913	354.731.890	356.216.656
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan		70.305.400	984.600		71.290.000	71.722.416	72.167.753	72.626.546
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		73.221.041	88.853.753		162.074.794	162.848.276	163.644.686	164.465.398
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan		91.576.780			91.576.780	91.641.130	91.707.398	91.775.696
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		26.950.000			26.950.000	27.079.091	27.212.053	27.349.016
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	192.256.354	205.579.469	13.850.090		411.685.913	422.897.909	434.446.115	446.341.153
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	192.256.354	205.579.469	13.850.090		411.685.913	422.897.909	434.446.115	446.341.153
032.04	Ditjen Perikanan Budidaya	211.353.370	760.936.826	240.450.208		1.212.740.404	1.249.121.835	1.286.594.383	1.325.192.010
04	EKONOMI	211.353.370	760.936.826	240.450.208		1.212.740.404	1.249.121.835	1.286.594.383	1.325.192.010
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	211.353.370	760.936.826	240.450.208		1.212.740.404	1.249.121.835	1.286.594.383	1.325.192.010
032.04.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		636.541.267	230.998.291		867.539.558	893.565.197	920.371.430	947.982.440
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan		154.232.493	45.173.173		199.405.666	205.387.600	211.548.938	217.895.399

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan		338.156.678	156.366.836		494.523.514	509.359.050	524.639.651	540.378.779
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan		104.932.006	12.567.994		117.500.000	121.024.929	124.655.496	128.395.121
5747	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan		39.220.090	16.890.288		56.110.378	57.793.618	59.527.345	61.313.141
032.04.WA	Program Dukungan Manajemen	211.353.370	124.395.559	9.451.917		345.200.846	355.556.638	366.222.953	377.209.570
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	211.353.370	124.395.559	9.451.917		345.200.846	355.556.638	366.222.953	377.209.570
032.05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	165.369.332	635.295.019	277.388.571		1.078.052.922	1.110.218.849	1.143.524.065	1.177.829.520
04	EKONOMI	165.369.332	635.295.019	277.388.571		1.078.052.922	1.110.218.849	1.143.524.065	1.177.829.520
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	165.369.332	635.295.019	277.388.571		1.078.052.922	1.110.218.849	1.143.524.065	1.177.829.520
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		531.380.117	265.385.498		796.765.615	820.608.629	845.226.085	870.582.685
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan		434.423.102	265.224.198		699.647.300	720.577.031	742.194.131	764.459.829
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan		45.752.715			45.752.715	47.125.205	48.538.831	49.994.982
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan		23.398.700	161.300		23.560.000	24.266.700	24.994.420	25.744.218
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan		27.805.600			27.805.600	28.639.693	29.498.703	30.383.656
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen	165.369.332	103.914.902	12.003.073		281.287.307	289.610.220	298.297.980	307.246.835
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	165.369.332	103.914.902	12.003.073		281.287.307	289.610.220	298.297.980	307.246.835
032.06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	56.035.681	369.338.647	6.329.700		431.704.028	444.654.954	457.993.966	471.733.705

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	56.035.681	369.338.647	6.329.700		431.704.028	444.654.954	457.993.966	471.733.705
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	56.035.681	369.338.647	6.329.700		431.704.028	444.654.954	457.993.966	471.733.705
032.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		190.400.275	416.200		190.816.475	196.540.881	202.436.823	208.509.917
2357	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan		157.651.475			157.651.475	162.380.984	167.252.267	172.269.830
2358	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		27.057.000			27.057.000	27.868.669	28.704.624	29.565.765
5279	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan		5.691.800	416.200		6.108.000	6.291.228	6.479.932	6.674.322
032.06.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		125.358.000	1.015.000		126.373.000	130.164.145	134.068.908	138.090.939
2356	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan		110.850.000	1.015.000		111.865.000	115.220.919	118.677.474	122.237.786
2360	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		14.508.000			14.508.000	14.943.226	15.391.434	15.853.153
032.06.WA	Program Dukungan Manajemen	56.035.681	53.580.372	4.898.500		114.514.553	117.949.928	121.488.235	125.132.849
2361	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	56.035.681	53.580.372	4.898.500		114.514.553	117.949.928	121.488.235	125.132.849
032.07	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	91.424.090	345.264.385	18.668.700		455.357.175	469.017.461	483.086.632	497.578.994
04	EKONOMI	91.424.090	250.603.835	9.424.800		351.452.725	361.996.040	372.855.041	384.040.582
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	91.424.090	250.603.835	9.424.800		351.452.725	361.996.040	372.855.041	384.040.582
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		168.268.217	679.000		168.947.217	174.015.540	179.235.509	184.612.538
2363	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan		149.668.217	479.000		150.147.217	154.651.549	159.290.631	164.069.328

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		18.600.000	200.000		18.800.000	19.363.991	19.944.878	20.543.210
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen	91.424.090	82.335.618	8.745.800		182.505.508	187.980.500	193.619.532	199.428.044
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	91.424.090	82.335.618	8.745.800		182.505.508	187.980.500	193.619.532	199.428.044
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		94.660.550	9.243.900		103.904.450	107.021.421	110.231.591	113.538.412
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM		94.660.550	9.243.900		103.904.450	107.021.421	110.231.591	113.538.412
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		75.261.550	8.842.900		84.104.450	86.627.440	89.225.866	91.902.519
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut		48.542.100	8.842.900		57.385.000	59.106.412	60.879.240	62.705.496
4346	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		26.719.450			26.719.450	27.521.028	28.346.626	29.197.023
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		19.399.000	401.000		19.800.000	20.393.981	21.005.725	21.635.893
2366	Perencanaan Ruang Laut		19.399.000	401.000		19.800.000	20.393.981	21.005.725	21.635.893
032.12	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	817.478.620	541.592.584	163.502.422		1.522.573.626	1.562.833.916	1.607.807.842	1.654.132.184
04	EKONOMI	817.478.620	414.768.248	68.150.407		1.300.397.275	1.333.964.189	1.372.044.217	1.411.267.415
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	817.478.620	414.768.248	68.150.407		1.300.397.275	1.333.964.189	1.372.044.217	1.411.267.415
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		112.650.550	30.611.816		143.262.366	142.889.662	146.011.992	149.228.050
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		112.650.550	30.611.816		143.262.366	142.889.662	146.011.992	149.228.050

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.12.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		56.175.784	34.768.591		90.944.375	91.883.432	92.850.647	93.846.968
2425	Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan		4.737.500	4.600.000		9.337.500	9.406.401	9.477.366	9.550.469
2426	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		4.383.733	423.788		4.807.521	4.897.510	4.990.199	5.085.675
2427	Riset Perikanan		37.384.551	11.464.194		48.848.745	49.533.266	50.238.302	50.964.559
2428	Riset Kelautan		9.670.000	18.280.609		27.950.609	28.046.255	28.144.780	28.246.265
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	817.478.620	245.941.914	2.770.000		1.066.190.534	1.099.191.095	1.133.181.578	1.168.192.397
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	817.478.620	235.536.384	2.770.000		1.055.785.004	1.088.511.788	1.122.220.278	1.156.940.644
4345	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP		10.405.530			10.405.530	10.679.307	10.961.300	11.251.753
10	PENDIDIKAN		126.824.336	95.352.015		222.176.351	228.869.727	235.763.625	242.864.769
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		126.824.336	95.352.015		222.176.351	228.869.727	235.763.625	242.864.769
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		126.824.336	95.352.015		222.176.351	228.869.727	235.763.625	242.864.769
2376	Pendidikan Kelautan dan Perikanan		126.824.336	95.352.015		222.176.351	228.869.727	235.763.625	242.864.769
032.13	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	273.806.391	246.214.419	83.698.846		603.719.656	621.829.850	640.482.138	659.696.335
04	EKONOMI	273.806.391	246.214.419	83.698.846		603.719.656	621.829.850	640.482.138	659.696.335
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	273.806.391	246.214.419	83.698.846		603.719.656	621.829.850	640.482.138	659.696.335

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		24.149.767	29.160.233		53.310.000	54.904.438	56.551.004	58.247.506
3989	Pengendalian Mutu		24.149.767	29.160.233		53.310.000	54.904.438	56.551.004	58.247.506
032.13.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		66.391.781	25.921.919		92.313.700	95.087.276	97.938.714	100.876.733
3988	Karantina Ikan		27.312.388	25.921.919		53.234.307	54.835.631	56.480.221	58.174.574
3990	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan		39.079.393			39.079.393	40.251.645	41.458.493	42.702.159
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	273.806.391	155.672.871	28.616.694		458.095.956	471.838.136	485.992.420	500.572.096
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	273.806.391	155.672.871	28.616.694		458.095.956	471.838.136	485.992.420	500.572.096
JUMLAH RM						6.498.221.737			
JUMLAH PLN						12.323.695			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						109.593.961			
JUMLAH BLU						32.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	2.995.835.138	49.502.673.465	97.312.631.015		149.811.139.618	151.921.009.037	154.093.233.308	156.330.628.106
033.01	Sekretariat Jenderal	108.313.462	569.118.101	70.772.334		748.203.897	748.203.897	748.203.897	748.203.897
04	EKONOMI	108.313.462	569.118.101	70.772.334		748.203.897	748.203.897	748.203.897	748.203.897
04.90	EKONOMI LAINNYA	108.313.462	569.118.101	70.772.334		748.203.897	748.203.897	748.203.897	748.203.897
033.01.WA	Program Dukungan Manajemen	108.313.462	569.118.101	70.772.334		748.203.897	748.203.897	748.203.897	748.203.897
2382	Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi Dan Tatalaksana		23.550.000			23.550.000	23.550.000	23.550.000	23.550.000
2384	Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta Advokasi Hukum		14.106.480			14.106.480	14.106.480	14.106.480	14.106.480
2390	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR		140.780.432	49.406.203		190.186.635	190.186.635	190.186.635	190.186.635
4206	Penyelenggaraan Fasilitasi Infrastruktur Daerah		48.922.915			48.922.915	48.922.915	48.922.915	48.922.915
4531	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	108.313.462	203.474.419	20.087.581		331.875.462	331.875.462	331.875.462	331.875.462
4532	Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan		6.284.508			6.284.508	6.284.508	6.284.508	6.284.508
4969	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum		93.145.825	1.278.550		94.424.375	94.424.375	94.424.375	94.424.375
5682	Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik		38.853.522			38.853.522	38.853.522	38.853.522	38.853.522
033.02	Inspektorat Jenderal	41.619.569	58.061.869	2.062.800		101.744.238	104.796.465	107.940.294	111.178.508
04	EKONOMI	41.619.569	58.061.869	2.062.800		101.744.238	104.796.465	107.940.294	111.178.508

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.90	EKONOMI LAINNYA	41.619.569	58.061.869	2.062.800		101.744.238	104.796.465	107.940.294	111.178.508
033.02.WA	Program Dukungan Manajemen	41.619.569	58.061.869	2.062.800		101.744.238	104.796.465	107.940.294	111.178.508
2391	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	41.619.569	23.416.851	2.062.800		67.099.220	69.112.149	71.185.485	73.321.048
2392	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR		34.645.018			34.645.018	35.684.316	36.754.809	37.857.460
033.04	Ditjen Bina Marga	1.030.426.761	14.901.930.908	38.024.445.722		53.956.803.391	55.576.447.983	57.243.738.918	58.961.050.653
04	EKONOMI	1.030.426.761	14.901.930.908	38.024.445.722		53.956.803.391	55.576.447.983	57.243.738.918	58.961.050.653
04.08	TRANSPORTASI		13.416.840.370	37.929.971.660		51.346.812.030	52.856.052.890	54.441.733.592	56.074.985.363
033.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		13.416.840.370	37.929.971.660		51.346.812.030	52.856.052.890	54.441.733.592	56.074.985.363
2409	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		11.393.187.621	36.925.887.396		48.319.075.017	49.749.335.190	51.241.814.598	52.779.068.882
2410	Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol		916.976.303			916.976.303	944.485.556	972.820.115	1.002.004.705
4979	Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		1.106.676.446	1.004.084.264		2.110.760.710	2.162.232.144	2.227.098.879	2.293.911.776
04.90	EKONOMI LAINNYA	1.030.426.761	1.485.090.538	94.474.062		2.609.991.361	2.720.395.093	2.802.005.326	2.886.065.290
033.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.030.426.761	1.485.090.538	94.474.062		2.609.991.361	2.720.395.093	2.802.005.326	2.886.065.290
4484	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	1.030.426.761	1.485.090.538	94.474.062		2.609.991.361	2.720.395.093	2.802.005.326	2.886.065.290
033.05	Ditjen Cipta Karya	399.242.131	17.237.381.622	8.924.609.037		26.561.232.790	26.868.952.858	27.185.904.631	27.512.365.328
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	399.242.131	13.795.136.898	6.478.492.983		20.672.872.012	20.903.828.376	21.141.713.488	21.386.735.505

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM		4.437.379.082	2.561.745.618		6.999.124.700	7.031.504.375	7.064.855.456	7.099.207.048
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.437.379.082	2.561.745.618		6.999.124.700	7.031.504.375	7.064.855.456	7.099.207.048
4973	Penyelenggaraan Air Minum yang Layak		4.437.379.082	2.561.745.618		6.999.124.700	7.031.504.375	7.064.855.456	7.099.207.048
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	399.242.131	9.357.757.816	3.916.747.365		13.673.747.312	13.872.324.001	14.076.858.032	14.287.528.457
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		8.757.796.090	3.833.438.484		12.591.234.574	12.764.010.445	12.941.969.633	13.125.267.735
4840	Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak		4.220.826.176	1.681.810.340		5.902.636.516	5.972.975.881	6.045.425.430	6.120.048.463
4971	Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung		4.289.194.825	2.027.890.014		6.317.084.839	6.413.325.840	6.512.454.131	6.614.556.294
4974	Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman		247.775.089	123.738.130		371.513.219	377.708.724	384.090.072	390.662.978
033.05.WA	Program Dukungan Manajemen	399.242.131	599.961.726	83.308.881		1.082.512.738	1.108.313.556	1.134.888.399	1.162.260.722
4481	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	399.242.131	599.961.726	83.308.881		1.082.512.738	1.108.313.556	1.134.888.399	1.162.260.722
10	PENDIDIKAN		3.442.244.724	2.446.116.054		5.888.360.778	5.965.124.482	6.044.191.143	6.125.629.823
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		3.442.244.724	2.446.116.054		5.888.360.778	5.965.124.482	6.044.191.143	6.125.629.823
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.442.244.724	2.446.116.054		5.888.360.778	5.965.124.482	6.044.191.143	6.125.629.823
4253	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan		3.442.244.724	2.446.116.054		5.888.360.778	5.965.124.482	6.044.191.143	6.125.629.823
033.06	Ditjen Sumber Daya Air	1.032.212.469	8.319.441.872	49.196.153.675		58.547.808.016	58.625.633.113	58.705.793.863	58.788.359.997
04	EKONOMI	1.032.212.469	8.319.441.872	49.196.153.675		58.547.808.016	58.625.633.113	58.705.793.863	58.788.359.997
04.04	PENGAIRAN		6.797.304.728	49.017.287.421		55.814.592.149	55.841.665.583	55.869.551.316	55.898.273.643

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
033.06.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air		6.797.304.728	49.017.287.421		55.814.592.149	55.841.665.583	55.869.551.316	55.898.273.643
2418	Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)		9.356.605			9.356.605	9.577.293	9.804.607	10.038.740
2419	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi		110.605.438	390.440		110.995.878	110.995.878	110.995.878	110.995.878
4537	Layanan Teknis SDA		151.638.974	27.031.179		178.670.153	178.670.153	178.670.153	178.670.153
5036	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi		151.956.241	13.753.808.050		13.905.764.291	13.906.079.291	13.906.403.741	13.906.737.924
5037	Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai		52.569.302	11.329.726.518		11.382.295.820	11.387.793.232	11.393.455.567	11.399.287.771
5039	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		222.949.381	19.102.071.395		19.325.020.776	19.325.273.525	19.325.533.859	19.325.802.002
5040	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku		52.272.672	4.306.663.256		4.358.935.928	4.358.935.928	4.358.935.928	4.358.935.928
5300	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana		6.045.956.115	497.596.583		6.543.552.698	6.564.340.283	6.585.751.583	6.607.805.247
04.90	EKONOMI LAINNYA	1.032.212.469	1.522.137.144	178.866.254		2.733.215.867	2.783.967.530	2.836.242.547	2.890.086.354
033.06.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air		223.798.478	54.688.502		278.486.980	278.486.980	278.486.980	278.486.980
2408	Pengendalian Lumpur Sidoarjo		214.548.478	54.688.502		269.236.980	269.236.980	269.236.980	269.236.980
4536	Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air		9.250.000			9.250.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
033.06.WA	Program Dukungan Manajemen	1.032.212.469	1.298.338.666	124.177.752		2.454.728.887	2.505.480.550	2.557.755.567	2.611.599.374

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2421	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	1.032.212.469	1.298.338.666	124.177.752		2.454.728.887	2.505.480.550	2.557.755.567	2.611.599.374
033.07	Ditjen Perumahan	73.749.354	7.077.705.345	942.466.558		8.093.921.257	8.147.489.711	8.202.665.336	8.259.496.446
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	73.749.354	7.077.705.345	942.466.558		8.093.921.257	8.147.489.711	8.202.665.336	8.259.496.446
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	73.749.354	223.091.985	13.649.000		310.490.339	317.303.532	324.321.134	331.549.349
033.07.WA	Program Dukungan Manajemen	73.749.354	223.091.985	13.649.000		310.490.339	317.303.532	324.321.134	331.549.349
5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	73.749.354	223.091.985	13.649.000		310.490.339	317.303.532	324.321.134	331.549.349
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		6.854.613.360	928.817.558		7.783.430.918	7.830.186.179	7.878.344.202	7.927.947.097
033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		6.854.613.360	928.817.558		7.783.430.918	7.830.186.179	7.878.344.202	7.927.947.097
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		6.854.613.360	928.817.558		7.783.430.918	7.830.186.179	7.878.344.202	7.927.947.097
033.13	Ditjen Bina Konstruksi	171.072.834	549.311.576	37.300.000		757.684.410	777.988.451	798.901.768	820.442.586
04	EKONOMI	171.072.834	453.235.576	37.300.000		661.608.410	679.097.693	697.111.809	715.666.434
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	171.072.834	453.235.576	37.300.000		661.608.410	679.097.693	697.111.809	715.666.434
033.13.WA	Program Dukungan Manajemen	171.072.834	453.235.576	37.300.000		661.608.410	679.097.693	697.111.809	715.666.434
2435	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	171.072.834	118.476.099	37.300.000		326.848.933	334.801.620	342.993.005	351.430.104
2436	Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi		11.000.000			11.000.000	11.212.463	11.431.303	11.656.723

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2437	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		10.500.000			10.500.000	10.850.484	11.211.484	11.583.327
2439	Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi		94.397.896			94.397.896	97.011.633	99.703.786	102.476.738
4201	Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi		212.361.581			212.361.581	218.531.069	224.885.662	231.430.934
5590	Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi		6.500.000			6.500.000	6.690.424	6.886.569	7.088.608
10	PENDIDIKAN		96.076.000			96.076.000	98.890.758	101.789.959	104.776.152
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		96.076.000			96.076.000	98.890.758	101.789.959	104.776.152
033.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		96.076.000			96.076.000	98.890.758	101.789.959	104.776.152
4535	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi		96.076.000			96.076.000	98.890.758	101.789.959	104.776.152
033.14	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	28.762.472	176.215.237	1.200.000		206.177.709	212.362.852	218.733.639	225.295.593
04	EKONOMI	28.762.472	176.215.237	1.200.000		206.177.709	212.362.852	218.733.639	225.295.593
04.90	EKONOMI LAINNYA	28.762.472	176.215.237	1.200.000		206.177.709	212.362.852	218.733.639	225.295.593
033.14.WA	Program Dukungan Manajemen	28.762.472	176.215.237	1.200.000		206.177.709	212.362.852	218.733.639	225.295.593
5591	Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah	28.762.472	57.135.237	1.200.000		87.097.709	89.710.537	92.401.803	95.173.841
5592	Pengembangan Infrastruktur Wilayah		119.080.000			119.080.000	122.652.315	126.331.836	130.121.752
033.15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	84.144.024	367.933.979	111.710.889		563.788.892	577.145.703	590.903.547	605.074.329
04	EKONOMI	84.144.024	329.439.689	39.172.179		452.755.892	464.908.210	477.425.425	490.318.369
04.90	EKONOMI LAINNYA	84.144.024	329.439.689	39.172.179		452.755.892	464.908.210	477.425.425	490.318.369

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
033.15.WA	Program Dukungan Manajemen	84.144.024	329.439.689	39.172.179		452.755.892	464.908.210	477.425.425	490.318.369
4977	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR		128.088.697			128.088.697	131.348.221	134.768.305	138.291.099
5596	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	84.144.024	162.198.390	39.172.179		285.514.593	293.212.124	301.078.136	309.180.227
5597	Penyelenggaran Pengembangan Talenta		39.152.602			39.152.602	40.347.865	41.578.984	42.847.043
10	PENDIDIKAN		38.494.290	72.538.710		111.033.000	112.237.493	113.478.122	114.755.960
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		38.494.290	72.538.710		111.033.000	112.237.493	113.478.122	114.755.960
033.15.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		38.494.290	72.538.710		111.033.000	112.237.493	113.478.122	114.755.960
4202	Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum		38.494.290	72.538.710		111.033.000	112.237.493	113.478.122	114.755.960
033.16	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	26.292.062	245.572.956	1.910.000		273.775.018	281.988.004	290.447.415	299.160.769
04	EKONOMI	26.292.062	191.982.929	1.910.000		220.184.991	226.790.323	233.593.834	240.601.586
04.90	EKONOMI LAINNYA	26.292.062	191.982.929	1.910.000		220.184.991	226.790.323	233.593.834	240.601.586
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	26.292.062	191.982.929	1.910.000		220.184.991	226.790.323	233.593.834	240.601.586
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	26.292.062	84.005.740	1.910.000		112.207.802	115.573.968	119.041.134	122.612.355
4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		20.127.189			20.127.189	20.730.965	21.352.839	21.993.425
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		87.850.000			87.850.000	90.485.390	93.199.861	95.995.806

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 033
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		53.590.027			53.590.027	55.197.681	56.853.581	58.559.183
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		53.590.027			53.590.027	55.197.681	56.853.581	58.559.183
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		53.590.027			53.590.027	55.197.681	56.853.581	58.559.183
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		53.590.027			53.590.027	55.197.681	56.853.581	58.559.183
JUMLAH RM						128.749.844.441			
JUMLAH PLN						5.869.121.470			
JUMLAH RMP						257.112.584			
JUMLAH PNBP						28.787.449			
JUMLAH BLU						72.953.524			
JUMLAH HLN						64.610.000			
JUMLAH PBS						14.768.710.150			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 034
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	68.805.991	211.064.583	37.887.332		317.757.906	326.220.314	334.936.683	343.915.019
034.01	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	68.805.991	211.064.583	37.887.332		317.757.906	326.220.314	334.936.683	343.915.019
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	68.805.991	211.064.583	37.887.332		317.757.906	326.220.314	334.936.683	343.915.019
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	68.805.991	211.064.583	37.887.332		317.757.906	326.220.314	334.936.683	343.915.019
034.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		136.692.751			136.692.751	140.304.919	144.025.452	147.857.936
4551	Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri		25.963.587			25.963.587	26.707.809	27.474.346	28.263.919
4552	Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri		10.373.676			10.373.676	10.684.830	11.005.346	11.335.494
4553	Koordinasi Bidang Hukum dan HAM		14.047.979			14.047.979	14.355.444	14.672.140	14.998.357
4554	Koordinasi Bidang Pertahanan Negara		16.549.868			16.549.868	16.996.632	17.456.786	17.930.829
4555	Koordinasi Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		20.326.088			20.326.088	20.934.994	21.562.153	22.208.203
4556	Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa		12.430.824			12.430.824	12.626.821	12.828.701	13.036.668
4557	Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur		37.000.729			37.000.729	37.998.389	39.025.980	40.084.466
034.01.WA	Program Dukungan Manajemen	68.805.991	74.371.832	37.887.332		181.065.155	185.915.395	190.911.231	196.057.083
2440	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data		6.403.062	42.000		6.445.062	6.635.233	6.831.127	7.032.912
2441	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga		3.097.801			3.097.801	3.186.511	3.277.889	3.372.026

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 034
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2442	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	60.357.430	39.195.113	25.333.000		124.885.543	128.245.694	131.706.668	135.271.509
2443	Pengelolaan Pengawasan Internal		3.194.173			3.194.173	3.251.023	3.309.583	3.369.921
2444	Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam		1.889.257			1.889.257	1.945.930	2.004.288	2.064.419
5041	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	4.902.307	12.107.067	9.188.913		26.198.287	26.923.354	27.670.212	28.439.488
5042	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI	3.546.254	8.485.359	3.323.419		15.355.032	15.727.650	16.111.464	16.506.808
JUMLAH RM						317.757.906			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 035
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	118.467.267	319.140.111	5.727.060		443.334.438	456.634.079	470.332.650	484.442.540
035.01	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	118.467.267	319.140.111	5.727.060		443.334.438	456.634.079	470.332.650	484.442.540
04	EKONOMI	118.467.267	319.140.111	5.727.060		443.334.438	456.634.079	470.332.650	484.442.540
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		8.500.000			8.500.000	9.500.000	10.500.000	11.500.000
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		8.500.000			8.500.000	9.500.000	10.500.000	11.500.000
2491	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital		7.000.000			7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000
2512	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN		5.000.000			5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		5.000.000			5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
2516	Koordinasi Kebijakan Pangan		5.000.000			5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
04.90	EKONOMI LAINNYA	118.467.267	305.640.111	5.727.060		429.834.438	441.134.079	452.832.650	464.942.540
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	2.597.493	219.783.870	162.060		222.543.423	233.043.423	243.543.423	254.043.423
2492	Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi		10.000.000			10.000.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000
2499	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 035
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2501	Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2503	Koordinasi Kebijakan Fiskal		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2505	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2510	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2511	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia		4.500.000			4.500.000	5.500.000	6.500.000	7.500.000
2513	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2514	Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional		1.900.000	100.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2518	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri		3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2520	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2524	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2525	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan		5.000.000			5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
2526	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Hortikultura		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 035
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2527	Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2528	Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4539	Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4541	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia		6.000.000			6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
4545	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4546	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi		5.000.000			5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
4547	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi		4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4548	Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 035
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4549	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja		5.000.000			5.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi		90.043.423			90.043.423	92.043.423	94.043.423	96.043.423
5047	Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus	2.597.493	13.840.447	62.060		16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
5200	Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta		9.500.000			9.500.000	10.500.000	11.500.000	12.500.000
5227	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5229	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja		3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5266	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas		17.500.000			17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
035.01.WA	Program Dukungan Manajemen	115.869.774	85.856.241	5.565.000		207.291.015	208.090.656	209.289.227	210.899.117
2486	Peningkatan Pelayanan Perencanaan		15.766.019	1.400.000		17.166.019	17.166.019	17.166.019	17.166.019
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi		4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2488	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	115.869.774	57.680.222	4.075.000		177.624.996	178.424.637	179.623.208	181.233.098
2489	Pengawasan Inspektorat		910.000	90.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian		2.500.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 035
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RM						443.334.438			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 036
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	67.803.257	168.620.570	22.200.000		258.623.827	266.382.218	274.373.272	282.604.351
036.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	67.803.257	168.620.570	22.200.000		258.623.827	266.382.218	274.373.272	282.604.351
01	PELAYANAN UMUM	67.803.257	168.620.570	22.200.000		258.623.827	266.382.218	274.373.272	282.604.351
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	67.803.257	168.620.570	22.200.000		258.623.827	266.382.218	274.373.272	282.604.351
036.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		73.229.708			73.229.708	75.426.359	77.688.868	80.019.443
6337	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial		13.200.000			13.200.000	13.595.959	14.003.771	14.423.861
6338	Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana		4.950.000			4.950.000	5.098.460	5.251.376	5.408.904
6339	Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		4.700.000			4.700.000	4.840.960	4.986.147	5.135.715
6340	Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		4.775.000			4.775.000	4.918.206	5.065.703	5.217.657
6341	Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga		40.429.708			40.429.708	41.642.560	42.891.790	44.178.536
6342	Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama		5.175.000			5.175.000	5.330.214	5.490.081	5.654.770
036.01.WA	Program Dukungan Manajemen	67.803.257	95.390.862	22.200.000		185.394.119	190.955.859	196.684.404	202.584.908

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 036
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6336	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	67.803.257	95.390.862	22.200.000		185.394.119	190.955.859	196.684.404	202.584.908
JUMLAH RM						258.623.827			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 040
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	344.467.070	3.591.583.658	971.097.654		4.907.148.382	5.012.868.733	5.121.760.913	5.233.920.422
040.01	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	344.467.070	3.591.583.658	971.097.654		4.907.148.382	5.012.868.733	5.121.760.913	5.233.920.422
08	PARIWISATA	221.953.834	3.279.989.494	193.380.557		3.695.323.885	3.778.010.757	3.863.178.382	3.950.901.474
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA	17.454.362	232.360.818	135.282.820		385.098.000	390.952.761	396.983.174	403.194.522
040.01.EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif		182.668.293	124.613.718		307.282.011	313.136.772	319.167.185	325.378.533
2596	Pengembangan Manajemen Strategis		32.500.000			32.500.000	33.698.333	34.932.609	36.203.943
2602	Pengelolaan Kawasan Pariwisata		150.168.293	124.613.718		274.782.011	279.438.439	284.234.576	289.174.590
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	17.454.362	49.692.525	10.669.102		77.815.989	77.815.989	77.815.989	77.815.989
6240	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Otorita Pariwisata	17.454.362	49.692.525	10.669.102		77.815.989	77.815.989	77.815.989	77.815.989
08.90	PARIWISATA LAINNYA	204.499.472	3.047.628.676	58.097.737		3.310.225.885	3.387.057.996	3.466.195.208	3.547.706.952
040.01.EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif		2.469.704.748	2.983.000		2.472.687.748	2.525.126.022	2.579.137.508	2.634.769.707
4303	Pengembangan Kajian Strategis		27.584.800			27.584.800	28.966.937	30.390.578	31.856.904
4305	Pengendalian Kebijakan Strategis		13.601.000	399.000		14.000.000	14.419.755	14.852.088	15.297.388
4306	Pengembangan Regulasi		19.000.000			19.000.000	19.499.714	20.014.412	20.544.627
4308	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata		135.624.000			135.624.000	139.129.442	142.740.046	146.458.970

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 040
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4309	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		98.813.000			98.813.000	101.842.769	104.963.439	108.177.740
4310	Pengembangan Kelembagaan		44.000.000			44.000.000	44.004.514	44.009.162	44.013.952
4311	Peningkatan Hubungan Antarlembaga		28.111.000			28.111.000	28.840.773	29.592.432	30.366.647
4313	Pengembangan Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan		55.401.700			55.401.700	56.034.289	56.685.859	57.357.003
4314	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif		113.128.500			113.128.500	118.263.768	123.553.099	129.001.135
4315	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I		27.620.400			27.620.400	28.630.602	29.671.124	30.742.912
4316	Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional II		23.395.400			23.395.400	24.368.131	25.370.049	26.402.042
4318	Peningkatan Manajemen Industri		48.320.065			48.320.065	48.869.666	49.435.755	50.018.827
4319	Peningkatan Manajemen Investasi		11.623.886			11.623.886	11.805.202	11.991.958	12.184.315
4320	Pengembangan Akses Pembiayaan		166.494.943	500.000		166.994.943	169.131.055	171.331.209	173.597.515
4321	Peningkatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual		14.312.106	200.000		14.512.106	14.783.547	15.063.120	15.351.104
4323	Komunikasi Pemasaran		417.775.689			417.775.689	426.781.871	436.058.243	445.612.916
4324	Pemasaran Pariwisata Regional I (Indonesia, ASEAN, Australia dan Oceania)		76.600.000			76.600.000	78.180.424	79.808.289	81.484.988
4325	Pemasaran Pariwisata Regional II (Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Tengah)		49.260.087			49.260.087	49.808.231	50.372.832	50.954.377
4326	Pemasaran Pariwisata Regional III (Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika)		88.566.022			88.566.022	90.356.524	92.200.756	94.100.317

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 040
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4327	Pemasaran Ekonomi Kreatif		44.800.000			44.800.000	45.386.136	45.989.859	46.611.697
4329	Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan		41.700.000			41.700.000	41.700.000	41.700.000	41.700.000
4330	Promosi Wisata Minat Khusus		72.500.000			72.500.000	74.531.000	76.622.930	78.777.613
4331	Pengembangan Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran		84.500.000			84.500.000	87.074.604	89.726.452	92.457.854
4332	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)		629.784.000			629.784.000	638.276.493	647.023.763	656.033.446
4334	Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola Ekonomi Digital		32.998.625	1.884.000		34.882.625	36.338.632	37.838.319	39.382.998
4335	Pengembangan Industri Kreatif Film, Televisi, dan Animasi		37.153.500			37.153.500	38.598.105	40.086.048	41.618.629
4336	Pengembangan Industri Kreatif Fesyen, Desain, dan Kuliner		39.201.625			39.201.625	40.476.929	41.790.493	43.143.463
4337	Pengembangan Industri Kreatif Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan		27.834.400			27.834.400	29.026.909	30.255.194	31.520.328
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	204.499.472	577.923.928	55.114.737		837.538.137	861.931.974	887.057.700	912.937.245
4299	Peningkatan Layanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi		24.062.000	938.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4300	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		30.000.000			30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
4301	Peningkatan Layanan Data dan Informasi		72.000.000			72.000.000	74.160.000	76.384.800	78.676.344
4302	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Kebijakan Strategis		25.500.000	3.471.200		28.971.200	29.720.926	30.493.184	31.288.599
4307	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi		24.358.000	1.000.000		25.358.000	25.646.000	25.942.640	26.248.178

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 040
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bidang Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan								
4312	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur		25.500.000	4.000.000		29.500.000	30.319.074	31.162.715	32.031.708
4317	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Industri dan Investasi		21.400.000	1.050.000		22.450.000	23.025.573	23.618.418	24.229.048
4322	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemasaran		27.741.378	1.400.000		29.141.378	29.950.235	30.783.391	31.641.568
4328	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)		25.500.000	2.800.000		28.300.000	28.750.000	29.213.499	29.690.897
4333	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif		24.761.850	500.000		25.261.850	25.764.705	26.282.646	26.816.123
5324	Peningkatan Layanan Komunikasi Publik		63.041.832	1.958.168		65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
5325	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Hukum		147.991.868	37.997.369		185.989.237	193.717.195	201.676.992	209.875.582
5326	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	204.499.472	27.665.000			232.164.472	242.476.266	253.097.415	264.037.198
5327	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas I		38.402.000			38.402.000	38.402.000	38.402.000	38.402.000
10	PENDIDIKAN	122.513.236	311.594.164	777.717.097		1.211.824.497	1.234.857.976	1.258.582.531	1.283.018.948
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	122.513.236	311.594.164	777.717.097		1.211.824.497	1.234.857.976	1.258.582.531	1.283.018.948
040.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		216.442.113	777.717.097		994.159.210	1.017.192.689	1.040.917.244	1.065.353.661

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 040
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5349	Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata		216.442.113	777.717.097		994.159.210	1.017.192.689	1.040.917.244	1.065.353.661
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	122.513.236	95.152.051			217.665.287	217.665.287	217.665.287	217.665.287
6241	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	122.513.236	95.152.051			217.665.287	217.665.287	217.665.287	217.665.287
JUMLAH RM						4.819.787.274			
JUMLAH PLN						41.000.000			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						46.361.108			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 041
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	63.174.744	159.841.518	21.811.221		244.827.483	252.171.771	259.736.771	267.528.771
041.01	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	63.174.744	159.841.518	21.811.221		244.827.483	252.171.771	259.736.771	267.528.771
04	EKONOMI	63.174.744	159.841.518	21.811.221		244.827.483	252.171.771	259.736.771	267.528.771
04.90	EKONOMI LAINNYA	63.174.744	159.841.518	21.811.221		244.827.483	252.171.771	259.736.771	267.528.771
041.01.EI	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN		71.054.203	15.500.000		86.554.203	89.150.894	91.824.894	94.579.894
4407	Pengembangan BUMN Sektor Industri Energi, Minyak dan Gas		1.598.345			1.598.345	1.650.345	1.705.345	1.761.345
4408	Pengembangan BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara		1.516.690			1.516.690	1.577.843	1.642.843	1.710.843
4409	Pengembangan BUMN Sektor Industri Telekomunikasi dan Farmasi		1.516.690			1.516.690	1.577.640	1.640.640	1.705.640
4410	Pengembangan BUMN Sektor Industri Pertahanan dan Manufaktur		1.516.690			1.516.690	1.571.906	1.630.906	1.689.906
4411	Pengembangan BUMN Sektor Industri Semen, Survei dan Industri Lainnya		1.516.690			1.516.690	1.576.835	1.638.835	1.702.835
4412	Pengembangan BUMN Sektor Perbankan dan Pembiayaan		1.686.475			1.686.475	1.750.329	1.816.329	1.884.329
4413	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Konstruksi dan Perumahan		1.516.690			1.516.690	1.575.786	1.637.786	1.702.786
4414	Pengembangan BUMN Sektor Asuransi dan Jasa Lainnya		1.516.690			1.516.690	1.575.273	1.637.273	1.700.273
4415	Pengembangan BUMN Sektor Perkebunan dan Kehutanan		1.516.690			1.516.690	1.574.972	1.634.972	1.697.972
4416	Pengembangan BUMN Sektor Kawasan, Logistik, dan Pariwisata		1.516.690			1.516.690	1.565.199	1.615.199	1.667.199
4417	Pengembangan BUMN Sektor Sarana dan Prasarana Perhubungan		1.516.690			1.516.690	1.568.602	1.620.602	1.675.602

SK No 019663 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 041
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4418	Peningkatan Pengeloaan Risiko BUMN		4.821.443			4.821.443	4.879.443	4.938.443	4.998.443
4419	Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN		2.849.205			2.849.205	2.944.005	3.043.005	3.144.005
4420	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum		2.234.604			2.234.604	2.310.666	2.387.666	2.467.666
4421	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Keuangan BUMN		15.914.179	10.000.000		25.914.179	26.392.179	26.884.179	27.391.179
4828	Pengembangan BUMN Sektor Industri Pangan dan Pupuk		1.516.690			1.516.690	1.565.780	1.616.780	1.668.780
5810	Peningkatan Kualitas SDM BUMN		1.949.468			1.949.468	1.989.468	2.030.468	2.072.468
5811	Pengembangan Teknologi dan Informasi BUMN yang mendukung kinerja		22.025.778	5.500.000		27.525.778	28.593.817	29.685.817	30.810.817
5813	Penatakelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN		2.807.806			2.807.806	2.910.806	3.017.806	3.127.806
041.01.WA	Program Dukungan Manajemen	63.174.744	88.787.315	6.311.221		158.273.280	163.020.877	167.911.877	172.948.877
2617	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian	63.174.744	17.108.676			80.283.420	82.761.553	85.312.553	87.943.553
2619	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, Rumah Tangga, Layanan Administrasi dan Keuangan		54.620.464	6.311.221		60.931.685	62.744.524	64.613.524	66.535.524
2620	Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian BUMN		2.468.235			2.468.235	2.543.165	2.621.165	2.700.165
4406	Penyelenggaraan Layanan Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis Pimpinan		14.589.940			14.589.940	14.971.635	15.364.635	15.769.635
JUMLAH RM						244.827.483			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 042
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	220.908.438	2.527.327.688	38.947.022		2.787.183.148	2.853.090.988	2.920.975.962	2.990.897.771
042.01	Sekretariat Utama	194.649.474	323.909.577	33.897.645		552.456.696	570.494.101	589.072.518	608.208.521
01	PELAYANAN UMUM	194.649.474	323.909.577	33.897.645		552.456.696	570.494.101	589.072.518	608.208.521
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	194.649.474	323.909.577	33.897.645		552.456.696	570.494.101	589.072.518	608.208.521
042.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		54.353.500			54.353.500	55.983.738	57.662.866	59.392.393
4291	Peningkatan Kualifikasi SDM Iptek		54.353.500			54.353.500	55.983.738	57.662.866	59.392.393
042.01.WA	Program Dukungan Manajemen	194.649.474	269.556.077	33.897.645		498.103.196	514.510.363	531.409.652	548.816.128
4294	Dukungan Manajemen untuk Inspektorat Utama	4.879.782	7.383.368	600.000		12.863.150	13.225.989	13.599.721	13.984.679
4295	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah I		3.384.799			3.384.799	3.479.258	3.576.554	3.676.769
4296	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah II		3.349.074			3.349.074	3.441.947	3.537.605	3.636.137
4297	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Wilayah III		3.458.874			3.458.874	3.554.839	3.653.684	3.755.498
5683	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi, serta Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja		9.978.708	371.292		10.350.000	10.573.581	10.803.876	11.041.085
5684	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		8.818.976	450.000		9.268.976	9.545.532	9.830.369	10.123.770

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 042
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5685	Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Keuangan dan Umum	159.424.830	99.412.339			258.837.169	268.502.129	278.456.979	288.710.552
5687	Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Organisasi		8.898.075	104.200		9.002.275	9.272.321	9.550.438	9.836.939
5688	Peningkatan Layanan Kerjasama dan Komunikasi Publik		15.111.452	499.960		15.611.412	15.855.642	16.107.191	16.366.309
5689	Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	24.484.980	58.452.673	17.493.661		100.431.314	103.429.114	106.516.860	109.697.245
5690	Pengembangan Data dan Informasi Iptek	2.247.412	12.473.611	3.229.760		17.950.783	18.458.941	18.982.339	19.521.427
5691	Pendidikan dan Pelatihan	3.612.470	22.782.706	1.414.500		27.809.676	28.613.939	29.442.314	30.295.572
5926	Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek		16.051.422	9.734.272		25.785.694	26.557.131	27.351.722	28.170.146
042.06	Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan	26.258.964	2.029.374.957	5.049.377		2.060.683.298	2.107.153.762	2.155.018.350	2.204.318.899
01	PELAYANAN UMUM	26.258.964	550.991.336	5.049.377		582.299.677	598.229.061	614.636.335	631.535.854
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	26.258.964	550.991.336	5.049.377		582.299.677	598.229.061	614.636.335	631.535.854
042.06.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		521.420.429	5.049.377		526.469.806	541.443.301	556.866.001	572.751.413
5714	Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek		6.000.000			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
5715	Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat		43.836.100	25.600		43.861.700	43.861.700	43.861.700	43.861.700
5717	Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat		10.571.936	4.782.382		15.354.318	15.814.096	16.287.688	16.775.500
5718	Pengembangan Teknologi dan Produk Inovasi Industri		447.650.308			447.650.308	462.079.363	476.941.271	492.249.052
5719	Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian		13.362.085	241.395		13.603.480	13.688.142	13.775.342	13.865.161

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 042
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
042.06.WA	Program Dukungan Manajemen	26.258.964	29.570.907			55.829.871	56.785.760	57.770.334	58.784.441
4400	Dukungan Manajemen untuk Program Riset dan Inovasi Iptek	23.706.457	14.570.907			38.277.364	39.233.253	40.217.827	41.231.934
6429	Dukungan Manajemen LBM Eijkman	2.552.507	15.000.000			17.552.507	17.552.507	17.552.507	17.552.507
10	PENDIDIKAN		1.478.383.621			1.478.383.621	1.508.924.701	1.540.382.015	1.572.783.045
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		1.478.383.621			1.478.383.621	1.508.924.701	1.540.382.015	1.572.783.045
042.06.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		1.478.383.621			1.478.383.621	1.508.924.701	1.540.382.015	1.572.783.045
5716	Penelitian dan Inovasi Perguruan Tinggi, serta Pengabdian Masyarakat (BOPTN)		1.461.633.621			1.461.633.621	1.492.174.701	1.523.632.015	1.556.033.045
5720	Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi		16.750.000			16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000
042.07	Deputi Bidang Penguatan Inovasi		174.043.154			174.043.154	175.443.125	176.885.094	178.370.351
01	PELAYANAN UMUM		174.043.154			174.043.154	175.443.125	176.885.094	178.370.351
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK		174.043.154			174.043.154	175.443.125	176.885.094	178.370.351
042.07.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		174.043.154			174.043.154	175.443.125	176.885.094	178.370.351
4292	Pengembangan Kawasan Inovasi		32.731.400			32.731.400	34.131.371	35.573.340	37.058.597
5722	Pengembangan Sistem Inovasi		34.340.000			34.340.000	34.340.000	34.340.000	34.340.000
5724	Pengembangan Start Up Inovasi Indonesia		106.971.754			106.971.754	106.971.754	106.971.754	106.971.754
JUMLAH RM						2.776.315.194			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 042
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH PNBP						4.974.471			
JUMLAH BLU						5.893.483			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 044
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	119.919.640	832.302.970	26.066.489		978.289.099	1.007.636.940	1.037.864.624	1.069.000.397
044.01	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	119.919.640	832.302.970	26.066.489		978.289.099	1.007.636.940	1.037.864.624	1.069.000.397
04	EKONOMI	119.919.640	715.745.970	25.023.489		860.689.099	886.508.977	913.102.933	940.495.871
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	119.919.640	715.745.970	25.023.489		860.689.099	886.508.977	913.102.933	940.495.871
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi		492.324.732	16.037.713		508.362.445	523.612.662	539.320.047	555.499.557
2726	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah		107.493.904			107.493.904	110.718.261	114.039.417	117.460.603
2746	Penataan peraturan Akses dan Skema Pembiayaan Koperasi		3.850.000			3.850.000	5.664.984	5.834.901	6.009.942
2751	Perluasan Pemasaran dan Jaringan Usaha UKM		35.728.537	180.000		35.908.537	36.779.779	37.883.105	39.019.598
2765	Pengembangan Bisnis UKM Produk		16.587.450	531.373		17.118.823	17.838.374	18.373.491	18.924.683
2779	Pengelolaan Dana Bergulir		157.113.520	6.492.480		163.606.000	168.514.135	173.569.471	178.776.564
2782	Layanan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM		13.436.768	2.509.380		15.946.148	16.424.524	16.917.243	17.424.758
4442	Pengembangan Manajemen Koperasi		5.600.000			5.600.000	5.973.990	6.153.175	6.337.766
4443	Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi		13.750.000			13.750.000	14.162.486	14.587.300	15.024.919
4444	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Keanggotaan Koperasi		3.270.050			3.270.050	12.668.985	13.048.991	13.440.465
4446	Perkuatan Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Investasi Usaha Mikro		19.697.790			19.697.790	20.288.717	20.897.339	21.524.239

SK No 019669 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 044
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4447	Penguatan Kapasitas Usaha		7.905.400			7.905.400	8.142.559	8.386.829	8.638.433
4448	Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor pertanian dan perkebunan		2.885.843	130.000		3.015.843	3.106.315	3.199.496	3.295.478
4450	Pengembangan Bisnis UKM Jasa		2.398.000	102.000		2.500.000	2.574.984	2.652.226	2.731.784
4451	Penguatan Pengelolaan dan Perlindungan Usaha Mikro		7.750.000			7.750.000	7.982.498	8.221.948	8.468.599
4452	Peningkatan Jaringan Kemitraan dan Akses Pemasaran Usaha Mikro		2.244.750			2.244.750	2.312.092	2.381.445	2.452.889
4453	Digitalisasi Penguatan Produk Usaha Mikro		10.325.250			10.325.250	10.635.006	10.954.030	11.282.646
4454	Penciptaan Iklim Kewirausahaan		9.900.000			9.900.000	10.196.991	10.502.883	10.817.964
4455	Peningkatan Kompetensi SDM dan Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha		33.700.000	200.000		33.900.000	34.916.997	35.964.495	37.043.425
4456	Inkubasi Calon Wirausaha		10.000.000			10.000.000	10.300.000	10.608.993	10.927.263
4457	Pemetaan Potensi Kewirausahaan		11.423.520	276.480		11.700.000	12.050.994	12.412.495	12.784.849
4458	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi		5.263.950	5.616.000		10.879.950			
4948	Pengembangan dan Penguatan Kontribusi Koperasi		12.000.000			12.000.000	12.359.991	12.730.774	13.112.690
044.01.WA	Program Dukungan Manajemen	119.919.640	223.421.238	8.985.776		352.326.654	362.896.315	373.782.886	384.996.314
2724	Perencanaan Program/Kegiatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		11.390.506	264.882		11.655.388	12.085.189	12.447.706	12.821.131

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 044
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2727	Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan	119.919.640	16.862.000	138.000		136.919.640	141.027.218	145.257.989	149.615.733
2728	Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah		7.645.368	857.000		8.502.368	9.784.991	10.078.531	10.380.882
2729	Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Penyelenggaraan Ketatausahaan		20.472.117	483.270		20.955.387	20.652.922	21.272.455	21.910.626
2732	Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM		55.387.236	2.722.544		58.109.780	59.482.497	61.266.966	63.104.974
4440	Manajemen Penyusunan Regulasi		9.652.980	308.700		9.961.680	10.814.988	11.139.395	11.473.571
4441	Komunikasi dan Informasi		32.260.660	2.987.300		35.247.960	35.944.872	37.023.196	38.133.863
4941	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Kelembagaan Perkoperasian		4.150.000	150.000		4.300.000	4.428.983	4.561.826	4.698.685
4942	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Pembiayaan Mikro		4.957.225	153.700		5.110.925	6.308.745	6.497.988	6.692.920
4943	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Produksi dan Pemasaran UKM		6.125.000			6.125.000	6.308.744	6.497.988	6.692.927
4944	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Restrukturisasi usaha Mikro		1.014.075			1.014.075			
4945	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kewirausahaan		5.832.020	292.980		6.125.000	6.308.747	6.497.997	6.692.932

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 044
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4946	Koordinasi Perencanaan, Data dan Umum Bidang Pengawasan Perkoperasian		2.250.000	250.000		2.500.000	2.574.993	2.652.236	2.731.802
5274	Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana BLU		45.422.051	377.400		45.799.451	47.173.426	48.588.613	50.046.268
10	PENDIDIKAN		116.557.000	1.043.000		117.600.000	121.127.963	124.761.691	128.504.526
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		116.557.000	1.043.000		117.600.000	121.127.963	124.761.691	128.504.526
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi		116.557.000	1.043.000		117.600.000	121.127.963	124.761.691	128.504.526
2757	Penumbuhan Wirausaha		26.242.000	758.000		27.000.000	27.809.993	28.644.268	29.503.591
4445	Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro		28.720.000			28.720.000	29.581.598	30.469.039	31.383.109
4449	Peningkatan akses pembiayaan, pengembangan investasi UKM dan Kualitas SDM di sektor perikanan dan peternakan		29.570.000	285.000		29.855.000	30.750.634	31.673.147	32.623.336
5615	Pendampingan, Pengawasan, Penyuluhan dan Peningkatan SDM Koperasi		32.025.000			32.025.000	32.985.738	33.975.237	34.994.490
JUMLAH RM						774.183.099			
JUMLAH BLU						204.106.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 047
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51.345.541	224.327.543	3.895.854		279.568.938	287.955.726	296.593.369	305.491.116
047.01	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51.345.541	224.327.543	3.895.854		279.568.938	287.955.726	296.593.369	305.491.116
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	51.345.541	224.327.543	3.895.854		279.568.938	287.955.726	296.593.369	305.491.116
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA	2.848.132	84.912.000	1.950.000		89.710.132	92.401.345	95.172.998	98.028.162
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak		70.450.000	1.350.000		71.800.000	73.953.938	76.172.220	78.457.376
2805	Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus		5.400.000			5.400.000	5.562.000	5.728.824	5.900.689
2809	Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan		5.250.000			5.250.000	5.407.498	5.569.690	5.736.779
2810	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan		5.800.000			5.800.000	5.973.993	6.153.172	6.337.768
2811	Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak		4.500.000			4.500.000	4.634.996	4.774.029	4.917.250
2812	Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan		4.000.000			4.000.000	4.119.996	4.243.567	4.370.876
5918	Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha		3.000.000			3.000.000	3.089.997	3.182.633	3.278.110
5920	Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan		4.500.000			4.500.000	4.634.986	4.774.005	4.917.230
6373	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak		3.500.000			3.500.000	3.604.995	3.713.123	3.824.511
6374	Peningkatan Partisipasi Keluarga		3.350.000			3.350.000	3.450.483	3.553.989	3.660.607
6377	Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak		23.900.000	600.000		24.500.000	25.234.995	25.992.003	26.771.757

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 047
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6378	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		7.250.000	750.000		8.000.000	8.239.999	8.487.185	8.741.799
047.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.848.132	14.462.000	600.000		17.910.132	18.447.407	19.000.778	19.570.786
6368	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak		4.300.000	200.000		4.500.000	4.634.992	4.774.020	4.917.236
6369	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat		3.700.000	300.000		4.000.000	4.119.992	4.243.582	4.370.886
6371	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak		4.400.000	100.000		4.500.000	4.634.992	4.774.021	4.917.239
6379	Penyelenggaraan Kesekretariatan KPAI	2.848.132	2.062.000			4.910.132	5.057.431	5.209.155	5.365.425
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	48.497.409	139.415.543	1.945.854		189.858.806	195.554.381	201.420.371	207.462.954
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak		69.266.500	700.000		69.966.500	72.065.417	74.227.017	76.453.787
2787	Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)		9.000.000			9.000.000	9.269.983	9.548.057	9.834.493
2790	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum		4.000.000			4.000.000	4.119.994	4.243.562	4.370.865
2794	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya		4.600.000			4.600.000	4.737.985	4.880.080	5.026.481
2795	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi		5.650.000			5.650.000	5.819.494	5.994.052	6.173.867
2797	Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan		6.900.000	100.000		7.000.000	7.209.993	7.426.271	7.649.056
2800	Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO		7.000.000			7.000.000	7.209.998	7.426.239	7.649.013
6372	Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender		3.000.000			3.000.000	3.089.983	3.182.613	3.278.092

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 047
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6375	Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO		7.500.000			7.500.000	7.724.992	7.956.714	8.195.408
6376	Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan		21.616.500	600.000		22.216.500	22.882.995	23.569.429	24.276.512
047.01.WA	Program Dukungan Manajemen	48.497.409	70.149.043	1.245.854		119.892.306	123.488.964	127.193.354	131.009.167
2783	Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Kerja sama		5.313.646	136.354		5.450.000	5.613.487	5.781.857	5.955.302
2784	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Keuangan	48.497.409	5.848.591	150.000		54.496.000	56.130.859	57.814.728	59.549.175
2785	Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA		41.080.306	390.000		41.470.306	42.714.385	43.995.748	45.315.624
2786	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PP dan PA		1.100.000			1.100.000	1.132.989	1.166.955	1.201.973
2788	Telaahan PP dan PA		4.200.000			4.200.000	4.325.986	4.455.735	4.589.407
6367	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Kesetaraan Gender		4.000.000	250.000		4.250.000	4.377.491	4.508.796	4.644.062
6370	Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan		4.300.000	200.000		4.500.000	4.634.993	4.774.031	4.917.252
6380	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		4.306.500	119.500		4.426.000	4.558.774	4.695.504	4.836.372
JUMLAH RM						279.568.938			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 048
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	90.068.389	176.391.786	11.252.015		277.712.190	285.690.742	293.908.582	302.373.261
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	90.068.389	176.391.786	11.252.015		277.712.190	285.690.742	293.908.582	302.373.261
01	PELAYANAN UMUM	90.068.389	176.391.786	11.252.015		277.712.190	285.690.742	293.908.582	302.373.261
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	90.068.389	176.391.786	11.252.015		277.712.190	285.690.742	293.908.582	302.373.261
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN		94.008.336	2.615.924		96.624.260	99.325.351	102.107.405	104.973.130
2834	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur		222.020	500.000		722.020	743.680	765.990	788.968
4350	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik		3.362.000	138.000		3.500.000	3.604.993	3.713.133	3.824.524
6189	Perumusan Kebijakan PANRB		15.171.215	424.023		15.595.238	16.060.021	16.538.731	17.031.865
6190	Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat		2.000.000			2.000.000	2.054.722	2.111.078	2.169.135
6191	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan		31.306.976	750.000		32.056.976	32.896.304	33.760.790	34.651.239
6192	Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		8.879.900	160.000		9.039.900	9.311.092	9.590.413	9.878.123
6193	Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana		11.036.772	298.901		11.335.673	11.675.728	12.025.990	12.386.771
6194	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur		5.564.453	210.000		5.774.453	5.944.015	6.118.656	6.298.573

SK No 019676 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 048
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6195	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik		8.300.000			8.300.000	8.546.668	8.800.701	9.062.405
6196	Penjaminan Kualitas Penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN		3.115.000	85.000		3.200.000	3.280.054	3.362.525	3.447.464
6197	Pengawasan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi		1.950.000	50.000		2.000.000	2.046.702	2.094.812	2.144.364
6198	Pengawasan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN		3.100.000			3.100.000	3.161.372	3.224.586	3.289.699
048.01.WA	Program Dukungan Manajemen	90.068.389	82.383.450	8.636.091		181.087.930	186.365.391	191.801.177	197.400.131
2818	Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB		1.076.530			1.076.530	1.103.987	1.132.268	1.161.401
6178	Pengelolaan Legislasi dan Litigasi		688.660	52.288		740.948	759.217	778.033	797.416
6179	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		7.914.506	186.443		8.100.949	8.345.041	8.596.454	8.855.425
6180	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	77.080.253	33.298.107	5.969.360		116.347.720	119.780.130	123.315.524	126.956.994
6181	Pengelolaan Sistem dan Teknologi		1.740.535	1.182.000		2.922.535	3.005.746	3.091.444	3.179.719
6182	Pengelolaan Organisasi dan SDM		10.881.361	111.000		10.992.361	11.284.065	11.584.512	11.893.991
6183	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		4.372.982	145.000		4.517.982	4.652.593	4.791.238	4.934.059
6184	Pengelolaan Legislasi dan Litigasi KASN		150.000			150.000	154.029	158.177	162.454
6185	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum KASN	12.988.136	17.552.590	500.000		31.040.726	31.967.616	32.922.322	33.905.680
6186	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik KASN		860.000	490.000		1.350.000	1.373.775	1.398.261	1.423.485

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 048
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6187	Pengelolaan Organisasi dan SDM KASN		3.698.179			3.698.179	3.788.524	3.881.590	3.977.443
6188	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal KASN		150.000			150.000	150.668	151.354	152.064
JUMLAH RM						277.712.190			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 050
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	506.224.472	4.962.933.894	3.797.800.871		9.266.959.237	9.542.215.046	9.825.728.516	10.117.747.455
050.01	Badan Intelijen Negara	506.224.472	4.962.933.894	3.797.800.871		9.266.959.237	9.542.215.046	9.825.728.516	10.117.747.455
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	506.224.472	4.962.933.894	3.797.800.871		9.266.959.237	9.542.215.046	9.825.728.516	10.117.747.455
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	506.224.472	4.962.933.894	3.797.800.871		9.266.959.237	9.542.215.046	9.825.728.516	10.117.747.455
050.01.BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara		4.557.542.284			4.557.542.284	4.694.268.537	4.835.096.549	4.980.149.444
2854	Operasi Intelijen Luar Negeri		513.168.000			513.168.000	528.563.037	544.419.926	560.752.523
2855	Operasi Intelijen Dalam Negeri		1.983.354.000			1.983.354.000	2.042.854.617	2.104.140.252	2.167.264.461
2856	Operasi Kontra Intelijen		987.696.000			987.696.000	1.017.326.878	1.047.846.674	1.079.282.074
2857	Operasi Intelijen Ekonomi		249.744.000			249.744.000	257.236.320	264.953.400	272.902.002
2858	Operasi Intelijen Teknologi		239.574.000			239.574.000	246.761.218	254.164.052	261.788.974
2859	Operasi Intelijen Komunikasi dan Informasi		236.988.000			236.988.000	244.097.640	251.420.564	258.963.180
3074	Operasi Intelijen Siber		257.040.000			257.040.000	264.751.197	272.693.727	280.874.539
5235	Analisis dan Produksi Intelijen		89.978.284			89.978.284	92.677.630	95.457.954	98.321.691
050.01.WA	Program Dukungan Manajemen	506.224.472	405.391.610	3.797.800.871		4.709.416.953	4.847.946.509	4.990.631.967	5.137.598.011
2851	Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia	506.224.472	337.191.610	3.797.800.871		4.641.216.953	4.777.700.509	4.918.278.591	5.063.074.036

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 050
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2852	Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen		51.000.000			51.000.000	52.530.000	54.105.900	55.729.077
2853	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		17.200.000			17.200.000	17.716.000	18.247.476	18.794.898
JUMLAH RM						9.266.959.237			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	176.036.615	364.122.912	1.176.448.908		1.716.608.435	1.768.106.199	1.821.148.969	1.875.783.367
051.01	Badan Siber dan Sandi Negara	176.036.615	364.122.912	1.176.448.908		1.716.608.435	1.768.106.199	1.821.148.969	1.875.783.367
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	176.036.615	364.122.912	1.176.448.908		1.716.608.435	1.768.106.199	1.821.148.969	1.875.783.367
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	176.036.615	364.122.912	1.176.448.908		1.716.608.435	1.768.106.199	1.821.148.969	1.875.783.367
051.01.BO	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara		149.699.928	813.416.522		963.116.450	992.009.632	1.021.769.680	1.052.422.721
3080	Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Pemerintah		4.334.720			4.334.720	4.516.417	4.651.898	4.791.459
3081	Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN)		4.988.468			4.988.468	4.938.949	5.087.108	5.239.720
3082	Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Ekonomi Digital		6.762.186			6.762.186	7.189.850	7.405.533	7.627.695
3083	Deteksi Ancaman Siber		6.482.258			6.482.258	6.676.711	6.876.990	7.083.303
3085	Proteksi Sektor Pemerintah		15.409.126			15.409.126	16.178.835	16.664.193	17.164.117
3086	Proteksi Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN)		5.679.912	30.000.000		35.679.912	36.738.522	37.840.662	38.975.880
3092	Proteksi Sektor Ekonomi Digital		5.798.718			5.798.718	6.018.866	6.199.422	6.385.405
3093	Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintah		15.746.658			15.746.658	16.220.580	16.707.181	17.208.397
3094	Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional		4.390.279			4.390.279	4.521.980	4.657.631	4.797.364
3095	Penanggulangan dan Pemulihan Keamanan Siber dan Sandi Sektor		4.134.162			4.134.162	4.391.048	4.522.775	4.658.453

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ekonomi Digital								
3101	Pengendalian Sumber Daya Manusia Siber dan Sandi Nasional		6.229.605			6.229.605	6.438.363	6.631.495	6.830.433
3102	Pemantauan dan Pengendalian Produk Kemanaan Siber dan Sandi		5.385.223			5.385.223	5.548.004	5.714.429	5.885.864
3106	Pengendalian Informasi, Investigasi, dan Forensik Digital		4.119.283			4.119.283	4.242.849	4.370.129	4.501.229
3118	Penyelenggaraan Operasi Keamanan Siber Nasional		2.837.528	681.400.000		684.237.528	704.764.650	725.907.584	747.684.809
3121	Pendidikan dan Pelatihan Bidang Siber dan Sandi		27.538.379			27.538.379	27.593.497	28.421.259	29.273.880
3123	Pendidikan Profesional di Bidang Siber dan Sandi		26.924.093	25.970.870		52.894.963	54.675.987	56.316.232	58.005.701
3124	Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik		2.939.330	76.045.652		78.984.982	81.354.524	83.795.159	86.309.012
051.01.WA	Program Dukungan Manajemen	176.036.615	214.422.984	363.032.386		753.491.985	776.096.567	799.379.289	823.360.646
3075	Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan	176.036.615	6.609.624			182.646.239	189.569.616	195.256.685	201.114.382
3076	Penyelenggaraan Organisasi dan SDM		9.986.501			9.986.501	10.288.841	10.597.453	10.915.366
3077	Penyelenggaraan Hukum dan Hubungan Masyarakat		11.090.097			11.090.097	11.428.633	11.771.462	12.124.607
3078	Penyelenggaraan Dukungan Administratif Bidang Ketatausahaan dan Kerasipan, Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Layanan Pengadaan		105.652.098	107.071.673		212.723.771	219.210.158	225.786.447	232.560.036
3079	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Siber dan Sandi Negara		3.924.618			3.924.618	4.042.335	4.163.581	4.288.484
3138	Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi		74.264.995	180.960.713		255.225.708	260.670.430	268.490.527	276.545.242

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3139	Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi		2.895.051	75.000.000		77.895.051	80.886.554	83.313.134	85.812.529
JUMLAH RM						1.716.608.435			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 052
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	28.459.484	21.977.346			50.436.830	51.949.792	53.508.101	55.113.312
052.01	Setjen Dewan Ketahanan Nasional	28.459.484	21.977.346			50.436.830	51.949.792	53.508.101	55.113.312
02	PERTAHANAN	28.459.484	21.353.625			49.813.109	51.307.364	52.846.406	54.431.768
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	28.459.484	13.988.784			42.448.268	43.721.650	45.033.222	46.384.217
052.01.WA	Program Dukungan Manajemen	28.459.484	13.988.784			42.448.268	43.721.650	45.033.222	46.384.217
2874	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan		760.359			760.359	783.130	806.601	830.795
2875	Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan		685.179			685.179	705.727	726.866	748.672
2876	Pengelolaan Internal Perkantoran	28.459.484	12.543.246			41.002.730	42.232.793	43.499.755	44.804.750
02.04	LITBANG PERTAHANAN		7.364.841			7.364.841	7.585.714	7.813.184	8.047.551
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional		7.364.841			7.364.841	7.585.714	7.813.184	8.047.551
5649	Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam		488.656			488.656	503.311	518.403	533.953
5653	Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial		488.656			488.656	503.311	518.403	533.953
5656	Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara		488.656			488.656	503.311	518.403	533.953
5659	Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data		458.044			458.044	471.780	485.928	500.503
5663	Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu		153.060			153.060	157.645	162.370	167.240
5943	Perumusan Kebijakan Politik Nasional		488.656			488.656	503.311	518.403	533.953

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 052
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5944	Perumusan Kebijakan Bidang Strategi Nasional		623.711			623.711	642.418	661.685	681.533
5945	Perumusan Kebijakan Bidang Rencana Kontijensi		623.711			623.711	642.418	661.685	681.533
5946	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional		623.701			623.701	642.408	661.674	681.522
5948	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional		488.656			488.656	503.311	518.403	533.953
5949	Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan		580.492			580.492	597.901	615.829	634.302
5950	Perumusan Kebijakan Bidang Ekonomi		580.492			580.492	597.901	615.829	634.302
5951	Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan		697.858			697.858	718.787	740.340	762.549
5952	Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya		580.492			580.492	597.901	615.829	634.302
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		623.721			623.721	642.428	661.695	681.544
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN		623.721			623.721	642.428	661.695	681.544
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional		623.721			623.721	642.428	661.695	681.544
5947	Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional		623.721			623.721	642.428	661.695	681.544
JUMLAH RM						50.436.830			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 054
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.244.503.319	2.902.294.288	131.953.537		5.278.751.144	5.437.085.457	5.600.189.696	5.768.193.410
054.01	Badan Pusat Statistik	2.244.503.319	2.902.294.288	131.953.537		5.278.751.144	5.437.085.457	5.600.189.696	5.768.193.410
01	PELAYANAN UMUM	2.244.503.319	2.902.294.288	131.953.537		5.278.751.144	5.437.085.457	5.600.189.696	5.768.193.410
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2.244.503.319	2.902.294.288	131.953.537		5.278.751.144	5.437.085.457	5.600.189.696	5.768.193.410
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		2.260.993.981	20.856.850		2.281.850.831	2.350.283.874	2.420.786.183	2.493.408.044
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik		6.393.093			6.393.093	6.584.869	6.782.366	6.985.841
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik		42.512.612	60.000		42.572.612	43.849.305	45.164.132	46.518.856
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran		25.977.421			25.977.421	26.755.494	27.557.384	28.383.979
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi		31.764.492			31.764.492	32.716.525	33.697.551	34.708.063
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei		27.647.824			27.647.824	28.476.703	29.331.061	30.210.854
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik		10.405.173	19.576.850		29.982.023	30.881.480	31.807.923	32.762.160
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi		18.754.274			18.754.274	19.315.842	19.895.528	20.492.202
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga		92.681.445	1.220.000		93.901.445	96.717.358	99.618.567	102.607.200
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi		74.206.048			74.206.048	76.431.208	78.723.981	81.085.517
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan		1.220.548.656			1.220.548.656	1.257.159.249	1.294.871.478	1.333.717.116

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 054
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat		255.769.256			255.769.256	263.441.073	271.343.789	279.484.326
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial		142.975.721			142.975.721	147.262.480	151.680.174	156.230.262
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata		65.607.282			65.607.282	67.574.088	69.601.339	71.689.122
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan		91.870.563			91.870.563	94.624.809	97.463.487	100.387.347
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		153.880.121			153.880.121	158.493.391	163.247.423	168.145.199
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.244.503.319	641.300.307	111.096.687		2.996.900.313	3.086.801.583	3.179.403.513	3.274.785.366
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran		30.947.688	4.500.000		35.447.688	36.511.110	37.606.436	38.734.628
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum		7.844.390	40.000		7.884.390	8.120.917	8.364.538	8.615.472
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian		24.836.999			24.836.999	25.582.103	26.349.558	27.140.048
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	239.904.861	4.141.587			244.046.448	251.367.832	258.908.863	266.676.124
2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya		99.295.038	38.957.763		138.252.801	142.400.377	146.672.382	151.072.543
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	1.970.676.899	385.152.658	65.806.424		2.421.635.981	2.494.279.412	2.569.105.751	2.646.178.706
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	12.984.469	57.321.605	1.500.000		71.806.074	73.960.237	76.179.028	78.464.390
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	20.937.090	25.643.173	292.500		46.872.763	48.278.924	49.727.267	51.219.079

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 054
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I		2.128.461			2.128.461	2.192.310	2.258.079	2.325.820
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II		1.908.754			1.908.754	1.966.012	2.024.992	2.085.740
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III		2.079.954			2.079.954	2.142.349	2.206.619	2.272.816
JUMLAH RM						5.255.281.667			
JUMLAH PNBP						23.469.477			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 055
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	200.667.839	1.434.604.313	135.149.011		1.770.421.163	1.823.532.858	1.878.237.844	1.934.584.859
055.01	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	200.667.839	1.434.604.313	135.149.011		1.770.421.163	1.823.532.858	1.878.237.844	1.934.584.859
01	PELAYANAN UMUM	200.667.839	1.434.604.313	135.149.011		1.770.421.163	1.823.532.858	1.878.237.844	1.934.584.859
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	200.667.839	1.434.604.313	135.149.011		1.770.421.163	1.823.532.858	1.878.237.844	1.934.584.859
055.01.CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional		945.894.924	35.383.639		981.278.563	1.010.716.136	1.041.036.836	1.072.267.878
6262	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		22.300.000	1.500.000		23.800.000	24.513.937	25.249.301	26.006.794
6263	Perencanaan Pembangunan Regional		90.435.215			90.435.215	93.148.173	95.942.522	98.820.790
6264	Perencanaan Pembangunan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam		144.718.758	1.101.242		145.820.000	151.224.515	155.761.135	160.433.958
6265	Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan		38.250.000	2.250.000		40.500.000	41.714.948	42.966.352	44.255.348
6266	Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan		40.190.000	100.000		40.290.000	41.498.650	42.743.545	44.025.848
6267	Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana		88.259.028	280.972		88.540.000	91.196.130	93.931.914	96.749.856
6268	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan		27.000.000			27.000.000	27.809.958	28.644.176	29.503.487
6269	Perencanaan Pembangunan Bidang Pendanaan Pembangunan		61.826.600	829.800		62.656.400	64.536.045	66.472.038	68.466.202

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 055
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6270	Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan		37.950.000	50.000		38.000.000	39.139.970	40.314.119	41.523.543
6271	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang		245.175.323	29.271.625		274.446.948	281.650.123	290.099.565	298.802.525
6272	Fasilitasi Peningkatan Institusi Perencana yang Berkelanjutan		149.790.000			149.790.000	154.283.687	158.912.169	163.679.527
055.01.WA	Program Dukungan Manajemen	200.667.839	488.709.389	99.765.372		789.142.600	812.816.722	837.201.008	862.316.981
6257	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		76.035.132	31.442.500		107.477.632	110.701.935	114.022.944	117.443.629
6258	Legislasi dan Litigasi		5.000.000			5.000.000	5.149.995	5.304.486	5.463.623
6259	Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan SDM		98.305.683	17.572.082		115.877.765	119.354.079	122.934.664	126.622.695
6260	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	200.667.839	300.119.364	50.000.000		550.787.203	567.310.742	584.329.971	601.859.827
6261	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		9.249.210	750.790		10.000.000	10.299.971	10.608.943	10.927.207
JUMLAH RM						1.595.541.163			
JUMLAH PLN						84.470.000			
JUMLAH RMP						25.000.000			
JUMLAH HLN						65.410.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	2.176.831.077	6.178.845.054	577.948.406		8.933.624.537	9.060.602.384	9.190.081.433	9.323.451.941
056.01	Sekretariat Jenderal	2.176.831.077	5.554.111.218	366.845.635		8.097.787.930	8.206.090.388	8.316.333.498	8.429.890.760
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	2.176.831.077	5.554.111.218	366.845.635		8.097.787.930	8.206.090.388	8.316.333.498	8.429.890.760
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	2.176.831.077	5.554.111.218	366.845.635		8.097.787.930	8.206.090.388	8.316.333.498	8.429.890.760
056.01.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		3.715.394.348	151.426.376		3.866.820.724	3.866.820.707	3.866.820.707	3.866.820.707
6411	Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang		4.760.542	2.418.803		7.179.345	7.179.344	7.179.344	7.179.344
6412	Survei dan Pemetaan Tematik		5.876.416	57.729.923		63.606.339	63.606.339	63.606.339	63.606.339
6413	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		1.646.705.888			1.646.705.888	1.646.705.888	1.646.705.888	1.646.705.888
6414	Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT		24.625.929			24.625.929	24.625.929	24.625.929	24.625.929
6415	Penetapan Hak Tanah dan Ruang		92.379.907			92.379.907	92.379.907	92.379.907	92.379.907
6416	Pendaftaran Tanah dan Ruang		1.338.541.790			1.338.541.790	1.338.541.788	1.338.541.788	1.338.541.788
6417	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah		20.270.210	55.943.850		76.214.060	76.214.060	76.214.060	76.214.060
6418	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		329.916.184			329.916.184	329.916.184	329.916.184	329.916.184
6419	Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)		99.036.508			99.036.508	99.036.507	99.036.507	99.036.507
6420	Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah		10.786.827	2.000		10.788.827	10.788.827	10.788.827	10.788.827

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6421	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan		8.461.892	35.331.800		43.793.692	43.793.692	43.793.692	43.793.692
6422	Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		18.210.588			18.210.588	18.210.588	18.210.588	18.210.588
6423	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan		10.266.335			10.266.335	10.266.332	10.266.332	10.266.332
6424	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		5.832.410			5.832.410	5.832.410	5.832.410	5.832.410
6425	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan		45.436.650			45.436.650	45.436.640	45.436.640	45.436.640
6426	Penanganan Sengketa Pertanahan		24.816.577			24.816.577	24.816.577	24.816.577	24.816.577
6427	Penanganan Perkara Pertanahan		29.469.695			29.469.695	29.469.695	29.469.695	29.469.695
056.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.176.831.077	1.838.716.870	215.419.259		4.230.967.206	4.339.269.681	4.449.512.791	4.563.070.053
4401	Penyelenggaraan Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat		83.030.916	2.359.680		85.390.596	87.245.696	89.156.453	91.124.536
5517	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	196.285.954	32.364.848	230.000		228.880.802	235.729.253	242.783.166	250.048.716
5518	Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian		16.876.206	614.000		17.490.206	17.994.918	18.514.786	19.050.251
5519	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran serta Administrasi Kerjasama		12.007.329	335.100		12.342.429	12.457.566	12.576.158	12.698.307
5521	Pengelolaan Administrasi Umum		97.876.668	21.689.120		119.565.788	125.028.203	130.654.490	136.449.571
5522	Pengembangan Data dan Informasi		53.714.661	54.167.467		107.882.128	110.339.381	112.870.363	115.477.267
5523	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum		17.768.316	620.500		18.388.816	18.906.545	19.439.808	19.989.070

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5524	Penyelenggaraan Pengembangan SDM Bidang Agraria dan Tata Ruang		53.134.650	3.160.800		56.295.450	56.516.153	56.743.483	56.977.627
5525	Kajian Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan		8.227.471	630.185		8.857.656	8.857.656	8.857.656	8.857.656
5526	Penyelenggaran Pendidikan Vokasi STPN	18.012.619	24.624.602	2.500.000		45.137.221	46.420.661	47.742.559	49.104.225
5527	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1.962.532.504	1.439.091.203	129.112.407		3.530.736.114	3.619.773.649	3.710.173.869	3.803.292.827
056.02	Inspektorat Jenderal		20.915.262	1.375.951		22.291.213	22.758.353	23.239.588	23.735.293
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		20.915.262	1.375.951		22.291.213	22.758.353	23.239.588	23.735.293
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		20.915.262	1.375.951		22.291.213	22.758.353	23.239.588	23.735.293
056.02.WA	Program Dukungan Manajemen		20.915.262	1.375.951		22.291.213	22.758.353	23.239.588	23.735.293
5530	Dukungan Manajemen Program Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Resiko		10.133.075	1.375.951		11.509.026	11.700.724	11.898.195	12.101.597
5531	Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko WIlayah I		2.012.374			2.012.374	2.066.191	2.121.632	2.178.743
5532	Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko WIlayah II		1.953.651			1.953.651	2.010.119	2.068.293	2.128.218
5533	Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko WIlayah III		1.880.419			1.880.419	1.935.690	1.992.634	2.051.292

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5534	Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko WIlayah IV		2.628.807			2.628.807	2.701.031	2.775.433	2.852.078
5535	Pengawasan Internal dan Penyelenggaran Manajemen Kualitas dan Risiko Bidang Investigasi		2.306.936			2.306.936	2.344.598	2.383.401	2.423.365
056.03	Direktorat Jenderal Tata Ruang		186.295.994	12.870.341		199.166.335	205.141.120	211.295.232	217.634.092
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		186.295.994	12.870.341		199.166.335	205.141.120	211.295.232	217.634.092
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		186.295.994	12.870.341		199.166.335	205.141.120	211.295.232	217.634.092
056.03.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		130.109.000			130.109.000	134.012.133	138.032.420	142.173.400
4405	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II		46.841.600			46.841.600	48.246.806	49.694.166	51.184.991
5538	Perencanaan Tata Ruang Nasional		19.622.000			19.622.000	20.210.625	20.816.935	21.441.440
5539	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		17.017.000			17.017.000	17.527.473	18.053.285	18.594.892
5541	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I		46.628.400			46.628.400	48.027.229	49.468.034	50.952.077
056.03.WA	Program Dukungan Manajemen		56.186.994	12.870.341		69.057.335	71.128.987	73.262.812	75.460.692
5536	Dukungan Manajemen (Ditjen 1-TR)		56.186.994	12.870.341		69.057.335	71.128.987	73.262.812	75.460.692
056.04	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		77.186.912	180.672.748		257.859.660	265.595.363	273.563.185	281.770.059
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		77.186.912	180.672.748		257.859.660	265.595.363	273.563.185	281.770.059
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		77.186.912	180.672.748		257.859.660	265.595.363	273.563.185	281.770.059

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
056.04.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		50.418.370	132.426.331		182.844.701	188.329.969	193.979.844	199.799.230
5543	Pengelolaan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang		10.521.294	59.858.941		70.380.235	72.491.595	74.666.326	76.906.316
5544	Survei dan Pemetaan Tematik		5.544.112	72.567.390		78.111.502	80.454.830	82.868.466	85.354.517
5546	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		34.352.964			34.352.964	35.383.544	36.445.052	37.538.397
056.04.WA	Program Dukungan Manajemen		26.768.542	48.246.417		75.014.959	77.265.394	79.583.341	81.970.829
5542	Dukungan Manajemen (Ditjen 2-SPPR)		26.768.542	48.246.417		75.014.959	77.265.394	79.583.341	81.970.829
056.05	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		63.661.478	2.290.500		65.951.978	67.930.473	69.968.292	72.067.292
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		63.661.478	2.290.500		65.951.978	67.930.473	69.968.292	72.067.292
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		63.661.478	2.290.500		65.951.978	67.930.473	69.968.292	72.067.292
056.05.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		53.218.073			53.218.073	54.814.565	56.458.926	58.152.648
4402	Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT		37.114.600			37.114.600	38.228.016	39.374.817	40.556.040
5549	Penetapan Hak Tanah dan Ruang		10.226.865			10.226.865	10.533.655	10.849.643	11.175.123
5550	Pendaftaran Tanah dan Ruang		5.876.608			5.876.608	6.052.894	6.234.466	6.421.485
056.05.WA	Program Dukungan Manajemen		10.443.405	2.290.500		12.733.905	13.115.908	13.509.366	13.914.644
5548	Dukungan Manajemen (Ditjen 3-PHPT)		10.443.405	2.290.500		12.733.905	13.115.908	13.509.366	13.914.644
056.06	Direktorat Jenderal Penataan Agraria		38.965.095	3.106.042		42.071.137	42.491.398	42.924.282	43.370.157

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		38.965.095	3.106.042		42.071.137	42.491.398	42.924.282	43.370.157
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		38.965.095	3.106.042		42.071.137	42.491.398	42.924.282	43.370.157
056.06.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		33.123.817	2.357.542		35.481.359	35.901.620	36.334.504	36.780.379
5551	Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)		9.086.841	1.000.000		10.086.841	10.086.841	10.086.841	10.086.841
5554	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah		5.241.100	779.653		6.020.753	6.068.786	6.118.270	6.169.237
5557	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		18.795.876	577.889		19.373.765	19.745.993	20.129.393	20.524.301
056.06.WA	Program Dukungan Manajemen		5.841.278	748.500		6.589.778	6.589.778	6.589.778	6.589.778
5553	Dukungan Manajemen (Ditjen 4-Pentag)		5.841.278	748.500		6.589.778	6.589.778	6.589.778	6.589.778
056.07	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan		31.166.311	5.039.589		36.205.900	37.291.971	38.410.694	39.562.969
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		31.166.311	5.039.589		36.205.900	37.291.971	38.410.694	39.562.969
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		31.166.311	5.039.589		36.205.900	37.291.971	38.410.694	39.562.969
056.07.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		23.708.211	4.840.089		28.548.300	29.404.660	30.286.779	31.195.343
4403	Pengadaan tanah dan Pencadangan tanah		2.748.236			2.748.236	2.830.679	2.915.594	3.003.059
5556	Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan		17.026.929			17.026.929	17.537.676	18.063.804	18.605.693
5563	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan		3.933.046	4.840.089		8.773.135	9.036.305	9.307.381	9.586.591

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
056.07.WA	Program Dukungan Manajemen		7.458.100	199.500		7.657.600	7.887.311	8.123.915	8.367.626
5559	Dukungan Manajemen (Ditjen 5-PTPP)		7.458.100	199.500		7.657.600	7.887.311	8.123.915	8.367.626
056.08	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang		173.324.659	5.199.200		178.523.859	178.523.859	178.523.859	178.523.859
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		173.324.659	5.199.200		178.523.859	178.523.859	178.523.859	178.523.859
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		173.324.659	5.199.200		178.523.859	178.523.859	178.523.859	178.523.859
056.08.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		51.813.000			51.813.000	51.813.000	51.813.000	51.813.000
5569	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan		26.720.000			26.720.000	26.720.000	26.720.000	26.720.000
5570	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		25.093.000			25.093.000	25.093.000	25.093.000	25.093.000
056.08.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		91.228.000			91.228.000	91.228.000	91.228.000	91.228.000
5567	Penertiban Pemanfaatan Ruang		36.699.000			36.699.000	36.699.000	36.699.000	36.699.000
5568	Pengendalian Pemanfaatan Ruang		54.529.000			54.529.000	54.529.000	54.529.000	54.529.000
056.08.WA	Program Dukungan Manajemen		30.283.659	5.199.200		35.482.859	35.482.859	35.482.859	35.482.859
5565	Dukungan Manajemen (Dirjen 6-PPTR)		30.283.659	5.199.200		35.482.859	35.482.859	35.482.859	35.482.859
056.09	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan		33.218.125	548.400		33.766.525	34.779.459	35.822.803	36.897.460
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		33.218.125	548.400		33.766.525	34.779.459	35.822.803	36.897.460
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		33.218.125	548.400		33.766.525	34.779.459	35.822.803	36.897.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
056.09.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		20.513.627			20.513.627	21.128.994	21.762.842	22.415.709
4404	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan		12.811.859			12.811.859	13.196.196	13.592.075	13.999.828
5573	Penanganan Sengketa Pertanahan		2.967.503			2.967.503	3.056.517	3.148.203	3.242.649
5576	Penanganan Perkara Pertanahan		4.734.265			4.734.265	4.876.281	5.022.564	5.173.232
056.09.WA	Program Dukungan Manajemen		12.704.498	548.400		13.252.898	13.650.465	14.059.961	14.481.751
5572	Dukungan Manajemen (Ditjen 7-PSKP)		12.704.498	548.400		13.252.898	13.650.465	14.059.961	14.481.751
JUMLAH RM						6.648.242.212			
JUMLAH PLN						721.049.000			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						1.564.333.325			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 057
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	131.528.833	463.375.227	80.635.740		675.539.800	688.970.225	702.803.456	717.052.134
057.01	Perpustakaan Nasional	131.528.833	463.375.227	80.635.740		675.539.800	688.970.225	702.803.456	717.052.134
01	PELAYANAN UMUM	131.528.833	93.531.772	4.676.815		229.737.420	234.755.900	239.924.953	245.249.145
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	131.528.833	93.531.772	4.676.815		229.737.420	234.755.900	239.924.953	245.249.145
057.01.WA	Program Dukungan Manajemen	131.528.833	93.531.772	4.676.815		229.737.420	234.755.900	239.924.953	245.249.145
3067	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	6.358.949	3.083.500			9.442.449	9.725.050	10.016.129	10.315.945
3069	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta	2.822.838	2.271.100			5.093.938	5.246.749	5.404.144	5.566.271
4377	Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional	122.347.046	10.234.363			132.581.409	136.361.547	140.255.087	144.265.442
4378	Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional		13.626.114	305.000		13.931.114	14.279.698	14.638.739	15.008.570
4379	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum Perpustakaan Nasional		59.497.395	4.191.115		63.688.510	64.007.848	64.336.783	64.675.602
5204	Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional		4.819.300	180.700		5.000.000	5.135.008	5.274.071	5.417.315
10	PENDIDIKAN		369.843.455	75.958.925		445.802.380	454.214.325	462.878.503	471.802.989
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		369.843.455	75.958.925		445.802.380	454.214.325	462.878.503	471.802.989
057.01.DM	Program Perpustakaan dan Literasi		369.843.455	75.958.925		445.802.380	454.214.325	462.878.503	471.802.989
3004	Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara		16.663.062	853.000		17.516.062	17.550.999	17.586.984	17.624.049

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 057
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3005	Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan		9.817.531	199.000		10.016.531	10.228.082	10.445.981	10.670.431
3008	Pembinaan Pustakawan		5.520.899	493.600		6.014.499	6.131.641	6.252.298	6.376.582
3009	Preservasi dan Alih Media Bahan Perpustakaan		5.929.337	2.420.338		8.349.675	8.549.772	8.755.883	8.968.181
3010	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno		4.367.902	15.602.598		19.970.500	20.500.578	21.046.540	21.608.914
4380	Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan		48.890.977	37.923.141		86.814.118	89.289.114	91.838.358	94.464.092
4381	Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan		3.100.286	1.185.590		4.285.876	4.392.124	4.501.559	4.614.277
4382	Pengelolaan Data dan Informasi		3.396.132	11.103.000		14.499.132	14.870.300	15.252.604	15.646.378
4383	Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan		3.445.120			3.445.120	3.548.459	3.654.906	3.764.556
4384	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus		230.059.167	5.080.000		235.139.167	238.371.241	241.700.145	245.129.205
4385	Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi		11.714.700			11.714.700	12.056.456	12.408.459	12.771.028
4386	Analisis Perpustakaan, Pengembangan Budaya Baca dan Literasi		23.551.500			23.551.500	24.189.437	24.846.517	25.523.309
5272	Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta		3.386.842	1.098.658		4.485.500	4.536.122	4.588.269	4.641.987
JUMLAH RM						674.503.759			
JUMLAH PNBP						1.036.041			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	499.005.709	8.413.090.264	8.046.681.977		16.958.777.950	17.215.635.487	17.692.896.324	18.185.373.531
059.01	Sekretariat Jenderal	66.286.243	302.438.283	53.078.215		421.802.741	422.267.064	423.195.815	423.660.142
04	EKONOMI	66.286.243	302.438.283	53.078.215		421.802.741	422.267.064	423.195.815	423.660.142
04.09	TELEKOMUNIKASI	66.286.243	302.438.283	53.078.215		421.802.741	422.267.064	423.195.815	423.660.142
059.01.GH	Program Komunikasi Publik		63.626.624	60.000		63.686.624	64.150.947	65.079.698	65.544.025
4511	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik		13.000.000			13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
4523	Penguatan Lembaga Pers dan Jurnalis		23.623.175			23.623.175	23.623.175	23.623.175	23.623.175
4524	Peningkatan Kualitas Konten Penyiaran		27.003.449	60.000		27.063.449	27.527.772	28.456.523	28.920.850
059.01.WA	Program Dukungan Manajemen	66.286.243	238.811.659	53.018.215		358.116.117	358.116.117	358.116.117	358.116.117
4492	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Sekretariat Jenderal	66.286.243	135.457.921	47.817.417		249.561.581	249.561.581	249.561.581	249.561.581
4493	Pengelolaan Organisasi dan SDM		17.000.001			17.000.001	17.000.001	17.000.001	17.000.001
4513	Legislasi dan Litigasi		6.554.536			6.554.536	6.554.536	6.554.536	6.554.536
4518	Pengelolaan administrasi dan kerjasama internasional		7.999.999			7.999.999	7.999.999	7.999.999	7.999.999
4519	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		41.850.000	150.000		42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
4520	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika		19.109.150	890.850		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4521	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		10.840.052	4.159.948		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059.02	Inspektorat Jenderal	15.529.202	22.883.764	626.500		39.039.466	40.992.376	43.042.066	45.194.486
04	EKONOMI	15.529.202	22.883.764	626.500		39.039.466	40.992.376	43.042.066	45.194.486
04.09	TELEKOMUNIKASI	15.529.202	22.883.764	626.500		39.039.466	40.992.376	43.042.066	45.194.486
059.02.WA	Program Dukungan Manajemen	15.529.202	22.883.764	626.500		39.039.466	40.992.376	43.042.066	45.194.486
4491	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Inspektorat Jenderal	15.529.202	10.778.182	626.500		26.933.884	28.141.893	29.406.447	30.729.159
4497	Pengelolaan Resiko, Pengandalian dan Pengawasan Internal		12.105.582			12.105.582	12.850.483	13.635.619	14.465.327
059.03	Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	199.560.803	525.153.033	349.359.250		1.074.073.086	1.007.020.225	1.008.942.698	1.012.271.967
04	EKONOMI	199.560.803	525.153.033	349.359.250		1.074.073.086	1.007.020.225	1.008.942.698	1.012.271.967
04.09	TELEKOMUNIKASI	199.560.803	525.153.033	349.359.250		1.074.073.086	1.007.020.225	1.008.942.698	1.012.271.967
059.03.GE	Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika		241.128.625	253.572.679		494.701.304	492.300.185	492.300.185	494.701.304
4499	Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat TIK		174.233.414	55.690.000		229.923.414	229.923.414	229.923.414	229.923.414
4514	Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan SFR dan SOR		66.895.211	197.882.679		264.777.890	262.376.771	262.376.771	264.777.890
059.03.WA	Program Dukungan Manajemen	199.560.803	284.024.408	95.786.571		579.371.782	514.720.040	516.642.513	517.570.663
4489	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	199.560.803	284.024.408	95.786.571		579.371.782	514.720.040	516.642.513	517.570.663
059.04	Ditjen Aplikasi Informatika	36.845.824	1.913.822.903	1.304.190.795		3.254.859.522	3.352.505.100	3.453.080.113	3.556.672.448

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	36.845.824	1.913.822.903	1.304.190.795		3.254.859.522	3.352.505.100	3.453.080.113	3.556.672.448
04.09	TELEKOMUNIKASI	36.845.824	1.913.822.903	1.304.190.795		3.254.859.522	3.352.505.100	3.453.080.113	3.556.672.448
059.04.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		1.880.699.560	1.302.990.795		3.183.690.355	3.279.200.900	3.377.576.833	3.478.904.084
4496	Pengembangan literasi digital bagi masyarakat		1.152.500.907	21.499.093		1.174.000.000	1.209.219.988	1.245.496.589	1.282.861.480
4502	Pengendalian konten dan aplikasi informatika		117.673.983	749.379.878		867.053.861	893.065.441	919.857.375	947.453.080
4507	Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi digital pada sektor ekonomi dan bisnis		293.150.000	5.850.000		299.000.000	307.969.937	317.208.992	326.725.238
4509	Pengembangan infrastruktur dan layanan aplikasi pemerintahan		288.374.670	526.261.824		814.636.494	839.075.540	864.247.782	890.175.208
4515	Pembinaan dan penerapan smart city		29.000.000			29.000.000	29.869.994	30.766.095	31.689.078
059.04.GE	Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika		1.650.000	50.000		1.700.000	1.750.997	1.803.522	1.857.629
4528	Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Informatika		1.650.000	50.000		1.700.000	1.750.997	1.803.522	1.857.629
059.04.WA	Program Dukungan Manajemen	36.845.824	31.473.343	1.150.000		69.469.167	71.553.203	73.699.758	75.910.735
4487	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	36.845.824	31.473.343	1.150.000		69.469.167	71.553.203	73.699.758	75.910.735
059.05	Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	47.450.430	269.513.240	114.367.739		431.331.409	444.271.064	457.598.992	471.326.893
04	EKONOMI	47.450.430	269.513.240	114.367.739		431.331.409	444.271.064	457.598.992	471.326.893
04.09	TELEKOMUNIKASI	47.450.430	269.513.240	114.367.739		431.331.409	444.271.064	457.598.992	471.326.893

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059.05.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		7.203.292	296.708		7.500.000	7.724.987	7.956.731	8.195.428
4517	Penerapan sistem informasi kebencanaan di smart city		7.203.292	296.708		7.500.000	7.724.987	7.956.731	8.195.428
059.05.GE	Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika		33.134.000	1.420.000		34.554.000	35.590.567	36.658.235	37.757.972
4503	Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran		33.134.000	1.420.000		34.554.000	35.590.567	36.658.235	37.757.972
059.05.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		144.710.486	109.847.134		254.557.620	262.194.185	270.059.916	278.161.666
4501	Pengembangan jaringan fixed broadband dan mobile broadband		55.400.016	88.866.604		144.266.620	148.594.553	153.052.361	157.643.918
4504	Digitalisasi penyiaran		54.610.000	18.290.000		72.900.000	75.086.962	77.339.542	79.659.707
4506	Pengembangan akses next generation broadband		11.129.470	2.690.530		13.820.000	14.234.586	14.661.616	15.101.463
4512	Konektivitas layanan pos		23.571.000			23.571.000	24.278.084	25.006.397	25.756.578
059.05.WA	Program Dukungan Manajemen	47.450.430	84.465.462	2.803.897		134.719.789	138.761.325	142.924.110	147.211.827
4488	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	47.450.430	84.465.462	2.803.897		134.719.789	138.761.325	142.924.110	147.211.827
059.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85.891.565	407.509.913	37.313.708		530.715.186	427.044.609	439.855.709	453.051.328
04	EKONOMI	59.500.000	333.334.307	9.843.424		402.677.731	295.166.101	304.020.919	313.141.514
04.09	TELEKOMUNIKASI	59.500.000	333.334.307	9.843.424		402.677.731	295.166.101	304.020.919	313.141.514
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		282.827.879	3.741.359		286.569.238	295.166.101	304.020.919	313.141.514

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4495	Pengembangan kompetensi digital bagi masyarakat		263.615.907	3.741.359		267.357.266	275.377.874	283.639.115	292.148.273
4498	Pengembangan riset dan penelitian bidang TIK		19.211.972			19.211.972	19.788.227	20.381.804	20.993.241
059.06.WA	Program Dukungan Manajemen	59.500.000	50.506.428	6.102.065		116.108.493			
4485	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59.500.000	50.506.428	6.102.065		116.108.493			
10	PENDIDIKAN	26.391.565	74.175.606	27.470.284		128.037.455	131.878.508	135.834.790	139.909.814
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		52.503.727			52.503.727	54.078.805	55.701.138	57.372.162
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		52.503.727			52.503.727	54.078.805	55.701.138	57.372.162
4153	SDM Vokasi Bidang Kominfo		52.503.727			52.503.727	54.078.805	55.701.138	57.372.162
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	26.391.565	21.671.879	27.470.284		75.533.728	77.799.703	80.133.652	82.537.652
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	26.391.565	21.671.879	27.470.284		75.533.728	77.799.703	80.133.652	82.537.652
4500	Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kominfo	26.391.565	21.671.879	27.470.284		75.533.728	77.799.703	80.133.652	82.537.652
059.07	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	45.468.993	255.956.690	5.558.208		306.983.891	294.563.261	303.400.032	312.501.974
04	EKONOMI	45.468.993	255.956.690	5.558.208		306.983.891	294.563.261	303.400.032	312.501.974
04.09	TELEKOMUNIKASI	45.468.993	255.956.690	5.558.208		306.983.891	294.563.261	303.400.032	312.501.974
059.07.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		21.000.000			21.000.000			
4510	Penyebaran Informasi Bidang Digital		21.000.000			21.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059.07.GH	Program Komunikasi Publik		192.845.917	4.154.083		197.000.000	202.909.904	208.997.103	215.266.965
4494	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik		172.995.917	4.004.083		177.000.000	182.309.949	187.779.172	193.412.510
4525	Tata kelola komunikasi publik		19.850.000	150.000		20.000.000	20.599.955	21.217.931	21.854.455
059.07.WA	Program Dukungan Manajemen	45.468.993	42.110.773	1.404.125		88.983.891	91.653.357	94.402.929	97.235.009
4486	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	45.468.993	42.110.773	1.404.125		88.983.891	91.653.357	94.402.929	97.235.009
059.08	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	1.972.649	4.715.812.438	6.182.187.562		10.899.972.649	11.226.971.788	11.563.780.899	11.910.694.293
04	EKONOMI	1.972.649	4.715.812.438	6.182.187.562		10.899.972.649	11.226.971.788	11.563.780.899	11.910.694.293
04.09	TELEKOMUNIKASI	1.972.649	4.715.812.438	6.182.187.562		10.899.972.649	11.226.971.788	11.563.780.899	11.910.694.293
059.08.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		4.715.812.438	6.182.187.562		10.898.000.000	11.224.939.963	11.561.688.120	11.908.538.730
4505	Pengelolaan Rencana Strategis, Keuangan, Hukum dan Sumber Daya		343.891.430	11.419.497		355.310.927	365.970.228	376.949.315	388.257.763
4526	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha		52.460.000			52.460.000	54.033.800	55.654.813	57.324.456
4527	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk masyarakat dan pemerintah		157.429.244			157.429.244	162.152.119	167.016.673	172.027.172
4961	Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi		4.162.031.764	6.170.768.065		10.332.799.829	10.642.783.816	10.962.067.319	11.290.929.339

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	1.972.649				1.972.649	2.031.825	2.092.779	2.155.563
4490	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum BAKTI	1.972.649				1.972.649	2.031.825	2.092.779	2.155.563
JUMLAH RM						12.235.259.710			
JUMLAH PLN						1.000.000			
JUMLAH RMP						416.699.000			
JUMLAH PNBP						938.819.240			
JUMLAH BLU						3.367.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	53.977.635.143	28.507.198.080	29.640.318.342		112.125.151.565	114.483.474.631	116.912.565.326	119.414.545.301
060.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia	53.977.635.143	28.507.198.080	29.640.318.342		112.125.151.565	114.483.474.631	116.912.565.326	119.414.545.301
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	53.977.635.143	28.507.198.080	29.640.318.342		112.125.151.565	114.483.474.631	116.912.565.326	119.414.545.301
03.01	KEPOLISIAN	53.977.635.143	28.507.198.080	29.640.318.342		112.125.151.565	114.483.474.631	116.912.565.326	119.414.545.301
060.01.BD	Program Profesionalisme SDM Polri	1.025.867.266	1.425.901.330			2.451.768.596	2.504.991.524	2.559.811.831	2.616.277.116
3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri	1.025.867.266	89.111.450			1.114.978.716	1.146.962.742	1.179.906.968	1.213.839.878
3097	Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri		4.550.902			4.550.902	4.550.902	4.550.902	4.550.902
3098	Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolsian		21.355.721			21.355.721	21.355.721	21.355.721	21.355.721
3099	Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri		8.626.348			8.626.348	8.626.348	8.626.348	8.626.348
3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri		977.790.338			977.790.338	996.728.292	1.016.234.387	1.036.325.671
3104	Pengkajian dan Strategi SDM Polri		7.427.930			7.427.930	7.650.767	7.880.290	8.116.699
3105	Peyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri		18.272.202			18.272.202	18.490.118	18.714.573	18.945.761
3107	Pengendalian Pegawai Polri		136.846.391			136.846.391	137.643.842	138.465.220	139.311.238
3108	Pembinaan Karier Personel Polri		18.087.996			18.087.996	18.454.026	18.831.036	19.219.359
3110	Pelayanan Psikologi Anggota Polri		12.957.297			12.957.297	13.144.994	13.338.323	13.537.451
5068	Pengkajian Pengembangan Pendidikan dan Latihan Polri		5.897.574			5.897.574	6.074.498	6.256.732	6.444.434
5069	Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri		5.999.232			5.999.232	6.172.485	6.350.935	6.534.740

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5070	Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan dan Latihan Polri		5.642.701			5.642.701	5.801.541	5.965.148	6.133.666
5071	Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri		21.689.882			21.689.882	21.689.882	21.689.882	21.689.882
5072	Pendidikan AKPOL		91.645.366			91.645.366	91.645.366	91.645.366	91.645.366
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.534.186.633	3.809.369.143			5.343.555.776	5.493.753.894	5.648.459.939	5.807.808.639
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.534.186.633	270.458.119			1.804.644.752	1.851.349.443	1.899.456.173	1.949.006.658
3140	Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		55.556.521			55.556.521	57.149.131	58.789.535	60.479.187
3141	Penyelenggaraan Laboratrium Forensik		36.309.075			36.309.075	37.273.442	38.266.711	39.289.846
3142	Penindakan Tindak Pidana Umum		1.414.003.676			1.414.003.676	1.455.651.772	1.498.549.921	1.542.735.619
3143	Penindakan Tindak Pidana Terorisme		840.332.036			840.332.036	864.707.899	889.815.040	915.675.396
3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba		627.609.589			627.609.589	646.261.818	665.473.766	685.262.180
3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus		38.654.000			38.654.000	39.808.528	40.997.718	42.222.591
3146	Penindakan Tindak Pidana Korupsi		291.890.654			291.890.654	300.345.466	309.053.915	318.023.557
3151	Penindakan Tindak Pidana Siber		72.610.937			72.610.937	74.758.130	76.969.748	79.247.764
4342	Penindakan Tindak Pidana Perairan		32.630.749			32.630.749	33.310.952	34.011.578	34.733.237
4343	Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas		58.032.025			58.032.025	59.769.560	61.559.437	63.403.007

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5082	Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana		9.608.916			9.608.916	9.876.436	10.151.997	10.435.857
5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu		48.646.918			48.646.918	50.098.523	51.593.719	53.133.796
5084	Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional		1.426.780			1.426.780	1.459.787	1.493.785	1.528.804
5085	Koordinasi dan Pengawasan PPNS		4.069.072			4.069.072	4.182.833	4.299.991	4.420.701
5086	Pengawasan Penyidikan		7.530.076			7.530.076	7.750.174	7.976.905	8.210.439
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	189.228.203	8.383.687.997	29.640.318.342		38.213.234.542	38.460.783.611	38.715.760.620	38.978.388.770
3084	Pengembangan Peralatan Polri		49.181.299	25.667.488.447		25.716.669.746	25.722.285.417	25.728.069.584	25.734.027.266
4341	Pengadaan Polri		418.798			418.798	418.798	418.798	418.798
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras	189.228.203	6.926.421.736			7.115.649.939	7.316.553.469	7.523.485.512	7.736.627.361
5060	Pengkajian dan Strategi Sarpras		624.029.743			624.029.743	645.750.626	668.123.142	691.166.838
5061	Pengembangan Perbekalan Umum		782.839.611			782.839.611	800.212.205	818.105.984	836.536.573
5062	Pengembangan Fasilitas dan Kontruksi Polri		796.810	3.972.829.895		3.973.626.705	3.975.563.096	3.977.557.600	3.979.611.934
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.148.942.551	10.968.171.600			17.117.114.151	17.562.501.095	18.021.256.633	18.493.782.943
3112	Analisis Keamanan		79.150.430			79.150.430	81.533.911	83.988.960	86.517.903
3114	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik		241.731.328			241.731.328	248.756.443	255.992.926	263.447.416
3115	Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi		196.031.641			196.031.641	201.128.415	206.378.653	211.787.434

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3116	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya		212.228.053			212.228.053	217.716.679	223.370.547	229.194.914
3117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara		284.328.520			284.328.520	290.245.761	296.341.460	302.620.439
3120	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L		8.573.502			8.573.502	8.753.344	8.938.599	9.129.416
3122	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri		4.979.094			4.979.094	5.128.460	5.282.316	5.440.784
3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	6.148.942.551	2.934.650.200			9.083.592.751	9.340.435.045	9.604.984.135	9.877.472.571
3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara		366.794.069			366.794.069	377.615.596	388.762.003	400.242.850
3131	Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital		453.053.862			453.053.862	465.913.299	479.158.631	492.801.434
3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas		4.142.329.318			4.142.329.318	4.236.257.334	4.333.003.642	4.432.652.831
3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan		227.396.075			227.396.075	229.014.439	230.681.379	232.398.363
3135	Penyelenggaraan Kepolisian Udara		11.123.844			11.123.844	11.285.478	11.451.958	11.623.436
3150	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus		196.590.063			196.590.063	199.895.978	203.301.127	206.808.436
5074	Misi Internasional		71.756.692			71.756.692	73.596.046	75.490.585	77.441.958
5076	Pembinaan Potensi Keamanan		948.339.013			948.339.013	973.645.911	999.713.165	1.026.563.157

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5077	Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan		10.402.774			10.402.774	10.696.012	10.998.041	11.309.247
5078	Pengkajian dan Strategi Operasi Kepolisian		493.344			493.344	508.142	523.386	539.088
5079	Pembinaan Operasi Kepolisian		4.943.706			4.943.706	5.092.013	5.244.772	5.402.117
5080	Pengendalian Operasi Kepolisian		453.726.007			453.726.007	463.117.891	472.792.103	482.756.688
5081	Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban		27.032.827			27.032.827	27.787.835	28.565.538	29.366.596
5087	Penanggulangan Keamanan dalam Negeri		92.517.238			92.517.238	94.377.063	96.292.707	98.265.865
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	45.079.410.490	3.920.068.010			48.999.478.500	50.461.444.507	51.967.276.303	53.518.287.833
3068	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri		19.185.907			19.185.907	19.644.025	20.115.888	20.601.948
3070	Penerangan Masyarakat		106.766.918			106.766.918	109.891.168	113.109.289	116.424.050
3071	Penyelenggaraan Teknologi Informasi		5.860.463			5.860.463	6.026.908	6.198.377	6.375.003
3072	Pelayanan Kesehatan Polri		2.298.136.915			2.298.136.915	2.365.482.334	2.434.848.265	2.506.295.267
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	45.079.410.490	1.155.721.260			46.235.131.750	47.617.147.604	49.040.629.938	50.506.820.171
3088	Pertanggungjawaban Profesi		14.800.421			14.800.421	15.219.028	15.650.300	16.094.599
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri		27.941.815			27.941.815	28.738.634	29.559.400	30.404.923
3090	Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri		21.848.739			21.848.739	22.465.518	23.100.984	23.755.650
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan		74.464.196			74.464.196	76.203.784	77.995.563	79.841.285
3149	Pengelolaan Multimedia		29.418.305			29.418.305	30.296.940	31.201.964	32.134.126

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3154	Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum		20.465.879			20.465.879	21.007.192	21.564.756	22.139.131
3155	Kerjasama dan Penyuluhan Hukum		13.438.294			13.438.294	13.831.531	14.236.375	14.653.578
4339	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri		4.445.454			4.445.454	4.445.454	4.445.454	4.445.454
4340	Penyusunan, Dokumentasi dan Informasi Hukum		1.515.740			1.515.740	1.515.740	1.515.740	1.515.740
5051	Penyusunan Kebijakan Polri		9.297.782			9.297.782	9.540.934	9.791.443	10.049.488
5052	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri		6.009.233			6.009.233	6.174.448	6.344.628	6.519.919
5053	Reformasi Birokrasi Polri		30.442.215			30.442.215	31.275.175	32.133.289	33.017.154
5054	Manajemen Anggaran		50.622.891			50.622.891	52.038.793	53.497.245	54.999.637
5055	Teknologi Komunikasi		116.648			116.648	120.147	123.750	127.463
5056	Pengelola Informasi dan Dokumentasi		9.397.426			9.397.426	9.667.620	9.945.896	10.232.559
5057	Penyelenggaraan Kesejarahan, Museum dan Perpustakan Polri		4.890.196			4.890.196	4.996.057	5.105.093	5.217.404
5067	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri		15.281.313			15.281.313	15.715.473	16.162.666	16.623.284
JUMLAH RM						97.545.837.647			
JUMLAH PLN						2.932.005.795			
JUMLAH RMP						735.000.000			
JUMLAH PNBP						8.685.149.097			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH PDN						37.000.000			
JUMLAH BLU						1.990.749.026			
JUMLAH PBS						199.410.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 063
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	667.405.767	1.010.502.600	406.376.845		2.084.285.212	2.146.809.002	2.211.208.963	2.277.544.760
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan	667.405.767	1.010.502.600	406.376.845		2.084.285.212	2.146.809.002	2.211.208.963	2.277.544.760
07	KESEHATAN	667.405.767	1.010.502.600	406.376.845		2.084.285.212	2.146.809.002	2.211.208.963	2.277.544.760
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	667.405.767	1.010.502.600	406.376.845		2.084.285.212	2.146.809.002	2.211.208.963	2.277.544.760
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan		619.081.878	321.384.195		940.466.073	968.675.965	997.732.509	1.027.664.124
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		423.433.913	269.613.451		693.047.364	713.835.166	735.247.004	757.304.182
4117	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan		6.866.456	2.846.400		9.712.856	10.004.234	10.304.343	10.613.473
4118	Intelijen Obat dan Makanan		5.382.948	1.873.672		7.256.620	7.474.308	7.698.529	7.929.483
4119	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan		9.099.111	175.000		9.274.111	9.552.295	9.838.838	10.133.999
4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan		11.524.525	324.000		11.848.525	12.203.954	12.570.039	12.947.130
4121	Pengawasan Kosmetik		8.087.950			8.087.950	8.330.559	8.580.452	8.837.864
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		7.534.335	113.000		7.647.335	7.876.738	8.113.023	8.356.409
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		8.384.574	385.000		8.769.574	9.032.630	9.303.579	9.582.678
4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan		10.947.261	190.000		11.137.261	11.471.352	11.815.458	12.169.907
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		8.230.939			8.230.939	8.477.845	8.732.166	8.994.129

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 063
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4126	Registrasi Pangan Olahan		8.500.000			8.500.000	8.754.988	9.017.609	9.288.130
4127	Registrasi Obat		8.800.000			8.800.000	9.063.982	9.335.874	9.615.938
4128	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		8.740.772	160.000		8.900.772	9.167.758	9.442.756	9.726.035
4129	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		4.239.763	1.577.550		5.817.313	5.808.943	5.983.196	6.162.690
4130	Standardisasi Pangan Olahan		6.728.258	1.500.000		8.228.258	8.475.080	8.729.320	8.991.196
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		6.164.095	1.492.000		7.656.095	7.885.763	8.122.316	8.365.980
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan		11.369.640	135.000		11.504.640	11.849.746	12.205.181	12.571.331
4133	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan		29.709.729	38.806.472		68.516.201	70.571.642	72.688.747	74.869.390
4134	Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan		7.683.087	100.000		7.783.087	8.016.564	8.257.045	8.504.752
4135	Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan		15.150.000			15.150.000	15.604.487	16.072.591	16.554.761
6385	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos		8.943.572			8.943.572	9.394.732	9.676.553	9.966.846
6386	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber		3.560.950	2.092.650		5.653.600	5.823.199	5.997.890	6.177.821
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	667.405.767	391.420.722	84.992.650		1.143.819.139	1.178.133.037	1.213.476.454	1.249.880.636
3158	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM		13.734.063	584.200		14.318.263	14.747.790	15.190.194	15.645.897
3159	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan		22.298.642			22.298.642	22.967.562	23.656.533	24.366.223

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 063
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan								
4110	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana		13.815.366	501.000		14.316.366	14.745.833	15.188.166	15.643.803
4112	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		9.492.970	200.000		9.692.970	9.983.744	10.283.227	10.591.719
4113	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	5.085.000	41.886.310	1.476.515		48.447.825	49.901.237	51.398.230	52.940.166
4114	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	6.662.203	25.876.835	20.986.165		53.525.203	55.130.930	56.784.815	58.488.336
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	8.916.155	7.941.563	434.970		17.292.688	17.811.437	18.345.759	18.896.120
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II		5.368.919			5.368.919	5.529.969	5.695.858	5.866.733
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	646.742.409	251.006.054	60.809.800		958.558.263	987.314.535	1.016.933.672	1.047.441.639
JUMLAH RM						1.991.594.999			
JUMLAH PNBP						92.690.213			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 064
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	83.027.019	92.079.895	7.268.556		182.375.470	198.114.073	198.163.105	206.147.583
064.01	Lembaga Ketahanan Nasional RI	83.027.019	92.079.895	7.268.556		182.375.470	198.114.073	198.163.105	206.147.583
02	PERTAHANAN	83.027.019	92.079.895	7.268.556		182.375.470	198.114.073	198.163.105	206.147.583
02.04	LITBANG PERTAHANAN	83.027.019	92.079.895	7.268.556		182.375.470	198.114.073	198.163.105	206.147.583
064.01.AI	Program Pembinaan Ketahanan Nasional		40.145.488	395.365		40.540.853	55.707.851	55.358.883	62.771.756
3190	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Program dan Pengembangan Pendidikan		2.394.848			2.394.848	3.421.186	3.079.064	3.421.186
3191	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Pembinaan Peserta Pendidikan		4.326.958			4.326.958	6.181.360	5.563.222	6.181.360
3192	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Operasional Pendidikan		17.190.610			17.190.610	24.557.985	22.102.184	24.557.985
3193	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan		3.460.439			3.460.439	4.943.472	4.449.125	4.943.472
3194	Penyusunan Rencana dan Program Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan		773.115			773.115	927.736	1.030.809	1.133.898
3195	Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan		1.662.871			1.662.871	3.325.742	4.988.613	6.651.484
3197	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai Kebangsaan		1.559.366			1.559.366	3.118.732	4.678.098	6.237.464

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 064
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3198	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan		1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3199	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ideologi dan Politik		780.000			780.000	780.000	780.000	780.000
3200	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam		765.000			765.000	765.000	765.000	765.000
3201	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Sosial Budaya dan Demografi		765.000			765.000	765.000	765.000	765.000
3202	Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan dan Geografi		765.000			765.000	765.000	765.000	765.000
3203	Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Pengkajian Strategik		2.299.968			2.299.968	2.299.968	2.299.968	2.299.968
6381	Pengukuran Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Tingkat Nasional		2.202.313	395.365		2.597.678	2.656.670	2.892.800	3.069.939
064.01.WA	Program Dukungan Manajemen	83.027.019	51.934.407	6.873.191		141.834.617	142.406.222	142.804.222	143.375.827
3183	Pengelolaan Hubungan Masyarakat Lemhannas		2.201.809	75.500		2.277.309	2.450.914	2.450.914	2.624.519
3184	Pengelolaan Hubungan Kerja Sama dan Hukum		2.332.456			2.332.456	2.332.456	2.332.456	2.332.456
3185	Pengelolaan Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana		2.700.845			2.700.845	2.700.845	2.700.845	2.700.845
3186	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lemhannas		44.400	5.689.646		5.734.046	5.734.046	5.734.046	5.734.046

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 064
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3187	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Lemhannas	83.027.019	42.904.897	1.108.045		127.039.961	127.437.961	127.835.961	128.233.961
3189	Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Lemhanas		1.750.000			1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
JUMLAH RM						182.375.470			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 065
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	155.618.063	831.448.375	102.433.689		1.089.500.127	1.092.009.883	1.097.169.944	1.102.484.856
065.01	Badan Koordinasi Penanaman Modal	155.618.063	831.448.375	102.433.689		1.089.500.127	1.092.009.883	1.097.169.944	1.102.484.856
04	EKONOMI	155.618.063	831.448.375	102.433.689		1.089.500.127	1.092.009.883	1.097.169.944	1.102.484.856
04.90	EKONOMI LAINNYA	155.618.063	831.448.375	102.433.689		1.089.500.127	1.092.009.883	1.097.169.944	1.102.484.856
065.01.ED	Program Penanaman Modal		671.891.685	100.316.059		772.207.744	772.788.142	773.385.975	774.001.754
2023	Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah		1.300.000			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2024	Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah		1.834.890			1.834.890	1.834.890	1.834.890	1.834.890
2025	Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri		4.520.000			4.520.000	4.521.155	4.522.347	4.523.574
3213	Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal		45.240.000			45.240.000	45.254.120	45.268.663	45.283.644
3214	Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah		3.334.051	618.916		3.952.967	3.952.967	3.952.967	3.952.967
3215	Pemberdayaan Usaha Nasional		2.927.200	172.800		3.100.000	3.149.998	3.201.497	3.254.546
3216	Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal		167.012.000			167.012.000	167.135.446	167.262.597	167.393.563
3217	Promosi Penanaman Modal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara		51.627.265	372.735		52.000.000	52.117.171	52.237.863	52.362.175
3218	Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal		7.500.000			7.500.000	7.582.253	7.666.980	7.754.250

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 065
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3219	Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal Untuk Kegiatan di dalam dan Luar Negeri		37.986.662	1.013.338		39.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000
3225	Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha		3.478.574			3.478.574	3.486.727	3.495.123	3.503.772
3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I		7.469.163	40.000		7.509.163	7.535.957	7.563.557	7.591.983
3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II		33.001.000	349.000		33.350.000	33.360.073	33.370.449	33.381.138
3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III		28.770.000	380.000		29.150.000	29.163.070	29.176.533	29.190.398
3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV		44.777.011	222.989		45.000.000	45.016.152	45.032.789	45.049.927
3230	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal		20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya		4.700.000			4.700.000	4.712.497	4.725.366	4.738.625
3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur		4.900.000			4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan		115.700.000			115.700.000	115.700.000	115.700.000	115.700.000
3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		500.000			500.000	500.000	500.000	500.000
4188	Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha		9.960.900			9.960.900	9.964.005	9.967.203	9.970.497
4189	Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		62.230.237	97.069.763		159.300.000	159.309.835	159.319.964	159.330.398

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 065
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4190	Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha		3.224.250			3.224.250	3.293.828	3.365.497	3.439.314
5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta		700.000			700.000	716.367	733.227	750.595
5264	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat		3.923.482	76.518		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur		5.275.000			5.275.000	5.281.631	5.288.463	5.295.498
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	155.618.063	159.556.690	2.117.630		317.292.383	319.221.741	323.783.969	328.483.102
3204	Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM		2.388.000	112.000		2.500.000			
3205	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal	155.618.063	71.909.552	700.000		228.227.615	232.470.849	236.841.377	241.343.041
3206	Pengelolaan Sistem Informasi		38.863.810	636.190		39.500.000	39.500.000	39.500.000	39.500.000
3207	Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal		1.175.328	389.440		1.564.768	1.575.820	1.587.202	1.598.928
3208	Pengembangan Sumber Daya Manusia		10.000.000			10.000.000	10.025.498	10.051.759	10.078.811
3209	Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal		2.000.000			2.000.000	2.017.342	2.035.204	2.053.605
3210	Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM		2.720.000	280.000		3.000.000	3.004.855	3.009.855	3.015.006
3211	Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal serta Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan		30.500.000			30.500.000	30.627.377	30.758.572	30.893.711
JUMLAH RM						1.089.500.127			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 066
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	532.710.047	1.037.512.626	119.769.838		1.689.992.511	1.723.217.758	1.757.437.831	1.792.689.976
066.01	Badan Narkotika Nasional	532.710.047	1.037.512.626	119.769.838		1.689.992.511	1.723.217.758	1.757.437.831	1.792.689.976
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	532.710.047	1.037.512.626	119.769.838		1.689.992.511	1.723.217.758	1.757.437.831	1.792.689.976
03.01	KEPOLISIAN	532.710.047	1.037.512.626	119.769.838		1.689.992.511	1.723.217.758	1.757.437.831	1.792.689.976
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		469.829.589	89.478.065		559.307.654	571.490.210	584.036.672	596.963.848
3247	Penyelenggaraan Advokasi		18.155.565			18.155.565	18.184.838	18.214.961	18.246.051
3248	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif		12.810.244			12.810.244	13.164.364	13.529.102	13.904.982
3250	Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum		3.950.317	50.000		4.000.317	4.001.810	4.003.349	4.004.934
3251	Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi		65.833.606			65.833.606	67.741.281	69.706.187	71.730.023
3252	Pelaksanaan Interdiksi Wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat		23.462.404	5.537.596		29.000.000	29.869.994	30.766.089	31.689.067
3253	Penyelenggaraan Kerja Sama dalam dan Luar Negeri		7.589.934			7.589.934	7.590.250	7.590.576	7.590.914
3256	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba		8.398.212			8.398.212	8.574.042	8.755.144	8.941.731
3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat		59.935.297			59.935.297	60.807.340	61.705.722	62.632.056
3258	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti		18.471.894	265.000		18.736.894	19.071.541	19.416.165	19.771.230
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah		16.326.946			16.326.946	16.739.815	17.164.966	17.603.143

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 066
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat		41.517.559	64.894		41.582.453	42.763.635	43.979.451	45.233.318
3261	Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran		23.580.756	40.977.107		64.557.863	66.493.145	68.486.496	70.539.643
3262	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor		6.898.530			6.898.530	7.108.520	7.324.811	7.547.595
4020	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba		25.122.734			25.122.734	25.876.325	26.652.409	27.451.976
5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika		56.528.878	6.028.712		62.557.590	64.383.318	66.263.691	68.200.743
5355	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika		22.663.461			22.663.461	23.339.271	24.035.318	24.752.307
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi		50.012.730			50.012.730	50.655.443	51.316.957	51.998.857
6239	Penyelenggaraan Layanan Pengujian, Penjaminan Mutu, Riset dan Pembinaan Laboratorium Narkotika		8.570.522	36.554.756		45.125.278	45.125.278	45.125.278	45.125.278
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	532.710.047	567.683.037	30.291.773		1.130.684.857	1.151.727.548	1.173.401.159	1.195.726.128
3236	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	532.710.047	39.587.653			572.297.700	588.936.819	606.075.260	623.728.009
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia		24.169.127	198.709		24.367.836	24.899.274	25.446.463	26.010.428
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN		19.899.471			19.899.471	19.984.512	20.072.069	20.162.314
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana		397.412.825	13.587.096		410.999.921	412.325.815	413.691.408	415.098.175

SK No 019725 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 066
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3241	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja		12.438.659			12.438.659	12.438.659	12.438.659	12.438.659
3242	Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN		46.995.720	16.195.968		63.191.688	65.023.982	66.911.252	68.855.153
3244	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan		11.631.465			11.631.465	11.917.944	12.213.024	12.516.959
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan		15.548.117	310.000		15.858.117	16.200.543	16.553.024	16.916.431
JUMLAH RM						1.689.992.511			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	284.267.726	3.300.289.913	105.251.503		3.689.809.142	3.717.151.877	3.738.239.893	3.763.561.040
067.02	Inspektorat Jenderal	20.239.153	29.149.077	611.770		50.000.000	53.801.651	50.642.501	50.988.041
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	20.239.153	29.149.077	611.770		50.000.000	53.801.651	50.642.501	50.988.041
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	20.239.153	29.149.077	611.770		50.000.000	53.801.651	50.642.501	50.988.041
067.02.WA	Program Dukungan Manajemen	20.239.153	29.149.077	611.770		50.000.000	53.801.651	50.642.501	50.988.041
5468	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	20.239.153	13.949.077	611.770		34.800.000	38.601.651	35.442.501	35.788.041
5469	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I		3.040.000			3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
5470	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II		3.040.000			3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
5471	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III		3.040.000			3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
5472	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV		3.040.000			3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5473	Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V		3.040.000			3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.724.538	2.131.728.342	1.500.000		2.161.952.880	2.161.952.880	2.161.952.880	2.161.952.880
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	28.724.538	2.131.728.342	1.500.000		2.161.952.880	2.161.952.880	2.161.952.880	2.161.952.880
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	28.724.538	2.131.728.342	1.500.000		2.161.952.880	2.161.952.880	2.161.952.880	2.161.952.880
067.03.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		2.084.123.800			2.084.123.800	2.084.123.800	2.084.123.800	2.084.123.800
5482	Pemberdayaan Masyarakat Desa		1.836.763.800			1.836.763.800	1.836.763.800	1.836.763.800	1.836.763.800
5483	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar		41.000.000			41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
5484	Pembangunan Sarana Prasarana Desa		85.000.000			85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000
5485	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna		74.860.000			74.860.000	74.860.000	74.860.000	74.860.000
5486	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa		46.500.000			46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000
067.03.WA	Program Dukungan Manajemen	28.724.538	47.604.542	1.500.000		77.829.080	77.829.080	77.829.080	77.829.080
5481	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	28.724.538	47.604.542	1.500.000		77.829.080	77.829.080	77.829.080	77.829.080

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
067.04	Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan	22.388.127	70.647.473	300.000		93.335.600	96.135.609	99.019.613	101.990.169
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	22.388.127	70.647.473	300.000		93.335.600	96.135.609	99.019.613	101.990.169
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	22.388.127	70.647.473	300.000		93.335.600	96.135.609	99.019.613	101.990.169
067.04.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		52.230.600			52.230.600	53.797.479	55.411.366	57.073.691
5488	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan		4.000.000			4.000.000	4.119.992	4.243.583	4.370.889
5489	Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan		14.400.000			14.400.000	14.831.994	15.276.949	15.735.253
5490	Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan		11.129.300			11.129.300	11.463.172	11.807.059	12.161.266
5491	Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan		13.401.300			13.401.300	13.803.330	14.217.418	14.643.939
5492	Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas		9.300.000			9.300.000	9.578.991	9.866.357	10.162.344
067.04.WA	Program Dukungan Manajemen	22.388.127	18.416.873	300.000		41.105.000	42.338.130	43.608.247	44.916.478
5487	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan	22.388.127	18.416.873	300.000		41.105.000	42.338.130	43.608.247	44.916.478
067.05	Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	21.539.000	66.377.994			87.916.994	90.554.361	93.270.900	96.068.998
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	21.539.000	66.377.994			87.916.994	90.554.361	93.270.900	96.068.998
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	21.539.000	66.377.994			87.916.994	90.554.361	93.270.900	96.068.998
067.05.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		46.500.000			46.500.000	47.894.899	49.331.694	50.811.617

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5494	Penanganan Daerah Rawan Pangan		7.172.400			7.172.400	7.387.559	7.609.168	7.837.437
5495	Pengembangan Daerah Perbatasan		17.000.000			17.000.000	17.509.978	18.035.261	18.576.318
5496	Penanganan Daerah Rawan Bencana		8.000.000			8.000.000	8.239.976	8.487.168	8.741.773
5497	Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar		9.327.600			9.327.600	9.607.403	9.895.622	10.192.493
5498	Penanganan Daerah Pasca Konflik		5.000.000			5.000.000	5.149.983	5.304.475	5.463.596
067.05.WA	Program Dukungan Manajemen	21.539.000	19.877.994			41.416.994	42.659.462	43.939.206	45.257.381
5493	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu	21.539.000	19.877.994			41.416.994	42.659.462	43.939.206	45.257.381
067.06	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	20.569.000	103.688.793	1.251.500		125.509.293	128.868.876	132.329.215	135.893.481
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	20.569.000	103.688.793	1.251.500		125.509.293	128.868.876	132.329.215	135.893.481
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	20.569.000	103.688.793	1.251.500		125.509.293	128.868.876	132.329.215	135.893.481
067.06.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		76.319.508			76.319.508	78.233.392	80.204.660	82.235.162
5500	Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal		4.000.000			4.000.000	4.113.764	4.230.932	4.351.630
5501	Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal		6.488.698			6.488.698	6.673.437	6.863.704	7.059.707
5502	Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal		41.833.663			41.833.663	42.729.154	43.651.507	44.601.551
5503	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal		10.645.480			10.645.480	10.964.831	11.293.766	11.632.576

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5504	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal		13.351.667			13.351.667	13.752.206	14.164.751	14.589.698
067.06.WA	Program Dukungan Manajemen	20.569.000	27.369.285	1.251.500		49.189.785	50.635.484	52.124.555	53.658.319
5499	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal	20.569.000	27.369.285	1.251.500		49.189.785	50.635.484	52.124.555	53.658.319
067.07	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	30.261.428	220.234.794	89.130.938		339.627.160	347.915.334	356.452.158	365.245.441
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	30.261.428	220.234.794	89.130.938		339.627.160	347.915.334	356.452.158	365.245.441
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	30.261.428	220.234.794	89.130.938		339.627.160	347.915.334	356.452.158	365.245.441
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		177.274.570	89.030.938		266.305.508	272.445.927	278.770.590	285.285.100
5506	Penataan Persebaran Penduduk		29.533.388			29.533.388	30.419.137	31.331.468	32.271.190
5507	Pembangunan Permukiman Transmigrasi		120.387.708	89.030.938		209.418.646	214.106.137	218.934.279	223.907.305
5508	Penyediaan Tanah Transmigrasi		8.088.186			8.088.186	8.290.012	8.497.896	8.712.028
5509	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		14.148.837			14.148.837	14.400.046	14.658.796	14.925.318
5510	Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi		5.116.451			5.116.451	5.230.595	5.348.151	5.469.259
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen	30.261.428	42.960.224	100.000		73.321.652	75.469.407	77.681.568	79.960.341
5505	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen	30.261.428	42.960.224	100.000		73.321.652	75.469.407	77.681.568	79.960.341

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi								
067.08	Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi	29.650.755	295.320.889	1.762.000		326.733.644	333.189.595	339.839.055	346.688.459
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.650.755	295.320.889	1.762.000		326.733.644	333.189.595	339.839.055	346.688.459
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	29.650.755	295.320.889	1.762.000		326.733.644	333.189.595	339.839.055	346.688.459
067.08.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		259.487.275			259.487.275	263.938.709	268.523.612	273.246.294
5512	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi		131.949.241			131.949.241	134.056.360	136.226.704	138.462.156
5513	Pengembangan Usaha Transmigrasi		52.600.340			52.600.340	53.375.097	54.173.099	54.995.070
5514	Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi		55.264.797			55.264.797	56.248.263	57.261.123	58.304.517
5515	Pelayanan Pertanahan Transmigrasi		10.815.897			10.815.897	11.140.305	11.474.454	11.818.667
5516	Promosi Dan Kemitraan		8.857.000			8.857.000	9.118.684	9.388.232	9.665.884
067.08.WA	Program Dukungan Manajemen	29.650.755	35.833.614	1.762.000		67.246.369	69.250.886	71.315.443	73.442.165
5511	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi	29.650.755	35.833.614	1.762.000		67.246.369	69.250.886	71.315.443	73.442.165
067.09	Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi	66.377.113	215.661.163	9.195.295		291.233.571	291.233.571	291.233.571	291.233.571
10	PENDIDIKAN	66.377.113	215.661.163	9.195.295		291.233.571	291.233.571	291.233.571	291.233.571

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	66.377.113	215.661.163	9.195.295		291.233.571	291.233.571	291.233.571	291.233.571
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		130.765.627			130.765.627	130.765.627	130.765.627	130.765.627
5475	Penyelenggaraan Pelatihan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		66.765.627			66.765.627	66.765.627	66.765.627	66.765.627
5476	Penelitian dan Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5478	Penyiapan Bahan Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		44.000.000			44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
067.09.WA	Program Dukungan Manajemen	66.377.113	84.895.536	9.195.295		160.467.944	160.467.944	160.467.944	160.467.944
5474	Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi (Balitlatfo)	56.637.678	66.257.828	7.749.295		130.644.801	130.644.801	130.644.801	130.644.801
5477	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	7.005.286	15.356.988	1.446.000		23.808.274	23.808.274	23.808.274	23.808.274
5480	Pengkajian dan Penerapan Teknik Produksi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.734.149	3.280.720			6.014.869	6.014.869	6.014.869	6.014.869
067.10	Sekretariat Jenderal	44.518.612	167.481.388	1.500.000		213.500.000	213.500.000	213.500.000	213.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 067
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	44.518.612	167.481.388	1.500.000		213.500.000	213.500.000	213.500.000	213.500.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	44.518.612	167.481.388	1.500.000		213.500.000	213.500.000	213.500.000	213.500.000
067.10.WA	Program Dukungan Manajemen	44.518.612	167.481.388	1.500.000		213.500.000	213.500.000	213.500.000	213.500.000
5463	Penyelenggaraan Hukum dan Organisasi Tata Laksana		7.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5464	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama		21.000.000			21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
5465	Penyelenggaraan Perencanaan		20.000.000			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
5466	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia dan Umum		112.193.000	1.500.000		113.693.000	113.693.000	113.693.000	113.693.000
5467	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	44.518.612	7.288.388			51.807.000	51.807.000	51.807.000	51.807.000
JUMLAH RM						3.476.449.142			
JUMLAH PLN						200.000.000			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH HLN						13.360.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 068
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	2.173.437.101	1.220.634.939	56.000.000		3.450.072.040	3.642.956.728	3.852.363.295	4.075.038.477
068.01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.173.437.101	1.220.634.939	56.000.000		3.450.072.040	3.642.956.728	3.852.363.295	4.075.038.477
07	KESEHATAN	2.173.437.101	1.220.634.939	56.000.000		3.450.072.040	3.642.956.728	3.852.363.295	4.075.038.477
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.173.437.101	1.220.634.939	56.000.000		3.450.072.040	3.642.956.728	3.852.363.295	4.075.038.477
068.01.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana		1.087.525.232	14.800.000		1.102.325.232	1.163.791.870	1.233.895.336	1.308.909.226
3309	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		10.746.171			10.746.171	11.390.938	12.074.394	12.798.859
3310	Peningkatan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		1.906.630			1.906.630	2.021.028	2.142.290	2.270.827
3311	Peningkatan Efektivitas Penelitian dan Pengembangan Kependudukan		8.355.211			8.355.211	8.856.521	9.387.912	9.951.186
3312	Pengembangan Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana		4.168.195			4.168.195	4.418.289	4.683.385	4.964.388
3313	Peningkatan Kepedulian dan Peran serta Mitra Kerja, Pemangku Kebijakan, dan Masyarakat melalui KIE		20.916.000	60.795		20.976.795	22.235.402	23.569.526	24.983.696
3314	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Keluarga Program Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah		3.205.576			3.205.576	3.397.910	3.601.784	3.817.891

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 068
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3315	Peningkatan Kualitas Jejaring Mitra Kerja dan Pemangku Kebijakan dalam Penguatan Program Bangga Kencana		1.666.000			1.666.000	1.765.967	1.871.923	1.984.238
3316	Pembinaan Akses Pelayanan KB		1.754.211			1.754.211	1.859.460	1.971.026	2.089.288
3317	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak		1.041.000			1.041.000	1.103.460	1.169.667	1.239.845
3318	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lini Lapangan Program Bangga Kencana		1.041.000			1.041.000	1.103.460	1.169.667	1.239.845
3319	Pembinaan Ketahanan Remaja		18.541.000			18.541.000	19.653.460	20.832.667	22.082.625
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi		1.041.000			1.041.000	1.103.456	1.169.663	1.239.844
3322	Peningkatan Pelayanan KB Wilayah Khusus		1.041.000			1.041.000	1.103.462	1.169.667	1.239.846
3323	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		1.541.000			1.541.000	1.633.456	1.731.463	1.835.352
3324	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		1.041.000			1.041.000	1.103.462	1.169.668	1.217.019
3325	Kerjasama Pendidikan kependudukan		1.041.000			1.041.000	1.103.460	1.169.667	1.239.845
3326	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk		7.041.000			7.041.000	7.463.460	7.911.266	8.385.941
3327	Pembinaan Kualitas Pelayanan KB		1.041.000			1.041.000	1.103.460	1.169.667	1.239.845
3328	Analisis Dampak Kependudukan		1.378.060			1.378.060	1.460.743	1.548.387	1.641.289
3329	Perencanaan Pengendalian Penduduk		1.391.000			1.391.000	1.474.460	1.562.926	1.656.697
3330	Peningkatan Kualitas Teknologi Informasi dan Data dalam Pengelolaan Program Bangga Kencana		21.116.000	14.739.205		35.855.205	33.337.776	35.618.167	38.035.381

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 068
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi		976.512.178			976.512.178	1.035.098.780	1.097.200.554	1.163.755.479
068.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.173.437.101	133.109.707	41.200.000		2.347.746.808	2.479.164.858	2.618.467.959	2.766.129.251
3300	Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana		2.721.937			2.721.937	2.885.258	3.058.373	3.241.873
3301	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan BMN		2.275.080			2.275.080	2.411.592	2.556.286	2.709.662
3302	Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran		3.102.000			3.102.000	3.288.119	3.485.406	3.694.530
3303	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) BKKBN		1.641.996			1.641.996	1.740.515	1.844.947	1.955.642
3304	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Hubungan Masyarakat yang Cepat dan Tepat	86.512.270	20.179.213	16.297.937		122.989.420	130.368.782	138.190.908	146.482.360
3306	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah III		3.174.344			3.174.344	3.364.800	3.566.687	3.780.689
3307	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah I		3.174.342			3.174.342	3.364.807	3.566.693	3.780.695
3308	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana Wilayah II		3.174.344			3.174.344	3.364.804	3.566.690	3.780.693
5297	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	2.086.924.831	93.666.451	24.902.063		2.205.493.345	2.328.376.181	2.458.631.969	2.596.703.107

SK No 019737 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 068
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RM						3.450.072.040			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 074
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	39.915.424	57.672.929	2.642.767		100.231.120	103.237.834	106.334.741	109.524.737
074.01	Komnas HAM	39.915.424	57.672.929	2.642.767		100.231.120	103.237.834	106.334.741	109.524.737
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	39.915.424	57.672.929	2.642.767		100.231.120	103.237.834	106.334.741	109.524.737
03.03	PEMBINAAN HUKUM	39.915.424	57.672.929	2.642.767		100.231.120	103.237.834	106.334.741	109.524.737
074.01.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		24.759.181	625.000		25.384.181	26.145.564	26.929.777	27.737.635
5679	Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara		4.970.627	33.000		5.003.627	5.153.715	5.308.294	5.467.533
5680	Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM		8.974.738	592.000		9.566.738	9.853.692	10.149.251	10.453.715
5681	Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban		10.813.816			10.813.816	11.138.157	11.472.232	11.816.387
074.01.WA	Program Dukungan Manajemen	39.915.424	32.913.748	2.017.767		74.846.939	77.092.270	79.404.964	81.787.102
3335	Peningkatan Kualitas Perencananaan, Pengawasan dan Kerjasama		4.055.901	30.000		4.085.901	4.208.450	4.334.681	4.464.713
3336	Penyelenggaraan layanan perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	32.353.728	24.493.374	1.987.767		58.834.869	60.599.871	62.417.819	64.290.349
6387	Dukungan Internal Komnas Perempuan	7.561.696	4.364.473			11.926.169	12.283.949	12.652.464	13.032.040
JUMLAH RM						100.231.120			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 075
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	658.076.230	1.231.527.892	1.384.637.385		3.274.241.507	3.322.669.092	3.372.550.234	3.423.928.627
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	658.076.230	1.231.527.892	1.384.637.385		3.274.241.507	3.322.669.092	3.372.550.234	3.423.928.627
04	EKONOMI	658.076.230	1.231.527.892	1.384.637.385		3.274.241.507	3.322.669.092	3.372.550.234	3.423.928.627
04.90	EKONOMI LAINNYA	658.076.230	1.231.527.892	1.384.637.385		3.274.241.507	3.322.669.092	3.372.550.234	3.423.928.627
075.01.GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	533.335.993	1.026.393.665	1.353.611.523		2.913.341.181	2.952.446.446	2.992.725.565	3.034.213.822
3344	Pengelolaan Database BMKG		11.004.990	9.030.455		20.035.445	20.495.009	20.968.355	21.455.900
3345	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	57.841.589	269.917.664	310.536.934		638.296.187	647.072.382	656.111.967	665.422.820
3346	Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG	8.932.761	20.243.262	73.730.048		102.906.071	103.244.329	103.592.751	103.951.638
3347	Pengelolaan Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa BMKG		200.671.077	184.362.500		385.033.577	390.901.307	396.945.068	403.170.140
3348	Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG		97.714.200	65.500.000		163.214.200	163.214.200	163.214.200	163.214.200
3349	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan BMKG	215.529.735	171.466.098	219.620.150		606.615.983	615.029.020	623.694.862	632.621.019
3350	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	28.853.518	26.498.641	249.656.755		305.008.914	308.502.259	312.100.474	315.806.679
3352	Pengelolaan Informasi Perubahan Iklim BMKG	85.569.758	54.038.297	17.792.776		157.400.831	161.536.636	165.796.563	170.184.437
3353	Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG	29.616.374	66.942.523	16.335.022		112.893.919	113.983.600	115.106.002	116.262.094
3354	Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG	69.876.355	88.009.194	48.172.946		206.058.495	211.351.764	216.803.814	222.419.505
5201	Pengelolaan Meteorologi Maritim BMKG	37.115.903	19.887.719	158.873.937		215.877.559	217.115.940	218.391.509	219.705.390

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 075
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
075.01.WA	Program Dukungan Manajemen	124.740.237	205.134.227	31.025.862		360.900.326	370.222.646	379.824.669	389.714.805
3337	Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma STMKG	15.651.114	21.493.604	6.267.478		43.412.196	44.714.544	46.055.959	47.437.627
3338	Layanan Hukum, Kerja Sama, Organisasi dan Humas BMKG		11.829.500	670.500		12.500.000	12.725.292	12.957.336	13.196.351
3339	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Tarif, Program dan Anggaran, Monitoring dan Evaluasi BMKG		14.078.160	1.721.840		15.800.000	16.268.752	16.751.551	17.248.874
3340	Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Tata Usaha dan Rumah Tangga BMKG	81.572.939	114.768.048	19.603.576		215.944.563	221.100.135	226.410.367	231.879.904
3341	Pengawasan Internal BMKG	9.630.580	7.548.030			17.178.610	17.693.949	18.224.760	18.771.497
3342	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia BMKG	6.571.073	23.935.871	400.000		30.906.944	31.807.245	32.734.607	33.689.773
3343	Penelitian dan Pengembangan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	11.314.531	11.481.014	2.362.468		25.158.013	25.912.729	26.690.089	27.490.779
JUMLAH RM						2.532.886.633			
JUMLAH PLN						624.337.500			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						117.017.374			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 076
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.366.679.928	629.241.954	52.633.110		2.048.554.992	2.097.553.742	2.148.022.499	2.200.005.354
076.01	Komisi Pemilihan Umum	1.366.679.928	629.241.954	52.633.110		2.048.554.992	2.097.553.742	2.148.022.499	2.200.005.354
01	PELAYANAN UMUM	1.366.679.928	629.241.954	52.633.110		2.048.554.992	2.097.553.742	2.148.022.499	2.200.005.354
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	1.366.679.928	629.241.954	52.633.110		2.048.554.992	2.097.553.742	2.148.022.499	2.200.005.354
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		68.675.064	400.000		69.075.064	69.789.168	70.524.707	71.282.326
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan		14.000.000			14.000.000	14.156.473	14.317.643	14.483.654
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu		20.500.000			20.500.000	20.655.657	20.815.987	20.981.130
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW		34.175.064	400.000		34.575.064	34.977.038	35.391.077	35.817.542
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.366.679.928	560.566.890	52.233.110		1.979.479.928	2.027.764.574	2.077.497.792	2.128.723.028
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	1.366.679.928	29.999.931			1.396.679.859	1.438.055.523	1.480.672.464	1.524.567.925

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 076
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data		84.766.959	2.233.110		87.000.069	88.188.109	89.411.802	90.672.206
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi		33.650.000			33.650.000	34.289.072	34.947.316	35.625.317
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana		394.150.000	50.000.000		444.150.000	448.912.471	453.817.816	458.870.325
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		18.000.000			18.000.000	18.319.399	18.648.394	18.987.255
JUMLAH RM						2.048.554.992			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 077
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	66.000.000	192.665.223	8.100.000		266.765.223	271.354.275	276.080.988	280.949.525
077.01	Mahkamah Konstitusi Ri	66.000.000	192.665.223	8.100.000		266.765.223	271.354.275	276.080.988	280.949.525
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	66.000.000	192.665.223	8.100.000		266.765.223	271.354.275	276.080.988	280.949.525
03.04	PERADILAN	66.000.000	192.665.223	8.100.000		266.765.223	271.354.275	276.080.988	280.949.525
077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi		105.876.903	300.000		106.176.903	106.221.903	106.268.251	106.315.992
3372	Penanganan Perkara Konstitusi		97.912.703	300.000		98.212.703	98.257.703	98.304.051	98.351.792
4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara		2.284.200			2.284.200	2.284.200	2.284.200	2.284.200
4247	Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK		5.680.000			5.680.000	5.680.000	5.680.000	5.680.000
077.01.WA	Program Dukungan Manajemen	66.000.000	86.788.320	7.800.000		160.588.320	165.132.372	169.812.737	174.633.533
3366	Penyelenggaraan Hubungan Kerjasama Internasional		2.736.670			2.736.670	2.808.349	2.882.180	2.958.226
3367	Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	66.000.000	760.000			66.760.000	68.761.705	70.823.461	72.947.077
3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi		75.831.650	7.800.000		83.631.650	86.089.590	88.621.265	91.228.895
4245	Penyelenggaraan Pengawasan Intern		580.000			580.000	580.000	580.000	580.000
5238	Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi		6.880.000			6.880.000	6.892.728	6.905.831	6.919.335
JUMLAH RM						266.765.223			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 078
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	127.823.584	75.706.450	21.078.311		224.608.345	231.346.474	238.286.744	245.435.340
078.01	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	127.823.584	75.706.450	21.078.311		224.608.345	231.346.474	238.286.744	245.435.340
01	PELAYANAN UMUM	127.823.584	75.706.450	21.078.311		224.608.345	231.346.474	238.286.744	245.435.340
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	127.823.584	75.706.450	21.078.311		224.608.345	231.346.474	238.286.744	245.435.340
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme		40.474.589	9.660.872		50.135.461	51.639.472	53.188.581	54.784.239
3365	Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang PPATK		2.750.000			2.750.000	2.832.492	2.917.460	3.004.981
3379	Pengelolaan Bidang Hukum PPATK		1.200.000			1.200.000	1.235.994	1.273.063	1.311.253
3380	Pelaksanaan Kerja Sama dan Humas PPATK		5.630.500			5.630.500	5.799.403	5.973.362	6.152.565
3381	Pengelolaan Teknologi Informasi PPATK		19.444.089	9.660.872		29.104.961	29.978.105	30.877.441	31.803.764
3382	Pengawasan Kepatuhan Pihak Pelapor		1.100.000			1.100.000	1.132.999	1.166.982	1.201.994
3383	Pengawasan Kewajiban Pelaporan dan Pembinaan Pihak Pelapor		1.450.000			1.450.000	1.493.490	1.538.286	1.584.433
3384	Analisis Transaksi dan Pengelolaan Laporan Masyarakat		900.000			900.000	926.997	954.806	983.452
5232	Pemeriksaan dan Pengembangan Riset TPPU		8.000.000			8.000.000	8.239.992	8.487.181	8.741.797
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	127.823.584	35.231.861	11.417.439		174.472.884	179.707.002	185.098.163	190.651.101
3374	Pengawasan Internal PPATK		250.000			250.000	257.497	265.219	273.175

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 078
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3375	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan PPATK	127.823.584	400.298			128.223.882	132.020.075	135.980.666	140.060.090
3376	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan PPATK		5.888.000			5.888.000	6.064.626	6.246.555	6.433.942
3377	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan PPATK		28.693.563	11.417.439		40.111.002	41.364.804	42.605.723	43.883.894
JUMLAH RM						224.608.345			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 079
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)	724.350.184	312.584.397	803.062.891		1.839.997.472	2.441.502.795	2.636.380.065	2.943.369.496
079.01	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	724.350.184	312.584.397	803.062.891		1.839.997.472	2.441.502.795	2.636.380.065	2.943.369.496
04	EKONOMI	724.350.184	312.584.397	803.062.891		1.839.997.472	2.441.502.795	2.636.380.065	2.943.369.496
04.10	LITBANG EKONOMI	724.350.184	312.584.397	803.062.891		1.839.997.472	2.441.502.795	2.636.380.065	2.943.369.496
079.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		188.127.435	794.543.157		982.670.592	1.414.908.870	1.510.883.874	1.705.358.875
3390	Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti		36.075.966	924.034		37.000.000	49.449.996	53.899.994	72.749.995
3393	Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah		1.930.000			1.930.000	2.930.000	2.930.000	2.930.000
3394	Pemanfaatan dan Inovasi Iptek		36.206.157	682.794.435		719.000.592	813.800.583	835.500.583	835.500.583
3424	Pengembangan Multimedia dan Penerbitan Ilmiah		1.881.526	318.474		2.200.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5937	Penelitian, Konservasi Tumbuhan dan Pengembangan Kebun Raya		6.657.736	342.264		7.000.000	65.250.000	65.475.000	135.700.000
5938	Penelitian Ilmu Pengetahuan Hayati		27.533.171	6.626.829		34.160.000	122.998.755	85.198.755	86.598.755
5939	Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan		13.617.643	4.802.357		18.420.000	23.395.544	46.395.544	48.395.544
5940	Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora		20.500.000	1.500.000		22.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5941	Penelitian Ilmu Pengetahuan Teknik		11.131.720	23.288.280		34.420.000	167.920.000	267.920.000	367.920.000
5942	Penelitian Ilmu Pengetahuan Kebumian		32.593.516	73.946.484		106.540.000	104.663.992	89.063.998	91.063.998
079.01.WA	Program Dukungan Manajemen	724.350.184	124.456.962	8.519.734		857.326.880	1.026.593.925	1.125.496.191	1.238.010.621
3388	Peningkatan Pengawasan Audit dan Sistem Akuntabilitas Kinerja		500.000			500.000	1.900.000	2.100.000	2.200.000

SK No 019747 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 079
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3399	Dukungan Manajemen Iptek	724.350.184	123.956.962	8.519.734		856.826.880	1.024.693.925	1.123.396.191	1.235.810.621
JUMLAH RM						1.013.646.880			
JUMLAH PLN						109.750.592			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						57.600.000			
JUMLAH PBS						659.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 080
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)	459.457.326	209.368.285	146.967.596		815.793.207	833.562.431	851.864.748	870.716.260
080.01	Badan Tenaga Nuklir Nasional	459.457.326	209.368.285	146.967.596		815.793.207	833.562.431	851.864.748	870.716.260
01	PELAYANAN UMUM	444.439.782	199.875.829	138.677.596		782.993.207	799.974.059	817.464.346	835.479.432
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	444.439.782	199.875.829	138.677.596		782.993.207	799.974.059	817.464.346	835.479.432
080.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		39.693.918	136.462.900		176.156.818	176.704.864	177.269.342	177.850.829
3435	Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi Nuklir untuk Produk Inovasi di Bidang Pangan/Pertanian		1.216.468			1.216.468	1.252.551	1.289.726	1.328.021
3436	Penyelenggaraan Fasilitasi, Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan Teknis Iptek Nuklir		19.396.941	6.543.230		25.940.171	25.999.422	26.060.453	26.123.319
3438	Pengembangan dan Pengkajian Teknologi Reaktor dan Bahan Bakar Nuklir		9.955.829	1.217.032		11.172.861	11.426.886	11.688.524	11.958.043
3439	Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Bahan Galian Nuklir		851.056	94.000		945.056	979.438	1.014.848	1.051.333
3441	Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka		2.361.113	909.076		3.270.189	3.360.395	3.453.301	3.549.003
3443	Perekayasaan Perangkat dan Fasilitas Nuklir		195.809	124.133.250		124.329.059	124.330.309	124.331.597	124.332.923
3446	Penelitian dan Pengembangan Material Maju Berbasis Iptek Nuklir		1.489.628	174.119		1.663.747	1.676.094	1.688.808	1.701.912
3448	Pengembangan Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Limbah Radioaktif		827.445	1.008.664		1.836.109	1.896.611	1.958.927	2.023.117

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 080
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6331	Pelaksanaan Standardisasi, Jaminan Mutu Nuklir, Akreditasi dan Sertifikasi		547.231	20.000		567.231	567.231	567.231	567.231
6333	Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Inovasi Teknologi Nuklir di Bidang Kesehatan		338.558	13.229		351.787	351.787	351.787	351.787
6334	Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nuklir untuk Pengelolaan Lingkungan		465.394	5.000		470.394	470.394	470.394	470.394
6343	Pengembangan dan Pengkajian Teknologi Keselamatan dan Keamanan Nuklir dan Radiasi		2.048.446	2.345.300		4.393.746	4.393.746	4.393.746	4.393.746
080.01.WA	Program Dukungan Manajemen	444.439.782	160.181.911	2.214.696		606.836.389	623.269.195	640.195.004	657.628.603
3427	Legislasi dan Litigasi		338.107			338.107	350.822	363.922	377.415
3429	Pengelolaan Organisasi dan SDM		5.483.657			5.483.657	5.488.271	5.493.028	5.497.926
3430	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	444.439.782	105.947.047	741.363		551.128.192	567.517.783	584.399.068	601.786.799
3431	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		717.434			717.434	743.320	769.987	797.464
6332	Pelayanan Operasional Fasilitas Litbangjirap Iptek Nuklir		47.219.894	1.473.333		48.693.227	48.693.227	48.693.227	48.693.227
6335	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		475.772			475.772	475.772	475.772	475.772
10	PENDIDIKAN	15.017.544	9.492.456	8.290.000		32.800.000	33.588.372	34.400.402	35.236.828
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	15.017.544	9.492.456	8.290.000		32.800.000	33.588.372	34.400.402	35.236.828
080.01.WA	Program Dukungan Manajemen	15.017.544	9.492.456	8.290.000		32.800.000	33.588.372	34.400.402	35.236.828

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 080
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3434	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	15.017.544	9.492.456	8.290.000		32.800.000	33.588.372	34.400.402	35.236.828
JUMLAH RM						666.846.844			
JUMLAH PNBP						24.839.363			
JUMLAH PBS						124.107.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 081
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)	535.114.464	875.832.365	350.600.991		1.761.547.820	1.761.727.552	1.761.912.674	1.762.103.372
081.01	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	535.114.464	875.832.365	350.600.991		1.761.547.820	1.761.727.552	1.761.912.674	1.762.103.372
04	EKONOMI	535.114.464	875.832.365	350.600.991		1.761.547.820	1.761.727.552	1.761.912.674	1.762.103.372
04.10	LITBANG EKONOMI	535.114.464	875.832.365	350.600.991		1.761.547.820	1.761.727.552	1.761.912.674	1.762.103.372
081.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		720.731.285	346.725.503		1.067.456.788	1.067.456.788	1.067.456.788	1.067.456.788
6246	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Sistem Peringatan Dini Bencana		483.877.577	144.809.852		628.687.429	628.687.429	628.687.429	628.687.429
6247	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Kemaritiman		4.230.388	5.319.612		9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000
6248	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Kesehatan		45.038.265	78.561.735		123.600.000	123.600.000	123.600.000	123.600.000
6249	Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk Pertahanan dan Keamanan		23.156.464	60.793.536		83.950.000	83.950.000	83.950.000	83.950.000
6250	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Rekayasa Keteknikan		8.997.834	24.502.166		33.500.000	33.500.000	33.500.000	33.500.000
6251	Pengkajian dan Penerapan Teknologi bidang Energi		11.658.522	9.500.210		21.158.732	21.158.732	21.158.732	21.158.732
6252	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Lingkungan		4.305.952	1.194.048		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
6253	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Transportasi		5.090.000	5.410.000		10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
6254	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Teknologi		134.376.283	16.634.344		151.010.627	151.010.627	151.010.627	151.010.627
081.01.WA	Program Dukungan Manajemen	535.114.464	155.101.080	3.875.488		694.091.032	694.270.764	694.455.886	694.646.584

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 081
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3451	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		1.943.558	206.442		2.150.000	2.203.411	2.258.415	2.315.086
3453	Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi		1.852.860	147.140		2.000.000	2.019.531	2.039.649	2.060.374
5863	Pengelolaan Hukum, Kerjasama dan HUMAS		4.816.000	184.000		5.000.000	5.106.790	5.216.790	5.330.092
6255	Pengelolaan Organisasi dan SDM		15.052.250	447.750		15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
6256	Pengelolaan Perencanaan Program, Keuangan, BMN dan Umum	535.114.464	131.436.412	2.890.156		669.441.032	669.441.032	669.441.032	669.441.032
JUMLAH RM						1.610.511.715			
JUMLAH PNBP						87.843.305			
JUMLAH BLU						63.192.800			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 082
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)	221.467.855	266.612.035	352.235.992		840.315.882	882.315.029	909.521.029	929.521.029
082.01	LAPAN	221.467.855	266.612.035	352.235.992		840.315.882	882.315.029	909.521.029	929.521.029
01	PELAYANAN UMUM	221.467.855	266.612.035	352.235.992		840.315.882	882.315.029	909.521.029	929.521.029
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	221.467.855	266.612.035	352.235.992		840.315.882	882.315.029	909.521.029	929.521.029
082.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		162.239.263	346.896.042		509.135.305	551.134.452	578.340.452	598.340.452
6324	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh		95.133.459	18.921.541		114.055.000	114.055.000	114.055.000	114.055.000
6325	Pemanfaatan dan Penyelenggaraan Keantariksaan di Bidang Teknologi dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh		4.468.694	726.516		5.195.210	5.195.210	5.195.210	5.195.210
6326	Penelitian dan Pengembangan Sains Antariksa dan Atmosfer		2.743.314	2.968.228		5.711.542	5.711.542	5.711.542	5.711.542
6327	Pemanfaatan dan Penyelenggaraan Keantariksaan di Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer		4.061.707	26.542.874		30.604.581	30.604.581	30.604.581	30.604.581
6328	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Penerbangan, Satelit, dan Roket		49.087.093	200.107.635		249.194.728	291.193.875	318.399.875	338.399.875
6329	Pemanfaatan dan Penyelenggaraan Keantariksaan di Bidang Teknologi Penerbangan, Satelit, dan Roket		6.744.996	97.629.248		104.374.244	104.374.244	104.374.244	104.374.244
082.01.WA	Program Dukungan Manajemen	221.467.855	104.372.772	5.339.950		331.180.577	331.180.577	331.180.577	331.180.577
3516	Pelaksanaan Pengawasan Internal		1.029.951			1.029.951	1.029.951	1.029.951	1.029.951

SK No 019754 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 082
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3523	Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa		10.572.344	3.515.000		14.087.344	14.087.344	14.087.344	14.087.344
3524	Penyelenggaraan Layanan Inovasi dan Standar di Bidang Penerbangan dan Antariksa		1.024.065	143.500		1.167.565	1.167.565	1.167.565	1.167.565
5848	Pelaksanaan Pengkajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa		1.625.556			1.625.556	1.625.556	1.625.556	1.625.556
6330	Penyelenggaraan dan Pembinaan Dukungan Administrasi Iptek Penerbangan dan Antariksa	221.467.855	90.120.856	1.681.450		313.270.161	313.270.161	313.270.161	313.270.161
JUMLAH RM						745.347.225			
JUMLAH PNBP						4.968.657			
JUMLAH PBS						90.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 083
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	94.756.910	223.881.009	949.263.710		1.267.901.629	1.757.993.445	2.314.881.445	1.161.400.749
083.01	Badan Informasi Geospasial	94.756.910	223.881.009	949.263.710		1.267.901.629	1.757.993.445	2.314.881.445	1.161.400.749
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	94.756.910	223.881.009	949.263.710		1.267.901.629	1.757.993.445	2.314.881.445	1.161.400.749
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	94.756.910	223.881.009	949.263.710		1.267.901.629	1.757.993.445	2.314.881.445	1.161.400.749
083.01.GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial		145.190.322	945.353.478		1.090.543.800	1.580.635.616	2.137.523.616	984.042.920
6445	Penyediaan Sistem Referensi Geospasial Indonesia		34.730.705	101.338.295		136.069.000	136.069.000	136.069.000	136.069.000
6446	Penyediaan Peta Dasar		38.533.288	805.790.712		844.324.000	1.334.415.816	1.891.303.816	737.823.120
6447	Pembinaan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial		24.330.542	12.471.458		36.802.000	36.802.000	36.802.000	36.802.000
6448	Penyediaan Infrastruktur dan Penyebarluasan Informasi Geospasial		39.835.787	25.753.013		65.588.800	65.588.800	65.588.800	65.588.800
6449	Penyelenggaraan Jasa dan Produk Bidang Informasi Geospasial		7.760.000			7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.760.000
083.01.WA	Program Dukungan Manajemen	94.756.910	78.690.687	3.910.232		177.357.829	177.357.829	177.357.829	177.357.829
3538	Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara		2.950.000	50.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3539	Penyelenggaraan Penelitian, Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk		13.553.165	1.373.400		14.926.565	14.926.565	14.926.565	14.926.565
6450	Penyelenggaraan Kesekretariatan	94.756.910	62.187.522	2.486.832		159.431.264	159.431.264	159.431.264	159.431.264
JUMLAH RM						1.256.741.629			
JUMLAH PLN						1.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 083
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						10.160.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 084
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	79.466.698	136.098.610	50.430.825		265.996.133	271.006.133	276.016.133	280.026.133
084.01	Badan Standarisasi Nasional	79.466.698	136.098.610	50.430.825		265.996.133	271.006.133	276.016.133	280.026.133
04	EKONOMI	79.466.698	136.098.610	50.430.825		265.996.133	271.006.133	276.016.133	280.026.133
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	79.466.698	135.148.610	50.380.825		264.996.133	270.006.133	275.016.133	279.026.133
084.01.EJ	Program Standardisasi Nasional		69.657.178	41.996.687		111.653.865	111.663.865	111.673.865	111.683.865
3558	Peningkatan Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		9.500.000			9.500.000	9.510.000	9.520.000	9.530.000
3559	Peningkatan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		6.382.000	215.000		6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
3561	Peningkatan Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian		5.515.800			5.515.800	5.515.800	5.515.800	5.515.800
4177	Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi		3.500.000			3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
6175	Peningkatan Pengembangan Standar		12.375.000			12.375.000	12.375.000	12.375.000	12.375.000
6176	Peningkatan Akreditasi		26.424.633	295.000		26.719.633	26.719.633	26.719.633	26.719.633
6177	Peningkatan Standar Nasional Satuan Ukuran		5.959.745	41.486.687		47.446.432	47.446.432	47.446.432	47.446.432
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	79.466.698	65.491.432	8.384.138		153.342.268	158.342.268	163.342.268	167.342.268
3549	Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum BSN		8.253.356	302.500		8.555.856	8.555.856	8.555.856	8.555.856
3550	Peningkatan Pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Umum	79.466.698	47.932.414	6.784.800		134.183.912	139.183.912	144.183.912	148.183.912

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 084
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3556	Peningkatan Data dan Sistem Informasi		2.199.032	1.192.868		3.391.900	3.391.900	3.391.900	3.391.900
4176	Peningkatan Pelayanan Humas, kerjasama dan Layanan Informasi		7.106.630	103.970		7.210.600	7.210.600	7.210.600	7.210.600
04.10	LITBANG EKONOMI		950.000	50.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen		950.000	50.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3551	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN		950.000	50.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
JUMLAH RM						233.511.409			
JUMLAH PNBP						32.484.724			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 085
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	62.605.380	54.350.797	9.102.012		126.058.189	129.094.189	132.221.413	135.442.537
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	62.605.380	54.350.797	9.102.012		126.058.189	129.094.189	132.221.413	135.442.537
01	PELAYANAN UMUM	62.605.380	54.350.797	9.102.012		126.058.189	129.094.189	132.221.413	135.442.537
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	62.605.380	54.350.797	9.102.012		126.058.189	129.094.189	132.221.413	135.442.537
085.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		22.645.841	7.000.812		29.646.653	30.146.094	30.660.624	31.190.631
3568	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Keselamatan, Keamanan, Garda Aman Ketenaganukliran		12.715.502	769.760		13.485.262	13.771.930	14.067.247	14.371.429
3569	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Partisipatif Ketenaganukliran		1.034.720	315.280		1.350.000	1.380.312	1.411.541	1.443.714
3570	Peningkatan Sistem Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir Nasional		1.864.245	5.722.146		7.586.391	7.596.922	7.607.772	7.618.947
3571	Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran		6.523.000	152.000		6.675.000	6.831.399	6.992.534	7.158.531
4389	Pengembangan Sistem Pengawasan PLTN		508.374	41.626		550.000	565.531	581.530	598.010
085.01.WA	Program Dukungan Manajemen	62.605.380	31.704.956	2.101.200		96.411.536	98.948.095	101.560.789	104.251.906
3562	Pengelolaan Organisasi dan SDM		3.903.685	4.400		3.908.085	4.019.253	4.133.769	4.251.735
3563	Pengelolaan Litigasi dan Legislasi Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik		3.979.800	234.800		4.214.600	4.265.344	4.317.617	4.371.463
3564	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		1.060.760	599.000		1.659.760	1.665.904	1.672.236	1.678.758

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 085
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3565	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	62.605.380	22.103.711	1.170.000		85.879.091	88.233.425	90.658.399	93.156.142
3566	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		657.000	93.000		750.000	764.169	778.768	793.808
JUMLAH RM						113.792.142			
JUMLAH PNBP						12.266.047			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 086
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	160.985.903	151.035.794	12.983.723		325.005.420	334.755.158	344.797.350	355.141.233
086.01	Lembaga Administrasi Negara	160.985.903	151.035.794	12.983.723		325.005.420	334.755.158	344.797.350	355.141.233
01	PELAYANAN UMUM	160.985.903	132.699.718	12.833.438		306.519.059	315.033.663	324.484.307	334.218.799
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	160.985.903	132.699.718	12.833.438		306.519.059	315.033.663	324.484.307	334.218.799
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN		49.032.130			49.032.130	49.822.331	51.316.813	52.856.316
4824	Pembinaan Jabatan Fungsional Administrasi Negara		2.549.823			2.549.823	2.626.307	2.705.076	2.786.226
4825	Pengkajian Kebijakan Dan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara		3.368.293			3.368.293	3.469.322	3.573.378	3.680.583
4826	Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara		3.100.118			3.100.118	3.193.108	3.288.892	3.387.560
4827	Penyusunan Kebijakan Dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara		40.013.896			40.013.896	40.533.594	41.749.467	43.001.947
086.01.WA	Program Dukungan Manajemen	160.985.903	83.667.588	12.833.438		257.486.929	265.211.332	273.167.494	281.362.483
3579	Pengawasan Resiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		660.000			660.000	679.795	700.185	721.191
4821	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Keuangan		7.919.635	2.000		7.921.635	7.870.416	8.106.476	8.349.652
4822	Pembinaan Administrasi serta Pengelolaan Pelayanan SDM dan Umum	160.985.903	71.355.524	10.825.743		243.167.170	250.725.072	258.246.741	265.994.128

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 086
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4823	Peningkatan Koordinasi Hukum, Organisasi, Data, dan Sistem Informasi		3.732.429	2.005.695		5.738.124	5.936.049	6.114.092	6.297.512
10	PENDIDIKAN		18.336.076	150.285		18.486.361	19.721.495	20.313.043	20.922.434
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN		18.336.076	150.285		18.486.361	19.721.495	20.313.043	20.922.434
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN		18.336.076	150.285		18.486.361	19.721.495	20.313.043	20.922.434
3611	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Terapan Bidang Ilmu Administrasi Politeknik STIA LAN		18.336.076	150.285		18.486.361	19.721.495	20.313.043	20.922.434
JUMLAH RM						272.673.826			
JUMLAH PNBP						52.331.594			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 087
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	109.417.669	83.283.631	99.738.311		292.439.611	297.632.816	302.981.907	308.491.509
087.01	Arsip Nasional	109.417.669	83.283.631	99.738.311		292.439.611	297.632.816	302.981.907	308.491.509
01	PELAYANAN UMUM	109.417.669	83.283.631	99.738.311		292.439.611	297.632.816	302.981.907	308.491.509
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	109.417.669	83.283.631	99.738.311		292.439.611	297.632.816	302.981.907	308.491.509
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		29.791.671	40.229.554		70.021.225	70.630.098	71.257.287	71.903.320
3620	Akuisisi Arsip Nasional		729.791	177.240		907.031	907.031	907.031	907.031
3622	Pembinaan Kearsipan Lingkup Pusat		1.452.000	48.000		1.500.000	1.544.995	1.591.334	1.639.072
3623	Pelayanan dan Pemanfaatan Arsip		1.636.423	281.195		1.917.618	1.970.391	2.024.746	2.080.741
3624	Pengolahan Arsip Nasional		692.000	108.000		800.000	802.052	804.165	806.342
3625	Preservasi Arsip Nasional		2.898.305	29.801.695		32.700.000	32.749.206	32.799.913	32.852.138
3626	Pelayanan Jasa Kearsipan		6.254.992	328.400		6.583.392	6.704.672	6.829.590	6.958.259
3627	Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan		3.676.671	667.824		4.344.495	4.430.711	4.519.520	4.610.998
3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan		875.300	124.700		1.000.000	1.028.565	1.057.990	1.088.299
5257	Pengelolaan Arsip Tsunami dan Arsip Statis di Daerah		190.000	8.000.000		8.190.000	8.194.398	8.198.929	8.203.599
5356	Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan		3.925.440			3.925.440	3.966.844	4.009.493	4.053.421
5357	Pengembangan dan Sertifikasi SDM Kearsipan		1.943.089	167.160		2.110.249	2.124.722	2.139.628	2.154.986

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 087
KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5358	Pembinaan Kearsipan Lingkup Daerah Wilayah Timur		1.840.000			1.840.000	1.894.663	1.950.971	2.008.969
5359	Pembinaan Kearsipan Lingkup Daerah Wilayah Barat		1.653.000			1.653.000	1.695.689	1.739.660	1.784.954
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan		2.024.660	525.340		2.550.000	2.616.159	2.684.317	2.754.511
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen	109.417.669	53.491.960	59.508.757		222.418.386	227.002.718	231.724.620	236.588.189
3614	Pelayanan Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum		3.323.993	224.007		3.548.000	3.582.926	3.618.907	3.655.978
3615	Pelayanan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerjasama, Humas dan Tata Usaha Pimpinan		5.950.160	161.456		6.111.616	6.244.602	6.381.578	6.522.670
3616	Pelayanan Umum	109.417.669	43.539.101	28.471.000		181.427.770	185.835.956	190.376.403	195.053.059
3617	Pengawasan Internal		481.000			481.000	489.234	497.732	506.482
6451	Pengelolaan Data dan Informasi Kearsipan		197.706	30.652.294		30.850.000	30.850.000	30.850.000	30.850.000
JUMLAH RM						280.972.937			
JUMLAH PNBP						11.466.674			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 088
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	345.541.716	223.599.412	64.964.745		634.105.873	648.485.702	663.297.005	678.552.819
088.01	Badan Kepegawaian Negara	345.541.716	223.599.412	64.964.745		634.105.873	648.485.702	663.297.005	678.552.819
01	PELAYANAN UMUM	345.541.716	223.599.412	64.964.745		634.105.873	648.485.702	663.297.005	678.552.819
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	345.541.716	223.599.412	64.964.745		634.105.873	648.485.702	663.297.005	678.552.819
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN		75.728.338	3.206.886		78.935.224	80.228.462	81.560.534	82.932.599
3644	Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian		3.150.000			3.150.000	3.174.138	3.199.003	3.224.618
3655	Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi		5.223.825	493.820		5.717.645	5.862.027	6.010.744	6.163.938
3663	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN		7.100.000			7.100.000	7.273.840	7.452.897	7.637.329
3664	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kepegawaian		8.812.579			8.812.579	9.006.093	9.205.399	9.410.708
4845	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pembinaan Bidang Manajemen ASN		15.649.389			15.649.389	15.747.750	15.849.070	15.953.434
4846	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN		9.994.513			9.994.513	10.237.591	10.487.977	10.745.852
4847	Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN		13.625.346	2.713.066		16.338.412	16.549.997	16.767.934	16.992.408
4848	Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN		12.172.686			12.172.686	12.377.026	12.587.510	12.804.312
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	345.541.716	147.871.074	61.757.859		555.170.649	568.257.240	581.736.471	595.620.220

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 088
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3630	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		1.289.178			1.289.178	1.294.978	1.300.957	1.307.113
3635	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal		1.178.737			1.178.737	1.210.570	1.243.362	1.277.135
3639	Pelaksanaan Tugas Khusus (Spesial Mission)		1.000.000			1.000.000	1.021.129	1.042.892	1.065.313
3648	Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi		14.428.841	21.571.159		36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
3662	Pengkajian dan Penelitian di Bidang Manajemen ASN		900.000			900.000	902.421	904.917	907.488
4842	Pengelolaan Organisasi dan SDM		8.861.754			8.861.754	8.938.280	9.017.103	9.098.297
4843	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	345.541.716	119.332.864	40.186.700		505.061.280	517.992.373	531.311.426	545.030.184
4844	Legislasi dan Litigasi		879.700			879.700	897.489	915.814	934.690
JUMLAH RM						625.468.228			
JUMLAH PNBP						8.637.645			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 089
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1.036.010.770	461.147.921	178.022.809		1.675.181.500	1.725.435.532	1.777.197.672	1.830.513.530
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.036.010.770	461.147.921	178.022.809		1.675.181.500	1.725.435.532	1.777.197.672	1.830.513.530
01	PELAYANAN UMUM	1.036.010.770	461.147.921	178.022.809		1.675.181.500	1.725.435.532	1.777.197.672	1.830.513.530
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	1.036.010.770	461.147.921	178.022.809		1.675.181.500	1.725.435.532	1.777.197.672	1.830.513.530
089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan		237.646.469	17.958.844		255.605.313	263.272.724	271.170.347	279.305.428
3671	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP		1.541.505			1.541.505	1.587.742	1.635.374	1.684.434
3672	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengawasan		13.872.047	247.186		14.119.233	14.542.805	14.979.086	15.428.456
3673	Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor		2.460.084			2.460.084	2.533.878	2.609.885	2.688.177
3674	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan		119.414.440	17.711.658		137.126.098	141.239.854	145.476.981	149.841.273
3675	Penelitian dan Pengembangan Pengawasan		1.785.908			1.785.908	1.839.469	1.894.653	1.951.490
3701	Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan		44.832.028			44.832.028	46.176.433	47.561.305	48.988.148
4207	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi dan Keuangan		525.000			525.000	540.748	556.970	573.678
4208	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pangan, Pengelolaan Energi, dan Sumber Daya Alam		713.091			713.091	734.480	756.515	779.208
4209	Pengawasan Kementerian/Lembaga Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan		847.000			847.000	872.407	898.577	925.533

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 089
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan		608.730			608.730	626.989	645.798	665.171
4211	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Kerja Sama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan		562.300			562.300	579.167	596.539	614.433
4212	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan		515.632			515.632	531.100	547.032	563.443
4213	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Politik dan Penegakan Hukum		652.000			652.000	671.559	691.704	712.456
4214	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Sosial dan Penanganan Bencana		997.511			997.511	1.027.432	1.058.254	1.090.001
4215	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan		1.048.917			1.048.917	1.080.382	1.112.793	1.146.177
4216	Pengawasan Kementerian/Lembaga Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi		1.699.195			1.699.195	1.750.169	1.802.673	1.856.752
4217	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah		649.806			649.806	669.291	689.370	710.048
4218	Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah		877.782			877.782	904.103	931.221	959.161
4219	Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa		1.248.910			1.248.910	1.286.372	1.324.955	1.364.706
4220	Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah		1.440.878			1.440.878	1.484.096	1.528.619	1.574.477
4221	Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan		666.621			666.621	686.600	707.193	728.411

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 089
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perdagangan								
4222	Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan		550.000			550.000	566.485	583.474	600.981
4223	Pegawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur		958.547			958.547	987.293	1.016.905	1.047.412
4224	Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan		1.025.000			1.025.000	1.055.747	1.087.417	1.120.041
4225	Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa		570.000			570.000	587.097	604.708	622.848
4226	Pengawasan Investigasi I		503.534			503.534	518.638	534.195	550.220
4227	Pengawasan Investigasi II		616.576			616.576	635.071	654.121	673.744
4228	Pengawasan Investigasi III		696.515			696.515	717.407	738.929	761.097
4229	Pengawasan Investigasi IV		519.335			519.335	534.912	550.956	567.485
5237	Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pengawasan Intern Nasional dan Pengembangan Metodologi Pengawasan		35.247.577			35.247.577	36.304.998	37.394.145	38.515.967
089.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.036.010.770	223.501.452	160.063.965		1.419.576.187	1.462.162.808	1.506.027.325	1.551.208.102
3665	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Hukum dan Komunikasi		3.473.880			3.473.880	3.578.088	3.685.426	3.795.987
3666	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sumber Daya Manusia		21.540.000			21.540.000	22.186.188	22.851.760	23.537.311

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 089
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3667	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Keuangan	274.571.313	20.805.810			295.377.123	304.238.404	313.365.537	322.766.506
3668	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Manajemen Kinerja Organisasi, dan Tata Kelola		4.000.000			4.000.000	4.119.980	4.243.566	4.370.872
3669	Pembinaan dan Koordinasi Layanan Sarana Prasarana dan Layanan Internal		37.476.574	13.887.626		51.364.200	52.905.109	54.492.253	56.127.013
3676	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	761.439.457	136.205.188	146.176.339		1.043.820.984	1.075.135.039	1.107.388.783	1.140.610.413
JUMLAH RM						1.509.847.900			
JUMLAH PLN						136.932.367			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						28.401.233			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	571.034.871	2.269.321.809	188.608.032		3.028.964.712	3.111.483.816	3.188.727.658	3.268.280.030
090.01	Sekretariat Jenderal	237.740.593	569.265.969	141.529.584		948.536.146	960.168.955	972.150.623	984.492.109
04	EKONOMI	237.638.190	560.705.994	141.234.942		939.579.126	950.997.766	962.758.841	974.873.099
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	237.638.190	560.705.994	141.234.942		939.579.126	950.997.766	962.758.841	974.873.099
090.01.EE	Program Perdagangan Luar Negeri		135.139.829	7.852.806		142.992.635	146.296.525	149.699.485	153.204.630
3711	Penyelidikan Kasus Dumping Dan Subsidi		4.507.843	269.596		4.777.439	4.781.331	4.785.340	4.789.471
3712	Peningkatan Penyelidikan Tindakan Pengamanan (Safeguard)		3.816.998	458.576		4.275.574	4.376.983	4.481.441	4.589.039
3714	Penyelenggaraan Atase Perdagangan		34.629.506	3.577.165		38.206.671	39.186.500	40.195.665	41.235.165
3777	Pengembangan Promosi Indonesia Trade Promotion Center (ITPC)		84.328.518	3.197.469		87.525.987	89.744.747	92.030.075	94.383.991
3973	Layanan Advokasi Perdagangan		7.856.964	350.000		8.206.964	8.206.964	8.206.964	8.206.964
090.01.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		10.230.561	612.564		10.843.125	11.012.224	11.186.401	11.365.831
3725	Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional		10.230.561	612.564		10.843.125	11.012.224	11.186.401	11.365.831
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	237.638.190	415.335.604	132.769.572		785.743.366	793.689.017	801.872.955	810.302.638
3702	Peningkatan Pengelolaan Perencanaan	309.120	19.852.580	295.532		20.457.232	23.171.893	25.967.980	28.847.995
3703	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi	75.000	16.954.707	1.300.000		18.329.707	18.577.986	18.833.711	19.097.132
3704	Peningkatan Pengelolaan Keuangan	74.168.882	24.792.931	400.000		99.361.813	99.499.205	99.640.707	99.786.488
3705	Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Pelaksanaan Tugas	550.512	82.170.542	1.649.979		84.371.033	84.516.217	84.665.743	84.819.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kementerian Perdagangan								
3706	Penyusunan Perangkat dan Pelayanan Hukum Bidang Perdagangan	149.640	8.550.641	184.000		8.884.281	8.884.281	8.884.281	8.884.281
3707	Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan	13.632.688	20.265.911	395.022		34.293.621	34.318.623	34.344.375	34.370.901
3708	Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian	12.054.654	13.405.609	272.478		25.732.741	25.879.398	26.030.450	26.186.060
3709	Pelayanan Informasi Publik	72.408	27.597.325	2.536.000		30.205.733	30.510.957	30.825.329	31.149.150
3710	Penanganan Isu Strategis Perdagangan Lintas Sektor	147.070	6.215.130	245.000		6.607.200	6.607.200	6.607.200	6.607.200
3713	Penyelenggaraan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan	39.320.766	45.267.809	266.000		84.854.575	87.307.206	89.833.407	92.435.413
3718	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan		8.341.202	116.861.838		125.203.040	125.228.438	125.254.597	125.281.542
5048	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan	70.020	43.159.168	7.957.023		51.186.211	52.799.925	54.462.035	56.174.028
5112	Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Teknis Penguji Mutu Barang	75.570	5.038.240	406.700		5.520.510	5.652.019	5.787.471	5.927.005
6410	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal	97.011.860	93.723.809			190.735.669	190.735.669	190.735.669	190.735.669
10	PENDIDIKAN	102.403	8.559.975	294.642		8.957.020	9.171.189	9.391.782	9.619.010
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	102.403	8.559.975	294.642		8.957.020	9.171.189	9.391.782	9.619.010
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	102.403	8.559.975	294.642		8.957.020	9.171.189	9.391.782	9.619.010
3723	Penyelenggaraan Akademi Metrologi	102.403	8.559.975	294.642		8.957.020	9.171.189	9.391.782	9.619.010

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090.02	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	41.470.031	872.223.883	3.157.000		916.850.914	944.355.598	972.685.431	1.001.866.005
04	EKONOMI	41.470.031	872.223.883	3.157.000		916.850.914	944.355.598	972.685.431	1.001.866.005
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	41.470.031	872.223.883	3.157.000		916.850.914	944.355.598	972.685.431	1.001.866.005
090.02.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		819.587.656	2.673.000		822.260.656	846.927.727	872.334.799	898.504.863
3716	Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		119.550.000	973.000		120.523.000	124.138.666	127.862.779	131.698.647
3720	Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		29.200.000	500.000		29.700.000	30.590.960	31.508.620	32.453.881
3722	Pembinaan Usaha dan Pelaku Distribusi Perdagangan		18.700.000	700.000		19.400.000	19.981.961	20.581.378	21.198.818
3974	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah		32.000.000			32.000.000	32.959.413	33.947.687	34.966.173
5090	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan		620.137.656	500.000		620.637.656	639.256.727	658.434.335	678.187.344
090.02.WA	Program Dukungan Manajemen	41.470.031	52.636.227	484.000		94.590.258	97.427.871	100.350.632	103.361.142
3719	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	41.470.031	52.636.227	484.000		94.590.258	97.427.871	100.350.632	103.361.142
090.03	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	40.762.655	108.897.801	3.389.875		153.050.331	155.809.300	158.650.984	161.578.029
04	EKONOMI	40.762.655	108.897.801	3.389.875		153.050.331	155.809.300	158.650.984	161.578.029
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	40.762.655	108.897.801	3.389.875		153.050.331	155.809.300	158.650.984	161.578.029
090.03.EE	Program Perdagangan Luar Negeri		55.966.571			55.966.571	56.505.715	57.060.996	57.633.006

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3730	Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan		6.969.295			6.969.295	7.080.598	7.195.239	7.313.327
3731	Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan		5.400.000			5.400.000	5.443.650	5.488.605	5.534.924
3736	Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor		13.632.287			13.632.287	13.959.399	14.296.305	14.643.350
3737	Pengelolaan Impor		5.729.989			5.729.989	5.783.676	5.838.961	5.895.919
3745	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar		7.878.549			7.878.549	7.881.941	7.885.435	7.889.035
3975	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah		16.356.451			16.356.451	16.356.451	16.356.451	16.356.451
090.03.WA	Program Dukungan Manajemen	40.762.655	52.931.230	3.389.875		97.083.760	99.303.585	101.589.988	103.945.023
3729	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	40.762.655	52.931.230	3.389.875		97.083.760	99.303.585	101.589.988	103.945.023
090.04	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	39.737.760	100.218.818	770.700		140.727.278	144.408.877	148.201.095	152.107.226
04	EKONOMI	39.737.760	100.218.818	770.700		140.727.278	144.408.877	148.201.095	152.107.226
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	39.737.760	100.218.818	770.700		140.727.278	144.408.877	148.201.095	152.107.226
090.04.EE	Program Perdagangan Luar Negeri		83.403.455	250.000		83.653.455	85.694.761	87.797.434	89.963.334
3738	Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional		39.232.905	250.000		39.482.905	40.331.970	41.206.515	42.107.309
3740	Perundingan Perdagangan Jasa		9.560.000			9.560.000	9.786.774	10.020.340	10.260.959
3741	Perundingan Perdagangan Multilateral		6.500.000			6.500.000	6.699.632	6.905.257	7.117.065

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3742	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN		10.400.000			10.400.000	10.698.518	11.006.024	11.322.764
3743	Perundingan Perdagangan Bilateral		11.510.550			11.510.550	11.777.871	12.053.292	12.337.008
3744	Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional		6.200.000			6.200.000	6.399.996	6.606.006	6.818.229
090.04.WA	Program Dukungan Manajemen	39.737.760	16.815.363	520.700		57.073.823	58.714.116	60.403.661	62.143.892
3739	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	39.737.760	16.815.363	520.700		57.073.823	58.714.116	60.403.661	62.143.892
090.05	Inspektorat Jenderal	19.205.084	24.672.526	1.430.558		45.308.168	46.667.341	48.067.234	49.509.233
04	EKONOMI	19.205.084	24.672.526	1.430.558		45.308.168	46.667.341	48.067.234	49.509.233
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	19.205.084	24.672.526	1.430.558		45.308.168	46.667.341	48.067.234	49.509.233
090.05.WA	Program Dukungan Manajemen	19.205.084	24.672.526	1.430.558		45.308.168	46.667.341	48.067.234	49.509.233
3746	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	19.205.084	15.072.526	1.430.558		35.708.168	36.779.373	37.882.692	39.019.162
3747	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I		2.238.260			2.238.260	2.305.395	2.374.547	2.445.778
3748	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II		2.724.740			2.724.740	2.806.481	2.890.660	2.977.378
3749	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III		2.237.000			2.237.000	2.304.103	2.373.208	2.444.405

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3750	Peningkatan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah IV		2.400.000			2.400.000	2.471.989	2.546.127	2.622.510
090.06	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	39.776.921	381.528.658	5.312.174		426.617.753	439.416.075	452.598.142	466.176.065
04	EKONOMI	39.776.921	381.528.658	5.312.174		426.617.753	439.416.075	452.598.142	466.176.065
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	39.776.921	381.528.658	5.312.174		426.617.753	439.416.075	452.598.142	466.176.065
090.06.EE	Program Perdagangan Luar Negeri		356.761.383	3.897.174		360.658.557	371.478.141	382.622.133	394.100.767
3717	Pengembangan Produk Ekspor		19.700.000	100.000		19.800.000	20.393.968	21.005.722	21.635.898
3751	Peningkatan Kualitas Promosi dan Kelembagaan Ekspor		8.154.837			8.154.837	8.399.469	8.651.437	8.910.978
3753	Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor		14.174.000	1.826.000		16.000.000	16.479.991	16.974.323	17.483.545
3754	Pengembangan Promosi dan Citra		286.900.000			286.900.000	295.506.962	304.372.095	313.503.260
3755	Kerja Sama Pengembangan Ekspor		7.870.000	130.000		8.000.000	8.239.981	8.487.156	8.741.758
3756	Pengembangan SDM Bidang Ekspor		19.962.546	1.841.174		21.803.720	22.457.770	23.131.400	23.825.328
090.06.WA	Program Dukungan Manajemen	39.776.921	24.767.275	1.415.000		65.959.196	67.937.934	69.976.009	72.075.298
3752	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PEN	39.776.921	24.767.275	1.415.000		65.959.196	67.937.934	69.976.009	72.075.298
090.07	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	24.145.910	39.673.523	2.566.792		66.386.225	68.377.682	70.428.838	72.541.682
04	EKONOMI	24.145.910	39.673.523	2.566.792		66.386.225	68.377.682	70.428.838	72.541.682
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	24.145.910	39.673.523	2.566.792		66.386.225	68.377.682	70.428.838	72.541.682

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090.07.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		19.164.238	1.405.000		20.569.238	21.186.238	21.821.740	22.476.376
3759	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi		2.657.960	385.000		3.042.960	3.134.237	3.228.249	3.325.098
3760	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas		8.341.102	700.000		9.041.102	9.312.307	9.591.638	9.879.376
3761	Peningkatan Pelayanan Hukum		3.218.515			3.218.515	3.315.055	3.414.495	3.516.927
3762	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		4.946.661	320.000		5.266.661	5.424.639	5.587.358	5.754.975
090.07.WA	Program Dukungan Manajemen	24.145.910	20.509.285	1.161.792		45.816.987	47.191.444	48.607.098	50.065.306
3758	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	24.145.910	20.509.285	1.161.792		45.816.987	47.191.444	48.607.098	50.065.306
090.08	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	19.412.682	22.650.768	1.067.248		43.130.698	44.424.545	45.757.120	47.129.824
04	EKONOMI	19.412.682	22.650.768	1.067.248		43.130.698	44.424.545	45.757.120	47.129.824
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	19.412.682	22.650.768	1.067.248		43.130.698	44.424.545	45.757.120	47.129.824
090.08.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		10.170.000			10.170.000	10.475.068	10.789.220	11.112.891
3764	Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri		3.390.000			3.390.000	3.491.690	3.596.402	3.704.294
3765	Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri		3.390.000			3.390.000	3.491.687	3.596.400	3.704.292
3766	Pengkajian dan Pengembangan Kerja Sama Perdagangan		3.390.000			3.390.000	3.491.691	3.596.418	3.704.305

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Internasional								
090.08.WA	Program Dukungan Manajemen	19.412.682	12.480.768	1.067.248		32.960.698	33.949.477	34.967.900	36.016.933
3763	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	19.412.682	12.480.768	1.067.248		32.960.698	33.949.477	34.967.900	36.016.933
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	108.783.235	150.189.863	29.384.101		288.357.199	307.855.443	320.188.191	332.879.857
04	EKONOMI	108.783.235	150.189.863	29.384.101		288.357.199	307.855.443	320.188.191	332.879.857
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	108.783.235	150.189.863	29.384.101		288.357.199	307.855.443	320.188.191	332.879.857
090.09.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		91.269.848	28.651.601		119.921.449	134.366.744	141.494.957	148.825.834
3724	Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen		12.149.882	621.000		12.770.882	13.212.228	13.608.550	14.364.501
3726	Peningkatan Tertib Ukur		27.547.595	13.539.132		41.086.727	44.775.275	47.345.212	50.358.454
3727	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		10.514.400			10.514.400	15.874.037	17.347.513	18.113.726
3732	Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang		7.329.545	7.984.710		15.314.255	15.865.595	16.436.258	17.026.882
3733	Standardisasi dan Pengendalian Mutu		8.702.130	4.062.250		12.764.380	14.322.260	15.119.835	15.952.429
3734	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi		2.398.498	2.114.061		4.512.559	4.667.621	4.827.932	4.993.674
3735	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi		3.567.798	130.448		3.698.246	3.945.079	4.203.416	4.473.715
3992	Peningkatan Tertib Niaga		19.060.000	200.000		19.260.000	21.704.649	22.606.241	23.542.453
090.09.WA	Program Dukungan Manajemen	108.783.235	58.920.015	732.500		168.435.750	173.488.699	178.693.234	184.054.023

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3977	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	108.783.235	58.920.015	732.500		168.435.750	173.488.699	178.693.234	184.054.023
JUMLAH RM						2.959.421.965			
JUMLAH PNBP						69.542.747			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 092
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	118.345.757	2.184.004.071	20.420.840		2.322.770.668	2.383.955.303	2.446.975.441	2.511.886.499
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	118.345.757	2.184.004.071	20.420.840		2.322.770.668	2.383.955.303	2.446.975.441	2.511.886.499
01	PELAYANAN UMUM	118.345.757	180.469.392	16.596.726		315.411.875	324.078.800	333.005.724	342.200.590
01.03	PELAYANAN UMUM	118.345.757	180.469.392	16.596.726		315.411.875	324.078.800	333.005.724	342.200.590
092.01.WA	Program Dukungan Manajemen	118.345.757	180.469.392	16.596.726		315.411.875	324.078.800	333.005.724	342.200.590
1718	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda		6.000.000			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1719	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan Pemuda		6.000.000			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1720	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga		6.000.000			6.000.000	6.179.993	6.365.378	6.556.336
1721	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		7.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3802	Penyelenggaraan Kehumasan, Pelayanan Hukum		30.600.000			30.600.000	31.409.980	32.244.246	33.103.573
3803	Perencanaan, Penganggaran, Pengorganisasian dan Evaluasi Program		27.000.000			27.000.000	27.809.952	28.644.194	29.503.503
3804	Pengelolaan Keuangan dan Kerumahtanggaan	118.345.757	94.719.392			213.065.149	219.339.754	225.802.619	232.459.415
3805	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur		3.150.000			3.150.000	3.244.494	3.341.821	3.442.074

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 092
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3806	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Pemuda dan Olahraga			16.596.726		16.596.726	17.094.627	17.607.466	18.135.689
08	PARIWISATA		1.562.234.679	3.824.114		1.566.058.793	1.612.878.279	1.661.102.335	1.710.773.191
08.02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		1.562.234.679	3.824.114		1.566.058.793	1.612.878.279	1.661.102.335	1.710.773.191
092.01.DA	Program Keolahragaan		1.562.234.679	3.824.114		1.566.058.793	1.612.878.279	1.661.102.335	1.710.773.191
3824	Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga		245.770.000			245.770.000	253.143.075	260.737.330	268.559.440
3829	Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan		27.892.500			27.892.500	28.567.076	29.261.890	29.977.575
3831	Pengembangan Industri dan Promosi Olahraga		36.335.886	2.214.114		38.550.000	39.706.474	40.897.654	42.124.574
3833	Pembinaan Olahraga Prestasi		1.252.236.293	1.610.000		1.253.846.293	1.291.461.654	1.330.205.461	1.370.111.602
10	PENDIDIKAN		441.300.000			441.300.000	446.998.224	452.867.382	458.912.718
10.10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		441.300.000			441.300.000	446.998.224	452.867.382	458.912.718
092.01.DA	Program Keolahragaan		322.605.629			322.605.629	327.864.627	333.281.386	338.860.726
3820	Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus		10.000.000			10.000.000	10.299.975	10.608.956	10.927.224
3821	Pengembangan Olahraga Pendidikan		10.000.000			10.000.000	10.299.987	10.608.967	10.927.228
3822	Pengembangan Olahraga Rekreasi		33.528.000			33.528.000	34.443.823	35.387.123	36.358.736
3823	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga		151.784.200			151.784.200	153.196.720	154.651.606	156.150.150
3827	Peningkatan Pelayanan Iptek dan Kesehatan Olahraga		10.000.000			10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 092
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3828	Peningkatan Pembibitan dan IPTEK Olahraga		40.000.000			40.000.000	40.311.904	40.633.169	40.964.078
5912	Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga		67.293.429			67.293.429	69.312.218	71.391.565	73.533.310
092.01.DB	Program Kepemudaan		118.694.371			118.694.371	119.133.597	119.585.996	120.051.992
3807	Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda		7.900.000			7.900.000	8.044.857	8.194.059	8.347.755
3808	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		15.000.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3809	Pengembangan Kreativitas Pemuda		6.850.000			6.850.000	7.055.496	7.267.154	7.485.169
3810	Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		16.700.000			16.700.000	16.700.000	16.700.000	16.700.000
3812	Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda		10.400.000			10.400.000	10.448.373	10.498.197	10.549.516
3813	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan		18.900.000			18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
3815	Peningkatan Kapasitas Pemuda		5.500.000			5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3817	Peningkatan Wawasan Pemuda		12.600.000			12.600.000	12.640.500	12.682.215	12.725.181
3818	Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda		15.000.000			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3819	Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga		4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5910	Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda		5.844.371			5.844.371	5.844.371	5.844.371	5.844.371
JUMLAH RM						2.288.770.668			
JUMLAH BLU						34.000.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 093
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	635.839.546	482.904.042	186.331.668		1.305.075.256	1.306.270.566	1.307.591.737	1.308.912.910
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi	635.839.546	482.904.042	186.331.668		1.305.075.256	1.306.270.566	1.307.591.737	1.308.912.910
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	635.839.546	482.904.042	186.331.668		1.305.075.256	1.306.270.566	1.307.591.737	1.308.912.910
03.03	PEMBINAAN HUKUM	635.839.546	482.904.042	186.331.668		1.305.075.256	1.306.270.566	1.307.591.737	1.308.912.910
093.01.BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi		338.848.463	43.286.072		382.134.535	383.329.845	384.651.016	385.972.189
3840	Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi		12.081.918			12.081.918	12.585.327	13.214.595	13.843.859
3841	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi		16.605.723			16.605.723	17.297.624	17.989.527	18.681.436
3842	Penuntutan Tindak Pidana Korupsi		16.498.816			16.498.816	16.498.816	16.498.816	16.498.816
3843	Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi		14.478.076			14.478.076	14.478.076	14.478.076	14.478.076
3845	Pengelolaan LHKPN		16.074.590			16.074.590	16.074.590	16.074.590	16.074.590
3846	Pengelolaan Gratifikasi		15.277.372			15.277.372	15.277.372	15.277.372	15.277.372
3847	Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi		123.952.607			123.952.607	123.952.607	123.952.607	123.952.607
3848	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan KPK, serta Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di Semua Lembaga Negara dan Pemerintah		40.247.325			40.247.325	40.247.325	40.247.325	40.247.325
3850	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi		21.938.096	43.286.072		65.224.168	65.224.168	65.224.168	65.224.168
3851	Pengembangan dan Pemanfaatan Jaringan Kerja Sama Antara		6.920.471			6.920.471	6.920.471	6.920.471	6.920.471

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 093
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lembaga/Instansi (PJKAKI)								
3852	Penyediaan Data dan Informasi Untuk Pemberantasan Korupsi		6.884.352			6.884.352	6.884.352	6.884.352	6.884.352
3854	Pengawasan Internal KPK		1.651.936			1.651.936	1.651.936	1.651.936	1.651.936
3855	Penanganan Pengaduan Masyarakat		5.235.719			5.235.719	5.235.719	5.235.719	5.235.719
3922	Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi		9.187.224			9.187.224	9.187.224	9.187.224	9.187.224
5208	Koordinasi dan Supervisi Pencegahan		31.814.238			31.814.238	31.814.238	31.814.238	31.814.238
093.01.WA	Program Dukungan Manajemen	635.839.546	144.055.579	143.045.596		922.940.721	922.940.721	922.940.721	922.940.721
3834	Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3835	Penyelenggaraan Humas		5.322.750	245.000		5.567.750	5.567.750	5.567.750	5.567.750
3836	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan		1.700.000			1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3837	Manajemen Sumber Daya Manusia	635.839.546	2.707.346			638.546.892	638.546.892	638.546.892	638.546.892
3838	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK)		120.776.378	142.800.596		263.576.974	263.576.974	263.576.974	263.576.974
5645	Penyelenggaraan Kesekretariatan Pimpinan		11.549.105			11.549.105	11.549.105	11.549.105	11.549.105
JUMLAH RM						1.305.075.256			

SK No 020902 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 095
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	329.439.139	709.158.097	10.375.026		1.048.972.262	1.064.696.801	1.080.893.055	1.097.575.255
095.01	Sekretariat Jenderal DPD RI	113.631.921	118.775.985	10.375.026		242.782.932	248.696.714	254.787.898	261.061.858
01	PELAYANAN UMUM	113.631.921	118.775.985	10.375.026		242.782.932	248.696.714	254.787.898	261.061.858
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	113.631.921	90.571.012	10.375.026		214.577.959	220.381.092	226.358.307	232.514.875
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen	113.631.921	90.571.012	10.375.026		214.577.959	220.381.092	226.358.307	232.514.875
3856	Penatausahaan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum		8.060.000	1.440.000		9.500.000	9.506.481	9.513.157	9.520.034
3857	Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan DPD RI	113.631.921	19.274.993			132.906.914	136.760.299	140.729.284	144.817.347
3859	Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi, Risalah dan Dokumentasi		9.345.604	3.435.173		12.780.777	12.843.401	12.907.902	12.974.341
3961	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Sarana dan Prasarana DPD RI		32.917.169	4.764.520		37.681.689	39.041.825	40.442.764	41.885.742
5240	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		830.266			830.266	830.705	831.157	831.622
5241	Penyelenggaraan Dukungan Teknis Administratif, dan Keahlian di Kantor DPD RI di Daerah Pemilihan (Ibukota Provinsi)		20.142.980	735.333		20.878.313	21.398.381	21.934.043	22.485.789
01.03	PELAYANAN UMUM		28.204.973			28.204.973	28.315.622	28.429.591	28.546.983
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen		28.204.973			28.204.973	28.315.622	28.429.591	28.546.983
3865	Penyelenggaraan Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Media		28.204.973			28.204.973	28.315.622	28.429.591	28.546.983
095.02	Dewan Perwakilan Daerah	215.807.218	590.382.112			806.189.330	816.000.087	826.105.157	836.513.397

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 095
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	PELAYANAN UMUM	215.807.218	590.382.112			806.189.330	816.000.087	826.105.157	836.513.397
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		578.531.844			578.531.844	588.325.437	598.412.831	608.802.858
095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		578.531.844			578.531.844	588.325.437	598.412.831	608.802.858
3858	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD		18.422.240			18.422.240	19.018.754	19.633.166	20.266.010
3863	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD		85.513.791			85.513.791	85.635.878	85.761.620	85.891.144
3864	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Oleh Anggota DPD RI		474.595.813			474.595.813	483.670.805	493.018.045	502.645.704
01.03	PELAYANAN UMUM	215.807.218	11.850.268			227.657.486	227.674.650	227.692.326	227.710.539
095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		4.450.000			4.450.000	4.467.164	4.484.840	4.503.053
3962	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah		2.325.000			2.325.000	2.331.484	2.338.161	2.345.042
3963	Perancangan Perundang-undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum		2.125.000			2.125.000	2.135.680	2.146.679	2.158.011
095.02.WA	Program Dukungan Manajemen	215.807.218	7.400.268			223.207.486	223.207.486	223.207.486	223.207.486
6383	Pengelolaan Keuangan Keanggotaan DPD dan Operasional Persidangan dan Rapat-rapat	215.807.218	7.400.268			223.207.486	223.207.486	223.207.486	223.207.486

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 095
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RM						1.048.972.262			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 100
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	42.363.101	66.856.716	205.800		109.425.617	112.708.219	116.089.335	119.572.008
100.01	Komisi Yudisial RI	42.363.101	66.856.716	205.800		109.425.617	112.708.219	116.089.335	119.572.008
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	42.363.101	66.856.716	205.800		109.425.617	112.708.219	116.089.335	119.572.008
03.03	PEMBINAAN HUKUM	42.363.101	66.856.716	205.800		109.425.617	112.708.219	116.089.335	119.572.008
100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim		15.677.300			15.677.300	16.147.566	16.631.946	17.130.910
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim		3.195.862			3.195.862	3.291.720	3.390.463	3.492.179
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH		6.588.873			6.588.873	6.786.515	6.990.089	7.199.794
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		5.892.565			5.892.565	6.069.331	6.251.394	6.438.937
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	42.363.101	51.179.416	205.800		93.748.317	96.560.653	99.457.389	102.441.098
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	42.363.101	41.410.317	205.800		83.979.218	86.498.555	89.093.470	91.766.270
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		5.780.130			5.780.130	5.953.524	6.132.112	6.316.071
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		3.988.969			3.988.969	4.108.574	4.231.807	4.358.757
JUMLAH RM						109.425.617			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 103
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	74.131.939	459.927.877	29.043.933	250.000.000	813.103.749	824.585.686	836.411.986	848.593.309
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	74.131.939	459.927.877	29.043.933	250.000.000	813.103.749	824.585.686	836.411.986	848.593.309
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	74.131.939	459.927.877	29.043.933	250.000.000	813.103.749	824.585.686	836.411.986	848.593.309
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	74.131.939	459.927.877	29.043.933	250.000.000	813.103.749	824.585.686	836.411.986	848.593.309
103.01.FA	Program Ketahanan Bencana		286.005.842	26.706.830	250.000.000	562.712.672	567.828.371	573.097.493	578.524.819
3882	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup Pencegahan Melalui Kesiapsiagaan		31.457.500	1.600.000		33.057.500	33.491.602	33.938.727	34.399.279
3884	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana		7.000.000			7.000.000	7.079.498	7.161.378	7.245.719
3885	Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA		14.043.651			14.043.651	14.215.938	14.393.397	14.576.198
3888	Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		7.500.000			7.500.000	7.544.953	7.591.259	7.638.952
3891	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Dukungan Sumber Daya Darurat		6.500.000		250.000.000	256.500.000	256.573.445	256.649.091	256.727.010
3893	Layanan Data dan Informasi serta Komunikasi Kebencanaan		58.499.091	1.184.430		59.683.521	60.420.004	61.178.566	61.959.909
4280	Pemetaaan dan Evaluasi Risiko Bencana		17.500.000	16.500.000		34.000.000	34.199.957	34.405.912	34.618.047
4281	Pengembangan Strategi PB		9.300.000			9.300.000	9.420.728	9.545.074	9.673.153
4282	Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana		7.600.000	400.000		8.000.000	8.194.457	8.394.746	8.601.047
4283	Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis pada Lingkup		10.000.000			10.000.000	10.299.995	10.608.986	10.927.259

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 103
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pencegahan Melalui Mitigasi Bencana								
4284	Peringatan Dini		12.100.000	300.000		12.400.000	12.603.994	12.814.096	13.030.517
4285	Penyusunan dan Pelaksanan Kebijakan Teknis Bidang Dukungan Infrastruktur Darurat		7.200.000			7.200.000	7.392.512	7.590.802	7.795.049
4286	Penyusunan dan Pelaksanan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi		13.800.000	200.000		14.000.000	14.266.662	14.541.320	14.824.226
4287	Layanan Pusat Pengendalian Operasi		7.987.600	6.472.400		14.460.000	14.505.604	14.552.576	14.600.959
4288	Pengelolaan Logistik dan Peralatan PB		58.636.000			58.636.000	60.369.459	62.154.913	63.993.942
4289	Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan PB		16.882.000	50.000		16.932.000	17.249.563	17.576.650	17.913.553
103.01.WA	Program Dukungan Manajemen	74.131.939	173.922.035	2.337.103		250.391.077	256.757.315	263.314.493	270.068.490
3873	Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, organisasi dan Tatalaksana serta kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana		9.074.668			9.074.668	9.228.711	9.387.369	9.550.803
3874	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BNPB	74.131.939	9.081.023			83.212.962	85.436.919	87.727.591	90.086.986
3875	Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran, Pemantauan, dan Evaluasi Program		35.671.615			35.671.615	36.421.561	37.193.990	37.989.614
3876	Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Umum		86.807.548	2.192.452		89.000.000	91.523.512	94.122.718	96.799.931
3878	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		23.087.181	144.651		23.231.832	23.721.934	24.226.734	24.746.694

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 103
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3879	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern dan Melaksanakan Pengawasan Fungsional Lingkup Wewenang Inspektorat I		4.500.000			4.500.000	4.612.973	4.729.331	4.849.190
3880	Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern dan Melaksanakan Pengawasan Fungsional dalam Lingkup Wewenang Inspektorat II		4.500.000			4.500.000	4.583.268	4.669.034	4.757.375
4279	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern dan Melaksanakan Tugas Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana		1.200.000			1.200.000	1.228.437	1.257.726	1.287.897
JUMLAH RM						730.675.696			
JUMLAH PLN						81.989.115			
JUMLAH RMP						0			
JUMLAH PNBP						438.938			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 104
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	125.267.163	241.797.620	14.688.569		381.753.352	393.205.479	405.000.765	417.150.726
104.01	Sekretariat Utama BP2MI	125.267.163	241.797.620	14.688.569		381.753.352	393.205.479	405.000.765	417.150.726
04	EKONOMI	125.267.163	241.797.620	14.688.569		381.753.352	393.205.479	405.000.765	417.150.726
04.02	TENAGA KERJA	125.267.163	241.797.620	14.688.569		381.753.352	393.205.479	405.000.765	417.150.726
104.01.DP	Program Penempatan dan Pelindungan PMI		168.805.077	14.688.569		183.493.646	188.998.156	194.667.364	200.507.324
3894	Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		66.378.906	1.719.942		68.098.848	70.141.680	72.245.452	74.412.795
4558	Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika		3.478.900	78.500		3.557.400	3.664.117	3.774.027	3.887.248
4559	Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika		2.973.375			2.973.375	3.062.573	3.154.441	3.249.071
4560	Peningkatan Pelayanan Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika		2.890.465			2.890.465	2.977.172	3.066.478	3.158.471
4561	Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Asia dan Afrika		4.134.349			4.134.349	4.258.372	4.386.114	4.517.692
4562	Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik		2.551.900	91.830		2.643.730	2.723.032	2.804.717	2.888.860
4563	Peningkatan Pelayanan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik		4.098.045			4.098.045	4.220.981	4.347.603	4.478.029

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 104
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4564	Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik		3.981.247	150.000		4.131.247	4.255.179	4.382.824	4.514.306
4565	Peningkatan Kualitas Sistem dan Strategi Pelayanan Penempatan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah		2.453.134	22.400		2.475.534	2.549.796	2.626.279	2.705.067
4566	Peningkatan Pelayanan Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah		1.838.823			1.838.823	1.893.981	1.950.796	2.009.319
4567	Peningkatan Pelayanan Penempatan Non Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah		3.102.825			3.102.825	3.195.903	3.291.771	3.390.523
4568	Peningkatan Pelayanan Pelindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah		11.790.849			11.790.849	12.144.561	12.508.880	12.884.145
4569	Peningkatan Tata Kelola Keuangan, BMN, dan Rumah Tangga		25.656.732	9.728.700		35.385.432	36.446.977	37.540.354	38.666.565
4570	Peningkatan Kualitas Produk Hukum dan Hubungan Masyarakat dalam Pelayanan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		10.808.073	139.200		10.947.273	11.275.677	11.613.918	11.962.329
4571	Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan		4.245.498			4.245.498	4.372.851	4.504.013	4.639.130
4572	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kerja Sama		4.816.402			4.816.402	4.960.877	5.109.686	5.262.972
4573	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BP2MI		3.937.035	362.965		4.300.000	4.428.982	4.561.822	4.698.674
4574	Peningkatan Layanan Data dan Informasi Penempatan dan		5.722.406	2.395.032		8.117.438	8.360.952	8.611.767	8.870.114

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 104
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia								
4575	Peningkatan Kualitas SDM		3.946.113			3.946.113	4.064.493	4.186.422	4.312.014
104.01.WA	Program Dukungan Manajemen	125.267.163	72.992.543			198.259.706	204.207.323	210.333.401	216.643.402
4587	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan pada BP2MI	125.267.163	72.992.543			198.259.706	204.207.323	210.333.401	216.643.402
JUMLAH RM						381.753.352			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 106
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	50.504.299	113.819.009	28.352.126		192.675.434	195.527.531	198.465.189	201.491.003
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50.504.299	113.819.009	28.352.126		192.675.434	195.527.531	198.465.189	201.491.003
01	PELAYANAN UMUM	50.504.299	113.819.009	28.352.126		192.675.434	195.527.531	198.465.189	201.491.003
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	50.504.299	113.819.009	28.352.126		192.675.434	195.527.531	198.465.189	201.491.003
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional		58.224.885	24.278.600		82.503.485	82.503.485	82.503.485	82.503.485
6319	Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa		5.554.550	190.450		5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000
6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ		31.246.900	22.861.100		54.108.000	54.108.000	54.108.000	54.108.000
6321	Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya		9.713.635	617.050		10.330.685	10.330.685	10.330.685	10.330.685
6322	Pengelolaan Advokasi dan Hukum		9.126.000	475.000		9.601.000	9.601.000	9.601.000	9.601.000
6323	Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ		2.583.800	135.000		2.718.800	2.718.800	2.718.800	2.718.800
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	50.504.299	55.594.124	4.073.526		110.171.949	113.024.046	115.961.704	118.987.518
3925	Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian		5.715.000			5.715.000	5.844.388	5.977.657	6.114.937
3926	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana		3.353.000	73.000		3.426.000	3.503.249	3.582.811	3.664.765
3927	Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan	50.504.299	45.876.124	4.000.526		100.380.949	103.024.619	105.747.601	108.552.278

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 106
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tata Usaha								
5664	Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP		650.000			650.000	651.790	653.635	655.538
JUMLAH RM						192.675.434			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	490.601.565	1.029.194.954	747.663.741		2.267.460.260	2.312.572.913	2.359.039.079	2.406.899.240
107.01	Badan SAR Nasional	490.601.565	1.029.194.954	747.663.741		2.267.460.260	2.312.572.913	2.359.039.079	2.406.899.240
04	EKONOMI	490.601.565	1.029.194.954	747.663.741		2.267.460.260	2.312.572.913	2.359.039.079	2.406.899.240
04.08	TRANSPORTASI	490.601.565	1.029.194.954	747.663.741		2.267.460.260	2.312.572.913	2.359.039.079	2.406.899.240
107.01.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana		744.963.145	662.923.636		1.407.886.781	1.429.311.612	1.451.379.200	1.474.108.774
3946	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR		494.776.754	549.423.636		1.044.200.390	1.059.476.549	1.075.210.992	1.091.417.456
3947	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga SAR		51.663.613			51.663.613	53.146.490	54.673.857	56.247.026
3948	Pengelolaan Operasi SAR		78.710.387			78.710.387	80.872.935	83.100.371	85.394.630
3949	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR		53.432.503	113.500.000		166.932.503	167.910.501	168.917.841	169.955.388
3971	Pembinaan Potensi SAR		42.399.888			42.399.888	43.426.216	44.483.324	45.572.141
3972	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR		23.980.000			23.980.000	24.478.921	24.992.815	25.522.133
107.01.WA	Program Dukungan Manajemen	490.601.565	284.231.809	84.740.105		859.573.479	883.261.301	907.659.879	932.790.466
3941	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Kerjasama		18.570.535			18.570.535	19.073.729	19.592.058	20.125.897
3942	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian		23.136.000			23.136.000	23.556.005	23.988.600	24.434.188
3943	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	490.601.565	222.225.274			712.826.839	733.258.411	754.303.015	775.979.067

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3944	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur			64.740.105		64.740.105	66.312.366	67.931.794	69.599.780
3945	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		14.300.000	20.000.000		34.300.000	34.934.494	35.588.029	36.261.165
4021	Pengawasan dan Pembinaan Internal		6.000.000			6.000.000	6.126.296	6.256.383	6.390.369
JUMLAH RM						2.267.460.260			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 108
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	44.120.992	73.574.817	789.206		118.485.015	120.070.111	121.702.754	123.384.395
108.01	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	44.120.992	73.574.817	789.206		118.485.015	120.070.111	121.702.754	123.384.395
04	EKONOMI	44.120.992	73.574.817	789.206		118.485.015	120.070.111	121.702.754	123.384.395
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	44.120.992	73.574.817	789.206		118.485.015	120.070.111	121.702.754	123.384.395
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha		26.503.100	50.000		26.553.100	26.553.100	26.553.100	26.553.100
3952	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha		2.124.700			2.124.700	2.124.700	2.124.700	2.124.700
3953	Pengawasan Kemitraan		1.883.000			1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
3955	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU		4.320.000			4.320.000	4.320.000	4.320.000	4.320.000
3956	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat		3.818.500			3.818.500	3.818.500	3.818.500	3.818.500
3957	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat		2.065.400			2.065.400	2.065.400	2.065.400	2.065.400
3958	Penilaian Merger dan Akusisi		1.849.400	50.000		1.899.400	1.899.400	1.899.400	1.899.400
5162	Analisis Kebijakan Pemerintah		1.512.200			1.512.200	1.512.200	1.512.200	1.512.200
5194	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan		1.800.000			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5275	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha		7.129.900			7.129.900	7.129.900	7.129.900	7.129.900
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen	44.120.992	47.071.717	739.206		91.931.915	93.517.011	95.149.654	96.831.295
5971	Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Umum	44.120.992	36.712.630	701.446		81.535.068	83.120.164	84.752.807	86.434.448

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 108
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5972	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		1.009.100			1.009.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100
5973	Peningkatan Data dan Infromasi		444.900			444.900	444.900	444.900	444.900
5974	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi		1.041.950			1.041.950	1.041.950	1.041.950	1.041.950
5975	Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga		4.255.442	37.760		4.293.202	4.293.202	4.293.202	4.293.202
5976	Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara KPPU		986.900			986.900	986.900	986.900	986.900
5977	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU		2.620.795			2.620.795	2.620.795	2.620.795	2.620.795
JUMLAH RM						113.257.815			
JUMLAH PNBP						5.227.200			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 109
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	12.836.540	57.107.088	86.434.104		156.377.732	160.643.851	165.037.968	169.563.916
109.01	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)	12.836.540	57.107.088	86.434.104		156.377.732	160.643.851	165.037.968	169.563.916
04	EKONOMI	12.836.540	57.107.088	86.434.104		156.377.732	160.643.851	165.037.968	169.563.916
04.90	EKONOMI LAINNYA	12.836.540	57.107.088	86.434.104		156.377.732	160.643.851	165.037.968	169.563.916
109.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis		42.242.332	86.069.104		128.311.436	131.757.329	135.306.597	138.962.346
4666	Pengusahaan Investasi Kawasan dan Pengembangan SDM di Suramadu		6.850.000	5.550.000		12.400.000	12.760.895	13.132.619	13.515.498
4667	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Suramadu		35.392.332	80.519.104		115.911.436	118.996.434	122.173.978	125.446.848
109.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.836.540	14.864.756	365.000		28.066.296	28.886.522	29.731.371	30.601.570
3960	Pelaksanaan Dukungan Manajemen Internal	12.836.540	14.864.756	365.000		28.066.296	28.886.522	29.731.371	30.601.570
JUMLAH RM						156.377.732			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 110
KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	84.908.650	120.568.634	1.494.960		206.972.244	206.972.244	206.972.244	206.972.244
110.01	Ombudsman Republik Indonesia	84.908.650	120.568.634	1.494.960		206.972.244	206.972.244	206.972.244	206.972.244
01	PELAYANAN UMUM	84.908.650	120.568.634	1.494.960		206.972.244	206.972.244	206.972.244	206.972.244
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	84.908.650	120.568.634	1.494.960		206.972.244	206.972.244	206.972.244	206.972.244
110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		35.412.209	305.000		35.717.209	35.717.209	35.717.209	35.717.209
5618	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		15.200.000			15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
5619	Pencegahan Maladministrasi		19.812.209	305.000		20.117.209	20.117.209	20.117.209	20.117.209
5731	Penjaminan Mutu		400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	84.908.650	85.156.425	1.189.960		171.255.035	171.255.035	171.255.035	171.255.035
4051	Perencanaan dan Keuangan		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4191	Fasilitasi Pelayanan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik		525.000			525.000	525.000	525.000	525.000
4192	Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi		1.840.040	414.960		2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
4193	Pengawasan Internal		575.000			575.000	575.000	575.000	575.000
5093	Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi		1.850.000			1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	84.908.650	78.366.385	775.000		164.050.035	164.050.035	164.050.035	164.050.035
JUMLAH RM						206.972.244			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 111
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	34.651.597	183.373.953	9.679.012		227.704.562	233.862.597	240.205.408	246.738.600
111.01	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	34.651.597	183.373.953	9.679.012		227.704.562	233.862.597	240.205.408	246.738.600
01	PELAYANAN UMUM	34.651.597	183.373.953	9.679.012		227.704.562	233.862.597	240.205.408	246.738.600
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		50.917.167	6.036.922		56.954.089	58.160.836	59.403.802	60.684.108
111.01.AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan		50.917.167	6.036.922		56.954.089	58.160.836	59.403.802	60.684.108
4592	Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas Negara		21.604.089	700.000		22.304.089	22.604.708	22.914.343	23.233.282
4593	Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan		13.616.602	3.928.398		17.545.000	18.058.412	18.587.236	19.131.947
4594	Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan		15.696.476	1.408.524		17.105.000	17.497.716	17.902.223	18.318.879
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	34.651.597	132.456.786	3.642.090		170.750.473	175.701.761	180.801.606	186.054.492
111.01.WA	Program Dukungan Manajemen	34.651.597	132.456.786	3.642.090		170.750.473	175.701.761	180.801.606	186.054.492
4588	Layanan Legislasi dan Litigasi		3.350.000	50.000		3.400.000	3.499.422	3.601.833	3.707.318
4589	Pengelolaan Organisasi, SDM dan Kerjasama		11.520.000	500.000		12.020.000	12.366.205	12.722.794	13.090.104
4590	Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	34.651.597	108.690.908	2.064.090		145.406.595	149.645.496	154.011.580	158.508.651
4591	Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informasi Publik		8.895.878	1.028.000		9.923.878	10.190.638	10.465.399	10.748.419
JUMLAH RM						227.704.562			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 112
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM		1.375.815.599	638.384.401		2.014.200.000	2.074.625.528	2.136.864.036	2.200.969.861
112.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)		1.375.815.599	638.384.401		2.014.200.000	2.074.625.528	2.136.864.036	2.200.969.861
04	EKONOMI		1.375.815.599	638.384.401		2.014.200.000	2.074.625.528	2.136.864.036	2.200.969.861
04.90	EKONOMI LAINNYA		1.375.815.599	638.384.401		2.014.200.000	2.074.625.528	2.136.864.036	2.200.969.861
112.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis		594.927.704	602.533.891		1.197.461.595	1.233.385.198	1.270.386.613	1.308.498.141
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam		15.034.454	7.606.710		22.641.164	23.320.364	24.019.965	24.740.555
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut		38.136.742	1.383.961		39.520.703	42.170.125	43.435.211	44.738.263
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara dan Teknologi Informasi		109.589.284	12.439.545		122.028.829	125.776.743	129.550.023	133.436.503
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan		112.104.217	15.876.447		127.980.664	125.806.298	129.580.485	133.467.894
5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan		211.443.137	489.057.481		700.500.618	469.649.468	483.738.936	498.251.096
5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal		11.404.776	166.800		11.571.576	11.918.706	12.276.254	12.644.542
5130	Pengelolan dan Penyelenggaraan Aset Lainnya dan Lingkungan		45.002.544	70.931.620		115.934.164	375.485.520	386.750.040	398.352.520
5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi		41.729.157	5.071.327		46.800.484	48.204.484	49.650.610	51.140.130

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 112
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5981	Penyusunan, Pembinaan dan Perumusan Kinerja Badan Usaha BP Batam		5.293.850			5.293.850	5.452.732	5.616.310	5.784.795
5982	Penyusunan Evaluasi dan Pengendalian Badan Usaha BP Batam		1.190.616			1.190.616	1.226.331	1.263.120	1.301.014
5983	Penyusunan Rumusan Restrukturisasi Badan Usaha BP Batam		3.998.927			3.998.927	4.374.427	4.505.659	4.640.829
112.01.WA	Program Dukungan Manajemen		780.887.895	35.850.510		816.738.405	841.240.330	866.477.423	892.471.720
5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program dan Teknis		11.218.195	8.181.770		19.399.965	20.423.311	21.035.987	21.667.068
5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa		91.089.106	16.967.814		108.056.920	111.037.000	114.368.086	117.799.127
5115	Pengelolaan dan Pelayanan Sumber Daya Manusia dan Organisasi		596.127.968	218.400		596.346.368	613.313.410	631.712.794	650.664.173
5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran dan Pengelolaan Administrasi Keuangan		9.008.100			9.008.100	9.278.327	9.556.672	9.843.375
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum		6.955.000			6.955.000	7.163.638	7.378.542	7.599.897
5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta		8.874.781	1.066.000		9.940.781	10.239.929	10.547.120	10.863.531
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan		1.826.403			1.826.403	1.881.186	1.937.615	1.995.739
5978	Penyusunan dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan serta Pengelolaan Teknologi Informasi		26.942.734	5.570.588		32.513.322	28.606.974	29.465.171	30.349.121
5979	Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kawasan		2.025.000	3.474.938		5.499.938	10.943.111	11.271.403	11.609.542
5980	Pelayanan Pemasaran, Kehumasan dan Protokol		26.820.608	371.000		27.191.608	28.353.444	29.204.033	30.080.147

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 112
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RM						287.000.000			
JUMLAH PLN						45.000.000			
JUMLAH RMP						12.000.000			
JUMLAH BLU						1.670.200.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 113
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	38.438.164	404.837.073	72.644.207		515.919.444	553.821.927	570.436.450	587.549.496
113.01	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	38.438.164	404.837.073	72.644.207		515.919.444	553.821.927	570.436.450	587.549.496
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	38.438.164	404.837.073	72.644.207		515.919.444	553.821.927	570.436.450	587.549.496
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	38.438.164	404.837.073	72.644.207		515.919.444	553.821.927	570.436.450	587.549.496
113.01.BA	Program Penanggulangan Terorisme		323.268.491			323.268.491	355.391.540	366.053.203	377.034.783
5096	Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan		158.505.608			158.505.608	185.685.843	191.256.364	196.994.047
5097	Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan		137.026.653			137.026.653	141.137.416	145.371.525	149.732.666
5098	Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional		27.736.230			27.736.230	28.568.281	29.425.314	30.308.070
113.01.WA	Program Dukungan Manajemen	38.438.164	81.568.582	72.644.207		192.650.953	198.430.387	204.383.247	210.514.713
5099	Dukungan Administrasi dan SDM	38.438.164	79.304.865	72.644.207		190.387.236	196.098.779	201.981.690	208.041.116
5729	Pengawasan Internal BNPT		2.263.717			2.263.717	2.331.608	2.401.557	2.473.597
JUMLAH RM						515.919.444			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 114
KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	SEKRETARIAT KABINET	190.696.111	124.230.867	24.828.164		339.755.142	339.755.142	339.755.142	339.755.142
114.01	Sekretariat Kabinet	190.696.111	124.230.867	24.828.164		339.755.142	339.755.142	339.755.142	339.755.142
01	PELAYANAN UMUM	190.696.111	124.230.867	24.828.164		339.755.142	339.755.142	339.755.142	339.755.142
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	190.696.111	124.230.867	24.828.164		339.755.142	339.755.142	339.755.142	339.755.142
114.01.CA	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		37.451.201			37.451.201	37.451.201	37.451.201	37.451.201
4982	Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan		828.750			828.750	828.750	828.750	828.750
4984	Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir		2.632.845			2.632.845	2.632.845	2.632.845	2.632.845
4985	Penyelenggaran layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah		1.933.750			1.933.750	1.933.750	1.933.750	1.933.750
5211	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan penyelenggaraan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden		11.550.000			11.550.000	11.550.000	11.550.000	11.550.000
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		2.150.192			2.150.192	2.150.192	2.150.192	2.150.192
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		1.449.808			1.449.808	1.449.808	1.449.808	1.449.808

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 114
KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6403	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian		2.159.793			2.159.793	2.159.793	2.159.793	2.159.793
6404	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian		1.440.207			1.440.207	1.440.207	1.440.207	1.440.207
6405	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		1.975.494			1.975.494	1.975.494	1.975.494	1.975.494
6406	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		1.679.220			1.679.220	1.679.220	1.679.220	1.679.220
6407	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi		2.091.567			2.091.567	2.091.567	2.091.567	2.091.567
6408	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi		1.107.327			1.107.327	1.107.327	1.107.327	1.107.327
6409	Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/ pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden		6.452.248			6.452.248	6.452.248	6.452.248	6.452.248
114.01.WA	Program Dukungan Manajemen	190.696.111	86.779.666	24.828.164		302.303.941	302.303.941	302.303.941	302.303.941
5010	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	190.696.111	3.683.489			194.379.600	194.379.600	194.379.600	194.379.600
5011	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan		1.814.741			1.814.741	1.814.741	1.814.741	1.814.741
5012	Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum		63.879.563	24.591.914		88.471.477	88.471.477	88.471.477	88.471.477
5013	Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan		5.539.500	236.250		5.775.750	5.775.750	5.775.750	5.775.750

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 114
KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perpustakaan								
5014	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		887.000			887.000	887.000	887.000	887.000
5822	Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan		4.999.800			4.999.800	4.999.800	4.999.800	4.999.800
6399	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan		2.762.500			2.762.500	2.762.500	2.762.500	2.762.500
6400	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah		3.213.073			3.213.073	3.213.073	3.213.073	3.213.073
JUMLAH RM						339.755.142			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 115
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	440.485.557	1.182.145.490	18.709.556		1.641.340.603	1.690.580.691	1.741.298.081	1.793.537.060
115.01	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	440.485.557	1.182.145.490	18.709.556		1.641.340.603	1.690.580.691	1.741.298.081	1.793.537.060
01	PELAYANAN UMUM	440.485.557	1.182.145.490	18.709.556		1.641.340.603	1.690.580.691	1.741.298.081	1.793.537.060
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	440.485.557	1.182.145.490	18.709.556		1.641.340.603	1.690.580.691	1.741.298.081	1.793.537.060
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		396.522.288	8.062.179		404.584.467	416.721.920	429.223.577	442.100.309
4358	Fasilitasi Pengawasan		112.569.490	300.000		112.869.490	116.255.562	119.743.218	123.335.524
4359	Fasilitasi Penanganan Pelanggaran		7.373.144	315.276		7.688.420	7.919.055	8.156.624	8.401.313
4360	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses		7.587.694	100.000		7.687.694	7.918.318	8.155.861	8.400.538
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		268.991.960	7.346.903		276.338.863	284.628.985	293.167.874	301.962.934
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	440.485.557	785.623.202	10.647.377		1.236.756.136	1.273.858.771	1.312.074.504	1.351.436.751
4351	Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan serta Ketatausahaan		18.005.810	500.000		18.505.810	19.060.971	19.632.798	20.221.784
4352	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	440.485.557	701.147.040	250.000		1.141.882.597	1.174.692.947	1.209.933.729	1.246.231.747
4353	Penataan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum, dan Pengelolaan Kehumasan		9.303.847	57.000		9.360.847	9.641.664	9.930.904	10.228.840

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 115
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4354	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum		31.568.370	6.780.000		38.348.370	40.944.938	42.173.282	43.438.475
4355	Dukungan Manajemen Inspektorat Utama		10.087.450	621.371		10.708.821	11.030.076	11.360.976	11.701.805
4356	Pengelolaan Data dan Informasi		7.196.042	2.439.006		9.635.048	9.924.094	10.221.816	10.528.469
4357	Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan		8.314.643			8.314.643	8.564.081	8.820.999	9.085.631
JUMLAH RM						1.641.340.603			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 116
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	615.187.819	377.594.611	691.350.163		1.684.132.593	1.734.653.295	1.786.690.125	1.840.290.161
116.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	615.187.819	377.594.611	691.350.163		1.684.132.593	1.734.653.295	1.786.690.125	1.840.290.161
01	PELAYANAN UMUM	615.187.819	377.594.611	691.350.163		1.684.132.593	1.734.653.295	1.786.690.125	1.840.290.161
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	615.187.819	377.594.611	691.350.163		1.684.132.593	1.734.653.295	1.786.690.125	1.840.290.161
116.01.GC	Program Penyiaran Publik		103.102.214	570.700.246		673.802.460	694.014.022	714.832.229	736.276.634
5141	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran Teknologi dan Media Baru		15.929.592	562.158.122		578.087.714	595.430.328	613.293.230	631.692.011
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik		15.576.279			15.576.279	16.043.548	16.524.804	17.020.544
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha		14.343.459	2.000		14.345.459	14.775.606	15.218.524	15.675.075
5144	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional		3.804.489			3.804.489	3.918.599	4.036.136	4.157.216
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional		47.895.270	8.540.124		56.435.394	58.126.242	59.868.269	61.663.787
5146	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI		5.553.125			5.553.125	5.719.699	5.891.266	6.068.001
116.01.WA	Program Dukungan Manajemen	615.187.819	274.492.397	120.649.917		1.010.330.133	1.040.639.273	1.071.857.896	1.104.013.527
5136	Pengelolaan Keuangan LPP RRI	615.187.819	250.475.497			865.663.316	891.632.500	918.381.009	945.932.338
5137	Pengelolaan Organisasi dan SDM, BMN dan Umum		9.397.491	120.649.917		130.047.408	133.948.802	137.967.224	142.106.244
5138	Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal		4.844.897			4.844.897	4.990.237	5.139.930	5.294.129
5139	Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan		9.774.512			9.774.512	10.067.734	10.369.733	10.680.816

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 116
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH RM						1.671.272.601			
JUMLAH PNBP						12.859.992			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 117
KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	477.511.065	604.706.719	375.995.139		1.458.212.923	1.501.958.537	1.547.016.705	1.593.427.109
117.01	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	477.511.065	604.706.719	375.995.139		1.458.212.923	1.501.958.537	1.547.016.705	1.593.427.109
01	PELAYANAN UMUM	477.511.065	604.706.719	375.995.139		1.458.212.923	1.501.958.537	1.547.016.705	1.593.427.109
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	477.511.065	604.706.719	375.995.139		1.458.212.923	1.501.958.537	1.547.016.705	1.593.427.109
117.01.GC	Program Penyiaran Publik		301.728.198	335.225.837		636.954.035	656.062.295	675.743.832	696.016.065
5152	Pengembangan Infrastruktur Penyiaran TV Publik		10.500.000	294.080.538		304.580.538	313.717.946	323.129.481	332.823.366
5153	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik		170.700.641			170.700.641	175.821.567	181.096.107	186.528.949
5154	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik		8.473.356			8.473.356	8.727.535	8.989.342	9.259.015
5155	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional		112.054.201	41.145.299		153.199.500	157.795.247	162.528.902	167.404.735
117.01.WA	Program Dukungan Manajemen	477.511.065	302.978.521	40.769.302		821.258.888	845.896.242	871.272.873	897.411.044
4376	Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	339.089.665	141.079.300			480.168.965	494.573.753	509.410.838	524.693.157
5147	Pengelolaan Keuangan LPP TVRI	138.421.400	94.919.994			233.341.394	240.341.595	247.551.799	254.978.352
5148	Pengelolaan Organisasi dan SDM LPP TVRI		49.506.450	40.769.302		90.275.752	92.983.997	95.773.487	98.646.684
5149	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal LPP TVRI		3.783.680			3.783.680	3.897.178	4.014.084	4.134.508
5150	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik		9.214.722			9.214.722	9.491.127	9.775.824	10.069.094

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 117
KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5151	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik		4.474.375			4.474.375	4.608.592	4.746.841	4.889.249
JUMLAH RM						1.353.826.988			
JUMLAH PNBP						104.385.935			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 118
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG		50.561.592	44.416.705		94.978.297	96.411.102	97.886.895	99.406.972
118.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)		50.561.592	44.416.705		94.978.297	96.411.102	97.886.895	99.406.972
04	EKONOMI		50.561.592	44.416.705		94.978.297	96.411.102	97.886.895	99.406.972
04.90	EKONOMI LAINNYA		50.561.592	44.416.705		94.978.297	96.411.102	97.886.895	99.406.972
118.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis		9.858.602	44.401.705		54.260.307	55.162.576	56.091.914	57.049.143
5164	Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		495.314	630.917		1.126.231	1.138.847	1.151.843	1.165.228
5165	Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		308.560	32.886.176		33.194.736	33.785.785	34.394.565	35.021.610
5166	Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1.707.828	1.295.750		3.003.578	3.078.022	3.154.701	3.233.681
5167	Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan		1.142.000			1.142.000	1.149.960	1.158.159	1.166.607
5168	Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi		2.726.820	80.000		2.806.820	2.817.264	2.828.020	2.839.100
5169	Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS		962.342	1.339.600		2.301.942	2.303.218	2.304.532	2.305.887
5732	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		560.954	34.046		595.000	605.751	616.824	628.230
5733	Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International		1.954.784	8.135.216		10.090.000	10.283.729	10.483.270	10.688.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 118
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118.01.WA	Program Dukungan Manajemen		40.702.990	15.000		40.717.990	41.248.526	41.794.981	42.357.829
5158	Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi		521.719			521.719	521.719	521.719	521.719
5160	Koordinasi Bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum), Perpustakaan/Kearsipan, dan Peningkatan SDM		38.737.236	15.000		38.752.236	39.282.772	39.829.227	40.392.075
5161	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi/Pelaporan Berbasis Akrual		317.550			317.550	317.550	317.550	317.550
5163	Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan		445.045			445.045	445.045	445.045	445.045
5212	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan		681.440			681.440	681.440	681.440	681.440
JUMLAH RM						91.719.479			
JUMLAH BLU						3.258.818			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 119
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	BADAN KEAMANAN LAUT	74.963.888	253.608.010	186.928.689		515.500.587	529.872.556	544.675.710	559.923.050
119.01	Badan Keamanan Laut	74.963.888	253.608.010	186.928.689		515.500.587	529.872.556	544.675.710	559.923.050
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	74.963.888	253.608.010	186.928.689		515.500.587	529.872.556	544.675.710	559.923.050
03.03	PEMBINAAN HUKUM		8.722.577	83.459.998		92.182.575	94.871.288	97.640.662	100.493.140
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen		8.722.577	83.459.998		92.182.575	94.871.288	97.640.662	100.493.140
3967	Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla		4.887.000	83.459.998		88.346.998	90.926.799	93.583.996	96.320.916
3968	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi		2.513.222			2.513.222	2.586.794	2.662.572	2.740.635
3969	Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla		1.322.355			1.322.355	1.357.695	1.394.094	1.431.589
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	74.963.888	244.885.433	103.468.691		423.318.012	435.001.268	447.035.048	459.429.910
119.01.BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia		155.885.411	103.220.191		259.105.602	266.631.339	274.382.865	282.366.993
5735	Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut		145.281.222	103.024.380		248.305.602	255.579.855	263.072.341	270.789.618
5736	Penyiapan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut		3.450.000			3.450.000	3.543.434	3.639.667	3.738.821
5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut		7.154.189	195.811		7.350.000	7.508.050	7.670.857	7.838.554

SK No 020937 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 119
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen	74.963.888	89.000.022	248.500		164.212.410	168.369.929	172.652.183	177.062.917
5734	Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla	74.963.888	89.000.022	248.500		164.212.410	168.369.929	172.652.183	177.062.917
JUMLAH RM						515.500.587			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 120
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	61.294.160	246.233.595	7.068.662		314.596.417	324.033.698	333.754.213	343.766.717
120.01	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	61.294.160	246.233.595	7.068.662		314.596.417	324.033.698	333.754.213	343.766.717
01	PELAYANAN UMUM	61.294.160	246.233.595	7.068.662		314.596.417	324.033.698	333.754.213	343.766.717
01.03	PELAYANAN UMUM	61.294.160	246.233.595	7.068.662		314.596.417	324.033.698	333.754.213	343.766.717
120.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		120.708.099			120.708.099	124.328.961	128.058.580	131.900.271
4830	Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi		60.951.350			60.951.350	65.869.791	67.845.857	69.881.205
4831	Koordinasi Sumber Daya Maritim		11.001.350			11.001.350	11.331.293	11.671.175	12.021.314
4832	Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi		11.151.349			11.151.349	11.485.832	11.830.350	12.185.260
5996	Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		10.776.350			10.776.350	11.099.576	11.432.526	11.775.488
6002	Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		10.901.350			10.901.350	11.228.356	11.565.173	11.912.116
6008	Koordinasi Investasi dan Pertambangan		15.926.350			15.926.350	13.314.113	13.713.499	14.124.888
120.01.WA	Program Dukungan Manajemen	61.294.160	125.525.496	7.068.662		193.888.318	199.704.737	205.695.633	211.866.446
5601	Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	61.294.160	125.525.496	7.068.662		193.888.318	199.704.737	205.695.633	211.866.446
JUMLAH RM						314.596.417			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 122
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	69.561.000	131.144.658	8.141.084		208.846.742	212.487.078	216.236.646	220.098.775
122.01	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	69.561.000	131.144.658	8.141.084		208.846.742	212.487.078	216.236.646	220.098.775
01	PELAYANAN UMUM	69.561.000	131.144.658	8.141.084		208.846.742	212.487.078	216.236.646	220.098.775
01.03	PELAYANAN UMUM	69.561.000	131.144.658	8.141.084		208.846.742	212.487.078	216.236.646	220.098.775
122.01.AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila		91.158.633			91.158.633	92.426.407	93.732.225	95.077.276
4362	Penguatan Sinergi Antar Lembaga yang Melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila		10.000.000			10.000.000	10.087.417	10.177.457	10.270.200
4363	Penyelengaraan Sosialisasi, Komunikasi, dan Pengembangan Jaringan Ideologi Pancasila		16.158.633			16.158.633	16.481.310	16.813.669	17.155.996
4364	Penyelenggaraan Pembudayaan Ideologi Pancasila		8.000.000			8.000.000	8.077.698	8.157.725	8.240.156
4365	Pelaksanaan Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional terhadap Nilai-Nilai Pancasila		4.000.000			4.000.000	4.089.090	4.180.863	4.275.387
4366	Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila		4.000.000			4.000.000	4.065.691	4.133.353	4.203.047
4367	Pelaksanaan Internalisasi, Institusionalisasi Pancasila dan Regulasi yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila		5.000.000			5.000.000	5.079.141	5.160.655	5.244.621
4368	Pengkajian Materi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila		5.000.000			5.000.000	5.012.892	5.026.172	5.039.850
4369	Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar, dan Metode Pembelajaran bagi Aparatur Negara		6.000.000			6.000.000	6.062.670	6.127.220	6.193.709

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 122
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4370	Pelaksanaan Standardisasi Materi, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Formal, Nonformal, dan Informal Pembinaan Ideologi Pancasila		6.000.000			6.000.000	6.108.913	6.221.093	6.336.641
4371	Penyusunan Kebijakan Strategis dan Program Teknis Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila		3.500.000			3.500.000	3.527.242	3.555.307	3.584.212
4372	Penyusunan Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila		3.500.000			3.500.000	3.558.473	3.618.691	3.680.742
4373	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila		9.000.000			9.000.000	9.159.191	9.323.156	9.492.049
4374	Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila		5.000.000			5.000.000	5.102.457	5.207.992	5.316.697
4375	Pelaksanaan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila		6.000.000			6.000.000	6.014.222	6.028.872	6.043.969
122.01.WA	Program Dukungan Manajemen	69.561.000	39.986.025	8.141.084		117.688.109	120.060.671	122.504.421	125.021.499
4391	Pelaksanaan Manajemen Program, Keuangan, dan Kinerja		5.500.000			5.500.000	5.538.366	5.577.888	5.618.595
4392	Pelaksanaan Manajemen Pengawasan Internal		2.892.100			2.892.100	2.935.015	2.979.217	3.024.750
4393	Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, BMN, dan Ketatausahaan	69.561.000	23.096.228	2.388.781		95.046.009	97.220.940	99.461.117	101.768.508
4394	Pelaksanaan Manajemen Fasilitasi Dewan Pengarah dan Ketenagaahlian		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 122
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4395	Pelaksanaan Manajemen Hukum dan Organisasi		4.250.000			4.250.000	4.366.350	4.486.199	4.609.646
4396	Pelaksanaan Manajemen Data dan Informasi		2.247.697	5.752.303		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
JUMLAH RM						208.846.742			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI/BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA, SUMBER DANA, DAN PRAKIRAAN MAJU

BAGIAN ANGGARAN : 123
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	16.983.000	61.807.915	626.600		79.417.515	98.625.602	115.787.923	136.140.202
123.01	Sekretariat Jenderal	16.983.000	61.807.915	626.600		79.417.515	98.625.602	115.787.923	136.140.202
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	16.983.000	61.807.915	626.600		79.417.515	98.625.602	115.787.923	136.140.202
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	16.983.000	61.807.915	626.600		79.417.515	98.625.602	115.787.923	136.140.202
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		28.116.690			28.116.690	37.064.611	41.914.733	47.492.373
6220	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban		28.116.690			28.116.690	37.064.611	41.914.733	47.492.373
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	16.983.000	33.691.225	626.600		51.300.825	61.560.991	73.873.190	88.647.829
6221	Penyelenggaraan Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Tata Usaha serta Penyusunan Peraturan	16.983.000	33.691.225	626.600		51.300.825	61.560.991	73.873.190	88.647.829
JUMLAH RM						79.417.515			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)							750.871.684
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							750.871.684
3 Program	1)	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan							588.168.391
	2)	Program Dukungan Manajemen							162.703.293
1 Program	1)	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan							588.168.391
	RM	588.168.391	01	Terselenggaranya dukungan bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi, serta penyerapan aspirasi masyarakat yang berkualitas kepada MPR	01	Layanan Konstitusi dan Administrasi MPR RI			588.168.391
			02	Terselenggaranya dukungan bidang administrasi yang berkualitas kepada MPR	ABC	Kebijakan Bidang Politik	35	Rekomendasi Kebijakan	104.603.608
					AEA	Koordinasi	130	kegiatan	12.478.730
					AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	8.192.480
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	365110	orang	286.871.063
					BLA	Persidangan Lembaga Legislatif	1	sidang	8.815.774
					BMB	Komunikasi Publik	13	layanan	34.055.887
					EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	58.008.276
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	21.817.775

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	52.931.497
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	393.301
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						162.703.293
	RM	162.703.293	01 Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Setjen MPR RI	01	Reformasi Birokrasi dan Layanan Internal Setjen MPR RI			162.703.293
			02 Meningkatnya Kualitas tata kelola birokrasi Setjen MPR	ABC	Kebijakan Bidang Politik	2	Rekomendasi Kebijakan	790.528
			03 Terselenggaranya layanan internal Setjen MPR RI	EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	120.542.204
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	1.017.720
				EAC	Layanan Umum	13	Layanan	19.185.420
				EAD	Layanan Sarana Internal	2224	unit	4.981.868
				EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	3.939.500
				EAF	Layanan SDM	1827	orang	3.478.930
				EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	415.786
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	1.200.060
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	1.347.501
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	1.759.930
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	20	Laporan	1.154.646

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	31	Laporan	1.520.936
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	114	Dokumen	1.368.264

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT							5.992.062.884
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							5.992.062.884
3 Program	1)	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan							4.426.134.375
	2)	Program Dukungan Manajemen							1.565.928.509
1 Program	1)	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan							4.426.134.375
	RM	4.426.134.375	01	Tercapainya target pembentukan RUU	01	Pembentukan RUU			340.499.779
			02	Tercapainya target pengesahan APBN murni, perubahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN	AAA	Undang-Undang	42	UU	266.607.065
			03	Tercapainya target pengawasan oleh Alat Kelengkapan Dewan	AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	10.333.488
			04	Tercapainya target pengembangan hubungan diplomasi DPR RI	ABC	Kebijakan Bidang Politik	1	Rekomendasi Kebijakan	12.710.207
			05	Tercapainya target penguatan kelembagaan melalui kebijakan internal dan penyerapan aspirasi	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1150	orang	36.370.300
			06	Tercapainya target penetapan kebijakan kelembagaan DPR RI yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI	BCB	Perkara Hukum Lembaga	62	Perkara	5.773.866
			07	Tercapainya target penyelesaian penanganan perkara etik	BKB	Pemantauan produk	5	laporan	8.704.853
					02	Pengesahan APBN murni, perubahan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN			37.252.288

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		AAA Undang-Undang	3	UU	8.639.335
		ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	48	Rekomendasi Kebijakan	28.612.953
		03 Pengawasan oleh Alat Kelengkapan Dewan			369.062.272
		ABC Kebijakan Bidang Politik	55	Rekomendasi Kebijakan	369.062.272
		04 Pengembangan hubungan diplomasi DPR RI			110.284.183
		AEC Kerja sama	143	Kesepakatan	90.113.193
		AEG Konferensi dan Event	3	Kegiatan	20.170.990
		05 Penguatan kelembagaan melalui kebijakan internal dan penyerapan aspirasi			3.418.490.519
		BMB Komunikasi Publik	96025	layanan	2.337.007.754
		EAA Layanan Perkantoran	3	Layanan	1.081.482.765
		06 Penetapan kebijakan kelembagaan DPR RI yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI			94.780.823
		ABC Kebijakan Bidang Politik	40	Rekomendasi Kebijakan	94.780.823
		07 Penyelesaian penanganan perkara etik			55.764.511
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	15	Rekomendasi Kebijakan	35.389.655

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				BCA	Perkara Hukum Perseorangan	20	Perkara	20.374.856
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						1.565.928.509
	RM	1.565.928.509	01 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas	01	Tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkualitas			289.699.335
			02 Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	47	Rekomendasi Kebijakan	8.063.552
			03 Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI	EAA	Layanan Perkantoran	6	Layanan	252.709.312
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	18	Layanan	10.149.302
				EAG	Layanan Hukum	9	Layanan	2.386.205
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	11	Laporan	1.580.112
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	34	Laporan	1.981.446
				EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	767	Orang	10.742.231
				FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	5	Laporan	2.087.175
				02	Pemerintahan yang Terbuka dan Berbasis Elektronik			320.809.305
				ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	17	Rekomendasi Kebijakan	4.554.048
				AEG	Konferensi dan Event	2	Kegiatan	1.583.070
				BMB	Komunikasi Publik	38	layanan	125.846.361

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	37.629.463
		EAD	Layanan Sarana Internal	17	unit	139.021.456
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	11	Layanan	12.174.907
		03	Anggota DPR RI yang puas atas layanan Sekretariat Jenderal DPR RI			955.419.869
		AAA	Undang-Undang	18	UU	8.429.493
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	68	Rekomendasi Kebijakan	7.384.380
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	27	Rekomendasi Kebijakan	4.070.965
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	102	Rekomendasi Kebijakan	13.609.090
		ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	108	Rekomendasi Kebijakan	38.504.256
		AEC	Kerja sama	4	Kesepakatan	2.148.309
		BLA	Persidangan Lembaga Legislatif	126	sidang	5.644.928
		EAA	Layanan Perkantoran	13	Layanan	418.924.117
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	27.187.953
		EAD	Layanan Sarana Internal	6328	unit	326.298.293
		EAE	Layanan Prasarana Internal	221	unit	59.812.079

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	21	Layanan	31.411.363
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	21	Layanan	11.994.643

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN								3.769.088.671
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM								3.769.088.671
3 Program	1)	Program Pemeriksaan Keuangan Negara								3.065.908.032
	2)	Program Dukungan Manajemen								703.180.639
1 Program	1)	Program Pemeriksaan Keuangan Negara								3.065.908.032
	RM		3.059.221.064	01	Meningkatnya kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis	01	Layanan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan			18.791.328
	PNBP		6.686.968	02	Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif	FAF	Pemeriksaan Keuangan	151	Laporan	18.791.328
				03	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara	02	Layanan Pemeriksaan yang Strategis, antisipatif, dan responsif			2.920.294.026
				04	Terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara	EAA	Layanan Perkantoran	35	Layanan	2.045.339.229
				05	Menguatnya regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara	EAD	Layanan Sarana Internal	292	unit	17.145.133
						EAE	Layanan Prasarana Internal	65	unit	14.573.137
						FAF	Pemeriksaan Keuangan	13405	Laporan	843.236.527
						03	Layanan Mutu Pemeriksaan			14.662.495
						FAF	Pemeriksaan Keuangan	138	Laporan	14.662.495

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					04	Layanan Diklat PKN			101.718.361
					EAA	Layanan Perkantoran	5	Layanan	30.948.910
					EAD	Layanan Sarana Internal	155	unit	1.966.771
					EAE	Layanan Prasarana Internal	5	unit	1.802.378
					FAF	Pemeriksaan Keuangan	471	Laporan	67.000.302
					05	Layanan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara			10.441.822
					FAF	Pemeriksaan Keuangan	218	Laporan	10.441.822
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							703.180.639
	RM		703.180.639	01	Optimalnya pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan	01	Layanan Pengelolaan Sumber Daya		703.180.639
					EAA	Layanan Perkantoran	7	Layanan	418.569.973
					EAC	Layanan Umum	4	Layanan	36.306.791
					EAD	Layanan Sarana Internal	1144	unit	84.249.398
					EAE	Layanan Prasarana Internal	10	unit	17.122.752
					EAF	Layanan SDM	20225	orang	53.460.635
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	140	Layanan	2.304.295
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	69	Layanan	62.293.987
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	5.367.828

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	26	Dokumen	23.504.980

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	005	MAHKAMAH AGUNG							11.238.947.386
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							11.238.947.386
3 Program	1)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							163.416.684
	2)	Program Dukungan Manajemen							11.075.530.702
1 Program	1)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							163.416.684
	RM	163.416.684	01	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di Mahkamah Agung	01	Putusan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali			11.026.581
			02	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	BCA	Perkara Hukum Perseorangan	6946	Perkara	11.026.581
			03	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama	03	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum			90.206.458
			04	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5	Rekomendasi Kebijakan	136.920
					ADE	Akreditasi Lembaga	1	Lembaga	2.145.462
					BCA	Perkara Hukum Perseorangan	124182	Perkara	54.833.161
					FAA	Kearsipan	3	Dokumen	775.878
					FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	3337	Orang	9.655.993
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	251	Laporan	3.598.599

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	84866	Orang	17.560.445
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	580	Orang	1.500.000
		05	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Agama			51.337.500
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	6	Rekomendasi Kebijakan	1.565.427
		ADE	Akreditasi Lembaga	281	Lembaga	2.570.050
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	319	Perkara	100.485
		FAA	Kearsipan	1005	Dokumen	403.473
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	3708	Orang	5.541.908
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	232	Laporan	1.657.289
		QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	227436	Orang	39.498.868
		07	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			10.846.145
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	7	Rekomendasi Kebijakan	491.772
		ADE	Akreditasi Lembaga	16	Lembaga	355.840
		BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	411	Orang	2.419.179
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	2922	Perkara	1.623.518

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				FAA	Kearsipan	2	Dokumen	202.364
				FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1396	Orang	3.575.748
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11	Laporan	1.143.724
				QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	2946	Orang	1.034.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						11.075.530.702
	RM	11.075.530.702	01 Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			8.914.038.312
			02 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	EAA	Layanan Perkantoran	1380	Layanan	8.782.474.917
			03 Terwujudnya Layanan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kompetensi SDM	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	5	Layanan	4.538.802
			04 Terwujudnya SDM Peradilan yang berkompeten dibidang hukum dan peradilan	EAC	Layanan Umum	1209	Layanan	43.476.040
			05 Terwujudnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan	EAF	Layanan SDM	84379	orang	14.736.488
			06 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	1.555.033
			07 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di Mahkamah Agung	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	6.088.246
			08 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	3.420.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	09 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama	EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	2.700.000
	10 Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	2.204.820
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	49.643.966
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	1.000.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	2.200.000
		02	Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung			1.663.782.680
		EAD	Layanan Sarana Internal	2333	unit	415.477.336
		EAE	Layanan Prasarana Internal	33866	unit	1.248.305.344
		03	Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengawasan MA RI			15.327.451
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	9.047.036
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	300.000
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	938.695
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	200.000
		EAF	Layanan SDM	170	orang	335.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	230.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	150.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	3.725.920
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	14	Dokumen	400.800
		04	LHP Pemeriksaan dan Peningkatan Akuntabilitas			24.793.812
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	427	Laporan	17.870.789
		TAK	Layanan Pengawasan Internal	161	Laporan	6.923.023
		05	Sumber Daya Aparatur Teknis dan Non Teknis yang Profesional dan Kompeten			92.362.943
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	8830	Orang	85.162.943
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	520	Orang	7.200.000
		06	Layanan Dukungan Manajemen Badan Litbang Diklat Kumdil			64.246.820
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	42.085.320
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	1.062.259
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	4.216.225
		EAD	Layanan Sarana Internal	1158	unit	9.886.500
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1850	unit	2.775.000
		EAF	Layanan SDM	127	orang	2.519.918

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	715.950
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	338.730
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	165.700
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	481.218
		07	Hasil Penelitian dan Pengkajian di bidang Hukum dan Peradilan			15.475.557
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	16	Rekomendasi Kebijakan	14.175.557
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan	1.300.000
		08	Layanan Dukungan Manajemen di Kepaniteraan			179.792.933
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	170.819.581
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	219.523
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	200.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	301	unit	2.900.000
		EAF	Layanan SDM	200	orang	588.592
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25	Layanan	4.665.237
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	400.000
		09	Layanan Dukungan Manajemen di Badan Peradilan Umum			48.373.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	38.792.884
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.663.200
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	6.339.932
		EAD	Layanan Sarana Internal	18	unit	156.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	3	unit	435.000
		EAF	Layanan SDM	450	orang	446.781
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	356.100
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	125.400
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	4	Dokumen	57.780
		10	Layanan Dukungan Manajemen di Badan Peradilan Agama			38.970.067
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	32.152.082
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.420.171
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	979.650
		EAD	Layanan Sarana Internal	37	unit	1.382.180
		EAF	Layanan SDM	134	orang	707.877
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.637.853
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	690.254
		11	Layanan Dukungan Manajemen di Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			18.367.050

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAA Layanan Perkantoran	1	Layanan	15.764.723
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	49.790
		EAC Layanan Umum	2	Layanan	1.285.396
		EAD Layanan Sarana Internal	17	unit	265.991
		EAF Layanan SDM	114	orang	219.070
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	564.240
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	136.940
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	80.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA							9.593.319.486
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							9.593.319.486
3 Program	1)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							527.214.331
	2)	Program Dukungan Manajemen							9.066.105.155
1 Program	1)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							527.214.331
	RM		527.214.331	01	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	01	Laporan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam		67.501.192
				02	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3 Rekomendasi Kebijakan	549.300
				03	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	3 Orang	4.516.413
				04	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1059 Lembaga	8.224.662
				05	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	104 Orang	4.211.580
				06	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1404 laporan	20.512.066
				07	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	BKB	Pemantauan produk	331 laporan	4.875.750

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	08	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	BKC	Pemantauan lembaga	195	laporan	3.047.700
	09	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	12	Laporan	1.472.256
	10	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	FAG	Pengawasan Pembangunan	107	Laporan	2.241.465
	11	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	164850	Orang	17.850.000
	12	Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU berbasis Teknologi Informasi	02	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum			309.061.866
	13	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	BCA	Perkara Hukum Perseorangan	324017	Perkara	243.955.466
	14	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	45	Laporan	51.006.400
			PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	66	orang	2.000.000
			QCA	Perkara Hukum Perseorangan	550	Perkara	12.100.000
			03	Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi			140.053.193

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BCA	Perkara Hukum Perseorangan	2462	Perkara	135.670.535
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	168	Laporan	4.382.658
					04	Laporan Penanganan dan Penyelesaiaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara			10.598.080
					BCB	Perkara Hukum Lembaga	3203	Perkara	6.327.140
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	4.270.940
2 Program	2) Program Dukungan Manajemen								9.066.105.155
	RM	8.980.528.155	01	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI	01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI			5.243.276.624
	PNBP	85.577.000	02	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	1.688.380
			03	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.014.600
			04	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis TI	BKB	Pemantauan produk	1	laporan	25.739.020
			05	Meningkatkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1	produk	2.262.150
			06	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan RI	EAA	Layanan Perkantoran	875	Layanan	4.991.955.068
			07	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja aparatur Kejaksaan RI	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	19.764.705
			08	Meningkatnya kualitas aparatur Kejaksaan RI yang bersertifikat kompetensi	EAC	Layanan Umum	1051	Layanan	84.289.697

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	65.001.970
		EAF	Layanan SDM	22000	orang	24.244.608
		EAG	Layanan Hukum	5	Layanan	6.482.833
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	2.466.090
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.410.755
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	5	Laporan	21.750
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.482.275
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	1	Laporan	847.723
		PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
		QKB	Pemantauan produk	40	laporan	9.800.000
		TAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	1.500.000
		TAK	Layanan Pengawasan Internal	33	Laporan	1.805.000
		02	Laporan Pelaksanaan Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI			3.455.242.090
		EAD	Layanan Sarana Internal	220	unit	2.827.521.063
		EAE	Layanan Prasarana Internal	367	unit	468.751.713
		TAE	Layanan Prasarana Internal	6	unit	158.969.314

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		03 Laporan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI			20.248.599
		EAA Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.029.782
		EAC Layanan Umum	1	Layanan	10.041.674
		EAK Layanan Pengawasan Internal	1854	Laporan	9.177.143
		04 Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan			347.337.842
		EAA Layanan Perkantoran	1	Layanan	89.913.894
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	12971	Orang	235.517.948
		TAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1143	Orang	21.906.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						1.941.058.122
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						1.941.058.122
3 Program	1)	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden						739.714.928
	2)	Program Dukungan Manajemen						1.201.343.194
1 Program	1)	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden						739.714.928
	RM	685.463.928	01	Pemberian analisis dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi, permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganega	01	Hasil Analisis Kebijakan Bidang Administrasi Hukum dan rancangan peraturan Perundang-undangan		1.303.459
	RMP	1.000.000	02	Penyelenggaraan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang berkualitas antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	262 Rekomendasi Kebijakan	1.303.459
	HLN	53.251.000	03	Pemberian analisis kebijakan kepada Menteri Sekretaris Negara yang berkualitas	02	Hasil analisis kebijakan bidang hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan		2.479.831
			04	Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang optimal	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	153 Rekomendasi Kebijakan	2.479.831

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	05 Pemberian analisis kebijakan kepada Wakil Presiden yang berkualitas	03	Layanan teknis Seketariat Kementerian			162.641.794
	06 Pengelolaan program kerja sama teknik selatan-selatan dan triangular, koordinasi kerja sama teknik luar negeri, serta penanganan perjalanan dinas luar negeri yang efektif	AEA	Koordinasi	27	kegiatan	514.343
	07 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	151.427.388
	08 Terselenggaranya dukungan administrasi personel TNI dan Polri yang berkualitas	BEI	Bantuan Lembaga	1	Lembaga	6.500.000
	09 Terselenggaranya dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang berkualitas	FAA	Kearsipan	4	Dokumen	400.063
	10 Terwujudnya dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, serta pers dan media kegiatan Presiden yang lancar	PEC	Kerja sama	10	Kesepakatan	3.800.000
	11 Terwujudnya dukungan kerumahtanggaan, keprotokolan, serta pers dan media kegiatan Wakil Presiden yang lancar	04	Layanan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya			607.172
	12 Kegiatan Presiden dan Wakil Presiden yang lancar melalui dukungan pengelolaan arsip kepresidenan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5	layanan	607.172
	13 Meningkatnya kelancaraan aktivitas Presiden dan Wakil Presiden melalui dukungan koordinasi pengamanan	05	Layanan kepada Presiden			306.767.110

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	14 Layanan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berkualitas	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	99	layanan	306.767.110
	15 Layanan pemberian bantuan pemerintah sesuai ketentuan	06	Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden			59.092.835
	16 Terwujudnya tugas khusus pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara secara optimal	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	939.500
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	4	Rekomendasi Kebijakan	1.246.480
		ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2	Rekomendasi Kebijakan	54.251.000
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	2	Rekomendasi Kebijakan	2.655.855
		07	Layanan kepada Wakil Presiden			71.743.577
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	52	layanan	71.743.577
		08	Layanan administrasi personel TNI dan Polri, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, dan pengkoordinasian pengamanan Presiden dan Wakil Presiden			37.932.070
		AAE	Keputusan Presiden	180	KepPres	1.218.825
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	389530	Orang	26.336.036
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	10.377.209

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					09	Layanan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarganya, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah			90.297.447
					BHB	Operasi Bidang Keamanan	147	operasi	90.297.447
					10	Layanan dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden			2.454.416
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	117	layanan	2.454.416
					11	Rekomendasi kebijakan pengendalian program-program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi politik			4.395.217
					ABC	Kebijakan Bidang Politik	307	Rekomendasi Kebijakan	4.395.217
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							1.201.343.194
	RM	877.430.634	01	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	01	Layanan Internal Kementerian Sekretariat Negara			623.832.321
	PNBP	2.149.706	02	Organisasi, tata kelola, dan transformasi birokrasi yang efektif	EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	544.674.965
	BLU	321.762.854	03	Pengawasan yang berkualitas	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	1.024.100
			04	Perencanaan kinerja dan anggaran, serta pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan akuntabel	EAC	Layanan Umum	6	Layanan	21.045.581
			05	Layanan BLU Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	EAD	Layanan Sarana Internal	610	unit	11.522.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	06 Terwujudnya dukungan administrasi yang baik pada lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	EAE	Layanan Prasarana Internal	33	unit	7.255.147
		EAF	Layanan SDM	1994	orang	3.786.367
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	171.150
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	584.730
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	16	Layanan	1.729.015
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	22.934.682
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	161	Laporan	853.106
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	25.600
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2200	Orang	7.009.250
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9	Dokumen	1.216.551
		02	Layanan Internal Sekretariat Presiden			77.283.671
		EAA	Layanan Perkantoran	27	Layanan	73.625.555
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	164.916
		EAC	Layanan Umum	16	Layanan	1.611.516
		EAD	Layanan Sarana Internal	80	unit	1.165.860
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Layanan	715.824

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		03	Layanan Internal Sekretariat Wakil Presiden			52.469.225
		EAA	Layanan Perkantoran	200	Layanan	45.370.629
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	399.795
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	1.520.931
		EAD	Layanan Sarana Internal	7	unit	2.198.000
		EAF	Layanan SDM	1	orang	304.275
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	404.550
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	2.271.045
		04	Layanan internal Sekretariat Militer Presiden			7.815.603
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	5.393.327
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	45.463
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	1.567.537
		EAD	Layanan Sarana Internal	134	unit	418.638
		EAF	Layanan SDM	160	orang	299.438
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	8	Laporan	60.560
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	4	Dokumen	30.640
		05	Layanan Pengelolaan Komplek Kemayoran			165.750.505
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	10	layanan	89.418.958

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	205.615
		EAC	Layanan Umum	5	Layanan	70.529.726
		EAD	Layanan Sarana Internal	11	unit	559.450
		EAF	Layanan SDM	178	orang	691.608
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	5	Layanan	1.237.063
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.612.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	4	Laporan	600.000
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	18	Dokumen	896.085
		06	Layanan Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno			156.012.349
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6	layanan	65.004.932
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	25	Layanan	163.780
		EAC	Layanan Umum	26	Layanan	87.798.668
		EAD	Layanan Sarana Internal	17	unit	780.281
		EAF	Layanan SDM	2	orang	1.049.810
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	328.720
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	278.674
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	4	Laporan	75.620
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	17	Dokumen	531.864

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		07	Layanan Internal Pasukan Pengamanan Presiden			4.336.743
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.198.510
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6	Layanan	417.161
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	449.779
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	4	Laporan	134.082
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	137.211
		08	Layanan Internal Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden			31.477.761
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	26.574.225
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4	Layanan	13.920
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	3.812.576
		EAD	Layanan Sarana Internal	54	unit	604.768
		EAF	Layanan SDM	63	orang	20.880
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	39	Layanan	322.999
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9	Dokumen	128.393
		09	Layanan Internal Sekretariat Kantor Staf Presiden			82.365.016
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	78.128.521
		EAC	Layanan Umum	9	Layanan	257.923
		EAD	Layanan Sarana Internal	18	unit	3.978.572

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI						3.204.700.438
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						3.204.700.438
3 Program	1)	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa						521.991.353
	2)	Program Tata Kelola Kependudukan						681.650.683
	3)	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum						147.681.418
	4)	Program Dukungan Manajemen						1.853.376.984
1 Program	1)	Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa						521.991.353
	RM	376.627.758	01	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar	01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien		95.286.513
	PLN	108.531.606	02	Meningkatnya kualitas standard dan kompetensi pengembangan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri	AEC	Kerja sama	120 Kesepakatan	2.350.000
	RMP		03	Meningkatnya produk hukum daerah secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah	AEG	Konferensi dan Event	1 Kegiatan	1.730.251
	PNBP	24.831.989	04	Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2 NSPK	300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
HLN	12.000.000	05	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8940	Lembaga	6.060.532
		06	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jujur, bersih, dan transparan	BEI	Bantuan Lembaga	100	Lembaga	5.235.300
		07	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	585	Orang	5.760.684
		08	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Efisien	FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	50	Lembaga	1.150.000
		09	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	11500	Desa	22.456.156
		10	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	1.880.000
		11	Meningkatnya perangkat litbang daerah berkategori "utama"	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	14.017.115
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2982	Orang	15.871.713
				UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	318	Desa	18.474.762
				02	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah			27.700.000
				AAC	Peraturan Pemerintah	1	PP	400.000
				AAG	Peraturan Menteri	8	PerMen	1.700.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	4	layanan	2.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1571	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.614.800
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1956	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.785.200
		03	meningkatnya kualitas produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			5.561.200
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	20	Daerah (Prov/Kab/Kota)	816.900
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	3	Rekomendasi Kebijakan	185.900
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	1.177.100
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	23	Laporan	2.000.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	23	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.381.300
		04	layanan pembinaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah			28.738.800
		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	250.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4	Laporan	6.350.000
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	7	Lembaga	250.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	51	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.850.000
		PAH	Peraturan lainnya	5	peraturan	1.200.000
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	548	Laporan	7.338.800
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	91	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.500.000
		05	Layanan Standarisasi dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemerintah Daerah			2.435.034
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	700	Orang	555.784
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16	NSPK	1.879.250
		06	Kebijakan dan Layanan Pengembangan SDM Aparatur			42.136.710
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	9	Rekomendasi Kebijakan	675.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	75.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	7380	Orang	33.315.673
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2262	Orang	8.071.037
		07	Kebijakan dan Layanan di bidang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Perencanaan Pembangunan Daerah			138.034.606
		AAG	Peraturan Menteri	3	PerMen	450.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14	NSPK	1.735.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	110	Orang	190.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80	Laporan	2.250.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1468	Daerah (Prov/Kab/Kota)	97.091.606
		PAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	700.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	1.500.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3270	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34.118.000
		08	Kebijakan dan layanan penyelenggaraan trantibumlinmas			27.650.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AAG	Peraturan Menteri	6	PerMen	900.000
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2	Rekomendasi Kebijakan	600.000
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	150.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	1.355.000
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	20	Unit	3.900.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	250.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	800	Orang	2.050.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	65	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.465.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	467	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.980.400
		09	Kebijakan dan layanan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan			144.648.090
		AAG	Peraturan Menteri	2	PerMen	400.000
		AAH	Peraturan lainnya	2	peraturan	600.000
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	31	Rekomendasi Kebijakan	4.969.990

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		CAI Sarana Pengembangan Kawasan	4	Unit	2.900.000
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	69	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.257.700
		PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	141	Rekomendasi Kebijakan	105.000.000
		PEC Kerja sama	8	Kesepakatan	5.680.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	450.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	900.000
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	34	Laporan	4.251.000
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	286	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.239.400
		10 Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri			5.450.000
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	13	Rekomendasi Kebijakan	5.450.000
		11 Daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi			3.350.000
		PAG Peraturan Menteri	1	PerMen	300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	603	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.050.000
					12	Perangkat litbang daerah berkategori "utama"			1.000.000
					BKC	Pemantauan lembaga	1	laporan	100.000
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	548	Daerah (Prov/Kab/Kota)	900.000
2 Program	2)	Program Tata Kelola Kependudukan							681.650.683
	RM		681.650.683	01 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	01	Kebijakan dan Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			681.650.683
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	10000000	Orang	106.210.000
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	450	Lembaga	3.109.084
					CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	5	Unit	27.430.049
					CCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	7	Unit	14.600.000
					FAB	Sistem informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	201.105.071
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5	Laporan	5.483.144
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3230	Daerah (Prov/Kab/K	315.664.935

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
								ota)	
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	364000	Orang	2.298.400
					QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	30	Lembaga	2.500.000
					UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.250.000
3 Program	3)	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum							147.681.418
	RM	147.681.418	01	Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi	01	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia			136.876.418
			02	Simpul strategis pembumian Pancasila berjalan optimal	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	62	orang	3.300.000
			03	Meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam melaksanakan deteksi dini dan cegah dini	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	200.000
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	9	Laporan	250.000
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	950.000
					PBC	Kebijakan Bidang Politik	2	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1050	Orang	1.200.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	200	Kelompok Masyarakat	1.300.000
		QEI	Bantuan Lembaga	9	Lembaga	126.376.418
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.200.000
		02	Memantapkan pengamalan nilai nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia			6.280.000
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	1	Rekomendasi Kebijakan	350.000
		AEB	Forum	8	forum	1.000.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	100	orang	60.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	87	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.720.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	42	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.150.000
		03	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan nasional			4.525.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				ABC	Kebijakan Bidang Politik	2	Rekomendasi Kebijakan	125.000
				ACB	Perizinan Masyarakat	400	Orang	200.000
				ACD	Perizinan Lembaga	6	Institusi	100.000
				AEB	Forum	1	forum	100.000
				BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	250	Orang	250.000
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	100.000
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	200	Orang	1.300.000
				UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	21	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.350.000
4 Program	4)	Program Dukungan Manajemen						1.853.376.984
	RM	1.845.608.170	01	Meningkatnya kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional	01	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kementerian Dalam Negeri		767.922.633
	PNBP	7.768.814	02	Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas	BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan	900.000
			03	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintahan daerah dan kapasitas Inspektorat Daerah	CCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	100 Unit	4.623.020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	04	Meningkatnya kualitas pengawasan di lingkungan Kemendagri	EAA	Layanan Perkantoran	43	Layanan	596.245.470
	05	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	47	Layanan	29.434.965
	06	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	EAC	Layanan Umum	27	Layanan	38.492.645
			EAD	Layanan Sarana Internal	856	unit	26.898.756
			EAE	Layanan Prasarana Internal	27	unit	2.147.241
			EAF	Layanan SDM	2374	orang	8.804.468
			EAG	Layanan Hukum	10	Layanan	13.745.700
			EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10	Layanan	6.089.887
			EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	6	Layanan	6.150.000
			EAJ	Layanan Data dan Informasi	13	Layanan	14.824.312
			EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	26	Laporan	7.212.501
			FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	1.000.000
			FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	4	Laporan	3.053.668
			FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	102	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		02	Layanan Dukungan Manajemen Kementerian			1.059.909.249
		AAC	Peraturan Pemerintah	1	PP	95.981
		AAG	Peraturan Menteri	15	PerMen	1.854.602
		AAH	Peraturan lainnya	13	peraturan	203.900
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	117	Rekomendasi Kebijakan	7.037.014
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	3	Rekomendasi Kebijakan	75.000
		ADE	Akreditasi Lembaga	12	Lembaga	1.390.240
		AEA	Koordinasi	22	kegiatan	4.159.983
		AEC	Kerja sama	14	Kesepakatan	765.079
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	3.672.078
		BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	163	Orang	46.560
		BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	397	Institusi	130.860
		BCB	Perkara Hukum Lembaga	100	Perkara	7.813.326
		DBA	Pendidikan Tinggi	9248	Orang	58.873.253
		EAA	Layanan Perkantoran	110	Layanan	710.449.587
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	22	Layanan	11.624.194

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAC	Layanan Umum	909	Layanan	42.647.486
		EAD	Layanan Sarana Internal	2879	unit	39.833.929
		EAE	Layanan Prasarana Internal	31	unit	70.868.107
		EAF	Layanan SDM	7844	orang	23.330.991
		EAG	Layanan Hukum	26	Layanan	6.080.454
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	803	Layanan	3.484.477
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	105	Layanan	13.467.715
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	11	Layanan	20.435.606
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	100	Laporan	1.068.647
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	909	Laporan	8.613.906
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	8.601.231
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	547	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.285.043
		03	kapabilitas auditor Kemendagri dan PPUPD secara nasional			5.286.507
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	2514	Orang	565.975
		AEC	Kerja sama	3	Kesepakatan	314.860
		EAF	Layanan SDM	307	orang	2.305.672

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	300.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	600	Orang	1.800.000
		04	kualitas pengawasan pemerintahan daerah, internal dan kapasitas Inspektorat Daerah			20.258.595
		BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	68	Pemerintah Daerah	8.080.508
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	59	Laporan	6.265.113
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	1.574.274
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	35	Lembaga	3.088.700
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.250.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI						8.205.316.860
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						8.205.316.860
3 Program	1)	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional						431.212.268
	2)	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral						950.792.142
	3)	Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik						225.043.415
	4)	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional						11.088.735
	5)	Program Dukungan Manajemen						6.587.180.300
1 Program	1)	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional						431.212.268
	RM	431.212.268	01	Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan	01	Kesepakatan Kerjasama di Kawasan dan Prakarsa/Rekomendasi di Forum Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan		32.060.077
			02	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antrakawasan	AEB	Forum	33 forum	4.225.402
			03	Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	AEC	Kerja sama	124 Kesepakatan	27.834.675
			04	Kebijakan luar negeri yang berkualitas	02	Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri		6.070.500
			23	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI	ABC	Kebijakan Bidang Politik	20 Rekomendasi Kebijakan	6.070.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					03	Diplomasi dan Kerja Sama Internasional oleh Perwakilan RI			365.630.654
					AEC	Kerja sama	904	Kesepakatan	98.623.832
					AEH	Promosi	1478	promosi	209.766.273
					BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1191	Kelompok Masyarakat	57.240.549
					04	Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional			27.451.037
					ABC	Kebijakan Bidang Politik	8	Rekomendasi Kebijakan	2.443.070
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	64	Rekomendasi Kebijakan	1.899.464
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	846	orang	4.354.500
					AEH	Promosi	66	promosi	18.754.003
2 Program	2)	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral							950.792.142
	RM		950.792.142	01	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN				
					01	Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang disampaikan dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN			950.792.142
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	22	Rekomendasi Kebijakan	1.891.067
					ABC	Kebijakan Bidang Politik	63	Rekomendasi Kebijakan	913.087.298

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					ABN	Kebijakan Bidang Sosial	21	Rekomendasi Kebijakan	2.183.191
					AEA	Koordinasi	7	kegiatan	2.287.274
					AEB	Forum	166	forum	24.843.312
					PEA	Koordinasi	23	kegiatan	2.500.000
					PEB	Forum	30	forum	4.000.000
3 Program	3)	Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik							225.043.415
	RM	224.055.167	01	Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima	01	Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI			222.573.415
	PNBP	988.248			BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	395183	Orang	48.875.067
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	176252	layanan	15.152.787
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	135952	Orang	158.545.561
					02	Pelayanan Keprotokolan dan Fasilitas Diplomatik			2.470.000
					BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	213	Lembaga	2.470.000
4 Program	4)	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional							11.088.735
	RM	11.088.735	01	Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	01	Kesepakatan Hukum dan Perjanjian Internasional			11.088.735
					AEC	Kerja sama	93	Kesepakatan	8.413.735

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					PEC	Kerja sama	8	Kesepakatan	2.675.000
5 Program	5)	Program Dukungan Manajemen							6.587.180.300
	RM	6.273.748.120	01	Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	01	Layanan Manajemen Organisasi yang Baik			6.587.180.300
	PNBP	313.432.180			EAA	Layanan Perkantoran	278	Layanan	5.198.644.468
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	24.422.923
					EAC	Layanan Umum	4	Layanan	63.235.056
					EAD	Layanan Sarana Internal	5865	unit	192.115.424
					EAE	Layanan Prasarana Internal	95	unit	773.288.316
					EAF	Layanan SDM	3272	orang	235.134.624
					EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	9.000.000
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13	Layanan	40.885.890
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	23	Layanan	6.829.117
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	1267	Laporan	6.982.219
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	5.915.814
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1500	Orang	21.526.449
					FAA	Kearsipan	1	Dokumen	9.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN							137.295.889.455
2 Fungsi	02	PERTAHANAN							136.953.448.274
	10	PENDIDIKAN							342.441.181
3 Program	1)	Program Penggunaan Kekuatan							4.406.623.984
	2)	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit							11.215.297.386
	3)	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan							22.482.730
	4)	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan							43.125.307.122
	5)	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan							1.579.608.891
	6)	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan							663.472.472
	7)	Program Dukungan Manajemen							76.283.096.870
1 Program	1)	Program Penggunaan Kekuatan							4.406.623.984
	RM	4.334.531.984	01	Terwujudnya kesiapan Alutsista TNI AL	01	Penggunaan Kekuatan Pertahanan			4.406.623.984
	PNBP	72.092.000	02	Terjaganya kedaulatan NKRI, penegakkan hukum di laut serta terbinanya potensi maritim untuk kepentingan pertahanan	BHA	Operasi Bidang Pertahanan	141	operasi	3.206.491.138
			03	Terwujudnya kesiapan Alat Utama Sistem Senjata TNI AU	BHB	Operasi Bidang Keamanan	4	operasi	67.634.243
					CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	60	Unit	495.295.732

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	129	unit	124.663.897
					CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	6	Unit	74.121.194
					DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	83021	Orang	16.979.836
					EAA	Layanan Perkantoran	81	Layanan	115.121.934
					EAC	Layanan Umum	12	Layanan	29.606.326
					QHA	Operasi Bidang Pertahanan	82	operasi	276.709.684
2 Program	2)	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit							11.215.297.386
	RM	5.260.615.981	01	Terwujudnya profesionalisme prajurit integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP.	01	Peningkatan Profesionalisme Personel TNI			10.778.574.229
	PNBP	1.896.202.405	02	Terwujudnya peningkatan profesionalisme personel TNI AD untuk melaksanakan OMP dan OMSP	AEC	Kerja sama	15	Kesepakatan	64.608.000
	BLU	3.093.974.000	03	Terwujudnya prajurit Matra Laut yang profesional dalam melaksanakan OMSP dan OMP	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	2	Paket	53.355.237
	PBS	964.505.000	04	Terwujudnya profesionalisme personel hasil pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar mutu serta mampu memenuhi kebutuhan tugas TNI-AU	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	98	Paket	590.512.405
			05	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras kesejahteraan personel matra udara	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2557	Unit	837.644.354
			06	Terpenuhinya dukungan pelayanan kesehatan dan kebutuhan obat bagi personel Matra Laut serta keluarga	CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	247	unit	288.768.777

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					CCA	OM Sarana Bidang Pendidikan	1	Paket	270.000.000
					CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	94	Paket	34.288.999
					CDM	OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	6731	unit	244.843.972
					DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2933620	Orang	3.558.394.847
					EAA	Layanan Perkantoran	192	Layanan	7.705.125
					EAC	Layanan Umum	639	Layanan	4.019.671.890
					EAF	Layanan SDM	3	orang	9.061.598
					RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1776	unit	799.719.025
					02	Peningkatan Kesejahteraan Prajurit TNI			436.723.157
					CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	70	unit	246.843.157
					RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	170	unit	189.880.000
3 Program	3)	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan							22.482.730
	RM	22.482.730	01	Tersedianya informasi strategis pertahanan negara yang up to date	01	Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam rangka penyelenggaran seluruh kegiatan di kawaasan instalasi strategis pertahanan			22.482.730
			03	Terwujudnya kebijakan dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dan memiliki efek dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global	AAA	Undang-Undang	1	UU	223.526

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
			05	Terwujudnya kebijakan nota kesepahaman di bidang pertahanan	AAC	Peraturan Pemerintah	1 PP	169.829
					AAD	Peraturan Presiden	2 PerPres	558.026
					AAG	Peraturan Menteri	4 PerMen	380.338
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	34 Rekomendasi Kebijakan	8.575.092
					ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2 Rekomendasi Kebijakan	256.609
					ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	2 Rekomendasi Kebijakan	248.890
					ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	4 Rekomendasi Kebijakan	555.570
					AEB	Forum	12 forum	4.655.950
					AEC	Kerja sama	19 Kesepakatan	5.647.855
					AED	Perjanjian	1 perjanjian	1.025.645
					AEG	Konferensi dan Event	2 Kegiatan	185.400
4 Program	4)	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan						43.125.307.122
	RM	31.132.374.100	01	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista/Non Alutsista/Sarpras integratif untuk melaksanakan OMP dan OMSP.	01	Kesiapan Alutsista TNI dalam melaksanakan operasi		33.145.552.882

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
PLN	7.337.796.250	02	Terwujudnya kesiapan operasional Alutsista TNI AD	AEA	Koordinasi	2	kegiatan	106.076
RMP	1.963.010.000	03	Terpenuhinya kebutuhan Alutsista yang modern dalam rangka pelaksanaan Tupok sesuai dengan standarisasi TNI AD	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	97	orang	162.098
PDN	2.692.126.772	04	Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras yang memenuhi standar mutu sesuai kebutuhan dan kemajuan IPTEK	AEG	Konferensi dan Event	1	Kegiatan	213.475
		05	Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista, fasilitas, dan sarpras TNI AU untuk siap melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2785	Unit	6.241.258.335
		06	Terwujudnya kesiapan operasional TNI AU dalam melaksanakan OMP dan OMSP serta pemenuhan alutsista TNI AU.	CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	22	unit	303.805.867
		07	Terwujudnya kesiapan operasional Non Alutsista dan Faslat Pendukung	CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1836	Unit	2.843.844.849
		08	Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista yang modern dalam rangka pelaksanaan Tupok sesuai dengan standarisasi TNI AD	CDM	OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	8	unit	21.658.712
		09	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas dan Sarpras dalam rangka pelaksanaan Tupok sesuai dengan standarisasi TNI AD	EAA	Layanan Perkantoran	6	Layanan	8.250.000
		10	Terwujudnya kesiapan operasional TNI AL	EAD	Layanan Sarana Internal	6	unit	247.126
		11	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan	EAJ	Layanan Data dan Informasi	8	Layanan	1.645.161
		12	Terpenuhinya Alutsista/Non Alutsista dalam rangka mendukung postur TNI yang tangguh	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	37.582

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	246	Unit	15.894.560.070
		RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	unit	10.107.075
		RCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	614	Unit	7.819.656.456
		02	Kesiapan Non Alutsista TNI dalam melaksanakan operasi			5.915.910.749
		CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1775	Unit	4.749.339.079
		CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	26	unit	270.235.418
		CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	221	Unit	310.296.307
		EAA	Layanan Perkantoran	208	Layanan	8.007.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	121	unit	409.911.967
		RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	Unit	168.120.978
		03	Kesiapan Sarpras Pertahanan			4.063.843.491
		CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Unit	31.671.148
		CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	575	unit	2.577.339.493
		RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	353	km	321.400.715
		RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	192	unit	1.133.432.135
5 Program 5) Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan						1.579.608.891
RM 1.579.608.891	01 Terwujudnya potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang terintegrasi	01	Potensi pertahanan dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang terintegrasi			87.469.955

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	02 Terwujudnya Penyelenggaraan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang Terintegrasi	AAA	Undang-Undang	3	UU	615.000
	03 Tersedianya kekuatan komponen pendukung Pertahanan Negara	AAC	Peraturan Pemerintah	3	PP	858.721
		AAD	Peraturan Presiden	5	PerPres	822.055
		AAG	Peraturan Menteri	11	PerMen	1.594.232
		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	99.400
		ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	19	Rekomendasi Kebijakan	3.913.195
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	4	Orang	718.175
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	125.210
		AEB	Forum	5	forum	572.708
		AED	Perjanjian	1	perjanjian	542.500
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	37516	orang	28.335.965
		AEG	Konferensi dan Event	1	Kegiatan	216.594
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	525.000
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1	Orang	400.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	3.100.000
		BEA	Bantuan Masyarakat	1	Orang	339.341

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	56	Orang	12.002.773
		BMA	Data dan Informasi Publik	6	layanan	2.620.065
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	1	Paket	169.330
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	146.719
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	460.980
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	91.500
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	400	Orang	684.687
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	522.605
		PAG	Peraturan Menteri	5	PerMen	900.000
		PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	Rekomendasi Kebijakan	750.000
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	13236	orang	20.393.200
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	400.000
		QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1	laporan	450.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	3.100.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	2.000.000
		02	Penyelenggaraan Kekuatan Komponen Utama Pertahanan Negara yang Terintegrasi			338.186.586

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				AAG	Peraturan Menteri	8	PerMen	751.161
				AAH	Peraturan lainnya	2	peraturan	120.582
				ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	14	Rekomendasi Kebijakan	1.642.848
				ACD	Perizinan Lembaga	1	Institusi	230.000
				AEA	Koordinasi	18	kegiatan	1.907.507
				AEB	Forum	4	forum	571.697
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	8	orang	565.234
				BHA	Operasi Bidang Pertahanan	5900	operasi	310.183.539
				BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1	Produk	74.159
				EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	22.000.000
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan	139.859
				03	Penyediaan kekuatan komponen pendukung Pertahanan Negara			1.153.952.350
				BHA	Operasi Bidang Pertahanan	3321	operasi	1.153.952.350
6 Program	6)	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan						663.472.472
	RM	663.472.472	01	Terwujudnya Pengadaan hasil pengembangan teknologi dan industri pertahanan dalam rangka Produksi Alutsista Industri Dalam Negeri	01	Hasil Litbang yang mendukung pengembangan Industri Pertahanan			663.472.472

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	02 Meningkatnya pemanfaatan teknologi hasil Litbang Kemhan	AAC	Peraturan Pemerintah	1	PP	150.000
	03 Tersedianya industri pertahanan yang dapat dikembangkan secara mandiri	AAH	Peraturan lainnya	13	peraturan	608.984
	04 Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan dalam rangka First Article (FA)	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	17	Rekomendasi Kebijakan	7.068.042
	05 Tersedianya hasil Litbang yang mampu mendukung pengembangan industri pertahanan	AEC	Kerja sama	5	Kesepakatan	1.350.000
	06 Terwujudnya hasil Litbang (prototipe) yang mampu mengembangkan industri pertahanan	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	10	Orang	1.104.349
	07 Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	6	Industri	1.488.069
	08 Tersedianya Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI yang memenuhi standar mutu	BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2	Produk	125.000
		CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	6	Unit	27.787.284
		DBA	Pendidikan Tinggi	4016	Orang	64.347.341
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	44	produk	29.526.825
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	41	Purwarupa	115.854.438
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	9	model	4.669.700
		EAA	Layanan Perkantoran	9	Layanan	250.063.720

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	57	Layanan	18.191.280
				EAD	Layanan Sarana Internal	4	unit	7.012.508
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	504.181
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	22	Laporan	604.855
				FAD	Perencanaan dan Penganggaran	8	Layanan	515.896
				RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Unit	62.500.000
				SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	2	Purwarupa	70.000.000
7 Program	7)	Program Dukungan Manajemen						76.283.096.870
	RM	76.226.235.498	01 Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan U.O Kemhan	01	Manajemen Pertahanan dan Keamanan yang Terstruktur dan Integratif			2.432.432.990
	PNBP	56.861.372	02 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di U.O. Mabes TNI secara efisien, efektif, dan akuntabel.	AAA	Undang-Undang	5	UU	1.243.624
			03 Terwujudnya tata kelola sumber daya TNI AD secara efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP dan OMSP	AAC	Peraturan Pemerintah	4	PP	839.614
			04 Tersedianya dukungan tata kelola pelaksanaan tugas pokok TNI AL secara efisien, efektif dan akuntabel.	AAD	Peraturan Presiden	2	PerPres	35.800
			05 Terwujudnya manajemen dan operasional TNI AU yang terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel	AAG	Peraturan Menteri	23	PerMen	2.015.116

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	06 Terwujudnya kesadaran disiplin hukum dan prajurit	AAH	Peraturan lainnya	35	peraturan	2.280.532
	07 Terwujudnya kesiapan dukungan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok TNI AD	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	11	Rekomendasi Kebijakan	3.103.932
	08 Meningkatnya pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur Kemhan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	72	Orang	2.062.611
		AEA	Koordinasi	28	kegiatan	10.139.651
		AEC	Kerja sama	4	Kesepakatan	663.393
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	678	orang	794.582
		BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	1	Orang	24.041
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1	Perkara	20.952
		BCB	Perkara Hukum Lembaga	8	Perkara	527.479
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	25	operasi	283.141
		BMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	89.581
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	1	km2	2.260.147
		DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	4148	Orang	19.787.760
		EAA	Layanan Perkantoran	64	Layanan	1.213.369.590
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	574	Layanan	326.341.928
		EAC	Layanan Umum	274240	Layanan	182.944.764

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	840	unit	37.453.330
		EAE	Layanan Prasarana Internal	36	unit	41.125.253
		EAF	Layanan SDM	1955	orang	1.867.190
		EAG	Layanan Hukum	16	Layanan	1.740.817
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	32	Layanan	4.345.497
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	40	Layanan	9.122.167
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	42	Layanan	517.997.385
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	166	Laporan	13.885.761
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	89	Laporan	6.510.988
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	726	Orang	1.166.304
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	29	Layanan	17.937.901
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	42	Laporan	8.622.415
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	36	Laporan	1.829.744
		02	Manajemen Pertahanan dan Keamanan Integratif			73.850.663.880
		AEC	Kerja sama	12	Kesepakatan	35.009.314
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	3	Perkara	372.400
		BHA	Operasi Bidang Pertahanan	3521	operasi	407.021.000
		BMB	Komunikasi Publik	948	layanan	54.930.640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	405	Unit	501.381.271
		CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	13	unit	1.700.851.753
		CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	237	Unit	67.373.862
		CDM	OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	582	unit	1.187.824.541
		DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	7882	Orang	5.645.612
		EAA	Layanan Perkantoran	15457	Layanan	59.807.644.436
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9601	Layanan	387.673.319
		EAC	Layanan Umum	2078	Layanan	3.995.871.643
		EAF	Layanan SDM	195785	orang	5.295.916.532
		EAG	Layanan Hukum	33892	Layanan	125.099.811
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	915	Layanan	29.623.099
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	111	Layanan	38.051.192
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	509	Laporan	86.343.506
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3254	Laporan	119.724.011
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	13	Sistem Informasi	4.305.938

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI						16.957.628.353
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN						16.874.756.994
	10	PENDIDIKAN						82.871.359
3 Program	1)	Program Pembentukan Regulasi						29.270.303
	2)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						4.821.907.739
	3)	Program Pemajuan dan Penegakan HAM						16.902.374
	4)	Program Dukungan Manajemen						12.089.547.937
1 Program	1)	Program Pembentukan Regulasi						29.270.303
	RM	29.270.303	01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	01	Rancangan Peraturan Perundang-undangan		21.985.006
			02	Terwujudnya Pembinaan Hukum	AAA	Undang-Undang	9 UU	3.222.646
					AAC	Peraturan Pemerintah	3 PP	500.000
					AAD	Peraturan Presiden	5 PerPres	375.000
					AAG	Peraturan Menteri	20 PerMen	250.000
					ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1117 Rekomendasi Kebijakan	11.636.153
					ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	826 Orang	1.126.241
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5 NSPK	267.791

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	18	Lembaga	535.580
				BMA	Data dan Informasi Publik	4	layanan	1.178.595
				PAA	Undang-Undang	4	UU	2.893.000
				02	Rekomendasi Peraturan Perundang-undangan			7.285.297
				ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	247	Rekomendasi Kebijakan	7.285.297
2 Program	2)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						4.821.907.739
	RM	2.647.998.068	03	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	01	Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang diselesaikan tepat waktu dan berkepastian Hukum		330.280.427
	PNBP	2.173.909.671	04	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	105	Rekomendasi Kebijakan	54.830.555
			05	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	44.113.472
			06	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	AEA	Koordinasi	532	kegiatan	21.212.690
			07	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	94070	Orang	6.347.087
			08	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	431	layanan	38.926.336

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	09 Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	BCB	Perkara Hukum Lembaga	103	Perkara	2.738.246
	10 Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	188	Lembaga	7.032.161
	11 Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	154.079.880
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		02	Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti			52.606.135
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	10	Rekomendasi Kebijakan	17.048.855
		AEC	Kerja sama	4	Kesepakatan	10.400.037
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	5	Lembaga	7.590.892
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	2.934.145
		BCB	Perkara Hukum Lembaga	2	Perkara	14.632.206
		03	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian			1.505.987.693
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3	Rekomendasi Kebijakan	19.795.018
		AEA	Koordinasi	958	kegiatan	51.586.576

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEC	Kerja sama	10	Kesepakatan	4.835.084
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	20.115.724
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	4252743	Orang	235.930.324
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	641.928.993
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	5086	operasi	72.336.470
		BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	40851822	Orang	79.281.775
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	379.177.729
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		04	Penyelenggaraan Pengamanan Keimigrasian			30.466.462
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan	3.973.870
		AEA	Koordinasi	2	kegiatan	1.523.118
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	4.468.546
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	127	operasi	17.505.528
		BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1850	Orang	2.995.400
		05	Penyelenggaraan Layanan Dasar Pemasyarakatan yang Berkualitas			7.844.272

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan	576.782
		AEC	Kerja sama	9	Kesepakatan	170.028
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	5.067.212
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	1.230.250
		PEA	Koordinasi	1	kegiatan	800.000
		06	Penyelenggaraan Layanan Teknis Pemasyarakatan yang berkualitas			2.565.769.415
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5	Rekomendasi Kebijakan	451.407
		AEA	Koordinasi	352	kegiatan	15.282.397
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2478	orang	11.415.257
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	5.767.451
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2	Orang	127.250
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8340	layanan	11.976.734
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	662771	Orang	2.477.365.798
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	6406	operasi	40.508.621
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	16.500
		EAF	Layanan SDM	15	orang	58.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		PEA	Koordinasi	1	kegiatan	1.800.000
		07	Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib			2.456.651
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	15	Rekomendasi Kebijakan	185.336
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	782.850
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	50	operasi	1.488.465
		08	Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual			254.568.954
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1585	Rekomendasi Kebijakan	10.047.789
		AEC	Kerja sama	11	Kesepakatan	10.495.527
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	15795	orang	27.245.035
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9	NSPK	13.882.702
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	132651	layanan	15.485.628
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	20	Perkara	1.755.410
		BKB	Pemantauan produk	76	laporan	4.059.229
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	170.597.634

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					QMA	Data dan Informasi Publik	156	layanan	1.000.000
					09	Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat			71.927.730
					ADE	Akreditasi Lembaga	524	Lembaga	1.121.860
					ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	432	Orang	519.726
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	331	Lembaga	4.777.869
					BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	776	Kelompok Masyarakat	6.306.983
					BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1081	Lembaga	2.669.235
					BMA	Data dan Informasi Publik	3	layanan	352.157
					PDE	Akreditasi Lembaga	524	Lembaga	2.500.000
					QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	5699	Orang	45.592.000
					QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	758	Kelompok Masyarakat	8.087.900
3 Program	3)	Program Pemajuan dan Penegakan HAM							16.902.374
	RM		16.902.374	01	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	01	Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM		16.902.374
						ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	405	Rekomendasi Kebijakan	7.746.298
						AEA	Koordinasi	921	kegiatan	2.894.461

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	357.946
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6 NSPK	374.190
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	287 Lembaga	3.162.674
					BKC	Pemantauan lembaga	4 laporan	367.301
					BMA	Data dan Informasi Publik	265 layanan	999.504
					PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1250 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
4 Program	4)	Program Dukungan Manajemen						12.089.547.937
	RM	11.025.706.738	02	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan	01	Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		17.417.968
	PNBP	1.063.841.199	05	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang Akuntabel	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	38 Rekomendasi Kebijakan	16.284.820
			06	Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang Partisipatif dan Profesional dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan	665.456
			07	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	EAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	467.692
			08	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	03	Layanan Manajemen Internal Kementerian Hukum dan HAM		11.800.319.857

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	09 Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	EAA	Layanan Perkantoran	1037	Layanan	8.583.410.605
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1727	Layanan	206.314.576
		EAC	Layanan Umum	919	Layanan	335.529.331
		EAD	Layanan Sarana Internal	8468	unit	941.505.799
		EAE	Layanan Prasarana Internal	16063	unit	1.346.904.778
		EAF	Layanan SDM	99022	orang	174.803.985
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	685.668
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	682	Layanan	52.952.046
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	431	Layanan	84.824.835
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	17.623.456
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	500.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1538	Laporan	45.936.476
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1090	Orang	9.328.302
		04	Pengawasan Internal dalam Rangka Mewujudkan Satuan Kerja WBK/WBBM guna Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Kementerian Hukum dan HAM			38.106.572
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	13	Laporan	29.142.172
		TAK	Layanan Pengawasan Internal	6	Laporan	8.964.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		05 Layanan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Bidang Hukum dan HAM			233.703.540
		EAA Layanan Perkantoran	5	Layanan	19.051.214
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	10	Layanan	840.247
		EAC Layanan Umum	5	Layanan	2.057.719
		EAE Layanan Prasarana Internal	3	unit	9.996.859
		EAF Layanan SDM	187	orang	2.334.527
		EAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	4.000.000
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	1.158.870
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	16150	Orang	188.020.579
		TAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	590	Orang	6.243.525

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	015	KEMENTERIAN KEUANGAN						43.307.277.579
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						40.493.705.703
	04	EKONOMI						209.900.491
	10	PENDIDIKAN						2.603.671.385
3 Program	1)	Program Pengelolaan Belanja Negara						33.759.191
	2)	Program Pengelolaan Penerimaan Negara						2.234.076.499
	3)	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko						233.740.751
	4)	Program Kebijakan Fiskal						65.695.955
	5)	Program Dukungan Manajemen						40.740.005.183
1 Program	1)	Program Pengelolaan Belanja Negara						33.759.191
	RM	33.759.191	01	Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang tepat.	01	Ketepatan Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKDD		22.362.298
					AAD	Peraturan Presiden	1 PerPres	2.884.552
					AAG	Peraturan Menteri	5 PerMen	521.380
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	12 Rekomendasi Kebijakan	2.421.454
					BMB	Komunikasi Publik	400 layanan	853.162

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	6744	Orang	5.690.954
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	11	Layanan	3.722.299
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	22	Laporan	3.874.408
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	3	Laporan	984.757
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	380	Daerah (Prov/Kab/Kota)	518.008
		FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	30	Desa	891.324
		02	Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda			11.396.893
		AAC	Peraturan Pemerintah	3	PP	979.110
		AAD	Peraturan Presiden	1	PerPres	175.800
		AAG	Peraturan Menteri	6	PerMen	809.730
		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	27.300
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	70	Rekomendasi Kebijakan	2.496.532
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1350	Orang	5.948.241
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	10	Layanan	302.399
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7	Laporan	657.781
2 Program 2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara						2.234.076.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	2.234.076.499	01	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang optimal	01	Realisasi Penerimaan Negara			1.539.213.317
				AAC	Peraturan Pemerintah	5	PP	412.069
				AAG	Peraturan Menteri	22	PerMen	1.595.335
				AAH	Peraturan lainnya	13	peraturan	11.554.538
				ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	35	Rekomendasi Kebijakan	15.424.122
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	405	orang	6.981.855
				BCE	Penanganan Perkara	4754023	Perkara	47.444.233
				BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	3441686	Laporan	243.388.421
				BMA	Data dan Informasi Publik	26160806	layanan	66.985.791
				BMB	Komunikasi Publik	3761	layanan	17.879.768
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	246	Laporan	6.037.166
				FAJ	Benda Meterai dan Cukai	2,715E+10	Keping	1.120.489.753
				PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.020.266
				02	Kepatuhan WP/WB/PJ/IP yang Tinggi			694.863.182
				AAC	Peraturan Pemerintah	1	PP	615.120
				AAG	Peraturan Menteri	7	PerMen	5.816.610

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					AAH	Peraturan lainnya	39 peraturan	12.919.451
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	74 Rekomendasi Kebijakan	32.091.726
					AEA	Koordinasi	41 kegiatan	10.392.290
					AEC	Kerja sama	8 Kesepakatan	1.838.967
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	9 orang	6.423.561
					AEG	Konferensi dan Event	4 Kegiatan	886.418
					BCE	Penanganan Perkara	34000 Perkara	13.830.752
					BHB	Operasi Bidang Keamanan	1365 operasi	161.490.165
					BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	33574 Laporan	129.998.493
					BMA	Data dan Informasi Publik	41 layanan	39.529.810
					BMB	Komunikasi Publik	309102 layanan	275.712.173
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	17 Laporan	3.317.646
3 Program	3)	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko						233.740.751
	RM	213.087.751	01	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	11	Kecukupan Kas Negara		129.400.977
	BLU	20.653.000	02	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	AAA	Undang-Undang	1 UU	444.620

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	03 Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali	AAG	Peraturan Menteri	31	PerMen	886.920
		AAH	Peraturan lainnya	266	peraturan	11.792.538
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	11	Rekomendasi Kebijakan	303.200
		BMB	Komunikasi Publik	40017	layanan	35.582.261
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	27816	Orang	10.122.444
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7180	Laporan	16.228.943
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	2303	Laporan	18.609.184
		FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	39646	Dokumen	35.430.867
		12	Utilisasi Kekayaan Negara			81.580.470
		AAA	Undang-Undang	1	UU	279.780
		AAC	Peraturan Pemerintah	11	PP	279.334
		AAG	Peraturan Menteri	13	PerMen	440.910
		AAH	Peraturan lainnya	73588	peraturan	11.691.891
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	50.000
		BDA	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN	8	BUMN	110.517
		BMB	Komunikasi Publik	623	layanan	3.326.015

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	182	Orang	1.398.466
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	128851	Laporan	24.766.990
				FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	7	Laporan	475.568
				FAK	Pengelolaan Aset BUN	19713	Unit	38.760.999
				13	Fasilitasi Investasi			22.759.304
				AAG	Peraturan Menteri	4	PerMen	293.750
				AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	5.382
				BMB	Komunikasi Publik	9	layanan	4.049.642
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	420	Laporan	12.499.397
				FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	42	Laporan	136.650
				FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	100	Dokumen	11.040
				UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	8	Laporan	5.763.443
4 Program	4)	Program Kebijakan Fiskal						65.695.955
	RM	65.695.955	01	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	01	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		65.695.955
					AAA	Undang-Undang	4	UU	5.025.315
					AAC	Peraturan Pemerintah	3	PP	3.962.388
					AAH	Peraturan lainnya	3	peraturan	3.218.690
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	84	Rekomendasi Kebijakan	27.520.980

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					AEC	Kerja sama	3 Kesepakatan	5.336.586
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	10 orang	2.438.540
					AEG	Konferensi dan Event	5 Kegiatan	14.343.789
					PAC	Peraturan Pemerintah	1 PP	686.540
					PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan	3.163.127
5 Program	5)	Program Dukungan Manajemen						40.740.005.183
	RM	32.253.637.183	01	Organisasi dan SDM yang Optimal	01	Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian		32.538.568.916
	BLU	8.486.368.000	02	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	AAG	Peraturan Menteri	81 PerMen	3.036.325
			03	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	AAH	Peraturan lainnya	120 peraturan	8.200.351
			04	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	34 Rekomendasi Kebijakan	24.420.642
					BMB	Komunikasi Publik	258016 layanan	84.221.283
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	300 Layanan	44.067.179
					EAC	Layanan Umum	23069 Layanan	3.701.188.721
					EAD	Layanan Sarana Internal	511440 unit	1.484.572.420
					EAE	Layanan Prasarana Internal	6697389 unit	1.528.038.596
					EAF	Layanan SDM	5336925 orang	23.657.101.185

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAG	Layanan Hukum	2323	Layanan	22.491.757
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1534	Layanan	36.272.850
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	650	Laporan	37.939.812
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	765	Dokumen	31.556.688
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	463	Sistem Informasi	1.185.982.437
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	154	Laporan	1.239.960
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	688.238.710
		02	Hasil Pengelolaan Tugas Khusus (Special Mission)			8.201.436.267
		AAA	Undang-Undang	1	UU	968.325
		AAH	Peraturan lainnya	5	peraturan	259.360
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	83	Rekomendasi Kebijakan	15.887.974
		AED	Perjanjian	1	perjanjian	741.385
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	10	orang	5.325.914
		EAC	Layanan Umum	9525	Layanan	50.239.398
		EAD	Layanan Sarana Internal	263	unit	580.412
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1621	unit	333.926

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	276	orang	64.864.271
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	4	Laporan	491.160
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	962.472
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	211	Laporan	8.979.719
		FAM	Hasil Kelolaan Dana	123238	Rupiah	8.009.912.305
		UAM	Hasil Kelolaan Dana	3344580	Rupiah	41.889.646

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	018	KEMENTERIAN PERTANIAN							21.838.977.027
2 Fungsi	04	EKONOMI							21.475.020.767
	10	PENDIDIKAN							363.956.260
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							1.022.146.302
	2)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							2.176.368.521
	3)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							12.402.081.487
	4)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							646.899.920
	5)	Program Dukungan Manajemen							5.591.480.797
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							1.022.146.302
	RM		932.232.555	01	Termanfaatkannya teknologi pertanian	01	Pemanfaatan teknologi pertanian		533.749.300
	PLN		84.927.050	02	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	AEA	Koordinasi	6 kegiatan	27.496.740
	RMP			03	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1465 Lembaga	19.169.024
	PNBP		4.986.697	04	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian	BMA	Data dan Informasi Publik	1465 layanan	1.465.000
						FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	42 Daerah (Prov/Kab/Kota)	34.897.044

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	40835	Orang	403.128.742
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5895	Kelompok Masyarakat	47.592.750
		03	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian			124.440.742
		AEA	Koordinasi	62	kegiatan	44.454.297
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	15.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100	Lembaga	3.560.000
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2394	Kelompok Masyarakat	19.000.000
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10	Unit	4.052.105
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1000	Orang	2.600.000
		SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	16223	Orang	35.774.340
		04	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian			363.956.260
		AEA	Koordinasi	12	kegiatan	13.775.368
		AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	719.915
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	18.750.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5000	Orang	6.762.232

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	20320	Orang	6.064.000
					CAA	Sarana Bidang Pendidikan	10	Paket	934.592
					CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1	unit	98.995.000
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.752.500
					QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	822	Kelompok Masyarakat	29.830.000
					SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	6701	Orang	185.372.653
2 Program	2)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							2.176.368.521
	RM	2.175.945.998	01	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian Perkebunan	--	--			805.120.095
	PNBP	422.523	02	Meningkatnya daya saing komoditas hortikultura nasional	ADA	Standarisasi Produk	460	produk	3.000.000
			02	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan	ADC	Sertifikasi Produk	60	produk	2.959.800
			02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan	AEA	Koordinasi	64	kegiatan	42.998.606
			03	Tertanganinya penyebaran OPT, gangguan usaha dan DPI pada tanaman perkebunan	AEH	Promosi	3	promosi	10.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	07 Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Tanaman Pangan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	2.895.800
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	300	Kelompok Masyarakat	11.800.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	450	layanan	9.544.300
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7177	Unit	595.921.589
		PDC	Sertifikasi Produk	200	produk	6.000.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	375	Unit	27.500.000
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	475	unit	92.500.000
		01	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan			630.203.295
		AEA	Koordinasi	32	kegiatan	10.581.550
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	18	NSPK	21.307.336
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	1260	Unit	17.003.156
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	74918	Unit	581.311.253
		02	Tersedianya Benih Unggul Tanaman Perkebunan			275.332.086
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	196	Rekomendasi Kebijakan	9.434.812
		AEA	Koordinasi	96	kegiatan	6.115.859
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	10.427.898

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	79249340	Produk	7.030.164
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	2629	Unit	187.509.549
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20	unit	54.813.804
		03	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pascapanen yang sesuai Kebutuhan			352.806.208
		ADA	Standarisasi Produk	671	produk	2.862.700
		AEA	Koordinasi	135	kegiatan	17.691.655
		AEH	Promosi	28	promosi	2.204.630
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	NSPK	12.389.545
		PDA	Standarisasi Produk	10000	produk	6.166.020
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	935	Unit	124.238.358
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	951	unit	187.253.300
		04	Areal Penguatan Perlindungan dari Gangguan OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan			47.423.337
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	15	Rekomendasi Kebijakan	1.399.892
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	8.046.523
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	79	Unit	12.980.705

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	2175	Unit	6.222.850
					PDC	Sertifikasi Produk	69	produk	11.404.900
					QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	15	Kelompok Masyarakat	835.500
					RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	600	Unit	6.532.967
					06	Nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan			65.483.500
					AEA	Koordinasi	4	kegiatan	20.321.000
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	3.000.000
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	37	Lembaga	31.150.000
					RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	70	Unit	7.437.500
					RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	44	unit	3.575.000
3 Program	3)	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas							12.402.081.487
	RM	12.173.707.145	01	Aman dari ancaman OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati	01	Kebijakan dan Sertifikasi Karantina Pertanian			207.455.516
	PLN	78.521.396	01	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Tanaman Pangan Dalam Negeri	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	68	Rekomendasi Kebijakan	51.343.241
	RMP		01	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak	PDC	Sertifikasi Produk	1018257	produk	150.026.344
	PNBP	78.072.055	03	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	PEC	Kerja sama	5	Kesepakatan	3.651.579

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
BLU	52.580.891	03	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak	UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	6	Sistem Informasi	2.434.352
PBS	19.200.000	03	Tersedianya sarana hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan	03	Meningkatnya Produksi Pangan Asal Ternak			1.714.455.905
		04	Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	AEA	Koordinasi	32	kegiatan	29.449.258
		04	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	23	NSPK	90.147.146
		05	Meningkatnya luas wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	89	Unit	41.939.591
		07	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19	unit	34.471.191
				PDA	Standarisasi Produk	1926545	produk	120.938.750
				PDF	Sertifikasi Lembaga	223	Lembaga	14.358.900
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	250	layanan	246.952.486
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3400	Orang	1.855.000
				QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	669	Unit	121.492.450
				QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	3007079	Kelompok Masyarakat	922.577.163
				QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	26867	Produk	58.373.385
				RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	45	Unit	29.737.585

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	unit	2.163.000
		04	--			4.006.444.134
		ADC	Sertifikasi Produk	126548	produk	33.968.215
		AEA	Koordinasi	164	kegiatan	214.280.468
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	42	NSPK	12.847.234
		BKB	Pemantauan produk	151350	laporan	23.720.221
		BMA	Data dan Informasi Publik	10	layanan	11.848.453
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1922262	Unit	61.429.850
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	215920	Unit	423.429.386
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	11	Purwarupa	22.595.682
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	5090770	Unit	3.202.324.625
		05	--			84.400.000
		AEA	Koordinasi	35	kegiatan	26.000.000
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	48300	Kelompok Masyarakat	42.500.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	35	layanan	15.900.000
		06	Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan			118.539.544
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	26.570.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BMA	Data dan Informasi Publik	582	layanan	47.539.864
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	200	Kelompok Masyarakat	44.429.680
		07	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			450.394.985
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	7.000.000
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	35	Kelompok Masyarakat	64.585.549
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	35	Produk	21.100.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	35	layanan	4.700.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6100	Kelompok Masyarakat	353.009.436
		08	Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai dengan Kebutuhan			4.968.421.498
		AEA	Koordinasi	345	kegiatan	115.436.511
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	169	Kelompok Masyarakat	78.521.396
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	70	Rekomendasi Kebijakan	46.957.443
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	9493912	Orang	87.677.991
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	283	layanan	51.630.570

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	35996	Unit	1.139.620.661
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1172319	unit	499.885.946
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	3317	km2	2.620.205.980
		RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4618	unit	328.485.000
		09	--			851.969.905
		AEA	Koordinasi	55	kegiatan	26.173.005
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	21	NSPK	4.484.600
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100	Kelompok Masyarakat	4.380.000
		BKB	Pemantauan produk	396	laporan	1.800.000
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	679500	Unit	10.374.000
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	1642273	Unit	580.925.800
		CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25	unit	25.960.000
		PDC	Sertifikasi Produk	10500	produk	13.700.000
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	215650	Unit	184.172.500
4 Program 4) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						646.899.920
RM 643.314.172	01 Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian	01	Teknologi dan Inovasi Pertanian			646.899.920

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	PNBP	3.585.748			SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	4276975	produk	646.899.920
5 Program	5) Program Dukungan Manajemen								5.591.480.797
	RM	5.542.821.614	01	Terwujudnya Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	01	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Pertanian			3.483.510.756
	PNBP	48.659.183	02	Terkelolanya Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	24	Rekomendasi Kebijakan	5.433.275
			03	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian	AEA	Koordinasi	71	kegiatan	32.525.591
					DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	43	kekayaan intelektual	1.750.000
					EAA	Layanan Perkantoran	683	Layanan	1.998.414.326
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1805	Layanan	505.034.317
					EAC	Layanan Umum	386	Layanan	144.928.372
					EAD	Layanan Sarana Internal	3657	unit	271.627.639
					EAE	Layanan Prasarana Internal	12337	unit	154.425.245
					EAF	Layanan SDM	24914	orang	95.993.176
					EAG	Layanan Hukum	28	Layanan	11.745.342
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	103	Layanan	28.374.574
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	135	Layanan	66.995.094

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	50	Layanan	20.259.996
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	989	Laporan	84.674.979
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1427	Orang	38.428.830
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	433	Daerah (Prov/Kab/Kota)	22.900.000
		02	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Layanan Lingkup Kementerian Pertanian			194.802.978
		ADC	Sertifikasi Produk	540	produk	9.100.500
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	10.983.988
		AEC	Kerja sama	18	Kesepakatan	13.103.000
		EAA	Layanan Perkantoran	14	Layanan	39.316.665
		EAD	Layanan Sarana Internal	456	unit	35.738.746
		EAE	Layanan Prasarana Internal	3914	unit	6.193.079
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	7.751.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	47.379.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	25.237.000
		03	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian			1.806.816.242
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	17	Rekomendasi Kebijakan	14.703.825

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	4.351.050
		EAA Layanan Perkantoran	7	Layanan	1.419.009.792
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	92	Layanan	155.369.508
		EAC Layanan Umum	45	Layanan	134.880.978
		EAD Layanan Sarana Internal	329	unit	33.723.755
		EAE Layanan Prasarana Internal	5	unit	4.714.484
		EAF Layanan SDM	236	orang	7.519.683
		EAG Layanan Hukum	1	Layanan	3.374.000
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	14.126.809
		EAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	4.681.998
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7	Laporan	10.360.360
		04 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Pertanian di lingkungan mitra kerja Inspektorat I, II, III dan IV			106.350.821
		EAK Layanan Pengawasan Internal	513	Laporan	106.350.821

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN						3.181.384.901
2 Fungsi	04	EKONOMI						1.746.403.259
	10	PENDIDIKAN						1.434.981.642
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						962.024.611
	2)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						663.361.351
	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						112.367.167
	4)	Program Dukungan Manajemen						1.443.631.772
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						962.024.611
	RM	904.856.496	01	Meningkatkan Tenaga Kerja Industri yang kompeten	01	Tenaga Kerja Industri yang Kompeten		866.340.246
	PNBP	47.504.870	02	Meningkatkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Industri	ACD	Perizinan Lembaga	1 Institusi	30.750.000
	BLU	9.663.245	03	Meningkatkan Infrastruktur Kompetensi Industri	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	20 Lembaga	2.000.000
					DCH	Pelatihan Bidang Industri	290 Orang	4.000.000
					FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	37 Lembaga	19.034.053
					PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	10 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
					PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	10000 Orang	5.000.000
					PEC	Kerja sama	8 Kesepakatan	5.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	80	Orang	2.300.000
					RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	Unit	164.691.224
					RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	2	unit	10.408.776
					RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	unit	3.900.000
					SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	14238	Orang	107.176.969
					SCH	Pelatihan Bidang Industri	87000	Orang	508.079.224
					02	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas			79.684.365
					FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	21	Lembaga	5.694.398
					PEC	Kerja sama	2600	Kesepakatan	3.000.000
					RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	2	unit	32.750.000
					SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	7563	Orang	38.239.967
					03	SDM Aparatur Kementerian Perindustrian yang Kompeten			16.000.000
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	740	Orang	16.000.000
2 Program	2)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							663.361.351
	RM	594.184.341	01	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	01	Kebijakan dan Fasilitas Dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Industri			7.734.021
	PNBP	37.463.146	02	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	11	Rekomendasi Kebijakan	6.014.901

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
BLU	31.713.864	03	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	8	Industri	419.120
		04	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	DCH	Pelatihan Bidang Industri	90	Orang	1.300.000
		05	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	02	Kebijakan dan Fasilitas Dalam rangka Meningkatkan Populasi dan Daya Saing Industri			621.083.319
		06	Meningkatnya Persebaran Industri	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
				ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	114	Rekomendasi Kebijakan	45.680.812
				AEA	Koordinasi	18	kegiatan	1.878.104
				AEB	Forum	2	forum	694.982
				AEC	Kerja sama	4	Kesepakatan	4.334.790
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	50	orang	359.086
				AEG	Konferensi dan Event	13	Kegiatan	11.472.878
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	51	NSPK	10.707.152
				BAD	Pelayanan Publik kepada industri	11493	Industri	69.340.103
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	3.000.000
				BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	1	Koperasi	2.250.000
				BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	13	Industri	8.224.998
				BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	1	Unit	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1	Lembaga	2.200.000
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	12	Produk	3.002.000
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	138	Lembaga	1.000.000
		BKB	Pemantauan produk	1	laporan	1.000.000
		CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	10	Unit	1.122.750
		CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	unit	260.000
		DCH	Pelatihan Bidang Industri	25	Orang	200.000
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1	produk	50.408
		DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	1	kekayaan intelektual	45.040
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	39	Rekomendasi Kebijakan	30.435.634
		PEA	Koordinasi	1	kegiatan	3.000.000
		PEB	Forum	3	forum	1.750.000
		PEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	1.300.000
		PEH	Promosi	13	promosi	85.289.591
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	104	NSPK	2.364.366

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	37	Kelompok Masyarakat	19.815.651
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	25	Badan usaha	12.500.000
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	7887	Industri	255.455.744
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	1	Unit	2.000.000
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10	Lembaga	500.000
		QJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	150	Produk	832.324
		QKB	Pemantauan produk	1	laporan	500.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	3.000.000
		RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	8	Unit	8.000.000
		RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	unit	19.000.000
		SCH	Pelatihan Bidang Industri	300	Orang	2.313.066
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1	produk	982.000
		SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	24	Purwarupa	1.121.840
		03	Kebijakan dan Fasilitas Dalam rangka Penguatan Struktur Industri			21.544.011
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	7	Rekomendasi Kebijakan	5.844.011
		AEH	Promosi	3	promosi	600.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	1.100.000
					PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	3 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
					QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1 Badan usaha	2.000.000
					QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri	9.000.000
					04	Kebijakan dan Fasilitas Dalam rangka Persebaran Industri		13.000.000
					ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	6 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
					PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	800.000
					QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	15 Badan usaha	8.200.000
3 Program	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						112.367.167
	RM	90.553.995	01	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	01	Hasil litbangyasa dan teknologi yang dimanfaatkan untuk mendukung daya saing industri		112.367.167
	PNBP	19.313.162	02	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3 Rekomendasi Kebijakan	1.113.028
	BLU	2.500.010	03	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	AEA	Koordinasi	12 kegiatan	648.123
			04	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	AEB	Forum	1 forum	40.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEC	Kerja sama	18	Kesepakatan	547.459
		AEE	Kemitraan	2	Kesepakatan	110.500
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1882	orang	4.956.161
		AEG	Konferensi dan Event	6	Kegiatan	2.190.338
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	505.500
		BAD	Pelayanan Publik kepada industri	285	Industri	548.217
		BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	26	Industri	2.060.983
		CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	104	Unit	10.242.669
		CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	5	unit	7.444.487
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	13	produk	687.575
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	5	Purwarupa	493.150
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2	model	66.635
		DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	8	kekayaan intelektual	194.242
		PEA	Koordinasi	4	kegiatan	3.637.366
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	150	Industri	40.000.000
		RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	4	Unit	6.040.000
		RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	unit	3.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	19	produk	8.352.729
				SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	16	Purwarupa	8.506.854
				SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	14	model	10.481.051
4 Program	4) Program Dukungan Manajemen							1.443.631.772
	RM	1.354.851.277	01 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	01	Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia			11.086.000
	PNBP	37.463.812	02 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.503.000
	BLU	51.316.683	03 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	734.917
			04 Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	EAF	Layanan SDM	4000	orang	4.977.383
			05 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Keloia Internal	1	Layanan	1.370.700
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	500	Orang	2.500.000
				02	Layanan Legislasi, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum			7.458.258
				AAG	Peraturan Menteri	30	PerMen	2.787.666
				BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	1	Institusi	286.830
				EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.718.525
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	878.407
				EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	286.830

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	300.000
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	1.200.000
		03	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			15.861.737
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2	Rekomendasi Kebijakan	750.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.756.023
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4	Layanan	3.324.224
		EAF	Layanan SDM	50	orang	380.830
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	2.150.660
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000
		TAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	7.000.000
		04	Layanan Dukungan Administrasi Sekretariat Jenderal			77.641.238
		BMB	Komunikasi Publik	2	layanan	9.592.795
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	56.149.839
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	5	Layanan	1.635.881
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	1.278.250

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	231.048
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	5.458.798
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	4	Laporan	3.294.627
		05	Layanan Internal Sarana dan Prasarana Kerja			64.175.135
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	33.228.000
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	683.453
		EAC	Layanan Umum	89	Layanan	6.218.547
		EAD	Layanan Sarana Internal	5	unit	8.583.154
		EAE	Layanan Prasarana Internal	4	unit	461.981
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	15.000.000
		06	Layanan Data dan Informasi Industri			24.428.153
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	13.061.251
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.087.746
		EAD	Layanan Sarana Internal	10	unit	400.645
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	6.378.511
		TAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	2.500.000
		07	Layanan Pengawasan dan Evaluasi Kementerian Perindustrian			8.000.000
		TAK	Layanan Pengawasan Internal	306	Laporan	8.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		08 Layanan Dukungan Manajemen dan Kesekretariatan			1.214.862.397
		EAA Layanan Perkantoran	184	Layanan	1.016.485.151
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	146	Layanan	131.759.091
		EAC Layanan Umum	3	Layanan	5.286.186
		EAD Layanan Sarana Internal	789	unit	27.381.055
		EAE Layanan Prasarana Internal	10	unit	4.580.891
		EAF Layanan SDM	45	orang	1.979.932
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	2.322.100
		EAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	2.324.050
		EAK Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	568.290
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	36	Laporan	13.173.821
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1348	Orang	6.201.830
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan	2.800.000
		09 Kebijakan dan Fasilitas dalam Rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			20.118.854
		ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	5	Rekomendasi Kebijakan	1.774.585
		AEH Promosi	3	promosi	1.443.896

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	6630	Produk	4.096.473
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	6.503.000
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	833.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	31	unit	467.900
		PDC	Sertifikasi Produk	313	produk	5.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						7.003.144.588
2 Fungsi	04	EKONOMI						6.877.658.965
	10	PENDIDIKAN						125.485.623
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						264.527.406
	2)	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi						703.626.536
	3)	Program Energi dan Ketenagalistrikan						3.231.299.390
	4)	Program Pertambangan Mineral dan Batubara						160.194.752
	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						326.352.191
	6)	Program Dukungan Manajemen						2.317.144.313
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						264.527.406
	RM	74.665.170	01	Terselenggaranya Pengembangan SDM sektor ESDM yang kompeten dan profesional	08	Pengembangan SDM Sektor ESDM Melalui Pendidikan Vokasi Sektor ESDM		84.677.849
	BLU	189.862.236	02	Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengembangan SDM Sektor ESDM	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4 layanan	21.784.762
			03	Meningkatnya kualitas pelayanan	BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan	164.046
			04	Institusi pendidikan vokasi yang unggul, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor yang unggul, pelatihan dan talent management Aparatur KESDM	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	21 Paket	8.281.185

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	05 Sarana dan prasarana pembelajaran yang kreatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan sektor	DAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	1503	Orang	48.117.015
	07 Optimalisasi TIK yang handal dan terintegrasi	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	31	produk	3.765.792
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.050.676
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	1.250.623
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1	Orang	263.750
		09	Pengembangan SDM Sektor ESDM Melalui Pelatihan Vokasi Sektor ESDM			179.849.557
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	235	NSPK	3.089.748
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	109.039.673
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	3603	Paket	2.442.438
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	3.351.540
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	6	Layanan	3.300.129
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	10	Laporan	1.157.852
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	10	Orang	3.698.925
		SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	4020	Orang	8.923.900
		SCH	Pelatihan Bidang Industri	27263	Orang	44.845.352
2 Program 2) Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi						703.626.536

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
	RM	703.217.791	01	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	01	Data, Informasi, Rekomendasi, dan Layanan Mitigasi Bencana Geologi		703.626.536
	PNBP	408.745	02	Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	41 Rekomendasi Kebijakan	21.097.489
			03	Data dan Peta Geologi yang Berkualitas	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	234 Rekomendasi Kebijakan	24.381.332
					BMA	Data dan Informasi Publik	32 layanan	20.696.522
					PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	302 Rekomendasi Kebijakan	578.122.454
					PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	135 Rekomendasi Kebijakan	51.802.579
					QMA	Data dan Informasi Publik	14 layanan	7.526.160
3 Program	3) Program Energi dan Ketenagalistrikan							3.231.299.390
	RM	3.155.060.799	05	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	01	Ketahanan Energi Migas, Kontribusi Sub Sektor Migas, Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal, Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Migas yang Efektif, Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah L		1.874.205.641
	PNBP	76.238.591	06	Optimalisasi Kontribusi Sub Sektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	31 Rekomendasi Kebijakan	22.073.423
			07	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	ACA	Perizinan Produk	35 Produk	6.884.792
			08	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	AEA	Koordinasi	20 kegiatan	3.149.596

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	09	Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	2.088.896
	11	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	130	Badan usaha	40.000
	12	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	735	Badan usaha	15.899.000
	13	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2382	Produk	1.687.542
	21	Tersedianya BBM di Seluruh Wilayah NKRI dan Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri	BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3	Lembaga	199.860
	22	Terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa	BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1985	Badan Usaha	14.953.084
	23	Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	FAG	Pengawasan Pembangunan	5	Laporan	48.335.385
	31	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	21	Rekomendasi Kebijakan	10.399.495
	32	Optimalisasi kontribusi Subsektor EBTKE yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	176776	Unit	1.739.957.473
	33	Layanan Subsektor EBTKE yang Optimal	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1	Produk	537.095
	34	Pembinaan dan Pengawasan Subsektor EBTKE yang Efektif	UAD	Perencanaan dan Penganggaran	10	Layanan	8.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	41 Meningkatnya kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	21	Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Koservasi Energi yang Berkelanjutan			1.234.357.214
	42 Optimalisasi Kontribusi Sektor Migas Wilayah Kewenangan Aceh yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	30767	Rekomendasi Kebijakan	7.409.515
	43 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif	AEA	Koordinasi	5	kegiatan	1.426.147
		AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	1.502.045
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	300	orang	724.800
		AEH	Promosi	5	promosi	3.137.074
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14	NSPK	5.355.627
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1369	layanan	1.650.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	1.295.649
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	6	Badan usaha	6.856.511
		BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3	Industri	1.207.005
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	22031	Unit	473.722.142
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	5	Produk	1.331.067
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga	1.902.400
		BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	11	Badan Usaha	6.267.274
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan	10.439.097

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan	3.024.461
		FAG	Pengawasan Pembangunan	6	Laporan	46.509.150
		PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	24	Rekomendasi Kebijakan	25.300.610
		PDA	Standarisasi Produk	2	produk	637.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	43204	Unit	631.970.300
		QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	120	Produk	1.730.340
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	67	Lembaga	959.000
		31	Peraturan, Ketetapan, serta Dokumen Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa			76.238.591
		AAH	Peraturan lainnya	35	peraturan	19.311.015
		ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	7	Rekomendasi Kebijakan	11.322.110
		ACD	Perizinan Lembaga	1	Institusi	702.462
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3	Produk	18.959.464
		BMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	11.737.582
		PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	15800	Rekomendasi Kebijakan	1.754.020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PCD	Perizinan Lembaga	1	Institusi	2.555.872
		QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	76	Badan usaha	5.800.000
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	253	Lembaga	4.096.066
		40	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional			42.159.194
		ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	7	Rekomendasi Kebijakan	4.423.381
		ACD	Perizinan Lembaga	34	Institusi	2.606.584
		ADC	Sertifikasi Produk	5000	produk	555.664
		ADE	Akreditasi Lembaga	10	Lembaga	651.834
		ADF	Sertifikasi Lembaga	600	Lembaga	399.000
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	11900	Orang	1.383.834
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	18	NSPK	1.371.838
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	50	layanan	499.149
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	3	Perkara	1.123.615
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	157	Produk	4.526.031
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10	Lembaga	750.000
		BKB	Pemantauan produk	6	laporan	1.007.956
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	256.895

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	10 Rekomendasi Kebijakan	22.003.412
					PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	600.001
					41	Penemuan Sumber Daya dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi serta Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kewenangan Aceh.		4.338.750
					ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	24 Rekomendasi Kebijakan	795.669
					BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	238 Badan Usaha	3.543.081
4 Program	4)	Program Pertambangan Mineral dan Batubara						160.194.752
	PNBP	160.194.752	21	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Mineral dan Batubara Nasional	01	Kemandirian dan Ketahanan Mineral dan Batubara Nasional, Ketersediaan Produk Mineral, dan Pembinaan dan Pengawasan Sektor Minerba yang Efektif		138.680.679
			22	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	AAH	Peraturan lainnya	8 peraturan	4.905.980
			23	Optimalisasi Kontribusi Sektor Minerba yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	88 Rekomendasi Kebijakan	87.410.519
			24	Pembinaan dan Pengawasan Sektor Minerba yang Efektif	AEA	Koordinasi	2 kegiatan	2.122.573

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	15 NSPK	5.416.489
					BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2307 Badan usaha	24.839.197
					PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	8 Rekomendasi Kebijakan	13.985.921
					02	Kontribusi Sektor Minerba yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan		21.514.073
					ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	12 Rekomendasi Kebijakan	21.514.073
5 Program	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						326.352.191
	RM	97.352.191	01	Optimalisasi Kontribusi Litbang Yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	01	Peningkatan kualitas litbang dan implementasi/komersialisasi hasil litbang dalam rangka mendukung kemandirian dan ketahanan energi		326.352.191
	BLU	229.000.000	02	Layanan Litbang yang Optimal	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	12 Rekomendasi Kebijakan	26.073.940
			03	Penelitian dan Pengembangan Teknologi yang Produktif	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	786.131
			04	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Sektor ESDM	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8 layanan	247.226.047
			05	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	14 produk	25.151.012
			06	Sarana Laboratorium yang menerapkan sistem manajeman mutu	DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	2 Purwarupa	3.506.303
					DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	1 kekayaan intelektual	1.226.736

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					EAC	Layanan Umum	4 Layanan	2.564.500
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	4 Layanan	2.472.100
					PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Kebijakan	3.350.288
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	155 produk	13.995.134
6 Program	6) Program Dukungan Manajemen							2.317.144.313
	RM	2.057.820.580	01	Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	01	Kepastian hukum untuk Peningkatan Investasi, serta Peningkatan Kualitas Data, Teknologi Informasi, Pelayanan Informasi Publik dan Kerja Sama Sektor ESDM		85.761.140
	PNBP	259.323.733	03	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif	AAC	Peraturan Pemerintah	1 PP	300.043
			04	Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional	AAG	Peraturan Menteri	23 PerMen	1.522.492
			11	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	AAH	Peraturan lainnya	88 peraturan	657.828
			12	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	315.343
			13	Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas	EAG	Layanan Hukum	5 Layanan	6.571.794
			14	Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien, dan Memberikan Nilai Tambah	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1 Layanan	7.230.179
			15	Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	EAJ	Layanan Data dan Informasi	12 Layanan	69.163.461

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	16	Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas	02	Peningkatan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, serta penataan organisasi, tata laksana, dan manajemen perubahan			247.090.148
	17	Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	130.654.899
	18	Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	1.917.391
	19	Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	EAC	Layanan Umum	5	Layanan	2.742.221
	21	Terwujudnya Birokrasi Ditjen Migas Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	EAD	Layanan Sarana Internal	200	unit	5.000.000
	22	Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	EAF	Layanan SDM	18709	orang	20.234.042
	23	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	EAG	Layanan Hukum	4	Layanan	912.770
	24	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Migas yang Efektif	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	10	Layanan	8.245.231
	25	Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal (Dukman)	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	601.028
	27	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	EAJ	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	704.047
	28	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	EAK	Layanan Pengawasan Internal	190	Laporan	55.862.694
	29	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6	Laporan	4.987.937

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	30	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	753	Orang	11.130.079
	31	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	7	Dokumen	4.097.809
	32	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	03	Peningkatan kualitas perencanaan, administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan serta akuntabel di lingkungan KESDM			33.789.228
	34	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor EBTKE Yang Berkualitas	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	21	Layanan	14.044.673
	35	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor EBTKE yang Efektif	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	144	Laporan	4.626.091
	36	Terwujudnya birokrasi Subsektor EBTKE yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	8	Dokumen	15.118.464
	37	Organisasi EBTKE yang Fit dan SDM yang Unggul	04	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang akurat dan akuntabel			202.208.390
	38	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen EBTKE yang Optimal	EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	94.169.085
	43	Layanan Sektor Minerba yang Optimal	EAC	Layanan Umum	16	Layanan	30.061.086
	44	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor Mineral dan Batubara Yang Berkualitas	EAD	Layanan Sarana Internal	147	unit	69.216.014
	45	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor Minerba oleh Setditjen Minerba yang Efektif	EAE	Layanan Prasarana Internal	1454	unit	7.070.691

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	46	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Mineral dan Batubara	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	1.691.514
	47	Organisasi Ditjen Minerba yang Fit dan SDM Unggul	10	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional			132.822.556
	48	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Minerba yang Optimal	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	76.146.549
	49	Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional.	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.719.684
	50	Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN	EAC	Layanan Umum	4	Layanan	1.319.908
	53	Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan	EAD	Layanan Sarana Internal	20193	unit	1.962.130
	54	Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN	EAE	Layanan Prasarana Internal	45	unit	30.203.870
	55	Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral	EAF	Layanan SDM	270	orang	2.780.000
	56	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN	EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	2.511.217
	57	Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Layanan	6.521.685
	58	Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	4.143.331
	59	Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal	EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.527.512
	60	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Esien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Badan Litbang ESDM	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	19	Laporan	1.854.362

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	61	Pengelolaan Sistem Anggaran Badan Litbang ESDM yang Optimal	EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	7	Dokumen	1.132.308
	62	Organisasi Badan Litbang ESDM yang Fit dan SDM Unggul	21	--			177.873.781
	63	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Badan Litbang ESDM yang Efektif	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	120.285.491
	64	Kebijakan Pengembangan SDM Sektor ESDM yang menunjang kebijakan pengelolaan Sektor ESDM	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6	Layanan	2.688.639
	65	Optimalisasi TIK yang handal dan terintegrasi pada BPSDM ESDM.	EAC	Layanan Umum	11	Layanan	9.754.995
	66	Organisasi BPSDM yang Fit dan SDM Unggul	EAD	Layanan Sarana Internal	397	unit	7.898.755
	67	Pengelolaan Sistem Anggaran BPSDM ESDM yang Optimal.	EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	1.300.000
	68	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk BPSDM ESDM.	EAF	Layanan SDM	2100	orang	7.616.000
	69	Institusi Pendidikan Vokasi yang unggul, Pelatihan dan Sertifikasi tenaga kerja Sektor yang unggul, Pelatihan dan Talent management Aparatur KESDM	EAG	Layanan Hukum	5	Layanan	4.964.022
	70	Meningkatnya kualitas pelayanan	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.628.000
	71	Pengendalian Mutu yang Optimal	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	5	Layanan	3.647.075
	72	Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang kreatif dan efektif sesuai dengan kebutuhan Sektor	EAJ	Layanan Data dan Informasi	6	Layanan	3.740.889

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	73	Terselenggaranya Pengembangan SDM Sektor ESDM yang kompeten dan Profesional	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	625.768
	75	Optimalisasi Kontribusi Sektor Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	11	Dokumen	11.642.397
	76	Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi	FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1	Lembaga	1.350.000
	77	Pengawasan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Badan Geologi yang Efektif	PAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	731.750
	78	Terwujudnya birokrasi Badan Geologi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	32	Terselenggaranya Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Energi Nasional yang optimal			7.828.392
	79	Organisasi Badan Geologi yang Fit dan SDM Unggul	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	6	Rekomendasi Kebijakan	2.550.284
	80	Pengelolaan Sistem Anggaran Badan Geologi yang Optimal	EAF	Layanan SDM	53	orang	34.366
	82	Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	1.248.556
	83	Layanan BPH Migas yang Optimal	EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	943.944
	84	Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	4	Laporan	68.736
	85	Organisasi yang Fit dan SDM BPH Migas yang Unggul	EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	34.366
	86	Terwujudnya birokrasi BPH Migas yang efektif dan efisien	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4	Laporan	1.998.282
	87	Pengelolaan sistem anggaran BPH Migas yang optimal	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	949.858

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	89	Tersedianya Perencanaan BPMA yang Berkualitas	34	Terselenggaranya Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Dewan Energi Nasional yang optimal			41.983.279
	90	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Sektor Hulu Migas Kewenangan Aceh (Internal)	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	33.000.000
	91	Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia BPMA yang Unggul	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	381.442
	92	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BPMA yang Efektif (Internal)	EAC	Layanan Umum	4	Layanan	2.292.371
	93	Pengelolaan Sistem Anggaran BPMA yang Optimal	EAD	Layanan Sarana Internal	64	unit	1.930.520
	94	Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM...	EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.295.980
	95	Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	EAF	Layanan SDM	95	orang	409.173
	96	Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	429.621
	97	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	640.585
	98	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	250.000
	99	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	95.000
			EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	703.587
			EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	555.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		35	Peningkatan kualitas litbang dan implementasi/komersialisasi hasil litbang dalam rangka mendukung ketahanan energi dan peningkatan nilai tambah			195.418.374
		EAA	Layanan Perkantoran	10	Layanan	177.984.820
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6	Layanan	1.354.797
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	1.196.687
		EAD	Layanan Sarana Internal	119	unit	1.657.174
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.000.000
		EAF	Layanan SDM	1454	orang	5.682.095
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	121.200
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	1.044.532
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	716.466
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	857.022
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6	Laporan	1.545.134
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	7	Dokumen	2.258.447
		43	Peningkatan Layanan Internal Ditjen Minerba			298.008.349
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	197.053.371
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	5	Layanan	2.443.618
		EAC	Layanan Umum	10	Layanan	6.840.133

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	1503	unit	6.814.770
		EAF	Layanan SDM	1106	orang	6.849.393
		EAG	Layanan Hukum	4	Layanan	8.392.014
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Layanan	13.286.349
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	7.404.941
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	12	Layanan	10.472.175
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	2.523.865
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1106	Orang	15.364.258
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	21	Dokumen	20.563.462
		50	Administrasi Kesekretariatan Bidang Pengembangan SDM ESDM			152.465.995
		ADE	Akreditasi Lembaga	7	Lembaga	399.465
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12	NSPK	229.640
		EAA	Layanan Perkantoran	12	Layanan	118.075.014
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	9	Layanan	3.278.629
		EAC	Layanan Umum	7	Layanan	3.863.630
		EAD	Layanan Sarana Internal	22	unit	4.500.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	570	unit	2.000.000
		EAF	Layanan SDM	1363	orang	6.264.706

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	755.566
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	62.080
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	508.626
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	2.762.844
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13	Laporan	2.296.190
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	391	Orang	4.121.033
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	25	Dokumen	3.348.572
		51	Pelatihan Aparatur Sipil Negara KESDM			31.920.022
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	6908	Orang	31.920.022
		52	Administrasi Kesekretariatan Bidang Pendidikan Vokasi Sektor ESDM			40.807.774
		EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	33.096.675
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.071.466
		EAC	Layanan Umum	5	Layanan	1.870.625
		EAF	Layanan SDM	21	orang	1.017.222
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	60.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	530.860
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2	Orang	1.371.376
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	1.789.550

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		56	Peningkatan Tata Kelola, Manajemen dan akuntabilitas Ditjen EBTKE			110.499.353
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	640.000
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	79.076.000
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.949.280
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	4.043.465
		EAD	Layanan Sarana Internal	2	unit	4.500.000
		EAF	Layanan SDM	339	orang	2.844.555
		EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	2.896.033
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	2.381.182
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	2.513.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	843.700
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9	Dokumen	8.812.138
		62	Peningkatan Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Stakeholder			194.935.609
		BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	Badan usaha	12.100.000
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1087	Badan usaha	7.200.301
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	2.156.614
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	78.370.108
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.648.062

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	2.500.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	1245	unit	12.305.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	9456	unit	41.922.560
		EAF	Layanan SDM	343	orang	8.467.037
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	5.000.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	926.963
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	12.348.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	3.403.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	2.722.872
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	6	Dokumen	2.865.092
		75	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Geologi			298.972.203
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	180.795
		EAA	Layanan Perkantoran	13	Layanan	247.491.524
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	5	Layanan	3.501.739
		EAC	Layanan Umum	7	Layanan	9.950.827
		EAD	Layanan Sarana Internal	231	unit	7.221.569
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	615.149

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	134	orang	7.860.698
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	1.384.895
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	1.005.749
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	869.215
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	4.635.853
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	545.835
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	2.388.009
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	4	Orang	2.718.739
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	10	Dokumen	8.601.607
		89	Peningkatan Dukungan Manajemen Hulu Migas Aceh			64.759.720
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	61.335.758
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	652.284
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	160.972
		EAF	Layanan SDM	86	orang	739.848
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	357.504
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	420.316
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	420.318
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	172.720

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN							45.664.041.141
2 Fungsi	04	EKONOMI							43.473.563.416
	10	PENDIDIKAN							2.190.477.725
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							2.096.036.490
	2)	Program Infrastruktur Konektivitas							33.955.357.187
	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							112.093.397
	4)	Program Dukungan Manajemen							9.500.554.067
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							2.096.036.490
	RM	1.152.036.458	01	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten	01	Terwujudnya Peningkatan Lulusan Diklat Transportasi yang Kompeten dan Berdaya Saing			2.096.036.490
	PNBP	18.884.418			AEC	Kerja sama	190	Kesepakatan	22.319.343
	BLU	925.115.614			AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	313	NSPK	76.804.755
					BMA	Data dan Informasi Publik	96	layanan	42.354.639
					DAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	303	Orang	4.057.530
					DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	242149	Orang	545.662.809
					EAD	Layanan Sarana Internal	100	unit	4.945.410
					QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	70	Orang	33.263.742

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					RAA	Sarana Bidang Pendidikan	542	Paket	65.325.647
					RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	290	unit	37.124.368
					SAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	28134	Orang	1.053.692.109
					SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	44170	Orang	101.981.357
					TAD	Layanan Sarana Internal	1619	unit	44.375.005
					TAE	Layanan Prasarana Internal	15	unit	64.129.776
2 Program	2)	Program Infrastruktur Konektivitas							33.955.357.187
	RM	23.478.764.908	01	Meningkatnya Konektivitas Transpotasi Nasional	01	Terwujudnya Konektivitas Masyarakat Terhadap Jasa Layanan Transportasi Udara			5.188.219.583
	PLN	807.116.574	02	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	3.300.000
	RMP		04	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	64	Produk	35.639.876
	PNBP	3.753.988.533			CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	81	Unit	12.122.510
	BLU	248.187.446			CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	13393	unit	2.725.373.362
	PBS	5.667.299.726			CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	52	unit	490.223.609
					RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	407	unit	1.921.560.226
					02	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Udara			640.686.853
					BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	45	Produk	33.489.804
					CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	18	Unit	197.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2688	layanan	606.999.449
		03	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara			1.369.516.519
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	20.253.881
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	136	Produk	200.115.981
		CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	133	Unit	583.286.236
		CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	108	unit	448.596.189
		CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	18	Unit	103.980.785
		CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	12	unit	13.283.447
		04	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Udara			1.252.218.018
		AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	25.778.655
		CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	2	unit	183.443.950
		CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	111	unit	303.987.588
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	209	Layanan	476.492.421
		EAC	Layanan Umum	6	Layanan	67.145.726
		EAD	Layanan Sarana Internal	269	unit	71.382.277
		EAE	Layanan Prasarana Internal	66	unit	49.987.589
		EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	9.483.479
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	27.236.131

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3 Layanan	37.280.202
		05	Terwujudnya Konektivitas Masyarakat Terhadap Jasa Layanan Transportasi Perkeretaapian		5.241.959.791
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	28 Rekomendasi Kebijakan	42.806.274
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK	223.255.776
		CAK	Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	3 Unit	102.315.716
		CBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	15 km	611.655.881
		CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	6 Unit	98.705.039
		PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	89.505.230
		RBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	171 km	4.073.715.875
		06	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Perkeretaapian		3.703.650.399
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	10 Rekomendasi Kebijakan	33.763.103
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2 NSPK	9.765.399
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6 layanan	79.490.854
		CBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	29 km	539.978.069
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	9 layanan	230.034.883

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		RBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	406	km	2.810.618.091
		07	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian			1.532.153.508
		ADC	Sertifikasi Produk	4	produk	22.370.147
		ADE	Akreditasi Lembaga	1	Lembaga	462.952
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	2	Orang	26.195.795
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	13.810.146
		CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	1	Unit	2.419.655
		CDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	2	km	235.775.153
		RDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	5634	km	1.231.119.660
		08	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian			137.741.696
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	8	Layanan	19.546.275
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	35.965.983
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	18.485.165
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	45	Laporan	63.744.273
		09	Terlaksananya Pemenuhan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut			3.303.380.271
		CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	196	unit	1.255.419.763
		CCE	OM Sarana Bidang Konektivitas Laut	95	Unit	3.163.523

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	1018	unit	509.580.853
		RBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	19	unit	1.535.216.132
		10	Terlaksananya Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Transportasi Laut			2.169.622.886
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22	layanan	57.398.140
		CAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut	7	Unit	211.198.073
		CCE	OM Sarana Bidang Konektivitas Laut	20	Unit	123.438.953
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	153	layanan	1.777.587.720
		11	Terlaksananya Pemenuhan Infrastruktur Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut			1.813.039.916
		CAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut	132	Unit	420.142.725
		CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	49	unit	94.015.936
		CCE	OM Sarana Bidang Konektivitas Laut	599	Unit	914.879.650
		CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	81	unit	36.669.217
		RAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut	30	Unit	347.332.388
		12	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Laut			823.236.294
		AEA	Koordinasi	1156	kegiatan	416.649.161
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	114	NSPK	236.798.989
		BMA	Data dan Informasi Publik	23	layanan	45.702.730

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	1563	unit	119.895.104
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	4.190.310
		13	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Jabodetabek			6.273.100
		CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	1	Unit	6.273.100
		14	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Jabodetabek			138.537.971
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	23	layanan	58.172.396
		RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	1	Unit	15.371.962
		RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	2	Unit	64.993.613
		15	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jabodetabek			24.034.788
		RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	9	Unit	24.034.788
		16	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek			95.577.227
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	43	Rekomendasi Kebijakan	67.622.502
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	226	orang	1.919.008
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	8.019.875
		BKB	Pemantauan produk	32	laporan	18.015.842
		17	Terwujudnya Konektivitas Masyarakat Terhadap Jasa Layanan Transportasi Darat			2.776.836.221

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	99.000.000
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	200	Unit	100.000.000
		CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	49	Unit	277.362.128
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	48	layanan	1.027.180.702
		RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	6	Unit	174.330.474
		RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	43	Unit	1.098.962.917
		18	Terwujudnya Kinerja Layanan Transportasi Darat			1.542.266.515
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	11	Unit	196.223.645
		CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	1	Unit	6.180.350
		CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	1	Unit	20.000.000
		CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	196	Unit	799.286.969
		RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	23	Unit	187.075.551
		RBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	19	Unit	333.500.000
		19	Terwujudnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat			1.524.830.227
		CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	372	Unit	240.284.697
		CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	3	Unit	86.938.972
		CCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	31	Unit	187.850.000
		CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	140	Unit	242.523.711

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					PEH	Promosi	26	promosi	16.839.640
					RAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat	291	Unit	750.393.207
					20	Terwujudnya Pemenuhan Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat			671.575.404
					ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	66	Rekomendasi Kebijakan	108.111.000
					EAD	Layanan Sarana Internal	17	unit	300.241.437
					EAE	Layanan Prasarana internal	2	unit	2.919.819
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	48	Laporan	260.303.148
3 Program	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							112.093.397
	RM		112.093.397	01 Optimalisasi Kemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan	01	Riset Kebijakan Transportasi			60.910.979
					ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	49	Rekomendasi Kebijakan	53.088.228
					PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7	Rekomendasi Kebijakan	7.822.751
					02	Layanan Penunjang Teknis Riset Kebijakan Transportasi			51.182.418
					EAC	Layanan Umum	37	Layanan	51.182.418
4 Program	4)	Program Dukungan Manajemen							9.500.554.067

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	9.121.101.503	01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	01	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal			716.034.249
PNBP	21.923.075	02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	AAG	Peraturan Menteri	111	PerMen	8.301.444
BLU	357.529.489	03	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1	Rekomendasi Kebijakan	654.038
		04	Meningkatnya Pengawasan Intern Yang Memberikan Nilai Tambah	ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	3	Rekomendasi Kebijakan	1.852.689
				ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	4	Rekomendasi Kebijakan	4.915.000
				ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	3	Rekomendasi Kebijakan	1.567.171
				AEB	Forum	6	forum	2.482.610
				AEC	Kerja sama	12	Kesepakatan	22.985.290
				AED	Perjanjian	15	perjanjian	882.114
				AEE	Kemitraan	6	Kesepakatan	4.045.982
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2925	orang	8.703.721
				AEG	Konferensi dan Event	7	Kegiatan	1.557.790
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14	NSPK	5.166.007
				BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	90000	Orang	716.720

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	30	Perkara	5.321.902
		BCD	Perkara Hukum Badan Usaha	1	Perkara	127.584
		BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	4	Layanan	10.955.100
		BMA	Data dan Informasi Publik	8	layanan	8.263.013
		BMB	Komunikasi Publik	85	layanan	31.488.279
		EAA	Layanan Perkantoran	189	Layanan	258.927.865
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	29	Layanan	55.139.577
		EAC	Layanan Umum	10	Layanan	69.414.491
		EAD	Layanan Sarana Internal	575	unit	96.237.216
		EAE	Layanan Prasarana Internal	7	unit	12.697.068
		EAF	Layanan SDM	15055	orang	27.459.312
		EAG	Layanan Hukum	50	Layanan	1.872.924
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	35	Layanan	31.927.083
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	17.515.030
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	7.251.648
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	44	Laporan	16.294.543
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	475	Orang	1.311.038
		02	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat Jenderal			121.549.942

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	165.719
		AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	500.000
		AEE	Kemitraan	1	Kesepakatan	500.000
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	45.065.296
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	654.533
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	3.219.056
		EAD	Layanan Sarana Internal	31	unit	2.505.500
		EAF	Layanan SDM	1349	orang	884.004
		EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	1.938.546
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Layanan	2.401.413
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	1.607.417
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	3.161.556
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	503	Laporan	51.367.917
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	4.578.985
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	290	Orang	3.000.000
		03	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Ditjen Perhubungan Darat			1.130.350.696
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	15	Rekomendasi Kebijakan	19.786.279

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	54	Layanan	916.715.864
		EAD	Layanan Sarana Internal	106	unit	37.371.432
		EAE	Layanan Prasarana Internal	3	unit	11.550.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	144.927.121
		04	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Ditjen Perhubungan Laut			3.318.915.446
		AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	21.030.342
		EAA	Layanan Perkantoran	727	Layanan	3.004.692.743
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	319	Layanan	98.768.777
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	7.999.577
		EAD	Layanan Sarana Internal	6427	unit	106.667.082
		EAF	Layanan SDM	1	orang	35.342.084
		EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	13.598.308
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	9.954.845
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	17.458.068
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	3.403.620
		05	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Ditjen Perhubungan Udara			2.107.987.194

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	666	Layanan	1.617.192.815
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	474	Layanan	277.362.361
		EAC	Layanan Umum	228	Layanan	188.378.138
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8	Layanan	24.313.200
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	740.680
		06	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Ditjen Perkeretaapian			487.938.654
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	9	Rekomendasi Kebijakan	12.808.742
		EAA	Layanan Perkantoran	26	Layanan	190.730.420
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal	7	Layanan	8.743.548
		EAC	Layanan Umum	23	Layanan	107.619.733
		EAD	Layanan Sarana Internal	104	unit	85.540.786
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	19.808.667
		EAF	Layanan SDM	2	orang	9.293.566
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	2.177.029
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	3.422.320
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	6	Layanan	12.310.910

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	2.121.719
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	40	Laporan	33.361.214
		07	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Badan Litbang Perhubungan			85.899.774
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1	Rekomendasi Kebijakan	3.471.988
		AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	2.485.530
		EAA	Layanan Perkantoran	7	Layanan	48.172.407
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	10.781.300
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	9.694.555
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	6.154.877
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	5.139.117
		08	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengembangan SDM Perhubungan			1.445.714.105
		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	943.555
		AEC	Kerja sama	5	Kesepakatan	1.679.249
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11	NSPK	7.807.083
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	377.260

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	86	Layanan	1.062.663.732
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	16.862.768
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	14.001.601
		EAD	Layanan Sarana Internal	135	unit	20.053.504
		EAE	Layanan Prasarana Internal	11	unit	31.713.356
		EAF	Layanan SDM	14190	orang	85.606.102
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	469.036
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	281	Layanan	198.899.041
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	2.325.119
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	8	Layanan	2.312.699
		09	Terwujudnya Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek			86.164.007
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	54.279.603
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	8.058.345
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	976.930
		EAD	Layanan Sarana Internal	250	unit	5.107.500
		EAF	Layanan SDM	427	orang	5.776.770
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	2.622.356

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	6.165.750
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	12	Dokumen	3.176.753

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							81.534.001.080
2 Fungsi	10	PENDIDIKAN							81.534.001.080
3 Program	1)	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun							11.868.301.547
	2)	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan							1.087.702.794
	3)	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran							12.269.248.017
	4)	Program Pendidikan Tinggi							28.205.232.540
	5)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							4.669.792.391
	6)	Program Dukungan Manajemen							23.433.723.791
1 Program	1)	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun							11.868.301.547
RM		11.868.301.547	31	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	02	Meningkatnya penerima bantuan pembiayaan pendidikan dasar menengah yang tepat sasaran			9.869.575.809
					BEI	Bantuan Lembaga	23	Lembaga	197.143.109
					QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	17927992	Orang	9.672.432.700
					03	Perluasan akses afirmasi pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah			1.998.725.738
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1530	Lembaga	152.121.858
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3039	Lembaga	196.430.248

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	102177	Orang	82.610.657
					QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	8895	Orang	120.121.271
					RAA	Sarana Bidang Pendidikan	16858	Paket	1.447.441.704
2 Program	2)	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan							1.087.702.794
	RM	1.082.353.025	61	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	13	Bahasa dan Sastra Terkembangkan, Terbina, dan Terlindungi			254.956.709
	PNBP	5.349.769	62	Terwujudnya pelindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4565	Lembaga	26.207.828
			63	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1834	produk	129.924.541
			64	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	11	model	4.681.163
			65	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	200	Lembaga	27.404.975
			66	Meningkatnya budaya literasi	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25249	Orang	45.478.431
			67	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	91	model	21.259.771
			68	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	15	Pemajuan Kebudayaan			832.746.085
					ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	359	Rekomendasi Kebijakan	29.161.036
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2700	orang	5.742.730

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	32	NSPK	15.300.000
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	500	Orang	11.500.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	9	layanan	5.570.633
		CBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1	unit	39.933.141
		CDN	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2	unit	9.725.655
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1331	Orang	9.176.000
		PEG	Konferensi dan Event	216	Kegiatan	195.940.592
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	603291	Orang	47.521.476
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	7.400.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	974	Lembaga	30.968.457
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4111	Orang	37.951.847
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	150	Kelompok Masyarakat	79.360.200
		QMA	Data dan Informasi Publik	1721	layanan	72.291.817
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	4	unit	41.000.000
		RDN	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	62191	unit	138.744.535
		SCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1325	Orang	6.957.966
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	3	model	7.050.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	364	Desa	41.450.000
3 Program	3)	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran							12.269.248.017
	RM	12.268.505.524	21	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	01	Guru dan tenaga kependidikan yang profesional			796.899.517
	PNBP	742.493	22	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	20438	Orang	320.449.484
			23	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah (pauddasmen)	PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	400	Orang	7.393.950
			24	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	50000	Orang	386.946.081
			25	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional	SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	5318	Orang	82.110.002
			26	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	02	Guru dan tenaga kependidikan yang terlatih dan berkompeten			1.041.551.555
			27	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	54020	Orang	321.912.311
			28	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	31451	Orang	607.580.058
			29	Meningkatnya partisipasi peserta Asesmen Nasional Terstandar	SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	7	model	112.059.186
			30	Meningkatnya Internalisasi Nilai Penguatan Karakter	03	Guru dan tenaga kependidikan PAUD yang memenuhi standar dan meningkat performanya			91.220.115

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2600	Orang	9.448.833
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	43.376.950
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4003	Orang	31.469.132
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.925.200
		04	Guru dan tenaga kependidikan Dikdas yang memenuhi standar dan meningkat performanya			139.328.847
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3280	Orang	25.432.322
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	68	Daerah (Prov/Kab/Kota)	70.291.700
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9625	Orang	35.804.395
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.800.430
		05	Guru dan tenaga kependidikan Dikmen dan Diksus yang memenuhi standar dan meningkat performanya			107.134.684

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3500	Orang	45.012.164
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	43.376.950
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7468	Orang	12.328.470
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.417.100
		06	Perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dan buku pendidikan yang berkualitas			150.393.331
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	7	Rekomendasi Kebijakan	5.215.170
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	370	Orang	5.289.716
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	2.069.069
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	4515	model	137.819.376
		07	Standar Mutu Pendidikan dan Akreditasi			807.888.301
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	8	Rekomendasi Kebijakan	14.359.960
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1096	Lembaga	148.083.515
		PDE	Akreditasi Lembaga	94912	Lembaga	188.758.671

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	400151	Lembaga	456.686.155
		08	Pemanfaatan Penelitian Arkeologi dalam Pelestarian Pemajuan Pendidikan dan Kebudayaan			50.237.335
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	151	Rekomendasi Kebijakan	42.275.254
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	22	model	7.962.081
		09	Pemanfaatan Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan			35.623.762
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	50	Rekomendasi Kebijakan	35.623.762
		10	Tersedianya inovasi asesmen dan pembelajaran yang berkualitas			157.578.158
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	12	Rekomendasi Kebijakan	2.424.000
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	5	Rekomendasi Kebijakan	34.393.904
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	271523	Lembaga	79.784.736
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	18222	model	40.975.518
		11	Internalisasi Nilai Penguatan Karakter			88.064.388
		QMB	Komunikasi Publik	3	layanan	88.064.388
		12	Peningkatan prestasi peserta didik dan satuan pendidikan			296.091.758

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	12.710.610
		SBA	Pendidikan Tinggi	4833	Orang	46.020.100
		SBB	Pendidikan Menengah	6634	Orang	158.667.073
		SBC	Pendidikan Dasar	3196	Orang	78.693.975
		13	Peningkatan Layanan Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara			35.707.559
		AEE	Kemitraan	60	Kesepakatan	1.437.991
		BMA	Data dan Informasi Publik	7	layanan	7.588.028
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	10360	Orang	12.496.747
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	67	model	10.220.730
		PEE	Kemitraan	5	Kesepakatan	200.130
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	2000	Orang	1.977.974
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2	model	1.785.959
		14	Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran			300.085.053
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	4	Sistem Informasi	300.085.053
		15	Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah (pauddasmen)			868.317.812

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2712	Lembaga	81.621.939
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	69472	Lembaga	786.695.873
					16	Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru Non PNS			7.303.125.842
					QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	363573	Orang	7.303.125.842
4 Program	4)	Program Pendidikan Tinggi							28.205.232.540
	RM	15.569.894.940	01	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi	01	Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang Meningkat			385.624.485
	PLN	995.587.939	02	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	ADD	Standarisasi Lembaga	53	Lembaga	14.500.000
	RMP	92.572.910			BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	12000	Orang	10.000.000
	PNBP	1.771.491.150			BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	450	Lembaga	15.000.000
	BLU	8.831.563.011			BEI	Bantuan Lembaga	543	Lembaga	31.800.000
	PBS	944.122.590			BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	42682	Orang	100.000.000
					PDD	Standarisasi Lembaga	660	Lembaga	8.000.000
					QEI	Bantuan Lembaga	2080	Lembaga	64.500.000
					QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	72440	Orang	124.824.485
					RAA	Sarana Bidang Pendidikan	1	Paket	17.000.000
					02	Meningkatnya Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi			23.035.622.093
					BEI	Bantuan Lembaga	208	Lembaga	750.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	211	unit	300.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	Lembaga	118.134.202
		QEI	Bantuan Lembaga	143	Lembaga	1.460.674.277
		QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1116192	Orang	9.600.284.493
		RAA	Sarana Bidang Pendidikan	3155	Paket	1.016.910.676
		RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	5011	unit	3.014.788.242
		RCA	OM Sarana Bidang Pendidikan	1428	Paket	75.626.998
		RDJ	OM Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	506	unit	89.066.086
		SBA	Pendidikan Tinggi	1351659	Orang	3.864.428.717
		TAA	Layanan Perkantoran	196	Layanan	2.830.046.928
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	29653	Orang	215.361.474
		03	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pendidikan Tinggi			281.655.200
		ADD	Standarisasi Lembaga	138	Lembaga	17.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4675	Lembaga	100.000.000
		PDE	Akreditasi Lembaga	3435	Lembaga	60.000.000
		QEI	Bantuan Lembaga	80	Lembaga	70.000.000
		QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	528	Orang	34.655.200
		04	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi			319.156.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					DBE	Pendidikan Non Gelar	475	Orang	17.250.000
					PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	320	Orang	10.000.000
					PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	7100	Orang	10.000.000
					QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	3748	Orang	270.156.000
					SBA	Pendidikan Tinggi	2475	Orang	11.750.000
					05	Meningkatnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri			4.183.174.762
					BEI	Bantuan Lembaga	105	Lembaga	908.951.385
					QEI	Bantuan Lembaga	362	Lembaga	3.274.223.377
5 Program	5)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							4.669.792.391
	RM	3.330.804.979	41	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	01	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri			4.669.792.391
	PNBP	643.534.053	42	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1030	Lembaga	56.794.150
	BLU	99.095.192	43	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	109450	Orang	80.765.192
	PBS	596.358.167	44	Terwujudnya pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	PEC	Kerja sama	250	Kesepakatan	25.112.483
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4661	Lembaga	1.930.346.097

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	66676 Orang	296.201.000
					QEI	Bantuan Lembaga	390 Lembaga	517.682.918
					QMA	Data dan Informasi Publik	5 layanan	29.443.581
					RAA	Sarana Bidang Pendidikan	762 Paket	384.458.277
					RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	1 unit	18.560.000
					RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	645 unit	432.561.942
					SBA	Pendidikan Tinggi	151165 Orang	418.789.537
					SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	24881 Orang	431.106.852
					SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	48 model	47.970.362
6 Program	6)	Program Dukungan Manajemen						23.433.723.791
	RM	23.428.783.746	11	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	01	Layanan Audit Internal yang Efektif dan Efisien		87.238.659
	PNBP	4.940.045	12	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	EAK	Layanan Pengawasan Internal	237 Laporan	87.238.659
			13	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	07	Tata Kelola Kementerian yang transparan dan akuntabel		23.303.116.136
			15	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	5 Rekomendasi Kebijakan	7.963.355
			16	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	5.646.634
			17	Terwujudnya budaya sensor mandiri sebagai gerakan nasional	AEG	Konferensi dan Event	2 Kegiatan	1.182.038

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	18 Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22	layanan	77.891.398
		BEI	Bantuan Lembaga	1540	Lembaga	81.001.930
		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	4440	Orang	149.072.808
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	13.520.406
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	677	model	74.019.152
		EAA	Layanan Perkantoran	1179	Layanan	20.844.719.169
		EAC	Layanan Umum	350	Layanan	1.009.339.569
		EAD	Layanan Sarana Internal	7796	unit	293.043.523
		EAE	Layanan Prasarana Internal	78	unit	221.554.985
		EAF	Layanan SDM	61569	orang	29.340.698
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	24.843.345
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	17.362.526
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	231.688.323
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	6.113.794
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	12	Laporan	9.116.704
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	9534	Orang	73.000.000
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	7	Dokumen	23.673.507

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	13.032.401
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	2	Layanan	48.697.094
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan	24.500.000
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	22	Laporan	22.792.777
		10	Kualitas Sensor Film dan Iklan Film			43.368.996
		BKB	Pemantauan produk	34	laporan	4.626.671
		BMB	Komunikasi Publik	3	layanan	7.725.000
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	24.664.941
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	3.352.884
		EAD	Layanan Sarana Internal	157	unit	807.500
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.000.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	58	Orang	1.192.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	024	KEMENTERIAN KESEHATAN						84.299.613.500
2 Fungsi	07	KESEHATAN						81.996.874.144
	10	PENDIDIKAN						2.302.739.356
3 Program	1)	Program Kesehatan Masyarakat						1.778.171.067
	2)	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						66.853.183.146
	3)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						2.594.568.761
	4)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						2.943.742.053
	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						454.673.219
	6)	Program Dukungan Manajemen						9.675.275.254
1 Program	1)	Program Kesehatan Masyarakat						1.778.171.067
	RM	1.778.171.067	01	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat	01	Penanggulangan Kurang Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil		750.231.553
					AEA	Koordinasi	8 kegiatan	7.000.000
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK	1.200.000
					CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	5.000.000
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	35 Laporan	1.600.000
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.900.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QEA	Bantuan Masyarakat	1155368	Orang	683.500.000
		QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	313	laporan	25.582.614
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	3464	Orang	23.448.939
		02	Kabupaten/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja			89.575.033
		AEA	Koordinasi	37	kegiatan	3.898.536
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	380	orang	1.432.900
		AEG	Konferensi dan Event	8	Kegiatan	4.134.887
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14	NSPK	2.653.508
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	512	Unit	2.314.603
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	13857	orang	20.568.532
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	2.921.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	2	Unit	8.200.000
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1553	Orang	6.626.354
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2558	Daerah (Prov/Kab/Kota)	36.824.713
		03	Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan			350.655.991
		AEA	Koordinasi	1063	kegiatan	59.711.253

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12	NSPK	1.856.200
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	5999222	Paket	74.761.065
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	31693	Orang	123.613.346
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	127	Laporan	5.528.777
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1510	Daerah (Prov/Kab/Kota)	85.185.350
		04	Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas			256.614.892
		AEE	Kemitraan	60	Kesepakatan	1.382.060
		AEG	Konferensi dan Event	77	Kegiatan	8.333.987
		PEA	Koordinasi	262	kegiatan	29.953.167
		PEE	Kemitraan	1	Kesepakatan	9.600
		PEH	Promosi	141	promosi	106.403.305
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	376.300
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	95782	Kelompok Masyarakat	93.084.408
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	13975	Orang	17.072.065
		05	Desa/Kelurahanan dengan stop buang air besar sembarangan			331.093.598

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AAG	Peraturan Menteri	3	PerMen	150.000
		AEA	Koordinasi	6	kegiatan	4.719.915
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1300	orang	1.886.114
		AEG	Konferensi dan Event	6	Kegiatan	1.893.975
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9	NSPK	450.000
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	804	Unit	3.110.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	899	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.654.218
		PAD	Peraturan Presiden	1	PerPres	50.000
		PEA	Koordinasi	188	kegiatan	34.973.000
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3903	orang	7.245.635
		PEG	Konferensi dan Event	9	Kegiatan	5.904.741
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	17	NSPK	850.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	654	Unit	18.102.000
		QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	1660	Kelompok Masyarakat	221.500.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1990	Daerah (Prov/Kab/Kota)	24.604.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
2 Program	2) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN							66.853.183.146
	RM	52.991.506.685	01	Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	01	Tata Keloia Jaminan Kesehatan Nasional		48.787.200.000
	PLN	448.851.000	02	meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	QEA	Bantuan Masyarakat	96800000 Orang	48.787.200.000
	RMP		03	meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan	02	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan		17.613.468.288
	PNBP	63.384.018	04	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	AAG	Peraturan Menteri	7 PerMen	2.091.025
	BLU	13.349.441.443			ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	21 Rekomendasi Kebijakan	3.015.599
					ACA	Perizinan Produk	5310 Produk	10.658.856
					ACD	Perizinan Lembaga	750 Institusi	994.632
					ADE	Akreditasi Lembaga	281 Lembaga	2.169.667
					ADF	Sertifikasi Lembaga	100 Lembaga	1.445.996
					AEA	Koordinasi	15 kegiatan	5.116.915
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1305 orang	18.550.869
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	42 NSPK	8.737.311
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1003 Orang	75.225.000
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5 layanan	44.055.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5545	Lembaga	42.999.159
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1210	Orang	3.509.102
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2283	Badan usaha	5.762.685
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	48	Produk	1.206.388
		BJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	2527	Unit	5.935.794
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	61516	Paket	4.306.872.123
		CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	104	Paket	4.227.259.305
		DCH	Pelatihan Bidang Industri	150	Orang	313.800
		EAC	Layanan Umum	120	Layanan	4.513.561.330
		EAD	Layanan Sarana Internal	6	unit	9.874.558
		EAE	Layanan Prasarana Internal	12706	unit	306.019.645
		EAF	Layanan SDM	3500	orang	74.007.440
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	35	Laporan	1.203.990
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	100	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.262.778
		PAG	Peraturan Menteri	1	PerMen	548.768
		PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1	Rekomendasi Kebijakan	510.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PDE	Akreditasi Lembaga	4012	Lembaga	1.663.148
		PEA	Koordinasi	30	kegiatan	5.138.276
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3014	orang	6.826.267
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	NSPK	4.914.433
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	351	layanan	47.223.419
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7159	Lembaga	20.612.544
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	156	Industri	22.075.074
		QEC	Bantuan Produk	24	Paket	3.137.820.109
		QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	4430	Produk	4.153.084
		RAB	Sarana Bidang Kesehatan	4	Paket	656.351.000
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	16	Laporan	1.650.746
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	722	Daerah (Prov/Kab/Kota)	26.131.954
		03	SDM kesehatan yang terpenuhi sesuai standar			452.514.858
		ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	42	Rekomendasi Kebijakan	20.291.447
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	20250	Orang	5.917.763
		AEB	Forum	4	forum	498.648

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	25 NSPK	2.756.547
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	760 Orang	31.103.259
					BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1890 Orang	71.680.332
					BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	60 Lembaga	3.204.799
					BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5 Orang	487.000
					DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	2200 Orang	3.128.038
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	45 Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.645.966
					PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	3.059.987
					PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	155000 Orang	13.041.268
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	10043 Orang	145.916.644
					QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	2155 Orang	137.783.160
3 Program	3)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						2.594.568.761
	RM	1.755.247.402	01	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	01	SDM yang ditingkatkan kompetensinya		2.594.568.761
	PNBP	224.925.920			ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	7 Rekomendasi Kebijakan	2.001.694
	BLU	614.395.439			ADA	Standarisasi Produk	59 produk	6.962.210

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ADB	Akreditasi Produk	200	produk	936.610
		ADE	Akreditasi Lembaga	122	Lembaga	25.508.149
		AEC	Kerja sama	830	Kesepakatan	12.987.153
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	104	NSPK	29.947.400
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	215	Lembaga	23.124.220
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	550	Orang	1.752.506
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1793	Kelompok Masyarakat	45.110.278
		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	7859	Orang	38.278.975
		BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	51	Lembaga	444.725.760
		BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	6	Lembaga	3.128.811
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	10590	Paket	342.634.651
		CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	37846	unit	125.464.771
		DBA	Pendidikan Tinggi	288000	Orang	1.008.678.935
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	15433	Orang	58.845.781
		DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	29886	Orang	177.013.449
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	47	produk	1.374.711
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	64	Purwarupa	3.936.512

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	1901	model	62.837.957
					DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	2	kekayaan intelektual	174.976
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	51	Layanan	12.536.462
					EAC	Layanan Umum	28	Layanan	13.997.615
					EAD	Layanan Sarana Internal	1113	unit	29.000.774
					EAF	Layanan SDM	5086	orang	11.670.177
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	79	Laporan	13.312.100
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	8	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.625.911
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	52	Lembaga	4.842.584
					QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1000	Orang	15.663.605
					SBA	Pendidikan Tinggi	500	Orang	1.322.510
					SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	8573	Orang	75.171.514
4 Program	4)	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit							2.943.742.053
	RM		2.864.086.606	01 Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, serta meningkatnya kesehatan jiwa	01	Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)			1.876.453.443

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
PNBP	79.655.447		AEA	Koordinasi	5	kegiatan	20.959
			AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	200	orang	6.887
			AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	314.290
			BAH	Pelayanan Publik Lainnya	74	layanan	4.619.673
			BMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	111.550
			CAB	Sarana Bidang Kesehatan	3	Paket	10.123.000
			EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	120	Orang	1.200.000
			FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	4	Daerah (Prov/Kab/Kota)	99.920
			PEA	Koordinasi	398	kegiatan	40.521.887
			PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	5506	orang	6.769.827
			PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9	NSPK	610.850
			QAH	Pelayanan Publik Lainnya	554	layanan	174.971.978
			QMA	Data dan Informasi Publik	25	layanan	3.653.450
			RAB	Sarana Bidang Kesehatan	30	Paket	1.407.045.854
			RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	15	Paket	838.667
			TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	72903	Orang	218.698.260

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	423	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.846.391
		02	Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria			181.711.476
		PEA	Koordinasi	168	kegiatan	29.722.620
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3571	orang	2.327.371
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	13	NSPK	1.469.223
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	504	layanan	31.165.568
		QMA	Data dan Informasi Publik	34	layanan	10.622.130
		RAB	Sarana Bidang Kesehatan	51	Paket	91.410.350
		RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	5	Paket	965.000
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1404	Orang	7.433.292
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	261	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.595.922
		03	Kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM			118.664.518
		PEA	Koordinasi	62	kegiatan	15.716.535
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3702	orang	5.516.262
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16	NSPK	2.944.152

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QMA	Data dan Informasi Publik	5	layanan	2.617.721
		RAB	Sarana Bidang Kesehatan	3053	Paket	60.281.683
		RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	2	Paket	5.802.500
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	32319	Orang	19.068.340
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	502	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.717.325
		04	Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan			334.640.147
		PEA	Koordinasi	255	kegiatan	20.503.410
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	5190	orang	11.496.162
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9	NSPK	2.968.648
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	874	layanan	23.771.551
		QMA	Data dan Informasi Publik	1017	layanan	99.461.150
		RAB	Sarana Bidang Kesehatan	75	Paket	132.535.805
		RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	10	Paket	2.795.300
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	3781	Orang	23.971.951
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	920	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17.136.170

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		05	Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan Napza			52.838.904
		PEA	Koordinasi	54	kegiatan	1.711.280
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3084	orang	9.233.355
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	1.490.420
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	10000	Orang	34.615.819
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	474	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.788.030
		06	Faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan			238.836.633
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	449306	Orang	24.422.756
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	38669	layanan	55.016.889
		RAB	Sarana Bidang Kesehatan	433	Paket	154.559.991
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1150	Orang	4.836.997
		07	Rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan			140.596.932
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	338	layanan	124.803.956
		QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	696	Unit	1.358.405
		QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	77561	Sampel	3.168.656

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				RAB	Sarana Bidang Kesehatan	85	Paket	8.190.899
				RCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	13	Paket	1.294.822
				SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	39	model	995.601
				SDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	1	kekayaan intelektual	4.000
				TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	261	Orang	780.593
5 Program	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						454.673.219
	RM	454.673.219	01 Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatannya untuk masukan kebijakan program kesehatan	01	Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan			454.673.219
				ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	70	Rekomendasi Kebijakan	3.996.612
				AEA	Koordinasi	16	kegiatan	2.820.866
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	702	orang	1.768.407
				BMA	Data dan Informasi Publik	203	layanan	3.017.554
				DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	28	produk	26.461.151
				DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	3	Purwarupa	1.557.120
				DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	26	model	19.378.287
				EAC	Layanan Umum	14	Layanan	76.525.383

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					EAD	Layanan Sarana Internal	209	unit	35.261.481
					EAE	Layanan Prasarana Internal	10	unit	146.853.539
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	11	produk	126.632.704
					SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	7	model	10.400.115
6 Program	6)	Program Dukungan Manajemen							9.675.275.254
	RM	9.632.339.885	01	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	01	Pembinaan pelaksanaan dukungan manajemen pembangunan kesehatan di daerah			76.391.990
	PLN	1.746.920	02	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan serta Tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi di Kementerian Kesehatan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	304.099
	RMP				EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.512.705
	PNBP	41.188.449			EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	11	Layanan	15.149.945
					EAC	Layanan Umum	1	Layanan	62.180
					EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	3.004.120
					EAF	Layanan SDM	1030	orang	938.874
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	8.400
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	17	Laporan	9.175.826
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	134	Orang	1.499.460
					FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	150	Orang	193.250

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	37	Layanan	28.092.197
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	46	Laporan	2.478.859
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11.972.075
		02	Tata kelola pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan			9.578.354.998
		AAA	Undang-Undang	2	UU	148.300
		AAC	Peraturan Pemerintah	1	PP	144.850
		AAD	Peraturan Presiden	5	PerPres	165.605
		AAG	Peraturan Menteri	40	PerMen	1.066.700
		AAH	Peraturan lainnya	66	peraturan	2.240.170
		ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	34	Rekomendasi Kebijakan	5.725.775
		ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	2	Rekomendasi Kebijakan	744.264
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	73004	Orang	15.571.357
		AEA	Koordinasi	243	kegiatan	36.201.924
		AEC	Kerja sama	30	Kesepakatan	921.890
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3610	orang	3.309.820

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEG	Konferensi dan Event	10	Kegiatan	6.790.959
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	50	NSPK	5.315.074
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1831	Orang	213.499.453
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	34	layanan	8.009.377
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	131	Kelompok Masyarakat	9.700.875
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	1	Unit	180.000.000
		BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1	Lembaga	3.600.000
		BHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	45	operasi	4.534.180
		BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	43	Orang	1.566.393
		BJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	65	Unit	7.093.341
		BMA	Data dan Informasi Publik	3	layanan	479.400
		BMB	Komunikasi Publik	20	layanan	25.748.473
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1584	Paket	503.362.773
		CBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	5833	unit	1.647.433
		CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	83	Paket	76.906.324
		DCK	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	68	Orang	836.144
		EAA	Layanan Perkantoran	717	Layanan	7.296.853.875

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	327	Layanan	81.616.818
		EAC	Layanan Umum	281	Layanan	171.323.174
		EAD	Layanan Sarana Internal	2332	unit	179.657.285
		EAE	Layanan Prasarana Internal	5566	unit	93.466.095
		EAF	Layanan SDM	137777	orang	80.333.013
		EAG	Layanan Hukum	224	Layanan	12.199.691
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	119	Layanan	23.838.724
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	85	Layanan	24.143.485
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	111	Layanan	166.580.589
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	8	Laporan	957.046
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	180	Laporan	69.167.899
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	4966	Orang	71.853.905
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	119.565
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan	4.996.767
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	621	Laporan	34.176.191
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	691	Laporan	39.028.666
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	300	Daerah (Prov/Kab/Kota)	35.785.335

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	8	Rekomendasi Kebijakan	6.343.318
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	221000	Orang	39.868.300
		QHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	35	operasi	4.162.317
		QMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	1.544.787
		SCK	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	584	Orang	4.447.164
		TAJ	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	2.500.930
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	25	Sistem Informasi	18.059.205
		03	Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Kementerian Kesehatan			20.528.266
		EAC	Layanan Umum	60	Layanan	212.700
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	2706	Laporan	20.315.566

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	025	KEMENTERIAN AGAMA							66.961.386.822
2 Fungsi	09	AGAMA							11.075.918.925
	10	PENDIDIKAN							55.885.467.897
3 Program	1)	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama							3.207.891.531
	2)	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun							14.054.367.181
	3)	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran							7.060.717.073
	4)	Program Pendidikan Tinggi							6.987.656.465
	5)	Program Dukungan Manajemen							35.650.754.572
1 Program	1)	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama							3.207.891.531
	RM	1.938.876.334	01	Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama	--	--			101.299.825
	PNBP	677.961.821	02	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	607	Lembaga	33.144.500
	BLU	8.839.676	03	Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	19381	Orang	67.965.325
	PBS	582.213.700	04	Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama	QEI	Bantuan Lembaga	4	Lembaga	190.000
			05	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama	02	Layanan Keagamaan Islam			2.660.361.183
			06	Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan	ADE	Akreditasi Lembaga	368	Lembaga	8.755.928

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	07 Meningkatnya jumlah penerimaan dana sosial keagamaan	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	551869	Orang	31.882.450
	08 Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1605	layanan	11.654.371
	09 Menguatnya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji khusus sesuai standar	BBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	9521	Kelompok Masyarakat	12.641.356
	11 Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3838	Lembaga	8.914.880
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	692560	Orang	435.491.701
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	800000	Unit	40.000.012
		BEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	2682	Kelompok Masyarakat	1.749.935
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13	Lembaga	7.260
		BMA	Data dan Informasi Publik	145	layanan	24.029.435
		BMB	Komunikasi Publik	2184	layanan	28.340.448
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	2	Layanan	16.700
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	68	Laporan	5.564.610
		PDC	Sertifikasi Produk	25000	produk	28.339.676
		PEC	Kerja sama	28	Kesepakatan	6.922.803
		PEE	Kemitraan	69	Kesepakatan	3.710.384
		PEG	Konferensi dan Event	1837	Kegiatan	41.382.849

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2648137	Orang	696.375.115
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	160	Lembaga	4.731.315
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	251	layanan	384.375.761
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	768	Lembaga	23.650.068
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	130275	Orang	563.909.969
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1710	Kelompok Masyarakat	26.239.225
		QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	120083	Keluarga	95.393.715
		QEI	Bantuan Lembaga	3172	Lembaga	170.781.216
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	80	Lembaga	5.500.001
		03	Layanan Keagamaan Katolik			91.281.489
		AEG	Konferensi dan Event	1	Kegiatan	3.500.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2453	Orang	6.441.333
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	285	Kelompok Masyarakat	5.611.639
		BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	2154	Keluarga	6.393.203
		BEI	Bantuan Lembaga	630	Lembaga	18.154.314
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8164	Orang	48.504.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	10193	Unit	2.677.000
		04	Layanan Keagamaan Kristen			196.423.953
		AEG	Konferensi dan Event	227	Kegiatan	13.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	64	Lembaga	4.500.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	14550	Orang	116.694.953
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	436	Kelompok Masyarakat	9.939.500
		BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	1272	Keluarga	4.236.700
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	1643	Unit	2.397.000
		BEI	Bantuan Lembaga	864	Lembaga	45.655.800
		05	Layanan Keagamaan Hindu			100.196.042
		AEG	Konferensi dan Event	131	Kegiatan	12.624.046
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	389	Lembaga	4.490.236
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	116	Kelompok Masyarakat	1.147.750
		BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	2158	Keluarga	4.269.470
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	3121	Unit	8.251.970
		BEI	Bantuan Lembaga	9	Lembaga	370.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9237	Orang	30.842.210
					QEI	Bantuan Lembaga	730	Lembaga	38.200.360
					06	Layanan Keagamaan Buddha			54.123.039
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1286	Lembaga	18.807.029
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3376	Orang	17.235.288
					QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	855	Kelompok Masyarakat	9.939.494
					QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	1881	Keluarga	2.857.158
					QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	2000	Unit	1.325.000
					QEI	Bantuan Lembaga	218	Lembaga	3.959.070
					07	Layanan Keagamaan Khonghucu			4.206.000
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	180	Orang	4.206.000
2 Program	2)	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun							14.054.367.181
	RM	12.554.367.181	01	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	01	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik			26.544.964
	PBS	1.500.000.000			BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	89	Unit	4.433.500
					BEI	Bantuan Lembaga	152	Lembaga	9.960.464
					CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	9	unit	2.955.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	6869	Orang	9.196.000
		02	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam			13.923.755.016
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	195	Orang	50.340.494
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	100	layanan	5.000.000
		BEI	Bantuan Lembaga	250	Lembaga	406.317.906
		BEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1625	Orang	3.250.000
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	1060	Paket	262.871.508
		CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	613	unit	1.335.422.842
		DBB	Pendidikan Menengah	2304	Orang	61.516.500
		QEI	Bantuan Lembaga	5000	Lembaga	100.000.000
		QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	12281767	Orang	11.699.035.766
		03	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu			34.822.001
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	34215	Unit	11.872.800
		QEI	Bantuan Lembaga	812	Lembaga	22.030.501
		QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1095	Orang	918.700
		04	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen			40.354.200
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	3	Unit	300.000
		BEI	Bantuan Lembaga	4	Lembaga	1.250.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	4	unit	6.218.800
					QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	33283	Orang	32.585.400
					05	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha			28.891.000
					CAA	Sarana Bidang Pendidikan	2	Paket	30.000
					QEI	Bantuan Lembaga	1030	Lembaga	20.969.000
					QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	721	Orang	450.000
					RAA	Sarana Bidang Pendidikan	246	Paket	7.442.000
3 Program	3)	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran							7.060.717.073
	RM	6.476.509.652	01	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	01	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik			73.013.779
	PLN	584.207.421	02	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa	BEI	Bantuan Lembaga	85	Lembaga	1.787.792
	RMP		03	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	30	Orang	20.000
			04	Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	PDE	Akreditasi Lembaga	3	Lembaga	300.000
			05	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	707	orang	240.000
			06	Menguatnya pendidikan karakter siswa	QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	24474	Orang	42.488.265
			07	Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	7325	Orang	28.177.722

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		02	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam			6.846.540.477
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2000	Orang	3.700.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9528	Orang	50.735.000
		BEI	Bantuan Lembaga	150	Lembaga	57.366.200
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4263	Lembaga	4.421.100
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1200	Orang	16.150.000
		PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	15656	Orang	108.500.000
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	400	Orang	1.587.543
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5010	Lembaga	19.948.700
		QEI	Bantuan Lembaga	33	Lembaga	4.000.000
		QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	474303	Orang	5.943.061.886
		QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	1	Lembaga	343.013.334
		SBA	Pendidikan Tinggi	1500	Orang	5.017.627
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	8536	Orang	263.719.087
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	11	model	25.320.000
		03	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu			36.529.645
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	75	Orang	1.775.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2074	orang	3.210.527

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	624	Lembaga	5.857.944
		BEI	Bantuan Lembaga	147	Lembaga	3.550.000
		BEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	50	Orang	150.000
		DBB	Pendidikan Menengah	110	Orang	175.000
		DBC	Pendidikan Dasar	70	Orang	100.000
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	13	model	1.902.735
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	421	orang	502.546
		QEI	Bantuan Lembaga	41	Lembaga	1.417.000
		QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1966	Orang	9.475.892
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	4918	Orang	8.413.001
		04	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Buddha			33.881.847
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	162	Lembaga	4.929.842
		BEI	Bantuan Lembaga	40	Lembaga	408.000
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	15	model	701.748
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	7119	orang	8.362.494
		QEI	Bantuan Lembaga	102	Lembaga	1.076.930
		QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	2861	Orang	16.384.660
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	8278	Orang	2.018.173

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					05	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen			65.835.500
					ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	700	Orang	5.250.000
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	58	Lembaga	2.069.500
					BEI	Bantuan Lembaga	246	Lembaga	2.090.000
					BEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	6212	Orang	39.778.598
					DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1666	Orang	3.005.000
					PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1158	orang	1.500.000
					QEI	Bantuan Lembaga	300	Lembaga	969.600
					QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	928	Orang	5.451.000
					SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	2525	Orang	5.221.802
					SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	5	model	500.000
					06	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu			4.915.825
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	56	Orang	4.519.825
					QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	127	Orang	396.000
4 Program	4)	Program Pendidikan Tinggi							6.987.656.465
	RM	2.581.029.423	01	Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	01	Layanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik			52.501.538
	PLN	76.159.496	02	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	700	orang	937.576
	RMP	18.436.000	03	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	BEI	Bantuan Lembaga	24	Lembaga	16.163.033

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
PNBP	1.020.125.161	04	Meningkatnya kualitas PTK yang bereputasi internasional	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	20	Paket	2.300.000
BLU	2.012.669.077	05	Meningkatnya kualitas pemanfaatan penelitian	CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1	unit	9.909.000
PBS	1.279.237.308	06	Meningkatnya kualitas lulusan PTK yang diterima di dunia kerja	PDE	Akreditasi Lembaga	1	Lembaga	200.000
				PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	275	Orang	11.193.093
				QEI	Bantuan Lembaga	23	Lembaga	5.232.348
				QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	201	Orang	5.095.000
				SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	36	model	1.471.488
				02	Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha			14.714.873
				ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	20	Orang	30.000
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	465	orang	546.726
				DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	143	kekayaan intelektual	1.979.500
				PDE	Akreditasi Lembaga	7	Lembaga	133.095
				QEI	Bantuan Lembaga	2	Lembaga	1.743.043
				QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1059	Orang	8.010.889
				SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	334	Orang	2.271.620
				03	Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu			117.167.700
				ADE	Akreditasi Lembaga	18	Lembaga	1.794.293

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	9	Unit	1.980.000
		DBA	Pendidikan Tinggi	5222	Orang	21.755.405
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1554	Orang	11.899.786
		DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	233	kekayaan intelektual	6.943.966
		QEI	Bantuan Lembaga	5	Lembaga	11.972.022
		QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	3725	Orang	37.229.950
		RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	13	unit	23.592.278
		04	Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam			6.575.189.596
		ACD	Perizinan Lembaga	10	Institusi	3.302.908
		ADE	Akreditasi Lembaga	113	Lembaga	4.329.999
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	300	Orang	5.100.000
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1000	Orang	1.000.000
		AEC	Kerja sama	5	Kesepakatan	3.500.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4007	Orang	22.000.000
		BEI	Bantuan Lembaga	200	Lembaga	819.921.232
		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1988	Orang	45.856.000
		BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	56	Lembaga	2.511.616.965

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	420	Paket	194.547.570
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	110	unit	1.954.765.922
				DBA	Pendidikan Tinggi	1278	Orang	6.950.000
				QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	68521	Orang	1.002.299.000
				05	Layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen			228.082.758
				ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	125	Orang	350.000
				BEI	Bantuan Lembaga	10134	Lembaga	30.067.600
				BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	8213	Orang	101.329.800
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	325	unit	74.524.299
				DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	5066	Orang	21.811.059
5 Program	5)	Program Dukungan Manajemen						35.650.754.572
	RM	35.607.943.013	01	Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama	01	Tersedianya laporan hasil penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang menghasilkan naskah kebijakan (policy paper)		89.077.576
	PNBP	42.811.559	02	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	39 Rekomendasi Kebijakan	18.709.718
			04	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	41 Rekomendasi Kebijakan	20.761.740
			06	Meningkatnya tata kelola organisasi Inspektorat Jenderal yang efektif dan akuntabel	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	11 Lembaga	2.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BMB	Komunikasi Publik	11	layanan	2.432.064
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	63	produk	27.203.278
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	37	Rekomendasi Kebijakan	17.470.776
		02	Tersedianya aparatur Kementerian Agama, tenaga teknis pendidikan, dan tenaga teknis keagamaan yang memenuhi standar kompetensi dan berwawasan keagamaan yang moderat			301.353.663
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	113	NSPK	6.624.922
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	60	Orang	166.519
		DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	3240	Orang	9.941.709
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	32185	Orang	86.254.299
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	112	NSPK	7.046.362
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	4420	Orang	18.013.300
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	6800	Orang	17.851.377
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	57660	Orang	155.455.175
		03	Tersedianya naskah mushaf Al-Qur'an yang ditashih, bahan bacaan tafsir agama dan literatur ke-Al-Qur'anan dalam konteks budaya			13.381.436
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	6	Rekomendasi Kebijakan	2.583.887

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	18	Lembaga	2.430.579
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	812500	Orang	3.153.739
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15	Lembaga	5.213.231
		04	Tersedianya layanan kesekretariatan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan kategori puas			289.330.686
		EAA	Layanan Perkantoran	50	Layanan	240.751.782
		EAC	Layanan Umum	19	Layanan	36.918.844
		EAD	Layanan Sarana Internal	320	unit	3.093.515
		EAE	Layanan Prasarana Internal	17	unit	8.566.545
		05	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama			83.619.812
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1357	Laporan	83.619.812
		06	Meningkatnya kualitas layanan administrasi, kinerja dan operasional perkantoran			29.909.324.790
		EAA	Layanan Perkantoran	12772	Layanan	29.555.967.207
		EAC	Layanan Umum	1537	Layanan	279.840.443
		EAD	Layanan Sarana Internal	40000894	unit	53.567.140
		EAE	Layanan Prasarana Internal	18	unit	19.950.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		07	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik			125.333.695
		EAA	Layanan Perkantoran	460	Layanan	117.532.800
		EAC	Layanan Umum	5	Layanan	6.051.795
		EAD	Layanan Sarana Internal	25	unit	1.749.100
		08	Layanan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik			531.048.833
		EAA	Layanan Perkantoran	474	Layanan	517.835.667
		EAC	Layanan Umum	173	Layanan	9.124.056
		EAD	Layanan Sarana Internal	204	unit	4.089.110
		09	--			23.154.028
		EAA	Layanan Perkantoran	59	Layanan	15.219.550
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	5.370.878
		EAD	Layanan Sarana Internal	43	unit	2.563.600
		10	--			117.896.389
		EAA	Layanan Perkantoran	180	Layanan	114.710.079
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	2.198.810
		EAD	Layanan Sarana Internal	36	unit	937.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	50.000
		11	--			61.643.240
		EAA	Layanan Perkantoran	283	Layanan	56.953.545
		EAC	Layanan Umum	97	Layanan	4.321.812
		EAD	Layanan Sarana Internal	67	unit	367.883
		12	--			453.392.417
		EAA	Layanan Perkantoran	643	Layanan	438.718.657
		EAC	Layanan Umum	30	Layanan	7.671.259
		EAD	Layanan Sarana Internal	297	unit	7.002.501
		13	Layanan Dukungan Penyelenggaraan Manajemen Pengawasan Internal			86.505.143
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	66.199.032
		EAC	Layanan Umum	17	Layanan	14.867.207
		EAD	Layanan Sarana Internal	53	unit	4.138.904
		EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	1.300.000
		14	--			2.169.625.345
		AAG	Peraturan Menteri	70	PerMen	2.166.050
		AAH	Peraturan lainnya	15	peraturan	436.342
		AEC	Kerja sama	70	Kesepakatan	3.050.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	1870	Layanan	1.824.002.096
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	389	Layanan	26.695.495
		EAC	Layanan Umum	201	Layanan	25.855.684
		EAD	Layanan Sarana Internal	4304	unit	91.727.891
		EAE	Layanan Prasarana Internal	168	unit	78.356.107
		EAF	Layanan SDM	201277	orang	34.167.839
		EAG	Layanan Hukum	158	Layanan	7.101.250
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	482	Layanan	19.219.228
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	245	Layanan	9.072.420
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	4.500
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	197	Laporan	12.113.470
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	730	Dokumen	24.184.707
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	5	Laporan	495.590
		TAJ	Layanan Data dan Informasi	51	Layanan	10.976.676
		15	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH			56.735.436
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	27.143.282
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	18.206.429

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	22	unit	2.610.602
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	8.775.123
		16	--			1.250.133.726
		EAA	Layanan Perkantoran	561	Layanan	1.212.214.841
		EAC	Layanan Umum	151	Layanan	21.564.485
		EAD	Layanan Sarana Internal	229	unit	14.415.400
		EAE	Layanan Prasarana Internal	17	unit	1.939.000
		17	--			89.198.357
		EAA	Layanan Perkantoran	302	Layanan	74.451.835
		EAC	Layanan Umum	47	Layanan	14.000.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	546.522
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME			OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN									5.721.705.435
2 Fungsi	04	EKONOMI									2.009.665.818
	10	PENDIDIKAN									3.712.039.617
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi									4.022.048.648
	2)	Program Pembinaan Ketenagakerjaan									1.169.977.841
	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									155.630.553
	4)	Program Dukungan Manajemen									374.048.393
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi									4.022.048.648
	RM		3.893.483.837	01	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi	01	Tenaga kerja yang ditingkatkan Kompetensinya				3.592.420.007
	PLN		125.246.000	02	Meningkatnya produktivitas pekerja di sektor prioritas	AEC	Kerja sama	307	Kesepakatan		30.266.934
	RMP			03	Meningkatnya tata kelola manajemen internal Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3	Industri		750.000
	PNBP		3.318.811			BEF	Bantuan Luar Negeri	3	Kegiatan		129.298.850
						DCH	Pelatihan Bidang Industri	10	Orang		37.767.170
						EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan		3.400.000
						EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit		9.459.887
						PDF	Sertifikasi Lembaga	75	Lembaga		7.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	213542	Orang	182.171.472
		PEA	Koordinasi	20	kegiatan	11.715.003
		PEB	Forum	1	forum	2.392.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	350	NSPK	29.023.188
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	930	Lembaga	35.321.950
		QEI	Bantuan Lembaga	1259	Lembaga	917.578.500
		RAJ	Sarana Bidang Ketenagakerjaan	75	Unit	1.066.800.835
		SBA	Pendidikan Tinggi	330	Orang	16.688.351
		SCH	Pelatihan Bidang Industri	268474	Orang	999.506.032
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	4738	Orang	112.779.835
		02	Tenaga Kerja yang meningkat Produktivitasnya di sektor Prioritas			47.064.641
		AEC	Kerja sama	1300	Kesepakatan	14.939.651
		SCH	Pelatihan Bidang Industri	7520	Orang	32.124.990
		03	Meningkatnya tata kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas			382.564.000
		EAA	Layanan Perkantoran	30	Layanan	329.904.247
		EAE	Layanan Prasarana Internal	14	unit	7.937.907
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	69	Layanan	44.721.846

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
2 Program	2) Program Pembinaan Ketenagakerjaan								1.169.977.841
	RM	581.282.024	11	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	01	Pekerja pada perusahaan yang menetapkan Norma Ketenagakerjaan yang fundamental			146.106.294
	PNBP	588.695.817	12	Meningkatnya tata kelola manajemen internal Ditjen Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	BCD	Perkara Hukum Badan Usaha	341	Perkara	3.862.184
			13	Meningkatnya peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan	BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	500	Orang	920.813
			14	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2980	Badan Usaha	8.981.217
			15	Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan Dialog sosial pada perusahaan	EAA	Layanan Perkantoran	79	Layanan	49.477.043
			16	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	EAD	Layanan Sarana Internal	144	unit	10.853.511
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	24.275.252
					QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	84595	Badan Usaha	47.736.274
					02	Pekerja pada perusahaan yang menerapkan dan mematuhi Norma K3			7.033.325

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	8695	Badan Usaha	7.033.325
		03	Pekerja pada perusahaan yang mematuhi dan menerapkan K3, lingkungan kerja dan hygiene perusahaan			76.048.350
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	105	Lembaga	14.784.887
		EAA	Layanan Perkantoran	18	Layanan	31.938.210
		EAD	Layanan Sarana Internal	107	unit	5.878.128
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.600.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	22	Layanan	6.985.903
		QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	4500	Badan usaha	14.861.222
		04	Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan			798.779.919
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	6	Rekomendasi Kebijakan	3.423.025
		ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1	Rekomendasi Kebijakan	381.000
		ACA	Perizinan Produk	30000	Produk	354.260
		ACB	Perizinan Masyarakat	150000	Orang	11.575.453
		ACD	Perizinan Lembaga	60	Institusi	5.230.042
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	40	Orang	415.020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEA	Koordinasi	21	kegiatan	11.034.500
		AEB	Forum	2	forum	2.412.600
		AEC	Kerja sama	24	Kesepakatan	8.933.936
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	13000	orang	9.500.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16	NSPK	18.380.835
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	548400	Orang	30.332.950
		BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	25	Badan usaha	2.847.400
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	634	Lembaga	5.613.620
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25858	Orang	46.414.363
		BEA	Bantuan Masyarakat	2350	Orang	38.772.200
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	50	Unit	1.000.000
		BEI	Bantuan Lembaga	657	Lembaga	119.708.000
		BMA	Data dan informasi Publik	1	layanan	4.505.300
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	800	Orang	9.414.375
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	108.888.955
		EAD	Layanan Sarana Internal	130	unit	6.984.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	6	unit	6.131.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	19	Layanan	48.180.712

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1167000	Orang	61.814.176
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	48434	Orang	67.131.474
		QEA	Bantuan Masyarakat	47215	Orang	169.400.723
		07	Pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial			142.009.953
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	7	Rekomendasi Kebijakan	3.850.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	32250	orang	19.819.350
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	28	NSPK	15.400.000
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	640	Perkara	500.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	5.000.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8700	Orang	17.924.650
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	165	Badan usaha	1.906.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	36.102.981
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	3.000.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	27.906.972
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	500	Lembaga	1.500.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1900	Orang	4.800.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2000	Badan usaha	4.300.000
3 Program	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							155.630.553
	RM	155.630.553	01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik	01	Layanan Publik di Bidang Ketenagakerjaan secara elektronik			78.858.050
			02	Meningkatnya kualitas rencana tenaga kerja Nasional	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	78.858.050
			03	Meningkatnya tata kelola manajemen internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	02	Layanan Perencanaan Tenaga Kerja			21.977.173
					ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	7.555.962
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	7.179.052
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	7.242.159
					03	Layanan Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan			54.795.330
					EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	35.242.503
					EAD	Layanan Sarana Internal	291	unit	4.278.018
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	15.274.809
4 Program	4)	Program Dukungan Manajemen							374.048.393

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	319.264.882	01	Meningkatnya Kapasitas, Kinerja Organisasi dan Pelayanan Internal	01	Reformasi Birokrasi			107.379.618
PNBP	54.783.511	01	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung good governance di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan	AAG	Peraturan Menteri	16	PerMen	1.251.200
				AAH	Peraturan lainnya	8	peraturan	1.348.800
				ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	12	Rekomendasi Kebijakan	970.280
				AEA	Koordinasi	8	kegiatan	4.457.459
				AEC	Kerja sama	3	Kesepakatan	879.997
				BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	1	Institusi	1.300.000
				EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	20.539.510
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.356.000
				EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	289.000
				EAF	Layanan SDM	2500	orang	13.070.944
				EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	255.720
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	Layanan	1.691.900
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	47.008.798
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	28	Laporan	2.615.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	535	Orang	9.345.010
		02	Opini BPK			147.981.092
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	142.829.212
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	1.300.000
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	13	Dokumen	3.851.880
		03	Nilai kinerja mitra kerja Pengawasan Internal			23.961.877
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	28	Laporan	23.961.877
		04	Tingkat maturitas Layanan Whistle Blowing System (WBS)			35.341.560
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4	Rekomendasi Kebijakan	1.511.428
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	953.374
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	24.027.232
		EAD	Layanan Sarana Internal	45	unit	802.500
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	6.889.250
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	1.157.776
		05	Maturitas Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik			59.384.246
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	3.092.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	89	unit	4.104.246

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1170	unit	51.900.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	288.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	027	KEMENTERIAN SOSIAL							92.817.590.291
2 Fungsi	10	PENDIDIKAN							13.254.273
	11	PERLINDUNGAN SOSIAL							92.804.336.018
3 Program	1)	Program Perlindungan Sosial							90.872.250.384
	2)	Program Dukungan Manajemen							1.945.339.907
1 Program	1)	Program Perlindungan Sosial							90.872.250.384
	RM		90.870.165.385	01	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	--	--		505.000
	PNBP		2.084.999	02	Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam penyelenggaraan kesos	ACD	Perizinan Lembaga	10 Institusi	505.000
				03	Meningkatnya penyelenggaraan pengendalian layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	01	Kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan		272.934.778
				04	Meningkatnya keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	803 Lembaga	10.731.773
				05	Meningkatnya kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100 Orang	915.595
				06	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	10230 Orang	62.584.583

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	07 Meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian ekonomi keluarga miskin dan rentan	QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	150	Badan usaha	4.422.838
	08 Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang handal	QEB	Bantuan Keluarga	9523	Keluarga	117.301.674
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	300	Daerah (Prov/Kab/Kota)	74.970.195
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	600	Desa	2.008.120
		02	Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam penyelenggaraan kesos			188.377.226
		ACD	Perizinan Lembaga	1444	Institusi	18.142.217
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	5130	Orang	1.416.684
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	22740	Orang	16.326.809
		BEA	Bantuan Masyarakat	591	Orang	6.277.191
		CDN	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	132	unit	35.341.224
		PDE	Akreditasi Lembaga	4000	Lembaga	8.857.802
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	18000	Orang	16.304.400
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	8000	Orang	67.579.897

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	1352	Desa	18.131.002
		04	Keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan			553.578.088
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	2	Rekomendasi Kebijakan	4.168.634
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	293.900
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	9000	Orang	27.383.703
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	233.500
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	19	Orang	1.218.550
		PBN	Kebijakan Bidang Sosial	13	Rekomendasi Kebijakan	22.590.505
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	1.552.390
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	133002	Orang	399.724.272
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	202	Lembaga	1.897.990
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4511	Orang	91.925.820
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	47000	Unit	2.588.824
		05	kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adaptif			30.666.584.153
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	863	Orang	3.050.858

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BEE	Bantuan Kebencanaan	54730	Paket	25.258.048
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	359789	Orang	1.663.098.414
					QEA	Bantuan Masyarakat	25000	Orang	16.236.750
					QEB	Bantuan Keluarga	10000000	Keluarga	28.782.227.726
					QEE	Bantuan Kebencanaan	133000	Paket	165.071.573
					QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	200	Kelompok Masyarakat	11.640.784
					07	Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemandirian ekonomi keluarga miskin dan rentan			57.772.043.974
					QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	10.800.794
					QEB	Bantuan Keluarga	28809045	Keluarga	57.761.243.180
					08	Kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem informasi layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang handal			1.418.227.165
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	163400000	Orang	1.275.674.813
					UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	142.552.352
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							1.945.339.907
	RM	1.939.988.243	01	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	01	Tata kelola Kementerian Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi			753.790.253

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
PNBP	5.351.664	02	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Mendukung Good and Clean Governance melalui Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko	AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	2.840.539
		04	Terwujudnya tata kelola Ditjen Pemberdayaan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	157.264.805
		05	Terwujudnya tatakelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	35	Layanan	13.384.083
		06	Terwujudnya tatakelola Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	EAC	Layanan Umum	38	Layanan	16.567.686
		07	Terwujudnya tatakelola Ditjen Penanganan Fakir Miskin yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	EAD	Layanan Sarana Internal	327	unit	57.114.174
		08	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	EAE	Layanan Prasarana Internal	8	unit	451.988.874
		09	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	27.673.630
		10	Terwujudnya tatakelola Badiklitpensos yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	6.076.204
				EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	39	Dokumen	11.886.036
				TAG	Layanan Hukum	3	Layanan	8.994.222

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		02 Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Mendukung Good and Clean Governance melalui Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko			38.408.503
		EAA Layanan Perkantoran	2	Layanan	19.926.639
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	640.526
		EAC Layanan Umum	2	Layanan	809.560
		EAD Layanan Sarana Internal	37	unit	1.186.353
		EAF Layanan SDM	187	orang	488.460
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	173.280
		EAK Layanan Pengawasan Internal	16	Laporan	11.162.510
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	948.332
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	7	Dokumen	3.072.843
		04 Tata kelola Ditjen Pemberdayaan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi			55.263.457
		EAA Layanan Perkantoran	2	Layanan	35.632.807
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	3.934.840
		EAC Layanan Umum	3	Layanan	2.454.809
		EAD Layanan Sarana Internal	55	unit	927.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	219	orang	926.566
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	1.226.982
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	4.722.912
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.069.720
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	4.367.821
		05	Tatakelola Ditjen Rehabilitasi Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi			737.907.699
		EAA	Layanan Perkantoran	84	Layanan	316.954.725
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	61	Layanan	4.543.676
		EAC	Layanan Umum	106	Layanan	14.310.725
		EAD	Layanan Sarana Internal	2227	unit	89.137.516
		EAE	Layanan Prasarana Internal	177	unit	285.346.659
		EAF	Layanan SDM	1312	orang	10.010.289
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	484.435
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	Layanan	947.367
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	45	Layanan	6.130.152
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	37	Laporan	6.647.116
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	95	Dokumen	3.395.039

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		06 Tatakelola Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi			53.921.147
		EAA Layanan Perkantoran	2	Layanan	34.473.245
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	3.319.734
		EAC Layanan Umum	2	Layanan	3.297.855
		EAD Layanan Sarana Internal	25	unit	1.255.626
		EAF Layanan SDM	190	orang	824.044
		EAG Layanan Hukum	1	Layanan	1.396.489
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	411.280
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	2.955.761
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	2.001.584
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	4	Dokumen	3.985.529
		07 Terwujudnya tatakelola Ditjen Penanganan Fakir Miskin yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi			59.108.531
		EAA Layanan Perkantoran	2	Layanan	27.783.346
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	8.588.780
		EAC Layanan Umum	3	Layanan	3.029.078
		EAD Layanan Sarana Internal	1	unit	716.291

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	3.400.000
		EAF	Layanan SDM	130	orang	2.141.351
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	791.242
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	945.632
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	4.371.270
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	4.138.320
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	3.203.221
		08	Kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			26.551.741
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	600	Orang	1.729.195
		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	174	Orang	1.829.214
		DBA	Pendidikan Tinggi	1700	Orang	6.640.934
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2	model	3.054.930
		EAF	Layanan SDM	7616	orang	10.859.648
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	2.437.820
		09	Hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial			6.522.932
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	13	Rekomendasi Kebijakan	6.522.932

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		10 Tatakelola Badiklitpensos yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi			213.865.644
		EAA Layanan Perkantoran	25	Layanan	153.036.196
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	32	Layanan	3.336.687
		EAC Layanan Umum	32	Layanan	5.423.527
		EAD Layanan Sarana Internal	23	unit	1.015.450
		EAE Layanan Prasarana Internal	4	unit	25.584.550
		EAF Layanan SDM	1224	orang	6.431.043
		EAG Layanan Hukum	1	Layanan	364.720
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	371.500
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	17	Layanan	2.357.634
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	14	Laporan	2.433.798
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	794	Orang	9.517.491
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	30	Dokumen	3.993.048

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						7.957.114.783
2 Fungsi	04	EKONOMI						1.858.167.247
	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP						5.995.891.726
	10	PENDIDIKAN						103.055.810
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						108.575.810
	2)	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim						200.949.088
	3)	Program Kualitas Lingkungan Hidup						834.926.008
	4)	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						3.288.257.788
	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						36.534.505
	6)	Program Dukungan Manajemen						3.487.871.584
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						108.575.810
	RM	80.136.231	01	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat	--	--		27.055.810
	RMP		02	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	14 Unit	4.600.000
	PNBP	5.180.000			DCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	900 Orang	12.183.231
	HLN	7.957.579			EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	35 Orang	2.875.000
	PBS	15.302.000			SCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	3510 Orang	7.397.579

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					01	SDM LHK yang berdaya saing			81.520.000
					DCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	1530	Orang	3.060.000
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	365	Lembaga	2.460.000
					RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	3	unit	15.302.000
					SAE	Pendidikan Vokasi Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	958	Orang	60.698.000
2 Program	2)	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim							200.949.088
	RM	112.268.138	01	Terwujudnya tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	01	Tata kelola adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terwujud			44.520.950
	RMP		02	Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan setiap tahun	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	2	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
	PNBP	65.160.000			BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	600	Orang	2.000.000
	HLN	23.520.950			BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	365	Kelompok Masyarakat	4.000.000
					BMA	Data dan Informasi Publik	13	layanan	9.000.000
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8	Lembaga	16.080.950
					QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	3	Badan usaha	8.440.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					02	Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun		156.428.138
					QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1200 Kelompok Masyarakat	126.782.438
					QHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	1370 operasi	29.645.700
3 Program	3) Program Kualitas Lingkungan Hidup							834.926.008
	RM	803.600.437	01	Meningkatnya Kualitas Udara	--	--		101.745.281
	PNBP	31.325.571	02	Meningkatnya Kualitas Air	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	3.000.000
			03	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut	BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	100 Produk	488.425
			04	Meningkatnya Kualitas Air Laut	BJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	200 Unit	209.325
			07	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	DCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	204 Orang	21.890.000
			08	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1 produk	52.580
			13	Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup	PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	52 Rekomendasi Kebijakan	13.161.882
			14	Meningkatnya kualitas pada perairan darat	PDF	Sertifikasi Lembaga	2 Lembaga	1.081.239
			15	Terselenggaranya Inventarisasi dan verifiikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi	QCA	Perkara Hukum Perseorangan	165 Perkara	31.629.407
					QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	4 Perkara	3.930.593

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QMA	Data dan Informasi Publik	5534918	layanan	15.613.876
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	340	Unit	2.638.000
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	115	unit	4.499.954
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.550.000
		02	Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan			146.127.992
		QMA	Data dan Informasi Publik	1307	layanan	76.805.340
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	63	Unit	69.322.652
		03	Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan			75.644.660
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	25	Badan usaha	900.000
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	5685	Industri	11.000.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	53	Unit	50.850.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	45	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.894.660
		04	Fasilitasi Pemulihan Kerusakan Lingkungan			266.789.075
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3310	Unit	243.050.000
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	105	Desa	23.739.075

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		05	Jumlah B3 yang terkelola			9.100.000
		ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	4	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
		BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	200	Badan usaha	600.000
		CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8	unit	3.200.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	600.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Unit	3.600.000
		06	Jumlah limbah B3 yang terkelola			95.840.000
		ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	6	Rekomendasi Kebijakan	1.600.000
		ACD	Perizinan Lembaga	400	Institusi	7.700.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan	600.000
		BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3008	Industri	7.570.000
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Unit	10.640.000
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan	13.930.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4	Unit	53.800.000
		07	Jumlah sampah yang terkelola			89.388.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	100	UMKM	13.568.000
				BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	15	Badan usaha	1.468.500
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	380	Daerah (Prov/Kab/Kota)	43.251.500
				RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16	Unit	31.100.000
				08	Ketaatan pemegang ijin lingkungan terhadap peraturan			36.830.000
				DCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	176	Orang	10.620.800
				QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	780	Lembaga	26.209.200
				09	Kasus Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan			13.461.000
				QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	25	Perkara	13.461.000
4 Program	4)	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan						3.288.257.788
	RM	1.985.019.610	01	Meningkatnya Produktivitas Hutan Produksi	--	--		3.100.342.657
	RMP	17.283.415	02	Meningkatnya Ragam Usaha Kehutanan	ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan	56	Rekomendasi Kebijakan	13.668.000
	PNBP	885.039.079	04	Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu	AED	Perjanjian	83200	perjanjian	33.193.152
	HLN	258.768.284	05	Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan	BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	44	Badan usaha	3.309.980
	PBS	142.147.400	07	Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	336	layanan	2.904.443

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	08	Meningkatnya luas penutupan vegetasi	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	760	Lembaga	166.165.052
	09	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas Kehutanan	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7	Kelompok Masyarakat	67.482.203
	10	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari	BMA	Data dan Informasi Publik	108	layanan	12.313.681
	11	Pulihnya kondisi lahan dalam DAS	PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	3187791	Rekomendasi Kebijakan	83.165.494
	12	Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati	PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	227389	Rekomendasi Kebijakan	364.461.612
	13	Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL	PCC	Perizinan Kelompok Masyarakat	5	Kelompok Masyarakat	3.750.000
	14	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari	PCD	Perizinan Lembaga	26	Institusi	3.540.000
	15	Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	PEE	Kemitraan	100	Kesepakatan	5.200.000
	16	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	115	layanan	9.650.000
	17	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3583	Lembaga	22.298.158
	18	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4520	Orang	48.656.900
	20	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	512	Kelompok Masyarakat	17.655.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	21 Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	75	UMKM	15.000.000
	22 Meningkatnya akses kelola hutan oleh masyarakat	QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	1520	Kelompok Masyarakat	97.371.600
	23 Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mampu memanfaatkan dan melestarikan hutan dan lingkungan	QHB	Operasi Bidang Keamanan	314	operasi	68.405.000
	25 Teramankannya hutan dari gangguan dan ancaman	QMA	Data dan Informasi Publik	5667551	layanan	44.923.618
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	62919	Unit	1.836.993.018
		RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	82500100	unit	161.637.402
		SCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	393	Orang	2.500.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	60	Sistem Informasi	16.098.344
		02	Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari			187.915.131
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	15	NSPK	4.648.841
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	30	Lembaga	1.267.810
		BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	435	Badan usaha	5.959.917
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	1.330.421
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	555	Lembaga	6.789.399

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	200	UMKM	12.499.900
				BEF	Bantuan Luar Negeri	23	Kegiatan	55.239.680
				BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	384	Lembaga	28.860.323
				PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
				QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	20	Badan usaha	2.771.796
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	36	layanan	900.000
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	267	Lembaga	67.147.044
5 Program	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						36.534.505
	RM	6.045.737	01	Tersedianya produk riset sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Implementatif dan atau Inovatif	01	Produk riset sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Implementatif dan atau Inovatif		36.534.505
	PNBP	6.042.458			CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Unit	24.446.310
	PBS	24.446.310			CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5 unit	123.000
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	26 produk	5.933.460
					DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	37 model	2.174.436
					PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	60.698
					SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	1 Purwarupa	796.601

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	5	model	3.000.000
6 Program	6) Program Dukungan Manajemen								3.487.871.584
	RM	3.443.780.597	01	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	--	--			2.721.710.725
	RMP	3.944.400	02	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	6	Rekomendasi Kebijakan	1.645.200
	PNBP	7.252.892	03	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan	6	Rekomendasi Kebijakan	2.545.200
	HLN	32.893.695			EAA	Layanan Perkantoran	444	Layanan	2.320.888.030
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	5.000.000
					EAC	Layanan Umum	209	Layanan	262.286.486
					EAD	Layanan Sarana Internal	1628	unit	41.803.712
					EAE	Layanan Prasarana Internal	164	unit	17.480.260
					EAF	Layanan SDM	1200	orang	2.654.995
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	8.094.400
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	7.841.299
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	160	Orang	3.690.993
					FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	21.599.837

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	514	Daerah (Prov/Kab/Kota)	21.132.813
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	32	NSPK	5.047.500
		01	Layanan Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien			739.060.859
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	12.804.909
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	2.913.700
		EAA	Layanan Perkantoran	20	Layanan	480.575.435
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	51.493.227
		EAC	Layanan Umum	15	Layanan	179.193.388
		EAF	Layanan SDM	2500	orang	6.000.000
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	4.096.400
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.983.800
		02	Layanan Pengawasan Internal KLHK			27.100.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan	4.500.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	344	Laporan	22.600.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						6.652.139.393
2 Fungsi	04	EKONOMI						6.326.058.592
	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP						103.904.450
	10	PENDIDIKAN						222.176.351
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						365.438.717
	2)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						244.126.475
	3)	Program Kualitas Lingkungan Hidup						84.104.450
	4)	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						2.423.630.664
	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						90.944.375
	6)	Program Dukungan Manajemen						3.443.894.712
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						365.438.717
	RM	365.438.717	01	SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri	01	Hasil Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM yang mendukung kesejahteraan masyarakat		365.438.717
			03	Iptek hasil kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK	3.304.287
			04	Kelompok kelautan dan perikanan mandiri yang dibentuk	DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	180 Orang	108.000
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	9 produk	516.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	41017	Kelompok Masyarakat	88.589.027
					RAA	Sarana Bidang Pendidikan	16	Paket	28.305.924
					RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	8	Unit	15.367.006
					RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	5	unit	23.266.082
					RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	10	unit	43.780.009
					RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	7	Unit	15.244.810
					SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	8308	Orang	121.637.165
					SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	29000	Orang	23.200.000
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	16	produk	2.120.407
2 Program	2)	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							244.126.475
	RM	234.291.977	01	Produk Olahan KP Berdaya Saing	01	Provinsi yang konsumsi ikannya meningkat			157.651.475
	PNBP	9.834.498	03	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7	Rekomendasi Kebijakan	3.892.000
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	250.000
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	17	Lembaga	1.420.000
					PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2	Rekomendasi Kebijakan	4.800.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PEH	Promosi	339	promosi	90.335.904
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	50	Unit	1.953.571
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	19	Unit	55.000.000
		02	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing			6.108.000
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3	Rekomendasi Kebijakan	138.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	600	orang	688.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	1.000.000
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	20	UMKM	2.200.000
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	1000	Produk	932.000
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	10	produk	1.150.000
		03	Utilitas UPI yang meningkat			27.057.000
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	508	Rekomendasi Kebijakan	3.550.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	250.000
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	500	UMKM	1.914.400
		BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	100	Industri	327.600
		PDC	Sertifikasi Produk	2650	produk	1.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	538	Unit	12.915.000
					RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2	Unit	6.600.000
					04	Penjaminan Mutu Produk KP			53.310.000
					ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	122	Rekomendasi Kebijakan	1.484.480
					ADF	Sertifikasi Lembaga	648	Lembaga	3.965.501
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	100.000
					BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	573	Produk	2.230.700
					QAH	Pelayanan Publik Lainnya	568	layanan	12.292.853
					QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	85	Produk	3.064.919
					QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	407	Lembaga	1.007.964
					RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	103	Unit	16.326.696
					RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	30	Unit	12.836.887
3 Program	3)	Program Kualitas Lingkungan Hidup							84.104.450
	RM		84.104.450	02	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	01	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan		57.385.000
				03	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	04 Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	PEC	Kerja sama	14	Kesepakatan	983.000
	05 Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	PEE	Kemitraan	18	Kesepakatan	2.075.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11	NSPK	4.840.739
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	10	layanan	2.225.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	10	Kelompok Masyarakat	581.090
		QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	54	Kelompok Masyarakat	6.632.850
		RDQ	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	4	Unit	718.910
		REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	39105132	Hektar	24.418.411
		REB	Konservasi Jenis/Spesies	72	Jenis	13.910.000
		04	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali			26.719.450
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6	Kelompok Masyarakat	2.599.006
		RBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	2	unit	3.336.477
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	6	Unit	4.772.494
		REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	410	Hektar	16.011.473
4 Program 4) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						2.423.630.664

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	2.354.198.537	01	Kesejahteraan Nelayan Meningkat	01	Kesejahteraan Nelayan Meningkat			91.576.780
PLN	12.323.695	04	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya	ACA	Perizinan Produk	5300	Produk	2.700.000
RMP		05	Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	15000	Orang	14.000.000
PNBP	57.108.432	06	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	BEA	Bantuan Masyarakat	144700	Orang	1.906.975
		07	Kesejahteraan petambak garam meningkat	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	31	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.669.681
		11	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	PCA	Perizinan Produk	9600	Produk	2.200.000
		12	Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	22667	Orang	8.400.000
		13	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4676	Kelompok Masyarakat	4.000.000
		14	Produktivitas perikanan tangkap meningkat	QEA	Bantuan Masyarakat	124950	Orang	21.693.025
		15	Produktivitas perikanan budidaya meningkat	QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	40	Kelompok Masyarakat	27.000.000
		16	Poduktivitas dan usaha garam nasional meningkat	QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1	Lembaga	750.000
		17	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	59	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.257.099

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	18 Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	02	Ikan dan hasil perikanan yang terjamin kesehatan, mutu dan keamanannya			92.313.700
	19 Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	746	Rekomendasi Kebijakan	6.818.087
	22 Tata kelola sumber daya perikanan tangkap bertanggung jawab	ADD	Standarisasi Lembaga	99	Lembaga	15.155.729
		ADE	Akreditasi Lembaga	180	Lembaga	128.200
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	138.450
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	61	Produk	2.436.095
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	186	Lembaga	3.982.711
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	303	Rekomendasi Kebijakan	7.145.110
		PDD	Standarisasi Lembaga	277	Lembaga	10.977.963
		PDF	Sertifikasi Lembaga	1102	Lembaga	3.498.990
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	409	layanan	13.985.313
		QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	324	Produk	2.125.133
		RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	13	Unit	7.704.898
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	18	Unit	18.217.021
		03	Sumber daya perikanan tangkap berkelanjutan			26.950.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	28	Rekomendasi Kebijakan	12.750.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	200.000
		BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1	Lembaga	36.000
		BKB	Pemantauan produk	205	laporan	66.577
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	14	Rekomendasi Kebijakan	2.615.000
		QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	26	Lembaga	4.164.000
		QKB	Pemantauan produk	6727	laporan	1.118.423
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	8	Unit	6.000.000
		05	Produktivitas perikanan tangkap meningkat			233.364.794
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	15	Rekomendasi Kebijakan	6.055.804
		ADC	Sertifikasi Produk	764	produk	4.748.710
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	12030	Orang	3.200.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4346	layanan	18.233.147
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4206	Orang	4.493.996
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100	Kelompok Masyarakat	1.300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	69	Lembaga	21.983.842
		BKB	Pemantauan produk	2513	laporan	1.600.000
		CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	22	Unit	7.710.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	847	Unit	45.500.000
		QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	5	Lembaga	1.995.500
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	50	Unit	116.543.795
		07	Produksi Perikanan Budidaya			867.539.558
		ACA	Perizinan Produk	50	Produk	1.000.000
		ACD	Perizinan Lembaga	50	Institusi	1.500.000
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	2553	Lembaga	5.437.500
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	69	layanan	8.262.000
		BJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	50000	Sampel	17.810.000
		CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	57	Unit	8.778.000
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	20	Rekomendasi Kebijakan	9.200.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	42	NSPK	18.062.500
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	26000	Orang	2.000.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	150	Kelompok Masyarakat	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QEA	Bantuan Masyarakat	5000	Orang	3.500.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	1201104	Unit	272.974.700
		QEL	Bantuan Hewan	217300000	Ekor	69.449.797
		QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	9346	Sampel	21.850.000
		RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1300015	Unit	52.942.669
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	156	Unit	371.772.392
		RDQ	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2	Unit	2.000.000
		08	Pelaku usaha KP yang diawasi			51.365.600
		AEA	Koordinasi	10	kegiatan	7.772.935
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9	NSPK	2.050.708
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1350	Orang	3.976.968
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1205	Lembaga	6.392.792
		BKB	Pemantauan produk	120	laporan	15.628.989
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	21812	Lembaga	15.543.208
		10	Cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing			699.647.300
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	120.960
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5000	layanan	2.090.064
		BID	Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat	38	Kelompok Masyarakat	1.099.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BKB	Pemantauan produk	32	laporan	1.590.057
		CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	4	Unit	10.000.000
		CBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	105	Unit	2.295.530
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1050	Kelompok Masyarakat	1.900.500
		QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	3755	Operasi	345.738.960
		RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	6	Unit	209.027.783
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	10	Unit	15.704.470
		RCG	OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	98	Unit	110.079.476
		11	Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas ditangani			45.752.715
		AEA	Koordinasi	25	kegiatan	28.691.160
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	199.510
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	62	Perkara	1.531.615
		BCE	Penanganan Perkara	324	Perkara	6.444.112
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	400	Orang	700.000
		BKB	Pemantauan produk	75	laporan	8.186.318
		12	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang merealikasikan investasi dan mendapatkan pembiayaan kredit program meningkat			14.508.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ACD	Perizinan Lembaga	60	Institusi	1.250.000
		AEH	Promosi	10	promosi	2.000.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	100.000
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3	Rekomendasi Kebijakan	1.800.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	36	Lembaga	2.650.000
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3780	UMKM	6.708.000
		13	Koridor Logistik Hasil Perikanan yang terkelola			111.865.000
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	15	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	250.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	800.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8	Orang	68.725
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7	Kelompok Masyarakat	471.705
		BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	16	Koperasi	484.900
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	19	Badan usaha	574.670
		CDQ	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1	Unit	1.500.000
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3	Rekomendasi Kebijakan	1.550.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	1.000.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	22	Unit	60.965.000
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	5	Unit	42.450.000
		17	Jumlah pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan			18.800.000
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4	Rekomendasi Kebijakan	800.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5	layanan	800.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	400.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7	Kelompok Masyarakat	3.228.530
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	7	Unit	12.432.530
		RDQ	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	12	Unit	1.138.940
		18	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan			19.800.000
		PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	22	Rekomendasi Kebijakan	14.000.000
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	2.300.000
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2	Unit	451.730

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					RDQ	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2	Unit	1.048.270
					UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	8	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000
					19	Produksi garam			150.147.217
					PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	14	Rekomendasi Kebijakan	3.225.898
					PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	5.754.732
					QAH	Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	902.370
					QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	16	Kelompok Masyarakat	297.450
					QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	79	Unit	94.607.550
					RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	469	Unit	44.156.667
					RDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12	unit	1.202.550
5 Program	5)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							90.944.375
	RM		90.944.375	02	Iptek hasil kegiatan riset KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat	01	Hasil riset yang dimanfaatkan industri dan masyarakat			90.944.375
				03	Hasil riset KP yang digunakan dalam penyusunan kebijakan	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	28	Rekomendasi Kebijakan	6.009.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	31 Rekomendasi Kebijakan	4.868.733
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12 NSPK	2.059.440
					CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	2 Unit	5.023.788
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	18 produk	6.872.500
					DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	10 Purwarupa	3.335.000
					DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	1 model	300.000
					PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	16 Rekomendasi Kebijakan	14.282.580
					PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	12 Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
					RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	361 Unit	21.206.204
					RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	5 Unit	8.538.599
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	25 produk	10.448.071
					SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	6 model	3.000.000
6 Program	6)	Program Dukungan Manajemen						3.443.894.712
	RM	3.369.243.681	03	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	01	Birokrasi dan Layanan Publik di Ditjen PSDKP yang agile, efektif dan efisien		313.287.307
	PNBP	42.651.031	07	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PSDKP	AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	809.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
BLU	32.000.000	09	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan DJPDS	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	150.000
		10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal	BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10270	UMKM	2.418.480
		11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen PRL	BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	Layanan	352.170
		12	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	EAA	Layanan Perkantoran	53	Layanan	225.606.193
		13	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	60	Layanan	4.494.898
		14	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP	EAC	Layanan Umum	53	Layanan	42.603.437
		15	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKIPM	EAD	Layanan Sarana Internal	848	unit	11.987.393
				EAF	Layanan SDM	1295	orang	2.748.205
				EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	781.000
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	9	Layanan	1.541.390
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	2.060.000
				EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	240	Orang	8.099.462
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	143	Laporan	9.635.679
				03	Integritas Aparatur dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Efektif, Efesien dan Akuntabel			86.767.955
				EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	40.945.022

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAC	Layanan Umum	7	Layanan	1.136.316
		EAD	Layanan Sarana Internal	63	unit	2.640.011
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	255.700
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	246.116
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	33	Laporan	35.454.814
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	35.300
		TAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	7	Layanan	532.224
		TAF	Layanan SDM	892	orang	386.252
		TAJ	Layanan Data dan informasi	1	Layanan	877.172
		TAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	223	Orang	2.934.700
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11	Laporan	1.324.328
		04	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya			345.200.846
		AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	1.672.440
		EAA	Layanan Perkantoran	38	Layanan	278.786.422
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	50	Layanan	9.705.505
		EAC	Layanan Umum	41	Layanan	13.594.683
		EAD	Layanan Sarana Internal	73	unit	9.319.424
		EAF	Layanan SDM	1680	orang	5.381.781

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	1.157.600
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	848.950
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	35	Layanan	5.574.822
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	98	Laporan	19.159.219
		05	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BRSDMKP			1.066.190.534
		AEC	Kerja sama	85	Kesepakatan	3.481.201
		EAA	Layanan Perkantoran	51	Layanan	1.007.275.734
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	28	Layanan	5.738.315
		EAC	Layanan Umum	52	Layanan	16.726.394
		EAD	Layanan Sarana Internal	2	unit	2.770.000
		EAF	Layanan SDM	5678	orang	3.095.481
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	675.381
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	568.520
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	8	Layanan	2.571.553
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	12	Layanan	1.980.613
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	31	Laporan	6.572.520
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	4490	Orang	10.405.530
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	4.329.292

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		06	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkup Sekretariat Jenderal		465.646.140
		AEC	Kerja sama	66 Kesepakatan	10.799.950
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	618.900
		EAA	Layanan Perkantoran	2 Layanan	191.281.774
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	69 Layanan	26.440.116
		EAC	Layanan Umum	4 Layanan	67.950.414
		EAD	Layanan Sarana Internal	303 unit	27.192.912
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1 unit	2.637.365
		EAF	Layanan SDM	1050 orang	12.643.704
		EAG	Layanan Hukum	3 Layanan	12.728.693
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	918.796
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2 Layanan	33.652.083
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	37 Layanan	53.402.105
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	74 Laporan	25.379.328
		09	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan DJPDS		114.514.553
		AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	1.830.000
		EAA	Layanan Perkantoran	4 Layanan	75.298.335
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	36 Layanan	8.842.405

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	5.270.208
		EAD	Layanan Sarana Internal	570	unit	4.898.500
		EAF	Layanan SDM	1522	orang	1.560.000
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	782.100
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	913.005
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	6.350.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5	Laporan	8.770.000
		11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Ditjen PRL			182.505.508
		AEC	Kerja sama	3	Kesepakatan	7.157.972
		EAA	Layanan Perkantoran	22	Layanan	119.746.315
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	41	Layanan	4.932.766
		EAC	Layanan Umum	56	Layanan	7.202.046
		EAD	Layanan Sarana Internal	131	unit	5.828.300
		EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	2.917.500
		EAF	Layanan SDM	3115	orang	4.958.528
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	4.685.533
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	15	Layanan	3.006.614
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	6	Layanan	3.824.003

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	7.582.046
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	94	Laporan	10.663.885
		13	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap			411.685.913
		AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	3.040.000
		EAA	Layanan Perkantoran	70	Layanan	326.439.005
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	58	Layanan	15.124.200
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	3.000.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	101	unit	9.124.490
		EAE	Layanan Prasarana Internal	4	unit	4.795.000
		EAF	Layanan SDM	637	orang	6.999.000
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	1.600.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	26	Layanan	1.989.750
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	58	Layanan	6.874.060
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	141	Laporan	32.700.408
		15	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BKIPM			458.095.956
		AEC	Kerja sama	12	Kesepakatan	1.100.921
		EAA	Layanan Perkantoran	1395	Layanan	381.481.659

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	79	Layanan	6.489.894
		EAC	Layanan Umum	133	Layanan	24.807.965
		EAD	Layanan Sarana Internal	1055	unit	20.088.416
		EAE	Layanan Prasarana Internal	49	unit	8.579.978
		EAF	Layanan SDM	4895	orang	6.197.656
		EAG	Layanan Hukum	26	Layanan	1.546.929
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	37	Layanan	850.932
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	10	Layanan	2.335.876
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	79	Laporan	4.615.730

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							149.811.139.618
2 Fungsi	04	EKONOMI							114.895.286.544
	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM							28.820.383.296
	10	PENDIDIKAN							6.095.469.778
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							207.109.000
	2)	Program Ketahanan Sumber Daya Air							56.093.079.129
	3)	Program Infrastruktur Konektivitas							51.346.812.030
	4)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							33.315.740.997
	5)	Program Dukungan Manajemen							8.848.398.462
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							207.109.000
	RM	207.109.000	01	Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	--	--			111.033.000
					CAA	Sarana Bidang Pendidikan	2	Paket	72.538.710
					CDJ	OM Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1	unit	2.904.290
					DAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	508	Orang	28.140.000
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	3	produk	7.450.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					01	SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Tersertifikasi			96.076.000
					DAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	48000	Orang	96.076.000
2 Program	2)	Program Ketahanan Sumber Daya Air							56.093.079.129
	RM	48.770.663.075	01	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	01	Infrastruktur Sumber Daya Air			56.093.079.129
	PLN	2.995.520.970			ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	440	Rekomendasi Kebijakan	740.189.020
	RMP	96.220.084			AEA	Koordinasi	136	kegiatan	83.150.385
	PBS	4.230.675.000			AEB	Forum	37	forum	14.622.743
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	5.125.000
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	600.000
					BHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	93	operasi	786.374.719
					BMA	Data dan Informasi Publik	83	layanan	121.894.787
					CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	628	unit	2.442.108.898
					CBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	14	unit	299.633.603
					CBR	Dukungan Teknis	776	Dokumen	3.590.479.701
					CBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	1061	Km	5.857.731.914
					CDG	OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	2436	unit	1.408.248.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					CDH	OM Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	1399	unit	353.446.591
					CDR	OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	35152	Km	3.858.820.054
					RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	75	unit	17.556.293.411
					RBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	24	unit	883.282.979
					RBR	Dukungan Teknis	127	Dokumen	264.163.831
					RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	8972	Km	17.826.913.333
3 Program	3)	Program Infrastruktur Konektivitas							51.346.812.030
	RM	39.947.878.380	01	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	01	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional			48.319.075.017
	PLN	770.898.500			ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6	Rekomendasi Kebijakan	31.773.914
	RMP	90.000.000			CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	1011	km	15.464.103.152
	PBS	10.538.035.150			CBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	29315	m	4.529.362.036
					CBR	Dukungan Teknis	3399	Dokumen	2.373.745.841
					CDC	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	50492	km	22.533.165.765
					CDF	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	479162	m	3.386.924.309
					02	Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol			916.976.303
					ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1	Rekomendasi Kebijakan	916.976.303

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				03	Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			2.110.760.710
				ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	33	Rekomendasi Kebijakan	1.914.887.914
				BEE	Bantuan Kebencanaan	2	Paket	195.872.796
4 Program	4)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						33.315.740.997
	RM	31.055.214.410	01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	01	Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		7.837.020.945
	PLN	2.091.802.000			ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	97 Rekomendasi Kebijakan	132.413.918
	RMP	70.892.500			AEA	Koordinasi	2 kegiatan	4.000.000
	PNBP	5.482.060			AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	750.000
	BLU	27.840.027			BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	8.550.000
	HLN	64.510.000			BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1900 Orang	2.200.000
					BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga	6.450.000
					CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	4318 unit	1.305.609.887
					CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	2 unit	112.358.250
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3 Layanan	5.338.339
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4 Layanan	9.204.594

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	5.700.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	1.997.094
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	1.750.000
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	38	Layanan	37.627.636
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11	Laporan	49.960.000
		FAG	Pengawasan Pembangunan	179	Laporan	372.924.484
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	320	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.050.000
		PEA	Koordinasi	1	kegiatan	500.000
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	15.100.000
		QFC	Subsidi kepada Keluarga	312	Rumah Tangga	10.000.000
		RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	161288	unit	5.740.536.743
		02	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Meningkat Kualitasnya			5.888.360.778
		CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	1859	unit	3.974.558.418
		CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	106	unit	1.913.802.360
		03	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak			6.999.124.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	7.181.679
		CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	443903	unit	6.728.293.166
		DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	800	Orang	6.604.081
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	496	Daerah (Prov/Kab/Kota)	257.045.774
		04	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak			5.902.636.516
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	4.194.477
		CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	1601398	unit	5.431.496.635
		DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	240	Orang	4.702.796
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	752	Daerah (Prov/Kab/Kota)	462.242.608
		05	Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman yang Tertib, Andal dan Meningkat Kualitasnya			6.317.084.839
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	16	Rekomendasi Kebijakan	38.000.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3953	layanan	17.076.650
		CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	15015	unit	5.101.557.475

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		CBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	40430	unit	39.594.604
		CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	8	unit	499.533.382
		CBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1929	unit	419.752.491
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	869	Daerah (Prov/Kab/Kota)	201.570.237
		06	Terselenggaranya Pembinaan Bidang Infrastruktur Permukiman			371.513.219
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	40	Rekomendasi Kebijakan	10.704.833
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	36	Rekomendasi Kebijakan	16.541.593
		AEE	Kemitraan	1	Kesepakatan	4.664.561
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11	NSPK	4.041.528
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	15	layanan	8.786.035
		BHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	45	operasi	159.069.244
		BMA	Data dan Informasi Publik	37	layanan	14.482.570
		DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	728	Orang	12.942.219
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	40	Layanan	97.346.634
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	46	Laporan	42.934.002

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
5 Program	5) Program Dukungan Manajemen							8.848.398.462
	RM	8.768.979.576	01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	--	--		48.922.915
	PLN	10.900.000			ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3 Rekomendasi Kebijakan	6.400.000
	RMP				EAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	850.000
	PNBP	23.305.389			FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2164 Daerah (Prov/Kab/Kota)	41.672.915
	BLU	45.113.497			01	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		8.799.475.547
	HLN	100.000			AAG	Peraturan Menteri	12 PerMen	2.221.120
					AAH	Peraturan lainnya	10 peraturan	850.000
					ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	42 Rekomendasi Kebijakan	66.671.315
					ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	26 Rekomendasi Kebijakan	46.450.000
					ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	76300 Orang	74.397.896
					AEA	Koordinasi	3 kegiatan	3.790.240
					AEC	Kerja sama	5 Kesepakatan	6.174.978
					AEE	Kemitraan	21 Kesepakatan	22.396.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2650	orang	7.000.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	43	NSPK	55.891.248
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	21.208.148
		BEE	Bantuan Kebencanaan	1	Paket	6.000.000
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	8	Lembaga	2.500.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	4	layanan	13.096.052
		EAA	Layanan Perkantoran	1629	Layanan	5.382.979.977
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	217	Layanan	284.459.957
		EAC	Layanan Umum	591	Layanan	1.066.120.863
		EAD	Layanan Sarana Internal	4157	unit	294.871.461
		EAE	Layanan Prasarana Internal	54	unit	152.685.298
		EAF	Layanan SDM	37384	orang	72.534.449
		EAG	Layanan Hukum	15	Layanan	19.432.307
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	357	Layanan	681.727.443
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	45	Layanan	62.639.214
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	46	Layanan	161.899.058
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	559	Laporan	50.466.496
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	134	Laporan	67.874.097

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	8636	Orang	106.637.930
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan	9.950.000
		PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	27	Rekomendasi Kebijakan	56.550.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN						317.757.906
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN						317.757.906
3 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						136.692.751
	2)	Program Dukungan Manajemen						181.065.155
1 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						136.692.751
	RM	136.692.751	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Lintas Sektoral Yang Efektif	01	Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Dukungan Layanan Manajemen Deputi		136.692.751
			02	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi	ABC	Kebijakan Bidang Politik	51 Rekomendasi Kebijakan	54.816.712
					ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	14 Rekomendasi Kebijakan	9.932.013
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	25 Rekomendasi Kebijakan	32.099.985
					ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	14 Rekomendasi Kebijakan	25.423.544
					EAC	Layanan Umum	14 Layanan	9.620.497
					PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	2.700.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.100.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						181.065.155
	RM	181.065.155	01	SDM yang Kompetitif	01	Layanan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata laksana, Perpustakaan dan Data		6.445.062
			02	Organisasi yang fit dan purpose	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 Layanan	2.462.734
			03	Layanan dukungan sekretariat dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	1.891.968
			04	Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan optimal	EAJ	Layanan Data dan Informasi	3 Layanan	972.162
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	10 Laporan	1.118.198
					02	Layanan Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan hubungan antar lembaga		3.097.801
					EAC	Layanan Umum	1 Layanan	693.334
					EAG	Layanan Hukum	2 Layanan	648.164
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1 Layanan	1.756.303
					03	Layanan Administrasi umum, Kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, dan keamanan internal		124.885.543
					EAA	Layanan Perkantoran	2 Layanan	86.638.045
					EAC	Layanan Umum	5 Layanan	9.231.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	327	unit	13.718.610
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	11.614.390
		EAF	Layanan SDM	157	orang	2.522.002
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	1.160.533
		04	Layanan Pengelolaan Pengawasan Internal			3.194.173
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	8	Laporan	3.194.173
		05	Penelaahan dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam			1.889.257
		ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	5	Rekomendasi Kebijakan	1.889.257
		06	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)			26.198.287
		ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Rekomendasi Kebijakan	4.642.901
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	9.045.057
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	3.321.416
		EAD	Layanan Sarana Internal	279	unit	9.044.410
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	144.503
		07	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI			15.355.032

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2	Rekomendasi Kebijakan	2.998.996
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	7.413.241
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	1.639.376
		EAD	Layanan Sarana Internal	434	unit	1.704.490
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.598.929

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN						443.334.438
2 Fungsi	04	EKONOMI						443.334.438
3 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						236.043.423
	2)	Program Dukungan Manajemen						207.291.015
1 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						236.043.423
	RM	236.043.423	01	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas	01	Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan		15.000.000
			02	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	22 Rekomendasi Kebijakan	12.000.000
			03	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Berkualitas	EAC	Layanan Umum	2 Layanan	3.000.000
			04	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM yang Berkualitas	02	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis		15.000.000
			05	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	42 Rekomendasi Kebijakan	12.000.000
			06	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas	EAC	Layanan Umum	2 Layanan	3.000.000
			07	Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Integrasi Konektivitas dan Daya Saing	03	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi		10.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	08 Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional yang Berkualitas	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	22	Rekomendasi Kebijakan	7.000.000
	09 Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	EAC	Layanan Umum	2	Layanan	3.000.000
		04	Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM			14.500.000
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.678.580
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	10	Rekomendasi Kebijakan	6.500.000
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	5.321.420
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		05	Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri			13.000.000
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	8	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	922.000
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	3.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3 Rekomendasi Kebijakan	2.078.000
		06	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang		16.500.000
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	7 Rekomendasi Kebijakan	10.500.000
		ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	6 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
		EAC	Layanan Umum	2 Layanan	3.000.000
		07	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Integrasi Konektivitas dan Daya Saing		36.000.000
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	13 Rekomendasi Kebijakan	18.500.000
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	12 Rekomendasi Kebijakan	9.195.359
		EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	7.966.641
		EAC	Layanan Umum	1 Layanan	338.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					08	Rekomendasi Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional			11.000.000
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	23	Rekomendasi Kebijakan	8.000.000
					EAC	Layanan Umum	2	Layanan	3.000.000
					09	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian			105.043.423
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	8	Rekomendasi Kebijakan	100.043.423
					PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							207.291.015
	RM	207.291.015	01	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	01	Layanan Dukungan Manajemen			207.291.015
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	10	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000
					EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	166.124.996
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.000.000
					EAC	Layanan Umum	4	Layanan	3.000.000
					EAD	Layanan Sarana Internal	74	unit	4.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAF Layanan SDM	601	orang	4.500.000
		EAG Layanan Hukum	2	Layanan	2.000.000
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	2.000.000
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	5.000.000
		EAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	11.666.019
		EAK Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	1.000.000
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6	Laporan	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN						258.623.827
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						258.623.827
3 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						73.229.708
	2)	Program Dukungan Manajemen						185.394.119
1 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						73.229.708
	RM	73.229.708	01	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial	01	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial		13.200.000
			02	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	12 Rekomendasi Kebijakan	5.200.000
			03	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan	PBN	Kebijakan Bidang Sosial	7 Rekomendasi Kebijakan	8.000.000
			04	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	02	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana		4.950.000
			05	Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	6 Rekomendasi Kebijakan	2.550.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
	06 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	6 Rekomendasi Kebijakan	2.400.000
		03	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan		4.700.000
		ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	12 Rekomendasi Kebijakan	4.700.000
		04	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda		4.775.000
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	12 Rekomendasi Kebijakan	4.775.000
		05	Rekomendasi Kebijakan Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga		40.429.708
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	9 Rekomendasi Kebijakan	3.500.000
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3 Rekomendasi Kebijakan	5.402.486
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	69 Lembaga	18.620.126
		QMB	Komunikasi Publik	1 layanan	12.907.096
		06	Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama		5.175.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	12	Rekomendasi Kebijakan	5.175.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						185.394.119
	RM	185.394.119	01 Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib administrasi	01	Layanan Dukungan Manajemen			185.394.119
				ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.300.000
				ABC	Kebijakan Bidang Politik	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
				ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
				ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1	Rekomendasi Kebijakan	500.000
				EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	112.428.245
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	8	Layanan	4.602.125
				EAC	Layanan Umum	18	Layanan	23.661.953
				EAD	Layanan Sarana Internal	201	unit	22.200.000
				EAF	Layanan SDM	295	orang	2.604.732
				EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	550.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	5.500.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	4.212.934
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.100.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	714.450
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	8	Laporan	3.854.645
		FAA	Kearsipan	7	Dokumen	465.035

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							4.907.148.382
2 Fungsi	08	PARIWISATA							3.695.323.885
	10	PENDIDIKAN							1.211.824.497
3 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							994.159.210
	2)	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif							2.779.969.759
	3)	Program Dukungan Manajemen							1.133.019.413
1 Program	1)	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							994.159.210
	RM	947.798.102	01	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	01	Lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata berdaya saing			994.159.210
	PNBP	46.361.108			EAC	Layanan Umum	6	Layanan	31.885.539
					PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	5489	Orang	9.105.966
					PEC	Kerja sama	77	Kesepakatan	5.194.141
					RAA	Sarana Bidang Pendidikan	1343	Paket	222.466.303
					RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	10	unit	554.804.786
					SAD	Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	12377	Orang	159.719.104
					SCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2111	Orang	10.983.371
2 Program	2)	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif							2.779.969.759

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	2.738.969.759	01	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	01	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional			14.000.000
PLN	41.000.000	02	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3	Rekomendasi Kebijakan	1.236.160
RMP		03	Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	AEA	Koordinasi	7	kegiatan	6.763.840
		04	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreatif	PEA	Koordinasi	1	kegiatan	6.000.000
		05	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kerjasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif	02	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian			19.000.000
		06	Tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif	AAH	Peraturan lainnya	4	peraturan	6.050.300
		07	Tersedianya destinasi pariwisata yang siap dipasarkan	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2	Rekomendasi Kebijakan	2.100.000
		08	Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan	PAC	Peraturan Pemerintah	4	PP	10.849.700
		09	Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara di destinasi	03	Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif			60.084.800
		10	Meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		11	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	11	Rekomendasi Kebijakan	41.334.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	12 Bertumbuhnya akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	PEA	Koordinasi	5	kegiatan	8.500.000
	13 Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	TAJ	Layanan Data dan informasi	3	Layanan	9.250.000
	14 Meningkatnya citra dan akses pasar produk ekonomi kreatif nasional	04	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kepariwisataan dan ekonomi kreati			234.437.000
	15 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara leisure	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	NSPK	8.066.800
	16 Meningkatnya citra pariwisata Indonesia	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	68	Daerah (Prov/Kab/Kota)	54.049.200
	17 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan mancanegara minat khusus dan bisnis	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	16800	Orang	30.023.000
	18 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan minat khusus dan bisnis	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5750	Orang	82.000.000
	19 Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	SCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	27750	Orang	60.298.000
	20 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Digital Bidang Ekonomi Kreatif	05	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kerjasama kepariwisataan dan ekonomi kreatif			72.111.000
	21 Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan Nusantara	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	3.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25	Lembaga	42.000.000
		PEC	Kerja sama	15	Kesepakatan	27.111.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		06	Tersedianya infrastruktur ekonomi kreatif			113.128.500
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6000	Orang	13.180.695
		PEA	Koordinasi	5	kegiatan	13.749.920
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	8	Unit	20.657.885
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	20	unit	65.540.000
		07	Tersedianya destinasi pariwisata yang siap dipasarkan			27.620.400
		AEA	Koordinasi	34	kegiatan	6.016.000
		PEA	Koordinasi	64	kegiatan	12.647.400
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	917	Orang	2.390.000
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	16	unit	6.567.000
		08	Tersedianya destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan			55.401.700
		AEA	Koordinasi	5	kegiatan	5.500.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	1.750.000
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3	Kelompok Masyarakat	21.750.000
		CBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1	unit	3.000.000
		PEA	Koordinasi	8	kegiatan	14.424.860

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	3.500.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2	Kelompok Masyarakat	2.750.000
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2	unit	2.726.840
		09	Meningkatnya lama tinggal wisatawan mancanegara di destinasi			23.395.400
		AEA	Koordinasi	12	kegiatan	3.000.000
		PEA	Koordinasi	35	kegiatan	12.000.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	200	Orang	2.000.000
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	10	unit	6.395.400
		10	Meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional			48.320.065
		ADD	Standarisasi Lembaga	1700	Lembaga	31.635.200
		PDD	Standarisasi Lembaga	250	Lembaga	16.684.865
		11	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional			11.623.886
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	1.000.000
		BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	250	Industri	6.123.886
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PEH	Promosi	6	promosi	2.500.000
		12	Bertumbuhnya akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional			166.994.943
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2400	UMKM	21.552.900
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3000	UMKM	33.592.043
		QEA	Bantuan Masyarakat	600	Orang	111.850.000
		13	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif			14.512.106
		ACD	Perizinan Lembaga	60	Institusi	1.245.515
		AEH	Promosi	75	promosi	3.166.591
		PDC	Sertifikasi Produk	1000	produk	7.000.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	150	Orang	3.100.000
		14	Meningkatnya akses pasar produk ekonomi kreatif nasional			44.800.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1400	orang	4.000.000
		PEH	Promosi	11	promosi	40.800.000
		15	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan leisure			137.826.109
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1450	orang	9.113.050
		AEH	Promosi	15	promosi	39.215.582
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	2.098.878

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.550.000
		PEH	Promosi	21	promosi	78.848.599
		16	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan Nusantara			76.600.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2000	orang	5.500.000
		AEH	Promosi	6	promosi	8.900.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	1.000.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.500.000
		PEH	Promosi	19	promosi	50.700.000
		17	Meningkatnya citra pariwisata Indonesia			417.775.689
		AEE	Kemitraan	1	Kesepakatan	5.000.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2000	orang	6.775.689
		AEH	Promosi	3	promosi	85.000.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	21.000.000
		PEH	Promosi	4	promosi	300.000.000
		18	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan minat khusus dan bisnis			72.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2500	orang	10.000.000
		AEH	Promosi	30	promosi	13.500.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	4.000.000
		PEH	Promosi	41	promosi	45.000.000
		19	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan			755.984.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2100	orang	26.810.000
		AEG	Konferensi dan Event	75	Kegiatan	304.781.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	15	NSPK	14.793.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2500	Orang	8.750.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	52	Daerah (Prov/Kab/Kota)	17.000.000
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	33	Rekomendasi Kebijakan	20.850.000
		PEG	Konferensi dan Event	8	Kegiatan	13.780.000
		PEH	Promosi	63	promosi	349.220.000
		20	Meningkatnya kualitas produk ekonomi kreatif			104.189.525
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	6.470.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	35	Lembaga	24.350.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1200	Orang	13.055.000
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3	Rekomendasi Kebijakan	7.335.036
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	97	Industri	52.979.489
		21	Meningkatnya kontribusi ekonomi digital bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi nasional 24 Jumlah			34.882.625
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	3.600.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3000	Orang	3.000.000
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3600	UMKM	7.400.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9	Lembaga	15.160.195
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	70	UMKM	5.722.430
		22	Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus			274.782.011
		AEA	Koordinasi	17	kegiatan	40.793.950
		PEC	Kerja sama	10	Kesepakatan	12.105.860
		PEH	Promosi	47	promosi	32.691.400
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	50	Industri	19.653.090
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	15	unit	169.537.711

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
3 Program	3)	Program Dukungan Manajemen							1.133.019.413
	RM	1.133.019.413	01	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/ Baparekraf sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	01	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/ Baparekraf sesuai kewenangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama			1.094.617.413
			02	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/ Baparekraf sesuai kewenangan Inspektorat Utama	AAG	Peraturan Menteri	1	PerMen	3.421.526
					AEA	Koordinasi	1	kegiatan	5.967.000
					BMB	Komunikasi Publik	4	layanan	69.836.096
					EAA	Layanan Perkantoran	19	Layanan	652.861.282
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	22	Layanan	80.519.238
					EAC	Layanan Umum	18	Layanan	39.460.234
					EAD	Layanan Sarana Internal	7	unit	23.762.534
					EAE	Layanan Prasarana Internal	203	unit	40.653.514
					EAF	Layanan SDM	1231	orang	42.061.672
					EAG	Layanan Hukum	7	Layanan	7.406.729
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7	Layanan	9.544.698
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	562.636
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	8	Layanan	75.922.905
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	10	Laporan	29.994.055

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	400	Orang	12.643.294
		02	Nilai akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			38.402.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	5.707.976
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	32.694.024

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA							244.827.483
2 Fungsi	04	EKONOMI							244.827.483
3 Program	1)	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN							86.554.203
	2)	Program Dukungan Manajemen							158.273.280
1 Program	1)	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN							86.554.203
	RM		86.554.203	01	Meningkatkan daya saing BUMN	01	Tata Kelola BUMN yang Profesional		86.554.203
				02	BUMN unggul di kancah global	AAG	Peraturan Menteri	5 PerMen	2.234.604
				03	Kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan nasional	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	56 Rekomendasi Kebijakan	42.655.624
				04	Kontribusi BUMN dalam meningkatkan value BUMN untuk pemegang saham (Aset Negara)	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	68 Rekomendasi Kebijakan	1.949.468
				05	Menciptakan SDM yang unggul dan profesional	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	5 Rekomendasi Kebijakan	23.131.246
				06	Mencitapkan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	BBD	Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha	1 Badan usaha	2.849.205
				07	Kontribusi BUMN untuk kemanfaatan sosial masyarakat	BDA	Fasilitasi dan Pembinaan BUMN	115 BUMN	13.734.056
				08	Mewujudkan penegakan hukum pengelolaan badan usaha milik negara				
				09	Mewujudkan penguatan aspek legal BUMN				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
			10	Meningkatnya tata kelola BUMN sebagai korporasi					
			11	Penguatan kapasitas BUMN					
			12	Kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN)					
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							158.273.280
	RM	158.273.280	01	Menciptakan SDM yang unggul dan professional	01	Tata Kelola Kementerian BUMN yang Baik			158.273.280
			02	Terciptanya organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	99.626.794
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.004.169
					EAC	Layanan Umum	1	Layanan	18.010.922
					EAD	Layanan Sarana Internal	56	unit	6.266.221
					EAF	Layanan SDM	387	orang	10.001.251
					EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	761.702
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.608.335
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	13.828.238
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	5	Laporan	2.468.235
					FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	16	Laporan	3.697.413

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)						2.787.183.148
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						1.308.799.527
	10	PENDIDIKAN						1.478.383.621
3 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						2.233.250.081
	2)	Program Dukungan Manajemen						553.933.067
1 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						2.233.250.081
	RM	2.231.863.586	01	Meningkatnya Akselerasi Ekosistem Riset dan Inovasi yang Kondusif melalui Kolaborasi Antar Pihak dalam Litbangjirap Iptek	01	Kawasan Sains dan Teknologi yang Strategis		32.731.400
	PNBP	1.386.495	02	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Industri dalam Riset dan Inovasi	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	55 Lembaga	32.731.400
			03	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dan Kemitraan Litbangjirap Iptek	02	Start Up Inovasi yang Mandiri		106.971.754
			04	Meningkatnya Research Power House yang Unggul, Otonomi dan Mandiri	BDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	102 Start Up	13.770.000
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	550 produk	16.500.000
					QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	155 Start Up	76.701.754
					03	SDM Iptek yang berkualitas		54.353.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		SBA	Pendidikan Tinggi	550	Orang	50.000.000
		SBE	Pendidikan Non Gelar	200	Orang	4.353.500
		04	Produk Riset dan Inovasi hasil kolaborasi (PRN)			2.004.853.427
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	1.500.000
		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	5000	Orang	50.000.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	2.000.000
		PCB	Perizinan Masyarakat	400	Orang	2.147.239
		PDB	Akreditasi Produk	1370	produk	7.274.593
		PDE	Akreditasi Lembaga	380	Lembaga	6.249.797
		PEA	Koordinasi	107	kegiatan	43.861.700
		PEC	Kerja sama	30	Kesepakatan	683.198
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	498	orang	63.000.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	15	NSPK	562.272
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15	Lembaga	1.024.797
		QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	300	Start Up	81.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QMA	Data dan Informasi Publik	1424000	layanan	9.015.989
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	50	produk	484.150.308
					SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	1251	Purwarupa	460.097.570
					SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	4302	model	780.107.987
					SDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	37	kekayaan intelektual	3.395.595
					TAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	4.782.382
					05	E-Katalog Produk Inovasi			34.340.000
					AEG	Konferensi dan Event	1	Kegiatan	6.000.000
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	8	produk	2.000.000
					FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	40	Desa	17.340.000
					PEH	Promosi	2	promosi	9.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							553.933.067
	RM	544.451.608	01	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam Rangka Reformasi Birokrasi	01	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Rangka Reformasi Birokrasi			553.933.067
	PNBP	3.587.976			AAC	Peraturan Pemerintah	1	PP	1.354.126
	BLU	5.893.483			AAD	Peraturan Presiden	1	PerPres	951.941
					AAG	Peraturan Menteri	1	PerMen	717.750

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		AAH Peraturan lainnya	1	peraturan	673.665
		AEC Kerja sama	57	Kesepakatan	7.562.815
		AEH Promosi	12	promosi	9.983.562
		BMB Komunikasi Publik	1	layanan	3.709.127
		EAA Layanan Perkantoran	8	Layanan	352.756.790
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	8.201.700
		EAC Layanan Umum	28	Layanan	83.314.096
		EAE Layanan Prasarana Internal	6	unit	13.001.124
		EAF Layanan SDM	4	orang	8.750.000
		EAG Layanan Hukum	1	Layanan	1.071.380
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	27	Layanan	9.353.052
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	8.040.925
		EAJ Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	11.346.946
		EAK Layanan Pengawasan Internal	240	Laporan	10.192.747
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6	Laporan	8.283.350
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	566	Orang	13.372.481
		PEH Promosi	2	promosi	1.295.490

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH						978.289.099
2 Fungsi	04	EKONOMI						860.689.099
	10	PENDIDIKAN						117.600.000
3 Program	1)	Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi						625.962.445
	2)	Program Dukungan Manajemen						352.326.654
1 Program	1)	Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi						625.962.445
	RM	458.155.896	01	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Wirausaha, UMKM dan Koperasi	01	Pertumbuhan start-up berbasis koperasi		69.350.000
	BLU	167.806.549			ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	4.800.000
					BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	230 Koperasi	2.800.000
					BMA	Data dan Informasi Publik	3 layanan	10.966.000
					FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	2.634.000
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	8 Laporan	3.050.000
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	84 Lembaga	8.900.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1550	Orang	35.000.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	10	Badan usaha	1.200.000
		02	Persentase kontribusi PDB sektor koperasi			241.131.000
		AAG	Peraturan Menteri	2	PerMen	1.100.000
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	650.000
		BAF	Pelayanan Publik kepada Koperasi	13320	Koperasi	24.165.236
		BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	575	Koperasi	12.000.000
		DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6470	Orang	8.000.000
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	1	model	600.000
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	95.426.995
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	5.214.656
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	8.055.709
		EAD	Layanan Sarana Internal	51	unit	2.337.320
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	6.034.517
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6	Layanan	7.415.558
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	8.690.530
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	10.041.682

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	15	Laporan	1.968.409
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7	Laporan	4.605.388
		QAF	Pelayanan Publik kepada Koperasi	100	Koperasi	3.800.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100	Kelompok Masyarakat	5.500.000
		QDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	750	Koperasi	18.750.000
		SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3550	Orang	16.775.000
		03	Persentase Total Nilai Potensi Ekspor UMKM			15.946.148
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3000	UMKM	15.946.148
		04	Persentase UKM Naik Kelas			77.198.537
		AEB	Forum	1	forum	1.500.000
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3820	UMKM	9.415.287
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan	4.363.500
		PEH	Promosi	1	promosi	1.146.705
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	4113	UMKM	60.773.045
		05	Pertumbuhan Jumlah Tenaga UMKM			27.000.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7000	Orang	5.736.000
		SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6000	Orang	21.264.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		06	Persentase Total Investasi UMKM			22.197.790
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
		AEB	Forum	1	forum	394.600
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	1000	UMKM	6.000.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	500.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10500	UMKM	11.303.190
		07	Persentase Kontribusi PDB Sektor UMKM			173.138.970
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		AEH	Promosi	34	promosi	9.132.750
		BDF	Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	6653	Koperasi	54.895.700
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	56700	UMKM	11.155.400
		DAA	Pendidikan Vokasi Bidang Komunikasi dan Informatika	200	Orang	1.403.710
		DBE	Pendidikan Non Gelar	600	Orang	18.937.490

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2100	Orang	9.513.800
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	34	Layanan	20.245.827
					FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	131	Daerah (Prov/Kab/Kota)	23.219.627
					QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	1135	UMKM	20.134.666
					QEE	Bantuan Kebencanaan	1000	Paket	3.500.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							352.326.654
	RM	316.027.203	01	Meningkatnya Efektivitas Manajemen dan Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM	01	Meningkatnya Efektivitas Manajemen dan Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM			352.326.654
	BLU	36.299.451			ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	600.000
					ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1	Rekomendasi Kebijakan	1.750.000
					AEA	Koordinasi	1	kegiatan	700.000
					AEB	Forum	7	forum	625.400
					AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	3.264.310
					BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	20	Orang	118.320
					BCB	Perkara Hukum Lembaga	4	Perkara	550.080

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	9	Layanan	225.582.243
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	14	Layanan	34.306.362
		EAC	Layanan Umum	8	Layanan	9.796.270
		EAD	Layanan Sarana Internal	36	unit	3.126.450
		EAE	Layanan Prasarana Internal	3	unit	124.750
		EAF	Layanan SDM	3	orang	14.577.067
		EAG	Layanan Hukum	6	Layanan	2.793.060
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	5.081.901
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	16.521.660
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	17.305.300
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	8.952.978
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	7	Laporan	5.974.663
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	150	Orang	187.300
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	388.540

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						279.568.938
2 Fungsi	11	PERLINDUNGAN SOSIAL						279.568.938
3 Program	1)	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak						141.766.500
	2)	Program Dukungan Manajemen						137.802.438
1 Program	1)	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak						141.766.500
	RM	141.766.500	01	Meningkatnya kesetaraan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	01	Kebijakan kesetaraan gender dan pelaksanaan PUG yang baik di K/L bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dan daerah		17.250.000
			04	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	3 Rekomendasi Kebijakan	2.050.000
			05	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	650.000
			06	Meningkatnya kualitas keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9 Lembaga	381.967
			07	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan	300.000
			08	Meningkatnya kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7 Laporan	1.001.820

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FBA	Fasiilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	7	Daerah (Prov/Kab/Kota)	628.160
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	18	Lembaga	2.352.113
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.885.940
		03	Kebijakan pemenuhan hak anak dan kapasitas kelembagaan yang baik di daerah			17.250.000
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
		AEA	Koordinasi	3	kegiatan	3.000.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	400.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25	Lembaga	650.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	100.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan	2.600.000
		PBN	Kebijakan Bidang Sosial	34	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	201	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		06 Partisipasi masyarakat dan keluarga dalam PP dan PA yang baik di daerah			10.850.000
		AAH Peraturan lainnya	3	peraturan	850.000
		AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	150.000
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12	Kelompok Masyarakat	1.200.000
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan	200.000
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	292	Kelompok Masyarakat	5.600.000
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	11	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.350.000
		07 Kebijakan perlindungan hak perempuan dan unit layanan dan SDM perlindungan perempuan di daerah			43.716.500
		ABN Kebijakan Bidang Sosial	4	Rekomendasi Kebijakan	4.537.600
		AEA Koordinasi	7	kegiatan	7.900.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	1.678.900
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	29 Lembaga	1.000.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3 Laporan	4.700.000
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	100 Orang	3.500.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15 Lembaga	1.400.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan	16.000.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.000.000
		10	Kebijakan perlindungan khusus anak dan unit layanan dan SDM perlindungan anak di daerah		52.700.000
		AAH	Peraturan lainnya	1 peraturan	1.580.000
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	2.190.000
		AEA	Koordinasi	24 kegiatan	2.579.650
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	730.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2 Lembaga	600.000
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	14 Lembaga	1.000.000
		BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	14 Pemerintah Daerah	5.292.769

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	7	Laporan	4.483.641
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	9	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.354.620
				PEA	Koordinasi	13	kegiatan	831.360
				QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	420	Orang	5.695.000
				QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	20.000.000
				UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	27	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.362.960
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						137.802.438
	RM	137.802.438	01	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA	01	Layanan administrasi pemerintahan yang baik di Kementerian PPPA		137.802.438
				ABN	Kebijakan Bidang Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan	4.200.000
				AEA	Koordinasi	1	kegiatan	1.500.000
				AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	1.700.000
				EAA	Layanan Perkantoran	5	Layanan	89.403.847
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.598.591

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAC	Layanan Umum	6	Layanan	22.000.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	36	unit	1.350.000
		EAF	Layanan SDM	473	orang	1.900.000
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	1.350.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.200.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	3.600.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	4.000.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	23	Laporan	1.100.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.700.000
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	1.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI						277.712.190
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						277.712.190
3 Program	1)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN						96.624.260
	2)	Program Dukungan Manajemen						181.087.930
1 Program	1)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN						96.624.260
	RM	96.624.260	01	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	--	--		36.757.158
			02	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	AAC	Peraturan Pemerintah	2 PP	1.086.268
			03	Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	AAD	Peraturan Presiden	1 PerPres	610.128
			05	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima	AAE	Keputusan Presiden	1 KepPres	1.200.000
			06	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional	AAG	Peraturan Menteri	22 PerMen	4.038.653
			07	Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah dalam penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan	1.633.910
			08	Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan	130.000
			09	Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah dalam penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas pegawai ASN	BMB	Komunikasi Publik	12 layanan	400.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	722.020
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	619	Lembaga	9.989.900
		PAC	Peraturan Pemerintah	3	PP	1.577.508
		PAD	Peraturan Presiden	1	PerPres	1.000.000
		PAG	Peraturan Menteri	3	PerMen	5.500.000
		PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	568.771
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	370	Lembaga	2.700.000
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	359	Lembaga	5.600.000
		02	Lembaga yang efisien, akuntabel, bersih dan berintegritas			32.056.976
		BMA	Data dan Informasi Publik	3151	layanan	3.796.933
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan	673.158
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1004	Lembaga	1.950.000
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	9	Rekomendasi Kebijakan	1.736.885
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1996	Lembaga	23.900.000
		03	Organisasi pemerintah yang efektif			11.335.673
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	5	Lembaga	1.014.892

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	36	Lembaga	10.320.781
		04	Lembaga dengan ASN profesional			5.774.453
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	300.000
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	316	Lembaga	3.224.453
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	70	Lembaga	2.250.000
		05	Lembaga dengan pelayanan publik prima			5.500.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1000	Laporan	400.000
		PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	2.500.000
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	130000	Laporan	1.600.000
		06	IP yang menerapkan sistem merit			5.200.000
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
		BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	30	Orang	280.000
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	15	Lembaga	70.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	150.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	50	Orang	100.000
					QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1950	Lembaga	3.500.000
					UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	70	Lembaga	1.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							181.087.930
	RM	181.087.930	01	Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	01	Kementerian PANRB yang efektif dan ASN yang profesional			13.914.896
			02	Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera	AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	448.613
			03	Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi dan akuntabel	EAF	Layanan SDM	4	orang	9.660.079
			04	Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	883.669
			05	Meningkatnya profesionalisme, kinerja dan pelayanan KASN	EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	2.922.535
					02	Kementerian PANRB yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas			129.707.599
					EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	99.591.190
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6	Layanan	2.947.312
					EAC	Layanan Umum	6	Layanan	8.209.218
					EAD	Layanan Sarana Internal	2	unit	3.600.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	2.000.000
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	740.948
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	8.100.949
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	2.273.943
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6	Laporan	2.244.039
		03	Layanan Dukungan Manajemen Kementerian PANRB			1.076.530
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4	Rekomendasi Kebijakan	1.076.530
		04	Layanan Dukungan Manajemen KASN			36.388.905
		AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	200.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	29.290.726
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	750.000
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	350.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	14	unit	500.000
		EAF	Layanan SDM	200	orang	3.398.179
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	150.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	300.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	550.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	600.000
		EAK Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	150.000
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	150.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	050	BADAN INTELIJEN NEGARA							9.266.959.237
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							9.266.959.237
3 Program	1)	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara							4.557.542.284
	2)	Program Dukungan Manajemen							4.709.416.953
1 Program	1)	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara							4.557.542.284
	RM	4.557.542.284	01	Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen luar negeri	01	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang luar negeri			513.168.000
			02	Menurunnya status ancaman aspek Ipoleksosbudhankam yang dipengaruhi dari luar negeri	BHB	Operasi Bidang Keamanan	925	operasi	513.168.000
			03	Menurunnya status ancaman aspek Ipolsosbudhankam	02	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri			1.983.354.000
			04	Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen dalam negeri	BHB	Operasi Bidang Keamanan	10765	operasi	1.983.354.000
			05	Menurunnya status ancaman aspek Sosbudhankam	03	Terwujudnya pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ATHG			987.696.000
			06	Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kontra intelijen	BHB	Operasi Bidang Keamanan	4830	operasi	952.096.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	07 Menurunnya status ancaman aspek ekonomi	QHB	Operasi Bidang Keamanan	153	operasi	35.600.000
	08 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen ekonomi	04	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG masalah ekonomi			249.744.000
	09 Menurunnya status ancaman variabel ancaman teknologi	BHB	Operasi Bidang Keamanan	1180	operasi	249.744.000
	10 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen teknologi	05	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG intelijen teknologi			239.574.000
	11 Menurunnya status ancaman variabel ancaman siber	BHB	Operasi Bidang Keamanan	555	operasi	239.574.000
	12 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen siber	06	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG intelijen siber			257.040.000
	13 Terwujudnya stabilitas pemberitaan media komunikasi dan informasi	BHB	Operasi Bidang Keamanan	867	operasi	242.540.000
	14 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi	QHB	Operasi Bidang Keamanan	129	operasi	14.500.000
	15 Terwujudnya deteksi dini dan peringatan dini secara cepat dan tepat	07	Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG komunikasi dan informasi			236.988.000
	16 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan produksi intelijen	BHB	Operasi Bidang Keamanan	1289	operasi	236.988.000
	17 Meningkatnya efektivitas koordinasi dan kerja sama antar penyelenggara intelijen negara	08	Pengambilan kebijakan yang tepat			89.978.284
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	5282	operasi	89.978.284

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							4.709.416.953
	RM	4.709.416.953	01	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BIN	01	Pelaksanaan Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia			4.641.216.953
			02	Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja, anggaran dan BMN	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	7	Paket	300.000.000
			03	Meningkatnya profesionalisme SDM	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	8	Unit	2.645.750.000
					CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	897	Unit	52.726.577
					DBA	Pendidikan Tinggi	275	Orang	100.000.000
					EAA	Layanan Perkantoran	24	Layanan	598.069.899
					EAD	Layanan Sarana Internal	357	unit	420.483.860
					EAE	Layanan Prasarana Internal	5	unit	435.942.110
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	427	Orang	32.244.507
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	3.500.000
					RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	7	Unit	50.000.000
					TAF	Layanan SDM	25	orang	2.500.000
					02	Pelaksanaan Administrasi Operasi Intelijen			51.000.000
					BHB	Operasi Bidang Keamanan	2	operasi	51.000.000
					03	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Program Kerja dan Kinerja, Personel, Keuangan dan Logistik			17.200.000
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	81	Laporan	17.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA						1.716.608.435
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN						1.716.608.435
3 Program	1)	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara						963.116.450
	2)	Program Dukungan Manajemen						753.491.985
1 Program	1)	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara						963.116.450
	RM	963.116.450	01	Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber di Indonesia	01	Profil Keamanan Siber Stakeholder		963.116.450
			02	Terwujudnya Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi yang Prima	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	19 Rekomendasi Kebijakan	18.388.645
					ADC	Sertifikasi Produk	42 produk	84.370.205
					ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	300 Orang	6.229.605
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	44 Lembaga	10.436.937
					BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	4 Badan usaha	4.134.162
					BHB	Operasi Bidang Keamanan	140 operasi	38.023.554
					CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2 unit	206.400.000
					DBA	Pendidikan Tinggi	394 Orang	52.894.963
					DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	583 Orang	22.938.379
					PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	200 Orang	3.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	29	Lembaga	9.700.000
					RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	12	unit	505.000.000
					SCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	100	Orang	1.600.000
2 Program	2) Program Dukungan Manajemen							753.491.985
	RM	753.491.985	01 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya BSSN yang andal dan profesional		01 Penyelenggaraan Birokrasi BSSN yang Bersih, Akuntabel, Berkinerja Tinggi, Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik			753.491.985
			02 Terwujudnya Tata Kelola TIK yang aman dan andal		ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	13	Rekomendasi Kebijakan	864.296
			03 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan bidang siber dan sandi		AEC Kerja sama	2	Kesepakatan	1.401.701
					CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	unit	75.000.000
					DDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	11	Purwarupa	2.030.755
					EAA Layanan Perkantoran	3	Layanan	269.849.065
					EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.045.859
					EAC Layanan Umum	4	Layanan	132.774.379
					EAF Layanan SDM	2446	orang	7.774.343
					EAG Layanan Hukum	3	Layanan	1.853.362
					EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	2.212.158
					EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	7.835.034

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	66.362.650
		EAK Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	3.924.618
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.767.135
		FAH Pengelolaan Keuangan Negara	2	Laporan	2.796.630
		RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	unit	175.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL							50.436.830
2 Fungsi	02	PERTAHANAN							49.813.109
	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							623.721
3 Program	1)	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional							7.988.562
	2)	Program Dukungan Manajemen							42.448.268
1 Program	1)	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional							7.988.562
	RM		7.988.562	01	Terumuskannya rancangan Kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis	01	Rancangan Kebijakan dan Strategi Nasional, Regional, dan Internasional		1.736.078
				02	Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	17 Rekomendasi Kebijakan	1.736.078
				03	Terumuskannya rancangan Kebijakan politik, strategi nasional dan rencana kontinjensi yang tangguh dan dinamis	02	Rancangan Kebijakan Sistem Nasional		1.924.012
				04	Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	5 Rekomendasi Kebijakan	488.656
				05	Terumuskannya kebijakan terkait keahlian tertentu yang tangguh dan dinamis	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	5 Rekomendasi Kebijakan	488.656
						ABN	Kebijakan Bidang Sosial	5 Rekomendasi Kebijakan	488.656

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	4 Rekomendasi Kebijakan	458.044
		03	Rancangan Kebijakan Politik, Strategi Nasional dan Rencana Kontinjensi		1.736.078
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	5 Rekomendasi Kebijakan	488.656
		ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	10 Rekomendasi Kebijakan	1.247.422
		04	Rancangan Kebijakan Terkait Hasil Pengukuran Pembangunan Nasional dan Kondisi Kehidupan Nasional serta Kebijakan Mobilisasi Sumber Kekuatan Nasional		2.439.334
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	8 Rekomendasi Kebijakan	580.492
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	8 Rekomendasi Kebijakan	580.492
		ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	8 Rekomendasi Kebijakan	580.492
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	8 Rekomendasi Kebijakan	580.492
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4 Rekomendasi Kebijakan	117.366

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					05	Rancangan Kebijakan Terkait Keahlian Tertentu		153.060
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	30.612
					ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	30.612
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	30.612
					ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	30.612
					ABN	Kebijakan Bidang Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	30.612
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						42.448.268
	RM	42.448.268	01	Terkelolanya Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	01	Layanan Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan		760.359
			02	Terkelolanya Layanan Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 Layanan	200.660
			03	Terwujudnya dukungan internal perkantoran yang berkualitas dan berkinerja tinggi	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4 Layanan	305.179
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13 Laporan	100.072

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	14	Laporan	154.448
		02	Layanan Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal			685.179
		BLB	Persidangan Lembaga Eksekutif	2	sidang	300.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	50.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	50.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	40	Laporan	285.179
		03	Layanan Dukungan Internal Perkantoran			41.002.730
		EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	40.392.730
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	203.860
		EAF	Layanan SDM	45	orang	338.108
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	51.892
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	16.140

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	054	BADAN PUSAT STATISTIK							5.278.751.144
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							5.278.751.144
3 Program	1)	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							2.281.850.831
	2)	Program Dukungan Manajemen							2.996.900.313
1 Program	1)	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							2.281.850.831
	RM	2.264.039.174	01	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	01	Publikasi/Laporan Metodologi, Statistik Produksi, Distribusi, Sosial, Neraca Nasional dan Analisis Statistik			2.209.296.196
	PNBP	17.811.657	02	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12	Lembaga	583.440
			03	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	BMA	Data dan Informasi Publik	6858	layanan	937.732.756
					QMA	Data dan Informasi Publik	1754	layanan	1.270.980.000
					02	Sistem informasi/aplikasi pengolahan yang dibuat/dikembangkan/dipelihara			29.982.023
					BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	29.982.023
					03	Laporan metadata dan diseminasi statistik			42.572.612
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	516	Lembaga	5.194.521
					BMA	Data dan Informasi Publik	516	layanan	37.378.091
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							2.996.900.313

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	2.991.242.493	01	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan	01	Layanan Manajemen SDM, Pendidikan dan Pelatihan, serta kemahasiswaan			143.515.836
PNBP	5.657.820	02	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS	EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	45.726.254
		03	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	49.250
				EAC	Layanan Umum	2	Layanan	376.150
				EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	1.200.000
				EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	300.000
				EAF	Layanan SDM	13591	orang	47.650.420
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	131.980
				EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	19443	Orang	47.972.232
				EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	6	Dokumen	109.550
				02	Layanan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Evaluasi, serta Reformasi Birokrasi			41.564.857
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	9.720.045
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	25.324.630
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	3	Laporan	6.117.169
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	403.013
				03	Layanan Hubungan Masyarakat, Protokoler, Manajemen Organisasi dan Hukum			7.884.390

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	2.861.755
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	84.569
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	4.938.066
		04	Layanan Manajemen Keuangan			244.046.448
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	239.904.861
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	34	Dokumen	4.141.587
		05	Manajemen BMN, dan Umum dan Perkantoran			2.559.888.782
		EAA	Layanan Perkantoran	1029	Layanan	2.410.467.049
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	559	Layanan	4.932.466
		EAC	Layanan Umum	1042	Layanan	10.842.077
		EAD	Layanan Sarana Internal	295	unit	35.221.724
		EAE	Layanan Prasarana Internal	31	unit	69.542.463
		EAF	Layanan SDM	14042	orang	2.724.186
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34	Layanan	4.034.400
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	34	Layanan	803.160
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	34	Laporan	1.563.151
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1355	Dokumen	19.758.106

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS						1.770.421.163
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						1.770.421.163
3 Program	1)	Program Perencanaan Pembangunan Nasional						981.278.563
	2)	Program Dukungan Manajemen						789.142.600
1 Program	1)	Program Perencanaan Pembangunan Nasional						981.278.563
	RM	806.398.563	01	Terwujudnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai bidangnya	06	Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas		981.278.563
	PLN	84.470.000	02	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai bidangnya	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	11 Rekomendasi Kebijakan	90.858.300
	RMP	25.000.000	03	Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2 Rekomendasi Kebijakan	3.626.200
	HLN	65.410.000	04	Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya	ABC	Kebijakan Bidang Politik	4 Rekomendasi Kebijakan	5.515.000
					ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2 Rekomendasi Kebijakan	1.354.123
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	5.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN		ALOKASI Ribu Rp
		ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	11 Rekomendasi Kebijakan	87.050.000
		ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	19.890.000
		ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
		ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	4 Rekomendasi Kebijakan	4.250.000
		ABJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	4 Rekomendasi Kebijakan	9.500.000
		ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	6 Rekomendasi Kebijakan	10.365.000
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	11 Rekomendasi Kebijakan	52.052.263
		ABN Kebijakan Bidang Sosial	8 Rekomendasi Kebijakan	33.931.360
		ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	9 Rekomendasi Kebijakan	73.165.215
		ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	2 Rekomendasi Kebijakan	2.750.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000
		ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	3	Rekomendasi Kebijakan	57.820.000
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2	Rekomendasi Kebijakan	2.750.000
		ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan	4	Rekomendasi Kebijakan	26.625.000
		ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2	Rekomendasi Kebijakan	8.100.000
		AEA	Koordinasi	41	kegiatan	93.018.849
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	77.849.680
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1761	Orang	149.790.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	50	Laporan	96.701.752
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	31	Daerah (Prov/Kab/Kota)	31.115.821
		PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1	Rekomendasi Kebijakan	5.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					PEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	2.600.000
					UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	7.600.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							789.142.600
	RM	789.142.600	01	Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen	01	Layanan Dukungan Manajemen Internal Tepat Waktu			789.142.600
			02	Terlaksananya pelayanan pengawasan intern	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	363.066.564
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	98.027.765
					EAC	Layanan Umum	3	Layanan	130.557.856
					EAD	Layanan Sarana Internal	100	unit	41.400.000
					EAE	Layanan Prasarana Internal	10	unit	8.600.000
					EAF	Layanan SDM	2000	orang	8.000.000
					EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	5.000.000
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.700.000
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	29.477.632
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	78.000.000
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	10	Laporan	10.000.000
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.150.000
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2000	Orang	7.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	7.162.783

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN							8.933.624.537
2 Fungsi	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP							8.933.624.537
3 Program	1)	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan							4.239.239.784
	2)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							221.337.000
	3)	Program Dukungan Manajemen							4.473.047.753
1 Program	1)	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan							4.239.239.784
	RM	2.958.070.398	01	Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktifitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	01	Pengurangan Tuna Lahan dan Peningkatan Produktifitas P4T			67.911.745
	PLN	601.092.842	02	Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2	Rekomendasi Kebijakan	2.211.916
	RMP		03	Terwujudnya Akses Reform dalam Reforma Agraria	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	2.750.000
	PNBP	680.076.544	04	Peningkatan Pendaftaran Tanah untuk Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang	BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2928161	Produk	47.649.829
			05	Menurunnya kasus baru sengketa , konflik dan perkara pertanahan	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	23000	Produk	15.300.000
			06	Percepatan Penyelesian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	02	Luas tanah yang diredistribusi terhadap target luas tanah yang diredistribusi			431.524.762
			07	Optimalisasi Pemanfaatan Nilai Tanah	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	1.835.395

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	08 Tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	66	Orang	10.572.261
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	43488	layanan	18.724.449
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	217	km2	63.996.406
		PEA	Koordinasi	230	kegiatan	149.334.024
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	482634	Orang	145.008.199
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	408204	km2	42.054.028
		03	Jumlah Kepala Keluarga penerima Akses Reform terhadap target Kepala Keluarga penerima akses reform			109.123.349
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	446.566
		BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	106	Keluarga	9.640.275
		QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	119811	Keluarga	99.036.508
		04	Jumlah bidang tanah terdaftar nasional			1.508.765.699
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2	Rekomendasi Kebijakan	1.604.732
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	5237	Orang	8.051.726
		AEE	Kemitraan	3	Kesepakatan	2.413.212
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	7.973.181

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	21387	Lembaga	6.892.421
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8675236	layanan	211.320.334
		BDB	Fasiilitasi dan Pembinaan Lembaga	33	Lembaga	711.694
		BKC	Pemantauan lembaga	1187	laporan	65.435.990
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.068.755
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	2.182.274
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	8922584	Orang	1.170.192.036
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	27095	Lembaga	30.919.344
		05	Penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan			58.248.509
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	578	Rekomendasi Kebijakan	2.284.170
		AEA	Koordinasi	504	kegiatan	48.234.585
		AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	1.625.596
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	508.460
		BKC	Pemantauan lembaga	5	laporan	161.600
		QCE	Penanganan Perkara	96	Perkara	5.434.098
		06	Peningkatan penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan			61.988.040

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	10	Rekomendasi Kebijakan	346.887
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	277.449
		BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	33	laporan	457.972
		BKC	Pemantauan lembaga	14	laporan	324.544
		QCE	Penanganan Perkara	1644	Perkara	60.581.188
		07	Akurasi informasi nilai tanah			101.341.407
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12	NSPK	14.184.734
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1675	Orang	7.013.256
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	243658	layanan	4.509.270
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1765	Lembaga	14.479.236
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	152842	km2	14.158.852
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	105	Sistem Informasi	6.559.471
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	5139	Orang	3.247.940
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	4290908	km2	37.188.648
		08	Cakupan dan Informasi serta Reliabilitas Peta Kadastral			1.900.336.273
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	50	Orang	461.142

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	2.423.457
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	64238	Orang	18.989.803
					BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	49646	Lembaga	28.025.524
					BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	181728	Badan usaha	5.080.539
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1441844	layanan	230.843.229
					CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	712120	km2	6.346.320
					CCI	OM Sarana Pengembangan Kawasan	884	Unit	4.365.220
					FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2060004	Sistem Informasi	7.229.589
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	285	Laporan	6.675.963
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	10428949	Orang	1.404.884.065
					RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	4322869	km2	185.011.422
2 Program	2)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							221.337.000
	RM	151.946.000	01	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	01	Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas			130.109.000
	PNBP	69.391.000	02	Terwujudnya implementasi pemanfaatan ruang yang terkendali dan tertib	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	59	Rekomendasi Kebijakan	18.617.000
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	3.400.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	359	Rekomendasi Kebijakan	108.092.000
		02	Kepatuhan Ruang			91.228.000
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	10	Rekomendasi Kebijakan	12.154.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	7.400.000
		BCE	Penanganan Perkara	482	Perkara	17.625.000
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	5	Produk	6.800.000
		BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	34	Pemerintah Daerah	6.300.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	100	Orang	1.799.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	12	Daerah (Prov/Kab/Kota)	12.300.000
		PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	6	Rekomendasi Kebijakan	9.150.000
		QCE	Penanganan Perkara	94	Perkara	8.500.000
		QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	8	Produk	9.200.000
3 Program 3) Program Dukungan Manajemen						4.473.047.753

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	3.538.225.814	01	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional	01	Tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional			4.462.265.566
PLN	119.956.158	02	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek pengendalian internal	AAA	Undang-Undang	1	UU	2.250.000
RMP				AAC	Peraturan Pemerintah	2	PP	2.350.000
PNBP	814.865.781			AAG	Peraturan Menteri	10	PerMen	4.600.000
				ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	22	Rekomendasi Kebijakan	3.086.484
				AEC	Kerja sama	23	Kesepakatan	8.506.510
				BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	7	Orang	2.503.625
				BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	8	Kelompok Masyarakat	200.000
				DBA	Pendidikan Tinggi	1413	Orang	7.500.001
				DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	28	model	6.129.656
				EAA	Layanan Perkantoran	665	Layanan	3.575.424.219
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1534	Layanan	64.637.085
				EAC	Layanan Umum	442	Layanan	39.316.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	773	unit	160.734.064
		EAE	Layanan Prasarana Internal	4	unit	3.122.120
		EAF	Layanan SDM	11103	orang	52.541.969
		EAG	Layanan Hukum	476	Layanan	17.681.911
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	512	Layanan	46.913.200
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	518	Layanan	95.085.082
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	535	Layanan	85.730.850
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	4	Laporan	1.133.020
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	626	Laporan	52.476.248
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	61	Orang	42.808.191
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	117.550
		TAC	Layanan Umum	1	Layanan	10.000.000
		TAD	Layanan Sarana Internal	51	unit	9.251.881
		TAE	Layanan Prasarana Internal	41	unit	90.356.500
		TAJ	Layanan Data dan Informasi	296966	Layanan	77.809.000
		02	Tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dari aspek pengendalian internal			10.782.187
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	52	Laporan	10.782.187

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA							1.295.859.713
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							444.938.453
	10	PENDIDIKAN							850.921.260
3 Program	1)	Program Perpustakaan dan Literasi							850.921.260
	2)	Program Dukungan Manajemen							444.938.453
1 Program	1)	Program Perpustakaan dan Literasi							850.921.260
	RM	850.090.618	01	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	01	Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan, Pelestarian dan Alih Media Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno			76.187.474
	PNBP	830.642	02	Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	5	Rekomendasi Kebijakan	278.718
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	16198	orang	2.745.809
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	401.832
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	8688475	Orang	8.238.562
					CAA	Sarana Bidang Pendidikan	5086	Paket	820.080
					EAC	Layanan Umum	2	Layanan	1.107.691
					EAD	Layanan Sarana Internal	67	unit	781.058
					EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	15.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	3302	Orang	18.982.500
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	797.532
		QEI	Bantuan Lembaga	1	Lembaga	1.236.000
		RAA	Sarana Bidang Pendidikan	71566	Paket	25.797.692
		02	Penyelenggaraan Peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional			32.062.060
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	1300	Orang	6.126.980
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11	NSPK	3.670.894
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	100	Orang	2.908.850
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	830	Orang	5.019.986
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1385	Orang	14.335.350
		03	Penyelenggaraan Peningkatan Koleksi Nasional, Deposit dan Bibliografi serta Pengolahan Bahan Perpustakaan yang Lengkap dan Mutakhir			182.199.988
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	6	Rekomendasi Kebijakan	1.746.660
		AEB	Forum	6	forum	199.256
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	925	orang	7.633.840
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	NSPK	685.998

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	84000	layanan	2.308.592
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	52209	Paket	12.150.746
		RAA	Sarana Bidang Pendidikan	901661	Paket	157.474.896
		04	Penyelenggaraan Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan Yang Terpadu			28.998.264
		AEG	Konferensi dan Event	1	Kegiatan	1.090.314
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	755.600
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	4	Sistem Informasi	17.077.928
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	500	Lembaga	10.074.422
		05	Penyelenggaraan Penyusunan Kebijakan dan Pengkajian Perpustakaan. Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi			47.103.000
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	13	Rekomendasi Kebijakan	12.321.282
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	20161	orang	34.781.718
		06	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pembinaan Semua Jenis Perpustakaan			484.370.474
		AEB	Forum	4	forum	708.074
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	1.611.976

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	708	Lembaga	22.776.088
					PDE	Akreditasi Lembaga	900	Lembaga	5.278.264
					QEI	Bantuan Lembaga	1669	Lembaga	453.996.072
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							444.938.453
	RM	443.749.899	01	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional Yang Baik dan Handal	01	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran UPT Perpustakaan Proklamator			14.536.387
	PNBP	1.188.554			EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	14.536.387
					02	Penyelenggaraan Layanan Perencanaan dan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel			265.162.818
					AEA	Koordinasi	4	kegiatan	6.491.876
					EAA	Layanan Perkantoran	15	Layanan	247.974.892
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	37	Layanan	1.457.900
					EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	2	Dokumen	3.406.170
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	44	Laporan	5.831.980
					03	Penyelenggaraan Layanan Hukum, Kemitraan, Tatalaksana Organisasi yang berkualitas			27.862.228
					AAH	Peraturan lainnya	14	peraturan	879.466
					AEC	Kerja sama	103	Kesepakatan	7.825.982

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEH	Promosi	10	promosi	3.166.512
		BMB	Komunikasi Publik	2	layanan	10.932.520
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	709.776
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	11	Layanan	4.347.972
		04	Penyelenggaraan Layanan Aparat Sipil Negara dan Ketatausahaan Perpustakaan Nasional yang Profesional			127.377.020
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	105.294.748
		EAC	Layanan Umum	7	Layanan	8.959.450
		EAD	Layanan Sarana Internal	57	unit	7.175.344
		EAF	Layanan SDM	2292	orang	4.862.994
		FAA	Kearsipan	1	Dokumen	1.084.484
		05	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern PERPUSNAS yang Andal, Efektif, dan Berintegritas			10.000.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	10.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						16.958.777.950
2 Fungsi	04	EKONOMI						16.830.740.495
	10	PENDIDIKAN						128.037.455
3 Program	1)	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)						3.626.797.048
	2)	Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika						530.955.304
	3)	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)						11.152.557.620
	4)	Program Komunikasi Publik						260.686.624
	5)	Program Dukungan Manajemen						1.387.781.354
1 Program	1)	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)						3.626.797.048
	RM	3.183.443.843	01	Meningkatnya kompetensi dan kemampuan SDM Nasional bidang TIK	01	Smart City		36.500.000
	PLN	1.000.000	02	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12 Lembaga	4.850.000
	RMP	416.699.000	03	Terwujudnya digitalisasi pemerintahan pusat dan daerah	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	83 Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.650.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
PNBP	25.654.205	04	Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital	UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	151	Daerah (Prov/Kab/Kota)	29.000.000
		05	Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital	02	SDM Talenta Digital			395.394.721
		06	Meningkatnya kualitas riset dan penelitian bidang TIK	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	5	Rekomendasi Kebijakan	2.634.808
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	680.510
				DBA	Pendidikan Tinggi	2379	Orang	35.629.061
				DCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	1485	Orang	12.539.849
				EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	33.996.087
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	152.435
				EAC	Layanan Umum	1	Layanan	20.000
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	77.160
				EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	898	Orang	17.046.561
				QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	170	Orang	40.361.597
				SCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	67164	Orang	252.256.653
				03	Keamanan Data dan Informasi			2.062.053.861
				AAG	Peraturan Menteri	3	PerMen	7.067.845

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	6	Lembaga	2.030.260
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	10.507.050
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	100	Lembaga	1.604.370
		BMB	Komunikasi Publik	322	layanan	21.000.000
		PAA	Undang-Undang	1	UU	1.804.536
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	150.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	12448750	Orang	1.174.000.000
		QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	150000	Produk	65.000.000
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	12	Lembaga	778.889.800
		04	Pusat Data Nasional			814.636.494
		AAG	Peraturan Menteri	2	PerMen	1.500.000
		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	500.000
		ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	897.760
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	10	Sistem Informasi	82.643.929
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		TAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	691.794.805
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	25	Sistem Informasi	35.000.000
		05 Ekosistem Ekonomi DIgital			299.000.000
		BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	1	Industri	5.000.000
		PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	5	Rekomendasi Kebijakan	63.000.000
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10000	UMKM	55.000.000
		QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	110	Start Up	176.000.000
		06 Riset dan Penelitian Bidang TIK			19.211.972
		ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	26	Rekomendasi Kebijakan	13.338.774
		ADE Akreditasi Lembaga	8	Lembaga	815.534
		DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	13	produk	3.557.664
		PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
2 Program 2) Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika					530.955.304
RM 1.700.000	01 Terwujudnya optimalisasi pemanfataan spektrum frekuensi radio	01 Layanan Publik Bidang Pos dan Informatika			266.177.414

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	PNBP	529.255.304	02	Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	7	Rekomendasi Kebijakan	4.924.749
			03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2245	layanan	169.014.543
			04	Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK	BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga	18.000.000
					QAH	Pelayanan Publik Lainnya	5	layanan	74.238.122
					02	Penataan Spektrum Frekuensi Radio			264.777.890
					ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	12.557.350
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	38.862.000
					PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	2	Rekomendasi Kebijakan	15.925.180
					QAH	Pelayanan Publik Lainnya	35	layanan	197.433.360
3 Program	3) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)								11.152.557.620
	RM	7.684.397.846	01	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah komersial	01	Pemerataan Jaringan Broadband			11.042.266.620
	PNBP	101.159.774	02	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	AAG	Peraturan Menteri	2	PerMen	1.400.000
	BLU	3.367.000.000	03	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pos	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	7	Rekomendasi Kebijakan	10.437.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	04 Terwujudnya pengembangan mobile high-speed broadband	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	Lembaga	750.000
	05 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah non komersial	EAC	Layanan Umum	11	Layanan	355.310.927
		PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	5	Rekomendasi Kebijakan	5.800.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	688	Orang	9.731.774
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	20	Kelompok Masyarakat	157.429.244
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	4	Badan usaha	52.460.000
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga	113.397.846
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	7389	Unit	10.332.799.829
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.750.000
		02	Migrasi TV Analog ke Digital			72.900.000
		PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	21	Rekomendasi Kebijakan	45.506.773
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	60	Unit	27.393.227
		03	Konektivitas 5G			13.820.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	2.900.000
					BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	5 Badan usaha	2.000.000
					PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	8.920.000
					04	Cakupan Layanan Pos		23.571.000
					ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	90 Rekomendasi Kebijakan	11.595.495
					BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	60 Badan usaha	1.950.000
					PBO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	10.025.505
4 Program	4)	Program Komunikasi Publik						260.686.624
	RM	260.686.624	01	Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	01	Akses dan Informasi Publik		240.686.624
			02	Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik	ACD	Perizinan Lembaga	1 Institusi	1.043.166
			03	Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	5.319.842
					BMB	Komunikasi Publik	1242 layanan	64.000.000
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	1 Laporan	6.347.558
					PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	34 Rekomendasi Kebijakan	5.022.871

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
				PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	3	Rekomendasi Kebijakan	12.268.280
				PDD	Standarisasi Lembaga	350	Lembaga	1.003.364
				PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1700	Orang	10.072.174
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	2.204.924
				QCB	Perkara Hukum Lembaga	92	Perkara	2.203.215
				QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	70	Lembaga	18.201.230
				QMB	Komunikasi Publik	45224	layanan	113.000.000
				02	Tata kelola informasi dan komunikasi publik			20.000.000
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	990.000
				PAG	Peraturan Menteri	1	PerMen	298.200
				PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	7	Rekomendasi Kebijakan	1.676.216
				QMB	Komunikasi Publik	33001	layanan	17.035.584
5 Program	5) Program Dukungan Manajemen							1.387.781.354
	RM	1.105.031.397	01	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	01	Tata kelola birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika		1.387.781.354
	PNBP	282.749.957			AEC	--	-- --	7.999.999
					BBB	--	-- --	1.736.742

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	146	Layanan	863.258.787
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	15	Layanan	97.801.721
		EAC	Layanan Umum	49	Layanan	141.495.821
		EAD	Layanan Sarana Internal	449	unit	22.963.486
		EAE	Layanan Prasarana Internal	3	unit	36.715.000
		EAF	Layanan SDM	1107	orang	50.489.061
		EAG	Layanan Hukum	8	Layanan	42.747.095
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6	Layanan	46.715.290
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	20.651.267
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	18.940.672
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	6	Laporan	12.105.582
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	9	Laporan	9.993.468
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	1	Laporan	14.167.363

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA							112.125.151.565
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							112.125.151.565
3 Program	1)	Program Profesionalisme SDM Polri							2.451.768.596
	2)	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							5.343.555.776
	3)	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri							38.213.234.542
	4)	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat							17.117.114.151
	5)	Program Dukungan Manajemen							48.999.478.500
1 Program	1)	Program Profesionalisme SDM Polri							2.451.768.596
	RM	2.390.121.638	01	Terpenuhinya SDM Polri yang mampu menjalankan tugasnya secara profesional	01	SDM Polri yang Kompeten			2.451.768.596
	PNBP	61.646.958			AEC	Kerja sama	201	Kesepakatan	27.823.249
					DBA	Pendidikan Tinggi	153	Orang	21.355.721
					DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	89458	Orang	1.026.116.087
					EAA	Layanan Perkantoran	488	Layanan	1.039.758.849
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	5.499.232
					EAC	Layanan Umum	336	Layanan	75.219.867
					EAF	Layanan SDM	174068	orang	186.163.886

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	226	Laporan	14.855.504
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	15621	Orang	54.976.201
2 Program	2)	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana							5.343.555.776
	RM	5.285.523.751	01	terciptanya keadilan penegakkan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi	01	layanan penegakkan hukum oleh Polri			5.343.555.776
	PNBP	58.032.025			BCA	Perkara Hukum Perseorangan	177247	Perkara	3.115.701.721
					BHB	Operasi Bidang Keamanan	1767	operasi	5.343.087
					BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	85767	Produk	91.865.596
					EAA	Layanan Perkantoran	570	Layanan	1.680.175.076
					EAC	Layanan Umum	917	Layanan	127.893.303
					EAG	Layanan Hukum	76214	Layanan	221.029.173
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	1804	Layanan	1.426.780
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	3960	Laporan	11.432.391
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	50	Laporan	25.000
					PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	10	Orang	148.500
					QCA	Perkara Hukum Perseorangan	545	Perkara	88.515.149
3 Program	3)	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri							38.213.234.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	RM	30.901.659.021	01	terselenggaranya operasional Polri yang optimal dalam pelaksanaan harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal	01	Almatsus dan Sarpras			38.213.234.542
	PLN	2.932.005.795			CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	66348	Unit	25.300.362.037
	RMP	735.000.000			CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	13237	unit	3.557.207.495
	PNBP	3.252.755.351			EAA	Layanan Perkantoran	29641	Layanan	7.395.199.867
	PDN	37.000.000			EAC	Layanan Umum	7039	Layanan	1.128.116.236
	BLU	155.404.375			EAD	Layanan Sarana Internal	10	unit	418.798
	PBS	199.410.000			RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	11	Unit	416.307.709
					RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	549	unit	415.622.400
4 Program	4) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat								17.117.114.151
	RM	11.942.283.794	01	Terjaganya ketertiban sosial dalam masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitasnya dalam kondisi bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan	01	layanan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat			17.117.114.151
	PNBP	5.174.830.357			ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	464916	Rekomendasi Kebijakan	1.210.060.035
					AEC	Kerja sama	160	Kesepakatan	12.691.388
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	126945	layanan	1.998.901.949
					BHB	Operasi Bidang Keamanan	2300540	operasi	3.247.817.838

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2145837	laporan	948.339.013
					EAA	Layanan Perkantoran	5237	Layanan	6.435.200.841
					EAC	Layanan Umum	34998	Layanan	3.257.346.211
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	343	Laporan	6.756.876
5 Program	5)	Program Dukungan Manajemen							48.999.478.500
	RM	47.026.249.443	01	terselenggaranya dukungan manajemen kepada internal Polri yang memenuhi standar pelayanan	01	layanan kepada internal Polri			48.999.478.500
	PNBP	137.884.406			AAH	Peraturan lainnya	6897	peraturan	14.954.034
	BLU	1.835.344.651			ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	494	Rekomendasi Kebijakan	19.610.553
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1607728	Orang	2.151.262.612
					BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	80	Produk	525.556
					DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	2	Purwarupa	2.220.409
					EAA	Layanan Perkantoran	4664	Layanan	45.738.586.440
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2552	Layanan	50.622.891
					EAC	Layanan Umum	20167	Layanan	753.935.515
					EAG	Layanan Hukum	2181	Layanan	20.465.879
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	74	Layanan	6.009.233

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4092	Layanan	106.766.918
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	259	Layanan	9.397.426
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	34261	Laporan	119.514.182
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13	Laporan	4.445.454
		QHB	Operasi Bidang Keamanan	1	operasi	1.161.398

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN							2.084.285.212
2 Fungsi	07	KESEHATAN							2.084.285.212
3 Program	1)	Program Pengawasan Obat dan Makanan							940.466.073
	2)	Program Dukungan Manajemen							1.143.819.139
1 Program	1)	Program Pengawasan Obat dan Makanan							940.466.073
	RM		856.572.161	01	Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	01	Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		940.466.073
	PNBP		83.893.912	02	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	302 Rekomendasi Kebijakan	7.710.496
				03	Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu	ADD	Standarisasi Lembaga	48 Lembaga	70.167.885
				04	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	AEA	Koordinasi	137 kegiatan	5.917.124
						AEE	Kemitraan	8 Kesepakatan	1.234.258
						AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	229 NSPK	67.800.313
						BAH	Pelayanan Publik Lainnya	83326 layanan	24.446.980
						BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	97200 Orang	65.495.874
						BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	31 Kelompok Masyarakat	1.167.482
						BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	87 UMKM	5.772.860

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	17697	Produk	30.415.994
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	810	Lembaga	2.472.692
		BKB	Pemantauan produk	104	laporan	76.234.590
		BMB	Komunikasi Publik	1839	layanan	6.001.250
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	457	Paket	275.667.690
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	85	produk	1.655.460
		EAD	Layanan Sarana Internal	225	unit	3.077.550
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25	Layanan	2.692.760
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	25	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.676.240
		PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	7	Rekomendasi Kebijakan	15.150.000
		PCA	Perizinan Produk	106640	Produk	26.200.772
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	16630	layanan	2.154.546
		QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	306	Perkara	37.723.942
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1926	Lembaga	63.209.527
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	72	UMKM	4.976.830
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	91	Industri	5.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	146048	Produk	53.171.780
					QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	39244	Lembaga	67.067.650
					QKB	Pemantauan produk	3	laporan	2.442.528
					TAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	2.000.000
					UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	410	Daerah (Prov/Kab/Kota)	10.761.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							1.143.819.139
	RM	1.135.022.838	01	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	01	Dukungan Manajemen BPOM yang berkualitas			1.143.819.139
	PNBP	8.796.301	02	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik di lingkup Sektama	AAH	Peraturan lainnya	220	peraturan	3.377.500
			03	Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	AEC	Kerja sama	84	Kesepakatan	5.396.672
			04	Terwujudnya Organisasi BPOM yang efektif	BMB	Komunikasi Publik	1	layanan	4.771.207
			05	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel	EAA	Layanan Perkantoran	54	Layanan	922.623.920
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6	Layanan	10.503.389
					EAC	Layanan Umum	2	Layanan	7.222.386
					EAD	Layanan Sarana Internal	176	unit	73.283.885
					EAF	Layanan SDM	4609	orang	9.692.970

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAG	Layanan Hukum	320	Layanan	1.838.090
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	9	Layanan	6.679.529
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	249	Layanan	14.109.906
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	44	Laporan	11.260.482
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	9	Laporan	9.445.293
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	3560	Orang	20.973.910
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	820	Orang	16.640.000
		PEE	Kemitraan	2	Kesepakatan	1.000.000
		TAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	25.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL							182.375.470
2 Fungsi	02	PERTAHANAN							182.375.470
3 Program	1)	Program Pembinaan Ketahanan Nasional							40.540.853
	2)	Program Dukungan Manajemen							141.834.617
1 Program	1)	Program Pembinaan Ketahanan Nasional							40.540.853
	RM		40.540.853	01	Meningkatnya kader pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan professional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal.	01	Kader pimpinan tingkat nasional yang yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memp		27.372.855
				02	Meningkatnya agen perubahan dan komponen bangsa yang melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.	DBE	Pendidikan Non Gelar	420 Orang	23.045.897
				03	Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI	DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	140 Orang	4.326.958
				04	Meningkatnya Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang terintegratif.	02	Agen perubahan dan komponen bangsa yang melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.		5.195.352

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					AEA	Koordinasi	15	kegiatan	773.115
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1600	Orang	4.422.237
					03	Kualitas Kajian Strategis yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap			5.374.968
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6	Rekomendasi Kebijakan	765.000
					ABC	Kebijakan Bidang Politik	7	Rekomendasi Kebijakan	780.000
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	6	Rekomendasi Kebijakan	765.000
					ABN	Kebijakan Bidang Sosial	6	Rekomendasi Kebijakan	765.000
					AEA	Koordinasi	57	kegiatan	2.299.968
					04	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung Sistem Keamanan Nasional yang terintegratif.			2.597.678
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	44	Rekomendasi Kebijakan	2.597.678
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							141.834.617
	RM	141.834.617	01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Hubungan Masyarakat	01	Kualitas Pelayanan Bidang Hubungan Masyarakat			2.277.309

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	02 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kerjasama dan Hukum	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	173.605
	03 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	2.103.704
	04 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Sistem Informatika	02	Kualitas Pelayanan Bidang Kerjasama dan Hukum			2.332.456
	05 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas	AEC	Kerja sama	60	Kesepakatan	1.225.713
	06 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan	EAF	Layanan SDM	23	orang	743.500
		EAG	Layanan Hukum	32	Layanan	363.243
		03	Kualitas Pelayanan Bidang Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana			2.700.845
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	1.108.931
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	342.177
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	30	Laporan	858.388
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	22	Laporan	391.349
		04	Kualitas Pelayanan Bidang Sistem Informatika			5.734.046
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	5.734.046
		05	Kualitas Pelayanan Bidang Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas			127.039.961
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	122.514.048

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	1.452.644
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	398.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	710.045
		EAF	Layanan SDM	1	orang	1.457.639
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	17	Laporan	507.585
		06	Kualitas Pengawasan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan			1.750.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	56	Laporan	1.750.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL							1.089.500.127
2 Fungsi	04	EKONOMI							1.089.500.127
3 Program	1)	Program Penanaman Modal							772.207.744
	2)	Program Dukungan Manajemen							317.292.383
1 Program	1)	Program Penanaman Modal							772.207.744
	RM		772.207.744	01	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	01	Perencanaan penanaman modal yang implementatif		131.775.000
				02	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12 Rekomendasi Kebijakan	4.250.000
				03	Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal	AEG	Konferensi dan Event	1 Kegiatan	500.000
				04	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	61 Rekomendasi Kebijakan	120.925.000
				05	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	PEG	Konferensi dan Event	4 Kegiatan	1.000.000
				06	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	52 Badan usaha	5.100.000
						02	Iklim penanaman modal yang kondusif		52.292.967
						BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	1 UMKM	1.000.000
						BMA	Data dan Informasi Publik	2 layanan	2.352.967
						FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	19	Rekomendasi Kebijakan	35.240.000
		PEA	Koordinasi	1	kegiatan	5.000.000
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	9	UMKM	1.700.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	10	Badan usaha	5.000.000
		03	Kerjasama penanaman modal			27.654.890
		AEA	Koordinasi	3	kegiatan	874.890
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	18	Lembaga	480.000
		BKC	Pemantauan lembaga	18	laporan	480.000
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	27	Rekomendasi Kebijakan	4.661.024
		PEB	Forum	2	forum	127.368
		PEC	Kerja sama	4	Kesepakatan	500.000
		PEG	Konferensi dan Event	2	Kegiatan	258.976
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	570	Lembaga	20.000.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1	Badan usaha	172.632
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	100.000
		04	Promosi penanaman modal yang terfokus dan terintegrasi			265.512.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	626.862
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	78.998
		AEH	Promosi	50	promosi	2.500.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	5	layanan	2.500.000
		BMB	Komunikasi Publik	3	layanan	31.000.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	8	Laporan	921.002
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
		PEG	Konferensi dan Event	2	Kegiatan	8.440.684
		PEH	Promosi	2014	promosi	104.151.725
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	40	Badan usaha	111.000.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.292.729
		05	Pelayanan penanaman modal yang prima			179.963.724
		BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	92300	Badan usaha	16.663.724
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	500.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	11	Sistem Informasi	154.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	4.000.000
					UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.300.000
					06	Pengendalian pelaksanaan dan fasilitasi penanaman modal			115.009.163
					AEA	Koordinasi	6	kegiatan	1.135.676
					BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	349	Badan usaha	8.822.032
					BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	90	Unit	683.625
					BEI	Bantuan Lembaga	33	Lembaga	15.000.000
					BMA	Data dan Informasi Publik	4	layanan	8.665.767
					PEB	Forum	2	forum	152.240
					PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	450	orang	969.033
					PEG	Konferensi dan Event	20	Kegiatan	2.131.780
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	39	Lembaga	897.288
					QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	267	Badan usaha	76.551.722
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							317.292.383
	RM	317.292.383	01	Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas	01	Layanan Manajemen Organisasi			317.292.383

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	02 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	800	Orang	3.500.000
	03 Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel	EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	220.853.212
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	3.216.403
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	3.383.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	35	unit	525.000
		EAF	Layanan SDM	659	orang	1.350.000
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	3.500.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	600.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	29.000.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.564.768
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	2.500.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	9	Laporan	1.300.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	400	Orang	6.500.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	1.100.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	38.400.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)							1.689.992.511
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							1.689.992.511
3 Program	1)	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)							559.307.654
	2)	Program Dukungan Manajemen							1.130.684.857
1 Program	1)	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)							559.307.654
	RM	559.307.654	01	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	01	Pencegahan Penyalahgunaan narkoba			113.293.573
			02	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	Rekomendasi Kebijakan	2.509.709
			03	Meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan	ADD	Standarisasi Lembaga	2	Lembaga	3.860.692
			04	Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	1039	Keluarga	8.637.768
			05	Meningkatnya produk dan layanan hukum serta kerjasama nasional dan internasional bidang P4GN	BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	20000	Produk	5.710.000
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	2	produk	554.586

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	5	Rekomendasi Kebijakan	13.687.125
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	34	Lembaga	10.040.605
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1730	Orang	26.285.000
		RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	unit	35.000.000
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	346	Desa	7.008.088
		02	Pemberdayaan masyarakat anti narkoba			72.745.541
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	47	Kelompok Masyarakat	8.810.244
		PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	Rekomendasi Kebijakan	7.714.918
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	828	Lembaga	52.220.379
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4	Kelompok Masyarakat	4.000.000
		03	Rehabilitasi pecandu dan penyalah guna narkoba			91.430.345
		ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	36	Rekomendasi Kebijakan	8.398.212
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	1130	Orang	2.956.614
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	900	Orang	10.241.038

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1810	Orang	25.122.734
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	709	Lembaga	26.462.976
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	231	Kelompok Masyarakat	10.019.477
		PDD	Standarisasi Lembaga	20	Lembaga	3.300.000
		PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	225	Orang	3.129.294
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	45	Kelompok Masyarakat	1.800.000
		04	Pemberantasan peredaran gelap narkoba			270.247.944
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	729	Perkara	92.591.117
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	28	operasi	64.557.863
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	89	Produk	4.645.131
		BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1614	Orang	14.091.763
		BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	209	laporan	65.210.366
		BKC	Pemantauan lembaga	30	laporan	416.060
		PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	3	Rekomendasi Kebijakan	13.000.000
		QHB	Operasi Bidang Keamanan	15	operasi	6.500.000
		RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	7	unit	9.235.644

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					05	Produk layanan hukum dan kerjasama bidang P4GN		11.590.251
					AAA	Undang-Undang	1 UU	251.252
					AAH	Peraturan lainnya	6 peraturan	1.188.340
					AEA	Koordinasi	15 kegiatan	1.262.144
					AEB	Forum	9 forum	2.849.161
					AEC	Kerja sama	6 Kesepakatan	1.732.572
					AED	Perjanjian	20 perjanjian	1.746.057
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	200 orang	659.558
					BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	300 Orang	563.461
					BBB	Layanan Bantuan Hukum Lembaga	6 Institusi	1.159.060
					BBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	12 Kelompok Masyarakat	77.796
					BMA	Data dan Informasi Publik	7 layanan	100.850
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						1.130.684.857
	RM	1.130.684.857	01	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional	01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN		1.130.684.857
			02	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	EAA	Layanan Perkantoran	435 Layanan	893.911.627

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	208	Layanan	13.835.129
		EAC Layanan Umum	481	Layanan	75.800.198
		EAD Layanan Sarana Internal	460	unit	9.603.496
		EAE Layanan Prasarana Internal	14	unit	3.982.300
		EAF Layanan SDM	5649	orang	19.817.835
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	4.550.001
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	209	Layanan	15.858.117
		EAJ Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	63.191.688
		EAK Layanan Pengawasan Internal	6	Laporan	12.438.659
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	208	Laporan	6.064.342
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	542	Orang	11.631.465

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI						3.689.809.142
2 Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM						3.398.575.571
	10	PENDIDIKAN						291.233.571
3 Program	1)	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi						2.915.732.318
	2)	Program Dukungan Manajemen						774.076.824
1 Program	1)	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi						2.915.732.318
	RM	2.707.372.318	01	Terpenuhinya indeks desa yang berkembang dan mandiri	01	Desa Tertinggal dan Desa Berkembang yang difasilitasi/dibangun/dikembangkan		2.084.123.800
	PLN	195.000.000	02	Terpenuhinya indeks pembangunan 62 kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN)	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
	RMP		06	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan kawasan perdesaan Prioritas Nasional	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
	HLN	13.360.000	07	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan kawasan perdesaan Prioritas Kementerian	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	600 Orang	2.500.000
			08	Meningkatnya status Bumdes	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	70598 Orang	1.751.763.800
			09	Meningkatnya status Bumdes Bersama	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1420 Kelompok Masyarakat	83.360.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	10	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan	QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	50	Kelompok Masyarakat	13.500.000
	11	Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi	QEI	Bantuan Lembaga	500	Lembaga	31.500.000
	13	Meningkatnya daerah tertinggal yang potensi terentaskan sesuai dengan indeks ketertinggalan	RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	97	unit	81.000.000
	14	Terbangunnya komitmen lintas K/L/D/M dalam Pembangunan Daerah Tertinggal	UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	84181	Desa	115.000.000
	15	Meningkatnya rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi	02	Kawasan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan (RA-PKP)			52.230.600
	16	Meningkatnya rata-rata nilai indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	11	Rekomendasi Kebijakan	2.207.550
	17	Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, inovasi, serta data dan informasi	AEA	Koordinasi	1	kegiatan	457.350
	18	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Perdesaan yang berintegritas dan berkompeten	AEC	Kerja sama	3	Kesepakatan	663.793
			PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	66	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
			PEA	Koordinasi	2	kegiatan	645.118
			QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	63	Orang	8.636.207

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	66	Badan usaha	14.200.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8	Unit	6.603.462
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	3	Unit	4.924.182
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	4	unit	4.332.938
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	2	km2	5.560.000
		03	Peningkatan ketahanan masyarakat dan pemerintah daerah didaerah rawan pangan, rawan bencana dan daerah pasca konflik			20.172.400
		AEC	Kerja sama	3	Kesepakatan	4.700.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	150	Orang	1.272.400
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	70	Kelompok Masyarakat	2.600.000
		BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	8	Unit	700.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	720	Orang	6.500.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	8	Unit	4.400.000
		04	Sarana Prasana Dan Konektivitas Dalam Mendukung Produk Unggulan Di Daerah Perbatasan Dan Pulau Kecil Dan Terluar			26.327.600
		AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	3.000.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	470	Orang	4.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	21	Unit	19.327.600
		05	Daerah Tertinggal Yang Dientaskan			76.319.508
		AEC	Kerja sama	8	Kesepakatan	11.832.707
		AEE	Kemitraan	1	Kesepakatan	2.000.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100	Orang	1.000.000
		BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10	UMKM	1.000.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	889.310
		PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4	Rekomendasi Kebijakan	3.110.690
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6305	Orang	31.649.166
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	34	Unit	24.837.635
		06	Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun di Kawasan Transmigrasi			266.305.508
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2	Rekomendasi Kebijakan	3.291.124
		AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	632.383
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	669.425
		BDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	1268	Keluarga	29.035.872

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	52	Laporan	1.149.184
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.525.381
		PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	15	Rekomendasi Kebijakan	11.495.307
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	739.937
		QMA	Data dan Informasi Publik	10	layanan	909.219
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	1425	Unit	124.040.015
		RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	769	km	37.407.680
		RBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	309	m	18.780.903
		RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	30555	unit	18.128.134
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	11	km2	11.061.914
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	39	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.439.030
		07	Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan sesuai dengan tahap pengembangannya			259.487.275
		AEC	Kerja sama	6	Kesepakatan	1.191.090

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEE	Kemitraan	19	Kesepakatan	1.749.436
		AEH	Promosi	13	promosi	5.856.474
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	1.834.333
		BCC	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	162	Perkara	1.865.442
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	32	Lembaga	4.626.370
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	61765	Orang	40.290.581
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5	Laporan	3.458.712
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15	Lembaga	3.773.728
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	22695	Orang	8.950.455
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	30	Kelompok Masyarakat	5.030.000
		QEB	Bantuan Keluarga	3197	Keluarga	10.259.002
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	72	Unit	43.796.612
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	77	Unit	27.417.493
		RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	86	km	51.536.533
		RBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	540	m	33.487.126
		RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	158	unit	14.363.888
		08	Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mendapat pelatihan			66.765.627

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	11155	Orang	66.765.627
					09	Modul/Pedoman penyelenggaraan pelatihan masyarakat			44.000.000
					ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	2000	Orang	34.000.000
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	30000	Orang	10.000.000
					10	Tersedianya dokumen kebijakan, inovasi, serta data dan informasi			20.000.000
					PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1	Rekomendasi Kebijakan	20.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							774.076.824
	RM	769.076.824	01	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perdesaan dan inovasi	01	Produk Hukum Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi			7.000.000
	PLN	5.000.000	02	Meningkatnya SDM Aparatur dan SDM Perdesaan yang berintegritas dan berkompeten	AED	Perjanjian	1	perjanjian	700.000
	RMP		03	Meningkatnya pengawasan, pengendalian mutu dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	3.350.000
			04	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	2.950.000
			06	Meningkatnya citra positif Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	02	Dokumen Kerjasama			21.000.000
			07	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Kementerian	AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	3.750.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	08 Meningkatnya kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	BMB	Komunikasi Publik	2	layanan	14.000.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	3.250.000
		03	Dokumen Perencanaan			500.753.681
		AEA	Koordinasi	1	kegiatan	5.000.000
		EAA	Layanan Perkantoran	72	Layanan	314.299.755
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	8	Layanan	44.059.018
		EAD	Layanan Sarana Internal	476	unit	10.761.295
		EAE	Layanan Prasarana Internal	177	unit	2.661.500
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	109	Layanan	121.050.173
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	9	Laporan	2.921.940
		04	SDM yang kompeten			113.693.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	87.930.000
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	9.013.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	15	unit	1.300.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	200.000
		EAF	Layanan SDM	200	orang	14.000.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	1.250.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		05	Layanan Keuangan dan BMN		51.807.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	45.674.852
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 Layanan	3.321.666
		EAC	Layanan Umum	1 Layanan	2.810.482
		06	Hasil Pengawasan Internal yang Efektif di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi		50.000.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	25.042.600
		EAE	Layanan Prasarana Internal	92 unit	611.770
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	9.145.630
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	182 Laporan	15.200.000
		08	Rekomendasi Hasil Kajian dan Terapan Teknik Produksi		6.014.869
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan	791.776
		EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	4.683.223
		EAC	Layanan Umum	1 Layanan	539.870
		09	Pegawai ASN yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		23.808.274
		EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	10.247.477
		EAC	Layanan Umum	1 Layanan	1.119.085

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	25	unit	116.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	1.330.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	750	Orang	10.995.712

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)						3.450.072.040
2 Fungsi	07	KESEHATAN						3.450.072.040
3 Program	1)	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana						1.102.325.232
	2)	Program Dukungan Manajemen						2.347.746.808
1 Program	1)	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana						1.102.325.232
	RM	1.102.325.232	01	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	01	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		1.102.325.232
					ABN	Kebijakan Bidang Sosial	48 Rekomendasi Kebijakan	6.754.081
					ADE	Akreditasi Lembaga	5 Lembaga	2.439.117
					AEA	Koordinasi	1 kegiatan	5.000.000
					AEC	Kerja sama	3 Kesepakatan	859.886
					AEH	Promosi	13 promosi	20.150.000
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	41 NSPK	6.840.541

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7773	Lembaga	7.971.180
		BMA	Data dan Informasi Publik	34	layanan	569.392.678
		DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	16427	Orang	26.117.927
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	33.346.125
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	30	Laporan	7.856.814
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	821	Daerah (Prov/Kab/Kota)	26.266.472
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	521.540
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	40862	Kelompok Masyarakat	74.336.078
		QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	4122784	Keluarga	25.577.000
		QEI	Bantuan Lembaga	12246	Lembaga	260.966.364
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	2.561.479
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	389	Daerah (Prov/Kab/Kota)	25.367.950
2 Program 2) Program Dukungan Manajemen						2.347.746.808

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	2.347.746.808	01	Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan BKKBN dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	01	Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan BKKBN dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			2.347.746.808
				EAA	Layanan Perkantoran	33	Layanan	2.266.469.845
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	3.102.000
				EAC	Layanan Umum	1	Layanan	991.000
				EAD	Layanan Sarana Internal	277	unit	18.660.795
				EAE	Layanan Prasarana Internal	8	unit	22.639.205
				EAF	Layanan SDM	3706	orang	1.641.996
				EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	927.937
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34	Layanan	12.515.920
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	950.000
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	74	Laporan	14.473.030
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	3.300.000
				FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	4	Laporan	2.075.080

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA							100.231.120
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							100.231.120
3 Program	1)	Program Pemajuan dan Penegakan HAM							25.384.181
	2)	Program Dukungan Manajemen							74.846.939
1 Program	1)	Program Pemajuan dan Penegakan HAM							25.384.181
	RM		25.384.181	01	Meningkatnya K/L/D yang memahami Standar Norma HAM	01	Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran HAM Penyelenggara Negara dan Masyarakat		5.003.627
				02	Meningkatnya hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
				03	Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	20840 orang	1.603.627
				04	Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4 NSPK	2.400.000
				05	Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Penanggulangan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	02	Rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran ham		9.566.738
						BCC	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	4325 Perkara	5.323.010
						BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	4 laporan	893.728
						PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	450 Rekomendasi Kebijakan	2.100.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1 laporan	500.000
					UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	750.000
					03	Perangkat standar, norma, dan kerjasama dalam penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan KtP, pemulihan korban dan mekanisme khusus HAM perempuan		10.813.816
					ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	7 Rekomendasi Kebijakan	4.913.816
					PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	18 Rekomendasi Kebijakan	5.900.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						74.846.939
	RM	74.846.939	01	Meningkatnya kerjasama strategis nasional dan internasional	01	Layanan Dukungan Manajemen		74.846.939
			02	Terwujudnya manajemen organisasi Komnas HAM yang transparan dan akuntabel	EAA	Layanan Perkantoran	4 Layanan	64.094.824
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	821.480
					EAC	Layanan Umum	2 Layanan	1.530.000
					EAD	Layanan Sarana Internal	32 unit	787.767
					EAE	Layanan Prasarana Internal	3 unit	1.200.000
					EAF	Layanan SDM	391 orang	1.428.447

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	270.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	600.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	1.870.271
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	21	Laporan	596.112
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	798.038
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja internal	1	Dokumen	850.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA							3.274.241.507
2 Fungsi	04	EKONOMI							3.274.241.507
3 Program	1)	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika							2.913.341.181
	2)	Program Dukungan Manajemen							360.900.326
1 Program	1)	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika							2.913.341.181
	RM	2.193.686.307	01	Meningkatnya Layanan Informasi Meteorologi yang Berkualitas	01	Layanan Informasi Meteorologi yang berkualitas			1.127.502.456
	PLN	624.337.500	02	Meningkatnya Layanan Informasi Klimatologi yang Berkualitas	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	269	layanan	341.122.312
	RMP		03	Meningkatnya Layanan informasi Geofisika yang Berkualitas	EAA	Layanan Perkantoran	124	Layanan	362.055.144
	PNBP	95.317.374	04	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Peralatan Operasional Utama MKG Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrasi	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	26	layanan	319.250.000
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3800	Orang	4.750.000
					RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	5	Unit	100.325.000
					02	Layanan Informasi Klimatologi yang Berkualitas			260.306.902
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	70	layanan	72.419.371
					EAA	Layanan Perkantoran	30	Layanan	114.978.986
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2200	Orang	5.960.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40	Unit	66.948.545
					03	Layanan Informasi Geofisika yang berkualitas			751.190.106
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	47	layanan	88.453.201
					EAA	Layanan Perkantoran	31	Layanan	109.905.005
					PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3900	orang	4.650.000
					QAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	269.581.900
					QMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	1.600.000
					RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	118	Unit	277.000.000
					04	Teknologi Informasi dan Komunikasi MKG Yang Terintegrasi			774.341.717
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5	layanan	123.371.748
					BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	20.035.445
					EAA	Layanan Perkantoran	5	Layanan	82.686.747
					PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi Kebijakan	159.537.500
					QMA	Data dan Informasi Publik	93	layanan	163.214.200
					RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1863	unit	225.496.077
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							360.900.326
	RM	339.200.326	01	Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik	01	Tata Kelola Yang Baik			360.900.326

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
PNBP	21.700.000		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	1.550.000
			AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	2.255.000
			DAE	Pendidikan Vokasi Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	1200	Orang	23.009.082
			DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	4	produk	12.200.000
			EAA	Layanan Perkantoran	5	Layanan	186.426.451
			EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	12.050.000
			EAC	Layanan Umum	2	Layanan	34.828.483
			EAD	Layanan Sarana Internal	12	unit	3.614.200
			EAE	Layanan Prasarana Internal	15	unit	15.989.376
			EAF	Layanan SDM	4800	orang	4.813.471
			EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	2.735.000
			EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	2.900.000
			EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	3.060.000
			EAK	Layanan Pengawasan Internal	12	Laporan	6.200.000
			EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	3.750.000
			EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2200	Orang	23.000.000
			EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	22.519.263

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM							2.048.554.992
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							2.048.554.992
3 Program	1)	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							69.075.064
	2)	Program Dukungan Manajemen							1.979.479.928
1 Program	1)	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							69.075.064
	RM	69.075.064	01	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	06	Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan			69.075.064
			02	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	AAH	Peraturan lainnya	35	peraturan	6.150.000
					ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1	Rekomendasi Kebijakan	463.400
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	549	orang	4.152.906
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	549	NSPK	2.147.847
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	844	Orang	10.187.135
					BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1	Lembaga	4.760.598
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1133	layanan	11.135.322

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BCB	Perkara Hukum Lembaga	1	Perkara	5.125.000
					BMA	Data dan Informasi Publik	1098	layanan	6.809.875
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	583	Layanan	5.617.387
					EAE	Layanan Prasarana Internal	39	unit	779.171
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	891	Laporan	11.746.423
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							1.979.479.928
	RM	1.979.479.928	01	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya	01	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabi			1.979.479.928
			02	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.057.066
			03	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	432.932
			04	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	AEC	Kerja sama	1	Kesepakatan	2.500.000
			05	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	2	Lembaga	1.984.737
					BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	76	Lembaga	1.157.476
					BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	270	Pemerintah Daerah	2.452.612

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BKC	Pemantauan lembaga	1	laporan	397.478
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	5	produk	1.500.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1098	Layanan	1.736.679.928
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	650.000
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	11.053.004
		EAD	Layanan Sarana Internal	1097	unit	6.145.200
		EAE	Layanan Prasarana Internal	549	unit	50.000.000
		EAF	Layanan SDM	270	orang	3.310.595
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	172.329
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	35	Layanan	6.350.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	2.335.963
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	550	Layanan	25.320.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	595	Laporan	11.965.075
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1647	Laporan	37.932.466
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	583	Orang	2.776.584
		FAA	Kearsipan	71	Dokumen	15.117.569
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	2.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	552	Orang	13.427.671
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	549	Layanan	40.000.069
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	864.029
		FAF	Pemeriksaan Keuangan	22	Laporan	1.347.997
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	8	Laporan	49.148

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI								266.765.223
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								266.765.223
3 Program	1)	Program Penanganan Perkara Konstitusi								106.176.903
	2)	Program Dukungan Manajemen								160.588.320
1 Program	1)	Program Penanganan Perkara Konstitusi								106.176.903
	RM		106.176.903	01	Terselenggaranya penanganan perkara Konstitusi yang bermutu	01	Putusan Mahkamah Konstitusi			98.212.703
				02	Terselenggaranya Pendidikan Hak Konstitusional dan Hukum Acara MK	AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	1.500.000
				03	Tersedianya akses data dan informasi perkara dan putusan MK bagi masyarakat	BCE	Penanganan Perkara	159	Perkara	95.612.703
						BKB	Pemantauan produk	1	laporan	300.000
						QKB	Pemantauan produk	2	laporan	800.000
						02	Peserta yang Paham dan Sadar Konstitusi			2.284.200
						BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	400	Orang	784.200
						QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300	Orang	1.500.000
						03	Informasi Perkara dan Putusan MK			5.680.000
						BMA	Data dan Informasi Publik	3	layanan	5.680.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen								160.588.320

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	160.588.320	01	Terselenggaranya Hubungan Kerjasama Internasional yang efektif	01	Terlaksananya Kerjasama Luar Negeri			2.736.670
		02	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya	AEG	Konferensi dan Event	5	Kegiatan	2.736.670
		03	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Berkualitas	02	Terlaksananya Layanan Perencanaan dan Keuangan			66.760.000
		04	Terselenggaranya Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	66.000.000
		05	Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	650.000
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	42	Laporan	110.000
				03	Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal			580.000
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	3	Laporan	80.000
				TAK	Layanan Pengawasan Internal	3	Laporan	500.000
				04	Terlaksananya Layanan Rumah Tangga dan Perlengkapan			83.631.650
				EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	75.671.650
				EAC	Layanan Umum	2	Layanan	160.000
				EAD	Layanan Sarana Internal	9	unit	6.300.000
				EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.500.000
				05	Terlaksananya Layanan SDM dan Ortala			6.880.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	30	orang	6.600.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	280.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)						224.608.345
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						224.608.345
3 Program	1)	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme						50.135.461
	2)	Program Dukungan Manajemen						174.472.884
1 Program	1)	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme						50.135.461
	RM	50.135.461	01	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	01	Rekomendasi PPATK yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan		8.000.000
			02	Penguatan Regulasi Serta Meningkatnya Efektivitas Layanan Hukum dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	23 Rekomendasi Kebijakan	5.600.000
			03	Meningkatnya Peran Pihak Pelapor dalam Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	BCE	Penanganan Perkara	24 Perkara	2.400.000
			04	Meningkatnya Kemanfaatan Produk Intelijen Keuangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.	02	Penguatan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme		1.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	05 Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	AAH	Peraturan lainnya	16	peraturan	246.219
	06 Meningkatnya Kapabilitas Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	12	Rekomendasi Kebijakan	465.683
	07 Meningkatnya kualitas sistem teknologi informasi PPATK.	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	125	orang	105.380
		BCE	Penanganan Perkara	123	Perkara	382.718
		03	Kepatuhan Pihak Pelapor			2.550.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	350	Lembaga	900.543
		BKC	Pemantauan lembaga	168	laporan	1.649.457
		04	Laporan Hasil Analisis			900.000
		BCE	Penanganan Perkara	905	Perkara	900.000
		05	Hasil kerjasama nasional dan internasional			5.630.500
		AEA	Koordinasi	89	kegiatan	598.768
		AEC	Kerja sama	13	Kesepakatan	3.401.232
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1200	orang	1.497.340
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	133.160
		06	Tingkat Kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat			2.750.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	835	Orang	2.750.000
					07	Tata Kelola Teknologi Informasi			29.104.961
					BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	29.104.961
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							174.472.884
	RM	174.472.884	01	Meningkatnya Kapabilitas Organisasi PPATK	01	Peningkatan kapabilitas organisasi PPATK			174.472.884
			02	Meningkatnya peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja PPATK.	EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	155.394.374
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	130.111
					EAC	Layanan Umum	4	Layanan	1.122.773
					EAD	Layanan Sarana Internal	50	unit	2.045.065
					EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	9.372.374
					EAF	Layanan SDM	444	orang	1.071.000
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	442.000
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	43	Laporan	250.000
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	360	Orang	4.375.000
					EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	14	Dokumen	270.187

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)							1.839.997.472
2 Fungsi	04	EKONOMI							1.839.997.472
3 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							982.670.592
	2)	Program Dukungan Manajemen							857.326.880
1 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							982.670.592
	RM	156.320.000	01	Implementasi riset dan inovasi ilmu pengetahuan yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan	01	Hasil Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Teknik			34.420.000
	PLN	109.750.592	02	Implementasi kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan	SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	15	Purwarupa	34.420.000
	RMP		03	Implementasi teknologi dan model sosial untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan kerentanan iklim	02	Hasil Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Hayati			41.160.000
	PNBP	57.600.000	04	Penguatan dan Peningkatan sumber daya riset dan inovasi yang unggul dan kompetitif	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	4.800.000
	PBS	659.000.000			REB	Konservasi Jenis/Spesies	40	Jenis	2.200.000
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	38	produk	14.650.000
					SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	20	Purwarupa	19.510.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		03	Hasil Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora			22.000.000
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	17	produk	22.000.000
		04	Hasil Riset Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan			18.420.000
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
		SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	18	Purwarupa	16.420.000
		05	Hasil Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Kebumian			106.540.000
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	5	produk	98.000.000
		SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	5	Purwarupa	7.540.000
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	1	model	1.000.000
		06	Hasil Layanan Pemanfaatan dan Inovasi Iptek			719.000.592
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	30	layanan	41.250.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4000	Orang	2.000.000
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10	UMKM	2.000.000
		QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	50	Start Up	2.000.000
		RAO	Sarana Bidang IPTEK	8	Unit	670.750.592
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	20	produk	1.000.000
		07	Hasil Layanan Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan			37.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					DCN	Pelatihan Bidang IPTEK	5000	Orang	10.600.000
					QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	220	Orang	26.400.000
					08	Hasil Layanan Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah			1.930.000
					QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	1.930.000
					09	Hasil Layanan Pengembangan Multimedia dan Penerbitan Ilmiah			2.200.000
					QMA	Data dan Informasi Publik	4	layanan	2.200.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							857.326.880
	RM	857.326.880	01	Implementasi Reformasi Birokrasi LIPI sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	00	Hasil Layanan tata kelola LIPI yang efektif, efisien dan akuntabel			857.326.880
					EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	847.307.146
					EAD	Layanan Sarana Internal	2	unit	8.519.734
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.000.000
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	18	Laporan	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)						815.793.207
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						782.993.207
	10	PENDIDIKAN						32.800.000
3 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						176.156.818
	2)	Program Dukungan Manajemen						639.636.389
1 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						176.156.818
	RM	29.788.023	01	Meningkatnya kontribusi hasil litbangjirap iptek nuklir dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa	01	Produk Inovasi Litbangjirap Iptek Nuklir		149.649.416
	PNBP	22.261.795	02	Meningkatnya penerimaan masyarakat dan pertumbuhan ekosistem inovasi berbasis iptek nuklir	ABU	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir	10 Rekomendasi Kebijakan	1.357.268
	PBS	124.107.000	03	Meningkatnya jaminan keamanan, keselamatan dan mutu produk litbangjirap iptek nuklir	CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1 unit	124.107.000
					DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	118 produk	898.317
					DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	8 Purwarupa	224.602
					PBU	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir	25 Rekomendasi Kebijakan	12.363.753
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	8 produk	2.337.876
					SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	34 Purwarupa	8.360.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
				02	Mitra Komersial yang Memanfaatkan Produk Litbangjirap Iptek Nuklir			25.940.171
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	10000	orang	64.613
				AEH	Promosi	4	promosi	2.587.626
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	13	layanan	22.261.795
				QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	1	UMKM	430.753
				SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1	produk	595.384
				03	Standar Iptek Nuklir			567.231
				ADA	Standarisasi Produk	5	produk	438.689
				ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	10	Orang	128.542
2 Program	2) Program Dukungan Manajemen							639.636.389
	RM 637.058.821	01	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas manajemen kelembagaan iptek nuklir	01	Tata Kelola Manajemen Kelembagaan Litbangjirap Iptek Nuklir			552.321.398
	PNBP 2.577.568	02	Meningkatnya aksesibilitas informasi publik dan jejaring kerja sama iptek nuklir	AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	146.160
		03	Meningkatnya kualitas SDM iptek nuklir untuk memacu produktivitas riset BATAN	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	543.381.339
		04	Meningkatnya kehandalan operasional fasilitas litbangjirap iptek nuklir sesuai dengan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	5	Layanan	1.856.414

SK No 019950 C

LAMPIRAN III.2
RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAC	Layanan Umum	10	Layanan	4.144.181
		EAD	Layanan Sarana Internal	12	unit	741.363
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	309.555
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	409.952
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	22	Laporan	717.434
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	615.000
		02	Tata Kelola Komunikasi dan Informasi Publik serta Layanan Humas			338.107
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	338.107
		03	Tata Kelola Kelembagaan dan SDM Iptek Nuklir			38.283.657
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	2.577.568
		DBA	Pendidikan Tinggi	364	Orang	900.000
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	17.222.432
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	1.600.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	8.190.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	11	Layanan	3.706.601
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	2440	Orang	4.087.056
		04	Tata Kelola Fasilitas Litbangjirap Iptek Nuklir			48.693.227
		EAC	Layanan Umum	16	Layanan	48.014.737

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAJ Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	678.490

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)						1.761.547.820
2 Fungsi	04	EKONOMI						1.761.547.820
3 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						1.067.456.788
	2)	Program Dukungan Manajemen						694.091.032
1 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						1.067.456.788
	RM	917.146.161	04	Terwujudnya Inovasi Teknologi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi	04	Terwujudnya Inovasi Teknologi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi		123.600.000
	PNBP	87.117.827	07	Terwujudnya Inovasi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam	ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	8 Rekomendasi Kebijakan	4.600.000
	BLU	63.192.800	10	Terwujudnya Inovasi Teknologi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material	DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	3 produk	3.250.000
			13	Terwujudnya Inovasi Teknologi Bidang Industri Rancang Bangun dan Rekayasa	DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	31 Purwarupa	75.104.100
			14	Terwujudnya Layanan Teknologi Bidang Industri Rancang Bangun dan Rekayasa	DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	4 model	40.645.900
					07	Terwujudnya Inovasi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam		634.187.429
					ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	5 Produk	8.000.000
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	13 produk	460.621.677
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	13 Purwarupa	120.315.752
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	13 model	43.750.000
		10	Terwujudnya Inovasi Teknologi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material		54.658.732
		ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	6 Rekomendasi Kebijakan	7.500.655
		ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	750.000
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	4 produk	31.000.000
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	15 Purwarupa	11.408.077
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2 model	4.000.000
		13	Terwujudnya Inovasi Teknologi Bidang Industri Rancang Bangun dan Rekayasa		104.000.000
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	676.206

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
				BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	7	Produk	5.800.000
				DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	6	Purwarupa	84.450.000
				DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	12	model	11.073.794
				14	Terwujudnya Layanan Teknologi Bidang Industri Rancang Bangun dan Rekayasa			151.010.627
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	151	layanan	151.010.627
2 Program	2) Program Dukungan Manajemen							694.091.032
	RM	693.365.554	01 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan dinamis Melalui Transformasi Digital	01	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan dinamis Melalui Transformasi Digital			694.091.032
	PNBP	725.478		EAA	Layanan Perkantoran	19	Layanan	638.539.900
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	10	Layanan	14.925.654
				EAC	Layanan Umum	4	Layanan	13.725.478
				EAF	Layanan SDM	1	orang	2.356.480
				EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	1.750.000
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.143.520
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	3.250.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	9	Layanan	2.000.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	2.150.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	2.250.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	967	Orang	8.735.295
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1600	Orang	3.264.705

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)							840.315.882
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							840.315.882
3 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							509.135.305
	2)	Program Dukungan Manajemen							331.180.577
1 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							509.135.305
	RM	414.166.648	01	Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi sains antariksa dan atmosfer untuk pembangunan nasional	01	Iptek sains antariksa dan atmosfer yang maju			36.316.123
	PNBP	4.968.657	02	Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi di bidang teknologi penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	86	layanan	1.143.045
	PBS	90.000.000	03	Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi di bidang penginderaan jauh untuk pembangunan nasional	BMA	Data dan Informasi Publik	5	layanan	702.760
			04	Meningkatnya kepuasaan pengguna terhadap produk dan layanan sains antariksa dan atmosfer	RBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	1	unit	28.758.776
			05	Meningkatnya kepuasaan pengguna terhadap produk dan layanan di bidang teknologi penerbangan dan antariksa	SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	7	model	5.711.542
			06	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap produk dan layanan di bidang Penginderaan Jauh	02	Iptek penginderaan jauh yang maju			119.250.210

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	07 Meningkatnya keunggulan litbangyasa sains antariksa dan atmosfer sesuai prioritas nasional	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	300	Lembaga	1.945.000
	08 Meningkatnya keunggulan litbangyasa di bidang teknologi penerbangan dan antariksa sesuai prioritas nasional	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	18	layanan	2.790.866
	09 Meningkatnya keunggulan litbangyasa di bidang penginderaan jauh sesuai prioritas nasional	BMA	Data dan Informasi Publik	3	layanan	459.344
	10 Terwujudnya produk dan layanan sains antariksa dan atmosfer sesuai kebutuhan	SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	13	produk	112.655.000
	11 Terwujudnya produk dan layanan teknologi penerbangan dan antariksa sesuai kebutuhan	SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	4	Purwarupa	400.000
	12 Terwujudnya produk dan layanan penginderaan jauh sesuai kebutuhan	SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	4	model	1.000.000
	13 Terwujudnya produk dan layanan di Balai Uji Teknologi Pengamatan Antariksa dan Atmosfer sesuai kebutuhan	03	Iptek penerbangan, roket dan satelit yang maju			353.568.972
	14 Terwujudnya produk dan layanan di Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh sesuai Kebutuhan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	44	layanan	2.512.452
	15 Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna layanan Sains Antariksa dan Atmosfer	BMA	Data dan Informasi Publik	11	layanan	830.872
	16 Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna layanan Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa	CDH	OM Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	2	unit	3.970.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
			17	Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna layanan Deputi Bidang Penginderaan Jauh	DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	3	Purwarupa	4.539.000
			18	Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna produk dan layanan di Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer sesuai kebutuhan	RBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	1	unit	90.000.000
			19	Terbangunnya hubungan baik dengan pengguna produk dan layanan di Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa, Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak sesuai kebutuhan	RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	unit	5.000.000
					RDH	OM Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	2	unit	2.060.920
					SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	1	produk	1.000.000
					SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	46	Purwarupa	243.655.728
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							331.180.577
	RM	331.180.577	01	Meningkatnya pemanfaatan produk inovasi kebijakan penerbangan dan antariksa untuk pembangunan nasional	01	Reformasi birokrasi di lingkungan LAPAN, Rumusan Kebijakan, dan Standar Penerbangan dan Antariksa			331.180.577
			02	Terselenggaranya pengelolaan kebijakan, standar dan inovasi penerbangan dan antariksa berbasis penelitian	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	12	Rekomendasi Kebijakan	1.205.711
			03	Meningkatnya kematangan kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penerbangan dan Antariksa Nasional	ADA	Standansasi Produk	1	produk	594.282
			04	Terselenggaranya kerjasama dalam penyelenggaraan penerbangan dan antariksa	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	370	orang	419.845

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	05 Terselenggaranya Reformasi Birokrasi LAPAN Menuju Birokrasi Kelas Dunia sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Utama	DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	21	kekayaan intelektual	573.283
	06 Terselenggaranya layanan internal Sekretariat Utama LAPAN yang prima	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	296.804.917
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	708.119
		EAC	Layanan Umum	2	Layanan	1.497.571
		EAE	Layanan Prasarana Internal	86	unit	1.481.450
		EAF	Layanan SDM	1293	orang	7.539.213
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	465.865
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	668.922
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	1.588.535
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	6	Layanan	686.069
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	46	Laporan	1.029.951
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.000.977
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1	Dokumen	869.314
		FAA	Kearsipan	7	Dokumen	645.278
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	13.401.275

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)							1.267.901.629
2 Fungsi	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP							1.267.901.629
3 Program	1)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial							1.090.543.800
	2)	Program Dukungan Manajemen							177.357.829
1 Program	1)	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial							1.090.543.800
	RM	1.079.383.800	01	Meningkatnya ketersediaan SRGI yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	01	SRGI yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional			136.069.000
	PLN	1.000.000	02	Meningkatnya ketersediaan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional	999	Output Cadangan	1	cadangan	378.000
	RMP		03	Meningkatnya ketersediaan tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional	CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	35	Unit	2.626.000
	PNBP	10.160.000	04	Tersedianya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM	CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	342115	km2	9.686.000
					CCI	OM Sarana Pengembangan Kawasan	464	Unit	19.997.000
					RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	112	Unit	101.777.000
					RCI	OM Sarana Pengembangan Kawasan	90	Unit	1.605.000
					02	Peta dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional			844.324.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		999	Output Cadangan	1	cadangan	353.043
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	1622	Unit	10.986.879
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	267125	km2	14.750.166
		PEC	Kerja sama	12	Kesepakatan	3.237.387
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	140	Unit	9.876.389
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	428644	km2	786.795.026
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	4334	Desa	18.325.110
		03	tema dan informasi geospasial tematik sesuai kebutuhan pembangunan nasional			36.802.000
		999	Output Cadangan	1	cadangan	664.677
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	129	Rekomendasi Kebijakan	19.200.823
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	4312928	km2	16.936.500
		04	Infrastruktur informasi Geospasial yang berkualitas dengan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan dan SDM			73.348.800
		999	Output Cadangan	1	cadangan	67.200
		ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1	Rekomendasi Kebijakan	400.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	4.520.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5	Lembaga	3.607.000
					BMA	Data dan Informasi Publik	1112	layanan	12.086.600
					DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	338	Orang	4.921.000
					QMA	Data dan Informasi Publik	360	layanan	47.747.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							177.357.829
	RM	177.357.829	01	Terwujudnya BIG yang akuntabel, transparan, dan profesional	01	BIG yang bersih, efektif dan terpercaya			177.357.829
					999	Output Cadangan	2	cadangan	439.340
					EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	123.732.249
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.750.000
					EAC	Layanan Umum	3	Layanan	8.271.512
					EAD	Layanan Sarana Internal	15	unit	4.771.532
					EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	506.652
					EAF	Layanan SDM	722	orang	7.263.000
					EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	3.799.700
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	2.250.000
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	603	Layanan	10.314.869
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	7	Layanan	3.473.620
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	33	Laporan	3.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	1.476.000
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	150	Orang	2.507.025
		EAN Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	5	Dokumen	2.802.330

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)							265.996.133
2 Fungsi	04	EKONOMI							265.996.133
3 Program	1)	Program Standardisasi Nasional							111.653.865
	2)	Program Dukungan Manajemen							154.342.268
1 Program	1)	Program Standardisasi Nasional							111.653.865
	RM		80.807.380	01	Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional	01	SNI yang dibutuhkan masyarakat		18.972.000
	PNBP		30.846.485	02	Meningkatnya pemenuhan produk terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI)	PAH	Peraturan lainnya	9 peraturan	2.098.832
				03	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	507 Rekomendasi Kebijakan	2.088.957
				04	Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional	PEB	Forum	29 forum	1.848.534
						PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	370 orang	1.148.576
						PEG	Konferensi dan Event	3 Kegiatan	500.001
						PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	715 NSPK	5.143.026
						QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1510 Orang	2.005.999
						SCH	Pelatihan Bidang Industri	1590 Orang	1.950.250

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	4	Purwarupa	332.802
		SDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	3	kekayaan intelektual	331.963
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	166	Laporan	1.523.060
		02	Sistem Penerapan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian			15.015.800
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	116	Rekomendasi Kebijakan	3.698.030
		PEB	Forum	3	forum	471.649
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	10000	orang	2.894.750
		PEG	Konferensi dan Event	10	Kegiatan	1.065.507
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	10	layanan	4.500.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25	Lembaga	1.000.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	10	Kelompok Masyarakat	105.250
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	150	UMKM	600.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	50	Badan usaha	400.000
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	15	Lembaga	280.614
		03	Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian			30.219.633

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	6	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
				ADE	Akreditasi Lembaga	1798	Lembaga	26.719.633
				PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	13	Rekomendasi Kebijakan	1.381.120
				PEB	Forum	3	forum	1.118.880
				04	Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran			47.446.432
				ADB	Akreditasi Produk	2	produk	2.201.838
				AEB	Forum	12	forum	552.074
				AEG	Konferensi dan Event	7	Kegiatan	507.362
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	875.685
				BJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	1204	Unit	2.309.473
				RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	17	Unit	41.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						154.342.268
	RM	152.704.029	01	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi BSN Menuju Birokrasi Profesional	99	Pengelolaan anggaran, Sumber Daya Manusia, tata kelola dan organisasi		154.342.268
	PNBP	1.638.239			AEC	Kerja sama	14	Kesepakatan	1.496.965
					AEG	Konferensi dan Event	6	Kegiatan	1.093.835

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	2.733.356
		BMB	Komunikasi Publik	1	layanan	1.886.444
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	120.648.789
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	2.775.000
		EAC	Layanan Umum	7	Layanan	4.170.323
		EAD	Layanan Sarana Internal	518	unit	6.589.800
		EAF	Layanan SDM	2089	orang	4.804.746
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	1.271.940
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.666.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	3.391.900
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	2	Laporan	1.000.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	30	Orang	813.170

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)							126.058.189
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							126.058.189
3 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							29.646.653
	2)	Program Dukungan Manajemen							96.411.536
1 Program	1)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi							29.646.653
	RM	17.748.691	01	Peningkatan kualitas pengawasan ketenaganukliran melalui penyusunan regulasi	01	Kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir			29.646.653
	PNBP	11.897.962	02	Peningkatan kualitas pengawasan ketenaganukliran melalui penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan inspeksi	AAA	Undang-Undang	1	UU	500.000
			03	Peningkatan kualitas pengawasan partisipasi stakeholder ketenaganukliran berbasis teknologi informasi	AAH	Peraturan lainnya	11	peraturan	1.937.288
			04	Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons kedaruratan nuklir.	ABU	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir	90	Rekomendasi Kebijakan	3.650.000
			05	Peningkatan sistem pengawasan dalam persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir	ACB	Perizinan Masyarakat	2049	Orang	2.545.858
					ACD	Perizinan Lembaga	2131	Institusi	4.332.842
					ADC	Sertifikasi Produk	1000	produk	248.918
					ADF	Sertifikasi Lembaga	32	Lembaga	440.974

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	25	Orang	210.000
					AEA	Koordinasi	10	kegiatan	200.000
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	200	orang	737.712
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	1.000.000
					BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	11	Orang	250.000
					BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	9	Produk	1.119.102
					BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1506	Lembaga	5.387.568
					CDH	OM Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	29	unit	391.874
					DCK	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	210	Orang	858.126
					RDH	OM Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	5	unit	5.836.391
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							96.411.536
	RM	96.043.451	01	SDM yang profesional.	01	Tata kelola dan sumber daya lembaga			96.411.536
	PNBP	368.085	02	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas organisasi.	AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	1.375.000
			03	Meningkatnya infrastruktur dan sistem informasi lembaga.	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	79.605.493
			04	Pengelolaan kinerja, anggaran yang optimal dan akuntabel.	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	800.000
					EAC	Layanan Umum	3	Layanan	4.023.598
					EAD	Layanan Sarana Internal	34	unit	1.000.000
					EAF	Layanan SDM	395	orang	620.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	655.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.000.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	2.184.600
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	1.659.760
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	10	Laporan	750.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	450.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	200	Orang	2.288.085

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA							325.005.420
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							306.519.059
	10	PENDIDIKAN							18.486.361
3 Program	1)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							67.518.491
	2)	Program Dukungan Manajemen							257.486.929
1 Program	1)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							67.518.491
	RM	23.242.513	01	Terwujudnya kebijakan, pembinaan profesi dan tata kelola ASN yang Berkualitas	01	Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ilmu administrasi negara terapan yang berkualitas			18.486.361
	PNBP	44.275.978			BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	14	Kelompok Masyarakat	1.577.654
					BMA	Data dan Informasi Publik	28	layanan	2.172.329
					DBA	Pendidikan Tinggi	6404	Orang	14.736.378
					02	Pembinaan jabatan fungsional administrasi negara yang berkualitas			2.549.823
					ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	2	Orang	301.553
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	2	orang	408.465
					BMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	236.000
					FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2	Orang	262.630

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4 Laporan	1.341.175
		03	Rekomendasi kebijakan dan inovasi di bidang administrasi negara yang berkualitas		3.368.293
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	4 Rekomendasi Kebijakan	1.707.597
		BMA	Data dan Informasi Publik	5 layanan	310.696
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	1 model	195.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.155.000
		04	Rekomendasi kebijakan dan inovasi di bidang manajemen ASN yang berkualitas		3.100.118
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	2 Rekomendasi Kebijakan	1.125.118
		BMA	Data dan Informasi Publik	2 layanan	75.000
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2 model	1.250.000
		PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000
		05	Kualitas Kebijakan dan penyelnggaraan pengembangan kompetensi ASN yang terjamin		40.013.896

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					AAH	Peraturan lainnya	4	peraturan	180.000
					ADE	Akreditasi Lembaga	35	Lembaga	1.168.127
					AEA	Koordinasi	1	kegiatan	200.000
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	401	orang	1.100.000
					FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	5791	Orang	31.715.769
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan	350.000
					PAH	Peraturan lainnya	4	peraturan	1.800.000
					UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	430	Orang	3.500.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							257.486.929
	RM	249.431.313	02	Tata kelola internal yang berkinerja tinggi	01	Tata kelola yang baik berbasis kinerja di Lingkungan LAN			257.486.929
	PNBP	8.055.616			AEA	Koordinasi	10	kegiatan	5.122.830
					EAA	Layanan Perkantoran	16	Layanan	221.844.719
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	25	Layanan	1.645.262
					EAC	Layanan Umum	22	Layanan	4.394.342
					EAD	Layanan Sarana Internal	16	unit	2.914.301
					EAE	Layanan Prasarana Internal	5	unit	8.064.882
					EAF	Layanan SDM	130	orang	5.948.926
					EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	136.004

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	17	Layanan	1.418.764
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	10	Layanan	1.633.356
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	660.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	11	Laporan	549.211
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	4	Dokumen	604.332
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	2.550.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA						292.439.611
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						292.439.611
3 Program	1)	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional						70.021.225
	2)	Program Dukungan Manajemen						222.418.386
1 Program	1)	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional						70.021.225
	RM	58.554.551	01	Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	01	Kualitas kebijakan kearsipan nasional		1.000.000
	PNBP	11.466.674	02	Peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	6 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
			03	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan	02	Kapabilitas Organisasi Kearsipan		7.103.249
			04	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1221 Orang	1.810.249
			05	Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15 Lembaga	200.000
			06	Peningkatan Pelayanan Informasi Kearsipan	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	140 Orang	300.000
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	65 Lembaga	1.300.000
					UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	96 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.493.000
					03	Kualitas Pelayanan dan Fasilitasi Kearsipan		10.927.887

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5	layanan	6.583.392
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1235	Orang	4.344.495
		04	Pengawasan Kearsipan yang Efektif			3.925.440
		ADE	Akreditasi Lembaga	8	Lembaga	171.920
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	634	Lembaga	3.753.520
		05	Arsip nasional yang terlindungi dan terselamatkan			42.597.031
		CAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	298	Unit	31.000.000
		FAA	Kearsipan	14886	Dokumen	1.897.031
		RAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	244	Unit	8.000.000
		UAA	Kearsipan	117351	Dokumen	1.700.000
		06	Ketersediaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan yang Berkualitas (Fungsi SIKN - manufacturing dan JIKN - service delivery)			4.467.618
		FAA	Kearsipan	5210	Dokumen	317.618
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	280110	Orang	1.600.000
		UAA	Kearsipan	9798	Dokumen	2.550.000
2 Program 2) Program Dukungan Manajemen						222.418.386
RM 222.418.386	02 Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI	01	Layanan Dukungan Manajemen serta penyediaan Sarana dan Prasarana ANRI			222.418.386

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	1.300.000
		EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	151.886.288
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.432.256
		EAC	Layanan Umum	6	Layanan	1.015.589
		EAD	Layanan Sarana Internal	88	unit	10.031.598
		EAE	Layanan Prasarana Internal	8	unit	45.841.505
		EAF	Layanan SDM	884	orang	1.400.702
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	805.948
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	618.350
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	3.428.842
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	984.656
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	16	Laporan	423.411
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13	Laporan	400.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	75	Orang	350.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	2.499.241

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA							634.105.873
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							634.105.873
3 Program	1)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							78.935.224
	2)	Program Dukungan Manajemen							555.170.649
1 Program	1)	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN							78.935.224
	RM	73.030.719	01	Terselenggaranya tata kelola manajemen ASN yang sesuai NSPK di instansi Pemerintah	02	Tata Kelola Manajemen ASN			12.172.686
	PNBP	5.904.505	02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Kepegawaian	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	755	Lembaga	7.580.311
					BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167	Lembaga	3.592.375
					PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur	2	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
					03	Rumusan Kebijakan Manajemen ASN			18.799.389
					AAH	Peraturan lainnya	20	peraturan	950.000
					ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	11	Rekomendasi Kebijakan	4.056.860
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	360.292
					BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	449	Lembaga	138.165

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	726	Lembaga	586.477
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	500	Orang	207.595
		PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	996	Lembaga	11.300.000
		04	Pelayanan Teknis Kepegawaian			47.963.149
		ADE	Akreditasi Lembaga	25	Lembaga	1.000.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	1.300.000
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	109741	Orang	5.217.645
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	2997	Lembaga	9.994.513
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	200.000
		FAA	Kearsipan	3047665	Dokumen	8.288.412
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	350.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1497	Orang	4.512.579
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2000	Orang	3.800.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	2.000.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	7.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1750	Orang	4.300.000
2 Program	2) Program Dukungan Manajemen								555.170.649
	RM	552.437.509	01	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, efektif, dan efisien	01	Tata Kelola Sumber Daya BKN			555.170.649
	PNBP	2.733.140			AEC	Kerja sama	6	Kesepakatan	470.300
					EAA	Layanan Perkantoran	33	Layanan	456.405.007
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	35	Layanan	2.873.154
					EAC	Layanan Umum	27	Layanan	3.434.311
					EAD	Layanan Sarana Internal	329	unit	28.872.022
					EAE	Layanan Prasarana Internal	12	unit	11.314.678
					EAF	Layanan SDM	1246	orang	5.698.533
					EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	879.700
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	729.665
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	1.289.178
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	900.000
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	5	Laporan	1.178.737
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	36	Laporan	1.447.501
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	235	Orang	1.963.256
					EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	17	Dokumen	1.714.607

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	36.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)								1.675.181.500
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM								1.675.181.500
3 Program	1)	Program Pengawasan Pembangunan								255.605.313
	2)	Program Dukungan Manajemen								1.419.576.187
1 Program	1)	Program Pengawasan Pembangunan								255.605.313
	RM		92.401.713	01	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	--	--			1.699.195
	PLN		136.932.367	02	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	UAG	Pengawasan Pembangunan	59	Laporan	1.699.195
	RMP			03	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KL Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	01	Laporan hasil pengawasan triwulanan			253.906.118
	PNBP		26.271.233	04	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara Bidang Polhukam dan PMK	AAH	Peraturan lainnya	3	peraturan	383.000
				05	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional Bidang Polhukam dan PMK	AEA	Koordinasi	5	kegiatan	1.000.000
				06	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern KL bidang Polhukam dan PMK	EAK	Layanan Pengawasan Internal	70	Laporan	1.541.505
				07	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	14.119.233

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	08 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	20906	Orang	138.784.098
	09 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	12	Laporan	419.084
	10 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha Terhadap Keuangan Negara dan Daerah	FAG	Pengawasan Pembangunan	116	Laporan	36.838.393
	11 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Badan Usaha Terhadap Pembangunan Nasional	UAG	Pengawasan Pembangunan	3338	Laporan	60.820.805
	12 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha					
	13 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD					
	14 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha					
	15 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Bidang Investigasi					
	16 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Nasional					
	17 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Badan Usaha					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN	ALOKASI Ribu Rp
	18 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian		
	19 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi		
	20 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah pada Perwakilan		
	21 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional pada Perwakilan		
	22 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha pada Perwakilan		
	23 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Perwakilan		
	24 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU pada Perwakilan		
	25 Meningkatnya Dukungan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan		
2 Program 2) Program Dukungan Manajemen			1.419.576.187
RM 1.417.446.187	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengawasan BPKP	-- --	51.364.200
PNBP 2.130.000		EAA Layanan Perkantoran 1 Layanan	34.996.574
		EAC Layanan Umum 3 Layanan	2.480.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	493	unit	4.862.906
		EAE	Layanan Prasarana Internal	16	unit	9.024.720
		01	Tindak lanjut peningkatan kualitas tata kelola			1.368.211.987
		EAA	Layanan Perkantoran	50	Layanan	1.155.455.768
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	2.635.685
		EAC	Layanan Umum	76	Layanan	36.880.315
		EAD	Layanan Sarana Internal	111	unit	628.958
		EAE	Layanan Prasarana Internal	37	unit	145.547.381
		EAF	Layanan SDM	6668	orang	20.565.000
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	1.808.500
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.400.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	1.565.380
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	875.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	22	Laporan	850.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN						3.028.964.712
2 Fungsi	04	EKONOMI						3.020.007.692
	10	PENDIDIKAN						8.957.020
3 Program	1)	Program Perdagangan Luar Negeri						643.271.218
	2)	Program Perdagangan Dalam Negeri						973.594.468
	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						10.170.000
	4)	Program Dukungan Manajemen						1.401.929.026
1 Program	1)	Program Perdagangan Luar Negeri						643.271.218
	RM	639.309.358	01	Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor yang berdaya saing	01	Potensi transaksi promosi ekspor		464.587.495
	PNBP	3.961.860	02	Meningkatnya efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri serta fasilitasi ekspor dan impor	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	169 Rekomendasi Kebijakan	5.300.367
			03	Meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional	AEG	Konferensi dan Event	108 Kegiatan	7.295.707
			04	Tersedianya dukungan atas pengamanan kebijakan nasional serta tata aturan yg kondusif bagi perdagangan internasional indonesia	AEH	Promosi	163 promosi	88.037.842
			05	Tercapainya efektivitas implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan indonesia dengan negara mitra FTA	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1 Layanan	596.104

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	06 Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor pangan	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	366.452
		EAD	Layanan Sarana Internal	54	unit	6.808.634
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	Layanan	2.970.000
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	1	Laporan	97.396
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	40	Rekomendasi Kebijakan	13.360.156
		PEC	Kerja sama	5	Kesepakatan	2.300.000
		PEH	Promosi	39	promosi	276.501.237
		QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	402	Badan usaha	17.900.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	392	Badan usaha	26.703.600
		QMA	Data dan Informasi Publik	6	layanan	4.650.000
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	140	produk	10.000.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.700.000
		03	pelaku usaha siap ekspor			21.803.720
		EAD	Layanan Sarana Internal	20	unit	541.174
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.300.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	1.262.546

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	150	UMKM	4.010.262
		SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3577	Orang	14.689.738
		05	Hasil Perundingan Perdagangan Internasional			83.653.455
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	8	Rekomendasi Kebijakan	565.886
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	119	Rekomendasi Kebijakan	36.084.541
		PEA	Koordinasi	18	kegiatan	6.055.170
		PEC	Kerja sama	78	Kesepakatan	23.126.527
		PED	Perjanjian	11	perjanjian	5.175.439
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	600	orang	1.237.395
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	400	Badan usaha	8.672.021
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	2.000.000
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	100	Orang	736.476
		06	Pengamanan Perdagangan Internasional			25.138.526
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	29	Rekomendasi Kebijakan	14.621.613
		EAD	Layanan Sarana Internal	14	unit	350.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	30	orang	1.143.549
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	1.006.260
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.582.104
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	300	orang	733.220
		QCB	Perkara Hukum Lembaga	30	Perkara	5.701.780
		07	Kebijakan Ekspor			12.369.295
		AAG	Peraturan Menteri	26	PerMen	4.115.943
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	100.000
		BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	1420	Badan usaha	113.352
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	398.088
		PAG	Peraturan Menteri	3	PerMen	1.251.436
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3	Rekomendasi Kebijakan	2.453.430
		PEB	Forum	6	forum	1.937.046
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2000	UMKM	2.000.000
		08	Kebijakan Pengelolaan Impor			5.729.989
		AAG	Peraturan Menteri	2	PerMen	957.430

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	500.000
		PAG	Peraturan Menteri	19	PerMen	2.772.559
		QKB	Pemantauan produk	2	laporan	1.500.000
		09	Fasilitasi Kebijakan Ekspor dan Impor			29.988.738
		AAG	Peraturan Menteri	2	PerMen	929.787
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	800.000
		BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	8000	Badan usaha	1.462.500
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	500.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	36	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.006.082
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.300.000
		PEA	Koordinasi	14	kegiatan	4.500.000
		QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	5550	Badan usaha	4.140.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	129	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.350.369

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
2 Program	2) Program Perdagangan Dalam Negeri							973.594.468
	RM	958.791.418	01	Mewujudkan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	01	Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan Dalam Negeri		49.100.000
	PNBP	14.803.050	02	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2 Layanan	4.500.000
			03	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan	EAD	Layanan Sarana Internal	34 unit	1.200.000
			04	Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	9 Rekomendasi Kebijakan	5.431.467
			05	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	PEA	Koordinasi	368 kegiatan	11.878.080
					PEB	Forum	3 forum	2.526.389
					PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1490 orang	5.043.741
					QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2000 layanan	1.049.345
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	83 Lembaga	2.373.664
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	200 Orang	1.500.000
					QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	440 UMKM	1.224.947
					QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	450 Badan usaha	1.378.189
					QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	13 Produk	2.575.178
					QKB	Pemantauan produk	10 laporan	5.279.552
					TAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	3.139.448

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		02	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha Bidang Perdagangan			620.637.656
		AAG	Peraturan Menteri	3	PerMen	1.236.440
		AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	25.000
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1	Rekomendasi Kebijakan	870.000
		AEA	Koordinasi	65	kegiatan	4.338.250
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	1.101.980
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	324	Lembaga	5.559.790
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	70	Badan usaha	2.249.850
		BKB	Pemantauan produk	2	laporan	1.944.000
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.613.341
		EAD	Layanan Sarana Internal	21	unit	300.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	200.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	5	Layanan	5.988.830
		PEA	Koordinasi	160	kegiatan	6.791.620
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	1.153.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	869	Lembaga	7.734.548
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2000	UMKM	4.723.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	380	Badan usaha	2.355.705
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	300	Lembaga	3.802.302
		RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	123	unit	567.000.000
		RCH	OM Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	Unit	650.000
		03	Kampanye dan Promosi Produk Dalam Negeri			152.523.000
		CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	unit	30.000.000
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	2.218.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	12	unit	973.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	200.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	297	Daerah (Prov/Kab/Kota)	32.000.000
		PEH	Promosi	1	promosi	4.000.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1000	Orang	7.500.000
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3000	UMKM	25.872.000
		RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	10	unit	49.760.000
		04	Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pesar Lelang Komoditas			20.569.238

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AAH	Peraturan lainnya	8	peraturan	700.000
		ACD	Perizinan Lembaga	600	Institusi	749.554
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	351	Orang	691.850
		BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	27	Orang	488.971
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12	Lembaga	575.000
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	560	Orang	1.800.000
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	100	Badan usaha	160.862
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	282	Lembaga	7.244.851
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	1.584.166
		EAG	Layanan Hukum	12	Layanan	267.953
		PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	7	Rekomendasi Kebijakan	1.991.449
		PCD	Perizinan Lembaga	28	Institusi	750.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK	536.880
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	52	Lembaga	974.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	464	Orang	903.702
		QMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	250.000
		RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	12	Unit	900.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		05	Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			130.764.574
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	32	Rekomendasi Kebijakan	5.236.222
		ACA	Perizinan Produk	1562	Produk	662.413
		ADC	Sertifikasi Produk	48700	produk	5.078.194
		AEB	Forum	5	forum	1.000.000
		AEC	Kerja sama	11	Kesepakatan	2.620.274
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	440	orang	710.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	NSPK	351.750
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1150	Orang	1.705.742
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	64	Lembaga	2.236.168
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3	Produk	1.519.250
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2	Lembaga	1.051.000
		BJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	5	Unit	325.000
		BMB	Komunikasi Publik	1	layanan	1.000.000
		CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	27	Unit	13.670.621
		CCH	OM Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	45	Unit	14.318.554
		EAC	Layanan Umum	22	Layanan	7.783.261

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
						EAD	Layanan Sarana Internal	483	unit	3.553.064
						EAE	Layanan Prasarana Internal	10	unit	2.855.000
						EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	6.030.561
						PDC	Sertifikasi Produk	11851	produk	6.128.350
						PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	128	Orang	1.759.218
						QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	191	Lembaga	6.154.050
						QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8580	Orang	10.045.957
						QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	77519	Produk	21.855.712
						QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	160	Lembaga	3.778.110
						QMA	Data dan Informasi Publik	11	layanan	519.468
						UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	665	Orang	8.816.635
3 Program	3)	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								10.170.000
	RM		10.170.000	01	Meningkatnya kualitas pengkajian dan pengembangan perdagangan	01	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan			10.170.000
						ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	77	Rekomendasi Kebijakan	9.424.255
						AEB	Forum	9	forum	745.745
4 Program	4)	Program Dukungan Manajemen								1.401.929.026

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	1.351.151.189	01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	01	Layanan Perencanaan dan Manajemen Keuangan			908.183.354
PNBP	50.777.837	02	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	AEA	Koordinasi	3	kegiatan	438.839
		03	Penguatan Pelaksanaan Manajemen Kinerja	EAA	Layanan Perkantoran	147	Layanan	759.832.035
		04	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	31	Layanan	62.024.839
		05	Meningkatnya Profesionalisme dan Kemampuan Manajemen Usaha SDM Perdagangan	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	1.312.280
				EAD	Layanan Sarana Internal	431	unit	10.450.647
				EAE	Layanan Prasarana Internal	3	unit	859.500
				EAF	Layanan SDM	123	orang	1.134.473
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	18	Layanan	47.037.729
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	977.375
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	1.889.637
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	2.700.000
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	34	Daerah (Prov/Kab/Kota)	19.526.000
				02	Layanan Manajemen SDM dan Organisasi			92.833.599
				ADE	Akreditasi Lembaga	1	Lembaga	72.106
				AEC	Kerja sama	8	Kesepakatan	952.664

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	209.206
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	200	Orang	107.758
		DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	714	Orang	3.818.471
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	9	Purwarupa	399.084
		EAA	Layanan Perkantoran	6	Layanan	49.227.988
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	411.149
		EAD	Layanan Sarana Internal	212	unit	3.567.442
		EAF	Layanan SDM	13570	orang	7.820.076
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	11	Layanan	10.917.627
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	262.181
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1192	Orang	3.210.399
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	386	Orang	5.357.448
		SBA	Pendidikan Tinggi	165	Orang	6.500.000
		03	Layanan Dukungan Kinerja Layanan Publik			391.312.073
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	6	Rekomendasi Kebijakan	2.074.254
		AEH	Promosi	8	promosi	7.075.319
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	6.777.189

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	461.174
		BMB	Komunikasi Publik	1	layanan	4.780.539
		EAA	Layanan Perkantoran	6	Layanan	153.735.848
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	267.640
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	29.877.088
		EAD	Layanan Sarana Internal	81	unit	5.321.817
		EAE	Layanan Prasarana Internal	4	unit	103.000.000
		EAF	Layanan SDM	32	orang	366.728
		EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	6.595.476
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Layanan	4.343.951
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	16.985.081
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	47.339.439
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12	Laporan	2.310.530
		04	Layanan Pengawasan Internal Yang Berkualitas			9.600.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	20	Laporan	9.600.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA							2.322.770.668
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							315.411.875
	08	PARIWISATA							1.566.058.793
	10	PENDIDIKAN							441.300.000
3 Program	1)	Program Keolahragaan							1.888.664.422
	2)	Program Kepemudaan							118.694.371
	3)	Program Dukungan Manajemen							315.411.875
1 Program	1)	Program Keolahragaan							1.888.664.422
	RM		1.854.664.422	01	Meningkatnya Pemasalan Olahraga dan Aktivitas Fisik Masyarakat	01	Kebijakan, Fasilitasi dan Event Dalam Meningkatkan Pemasalan Olahraga dan Aktivitas Fisik Masyarakat		272.605.629
	BLU		34.000.000	02	Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Regional dan Internasional	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	11.000.000
						AEA	Koordinasi	18 kegiatan	9.256.500
						AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6 NSPK	984.600
						BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	3.000.000
						BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	38 Lembaga	4.275.000
						BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	280 Orang	50.908.829
						BEI	Bantuan Lembaga	4 Lembaga	1.083.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	132.500
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	83974	Orang	181.765.200
		QEI	Bantuan Lembaga	65	Lembaga	10.200.000
		02	Kebijakan, Fasilitasi dan Event Dalam Meningkatkan Atlet Berprestasi			1.616.058.793
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	3	Rekomendasi Kebijakan	1.078.700
		ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	150	Orang	8.784.620
		AEA	Koordinasi	13	kegiatan	7.414.050
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	13	NSPK	8.673.713
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4	layanan	31.792.700
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	51	Lembaga	23.166.800
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	18670	Orang	42.760.499
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	1.983.900
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	266.566
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	1	Laporan	10.756.834
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11	Lembaga	10.462.654
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1060	Orang	432.988.893
		QEA	Bantuan Masyarakat	5	Orang	227.976

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QEI	Bantuan Lembaga	309	Lembaga	1.035.700.888
2 Program	2)	Program Kepemudaan							118.694.371
	RM	118.694.371	01	Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	01	Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Meningkatkan Pemuda yang Kreatif, Inovatif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Menumbuhkan Semangat Kewirausahaan			76.000.000
			02	Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan kebangsaan	AEA	Koordinasi	5	kegiatan	2.699.817
					AEE	Kemitraan	2	Kesepakatan	507.666
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5	NSPK	2.141.184
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	45	Lembaga	2.732.280
					BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2780	Orang	7.201.052
					BEA	Bantuan Masyarakat	1000	Orang	8.038.638
					BEI	Bantuan Lembaga	1	Lembaga	12.188.561
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4	Laporan	1.184.583
					PEA	Koordinasi	9	kegiatan	6.356.438
					PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	1.764.844
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	8768	Orang	17.533.042
					QEI	Bantuan Lembaga	102	Lembaga	13.651.895
					02	Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Pembangunan Pemuda yang Berideologi Pancasila, Berkarakter, Berbudaya, dan Berwawasan			42.694.371

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
						Kebangsaan				
					AEA	Koordinasi	40	kegiatan		5.239.357
					AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1000	orang		1.334.650
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12	NSPK		2.254.197
					BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	17729	Orang		20.816.167
					BEI	Bantuan Lembaga	20	Lembaga		1.000.000
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7772	Orang		12.050.000
3 Program	3)	Program Dukungan Manajemen								315.411.875
	RM		315.411.875	01 Meningkatnya Manajemen Organisasi yang Berkualitas, Keuangan yang Efektif dan Efisien, dan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.	01	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Kesekretariatan				74.196.726
				02 Meningkatnya Pengawasan Internal yang Akuntabel dan Transparan	AAA	Undang-Undang	1	UU		1.750.000
					AAC	Peraturan Pemerintah	1	PP		350.000
					AAD	Peraturan Presiden	1	PerPres		350.000
					AAG	Peraturan Menteri	1	PerMen		350.000
					AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan		500.000
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan		9.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAD	Layanan Sarana Internal	110	unit	8.000.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	4	unit	8.596.726
		EAF	Layanan SDM	851	orang	1.660.975
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	2.700.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	6.000.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	14.986.458
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	5.000.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	5.000.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	500	Orang	5.339.025
		FAA	Kearsipan	1	Dokumen	4.613.542
		02	Terlaksananya Pengeolaan Layanan Pengawasan Internal			216.215.149
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	175.389.906
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	22.975.243
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	14.700.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	50	Laporan	3.150.000
		03	Terselenggaranya Layanan Dukungan Kedeputian			25.000.000
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	1.180.080
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	19.597.920

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	170	orang	950.000
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	326.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	420.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	1.690.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	336.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)							1.305.075.256
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							1.305.075.256
3 Program	1)	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi							382.134.535
	2)	Program Dukungan Manajemen							922.940.721
1 Program	1)	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi							382.134.535
	RM	382.134.535	01	Mengoptimalkan Pencegahan Korupsi	01	Pemulihan dan Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi			9.187.224
			02	Meningkatkan Koordinasi KPK dengan Instansi Terkait	BCE	Penanganan Perkara	50	Perkara	527.224
			03	Menguatkan monitoring Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	QCE	Penanganan Perkara	120	Perkara	8.660.000
			04	Mengefektifikan Supervisi KPK terhadap Instansi terkait	02	Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi KPK			57.306.528
			05	Meningkatkan efektifitas Penegakan Hukum Tipikor	BCE	Penanganan Perkara	336	Perkara	45.186.457
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	6.884.352
					FAG	Pengawasan Pembangunan	128	Laporan	5.235.719
					03	Dampak Pencegahan Korupsi			195.551.894
					ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3000	Orang	40.213.221
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6170	Lembaga	23.060.000
					BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	16050000	Orang	60.679.386

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	360130	Orang	16.074.590
		BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1862	laporan	15.277.372
		BKC Pemantauan lembaga	51	laporan	10.170.614
		QKC Pemantauan lembaga	70	laporan	30.076.711
		04 Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi			120.088.889
		AEA Koordinasi	37	kegiatan	6.920.471
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2	Lembaga	14.478.076
		BIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	551	Pemerintah Daerah	18.068.042
		EAJ Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	64.229.168
		EAK Layanan Pengawasan Internal	54	Laporan	1.651.936
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	35	Lembaga	13.746.196
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	995.000
2 Program 2) Program Dukungan Manajemen					922.940.721
RM 922.940.721	05 Menyederhanakan dan Penataan Regulasi yang Efektif	01 Akuntabilitas Keuangan			1.700.000
	06 Membentuk Sumber Daya Manusia Berkinerja Optimal dan Berbudaya Kerja yang Tinggi	EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	1.700.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
	07 Membangun Sistem Operasional dan Data Informasi Terintegrasi yang Adaptif	02 Sistem Operasional Terintegrasi dan Adaptif			921.240.721
	08 Pemanfaatan Anggaran Tepat Sasaran dan Penguatan Pengendalian Internal Yang Terkelola dan Terukur	EAA Layanan Perkantoran	3	Layanan	724.864.762
		EAC Layanan Umum	2	Layanan	174.551.758
		EAF Layanan SDM	1612	orang	2.707.346
		EAG Layanan Hukum	1	Layanan	2.000.000
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6	Layanan	11.549.105
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	5.567.750

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)						1.048.972.262
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						1.048.972.262
3 Program	1)	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan						582.981.844
	2)	Program Dukungan Manajemen						465.990.418
1 Program	1)	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan						582.981.844
	RM	582.981.844	01	Meningkatnya kepuasan anggota DPD RI dan alat kelengkapan terhadap layanan Setjen DPD RI	01	Jumlah Draft Keputusan/Peraturan DPD RI yang Digunakan Sebagai Keputusan/Peraturan DPD RI terkait tugas komite I, Komite III dan PPUU		85.513.791
			02	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, kajian dan perancangan oleh DPD RI dan Alat Kelengkapan	ABC	Kebijakan Bidang Politik	10 Rekomendasi Kebijakan	11.969.558
			03	Terselenggaranya dukungan pengelolaan aspirasi masyarakat yang optimal	AEA	Koordinasi	2 kegiatan	740.400
			04	Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang professional sesuai wewenang DPD	AEC	Kerja sama	3 Kesepakatan	6.551.088
			05	Terselenggaranya dukungan legislasi dan anggaran serta produk DPD lainnya	PAA	Undang-Undang	19 UU	66.252.745
			06	Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang sesuai aturan	02	Jumlah Kegiatan/Layanan Kesekretariatan Terhadap Kegiatan Pimpinan DPD RI dalam Rangka Penguatan Kelembagaan DPD RI		18.422.240

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AEA	Koordinasi	7	kegiatan	18.422.240
		03	Jumlah draft keputusan/Peraturan DPD RI dan materi yang digunakan sebagai keputusan/peraturan DPD RI terkait tugas komite II,Komite IV, Panmus, BAP, PURT, dan BK			474.595.813
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	21	Rekomendasi Kebijakan	22.522.950
		AEA	Koordinasi	2	kegiatan	936.240
		BMB	Komunikasi Publik	34	layanan	399.129.157
		PAA	Undang-Undang	22	UU	52.007.466
		04	Bahan Kajian Penelitian, Materi Pengolahan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dan bahan kajian kebijakan anggaran daerah kepada Akel DPD RI.			2.325.000
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	22	Rekomendasi Kebijakan	1.029.680
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	7	Rekomendasi Kebijakan	1.295.320
		05	Bahan kajian kebijakan, perancangan hukum dan perundang-undangan, dan pengembangan jaringan informasi hukum pusat dan daerah			2.125.000
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	6	Rekomendasi Kebijakan	1.417.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BMA	Data dan Informasi Publik	2	layanan	708.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							465.990.418
	RM	465.990.418	01	Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi.	01	Perumusan kebijakan Organisasi dan Tata Laksana, Keanggotaan, Pengembangan SDM, dan Advokasi Hukum			9.500.000
			02	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi	EAF	Layanan SDM	2036	orang	8.104.719
			03	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan RB Setjen DPD RI sesuai tugas dan fungsi Deputi Administrasi	EAG	Layanan Hukum	5	Layanan	195.281
			04	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Deputi Bidang Administrasi	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8	Layanan	500.000
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	235	Orang	700.000
					02	Perumusan kebijakan perencanaan DPD RI dan layanan pengelolaan keuangan DPD RI yang transparan dan akuntabel			132.906.914
					EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	126.098.307
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4	Layanan	5.300.000
					EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	16	Dokumen	1.508.607
					03	Layanan Sistem Informasi, dokumentasi kearsipan, risalah persidangan, dan materi bahan sosialisasi DPD RI			12.780.777
					EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	6.670.397

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	6.072.430
		FAA	Kearsipan	1	Dokumen	37.950
		04	Layanan Keprotokolan kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI, Materi dukungan kehumasan, dan publikasi kegiatan DPD RI di Media			28.204.973
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	5	Layanan	28.204.973
		05	Perumusan kebijakan sistem pengawasan dan pengendalian intern Sekretariat Jenderal DPD RI			830.266
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	6	Laporan	830.266
		06	Layanan Dukungan Teknis Administratif, dan Keahlian bagi Anggota DPD RI yang dilaksanakan oleh Kantor DPD RI di Daerah Pemilihan (Ibukota Provinsi)			244.085.799
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	241.676.412
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	1.674.054
		EAE	Layanan Prasarana Internal	120	unit	735.333
		07	Jumlah ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana yang modern di kantor DPD RI di ibukota negara			37.681.689
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	25.575.244
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	7.341.925
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAE Layanan Prasarana Internal	190	unit	4.264.520

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA							109.425.617
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							109.425.617
3 Program	1)	Program Penegakan Integritas Hakim							15.677.300
	2)	Program Dukungan Manajemen							93.748.317
1 Program	1)	Program Penegakan Integritas Hakim							15.677.300
	RM		15.677.300	01	Meningkatnya Pengawasan Hakim	01	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan Hakim		6.588.873
				02	Memperkuat Kapasitas Hakim	AEA	Koordinasi	7 kegiatan	500.000
				03	Tersedianya Profile Hakim Sesuai dengan Standar	BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	170 Orang	4.886.066
						BKC	Pemantauan lembaga	30 laporan	1.202.807
						02	Terwujudnya peningkatan hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH		5.892.565
						ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	132 Orang	2.000.000
						AEA	Koordinasi	6 kegiatan	506.479
						BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	13 Orang	386.086
						PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	280 Orang	3.000.000
						03	Terpenuhinya profil hakim sesuai dengan standar		3.195.862
						BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	47 Orang	1.929.808
						BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga	266.054

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
				QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	80	Orang	1.000.000
2 Program	2) Program Dukungan Manajemen							93.748.317
	RM 93.748.317	01	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	01	Terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien			3.988.969
		02	Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	820.000
		03	Meningkatnya profesionalisme SDM lembaga	EAG	Layanan Hukum	75	Layanan	490.000
		04	Terlaksananya pemberdayaan Stakeholder dan Publik	EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6	Layanan	403.060
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	24	Laporan	540.000
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	13	Laporan	235.909
				TAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.500.000
				02	Teknologi informasi yang terintegrasi			5.780.130
				EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	3.883.700
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	11	Layanan	1.196.430
				FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	11	Lembaga	700.000
				03	Terwujudnya SDM Lembaga yang profesional			83.979.218
				EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	80.339.040
				EAC	Layanan Umum	4	Layanan	536.962
				EAD	Layanan Sarana Internal	16	unit	205.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	2	orang	602.237
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	250.000
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	12	Dokumen	863.601
		FAA	Kearsipan	3	Dokumen	190.640
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	4	Lembaga	990.938

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)						813.103.749
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN						813.103.749
3 Program	1)	Program Ketahanan Bencana						562.712.672
	2)	Program Dukungan Manajemen						250.391.077
1 Program	1)	Program Ketahanan Bencana						562.712.672
	RM	490.395.172	01	Meningkatnya Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif	01	Penurunan Indeks Risiko Bencana		242.009.021
	PLN	72.317.500	02	Meningkatnya upaya pencegahan di daerah rawan bencana	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	22 Rekomendasi Kebijakan	39.450.000
	RMP		03	Meningkatnya kualitas penanganan darurat bencana	AEA	Koordinasi	62 kegiatan	46.020.521
			04	Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	15 NSPK	31.076.900
			05	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan PB	BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan	1.500.000
					BMB	Komunikasi Publik	6 layanan	4.800.000
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	15.000.000
					FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	20 Orang	500.000
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	6 Laporan	800.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	985.000
		PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	24	Rekomendasi Kebijakan	16.150.000
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	8	layanan	4.600.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	320	Orang	3.200.000
		QEE	Bantuan Kebencanaan	34	Paket	26.058.890
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	149	Unit	38.167.710
		QMB	Komunikasi Publik	81	layanan	2.000.000
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	200	Desa	11.700.000
		02	Penurunan Rata-Rata Angka Kematian Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Per 100.000 Jiwa			292.160.000
		AEA	Koordinasi	147	kegiatan	12.676.280
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	3.580.897
		BHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	2	operasi	5.198.867
		CBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	2	unit	6.960.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	50	Orang	453.280
		QEE	Bantuan Kebencanaan	20	Paket	251.336.903

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	775	Orang	11.953.773
				03	Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana			28.543.651
				ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	41	Rekomendasi Kebijakan	8.344.600
				AEA	Koordinasi	2	kegiatan	2.124.842
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4	NSPK	1.705.527
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	2.709.482
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	20	layanan	8.349.800
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	120	Orang	1.309.400
				UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	7	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						250.391.077
	RM	240.280.524	02	Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan BNPB	01	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi		240.191.077
	PLN	9.671.615	03	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Utama	ADE	Akreditasi Lembaga	3	Lembaga	617.500
	RMP				ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	60	Orang	405.700
	PNBP	438.938			AEA	Koordinasi	9	kegiatan	7.865.240
					AEC	Kerja sama	13	Kesepakatan	2.144.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	4.583.965
		DCK	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	512	Orang	3.300.325
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	135.510.658
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	35.381.023
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	8.877.960
		EAD	Layanan Sarana Internal	100	unit	1.000.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	3	unit	1.192.452
		EAF	Layanan SDM	992	orang	17.148.454
		EAG	Layanan Hukum	13	Layanan	2.363.940
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	14	Layanan	4.566.228
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	16	Laporan	3.700.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	180	Orang	2.533.132
		SCK	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	760	Orang	9.000.000
		02	Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Utama			10.200.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	81	Laporan	10.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)							381.753.352
2 Fungsi	04	EKONOMI							381.753.352
3 Program	1)	Program Penempatan dan Pelindungan PMI							183.493.646
	2)	Program Dukungan Manajemen							198.259.706
1 Program	1)	Program Penempatan dan Pelindungan PMI							183.493.646
	RM	183.493.646	01	Meningkatnya pencegahan dan penindakan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural	01	Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional			23.580.197
			02	Meningkatnya penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	8.676.664
			03	Meningkatnya pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	7500	Orang	4.812.198
			04	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas organisasi	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	57336	Orang	10.091.335
					02	Pelindungan PMI			88.155.293
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	9260	Orang	15.894.225
					EAC	Layanan Umum	23	Layanan	11.387.024
					EAD	Layanan Sarana Internal	48	unit	608.460
					EAE	Layanan Prasarana Internal	255	unit	1.111.482

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	250385	Orang	59.154.102
				03	Tata Kelola Kelembagaan BP2MI			71.758.156
				AEC	Kerja sama	23	Kesepakatan	1.288.435
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	5.116.732
				EAC	Layanan Umum	2	Layanan	22.792.967
				EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	5.591.000
				EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	4.042.700
				EAF	Layanan SDM	2790	orang	2.177.153
				EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	3.145.635
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	2.068.345
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	7.801.638
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	8.117.438
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	28	Laporan	4.300.000
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	1.370.000
				EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	5200	Orang	3.946.113
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						198.259.706
	RM	198.259.706	01	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas organisasi	01	Tata Kelola Kelembagaan BP2MI		198.259.706
					EAA	Layanan Perkantoran	24	Layanan	198.259.706

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)						192.675.434
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						192.675.434
3 Program	1)	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional						82.503.485
	2)	Program Dukungan Manajemen						110.171.949
1 Program	1)	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional						82.503.485
	RM	82.503.485	01	Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ	01	Tata kelola pengadaan yang berkualitas		82.503.485
			02	Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ	AAH	Peraturan lainnya	3 peraturan	2.321.000
			03	Meningkatnya kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UMKM	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3 Rekomendasi Kebijakan	1.225.000
			04	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan	714.000
			05	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan	ADE	Akreditasi Lembaga	50 Lembaga	583.000
			06	Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan	ADH	Akreditasi Profesi dan SDM	4920 Orang	1.477.000
			07	Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	35 NSPK	10.918.085
					BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	10000 Orang	1.115.000
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	10 layanan	696.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					BCE	Penanganan Perkara	260	Perkara	859.788
					BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	367	UMKM	500.000
					DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	319	Orang	1.753.000
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	18	Laporan	1.786.000
					FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	121	Lembaga	7.471.812
					PDA	Standarisasi Produk	70000	produk	1.000.000
					PDE	Akreditasi Lembaga	50	Lembaga	2.000.000
					QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15	Lembaga	1.083.800
					UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	32	Sistem Informasi	47.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							110.171.949
	RM	110.171.949	01	Terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi	01	Tata kelola internal yang berkualitas			110.171.949
			02	Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	87.228.949
			03	Terselenggaranya efektivitas penerapan pelayanan LKPP kepada publik	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	500.000
					EAC	Layanan Umum	5	Layanan	9.368.224
					EAD	Layanan Sarana Internal	240	unit	2.400.000
					EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	1.383.776

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	309	orang	3.060.000
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	306.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	2.176.000
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	1.400.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	949.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	650.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	750.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA									ALOKASI Ribu Rp
SASARAN / OUTCOME			OUTPUT PROGRAM KELUARAN						
1 Kementerian Negara/Lembaga	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)							2.267.460.260
2 Fungsi	04	EKONOMI							2.267.460.260
3 Program	1)	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana							1.407.886.781
	2)	Program Dukungan Manajemen							859.573.479
1 Program	1)	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana							1.407.886.781
	RM	1.407.886.781	01	Meningkatnya kompetensi SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	01	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan, serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Sarana Prasarana SAR			1.044.200.390
			02	Meningkatnya kompetensi SDM potensi pencarian dan pertolongan	AEA	Koordinasi	3	kegiatan	1.500.000
			03	Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	2.480.909
			04	Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	7374	Unit	22.202.266
			05	Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	64	Unit	545.716.370
			06	Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	3	unit	4.688.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		RCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1935	Unit	463.400.014
		RDM	OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1616	unit	4.212.831
		02	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga SAR serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Bina Tenaga SAR			51.663.613
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	2.450.000
		DCK	Pelatihan Bidang Penanganan Bencana	1103	Orang	49.213.613
		03	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Operasi SAR			78.710.387
		AEA	Koordinasi	46	kegiatan	10.500.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	1.400.000
		BHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	1	operasi	2.200.000
		QHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	44	operasi	64.610.387
		04	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Peralatan Komunikasi dan Pemeliharaan, serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Sistem Komunikasi SAR			166.932.503
		AEA	Koordinasi	6	kegiatan	2.000.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	5.600.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	7	Unit	88.500.000
					CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	101	Unit	550.000
					RAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	16	Unit	25.000.000
					RCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	394	Unit	45.282.503
					05	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Potensi SAR serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Bina Potensi SAR			42.399.888
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	4.119.000
					BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	686	Orang	15.530.888
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4208	Orang	22.750.000
					06	Terwujudnya Penyelenggaraan Koordinasi, Siaga, Latihan serta Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria di Bidang Kesiapsiagaan SAR			23.980.000
					AEA	Koordinasi	54	kegiatan	12.100.000
					AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	1.580.000
					BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	51	laporan	10.300.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							859.573.479
	RM	859.573.479	01	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	01	Terwujudnya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Monitoring dan Evaluasi Internal serta Kerja Sama			18.570.535

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	02 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	AEC	Kerja sama	7	Kesepakatan	3.700.000
	03 Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	48	Layanan	8.588.137
	04 Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	49	Laporan	6.282.398
	05 Meningkatnya kerjasama di bidang pencarian dan pertolongan	02	Terwujudnya Layanan Hukum, Organisasi dan Tata Kelola Internal, SDM serta Pendidikan dan Pelatihan Internal			23.136.000
	06 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EAF	Layanan SDM	408	orang	6.800.000
	07 Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)	EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	2.900.000
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5	Layanan	2.810.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	45	Orang	10.626.000
		03	Terwujudnya Layanan Perkantoran, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal, Kehumasan dan Protokoler serta Layanan Umum			712.826.839
		EAA	Layanan Perkantoran	296	Layanan	669.857.209
		EAC	Layanan Umum	47	Layanan	17.636.152
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	58	Layanan	16.562.720
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	51	Dokumen	8.770.758

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		04	Terwujudnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			64.740.105
		EAD	Layanan Sarana Internal	135	unit	15.846.821
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1072	unit	48.893.284
		05	Terwujudnya Layanan Data dan Informasi, Peralatan Teknologi Informasi dan Pemeliharaan serta Layanan Umum			34.300.000
		CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	4	Unit	20.000.000
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	50.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.450.000
		RCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	4	Unit	12.800.000
		06	Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal, Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal serta Layanan Umum			6.000.000
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	100.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	6	Laporan	5.530.000
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	15	Orang	370.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)							118.485.015
2 Fungsi	04	EKONOMI							118.485.015
3 Program	1)	Program Pengawasan Persaingan Usaha							26.553.100
	2)	Program Dukungan Manajemen							91.931.915
1 Program	1)	Program Pengawasan Persaingan Usaha							26.553.100
	RM		21.325.900	01	Terpenuhinya kualitas advokasi kebijakan persaingan usaha kepada pemerintah yang lebih baik	01	Advokasi Persaingan usaha, kemitraan dan modul persaingan usaha		5.436.900
	PNBP		5.227.200	02	Terwujudnya kepastian penegakan hukum persaingan usaha	PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12 Rekomendasi Kebijakan	3.546.900
						PEB	Forum	1 forum	25.000
						QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4 Lembaga	560.000
						QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	10 Badan usaha	1.215.000
						UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	90.000
						02	Persidangan majelis/penanganan perkara		21.116.200
						PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12 Rekomendasi Kebijakan	1.487.562
						QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	3 Perkara	535.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					QCE	Penanganan Perkara	94	Perkara	16.896.798
					QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	16	Badan Usaha	1.040.124
					RAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	Unit	323.776
					UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	30	Daerah (Prov/Kab/Kota)	832.440
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							91.931.915
	RM	91.931.915	01	Penguatan Sumber Daya Manusia KPPU	01	Penyelenggaraan layanan internal KPPU			91.931.915
			02	Terwujudnya Kapasitas dan Kapabilitas Kinerja Birokrasi	AEB	Forum	2	forum	1.624.980
					AEC	Kerja sama	4	Kesepakatan	406.023
					AED	Perjanjian	1	perjanjian	224.148
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	50.000
					BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	123.200
					BMB	Komunikasi Publik	1	layanan	877.628
					EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	69.088.197
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.291.268
					EAC	Layanan Umum	5	Layanan	1.207.903
					EAD	Layanan Sarana Internal	30	unit	985.288

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAF	Layanan SDM	2301	orang	6.303.876
		EAG	Layanan Hukum	5	Layanan	910.123
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	3.657.728
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	444.900
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	13	Laporan	986.900
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	10	Laporan	911.402
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	400	Orang	909.100
		FAA	Kearsipan	12	Dokumen	450.142
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	300	Orang	149.582
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4	Laporan	203.795
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	3	Laporan	1.125.732

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)							156.377.732
2 Fungsi	04	EKONOMI							156.377.732
3 Program	1)	Program Pengembangan Kawasan Strategis							128.311.436
	2)	Program Dukungan Manajemen							28.066.296
1 Program	1)	Program Pengembangan Kawasan Strategis							128.311.436
	RM	128.311.436	01	Pembangunan kawasan strategis Madura yang mempunyai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan	01	Infrastruktur Kawasan Strategis Suramadu			128.311.436
					ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	3	Rekomendasi Kebijakan	5.250.000
					AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	2.150.000
					RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	1	unit	4.960.000
					RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	9	km	22.661.436
					RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	0	km2	88.290.000
					SCH	Pelatihan Bidang Industri	1000	Orang	5.000.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							28.066.296
	RM	28.066.296	01	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, efektif dan efisien	01	Tata kelola dan Sumber Daya Kementerian/Lembaga			28.066.296
					EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	23.058.920

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	1.560.000
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	525.576
		EAD	Layanan Sarana Internal	7	unit	115.000
		EAF	Layanan SDM	18	orang	91.000
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	750.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1.200.800
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	22	Laporan	475.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	2	Laporan	290.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA							206.972.244
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							206.972.244
3 Program	1)	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik							35.717.209
	2)	Program Dukungan Manajemen							171.255.035
1 Program	1)	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik							35.717.209
	RM	35.717.209	01	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	01	Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif			15.200.000
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	200.000
					QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	6300	Orang	15.000.000
					02	Kepercayaan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Membaik			20.117.209
					ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	7	Rekomendasi Kebijakan	1.900.000
					BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21	Lembaga	467.209
					BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	Lembaga	100.000
					BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	14	Pemerintah Daerah	550.000
					BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	100.000
					QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	39	Lembaga	4.250.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
				QIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	548	Pemerintah Daerah	12.750.000
				03	Kualitas Pelayanan Ombudsman RI yang Meningkat			400.000
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	400.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						171.255.035
	RM	171.255.035	01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	01	Layanan Dukungan Manajemen yang Prima			171.255.035
				EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	158.906.650
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	250.000
				EAC	Layanan Umum	8	Layanan	1.325.000
				EAD	Layanan Sarana Internal	71	unit	775.000
				EAF	Layanan SDM	836	orang	1.000.000
				EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	500.000
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	450.000
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	6	Layanan	2.755.000
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	575.000
				EAK	Layanan Pengawasan Internal	23	Laporan	575.000
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	200	Orang	2.393.385
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	93	Dokumen	750.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)						227.704.562
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						227.704.562
3 Program	1)	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan						56.954.089
	2)	Program Dukungan Manajemen						170.750.473
1 Program	1)	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan						56.954.089
	RM	56.954.089	01	Meningkatnya pengelolaan batas negara wilayah darat	01	Kebijakan, Koordinasi dan Pengawasan pengelolaan batas wilayah dan lintas batas negara		22.304.089
			02	Meningkatnya pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	11 Rekomendasi Kebijakan	3.380.164
			03	Meningkatnya pengelolaan lintas batas negara	AEA	Koordinasi	6 kegiatan	13.003.000
			04	Meningkatnya efektivitas pengelolaan potensi SDM dan SDA di kawasan perbatasan darat	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	50 orang	600.000
			05	Meningkatnya Penyelesaian Peraturan tentang Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	60 Orang	136.820
			06	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Potensi SDA dan SDM di Kawasan Perbatasan Laut	BKC	Pemantauan lembaga	4 laporan	3.184.105
			07	Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar Konektivitas dan energi di Kawasan Perbatasan	PEA	Koordinasi	1 kegiatan	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	08 Meningkatnya akses layanan infrastruktur sosial dasar di Kawasan Perbatasan	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	180	Orang	1.000.000
	09 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	02	Kebijakan, Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan Potensi dan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan			17.545.000
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	7	Rekomendasi Kebijakan	9.082.814
		AEA	Koordinasi	6	kegiatan	4.608.768
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	60	orang	860.305
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	90	Orang	625.000
		BKC	Pemantauan lembaga	3	laporan	2.368.113
		03	Kebijakan, Koordinasi dan Pengawasan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan			17.105.000
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	12	Rekomendasi Kebijakan	5.950.000
		AEA	Koordinasi	5	kegiatan	3.693.700
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	230	Orang	1.206.300
		BKC	Pemantauan lembaga	7	laporan	4.944.200
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	300	Orang	1.310.800
2 Program 2) Program Dukungan Manajemen						170.750.473

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
RM	170.750.473	01	Meningkatnya Integritas Settap BNPP	01	Meningkatnya Layanan Legislasi dan Litigasi			3.400.000
		02	Meningkatnya Kapabilitas Settap BNPP	EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	3.400.000
		03	Meningkatnya kualitas pelayanan Settap BNPP	02	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi, SDM, dan Kerjasama			12.020.000
				AEC	Kerja sama	2	Kesepakatan	6.000.000
				EAF	Layanan SDM	189	orang	3.020.000
				EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	3.000.000
				03	Meningkatnya Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			145.406.595
				EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	127.291.694
				EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	6.200.670
				EAC	Layanan Umum	1	Layanan	5.500.546
				EAD	Layanan Sarana Internal	40	unit	1.031.005
				EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	5.382.680
				04	Meningkatnya Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informasi Publik			9.923.878
				EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	5.506.558
				EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	4.417.320

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM						2.014.200.000
2 Fungsi	04	EKONOMI						2.014.200.000
3 Program	1)	Program Pengembangan Kawasan Strategis						1.197.461.595
	2)	Program Dukungan Manajemen						816.738.405
1 Program	1)	Program Pengembangan Kawasan Strategis						1.197.461.595
	RM	287.000.000	01	Meningkatnya Jumlah Realisasi Investasi di Batam	01	Tersedianya Lahan bagi Investasi di Batam		22.641.164
	PLN	45.000.000	02	Meningkatnya Pendapatan BP Batam	ACB	Perizinan Masyarakat	4 Orang	9.887.504
	RMP	12.000.000	03	Terwujudnya Pelayanan BP Batam yang terintegrasi sistem	ACD	Perizinan Lembaga	4 Institusi	9.886.668
	BLU	853.461.595	04	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan BP Batam	EAA	Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.866.992
			05	Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha	02	Terselesaikan dan Terintegrasi seluruh aplikasi layanan BP Batam		405.464.360
					CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	106.250.955
					CCI	OM Sarana Pengembangan Kawasan	10 Unit	125.312.178
					CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	4 unit	11.296.731
					CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1 unit	47.600.647
					CDN	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2 unit	2.255.868

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	4	Layanan	105.736.494
		EAD	Layanan Sarana Internal	4	unit	7.011.487
		03	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu Batam			11.571.576
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan	5.060.515
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	6.511.061
		04	Terpenuhinya kelengkapan fasilitas dan Infrastruktrur pendukung Investasi			747.301.102
		BHC	Operasi Bidang Penanganan Bencana	1	operasi	1.549.552
		CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	Paket	11.004.222
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	1	Unit	162.234.828
		CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	3	km	90.942.145
		CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	4	unit	30.398.673
		CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1	unit	42.831.305
		CBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2	unit	31.362.989
		CDC	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	2	km	4.303.850
		CDK	OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	unit	4.925.846
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	7.048.508
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	37.821.535
		EAD	Layanan Sarana Internal	3	unit	7.877.649

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	1	km	47.850.224
					RBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1	unit	267.149.776
					05	Penerapan hasil riset/kajian ke dalam rencana kerja unit usaha BP Batam			10.483.393
					ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	3	Rekomendasi Kebijakan	10.298.263
					EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	185.130
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							816.738.405
	BLU	816.738.405	01	Meningkatnya Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel	01	Pengelolaan Manajemen yang Efisien dan Efektif			155.187.169
			02	Meningkatnya Kinerja SDM	AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	1.612.175
			03	Penerapan hasil kajian/riset terhadap diversifikasi dan pengembangan usaha	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2	Rekomendasi Kebijakan	2.446.890
					ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	3	Rekomendasi Kebijakan	4.090.070
					AEA	Koordinasi	4	kegiatan	786.937
					CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	1	Unit	296.700
					CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	10	km	7.135.658
					CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	1	unit	3.059.308
					CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	2	unit	1.231.418

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	17	Layanan	45.851.808
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	1.869.239
		EAC	Layanan Umum	5	Layanan	54.914.387
		EAD	Layanan Sarana Internal	2	unit	16.735.802
		EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	5.205.417
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	4	Laporan	1.764.693
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6	Laporan	4.761.718
		FAF	Pemeriksaan Keuangan	14	Laporan	3.424.949
		02	Peningkatan Nilai Kinerja SDM			596.346.368
		EAA	Layanan Perkantoran	3	Layanan	566.039.491
		EAF	Layanan SDM	2693	orang	18.442.415
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	2.407.871
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	21	Orang	9.456.591
		03	Penerapan hasil riset/kajian ke dalam rencana kerja unit BP Batam			38.013.260
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	7	Rekomendasi Kebijakan	13.448.409
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	4.135.048
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	20.035.085

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	394.718
		04	Terlaksananya Promosi dan Business Gathering			27.191.608
		AEH	Promosi	2	promosi	10.522.411
		EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	593.590
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	5	Layanan	16.075.607

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)							515.919.444
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							515.919.444
3 Program	1)	Program Penanggulangan Terorisme							323.268.491
	2)	Program Dukungan Manajemen							192.650.953
1 Program	1)	Program Penanggulangan Terorisme							323.268.491
	RM	323.268.491	01	Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	01	Pencegahan Terorisme			158.505.608
			02	Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	27	Orang	5.452.497
			03	Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	BHB	Operasi Bidang Keamanan	9	operasi	6.313.340
			04	Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan perangkat hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri	PEB	Forum	32	forum	32.290.605
			06	Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	125	Orang	49.133.232
			07	Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme	QHB	Operasi Bidang Keamanan	56	operasi	65.315.934
			08	Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme	02	Penindakan Terorisme			137.026.653
			09	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme	AEA	Koordinasi	29	kegiatan	9.737.125

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
			10	Terkendalinya situasi keamanaan saat kejahatan terorisme terjadi	BHB	Operasi Bidang Keamanan	85	operasi	102.920.109
			11	Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme terorisme	DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	790	Orang	11.843.426
			12	Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan	PEA	Koordinasi	101	kegiatan	12.525.993
			13	Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi	03	Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme			27.736.230
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	18	Rekomendasi Kebijakan	8.547.442
					AEC	Kerja sama	20	Kesepakatan	19.188.788
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							192.650.953
	RM	192.650.953	01	Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	01	Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi BNPT sesuai wewenang Sekretariat Utama			192.650.953
			02	Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	EAA	Layanan Perkantoran	11	Layanan	68.483.237
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	3.344.200
					EAC	Layanan Umum	2	Layanan	13.547.290
					EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	72.644.207
					EAF	Layanan SDM	100	orang	3.303.095
					EAG	Layanan Hukum	1	Layanan	3.497.649

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	2.448.899
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1	Layanan	5.902.757
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	2.859.720
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	5	Laporan	2.263.717
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	20	Laporan	1.208.719
		PEA	Koordinasi	4	kegiatan	13.147.463

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	114	SEKRETARIAT KABINET						339.755.142
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						339.755.142
3 Program	1)	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden						37.451.201
	2)	Program Dukungan Manajemen						302.303.941
1 Program	1)	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden						37.451.201
	RM	37.451.201	01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi	01	Rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi		8.377.046
			02	Terwujudnya rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden yang berkualitas	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	48 Rekomendasi Kebijakan	441.910
			03	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	30 Rekomendasi Kebijakan	498.880
			04	Terwujudnya layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan yang berkualitas	ABC	Kebijakan Bidang Politik	77 Rekomendasi Kebijakan	1.142.700
			05	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	40 Rekomendasi Kebijakan	441.917

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
	06 Terwujudnya layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang berkualitas	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	34 Rekomendasi Kebijakan	565.575
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	27 Rekomendasi Kebijakan	650.998
		ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	24 Rekomendasi Kebijakan	688.977
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	15 Rekomendasi Kebijakan	386.742
		ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	28 Rekomendasi Kebijakan	397.660
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	43 Rekomendasi Kebijakan	499.670
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	21 Rekomendasi Kebijakan	565.217
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	24 Rekomendasi Kebijakan	841.665
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	69 Rekomendasi Kebijakan	1.255.135
		02	Rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden		11.550.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	20 Rekomendasi Kebijakan	11.550.000
		03	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman dan Investasi		5.676.562
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	15 Rekomendasi Kebijakan	458.090
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	10 Rekomendasi Kebijakan	301.120
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	17 Rekomendasi Kebijakan	657.300
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	12 Rekomendasi Kebijakan	458.083
		ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	23 Rekomendasi Kebijakan	334.425
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8 Rekomendasi Kebijakan	149.002
		ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	14 Rekomendasi Kebijakan	161.023
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	17 Rekomendasi Kebijakan	717.972

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	18 Rekomendasi Kebijakan	401.234
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	20 Rekomendasi Kebijakan	400.330
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	16 Rekomendasi Kebijakan	284.783
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	45 Rekomendasi Kebijakan	908.335
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	32 Rekomendasi Kebijakan	444.865
		04	Layanan persidangan kabinet, naskah kepresidenan, dan dokumen terjemahan		7.280.998
		BLB	Persidangan Lembaga Eksekutif	100 sidang	6.452.248
		FAA	Kearsipan	660 Dokumen	828.750
		05	Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir		2.632.845
		AAE	Keputusan Presiden	100 KepPres	2.632.845
		06	Layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah		1.933.750
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	75 Rekomendasi Kebijakan	1.091.484

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	30	Orang	842.266
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							302.303.941
	RM	302.303.941	01	Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet	01	Layanan dan Dukungan Manajemen			302.303.941
					EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	240.536.862
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	10	Layanan	1.357.705
					EAC	Layanan Umum	21	Layanan	20.410.174
					EAD	Layanan Sarana Internal	1749	unit	14.005.664
					EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	10.586.250
					EAF	Layanan SDM	817	orang	3.266.429
					EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	47.800
					EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	369.260
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	2.762.500
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	Layanan	5.712.784
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	13	Laporan	869.220
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	5	Laporan	423.579
					EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	318	Dokumen	1.955.714

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM						1.641.340.603
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						1.641.340.603
3 Program	1)	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						404.584.467
	2)	Program Dukungan Manajemen						1.236.756.136
1 Program	1)	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						404.584.467
	RM	404.584.467	01	Mewujudkan penyelenggaraan pemilu dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil	01	Meningkatnya kualitas dan efektifitas pencegahan dan pengawasan pelanggaran pemilu		389.208.353
			02	Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	ABC	Kebijakan Bidang Politik	3 Rekomendasi Kebijakan	2.556.196
					AEC	Kerja sama	10 Kesepakatan	2.547.298
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	65 layanan	27.744.433
					BKC	Pemantauan lembaga	1986 laporan	205.486.935
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	65 Layanan	6.538.767
					EAC	Layanan Umum	65 Layanan	12.241.218
					EAD	Layanan Sarana Internal	764 unit	5.815.984
					EAE	Layanan Prasarana Internal	2 unit	266.809

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA PUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					EAF	Layanan SDM	9617	orang	12.798.377
					EAG	Layanan Hukum	55	Layanan	11.033.817
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	67	Layanan	10.720.445
					EAJ	Layanan Data dan Informasi	66	Layanan	10.290.244
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	568	Laporan	21.161.738
					EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	472	Dokumen	15.206.092
					QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	282	Orang	44.800.000
					02	Mewujudkan Penindakan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu yang berintegritas dan independen			15.376.114
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7	layanan	15.376.114
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							1.236.756.136
	RM	1.236.756.136	01	Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif	01	Terwujudnya Penyusunan, Harmonisasi Regulasi, Produk Hukum, Layanan Bantuan Hukum dan Dokumentasi hukum yang progresif			9.360.847
			02	Terwujudnya pusat data dan informasi kepemiluan yang terintegrasi	EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	4.206.053
			03	Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif	EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	5.154.794
			04	Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi	03	Terwujudnya pengembangan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan			9.635.048
					EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	4.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAJ	Layanan Data dan informasi	3	Layanan	5.635.048
		04	Peningkatan Kualitas Manajemen Adminstrasi dan Pelayanan Publik yang efektif, Efisien, Akuntabel, Prima dan profesional			1.209.445.598
		EAA	Layanan Perkantoran	72	Layanan	1.155.528.690
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	Layanan	4.681.067
		EAC	Layanan Umum	4	Layanan	18.488.693
		EAD	Layanan Sarana Internal	30	unit	3.000.000
		EAE	Layanan Prasarana Internal	2	unit	3.500.000
		EAF	Layanan SDM	20	orang	4.231.071
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	3.114.064
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	2.053.224
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	15	Laporan	5.524.740
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	12	Laporan	2.608.629
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	13	Dokumen	6.715.420
		05	Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan			8.314.643
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	8	Rekomendasi Kebijakan	4.125.812

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	110	Orang	4.188.831

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME			OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA									1.684.132.593
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM									1.684.132.593
3 Program	1)	Program Penyiaran Publik									673.802.460
	2)	Program Dukungan Manajemen									1.010.330.133
1 Program	1)	Program Penyiaran Publik									673.802.460
	RM		662.942.468	01	Terwujudnya peningkatan kualitas layanan siaran radio publik modern berbasis multiplatform yang bersifat informatif, edukatif dan hiburan yang sehat kepada seluruh masyarakat di wilayah NKRI dan Mancanegara	01	Layanan Penyiaran Publik				673.802.460
	PNBP		10.859.992			ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	6	Rekomendasi Kebijakan		6.562.179
						AEC	Kerja sama	202	Kesepakatan		7.783.280
						BMB	Komunikasi Publik	2375	layanan		34.397.916
						CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit		78.847.237
						EAE	Layanan Prasarana Internal	103	unit		8.540.124
						QMA	Data dan Informasi Publik	653	layanan		38.784.560
						QMB	Komunikasi Publik	7	layanan		15.576.279
						RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	Unit		483.310.885

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
2 Program	2) Program Dukungan Manajemen							1.010.330.133
	RM	1.008.330.133	01	Meningkatkan tata kelola LPP RRI yang transparan dan akuntabel	01	Layanan Dukungan Manajemen		1.010.330.133
	PNBP	2.000.000			DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	1 Purwarupa	3.304.517
					EAA	Layanan Perkantoran	183 Layanan	857.105.683
					EAC	Layanan Umum	1 Layanan	457.690
					EAE	Layanan Prasarana Internal	1 unit	120.649.917
					EAF	Layanan SDM	100 orang	4.915.583
					EAG	Layanan Hukum	1 Layanan	1.345.891
					EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1 Layanan	2.678.327
					EAK	Layanan Pengawasan Internal	5 Laporan	4.844.897
					EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	1 Orang	6.469.995
					EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1 Dokumen	5.230.442
					FAD	Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	2.529.731
					FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan	797.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA							1.458.212.923
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							1.458.212.923
3 Program	1)	Program Penyiaran Publik							636.954.035
	2)	Program Dukungan Manajemen							821.258.888
1 Program	1)	Program Penyiaran Publik							636.954.035
	RM		552.250.004	01	Meningkatnya Kualitas Program dan Berita	01	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik		636.954.035
	PNBP		84.704.031	02	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Teknologi Penyiaran	AEA	Koordinasi	24 kegiatan	3.963.785
						AEC	Kerja sama	59 Kesepakatan	12.851.914
						BMA	Data dan Informasi Publik	45211 layanan	144.857.157
						QAH	Pelayanan Publik Lainnya	9288 layanan	170.700.641
						QMA	Data dan Informasi Publik	126 layanan	304.580.538
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							821.258.888
	RM		801.576.984	01	Terwujudnya Administrasi Pelayanan Pemerintah yang Baik di Lingkungan LPP TVRI	01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI		821.258.888
	PNBP		19.681.904			EAA	Layanan Perkantoran	60 Layanan	734.701.923
						EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3 Layanan	13.817.087
						EAC	Layanan Umum	2 Layanan	2.733.334
						EAD	Layanan Sarana Internal	481 unit	12.262.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		EAE Layanan Prasarana Internal	22	unit	28.507.142
		EAF Layanan SDM	1	orang	5.213.376
		EAG Layanan Hukum	2	Layanan	987.888
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	5.792.489
		EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	4.252.294
		EAJ Layanan Data dan Informasi	4	Layanan	4.474.375
		EAK Layanan Pengawasan Internal	4	Laporan	3.783.680
		EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	1.310.907
		EAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	643	Orang	3.422.233

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG						94.978.297
2 Fungsi	04	EKONOMI						94.978.297
3 Program	1)	Program Pengembangan Kawasan Strategis						54.260.307
	2)	Program Dukungan Manajemen						40.717.990
1 Program	1)	Program Pengembangan Kawasan Strategis						54.260.307
	RM	51.001.489	01	Terwujudnya Kawasan Sabang sebagai tujuan investasi regional dan internasional	01	Terlaksananya kawasan sabang sebagai tujuan investasi regional dan internasional		3.948.820
	BLU	3.258.818	02	Terwujudnya Peningkatan PNBP	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan	754.130
			03	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	14 Rekomendasi Kebijakan	1.783.032
					AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	419.658
					AEG	Konferensi dan Event	2 Kegiatan	492.000
					AEH	Promosi	1 promosi	500.000
					02	Terlaksanya peningkatan PNBP		12.986.942
					ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	180.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					AEA	Koordinasi	2	kegiatan	332.452
					BAH	Pelayanan Publik Lainnya	9	layanan	2.060.578
					BMA	Data dan Informasi Publik	1	layanan	133.840
					CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	518	Unit	4.279.912
					CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	1	unit	6.000.000
					03	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang			37.324.545
					ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	9	Rekomendasi Kebijakan	1.569.978
					ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	6	Rekomendasi Kebijakan	1.054.481
					CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	4	Unit	9.118.510
					CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	8	km	24.167.836
					CCI	OM Sarana Pengembangan Kawasan	1	Unit	957.380
					EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	4	Laporan	322.760
					FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1	Lembaga	133.600
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							40.717.990
	RM	40.717.990	01	Terwujudnya layanan manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang berkualitas	01	Terlaksananya manajemen BPKS yang berkualitas			39.273.955

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	02 Terwujudnya modernisasi layanan BLU	AAH	Peraturan lainnya	1	peraturan	63.200
	03 Terwujudnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur keuangan dan kinerja	EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	37.896.400
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	225.369
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	27.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	15.000
		EAG	Layanan Hukum	2	Layanan	115.500
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	4	Layanan	383.360
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	3	Layanan	229.950
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3	Laporan	12.400
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	8	Orang	245.776
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	60.000
		02	Terlaksananya modernisasi layanan BLU			317.550
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	3	Laporan	317.550
		03	Terlaksananya kepatuhan terhadap standar dan prosedur keuangan dan kinerja			1.126.485
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	20	Laporan	1.126.485

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	119	BADAN KEAMANAN LAUT							515.500.587
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN							515.500.587
3 Program	1)	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia							259.105.602
	2)	Program Dukungan Manajemen							256.394.985
1 Program	1)	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia							259.105.602
	RM	259.105.602	01	Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	01	PENINGKATAN OPERASI KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT			248.305.602
			02	Tersedianya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.	BCE	Penanganan Perkara	45	Perkara	4.000.000
			03	Mewujudkan Penegakan Hukum di wilayah Perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan Sistem Informasi/ Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan laut	BHB	Operasi Bidang Keamanan	8	operasi	13.170.000
			04	Meningkatkan Diplomasi Maritim dibidang keamanan dan keselamatan laut secara nasional dan internasional (bilateral dan multilateral) dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum diwilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	5	Unit	113.076.575

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
					DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	224	Orang	4.870.300
					QHB	Operasi Bidang Keamanan	20	operasi	113.188.727
					02	PENYIAPAN KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT			3.450.000
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	8	Rekomendasi Kebijakan	3.450.000
					03	PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT			7.350.000
					ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Rekomendasi Kebijakan	673.969
					AEC	Kerja sama	39	Kesepakatan	1.656.569
					AEG	Konferensi dan Event	2	Kegiatan	1.093.943
					BCE	Penanganan Perkara	23	Perkara	1.026.031
					BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	8	Kelompok Masyarakat	749.488
					BMA	Data dan Informasi Publik	12	layanan	2.150.000
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen							256.394.985
	RM	256.394.985	01	Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut	01	PENINGKATAN ATAU PENGADAAN MATERIAL, SARANA PRASARANA DAN MANAJEMEN BMN BAKAMLA			88.346.998

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
	02 Meningkatkan mutu kelembagaan, ketatalaksanaan dan Kinerja untuk memaksimalkan dukungan manajemen	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	9	Unit	22.898.491
	03 Meningkatkan kompetensi SDM	CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	Unit	16.401.509
		EAC	Layanan Umum	3	Layanan	777.000
		EAD	Layanan Sarana Internal	12	unit	10.195.266
		EAE	Layanan Prasarana Internal	8	unit	8.074.732
		RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Unit	30.000.000
		02	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, EVALUASI KINERJA SERTA MANAJEMEN ORGANISASI			2.513.222
		AAH	Peraturan lainnya	10	peraturan	322.315
		EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	Layanan	776.278
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	644.629
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	770.000
		03	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS BAKAMLA			1.322.355
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	15	Laporan	1.322.355
		04	PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS KAMLA			164.212.410

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAA	Layanan Perkantoran	2	Layanan	112.628.744
		EAC	Layanan Umum	1	Layanan	37.221.834
		EAF	Layanan SDM	886	orang	2.984.537
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	1.624.390
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	473	Orang	8.192.635
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	9	Laporan	1.560.270

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI						314.596.417
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						314.596.417
3 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						120.708.099
	2)	Program Dukungan Manajemen						193.888.318
1 Program	1)	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan						120.708.099
	RM	120.708.099	02	Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Kemaritiman dan Investasi	01	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi		60.951.350
					ABC	Kebijakan Bidang Politik	4 Rekomendasi Kebijakan	211.752
					ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	219.027
					AEA	Koordinasi	5 kegiatan	60.520.571
					02	Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim		11.001.350
					ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	2 Rekomendasi Kebijakan	1.060.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	3	Rekomendasi Kebijakan	1.681.350
		AEA	Koordinasi	5	kegiatan	8.260.000
		03	Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Transportasi			11.151.349
		ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2	Rekomendasi Kebijakan	259.121
		ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2	Rekomendasi Kebijakan	411.461
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1	Rekomendasi Kebijakan	204.058
		AEA	Koordinasi	5	kegiatan	10.276.709
		04	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			10.776.350
		ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	2	Rekomendasi Kebijakan	1.275.000
		ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	1	Rekomendasi Kebijakan	641.350
		ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	Rekomendasi Kebijakan	1.260.000
		AEA	Koordinasi	5	kegiatan	7.600.000
		05	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			10.901.350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
					ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan	3.304.790
					AEA	Koordinasi	5 kegiatan	7.596.560
					06	Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi dan Pertambangan		15.926.350
					ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
					ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	750.000
					AEA	Koordinasi	5 kegiatan	12.176.350
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen						193.888.318
	RM	193.888.318	01	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	01	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen		193.888.318
					AAG	Peraturan Menteri	1 PerMen	1.092.199
					AAH	Peraturan lainnya	3 peraturan	1.066.225
					AEA	Koordinasi	2 kegiatan	3.900.000
					EAA	Layanan Perkantoran	2 Layanan	105.768.999
					EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	14 Layanan	6.180.779
					EAC	Layanan Umum	16 Layanan	32.914.751
					EAD	Layanan Sarana Internal	1 unit	2.761.123

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAE	Layanan Prasarana Internal	1	unit	6.393.503
		EAF	Layanan SDM	4	orang	3.681.900
		EAG	Layanan Hukum	3	Layanan	3.045.126
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8	Layanan	3.544.838
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	2	Layanan	8.448.515
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	3.000.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	3.700.000
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	14	Laporan	7.538.172
		EAM	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	50	Orang	852.188

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)						208.846.742
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM						208.846.742
3 Program	1)	Program Pembinaan Ideologi Pancasila						91.158.633
	2)	Program Dukungan Manajemen						117.688.109
1 Program	1)	Program Pembinaan Ideologi Pancasila						91.158.633
	RM	91.158.633	01	Terwujudnya hubungan antar lembaga, kerjasama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan, serta pembudayaan pembinaan Ideologi Pancasila	01	Layanan pemahaman aktualisasi nilai-nilai pancasila		34.158.633
			02	Terwujudnya internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	2.216.975
			03	Terwujudnya perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila	AEC	Kerja sama	4 Kesepakatan	1.728.000
			04	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan/keagamaan nonformal dan informal	AEE	Kemitraan	3 Kesepakatan	1.772.000
			05	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	1.775.265
					PBN	Kebijakan Bidang Sosial	1 Rekomendasi Kebijakan	4.007.760

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		PEC	Kerja sama	24	Kesepakatan	4.066.050
		PEE	Kemitraan	27	Kesepakatan	2.433.950
		QMB	Komunikasi Publik	10	layanan	16.158.633
		02	Rekomendasi Pembinaan Ideologi Pancasila di bidang hukum, advokasi, apresiasi, dan pengawasan regulasi			13.000.000
		ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	8	Rekomendasi Kebijakan	7.666.000
		BMB	Komunikasi Publik	1	layanan	1.334.000
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3	Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
		03	Rekomendasi perumusan arah kebijakan, pengkajian, dan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila			17.000.000
		ABC	Kebijakan Bidang Politik	2	Rekomendasi Kebijakan	2.691.168
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	12.000.000
		PBC	Kebijakan Bidang Politik	2	Rekomendasi Kebijakan	2.308.832
		04	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Ideologi Pancasila			16.000.000
		DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	100	Orang	604.763

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN			ALOKASI Ribu Rp
		PEC Kerja sama	3	Kesepakatan	3.500.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	3.500.000
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	1640	Orang	8.395.237
		05 Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila			11.000.000
		ABC Kebijakan Bidang Politik	3	Rekomendasi Kebijakan	9.664.313
		PBC Kebijakan Bidang Politik	3	Rekomendasi Kebijakan	1.335.687
2 Program 2) Program Dukungan Manajemen					117.688.109
RM 117.688.109		01 Tata Kelola dan Sumber Daya Lembaga			117.688.109
		EAA Layanan Perkantoran	2	Layanan	87.775.979
		EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3	Layanan	2.500.000
		EAC Layanan Umum	3	Layanan	1.558.984
		EAD Layanan Sarana Internal	30	unit	2.441.016
		EAF Layanan SDM	201	orang	3.270.030
		EAG Layanan Hukum	1	Layanan	2.307.500
		EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2	Layanan	1.942.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	3	Layanan	2.000.000
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	8.000.000
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	1	Laporan	2.892.100
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Laporan	804.195
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	3	Dokumen	2.195.805

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
1 Kementerian Negara/Lembaga	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN								79.417.515
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN								79.417.515
3 Program	1)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								28.116.690
	2)	Program Dukungan Manajemen								51.300.825
1 Program	1)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								28.116.690
	RM		28.116.690	01	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban	01	Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban			28.116.690
						BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	3180	Orang	23.386.270
						BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6	layanan	4.730.420
2 Program	2)	Program Dukungan Manajemen								51.300.825
	RM		51.300.825	01	LPSK yang profesional dan modern	02	Layanan Internal LPSK			51.300.825
						EAA	Layanan Perkantoran	13	Layanan	41.565.000
						EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	11	Layanan	1.336.307
						EAC	Layanan Umum	14	Layanan	1.085.163
						EAD	Layanan Sarana Internal	36	unit	626.600
						EAF	Layanan SDM	350	orang	1.935.150
						EAG	Layanan Hukum	9	Layanan	759.940

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III.2

RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	OUTPUT PROGRAM KELUARAN				ALOKASI Ribu Rp
		EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	Layanan	41.940
		EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	16	Layanan	1.208.740
		EAJ	Layanan Data dan Informasi	10	Layanan	1.101.675
		EAK	Layanan Pengawasan Internal	6	Laporan	476.560
		EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	6	Laporan	692.370
		EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	9	Dokumen	471.380

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 017211 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

SK No 051938 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.01] PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**373.262.815.000**	**373.262.815.000**
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH		0	0	0	373.262.815.000	373.262.815.000
999.01.06	Program Pengelolaan Utang		0	0	0	373.262.815.000	373.262.815.000
	Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang	RM	0	0	0	373.262.815.000	373.262.815.000
1	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri		0	0	0	355.106.337.000	355.106.337.000
2	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri		0	0	0	18.156.478.000	18.156.478.000
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**373.262.815.000**	**373.262.815.000**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**112.000**	**112.000**
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA		0	0	0	112.000	112.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	112.000	112.000
	Pengelolaan *Banking Commission*	RM	0	0	0	112.000	112.000
1	*Banking Commission*		0	0	0	112.000	112.000
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**		**0**	**0**	**0**	**102.614.300**	**102.614.300**
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA		0	0	0	102.614.300	102.614.300
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	102.614.300	102.614.300
	Pengelolaan Hibah Pencegahan Risiko Banjir	PLN	0	0	0	102.614.300	102.614.300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)*		0	0	0	102.614.300	102.614.300
04	**EKONOMI**		**0**	**0**	**0**	**5.296.051.887**	**5.296.051.887**
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN		0	0	0	362.641.887	362.641.887
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	362.641.887	362.641.887
	Pengelolaan Hibah Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian	PLN	0	0	0	362.641.887	362.641.887
1	*Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READ-SI)*		0	0	0	107.641.887	107.641.887

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	*The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (Upland)*		0	0	0	255.000.000	255.000.000
04.04	PENGAIRAN		0	0	0	800.000.000	800.000.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	800.000.000	800.000.000
	Pengelolaan Hibah Sumber Daya Air dan Irigasi	PLN	0	0	0	800.000.000	800.000.000
1	*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*		0	0	0	800.000.000	800.000.000
04.08	TRANSPORTASI		0	0	0	4.133.410.000	4.133.410.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	4.133.410.000	4.133.410.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Hibah Transportasi	PLN	0	0	0	-	-
1	*Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase I*		0	0	0	-	-
	Pengelolaan Hibah Transportasi	PLN	0	0	0	3.210.250.000	3.210.250.000
1	*Mass Rapid Transit (MRT) Project Phase II*		0	0	0	3.210.250.000	3.210.250.000
	Pengelolaan Hibah Transportasi	RM	0	0	0	900.000.000	900.000.000
1	*Hibah Jalan Daerah*		0	0	0	900.000.000	900.000.000
	Pengelolaan Hibah Transportasi	HLN	0	0	0	23.160.000	23.160.000
1	*Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM)		0	0	0	23.160.000	23.160.000
05	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**		**0**	**0**	**0**	**387.785.000**	**387.785.000**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
05.02	MANAJEMEN AIR LIMBAH		0	0	0	287.685.000	287.685.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	287.685.000	287.685.000
	Pengelolaan Hibah Air Limbah	HLN	0	0	0	287.685.000	287.685.000
1	Hibah Air Limbah		0	0	0	100.000	100.000
2	Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang		0	0	0	287.585.000	287.585.000
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI		0	0	0	100.100.000	100.100.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	100.100.000	100.100.000
	Pengelolaan Hibah Sanitasi (Rupiah Murni)	RM	0	0	0	100.000.000	100.000.000
1	Hibah Sanitasi		0	0	0	100.000.000	100.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Hibah Sanitasi (Penerusan Hibah)	HLN	0	0	0	100.000	100.000
1	Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi		0	0	0	100.000	100.000
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**0**	**0**	**0**	**995.100.000**	**995.100.000**
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS FASILITAS UMUM		0	0	0	100.000	100.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	100.000	100.000
	Pengelolaan Hibah Kotaku	HLN	0	0	0	100.000	100.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Support to The National Slum Upgrading Project (NSUP/Kotaku)		0	0	0	100.000	100.000
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM		0	0	0	995.000.000	995.000.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	95.000.000	95.000.000
	Pengelolaan Hibah Air Minum	HLN	0	0	0	95.000.000	95.000.000
1	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP)		0	0	0	35.000.000	35.000.000
2	Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia		0	0	0	60.000.000	60.000.000
999.02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	900.000.000	900.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLAAN HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan *Nationwide Water Hibah Program* (Rupiah Murni)	RM	0	0	0	900.000.000	900.000.000
1	*Nationwide Water Hibah Program (NWHP)*		0	0	0	900.000.000	900.000.000
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**6.781.663.187**	**6.781.663.187**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**11.747.292.280**	**11.747.292.280**
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA		0	0	0	11.747.292.280	11.747.292.280
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	11.747.292.280	11.747.292.280
	Pengelolaan Subsidi Pajak	RM	0	0	0	11.747.292.280	11.747.292.280
1	PPh atas Komoditas Panas Bumi		0	0	0	2.401.859.480	2.401.859.480

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	PPh atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal		0	0	0	9.342.594.280	9.342.594.280

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	PPh atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		0	0	0	2.813.270	2.813.270

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PPh atas pembayaran *Recurrent Cost* SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni		0	0	0	25.250	25.250
04	**EKONOMI**		**0**	**0**	**0**	**157.003.049.241**	**157.003.049.241**
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	15.020.314.700	15.020.314.700
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	18.930.310	18.930.310
	Pengelolaan Subsidi Bunga Kredit Program	RM	0	0	0	18.930.310	18.930.310

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)		0	0	0	131.990	131.990
2	*Risk Sharing* Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)		0	0	0	15.699.000	15.699.000
3	Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)		0	0	0	2.177.940	2.177.940
4	Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)		0	0	0	17.590	17.590
5	Skema Subsidi Resi Gudang		0	0	0	903.790	903.790
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	15.001.384.390	15.001.384.390

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR	RM	0	0	0	15.001.384.390	15.001.384.390
1	Imbal Jasa Penjaminan KUR		0	0	0	161.384.390	161.384.390
2	Subsidi Bunga KUR		0	0	0	14.840.000.000	14.840.000.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN		0	0	0	25.276.937.716	25.276.937.716
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	25.276.937.716	25.276.937.716
	Pengelolaan Subsidi Pupuk	RM	0	0	0	25.276.937.716	25.276.937.716
1	Subsidi Pupuk		0	0	0	25.276.937.716	25.276.937.716
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI		0	0	0	110.512.205.899	110.512.205.899
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	110.512.205.899	110.512.205.899

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi Energi	RM	0	0	0	110.512.205.899	110.512.205.899
1	Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT)		0	0	0	16.639.207.575	16.639.207.575
2	Subsidi LPG Tabung 3 Kg					40.285.688.324	40.285.688.324
3	Subsidi Listrik		0	0	0	53.587.310.000	53.587.310.000
04.08	TRANSPORTASI		0	0	0	5.947.641.223	5.947.641.223
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	3.848.631.873	3.848.631.873
	Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian	RM	0	0	0	3.848.631.873	3.848.631.873
1	PSO kepada PT KAI		0	0	0	3.848.631.873	3.848.631.873
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	2.099.009.350	2.099.009.350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut	RM	0	0	0	2.099.009.350	2.099.009.350
1	PSO kepada PT Pelni		0	0	0	2.099.009.350	2.099.009.350
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		0	0	0	167.687.550	167.687.550
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	167.687.550	167.687.550
	Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	RM	0	0	0	167.687.550	167.687.550
1	PSO kepada Perum LKBN Antara		0	0	0	167.687.550	167.687.550
04.90	EKONOMI LAINNYA		0	0	0	78.262.153	78.262.153
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi	RM	0	0	0	78.262.153	78.262.153

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah		0	0	0	78.262.153	78.262.153
1	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah		0	0	0	78.262.153	78.262.153
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**0**	**0**	**0**	**3.232.730**	**3.232.730**
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		0	0	0	3.232.730	3.232.730
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	3.232.730	3.232.730
	Pengelolaan Subsidi Bunga untuk Air Bersih	RM	0	0	0	3.232.730	3.232.730
1	Subsidi Bunga untuk Air Bersih		0	0	0	3.232.730	3.232.730

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		**0**	**0**	**0**	**6.596.807.910**	**6.596.807.910**
11.07	BANTUAN PERUMAHAN		0	0	0	6.596.807.910	6.596.807.910
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	6.596.807.910	6.596.807.910
	Pengelolaan Subsidi Perumahan	RM	0	0	0	6.596.807.910	6.596.807.910
1.	Subsidi Bunga Kredit Perumahan		0	0	0	5.966.807.910	5.966.807.910
2.	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		0	0	0	630.000.000	630.000.000
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**175.350.382.161**	**175.350.382.161**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM		11.554.566.436	0	0	50.765.348.115	62.319.914.551
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		0	0	5.000.000.000	1.000.000.000	6.000.000.000
04	EKONOMI		0	0	0	104.528.988.159	104.528.988.159
07	KESEHATAN		0	0	0	24.135.453.039	24.135.453.039
10	PENDIDIKAN		0	0	0	14.050.000.000	14.050.000.000
11	PERLINDUNGAN SOSIAL		0	0	0	12.750.000.000	12.750.000.000
	JUMLAH TOTAL		**11.554.566.436**	**0**	**5.000.000.000**	**207.229.789.313**	**223.784.355.749**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**645.711.804**	**0**	**87.021.733**	**732.733.537**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		0	645.711.804	0	87.021.733	732.733.537
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	0	0	87.021.733	87.021.733
	Pengelolaan Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	RM	0	0	0	87.021.733	87.021.733
1	Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog		0	0	0	87.021.733	87.021.733

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	645.711.804	0	0	645.711.804
	Pengelolaan Pembayaran Belanja Terkait Pengelolaan Kas Negara	RM	0	645.711.804	0	0	645.711.804
	Pembiayaan Operasional BUN Pengelolaan Kas		0	645.711.804	0	0	645.711.804
04	**EKONOMI**		**0**	**1.043.160.196**	**0**	**0**	**1.043.160.196**
04.90	EKONOMI LAINNYA		0	1.043.160.196	0	0	1.043.160.196
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	-	0	0	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama	RM	0	-	0	0	-
	Dana Dukungan Kelayakan/ *Viability Gap Fund* (VGF) pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		0	-	0	0	-
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	1.020.808.878	0	0	1.020.808.878

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Fasilitas Penyiapan Proyek	RM	0	1.020.808.878	0	0	1.020.808.878
1	Dana Fasilitas Penyiapan Proyek dengan Skema KPBU		0	1.020.808.878	0	0	1.020.808.878
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	21.083.318	0	0	21.083.318
	Pengelolaan Pembayaran Kontribusi dan Trust Fund ke Lembaga Internasional	RM	0	21.083.318	0	0	21.083.318

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kontribusi ke Lembaga Internasional		0	21.083.318			21.083.318
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	1.268.000	0	0	1.268.000
	Pengelolaan Dukungan Loss Limit atas Pelaksanaan Program PEN	RM	0	1.268.000	0	0	1.268.000
	Pengelolaan Dukungan Loss Limit atas Pelaksanaan Program PEN		0	1.268.000			1.268.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*OECD Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project)*		0	-	0	0	-
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		**141.632.898.020**	**0**	**0**	**0**	**141.632.898.020**
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		141.632.898.020	0	0	0	141.632.898.020
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		141.632.898.020	0	0	0	141.632.898.020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial	RM	141.632.898.020	0	0	0	141.632.898.020
1	Anggaran Manfaat Pensiun		128.740.457.661	0	0	0	128.740.457.661
2	Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan)		11.235.656.000	0	0	0	11.235.656.000
3	Cicilan UPSL Program THT		669.808.471	0	0	0	669.808.471
4	Jamkesmen dan Jamkestama		224.305.200	0	0	0	224.305.200
5	IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja		236.193.720	0	0	0	236.193.720

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
MENURUT ORGANISASI, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN,
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	IWP Program Jaminan Kematian		526.476.968	0	0	0	526.476.968
	JUMLAH TOTAL		**141.632.898.020**	**1.688.872.000**	**0**	**87.021.733**	**143.408.791.753**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 017223 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

SK No 051939 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.1
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
TRANSFER KE DAERAH	723.479.475.461
I. Dana Perimbangan	688.676.556.279
A. Dana Transfer Umum	492.253.011.279
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	101.961.620.991
a. DBH Pajak	46.326.192.330
i. Pajak Penghasilan	28.936.680.071
ii. PBB	13.913.894.259
iii. Cukai Hasil Tembakau	3.475.618.000
b. DBH Sumber Daya Alam	35.635.428.661
i. Migas	14.184.777.050
ii. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	17.680.431.852
iii. Kehutanan	1.853.972.190
iv. Perikanan	765.752.134
v. Panas Bumi	1.150.495.435
c. Kurang Bayar (KB) DBH	20.000.000.000
i. KB DBH Pajak	16.442.265.884
ii. KB DBH SDA	3.557.734.116
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	390.291.390.288
B. Dana Transfer Khusus	196.423.545.000
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	65.248.200.000
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	131.175.345.000
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.459.118.000
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.014.724.000
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.195.308.000
d. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	55.360.363.813
e. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD	454.204.000
f. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus	1.985.007.000
g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	136.032.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.1
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN
h. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB)	12.700.500.000
i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	192.000.000
j. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	973.182.250
k. Dana Pelayanan Kepariwisataan	142.150.000
l. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	53.095.000
m. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	101.747.000
n. Dana Fasilitasi Penanaman Modal	203.913.937
o. Dana Pelayanan Ketahanan Pangan	204.000.000
II. Dana Insentif Daerah	13.500.000.000
III. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	21.302.919.182
A. Dana Otonomi Khusus	19.982.919.182
1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua	7.805.827.805
a. Provinsi Papua	5.464.079.464
b. Provinsi Papua Barat	2.341.748.341
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7.805.827.805
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam	4.371.263.572
a. Provinsi Papua	2.622.758.143
b. Provinsi Papua Barat	1.748.505.429
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.320.000.000
DANA DESA	72.000.000.000
J U M L A H	795.479.475.461

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
I	Provinsi Aceh	83.551.412	860.904	84.412.316
1	Kab. Aceh Barat	5.998.048	41.385	6.039.433
2	Kab. Aceh Besar	7.469.666	38.484	7.508.150
3	Kab. Aceh Selatan	4.530.156	21.621	4.551.777
4	Kab. Aceh Singkil	3.059.503	20.872	3.080.375
5	Kab. Aceh Tengah	4.690.825	43.776	4.734.601
6	Kab. Aceh Tenggara	2.417.600	20.842	2.438.442
7	Kab. Aceh Timur	5.125.770	43.743	5.169.513
8	Kab. Aceh Utara	4.865.995	39.456	4.905.451
9	Kab. Bireuen	5.353.205	45.636	5.398.841

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
10	Kab. Pidie	5.362.522	64.964	5.427.486
11	Kab. Simeulue	2.364.143	19.532	2.383.675
12	Kota Banda Aceh	25.750.965	233.786	25.984.751
13	Kota Sabang	2.763.230	18.281	2.781.511
14	Kota Langsa	5.170.099	67.464	5.237.563
15	Kota Lhokseumawe	9.019.245	120.624	9.139.869
16	Kab. Gayo Lues	2.284.979	18.102	2.303.081
17	Kab. Aceh Barat Daya	2.976.597	26.312	3.002.909
18	Kab. Aceh Jaya	2.714.230	18.614	2.732.844
19	Kab. Nagan Raya	3.699.414	113.900	3.813.314

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
20	Kab. Aceh Tamiang	5.093.397	86.570	5.179.967
21	Kab. Bener Meriah	2.694.080	19.548	2.713.628
22	Kab. Pidie Jaya	3.045.200	18.724	3.063.924
23	Kota Subulussalam	3.257.592	19.836	3.277.428
II	Provinsi Sumatera Utara	261.353.359	28.946.479	290.299.838
1	Kab. Asahan	9.656.861	716.208	10.373.069
2	Kab. Dairi	5.675.313	411.112	6.086.425
3	Kab. Deli Serdang	26.527.764	1.522.093	28.049.857
4	Kab. Karo	7.254.641	489.232	7.743.873
5	Kab. Labuhanbatu	8.580.828	543.967	9.124.795

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
6	Kab. Langkat	10.773.373	701.014	11.474.387
7	Kab. Mandailing Natal	6.704.876	418.061	7.122.937
8	Kab. Nias	3.949.299	408.119	4.357.418
9	Kab. Simalungun	10.443.735	579.559	11.023.294
10	Kab. Tapanuli Selatan	9.403.335	443.270	9.846.605
11	Kab. Tapanuli Tengah	5.778.500	415.995	6.194.495
12	Kab. Tapanuli Utara	6.653.226	413.485	7.066.711
13	Kab. Toba	7.614.509	422.900	8.037.409
14	Kota Binjai	7.070.524	897.393	7.967.917
15	Kota Medan	148.608.657	25.006.839	173.615.496

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
16	Kota Pematang Siantar	13.084.664	1.072.173	14.156.837
17	Kota Sibolga	6.677.381	466.460	7.143.841
18	Kota Tanjung Balai	5.118.303	673.341	5.791.644
19	Kota Tebing Tinggi	6.208.529	714.782	6.923.311
20	Kota Padang Sidempuan	8.641.344	586.983	9.228.327
21	Kab. Pakpak Bharat	4.161.930	407.947	4.569.877
22	Kab. Nias Selatan	4.418.347	418.081	4.836.428
23	Kab. Humbang Hasundutan	4.703.392	417.688	5.121.080
24	Kab. Serdang Bedagai	7.940.754	699.948	8.640.702
25	Kab. Samosir	4.779.956	407.519	5.187.475

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
26	Kab. Batu Bara	10.602.580	737.693	11.340.273
27	Kab. Padang Lawas	5.050.089	441.248	5.491.337
28	Kab. Padang Lawas Utara	4.514.162	415.703	4.929.865
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	6.339.889	449.198	6.789.087
30	Kab. Labuhanbatu Utara	5.422.638	507.597	5.930.235
31	Kab. Nias Utara	4.293.864	410.150	4.704.014
32	Kab. Nias Barat	4.070.583	408.441	4.479.024
33	Kota Gunungsitoli	6.003.036	519.405	6.522.441
III	Provinsi Sumatera Barat	86.097.055	4.195.338	90.292.393
1	Kab. Limapuluh Kota	5.026.662	199.446	5.226.108

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Agam	5.959.115	129.067	6.088.182
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3.542.136	119.546	3.661.682
4	Kab. Padang Pariaman	3.264.104	127.433	3.391.537
5	Kab. Pasaman	4.126.320	106.918	4.233.238
6	Kab. Pesisir Selatan	3.977.130	109.295	4.086.425
7	Kab. Sijunjung	3.404.808	106.016	3.510.824
8	Kab. Solok	4.191.983	152.129	4.344.112
9	Kab. Tanah Datar	4.974.794	179.770	5.154.564
10	Kota Bukit Tinggi	6.616.460	226.152	6.842.612
11	Kota Padang Panjang	3.411.445	126.344	3.537.789

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kota Padang	45.381.994	3.590.000	48.971.994
13	Kota Payakumbuh	4.231.355	265.529	4.496.884
14	Kota Sawahlunto	3.313.785	108.860	3.422.645
15	Kota Solok	4.791.284	136.475	4.927.759
16	Kota Pariaman	5.532.733	139.397	5.672.130
17	Kab. Pasaman Barat	4.919.094	154.538	5.073.632
18	Kab. Dharmasraya	4.714.760	136.929	4.851.689
19	Kab. Solok Selatan	3.745.831	106.263	3.852.094
IV	Provinsi Riau	181.010.986	7.425.369	188.436.355
1	Kab. Bengkalis	42.527.265	755.920	43.283.185

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Indragiri Hilir	12.998.931	602.254	13.601.185
3	Kab. Indragiri Hulu	12.301.649	503.717	12.805.366
4	Kab. Kampar	14.013.478	351.511	14.364.989
5	Kab. Kuantan Singingi	9.116.474	998.231	10.114.705
6	Kab. Pelalawan	21.272.167	363.731	21.635.898
7	Kab. Rokan Hilir	12.314.142	576.046	12.890.188
8	Kab. Rokan Hulu	10.852.749	336.082	11.188.831
9	Kab. Siak	21.704.862	336.469	22.041.331
10	Kota Dumai	21.696.368	712.076	22.408.444
11	Kota Pekanbaru	79.365.055	4.851.751	84.216.806

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Kepulauan Meranti	9.389.438	540.563	9.930.001
V	Provinsi Jambi	50.729.147	2.911.258	53.640.405
1	Kab. Batang Hari	4.145.021	177.150	4.322.171
2	Kab. Bungo	6.542.769	334.447	6.877.216
3	Kab. Kerinci	2.499.533	138.157	2.637.690
4	Kab. Merangin	5.212.615	204.256	5.416.871
5	Kab. Muaro Jambi	5.637.202	170.674	5.807.876
6	Kab. Sarolangun	4.229.584	135.738	4.365.322
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.729.151	270.701	5.999.852
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	5.696.623	143.095	5.839.718

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
9	Kab. Tebo	4.349.235	147.359	4.496.594
10	Kota Jambi	26.598.281	2.370.252	28.968.533
11	Kota Sungai Penuh	4.745.340	141.225	4.886.565
VI	Provinsi Sumatera Selatan	169.359.225	7.184.381	176.543.606
1	Kab. Lahat	10.553.227	217.762	10.770.989
2	Kab. Musi Banyuasin	17.789.611	228.354	18.017.965
3	Kab. Musi Rawas	6.922.774	238.987	7.161.761
4	Kab. Muara Enim	29.020.661	878.380	29.899.041
5	Kab. Ogan Komering Ilir	11.054.051	215.173	11.269.224
6	Kab. Ogan Komering Ulu	8.962.894	413.612	9.376.506

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kota Palembang	86.299.603	5.654.432	91.954.035
8	Kota Prabumulih	13.432.791	373.608	13.806.399
9	Kota Pagar Alam	5.750.299	212.654	5.962.953
10	Kota Lubuk Linggau	9.264.528	315.760	9.580.288
11	Kab. Banyuasin	10.205.844	317.168	10.523.012
12	Kab. Ogan Ilir	7.526.177	221.361	7.747.538
13	Kab. OKU Timur	7.265.121	257.799	7.522.920
14	Kab. OKU Selatan	5.943.597	207.258	6.150.855
15	Kab. Empat Lawang	5.814.358	205.411	6.019.769
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7.534.723	219.332	7.754.055

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
17	Kab. Musi Rawas Utara	5.957.775	202.627	6.160.402
VII	Provinsi Bengkulu	28.646.749	543.929	29.190.678
1	Kab. Bengkulu Selatan	3.165.432	33.840	3.199.272
2	Kab. Bengkulu Utara	3.910.738	43.033	3.953.771
3	Kab. Rejang Lebong	3.922.789	108.921	4.031.710
4	Kota Bengkulu	16.229.278	413.369	16.642.647
5	Kab. Kaur	1.810.822	29.566	1.840.388
6	Kab. Seluma	2.615.987	30.031	2.646.018
7	Kab. Mukomuko	3.009.699	41.166	3.050.865
8	Kab. Lebong	2.312.306	27.878	2.340.184

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
9	Kab. Kepahiang	2.620.250	51.140	2.671.390
10	Kab. Bengkulu Tengah	2.689.213	32.124	2.721.337
VIII	Provinsi Lampung	83.296.490	5.405.376	88.701.866
1	Kab. Lampung Barat	4.272.781	176.138	4.448.919
2	Kab. Lampung Selatan	10.490.996	363.576	10.854.572
3	Kab. Lampung Tengah	11.469.067	417.697	11.886.764
4	Kab. Lampung Utara	7.730.087	237.695	7.967.782
5	Kab. Lampung Timur	6.935.380	493.426	7.428.806
6	Kab. Tanggamus	6.192.729	250.926	6.443.655
7	Kab. Tulang Bawang	6.316.701	274.160	6.590.861

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kab. Way Kanan	4.629.796	179.244	4.809.040
9	Kota Bandar Lampung	37.345.672	4.465.910	41.811.582
10	Kota Metro	7.106.809	668.207	7.775.016
11	Kab. Pesawaran	4.784.666	173.753	4.958.419
12	Kab. Pringsewu	5.512.675	248.896	5.761.571
13	Kab. Mesuji	3.674.896	178.924	3.853.820
14	Kab. Tulang Bawang Barat	3.983.473	175.814	4.159.287
15	Kab. Pesisir Barat	3.441.916	173.897	3.615.813
IX	Provinsi DKI Jakarta	11.946.128.624	885.337.894	12.831.466.518
X	Provinsi Jawa Barat	1.048.113.951	87.040.322	1.135.154.273

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kab. Bandung	49.177.593	5.023.436	54.201.029
2	Kab. Bekasi	274.243.776	28.674.525	302.918.301
3	Kab. Bogor	108.111.583	4.577.556	112.689.139
4	Kab. Ciamis	25.397.072	1.849.291	27.246.363
5	Kab. Cianjur	29.032.052	3.632.256	32.664.308
6	Kab. Cirebon	36.619.735	2.172.796	38.792.531
7	Kab. Garut	30.879.301	1.974.866	32.854.167
8	Kab. Indramayu	35.673.856	2.254.743	37.928.599
9	Kab. Karawang	141.845.255	7.594.608	149.439.863
10	Kab. Kuningan	24.905.675	1.841.589	26.747.264

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
11	Kab. Majalengka	25.992.154	1.643.276	27.635.430
12	Kab. Purwakarta	54.367.128	2.529.375	56.896.503
13	Kab. Subang	34.782.148	1.807.128	36.589.276
14	Kab. Sukabumi	35.180.911	1.751.035	36.931.946
15	Kab. Sumedang	32.434.555	1.887.206	34.321.761
16	Kab. Tasikmalaya	24.984.232	1.608.741	26.592.973
17	Kota Bandung	214.009.702	31.596.003	245.605.705
18	Kota Bekasi	88.840.455	9.469.913	98.310.368
19	Kota Bogor	49.238.720	7.647.957	56.886.677
20	Kota Cirebon	32.240.796	2.860.456	35.101.252

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
21	Kota Depok	58.903.021	5.649.634	64.552.655
22	Kota Sukabumi	25.665.130	1.968.895	27.634.025
23	Kota Tasikmalaya	28.949.722	2.509.850	31.459.572
24	Kota Cimahi	29.969.653	3.749.412	33.719.065
25	Kota Banjar	20.393.443	1.615.604	22.009.047
26	Kab. Bandung Barat	36.839.665	3.005.589	39.845.254
27	Kab. Pangandaran	20.456.943	1.542.450	21.999.393
XI	Provinsi Jawa Tengah	424.939.211	49.044.714	473.983.925
1	Kab. Banjarnegara	11.502.113	809.321	12.311.434
2	Kab. Banyumas	23.098.830	1.543.589	24.642.419

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
3	Kab. Batang	17.301.085	766.077	18.067.162
4	Kab. Blora	11.535.094	951.869	12.486.963
5	Kab. Boyolali	13.879.529	981.979	14.861.508
6	Kab. Brebes	11.286.603	811.235	12.097.838
7	Kab. Cilacap	25.640.915	1.108.148	26.749.063
8	Kab. Demak	12.512.352	819.841	13.332.193
9	Kab. Grobogan	11.856.900	872.134	12.729.034
10	Kab. Jepara	20.842.103	1.285.144	22.127.247
11	Kab. Karanganyar	14.073.812	1.254.985	15.328.797
12	Kab. Kebumen	12.490.471	1.153.009	13.643.480

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
13	Kab. Kendal	12.605.136	906.755	13.511.891
14	Kab. Klaten	15.403.364	1.730.912	17.134.276
15	Kab. Kudus	49.061.164	10.464.101	59.525.265
16	Kab. Magelang	12.152.282	997.235	13.149.517
17	Kab. Pati	14.090.875	1.308.742	15.399.617
18	Kab. Pekalongan	9.654.155	723.184	10.377.339
19	Kab. Pemalang	11.165.126	826.249	11.991.375
20	Kab. Purbalingga	10.853.637	872.268	11.725.905
21	Kab. Purworejo	10.412.616	935.059	11.347.675
22	Kab. Rembang	10.758.385	945.035	11.703.420

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
23	Kab. Semarang	18.640.067	1.144.446	19.784.513
24	Kab. Sragen	11.959.383	887.140	12.846.523
25	Kab. Sukoharjo	17.851.122	1.617.875	19.468.997
26	Kab. Tegal	12.908.400	833.500	13.741.900
27	Kab. Temanggung	10.575.557	1.148.717	11.724.274
28	Kab. Wonogiri	11.647.483	870.622	12.518.105
29	Kab. Wonosobo	9.720.117	731.661	10.451.778
30	Kota Magelang	11.471.578	1.234.484	12.706.062
31	Kota Pekalongan	11.445.480	1.432.641	12.878.121
32	Kota Salatiga	10.711.876	1.651.182	12.363.058

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
33	Kota Semarang	117.454.191	13.270.552	130.724.743
34	Kota Surakarta	26.389.097	10.556.532	36.945.629
35	Kota Tegal	12.606.510	1.381.289	13.987.799
XII	Provinsi DI Yogyakarta	74.888.850	8.111.228	83.000.078
1	Kab. Bantul	17.723.233	1.828.591	19.551.824
2	Kab. Gunung Kidul	12.816.780	1.013.873	13.830.653
3	Kab. Kulon Progo	12.611.041	1.046.141	13.657.182
4	Kab. Sleman	35.839.400	4.207.865	40.047.265
5	Kota Yogyakarta	33.342.821	3.873.016	37.215.837
XIII	Provinsi Jawa Timur	653.433.003	81.443.369	734.876.372

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kab. Bangkalan	12.340.404	1.226.440	13.566.844
2	Kab. Banyuwangi	18.644.691	2.080.318	20.725.009
3	Kab. Blitar	12.856.890	1.625.820	14.482.710
4	Kab. Bojonegoro	20.358.637	1.450.402	21.809.039
5	Kab. Bondowoso	11.605.421	1.193.910	12.799.331
6	Kab. Gresik	70.179.077	2.222.932	72.402.009
7	Kab. Jember	23.393.970	2.494.348	25.888.318
8	Kab. Jombang	16.321.317	1.548.889	17.870.206
9	Kab. Kediri	16.834.398	1.746.276	18.580.674
10	Kab. Lamongan	14.950.786	1.297.695	16.248.481

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
11	Kab. Lumajang	12.436.524	1.474.095	13.910.619
12	Kab. Madiun	11.850.758	1.108.460	12.959.218
13	Kab. Magetan	13.118.093	1.294.696	14.412.789
14	Kab. Malang	25.563.382	2.964.540	28.527.922
15	Kab. Mojokerto	20.654.984	1.614.876	22.269.860
16	Kab. Nganjuk	14.064.250	1.356.688	15.420.938
17	Kab. Ngawi	13.084.791	1.116.899	14.201.690
18	Kab. Pacitan	11.400.897	1.086.806	12.487.703
19	Kab. Pamekasan	13.297.618	1.224.680	14.522.298
20	Kab. Pasuruan	34.493.362	3.019.336	37.512.698

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
21	Kab. Ponorogo	14.095.594	1.409.054	15.504.648
22	Kab. Probolinggo	15.625.207	1.321.770	16.946.977
23	Kab. Sampang	10.904.291	1.027.851	11.932.142
24	Kab. Sidoarjo	74.805.766	6.955.105	81.760.871
25	Kab. Situbondo	12.194.152	1.254.900	13.449.052
26	Kab. Sumenep	12.470.028	1.091.099	13.561.127
27	Kab. Trenggalek	11.943.031	1.159.474	13.102.505
28	Kab. Tuban	20.627.159	1.341.924	21.969.083
29	Kab. Tulungagung	15.402.204	1.978.453	17.380.657
30	Kota Blitar	11.718.842	1.712.483	13.431.325

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
31	Kota Kediri	24.156.132	3.611.745	27.767.877
32	Kota Madiun	17.636.508	1.534.445	19.170.953
33	Kota Malang	41.005.630	6.480.020	47.485.650
34	Kota Mojokerto	12.513.720	1.417.726	13.931.446
35	Kota Pasuruan	13.187.741	1.221.431	14.409.172
36	Kota Probolinggo	12.925.523	1.501.488	14.427.011
37	Kota Surabaya	261.563.496	52.206.371	313.769.867
38	Kota Batu	9.924.232	1.234.731	11.158.963
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	71.022.102	4.895.513	75.917.615
1	Kab. Bengkayang	3.389.885	193.865	3.583.750

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Landak	4.306.201	197.907	4.504.108
3	Kab. Kapuas Hulu	4.909.369	189.856	5.099.225
4	Kab. Ketapang	10.634.833	312.190	10.947.023
5	Kab. Mempawah	4.895.712	224.486	5.120.198
6	Kab. Sambas	5.750.033	286.272	6.036.305
7	Kab. Sanggau	6.708.188	211.028	6.919.216
8	Kab. Sintang	6.987.137	300.331	7.287.468
9	Kota Pontianak	28.848.966	3.744.214	32.593.180
10	Kota Singkawang	5.728.905	680.966	6.409.871
11	Kab. Sekadau	4.455.942	182.160	4.638.102

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Melawi	3.758.570	235.539	3.994.109
13	Kab. Kayong Utara	3.280.319	177.042	3.457.361
14	Kab. Kubu Raya	9.037.509	407.414	9.444.923
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	61.053.639	1.051.920	62.105.559
1	Kab. Barito Selatan	4.461.177	43.477	4.504.654
2	Kab. Barito Utara	5.642.674	43.740	5.686.414
3	Kab. Kapuas	6.230.670	77.398	6.308.068
4	Kab. Kotawaringin Barat	11.050.869	439.216	11.490.085
5	Kab. Kotawaringin Timur	13.785.790	365.842	14.151.632
6	Kota Palangkaraya	16.975.764	194.801	17.170.565

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kab. Katingan	3.830.442	36.646	3.867.088
8	Kab. Seruyan	4.158.676	45.770	4.204.446
9	Kab. Sukamara	2.975.954	38.386	3.014.340
10	Kab. Lamandau	3.411.387	101.496	3.512.883
11	Kab. Gunung Mas	3.837.848	41.584	3.879.432
12	Kab. Pulang Pisau	3.397.930	37.299	3.435.229
13	Kab. Murung Raya	4.980.775	48.637	5.029.412
14	Kab. Barito Timur	6.840.500	37.825	6.878.325
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	94.459.243	4.635.871	99.095.114
1	Kab. Banjar	9.587.015	371.040	9.958.055

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Barito Kuala	5.841.852	196.027	6.037.879
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	5.966.253	196.012	6.162.265
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	6.593.937	225.792	6.819.729
5	Kab. Hulu Sungai Utara	5.964.077	241.285	6.205.362
6	Kab. Kotabaru	11.420.195	261.263	11.681.458
7	Kab. Tabalong	11.958.297	268.983	12.227.280
8	Kab. Tanah Laut	9.229.801	222.713	9.452.514
9	Kab. Tapin	6.624.717	327.929	6.952.646
10	Kota Banjarbaru	14.672.591	378.937	15.051.528
11	Kota Banjarmasin	32.617.982	2.829.199	35.447.181

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Balangan	8.432.381	183.123	8.615.504
13	Kab. Tanah Bumbu	11.517.825	853.780	12.371.605
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	274.402.599	7.181.381	281.583.980
1	Kab. Berau	30.255.980	541.373	30.797.353
2	Kab. Kutai Kartanegara	52.955.879	832.910	53.788.789
3	Kab. Kutai Barat	22.464.073	442.496	22.906.569
4	Kab. Kutai Timur	50.152.705	459.888	50.612.593
5	Kab. Paser	24.846.329	496.353	25.342.682
6	Kota Balikpapan	98.670.099	2.371.152	101.041.251
7	Kota Bontang	48.746.204	676.317	49.422.521

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kota Samarinda	50.363.425	4.104.527	54.467.952
9	Kab. Penajam Paser Utara	16.996.221	390.099	17.386.320
10	Kab. Mahakam Ulu	14.892.702	359.069	15.251.771
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	54.147.203	3.313.021	57.460.224
1	Kab. Bolaang Mongondow	2.556.305	118.820	2.675.125
2	Kab. Minahasa	5.632.388	210.561	5.842.949
3	Kab. Sangihe	3.921.219	135.626	4.056.845
4	Kota Bitung	5.557.489	260.283	5.817.772
5	Kota Manado	29.294.422	2.420.526	31.714.948
6	Kab. Kepulauan Talaud	2.634.882	107.264	2.742.146

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kab. Minahasa Selatan	3.683.805	168.243	3.852.048
8	Kota Tomohon	3.744.831	299.330	4.044.161
9	Kab. Minahasa Utara	6.846.136	201.645	7.047.781
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2.419.913	109.710	2.529.623
11	Kota Kotamobagu	4.765.940	279.599	5.045.539
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.402.946	107.278	2.510.224
13	Kab. Minahasa Tenggara	2.802.231	110.616	2.912.847
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.395.021	125.457	2.520.478
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.288.451	107.325	2.395.776
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	41.929.807	1.483.773	43.413.580

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kab. Banggai	8.111.233	378.337	8.489.570
2	Kab. Banggai Kepulauan	2.105.700	67.883	2.173.583
3	Kab. Buol	2.505.013	109.004	2.614.017
4	Kab. Toli-Toli	3.333.366	152.453	3.485.819
5	Kab. Donggala	3.006.364	161.371	3.167.735
6	Kab. Morowali	15.648.383	168.941	15.817.324
7	Kab. Poso	3.808.867	103.055	3.911.922
8	Kota Palu	15.656.470	845.978	16.502.448
9	Kab. Parigi Moutong	3.364.760	109.001	3.473.761
10	Kab. Tojo Una Una	2.529.450	68.844	2.598.294

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
11	Kab. Sigi	2.884.629	68.695	2.953.324
12	Kab. Banggai Laut	2.365.425	73.160	2.438.585
13	Kab. Morowali Utara	2.918.889	62.526	2.981.415
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	153.086.075	8.854.698	161.940.773
1	Kab. Bantaeng	4.514.514	218.307	4.732.821
2	Kab. Barru	4.790.705	190.494	4.981.199
3	Kab. Bone	8.671.707	407.583	9.079.290
4	Kab. Bulukumba	6.666.065	233.938	6.900.003
5	Kab. Enrekang	4.625.749	198.976	4.824.725
6	Kab. Gowa	7.518.975	307.591	7.826.566

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kab. Jeneponto	5.940.318	182.458	6.122.776
8	Kab. Luwu	5.195.596	239.553	5.435.149
9	Kab. Luwu Utara	4.872.406	196.091	5.068.497
10	Kab. Maros	9.252.138	242.283	9.494.421
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	8.360.879	280.863	8.641.742
12	Kota Palopo	6.716.752	390.547	7.107.299
13	Kab. Luwu Timur	12.223.728	256.546	12.480.274
14	Kab. Pinrang	5.738.788	239.797	5.978.585
15	Kab. Sinjai	5.143.940	204.283	5.348.223
16	Kab. Kepulauan Selayar	4.338.863	193.934	4.532.797

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
17	Kab. Sidenreng Rappang	5.561.079	245.235	5.806.314
18	Kab. Soppeng	5.255.289	224.354	5.479.643
19	Kab. Takalar	5.295.840	215.011	5.510.851
20	Kab. Tana Toraja	5.056.327	199.125	5.255.452
21	Kab. Wajo	6.726.582	260.423	6.987.005
22	Kota Pare-pare	7.716.165	341.125	8.057.290
23	Kota Makassar	82.175.605	7.519.596	89.695.201
24	Kab. Toraja Utara	4.519.989	278.135	4.798.124
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	32.211.738	884.917	33.096.655
1	Kab. Buton	1.831.005	26.155	1.857.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Konawe	2.356.471	37.603	2.394.074
3	Kab. Kolaka	5.871.647	200.487	6.072.134
4	Kab. Muna	2.808.976	67.941	2.876.917
5	Kota Kendari	15.053.599	481.258	15.534.857
6	Kota Bau-bau	3.543.342	176.708	3.720.050
7	Kab. Konawe Selatan	2.568.451	28.022	2.596.473
8	Kab. Bombana	1.842.218	27.404	1.869.622
9	Kab. Wakatobi	1.769.367	25.543	1.794.910
10	Kab. Kolaka Utara	1.532.784	28.231	1.561.015
11	Kab. Konawe Utara	1.274.183	25.092	1.299.275

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Buton Utara	1.387.200	25.967	1.413.167
13	Kab. Konawe Kepulauan	1.074.240	25.039	1.099.279
14	Kab. Kolaka Timur	1.291.410	27.474	1.318.884
15	Kab. Muna Barat	1.315.010	25.128	1.340.138
16	Kab. Buton Tengah	1.385.394	24.952	1.410.346
17	Kab. Buton Selatan	1.294.435	25.183	1.319.618
XXII	Provinsi Bali	145.140.494	11.632.188	156.772.682
1	Kab. Badung	60.486.564	3.710.978	64.197.542
2	Kab. Bangli	10.393.831	713.670	11.107.501
3	Kab. Buleleng	16.684.128	1.156.427	17.840.555

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
4	Kab. Gianyar	16.929.842	1.298.867	18.228.709
5	Kab. Jembrana	10.998.658	723.315	11.721.973
6	Kab. Karangasem	12.361.905	796.716	13.158.621
7	Kab. Klungkung	10.835.157	757.330	11.592.487
8	Kab. Tabanan	14.335.663	1.444.898	15.780.561
9	Kota Denpasar	61.076.693	6.782.834	67.859.527
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	55.919.603	1.970.778	57.890.381
1	Kab. Bima	4.562.827	112.666	4.675.493
2	Kab. Dompu	4.823.195	167.830	4.991.025
3	Kab. Lombok Barat	6.337.980	171.745	6.509.725

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
4	Kab. Lombok Tengah	8.071.031	208.501	8.279.532
5	Kab. Lombok Timur	8.311.130	231.913	8.543.043
6	Kab. Sumbawa	6.912.774	400.755	7.313.529
7	Kota Mataram	21.831.975	1.172.199	23.004.174
8	Kota Bima	6.106.314	271.679	6.377.993
9	Kab. Sumbawa Barat	12.475.996	108.732	12.584.728
10	Kab. Lombok Utara	4.163.997	110.147	4.274.144
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	43.854.558	2.142.426	45.996.984
1	Kab. Alor	1.906.213	109.603	2.015.816
2	Kab. Belu	2.653.516	124.030	2.777.546

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
3	Kab. Ende	3.584.028	253.090	3.837.118
4	Kab. Flores Timur	2.469.245	76.793	2.546.038
5	Kab. Kupang	2.694.689	49.190	2.743.879
6	Kab. Lembata	1.874.439	108.598	1.983.037
7	Kab. Manggarai	3.088.678	127.131	3.215.809
8	Kab. Ngada	1.803.418	91.024	1.894.442
9	Kab. Sikka	3.164.249	272.228	3.436.477
10	Kab. Sumba Barat	1.958.728	66.953	2.025.681
11	Kab. Sumba Timur	3.123.127	169.452	3.292.579
12	Kab. Timor Tengah Selatan	2.347.984	52.378	2.400.362

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
13	Kab. Timor Tengah Utara	1.785.949	60.954	1.846.903
14	Kota Kupang	18.327.412	844.425	19.171.837
15	Kab. Rote Ndao	1.666.795	60.550	1.727.345
16	Kab. Manggarai Barat	2.352.609	105.081	2.457.690
17	Kab. Nagekeo	1.663.512	69.007	1.732.519
18	Kab. Sumba Barat Daya	1.899.763	99.736	1.999.499
19	Kab. Sumba Tengah	1.229.005	46.599	1.275.604
20	Kab. Manggarai Timur	1.713.667	46.517	1.760.184
21	Kab. Sabu Raijua	1.411.678	46.019	1.457.697
22	Kab. Malaka	1.442.658	168.179	1.610.837

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
XXV	Provinsi Maluku	24.512.778	734.999	25.247.777
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.296.934	50.896	2.347.830
2	Kab. Maluku Tengah	3.418.446	51.958	3.470.404
3	Kab. Maluku Tenggara	1.848.826	122.294	1.971.120
4	Kab. Buru	2.070.863	35.116	2.105.979
5	Kota Ambon	16.939.044	506.958	17.446.002
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.863.148	41.196	1.904.344
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.686.571	33.120	1.719.691
8	Kab. Kepulauan Aru	1.450.640	129.458	1.580.098
9	Kota Tual	1.436.193	33.128	1.469.321

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
10	Kab. Maluku Barat Daya	2.217.197	33.291	2.250.488
11	Kab. Buru Selatan	1.261.455	33.076	1.294.531
XXVI	Provinsi Papua	174.142.949	2.044.245	176.187.194
1	Kab. Biak Numfor	5.945.098	184.089	6.129.187
2	Kab. Jayapura	5.711.127	132.837	5.843.964
3	Kab. Jayawijaya	6.028.385	70.332	6.098.717
4	Kab. Merauke	8.363.846	349.638	8.713.484
5	Kab. Mimika	119.721.126	591.387	120.312.513
6	Kab. Nabire	4.834.116	162.810	4.996.926
7	Kab. Paniai	4.186.865	32.854	4.219.719

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kab. Puncak Jaya	3.666.656	32.868	3.699.524
9	Kab. Kepulauan Yapen	4.566.279	39.522	4.605.801
10	Kota Jayapura	27.226.398	800.622	28.027.020
11	Kab. Sarmi	3.398.038	45.320	3.443.358
12	Kab. Keerom	3.451.304	35.636	3.486.940
13	Kab. Yahukimo	3.183.697	32.854	3.216.551
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.467.602	32.855	3.500.457
15	Kab. Tolikara	3.061.228	32.854	3.094.082
16	Kab. Boven Digoel	4.225.805	35.702	4.261.507
17	Kab. Mappi	3.294.249	42.515	3.336.764

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
18	Kab. Asmat	3.587.274	33.259	3.620.533
19	Kab. Waropen	3.039.366	32.854	3.072.220
20	Kab. Supiori	3.171.604	32.854	3.204.458
21	Kab. Mamberamo Raya	2.991.128	32.854	3.023.982
22	Kab. Mamberamo Tengah	3.083.058	32.877	3.115.935
23	Kab. Yalimo	2.809.113	32.939	2.842.052
24	Kab. Lanny Jaya	2.905.402	32.854	2.938.256
25	Kab. Nduga	2.835.625	32.854	2.868.479
26	Kab. Dogiyai	3.116.424	32.854	3.149.278
27	Kab. Puncak	3.122.041	33.751	3.155.792

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
28	Kab. Intan Jaya	3.052.675	32.854	3.085.529
29	Kab. Deiyai	3.510.979	48.870	3.559.849
XXVII	Provinsi Maluku Utara	26.159.455	999.172	27.158.627
1	Kab. Halmahera Tengah	2.517.291	50.524	2.567.815
2	Kota Ternate	10.826.153	954.854	11.781.007
3	Kab. Halmahera Barat	1.914.219	55.443	1.969.662
4	Kab. Halmahera Timur	2.248.839	50.905	2.299.744
5	Kab. Halmahera Selatan	3.717.466	70.806	3.788.272
6	Kab. Halmahera Utara	9.457.796	95.760	9.553.556
7	Kab. Kepulauan Sula	1.775.503	59.254	1.834.757

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kota Tidore Kepulauan	3.430.050	61.219	3.491.269
9	Kab. Pulau Morotai	1.826.188	50.035	1.876.223
10	Kab. Pulau Taliabu	1.605.647	49.959	1.655.606
XXVIII	Provinsi Banten	541.455.956	22.325.288	563.781.244
1	Kab. Lebak	41.099.584	1.591.762	42.691.346
2	Kab. Pandeglang	41.827.761	1.504.783	43.332.544
3	Kab. Serang	60.803.150	1.882.489	62.685.639
4	Kab. Tangerang	161.355.725	5.793.163	167.148.888
5	Kota Cilegon	94.145.230	4.269.540	98.414.770
6	Kota Tangerang	217.809.330	7.343.651	225.152.981

SK No 021049 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kota Serang	57.220.356	1.703.007	58.923.363
8	Kota Tangerang Selatan	137.922.799	9.703.173	147.625.972
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	27.102.051	2.522.733	29.624.784
1	Kab. Bangka	6.119.890	378.335	6.498.225
2	Kab. Belitung	4.641.824	337.517	4.979.341
3	Kota Pangkal Pinang	12.630.543	2.406.086	15.036.629
4	Kab. Bangka Selatan	3.407.879	194.399	3.602.278
5	Kab. Bangka Tengah	4.543.916	254.328	4.798.244
6	Kab. Bangka Barat	5.550.336	208.294	5.758.630
7	Kab. Belitung Timur	3.758.689	211.737	3.970.426

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
XXX	Provinsi Gorontalo	15.050.054	662.900	15.712.954
1	Kab. Boalemo	2.330.307	60.352	2.390.659
2	Kab. Gorontalo	4.355.589	142.409	4.497.998
3	Kota Gorontalo	8.261.110	580.604	8.841.714
4	Kab. Pohuwato	2.487.281	82.150	2.569.431
5	Kab. Bone Bolango	2.874.531	66.860	2.941.391
6	Kab. Gorontalo Utara	2.196.456	61.976	2.258.432
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	116.839.409	6.838.819	123.678.228
1	Kab. Natuna	10.172.700	513.686	10.686.386
2	Kab. Kepulauan Anambas	14.793.937	513.140	15.307.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
3	Kab. Karimun	18.783.080	898.458	19.681.538
4	Kota Batam	89.260.050	6.246.678	95.506.728
5	Kota Tanjung Pinang	17.745.262	1.413.962	19.159.224
6	Kab. Lingga	9.601.266	537.745	10.139.011
7	Kab. Bintan	13.712.499	678.933	14.391.432
XXXII	Provinsi Papua Barat	32.118.692	873.393	32.992.085
1	Kab. Fak Fak	2.242.730	76.565	2.319.295
2	Kab. Manokwari	8.012.063	229.256	8.241.319
3	Kab. Sorong	3.433.975	56.465	3.490.440
4	Kota Sorong	9.580.315	378.382	9.958.697

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
5	Kab. Raja Ampat	1.899.084	33.766	1.932.850
6	Kab. Sorong Selatan	1.911.278	43.978	1.955.256
7	Kab. Teluk Bintuni	11.713.336	423.339	12.136.675
8	Kab. Teluk Wondama	1.613.412	44.466	1.657.878
9	Kab. Kaimana	1.819.603	45.154	1.864.757
10	Kab. Maybrat	1.370.970	32.969	1.403.939
11	Kab. Tambrauw	1.474.557	32.762	1.507.319
12	Kab. Manokwari Selatan	1.469.622	32.753	1.502.375
13	Kab. Pegunungan Arfak	1.382.989	36.547	1.419.536
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	11.071.304	213.753	11.285.057

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kab. Majene	2.458.286	48.031	2.506.317
2	Kab. Mamuju	5.358.140	95.878	5.454.018
3	Kab. Polewali Mandar	3.514.698	84.552	3.599.250
4	Kab. Mamasa	1.752.467	22.220	1.774.687
5	Kab. Pasangkayu	2.181.099	36.605	2.217.704
6	Kab. Mamuju Tengah	1.342.266	24.403	1.366.669
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	18.937.474	1.591.513	20.528.987
1	Kab. Bulungan	8.036.906	305.369	8.342.275
2	Kab. Malinau	4.116.293	205.490	4.321.783
3	Kab. Nunukan	4.206.352	242.214	4.448.566

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.2
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh Pasal 21	PPh Pasal 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
4	Kota Tarakan	9.031.598	1.452.674	10.484.272
5	Kab. Tana Tidung	3.015.062	181.523	3.196.585
XXXV	Selisih Lebih	1.976.785.869	359.632.249	2.336.418.118
TOTAL		26.760.973.843	2.175.706.228	28.936.680.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
I	Provinsi Aceh	-	5.336.916	245.367	37.809.313
1	Kab. Aceh Barat	2.913.675	2.038.419	-	764.617
2	Kab. Aceh Besar	2.913.675	-	-	1.098.153
3	Kab. Aceh Selatan	2.913.675	325.468	-	1.052.636
4	Kab. Aceh Singkil	2.913.675	3.783.841	-	841.420
5	Kab. Aceh Tengah	2.913.675	6.883	661.752	946.606
6	Kab. Aceh Tenggara	2.913.675	-	-	982.212

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
I	Provinsi Aceh	-	83.020	353.657	43.828.273
1	Kab. Aceh Barat	-	18.096	61.505	2.882.637
2	Kab. Aceh Besar	-	285.761	61.505	1.445.419
3	Kab. Aceh Selatan	-	5.409	61.505	1.445.018
4	Kab. Aceh Singkil	-	-	61.505	4.686.766
5	Kab. Aceh Tengah	-	-	61.505	1.676.746
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	61.505	1.043.717

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
I	Provinsi Aceh	296.495	11.927	1.575.388	-
1	Kab. Aceh Barat	84.934	-	23.894	-
2	Kab. Aceh Besar	-	-	34.317	-
3	Kab. Aceh Selatan	13.561	-	32.895	-
4	Kab. Aceh Singkil	157.660	-	26.294	-
5	Kab. Aceh Tengah	287	24.126	29.581	-
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	30.694	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
I	Provinsi Aceh	3.459	14.736	1.902.005	45.730.278
1	Kab. Aceh Barat	566	1.922	111.316	5.907.628
2	Kab. Aceh Besar	8.930	1.922	45.169	4.404.263
3	Kab. Aceh Selatan	169	1.922	48.547	4.407.240
4	Kab. Aceh Singkil	-	1.922	185.876	7.786.317
5	Kab. Aceh Tengah	-	1.922	55.916	4.646.337
6	Kab. Aceh Tenggara	-	1.922	32.616	3.990.008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
7	Kab. Aceh Timur	2.913.675	3.689.049	-	18.355.306
8	Kab. Aceh Utara	2.913.675	1.016.222	56.162	45.695.002
9	Kab. Bireuen	2.913.675	499.176	25.815	1.491.176
10	Kab. Pidie	2.913.675	-	-	1.082.587
11	Kab. Simeulue	2.913.675	-	-	815.592
12	Kota Banda Aceh	2.913.675	-	-	564.979
13	Kota Sabang	2.913.675	-	-	537.427

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
7	Kab. Aceh Timur	-	-	61.505	22.105.860
8	Kab. Aceh Utara	-	-	61.505	46.828.891
9	Kab. Bireuen	-	-	61.505	2.077.672
10	Kab. Pidie	-	9.992	61.505	1.154.084
11	Kab. Simeulue	-	-	61.505	877.097
12	Kota Banda Aceh	-	-	61.505	626.484
13	Kota Sabang	-	-	61.505	598.932

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
7	Kab. Aceh Timur	153.710	-	573.603	-
8	Kab. Aceh Utara	42.343	2.048	1.427.969	-
9	Kab. Bireuen	20.799	941	46.599	-
10	Kab. Pidie	-	-	33.831	-
11	Kab. Simeulue	-	-	25.487	-
12	Kota Banda Aceh	-	-	17.656	-
13	Kota Sabang	-	-	16.795	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
7	Kab. Aceh Timur	-	1.922	729.235	25.748.770
8	Kab. Aceh Utara	-	1.922	1.474.282	51.216.848
9	Kab. Bireuen	-	1.922	70.261	5.061.608
10	Kab. Pidie	312	1.922	36.065	4.103.824
11	Kab. Simeulue	-	1.922	27.409	3.818.181
12	Kota Banda Aceh	-	1.922	19.578	3.559.737
13	Kota Sabang	-	1.922	18.717	3.531.324

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
14	Kota Langsa	2.913.675	549.175	-	611.375
15	Kota Lhokseumawe	2.913.675	-	-	7.960.030
16	Kab. Gayo Lues	2.913.675	-	119.569	1.127.534
17	Kab. Aceh Barat Daya	2.913.675	519.858	-	680.875
18	Kab. Aceh Jaya	2.913.675	319.948	-	894.755
19	Kab. Nagan Raya	2.913.675	3.939.914	-	878.835
20	Kab. Aceh Tamiang	2.913.675	3.798.933	-	62.854.407

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
14	Kota Langsa	-	-	61.505	1.222.055
15	Kota Lhokseumawe	-	-	61.505	8.021.535
16	Kab. Gayo Lues	-	-	61.505	1.308.608
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	1.214	61.505	1.263.452
18	Kab. Aceh Jaya	-	-	61.505	1.276.208
19	Kab. Nagan Raya	-	8.858	61.505	4.889.112
20	Kab. Aceh Tamiang	-	812	61.505	66.715.657

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
14	Kota Langsa	22.882	-	19.105	-
15	Kota Lhokseumawe	-	-	248.751	-
16	Kab. Gayo Lues	-	4.359	35.235	-
17	Kab. Aceh Barat Daya	21.661	-	21.277	-
18	Kab. Aceh Jaya	13.331	-	27.961	-
19	Kab. Nagan Raya	164.163	-	27.464	-
20	Kab. Aceh Tamiang	158.289	-	1.964.200	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
14	Kota Langsa	-	1.922	43.909	4.179.639
15	Kota Lhokseumawe	-	1.922	250.673	11.185.883
16	Kab. Gayo Lues	-	1.922	41.516	4.263.799
17	Kab. Aceh Barat Daya	38	1.922	44.898	4.222.025
18	Kab. Aceh Jaya	-	1.922	43.214	4.233.097
19	Kab. Nagan Raya	277	1.922	193.826	7.996.613
20	Kab. Aceh Tamiang	25	1.922	2.124.436	71.753.768

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
21	Kab. Bener Meriah	2.913.675	-	138.665	707.474
22	Kab. Pidie Jaya	2.913.675	8.737	-	681.246
23	Kota Subulussalam	2.913.675	742.728	-	613.008
II	Provinsi Sumatera Utara	-	47.304.082	1.781.173	33.246.258
1	Kab. Asahan	2.913.675	27.386.486	13.856	1.595.498
2	Kab. Dairi	2.913.675	89.060	124.594	938.411
3	Kab. Deli Serdang	2.913.675	13.427.450	-	5.545.959

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
21	Kab. Bener Meriah	-	-	61.505	907.644
22	Kab. Pidie Jaya	-	-	61.505	751.488
23	Kota Subulussalam	-	1.938	61.505	1.419.179
II	Provinsi Sumatera Utara	4.760.743	3.008.123	507.420	90.607.799
1	Kab. Asahan	-	-	82.007	29.077.847
2	Kab. Dairi	-	155.053	61.505	1.368.623
3	Kab. Deli Serdang	62.190	-	61.505	19.097.104

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
21	Kab. Bener Meriah	-	5.056	22.109	-
22	Kab. Pidie Jaya	364	-	21.289	-
23	Kota Subulussalam	30.947	-	19.156	-
II	Provinsi Sumatera Utara	525.601	17.317	277.052	39.673
1	Kab. Asahan	1.445.398	640	63.155	-
2	Kab. Dairi	4.700	5.754	37.145	-
3	Kab. Deli Serdang	708.671	-	219.528	2.462

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
21	Kab. Bener Meriah	-	1.922	29.087	3.850.406
22	Kab. Pidie Jaya	-	1.922	23.575	3.688.738
23	Kota Subulussalam	61	1.922	52.086	4.384.940
II	Provinsi Sumatera Utara	25.068	4.229	888.940	91.496.739
1	Kab. Asahan	-	3.246	1.512.439	33.503.961
2	Kab. Dairi	6.138	2.435	56.172	4.338.470
3	Kab. Deli Serdang	-	2.435	933.096	22.943.875

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
4	Kab. Karo	2.913.675	147.090	-	922.207
5	Kab. Labuhanbatu	2.913.675	17.748.371	-	1.312.987
6	Kab. Langkat	2.913.675	18.730.297	-	91.439.603
7	Kab. Mandailing Natal	2.913.675	8.089.399	246.694	1.552.281
8	Kab. Nias	2.913.675	-	-	538.484
9	Kab. Simalungun	2.913.675	20.932.752	590.841	1.941.857
10	Kab. Tapanuli Selatan	2.913.675	3.814.433	291.832	1.161.564

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
4	Kab. Karo	353.809	-	61.505	1.484.611
5	Kab. Labuhanbatu	-	-	61.948	19.123.306
6	Kab. Langkat	36.279	-	61.505	110.267.684
7	Kab. Mandailing Natal	1.611.008	32.218	61.505	11.593.105
8	Kab. Nias	-	-	61.505	599.989
9	Kab. Simalungun	550	-	61.505	23.527.505
10	Kab. Tapanuli Selatan	187.031	11.813.647	61.505	17.330.012

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
4	Kab. Karo	7.763	-	36.504	14.005
5	Kab. Labuhanbatu	936.720	-	51.972	-
6	Kab. Langkat	988.543	-	3.619.484	1.436
7	Kab. Mandailing Natal	426.941	11.393	61.444	63.769
8	Kab. Nias	-	-	21.315	-
9	Kab. Simalungun	1.104.784	27.285	76.865	22
10	Kab. Tapanuli Selatan	201.317	13.477	45.979	7.403

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
4	Kab. Karo	-	2.435	60.707	4.458.993
5	Kab. Labuhanbatu	-	2.452	991.144	23.028.125
6	Kab. Langkat	-	2.435	4.611.898	117.793.257
7	Kab. Mandailing Natal	1.275	2.435	567.257	15.074.037
8	Kab. Nias	-	2.435	23.750	3.537.414
9	Kab. Simalungun	-	2.435	1.211.391	27.652.571
10	Kab. Tapanuli Selatan	467.624	2.435	738.235	20.981.922

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
11	Kab. Tapanuli Tengah	2.913.675	2.219.296	75.904	1.094.308
12	Kab. Tapanuli Utara	2.913.675	-	663.982	1.041.555
13	Kab. Toba	2.913.675	12.748	273.682	779.628
14	Kota Binjai	2.913.675	497.419	-	2.720.472
15	Kota Medan	2.913.675	-	-	4.334.297
16	Kota Pematang Siantar	2.913.675	22.880	-	531.655
17	Kota Sibolga	2.913.675	-	-	451.823

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
11	Kab. Tapanuli Tengah	39.982	7.569	61.505	3.498.564
12	Kab. Tapanuli Utara	16.745.596	4.039	61.505	18.516.677
13	Kab. Toba	-	-	61.505	1.127.563
14	Kota Binjai	-	-	61.505	3.279.396
15	Kota Medan	-	-	64.993	4.399.290
16	Kota Pematang Siantar	-	-	61.505	616.040
17	Kota Sibolga	270	-	82.007	534.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
11	Kab. Tapanuli Tengah	117.129	3.505	43.316	1.583
12	Kab. Tapanuli Utara	-	30.663	41.228	662.846
13	Kab. Toba	673	12.639	30.860	-
14	Kota Binjai	26.253	-	107.685	-
15	Kota Medan	-	-	171.566	-
16	Kota Pematang Siantar	1.208	-	21.045	-
17	Kota Sibolga	-	-	17.885	11

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
11	Kab. Tapanuli Tengah	300	2.435	168.268	6.580.507
12	Kab. Tapanuli Utara	160	2.435	737.332	22.167.684
13	Kab. Toba	-	2.435	46.607	4.087.845
14	Kota Binjai	-	2.435	136.373	6.329.444
15	Kota Medan	-	2.573	174.139	7.487.104
16	Kota Pematang Siantar	-	2.435	24.688	3.554.403
17	Kota Sibolga	-	3.246	21.142	3.468.917

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
18	Kota Tanjung Balai	2.913.675	-	-	512.500
19	Kota Tebing Tinggi	2.913.675	-	-	482.095
20	Kota Padang Sidempuan	2.913.675	126.750	-	672.181
21	Kab. Pakpak Bharat	2.913.675	-	69.626	803.598
22	Kab. Nias Selatan	2.913.675	-	720.153	1.456.501
23	Kab. Humbang Hasundutan	2.913.675	-	529.573	903.433
24	Kab. Serdang Bedagai	2.913.675	17.896.040	-	1.324.585

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
18	Kota Tanjung Balai	-	-	82.007	594.507
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	61.505	543.600
20	Kota Padang Sidempuan	11.353	-	61.505	871.789
21	Kab. Pakpak Bharat	-	19.569	61.505	954.298
22	Kab. Nias Selatan	-	-	61.505	2.238.159
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	61.505	1.494.511
24	Kab. Serdang Bedagai	-	-	61.505	19.282.130

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
18	Kota Tanjung Balai	-	-	20.286	-
19	Kota Tebing Tinggi	-	-	19.083	-
20	Kota Padang Sidempuan	6.690	-	26.607	449
21	Kab. Pakpak Bharat	-	3.215	31.809	-
22	Kab. Nias Selatan	-	33.257	57.653	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	24.456	35.761	-
24	Kab. Serdang Bedagai	944.513	-	52.431	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
18	Kota Tanjung Balai	-	3.246	23.532	3.531.714
19	Kota Tebing Tinggi	-	2.435	21.518	3.478.793
20	Kota Padang Sidempuan	-	2.435	36.181	3.821.645
21	Kab. Pakpak Bharat	775	2.435	38.234	3.906.207
22	Kab. Nias Selatan	-	2.435	93.345	5.245.179
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	2.435	62.652	4.470.838
24	Kab. Serdang Bedagai	-	2.435	999.379	23.195.184

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
25	Kab. Samosir	2.913.675	-	595.809	666.821
26	Kab. Batu Bara	2.913.675	5.207.428	-	835.422
27	Kab. Padang Lawas	2.913.675	4.555.255	1.203.341	2.012.873
28	Kab. Padang Lawas Utara	2.913.675	5.545.195	207.597	1.056.005
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	2.913.675	29.234.063	1.838.716	1.051.135
30	Kab. Labuhanbatu Utara	2.913.675	13.533.915	43.421	1.482.771
31	Kab. Nias Utara	2.913.675	-	-	689.892

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
25	Kab. Samosir	-	-	61.505	1.324.135
26	Kab. Batu Bara	-	-	82.007	6.124.857
27	Kab. Padang Lawas	-	-	61.505	7.832.974
28	Kab. Padang Lawas Utara	223.604	-	61.505	7.093.906
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	-	61.505	32.185.419
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	299	61.505	15.121.911
31	Kab. Nias Utara	-	-	61.505	751.397

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
25	Kab. Samosir	-	27.515	26.395	-
26	Kab. Batu Bara	274.836	-	33.069	-
27	Kab. Padang Lawas	240.416	55.571	79.676	-
28	Kab. Padang Lawas Utara	292.663	9.587	41.800	8.851
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.542.909	84.913	41.607	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	714.290	2.006	58.693	-
31	Kab. Nias Utara	-	-	27.308	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
25	Kab. Samosir	-	2.435	56.345	4.294.155
26	Kab. Batu Bara	-	3.246	311.151	9.349.683
27	Kab. Padang Lawas	-	2.435	378.098	11.124.747
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	2.435	355.336	10.362.917
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	2.435	1.671.864	36.770.958
30	Kab. Labuhanbatu Utara	12	2.435	777.436	18.813.022
31	Kab. Nias Utara	-	2.435	29.743	3.694.815

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
32	Kab. Nias Barat	2.913.675	-	-	597.817
33	Kota Gunungsitoli	2.913.675	-	-	534.813
III	Provinsi Sumatera Barat	-	6.266.886	608.727	4.349.435
1	Kab. Limapuluh Kota	2.913.675	247.563	-	1.128.500
2	Kab. Agam	2.913.675	2.196.365	-	1.097.988
3	Kab. Kepulauan Mentawai	2.913.675	-	1.573.889	1.306.542
4	Kab. Padang Pariaman	2.913.675	-	-	948.750

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
32	Kab. Nias Barat	-	-	61.505	659.322
33	Kota Gunungsitoli	-	-	61.505	596.318
III	Provinsi Sumatera Barat	547.691	522.763	292.151	12.587.653
1	Kab. Limapuluh Kota	-	93.443	61.505	1.531.011
2	Kab. Agam	-	-	61.505	3.355.858
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	61.505	2.941.936
4	Kab. Padang Pariaman	-	2.638	61.505	1.012.893

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
32	Kab. Nias Barat	-	-	23.664	-
33	Kota Gunungsitoli	-	-	21.170	-
III	Provinsi Sumatera Barat	348.160	50.727	241.635	30.428
1	Kab. Limapuluh Kota	10.315	-	31.347	-
2	Kab. Agam	91.515	-	30.500	-
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	43.719	36.293	-
4	Kab. Padang Pariaman	-	-	26.354	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
32	Kab. Nias Barat	-	2.435	26.099	3.599.096
33	Kota Gunungsitoli	-	2.435	23.605	3.533.598
III	Provinsi Sumatera Barat	29.042	16.231	716.223	13.303.876
1	Kab. Limapuluh Kota	2.596	1.709	45.967	4.490.653
2	Kab. Agam	-	1.709	123.724	6.393.257
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	1.709	81.721	5.937.332
4	Kab. Padang Pariaman	73	1.709	28.136	3.954.704

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
5	Kab. Pasaman	2.913.675	-	-	1.021.739
6	Kab. Pesisir Selatan	2.913.675	4.226.215	60.827	1.554.269
7	Kab. Sijunjung	2.913.675	455.714	338.153	1.697.247
8	Kab. Solok	2.913.675	120.146	-	1.128.909
9	Kab. Tanah Datar	2.913.675	8.851	-	817.729
10	Kota Bukit Tinggi	2.913.675	-	-	323.531
11	Kota Padang Panjang	2.913.675	-	-	349.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
5	Kab. Pasaman	-	-	61.505	1.083.244
6	Kab. Pesisir Selatan	19.583	31.396	61.505	5.953.795
7	Kab. Sijunjung	-	5.975	61.505	2.558.594
8	Kab. Solok	-	-	61.505	1.310.560
9	Kab. Tanah Datar	-	-	61.505	888.085
10	Kota Bukit Tinggi	-	-	61.505	385.036
11	Kota Padang Panjang	-	-	61.505	411.279

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
5	Kab. Pasaman	-	-	28.382	-
6	Kab. Pesisir Selatan	176.092	1.690	43.174	544
7	Kab. Sijunjung	18.988	9.393	47.146	-
8	Kab. Solok	5.006	-	31.359	-
9	Kab. Tanah Datar	369	-	22.715	-
10	Kota Bukit Tinggi	-	-	8.987	-
11	Kota Padang Panjang	-	-	9.716	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
5	Kab. Pasaman	-	1.709	30.091	4.027.010
6	Kab. Pesisir Selatan	872	1.709	224.081	9.091.551
7	Kab. Sijunjung	166	1.709	77.402	5.549.671
8	Kab. Solok	-	1.709	38.074	4.262.309
9	Kab. Tanah Datar	-	1.709	24.793	3.826.553
10	Kota Bukit Tinggi	-	1.709	10.696	3.309.407
11	Kota Padang Panjang	-	1.709	11.425	3.336.379

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
12	Kota Padang	2.913.675	-	-	1.407.138
13	Kota Payakumbuh	2.913.675	-	-	366.125
14	Kota Sawahlunto	2.913.675	-	-	398.781
15	Kota Solok	2.913.675	-	-	453.386
16	Kota Pariaman	2.913.675	-	-	592.696
17	Kab. Pasaman Barat	2.913.675	7.745.108	-	1.185.418
18	Kab. Dharmasraya	2.913.675	4.971.629	337.097	774.559

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
12	Kota Padang	-	1.442.666	61.505	2.911.309
13	Kota Payakumbuh	-	-	61.505	427.630
14	Kota Sawahlunto	-	496.538	61.505	956.824
15	Kota Solok	-	-	61.505	514.891
16	Kota Pariaman	-	-	61.505	654.201
17	Kab. Pasaman Barat	-	1.692	61.505	8.993.723
18	Kab. Dharmasraya	-	16.705	61.505	6.161.495

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
12	Kota Padang	-	-	39.087	-
13	Kota Payakumbuh	-	-	10.170	-
14	Kota Sawahlunto	-	-	11.077	-
15	Kota Solok	-	-	12.594	-
16	Kota Pariaman	-	-	16.464	-
17	Kab. Pasaman Barat	322.713	-	32.928	-
18	Kab. Dharmasraya	207.151	9.364	21.516	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
12	Kota Padang	40.074	1.709	80.870	5.905.854
13	Kota Payakumbuh	-	1.709	11.879	3.353.184
14	Kota Sawahlunto	13.793	1.709	26.579	3.897.078
15	Kota Solok	-	1.709	14.303	3.442.869
16	Kota Pariaman	-	1.709	18.173	3.586.049
17	Kab. Pasaman Barat	47	1.709	357.397	12.264.795
18	Kab. Dharmasraya	464	1.709	240.204	9.315.374

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
19	Kab. Solok Selatan	2.913.675	4.993.198	209.359	844.656
IV	Provinsi Riau	-	30.828.956	12.694.233	567.808.989
1	Kab. Bengkalis	2.913.675	7.250.350	5.941.846	1.322.898.561
2	Kab. Indragiri Hilir	2.913.675	16.944.355	3.155.061	2.622.733
3	Kab. Indragiri Hulu	2.913.675	13.057.462	1.636.642	44.041.798
4	Kab. Kampar	2.913.675	19.884.391	4.551.936	155.569.261
5	Kab. Kuantan Singingi	2.913.675	7.025.794	2.928.824	1.401.858

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
19	Kab. Solok Selatan	2.176.079	-	61.505	8.284.797
IV	Provinsi Riau	-	359.470	184.517	611.876.165
1	Kab. Bengkalis	-	-	61.505	1.336.152.262
2	Kab. Indragiri Hilir	-	622.395	61.505	23.406.049
3	Kab. Indragiri Hulu	-	217.078	61.505	59.014.485
4	Kab. Kampar	-	-	61.505	180.067.093
5	Kab. Kuantan Singingi	-	77.802	61.505	11.495.783

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
19	Kab. Solok Selatan	208.050	5.816	23.463	60.447
IV	Provinsi Riau	1.370.176	493.665	18.926.966	-
1	Kab. Bengkalis	322.238	231.072	44.096.619	-
2	Kab. Indragiri Hilir	753.082	122.697	87.424	-
3	Kab. Indragiri Hulu	580.332	63.647	1.468.060	-
4	Kab. Kampar	883.751	177.020	5.185.642	-
5	Kab. Kuantan Singingi	312.258	113.899	46.729	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
19	Kab. Solok Selatan	-	1.709	299.485	11.497.957
IV	Provinsi Riau	11.982	6.151	20.808.940	632.685.105
1	Kab. Bengkalis	-	2.051	44.651.980	1.383.717.917
2	Kab. Indragiri Hilir	20.747	2.051	986.001	27.305.725
3	Kab. Indragiri Hulu	7.236	2.051	2.121.326	64.049.486
4	Kab. Kampar	-	2.051	6.248.464	189.229.232
5	Kab. Kuantan Singingi	2.593	2.051	477.530	14.886.988

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
6	Kab. Pelalawan	2.913.675	17.702.075	15.102.818	46.186.613
7	Kab. Rokan Hilir	2.913.675	12.240.306	1.347.841	181.747.778
8	Kab. Rokan Hulu	2.913.675	16.834.338	768.739	19.445.982
9	Kab. Siak	2.913.675	11.387.629	8.817.244	380.425.077
10	Kota Dumai	2.913.675	10.190	2.243.037	19.099.625
11	Kota Pekanbaru	2.913.675	882.985	41.874	14.027.457
12	Kab. Kepulauan Meranti	2.913.675	95.947	2.160.067	34.134.342

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
6	Kab. Pelalawan	-	-	61.505	79.053.011
7	Kab. Rokan Hilir	-	-	61.505	195.397.430
8	Kab. Rokan Hulu	-	-	61.505	37.110.564
9	Kab. Siak	-	-	61.505	400.691.455
10	Kota Dumai	-	-	61.505	21.414.357
11	Kota Pekanbaru	-	-	61.505	15.013.821
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	520.605	61.505	36.972.466

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
6	Kab. Pelalawan	786.759	587.332	1.539.554	-
7	Kab. Rokan Hilir	544.014	52.416	6.058.259	-
8	Kab. Rokan Hulu	748.193	29.895	648.199	-
9	Kab. Siak	506.117	342.893	12.680.836	-
10	Kota Dumai	453	87.229	636.654	-
11	Kota Pekanbaru	39.244	1.628	467.582	-
12	Kab. Kepulauan Meranti	4.264	84.003	1.137.811	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
6	Kab. Pelalawan	-	2.051	2.915.696	84.882.382
7	Kab. Rokan Hilir	-	2.051	6.656.740	204.967.845
8	Kab. Rokan Hulu	-	2.051	1.428.338	41.452.577
9	Kab. Siak	-	2.051	13.531.897	417.137.027
10	Kota Dumai	-	2.051	726.387	25.054.419
11	Kota Pekanbaru	-	2.051	510.505	18.438.001
12	Kab. Kepulauan Meranti	17.353	2.051	1.245.482	41.131.623

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
V	Provinsi Jambi	-	7.441.639	3.409.498	76.101.477
1	Kab. Batang Hari	2.913.675	3.403.518	2.798.274	56.396.565
2	Kab. Bungo	2.913.675	3.051.835	2.659.082	8.453.747
3	Kab. Kerinci	2.913.675	406.431	-	912.428
4	Kab. Merangin	2.913.675	303.032	-	2.578.329
5	Kab. Muaro Jambi	2.913.675	7.610.760	811.362	59.356.607
6	Kab. Sarolangun	2.913.675	4.983.538	2.135.219	20.535.209

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
V	Provinsi Jambi	109.507	366.725	169.140	87.597.986
1	Kab. Batang Hari	-	342.233	61.505	63.002.095
2	Kab. Bungo	-	98.508	61.505	14.324.677
3	Kab. Kerinci	405.498	-	61.505	1.785.862
4	Kab. Merangin	-	8.776	61.505	2.951.642
5	Kab. Muaro Jambi	-	41.406	61.505	67.881.640
6	Kab. Sarolangun	-	843.215	61.505	28.558.686

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
V	Provinsi Jambi	496.109	198.887	3.805.074	5.475
1	Kab. Batang Hari	132.359	95.219	1.644.900	-
2	Kab. Bungo	118.682	90.483	246.568	-
3	Kab. Kerinci	15.806	-	26.612	11.827
4	Kab. Merangin	11.785	-	75.201	-
5	Kab. Muaro Jambi	295.974	27.609	1.731.234	-
6	Kab. Sarolangun	193.804	72.657	598.944	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
V	Provinsi Jambi	18.336	8.457	4.532.338	92.130.324
1	Kab. Batang Hari	9.982	1.794	1.884.254	67.800.024
2	Kab. Bungo	2.873	1.794	460.400	17.698.752
3	Kab. Kerinci	-	1.794	56.039	4.755.576
4	Kab. Merangin	256	1.794	89.036	5.954.353
5	Kab. Muaro Jambi	1.208	1.794	2.057.819	72.853.134
6	Kab. Sarolangun	24.594	1.794	891.793	32.364.154

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.913.675	5.026.449	4.144.852	78.490.155
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.913.675	1.957.625	1.186.770	39.150.228
9	Kab. Tebo	2.913.675	3.023.366	37.211	8.298.097
10	Kota Jambi	2.913.675	-	-	29.741.909
11	Kota Sungai Penuh	2.913.675	-	-	492.636
VI	Provinsi Sumatera Selatan	-	19.443.481	7.193.393	438.926.843
1	Kab. Lahat	2.913.675	3.894.996	951.541	52.395.856

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	2.231	61.505	87.725.192
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	3.378	61.505	42.359.506
9	Kab. Tebo	-	127.154	61.505	11.547.333
10	Kota Jambi	-	-	61.505	29.803.414
11	Kota Sungai Penuh	32.531	-	61.505	586.672
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.497.192	8.230.608	261.398	475.552.915
1	Kab. Lahat	69.219	6.604.187	65.500	63.981.299

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	195.473	141.040	2.289.296	-
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	76.130	40.383	1.141.882	-
9	Kab. Tebo	117.575	1.266	242.028	-
10	Kota Jambi	-	-	867.472	-
11	Kota Sungai Penuh	-	-	14.369	949
VI	Provinsi Sumatera Selatan	864.155	299.725	12.192.412	41.589
1	Kab. Lahat	173.111	36.344	1.819.301	2.403

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	65	1.794	2.627.668	93.266.535
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	99	1.794	1.260.288	46.533.469
9	Kab. Tebo	3.709	1.794	366.372	14.827.380
10	Kota Jambi	-	1.794	869.266	33.586.355
11	Kota Sungai Penuh	-	1.794	17.112	3.517.459
VI	Provinsi Sumatera Selatan	228.628	7.261	13.633.770	489.186.685
1	Kab. Lahat	229.312	2.274	2.262.745	69.157.719

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
2	Kab. Musi Banyuasin	2.913.675	18.413.668	5.479.810	530.747.607
3	Kab. Musi Rawas	2.913.675	7.654.105	3.068.432	149.039.526
4	Kab. Muara Enim	2.913.675	4.390.615	3.682.190	331.365.680
5	Kab. Ogan Komering Ilir	2.913.675	14.018.195	12.690.009	3.198.471
6	Kab. Ogan Komering Ulu	2.913.675	1.462.107	253.433	52.137.338
7	Kota Palembang	2.913.675	-	-	2.396.132
8	Kota Prabumulih	2.913.675	-	-	76.270.852

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
2	Kab. Musi Banyuasin	146.597	2.066.969	61.505	556.916.156
3	Kab. Musi Rawas	3.494	-	65.816	159.831.373
4	Kab. Muara Enim	5.536.911	22.761.783	61.505	367.798.684
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	61.505	29.968.180
6	Kab. Ogan Komering Ulu	37.330	709.659	61.505	54.661.372
7	Kota Palembang	-	-	74.649	2.470.781
8	Kota Prabumulih	-	-	61.505	76.332.357

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
2	Kab. Musi Banyuasin	818.385	209.298	18.428.736	5.090
3	Kab. Musi Rawas	340.182	117.197	5.174.984	121
4	Kab. Muara Enim	195.138	140.639	11.505.753	192.254
5	Kab. Ogan Komering Ilir	623.031	484.688	111.058	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	64.982	9.680	1.810.324	1.296
7	Kota Palembang	-	-	83.199	-
8	Kota Prabumulih	-	-	2.648.293	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
2	Kab. Musi Banyuasin	71.770	2.135	19.535.414	579.365.245
3	Kab. Musi Rawas	-	2.285	5.634.769	168.379.817
4	Kab. Muara Enim	790.340	2.135	12.826.259	383.538.618
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	2.135	1.220.912	34.102.767
6	Kab. Ogan Komering Ulu	24.641	2.135	1.913.058	59.488.105
7	Kota Palembang	-	2.592	85.791	5.470.247
8	Kota Prabumulih	-	2.135	2.650.428	81.896.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
9	Kota Pagar Alam	2.913.675	287.946	-	857.014
10	Kota Lubuk Linggau	2.913.675	-	-	742.650
11	Kab. Banyuasin	2.913.675	13.558.035	1.068.654	32.992.796
12	Kab. Ogan Ilir	2.913.675	3.445.926	-	44.839.356
13	Kab. OKU Timur	2.913.675	1.849.345	225.264	1.791.372
14	Kab. OKU Selatan	2.913.675	510.942	293.031	1.539.600
15	Kab. Empat Lawang	2.913.675	245.278	134.194	1.294.449

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
9	Kota Pagar Alam	145.168	-	61.505	1.351.633
10	Kota Lubuk Linggau	-	-	61.505	804.155
11	Kab. Banyuasin	-	12.268	61.505	47.693.258
12	Kab. Ogan Ilir	-	-	61.505	48.346.787
13	Kab. OKU Timur	-	28.949	61.505	3.956.435
14	Kab. OKU Selatan	81.528	4.383	61.505	2.490.989
15	Kab. Empat Lawang	-	-	61.505	1.735.426

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
9	Kota Pagar Alam	12.798	-	29.757	5.041
10	Kota Lubuk Linggau	-	-	25.786	-
11	Kab. Banyuasin	602.579	40.817	1.145.583	-
12	Kab. Ogan Ilir	153.152	-	1.556.922	-
13	Kab. OKU Timur	82.193	8.604	62.200	-
14	Kab. OKU Selatan	22.709	11.192	53.458	2.831
15	Kab. Empat Lawang	10.901	5.126	44.946	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
9	Kota Pagar Alam	-	2.135	49.731	4.315.039
10	Kota Lubuk Linggau	-	2.135	27.921	3.745.751
11	Kab. Banyuasin	426	2.135	1.791.540	52.398.473
12	Kab. Ogan Ilir	-	2.135	1.712.209	52.972.671
13	Kab. OKU Timur	1.005	2.135	156.137	7.026.247
14	Kab. OKU Selatan	152	2.135	92.477	5.497.141
15	Kab. Empat Lawang	-	2.135	63.108	4.712.209

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.913.675	1.712.323	413.666	345.746.670
17	Kab. Musi Rawas Utara	2.913.675	5.843.074	101.504	7.243.517
VII	Provinsi Bengkulu	-	3.512.841	292.113	2.184.856
1	Kab. Bengkulu Selatan	2.913.675	139.551	-	666.596
2	Kab. Bengkulu Utara	2.913.675	4.354.138	810.212	1.131.387
3	Kab. Rejang Lebong	2.913.675	53.337	-	812.226
4	Kota Bengkulu	2.913.675	-	-	742.111

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	24.202	61.505	347.958.366
17	Kab. Musi Rawas Utara	44.978	710.033	61.505	14.004.611
VII	Provinsi Bengkulu	358.019	320.044	153.764	6.821.637
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	61.505	867.652
2	Kab. Bengkulu Utara	100.438	735.838	61.505	7.193.518
3	Kab. Rejang Lebong	65.579	1.163	61.505	993.810
4	Kota Bengkulu	-	-	61.505	803.616

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	76.103	15.800	12.005.093	-
17	Kab. Musi Rawas Utara	259.692	3.877	251.511	1.562
VII	Provinsi Bengkulu	156.126	9.737	72.829	11.934
1	Kab. Bengkulu Selatan	6.203	-	22.220	-
2	Kab. Bengkulu Utara	193.517	32.633	37.713	3.348
3	Kab. Rejang Lebong	2.371	-	27.074	2.186
4	Kota Bengkulu	-	-	24.737	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	840	2.135	12.099.971	362.972.012
17	Kab. Musi Rawas Utara	24.654	2.135	543.431	17.461.717
VII	Provinsi Bengkulu	10.668	5.126	266.420	7.088.057
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	2.051	30.474	3.811.801
2	Kab. Bengkulu Utara	24.528	2.051	293.790	10.400.983
3	Kab. Rejang Lebong	39	2.051	33.721	3.941.206
4	Kota Bengkulu	-	2.051	26.788	3.744.079

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
5	Kab. Kaur	2.913.675	581.105	-	922.745
6	Kab. Seluma	2.913.675	1.869.675	-	945.018
7	Kab. Mukomuko	2.913.675	5.621.868	358.241	1.039.140
8	Kab. Lebong	2.913.675	37.213	-	951.995
9	Kab. Kepahiang	2.913.675	97.798	-	776.349
10	Kab. Bengkulu Tengah	2.913.675	1.056.459	-	751.857
VIII	Provinsi Lampung	-	9.327.455	283.983	6.439.928

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
5	Kab. Kaur	22.148	5.260	61.505	1.592.763
6	Kab. Seluma	-	30.953	61.505	2.907.151
7	Kab. Mukomuko	197	-	61.505	7.080.951
8	Kab. Lebong	1.213.067	25.040	61.505	2.288.820
9	Kab. Kepahiang	-	-	61.505	935.652
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	479.784	61.505	2.349.605
VIII	Provinsi Lampung	3.804.486	205.208	230.645	20.291.705

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
5	Kab. Kaur	25.827	-	30.758	738
6	Kab. Seluma	83.097	-	31.501	-
7	Kab. Mukomuko	249.861	14.429	34.638	7
8	Kab. Lebong	1.654	-	31.733	40.436
9	Kab. Kepahiang	4.347	-	25.878	-
10	Kab. Bengkulu Tengah	46.954	-	25.062	-
VIII	Provinsi Lampung	414.554	11.044	214.664	126.816

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
5	Kab. Kaur	176	2.051	59.550	4.565.988
6	Kab. Seluma	1.032	2.051	117.681	5.938.507
7	Kab. Mukomuko	-	2.051	300.986	10.295.612
8	Kab. Lebong	835	2.051	76.709	5.279.204
9	Kab. Kepahiang	-	2.051	32.276	3.881.603
10	Kab. Bengkulu Tengah	15.993	2.051	90.060	5.353.340
VIII	Provinsi Lampung	6.840	7.688	781.606	21.073.311

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Lampung Barat	2.913.675	-	-	911.400
2	Kab. Lampung Selatan	2.913.675	4.251.015	-	1.860.278
3	Kab. Lampung Tengah	2.913.675	12.493.295	-	3.000.634
4	Kab. Lampung Utara	2.913.675	2.390.437	-	1.592.350
5	Kab. Lampung Timur	2.913.675	550.121	-	6.673.244
6	Kab. Tanggamus	2.913.675	217.911	-	1.497.834
7	Kab. Tulang Bawang	2.913.675	5.305.823	-	1.603.604

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
1	Kab. Lampung Barat	-	-	61.505	972.905
2	Kab. Lampung Selatan	6.232	162.675	61.505	6.341.705
3	Kab. Lampung Tengah	-	26.918	61.505	15.582.352
4	Kab. Lampung Utara	-	11.304	61.505	4.055.596
5	Kab. Lampung Timur	-	-	61.505	7.284.870
6	Kab. Tanggamus	15.195.192	554.118	61.505	17.526.560
7	Kab. Tulang Bawang	-	2.711	61.505	6.973.643

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
1	Kab. Lampung Barat	-	-	30.380	-
2	Kab. Lampung Selatan	188.934	-	62.009	208
3	Kab. Lampung Tengah	555.258	-	100.021	-
4	Kab. Lampung Utara	106.242	-	53.078	-
5	Kab. Lampung Timur	24.450	-	222.441	-
6	Kab. Tanggamus	9.685	-	49.928	506.506
7	Kab. Tulang Bawang	235.814	-	53.453	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
1	Kab. Lampung Barat	-	2.051	32.431	3.919.011
2	Kab. Lampung Selatan	5.423	2.051	258.625	9.514.005
3	Kab. Lampung Tengah	897	2.051	658.227	19.154.254
4	Kab. Lampung Utara	377	2.051	161.748	7.131.019
5	Kab. Lampung Timur	-	2.051	248.942	10.447.487
6	Kab. Tanggamus	18.471	2.051	586.641	21.026.876
7	Kab. Tulang Bawang	90	2.051	291.408	10.178.726

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
8	Kab. Way Kanan	2.913.675	3.118.672	713.172	1.531.143
9	Kota Bandar Lampung	2.913.675	-	-	1.727.921
10	Kota Metro	2.913.675	-	-	590.759
11	Kab. Pesawaran	2.913.675	1.513.247	-	1.136.187
12	Kab. Pringsewu	2.913.675	-	-	797.549
13	Kab. Mesuji	2.913.675	5.894.346	422.759	890.087
14	Kab. Tulang Bawang Barat	2.913.675	1.270.414	-	969.930

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
8	Kab. Way Kanan	-	31.027	61.505	5.455.519
9	Kota Bandar Lampung	-	7.167	61.505	1.796.593
10	Kota Metro	-	-	61.505	652.264
11	Kab. Pesawaran	-	13.906	61.505	2.724.845
12	Kab. Pringsewu	-	-	61.505	859.054
13	Kab. Mesuji	-	3.181	61.505	7.271.878
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	61.505	2.301.849

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
8	Kab. Way Kanan	138.608	27.734	51.038	-
9	Kota Bandar Lampung	-	-	57.597	-
10	Kota Metro	-	-	19.692	-
11	Kab. Pesawaran	67.255	-	37.873	-
12	Kab. Pringsewu	-	-	26.585	-
13	Kab. Mesuji	261.971	16.441	29.670	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	56.463	-	32.331	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
8	Kab. Way Kanan	1.034	2.051	220.465	8.589.659
9	Kota Bandar Lampung	239	2.051	59.887	4.770.155
10	Kota Metro	-	2.051	21.743	3.587.682
11	Kab. Pesawaran	464	2.051	107.643	5.746.163
12	Kab. Pringsewu	-	2.051	28.636	3.801.365
13	Kab. Mesuji	106	2.051	310.239	10.495.792
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	2.051	90.845	5.306.369

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
15	Kab. Pesisir Barat	2.913.675	231.902	-	976.790
IX	Provinsi DKI Jakarta	2.913.585	-	-	32.633.906
X	Provinsi Jawa Barat	-	8.663.569	3.603.203	66.149.619
1	Kab. Bandung	2.913.675	6.832.556	123.010	4.765.028
2	Kab. Bekasi	2.913.675	-	-	35.809.295
3	Kab. Bogor	2.913.675	2.765.914	1.433.506	6.697.456
4	Kab. Ciamis	2.913.675	388.004	825.563	2.029.971

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
15	Kab. Pesisir Barat	-	4.376	61.505	1.274.573
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	-	102.509	32.736.415
X	Provinsi Jawa Barat	23.733.007	1.325.381	415.162	103.889.941
1	Kab. Bandung	42.921.932	-	65.181	54.707.707
2	Kab. Bekasi	-	81.367	62.843	35.953.505
3	Kab. Bogor	13.381.207	4.127.602	61.505	28.467.190
4	Kab. Ciamis	3.903	-	61.505	3.308.946

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
15	Kab. Pesisir Barat	10.307	-	32.560	-
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	-	1.087.797	-
X	Provinsi Jawa Barat	96.262	35.031	551.247	197.775
1	Kab. Bandung	360.607	5.681	188.616	1.698.993
2	Kab. Bekasi	-	-	1.417.451	-
3	Kab. Bogor	145.979	66.200	265.108	529.673
4	Kab. Ciamis	20.478	38.125	80.353	155

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
15	Kab. Pesisir Barat	146	2.051	45.064	4.233.312
IX	Provinsi DKI Jakarta	-	3.417	1.091.214	36.741.214
X	Provinsi Jawa Barat	11.045	3.460	894.820	104.784.761
1	Kab. Bandung	-	2.580	2.256.477	59.877.859
2	Kab. Bekasi	3.221	2.488	1.423.160	40.290.340
3	Kab. Bogor	163.384	2.435	1.172.779	32.553.644
4	Kab. Ciamis	-	2.435	141.546	6.364.167

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
5	Kab. Cianjur	2.913.675	2.423.387	2.062.453	3.717.667
6	Kab. Cirebon	2.913.675	-	173.199	9.722.975
7	Kab. Garut	2.913.675	4.519.993	208.072	3.610.435
8	Kab. Indramayu	2.913.675	2.168.627	821.576	85.282.665
9	Kab. Karawang	2.913.675	-	360.186	26.872.746
10	Kab. Kuningan	2.913.675	42.617	790.778	1.925.982
11	Kab. Majalengka	2.913.675	1.398.428	261.296	9.154.143

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
5	Kab. Cianjur	-	21.251	61.505	8.286.263
6	Kab. Cirebon	-	397.851	65.319	10.359.344
7	Kab. Garut	22.871.700	1.545	61.505	31.273.250
8	Kab. Indramayu	-	-	77.726	88.350.594
9	Kab. Karawang	-	1.492	61.505	27.295.929
10	Kab. Kuningan	-	-	61.505	2.820.882
11	Kab. Majalengka	4.456	-	61.505	10.879.828

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
5	Kab. Cianjur	127.901	95.245	147.158	-
6	Kab. Cirebon	-	7.998	384.868	-
7	Kab. Garut	238.555	9.609	142.913	905.338
8	Kab. Indramayu	114.455	37.941	3.375.772	-
9	Kab. Karawang	-	16.634	1.063.713	-
10	Kab. Kuningan	2.249	36.519	76.237	-
11	Kab. Majalengka	73.806	12.067	362.351	176

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
5	Kab. Cianjur	841	2.435	373.580	11.573.518
6	Kab. Cirebon	15.748	2.586	411.200	13.684.219
7	Kab. Garut	61	2.435	1.298.911	35.485.836
8	Kab. Indramayu	-	3.077	3.531.245	94.795.514
9	Kab. Karawang	59	2.435	1.082.841	31.292.445
10	Kab. Kuningan	-	2.435	117.440	5.851.997
11	Kab. Majalengka	-	2.435	450.835	14.244.338

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
12	Kab. Purwakarta	2.913.675	734.553	927.409	1.711.095
13	Kab. Subang	2.913.675	5.580.010	434.644	44.485.306
14	Kab. Sukabumi	2.913.675	4.406.659	2.662.051	4.008.981
15	Kab. Sumedang	2.913.675	37.744	879.031	1.904.074
16	Kab. Tasikmalaya	2.913.675	744.680	988.410	2.881.936
17	Kota Bandung	2.913.675	-	-	3.410.017
18	Kota Bekasi	2.913.675	-	-	4.734.946

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
12	Kab. Purwakarta	-	105.601	61.505	3.540.163
13	Kab. Subang	-	-	61.505	50.561.465
14	Kab. Sukabumi	15.406.697	-	63.154	26.547.542
15	Kab. Sumedang	2.418	6.450	61.505	2.891.222
16	Kab. Tasikmalaya	339.515	1.881	61.505	5.017.927
17	Kota Bandung	-	-	61.505	3.471.522
18	Kota Bekasi	-	-	61.505	4.796.451

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
12	Kab. Purwakarta	38.768	42.828	67.731	-
13	Kab. Subang	294.501	20.072	1.760.877	-
14	Kab. Sukabumi	232.574	122.935	158.689	609.848
15	Kab. Sumedang	1.992	40.594	75.370	96
16	Kab. Tasikmalaya	39.303	45.645	114.077	13.439
17	Kota Bandung	-	-	134.980	-
18	Kota Bekasi	-	-	187.425	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
12	Kab. Purwakarta	4.180	2.435	155.942	6.609.780
13	Kab. Subang	-	2.435	2.077.885	55.553.025
14	Kab. Sukabumi	-	2.500	1.126.546	30.587.763
15	Kab. Sumedang	255	2.435	120.742	5.925.639
16	Kab. Tasikmalaya	74	2.435	214.973	8.146.575
17	Kota Bandung	-	2.435	137.415	6.522.612
18	Kota Bekasi	-	2.435	189.860	7.899.986

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
19	Kota Bogor	2.913.675	-	-	1.501.471
20	Kota Cirebon	2.913.675	-	-	1.372.467
21	Kota Depok	2.913.675	-	-	2.583.070
22	Kota Sukabumi	2.913.675	-	-	573.140
23	Kota Tasikmalaya	2.913.675	-	29.142	1.086.840
24	Kota Cimahi	2.913.675	-	-	840.802
25	Kota Banjar	2.913.675	108.314	122.872	691.535

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
19	Kota Bogor	202	-	61.505	1.563.178
20	Kota Cirebon	-	-	61.505	1.433.972
21	Kota Depok	-	-	61.505	2.644.575
22	Kota Sukabumi	-	367.772	63.148	1.004.060
23	Kota Tasikmalaya	-	-	61.505	1.177.487
24	Kota Cimahi	-	-	61.505	902.307
25	Kota Banjar	-	-	61.505	984.226

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
19	Kota Bogor	-	-	59.433	8
20	Kota Cirebon	-	-	54.327	-
21	Kota Depok	-	-	102.247	-
22	Kota Sukabumi	-	-	22.687	-
23	Kota Tasikmalaya	-	1.346	43.021	-
24	Kota Cimahi	-	-	33.282	-
25	Kota Banjar	5.717	5.675	27.373	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
19	Kota Bogor	-	2.435	61.876	4.538.729
20	Kota Cirebon	-	2.435	56.762	4.404.409
21	Kota Depok	-	2.435	104.682	5.662.932
22	Kota Sukabumi	14.558	2.500	39.745	3.957.480
23	Kota Tasikmalaya	-	2.435	46.802	4.137.964
24	Kota Cimahi	-	2.435	35.717	3.851.699
25	Kota Banjar	-	2.435	41.200	3.939.101

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
26	Kab. Bandung Barat	2.913.675	1.247.557	775.301	2.335.124
27	Kab. Pangandaran	2.913.675	368.282	719.589	889.310
XI	Provinsi Jawa Tengah	-	5.128.359	9.551.588	30.700.766
1	Kab. Banjarnegara	2.913.675	13.825	952.015	1.617.830
2	Kab. Banyumas	2.913.675	539.983	1.475.513	2.911.866
3	Kab. Batang	2.913.675	3.596.710	536.991	1.413.484
4	Kab. Blora	2.913.675	-	6.066.222	58.921.334

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
26	Kab. Bandung Barat	-	65.495	61.505	4.484.982
27	Kab. Pangandaran	-	-	61.505	2.038.686
XI	Provinsi Jawa Tengah	1.164.616	316.261	670.951	47.532.541
1	Kab. Banjarnegara	2.731.866	-	61.505	5.377.041
2	Kab. Banyumas	28.332	177.536	61.505	5.194.735
3	Kab. Batang	13.034	-	61.505	5.621.724
4	Kab. Blora	-	-	61.505	65.049.061

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
26	Kab. Bandung Barat	65.843	35.804	92.432	-
27	Kab. Pangandaran	19.437	33.231	35.202	-
XI	Provinsi Jawa Tengah	190.034	371.451	1.023.359	38.821
1	Kab. Banjarnegara	640	37.023	53.928	91.062
2	Kab. Banyumas	24.997	57.381	97.062	944
3	Kab. Batang	166.498	20.883	47.116	434
4	Kab. Blora	-	235.909	1.964.044	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
26	Kab. Bandung Barat	2.593	2.435	199.107	7.597.764
27	Kab. Pangandaran	-	2.435	90.305	5.042.666
XI	Provinsi Jawa Tengah	10.542	22.365	1.656.572	49.189.113
1	Kab. Banjarnegara	-	2.051	184.704	8.475.420
2	Kab. Banyumas	5.918	2.051	188.353	8.296.763
3	Kab. Batang	-	2.051	236.982	8.772.381
4	Kab. Blora	-	2.051	2.202.004	70.164.740

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
5	Kab. Boyolali	2.913.675	-	1.334.255	1.642.534
6	Kab. Brebes	2.913.675	326.382	3.157.282	3.120.517
7	Kab. Cilacap	2.913.675	2.511.568	2.721.650	3.365.027
8	Kab. Demak	2.913.675	-	260.463	2.250.148
9	Kab. Grobogan	2.913.675	-	5.989.160	6.030.777
10	Kab. Jepara	2.913.675	1.827.763	609.458	2.045.845
11	Kab. Karanganyar	2.913.675	1.115.917	16.624	1.440.342

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
5	Kab. Boyolali	-	-	61.505	3.038.294
6	Kab. Brebes	12.549	8.304	61.505	6.686.539
7	Kab. Cilacap	-	585.379	82.007	9.265.631
8	Kab. Demak	-	-	61.505	2.572.116
9	Kab. Grobogan	-	345	61.505	12.081.787
10	Kab. Jepara	-	4.530	61.505	4.549.101
11	Kab. Karanganyar	-	-	61.505	2.634.388

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
5	Kab. Boyolali	-	51.888	54.751	-
6	Kab. Brebes	15.109	122.783	104.017	418
7	Kab. Cilacap	116.265	105.842	112.168	-
8	Kab. Demak	-	10.129	75.005	-
9	Kab. Grobogan	-	232.912	201.026	-
10	Kab. Jepara	84.610	23.701	68.195	-
11	Kab. Karanganyar	51.658	646	48.011	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
5	Kab. Boyolali	-	2.051	108.690	6.060.659
6	Kab. Brebes	277	2.051	244.655	9.844.869
7	Kab. Cilacap	19.513	2.734	356.522	12.535.828
8	Kab. Demak	-	2.051	87.185	5.572.976
9	Kab. Grobogan	12	2.051	436.001	15.431.463
10	Kab. Jepara	151	2.051	178.708	7.641.484
11	Kab. Karanganyar	-	2.051	102.366	5.650.429

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
12	Kab. Kebumen	2.913.675	-	1.152.925	2.199.499
13	Kab. Kendal	2.913.675	3.297.773	898.867	2.127.312
14	Kab. Klaten	2.913.675	-	60.240	1.979.831
15	Kab. Kudus	2.913.675	-	70.727	1.690.064
16	Kab. Magelang	2.913.675	30.653	325.021	1.977.380
17	Kab. Pati	2.913.675	1.002.090	1.529.098	2.215.504
18	Kab. Pekalongan	2.913.675	801.476	976.807	1.531.587

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
12	Kab. Kebumen	-	159	61.505	3.414.088
13	Kab. Kendal	5.250	-	61.505	6.390.707
14	Kab. Klaten	-	-	61.505	2.101.576
15	Kab. Kudus	-	-	61.505	1.822.296
16	Kab. Magelang	-	-	61.505	2.394.559
17	Kab. Pati	-	695	82.007	4.829.394
18	Kab. Pekalongan	20.004	-	82.007	3.411.881

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
12	Kab. Kebumen	-	44.836	73.317	-
13	Kab. Kendal	152.660	34.956	70.910	175
14	Kab. Klaten	-	2.343	65.994	-
15	Kab. Kudus	-	2.750	56.335	-
16	Kab. Magelang	1.419	12.640	65.913	-
17	Kab. Pati	46.388	59.465	73.850	-
18	Kab. Pekalongan	37.102	37.987	51.053	667

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
12	Kab. Kebumen	5	2.051	120.209	6.447.972
13	Kab. Kendal	-	2.051	260.752	9.565.134
14	Kab. Klaten	-	2.051	70.388	5.085.639
15	Kab. Kudus	-	2.051	61.136	4.797.107
16	Kab. Magelang	-	2.051	82.023	5.390.257
17	Kab. Pati	23	2.734	182.460	7.925.529
18	Kab. Pekalongan	-	2.734	129.543	6.455.099

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
19	Kab. Pemalang	2.913.675	359.721	2.053.609	2.301.684
20	Kab. Purbalingga	2.913.675	-	292.479	1.527.138
21	Kab. Purworejo	2.913.675	-	725.679	1.330.453
22	Kab. Rembang	2.913.675	-	1.486.464	1.338.267
23	Kab. Semarang	2.913.675	2.149.266	471.022	1.591.142
24	Kab. Sragen	2.913.675	381.779	456.142	1.579.268
25	Kab. Sukoharjo	2.913.675	236.530	6.013	1.399.269

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
19	Kab. Pemalang	-	-	82.007	4.797.021
20	Kab. Purbalingga	-	-	61.505	1.881.122
21	Kab. Purworejo	-	365	61.505	2.118.002
22	Kab. Rembang	-	476.571	68.391	3.369.693
23	Kab. Semarang	13.785	-	61.505	4.286.720
24	Kab. Sragen	-	-	61.505	2.478.694
25	Kab. Sukoharjo	-	-	61.505	1.703.317

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
19	Kab. Pemalang	16.652	79.863	76.723	-
20	Kab. Purbalingga	-	11.374	50.905	-
21	Kab. Purworejo	-	28.221	44.348	-
22	Kab. Rembang	-	57.807	44.609	-
23	Kab. Semarang	99.493	18.318	53.038	460
24	Kab. Sragen	17.673	17.739	52.642	-
25	Kab. Sukoharjo	10.949	234	46.642	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
19	Kab. Pemalang	-	2.734	175.972	7.886.668
20	Kab. Purbalingga	-	2.051	64.330	4.859.127
21	Kab. Purworejo	12	2.051	74.632	5.106.309
22	Kab. Rembang	15.886	2.280	120.582	6.403.950
23	Kab. Semarang	-	2.051	173.360	7.373.755
24	Kab. Sragen	-	2.051	90.105	5.482.474
25	Kab. Sukoharjo	-	2.051	59.876	4.676.868

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
26	Kab. Tegal	2.913.675	71.861	1.416.404	2.351.139
27	Kab. Temanggung	2.913.675	253.381	697.750	1.258.778
28	Kab. Wonogiri	2.913.675	-	769.722	1.808.150
29	Kab. Wonosobo	2.913.675	187.238	952.932	1.439.619
30	Kota Magelang	2.913.675	-	-	274.990
31	Kota Pekalongan	2.913.675	-	-	579.219
32	Kota Salatiga	2.913.675	52.006	-	368.357

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
26	Kab. Tegal	-	9.519	61.505	3.910.428
27	Kab. Temanggung	2.617	-	61.505	2.274.031
28	Kab. Wonogiri	-	1.523	61.505	2.640.900
29	Kab. Wonosobo	1.825.812	-	61.505	4.467.106
30	Kota Magelang	-	-	61.505	336.495
31	Kota Pekalongan	-	-	82.007	661.226
32	Kota Salatiga	465	-	61.505	482.333

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
26	Kab. Tegal	3.327	55.082	78.371	-
27	Kab. Temanggung	11.729	27.135	41.959	87
28	Kab. Wonogiri	-	29.934	60.272	-
29	Kab. Wonosobo	8.668	37.058	47.987	60.860
30	Kota Magelang	-	-	9.166	-
31	Kota Pekalongan	-	-	19.307	-
32	Kota Salatiga	2.407	-	12.279	16

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
26	Kab. Tegal	317	2.051	139.148	6.963.251
27	Kab. Temanggung	-	2.051	82.961	5.270.667
28	Kab. Wonogiri	51	2.051	92.308	5.646.883
29	Kab. Wonosobo	-	2.051	156.624	7.537.405
30	Kota Magelang	-	2.051	11.217	3.261.387
31	Kota Pekalongan	-	2.734	22.041	3.596.942
32	Kota Salatiga	-	2.051	16.753	3.412.761

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
33	Kota Semarang	2.913.675	-	523.458	3.080.169
34	Kota Surakarta	2.913.675	-	-	850.503
35	Kota Tegal	2.913.675	-	-	478.902
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	1.171	-	1.477.899
1	Kab. Bantul	2.913.675	-	-	1.458.038
2	Kab. Gunung Kidul	2.913.675	-	-	1.362.591
3	Kab. Kulon Progo	2.913.675	4.684	-	794.650

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
33	Kota Semarang	-	-	61.505	3.665.132
34	Kota Surakarta	-	-	61.505	912.008
35	Kota Tegal	-	-	61.505	540.407
XII	Provinsi DI Yogyakarta	-	4.032	76.882	1.559.984
1	Kab. Bantul	-	-	61.505	1.519.543
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	61.505	1.424.096
3	Kab. Kulon Progo	-	16.128	61.505	876.967

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
33	Kota Semarang	-	20.357	102.672	-
34	Kota Surakarta	-	-	28.350	-
35	Kota Tegal	-	-	15.963	-
XII	Provinsi DI Yogyakarta	43	-	49.263	-
1	Kab. Bantul	-	-	48.601	-
2	Kab. Gunung Kidul	-	-	45.420	-
3	Kab. Kulon Progo	217	-	26.488	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
33	Kota Semarang	-	2.051	125.080	6.703.887
34	Kota Surakarta	-	2.051	30.401	3.856.084
35	Kota Tegal	-	2.051	18.014	3.472.096
XII	Provinsi DI Yogyakarta	134	2.563	52.003	1.611.987
1	Kab. Bantul	-	2.051	50.652	4.483.870
2	Kab. Gunung Kidul	-	2.051	47.471	4.385.242
3	Kab. Kulon Progo	538	2.051	29.294	3.819.936

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
4	Kab. Sleman	2.913.675	-	-	1.653.377
5	Kota Yogyakarta	2.913.675	-	-	642.939
XIII	Provinsi Jawa Timur	-	6.267.465	12.112.458	79.783.527
1	Kab. Bangkalan	2.913.675	-	145.672	5.152.820
2	Kab. Banyuwangi	2.913.675	5.542.472	3.844.508	3.121.555
3	Kab. Blitar	2.913.675	1.075.723	1.138.876	1.991.821
4	Kab. Bojonegoro	2.913.675	-	5.745.668	189.010.467

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
4	Kab. Sleman	-	-	61.505	1.714.882
5	Kota Yogyakarta	-	-	61.505	704.444
XIII	Provinsi Jawa Timur	1.060	1.980.749	584.302	100.729.561
1	Kab. Bangkalan	-	-	61.505	5.359.997
2	Kab. Banyuwangi	-	4.963.320	61.505	17.533.360
3	Kab. Blitar	-	401	61.505	4.268.326
4	Kab. Bojonegoro	-	-	61.505	194.817.640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
4	Kab. Sleman	-	-	55.113	-
5	Kota Yogyakarta	-	-	21.431	-
XIII	Provinsi Jawa Timur	174.096	336.457	2.216.209	29
1	Kab. Bangkalan	-	6.070	178.917	-
2	Kab. Banyuwangi	269.426	160.188	108.387	-
3	Kab. Blitar	52.292	47.453	69.160	-
4	Kab. Bojonegoro	-	239.403	6.562.863	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
4	Kab. Sleman	-	2.051	57.164	4.685.721
5	Kota Yogyakarta	-	2.051	23.482	3.641.601
XIII	Provinsi Jawa Timur	55.021	16.231	2.798.043	103.527.604
1	Kab. Bangkalan	-	2.135	187.122	8.460.794
2	Kab. Banyuwangi	172.337	2.135	712.473	21.159.508
3	Kab. Blitar	14	2.135	171.054	7.353.055
4	Kab. Bojonegoro	-	2.135	6.804.401	204.535.716

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
5	Kab. Bondowoso	2.913.675	1.259.547	1.328.528	1.364.573
6	Kab. Gresik	2.913.675	-	151.918	23.396.588
7	Kab. Jember	2.913.675	5.626.542	1.338.639	3.917.222
8	Kab. Jombang	2.913.675	29.734	1.133.884	2.510.009
9	Kab. Kediri	2.913.675	3.322.057	793.030	2.565.171
10	Kab. Lamongan	2.913.675	-	2.843.591	3.256.086
11	Kab. Lumajang	2.913.675	2.534.808	952.260	1.867.891

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
5	Kab. Bondowoso	-	-	61.505	4.014.153
6	Kab. Gresik	-	33.288	82.007	23.663.801
7	Kab. Jember	-	-	61.709	10.944.112
8	Kab. Jombang	-	28.802	61.505	3.763.934
9	Kab. Kediri	-	-	61.505	6.741.763
10	Kab. Lamongan	-	-	61.505	6.161.182
11	Kab. Lumajang	-	-	76.176	5.431.135

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
5	Kab. Bondowoso	61.228	55.355	47.381	-
6	Kab. Gresik	-	6.330	812.382	-
7	Kab. Jember	273.512	55.777	136.015	-
8	Kab. Jombang	1.445	47.246	87.153	-
9	Kab. Kediri	161.489	33.043	89.068	-
10	Kab. Lamongan	-	118.483	113.059	-
11	Kab. Lumajang	123.220	39.677	64.857	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
5	Kab. Bondowoso	-	2.135	166.099	7.093.927
6	Kab. Gresik	1.156	2.847	822.715	27.400.191
7	Kab. Jember	-	2.143	467.447	14.325.234
8	Kab. Jombang	1.000	2.135	138.979	6.816.588
9	Kab. Kediri	-	2.135	285.735	9.941.173
10	Kab. Lamongan	-	2.135	233.677	9.308.534
11	Kab. Lumajang	-	2.645	230.399	8.575.209

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
12	Kab. Madiun	2.913.675	242.642	3.146.983	1.282.673
13	Kab. Magetan	2.913.675	-	259.330	1.171.422
14	Kab. Malang	2.913.675	3.253.719	4.949.395	3.877.375
15	Kab. Mojokerto	2.913.675	57.574	1.011.926	2.361.951
16	Kab. Nganjuk	2.913.675	-	2.241.538	1.957.869
17	Kab. Ngawi	2.913.675	549.387	3.787.777	1.582.377
18	Kab. Pacitan	2.913.675	-	111.899	1.181.242

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
12	Kab. Madiun	-	-	61.505	4.733.803
13	Kab. Magetan	-	-	61.505	1.492.257
14	Kab. Malang	-	43.421	63.629	12.187.539
15	Kab. Mojokerto	59	20.051	61.505	3.513.066
16	Kab. Nganjuk	-	-	61.505	4.260.912
17	Kab. Ngawi	-	-	61.505	5.981.046
18	Kab. Pacitan	-	4.415	63.596	1.361.152

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
12	Kab. Madiun	11.795	131.124	44.537	-
13	Kab. Magetan	-	10.805	40.674	-
14	Kab. Malang	158.167	206.225	134.631	-
15	Kab. Mojokerto	2.799	42.164	82.012	2
16	Kab. Nganjuk	-	93.397	67.982	-
17	Kab. Ngawi	26.706	157.824	54.944	-
18	Kab. Pacitan	-	4.663	41.015	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
12	Kab. Madiun	-	2.135	189.591	7.837.069
13	Kab. Magetan	-	2.135	53.614	4.459.546
14	Kab. Malang	1.508	2.209	502.740	15.603.954
15	Kab. Mojokerto	696	2.135	129.808	6.556.549
16	Kab. Nganjuk	-	2.135	163.514	7.338.101
17	Kab. Ngawi	-	2.135	241.609	9.136.330
18	Kab. Pacitan	153	2.208	48.039	4.322.866

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
19	Kab. Pamekasan	2.913.675	-	30.276	2.129.208
20	Kab. Pasuruan	2.913.675	213.681	602.442	3.163.628
21	Kab. Ponorogo	2.913.675	10.015	2.715.526	1.707.214
22	Kab. Probolinggo	2.913.675	322.483	1.111.295	2.231.930
23	Kab. Sampang	2.913.675	-	32.615	2.508.634
24	Kab. Sidoarjo	2.913.675	-	-	14.418.742
25	Kab. Situbondo	2.913.675	829.997	1.476.067	1.454.742

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
19	Kab. Pamekasan	-	-	61.505	2.220.989
20	Kab. Pasuruan	-	35.564	61.505	4.076.820
21	Kab. Ponorogo	4.161	1.620	61.505	4.500.041
22	Kab. Probolinggo	-	-	76.176	3.741.884
23	Kab. Sampang	-	-	61.505	2.602.754
24	Kab. Sidoarjo	-	-	61.505	14.480.247
25	Kab. Situbondo	-	-	61.505	3.822.311

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
19	Kab. Pamekasan	-	1.261	73.931	-
20	Kab. Pasuruan	10.387	25.102	109.848	-
21	Kab. Ponorogo	487	113.147	59.278	144
22	Kab. Probolinggo	15.676	46.304	77.498	-
23	Kab. Sampang	-	1.359	87.105	-
24	Kab. Sidoarjo	-	-	500.651	-
25	Kab. Situbondo	40.347	61.503	50.512	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
19	Kab. Pamekasan	-	2.135	77.327	5.211.991
20	Kab. Pasuruan	1.235	2.135	148.707	7.139.202
21	Kab. Ponorogo	56	2.135	175.247	7.588.963
22	Kab. Probolinggo	-	2.645	142.123	6.797.682
23	Kab. Sampang	-	2.135	90.599	5.607.028
24	Kab. Sidoarjo	-	2.135	502.786	17.896.708
25	Kab. Situbondo	-	2.135	154.497	6.890.483

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
26	Kab. Sumenep	2.913.675	-	841.458	8.242.064
27	Kab. Trenggalek	2.913.675	29.063	2.118.819	1.359.374
28	Kab. Tuban	2.913.675	-	5.520.799	19.896.853
29	Kab. Tulungagung	2.913.675	136.293	1.481.459	1.747.148
30	Kota Blitar	2.913.675	-	8.110	355.277
31	Kota Kediri	2.913.675	-	66.209	498.409
32	Kota Madiun	2.913.675	-	-	401.411

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
26	Kab. Sumenep	-	-	61.505	9.145.027
27	Kab. Trenggalek	-	1.163	61.505	3.569.924
28	Kab. Tuban	-	2.780.788	61.505	28.259.945
29	Kab. Tulungagung	-	8.461	61.505	3.434.866
30	Kota Blitar	-	-	61.505	424.892
31	Kota Kediri	-	-	61.505	626.123
32	Kota Madiun	-	-	61.505	462.916

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
26	Kab. Sumenep	-	35.061	286.183	-
27	Kab. Trenggalek	1.413	88.284	47.200	-
28	Kab. Tuban	-	230.033	690.863	-
29	Kab. Tulungagung	6.625	61.727	60.665	-
30	Kota Blitar	-	338	12.336	-
31	Kota Kediri	-	2.759	17.306	-
32	Kota Madiun	-	-	13.938	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
26	Kab. Sumenep	-	2.135	323.379	12.382.081
27	Kab. Trenggalek	40	2.135	139.072	6.622.671
28	Kab. Tuban	96.555	2.135	1.019.586	32.193.206
29	Kab. Tulungagung	294	2.135	131.446	6.479.987
30	Kota Blitar	-	2.135	14.809	3.353.376
31	Kota Kediri	-	2.135	22.200	3.561.998
32	Kota Madiun	-	2.135	16.073	3.392.664

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
33	Kota Malang	2.913.675	-	-	1.263.681
34	Kota Mojokerto	2.913.675	-	-	376.682
35	Kota Pasuruan	2.913.675	-	-	480.307
36	Kota Probolinggo	2.913.675	15.912	-	670.974
37	Kota Surabaya	2.913.675	-	-	4.142.174
38	Kota Batu	2.913.675	-	393.224	516.546
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	28.397.663	4.457.484	6.331.024

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
33	Kota Malang	-	-	61.505	1.325.186
34	Kota Mojokerto	-	286	61.505	438.473
35	Kota Pasuruan	-	-	61.505	541.812
36	Kota Probolinggo	-	-	82.007	768.893
37	Kota Surabaya	-	-	66.716	4.208.890
38	Kota Batu	-	-	61.505	971.275
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	-	1.134.054	287.026	40.607.251

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
33	Kota Malang	-	-	43.878	-
34	Kota Mojokerto	-	-	13.079	-
35	Kota Pasuruan	-	-	16.677	-
36	Kota Probolinggo	773	-	23.298	-
37	Kota Surabaya	-	-	143.825	-
38	Kota Batu	-	16.384	17.936	-
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	788.824	123.819	175.862	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
33	Kota Malang	-	2.135	46.013	4.284.874
34	Kota Mojokerto	10	2.135	15.224	3.367.372
35	Kota Pasuruan	-	2.135	18.812	3.474.299
36	Kota Probolinggo	-	2.847	26.918	3.709.486
37	Kota Surabaya	-	2.317	146.142	7.268.707
38	Kota Batu	-	2.135	36.455	3.921.405
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	31.502	7.973	1.127.980	41.735.231

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Bengkayang	2.913.675	6.692.507	-	1.305.081
2	Kab. Landak	2.913.675	8.723.723	188.729	1.809.439
3	Kab. Kapuas Hulu	2.913.675	6.928.123	950.835	3.311.235
4	Kab. Ketapang	2.913.675	36.736.465	7.398.999	3.646.255
5	Kab. Mempawah	2.913.675	1.273.144	134.057	905.423
6	Kab. Sambas	2.913.675	7.011.779	67.362	1.841.739
7	Kab. Sanggau	2.913.675	11.253.880	1.582.060	2.106.366

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
1	Kab. Bengkayang	-	9.437	82.007	8.089.032
2	Kab. Landak	-	21.738	61.505	10.805.134
3	Kab. Kapuas Hulu	-	853	61.505	11.252.551
4	Kab. Ketapang	-	2.688.995	61.505	50.532.219
5	Kab. Mempawah	-	40.297	61.505	2.414.426
6	Kab. Sambas	-	1.357	82.007	9.004.244
7	Kab. Sanggau	-	1.752.139	61.505	16.755.950

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
1	Kab. Bengkayang	325.330	-	45.315	-
2	Kab. Landak	424.070	7.864	62.828	-
3	Kab. Kapuas Hulu	336.784	39.618	114.973	-
4	Kab. Ketapang	1.785.800	308.292	126.606	-
5	Kab. Mempawah	61.889	5.586	31.438	-
6	Kab. Sambas	340.850	2.807	63.949	-
7	Kab. Sanggau	547.064	65.919	73.138	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
1	Kab. Bengkayang	328	2.847	373.820	11.376.527
2	Kab. Landak	755	2.135	497.652	14.216.461
3	Kab. Kapuas Hulu	30	2.135	493.540	14.659.766
4	Kab. Ketapang	93.368	2.135	2.316.201	55.762.095
5	Kab. Mempawah	1.399	2.135	102.447	5.430.548
6	Kab. Sambas	47	2.847	410.500	12.328.419
7	Kab. Sanggau	60.838	2.135	749.094	20.418.719

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
8	Kab. Sintang	2.913.675	14.119.213	3.061.446	2.695.669
9	Kota Pontianak	2.913.675	-	-	1.129.780
10	Kota Singkawang	2.913.675	10.974	-	602.526
11	Kab. Sekadau	2.913.675	5.267.082	690.997	1.210.141
12	Kab. Melawi	2.913.675	3.730.278	1.343.457	1.724.362
13	Kab. Kayong Utara	2.913.675	2.823.973	33.410	1.357.873
14	Kab. Kubu Raya	2.913.675	8.290.315	1.561.850	1.678.205

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
8	Kab. Sintang	-	-	61.505	19.937.833
9	Kota Pontianak	-	-	82.007	1.211.787
10	Kota Singkawang	-	623	82.007	696.130
11	Kab. Sekadau	-	-	61.505	7.229.725
12	Kab. Melawi	-	62	61.505	6.859.664
13	Kab. Kayong Utara	-	-	61.505	4.276.761
14	Kab. Kubu Raya	-	20.487	61.505	11.612.362

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
8	Kab. Sintang	686.351	127.560	93.600	-
9	Kota Pontianak	-	-	39.228	-
10	Kota Singkawang	533	-	20.921	-
11	Kab. Sekadau	256.039	28.792	42.019	-
12	Kab. Melawi	181.333	55.977	59.874	-
13	Kab. Kayong Utara	137.276	1.392	47.148	-
14	Kab. Kubu Raya	403.001	65.077	58.271	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN / PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
8	Kab. Sintang	-	2.135	909.646	23.761.154
9	Kota Pontianak	-	2.847	42.075	4.167.537
10	Kota Singkawang	22	2.847	24.323	3.634.128
11	Kab. Sekadau	-	2.135	328.985	10.472.385
12	Kab. Melawi	2	2.135	299.321	10.072.660
13	Kab. Kayong Utara	-	2.135	187.951	7.378.387
14	Kab. Kubu Raya	711	2.135	529.195	15.055.232

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	32.673.601	7.010.504	7.138.368
1	Kab. Barito Selatan	2.913.675	315.765	164.779	1.835.049
2	Kab. Barito Utara	2.913.675	2.290.339	148.744	5.798.596
3	Kab. Kapuas	2.913.675	9.282.169	2.725.780	2.268.192
4	Kab. Kotawaringin Barat	2.913.675	17.703.139	3.586.961	1.543.567
5	Kab. Kotawaringin Timur	2.913.675	41.470.590	2.119.824	2.301.293
6	Kota Palangkaraya	2.913.675	182.611	-	756.001

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	5.462.521	215.270	52.500.264
1	Kab. Barito Selatan	-	581.409	61.505	2.958.507
2	Kab. Barito Utara	-	10.994.574	61.505	19.293.758
3	Kab. Kapuas	-	3.751.285	61.505	18.088.931
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	12.644	61.505	22.907.816
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	286.682	61.505	46.239.894
6	Kota Palangkaraya	-	2.637	61.505	1.002.754

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	2.178.240	408.946	356.918	-
1	Kab. Barito Selatan	12.280	5.607	53.522	-
2	Kab. Barito Utara	89.069	5.061	169.126	-
3	Kab. Kapuas	360.973	92.752	66.156	-
4	Kab. Kotawaringin Barat	688.455	122.056	45.021	-
5	Kab. Kotawaringin Timur	1.612.745	72.133	67.121	-
6	Kota Palangkaraya	7.102	-	22.050	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	273.126	10.763	3.227.993	55.728.257
1	Kab. Barito Selatan	16.958	1.794	90.161	5.962.343
2	Kab. Barito Utara	320.675	1.794	585.725	22.793.158
3	Kab. Kapuas	109.412	1.794	631.087	21.633.693
4	Kab. Kotawaringin Barat	369	1.794	857.695	26.679.186
5	Kab. Kotawaringin Timur	8.362	1.794	1.762.155	50.915.724
6	Kota Palangkaraya	77	1.794	31.023	3.947.452

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
7	Kab. Katingan	2.913.675	5.577.889	4.307.053	2.094.761
8	Kab. Seruyan	2.913.675	19.995.787	5.819.120	2.153.288
9	Kab. Sukamara	2.913.675	4.126.063	-	1.064.504
10	Kab. Lamandau	2.913.675	9.168.440	2.758.819	1.190.723
11	Kab. Gunung Mas	2.913.675	6.094.686	3.051.922	1.558.499
12	Kab. Pulang Pisau	2.913.675	3.683.271	-	1.434.930
13	Kab. Murung Raya	2.913.675	17.234	2.185.221	2.700.257

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
7	Kab. Katingan	-	222.165	61.505	12.263.373
8	Kab. Seruyan	-	15.924	61.505	28.045.624
9	Kab. Sukamara	-	-	61.505	5.252.072
10	Kab. Lamandau	-	297.317	61.505	13.476.804
11	Kab. Gunung Mas	-	92.936	61.505	10.859.548
12	Kab. Pulang Pisau	-	-	61.505	5.179.706
13	Kab. Murung Raya	-	5.013.919	61.505	9.978.136

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
7	Kab. Katingan	216.918	146.559	61.097	-
8	Kab. Seruyan	777.614	198.012	62.804	-
9	Kab. Sukamara	160.458	-	31.048	-
10	Kab. Lamandau	356.550	93.877	34.729	-
11	Kab. Gunung Mas	237.016	103.850	45.456	-
12	Kab. Pulang Pisau	143.238	-	41.852	-
13	Kab. Murung Raya	670	74.358	78.758	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
7	Kab. Katingan	6.480	1.794	432.848	15.609.896
8	Kab. Seruyan	464	1.794	1.040.688	31.999.987
9	Kab. Sukamara	-	1.794	193.300	8.359.047
10	Kab. Lamandau	8.672	1.794	495.622	16.886.101
11	Kab. Gunung Mas	2.711	1.794	390.827	14.164.050
12	Kab. Pulang Pisau	-	1.794	186.884	8.280.265
13	Kab. Murung Raya	146.239	1.794	301.819	13.193.630

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
14	Kab. Barito Timur	2.913.675	3.380.491	-	1.853.814
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-	9.697.783	663.548	15.204.884
1	Kab. Banjar	2.913.675	3.632.779	286.536	2.058.618
2	Kab. Barito Kuala	2.913.675	2.862.126	-	1.352.123
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.913.675	1.733.774	28.583	984.688
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.913.675	-	-	902.559
5	Kab. Hulu Sungai Utara	2.913.675	304.963	-	957.634

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
14	Kab. Barito Timur	-	578.593	61.505	5.874.403
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	-	9.953.119	199.893	35.719.227
1	Kab. Banjar	-	2.617.360	61.505	8.656.798
2	Kab. Barito Kuala	-	-	61.505	4.275.754
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	5.194.091	61.505	8.002.641
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	2.048	61.505	966.112
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	61.505	1.324.102

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
14	Kab. Barito Timur	131.464	-	54.070	-
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	431.013	25.805	506.829	-
1	Kab. Banjar	161.457	11.143	68.621	-
2	Kab. Barito Kuala	127.206	-	45.071	-
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	77.057	1.112	32.823	-
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	30.085	-
5	Kab. Hulu Sungai Utara	13.554	-	31.921	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
14	Kab. Barito Timur	16.876	1.794	204.204	8.992.282
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	331.771	6.663	1.302.081	37.021.308
1	Kab. Banjar	87.245	2.051	330.517	11.900.990
2	Kab. Barito Kuala	-	2.051	174.328	7.363.757
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	173.136	2.051	286.179	11.202.495
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	68	2.051	32.204	3.911.991
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	2.051	47.526	4.285.303

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
6	Kab. Kotabaru	2.913.675	12.335.141	521.117	1.736.794
7	Kab. Tabalong	2.913.675	714.603	32.682	42.398.865
8	Kab. Tanah Laut	2.913.675	6.400.624	479.845	1.167.143
9	Kab. Tapin	2.913.675	5.406.417	20.610	1.175.436
10	Kota Banjarbaru	2.913.675	-	-	590.382
11	Kota Banjarmasin	2.913.675	-	-	1.079.067
12	Kab. Balangan	2.913.675	-	-	5.257.413

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
6	Kab. Kotabaru	-	3.076.692	82.007	17.751.751
7	Kab. Tabalong	-	1.987.742	61.505	45.195.397
8	Kab. Tanah Laut	-	2.655.306	61.505	10.764.423
9	Kab. Tapin	-	5.608.799	61.505	12.272.767
10	Kota Banjarbaru	-	1.325	61.505	653.212
11	Kota Banjarmasin	-	-	61.505	1.140.572
12	Kab. Balangan	-	3.733.965	61.505	9.052.883

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
6	Kab. Kotabaru	548.228	20.266	57.893	-
7	Kab. Tabalong	31.760	1.271	1.413.296	-
8	Kab. Tanah Laut	284.472	18.661	38.905	-
9	Kab. Tapin	240.285	801	39.181	-
10	Kota Banjarbaru	-	-	19.679	-
11	Kota Banjarmasin	-	-	35.969	-
12	Kab. Balangan	-	-	175.247	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
6	Kab. Kotabaru	102.556	2.734	731.677	21.397.103
7	Kab. Tabalong	66.258	2.051	1.514.636	49.623.708
8	Kab. Tanah Laut	88.510	2.051	432.599	14.110.697
9	Kab. Tapin	186.960	2.051	469.278	15.655.720
10	Kota Banjarbaru	44	2.051	21.774	3.588.661
11	Kota Banjarmasin	-	2.051	38.020	4.092.267
12	Kab. Balangan	124.465	2.051	301.763	12.268.321

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
13	Kab. Tanah Bumbu	2.913.675	5.400.705	766.258	1.158.813
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-	26.272.153	8.243.786	163.865.440
1	Kab. Berau	2.913.675	11.898.557	9.661.755	3.234.542
2	Kab. Kutai Kartanegara	2.913.675	19.130.591	6.470.563	532.316.416
3	Kab. Kutai Barat	2.913.675	13.399.731	3.260.029	2.596.580
4	Kab. Kutai Timur	2.913.675	40.400.395	7.193.274	39.638.944
5	Kab. Paser	2.913.675	11.822.278	1.232.571	9.405.623

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
13	Kab. Tanah Bumbu	-	14.935.146	61.505	22.322.427
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	-	13.172.351	153.764	211.707.494
1	Kab. Berau	-	3.828.822	61.505	28.685.181
2	Kab. Kutai Kartanegara	-	22.968.690	61.505	580.947.765
3	Kab. Kutai Barat	-	3.755.461	61.505	23.073.306
4	Kab. Kutai Timur	-	15.747.955	61.505	103.042.073
5	Kab. Paser	-	3.700.772	61.505	26.222.749

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
13	Kab. Tanah Bumbu	240.031	29.799	38.627	-
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	729.782	228.994	4.551.818	-
1	Kab. Berau	578.402	402.573	112.310	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	929.959	269.607	18.483.209	-
3	Kab. Kutai Barat	651.376	135.835	90.159	-
4	Kab. Kutai Timur	1.963.908	299.720	1.376.352	-
5	Kab. Paser	574.694	51.357	326.584	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
13	Kab. Tanah Bumbu	497.838	2.051	808.346	26.044.448
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	365.899	4.271	5.880.764	217.588.258
1	Kab. Berau	132.945	2.135	1.228.365	32.827.221
2	Kab. Kutai Kartanegara	797.524	2.135	20.482.434	604.343.874
3	Kab. Kutai Barat	130.398	2.135	1.009.903	26.996.884
4	Kab. Kutai Timur	546.804	2.135	4.188.919	110.144.667
5	Kab. Paser	128.499	2.135	1.083.269	30.219.693

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
6	Kota Balikpapan	2.913.675	-	30.535	2.240.206
7	Kota Bontang	2.913.675	-	-	22.581.294
8	Kota Samarinda	2.913.675	-	-	14.513.662
9	Kab. Penajam Paser Utara	2.913.675	3.555.599	2.837.479	26.920.750
10	Kab. Mahakam Ulu	2.913.675	1.634.507	2.802.551	2.013.745
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	-	59.788	21.996	2.859.776
1	Kab. Bolaang Mongondow	2.913.675	59.329	-	880.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
6	Kota Balikpapan	-	12.162	61.505	2.344.408
7	Kota Bontang	-	232	61.505	22.643.031
8	Kota Samarinda	-	2.593.159	61.505	17.168.326
9	Kab. Penajam Paser Utara	-	27.475	61.505	33.402.808
10	Kab. Mahakam Ulu	-	54.674	61.505	6.566.982
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	2.140.373	2.378.032	281.913	7.741.878
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	799.992	61.505	1.801.789

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
6	Kota Balikpapan	-	1.272	77.785	-
7	Kota Bontang	-	-	784.073	-
8	Kota Samarinda	-	-	503.947	-
9	Kab. Penajam Paser Utara	172.842	118.228	934.748	-
10	Kab. Mahakam Ulu	79.455	116.773	69.922	-
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	3.322	1.222	119.157	89.182
1	Kab. Bolaang Mongondow	2.472	-	27.530	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
6	Kota Balikpapan	422	2.135	81.614	5.339.697
7	Kota Bontang	8	2.135	786.216	26.342.922
8	Kota Samarinda	90.040	2.135	596.122	20.678.123
9	Kab. Penajam Paser Utara	954	2.135	1.228.907	37.545.390
10	Kab. Mahakam Ulu	1.898	2.135	270.183	9.750.840
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	99.085	11.746	323.714	8.065.592
1	Kab. Bolaang Mongondow	25.000	1.922	56.924	4.772.388

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
2	Kab. Minahasa	2.913.675	35.739	-	887.424
3	Kab. Sangihe	2.913.675	-	-	617.231
4	Kota Bitung	2.913.675	-	-	599.952
5	Kota Manado	2.913.675	-	-	785.285
6	Kab. Kepulauan Talaud	2.913.675	-	-	896.795
7	Kab. Minahasa Selatan	2.913.675	80.167	-	857.958
8	Kota Tomohon	2.913.675	-	-	655.672

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
2	Kab. Minahasa	4.503.473	-	65.985	5.492.621
3	Kab. Sangihe	-	40.584	61.505	719.320
4	Kota Bitung	-	6.531.630	82.007	7.213.589
5	Kota Manado	3.191	-	82.007	870.483
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	61.505	958.300
7	Kab. Minahasa Selatan	-	41.779	61.505	1.041.409
8	Kota Tomohon	3.093.997	682	61.505	3.811.856

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
2	Kab. Minahasa	1.489	-	27.732	140.734
3	Kab. Sangihe	-	-	19.288	-
4	Kota Bitung	-	-	18.749	-
5	Kota Manado	-	-	24.540	100
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	28.025	-
7	Kab. Minahasa Selatan	3.340	-	26.811	-
8	Kota Tomohon	-	-	20.490	96.687

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
2	Kab. Minahasa	-	2.062	172.017	8.578.313
3	Kab. Sangihe	1.268	1.922	22.478	3.655.473
4	Kota Bitung	204.113	2.563	225.425	10.352.689
5	Kota Manado	-	2.563	27.203	3.811.361
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	1.922	29.947	3.901.922
7	Kab. Minahasa Selatan	1.306	1.922	33.379	3.988.463
8	Kota Tomohon	21	1.922	119.120	6.844.651

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
9	Kab. Minahasa Utara	2.913.675	47.518	-	745.766
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2.913.675	-	-	685.395
11	Kota Kotamobagu	2.913.675	-	-	489.092
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.913.675	6.569	-	886.382
13	Kab. Minahasa Tenggara	2.913.675	-	-	822.225
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.913.675	-	-	825.651
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.913.675	-	87.982	803.315

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
9	Kab. Minahasa Utara	720.623	1.322.636	65.985	2.902.528
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	-	61.644	747.039
11	Kota Kotamobagu	-	-	61.505	550.597
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	61.505	954.456
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	3.919	61.505	887.649
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	3.424	61.505	890.580
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	767.484	61.505	1.720.286

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
9	Kab. Minahasa Utara	1.980	-	23.305	22.520
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	-	21.419	-
11	Kota Kotamobagu	-	-	15.284	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	274	-	27.699	-
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	25.695	-
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	25.802	-
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	3.055	25.104	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
9	Kab. Minahasa Utara	41.332	2.062	91.199	5.907.402
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	1.926	23.345	3.684.059
11	Kota Kotamobagu	-	1.922	17.206	3.481.478
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	1.922	29.895	3.898.026
13	Kab. Minahasa Tenggara	122	1.922	27.739	3.829.063
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	107	1.922	27.831	3.832.086
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	23.984	1.922	54.065	4.688.026

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	-	2.195.140	67.775	22.371.084
1	Kab. Banggai	2.913.675	967.352	271.100	56.860.195
2	Kab. Banggai Kepulauan	2.913.675	2.825	-	998.387
3	Kab. Buol	2.913.675	2.531.715	-	951.772
4	Kab. Toli-Toli	2.913.675	132.631	-	1.042.615
5	Kab. Donggala	2.913.675	738.860	-	1.371.045
6	Kab. Morowali	2.913.675	724.914	-	1.127.559

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	-	790.199	199.893	25.624.091
1	Kab. Banggai	-	14.504	61.505	58.174.656
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	61.505	1.062.717
3	Kab. Buol	-	5.913	61.505	3.550.905
4	Kab. Toli-Toli	-	21.749	61.505	1.258.500
5	Kab. Donggala	-	53.852	61.505	2.225.262
6	Kab. Morowali	-	2.213.522	61.505	4.127.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	97.562	2.636	745.703	-
1	Kab. Banggai	42.993	10.543	1.895.340	-
2	Kab. Banggai Kepulauan	126	-	33.280	-
3	Kab. Buol	112.521	-	31.726	-
4	Kab. Toli-Toli	5.895	-	34.754	-
5	Kab. Donggala	32.838	-	45.701	-
6	Kab. Morowali	32.218	-	37.585	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	26.340	6.663	878.904	26.502.995
1	Kab. Banggai	483	2.051	1.951.410	63.039.741
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	2.051	35.457	4.011.849
3	Kab. Buol	197	2.051	146.495	6.611.075
4	Kab. Toli-Toli	725	2.051	43.425	4.215.600
5	Kab. Donggala	1.795	2.051	82.385	5.221.322
6	Kab. Morowali	73.784	2.051	145.638	7.186.813

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
7	Kab. Poso	2.913.675	430.382	-	1.525.743
8	Kota Palu	2.913.675	-	-	653.524
9	Kab. Parigi Moutong	2.913.675	97.931	-	1.507.799
10	Kab. Tojo Una Una	2.913.675	2.540	-	1.303.757
11	Kab. Sigi	2.913.675	-	-	1.091.696
12	Kab. Banggai Laut	2.913.675	-	-	829.920
13	Kab. Morowali Utara	2.913.675	2.900.378	-	2.455.261

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
7	Kab. Poso	-	-	61.505	2.017.630
8	Kota Palu	-	89.493	61.505	804.522
9	Kab. Parigi Moutong	-	10.494	61.505	1.677.729
10	Kab. Tojo Una Una	-	-	61.505	1.367.802
11	Kab. Sigi	-	9.824	61.505	1.163.025
12	Kab. Banggai Laut	-	-	61.505	891.425
13	Kab. Morowali Utara	-	738.173	61.505	6.155.317

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
7	Kab. Poso	19.128	-	50.858	-
8	Kota Palu	-	-	21.784	-
9	Kab. Parigi Moutong	4.352	-	50.260	-
10	Kab. Tojo Una Una	113	-	43.459	-
11	Kab. Sigi	-	-	36.390	-
12	Kab. Banggai Laut	-	-	27.664	-
13	Kab. Morowali Utara	128.906	-	81.842	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
7	Kab. Poso	-	2.051	72.037	5.003.342
8	Kota Palu	2.983	2.051	26.818	3.745.015
9	Kab. Parigi Moutong	350	2.051	57.013	4.648.417
10	Kab. Tojo Una Una	-	2.051	45.623	4.327.100
11	Kab. Sigi	328	2.051	38.769	4.115.469
12	Kab. Banggai Laut	-	2.051	29.715	3.834.815
13	Kab. Morowali Utara	24.606	2.051	237.405	9.306.397

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	1.513.290	32.563	10.092.833
1	Kab. Bantaeng	2.913.675	-	-	728.292
2	Kab. Barru	2.913.675	-	-	725.059
3	Kab. Bone	2.913.675	1.563.913	-	2.324.582
4	Kab. Bulukumba	2.913.675	1.186.206	-	1.047.753
5	Kab. Enrekang	2.913.675	101.619	-	975.864
6	Kab. Gowa	2.913.675	358.987	130.251	1.476.724

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	1.444.869	369.033	13.452.588
1	Kab. Bantaeng	-	-	61.505	789.797
2	Kab. Barru	-	-	61.505	786.564
3	Kab. Bone	-	6.255	61.505	3.956.255
4	Kab. Bulukumba	-	-	61.505	2.295.464
5	Kab. Enrekang	-	-	61.505	1.138.988
6	Kab. Gowa	-	2.930	61.505	2.030.397

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	33.629	633	168.214	-
1	Kab. Bantaeng	-	-	27.311	-
2	Kab. Barru	-	-	27.190	-
3	Kab. Bone	78.196	-	87.172	-
4	Kab. Bulukumba	59.310	-	39.291	-
5	Kab. Enrekang	5.081	-	36.595	-
6	Kab. Gowa	17.949	5.698	55.377	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	24.081	6.151	232.708	13.685.296
1	Kab. Bantaeng	-	2.306	29.617	3.733.089
2	Kab. Barru	-	2.306	29.496	3.729.735
3	Kab. Bone	235	2.306	167.909	7.037.839
4	Kab. Bulukumba	-	2.306	100.907	5.310.046
5	Kab. Enrekang	-	2.306	43.982	4.096.645
6	Kab. Gowa	110	2.306	81.440	5.025.512

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
7	Kab. Jeneponto	2.913.675	132.171	-	1.029.150
8	Kab. Luwu	2.913.675	-	-	1.082.850
9	Kab. Luwu Utara	2.913.675	179.313	-	1.544.450
10	Kab. Maros	2.913.675	-	-	897.900
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.913.675	-	-	1.243.666
12	Kota Palopo	2.913.675	-	-	486.130
13	Kab. Luwu Timur	2.913.675	538.057	-	1.209.228

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
7	Kab. Jeneponto	-	549	61.505	1.223.375
8	Kab. Luwu	-	6.457	61.505	1.150.812
9	Kab. Luwu Utara	-	9.184	61.505	1.794.452
10	Kab. Maros	-	612.612	61.505	1.572.017
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	1.123.320	61.505	2.428.491
12	Kota Palopo	-	-	61.505	547.635
13	Kab. Luwu Timur	-	4.011.683	61.505	5.820.473

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
7	Kab. Jeneponto	6.609	-	38.593	-
8	Kab. Luwu	-	-	40.607	-
9	Kab. Luwu Utara	8.966	-	57.917	-
10	Kab. Maros	-	-	33.671	-
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	46.637	-
12	Kota Palopo	-	-	18.230	-
13	Kab. Luwu Timur	26.903	-	45.346	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
7	Kab. Jeneponto	21	2.306	47.529	4.184.579
8	Kab. Luwu	242	2.306	43.155	4.107.642
9	Kab. Luwu Utara	344	2.306	69.533	4.777.660
10	Kab. Maros	22.973	2.306	58.950	4.544.642
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	42.124	2.306	91.067	5.433.233
12	Kota Palopo	-	2.306	20.536	3.481.846
13	Kab. Luwu Timur	150.438	2.306	224.993	8.959.141

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
14	Kab. Pinrang	2.913.675	19.466	-	1.047.678
15	Kab. Sinjai	2.913.675	-	-	769.055
16	Kab. Kepulauan Selayar	2.913.675	-	-	1.063.346
17	Kab. Sidenreng Rappang	2.913.675	-	-	1.093.082
18	Kab. Soppeng	2.913.675	87.741	-	781.248
19	Kab. Takalar	2.913.675	699.439	-	783.337
20	Kab. Tana Toraja	2.913.675	98.143	-	761.088

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
14	Kab. Pinrang	-	-	61.505	1.128.649
15	Kab. Sinjai	-	-	61.505	830.560
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	61.505	1.124.851
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	61.505	1.154.587
18	Kab. Soppeng	-	3.164	61.505	933.658
19	Kab. Takalar	-	-	61.505	1.544.281
20	Kab. Tana Toraja	-	1.779	61.505	922.515

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
14	Kab. Pinrang	973	-	39.288	-
15	Kab. Sinjai	-	-	28.840	-
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	39.875	-
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	40.991	-
18	Kab. Soppeng	4.387	-	29.297	-
19	Kab. Takalar	34.972	-	29.375	-
20	Kab. Tana Toraja	4.907	-	28.541	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
14	Kab. Pinrang	-	2.306	42.567	4.084.891
15	Kab. Sinjai	-	2.306	31.146	3.775.381
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	2.306	42.181	4.080.707
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	2.306	43.297	4.111.559
18	Kab. Soppeng	119	2.306	36.109	3.883.442
19	Kab. Takalar	-	2.306	66.653	4.524.609
20	Kab. Tana Toraja	67	2.306	35.821	3.872.011

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
21	Kab. Wajo	2.913.675	570.478	-	15.792.862
22	Kota Pare-pare	2.913.675	-	-	475.504
23	Kota Makassar	2.913.675	-	-	2.316.153
24	Kab. Toraja Utara	2.913.675	72.376	-	716.330
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1.057.436	19.684	3.856.058
1	Kab. Buton	2.913.675	-	-	707.657
2	Kab. Konawe	2.913.675	1.086.349	-	985.769

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
21	Kab. Wajo	-	182	61.505	16.425.027
22	Kota Pare-pare	-	-	61.505	537.009
23	Kota Makassar	-	-	61.505	2.377.658
24	Kab. Toraja Utara	-	325	61.505	850.536
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	2.618.913	261.398	7.813.489
1	Kab. Buton	-	43.364	63.937	814.958
2	Kab. Konawe	-	129.620	61.505	2.263.243

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
21	Kab. Wajo	28.524	-	592.232	-
22	Kota Pare-pare	-	-	17.831	-
23	Kota Makassar	-	-	86.856	-
24	Kab. Toraja Utara	3.619	-	26.862	-
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	23.499	383	64.268	-
1	Kab. Buton	-	-	26.537	-
2	Kab. Konawe	54.317	-	36.966	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
21	Kab. Wajo	7	2.306	623.069	19.961.771
22	Kota Pare-pare	-	2.306	20.137	3.470.821
23	Kota Makassar	-	2.306	89.162	5.380.495
24	Kab. Toraja Utara	12	2.306	32.799	3.797.010
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	43.649	4.357	136.156	7.949.645
1	Kab. Buton	1.626	2.398	30.561	3.759.194
2	Kab. Konawe	4.861	2.306	98.450	5.275.368

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
3	Kab. Kolaka	2.913.675	963.317	-	877.752
4	Kab. Muna	2.913.675	-	59.051	785.986
5	Kota Kendari	2.913.675	-	-	716.666
6	Kota Bau-bau	2.913.675	-	-	626.817
7	Kab. Konawe Selatan	2.913.675	844.739	-	1.364.980
8	Kab. Bombana	2.913.675	100.426	-	991.153
9	Kab. Wakatobi	2.913.675	-	-	841.279

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
3	Kab. Kolaka	-	4.088.556	61.505	5.991.130
4	Kab. Muna	-	56	61.505	906.598
5	Kota Kendari	-	-	61.505	778.171
6	Kota Bau-bau	-	7.357	61.505	695.679
7	Kab. Konawe Selatan	-	1.410.349	61.505	3.681.573
8	Kab. Bombana	-	2.321.976	61.505	3.475.060
9	Kab. Wakatobi	-	-	61.505	902.784

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
3	Kab. Kolaka	48.166	-	32.916	-
4	Kab. Muna	-	2.584	29.474	-
5	Kota Kendari	-	-	26.875	-
6	Kota Bau-bau	-	-	23.506	-
7	Kab. Konawe Selatan	42.237	-	51.187	-
8	Kab. Bombana	5.021	-	37.168	-
9	Kab. Wakatobi	-	-	31.548	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
3	Kab. Kolaka	153.321	2.306	236.709	9.141.514
4	Kab. Muna	2	2.306	34.366	3.854.639
5	Kota Kendari	-	2.306	29.181	3.721.027
6	Kota Bau-bau	276	2.306	26.088	3.635.442
7	Kab. Konawe Selatan	52.888	2.306	148.618	6.743.866
8	Kab. Bombana	87.074	2.306	131.569	6.520.304
9	Kab. Wakatobi	-	2.306	33.854	3.850.313

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
10	Kab. Kolaka Utara	2.913.675	-	-	961.837
11	Kab. Konawe Utara	2.913.675	974.631	-	1.270.127
12	Kab. Buton Utara	2.913.675	14.757	-	891.570
13	Kab. Konawe Kepulauan	2.913.675	-	-	922.958
14	Kab. Kolaka Timur	2.913.675	96.903	-	908.717
15	Kab. Muna Barat	2.913.675	-	-	592.914
16	Kab. Buton Tengah	2.913.675	-	-	917.159

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
10	Kab. Kolaka Utara	-	101.359	61.505	1.124.701
11	Kab. Konawe Utara	-	2.085.958	61.505	4.392.221
12	Kab. Buton Utara	-	-	61.505	967.832
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	61.505	984.463
14	Kab. Kolaka Timur	-	-	61.505	1.067.125
15	Kab. Muna Barat	-	-	61.505	654.419
16	Kab. Buton Tengah	-	51.148	61.505	1.029.812

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
10	Kab. Kolaka Utara	-	-	36.069	-
11	Kab. Konawe Utara	48.732	-	47.630	-
12	Kab. Buton Utara	738	-	33.434	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	-	34.611	-
14	Kab. Kolaka Timur	4.845	-	34.077	-
15	Kab. Muna Barat	-	-	22.234	-
16	Kab. Buton Tengah	-	-	34.393	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN LAINNYA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
10	Kab. Kolaka Utara	3.801	2.306	42.176	4.080.552
11	Kab. Konawe Utara	78.223	2.306	176.891	7.482.787
12	Kab. Buton Utara	-	2.306	36.478	3.917.985
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	2.306	36.917	3.935.055
14	Kab. Kolaka Timur	-	2.306	41.228	4.022.028
15	Kab. Muna Barat	-	2.306	24.540	3.592.634
16	Kab. Buton Tengah	1.918	2.306	38.617	3.982.104

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
17	Kab. Buton Selatan	2.913.675	-	-	1.060.895
XXII	Provinsi Bali	-	97.482	-	1.855.386
1	Kab. Badung	2.913.675	-	-	760.333
2	Kab. Bangli	2.913.675	-	-	614.208
3	Kab. Buleleng	2.913.675	21.010	-	1.337.077
4	Kab. Gianyar	2.913.675	-	-	788.458
5	Kab. Jembrana	2.913.675	346.588	-	708.614

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
17	Kab. Buton Selatan	-	667	61.505	1.123.067
XXII	Provinsi Bali	68.698	-	184.516	2.206.082
1	Kab. Badung	13.528	-	67.965	841.826
2	Kab. Bangli	5.706	-	61.505	681.419
3	Kab. Buleleng	34.885	-	82.007	1.474.979
4	Kab. Gianyar	2.581	-	61.505	852.544
5	Kab. Jembrana	-	-	66.242	1.121.444

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
17	Kab. Buton Selatan	-	-	39.784	-
XXII	Provinsi Bali	2.708	-	51.538	1.908
1	Kab. Badung	-	-	26.400	470
2	Kab. Bangli	-	-	21.327	198
3	Kab. Buleleng	1.021	-	46.426	1.211
4	Kab. Gianyar	-	-	27.377	90
5	Kab. Jembrana	16.848	-	24.605	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
17	Kab. Buton Selatan	25	2.306	42.115	4.078.857
XXII	Provinsi Bali	-	5.125	61.279	2.267.361
1	Kab. Badung	-	2.360	29.230	3.784.731
2	Kab. Bangli	-	2.135	23.660	3.618.754
3	Kab. Buleleng	-	2.847	51.505	4.440.159
4	Kab. Gianyar	-	2.135	29.602	3.795.821
5	Kab. Jembrana	-	2.300	43.753	4.078.872

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
6	Kab. Karangasem	2.913.675	60.583	-	958.307
7	Kab. Klungkung	2.913.675	-	-	493.279
8	Kab. Tabanan	2.913.675	-	-	791.684
9	Kota Denpasar	2.913.675	-	-	969.582
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	72.868	107.952	2.849.219
1	Kab. Bima	2.913.675	49.387	105.525	1.367.526
2	Kab. Dompu	2.913.675	191.531	104.682	837.478

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
6	Kab. Karangasem	-	-	61.505	1.080.395
7	Kab. Klungkung	-	-	61.505	554.784
8	Kab. Tabanan	217.846	-	61.505	1.071.035
9	Kota Denpasar	-	-	82.007	1.051.589
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	1.200.613	189.527	4.420.179
1	Kab. Bima	-	-	82.007	1.604.445
2	Kab. Dompu	-	10.397	61.505	1.205.593

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
6	Kab. Karangasem	2.945	-	33.275	-
7	Kab. Klungkung	-	-	17.128	-
8	Kab. Tabanan	-	-	27.489	7.564
9	Kota Denpasar	-	-	33.666	-
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.024	2.999	79.145	-
1	Kab. Bima	2.401	4.397	47.484	-
2	Kab. Dompu	9.311	4.362	29.079	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
6	Kab. Karangasem	-	2.135	38.355	4.032.425
7	Kab. Klungkung	-	2.135	19.263	3.487.722
8	Kab. Tabanan	-	2.135	37.188	4.021.898
9	Kota Denpasar	-	2.847	36.513	4.001.777
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	33.350	5.265	122.783	4.542.962
1	Kab. Bima	-	2.847	57.129	4.575.249
2	Kab. Dompu	361	2.135	45.248	4.164.516

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
3	Kab. Lombok Barat	2.913.675	-	-	1.211.157
4	Kab. Lombok Tengah	2.913.675	-	51.095	1.738.223
5	Kab. Lombok Timur	2.913.675	55.588	104.960	2.076.627
6	Kab. Sumbawa	2.913.675	27.460	-	1.609.015
7	Kota Mataram	2.913.675	-	-	734.903
8	Kota Bima	2.913.675	-	-	615.304
9	Kab. Sumbawa Barat	2.913.675	-	-	640.426

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
3	Kab. Lombok Barat	-	14.643	80.636	1.306.436
4	Kab. Lombok Tengah	-	-	61.505	1.850.823
5	Kab. Lombok Timur	-	-	61.505	2.298.680
6	Kab. Sumbawa	-	711.824	61.505	2.409.804
7	Kota Mataram	-	-	80.746	815.649
8	Kota Bima	-	6.119	61.505	682.928
9	Kab. Sumbawa Barat	-	4.057.430	61.505	4.759.361

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
3	Kab. Lombok Barat	-	-	42.054	-
4	Kab. Lombok Tengah	-	2.129	60.355	-
5	Kab. Lombok Timur	2.702	4.373	72.105	-
6	Kab. Sumbawa	1.335	-	55.869	-
7	Kota Mataram	-	-	25.517	-
8	Kota Bima	-	-	21.365	-
9	Kab. Sumbawa Barat	-	-	22.237	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
3	Kab. Lombok Barat	508	2.800	45.362	4.265.473
4	Kab. Lombok Tengah	-	2.135	64.619	4.829.117
5	Kab. Lombok Timur	-	2.135	81.315	5.293.670
6	Kab. Sumbawa	24.716	2.135	84.055	5.407.534
7	Kota Mataram	-	2.804	28.321	3.757.645
8	Kota Bima	212	2.135	23.712	3.620.315
9	Kab. Sumbawa Barat	140.883	2.135	165.255	7.838.291

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
10	Kab. Lombok Utara	2.913.675	-	44.263	566.215
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	182.753	57.778	4.766.040
1	Kab. Alor	2.913.675	-	-	984.838
2	Kab. Belu	2.913.675	-	-	595.334
3	Kab. Ende	2.913.675	-	-	882.192
4	Kab. Flores Timur	2.913.675	-	-	986.893
5	Kab. Kupang	2.913.675	-	215.381	1.305.060

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
10	Kab. Lombok Utara	-	-	61.505	671.983
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	219.765	1.767	374.498	5.602.601
1	Kab. Alor	-	-	79.261	1.064.099
2	Kab. Belu	-	371	82.007	677.712
3	Kab. Ende	288.400	-	61.505	1.232.097
4	Kab. Flores Timur	-	-	82.007	1.068.900
5	Kab. Kupang	-	-	61.505	1.581.946

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
10	Kab. Lombok Utara	-	1.844	19.660	-
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.076	1.605	132.390	6.105
1	Kab. Alor	-	-	34.196	-
2	Kab. Belu	-	-	20.671	-
3	Kab. Ende	-	-	30.632	10.014
4	Kab. Flores Timur	-	-	34.267	-
5	Kab. Kupang	-	8.975	45.315	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
10	Kab. Lombok Utara	-	2.135	23.639	3.609.297
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	49	10.403	155.628	5.758.229
1	Kab. Alor	-	2.752	36.948	4.014.722
2	Kab. Belu	13	2.847	23.531	3.614.918
3	Kab. Ende	-	2.135	42.781	4.188.553
4	Kab. Flores Timur	-	2.847	37.114	4.019.689
5	Kab. Kupang	-	2.135	56.425	4.552.046

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
6	Kab. Lembata	2.913.675	2.576	-	734.142
7	Kab. Manggarai	2.913.675	-	-	826.263
8	Kab. Ngada	2.913.675	79.871	-	651.653
9	Kab. Sikka	2.913.675	25.305	-	915.266
10	Kab. Sumba Barat	2.913.675	31.619	20.973	598.559
11	Kab. Sumba Timur	2.913.675	536.493	-	1.353.999
12	Kab. Timor Tengah Selatan	2.913.675	-	-	1.305.845

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
6	Kab. Lembata	-	-	67.268	803.986
7	Kab. Manggarai	545.611	6.062	74.171	1.452.107
8	Kab. Ngada	105.190	-	61.505	898.219
9	Kab. Sikka	-	-	61.505	1.002.076
10	Kab. Sumba Barat	-	-	61.505	712.656
11	Kab. Sumba Timur	-	-	61.505	1.951.997
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	61.505	1.367.350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
6	Kab. Lembata	125	-	25.491	-
7	Kab. Manggarai	-	-	28.690	18.945
8	Kab. Ngada	3.883	-	22.627	3.652
9	Kab. Sikka	1.230	-	31.780	-
10	Kab. Sumba Barat	1.537	874	20.783	-
11	Kab. Sumba Timur	26.080	-	47.014	-
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	45.342	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
6	Kab. Lembata	-	2.336	27.952	3.745.613
7	Kab. Manggarai	210	2.575	50.420	4.416.202
8	Kab. Ngada	-	2.135	32.297	3.844.191
9	Kab. Sikka	-	2.135	35.145	3.950.896
10	Kab. Sumba Barat	-	2.135	25.329	3.651.660
11	Kab. Sumba Timur	-	2.135	75.229	4.940.901
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	2.135	47.477	4.328.502

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
13	Kab. Timor Tengah Utara	2.913.675	-	-	946.997
14	Kota Kupang	2.913.675	-	-	716.365
15	Kab. Rote Ndao	2.913.675	-	-	857.728
16	Kab. Manggarai Barat	2.913.675	-	-	923.969
17	Kab. Nagekeo	2.913.675	-	-	777.407
18	Kab. Sumba Barat Daya	2.913.675	138.131	-	905.474
19	Kab. Sumba Tengah	2.913.675	-	-	747.566

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	637	61.505	1.009.139
14	Kota Kupang	-	-	82.007	798.372
15	Kab. Rote Ndao	-	-	61.505	919.233
16	Kab. Manggarai Barat	-	-	61.505	985.474
17	Kab. Nagekeo	-	-	61.505	838.912
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	-	61.505	1.105.110
19	Kab. Sumba Tengah	-	-	61.505	809.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	32.882	-
14	Kota Kupang	-	-	24.874	-
15	Kab. Rote Ndao	-	-	29.782	-
16	Kab. Manggarai Barat	-	-	32.082	-
17	Kab. Nagekeo	-	-	26.993	-
18	Kab. Sumba Barat Daya	6.715	-	31.440	-
19	Kab. Sumba Tengah	-	-	25.957	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
13	Kab. Timor Tengah Utara	22	2.135	35.039	3.957.853
14	Kota Kupang	-	2.847	27.721	3.739.768
15	Kab. Rote Ndao	-	2.135	31.917	3.864.825
16	Kab. Manggarai Barat	-	2.135	34.217	3.933.366
17	Kab. Nagekeo	-	2.135	29.128	3.781.715
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	2.135	40.290	4.059.075
19	Kab. Sumba Tengah	-	2.135	28.092	3.750.838

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
20	Kab. Manggarai Timur	2.913.675	-	-	888.456
21	Kab. Sabu Raijua	2.913.675	-	-	519.000
22	Kab. Malaka	2.913.675	-	-	641.155
XXV	Provinsi Maluku	-	222.641	421.551	7.399.479
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.913.675	-	287.327	1.440.736
2	Kab. Maluku Tengah	2.913.675	681.878	-	2.364.902
3	Kab. Maluku Tenggara	2.913.675	-	-	937.407

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
20	Kab. Manggarai Timur	-	-	61.505	949.961
21	Kab. Sabu Raijua	-	-	61.505	580.505
22	Kab. Malaka	-	-	61.505	702.660
XXV	Provinsi Maluku	35.483	18.613	195.651	8.293.418
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-	61.505	1.789.568
2	Kab. Maluku Tengah	141.931	-	61.505	3.250.216
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	66.649	1.004.056

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
20	Kab. Manggarai Timur	-	-	30.849	-
21	Kab. Sabu Raijua	-	-	18.021	-
22	Kab. Malaka	-	-	22.262	-
XXV	Provinsi Maluku	12.369	23.419	308.312	1.478
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	9.977	45.023	-
2	Kab. Maluku Tengah	28.412	-	73.903	4.435
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	29.294	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
20	Kab. Manggarai Timur	-	2.135	32.984	3.896.620
21	Kab. Sabu Raijua	-	2.135	20.156	3.514.336
22	Kab. Malaka	-	2.135	24.397	3.640.732
XXV	Provinsi Maluku	776	8.152	354.506	8.647.924
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	1.922	56.922	4.760.165
2	Kab. Maluku Tengah	-	1.922	108.672	6.272.563
3	Kab. Maluku Tenggara	-	2.083	31.377	3.949.108

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
4	Kab. Buru	2.913.675	208.685	660.731	1.180.261
5	Kota Ambon	2.913.675	-	-	819.322
6	Kab. Seram Bagian Barat	2.913.675	-	-	1.582.137
7	Kab. Seram Bagian Timur	2.913.675	-	-	16.095.404
8	Kab. Kepulauan Aru	2.913.675	-	-	1.756.235
9	Kota Tual	2.913.675	-	-	798.067
10	Kab. Maluku Barat Daya	2.913.675	-	-	1.386.586

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
4	Kab. Buru	-	-	61.505	2.111.182
5	Kota Ambon	-	-	61.505	880.827
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	61.505	1.643.642
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	61.505	16.156.909
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	82.007	1.838.242
9	Kota Tual	-	-	61.505	859.572
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	72.987	61.505	1.521.078

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
4	Kab. Buru	8.695	22.942	36.883	-
5	Kota Ambon	-	-	25.604	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	49.442	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	502.981	-
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	54.882	-
9	Kota Tual	-	-	24.940	-
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	43.331	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
4	Kab. Buru	-	1.922	70.442	5.095.299
5	Kota Ambon	-	1.922	27.526	3.822.028
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	1.922	51.364	4.608.681
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	1.922	504.903	19.575.487
8	Kab. Kepulauan Aru	-	2.563	57.445	4.809.362
9	Kota Tual	-	1.922	26.862	3.800.109
10	Kab. Maluku Barat Daya	2.281	1.922	47.534	4.482.287

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
11	Kab. Buru Selatan	2.913.675	-	553.609	1.236.860
XXVI	Provinsi Papua	-	4.293.289	3.033.572	15.422.512
1	Kab. Biak Numfor	2.913.675	-	-	1.115.019
2	Kab. Jayapura	2.913.675	2.122.309	523.196	1.743.530
3	Kab. Jayawijaya	2.913.675	-	-	1.384.335
4	Kab. Merauke	2.913.675	8.015.632	2.026.942	4.527.431
5	Kab. Mimika	2.913.675	1.086.706	1.132.769	2.687.935

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
11	Kab. Buru Selatan	-	1.100	61.505	1.853.074
XXVI	Provinsi Papua	-	110.264.177	445.915	133.459.465
1	Kab. Biak Numfor	-	-	61.505	1.176.524
2	Kab. Jayapura	-	-	61.505	4.450.540
3	Kab. Jayawijaya	-	-	61.505	1.445.840
4	Kab. Merauke	-	-	61.505	14.631.510
5	Kab. Mimika	-	441.027.990	61.505	445.996.905

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
11	Kab. Buru Selatan	-	19.223	38.652	-
XXVI	Provinsi Papua	238.516	168.532	642.605	-
1	Kab. Biak Numfor	-	-	34.844	-
2	Kab. Jayapura	88.430	18.167	54.485	-
3	Kab. Jayawijaya	-	-	43.260	-
4	Kab. Merauke	333.985	70.380	141.482	-
5	Kab. Mimika	45.279	39.332	83.998	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
11	Kab. Buru Selatan	35	1.922	59.832	4.826.581
XXVI	Provinsi Papua	4.594.341	18.580	5.662.574	139.122.039
1	Kab. Biak Numfor	-	1.922	36.766	4.126.965
2	Kab. Jayapura	-	1.922	163.004	7.527.219
3	Kab. Jayawijaya	-	1.922	45.182	4.404.697
4	Kab. Merauke	-	1.922	547.769	18.092.954
5	Kab. Mimika	13.782.125	1.922	13.952.656	462.863.236

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
6	Kab. Nabire	2.913.675	1.005.076	1.731.947	1.782.309
7	Kab. Paniai	2.913.675	-	-	1.291.414
8	Kab. Puncak Jaya	2.913.675	-	-	1.742.118
9	Kab. Kepulauan Yapen	2.913.675	-	-	1.206.828
10	Kota Jayapura	2.913.675	-	-	788.866
11	Kab. Sarmi	2.913.675	101.174	2.633.222	2.739.531
12	Kab. Keerom	2.913.675	1.274.377	426.510	1.640.493

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
6	Kab. Nabire	-	-	61.505	4.580.837
7	Kab. Paniai	-	-	61.505	1.352.919
8	Kab. Puncak Jaya	-	-	61.505	1.803.623
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	61.505	1.268.333
10	Kota Jayapura	-	-	61.505	850.371
11	Kab. Sarmi	-	38.293	61.505	5.573.725
12	Kab. Keerom	-	-	61.505	3.402.885

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
6	Kab. Nabire	41.878	60.137	55.697	-
7	Kab. Paniai	-	-	40.357	-
8	Kab. Puncak Jaya	-	-	54.441	-
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	37.713	-
10	Kota Jayapura	-	-	24.652	-
11	Kab. Sarmi	4.216	91.431	85.610	-
12	Kab. Keerom	53.099	14.809	51.265	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
6	Kab. Nabire	-	1.922	159.634	7.654.146
7	Kab. Paniai	-	1.922	42.279	4.308.873
8	Kab. Puncak Jaya	-	1.922	56.363	4.773.661
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	1.922	39.635	4.221.643
10	Kota Jayapura	-	1.922	26.574	3.790.620
11	Kab. Sarmi	1.197	1.922	184.376	8.671.776
12	Kab. Keerom	-	1.922	121.095	6.437.655

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
13	Kab. Yahukimo	2.913.675	-	-	2.641.646
14	Kab. Pegunungan Bintang	2.913.675	-	-	2.481.859
15	Kab. Tolikara	2.913.675	-	-	1.910.577
16	Kab. Boven Digoel	2.913.675	2.585.977	2.181.907	3.102.208
17	Kab. Mappi	2.913.675	-	496.996	3.007.285
18	Kab. Asmat	2.913.675	-	-	3.409.566
19	Kab. Waropen	2.913.675	-	-	3.755.760

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
13	Kab. Yahukimo	-	-	61.505	2.703.151
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	61.505	2.543.364
15	Kab. Tolikara	-	-	61.505	1.972.082
16	Kab. Boven Digoel	-	-	61.505	7.931.597
17	Kab. Mappi	-	-	61.505	3.565.786
18	Kab. Asmat	-	-	61.505	3.471.071
19	Kab. Waropen	-	-	61.505	3.817.265

SK No 021324 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
13	Kab. Yahukimo	-	-	82.551	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	77.558	-
15	Kab. Tolikara	-	-	59.706	-
16	Kab. Boven Digoel	107.749	75.761	96.944	-
17	Kab. Mappi	-	17.257	93.978	-
18	Kab. Asmat	-	-	106.549	-
19	Kab. Waropen	-	-	117.368	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
13	Kab. Yahukimo	-	1.922	84.473	5.701.299
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	1.922	79.480	5.536.519
15	Kab. Tolikara	-	1.922	61.628	4.947.385
16	Kab. Boven Digoel	-	1.922	282.376	11.127.648
17	Kab. Mappi	-	1.922	113.157	6.592.618
18	Kab. Asmat	-	1.922	108.471	6.493.217
19	Kab. Waropen	-	1.922	119.290	6.850.230

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
20	Kab. Supiori	2.913.675	-	-	1.242.384
21	Kab. Mamberamo Raya	2.913.675	-	-	4.417.948
22	Kab. Mamberamo Tengah	2.913.675	-	-	961.267
23	Kab. Yalimo	2.913.675	-	-	781.098
24	Kab. Lanny Jaya	2.913.675	-	-	974.741
25	Kab. Nduga	2.913.675	-	-	1.223.038
26	Kab. Dogiyai	2.913.675	-	-	1.629.656

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
20	Kab. Supiori	-	-	61.505	1.303.889
21	Kab. Mamberamo Raya	-	-	61.505	4.479.453
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	61.505	1.022.772
23	Kab. Yalimo	-	-	61.505	842.603
24	Kab. Lanny Jaya	-	-	61.505	1.036.246
25	Kab. Nduga	-	-	61.505	1.284.543
26	Kab. Dogiyai	-	-	61.505	1.691.161

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
20	Kab. Supiori	-	-	38.825	-
21	Kab. Mamberamo Raya	-	-	138.061	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	30.040	-
23	Kab. Yalimo	-	-	24.409	-
24	Kab. Lanny Jaya	-	-	30.461	-
25	Kab. Nduga	-	-	38.220	-
26	Kab. Dogiyai	-	-	50.927	-

SK No 021329 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
20	Kab. Supiori	-	1.922	40.747	4.258.311
21	Kab. Mamberamo Raya	-	1.922	139.983	7.533.111
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	1.922	31.962	3.968.409
23	Kab. Yalimo	-	1.922	26.331	3.782.609
24	Kab. Lanny Jaya	-	1.922	32.383	3.982.304
25	Kab. Nduga	-	1.922	40.142	4.238.360
26	Kab. Dogiyai	-	1.922	52.849	4.657.685

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
27	Kab. Puncak	2.913.675	-	-	2.002.749
28	Kab. Intan Jaya	2.913.675	-	-	1.558.186
29	Kab. Deiyai	2.913.675	-	-	3.399.388
XXVII	Provinsi Maluku Utara	-	179.611	673.135	3.097.152
1	Kab. Halmahera Tengah	2.913.675	-	-	1.303.571
2	Kota Ternate	2.913.675	-	-	957.704
3	Kab. Halmahera Barat	2.913.675	-	-	1.147.217

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
27	Kab. Puncak	-	-	61.505	2.064.254
28	Kab. Intan Jaya	-	-	61.505	1.619.691
29	Kab. Deiyai	-	-	61.505	3.460.893
XXVII	Provinsi Maluku Utara	-	2.913.495	157.801	7.021.194
1	Kab. Halmahera Tengah	-	761.118	61.776	2.126.465
2	Kota Ternate	-	-	61.776	1.019.480
3	Kab. Halmahera Barat	-	-	61.505	1.208.722

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
27	Kab. Puncak	-	-	62.586	-
28	Kab. Intan Jaya	-	-	48.693	-
29	Kab. Deiyai	-	-	106.231	-
XXVII	Provinsi Maluku Utara	3.991	13.089	51.619	-
1	Kab. Halmahera Tengah	-	-	48.884	-
2	Kota Ternate	-	-	35.914	-
3	Kab. Halmahera Barat	-	-	43.021	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
27	Kab. Puncak	-	1.922	64.508	5.042.437
28	Kab. Intan Jaya	-	1.922	50.615	4.583.981
29	Kab. Deiyai	-	1.922	108.153	6.482.721
XXVII	Provinsi Maluku Utara	48.558	2.630	119.887	7.141.081
1	Kab. Halmahera Tengah	28.542	2.317	79.743	5.119.883
2	Kota Ternate	-	2.317	38.231	3.971.386
3	Kab. Halmahera Barat	-	2.306	45.327	4.167.724

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
4	Kab. Halmahera Timur	2.913.675	104.989	1.237.123	1.366.609
5	Kab. Halmahera Selatan	2.913.675	355.448	788.552	2.291.074
6	Kab. Halmahera Utara	2.913.675	303.330	-	985.778
7	Kab. Kepulauan Sula	2.913.675	-	802.497	1.139.578
8	Kota Tidore Kepulauan	2.913.675	-	-	858.313
9	Kab. Pulau Morotai	2.913.675	-	-	981.956
10	Kab. Pulau Taliabu	2.913.675	44.045	-	1.356.810

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
4	Kab. Halmahera Timur	-	1.305.484	61.505	4.075.710
5	Kab. Halmahera Selatan	-	5.806.690	82.007	9.323.771
6	Kab. Halmahera Utara	-	2.357.572	61.505	3.708.185
7	Kab. Kepulauan Sula	-	32.877	61.776	2.036.728
8	Kota Tidore Kepulauan	-	-	61.505	919.818
9	Kab. Pulau Morotai	-	-	61.505	1.043.461
10	Kab. Pulau Taliabu	-	85.400	61.776	1.548.031

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
4	Kab. Halmahera Timur	5.249	54.124	51.248	-
5	Kab. Halmahera Selatan	17.772	34.499	85.915	-
6	Kab. Halmahera Utara	15.167	-	36.967	-
7	Kab. Kepulauan Sula	-	35.109	42.734	-
8	Kota Tidore Kepulauan	-	-	32.187	-
9	Kab. Pulau Morotai	-	-	36.823	-
10	Kab. Pulau Taliabu	2.202	-	50.880	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
4	Kab. Halmahera Timur	48.956	2.306	161.883	7.151.268
5	Kab. Halmahera Selatan	217.751	3.075	359.012	12.596.458
6	Kab. Halmahera Utara	88.409	2.306	142.849	6.764.709
7	Kab. Kepulauan Sula	1.233	2.317	81.393	5.031.796
8	Kota Tidore Kepulauan	-	2.306	34.493	3.867.986
9	Kab. Pulau Morotai	-	2.306	39.129	3.996.265
10	Kab. Pulau Taliabu	3.202	2.317	58.601	4.520.307

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
XXVIII	Provinsi Banten	-	1.051.573	693.587	4.314.915
1	Kab. Lebak	2.913.675	2.755.920	1.222.839	2.553.043
2	Kab. Pandeglang	2.913.675	1.216.349	1.887.060	2.422.009
3	Kab. Serang	2.913.675	234.021	48.057	2.344.640
4	Kab. Tangerang	2.913.675	-	-	3.982.917
5	Kota Cilegon	2.913.675	-	5.255	711.072
6	Kota Tangerang	2.913.675	-	-	2.500.668

SK No 021339 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
XXVIII	Provinsi Banten	14.174	171.833	123.011	6.369.093
1	Kab. Lebak	206	90.008	61.505	6.683.521
2	Kab. Pandeglang	-	322.342	61.505	5.909.265
3	Kab. Serang	56.492	273.035	61.505	3.017.750
4	Kab. Tangerang	-	-	61.505	4.044.422
5	Kota Cilegon	-	1.946	61.505	779.778
6	Kota Tangerang	-	-	61.505	2.562.173

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
XXVIII	Provinsi Banten	46.737	26.973	143.830	472
1	Kab. Lebak	122.485	47.555	85.101	7
2	Kab. Pandeglang	54.060	73.386	80.734	-
3	Kab. Serang	10.401	1.869	78.155	1.883
4	Kab. Tangerang	-	-	132.764	-
5	Kota Cilegon	-	204	23.702	-
6	Kota Tangerang	-	-	83.356	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
XXVIII	Provinsi Banten	5.728	4.100	227.840	6.596.933
1	Kab. Lebak	3.000	2.051	260.199	9.857.395
2	Kab. Pandeglang	10.745	2.051	220.976	9.043.916
3	Kab. Serang	9.101	2.051	103.460	6.034.885
4	Kab. Tangerang	-	2.051	134.815	7.092.912
5	Kota Cilegon	65	2.051	26.022	3.719.475
6	Kota Tangerang	-	2.051	85.407	5.561.255

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
7	Kota Serang	2.913.675	-	-	990.182
8	Kota Tangerang Selatan	2.913.675	-	-	1.755.129
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-	4.183.894	230.603	1.655.683
1	Kab. Bangka	2.913.675	3.617.956	177.731	1.107.265
2	Kab. Belitung	2.913.675	3.659.074	-	904.846
3	Kota Pangkal Pinang	2.913.675	-	-	652.563
4	Kab. Bangka Selatan	2.913.675	1.026.686	-	1.126.773

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
7	Kota Serang	-	-	61.505	1.051.687
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	61.505	1.816.634
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	-	4.186.245	107.635	10.364.060
1	Kab. Bangka	-	4.053.495	61.505	9.017.952
2	Kab. Belitung	-	1.440.941	66.415	6.071.276
3	Kota Pangkal Pinang	-	357	65.208	718.128
4	Kab. Bangka Selatan	-	3.030.764	61.505	5.245.728

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
7	Kota Serang	-	-	33.006	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	58.504	-
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	185.951	9.608	45.991	-
1	Kab. Bangka	160.798	6.788	38.447	-
2	Kab. Belitung	162.626	-	31.418	-
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	22.658	-
4	Kab. Bangka Selatan	45.630	-	39.124	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
7	Kota Serang	-	2.051	35.057	4.000.419
8	Kota Tangerang Selatan	-	2.051	60.555	4.790.864
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	116.285	2.990	360.825	10.724.885
1	Kab. Bangka	140.746	2.135	348.914	12.280.541
2	Kab. Belitung	50.033	2.306	246.383	9.231.334
3	Kota Pangkal Pinang	12	2.264	24.934	3.656.737
4	Kab. Bangka Selatan	105.235	2.135	192.124	8.351.527

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
5	Kab. Bangka Tengah	2.913.675	1.135.171	286.400	930.629
6	Kab. Bangka Barat	2.913.675	3.573.977	305.968	988.991
7	Kab. Belitung Timur	2.913.675	3.597.714	346.896	911.664
XXX	Provinsi Gorontalo	-	575.451	193.556	1.118.338
1	Kab. Boalemo	2.913.675	750.284	-	693.262
2	Kab. Gorontalo	2.913.675	613.865	-	817.006
3	Kota Gorontalo	2.913.675	-	-	403.613

SK No 021347 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
5	Kab. Bangka Tengah	-	3.958.790	61.505	6.372.495
6	Kab. Bangka Barat	-	1.558.459	61.505	6.488.900
7	Kab. Belitung Timur	-	1.991.771	61.505	6.909.550
XXX	Provinsi Gorontalo	-	3.316	94.018	1.984.679
1	Kab. Boalemo	-	-	61.505	1.505.051
2	Kab. Gorontalo	-	-	61.505	1.492.376
3	Kota Gorontalo	-	-	61.505	465.118

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
5	Kab. Bangka Tengah	50.452	10.939	32.313	-
6	Kab. Bangka Barat	158.843	11.686	34.340	-
7	Kab. Belitung Timur	159.898	13.249	31.655	-
XXX	Provinsi Gorontalo	31.970	10.753	46.597	-
1	Kab. Boalemo	31.262	-	21.664	-
2	Kab. Gorontalo	25.578	-	25.531	-
3	Kota Gorontalo	-	-	12.613	-

SK No 021349 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
5	Kab. Bangka Tengah	137.458	2.135	233.297	9.519.467
6	Kab. Bangka Barat	54.113	2.135	261.117	9.663.692
7	Kab. Belitung Timur	69.159	2.135	276.096	10.099.321
XXX	Provinsi Gorontalo	138	3.917	93.375	2.078.054
1	Kab. Boalemo	-	1.922	54.848	4.473.574
2	Kab. Gorontalo	-	1.922	53.031	4.459.082
3	Kota Gorontalo	-	1.922	14.535	3.393.328

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
4	Kab. Pohuwato	2.913.675	1.045.712	-	943.386
5	Kab. Bone Bolango	2.913.675	-	-	805.110
6	Kab. Gorontalo Utara	2.913.675	9.696	774.223	810.974
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-	298.441	-	15.233.818
1	Kab. Natuna	2.913.675	-	-	33.345.337
2	Kab. Kepulauan Anambas	2.913.675	63.648	-	18.905.187
3	Kab. Karimun	2.913.675	138.738	-	1.412.938

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
4	Kab. Pohuwato	-	3.581	77.244	2.069.923
5	Kab. Bone Bolango	-	9.685	61.505	876.300
6	Kab. Gorontalo Utara	-	-	61.505	1.656.398
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	-	652.041	133.660	16.317.960
1	Kab. Natuna	-	-	61.505	33.406.842
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	-	61.505	19.030.340
3	Kab. Karimun	-	2.546.637	82.007	4.180.320

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
4	Kab. Pohuwato	43.571	-	29.481	-
5	Kab. Bone Bolango	-	-	25.160	-
6	Kab. Gorontalo Utara	404	26.883	25.343	-
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	13.264	-	507.794	-
1	Kab. Natuna	-	-	1.111.511	-
2	Kab. Kepulauan Anambas	2.829	-	630.173	-
3	Kab. Karimun	6.166	-	47.098	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
4	Kab. Pohuwato	112	2.414	75.578	5.059.176
5	Kab. Bone Bolango	303	1.922	27.385	3.817.360
6	Kab. Gorontalo Utara	-	1.922	54.552	4.624.625
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	21.735	4.455	547.248	16.865.208
1	Kab. Natuna	-	2.051	1.113.562	37.434.079
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	2.051	635.053	22.579.068
3	Kab. Karimun	84.888	2.734	140.886	7.234.881

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
4	Kota Batam	2.913.675	-	-	2.808.711
5	Kota Tanjung Pinang	2.913.675	-	-	1.101.717
6	Kab. Lingga	2.913.675	160.312	-	1.755.986
7	Kab. Bintan	2.913.675	831.068	-	1.605.397
XXXII	Provinsi Papua Barat	-	1.437.751	2.762.981	92.899.854
1	Kab. Fak Fak	2.913.675	413.225	556.677	17.905.230
2	Kab. Manokwari	2.913.675	531.283	-	2.865.354

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
4	Kota Batam	-	1.341	82.007	2.892.059
5	Kota Tanjung Pinang	-	-	69.149	1.170.866
6	Kab. Lingga	-	3.928	61.505	1.981.731
7	Kab. Bintan	-	56.259	82.007	2.574.731
XXXII	Provinsi Papua Barat	-	211.248	266.524	97.578.358
1	Kab. Fak Fak	-	6.005	61.505	18.942.642
2	Kab. Manokwari	-	99.362	61.505	3.557.504

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
4	Kota Batam	-	-	93.624	-
5	Kota Tanjung Pinang	-	-	36.724	-
6	Kab. Lingga	7.125	-	58.533	-
7	Kab. Bintan	36.936	-	53.513	-
XXXII	Provinsi Papua Barat	31.950	61.400	1.548.331	-
1	Kab. Fak Fak	20.661	23.968	671.446	-
2	Kab. Manokwari	26.564	-	107.451	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
4	Kota Batam	45	2.734	96.403	5.902.137
5	Kota Tanjung Pinang	-	2.305	39.029	4.123.570
6	Kab. Lingga	131	2.051	67.840	4.963.246
7	Kab. Bintan	1.875	2.734	95.058	5.583.464
XXXII	Provinsi Papua Barat	3.521	4.442	1.649.644	99.228.002
1	Kab. Fak Fak	225	2.306	718.606	22.574.923
2	Kab. Manokwari	3.726	2.306	140.047	6.611.226

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
3	Kab. Sorong	2.913.675	3.354.689	-	97.623.490
4	Kota Sorong	2.913.675	-	-	1.280.345
5	Kab. Raja Ampat	2.913.675	-	-	3.618.271
6	Kab. Sorong Selatan	2.913.675	-	301.389	2.267.915
7	Kab. Teluk Bintuni	2.913.675	883.223	4.663.101	226.342.102
8	Kab. Teluk Wondama	2.913.675	-	1.566.452	1.893.670
9	Kab. Kaimana	2.913.675	63.093	4.520.562	2.547.360

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
3	Kab. Sorong	-	909	65.674	101.044.762
4	Kota Sorong	-	47.237	82.007	1.409.589
5	Kab. Raja Ampat	-	655.141	61.505	4.334.917
6	Kab. Sorong Selatan	-	-	61.505	2.630.809
7	Kab. Teluk Bintuni	-	-	61.505	231.949.931
8	Kab. Teluk Wondama	-	-	61.505	3.521.627
9	Kab. Kaimana	-	8.428	82.007	7.221.450

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
3	Kab. Sorong	167.734	-	3.660.881	-
4	Kota Sorong	-	-	48.013	-
5	Kab. Raja Ampat	-	-	135.685	-
6	Kab. Sorong Selatan	-	12.976	85.047	-
7	Kab. Teluk Bintuni	44.161	200.772	8.487.829	-
8	Kab. Teluk Wondama	-	67.445	71.013	-
9	Kab. Kaimana	3.155	194.636	95.526	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
3	Kab. Sorong	34	2.463	3.831.112	107.789.549
4	Kota Sorong	1.771	3.075	52.859	4.376.123
5	Kab. Raja Ampat	24.568	2.306	162.559	7.411.151
6	Kab. Sorong Selatan	-	2.306	100.329	5.644.813
7	Kab. Teluk Bintuni	-	2.306	8.735.068	243.598.674
8	Kab. Teluk Wondama	-	2.306	140.764	6.576.066
9	Kab. Kaimana	316	3.075	296.708	10.431.833

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
10	Kab. Maybrat	2.913.675	49.269	-	2.592.211
11	Kab. Tambrauw	2.913.675	24.075	251.757	2.667.707
12	Kab. Manokwari Selatan	2.913.675	-	-	1.962.261
13	Kab. Pegunungan Arfak	2.913.675	-	-	4.975.781
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-	1.277.061	-	1.909.427
1	Kab. Majene	2.913.675	-	-	892.023
2	Kab. Mamuju	2.913.675	663.118	-	1.686.932

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
10	Kab. Maybrat	-	-	61.505	2.702.985
11	Kab. Tambrauw	-	-	61.505	3.005.044
12	Kab. Manokwari Selatan	-	-	61.505	2.023.766
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	61.505	5.037.286
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	-	540	92.258	3.279.286
1	Kab. Majene	-	-	61.505	953.528
2	Kab. Mamuju	-	-	61.505	2.411.555

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
10	Kab. Maybrat	2.463	-	97.208	-
11	Kab. Tambrauw	1.204	10.840	100.039	-
12	Kab. Manokwari Selatan	-	-	73.585	-
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	186.592	-
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	21.284	-	26.520	-
1	Kab. Majene	-	-	34.070	-
2	Kab. Mamuju	34.077	-	64.431	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
10	Kab. Maybrat	-	2.306	101.977	5.718.637
11	Kab. Tambrauw	-	2.306	114.389	6.033.108
12	Kab. Manokwari Selatan	-	2.306	75.891	5.013.332
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	2.306	188.898	8.139.859
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	7	1.281	49.092	3.328.378
1	Kab. Majene	-	2.349	36.419	3.903.622
2	Kab. Mamuju	-	2.349	100.857	5.426.087

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
3	Kab. Polewali Mandar	2.913.675	-	-	1.210.860
4	Kab. Mamasa	2.913.675	-	-	1.087.646
5	Kab. Pasangkayu	2.913.675	4.034.365	-	1.709.069
6	Kab. Mamuju Tengah	2.913.675	410.761	-	1.051.180
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-	4.877.496	3.797.066	39.365.768
1	Kab. Bulungan	2.913.675	6.236.882	4.754.425	40.809.738
2	Kab. Malinau	2.913.675	-	6.280.901	4.430.375

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	61.505	1.272.365
4	Kab. Mamasa	-	1.619	61.505	1.150.770
5	Kab. Pasangkayu	-	-	61.505	5.804.939
6	Kab. Mamuju Tengah	-	-	61.505	1.523.446
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	-	2.269.890	76.882	50.387.102
1	Kab. Bulungan	-	1.667.619	61.505	53.530.169
2	Kab. Malinau	-	4.148.227	61.505	14.921.008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
3	Kab. Polewali Mandar	-	-	46.248	-
4	Kab. Mamasa	-	-	41.542	-
5	Kab. Pasangkayu	207.322	-	65.277	-
6	Kab. Mamuju Tengah	21.109	-	40.149	-
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	135.486	105.474	1.093.494	-
1	Kab. Bulungan	303.182	198.101	1.417.005	-
2	Kab. Malinau	-	261.704	153.832	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
3	Kab. Polewali Mandar	-	2.349	48.597	4.234.637
4	Kab. Mamasa	62	2.349	43.953	4.108.398
5	Kab. Pasangkayu	-	2.349	274.948	8.993.562
6	Kab. Mamuju Tengah	-	2.349	63.607	4.500.728
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	63.052	2.135	1.399.641	51.786.743
1	Kab. Bulungan	57.903	2.135	1.978.326	58.422.170
2	Kab. Malinau	144.036	2.135	561.707	18.396.390

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGI RATA	BAGIAN DAERAH		
			SEKTOR		
			PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5	6
3	Kab. Nunukan	2.913.675	9.671.712	2.332.519	16.311.807
4	Kota Tarakan	2.913.675	-	-	83.196.865
5	Kab. Tana Tidung	2.913.675	2.701.041	1.173.331	4.870.316
XXXV	Selisih Lebih		19.403.961	47.221.815	200.716.132
TOTAL		1.483.060.485	1.352.113.547	467.179.140	8.875.563.754

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BAGIAN DAERAH			
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN		SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
		PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN LAINNYA		
1	2	7	8	9	10=4+5+6+7+8+9
3	Kab. Nunukan	-	1.568.660	61.505	29.946.203
4	Kota Tarakan	-	-	61.505	83.258.370
5	Kab. Tana Tidung	-	1.695.054	61.505	10.501.247
XXXV	Selisih Lebih	11.778.514	186.180.382	11.645.048	476.945.852
TOTAL		204.130.393	1.061.624.752	52.176.992	12.012.788.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			
		SEKTOR			
		PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN	
				MINYAK BUMI DAN GAS BUMI	PENGUSAHAAN PANAS BUMI
1	2	11	12	13	14
3	Kab. Nunukan	470.153	97.188	566.382	-
4	Kota Tarakan	-	-	2.888.780	-
5	Kab. Tana Tidung	131.300	48.889	169.108	-
XXXV	Selisih Lebih	853.829	1.814.086	6.881.253	390.524
TOTAL		60.093.934	18.168.080	295.852.118	6.804.345

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.3
RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN			JUMLAH
		SEKTOR			
		PERTAMBANGAN	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH	
		PERTAMBANGAN LAINNYA			
1	2	15	16	17=11+12+13+14+15+16	18
3	Kab. Nunukan	54.467	2.135	1.190.325	34.050.203
4	Kota Tarakan	-	2.135	2.890.915	89.062.960
5	Kab. Tana Tidung	58.856	2.135	410.288	13.825.210
XXXV	Selisih Lebih	6.214.334	388.324	16.542.350	493.488.202
TOTAL		35.387.494	1.739.225	418.045.196	13.913.894.259

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.4
RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
I	Provinsi Aceh	12.979.708
II	Provinsi Sumatera Utara	12.794.951
III	Provinsi Sumatera Barat	3.079.849
IV	Provinsi Riau	11.300
V	Provinsi Jambi	1.783.056
VI	Provinsi Sumatera Selatan	822.957
VII	Provinsi Lampung	4.442.907
VIII	Provinsi DKI Jakarta	723.798
IX	Provinsi Jawa Barat	401.659.159
X	Provinsi Jawa Tengah	743.460.332
XI	Provinsi DI Yogyakarta	10.072.363
XII	Provinsi Jawa Timur	1.937.895.941
XIII	Provinsi Kalimantan Barat	113.005
XIV	Provinsi Kalimantan Tengah	26
XV	Provinsi Kalimantan Selatan	6.296
XVI	Provinsi Kalimantan Timur	10.470
XVII	Provinsi Sulawesi Tengah	478.974
XVIII	Provinsi Sulawesi Selatan	12.730.161
XIX	Provinsi Sulawesi Tenggara	7.572
XX	Provinsi Bali	7.255.187
XXI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	318.716.620
XXII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.402.834
XXIII	Provinsi Banten	802.853
XXIV	Provinsi Gorontalo	697
XXV	Provinsi Kepulauan Riau	163.956
XXVI	Provinsi Sulawesi Barat	201.519
XXVII	Provinsi Kalimantan Utara	1.509
TOTAL		3.475.618.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
I	Provinsi Aceh	301.891	-	5.534.671	5.836.562
1	Kab. Aceh Barat	27.445	-	-	27.445
2	Kab. Aceh Besar	27.445	-	-	27.445
3	Kab. Aceh Selatan	27.445	-	-	27.445
4	Kab. Aceh Singkil	27.445	-	-	27.445
5	Kab. Aceh Tengah	27.445	-	-	27.445
6	Kab. Aceh Tenggara	27.445	-	-	27.445
7	Kab. Aceh Timur	27.445	-	-	27.445
8	Kab. Aceh Utara	137.595	-	-	137.595
9	Kab. Bireuen	27.445	-	-	27.445

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
I	Provinsi Aceh	-	-	-	-	5.836.562
1	Kab. Aceh Barat	-	-	-	-	27.445
2	Kab. Aceh Besar	-	-	-	-	27.445
3	Kab. Aceh Selatan	-	-	-	-	27.445
4	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	-	27.445
5	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	-	27.445
6	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	-	27.445
7	Kab. Aceh Timur	-	-	-	-	27.445
8	Kab. Aceh Utara	-	-	-	-	137.595
9	Kab. Bireuen	-	-	-	-	27.445

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
10	Kab. Pidie	27.445	-	-	27.445
11	Kab. Simeulue	27.445	-	-	27.445
12	Kota Banda Aceh	27.445	-	-	27.445
13	Kota Sabang	27.445	-	-	27.445
14	Kota Langsa	27.445	-	-	27.445
15	Kota Lhokseumawe	27.445	-	-	27.445
16	Kab. Gayo Lues	27.445	-	-	27.445
17	Kab. Aceh Barat Daya	27.445	-	-	27.445
18	Kab. Aceh Jaya	27.445	-	-	27.445
19	Kab. Nagan Raya	27.445	-	-	27.445

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
10	Kab. Pidie	-	-	-	-	27.445
11	Kab. Simeulue	-	-	-	-	27.445
12	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	27.445
13	Kota Sabang	-	-	-	-	27.445
14	Kota Langsa	-	-	-	-	27.445
15	Kota Lhokseumawe	-	-	-	-	27.445
16	Kab. Gayo Lues	-	-	-	-	27.445
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	-	27.445
18	Kab. Aceh Jaya	-	-	-	-	27.445
19	Kab. Nagan Raya	-	-	-	-	27.445

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
20	Kab. Aceh Tamiang	493.632	-	-	493.632
21	Kab. Bener Meriah	27.445	-	-	27.445
22	Kab. Pidie Jaya	27.445	-	-	27.445
23	Kota Subulussalam	27.445	-	-	27.445
II	Provinsi Sumatera Utara	47.219	1.574	-	48.793
1	Kab. Asahan	2.951	98	-	3.049
2	Kab. Dairi	2.951	98	-	3.049
3	Kab. Deli Serdang	3.089	103	-	3.192
4	Kab. Karo	2.951	98	-	3.049
5	Kab. Labuhanbatu	2.951	98	-	3.049

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
20	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-	-	493.632
21	Kab. Bener Meriah	-	-	-	-	27.445
22	Kab. Pidie Jaya	-	-	-	-	27.445
23	Kota Subulussalam	-	-	-	-	27.445
II	Provinsi Sumatera Utara	288.327	4.805	-	293.132	341.925
1	Kab. Asahan	18.020	300	-	18.320	21.369
2	Kab. Dairi	18.020	300	-	18.320	21.369
3	Kab. Deli Serdang	20.404	340	-	20.744	23.936
4	Kab. Karo	18.020	300	-	18.320	21.369
5	Kab. Labuhanbatu	18.020	300	-	18.320	21.369

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
6	Kab. Langkat	94.301	3.143	-	97.444
7	Kab. Mandailing Natal	2.951	98	-	3.049
8	Kab. Nias	2.951	98	-	3.049
9	Kab. Simalungun	2.951	98	-	3.049
10	Kab. Tapanuli Selatan	2.951	98	-	3.049
11	Kab. Tapanuli Tengah	2.951	98	-	3.049
12	Kab. Tapanuli Utara	2.951	98	-	3.049
13	Kab. Toba	2.951	98	-	3.049
14	Kota Binjai	2.951	98	-	3.049
15	Kota Medan	2.951	98	-	3.049

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
6	Kab. Langkat	574.271	9.571	-	583.842	681.286
7	Kab. Mandailing Natal	18.020	300	-	18.320	21.369
8	Kab. Nias	18.020	300	-	18.320	21.369
9	Kab. Simalungun	18.020	300	-	18.320	21.369
10	Kab. Tapanuli Selatan	18.020	300	-	18.320	21.369
11	Kab. Tapanuli Tengah	18.020	300	-	18.320	21.369
12	Kab. Tapanuli Utara	18.020	300	-	18.320	21.369
13	Kab. Toba	18.020	300	-	18.320	21.369
14	Kota Binjai	18.020	300	-	18.320	21.369
15	Kota Medan	18.020	300	-	18.320	21.369

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
16	Kota Pematang Siantar	2.951	98	-	3.049
17	Kota Sibolga	2.951	98	-	3.049
18	Kota Tanjung Balai	2.951	98	-	3.049
19	Kota Tebing Tinggi	2.951	98	-	3.049
20	Kota Padang Sidempuan	2.951	98	-	3.049
21	Kab. Pakpak Bharat	2.951	98	-	3.049
22	Kab. Nias Selatan	2.951	98	-	3.049
23	Kab. Humbang Hasundutan	2.951	98	-	3.049
24	Kab. Serdang Bedagai	2.951	98	-	3.049
25	Kab. Samosir	2.951	98	-	3.049

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
16	Kota Pematang Siantar	18.020	300	-	18.320	21.369
17	Kota Sibolga	18.020	300	-	18.320	21.369
18	Kota Tanjung Balai	18.020	300	-	18.320	21.369
19	Kota Tebing Tinggi	18.020	300	-	18.320	21.369
20	Kota Padang Sidempuan	18.020	300	-	18.320	21.369
21	Kab. Pakpak Bharat	18.020	300	-	18.320	21.369
22	Kab. Nias Selatan	18.020	300	-	18.320	21.369
23	Kab. Humbang Hasundutan	18.020	300	-	18.320	21.369
24	Kab. Serdang Bedagai	18.020	300	-	18.320	21.369
25	Kab. Samosir	18.020	300	-	18.320	21.369

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
26	Kab. Batu Bara	2.951	98	-	3.049
27	Kab. Padang Lawas	2.951	98	-	3.049
28	Kab. Padang Lawas Utara	2.951	98	-	3.049
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	2.951	98	-	3.049
30	Kab. Labuhanbatu Utara	2.951	98	-	3.049
31	Kab. Nias Utara	2.951	98	-	3.049
32	Kab. Nias Barat	2.951	98	-	3.049
33	Kota Gunungsitoli	2.951	98	-	3.049
III	Provinsi Riau	327.478.782	10.915.959	-	338.394.741
1	Kab. Bengkalis	345.615.768	11.520.526	-	357.136.294

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
26	Kab. Batu Bara	18.020	300	-	18.320	21.369
27	Kab. Padang Lawas	18.020	300	-	18.320	21.369
28	Kab. Padang Lawas Utara	18.020	300	-	18.320	21.369
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	18.020	300	-	18.320	21.369
30	Kab. Labuhanbatu Utara	18.020	300	-	18.320	21.369
31	Kab. Nias Utara	18.020	300	-	18.320	21.369
32	Kab. Nias Barat	18.020	300	-	18.320	21.369
33	Kota Gunungsitoli	18.020	300	-	18.320	21.369
III	Provinsi Riau	7.582.066	126.368	-	7.708.434	346.103.175
1	Kab. Bengkalis	1.378.558	22.976	-	1.401.534	358.537.828

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2	Kab. Indragiri Hilir	59.541.597	1.984.720	-	61.526.317
3	Kab. Indragiri Hulu	60.180.988	2.006.033	-	62.187.021
4	Kab. Kampar	133.868.638	4.462.288	-	138.330.926
5	Kab. Kuantan Singingi	59.541.597	1.984.720	-	61.526.317
6	Kab. Pelalawan	60.370.437	2.012.348	-	62.382.785
7	Kab. Rokan Hilir	185.324.680	6.177.489	-	191.502.169
8	Kab. Rokan Hulu	66.802.865	2.226.762	-	69.029.627
9	Kab. Siak	152.890.828	5.096.361	-	157.987.189
10	Kota Dumai	59.541.597	1.984.720	-	61.526.317
11	Kota Pekanbaru	59.541.597	1.984.720	-	61.526.317

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
2	Kab. Indragiri Hilir	1.378.558	22.976	-	1.401.534	62.927.851
3	Kab. Indragiri Hulu	1.378.558	22.976	-	1.401.534	63.588.555
4	Kab. Kampar	3.376.748	56.279	-	3.433.027	141.763.953
5	Kab. Kuantan Singingi	1.378.558	22.976	-	1.401.534	62.927.851
6	Kab. Pelalawan	12.005.234	200.087	-	12.205.321	74.588.106
7	Kab. Rokan Hilir	1.378.558	22.976	-	1.401.534	192.903.703
8	Kab. Rokan Hulu	1.378.558	22.976	-	1.401.534	70.431.161
9	Kab. Siak	2.193.719	36.562	-	2.230.281	160.217.470
10	Kota Dumai	1.378.558	22.976	-	1.401.534	62.927.851
11	Kota Pekanbaru	1.378.558	22.976	-	1.401.534	62.927.851

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
12	Kab. Kepulauan Meranti	66.694.538	2.223.151	-	68.917.689
IV	Provinsi Jambi	51.625.302	1.720.843	-	53.346.145
1	Kab. Batang Hari	12.363.490	412.116	-	12.775.606
2	Kab. Bungo	10.325.060	344.169	-	10.669.229
3	Kab. Kerinci	10.325.060	344.169	-	10.669.229
4	Kab. Merangin	10.325.060	344.169	-	10.669.229
5	Kab. Muaro Jambi	10.868.646	362.288	-	11.230.934
6	Kab. Sarolangun	10.611.660	353.722	-	10.965.382
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	85.461.478	2.848.716	-	88.310.194
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	25.038.619	834.621	-	25.873.240

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
12	Kab. Kepulauan Meranti	1.724.104	28.735	-	1.752.839	70.670.528
IV	Provinsi Jambi	38.020.957	633.683	-	38.654.640	92.000.785
1	Kab. Batang Hari	25.363.340	422.723	-	25.786.063	38.561.669
2	Kab. Bungo	7.604.191	126.737	-	7.730.928	18.400.157
3	Kab. Kerinci	7.604.191	126.737	-	7.730.928	18.400.157
4	Kab. Merangin	7.604.191	126.737	-	7.730.928	18.400.157
5	Kab. Muaro Jambi	7.604.239	126.737	-	7.730.976	18.961.910
6	Kab. Sarolangun	7.604.191	126.737	-	7.730.928	18.696.310
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	43.510.752	725.179	-	44.235.931	132.546.125
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	13.921.712	232.029	-	14.153.741	40.026.981

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
9	Kab. Tebo	10.325.060	344.169	-	10.669.229
10	Kota Jambi	10.506.833	350.228	-	10.857.061
11	Kota Sungai Penuh	10.325.060	344.169	-	10.669.229
V	Provinsi Sumatera Selatan	33.778.822	1.125.961	-	34.904.783
1	Kab. Lahat	4.408.430	146.948	-	4.555.378
2	Kab. Musi Banyuasin	50.462.641	1.682.088	-	52.144.729
3	Kab. Musi Rawas	7.486.288	249.543	-	7.735.831
4	Kab. Muara Enim	6.364.529	212.151	-	6.576.680
5	Kab. Ogan Komering Ilir	4.222.353	140.745	-	4.363.098
6	Kab. Ogan Komering Ulu	8.263.309	275.444	-	8.538.753

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
9	Kab. Tebo	7.604.191	126.737	-	7.730.928	18.400.157
10	Kota Jambi	7.604.191	126.737	-	7.730.928	18.587.989
11	Kota Sungai Penuh	7.604.191	126.737	-	7.730.928	18.400.157
V	Provinsi Sumatera Selatan	201.819.401	3.363.657	-	205.183.058	240.087.841
1	Kab. Lahat	35.158.735	585.979	-	35.744.714	40.300.092
2	Kab. Musi Banyuasin	354.136.992	5.902.283	-	360.039.275	412.184.004
3	Kab. Musi Rawas	57.946.302	965.772	-	58.912.074	66.647.905
4	Kab. Muara Enim	30.180.550	503.009	-	30.683.559	37.260.239
5	Kab. Ogan Komering Ilir	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.010.980
6	Kab. Ogan Komering Ulu	26.753.479	445.891	-	27.199.370	35.738.123

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
7	Kota Palembang	4.222.353	140.745	-	4.363.098
8	Kota Prabumulih	5.101.343	170.045	-	5.271.388
9	Kota Pagar Alam	4.222.353	140.745	-	4.363.098
10	Kota Lubuk Linggau	4.222.353	140.745	-	4.363.098
11	Kab. Banyuasin	5.469.923	182.331	-	5.652.254
12	Kab. Ogan Ilir	4.753.106	158.437	-	4.911.543
13	Kab. OKU Timur	4.222.353	140.745	-	4.363.098
14	Kab. OKU Selatan	4.222.353	140.745	-	4.363.098
15	Kab. Empat Lawang	4.222.353	140.745	-	4.363.098
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7.068.648	235.622	-	7.304.270

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
7	Kota Palembang	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.010.980
8	Kota Prabumulih	25.496.041	424.934	-	25.920.975	31.192.363
9	Kota Pagar Alam	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.010.980
10	Kota Lubuk Linggau	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.010.980
11	Kab. Banyuasin	25.227.425	420.457	-	25.647.882	31.300.136
12	Kab. Ogan Ilir	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.559.425
13	Kab. OKU Timur	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.010.980
14	Kab. OKU Selatan	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.010.980
15	Kab. Empat Lawang	25.227.425	420.457	-	25.647.882	30.010.980
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	25.331.256	422.188	-	25.753.444	33.057.714

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
17	Kab. Musi Rawas Utara	6.180.602	206.020	-	6.386.622
VI	Provinsi Lampung	12.499.504	422.708	-	12.922.212
1	Kab. Lampung Barat	1.699.106	56.233	-	1.755.339
2	Kab. Lampung Selatan	1.699.106	56.233	-	1.755.339
3	Kab. Lampung Tengah	1.699.106	56.233	-	1.755.339
4	Kab. Lampung Utara	1.699.106	56.233	-	1.755.339
5	Kab. Lampung Timur	8.037.660	267.518	-	8.305.178
6	Kab. Tanggamus	1.699.106	56.233	-	1.755.339
7	Kab. Tulang Bawang	1.699.106	56.233	-	1.755.339
8	Kab. Way Kanan	1.699.106	56.233	-	1.755.339

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
17	Kab. Musi Rawas Utara	25.227.425	420.457	-	25.647.882	32.034.504
VI	Provinsi Lampung	1.733.052	29.462	-	1.762.514	14.684.726
1	Kab. Lampung Barat	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
2	Kab. Lampung Selatan	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
3	Kab. Lampung Tengah	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
4	Kab. Lampung Utara	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
5	Kab. Lampung Timur	231.074	3.813	-	234.887	8.540.065
6	Kab. Tanggamus	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
7	Kab. Tulang Bawang	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
8	Kab. Way Kanan	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
9	Kota Bandar Lampung	1.699.106	56.233	-	1.755.339
10	Kota Metro	1.699.106	56.233	-	1.755.339
11	Kab. Pesawaran	1.699.106	56.233	-	1.755.339
12	Kab. Pringsewu	1.699.106	56.233	-	1.755.339
13	Kab. Mesuji	1.699.106	56.233	-	1.755.339
14	Kab. Tulang Bawang Barat	1.699.106	56.233	-	1.755.339
15	Kab. Pesisir Barat	1.699.106	56.233	-	1.755.339
VII	Provinsi DKI Jakarta	38.619.601	1.287.320	-	39.906.921
VIII	Provinsi Jawa Barat	43.815.698	1.488.441	-	45.304.139
1	Kab. Bandung	3.251.132	107.337	-	3.358.469

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
9	Kota Bandar Lampung	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
10	Kota Metro	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
11	Kab. Pesawaran	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
12	Kab. Pringsewu	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
13	Kab. Mesuji	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
14	Kab. Tulang Bawang Barat	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
15	Kab. Pesisir Barat	231.074	3.813	-	234.887	1.990.226
VII	Provinsi DKI Jakarta	5.199.156	86.653	-	5.285.809	45.192.730
VIII	Provinsi Jawa Barat	2.293.252	38.221	-	2.331.473	47.635.612
1	Kab. Bandung	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2	Kab. Bekasi	3.557.281	117.542	-	3.674.823
3	Kab. Bogor	3.251.132	107.337	-	3.358.469
4	Kab. Ciamis	3.251.132	107.337	-	3.358.469
5	Kab. Cianjur	3.251.132	107.337	-	3.358.469
6	Kab. Cirebon	3.251.132	107.337	-	3.358.469
7	Kab. Garut	3.251.132	107.337	-	3.358.469
8	Kab. Indramayu	4.504.585	149.119	-	4.653.704
9	Kab. Karawang	4.814.810	159.460	-	4.974.270
10	Kab. Kuningan	3.251.132	107.337	-	3.358.469
11	Kab. Majalengka	3.281.558	108.351	-	3.389.909

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
2	Kab. Bekasi	783.010	13.050	-	796.060	4.470.883
3	Kab. Bogor	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
4	Kab. Ciamis	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
5	Kab. Cianjur	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
6	Kab. Cirebon	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
7	Kab. Garut	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
8	Kab. Indramayu	657.179	10.953	-	668.132	5.321.836
9	Kab. Karawang	1.153.111	19.219	-	1.172.330	6.146.600
10	Kab. Kuningan	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
11	Kab. Majalengka	202.101	3.368	-	205.469	3.595.378

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
12	Kab. Purwakarta	3.251.132	107.337	-	3.358.469
13	Kab. Subang	3.792.730	125.390	-	3.918.120
14	Kab. Sukabumi	3.251.132	107.337	-	3.358.469
15	Kab. Sumedang	3.251.132	107.337	-	3.358.469
16	Kab. Tasikmalaya	3.251.132	107.337	-	3.358.469
17	Kota Bandung	3.251.132	107.337	-	3.358.469
18	Kota Bekasi	3.285.038	108.467	-	3.393.505
19	Kota Bogor	3.251.132	107.337	-	3.358.469
20	Kota Cirebon	3.251.132	107.337	-	3.358.469
21	Kota Depok	3.251.132	107.337	-	3.358.469

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
12	Kab. Purwakarta	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
13	Kab. Subang	2.388.088	39.801	-	2.427.889	6.346.009
14	Kab. Sukabumi	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
15	Kab. Sumedang	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
16	Kab. Tasikmalaya	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
17	Kota Bandung	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
18	Kota Bekasi	285.036	4.751	-	289.787	3.683.292
19	Kota Bogor	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
20	Kota Cirebon	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
21	Kota Depok	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
22	Kota Sukabumi	3.251.132	107.337	-	3.358.469
23	Kota Tasikmalaya	3.251.132	107.337	-	3.358.469
24	Kota Cimahi	3.251.132	107.337	-	3.358.469
25	Kota Banjar	3.251.132	107.337	-	3.358.469
26	Kab. Bandung Barat	3.251.132	107.337	-	3.358.469
27	Kab. Pangandaran	3.251.132	107.337	-	3.358.469
IX	Provinsi Jawa Tengah	182.646	6.088	-	188.734
1	Kab. Banjarnegara	10.744	358	-	11.102
2	Kab. Banyumas	10.744	358	-	11.102
3	Kab. Batang	10.744	358	-	11.102

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
22	Kota Sukabumi	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
23	Kota Tasikmalaya	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
24	Kota Cimahi	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
25	Kota Banjar	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
26	Kab. Bandung Barat	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
27	Kab. Pangandaran	176.404	2.940	-	179.344	3.537.813
IX	Provinsi Jawa Tengah	991.611	16.527	-	1.008.138	1.196.872
1	Kab. Banjarnegara	58.330	972	-	59.302	70.404
2	Kab. Banyumas	58.330	972	-	59.302	70.404
3	Kab. Batang	58.330	972	-	59.302	70.404

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
4	Kab. Blora	365.292	12.176	-	377.468
5	Kab. Boyolali	10.744	358	-	11.102
6	Kab. Brebes	10.744	358	-	11.102
7	Kab. Cilacap	10.744	358	-	11.102
8	Kab. Demak	10.744	358	-	11.102
9	Kab. Grobogan	10.744	358	-	11.102
10	Kab. Jepara	10.744	358	-	11.102
11	Kab. Karanganyar	10.744	358	-	11.102
12	Kab. Kebumen	10.744	358	-	11.102
13	Kab. Kendal	10.744	358	-	11.102

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
4	Kab. Blora	1.496.427	24.940	-	1.521.367	1.898.835
5	Kab. Boyolali	58.330	972	-	59.302	70.404
6	Kab. Brebes	58.330	972	-	59.302	70.404
7	Kab. Cilacap	58.330	972	-	59.302	70.404
8	Kab. Demak	58.330	972	-	59.302	70.404
9	Kab. Grobogan	58.330	972	-	59.302	70.404
10	Kab. Jepara	58.330	972	-	59.302	70.404
11	Kab. Karanganyar	58.330	972	-	59.302	70.404
12	Kab. Kebumen	58.330	972	-	59.302	70.404
13	Kab. Kendal	58.330	972	-	59.302	70.404

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
14	Kab. Klaten	10.744	358	-	11.102
15	Kab. Kudus	10.744	358	-	11.102
16	Kab. Magelang	10.744	358	-	11.102
17	Kab. Pati	10.744	358	-	11.102
18	Kab. Pekalongan	10.744	358	-	11.102
19	Kab. Pemalang	10.744	358	-	11.102
20	Kab. Purbalingga	10.744	358	-	11.102
21	Kab. Purworejo	10.744	358	-	11.102
22	Kab. Rembang	10.744	358	-	11.102
23	Kab. Semarang	10.744	358	-	11.102

SK No 021437 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
14	Kab. Klaten	58.330	972	-	59.302	70.404
15	Kab. Kudus	58.330	972	-	59.302	70.404
16	Kab. Magelang	58.330	972	-	59.302	70.404
17	Kab. Pati	58.330	972	-	59.302	70.404
18	Kab. Pekalongan	58.330	972	-	59.302	70.404
19	Kab. Pemalang	58.330	972	-	59.302	70.404
20	Kab. Purbalingga	58.330	972	-	59.302	70.404
21	Kab. Purworejo	58.330	972	-	59.302	70.404
22	Kab. Rembang	408.844	6.814	-	415.658	426.760
23	Kab. Semarang	58.330	972	-	59.302	70.404

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
24	Kab. Sragen	10.744	358	-	11.102
25	Kab. Sukoharjo	10.744	358	-	11.102
26	Kab. Tegal	10.744	358	-	11.102
27	Kab. Temanggung	10.744	358	-	11.102
28	Kab. Wonogiri	10.744	358	-	11.102
29	Kab. Wonosobo	10.744	358	-	11.102
30	Kota Magelang	10.744	358	-	11.102
31	Kota Pekalongan	10.744	358	-	11.102
32	Kota Salatiga	10.744	358	-	11.102
33	Kota Semarang	10.744	358	-	11.102

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
24	Kab. Sragen	58.330	972	-	59.302	70.404
25	Kab. Sukoharjo	58.330	972	-	59.302	70.404
26	Kab. Tegal	58.330	972	-	59.302	70.404
27	Kab. Temanggung	58.330	972	-	59.302	70.404
28	Kab. Wonogiri	58.330	972	-	59.302	70.404
29	Kab. Wonosobo	58.330	972	-	59.302	70.404
30	Kota Magelang	58.330	972	-	59.302	70.404
31	Kota Pekalongan	58.330	972	-	59.302	70.404
32	Kota Salatiga	58.330	972	-	59.302	70.404
33	Kota Semarang	58.330	972	-	59.302	70.404

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
34	Kota Surakarta	10.744	358	-	11.102
35	Kota Tegal	10.744	358	-	11.102
X	Provinsi Jawa Timur	644.905.035	21.497.133	-	666.402.168
1	Kab. Bangkalan	36.355.725	1.211.726	-	37.567.451
2	Kab. Banyuwangi	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
3	Kab. Blitar	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
4	Kab. Bojonegoro	1.282.652.030	42.755.060	-	1.325.407.090
5	Kab. Bondowoso	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
6	Kab. Gresik	38.349.529	1.278.310	-	39.627.839
7	Kab. Jember	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
34	Kota Surakarta	58.330	972	-	59.302	70.404
35	Kota Tegal	58.330	972	-	59.302	70.404
X	Provinsi Jawa Timur	14.698.369	244.998	-	14.943.367	681.345.535
1	Kab. Bangkalan	794.398	13.239	-	807.637	38.375.088
2	Kab. Banyuwangi	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
3	Kab. Blitar	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
4	Kab. Bojonegoro	4.419.369	73.098	-	4.492.467	1.329.899.557
5	Kab. Bondowoso	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
6	Kab. Gresik	2.968.375	49.472	-	3.017.847	42.645.686
7	Kab. Jember	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
8	Kab. Jombang	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
9	Kab. Kediri	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
10	Kab. Lamongan	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
11	Kab. Lumajang	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
12	Kab. Madiun	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
13	Kab. Magetan	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
14	Kab. Malang	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
15	Kab. Mojokerto	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
16	Kab. Nganjuk	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
17	Kab. Ngawi	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
8	Kab. Jombang	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
9	Kab. Kediri	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
10	Kab. Lamongan	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
11	Kab. Lumajang	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
12	Kab. Madiun	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
13	Kab. Magetan	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
14	Kab. Malang	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
15	Kab. Mojokerto	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
16	Kab. Nganjuk	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
17	Kab. Ngawi	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
18	Kab. Pacitan	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
19	Kab. Pamekasan	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
20	Kab. Pasuruan	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
21	Kab. Ponorogo	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
22	Kab. Probolinggo	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
23	Kab. Sampang	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
24	Kab. Sidoarjo	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
25	Kab. Situbondo	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
26	Kab. Sumenep	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
27	Kab. Trenggalek	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
18	Kab. Pacitan	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
19	Kab. Pamekasan	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
20	Kab. Pasuruan	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
21	Kab. Ponorogo	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
22	Kab. Probolinggo	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
23	Kab. Sampang	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
24	Kab. Sidoarjo	17.360.335	289.339	-	17.649.674	53.670.732
25	Kab. Situbondo	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
26	Kab. Sumenep	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
27	Kab. Trenggalek	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
28	Kab. Tuban	37.647.532	1.254.910	-	38.902.442
29	Kab. Tulungagung	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
30	Kota Blitar	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
31	Kota Kediri	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
32	Kota Madiun	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
33	Kota Malang	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
34	Kota Mojokerto	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
35	Kota Pasuruan	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
36	Kota Probolinggo	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
37	Kota Surabaya	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
28	Kab. Tuban	794.398	13.239	-	807.637	39.710.079
29	Kab. Tulungagung	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
30	Kota Blitar	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
31	Kota Kediri	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
32	Kota Madiun	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
33	Kota Malang	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
34	Kota Mojokerto	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
35	Kota Pasuruan	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
36	Kota Probolinggo	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
37	Kota Surabaya	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
38	Kota Batu	34.859.096	1.161.962	-	36.021.058
XI	Provinsi Kalimantan Tengah	6.525	218	-	6.743
1	Kab. Barito Selatan	1.004	33	-	1.037
2	Kab. Barito Utara	13.051	435	-	13.486
3	Kab. Kapuas	1.004	33	-	1.037
4	Kab. Kotawaringin Barat	1.004	33	-	1.037
5	Kab. Kotawaringin Timur	1.004	33	-	1.037
6	Kota Palangkaraya	1.004	33	-	1.037
7	Kab. Katingan	1.004	33	-	1.037
8	Kab. Seruyan	1.004	33	-	1.037

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
38	Kota Batu	794.398	13.239	-	807.637	36.828.695
XI	Provinsi Kalimantan Tengah	332.339	5.539	-	337.878	344.621
1	Kab. Barito Selatan	51.129	852	-	51.981	53.018
2	Kab. Barito Utara	664.677	11.078	-	675.755	689.241
3	Kab. Kapuas	51.129	852	-	51.981	53.018
4	Kab. Kotawaringin Barat	51.129	852	-	51.981	53.018
5	Kab. Kotawaringin Timur	51.129	852	-	51.981	53.018
6	Kota Palangkaraya	51.129	852	-	51.981	53.018
7	Kab. Katingan	51.129	852	-	51.981	53.018
8	Kab. Seruyan	51.129	852	-	51.981	53.018

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
9	Kab. Sukamara	1.004	33	-	1.037
10	Kab. Lamandau	1.004	33	-	1.037
11	Kab. Gunung Mas	1.004	33	-	1.037
12	Kab. Pulang Pisau	1.004	33	-	1.037
13	Kab. Murung Raya	1.004	33	-	1.037
14	Kab. Barito Timur	1.004	33	-	1.037
XII	Provinsi Kalimantan Selatan	344.225	11.474	-	355.699
1	Kab. Banjar	57.371	1.912	-	59.283
2	Kab. Barito Kuala	57.371	1.912	-	59.283
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	57.371	1.912	-	59.283

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
9	Kab. Sukamara	51.129	852	-	51.981	53.018
10	Kab. Lamandau	51.129	852	-	51.981	53.018
11	Kab. Gunung Mas	51.129	852	-	51.981	53.018
12	Kab. Pulang Pisau	51.129	852	-	51.981	53.018
13	Kab. Murung Raya	51.129	852	-	51.981	53.018
14	Kab. Barito Timur	51.129	852	-	51.981	53.018
XII	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	355.699
1	Kab. Banjar	-	-	-	-	59.283
2	Kab. Barito Kuala	-	-	-	-	59.283
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-	-	-	59.283

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	57.371	1.912	-	59.283
5	Kab. Hulu Sungai Utara	57.371	1.912	-	59.283
6	Kab. Kotabaru	57.371	1.912	-	59.283
7	Kab. Tabalong	636.421	21.214	-	657.635
8	Kab. Tanah Laut	57.371	1.912	-	59.283
9	Kab. Tapin	57.371	1.912	-	59.283
10	Kota Banjarbaru	57.371	1.912	-	59.283
11	Kota Banjarmasin	57.371	1.912	-	59.283
12	Kab. Balangan	109.401	3.647	-	113.048
13	Kab. Tanah Bumbu	57.371	1.912	-	59.283

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	59.283
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	59.283
6	Kab. Kotabaru	-	-	-	-	59.283
7	Kab. Tabalong	-	-	-	-	657.635
8	Kab. Tanah Laut	-	-	-	-	59.283
9	Kab. Tapin	-	-	-	-	59.283
10	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	59.283
11	Kota Banjarmasin	-	-	-	-	59.283
12	Kab. Balangan	-	-	-	-	113.048
13	Kab. Tanah Bumbu	-	-	-	-	59.283

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
XIII	Provinsi Kalimantan Timur	63.921.107	2.147.456	-	66.068.563
1	Kab. Berau	13.646.261	453.200	-	14.099.461
2	Kab. Kutai Kartanegara	76.991.301	2.564.701	-	79.556.002
3	Kab. Kutai Barat	13.646.261	453.200	-	14.099.461
4	Kab. Kutai Timur	13.828.195	459.265	-	14.287.460
5	Kab. Paser	13.646.261	453.200	-	14.099.461
6	Kota Balikpapan	13.646.261	453.200	-	14.099.461
7	Kota Bontang	15.454.887	513.488	-	15.968.375
8	Kota Samarinda	13.857.219	460.232	-	14.317.451
9	Kab. Penajam Paser Utara	17.062.881	567.087	-	17.629.968

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
XIII	Provinsi Kalimantan Timur	43.798.788	738.379	-	44.537.167	110.605.730
1	Kab. Berau	9.173.138	152.046	-	9.325.184	23.424.645
2	Kab. Kutai Kartanegara	38.703.770	644.223	-	39.347.993	118.903.995
3	Kab. Kutai Barat	9.173.138	152.046	-	9.325.184	23.424.645
4	Kab. Kutai Timur	9.173.138	152.046	-	9.325.184	23.612.644
5	Kab. Paser	9.173.138	152.046	-	9.325.184	23.424.645
6	Kota Balikpapan	9.173.138	152.046	-	9.325.184	23.424.645
7	Kota Bontang	9.450.583	156.670	-	9.607.253	25.575.628
8	Kota Samarinda	9.212.615	152.704	-	9.365.319	23.682.770
9	Kab. Penajam Paser Utara	12.395.987	205.760	-	12.601.747	30.231.715

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
10	Kab. Mahakam Ulu	13.646.261	453.200	-	14.099.461
XIV	Provinsi Sulawesi Tengah	5.579.517	185.984	-	5.765.501
1	Kab. Banggai	11.159.033	371.968	-	11.531.001
2	Kab. Banggai Kepulauan	929.919	30.997	-	960.916
3	Kab. Buol	929.919	30.997	-	960.916
4	Kab. Toli-Toli	929.919	30.997	-	960.916
5	Kab. Donggala	929.919	30.997	-	960.916
6	Kab. Morowali	929.919	30.997	-	960.916
7	Kab. Poso	929.919	30.997	-	960.916
8	Kota Palu	929.919	30.997	-	960.916

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
10	Kab. Mahakam Ulu	9.173.138	152.046	-	9.325.184	23.424.645
XIV	Provinsi Sulawesi Tengah	33.137.320	552.289	-	33.689.609	39.455.110
1	Kab. Banggai	66.274.639	1.104.577	-	67.379.216	78.910.217
2	Kab. Banggai Kepulauan	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
3	Kab. Buol	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
4	Kab. Toli-Toli	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
5	Kab. Donggala	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
6	Kab. Morowali	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
7	Kab. Poso	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
8	Kota Palu	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
9	Kab. Parigi Moutong	929.919	30.997	-	960.916
10	Kab. Tojo Una Una	929.919	30.997	-	960.916
11	Kab. Sigi	929.919	30.997	-	960.916
12	Kab. Banggai Laut	929.919	30.997	-	960.916
13	Kab. Morowali Utara	929.919	30.997	-	960.916
XV	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	-
1	Kab. Bantaeng	-	-	-	-
2	Kab. Barru	-	-	-	-
3	Kab. Bone	-	-	-	-
4	Kab. Bulukumba	-	-	-	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
9	Kab. Parigi Moutong	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
10	Kab. Tojo Una Una	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
11	Kab. Sigi	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
12	Kab. Banggai Laut	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
13	Kab. Morowali Utara	5.522.887	92.048	-	5.614.935	6.575.851
XV	Provinsi Sulawesi Selatan	8.749.516	145.826	-	8.895.342	8.895.342
1	Kab. Bantaeng	760.828	12.680	-	773.508	773.508
2	Kab. Barru	760.828	12.680	-	773.508	773.508
3	Kab. Bone	760.828	12.680	-	773.508	773.508
4	Kab. Bulukumba	760.828	12.680	-	773.508	773.508

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
5	Kab. Enrekang	-	-	-	-
6	Kab. Gowa	-	-	-	-
7	Kab. Jeneponto	-	-	-	-
8	Kab. Luwu	-	-	-	-
9	Kab. Luwu Utara	-	-	-	-
10	Kab. Maros	-	-	-	-
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	-
12	Kota Palopo	-	-	-	-
13	Kab. Luwu Timur	-	-	-	-
14	Kab. Pinrang	-	-	-	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
5	Kab. Enrekang	760.828	12.680	-	773.508	773.508
6	Kab. Gowa	760.828	12.680	-	773.508	773.508
7	Kab. Jeneponto	760.828	12.680	-	773.508	773.508
8	Kab. Luwu	760.828	12.680	-	773.508	773.508
9	Kab. Luwu Utara	760.828	12.680	-	773.508	773.508
10	Kab. Maros	760.828	12.680	-	773.508	773.508
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	760.828	12.680	-	773.508	773.508
12	Kota Palopo	760.828	12.680	-	773.508	773.508
13	Kab. Luwu Timur	760.828	12.680	-	773.508	773.508
14	Kab. Pinrang	760.828	12.680	-	773.508	773.508

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
15	Kab. Sinjai	-	-	-	-
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	-
18	Kab. Soppeng	-	-	-	-
19	Kab. Takalar	-	-	-	-
20	Kab. Tana Toraja	-	-	-	-
21	Kab. Wajo	-	-	-	-
22	Kota Pare-pare	-	-	-	-
23	Kota Makassar	-	-	-	-
24	Kab. Toraja Utara	-	-	-	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
15	Kab. Sinjai	760.828	12.680	-	773.508	773.508
16	Kab. Kepulauan Selayar	760.828	12.680	-	773.508	773.508
17	Kab. Sidenreng Rappang	760.828	12.680	-	773.508	773.508
18	Kab. Soppeng	760.828	12.680	-	773.508	773.508
19	Kab. Takalar	760.828	12.680	-	773.508	773.508
20	Kab. Tana Toraja	760.828	12.680	-	773.508	773.508
21	Kab. Wajo	17.499.032	291.650	-	17.790.682	17.790.682
22	Kota Pare-pare	760.828	12.680	-	773.508	773.508
23	Kota Makassar	760.828	12.680	-	773.508	773.508
24	Kab. Toraja Utara	760.828	12.680	-	773.508	773.508

SK No 021464 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
XVI	Provinsi Maluku	2.661.402	88.714	-	2.750.116
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	532.280	17.743	-	550.023
2	Kab. Maluku Tengah	532.280	17.743	-	550.023
3	Kab. Maluku Tenggara	532.280	17.743	-	550.023
4	Kab. Buru	532.280	17.743	-	550.023
5	Kota Ambon	532.280	17.743	-	550.023
6	Kab. Seram Bagian Barat	532.280	17.743	-	550.023
7	Kab. Seram Bagian Timur	5.322.804	177.427	-	5.500.231
8	Kab. Kepulauan Aru	532.280	17.743	-	550.023
9	Kota Tual	532.280	17.743	-	550.023

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
XVI	Provinsi Maluku	-	-	-	-	2.750.116
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	-	-	-	550.023
2	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	-	550.023
3	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	550.023
4	Kab. Buru	-	-	-	-	550.023
5	Kota Ambon	-	-	-	-	550.023
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	550.023
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	5.500.231
8	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	-	550.023
9	Kota Tual	-	-	-	-	550.023

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
10	Kab. Maluku Barat Daya	532.280	17.743	-	550.023
11	Kab. Buru Selatan	532.280	17.743	-	550.023
XVII	Provinsi Bangka Belitung	1.139.273	38.735	-	1.178.008
1	Kab. Bangka	325.506	10.742	-	336.248
2	Kab. Belitung	325.506	10.742	-	336.248
3	Kota Pangkal Pinang	325.506	10.742	-	336.248
4	Kab. Bangka Selatan	325.506	10.742	-	336.248
5	Kab. Bangka Tengah	325.506	10.742	-	336.248
6	Kab. Bangka Barat	325.506	10.742	-	336.248
7	Kab. Belitung Timur	325.506	10.742	-	336.248

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-	-	550.023
11	Kab. Buru Selatan	-	-	-	-	550.023
XVII	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	-	1.178.008
1	Kab. Bangka	-	-	-	-	336.248
2	Kab. Belitung	-	-	-	-	336.248
3	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-	336.248
4	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	-	336.248
5	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	336.248
6	Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	336.248
7	Kab. Belitung Timur	-	-	-	-	336.248

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
XVIII	Provinsi Kepulauan Riau	5.948.198	200.659	-	6.148.857
1	Kab. Natuna	4.379.496	145.642	-	4.525.138
2	Kab. Kepulauan Anambas	3.194.649	106.147	-	3.300.796
3	Kab. Karimun	1.812.328	60.070	-	1.872.398
4	Kota Batam	1.812.328	60.070	-	1.872.398
5	Kota Tanjung Pinang	1.812.328	60.070	-	1.872.398
6	Kab. Lingga	1.812.328	60.070	-	1.872.398
7	Kab. Bintan	1.812.328	60.070	-	1.872.398
XIX	Provinsi Papua Barat	4.454.954	-	81.674.158	86.129.112
1	Kab. Fak Fak	742.492	-	-	742.492

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
XVIII	Provinsi Kepulauan Riau	83.280.120	1.414.063	-	84.694.183	90.843.040
1	Kab. Natuna	29.557.255	488.898	-	30.046.153	34.571.291
2	Kab. Kepulauan Anambas	27.009.431	446.434	-	27.455.865	30.756.661
3	Kab. Karimun	24.036.970	396.893	-	24.433.863	26.306.261
4	Kota Batam	24.036.970	396.893	-	24.433.863	26.306.261
5	Kota Tanjung Pinang	24.036.970	396.893	-	24.433.863	26.306.261
6	Kab. Lingga	24.036.970	396.893	-	24.433.863	26.306.261
7	Kab. Bintan	24.036.970	396.893	-	24.433.863	26.306.261
XIX	Provinsi Papua Barat	2.541.507	-	16.943.381	19.484.888	105.614.000
1	Kab. Fak Fak	423.585	-	-	423.585	1.166.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2	Kab. Manokwari	742.492	-	-	742.492
3	Kab. Sorong	8.884.951	-	-	8.884.951
4	Kota Sorong	742.492	-	-	742.492
5	Kab. Raja Ampat	742.492	-	-	742.492
6	Kab. Sorong Selatan	742.492	-	-	742.492
7	Kab. Teluk Bintuni	767.450	-	-	767.450
8	Kab. Teluk Wondama	742.492	-	-	742.492
9	Kab. Kaimana	742.492	-	-	742.492
10	Kab. Maybrat	742.492	-	-	742.492
11	Kab. Tambrauw	742.492	-	-	742.492

SK No 021471 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
2	Kab. Manokwari	423.585	-	-	423.585	1.166.077
3	Kab. Sorong	5.083.014	-	-	5.083.014	13.967.965
4	Kota Sorong	423.585	-	-	423.585	1.166.077
5	Kab. Raja Ampat	423.585	-	-	423.585	1.166.077
6	Kab. Sorong Selatan	423.585	-	-	423.585	1.166.077
7	Kab. Teluk Bintuni	423.585	-	-	423.585	1.191.035
8	Kab. Teluk Wondama	423.585	-	-	423.585	1.166.077
9	Kab. Kaimana	423.585	-	-	423.585	1.166.077
10	Kab. Maybrat	423.585	-	-	423.585	1.166.077
11	Kab. Tambrauw	423.585	-	-	423.585	1.166.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI			
		15%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
12	Kab. Manokwari Selatan	742.492	-	-	742.492
13	Kab. Pegunungan Arfak	742.492	-	-	742.492
XX	Provinsi Kalimantan Utara	1.746.592	58.220	-	1.804.812
1	Kab. Bulungan	2.196.671	73.222	-	2.269.893
2	Kab. Malinau	873.296	29.110	-	902.406
3	Kab. Nunukan	1.142.215	38.074	-	1.180.289
4	Kota Tarakan	1.900.891	63.363	-	1.964.254
5	Kab. Tana Tidung	873.296	29.110	-	902.406
XXI	Selisih Lebih	2.707.165.001	90.053.316	20.428.000	2.817.646.317
TOTAL		8.586.916.737	285.252.084	107.636.829	8.979.805.650

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.5
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI				JUMLAH
		30%	0,50%	Tambahan dalam rangka Otsus	Sub Jumlah	
1	2	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10
12	Kab. Manokwari Selatan	423.585	-	-	423.585	1.166.077
13	Kab. Pegunungan Arfak	423.585	-	-	423.585	1.166.077
XX	Provinsi Kalimantan Utara	235.738	3.929	-	239.667	2.044.479
1	Kab. Bulungan	225.182	3.753	-	228.935	2.498.828
2	Kab. Malinau	117.869	1.964	-	119.833	1.022.239
3	Kab. Nunukan	133.795	2.230	-	136.025	1.316.314
4	Kota Tarakan	348.238	5.804	-	354.042	2.318.296
5	Kab. Tana Tidung	117.869	1.964	-	119.833	1.022.239
XXI	Selisih Lebih	3.100.351.917	51.349.269	25.928.000	3.177.629.186	5.995.275.503
TOTAL		5.078.002.293	84.097.726	42.871.381	5.204.971.400	14.184.777.050

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
I	Provinsi Aceh	684.155	12.672.358	13.356.513
1	Kab. Aceh Barat	800.534	21.566.433	22.366.967
2	Kab. Aceh Besar	56.979	1.550.651	1.607.630
3	Kab. Aceh Selatan	107.729	1.152.032	1.259.761
4	Kab. Aceh Singkil	-	1.152.032	1.152.032
5	Kab. Aceh Tengah	334.294	1.152.032	1.486.326
6	Kab. Aceh Tenggara	-	1.152.032	1.152.032
7	Kab. Aceh Timur	-	1.152.032	1.152.032
8	Kab. Aceh Utara	-	1.152.032	1.152.032
9	Kab. Bireuen	-	1.152.032	1.152.032

SK No 021482 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
10	Kab. Pidie	349.968	1.152.032	1.502.000
11	Kab. Simeulue	-	1.152.032	1.152.032
12	Kota Banda Aceh	-	1.152.032	1.152.032
13	Kota Sabang	-	1.152.032	1.152.032
14	Kota Langsa	-	1.152.032	1.152.032
15	Kota Lhokseumawe	-	1.152.032	1.152.032
16	Kab. Gayo Lues	28.723	1.152.032	1.180.755
17	Kab. Aceh Barat Daya	61.056	1.152.032	1.213.088
18	Kab. Aceh Jaya	-	1.152.032	1.152.032
19	Kab. Nagan Raya	521.210	4.490.460	5.011.670

SK No 021483 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
20	Kab. Aceh Tamiang	-	1.152.032	1.152.032
21	Kab. Bener Meriah	-	1.152.032	1.152.032
22	Kab. Pidie Jaya	13.121	1.193.269	1.206.390
23	Kota Subulussalam	26.921	1.152.032	1.178.953
II	Provinsi Sumatera Utara	1.672.772	37.240.967	38.913.739
1	Kab. Asahan	264	2.327.561	2.327.825
2	Kab. Dairi	33.909	2.327.561	2.361.470
3	Kab. Deli Serdang	296	2.327.561	2.327.857
4	Kab. Karo	17	2.327.561	2.327.578
5	Kab. Labuhanbatu	442	2.327.561	2.328.003

SK No 021484 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
6	Kab. Langkat	316	2.327.561	2.327.877
7	Kab. Mandailing Natal	1.986.662	2.327.561	4.314.223
8	Kab. Nias	-	2.327.561	2.327.561
9	Kab. Simalungun	-	2.327.561	2.327.561
10	Kab. Tapanuli Selatan	1.306.368	74.481.935	75.788.303
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.335.764	2.327.561	3.663.325
12	Kab. Tapanuli Utara	353.247	2.327.561	2.680.808
13	Kab. Toba	205	2.327.561	2.327.766
14	Kota Binjai	-	2.327.561	2.327.561
15	Kota Medan	-	2.327.561	2.327.561

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
16	Kota Pematang Siantar	-	2.327.561	2.327.561
17	Kota Sibolga	-	2.327.561	2.327.561
18	Kota Tanjung Balai	-	2.327.561	2.327.561
19	Kota Tebing Tinggi	-	2.327.561	2.327.561
20	Kota Padang Sidempuan	1.029.648	2.327.561	3.357.209
21	Kab. Pakpak Bharat	8.333	2.327.561	2.335.894
22	Kab. Nias Selatan	-	2.327.561	2.327.561
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	2.327.561	2.327.561
24	Kab. Serdang Bedagai	-	2.327.561	2.327.561
25	Kab. Samosir	-	2.327.561	2.327.561

SK No 021486 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
26	Kab. Batu Bara	29	2.327.561	2.327.590
27	Kab. Padang Lawas	-	2.327.561	2.327.561
28	Kab. Padang Lawas Utara	3.511	2.327.561	2.331.072
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	32	2.327.561	2.327.593
30	Kab. Labuhanbatu Utara	8.128	2.327.561	2.335.689
31	Kab. Nias Utara	-	2.327.561	2.327.561
32	Kab. Nias Barat	-	2.327.561	2.327.561
33	Kota Gunungsitoli	-	2.327.561	2.327.561
III	Provinsi Sumatera Barat	147.851	5.043.464	5.191.315
1	Kab. Limapuluh Kota	75.962	560.385	636.347

SK No 021487 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Agam	7.919	560.385	568.304
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	560.385	560.385
4	Kab. Padang Pariaman	389	560.385	560.774
5	Kab. Pasaman	42.488	560.385	602.873
6	Kab. Pesisir Selatan	31.686	1.607.585	1.639.271
7	Kab. Sijunjung	83.720	1.389.151	1.472.871
8	Kab. Solok	22.047	560.385	582.432
9	Kab. Tanah Datar	-	560.385	560.385
10	Kota Bukit Tinggi	-	560.385	560.385
11	Kota Padang Panjang	-	560.385	560.385

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kota Padang	-	560.385	560.385
13	Kota Payakumbuh	-	560.385	560.385
14	Kota Sawahlunto	155.299	8.309.858	8.465.157
15	Kota Solok	-	560.385	560.385
16	Kota Pariaman	-	560.385	560.385
17	Kab. Pasaman Barat	8.537	560.385	568.922
18	Kab. Dharmasraya	57.322	790.351	847.673
19	Kab. Solok Selatan	45.162	560.385	605.547
IV	Provinsi Riau	842.317	9.355.714	10.198.031
1	Kab. Bengkalis	-	1.701.039	1.701.039

SK No 021489 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Indragiri Hilir	612.538	13.552.672	14.165.210
3	Kab. Indragiri Hulu	1.994.736	2.224.908	4.219.644
4	Kab. Kampar	282	1.701.039	1.701.321
5	Kab. Kuantan Singingi	250.427	2.695.139	2.945.566
6	Kab. Pelalawan	-	1.701.039	1.701.039
7	Kab. Rokan Hilir	-	1.701.039	1.701.039
8	Kab. Rokan Hulu	48.523	1.701.039	1.749.562
9	Kab. Siak	-	1.701.039	1.701.039
10	Kota Dumai	-	1.701.039	1.701.039
11	Kota Pekanbaru	-	1.701.039	1.701.039

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Kepulauan Meranti	607.457	5.846.849	6.454.306
V	Provinsi Jambi	1.601.478	29.181.648	30.783.126
1	Kab. Batang Hari	979.420	12.787.080	13.766.500
2	Kab. Bungo	186.874	21.694.917	21.881.791
3	Kab. Kerinci	-	5.836.330	5.836.330
4	Kab. Merangin	470.225	5.836.330	6.306.555
5	Kab. Muaro Jambi	355.872	6.858.096	7.213.968
6	Kab. Sarolangun	2.756.660	31.859.081	34.615.741
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	9.725	6.523.814	6.533.539
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	5.836.330	5.836.330

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
9	Kab. Tebo	1.280.692	10.743.548	12.024.240
10	Kota Jambi	-	5.836.330	5.836.330
11	Kota Sungai Penuh	-	5.836.330	5.836.330
VI	Provinsi Sumatera Selatan	6.428.167	264.380.102	270.808.269
1	Kab. Lahat	1.210.007	263.812.893	265.022.900
2	Kab. Musi Banyuasin	8.081.633	56.137.989	64.219.622
3	Kab. Musi Rawas	2.089.556	33.047.513	35.137.069
4	Kab. Muara Enim	4.421.668	301.492.576	305.914.244
5	Kab. Ogan Komering Ilir	527.789	33.047.513	33.575.302
6	Kab. Ogan Komering Ulu	1.547.309	34.605.209	36.152.518

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kota Palembang	-	33.047.513	33.047.513
8	Kota Prabumulih	373.516	33.047.513	33.421.029
9	Kota Pagar Alam	-	33.047.513	33.047.513
10	Kota Lubuk Linggau	-	33.047.513	33.047.513
11	Kab. Banyuasin	1.620.005	34.955.963	36.575.968
12	Kab. Ogan Ilir	303.840	33.047.513	33.351.353
13	Kab. OKU Timur	863.712	33.047.513	33.911.225
14	Kab. OKU Selatan	553.306	33.047.513	33.600.819
15	Kab. Empat Lawang	77.914	33.047.513	33.125.427
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	840.937	33.047.513	33.888.450

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
17	Kab. Musi Rawas Utara	4.919.528	45.097.515	50.017.043
VII	Provinsi Bengkulu	490.786	24.201.802	24.692.588
1	Kab. Bengkulu Selatan	59	5.378.178	5.378.237
2	Kab. Bengkulu Utara	1.153.404	24.118.204	25.271.608
3	Kab. Rejang Lebong	19	5.378.178	5.378.197
4	Kota Bengkulu	-	5.378.178	5.378.178
5	Kab. Kaur	9.272	5.458.178	5.467.450
6	Kab. Seluma	102.208	6.120.962	6.223.170
7	Kab. Mukomuko	-	5.378.178	5.378.178
8	Kab. Lebong	330.842	5.444.443	5.775.285

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
9	Kab. Kepahiang	-	5.378.178	5.378.178
10	Kab. Bengkulu Tengah	340.789	26.599.290	26.940.079
VIII	Provinsi Lampung	244.123	1.287.130	1.531.253
1	Kab. Lampung Barat	200.653	183.876	384.529
2	Kab. Lampung Selatan	2.578	183.876	186.454
3	Kab. Lampung Tengah	1.167	183.876	185.043
4	Kab. Lampung Utara	-	183.876	183.876
5	Kab. Lampung Timur	538	183.876	184.414
6	Kab. Tanggamus	412.684	2.574.259	2.986.943
7	Kab. Tulang Bawang	402	183.876	184.278

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kab. Way Kanan	119.901	183.876	303.777
9	Kota Bandar Lampung	-	183.876	183.876
10	Kota Metro	-	183.876	183.876
11	Kab. Pesawaran	39.407	183.876	223.283
12	Kab. Pringsewu	305	183.876	184.181
13	Kab. Mesuji	1.965	183.876	185.841
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	183.876	183.876
15	Kab. Pesisir Barat	-	183.876	183.876
IX	Provinsi Jawa Barat	336.495	5.959.774	6.296.269
1	Kab. Bandung	-	458.444	458.444

SK No 021496 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Bekasi	-	458.444	458.444
3	Kab. Bogor	399.515	11.919.548	12.319.063
4	Kab. Ciamis	-	458.444	458.444
5	Kab. Cianjur	297.542	458.444	755.986
6	Kab. Cirebon	22.300	458.444	480.744
7	Kab. Garut	301.063	458.444	759.507
8	Kab. Indramayu	-	458.444	458.444
9	Kab. Karawang	-	458.444	458.444
10	Kab. Kuningan	-	458.444	458.444
11	Kab. Majalengka	-	458.444	458.444

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Purwakarta	12.255	458.444	470.699
13	Kab. Subang	-	458.444	458.444
14	Kab. Sukabumi	231.751	606.215	837.966
15	Kab. Sumedang	-	458.444	458.444
16	Kab. Tasikmalaya	436	611.259	611.695
17	Kota Bandung	-	458.444	458.444
18	Kota Bekasi	-	458.444	458.444
19	Kota Bogor	-	458.444	458.444
20	Kota Cirebon	-	458.444	458.444
21	Kota Depok	-	458.444	458.444

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
22	Kota Sukabumi	-	458.444	458.444
23	Kota Tasikmalaya	-	458.444	458.444
24	Kota Cimahi	-	458.444	458.444
25	Kota Banjar	-	611.259	611.259
26	Kab. Bandung Barat	-	458.444	458.444
27	Kab. Pangandaran	-	458.444	458.444
X	Provinsi Jawa Tengah	32.248	20.838	53.086
1	Kab. Banjarnegara	2.733	1.226	3.959
2	Kab. Banyumas	25.056	1.226	26.282
3	Kab. Batang	825	1.226	2.051

SK No 021499 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
4	Kab. Blora	899	1.226	2.125
5	Kab. Boyolali	1.491	1.226	2.717
6	Kab. Brebes	2.131	1.226	3.357
7	Kab. Cilacap	32.021	41.676	73.697
8	Kab. Demak	203	1.226	1.429
9	Kab. Grobogan	3.937	1.226	5.163
10	Kab. Jepara	2.239	1.226	3.465
11	Kab. Karanganyar	781	1.226	2.007
12	Kab. Kebumen	1.631	1.226	2.857
13	Kab. Kendal	3.110	1.226	4.336

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
14	Kab. Klaten	637	1.226	1.863
15	Kab. Kudus	-	1.226	1.226
16	Kab. Magelang	1.148	1.226	2.374
17	Kab. Pati	1.091	1.226	2.317
18	Kab. Pekalongan	2.831	1.226	4.057
19	Kab. Pemalang	2.083	1.226	3.309
20	Kab. Purbalingga	470	1.226	1.696
21	Kab. Purworejo	4.292	1.226	5.518
22	Kab. Rembang	3.951	1.226	5.177
23	Kab. Semarang	1.282	1.226	2.508

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
24	Kab. Sragen	1.316	1.226	2.542
25	Kab. Sukoharjo	974	1.226	2.200
26	Kab. Tegal	4.035	1.226	5.261
27	Kab. Temanggung	-	1.226	1.226
28	Kab. Wonogiri	4.848	1.226	6.074
29	Kab. Wonosobo	-	1.226	1.226
30	Kota Magelang	-	1.226	1.226
31	Kota Pekalongan	-	1.226	1.226
32	Kota Salatiga	-	1.226	1.226
33	Kota Semarang	-	1.226	1.226

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
34	Kota Surakarta	-	1.226	1.226
35	Kota Tegal	-	1.226	1.226
XI	Provinsi DI Yogyakarta	21.435	-	21.435
1	Kab. Kulon Progo	85.740	-	85.740
XII	Provinsi Jawa Timur	132.252	32.149.385	32.281.637
1	Kab. Bangkalan	-	1.737.805	1.737.805
2	Kab. Banyuwangi	338.356	64.262.738	64.601.094
3	Kab. Blitar	-	1.737.805	1.737.805
4	Kab. Bojonegoro	-	1.737.805	1.737.805
5	Kab. Bondowoso	-	1.737.805	1.737.805

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
6	Kab. Gresik	-	1.737.805	1.737.805
7	Kab. Jember	9.173	1.737.805	1.746.978
8	Kab. Jombang	-	1.737.805	1.737.805
9	Kab. Kediri	-	1.737.805	1.737.805
10	Kab. Lamongan	-	1.737.805	1.737.805
11	Kab. Lumajang	32.447	1.737.805	1.770.252
12	Kab. Madiun	-	1.737.805	1.737.805
13	Kab. Magetan	-	1.737.805	1.737.805
14	Kab. Malang	2.273	1.737.805	1.740.078
15	Kab. Mojokerto	9.166	1.737.805	1.746.971

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
16	Kab. Nganjuk	-	1.737.805	1.737.805
17	Kab. Ngawi	-	1.737.805	1.737.805
18	Kab. Pacitan	6.773	1.773.836	1.780.609
19	Kab. Pamekasan	-	1.737.805	1.737.805
20	Kab. Pasuruan	-	1.737.805	1.737.805
21	Kab. Ponorogo	-	1.737.805	1.737.805
22	Kab. Probolinggo	-	1.737.805	1.737.805
23	Kab. Sampang	-	1.737.805	1.737.805
24	Kab. Sidoarjo	-	1.737.805	1.737.805
25	Kab. Situbondo	-	1.737.805	1.737.805

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
26	Kab. Sumenep	-	1.737.805	1.737.805
27	Kab. Trenggalek	5.532	1.737.805	1.743.337
28	Kab. Tuban	-	1.737.805	1.737.805
29	Kab. Tulungagung	4.223	1.737.805	1.742.028
30	Kota Blitar	-	1.737.805	1.737.805
31	Kota Kediri	-	1.737.805	1.737.805
32	Kota Madiun	-	1.737.805	1.737.805
33	Kota Malang	-	1.737.805	1.737.805
34	Kota Mojokerto	-	1.737.805	1.737.805
35	Kota Pasuruan	-	1.737.805	1.737.805

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
36	Kota Probolinggo	-	1.737.805	1.737.805
37	Kota Surabaya	-	1.737.805	1.737.805
38	Kota Batu	-	1.737.805	1.737.805
XIII	Provinsi Kalimantan Barat	6.929.165	71.953.695	78.882.860
1	Kab. Bengkayang	134.554	11.069.799	11.204.353
2	Kab. Landak	2.051.738	11.069.799	13.121.537
3	Kab. Kapuas Hulu	1.906.718	11.159.813	13.066.531
4	Kab. Ketapang	12.306.548	92.519.425	104.825.973
5	Kab. Mempawah	553.468	11.290.675	11.844.143
6	Kab. Sambas	15.956	11.069.799	11.085.755

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kab. Sanggau	10.715.810	62.146.877	72.862.687
8	Kab. Sintang	535.689	11.069.799	11.605.488
9	Kota Pontianak	-	11.069.799	11.069.799
10	Kota Singkawang	34.620	11.069.799	11.104.419
11	Kab. Sekadau	308.880	11.069.799	11.378.679
12	Kab. Melawi	7.680	11.069.799	11.077.479
13	Kab. Kayong Utara	183.358	11.069.799	11.253.157
14	Kab. Kubu Raya	14.157	11.069.799	11.083.956
XIV	Provinsi Kalimantan Tengah	4.388.275	152.690.042	157.078.317
1	Kab. Barito Selatan	569.856	40.441.615	41.011.471

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Barito Utara	3.675.789	93.276.635	96.952.424
3	Kab. Kapuas	1.911.552	119.916.125	121.827.677
4	Kab. Kotawaringin Barat	724.925	23.726.693	24.451.618
5	Kab. Kotawaringin Timur	796.258	43.370.605	44.166.863
6	Kota Palangkaraya	-	23.494.320	23.494.320
7	Kab. Katingan	970.521	31.482.377	32.452.898
8	Kab. Seruyan	1.017.533	23.560.562	24.578.095
9	Kab. Sukamara	321.139	23.490.776	23.811.915
10	Kab. Lamandau	954.000	28.598.289	29.552.289
11	Kab. Gunung Mas	1.655.478	23.513.199	25.168.677

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Pulang Pisau	-	23.490.776	23.490.776
13	Kab. Murung Raya	2.457.984	91.429.075	93.887.059
14	Kab. Barito Timur	1.281.000	39.657.494	40.938.494
XV	Provinsi Kalimantan Selatan	1.841.640	503.502.670	505.344.310
1	Kab. Banjar	469.982	115.946.422	116.416.404
2	Kab. Barito Kuala	-	83.917.112	83.917.112
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	6.746	129.095.400	129.102.146
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	83.917.112	83.917.112
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	83.917.112	83.917.112
6	Kab. Kotabaru	3.260.729	143.248.472	146.509.201

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kab. Tabalong	737.000	204.427.919	205.164.919
8	Kab. Tanah Laut	324.484	295.120.359	295.444.843
9	Kab. Tapin	336.161	160.227.542	160.563.703
10	Kota Banjarbaru	113.050	83.917.112	84.030.162
11	Kota Banjarmasin	-	83.917.112	83.917.112
12	Kab. Balangan	155.328	204.235.023	204.390.351
13	Kab. Tanah Bumbu	1.963.081	342.123.984	344.087.065
XVI	Provinsi Kalimantan Timur	8.239.652	1.068.518.205	1.076.757.857
1	Kab. Berau	2.768.677	473.589.081	476.357.758
2	Kab. Kutai Kartanegara	9.801.922	794.763.002	804.564.924

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
3	Kab. Kutai Barat	8.973.079	445.291.400	454.264.479
4	Kab. Kutai Timur	8.115.311	920.874.650	928.989.961
5	Kab. Paser	1.313.125	407.753.734	409.066.859
6	Kota Balikpapan	-	237.448.490	237.448.490
7	Kota Bontang	-	237.448.490	237.448.490
8	Kota Samarinda	1.242	281.135.333	281.136.575
9	Kab. Penajam Paser Utara	667.441	238.320.151	238.987.592
10	Kab. Mahakam Ulu	1.317.812	237.448.490	238.766.302
XVII	Provinsi Sulawesi Utara	2.417.204	36.575.807	38.993.011
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.923.239	15.367.842	17.291.081

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Minahasa	-	5.225.115	5.225.115
3	Kab. Sangihe	33.280	5.225.115	5.258.395
4	Kota Bitung	469.151	45.826.145	46.295.296
5	Kota Manado	-	5.225.115	5.225.115
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	5.225.115	5.225.115
7	Kab. Minahasa Selatan	90.543	5.915.816	6.006.359
8	Kota Tomohon	-	5.225.115	5.225.115
9	Kab. Minahasa Utara	2.992.320	14.212.483	17.204.803
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	5.225.115	5.225.115
11	Kota Kotamobagu	242.756	5.225.115	5.467.871

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	352.454	5.225.115	5.577.569
13	Kab. Minahasa Tenggara	46.040	5.225.115	5.271.155
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.259.290	5.225.115	6.484.405
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.313.533	12.729.790	15.043.323
XVIII	Provinsi Sulawesi Tengah	1.975.860	64.574.615	66.550.475
1	Kab. Banggai	562.266	18.524.797	19.087.063
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	10.762.436	10.762.436
3	Kab. Buol	309.542	10.762.436	11.071.978
4	Kab. Toli-Toli	129.690	10.762.436	10.892.126
5	Kab. Donggala	116.189	10.762.436	10.878.625

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
6	Kab. Morowali	4.847.374	109.915.776	114.763.150
7	Kab. Poso	-	10.762.436	10.762.436
8	Kota Palu	194.314	10.762.436	10.956.750
9	Kab. Parigi Moutong	331.295	10.762.436	11.093.731
10	Kab. Tojo Una Una	238.566	10.762.436	11.001.002
11	Kab. Sigi	-	10.762.436	10.762.436
12	Kab. Banggai Laut	-	10.762.436	10.762.436
13	Kab. Morowali Utara	967.524	22.233.529	23.201.053
XIX	Provinsi Sulawesi Selatan	769.133	35.362.952	36.132.085
1	Kab. Bantaeng	-	3.075.039	3.075.039

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	Kab. Barru	5.112	3.075.039	3.080.151
3	Kab. Bone	468.749	3.143.737	3.612.486
4	Kab. Bulukumba	-	3.075.039	3.075.039
5	Kab. Enrekang	2.754	3.075.211	3.077.965
6	Kab. Gowa	-	3.075.039	3.075.039
7	Kab. Jeneponto	-	3.075.039	3.075.039
8	Kab. Luwu	425.338	3.075.039	3.500.377
9	Kab. Luwu Utara	949.030	3.075.039	4.024.069
10	Kab. Maros	61.458	3.075.039	3.136.497
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	26.575	3.137.898	3.164.473

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
12	Kota Palopo	-	3.075.039	3.075.039
13	Kab. Luwu Timur	825.065	70.591.490	71.416.555
14	Kab. Pinrang	-	3.075.039	3.075.039
15	Kab. Sinjai	-	3.077.726	3.077.726
16	Kab. Kepulauan Selayar	2.361	3.075.039	3.077.400
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	3.075.039	3.075.039
18	Kab. Soppeng	1.602	3.075.039	3.076.641
19	Kab. Takalar	2.649	3.075.039	3.077.688
20	Kab. Tana Toraja	214	3.075.039	3.075.253
21	Kab. Wajo	77	3.075.039	3.075.116

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
22	Kota Pare-pare	-	3.075.039	3.075.039
23	Kota Makassar	-	3.075.039	3.075.039
24	Kab. Toraja Utara	2.724	3.075.039	3.077.763
XX	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.010.437	134.792.277	137.802.714
1	Kab. Buton	829.715	17.427.410	18.257.125
2	Kab. Konawe	1.931.242	18.886.700	20.817.942
3	Kab. Kolaka	3.270.949	76.560.245	79.831.194
4	Kab. Muna	-	16.849.034	16.849.034
5	Kota Kendari	-	16.849.034	16.849.034
6	Kota Bau-bau	51.725	16.849.034	16.900.759

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
7	Kab. Konawe Selatan	615.654	38.961.598	39.577.252
8	Kab. Bombana	1.805.247	55.496.792	57.302.039
9	Kab. Wakatobi	-	16.849.034	16.849.034
10	Kab. Kolaka Utara	926.180	29.518.316	30.444.496
11	Kab. Konawe Utara	2.481.145	139.703.510	142.184.655
12	Kab. Buton Utara	37.655	16.849.034	16.886.689
13	Kab. Konawe Kepulauan	242.000	16.879.634	17.121.634
14	Kab. Kolaka Timur	87.380	16.849.034	16.936.414
15	Kab. Muna Barat	-	16.849.034	16.849.034
16	Kab. Buton Tengah	111.196	23.149.208	23.260.404

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
17	Kab. Buton Selatan	118.607	17.018.858	17.137.465
XXI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.120.219	51.884.145	53.004.364
1	Kab. Bima	693.965	11.559.795	12.253.760
2	Kab. Dompu	528.742	11.537.959	12.066.701
3	Kab. Lombok Barat	143.232	11.529.898	11.673.130
4	Kab. Lombok Tengah	-	11.529.810	11.529.810
5	Kab. Lombok Timur	51.763	11.595.645	11.647.408
6	Kab. Sumbawa	1.361.184	11.529.810	12.890.994
7	Kota Mataram	-	11.529.810	11.529.810
8	Kota Bima	-	11.529.810	11.529.810

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
9	Kab. Sumbawa Barat	1.397.453	103.664.233	105.061.686
10	Kab. Lombok Utara	-	11.529.810	11.529.810
XXII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	499.337	-	499.337
1	Kab. Belu	457.365	-	457.365
2	Kab. Kupang	141.476	-	141.476
3	Kab. Manggarai	53.768	-	53.768
4	Kab. Sumba Timur	53.862	-	53.862
5	Kab. Timor Tengah Selatan	603.866	-	603.866
6	Kab. Timor Tengah Utara	687.975	-	687.975
7	Kab. Nagekeo	3.840	-	3.840

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kab. Manggarai Timur	28.274	-	28.274
9	Kab. Sabu Raijua	57.262	-	57.262
XXIII	Provinsi Maluku	103.272	1.184.999	1.288.271
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	237.000	237.000
2	Kab. Maluku Tengah	826	237.000	237.826
3	Kab. Maluku Tenggara	-	237.000	237.000
4	Kab. Buru	-	237.000	237.000
5	Kota Ambon	-	237.000	237.000
6	Kab. Seram Bagian Barat	6.851	237.000	243.851
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	237.000	237.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
8	Kab. Kepulauan Aru	-	237.000	237.000
9	Kota Tual	-	237.000	237.000
10	Kab. Maluku Barat Daya	402.854	2.369.998	2.772.852
11	Kab. Buru Selatan	-	237.000	237.000
XXIV	Provinsi Papua	2.335.781	322.239.474	324.575.255
1	Kab. Biak Numfor	-	23.017.105	23.017.105
2	Kab. Jayapura	97.783	23.017.105	23.114.888
3	Kab. Jayawijaya	-	23.017.105	23.017.105
4	Kab. Merauke	-	23.017.105	23.017.105
5	Kab. Mimika	2.764.723	644.478.948	647.243.671

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
6	Kab. Nabire	86.272	23.017.105	23.103.377
7	Kab. Paniai	-	23.017.105	23.017.105
8	Kab. Puncak Jaya	-	23.017.105	23.017.105
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	23.017.105	23.017.105
10	Kota Jayapura	-	23.017.105	23.017.105
11	Kab. Sarmi	810.336	23.017.105	23.827.441
12	Kab. Keerom	1.527.399	23.017.105	24.544.504
13	Kab. Yahukimo	-	23.017.105	23.017.105
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.591.844	23.017.105	26.608.949
15	Kab. Tolikara	-	23.017.105	23.017.105

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
16	Kab. Boven Digoel	-	23.017.105	23.017.105
17	Kab. Mappi	-	23.017.105	23.017.105
18	Kab. Asmat	-	23.017.105	23.017.105
19	Kab. Waropen	-	23.017.105	23.017.105
20	Kab. Supiori	-	23.017.105	23.017.105
21	Kab. Mamberamo Raya	-	23.017.105	23.017.105
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	23.017.105	23.017.105
23	Kab. Yalimo	-	23.017.105	23.017.105
24	Kab. Lanny Jaya	-	23.017.105	23.017.105
25	Kab. Nduga	-	23.017.105	23.017.105

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
26	Kab. Dogiyai	-	23.017.105	23.017.105
27	Kab. Puncak	-	23.017.105	23.017.105
28	Kab. Intan Jaya	-	23.017.105	23.017.105
29	Kab. Deiyai	-	23.017.105	23.017.105
XXV	Provinsi Maluku Utara	5.302.545	83.455.412	88.757.957
1	Kab. Halmahera Tengah	3.406.392	53.648.588	57.054.980
2	Kota Ternate	-	18.545.647	18.545.647
3	Kab. Halmahera Barat	543.049	18.545.647	19.088.696
4	Kab. Halmahera Timur	4.120.708	43.596.221	47.716.929
5	Kab. Halmahera Selatan	1.850.615	68.075.034	69.925.649

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
6	Kab. Halmahera Utara	1.714.991	48.833.896	50.548.887
7	Kab. Kepulauan Sula	3.260.500	18.545.647	21.806.147
8	Kota Tidore Kepulauan	340.954	18.545.647	18.886.601
9	Kab. Pulau Morotai	101.466	18.545.647	18.647.113
10	Kab. Pulau Taliabu	7.627.556	26.939.674	34.567.230
XXVI	Provinsi Banten	271.347	1.242.485	1.513.832
1	Kab. Lebak	859.638	354.996	1.214.634
2	Kab. Pandeglang	192.069	2.484.969	2.677.038
3	Kab. Serang	9.599	354.996	364.595
4	Kab. Tangerang	-	354.996	354.996

SK No 022027 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
5	Kota Cilegon	414	354.996	355.410
6	Kota Tangerang	-	354.996	354.996
7	Kota Serang	-	354.996	354.996
8	Kota Tangerang Selatan	-	354.996	354.996
XXVII	Provinsi Bangka Belitung	24.431.313	86.437.404	110.868.717
1	Kab. Bangka	2.529.842	60.529.561	63.059.403
2	Kab. Belitung	785.267	34.803.884	35.589.151
3	Kota Pangkal Pinang	-	28.879.802	28.879.802
4	Kab. Bangka Selatan	1.415.142	46.438.107	47.853.249
5	Kab. Bangka Tengah	947.610	39.004.755	39.952.365

SK No 022028 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
6	Kab. Bangka Barat	2.137.845	46.237.431	48.375.276
7	Kab. Belitung Timur	1.603.123	39.854.547	41.457.670
XXVIII	Provinsi Gorontalo	24.048	-	24.048
1	Kab. Gorontalo	5.990	-	5.990
2	Kab. Pohuwato	14.874	-	14.874
3	Kab. Bone Bolango	63.808	-	63.808
4	Kab. Gorontalo Utara	11.520	-	11.520
XXIX	Provinsi Kepulauan Riau	825.725	5.175.442	6.001.167
1	Kab. Natuna	-	1.649.180	1.649.180
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	1.649.180	1.649.180

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
3	Kab. Karimun	848.123	4.689.623	5.537.746
4	Kota Batam	-	1.649.180	1.649.180
5	Kota Tanjung Pinang	863	1.649.180	1.650.043
6	Kab. Lingga	536.010	1.649.180	2.185.190
7	Kab. Bintan	22.223	3.777.983	3.800.206
XXX	Provinsi Papua Barat	788.709	6.225.751	7.014.460
1	Kab. Fak Fak	23.501	1.037.625	1.061.126
2	Kab. Manokwari	10.757	1.037.625	1.048.382
3	Kab. Sorong	1.543.306	1.512.825	3.056.131
4	Kota Sorong	-	1.037.625	1.037.625

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
5	Kab. Raja Ampat	1.099.546	11.976.302	13.075.848
6	Kab. Sorong Selatan	-	1.037.625	1.037.625
7	Kab. Teluk Bintuni	-	1.037.625	1.037.625
8	Kab. Teluk Wondama	637.385	1.037.625	1.675.010
9	Kab. Kaimana	-	1.037.625	1.037.625
10	Kab. Maybrat	151.753	1.037.625	1.189.378
11	Kab. Tambrauw	-	1.037.625	1.037.625
12	Kab. Manokwari Selatan	-	1.037.625	1.037.625
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	1.037.625	1.037.625
XXXI	Provinsi Sulawesi Barat	22.953	-	22.953

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Kab. Mamuju	30.062	-	30.062
2	Kab. Polewali Mandar	9.653	-	9.653
3	Kab. Pasangkayu	39.072	-	39.072
XXXII	Provinsi Kalimantan Utara	796.351	102.008.715	102.805.066
1	Kab. Bulungan	1.348.406	62.751.399	64.099.805
2	Kab. Malinau	638.478	110.122.362	110.760.840
3	Kab. Nunukan	818.706	94.250.609	95.069.315
4	Kota Tarakan	-	51.004.358	51.004.358

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.6
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
5	Kab. Tana Tidung	379.814	78.742.254	79.122.068
XXXIII	Selisih Lebih	49.148.062	1.570.092.403	1.619.240.465
TOTAL		353.703.943	17.326.727.909	17.680.431.852

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
I	Provinsi Aceh	-	87.495	-	87.495
1	Kab. Aceh Barat	-	12.409	-	12.409
2	Kab. Aceh Besar	-	15.458	-	15.458
3	Kab. Aceh Selatan	-	19.105	-	19.105
4	Kab. Aceh Singkil	-	13.932	-	13.932
5	Kab. Aceh Tengah	-	50.748	-	50.748
6	Kab. Aceh Tenggara	-	7.954	-	7.954
7	Kab. Aceh Timur	-	21.448	-	21.448
8	Kab. Aceh Utara	-	13.075	-	13.075
9	Kab. Bireuen	-	7.954	-	7.954

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
10	Kab. Pidie	-	9.055	-	9.055
11	Kab. Simeulue	-	22.361	-	22.361
12	Kota Banda Aceh	-	7.954	-	7.954
13	Kota Sabang	-	7.954	-	7.954
14	Kota Langsa	-	8.128	-	8.128
15	Kota Lhokseumawe	-	7.954	-	7.954
16	Kab. Gayo Lues	-	10.496	-	10.496
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	7.954	-	7.954
18	Kab. Aceh Jaya	-	17.526	-	17.526
19	Kab. Nagan Raya	-	19.381	-	19.381

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
20	Kab. Aceh Tamiang	-	11.859	-	11.859
21	Kab. Bener Meriah	-	29.846	-	29.846
22	Kab. Pidie Jaya	-	7.954	-	7.954
23	Kota Subulussalam	-	7.954	-	7.954
II	Provinsi Sumatera Utara	-	3.554.255	8.569.590	12.123.845
1	Kab. Asahan	-	222.141	-	222.141
2	Kab. Dairi	-	248.913	-	248.913
3	Kab. Deli Serdang	-	222.373	-	222.373
4	Kab. Karo	-	721.884	-	721.884
5	Kab. Labuhanbatu	-	222.141	-	222.141

SK No 023366 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
6	Kab. Langkat	-	224.639	-	224.639
7	Kab. Mandailing Natal	-	428.951	-	428.951
8	Kab. Nias	-	222.141	-	222.141
9	Kab. Simalungun	-	757.580	-	757.580
10	Kab. Tapanuli Selatan	-	327.973	-	327.973
11	Kab. Tapanuli Tengah	-	222.320	-	222.320
12	Kab. Tapanuli Utara	-	864.668	-	864.668
13	Kab. Toba	-	936.059	-	936.059
14	Kota Binjai	-	222.141	-	222.141
15	Kota Medan	-	222.141	-	222.141

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
16	Kota Pematang Siantar	-	222.141	-	222.141
17	Kota Sibolga	-	222.141	-	222.141
18	Kota Tanjung Balai	-	222.141	-	222.141
19	Kota Tebing Tinggi	-	222.141	-	222.141
20	Kota Padang Sidempuan	-	222.141	-	222.141
21	Kab. Pakpak Bharat	-	236.420	-	236.420
22	Kab. Nias Selatan	-	316.939	-	316.939
23	Kab. Humbang Hasundutan	-	614.796	-	614.796
24	Kab. Serdang Bedagai	-	222.141	-	222.141
25	Kab. Samosir	-	577.316	-	577.316

SK No 023368 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
26	Kab. Batu Bara	-	222.141	-	222.141
27	Kab. Padang Lawas	-	1.471.498	-	1.471.498
28	Kab. Padang Lawas Utara	-	757.580	-	757.580
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	1.828.457	-	1.828.457
30	Kab. Labuhanbatu Utara	-	351.311	-	351.311
31	Kab. Nias Utara	-	222.141	-	222.141
32	Kab. Nias Barat	-	222.141	-	222.141
33	Kota Gunungsitoli	-	222.141	-	222.141
III	Provinsi Sumatera Barat	-	2.311.115	9.108.347	11.419.462
1	Kab. Limapuluh Kota	-	278.367	-	278.367

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Agam	-	260.270	-	260.270
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-	3.562.821	-	3.562.821
4	Kab. Padang Pariaman	-	256.790	-	256.790
5	Kab. Pasaman	-	263.750	-	263.750
6	Kab. Pesisir Selatan	-	302.031	-	302.031
7	Kab. Sijunjung	-	709.195	-	709.195
8	Kab. Solok	-	274.191	-	274.191
9	Kab. Tanah Datar	-	265.142	-	265.142
10	Kota Bukit Tinggi	-	256.790	-	256.790
11	Kota Padang Panjang	-	256.790	-	256.790

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
12	Kota Padang	-	259.574	-	259.574
13	Kota Payakumbuh	-	257.165	-	257.165
14	Kota Sawahlunto	-	264.098	-	264.098
15	Kota Solok	-	256.850	-	256.850
16	Kota Pariaman	-	256.790	-	256.790
17	Kab. Pasaman Barat	-	263.054	-	263.054
18	Kab. Dharmasraya	-	500.393	-	500.393
19	Kab. Solok Selatan	-	500.393	-	500.393
IV	Provinsi Riau	698.285	20.744.984	6.306.449	27.749.718
1	Kab. Bengkalis	-	9.303.921	-	9.303.921

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Indragiri Hilir	3.639.311	8.270.888	-	11.910.199
3	Kab. Indragiri Hulu	-	4.895.297	-	4.895.297
4	Kab. Kampar	-	6.409.690	-	6.409.690
5	Kab. Kuantan Singingi	-	5.200.736	-	5.200.736
6	Kab. Pelalawan	-	15.616.812	-	15.616.812
7	Kab. Rokan Hilir	-	4.507.596	-	4.507.596
8	Kab. Rokan Hulu	63.654	4.287.883	-	4.351.537
9	Kab. Siak	-	10.571.265	-	10.571.265
10	Kota Dumai	-	5.188.964	-	5.188.964
11	Kota Pekanbaru	-	3.774.763	-	3.774.763

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
12	Kab. Kepulauan Meranti	-	5.044.244	-	5.044.244
V	Provinsi Jambi	-	5.314.884	1.688 730	7.003.614
1	Kab. Batang Hari	-	3.177.917	-	3.177.917
2	Kab. Bungo	-	1.083.453	-	1.083.453
3	Kab. Kerinci	-	1.063.737	-	1.063.737
4	Kab. Merangin	-	1.222.857	-	1.222.857
5	Kab. Muaro Jambi	-	1.745.693	-	1.745.693
6	Kab. Sarolangun	-	1.623.044	-	1.623.044
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	4.990.889	-	4.990.889
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	2.396.533	-	2.396.533

SK No 023373 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
9	Kab. Tebo	-	1.786.148	-	1.786.148
10	Kota Jambi	-	1.065.721	-	1.065.721
11	Kota Sungai Penuh	-	1.103.546	-	1.103.546
VI	Provinsi Sumatera Selatan	-	9.314.996	874.785	10.189.781
1	Kab. Lahat	-	1.749.360	-	1.749.360
2	Kab. Musi Banyuasin	-	3.434.329	-	3.434.329
3	Kab. Musi Rawas	-	1.852.593	-	1.852.593
4	Kab. Muara Enim	-	2.368.757	-	2.368.757
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-	13.155.026	-	13.155.026
6	Kab. Ogan Komering Ulu	-	1.646.127	-	1.646.127

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
7	Kota Palembang	-	1.164.374	-	1.164.374
8	Kota Prabumulih	-	1.164.374	-	1.164.374
9	Kota Pagar Alam	-	1.164.374	-	1.164.374
10	Kota Lubuk Linggau	-	1.164.374	-	1.164.374
11	Kab. Banyuasin	-	1.590.529	-	1.590.529
12	Kab. Ogan Ilir	-	1.164.374	-	1.164.374
13	Kab. OKU Timur	-	1.333.904	-	1.333.904
14	Kab. OKU Selatan	-	1.164.374	-	1.164.374
15	Kab. Empat Lawang	-	1.164.374	-	1.164.374
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	1.788.821	-	1.788.821

SK No 023375 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
17	Kab. Musi Rawas Utara	-	1.164.374	-	1.164.374
VII	Provinsi Bengkulu	-	62.012	427.804	489.816
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	13.780	-	13.780
2	Kab. Bengkulu Utara	-	108.514	-	108.514
3	Kab. Rejang Lebong	-	13.780	-	13.780
4	Kota Bengkulu	-	13.780	-	13.780
5	Kab. Kaur	-	13.780	-	13.780
6	Kab. Seluma	-	13.780	-	13.780
7	Kab. Mukomuko	-	13.780	-	13.780
8	Kab. Lebong	-	13.780	-	13.780

SK No 023376 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
9	Kab. Kepahiang	-	13.780	-	13.780
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	13.780	-	13.780
VIII	Provinsi Lampung	-	969.518	-	969 518
1	Kab. Lampung Barat	-	138.503	-	138.503
2	Kab. Lampung Selatan	-	138.503	-	138.503
3	Kab. Lampung Tengah	-	138.503	-	138.503
4	Kab. Lampung Utara	-	138.503	-	138.503
5	Kab. Lampung Timur	-	138.503	-	138.503
6	Kab. Tanggamus	-	138.503	-	138.503
7	Kab. Tulang Bawang	-	138.503	-	138.503

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
8	Kab. Way Kanan	-	788.819	-	788.819
9	Kota Bandar Lampung	-	138.503	-	138.503
10	Kota Metro	-	138.503	-	138.503
11	Kab. Pesawaran	-	138.503	-	138.503
12	Kab. Pringsewu	-	138.503	-	138.503
13	Kab. Mesuji	-	1.288.721	-	1.288.721
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	138.503	-	138.503
15	Kab. Pesisir Barat	-	138.503	-	138.503
IX	Provinsi Jawa Barat	-	887.947	-	887.947
1	Kab Bandung	-	93.715	-	93.715

SK No 023378 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Bekasi	-	68.304	-	68.304
3	Kab. Bogor	-	102.230	-	102.230
4	Kab. Ciamis	-	429.344	-	429.344
5	Kab. Cianjur	-	355.897	-	355.897
6	Kab. Cirebon	-	94.512	-	94.512
7	Kab. Garut	-	96.149	-	96.149
8	Kab. Indramayu	-	137.735	-	137.735
9	Kab. Karawang	-	75.201	-	75.201
10	Kab. Kuningan	-	152.803	-	152.803
11	Kab. Majalengka	-	101.048	-	101.048

SK No 023379 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
12	Kab. Purwakarta	-	131.475	-	131.475
13	Kab. Subang	-	88.557	-	88.557
14	Kab. Sukabumi	-	209.493	-	209.493
15	Kab. Sumedang	-	148.962	-	148.962
16	Kab. Tasikmalaya	-	204.431	-	204.431
17	Kota Bandung	-	68.304	-	68.304
18	Kota Bekasi	-	68.304	-	68.304
19	Kota Bogor	-	68.441	-	68.441
20	Kota Cirebon	-	68.304	-	68.304
21	Kota Depok	-	68.304	-	68.304

SK No 023380 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
22	Kota Sukabumi	-	68.304	-	68.304
23	Kota Tasikmalaya	-	73.718	-	73.718
24	Kota Cimahi	-	68.304	-	68.304
25	Kota Banjar	-	85.775	-	85.775
26	Kab. Bandung Barat	-	111.478	-	111.478
27	Kab. Pangandaran	-	408.778	-	408.778
X	Provinsi Jawa Tengah	-	4.271.143	-	4.271.143
1	Kab. Banjarnegara	-	293.412	-	293.412
2	Kab. Banyumas	-	385.556	-	385.556
3	Kab. Batang	-	672.529	-	672.529

SK No 023381 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4	Kab. Blora	-	3.360.776	-	3.360.776
5	Kab. Boyolali	-	424.579	-	424.579
6	Kab. Brebes	-	790.090	-	790.090
7	Kab. Cilacap	-	524.168	-	524.168
8	Kab. Demak	-	251.838	-	251.838
9	Kab. Grobogan	-	948.195	-	948.195
10	Kab. Jepara	-	338.617	-	338.617
11	Kab. Karanganyar	-	253.016	-	253.016
12	Kab. Kebumen	-	330.590	-	330.590
13	Kab. Kendal	-	715.271	-	715.271

SK No 023382 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
14	Kab. Klaten	-	251.244	-	251.244
15	Kab. Kudus	-	251.446	-	251.446
16	Kab. Magelang	-	265.034	-	265.034
17	Kab. Pati	-	545.700	-	545.700
18	Kab. Pekalongan	-	340.871	-	340.871
19	Kab. Pemalang	-	848.774	-	848.774
20	Kab. Purbalingga	-	275.579	-	275.579
21	Kab. Purworejo	-	780.659	-	780.659
22	Kab. Rembang	-	870.054	-	870.054
23	Kab. Semarang	-	484.052	-	484.052

SK No 023383 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
24	Kab. Sragen	-	303.582	-	303.582
25	Kab. Sukoharjo	-	251.244	-	251.244
26	Kab. Tegal	-	859.187	-	859.187
27	Kab. Temanggung	-	292.664	-	292.664
28	Kab. Wonogiri	-	271.166	-	271.166
29	Kab. Wonosobo	-	294.897	-	294.897
30	Kota Magelang	-	251.244	-	251.244
31	Kota Pekalongan	-	251.244	-	251.244
32	Kota Salatiga	-	251.244	-	251.244
33	Kota Semarang	-	405.587	-	405.587

SK No 023384 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
34	Kota Surakarta	-	251.244	-	251.244
35	Kota Tegal	-	251.244	-	251.244
XI	Provinsi DI Yogyakarta	-	8.004	-	8.004
1	Kab. Bantul	-	4.291	-	4.291
2	Kab. Gunung Kidul	-	15.718	-	15.718
3	Kab. Kulon Progo	-	4.002	-	4.002
4	Kab. Sleman	-	4.002	-	4.002
5	Kota Yogyakarta	-	4.002	-	4.002
XII	Provinsi Jawa Timur	-	4.392.289	-	4.392.289
1	Kab. Bangkalan	-	250.046	-	250.046

SK No 023385 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Banyuwangi	-	2.680.793	-	2.680.793
3	Kab. Blitar	-	649.328	-	649.328
4	Kab. Bojonegoro	-	835.933	-	835.933
5	Kab. Bondowoso	-	449.689	-	449.689
6	Kab. Gresik	-	265.286	-	265.286
7	Kab. Jember	-	1.134.720	-	1.134.720
8	Kab. Jombang	-	378.982	-	378.982
9	Kab. Kediri	-	476.803	-	476.803
10	Kab. Lamongan	-	783.980	-	783.980
11	Kab. Lumajang	-	388.758	-	388.758

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
12	Kab. Madiun	-	975.911	-	975.911
13	Kab. Magetan	-	256.940	-	256.940
14	Kab. Malang	-	414.262	-	414.262
15	Kab. Mojokerto	-	400.853	-	400.853
16	Kab. Nganjuk	-	646.403	-	646.403
17	Kab. Ngawi	-	759.452	-	759.452
18	Kab. Pacitan	-	258.039	-	258.039
19	Kab. Pamekasan	-	248.400	-	248.400
20	Kab. Pasuruan	-	337.808	-	337.808
21	Kab. Ponorogo	-	560.440	-	560.440

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
22	Kab. Probolinggo	-	387.932	-	387.932
23	Kab. Sampang	-	238.232	-	238.232
24	Kab. Sidoarjo	-	237.421	-	237.421
25	Kab. Situbondo	-	319.149	-	319.149
26	Kab. Sumenep	-	317.043	-	317.043
27	Kab. Trenggalek	-	346.731	-	346.731
28	Kab. Tuban	-	927.465	-	927.465
29	Kab. Tulungagung	-	380.051	-	380.051
30	Kota Blitar	-	237.421	-	237.421
31	Kota Kediri	-	237.421	-	237.421

SK No 023388 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
32	Kota Madiun	-	237.421	-	237.421
33	Kota Malang	-	237.421	-	237.421
34	Kota Mojokerto	-	237.421	-	237.421
35	Kota Pasuruan	-	237.421	-	237.421
36	Kota Probolinggo	-	237.421	-	237.421
37	Kota Surabaya	-	245.721	-	245.721
38	Kota Batu	-	239.837	-	239.837
XIII	Provinsi Kalimantan Barat	1.054.216	6.383.516	27.997.037	35.434.769
1	Kab. Bengkayang	-	982.450	-	982.450
2	Kab. Landak	509.232	1.170.988	-	1.680.220

SK No 023389 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3	Kab. Kapuas Hulu	636.540	3.646.676	-	4.283.216
4	Kab. Ketapang	933.592	4.609.644	-	5.543.236
5	Kab. Mempawah	-	1.571.500	-	1.571.500
6	Kab. Sambas	-	1.002.672	-	1.002.672
7	Kab. Sanggau	-	1.275.661	-	1.275.661
8	Kab. Sintang	509.232	3.423.875	-	3.933.107
9	Kota Pontianak	-	1.061.501	-	1.061.501
10	Kota Singkawang	-	982.079	-	982.079
11	Kab. Sekadau	-	984.296	-	984.296
12	Kab. Melawi	-	2.287.529	-	2.287.529

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
13	Kab. Kayong Utara	-	989.558	-	989.558
14	Kab. Kubu Raya	807.451	1.835.021	-	2.642.472
XIV	Provinsi Kalimantan Tengah	-	37.629.029	200.108.586	237.737.615
1	Kab. Barito Selatan	-	6.109.607	-	6.109.607
2	Kab. Barito Utara	-	12.768.876	-	12.768.876
3	Kab. Kapuas	-	12.713.085	-	12.713.085
4	Kab. Kotawaringin Barat	-	11.892.514	-	11.892.514
5	Kab. Kotawaringin Timur	-	7.894.379	-	7.894.379
6	Kota Palangkaraya	-	5.798.594		5.798.594
7	Kab. Katingan	-	15.644.898	-	15.644.898

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
8	Kab. Seruyan	-	21.946.025	-	21.946.025
9	Kab. Sukamara	-	5.803.652	-	5.803.652
10	Kab. Lamandau	-	9.545.369	-	9.545.369
11	Kab. Gunung Mas	-	13.412.973	-	13.412.973
12	Kab. Pulang Pisau	-	5.859.359	-	5.859.359
13	Kab. Murung Raya	-	15.264.944	-	15.264.944
14	Kab. Barito Timur	-	5.861.843	-	5.861.843
XV	Provinsi Kalimantan Selatan	-	716.597	3.940.756	4.657.353
1	Kab. Banjar	-	119.433	-	119.433
2	Kab. Barito Kuala	-	135.139	-	135.139

SK No 023392 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	267.407	-	267.407
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	119.433	-	119.433
5	Kab. Hulu Sungai Utara	-	119.433	-	119.433
6	Kab. Kotabaru	-	159.244	-	159.244
7	Kab. Tabalong	-	510.073	-	510.073
8	Kab Tanah Laut	-	152.081	-	152.081
9	Kab. Tapin	-	119.433	-	119.433
10	Kota Banjarbaru	-	119.433	-	119.433
11	Kota Banjarmasin	-	119.433	-	119.433
12	Kab. Balangan	-	119.433	-	119.433

SK No 023393 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
13	Kab. Tanah Bumbu	-	868.711	-	868.711
XVI	Provinsi Kalimantan Timur	3.849.685	24.855.457	171.536.608	200.241.750
1	Kab. Berau	2.772.968	9.577.523	-	12.350.491
2	Kab. Kutai Kartanegara	4.201.164	9.108.385	-	13.309.549
3	Kab. Kutai Barat	3.055.392	13.712.434	-	16.767.826
4	Kab. Kutai Timur	1.697.440	13.221.052	-	14.918.492
5	Kab. Paser	-	7.483.776	-	7.483.776
6	Kota Balikpapan	-	5.523.435	-	5.523.435
7	Kota Bontang	-	5.714.754	-	5.714.754
8	Kota Samarinda	-	5.523.435	-	5.523.435

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
9	Kab. Penajam Paser Utara	1.527.696	8.301.712	-	9.829.408
10	Kab. Mahakam Ulu	2.568.439	12.806.234	-	15.374.673
XVII	Provinsi Sulawesi Utara	-	99.612	528.438	628.050
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	41.051	-	41.051
2	Kab. Minahasa	-	14.231	-	14.231
3	Kab. Sangihe	-	14.231	-	14.231
4	Kota Bitung	-	14.231	-	14.231
5	Kota Manado	-	14.231	-	14.231
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	14.231	-	14.231
7	Kab. Minahasa Selatan	-	15.454	-	15.454

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
8	Kota Tomohon	-	14.231	-	14.231
9	Kab. Minahasa Utara	-	14.231	-	14.231
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	14.231	-	14.231
11	Kota Kotamobagu	-	14.231	-	14.231
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	91.791	-	91.791
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	26.685	-	26.685
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	17.076	-	17.076
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	78.318	-	78.318
XVIII	Provinsi Sulawesi Tengah	1.886.938	749.675	2.398.743	5.035.356
1	Kab. Banggai	2.864.430	397.942	-	3.262.372

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Banggai Kepulauan	-	124.946	-	124.946
3	Kab. Buol	-	248.951	-	248.951
4	Kab. Toli-Toli	-	248.165	-	248.165
5	Kab. Donggala	-	236.285	-	236.285
6	Kab. Morowali	1.645.497	342.969	-	1.988.466
7	Kab. Poso	1.518.912	401.281	-	1.920.193
8	Kota Palu	-	130.824	-	130.824
9	Kab. Parigi Moutong	-	258.138	-	258.138
10	Kab. Tojo Una Una	2.025.216	213.374	-	2.238.590
11	Kab. Sigi	-	145.778	-	145.778

SK No 023397 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
12	Kab. Banggai Laut	-	124.946	-	124.946
13	Kab. Morowali Utara	-	310.813	-	310.813
XIX	Provinsi Sulawesi Selatan	-	190.931	761.663	952.594
1	Kab. Bantaeng	-	16.603	-	16.603
2	Kab. Barru	-	17.570	-	17.570
3	Kab. Bone	-	31.424	-	31.424
4	Kab. Bulukumba	-	16.603	-	16.603
5	Kab. Enrekang	-	19.181	-	19.181
6	Kab. Gowa	-	40.559	-	40.559
7	Kab. Jeneponto	-	17.749	-	17.749

SK No 023398 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
8	Kab. Luwu	-	17.919	-	17.919
9	Kab. Luwu Utara	-	17.717	-	17.717
10	Kab. Maros	-	18.354	-	18.354
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	18.892	-	18.892
12	Kota Palopo	-	16.603	-	16.603
13	Kab. Luwu Timur	-	217.201	-	217.201
14	Kab. Pinrang	-	16.603	-	16.603
15	Kab. Sinjai	-	16.694	-	16.694
16	Kab. Kepulauan Selayar	-	16.603	-	16.603
17	Kab. Sidenreng Rappang	-	16.603	-	16.603

SK No 023399 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
18	Kab. Soppeng	-	73.964	-	73.964
19	Kab. Takalar	-	16.603	-	16.603
20	Kab. Tana Toraja	-	21.676	-	21.676
21	Kab. Wajo	-	16.603	-	16.603
22	Kota Pare-pare	-	16.603	-	16.603
23	Kota Makassar	-	40.100	-	40.100
24	Kab. Toraja Utara	-	18.635	-	18.635
XX	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.998.432	267.782	1.645.506	3.911.720
1	Kab. Buton	-	38.723	-	38.723
2	Kab. Konawe	4.583.088	141.646	-	4.724.734

SK No 023400 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3	Kab. Kolaka	3.410.639	112.402	-	3.523.041
4	Kab. Muna	-	36.703	-	36.703
5	Kota Kendari	-	34.300	-	34.300
6	Kota Bau-bau	-	36.537	-	36.537
7	Kab. Konawe Selatan	-	55.159	-	55.159
8	Kab. Bombana	-	42.502	-	42.502
9	Kab. Wakatobi	-	33.473	-	33.473
10	Kab. Kolaka Utara	-	46.759	-	46.759
11	Kab. Konawe Utara	-	231.595	-	231.595
12	Kab. Buton Utara	-	40.825	-	40.825

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
13	Kab. Konawe Kepulauan	-	39.392	-	39.392
14	Kab. Kolaka Timur	-	60.698	-	60.698
15	Kab. Muna Barat	-	33.473	-	33.473
16	Kab. Buton Tengah	-	33.473	-	33.473
17	Kab. Buton Selatan	-	33.473	-	33.473
XXI	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	103.573	500.431	604.004
1	Kab. Bima	-	24.064	-	24.064
2	Kab. Dompu	-	75.541	-	75.541
3	Kab. Lombok Barat	-	27.775	-	27.775
4	Kab. Lombok Tengah	-	23.016	-	23.016

SK No 023402 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
5	Kab. Lombok Timur	-	49.068	-	49.068
6	Kab. Sumbawa	-	39.801	-	39.801
7	Kota Mataram	-	23.016	-	23.016
8	Kota Bima	-	23.016	-	23.016
9	Kab. Sumbawa Barat	-	105.977	-	105.977
10	Kab. Lombok Utara	-	23.016	-	23.016
XXII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	40.717	-	40.717
1	Kab Alor	-	10.283	-	10.283
2	Kab. Belu	-	3.878	-	3.878
3	Kab. Ende	-	32.022	-	32.022

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4	Kab. Flores Timur	-	3.878	-	3.878
5	Kab. Kupang	-	3.878	-	3.878
6	Kab. Lembata	-	3.878	-	3.878
7	Kab. Manggarai	-	3.878	-	3.878
8	Kab. Ngada	-	3.878	-	3.878
9	Kab. Sikka	-	46.885	-	46.885
10	Kab. Sumba Barat	-	3.878	-	3.878
11	Kab. Sumba Timur	-	3.878	-	3.878
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-	3.878	-	3.878
13	Kab. Timor Tengah Utara	-	3.878	-	3.878

SK No 023404 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
14	Kota Kupang	-	3.878	-	3.878
15	Kab. Rote Ndao	-	3.878	-	3.878
16	Kab. Manggarai Barat	-	3.878	-	3.878
17	Kab. Nagekeo	-	3.878	-	3.878
18	Kab. Sumba Barat Daya	-	3.878	-	3.878
19	Kab. Sumba Tengah	-	3.878	-	3.878
20	Kab. Manggarai Timur	-	3.878	-	3.878
21	Kab. Sabu Raijua	-	3.878	-	3.878
22	Kab. Malaka	-	3.878	-	3.878
XXIII	Provinsi Maluku	-	5.462.960	30.662.683	36.125.643

SK No 023405 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	-	3.847.539	-	3.847.539
2	Kab Maluku Tengah	-	1.579.569	-	1.579.569
3	Kab. Maluku Tenggara	-	1.102.541	-	1.102.541
4	Kab. Buru	-	3.974.422	-	3.974.422
5	Kota Ambon	-	1.092.592	-	1.092.592
6	Kab. Seram Bagian Barat	-	1.103.589	-	1.103.589
7	Kab. Seram Bagian Timur	-	1.366.735	-	1.366.735
8	Kab. Kepulauan Aru	-	1.121.934	-	1.121.934
9	Kota Tual	-	1.092.592	-	1.092.592
10	Kab. Maluku Barat Daya	-	1.092.592	-	1.092.592

SK No 023406 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
11	Kab. Buru Selatan	-	5.106.526	-	5.106.526
XXIV	Provinsi Papua	925.105	10.584.161	32.065.032	43.574.298
1	Kab. Biak Numfor	-	756.011	-	756.011
2	Kab. Jayapura	-	1.268.584	-	1.268.584
3	Kab. Jayawijaya	-	756.011	-	756.011
4	Kab. Merauke	1.527.696	3.347.544	-	4.875.240
5	Kab. Mimika	-	2.571.173	-	2.571.173
6	Kab. Nabire	678.976	5.393.464	-	6.072.440
7	Kab. Paniai	-	756.011	-	756.011
8	Kab. Puncak Jaya	-	756.011	-	756.011

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
9	Kab. Kepulauan Yapen	-	756.011	-	756.011
10	Kota Jayapura	-	756.011	-	756.011
11	Kab. Sarmi	636.540	5.021.290	-	5.657.830
12	Kab. Keerom	645.027	2.780.329	-	3.425.356
13	Kab. Yahukimo	-	756.011	-	756.011
14	Kab. Pegunungan Bintang	-	756.011	-	756.011
15	Kab. Tolikara	-	756.011	-	756.011
16	Kab. Boven Digoel	-	3.207.233	-	3.207.233
17	Kab. Mappi	-	1.350.240	-	1.350.240
18	Kab. Asmat	-	1.111.224	-	1.111.224

SK No 023408 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
19	Kab. Waropen	-	756.011	-	756.011
20	Kab. Supiori	-	756.011	-	756.011
21	Kab. Mamberamo Raya	-	895.950	-	895.950
22	Kab. Mamberamo Tengah	-	891.743	-	891.743
23	Kab. Yalimo	-	756.011	-	756.011
24	Kab. Lanny Jaya	-	756.011	-	756.011
25	Kab. Nduga	-	756.011	-	756.011
26	Kab. Dogiyai	-	756.011	-	756.011
27	Kab. Puncak	-	756.011	-	756.011
28	Kab. Intan Jaya	-	756.011	-	756.011

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
29	Kab. Deiyai	-	756.011	-	756.011
XXV	Provinsi Maluku Utara	-	4.885.266	12.867.613	17.752.879
1	Kab. Halmahera Tengah	-	2.384.655	-	2.384.655
2	Kota Ternate	-	1.085.615	-	1.085.615
3	Kab. Halmahera Barat	-	1.113.770	-	1.113.770
4	Kab. Halmahera Timur	-	2.908.283	-	2.908.283
5	Kab. Halmahera Selatan	-	5.507.303	-	5.507.303
6	Kab. Halmahera Utara	-	1 112.078	-	1.112.078
7	Kab. Kepulauan Sula	-	1.273.493	-	1.273.493
8	Kota Tidore Kepulauan	-	1.138.841	-	1.138.841

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
9	Kab. Pulau Morotai	-	1.280.134	-	1.280.134
10	Kab. Pulau Taliabu	-	1.736.894	-	1.736.894
XXVI	Provinsi Banten	-	254.071	-	254.071
1	Kab. Lebak	-	99.494	-	99.494
2	Kab. Pandeglang	-	454.542	-	454.542
3	Kab. Serang	-	72.649	-	72.649
4	Kab. Tangerang	-	72.592	-	72.592
5	Kota Cilegon	-	72.592	-	72.592
6	Kota Tangerang	-	72.592	-	72.592
7	Kota Serang	-	72.592	-	72.592

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
8	Kota Tangerang Selatan	-	72.592	-	72.592
XXVII	Provinsi Bangka Belitung	-	88.862	405.295	494.157
1	Kab. Bangka	-	34.736	-	34.736
2	Kab. Belitung	-	121.539	-	121.539
3	Kota Pangkal Pinang	-	29.621	-	29.621
4	Kab. Bangka Selatan	-	29.621	-	29.621
5	Kab. Bangka Tengah	-	29.666	-	29.666
6	Kab. Bangka Barat	-	31.139	-	31.139
7	Kab. Belitung Timur	-	79.728	-	79.728
XXVIII	Provinsi Gorontalo	-	458.459	1.231.547	1.690.006

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Kab. Boalemo	-	198.305	-	198.305
2	Kab. Gorontalo	-	314.468	-	314.468
3	Kota Gorontalo	-	183.384	-	183.384
4	Kab. Pohuwato	-	485.315	-	485.315
5	Kab. Bone Bolango	-	191.902	-	191.902
6	Kab. Gorontalo Utara	-	460.466	-	460.466
XXIX	Provinsi Kepulauan Riau	-	141.452	558.138	699.590
1	Kab. Natuna	-	47.151	-	47.151
2	Kab. Kepulauan Anambas	-	52.681	-	52.681
3	Kab. Karimun	-	147.038	-	147.038

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4	Kota Batam	-	50.915	-	50.915
5	Kota Tanjung Pinang	-	48.099	-	48.099
6	Kab. Lingga	-	194.900	-	194.900
7	Kab. Bintan	-	47.982	-	47.982
XXX	Provinsi Papua Barat	1.226.075	13.294.348	31.216.507	45.736.930
1	Kab. Fak Fak	101.846	4.353.900	-	4.455.746
2	Kab. Manokwari	-	2.646.681	-	2.646.681
3	Kab. Sorong	-	4.096.422	-	4.096.422
4	Kota Sorong	-	2.544.317	-	2.544.317
5	Kab. Raja Ampat	-	2.244.215	-	2.244.215

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
6	Kab. Sorong Selatan	572.886	2.827.614	-	3.400.500
7	Kab. Teluk Bintuni	1.697.440	6.538.084	-	8.235.524
8	Kab. Teluk Wondama	1.018.464	6.733.643	-	7.752.107
9	Kab. Kaimana	737.409	7.273.865	-	8.011.274
10	Kab. Maybrat	-	3.023.261	-	3.023.261
11	Kab. Tambrauw	-	2.672.936	-	2.672.936
12	Kab. Manokwari Selatan	-	2.843.621	-	2.843.621
13	Kab. Pegunungan Arfak	-	2.215.725	-	2.215.725
XXXI	Provinsi Sulawesi Barat	-	30.846	58.822	89.668
1	Kab. Majene	-	12.338	-	12.338

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Mamuju	-	22.860	-	22.860
3	Kab. Polewali Mandar	-	12.338	-	12.338
4	Kab. Mamasa	-	17.094	-	17.094
5	Kab. Pasangkayu	-	14.815	-	14.815
6	Kab. Mamuju Tengah	-	43.939	-	43.939
XXXII	Provinsi Kalimantan Utara	2.350.153	20.291.495	86.320.072	108.961.720
1	Kab. Bulungan	1.958.140	19.818.190	-	21.776.330
2	Kab. Malinau	2.546.160	14.291.080	-	16.837.240
3	Kab. Nunukan	1.655.004	20.094.545	-	21.749.549
4	Kota Tarakan	-	10.183.885	-	10.183.885

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.7
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
5	Kab. Tana Tidung	1.527.696	16.778.279	-	18.305.975
XXXIII	Selisih Lebih	15.737.936	205.174.825	48.868.706	269.781.467
TOTAL		84.000.002	1.089.324.300	680.647.888	1.853.972.190

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
I	**Provinsi Aceh**	-
1	Kab. Aceh Barat	1.128.319
2	Kab. Aceh Besar	1.128.319
3	Kab. Aceh Selatan	1.128.319
4	Kab. Aceh Singkil	1.128.319
5	Kab. Aceh Tengah	1.128.319
6	Kab. Aceh Tenggara	1.128.319
7	Kab. Aceh Timur	1.128.319
8	Kab. Aceh Utara	1.128.319
9	Kab. Bireuen	1.128.319
10	Kab. Pidie	1.128.319
11	Kab. Simeulue	1.128.319
12	Kota Banda Aceh	1.128.319
13	Kota Sabang	1.128.319
14	Kota Langsa	1.128.319
15	Kota Lhokseumawe	1.128.319
16	Kab. Gayo Lues	1.128.319
17	Kab. Aceh Barat Daya	1.128.319
18	Kab. Aceh Jaya	1.128.319
19	Kab. Nagan Raya	1.128.319
20	Kab. Aceh Tamiang	1.128.319
21	Kab. Bener Meriah	1.128.319
22	Kab. Pidie Jaya	1.128.319
23	Kota Subulussalam	1.128.319
II	**Provinsi Sumatera Utara**	-
1	Kab. Asahan	1.128.319
2	Kab. Dairi	1.128.319
3	Kab. Deli Serdang	1.128.319
4	Kab. Karo	1.128.319
5	Kab. Labuhanbatu	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
6	Kab. Langkat	1.128.319
7	Kab. Mandailing Natal	1.128.319
8	Kab. Nias	1.128.319
9	Kab. Simalungun	1.128.319
10	Kab. Tapanuli Selatan	1.128.319
11	Kab. Tapanuli Tengah	1.128.319
12	Kab. Tapanuli Utara	1.128.319
13	Kab. Toba	1.128.319
14	Kota Binjai	1.128.319
15	Kota Medan	1.128.319
16	Kota Pematang Siantar	1.128.319
17	Kota Sibolga	1.128.319
18	Kota Tanjung Balai	1.128.319
19	Kota Tebing Tinggi	1.128.319
20	Kota Padang Sidempuan	1.128.319
21	Kab. Pakpak Bharat	1.128.319
22	Kab. Nias Selatan	1.128.319
23	Kab. Humbang Hasundutan	1.128.319
24	Kab. Serdang Bedagai	1.128.319
25	Kab. Samosir	1.128.319
26	Kab. Batu Bara	1.128.319
27	Kab. Padang Lawas	1.128.319
28	Kab. Padang Lawas Utara	1.128.319
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.128.319
30	Kab. Labuhanbatu Utara	1.128.319
31	Kab. Nias Utara	1.128.319
32	Kab. Nias Barat	1.128.319
33	Kota Gunungsitoli	1.128.319
III	**Provinsi Sumatera Barat**	-
1	Kab. Limapuluh Kota	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
2	Kab. Agam	1.128.319
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.128.319
4	Kab. Padang Pariaman	1.128.319
5	Kab. Pasaman	1.128.319
6	Kab. Pesisir Selatan	1.128.319
7	Kab. Sijunjung	1.128.319
8	Kab. Solok	1.128.319
9	Kab. Tanah Datar	1.128.319
10	Kota Bukit Tinggi	1.128.319
11	Kota Padang Panjang	1.128.319
12	Kota Padang	1.128.319
13	Kota Payakumbuh	1.128.319
14	Kota Sawahlunto	1.128.319
15	Kota Solok	1.128.319
16	Kota Pariaman	1.128.319
17	Kab. Pasaman Barat	1.128.319
18	Kab. Dharmasraya	1.128.319
19	Kab. Solok Selatan	1.128.319
IV	**Provinsi Riau**	-
1	Kab. Bengkalis	1.128.319
2	Kab. Indragiri Hilir	1.128.319
3	Kab. Indragiri Hulu	1.128.319
4	Kab. Kampar	1.128.319
5	Kab. Kuantan Singingi	1.128.319
6	Kab. Pelalawan	1.128.319
7	Kab. Rokan Hilir	1.128.319
8	Kab. Rokan Hulu	1.128.319
9	Kab. Siak	1.128.319
10	Kota Dumai	1.128.319
11	Kota Pekanbaru	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
12	Kab. Kepulauan Meranti	1.128.319
V	**Provinsi Jambi**	-
1	Kab. Batang Hari	1.128.319
2	Kab. Bungo	1.128.319
3	Kab. Kerinci	1.128.319
4	Kab. Merangin	1.128.319
5	Kab. Muaro Jambi	1.128.319
6	Kab. Sarolangun	1.128.319
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.128.319
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.128.319
9	Kab. Tebo	1.128.319
10	Kota Jambi	1.128.319
11	Kota Sungai Penuh	1.128.319
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	-
1	Kab. Lahat	1.128.319
2	Kab. Musi Banyuasin	1.128.319
3	Kab. Musi Rawas	1.128.319
4	Kab. Muara Enim	1.128.319
5	Kab. Ogan Komering Ilir	1.128.319
6	Kab. Ogan Komering Ulu	1.128.319
7	Kota Palembang	1.128.319
8	Kota Prabumulih	1.128.319
9	Kota Pagar Alam	1.128.319
10	Kota Lubuk Linggau	1.128.319
11	Kab. Banyuasin	1.128.319
12	Kab. Ogan Ilir	1.128.319
13	Kab. OKU Timur	1.128.319
14	Kab. OKU Selatan	1.128.319
15	Kab. Empat Lawang	1.128.319
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
17	Kab. Musi Rawas Utara	1.128.319
VII	**Provinsi Bengkulu**	-
1	Kab. Bengkulu Selatan	1.128.319
2	Kab. Bengkulu Utara	1.128.319
3	Kab. Rejang Lebong	1.128.319
4	Kota Bengkulu	1.128.319
5	Kab. Kaur	1.128.319
6	Kab. Seluma	1.128.319
7	Kab. Mukomuko	1.128.319
8	Kab. Lebong	1.128.319
9	Kab. Kepahiang	1.128.319
10	Kab. Bengkulu Tengah	1.128.319
VIII	**Provinsi Lampung**	-
1	Kab. Lampung Barat	1.128.319
2	Kab. Lampung Selatan	1.128.319
3	Kab. Lampung Tengah	1.128.319
4	Kab. Lampung Utara	1.128.319
5	Kab. Lampung Timur	1.128.319
6	Kab. Tanggamus	1.128.319
7	Kab. Tulang Bawang	1.128.319
8	Kab. Way Kanan	1.128.319
9	Kota Bandar Lampung	1.128.319
10	Kota Metro	1.128.319
11	Kab. Pesawaran	1.128.319
12	Kab. Pringsewu	1.128.319
13	Kab. Mesuji	1.128.319
14	Kab. Tulang Bawang Barat	1.128.319
15	Kab. Pesisir Barat	1.128.319
IX	**Provinsi DKI Jakarta**	**1.128.319**
X	**Provinsi Jawa Barat**	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
1	Kab. Bandung	1.128.319
2	Kab. Bekasi	1.128.319
3	Kab. Bogor	1.128.319
4	Kab. Ciamis	1.128.319
5	Kab. Cianjur	1.128.319
6	Kab. Cirebon	1.128.319
7	Kab. Garut	1.128.319
8	Kab. Indramayu	1.128.319
9	Kab. Karawang	1.128.319
10	Kab. Kuningan	1.128.319
11	Kab. Majalengka	1.128.319
12	Kab. Purwakarta	1.128.319
13	Kab. Subang	1.128.319
14	Kab. Sukabumi	1.128.319
15	Kab. Sumedang	1.128.319
16	Kab. Tasikmalaya	1.128.319
17	Kota Bandung	1.128.319
18	Kota Bekasi	1.128.319
19	Kota Bogor	1.128.319
20	Kota Cirebon	1.128.319
21	Kota Depok	1.128.319
22	Kota Sukabumi	1.128.319
23	Kota Tasikmalaya	1.128.319
24	Kota Cimahi	1.128.319
25	Kota Banjar	1.128.319
26	Kab. Bandung Barat	1.128.319
27	Kab. Pangandaran	1.128.319
XI	**Provinsi Jawa Tengah**	-
1	Kab. Banjarnegara	1.128.319
2	Kab. Banyumas	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
3	Kab. Batang	1.128.319
4	Kab. Blora	1.128.319
5	Kab. Boyolali	1.128.319
6	Kab. Brebes	1.128.319
7	Kab. Cilacap	1.128.319
8	Kab. Demak	1.128.319
9	Kab. Grobogan	1.128.319
10	Kab. Jepara	1.128.319
11	Kab. Karanganyar	1.128.319
12	Kab. Kebumen	1.128.319
13	Kab. Kendal	1.128.319
14	Kab. Klaten	1.128.319
15	Kab. Kudus	1.128.319
16	Kab. Magelang	1.128.319
17	Kab. Pati	1.128.319
18	Kab. Pekalongan	1.128.319
19	Kab. Pemalang	1.128.319
20	Kab. Purbalingga	1.128.319
21	Kab. Purworejo	1.128.319
22	Kab. Rembang	1.128.319
23	Kab. Semarang	1.128.319
24	Kab. Sragen	1.128.319
25	Kab. Sukoharjo	1.128.319
26	Kab. Tegal	1.128.319
27	Kab. Temanggung	1.128.319
28	Kab. Wonogiri	1.128.319
29	Kab. Wonosobo	1.128.319
30	Kota Magelang	1.128.319
31	Kota Pekalongan	1.128.319
32	Kota Salatiga	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
33	Kota Semarang	1.128.319
34	Kota Surakarta	1.128.319
35	Kota Tegal	1.128.319
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**	-
1	Kab. Bantul	1.128.319
2	Kab. Gunung Kidul	1.128.319
3	Kab. Kulon Progo	1.128.319
4	Kab. Sleman	1.128.319
5	Kota Yogyakarta	1.128.319
XIII	**Provinsi Jawa Timur**	-
1	Kab. Bangkalan	1.128.319
2	Kab. Banyuwangi	1.128.319
3	Kab. Blitar	1.128.319
4	Kab. Bojonegoro	1.128.319
5	Kab. Bondowoso	1.128.319
6	Kab. Gresik	1.128.319
7	Kab. Jember	1.128.319
8	Kab. Jombang	1.128.319
9	Kab. Kediri	1.128.319
10	Kab. Lamongan	1.128.319
11	Kab. Lumajang	1.128.319
12	Kab. Madiun	1.128.319
13	Kab. Magetan	1.128.319
14	Kab. Malang	1.128.319
15	Kab. Mojokerto	1.128.319
16	Kab. Nganjuk	1.128.319
17	Kab. Ngawi	1.128.319
18	Kab. Pacitan	1.128.319
19	Kab. Pamekasan	1.128.319
20	Kab. Pasuruan	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
21	Kab. Ponorogo	1.128.319
22	Kab. Probolinggo	1.128.319
23	Kab. Sampang	1.128.319
24	Kab. Sidoarjo	1.128.319
25	Kab. Situbondo	1.128.319
26	Kab. Sumenep	1.128.319
27	Kab. Trenggalek	1.128.319
28	Kab. Tuban	1.128.319
29	Kab. Tulungagung	1.128.319
30	Kota Blitar	1.128.319
31	Kota Kediri	1.128.319
32	Kota Madiun	1.128.319
33	Kota Malang	1.128.319
34	Kota Mojokerto	1.128.319
35	Kota Pasuruan	1.128.319
36	Kota Probolinggo	1.128.319
37	Kota Surabaya	1.128.319
38	Kota Batu	1.128.319
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**	-
1	Kab. Bengkayang	1.128.319
2	Kab. Landak	1.128.319
3	Kab. Kapuas Hulu	1.128.319
4	Kab. Ketapang	1.128.319
5	Kab. Mempawah	1.128.319
6	Kab. Sambas	1.128.319
7	Kab. Sanggau	1.128.319
8	Kab. Sintang	1.128.319
9	Kota Pontianak	1.128.319
10	Kota Singkawang	1.128.319
11	Kab. Sekadau	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
12	Kab. Melawi	1.128.319
13	Kab. Kayong Utara	1.128.319
14	Kab. Kubu Raya	1.128.319
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	-
1	Kab. Barito Selatan	1.128.319
2	Kab. Barito Utara	1.128.319
3	Kab. Kapuas	1.128.319
4	Kab. Kotawaringin Barat	1.128.319
5	Kab. Kotawaringin Timur	1.128.319
6	Kota Palangkaraya	1.128.319
7	Kab. Katingan	1.128.319
8	Kab. Seruyan	1.128.319
9	Kab. Sukamara	1.128.319
10	Kab. Lamandau	1.128.319
11	Kab. Gunung Mas	1.128.319
12	Kab. Pulang Pisau	1.128.319
13	Kab. Murung Raya	1.128.319
14	Kab. Barito Timur	1.128.319
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**	-
1	Kab. Banjar	1.128.319
2	Kab. Barito Kuala	1.128.319
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.128.319
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.128.319
5	Kab. Hulu Sungai Utara	1.128.319
6	Kab. Kotabaru	1.128.319
7	Kab. Tabalong	1.128.319
8	Kab. Tanah Laut	1.128.319
9	Kab. Tapin	1.128.319
10	Kota Banjarbaru	1.128.319
11	Kota Banjarmasin	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
12	Kab. Balangan	1.128.319
13	Kab. Tanah Bumbu	1.128.319
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**	-
1	Kab. Berau	1.128.319
2	Kab. Kutai Kartanegara	1.128.319
3	Kab. Kutai Barat	1.128.319
4	Kab. Kutai Timur	1.128.319
5	Kab. Paser	1.128.319
6	Kota Balikpapan	1.128.319
7	Kota Bontang	1.128.319
8	Kota Samarinda	1.128.319
9	Kab. Penajam Paser Utara	1.128.319
10	Kab. Mahakam Ulu	1.128.319
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**	-
1	Kab. Bolaang Mongondow	1.128.319
2	Kab. Minahasa	1.128.319
3	Kab. Sangihe	1.128.319
4	Kota Bitung	1.128.319
5	Kota Manado	1.128.319
6	Kab. Kepulauan Talaud	1.128.319
7	Kab. Minahasa Selatan	1.128.319
8	Kota Tomohon	1.128.319
9	Kab. Minahasa Utara	1.128.319
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1.128.319
11	Kota Kotamobagu	1.128.319
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.128.319
13	Kab. Minahasa Tenggara	1.128.319
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.128.319
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.128.319
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
1	Kab. Banggai	1.128.319
2	Kab. Banggai Kepulauan	1.128.319
3	Kab. Buol	1.128.319
4	Kab. Toli-Toli	1.128.319
5	Kab. Donggala	1.128.319
6	Kab. Morowali	1.128.319
7	Kab. Poso	1.128.319
8	Kota Palu	1.128.319
9	Kab. Parigi Moutong	1.128.319
10	Kab. Tojo Una Una	1.128.319
11	Kab. Sigi	1.128.319
12	Kab. Banggai Laut	1.128.319
13	Kab. Morowali Utara	1.128.319
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	-
1	Kab. Bantaeng	1.128.319
2	Kab. Barru	1.128.319
3	Kab. Bone	1.128.319
4	Kab. Bulukumba	1.128.319
5	Kab. Enrekang	1.128.319
6	Kab. Gowa	1.128.319
7	Kab. Jeneponto	1.128.319
8	Kab. Luwu	1.128.319
9	Kab. Luwu Utara	1.128.319
10	Kab. Maros	1.128.319
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.128.319
12	Kota Palopo	1.128.319
13	Kab. Luwu Timur	1.128.319
14	Kab. Pinrang	1.128.319
15	Kab. Sinjai	1.128.319
16	Kab. Kepulauan Selayar	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
17	Kab. Sidenreng Rappang	1.128.319
18	Kab. Soppeng	1.128.319
19	Kab. Takalar	1.128.319
20	Kab. Tana Toraja	1.128.319
21	Kab. Wajo	1.128.319
22	Kota Pare-pare	1.128.319
23	Kota Makassar	1.128.319
24	Kab. Toraja Utara	1.128.319
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	-
1	Kab. Buton	1.128.319
2	Kab. Konawe	1.128.319
3	Kab. Kolaka	1.128.319
4	Kab. Muna	1.128.319
5	Kota Kendari	1.128.319
6	Kota Bau-bau	1.128.319
7	Kab. Konawe Selatan	1.128.319
8	Kab. Bombana	1.128.319
9	Kab. Wakatobi	1.128.319
10	Kab. Kolaka Utara	1.128.319
11	Kab. Konawe Utara	1.128.319
12	Kab. Buton Utara	1.128.319
13	Kab. Konawe Kepulauan	1.128.319
14	Kab. Kolaka Timur	1.128.319
15	Kab. Muna Barat	1.128.319
16	Kab. Buton Tengah	1.128.319
17	Kab. Buton Selatan	1.128.319
XXII	**Provinsi Bali**	-
1	Kab. Badung	1.128.319
2	Kab. Bangli	1.128.319
3	Kab. Buleleng	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
4	Kab. Gianyar	1.128.319
5	Kab. Jembrana	1.128.319
6	Kab. Karangasem	1.128.319
7	Kab. Klungkung	1.128.319
8	Kab. Tabanan	1.128.319
9	Kota Denpasar	1.128.319
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	-
1	Kab. Bima	1.128.319
2	Kab. Dompu	1.128.319
3	Kab. Lombok Barat	1.128.319
4	Kab. Lombok Tengah	1.128.319
5	Kab. Lombok Timur	1.128.319
6	Kab. Sumbawa	1.128.319
7	Kota Mataram	1.128.319
8	Kota Bima	1.128.319
9	Kab. Sumbawa Barat	1.128.319
10	Kab. Lombok Utara	1.128.319
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	-
1	Kab. Alor	1.128.319
2	Kab. Belu	1.128.319
3	Kab. Ende	1.128.319
4	Kab. Flores Timur	1.128.319
5	Kab. Kupang	1.128.319
6	Kab. Lembata	1.128.319
7	Kab. Manggarai	1.128.319
8	Kab. Ngada	1.128.319
9	Kab. Sikka	1.128.319
10	Kab. Sumba Barat	1.128.319
11	Kab. Sumba Timur	1.128.319
12	Kab. Timor Tengah Selatan	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
13	Kab. Timor Tengah Utara	1.128.319
14	Kota Kupang	1.128.319
15	Kab. Rote Ndao	1.128.319
16	Kab. Manggarai Barat	1.128.319
17	Kab. Nagekeo	1.128.319
18	Kab. Sumba Barat Daya	1.128.319
19	Kab. Sumba Tengah	1.128.319
20	Kab. Manggarai Timur	1.128.319
21	Kab. Sabu Raijua	1.128.319
22	Kab. Malaka	1.128.319
XXV	**Provinsi Maluku**	-
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.128.319
2	Kab. Maluku Tengah	1.128.319
3	Kab. Maluku Tenggara	1.128.319
4	Kab. Buru	1.128.319
5	Kota Ambon	1.128.319
6	Kab. Seram Bagian Barat	1.128.319
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.128.319
8	Kab. Kepulauan Aru	1.128.319
9	Kota Tual	1.128.319
10	Kab. Maluku Barat Daya	1.128.319
11	Kab. Buru Selatan	1.128.319
XXVI	**Provinsi Papua**	-
1	Kab. Biak Numfor	1.128.319
2	Kab. Jayapura	1.128.319
3	Kab. Jayawijaya	1.128.319
4	Kab. Merauke	1.128.319
5	Kab. Mimika	1.128.319
6	Kab. Nabire	1.128.319
7	Kab. Paniai	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
8	Kab. Puncak Jaya	1.128.319
9	Kab. Kepulauan Yapen	1.128.319
10	Kota Jayapura	1.128.319
11	Kab. Sarmi	1.128.319
12	Kab. Keerom	1.128.319
13	Kab. Yahukimo	1.128.319
14	Kab. Pegunungan Bintang	1.128.319
15	Kab. Tolikara	1.128.319
16	Kab. Boven Digoel	1.128.319
17	Kab. Mappi	1.128.319
18	Kab. Asmat	1.128.319
19	Kab. Waropen	1.128.319
20	Kab. Supiori	1.128.319
21	Kab. Mamberamo Raya	1.128.319
22	Kab. Mamberamo Tengah	1.128.319
23	Kab. Yalimo	1.128.319
24	Kab. Lanny Jaya	1.128.319
25	Kab. Nduga	1.128.319
26	Kab. Dogiyai	1.128.319
27	Kab. Puncak	1.128.319
28	Kab. Intan Jaya	1.128.319
29	Kab. Deiyai	1.128.319
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**	-
1	Kab. Halmahera Tengah	1.128.319
2	Kota Ternate	1.128.319
3	Kab. Halmahera Barat	1.128.319
4	Kab. Halmahera Timur	1.128.319
5	Kab. Halmahera Selatan	1.128.319
6	Kab. Halmahera Utara	1.128.319
7	Kab. Kepulauan Sula	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
8	Kota Tidore Kepulauan	1.128.319
9	Kab. Pulau Morotai	1.128.319
10	Kab. Pulau Taliabu	1.128.319
XXVIII	**Provinsi Banten**	-
1	Kab. Lebak	1.128.319
2	Kab. Pandeglang	1.128.319
3	Kab. Serang	1.128.319
4	Kab. Tangerang	1.128.319
5	Kota Cilegon	1.128.319
6	Kota Tangerang	1.128.319
7	Kota Serang	1.128.319
8	Kota Tangerang Selatan	1.128.319
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**	-
1	Kab. Bangka	1.128.319
2	Kab. Belitung	1.128.319
3	Kota Pangkal Pinang	1.128.319
4	Kab. Bangka Selatan	1.128.319
5	Kab. Bangka Tengah	1.128.319
6	Kab. Bangka Barat	1.128.319
7	Kab. Belitung Timur	1.128.319
XXX	**Provinsi Gorontalo**	-
1	Kab. Boalemo	1.128.319
2	Kab. Gorontalo	1.128.319
3	Kota Gorontalo	1.128.319
4	Kab. Pohuwato	1.128.319
5	Kab. Bone Bolango	1.128.319
6	Kab. Gorontalo Utara	1.128.319
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**	-
1	Kab. Natuna	1.128.319
2	Kab. Kepulauan Anambas	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
3	Kab. Karimun	1.128.319
4	Kota Batam	1.128.319
5	Kota Tanjung Pinang	1.128.319
6	Kab. Lingga	1.128.319
7	Kab. Bintan	1.128.319
XXXII	**Provinsi Papua Barat**	-
1	Kab. Fak Fak	1.128.319
2	Kab. Manokwari	1.128.319
3	Kab. Sorong	1.128.319
4	Kota Sorong	1.128.319
5	Kab. Raja Ampat	1.128.319
6	Kab. Sorong Selatan	1.128.319
7	Kab. Teluk Bintuni	1.128.319
8	Kab. Teluk Wondama	1.128.319
9	Kab. Kaimana	1.128.319
10	Kab. Maybrat	1.128.319
11	Kab. Tambrauw	1.128.319
12	Kab. Manokwari Selatan	1.128.319
13	Kab. Pegunungan Arfak	1.128.319
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**	-
1	Kab. Majene	1.128.319
2	Kab. Mamuju	1.128.319
3	Kab. Polewali Mandar	1.128.319
4	Kab. Mamasa	1.128.319
5	Kab. Pasangkayu	1.128.319
6	Kab. Mamuju Tengah	1.128.319
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**	-
1	Kab. Bulungan	1.128.319
2	Kab. Malinau	1.128.319
3	Kab. Nunukan	1.128.319

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.8
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
4	Kota Tarakan	1.128.319
5	Kab. Tana Tidung	1.128.319
XXXV	**Selisih Lebih**	**191.437.763**
TOTAL		**765.752.134**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
I	Provinsi Aceh	-	170.054	-	170.054
1	Kab. Aceh Barat	-	15.460	-	15.460
2	Kab. Aceh Besar	-	296.681	-	296.681
3	Kab. Aceh Selatan	-	15.460	-	15.460
4	Kab. Aceh Singkil	-	15.460	-	15.460
5	Kab. Aceh Tengah	-	15.460	-	15.460
6	Kab. Aceh Tenggara	-	15.460	-	15.460
7	Kab. Aceh Timur	-	15.460	-	15.460
8	Kab. Aceh Utara	-	15.460	-	15.460
9	Kab. Bireuen	-	15.460	-	15.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
10	Kab. Pidie	-	15.460	-	15.460
11	Kab. Simeulue	-	15.460	-	15.460
12	Kota Banda Aceh	-	15.460	-	15.460
13	Kota Sabang	-	68.256	-	68.256
14	Kota Langsa	-	15.460	-	15.460
15	Kota Lhokseumawe	-	15.460	-	15.460
16	Kab. Gayo Lues	-	15.460	-	15.460
17	Kab. Aceh Barat Daya	-	15.460	-	15.460
18	Kab. Aceh Jaya	-	15.460	-	15.460
19	Kab. Nagan Raya	-	15.460	-	15.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
20	Kab. Aceh Tamiang	-	15.460	-	15.460
21	Kab. Bener Meriah	-	15.460	-	15.460
22	Kab. Pidie Jaya	-	15.460	-	15.460
23	Kota Subulussalam	-	15.460	-	15.460
II	Provinsi Sumatera Utara	3.015.224	411.934	-	3.427.158
1	Kab. Asahan	188.452	25.746	-	214.198
2	Kab. Dairi	188.452	25.746	-	214.198
3	Kab. Deli Serdang	188.452	25.746	-	214.198
4	Kab. Karo	188.452	25.746	-	214.198
5	Kab. Labuhanbatu	188.452	25.746	-	214.198

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
6	Kab. Langkat	188.452	25.746	-	214.198
7	Kab. Mandailing Natal	6.030.447	823.868	-	6.854.315
8	Kab. Nias	188.452	25.746	-	214.198
9	Kab. Simalungun	188.452	25.746	-	214.198
10	Kab. Tapanuli Selatan	188.452	25.746	-	214.198
11	Kab. Tapanuli Tengah	188.452	25.746	-	214.198
12	Kab. Tapanuli Utara	188.452	25.746	-	214.198
13	Kab. Toba	188.452	25.746	-	214.198
14	Kota Binjai	188.452	25.746	-	214.198
15	Kota Medan	188.452	25.746	-	214.198

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
16	Kota Pematang Siantar	188.452	25.746	-	214.198
17	Kota Sibolga	188.452	25.746	-	214.198
18	Kota Tanjung Balai	188.452	25.746	-	214.198
19	Kota Tebing Tinggi	188.452	25.746	-	214.198
20	Kota Padang Sidempuan	188.452	25.746	-	214.198
21	Kab. Pakpak Bharat	188.452	25.746	-	214.198
22	Kab. Nias Selatan	188.452	25.746	-	214.198
23	Kab. Humbang Hasundutan	188.452	25.746	-	214.198
24	Kab. Serdang Bedagai	188.452	25.746	-	214.198
25	Kab. Samosir	188.452	25.746	-	214.198

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
26	Kab. Batu Bara	188.452	25.746	-	214.198
27	Kab. Padang Lawas	188.452	25.746	-	214.198
28	Kab. Padang Lawas Utara	188.452	25.746	-	214.198
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	188.452	25.746	-	214.198
30	Kab. Labuhanbatu Utara	188.452	25.746	-	214.198
31	Kab. Nias Utara	188.452	25.746	-	214.198
32	Kab. Nias Barat	188.452	25.746	-	214.198
33	Kota Gunungsitoli	188.452	25.746	-	214.198
III	Provinsi Sumatera Barat	3.460.139	455.013	-	3.915.152
1	Kab. Limapuluh Kota	384.460	50.557	-	435.017

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Agam	384.460	50.557	-	435.017
3	Kab. Kepulauan Mentawai	384.460	50.557	-	435.017
4	Kab. Padang Pariaman	384.460	50.557	-	435.017
5	Kab. Pasaman	384.460	50.557	-	435.017
6	Kab. Pesisir Selatan	384.460	50.557	-	435.017
7	Kab. Sijunjung	384.460	50.557	-	435.017
8	Kab. Solok	384.460	217.505	-	601.965
9	Kab. Tanah Datar	384.460	50.557	-	435.017
10	Kota Bukit Tinggi	384.460	50.557	-	435.017
11	Kota Padang Panjang	384.460	50.557	-	435.017

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
i	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
12	Kota Padang	384.460	50.557	-	435.017
13	Kota Payakumbuh	384.460	50.557	-	435.017
14	Kota Sawahlunto	384.460	50.557	-	435.017
15	Kota Solok	384.460	50.557	-	435.017
16	Kota Pariaman	384.460	50.557	-	435.017
17	Kab. Pasaman Barat	384.460	50.557	-	435.017
18	Kab. Dharmasraya	384.460	50.557	-	435.017
19	Kab. Solok Selatan	6.920.277	743.078	-	7.663.355
IV	Provinsi Sumatera Selatan	3.493.265	239.805	-	3.733.070
1	Kab. Lahat	1.549.481	137.706	-	1.687.187

SK No 022105 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
2	Kab. Musi Banyuasin	436.658	29.976	-	466.634
3	Kab. Musi Rawas	436.658	29.976	-	466.634
4	Kab. Muara Enim	5.010.434	307.403	-	5.317.837
5	Kab. Ogan Komering Ilir	436.658	29.976	-	466.634
6	Kab. Ogan Komering Ulu	436.658	29.976	-	466.634
7	Kota Palembang	436.658	29.976	-	466.634
8	Kota Prabumulih	436.658	29.976	-	466.634
9	Kota Pagar Alam	1.299.932	80.109	-	1.380.041
10	Kota Lubuk Linggau	436.658	29.976	-	466.634
11	Kab. Banyuasin	436.658	29.976	-	466.634

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
12	Kab. Ogan Ilir	436.658	29.976	-	466.634
13	Kab. OKU Timur	436.658	29.976	-	466.634
14	Kab. OKU Selatan	436.658	44.321	-	480.979
15	Kab. Empat Lawang	436.658	29.976	-	466.634
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	436.658	29.976	-	466.634
17	Kab. Musi Rawas Utara	436.658	29.976	-	466.634
V	Provinsi Bengkulu	-	155.905	-	155.905
1	Kab. Bengkulu Selatan	-	34.645	-	34.645
2	Kab. Bengkulu Utara	-	34.645	-	34.645
3	Kab. Rejang Lebong	-	149.031	-	149.031

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4	Kota Bengkulu	-	34.645	-	34.645
5	Kab. Kaur	-	34.645	-	34.645
6	Kab. Seluma	-	34.645	-	34.645
7	Kab. Mukomuko	-	34.645	-	34.645
8	Kab. Lebong	-	34.645	-	34.645
9	Kab. Kepahiang	-	197.424	-	197.424
10	Kab. Bengkulu Tengah	-	34.645	-	34.645
VI	Provinsi Lampung	-	315.740	3.647.344	3.963.084
1	Kab. Lampung Barat	-	82.943	521.049	603.992
2	Kab. Lampung Selatan	-	201.530	521.049	722.579

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3	Kab. Lampung Tengah	-	45.106	521.049	566.155
4	Kab. Lampung Utara	-	45.106	521.049	566.155
5	Kab. Lampung Timur	-	45.106	521.049	566.155
6	Kab. Tanggamus	-	62.859	7.294.687	7.357.546
7	Kab. Tulang Bawang	-	45.106	521.049	566.155
8	Kab. Way Kanan	-	45.106	521.049	566.155
9	Kota Bandar Lampung	-	144.577	521.049	665.626
10	Kota Metro	-	45.106	521.049	566.155
11	Kab. Pesawaran	-	353.708	521.049	874.757
12	Kab. Pringsewu	-	45.106	521.049	566.155

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
13	Kab. Mesuji	-	45.106	521.049	566.155
14	Kab. Tulang Bawang Barat	-	45.106	521.049	566.155
15	Kab. Pesisir Barat	-	45.106	521.049	566.155
VII	Provinsi Jawa Barat	-	199.307	203.020.521	203.219.828
1	Kab. Bandung	-	23.340	174.261.090	174.284.430
2	Kab. Bekasi	-	15.331	15.616.963	15.632.294
3	Kab. Bogor	-	15.331	81.888.356	81.903.687
4	Kab. Ciamis	-	15.331	15.616.963	15.632.294
5	Kab. Cianjur	-	15.331	15.616.963	15.632.294
6	Kab. Cirebon	-	15.331	15.616.963	15.632.294

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
7	Kab. Garut	-	15.331	99.036.514	99.051.845
8	Kab. Indramayu	-	15.331	15.616.963	15.632.294
9	Kab. Karawang	-	15.331	15.616.963	15.632.294
10	Kab. Kuningan	-	15.331	15.616.963	15.632.294
11	Kab. Majalengka	-	15.331	15.616.963	15.632.294
12	Kab. Purwakarta	-	93.051	15.616.963	15.710.014
13	Kab. Subang	-	202.233	15.616.963	15.819.196
14	Kab. Sukabumi	-	15.331	82.153.972	82.169.303
15	Kab. Sumedang	-	15.331	15.616.963	15.632.294
16	Kab. Tasikmalaya	-	15.331	15.616.963	15.632.294

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
17	Kota Bandung	-	15.331	15.616.963	15.632.294
18	Kota Bekasi	-	15.331	15.616.963	15.632.294
19	Kota Bogor	-	15.331	15.616.963	15.632.294
20	Kota Cirebon	-	15.331	15.616.963	15.632.294
21	Kota Depok	-	15.331	15.616.963	15.632.294
22	Kota Sukabumi	-	15.331	15.616.963	15.632.294
23	Kota Tasikmalaya	-	15.331	15.616.963	15.632.294
24	Kota Cimahi	-	15.331	15.616.963	15.632.294
25	Kota Banjar	-	15.331	15.616.963	15.632.294
26	Kab. Bandung Barat	-	116.993	15.616.963	15.733.956

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
27	Kab. Pangandaran	-	15.331	15.616.963	15.632.294
VIII	Provinsi Jawa Tengah	-	594.825	317.191	912.016
1	Kab. Banjarnegara	-	34.990	437.596	472.586
2	Kab. Banyumas	-	169.312	18.658	187.970
3	Kab. Batang	-	34.990	31.588	66.578
4	Kab. Blora	-	34.990	18.658	53.648
5	Kab. Boyolali	-	42.778	18.658	61.436
6	Kab. Brebes	-	85.196	18.658	103.854
7	Kab. Cilacap	-	34.990	18.658	53.648
8	Kab. Demak	-	34.990	18.658	53.648

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
9	Kab. Grobogan	-	34.990	18.658	53.648
10	Kab. Jepara	-	34.990	18.658	53.648
11	Kab. Karanganyar	-	270.907	18.658	289.565
12	Kab. Kebumen	-	34.990	18.658	53.648
13	Kab. Kendal	-	60.911	23.892	84.803
14	Kab. Klaten	-	34.990	18.658	53.648
15	Kab. Kudus	-	34.990	18.658	53.648
16	Kab. Magelang	-	108.824	18.658	127.482
17	Kab. Pati	-	34.990	18.658	53.648
18	Kab. Pekalongan	-	34.990	38.485	73.475

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
19	Kab. Pemalang	-	43.577	18.658	62.235
20	Kab. Purbalingga	-	46.209	18.658	64.867
21	Kab. Purworejo	-	34.990	18.658	53.648
22	Kab. Rembang	-	34.990	18.658	53.648
23	Kab. Semarang	-	403.737	18.658	422.395
24	Kab. Sragen	-	72.277	18.658	90.935
25	Kab. Sukoharjo	-	34.990	18.658	53.648
26	Kab. Tegal	-	39.586	18.658	58.244
27	Kab. Temanggung	-	61.027	21.244	82.271
28	Kab. Wonogiri	-	41.652	18.658	60.310

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
29	Kab. Wonosobo	-	34.990	174.867	209.857
30	Kota Magelang	-	34.990	18.658	53.648
31	Kota Pekalongan	-	34.990	18.658	53.648
32	Kota Salatiga	-	39.785	18.658	58.443
33	Kota Semarang	-	34.990	18.658	53.648
34	Kota Surakarta	-	34.990	18.658	53.648
35	Kota Tegal	-	34.990	18.658	53.648
IX	Provinsi Jawa Timur	-	509.709	-	509.709
1	Kab. Bangkalan	-	27.552	-	27.552
2	Kab. Banyuwangi	-	207.307	-	207.307

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
3	Kab. Blitar	-	27.552	-	27.552
4	Kab. Bojonegoro	-	27.552	-	27.552
5	Kab. Bondowoso	-	288.311	-	288.311
6	Kab. Gresik	-	27.552	-	27.552
7	Kab. Jember	-	27.552	-	27.552
8	Kab. Jombang	-	27.552	-	27.552
9	Kab. Kediri	-	27.552	-	27.552
10	Kab. Lamongan	-	27.552	-	27.552
11	Kab. Lumajang	-	27.552	-	27.552
12	Kab. Madiun	-	76.276	-	76.276

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
13	Kab. Magetan	-	48.668	-	48.668
14	Kab. Malang	-	38.826	-	38.826
15	Kab. Mojokerto	-	72.229	-	72.229
16	Kab. Nganjuk	-	27.552	-	27.552
17	Kab. Ngawi	-	88.169	-	88.169
18	Kab. Pacitan	-	27.552	-	27.552
19	Kab. Pamekasan	-	27.552	-	27.552
20	Kab. Pasuruan	-	59.365	-	59.365
21	Kab. Ponorogo	-	218.251	-	218.251
22	Kab. Probolinggo	-	27.552	-	27.552

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
23	Kab. Sampang	-	27.552	-	27.552
24	Kab. Sidoarjo	-	27.552	-	27.552
25	Kab. Situbondo	-	30.555	-	30.555
26	Kab. Sumenep	-	27.552	-	27.552
27	Kab. Trenggalek	-	27.552	-	27.552
28	Kab. Tuban	-	27.552	-	27.552
29	Kab. Tulungagung	-	27.552	-	27.552
30	Kota Blitar	-	27.552	-	27.552
31	Kota Kediri	-	27.552	-	27.552
32	Kota Madiun	-	27.552	-	27.552

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
33	Kota Malang	-	27.552	-	27.552
34	Kota Mojokerto	-	27.552	-	27.552
35	Kota Pasuruan	-	27.552	-	27.552
36	Kota Probolinggo	-	27.552	-	27.552
37	Kota Surabaya	-	27.552	-	27.552
38	Kota Batu	-	57.657	-	57.657
X	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	3.816.264	3.816.264
1	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	545.181	545.181
2	Kab. Minahasa	-	-	3.793.622	3.793.622
3	Kab. Sangihe	-	-	545.181	545.181

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4	Kota Bitung	-	-	545.181	545.181
5	Kota Manado	-	-	584.161	584.161
6	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	545.181	545.181
7	Kab. Minahasa Selatan	-	-	572.112	572.112
8	Kota Tomohon	-	-	3.617.496	3.617.496
9	Kab. Minahasa Utara	-	-	772.684	772.684
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	-	-	545.181	545.181
11	Kota Kotamobagu	-	-	545.181	545.181
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	545.181	545.181
13	Kab. Minahasa Tenggara	-	-	552.268	552.268

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-	545.181	545.181
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-	545.181	545.181
XI	Provinsi Nusa Tenggara Timur	574.180	793.937	-	1.368.117
1	Kab. Alor	54.684	158.516	-	213.200
2	Kab. Belu	54.684	75.613	-	130.297
3	Kab. Ende	796.612	783.432	-	1.580.044
4	Kab. Flores Timur	54.684	147.263	-	201.947
5	Kab. Kupang	54.684	75.613	-	130.297
6	Kab. Lembata	54.684	321.639	-	376.323
7	Kab. Manggarai	459.376	364.771	-	824.147

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
8	Kab. Ngada	54.684	92.177	-	146.861
9	Kab. Sikka	54.684	75.613	-	130.297
10	Kab. Sumba Barat	54.684	75.613	-	130.297
11	Kab. Sumba Timur	54.684	75.613	-	130.297
12	Kab. Timor Tengah Selatan	54.684	75.613	-	130.297
13	Kab. Timor Tengah Utara	54.684	75.613	-	130.297
14	Kota Kupang	54.684	75.613	-	130.297
15	Kab. Rote Ndao	54.684	75.613	-	130.297
16	Kab. Manggarai Barat	54.684	75.613	-	130.297
17	Kab. Nagekeo	54.684	75.613	-	130.297

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
18	Kab. Sumba Barat Daya	54.684	75.613	-	130.297
19	Kab. Sumba Tengah	54.684	75.613	-	130.297
20	Kab. Manggarai Timur	54.684	75.613	-	130.297
21	Kab. Sabu Raijua	54.684	75.613	-	130.297
22	Kab. Malaka	54.684	75.613	-	130.297
XII	Provinsi Maluku Utara	-	164.758	-	164.758
1	Kab. Halmahera Tengah	-	36.613	-	36.613
2	Kota Ternate	-	36.613	-	36.613
3	Kab. Halmahera Barat	-	41.260	-	41.260
4	Kab. Halmahera Timur	-	36.613	-	36.613

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
5	Kab. Halmahera Selatan	-	286.154	-	286.154
6	Kab. Halmahera Utara	-	36.613	-	36.613
7	Kab. Kepulauan Sula	-	36.613	-	36.613
8	Kota Tidore Kepulauan	-	36.613	-	36.613
9	Kab. Pulau Morotai	-	36.613	-	36.613
10	Kab. Pulau Taliabu	-	36.613	-	36.613
XIII	Provinsi Banten	-	454.795	-	454.795
1	Kab. Lebak	-	129.941	-	129.941
2	Kab. Pandeglang	-	326.724	-	326.724
3	Kab. Serang	-	534.605	-	534.605

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.9
RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4	Kab. Tangerang	-	129.941	-	129.941
5	Kota Cilegon	-	129.941	-	129.941
6	Kota Tangerang	-	129.941	-	129.941
7	Kota Serang	-	129.941	-	129.941
8	Kota Tangerang Selatan	-	129.941	-	129.941
XIV	Selisih Lebih	17.518.394	3.597.080	16.844.553	37.960.027
TOTAL		70.285.397	25.376.985	1.054.833.053	1.150.495.435

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
I	Provinsi Aceh	2.010.367.360
1	Kab. Aceh Barat	561.819.533
2	Kab. Aceh Besar	771.619.306
3	Kab. Aceh Selatan	615.381.713
4	Kab. Aceh Singkil	419.635.768
5	Kab. Aceh Tengah	584.064.494
6	Kab. Aceh Tenggara	557.213.845
7	Kab. Aceh Timur	784.643.932
8	Kab. Aceh Utara	911.862.322
9	Kab. Bireuen	827.762.183
10	Kab. Pidie	850.490.420
11	Kab. Simeulue	432.894.090
12	Kota Banda Aceh	557.079.909
13	Kota Sabang	343.123.774
14	Kota Langsa	421.002.694
15	Kota Lhokseumawe	432.477.774
16	Kab. Gayo Lues	433.649.541
17	Kab. Aceh Barat Daya	424.470.065
18	Kab. Aceh Jaya	405.647.701
19	Kab. Nagan Raya	492.894.146
20	Kab. Aceh Tamiang	504.489.012
21	Kab. Bener Meriah	431.518.927
22	Kab. Pidie Jaya	417.678.904
23	Kota Subulussalam	324.247.442
II	Provinsi Sumatera Utara	2.545.202.693
1	Kab. Asahan	845.782.109
2	Kab. Dairi	575.549.527
3	Kab. Deli Serdang	1.399.718.855
4	Kab. Karo	701.606.434
5	Kab. Labuhanbatu	659.351.692
6	Kab. Langkat	1.117.780.638
7	Kab. Mandailing Natal	766.908.677

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
8	Kab. Nias	426.273.979
9	Kab. Simalungun	1.157.869.531
10	Kab. Tapanuli Selatan	615.254.051
11	Kab. Tapanuli Tengah	623.187.906
12	Kab. Tapanuli Utara	617.410.172
13	Kab. Toba	527.775.092
14	Kota Binjai	550.250.084
15	Kota Medan	1.576.566.420
16	Kota Pematang Siantar	575.194.109
17	Kota Sibolga	397.258.578
18	Kota Tanjung Balai	416.591.491
19	Kota Tebing Tinggi	399.645.141
20	Kota Padang Sidempuan	483.580.247
21	Kab. Pakpak Bharat	329.109.170
22	Kab. Nias Selatan	637.989.763
23	Kab. Humbang Hasundutan	497.770.762
24	Kab. Serdang Bedagai	741.896.149
25	Kab. Samosir	427.830.255
26	Kab. Batu Bara	573.892.742
27	Kab. Padang Lawas	506.486.046
28	Kab. Padang Lawas Utara	530.916.406
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	488.398.593
30	Kab. Labuhanbatu Utara	570.739.426
31	Kab. Nias Utara	401.228.290
32	Kab. Nias Barat	340.435.104
33	Kota Gunungsitoli	412.635.036
III	Provinsi Sumatera Barat	1.949.470.283
1	Kab. Limapuluh Kota	709.388.713
2	Kab. Agam	770.168.377
3	Kab. Kepulauan Mentawai	567.152.366
4	Kab. Padang Pariaman	729.862.287
5	Kab. Pasaman	569.917.922

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
6	Kab. Pesisir Selatan	802.984.691
7	Kab. Sijunjung	518.814.633
8	Kab. Solok	676.154.865
9	Kab. Tanah Datar	658.257.163
10	Kota Bukit Tinggi	435.274.988
11	Kota Padang Panjang	357.910.679
12	Kota Padang	1.079.443.056
13	Kota Payakumbuh	427.519.801
14	Kota Sawahlunto	352.689.253
15	Kota Solok	381.556.605
16	Kota Pariaman	395.431.952
17	Kab. Pasaman Barat	616.168.178
18	Kab. Dharmasraya	488.046.996
19	Kab. Solok Selatan	451.638.869
IV	Provinsi Riau	1.503.538.311
1	Kab. Bengkalis	347.930.340
2	Kab. Indragiri Hilir	914.440.826
3	Kab. Indragiri Hulu	650.613.946
4	Kab. Kampar	791.847.753
5	Kab. Kuantan Singingi	619.107.221
6	Kab. Pelalawan	614.727.047
7	Kab. Rokan Hilir	507.585.261
8	Kab. Rokan Hulu	663.163.214
9	Kab. Siak	378.654.237
10	Kota Dumai	443.636.431
11	Kota Pekanbaru	826.619.573
12	Kab. Kepulauan Meranti	419.803.236
V	Provinsi Jambi	1.327.397.167
1	Kab. Batanghari	578.344.367
2	Kab. Bungo	608.905.893
3	Kab. Kerinci	576.227.015
4	Kab. Merangin	680.525.643

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
5	Kab. Muaro Jambi	639.992.420
6	Kab. Sarolangun	546.671.956
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	495.245.924
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	531.799.472
9	Kab. Tebo	545.876.348
10	Kota Jambi	697.632.020
11	Kota Sungai Penuh	418.470.255
VI	Provinsi Sumatera Selatan	1.614.757.701
1	Kab. Lahat	661.747.220
2	Kab. Musi Banyuasin	385.089.459
3	Kab. Musi Rawas	606.181.929
4	Kab. Muara Enim	626.516.555
5	Kab. Ogan Komering Ilir	998.456.096
6	Kab. Ogan Komering Ulu	609.604.288
7	Kota Palembang	1.247.690.325
8	Kota Prabumulih	405.351.139
9	Kota Pagar Alam	377.775.249
10	Kota Lubuk Linggau	456.420.348
11	Kab. Banyuasin	902.904.834
12	Kab. Ogan Ilir	598.745.241
13	Kab. OKU Timur	767.802.353
14	Kab. OKU Selatan	600.019.342
15	Kab. Empat Lawang	410.742.504
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	300.703.557
17	Kab. Musi Rawas Utara	373.995.700
VII	Provinsi Bengkulu	1.253.924.758
1	Kab. Bengkulu Selatan	530.906.845
2	Kab. Bengkulu Utara	598.933.999
3	Kab. Rejang Lebong	572.101.466
4	Kota Bengkulu	656.177.855
5	Kab. Kaur	421.660.115
6	Kab. Seluma	483.682.041

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
7	Kab. Mukomuko	467.469.744
8	Kab. Lebong	382.660.060
9	Kab. Kepahiang	408.396.965
10	Kab. Bengkulu Tengah	413.571.049
VIII	Provinsi Lampung	1.783.414.286
1	Kab. Lampung Barat	507.981.795
2	Kab. Lampung Selatan	979.091.229
3	Kab. Lampung Tengah	1.274.224.100
4	Kab. Lampung Utara	897.379.791
5	Kab. Lampung Timur	1.029.485.339
6	Kab. Tanggamus	735.266.499
7	Kab. Tulang Bawang	589.759.393
8	Kab. Way Kanan	636.375.470
9	Kota Bandar Lampung	1.035.373.952
10	Kota Metro	441.737.749
11	Kab. Pesawaran	632.082.371
12	Kab. Pringsewu	588.656.426
13	Kab. Mesuji	416.681.681
14	Kab. Tulang Bawang Barat	450.827.307
15	Kab. Pesisir Barat	414.730.347
IX	Provinsi DKI Jakarta	-
X	Provinsi Jawa Barat	3.107.449.500
1	Kab. Bandung	2.011.680.028
2	Kab. Bekasi	1.133.188.299
3	Kab. Bogor	1.924.846.835
4	Kab. Ciamis	1.135.769.046
5	Kab. Cianjur	1.532.487.814
6	Kab. Cirebon	1.452.822.229
7	Kab. Garut	1.721.028.659
8	Kab. Indramayu	1.325.416.407
9	Kab. Karawang	1.239.612.869
10	Kab. Kuningan	1.148.735.374

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
11	Kab. Majalengka	1.148.956.857
12	Kab. Purwakarta	825.439.607
13	Kab. Subang	1.221.080.162
14	Kab. Sukabumi	1.540.373.990
15	Kab. Sumedang	1.093.941.300
16	Kab. Tasikmalaya	1.421.519.801
17	Kota Bandung	1.617.852.903
18	Kota Bekasi	1.175.540.512
19	Kota Bogor	776.739.453
20	Kota Cirebon	554.276.295
21	Kota Depok	871.603.788
22	Kota Sukabumi	478.905.738
23	Kota Tasikmalaya	766.651.766
24	Kota Cimahi	547.976.205
25	Kota Banjar	358.176.982
26	Kab. Bandung Barat	1.044.339.297
27	Kab. Pangandaran	521.916.224
XI	Provinsi Jawa Tengah	3.546.565.978
1	Kab. Banjarnegara	925.606.228
2	Kab. Banyumas	1.332.303.777
3	Kab. Batang	762.093.504
4	Kab. Blora	892.172.280
5	Kab. Boyolali	976.154.843
6	Kab. Brebes	1.279.570.502
7	Kab. Cilacap	1.314.981.159
8	Kab. Demak	884.747.530
9	Kab. Grobogan	1.068.435.263
10	Kab. Jepara	959.599.852
11	Kab. Karanganyar	933.528.473
12	Kab. Kebumen	1.218.308.093
13	Kab. Kendal	931.382.224
14	Kab. Klaten	1.187.452.132

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
15	Kab. Kudus	772.237.217
16	Kab. Magelang	1.007.277.736
17	Kab. Pati	1.143.753.995
18	Kab. Pekalongan	899.888.446
19	Kab. Pemalang	1.144.446.416
20	Kab. Purbalingga	857.514.520
21	Kab. Purworejo	944.177.039
22	Kab. Rembang	741.967.840
23	Kab. Semarang	926.781.418
24	Kab. Sragen	1.017.058.181
25	Kab. Sukoharjo	875.928.712
26	Kab. Tegal	1.112.675.840
27	Kab. Temanggung	778.059.299
28	Kab. Wonogiri	1.095.011.743
29	Kab. Wonosobo	818.599.153
30	Kota Magelang	423.182.928
31	Kota Pekalongan	440.508.045
32	Kota Salatiga	431.844.399
33	Kota Semarang	1.206.256.161
34	Kota Surakarta	807.693.430
35	Kota Tegal	466.650.324
XII	Provinsi DI Yogyakarta	1.265.379.234
1	Kab. Bantul	941.315.965
2	Kab. Gunung Kidul	896.737.480
3	Kab. Kulon Progo	669.968.360
4	Kab. Sleman	956.601.996
5	Kota Yogyakarta	637.956.347
XIII	Provinsi Jawa Timur	3.771.146.596
1	Kab. Bangkalan	964.231.396
2	Kab. Banyuwangi	1.335.734.467
3	Kab. Blitar	1.078.450.383
4	Kab. Bojonegoro	898.915.809

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
5	Kab. Bondowoso	871.057.433
6	Kab. Gresik	899.246.533
7	Kab. Jember	1.660.676.135
8	Kab. Jombang	1.038.926.459
9	Kab. Kediri	1.187.961.417
10	Kab. Lamongan	1.122.346.232
11	Kab. Lumajang	929.212.488
12	Kab. Madiun	834.866.104
13	Kab. Magetan	865.427.353
14	Kab. Malang	1.610.042.915
15	Kab. Mojokerto	933.620.228
16	Kab. Nganjuk	1.015.486.592
17	Kab. Ngawi	998.372.421
18	Kab. Pacitan	755.965.747
19	Kab. Pamekasan	817.739.051
20	Kab. Pasuruan	1.133.108.026
21	Kab. Ponorogo	1.011.882.314
22	Kab. Probolinggo	956.865.262
23	Kab. Sampang	807.701.480
24	Kab. Sidoarjo	1.169.538.173
25	Kab. Situbondo	769.567.632
26	Kab. Sumenep	1.117.673.305
27	Kab. Trenggalek	850.766.057
28	Kab. Tuban	992.001.175
29	Kab. Tulungagung	1.097.920.931
30	Kota Blitar	407.004.118
31	Kota Kediri	588.574.951
32	Kota Madiun	480.897.030
33	Kota Malang	818.921.005
34	Kota Mojokerto	379.738.311
35	Kota Pasuruan	416.730.556
36	Kota Probolinggo	444.861.386

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
37	Kota Surabaya	1.221.563.157
38	Kota Batu	460.251.693
XIV	Provinsi Kalimantan Barat	1.624.268.870
1	Kab. Bengkayang	561.038.235
2	Kab. Landak	628.617.622
3	Kab. Kapuas Hulu	920.588.385
4	Kab. Ketapang	1.066.408.252
5	Kab. Mempawah	549.229.501
6	Kab. Sambas	830.337.802
7	Kab. Sanggau	764.906.886
8	Kab. Sintang	864.889.771
9	Kota Pontianak	668.160.406
10	Kota Singkawang	472.145.219
11	Kab. Sekadau	479.198.360
12	Kab. Melawi	571.472.321
13	Kab. Kayong Utara	459.627.274
14	Kab. Kubu Raya	742.123.048
XV	Provinsi Kalimantan Tengah	1.478.722.776
1	Kab. Barito Selatan	534.162.935
2	Kab. Barito Utara	517.637.911
3	Kab. Kapuas	803.694.028
4	Kab. Kotawaringin Barat	612.889.225
5	Kab. Kotawaringin Timur	786.123.576
6	Kota Palangkaraya	612.076.136
7	Kab. Katingan	646.667.846
8	Kab. Seruyan	578.163.594
9	Kab. Sukamara	394.536.235
10	Kab. Lamandau	433.340.075
11	Kab. Gunung Mas	527.932.477
12	Kab. Pulang Pisau	532.104.386
13	Kab. Murung Raya	635.603.443
14	Kab. Barito Timur	451.549.564

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
XVI	Provinsi Kalimantan Selatan	1.129.519.254
1	Kab. Banjar	696.384.761
2	Kab. Barito Kuala	543.842.354
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	490.461.821
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	493.980.930
5	Kab. Hulu Sungai Utara	462.510.806
6	Kab. Kotabaru	602.279.945
7	Kab. Tabalong	466.357.861
8	Kab. Tanah Laut	510.661.585
9	Kab. Tapin	430.487.200
10	Kota Banjarbaru	425.300.994
11	Kota Banjarmasin	681.679.786
12	Kab. Balangan	357.992.698
13	Kab. Tanah Bumbu	442.406.892
XVII	Provinsi Kalimantan Timur	856.333.359
1	Kab. Berau	564.406.225
2	Kab. Kutai Kartanegara	458.084.268
3	Kab. Kutai Barat	562.642.939
4	Kab. Kutai Timur	577.491.008
5	Kab. Paser	388.745.286
6	Kota Balikpapan	442.478.095
7	Kota Bontang	233.454.676
8	Kota Samarinda	682.255.913
9	Kab. Penajam Paser Utara	280.388.087
10	Kab. Mahakam Ulu	457.668.332
XVIII	Provinsi Sulawesi Utara	1.374.484.768
1	Kab. Bolaang Mongondow	527.960.118
2	Kab. Minahasa	635.281.531
3	Kab. Sangihe	510.463.056
4	Kota Bitung	480.061.807
5	Kota Manado	725.286.092
6	Kab. Kepulauan Talaud	473.210.020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
7	Kab. Minahasa Selatan	517.743.755
8	Kota Tomohon	406.403.349
9	Kab. Minahasa Utara	483.673.388
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	373.821.875
11	Kota Kotamobagu	364.720.632
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	359.975.091
13	Kab. Minahasa Tenggara	392.476.411
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	334.764.412
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	338.934.649
XIX	Provinsi Sulawesi Tengah	1.542.542.285
1	Kab. Banggai	832.604.848
2	Kab. Banggai Kepulauan	455.240.804
3	Kab. Buol	493.198.370
4	Kab. Toli-Toli	598.193.032
5	Kab. Donggala	639.377.007
6	Kab. Morowali	473.825.401
7	Kab. Poso	694.175.865
8	Kota Palu	657.337.602
9	Kab. Parigi Moutong	742.502.078
10	Kab. Tojo Una Una	561.831.712
11	Kab. Sigi	597.869.746
12	Kab. Banggai Laut	398.302.986
13	Kab. Morowali Utara	550.351.848
XX	Provinsi Sulawesi Selatan	2.416.530.962
1	Kab. Bantaeng	483.496.615
2	Kab. Barru	498.613.623
3	Kab. Bone	1.028.458.565
4	Kab. Bulukumba	681.648.431
5	Kab. Enrekang	512.848.721
6	Kab. Gowa	822.135.097
7	Kab. Jeneponto	624.726.479
8	Kab. Luwu	668.641.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
9	Kab. Luwu Utara	637.175.882
10	Kab. Maros	681.865.121
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	724.314.014
12	Kota Palopo	503.854.529
13	Kab. Luwu Timur	519.015.708
14	Kab. Pinrang	683.320.559
15	Kab. Sinjai	559.872.682
16	Kab. Kepulauan Selayar	578.680.942
17	Kab. Sidenreng Rappang	594.592.535
18	Kab. Soppeng	598.351.484
19	Kab. Takalar	583.626.582
20	Kab. Tana Toraja	554.798.865
21	Kab. Wajo	690.149.083
22	Kota Pare-pare	444.105.394
23	Kota Makassar	1.299.283.508
24	Kab. Toraja Utara	514.690.284
XXI	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.504.815.729
1	Kab. Buton	407.932.836
2	Kab. Konawe	676.403.604
3	Kab. Kolaka	560.585.321
4	Kab. Muna	632.047.562
5	Kota Kendari	649.867.063
6	Kota Bau-bau	502.731.572
7	Kab. Konawe Selatan	683.398.286
8	Kab. Bombana	464.079.247
9	Kab. Wakatobi	453.561.782
10	Kab. Kolaka Utara	469.523.649
11	Kab. Konawe Utara	435.309.491
12	Kab. Buton Utara	397.634.471
13	Kab. Konawe Kepulauan	309.948.538
14	Kab. Kolaka Timur	391.050.304
15	Kab. Muna Barat	347.879.343

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
16	Kab. Buton Tengah	350.703.020
17	Kab. Buton Selatan	345.962.916
XXII	Provinsi Bali	1.241.266.313
1	Kab. Badung	338.522.304
2	Kab. Bangli	543.381.469
3	Kab. Buleleng	919.593.725
4	Kab. Gianyar	658.741.795
5	Kab. Jembrana	530.846.915
6	Kab. Karangasem	723.846.259
7	Kab. Klungkung	510.642.255
8	Kab. Tabanan	770.968.153
9	Kota Denpasar	629.908.879
XXIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.524.501.604
1	Kab. Bima	860.233.662
2	Kab. Dompu	554.043.719
3	Kab. Lombok Barat	740.464.949
4	Kab. Lombok Tengah	969.942.081
5	Kab. Lombok Timur	1.107.842.697
6	Kab. Sumbawa	806.517.021
7	Kota Mataram	588.593.342
8	Kota Bima	446.458.704
9	Kab. Sumbawa Barat	382.933.128
10	Kab. Lombok Utara	386.085.830
XXIV	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.783.843.886
1	Kab. Alor	584.312.762
2	Kab. Belu	482.122.313
3	Kab. Ende	606.394.891
4	Kab. Flores Timur	602.314.269
5	Kab. Kupang	649.813.306
6	Kab. Lembata	452.492.077
7	Kab. Manggarai	570.290.182
8	Kab. Ngada	453.957.148

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
9	Kab. Sikka	598.871.808
10	Kab. Sumba Barat	385.711.968
11	Kab. Sumba Timur	617.198.894
12	Kab. Timor Tengah Selatan	729.046.659
13	Kab. Timor Tengah Utara	573.028.403
14	Kota Kupang	630.095.340
15	Kab. Rote Ndao	433.508.165
16	Kab. Manggarai Barat	511.595.143
17	Kab. Nagekeo	420.696.362
18	Kab. Sumba Barat Daya	471.771.211
19	Kab. Sumba Tengah	340.884.066
20	Kab. Manggarai Timur	502.780.135
21	Kab. Sabu Raijua	348.032.496
22	Kab. Malaka	436.323.453
XXV	Provinsi Maluku	1.574.799.396
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	541.981.957
2	Kab. Maluku Tengah	906.685.148
3	Kab. Maluku Tenggara	468.052.631
4	Kab. Buru	492.060.817
5	Kota Ambon	641.757.645
6	Kab. Seram Bagian Barat	578.985.055
7	Kab. Seram Bagian Timur	517.469.109
8	Kab. Kepulauan Aru	572.566.656
9	Kota Tual	375.667.302
10	Kab. Maluku Barat Daya	548.488.720
11	Kab. Buru Selatan	413.367.941
XXVI	Provinsi Papua	2.391.513.927
1	Kab. Biak Numfor	549.977.773
2	Kab. Jayapura	649.247.680
3	Kab. Jayawijaya	684.439.004
4	Kab. Merauke	1.158.161.374
5	Kab. Mimika	569.067.026

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
6	Kab. Nabire	683.701.072
7	Kab. Paniai	556.719.745
8	Kab. Puncak Jaya	713.321.681
9	Kab. Kepulauan Yapen	529.881.230
10	Kota Jayapura	599.692.171
11	Kab. Sarmi	652.457.027
12	Kab. Keerom	508.416.806
13	Kab. Yahukimo	718.684.414
14	Kab. Pegunungan Bintang	789.928.649
15	Kab. Tolikara	700.414.831
16	Kab. Boven Digoel	771.368.712
17	Kab. Mappi	720.381.030
18	Kab. Asmat	842.863.076
19	Kab. Waropen	539.908.850
20	Kab. Supiori	421.838.061
21	Kab. Mamberamo Raya	689.337.679
22	Kab. Mamberamo Tengah	612.307.434
23	Kab. Yalimo	580.573.236
24	Kab. Lanny Jaya	617.363.510
25	Kab. Nduga	578.934.519
26	Kab. Dogiyai	469.388.923
27	Kab. Puncak	760.545.035
28	Kab. Intan Jaya	649.873.770
29	Kab. Deiyai	461.840.722
XXVII	Provinsi Maluku Utara	1.262.976.766
1	Kab. Halmahera Tengah	424.488.322
2	Kota Ternate	608.090.902
3	Kab. Halmahera Barat	471.390.557
4	Kab. Halmahera Timur	457.734.823
5	Kab. Halmahera Selatan	716.679.456
6	Kab. Halmahera Utara	464.956.164
7	Kab. Kepulauan Sula	464.778.311

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
8	Kota Tidore Kepulauan	520.766.918
9	Kab. Pulau Morotai	372.428.984
10	Kab. Pulau Taliabu	339.125.513
XXVIII	Provinsi Banten	1.105.866.293
1	Kab. Lebak	1.046.531.357
2	Kab. Pandeglang	1.146.165.603
3	Kab. Serang	1.052.850.904
4	Kab. Tangerang	1.148.970.079
5	Kota Cilegon	605.455.422
6	Kota Tangerang	854.592.265
7	Kota Serang	624.827.538
8	Kota Tangerang Selatan	570.226.008
XXIX	Provinsi Bangka Belitung	970.636.972
1	Kab. Bangka	506.653.312
2	Kab. Belitung	468.342.798
3	Kota Pangkal Pinang	438.919.884
4	Kab. Bangka Selatan	448.918.589
5	Kab. Bangka Tengah	431.227.177
6	Kab. Bangka Barat	433.792.745
7	Kab. Belitung Timur	429.280.821
XXX	Provinsi Gorontalo	971.762.295
1	Kab. Boalemo	435.796.166
2	Kab. Gorontalo	630.646.862
3	Kota Gorontalo	497.821.062
4	Kab. Pohuwato	496.856.253
5	Kab. Bone Bolango	467.100.538
6	Kab. Gorontalo Utara	389.377.730
XXXI	Provinsi Kepulauan Riau	1.129.091.346
1	Kab. Natuna	403.624.512
2	Kab. Kepulauan Anambas	380.489.223
3	Kab. Karimun	430.884.153
4	Kota Batam	646.918.482

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
5	Kota Tanjung Pinang	463.626.007
6	Kab. Lingga	469.625.118
7	Kab. Bintan	492.618.448
XXXII	Provinsi Papua Barat	1.350.978.612
1	Kab. Fak Fak	662.932.751
2	Kab. Manokwari	507.833.489
3	Kab. Sorong	511.889.989
4	Kota Sorong	473.147.792
5	Kab. Raja Ampat	663.610.172
6	Kab. Sorong Selatan	448.685.616
7	Kab. Teluk Bintuni	510.059.360
8	Kab. Teluk Wondama	435.413.331
9	Kab. Kaimana	586.962.173
10	Kab. Maybrat	415.074.704
11	Kab. Tambrauw	478.060.116
12	Kab. Manokwari Selatan	327.486.558
13	Kab. Pegunungan Arfak	355.097.234
XXXIII	Provinsi Sulawesi Barat	1.003.041.642
1	Kab. Majene	502.411.016
2	Kab. Mamuju	612.150.082
3	Kab. Polewali Mandar	686.108.375
4	Kab. Mamasa	505.381.552
5	Kab. Pasangkayu	468.522.463
6	Kab. Mamuju Tengah	344.703.248
XXXIV	Provinsi Kalimantan Utara	1.114.975.109
1	Kab. Bulungan	541.744.074
2	Kab. Malinau	806.464.007
3	Kab. Nunukan	519.277.375
4	Kota Tarakan	436.727.861
5	Kab. Tana Tidung	420.931.382

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.10
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	DANA ALOKASI UMUM
(1)	(2)	(3)
JUMLAH ALOKASI DAU PROVINSI		55.031.086.031
JUMLAH ALOKASI DAU KAB/KOTA		335.260.304.257
JUMLAH ALOKASI DAU NASIONAL		390.291.390.288

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Provinsi Aceh				100.391.123	103.659.840
2	Kab. Aceh Barat	453.430	26.522.671	22.410.110		
3	Kab. Aceh Besar	571.571	25.170.591	7.238.715		
4	Kab. Aceh Selatan	2.660.439	11.687.535	13.842.880		
5	Kab. Aceh Singkil		21.908.538	27.483.216		
6	Kab. Aceh Tengah	1.073.870	4.564.506	2.461.601		
7	Kab. Aceh Tenggara	996.412	27.644.118	22.298.351		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
1	Provinsi Aceh		3.864.765		207.915.728	
2	Kab. Aceh Barat	1.716.614			51.102.825	16.550.950
3	Kab. Aceh Besar			300.000	33.280.877	3.316.108
4	Kab. Aceh Selatan				28.190.854	13.910.952
5	Kab. Aceh Singkil			500.000	49.891.754	8.259.646
6	Kab. Aceh Tengah				8.099.977	9.003.725
7	Kab. Aceh Tenggara	546.800			51.485.681	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
1	Provinsi Aceh	14.689.559		4.904.767		19.594.326
2	Kab. Aceh Barat	20.546.190	3.970.333	261.590	1.488.826	42.817.889
3	Kab. Aceh Besar	3.911.300	5.065.443	391.581	1.146.144	13.830.576
4	Kab. Aceh Selatan	3.000.000	7.029.733	512.293	1.353.974	25.806.952
5	Kab. Aceh Singkil	25.876.872	3.307.327		1.112.537	38.556.382
6	Kab. Aceh Tengah	12.433.620	3.537.463		1.110.311	26.085.119
7	Kab. Aceh Tenggara	14.500.000	2.838.955	2.208.918	1.242.034	22.789.907

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
1	Provinsi Aceh	15.000.563			242.510.617
2	Kab. Aceh Barat	14.464.701			108.385.415
3	Kab. Aceh Besar	11.919.262	4.600.000		63.630.715
4	Kab. Aceh Selatan	11.669.083			65.666.889
5	Kab. Aceh Singkil	12.188.094	6.809.121		107.445.351
6	Kab. Aceh Tengah	15.217.015	3.800.000		53.202.111
7	Kab. Aceh Tenggara	10.839.569			85.115.157

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
1	Provinsi Aceh	2.157.908			2.157.908	49.363.737
2	Kab. Aceh Barat					
3	Kab. Aceh Besar	650.000		280.000	930.000	8.774.291
4	Kab. Aceh Selatan		26.557.714		26.557.714	
5	Kab. Aceh Singkil					
6	Kab. Aceh Tengah			280.000	280.000	10.460.888
7	Kab. Aceh Tenggara			280.000	280.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
1	Provinsi Aceh		49.363.737			
2	Kab. Aceh Barat				4.902.959	4.902.959
3	Kab. Aceh Besar		8.774.291		4.238.824	4.238.824
4	Kab. Aceh Selatan	11.452.822	11.452.822		5.771.368	5.771.368
5	Kab. Aceh Singkil				3.820.919	3.820.919
6	Kab. Aceh Tengah		10.460.888	1.673.307	2.239.213	3.912.520
7	Kab. Aceh Tenggara			2.749.680	2.250.000	4.999.680

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
1	Provinsi Aceh					6.664.652
2	Kab. Aceh Barat		1.911.541	1.911.541	6.264.890	13.282.000
3	Kab. Aceh Besar		2.121.501	2.121.501	7.348.845	7.814.384
4	Kab. Aceh Selatan		2.159.682	2.159.682	2.032.781	6.712.000
5	Kab. Aceh Singkil		1.653.144	1.653.144	14.070.248	
6	Kab. Aceh Tengah	4.234.160	2.281.319	6.515.479	745.603	5.673.598
7	Kab. Aceh Tenggara	6.863.553	2.099.691	8.963.244	1.129.711	7.721.165

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
1	Provinsi Aceh	4.902.661	10.478.800			
2	Kab. Aceh Barat	3.125.000	900.000	1.184.345		
3	Kab. Aceh Besar	6.420.922	1.094.000	4.000.389		
4	Kab. Aceh Selatan		1.097.500	3.700.360		
5	Kab. Aceh Singkil	3.100.000	1.082.000			
6	Kab. Aceh Tengah	5.815.000	1.213.820			
7	Kab. Aceh Tenggara	2.900.000	1.300.000		1.434.991	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
1	Provinsi Aceh		6.411.131	6.411.131	79.978.889	322.489.506
2	Kab. Aceh Barat				31.570.735	139.956.150
3	Kab. Aceh Besar				42.743.156	106.373.871
4	Kab. Aceh Selatan				59.484.227	125.151.116
5	Kab. Aceh Singkil				23.726.311	131.171.662
6	Kab. Aceh Tengah				34.616.908	87.819.019
7	Kab. Aceh Tenggara				28.728.791	113.843.948

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
8	Kab. Aceh Timur	2.560.119	14.671.854	14.424.884		
9	Kab. Aceh Utara	5.143.241	28.815.351	20.580.516		
10	Kab. Bireuen	245.801	14.463.302	12.165.665		
11	Kab. Pidie	979.067	13.833.890	5.790.743		
12	Kab. Simeulue		4.670.439	2.613.304		
13	Kota Banda Aceh	489.205	4.048.841	2.151.452		
14	Kota Sabang	670.073	3.704.373	2.627.626		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
8	Kab. Aceh Timur			432.348	32.089.205	2.448.700
9	Kab. Aceh Utara			357.200	54.896.308	2.000.000
10	Kab. Bireuen	596.800			27.471.568	4.403.004
11	Kab. Pidie			699.950	21.303.650	6.085.337
12	Kab. Simeulue				7.283.743	6.270.000
13	Kota Banda Aceh			9.999.930	16.689.428	2.000.000
14	Kota Sabang				7.002.072	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
8	Kab. Aceh Timur	15.488.016	6.376.320	1.307.363	1.463.986	27.084.385
9	Kab. Aceh Utara	3.200.000	4.004.001	345.896	1.299.773	10.849.670
10	Kab. Bireuen	5.037.500	4.695.248	351.418	1.145.639	15.632.809
11	Kab. Pidie	3.597.614	8.321.422	391.581	1.118.386	19.514.340
12	Kab. Simeulue	13.643.381	2.533.631	200.000	1.155.834	23.802.846
13	Kota Banda Aceh	5.366.903	3.540.966	391.581	1.053.483	12.352.933
14	Kota Sabang	42.528.718	1.900.822		843.836	47.273.376

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
8	Kab. Aceh Timur	24.945.154			84.118.744
9	Kab. Aceh Utara	23.078.259			88.824.237
10	Kab. Bireuen	35.949.116			79.053.493
11	Kab. Pidie	12.483.325			53.301.315
12	Kab. Simeulue	7.555.431	3.599.107		42.241.127
13	Kota Banda Aceh	6.530.449			35.572.810
14	Kota Sabang	10.190.130	4.600.000	3.250.500	72.316.078

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
8	Kab. Aceh Timur	3.255.489	1.000.000	260.000	4.515.489	11.752.696
9	Kab. Aceh Utara	650.000	5.667.799	280.000	6.597.799	12.892.227
10	Kab. Bireuen		29.507.743	280.000	29.787.743	13.665.421
11	Kab. Pidie	900.000	29.132.865	280.000	30.312.865	8.738.839
12	Kab. Simeulue			280.000	280.000	
13	Kota Banda Aceh					
14	Kota Sabang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
8	Kab. Aceh Timur		11.752.696	840.000	6.182.108	7.022.108
9	Kab. Aceh Utara		12.892.227		7.096.137	7.096.137
10	Kab. Bireuen		13.665.421		4.873.288	4.873.288
11	Kab. Pidie		8.738.839	320.000	4.678.356	4.998.356
12	Kab. Simeulue	2.897.714	2.897.714	10.848.738	4.271.405	15.120.143
13	Kota Banda Aceh				4.298.786	4.298.786
14	Kota Sabang	3.114.844	3.114.844		4.982.142	4.982.142

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
8	Kab. Aceh Timur	1.539.099	3.054.756	4.593.855		3.791.245
9	Kab. Aceh Utara		2.249.669	2.249.669		5.564.900
10	Kab. Bireuen	1.758.970	2.766.427	4.525.397		15.425.057
11	Kab. Pidie	378.000	3.494.777	3.872.777	2.141.801	15.724.900
12	Kab. Simeulue	7.620.615		7.620.615		7.275.000
13	Kota Banda Aceh		1.501.238	1.501.238	2.480.235	10.600.000
14	Kota Sabang		1.256.960	1.256.960	1.094.559	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
8	Kab. Aceh Timur	6.794.909	1.718.315			
9	Kab. Aceh Utara	6.535.000	1.296.400	4.000.389		
10	Kab. Bireuen	3.642.000	1.159.000			
11	Kab. Pidie	8.378.283	1.195.000			
12	Kab. Simeulue		1.315.000			
13	Kota Banda Aceh		525.000	3.500.340	11.803.952	
14	Kota Sabang		1.180.000	4.000.389		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
8	Kab. Aceh Timur				40.188.617	124.307.361
9	Kab. Aceh Utara				46.232.521	135.056.758
10	Kab. Bireuen				73.077.906	152.131.399
11	Kab. Pidie				75.362.821	128.664.136
12	Kab. Simeulue				34.508.472	76.749.599
13	Kota Banda Aceh				34.709.551	70.282.361
14	Kota Sabang				15.628.894	87.944.972

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15	Kota Langsa	1.732.995	25.380.663	23.829.541		
16	Kota Lhokseumawe	608.412	5.977.072	6.365.876		
17	Kab. Gayo Lues	2.662.702	8.925.034	6.918.015		
18	Kab. Aceh Barat Daya		14.133.092	8.805.315		
19	Kab. Aceh Jaya	1.489.185	12.892.479	6.724.931		
20	Kab. Nagan Raya		13.499.813	18.890.684		
21	Kab. Aceh Tamiang	281.738	3.831.631	5.269.787		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
15	Kota Langsa			200.000	51.143.199	2.000.000
16	Kota Lhokseumawe			499.625	13.450.985	2.000.000
17	Kab. Gayo Lues				18.505.751	6.883.850
18	Kab. Aceh Barat Daya			475.000	23.413.407	2.000.000
19	Kab. Aceh Jaya			388.000	21.494.595	15.920.609
20	Kab. Nagan Raya			610.270	33.000.767	7.536.376
21	Kab. Aceh Tamiang				9.383.156	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
15	Kota Langsa	3.000.000	3.045.525	1.571.149	869.979	10.486.653
16	Kota Lhokseumawe		4.172.288	208.925	625.811	7.007.024
17	Kab. Gayo Lues	6.000.000	1.743.509	300.545	1.275.012	16.202.916
18	Kab. Aceh Barat Daya	13.253.616	3.903.897		1.035.012	20.192.525
19	Kab. Aceh Jaya	20.000.000	2.658.708	200.000	1.250.299	40.029.616
20	Kab. Nagan Raya	3.000.000	2.389.127	5.522.296	1.101.167	19.548.966
21	Kab. Aceh Tamiang	3.000.000	4.551.563		938.717	10.490.280

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
15	Kota Langsa	9.018.699	3.700.000		74.348.551
16	Kota Lhokseumawe	7.364.010			27.822.019
17	Kab. Gayo Lues	10.386.484			45.095.151
18	Kab. Aceh Barat Daya	12.444.619			56.050.551
19	Kab. Aceh Jaya	9.324.545			70.848.756
20	Kab. Nagan Raya	15.937.120			68.486.853
21	Kab. Aceh Tamiang	13.915.801			33.789.237

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
15	Kota Langsa					
16	Kota Lhokseumawe					
17	Kab. Gayo Lues			280.000	280.000	
18	Kab. Aceh Barat Daya					
19	Kab. Aceh Jaya					
20	Kab. Nagan Raya	650.000	1.000.000	280.000	1.930.000	
21	Kab. Aceh Tamiang	2.007.846		280.000	2.287.846	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
15	Kota Langsa	3.134.316	3.134.316		6.595.119	6.595.119
16	Kota Lhokseumawe	2.751.552	2.751.552		4.585.549	4.585.549
17	Kab. Gayo Lues			3.714.568	4.180.381	7.894.949
18	Kab. Aceh Barat Daya				3.773.819	3.773.819
19	Kab. Aceh Jaya				4.159.827	4.159.827
20	Kab. Nagan Raya			2.404.722	3.833.653	6.238.375
21	Kab. Aceh Tamiang				5.212.467	5.212.467

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
15	Kota Langsa		5.352.984	5.352.984	40.373.374	
16	Kota Lhokseumawe		1.791.228	1.791.228	2.613.842	
17	Kab. Gayo Lues	5.136.143	421.000	5.557.143		7.161.714
18	Kab. Aceh Barat Daya		2.413.981	2.413.981		2.293.000
19	Kab. Aceh Jaya		1.826.555	1.826.555		2.217.230
20	Kab. Nagan Raya	3.957.682		3.957.682		10.466.911
21	Kab. Aceh Tamiang		1.998.824	1.998.824	1.111.580	4.260.820

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
15	Kota Langsa		980.000	600.058		1.000.000
16	Kota Lhokseumawe		1.113.000			
17	Kab. Gayo Lues		526.000			
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.105.000	1.037.200			
19	Kab. Aceh Jaya	2.550.000	1.323.000	12.237.068		
20	Kab. Nagan Raya	1.720.000	850.401			
21	Kab. Aceh Tamiang	3.255.000	1.344.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
15	Kota Langsa			1.000.000	58.035.851	132.384.402
16	Kota Lhokseumawe				12.855.171	40.677.190
17	Kab. Gayo Lues				21.419.806	66.514.957
18	Kab. Aceh Barat Daya				12.623.000	68.673.551
19	Kab. Aceh Jaya				24.313.680	95.162.436
20	Kab. Nagan Raya				25.163.369	93.650.222
21	Kab. Aceh Tamiang				19.470.537	53.259.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
22	Kab. Bener Meriah	559.961	7.885.671	1.052.915		
23	Kab. Pidie Jaya	1.411.320	20.249.057	8.141.234		
24	Kota Subulussalam	1.167.182	5.540.581	6.259.427		
25	Provinsi Sumatera Utara				50.536.800	144.393.850
26	Kab. Asahan		19.775.779	9.673.764		
27	Kab. Dairi		19.503.211	11.629.209		
28	Kab. Deli Serdang	3.657.876	6.158.656	11.575.503		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
22	Kab. Bener Meriah			534.785	10.033.332	13.910.388
23	Kab. Pidie Jaya				29.801.611	7.430.272
24	Kota Subulussalam				12.967.190	3.849.899
25	Provinsi Sumatera Utara		1.895.050	500.000	197.325.700	
26	Kab. Asahan				29.449.543	2.000.000
27	Kab. Dairi				31.132.420	10.620.023
28	Kab. Deli Serdang	200.000		10.000.000	31.592.035	3.177.693

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
22	Kab. Bener Meriah	5.747.484	1.806.625	225.628	1.229.332	22.919.457
23	Kab. Pidie Jaya	7.609.030	2.168.721		1.414.632	18.622.655
24	Kota Subulussalam	5.665.048	2.505.445		934.370	12.954.762
25	Provinsi Sumatera Utara	42.531.981		1.780.492		44.312.473
26	Kab. Asahan	3.000.000	3.595.305		1.216.295	9.811.600
27	Kab. Dairi	10.220.731	2.496.833		1.535.257	24.872.844
28	Kab. Deli Serdang	6.165.000	6.793.266	1.580.611	898.342	18.614.912

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
22	Kab. Bener Meriah	19.120.098	4.600.000		56.672.887
23	Kab. Pidie Jaya	9.666.880			58.091.146
24	Kota Subulussalam	7.541.350			33.463.302
25	Provinsi Sumatera Utara	13.133.236			254.771.409
26	Kab. Asahan	17.937.510			57.198.653
27	Kab. Dairi	37.906.952			93.912.216
28	Kab. Deli Serdang	15.987.854			66.194.801

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
22	Kab. Bener Meriah	1.514.500		280.000	1.794.500	5.431.830
23	Kab. Pidie Jaya					
24	Kota Subulussalam	600.000		244.000	844.000	
25	Provinsi Sumatera Utara	19.256.700			19.256.700	
26	Kab. Asahan	2.849.900	2.135.112		4.985.012	
27	Kab. Dairi	650.000		280.000	930.000	
28	Kab. Deli Serdang		2.971.953	280.000	3.251.953	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
22	Kab. Bener Meriah		5.431.830	9.192.287		9.192.287
23	Kab. Pidie Jaya				4.563.396	4.563.396
24	Kota Subulussalam			6.691.684		6.691.684
25	Provinsi Sumatera Utara	70.294.554	70.294.554			
26	Kab. Asahan				1.309.040	1.309.040
27	Kab. Dairi	10.972.878	10.972.878		4.210.429	4.210.429
28	Kab. Deli Serdang				3.703.099	3.703.099

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
22	Kab. Bener Meriah	3.545.741	550.000	4.095.741		3.261.742
23	Kab. Pidie Jaya		2.170.445	2.170.445		5.500.000
24	Kota Subulussalam	9.091.642		9.091.642	1.017.016	
25	Provinsi Sumatera Utara					11.999.999
26	Kab. Asahan		487.955	487.955	1.350.061	3.867.000
27	Kab. Dairi		1.360.148	1.360.148	1.078.274	3.400.400
28	Kab. Deli Serdang	3.022.971		3.022.971	1.377.908	7.717.322

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
22	Kab. Bener Meriah	7.185.000	684.000			
23	Kab. Pidie Jaya	2.399.250	1.304.000			
24	Kota Subulussalam	1.903.935				
25	Provinsi Sumatera Utara	4.735.000	350.000			
26	Kab. Asahan	1.831.080	1.078.433			1.997.500
27	Kab. Dairi	2.762.560	605.000		4.462.323	
28	Kab. Deli Serdang	1.228.000	805.000	4.780.627		2.128.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
22	Kab. Bener Meriah				31.645.100	88.317.987
23	Kab. Pidie Jaya				15.937.091	74.028.237
24	Kota Subulussalam				19.548.277	53.011.579
25	Provinsi Sumatera Utara		26.497.738	26.497.738	133.133.991	387.905.400
26	Kab. Asahan			1.997.500	16.906.081	74.104.734
27	Kab. Dairi	6.820.000		6.820.000	36.602.012	130.514.228
28	Kab. Deli Serdang			2.128.000	28.014.880	94.209.681

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
29	Kab. Karo	1.226.270	20.939.811	23.776.952		
30	Kab. Labuhanbatu	320.150	16.586.039	2.513.336		
31	Kab. Langkat	447.397	23.492.544	12.254.413		
32	Kab. Mandailing Natal	331.977	14.510.996	1.096.447		
33	Kab. Nias		4.222.610	3.224.754		
34	Kab. Simalungun	349.046	13.360.614	8.388.416		
35	Kab. Tapanuli Selatan	262.000	16.112.845	6.754.234		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
29	Kab. Karo				45.943.033	9.717.900
30	Kab. Labuhanbatu			300.000	19.719.525	9.536.665
31	Kab. Langkat	1.319.700			37.514.054	3.636.000
32	Kab. Mandailing Natal			200.000	16.139.420	2.970.105
33	Kab. Nias			200.000	7.647.364	2.000.000
34	Kab. Simalungun				22.098.076	14.743.000
35	Kab. Tapanuli Selatan				23.129.079	7.584.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
29	Kab. Karo	5.160.099	3.843.335		1.407.067	20.128.401
30	Kab. Labuhanbatu	5.700.000	2.782.535		844.210	18.863.410
31	Kab. Langkat	7.661.445	4.337.458		1.498.011	17.132.914
32	Kab. Mandailing Natal	5.067.371	4.605.258	351.280	1.257.175	14.251.189
33	Kab. Nias	16.576.619	2.677.016		1.249.691	22.503.326
34	Kab. Simalungun	22.497.679	2.968.171		1.044.702	41.253.552
35	Kab. Tapanuli Selatan	8.812.352	2.757.487		1.213.368	20.367.207

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
29	Kab. Karo	12.459.097			78.530.531
30	Kab. Labuhanbatu	11.229.931			49.812.866
31	Kab. Langkat	7.954.088			62.601.056
32	Kab. Mandailing Natal	26.632.839			57.023.448
33	Kab. Nias	13.501.568	5.700.000		49.352.258
34	Kab. Simalungun	21.543.809			84.895.437
35	Kab. Tapanuli Selatan	11.533.311			55.029.597

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
29	Kab. Karo	1.834.716		290.000	2.124.716	
30	Kab. Labuhanbatu	1.532.000	6.432.459	280.000	8.244.459	
31	Kab. Langkat			280.000	280.000	
32	Kab. Mandailing Natal	649.440	70.777.188	250.000	71.676.628	
33	Kab. Nias	650.000		40.375	690.375	
34	Kab. Simalungun	1.765.400		39.999	1.805.399	15.364.122
35	Kab. Tapanuli Selatan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
29	Kab. Karo	4.121.974	4.121.974		1.726.893	1.726.893
30	Kab. Labuhanbatu				3.501.011	3.501.011
31	Kab. Langkat			1.513.139	842.029	2.355.168
32	Kab. Mandailing Natal			3.941.541	5.053.678	8.995.219
33	Kab. Nias	4.442.064	4.442.064	900.000	4.659.127	5.559.127
34	Kab. Simalungun		15.364.122		4.998.244	4.998.244
35	Kab. Tapanuli Selatan				3.600.535	3.600.535

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
29	Kab. Karo		2.226.397	2.226.397	983.401	12.800.000
30	Kab. Labuhanbatu		2.885.682	2.885.682	2.424.649	3.348.499
31	Kab. Langkat				1.837.500	3.350.000
32	Kab. Mandailing Natal	3.954.864		3.954.864		5.255.000
33	Kab. Nias				1.022.410	7.434.000
34	Kab. Simalungun		2.768.449	2.768.449	1.176.000	6.788.848
35	Kab. Tapanuli Selatan		3.323.248	3.323.248		4.100.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
29	Kab. Karo			6.914.148	6.163.334	
30	Kab. Labuhanbatu	1.359.953	732.000			
31	Kab. Langkat	3.911.250	947.450	1.783.773		
32	Kab. Mandailing Natal	3.743.250	564.650			
33	Kab. Nias	3.080.000	523.400			
34	Kab. Simalungun	2.037.725	523.800	3.000.292	1.030.000	
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.325.875	920.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
29	Kab. Karo	4.540.000		4.540.000	41.600.863	120.131.394
30	Kab. Labuhanbatu				22.496.253	72.309.119
31	Kab. Langkat				14.465.141	77.066.197
32	Kab. Mandailing Natal				94.189.611	151.213.059
33	Kab. Nias				22.751.376	72.103.634
34	Kab. Simalungun	3.590.000		3.590.000	43.082.879	127.978.316
35	Kab. Tapanuli Selatan				15.269.658	70.299.255

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
36	Kab. Tapanuli Tengah	574.686	15.151.459	24.615.950		
37	Kab. Tapanuli Utara	2.060.588	17.047.040	15.037.617		
38	Kab. Toba		2.195.335	7.240.224		
39	Kota Binjai	222.020	25.685.229	13.864.315		
40	Kota Medan					
41	Kota Pematang Siantar	797.046	7.968.843	13.364.066		
42	Kota Sibolga		5.351.341	2.964.001		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
36	Kab. Tapanuli Tengah			183.500	40.525.595	2.845.003
37	Kab. Tapanuli Utara			218.981	34.364.226	2.877.000
38	Kab. Toba	648.144			10.083.703	7.557.162
39	Kota Binjai	423.800			40.195.364	6.707.215
40	Kota Medan					13.069.500
41	Kota Pematang Siantar			498.840	22.628.795	2.368.682
42	Kota Sibolga			2.605.400	10.920.742	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
36	Kab. Tapanuli Tengah	5.128.276	5.175.283		1.484.789	14.633.351
37	Kab. Tapanuli Utara	6.010.600	2.789.321		1.111.752	12.788.673
38	Kab. Toba	4.531.273	5.043.602	1.076.993		18.209.030
39	Kota Binjai	5.900.000	2.582.673	391.581	822.437	16.403.906
40	Kota Medan	8.080.911	8.084.465	1.987.275	1.260.437	32.482.588
41	Kota Pematang Siantar	5.071.294	2.828.548	528.132	1.398.083	12.194.739
42	Kota Sibolga	5.076.200	2.251.326		605.624	9.933.150

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
36	Kab. Tapanuli Tengah	12.711.321			67.870.267
37	Kab. Tapanuli Utara	13.077.345			60.230.244
38	Kab. Toba	34.019.264			62.311.997
39	Kota Binjai				56.599.270
40	Kota Medan	9.653.848			42.136.436
41	Kota Pematang Siantar				34.823.534
42	Kota Sibolga	5.665.012			26.518.904

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.393.858		290.000	2.683.858	
37	Kab. Tapanuli Utara	2.590.000		280.000	2.870.000	9.838.397
38	Kab. Toba					13.889.458
39	Kota Binjai					
40	Kota Medan	4.100.000		234.000	4.334.000	
41	Kota Pematang Siantar					
42	Kota Sibolga					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
36	Kab. Tapanuli Tengah			999.884	6.191.824	7.191.708
37	Kab. Tapanuli Utara		9.838.397		650.000	650.000
38	Kab. Toba		13.889.458		2.728.041	2.728.041
39	Kota Binjai					
40	Kota Medan				996.113	996.113
41	Kota Pematang Siantar					
42	Kota Sibolga				360.071	360.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.708.813		2.708.813		6.660.000
37	Kab. Tapanuli Utara		1.049.845	1.049.845		9.544.000
38	Kab. Toba		707.535	707.535		1.497.541
39	Kota Binjai		1.240.568	1.240.568		
40	Kota Medan		3.442.807	3.442.807		
41	Kota Pematang Siantar		1.219.887	1.219.887	2.141.433	
42	Kota Sibolga		1.729.033	1.729.033	1.342.142	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
36	Kab. Tapanuli Tengah		630.500			
37	Kab. Tapanuli Utara	1.700.000	736.000		5.103.337	
38	Kab. Toba	1.806.795	495.000	292.228	10.623.043	
39	Kota Binjai		640.000			
40	Kota Medan		520.000			
41	Kota Pematang Siantar					3.230.000
42	Kota Sibolga		555.000	3.750.365		2.520.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
36	Kab. Tapanuli Tengah				19.874.879	87.745.146
37	Kab. Tapanuli Utara	3.590.000		3.590.000	35.081.579	95.311.823
38	Kab. Toba	2.800.000		2.800.000	34.839.641	97.151.638
39	Kota Binjai				1.880.568	58.479.838
40	Kota Medan				9.292.920	51.429.356
41	Kota Pematang Siantar			3.230.000	6.591.320	41.414.854
42	Kota Sibolga			2.520.000	10.256.611	36.775.515

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
43	Kota Tanjung Balai	727.210	2.418.595	13.806.683		
44	Kota Tebing Tinggi		10.386.458	2.421.377		
45	Kota Padang sidempuan	243.969	20.276.509	7.478.474		
46	Kab. Pakpak Bharat	3.172.432	17.939.823	10.448.818		
47	Kab. Nias Selatan	824.042	23.784.623	26.726.875		
48	Kab. Humbang Hasundutan	221.979	15.809.885	7.705.428		
49	Kab. Serdang Bedagai	222.310	15.941.381	6.056.943		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
43	Kota Tanjung Balai				16.952.488	9.560.711
44	Kota Tebing Tinggi			581.621	13.389.456	8.674.000
45	Kota Padang sidempuan			300.000	28.298.952	3.451.669
46	Kab. Pakpak Bharat				31.561.073	2.000.000
47	Kab. Nias Selatan				51.335.540	30.588.834
48	Kab. Humbang Hasundutan				23.737.292	2.000.000
49	Kab. Serdang Bedagai	200.000			22.420.634	10.131.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
43	Kota Tanjung Balai	7.050.000	1.352.547	200.000	469.863	18.633.121
44	Kota Tebing Tinggi	8.219.286	1.839.030		302.812	19.035.128
45	Kota Padang sidempuan	9.261.264	1.758.695	763.734	544.052	15.779.414
46	Kab. Pakpak Bharat	9.000.000	2.173.849		559.796	13.733.645
47	Kab. Nias Selatan		8.223.120	1.921.919	1.317.154	42.051.027
48	Kab. Humbang Hasundutan	5.146.200	2.070.577	391.427	1.393.693	11.001.897
49	Kab. Serdang Bedagai	8.965.212	5.610.450		662.149	25.369.611

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
43	Kota Tanjung Balai	6.648.195			42.233.804
44	Kota Tebing Tinggi	9.680.370			42.104.954
45	Kota Padang sidempuan	7.496.217			51.574.583
46	Kab. Pakpak Bharat	7.742.493			53.037.211
47	Kab. Nias Selatan	11.225.400	5.300.000		109.911.967
48	Kab. Humbang Hasundutan	8.347.188			43.086.377
49	Kab. Serdang Bedagai	35.023.044	5.544.570		88.357.859

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
43	Kota Tanjung Balai					
44	Kota Tebing Tinggi					
45	Kota Padang sidempuan	200.000		280.000	480.000	
46	Kab. Pakpak Bharat	299.850		170.000	469.850	
47	Kab. Nias Selatan	749.950	6.271.544	266.000	7.287.494	
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.073.976		289.000	1.362.976	
49	Kab. Serdang Bedagai	340.000		250.000	590.000	14.689.571

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
43	Kota Tanjung Balai				1.000.000	1.000.000
44	Kota Tebing Tinggi				4.769.366	4.769.366
45	Kota Padang sidempuan				975.000	975.000
46	Kab. Pakpak Bharat	2.888.492	2.888.492	5.434.699	4.331.493	9.766.192
47	Kab. Nias Selatan	3.939.715	3.939.715		5.861.509	5.861.509
48	Kab. Humbang Hasundutan	3.065.469	3.065.469		2.275.201	2.275.201
49	Kab. Serdang Bedagai		14.689.571		4.507.579	4.507.579

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
43	Kota Tanjung Balai		1.754.999	1.754.999	1.196.106	
44	Kota Tebing Tinggi		1.688.019	1.688.019	1.527.803	
45	Kota Padang sidempuan		2.294.531	2.294.531	974.888	4.352.560
46	Kab. Pakpak Bharat	1.145.547		1.145.547		5.429.999
47	Kab. Nias Selatan	7.273.314	4.581.827	11.855.141	2.613.804	6.580.000
48	Kab. Humbang Hasundutan		1.695.211	1.695.211		4.948.870
49	Kab. Serdang Bedagai		2.332.500	2.332.500	1.426.688	5.087.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
43	Kota Tanjung Balai					
44	Kota Tebing Tinggi					
45	Kota Padang sidempuan					
46	Kab. Pakpak Bharat	2.550.000			928.000	
47	Kab. Nias Selatan	5.300.000	1.419.000		10.012.313	
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.820.000	660.000		4.303.114	
49	Kab. Serdang Bedagai	1.980.000	752.169	3.210.792		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
43	Kota Tanjung Balai				3.951.105	46.184.909
44	Kota Tebing Tinggi				7.985.188	50.090.142
45	Kota Padang sidempuan				9.076.979	60.651.562
46	Kab. Pakpak Bharat				23.178.080	76.215.291
47	Kab. Nias Selatan				54.868.976	164.780.943
48	Kab. Humbang Hasundutan	3.090.000		3.090.000	24.220.841	67.307.218
49	Kab. Serdang Bedagai				34.577.199	122.935.058

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
50	Kab. Samosir		23.261.008	9.851.922		
51	Kab. Batu Bara		5.318.520	2.867.496		
52	Kab. Padang Lawas		9.615.000	1.397.944		
53	Kab. Padang Lawas Utara		13.506.173	3.595.628		
54	Kab. Labuhanbatu Selatan		19.065.045	3.049.562		
55	Kab. Labuhanbatu Utara	569.612	22.202.541	11.603.948		
56	Kab. Nias Utara	561.628	12.919.584	2.662.020		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
50	Kab. Samosir			10.000.000	43.112.930	2.000.000
51	Kab. Batu Bara			338.431	8.524.447	2.000.000
52	Kab. Padang Lawas				11.012.944	6.902.000
53	Kab. Padang Lawas Utara			200.000	17.301.801	11.721.537
54	Kab. Labuhanbatu Selatan				22.114.607	20.594.300
55	Kab. Labuhanbatu Utara			397.904	34.774.005	5.888.441
56	Kab. Nias Utara				16.143.232	18.400.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
50	Kab. Samosir	6.852.856	1.969.454		358.253	11.180.563
51	Kab. Batu Bara	3.000.000	3.284.842	541.385	1.423.217	10.249.444
52	Kab. Padang Lawas	10.247.800	3.483.940		1.432.301	22.066.041
53	Kab. Padang Lawas Utara	5.269.604	1.745.121		1.129.994	19.866.256
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	30.909.407	2.632.739		1.301.083	55.437.529
55	Kab. Labuhanbatu Utara	17.043.000	3.315.766	351.900	598.348	27.197.455
56	Kab. Nias Utara	4.450.000	1.605.611	609.059	966.980	26.031.650

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
50	Kab. Samosir	10.246.358			64.539.851
51	Kab. Batu Bara	8.019.865	4.000.000		30.793.756
52	Kab. Padang Lawas	11.031.870			44.110.855
53	Kab. Padang Lawas Utara	15.604.543			52.772.600
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	10.138.287			87.690.423
55	Kab. Labuhanbatu Utara	16.120.590			78.092.050
56	Kab. Nias Utara	14.614.957	5.155.477		61.945.316

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
50	Kab. Samosir					
51	Kab. Batu Bara	2.569.055		220.000	2.789.055	
52	Kab. Padang Lawas			280.000	280.000	
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.677.900		280.000	1.957.900	
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.204.000			3.204.000	
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1.980.000		280.000	2.260.000	
56	Kab. Nias Utara	600.000		40.375	640.375	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
50	Kab. Samosir	3.517.556	3.517.556		3.893.930	3.893.930
51	Kab. Batu Bara	2.916.047	2.916.047		4.378.904	4.378.904
52	Kab. Padang Lawas			989.885	4.942.768	5.932.653
53	Kab. Padang Lawas Utara			799.907	2.988.950	3.788.857
54	Kab. Labuhanbatu Selatan				2.130.335	2.130.335
55	Kab. Labuhanbatu Utara				4.026.664	4.026.664
56	Kab. Nias Utara	4.805.204	4.805.204			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
50	Kab. Samosir		1.322.323	1.322.323		2.363.000
51	Kab. Batu Bara				2.600.490	3.354.400
52	Kab. Padang Lawas	2.181.994		2.181.994		5.500.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	5.000.403		5.000.403		3.900.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan		2.412.734	2.412.734		
55	Kab. Labuhanbatu Utara					661.914
56	Kab. Nias Utara	2.638.455		2.638.455	992.545	2.831.349

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
50	Kab. Samosir		510.885		4.942.278	
51	Kab. Batu Bara	2.015.645	1.709.000			
52	Kab. Padang Lawas		344.000			
53	Kab. Padang Lawas Utara			5.500.535		
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.797.081				
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1.540.000				
56	Kab. Nias Utara	2.923.900	1.315.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
50	Kab. Samosir	3.614.000		3.614.000	20.163.972	84.703.823
51	Kab. Batu Bara				19.763.541	50.557.297
52	Kab. Padang Lawas				14.238.647	58.349.502
53	Kab. Padang Lawas Utara				20.147.695	72.920.295
54	Kab. Labuhanbatu Selatan				9.544.150	97.234.573
55	Kab. Labuhanbatu Utara				8.488.578	86.580.628
56	Kab. Nias Utara				16.146.828	78.092.144

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
57	Kab. Nias Barat	263.640	7.531.986	1.319.233		
58	Kota Gunungsitoli	301.614	11.683.747	9.670.524		
59	Provinsi Sumatera Barat				35.609.062	85.201.207
60	Kab. Limapuluh Kota		6.893.893	2.071.416		
61	Kab. Agam	487.638	15.005.605	1.583.510		
62	Kab. Kepulauan Mentawai		7.133.772	6.303.091		
63	Kab. Padang Pariaman	1.301.390	15.961.965	13.806.203		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
57	Kab. Nias Barat				9.114.859	2.792.458
58	Kota Gunungsitoli				21.655.885	11.282.920
59	Provinsi Sumatera Barat		7.407.020	700.000	128.917.289	
60	Kab. Limapuluh Kota	198.984		10.000.000	19.164.293	8.423.283
61	Kab. Agam			9.500.000	26.576.753	4.330.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai				13.436.863	2.000.000
63	Kab. Padang Pariaman	518.913			31.588.471	6.720.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
57	Kab. Nias Barat		4.653.745	200.000	1.427.868	9.074.071
58	Kota Gunungsitoli		4.244.607		1.106.172	16.633.699
59	Provinsi Sumatera Barat	29.531.809		13.382.300		42.914.109
60	Kab. Limapuluh Kota	6.346.601	3.960.310		996.554	19.726.748
61	Kab. Agam		7.566.905		1.514.061	13.410.966
62	Kab. Kepulauan Mentawai	3.000.000	4.804.863	200.000	304.174	10.309.037
63	Kab. Padang Pariaman	19.867.576	5.599.560	4.567.874	1.068.202	37.823.212

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
57	Kab. Nias Barat	11.227.005	5.641.843		35.057.778
58	Kota Gunungsitoli	10.077.110			48.366.694
59	Provinsi Sumatera Barat	16.270.818			188.102.216
60	Kab. Limapuluh Kota	8.423.962			47.315.003
61	Kab. Agam	15.712.594			55.700.313
62	Kab. Kepulauan Mentawai	22.969.790	5.300.000		52.015.690
63	Kab. Padang Pariaman	19.349.947			88.761.630

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
57	Kab. Nias Barat		2.385.594	280.000	2.665.594	
58	Kota Gunungsitoli			258.000	258.000	
59	Provinsi Sumatera Barat	6.301.012			6.301.012	39.692.057
60	Kab. Limapuluh Kota			315.000	315.000	7.181.312
61	Kab. Agam	1.752.901	19.674.685	405.999	21.833.585	10.080.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai		9.156.871		9.156.871	
63	Kab. Padang Pariaman	2.425.000		280.000	2.705.000	8.772.769

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
57	Kab. Nias Barat	3.893.873	3.893.873	5.149.655	3.442.421	8.592.076
58	Kota Gunungsitoli				2.988.950	2.988.950
59	Provinsi Sumatera Barat		39.692.057			
60	Kab. Limapuluh Kota		7.181.312	1.671.807		1.671.807
61	Kab. Agam		10.080.000		5.775.514	5.775.514
62	Kab. Kepulauan Mentawai	7.068.068	7.068.068		3.607.834	3.607.834
63	Kab. Padang Pariaman		8.772.769		3.529.577	3.529.577

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
57	Kab. Nias Barat	2.749.313	2.242.206	4.991.519	1.145.803	
58	Kota Gunungsitoli	4.341.146		4.341.146		5.499.222
59	Provinsi Sumatera Barat					28.146.761
60	Kab. Limapuluh Kota	8.681.885		8.681.885		10.123.370
61	Kab. Agam		350.000	350.000	2.877.661	11.897.300
62	Kab. Kepulauan Mentawai		1.666.313	1.666.313	1.668.995	6.389.378
63	Kab. Padang Pariaman		634.000	634.000		9.655.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
57	Kab. Nias Barat	2.688.000	735.000			
58	Kota Gunungsitoli	1.225.000	1.385.000			
59	Provinsi Sumatera Barat	4.413.698	8.725.000			
60	Kab. Limapuluh Kota	2.258.494	1.247.600	600.058		
61	Kab. Agam	4.645.000	1.299.850		10.332.133	
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.855.000	1.060.000	1.170.113		
63	Kab. Padang Pariaman	3.496.500	1.235.300	19.001.851	1.619.147	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
57	Kab. Nias Barat				24.711.865	59.769.643
58	Kota Gunungsitoli				15.697.318	64.064.012
59	Provinsi Sumatera Barat		6.978.830	6.978.830	94.257.358	282.359.574
60	Kab. Limapuluh Kota				32.079.526	79.394.529
61	Kab. Agam				69.091.043	124.791.356
62	Kab. Kepulauan Mentawai				34.642.572	86.658.262
63	Kab. Padang Pariaman				50.649.144	139.410.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
64	Kab. Pasaman	295.948	8.002.497	4.037.760		
65	Kab. Pesisir Selatan	623.092	15.406.472	5.242.604		
66	Kab. Sijunjung	322.670	20.387.617	10.287.705		
67	Kab. Solok		6.387.909	4.786.908		
68	Kab. Tanah Datar	369.689	6.927.774	5.756.426		
69	Kota Bukit Tinggi		2.591.832	2.979.428		
70	Kota Padang Panjang	283.812	7.079.164	1.985.333		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
64	Kab. Pasaman			300.000	12.636.205	6.319.861
65	Kab. Pesisir Selatan	200.000			21.472.168	13.046.277
66	Kab. Sijunjung	201.800		500.000	31.699.792	3.136.175
67	Kab. Solok			300.000	11.474.817	5.397.201
68	Kab. Tanah Datar			500.000	13.553.889	17.078.860
69	Kota Bukit Tinggi				5.571.260	2.000.000
70	Kota Padang Panjang				9.348.309	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
64	Kab. Pasaman	7.533.150	8.026.614	3.010.979	1.383.851	26.274.455
65	Kab. Pesisir Selatan	5.116.517	4.057.975	767.097	1.488.826	24.476.692
66	Kab. Sijunjung	3.000.000	2.463.201	1.001.834	955.425	10.556.635
67	Kab. Solok	3.000.000	3.220.655	2.573.088	1.091.991	15.282.935
68	Kab. Tanah Datar	25.000.000	6.022.937		1.143.620	49.245.417
69	Kota Bukit Tinggi		771.003	2.830.263	288.347	5.889.613
70	Kota Padang Panjang	10.227.641	501.498		207.199	12.936.338

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
64	Kab. Pasaman	14.585.694			53.496.354
65	Kab. Pesisir Selatan	31.892.224	3.404.561		81.245.645
66	Kab. Sijunjung	13.965.424			56.221.851
67	Kab. Solok	12.623.980			39.381.732
68	Kab. Tanah Datar	11.798.633			74.597.939
69	Kota Bukit Tinggi	8.690.293			20.151.166
70	Kota Padang Panjang	7.221.349			29.505.996

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
64	Kab. Pasaman			280.000	280.000	8.751.917
65	Kab. Pesisir Selatan	1.429.325	23.425.261	280.000	25.134.586	13.839.968
66	Kab. Sijunjung	200.000	16.908.799	280.000	17.388.799	
67	Kab. Solok	2.835.000	25.156.534	280.000	28.271.534	7.938.575
68	Kab. Tanah Datar					8.839.176
69	Kota Bukit Tinggi					
70	Kota Padang Panjang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
64	Kab. Pasaman		8.751.917		5.079.981	5.079.981
65	Kab. Pesisir Selatan		13.839.968		6.380.645	6.380.645
66	Kab. Sijunjung				6.020.031	6.020.031
67	Kab. Solok		7.938.575	7.549.122	3.261.854	10.810.976
68	Kab. Tanah Datar		8.839.176		4.462.626	4.462.626
69	Kota Bukit Tinggi					
70	Kota Padang Panjang				2.188.435	2.188.435

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
64	Kab. Pasaman	5.772.559		5.772.559		2.745.490
65	Kab. Pesisir Selatan		3.055.157	3.055.157		5.749.096
66	Kab. Sijunjung		2.342.184	2.342.184	1.120.168	2.202.709
67	Kab. Solok	1.636.496		1.636.496		3.789.840
68	Kab. Tanah Datar		1.366.274	1.366.274		15.382.500
69	Kota Bukit Tinggi		740.865	740.865	477.750	1.960.540
70	Kota Padang Panjang		1.519.681	1.519.681	1.083.955	687.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
64	Kab. Pasaman	1.780.000	1.352.000			
65	Kab. Pesisir Selatan	1.197.000	1.569.035	18.001.753	3.703.468	
66	Kab. Sijunjung	2.127.355		1.270.123	4.493.486	
67	Kab. Solok	2.690.000	692.041		4.568.886	
68	Kab. Tanah Datar	2.720.000	1.537.500	2.480.241	12.192.979	
69	Kota Bukit Tinggi				179.501	
70	Kota Padang Panjang		526.000		1.897.013	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
64	Kab. Pasaman				25.761.947	79.258.301
65	Kab. Pesisir Selatan				78.630.708	159.876.353
66	Kab. Sijunjung				36.964.855	93.186.706
67	Kab. Solok				60.398.348	99.780.080
68	Kab. Tanah Datar				48.981.296	123.579.235
69	Kota Bukit Tinggi				3.358.656	23.509.822
70	Kota Padang Panjang				7.902.584	37.408.580

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
71	Kota Padang	231.875	4.987.906	19.751.367		
72	Kota Payakumbuh		2.431.452	10.211.146		
73	Kota Sawahlunto	205.328	6.833.500	1.109.928		
74	Kota Solok	228.037	2.507.853	5.800.075		
75	Kota Pariaman	346.183	4.284.205	1.432.211		
76	Kab. Pasaman Barat	602.134	6.221.293	1.899.069		
77	Kab. Dharmasraya	1.129.685	28.517.453	10.193.060		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
71	Kota Padang	979.927			25.951.075	6.003.000
72	Kota Payakumbuh	1.189.244			13.831.842	2.000.000
73	Kota Sawahlunto			2.250.000	10.398.756	2.000.000
74	Kota Solok	357.500			8.893.465	3.391.261
75	Kota Pariaman	243.738			6.306.337	3.371.275
76	Kab. Pasaman Barat			460.500	9.182.996	6.511.007
77	Kab. Dharmasraya			500.000	40.340.198	9.635.455

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
71	Kota Padang	7.507.314	3.767.823		1.347.514	18.625.651
72	Kota Payakumbuh	3.000.000	2.302.004	391.427	534.463	8.227.894
73	Kota Sawahlunto	8.148.000	1.974.862		601.788	12.724.650
74	Kota Solok		1.954.432	4.014.639	1.341.306	10.701.638
75	Kota Pariaman	3.000.000	1.671.364		1.282.914	9.325.553
76	Kab. Pasaman Barat	3.000.000	4.412.263		1.322.658	15.245.928
77	Kab. Dharmasraya	37.982.706	2.213.913	4.407.796	1.145.942	55.385.812

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
71	Kota Padang	12.216.056			56.792.782
72	Kota Payakumbuh	8.831.901			30.891.637
73	Kota Sawahlunto	7.565.445			30.688.851
74	Kota Solok	6.619.569			26.214.672
75	Kota Pariaman	7.865.817			23.497.707
76	Kab. Pasaman Barat	16.796.184	5.155.477		46.380.585
77	Kab. Dharmasraya	16.512.715			112.238.725

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
71	Kota Padang	2.657.400	2.594.767	116.000	5.368.167	
72	Kota Payakumbuh					
73	Kota Sawahlunto					
74	Kota Solok					
75	Kota Pariaman					
76	Kab. Pasaman Barat		29.733.363	280.000	30.013.363	
77	Kab. Dharmasraya					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
71	Kota Padang				4.460.635	4.460.635
72	Kota Payakumbuh				1.300.000	1.300.000
73	Kota Sawahlunto	2.760.374	2.760.374		1.297.567	1.297.567
74	Kota Solok				3.846.859	3.846.859
75	Kota Pariaman				5.011.951	5.011.951
76	Kab. Pasaman Barat			5.579.683	5.810.768	11.390.451
77	Kab. Dharmasraya				5.387.463	5.387.463

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
71	Kota Padang		3.686.374	3.686.374	853.355	7.024.000
72	Kota Payakumbuh		1.270.380	1.270.380	1.251.662	4.441.712
73	Kota Sawahlunto		1.171.092	1.171.092	1.425.027	415.000
74	Kota Solok		1.603.538	1.603.538	2.405.715	2.854.550
75	Kota Pariaman		1.599.853	1.599.853	1.027.395	7.203.856
76	Kab. Pasaman Barat	5.204.965	3.495.929	8.700.894	1.442.743	5.568.780
77	Kab. Dharmasraya		2.105.225	2.105.225		2.631.300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
71	Kota Padang	805.000	840.000	27.605.121	8.483.654	1.380.000
72	Kota Payakumbuh			5.019.949		
73	Kota Sawahlunto				4.695.617	
74	Kota Solok				5.487.287	4.337.000
75	Kota Pariaman		1.185.136			
76	Kab. Pasaman Barat	2.740.000	1.155.000	760.074		
77	Kab. Dharmasraya	3.040.467	1.252.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
71	Kota Padang			1.380.000	60.506.306	117.299.088
72	Kota Payakumbuh				13.283.703	44.175.340
73	Kota Sawahlunto				11.764.677	42.453.528
74	Kota Solok			4.337.000	20.534.949	46.749.621
75	Kota Pariaman				16.028.191	39.525.898
76	Kab. Pasaman Barat				61.771.305	108.151.890
77	Kab. Dharmasraya				14.416.455	126.655.180

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
78	Kab. Solok Selatan	1.965.403	13.149.123	5.991.207		
79	Provinsi Riau				65.046.450	103.967.683
80	Kab. Bengkalis	1.769.821	9.648.862	22.090.577		
81	Kab. Indragiri Hilir	2.403.303	9.534.802	14.946.262		
82	Kab. Indragiri Hulu	483.441	14.365.479	12.496.339		
83	Kab. Kampar	342.521	25.238.194	22.018.665		
84	Kab. Kuantan Singingi	263.239	7.178.319	13.519.007		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
78	Kab. Solok Selatan	2.183.000		200.000	23.488.733	2.000.000
79	Provinsi Riau		2.054.470	1.000.000	172.068.603	
80	Kab. Bengkalis				33.509.260	2.000.000
81	Kab. Indragiri Hilir			10.000.000	36.884.367	16.924.000
82	Kab. Indragiri Hulu	436.000			27.781.259	14.853.700
83	Kab. Kampar			396.563	47.995.943	20.999.325
84	Kab. Kuantan Singingi			118.250	21.078.815	20.350.852

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
78	Kab. Solok Selatan	3.000.000	2.128.000		1.166.836	8.294.836
79	Provinsi Riau	24.594.479		1.756.404		26.350.883
80	Kab. Bengkalis	19.594.209	3.999.781	304.401	1.096.482	26.994.873
81	Kab. Indragiri Hilir	29.808.758	4.310.455	1.320.413	418.587	52.782.213
82	Kab. Indragiri Hulu	9.008.168	4.073.508	268.298	1.405.048	29.608.722
83	Kab. Kampar	13.295.713	5.860.514	2.007.319	1.154.698	43.317.569
84	Kab. Kuantan Singingi		2.302.680	409.493	1.488.826	24.551.851

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
78	Kab. Solok Selatan	11.343.941	6.000.000		49.127.510
79	Provinsi Riau	21.783.305			220.202.791
80	Kab. Bengkalis	15.097.442	2.452.504	3.368.212	81.422.291
81	Kab. Indragiri Hilir	11.303.605			100.970.185
82	Kab. Indragiri Hulu	13.889.288			71.279.269
83	Kab. Kampar	17.246.424			108.559.936
84	Kab. Kuantan Singingi	12.044.945			57.675.611

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
78	Kab. Solok Selatan					
79	Provinsi Riau	5.027.774			5.027.774	
80	Kab. Bengkalis	3.444.848		407.000	3.851.848	
81	Kab. Indragiri Hilir			343.999	343.999	
82	Kab. Indragiri Hulu			413.000	413.000	
83	Kab. Kampar	1.484.625		344.000	1.828.625	
84	Kab. Kuantan Singingi		1.000.000		1.000.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
78	Kab. Solok Selatan				4.685.820	4.685.820
79	Provinsi Riau	69.729.850	69.729.850			
80	Kab. Bengkalis	4.813.923	4.813.923		5.467.631	5.467.631
81	Kab. Indragiri Hilir				2.324.001	2.324.001
82	Kab. Indragiri Hulu					
83	Kab. Kampar				5.511.580	5.511.580
84	Kab. Kuantan Singingi				4.219.905	4.219.905

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
78	Kab. Solok Selatan		2.195.674	2.195.674	1.126.779	6.099.293
79	Provinsi Riau					
80	Kab. Bengkalis		2.642.346	2.642.346	1.167.357	
81	Kab. Indragiri Hilir				2.367.808	3.124.307
82	Kab. Indragiri Hulu		2.287.405	2.287.405		1.460.757
83	Kab. Kampar	4.295.801	2.848.610	7.144.411		4.853.852
84	Kab. Kuantan Singingi		1.399.794	1.399.794	1.124.726	3.043.388

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
78	Kab. Solok Selatan	2.180.782	1.018.000	8.750.852		
79	Provinsi Riau	6.299.789	4.784.360			
80	Kab. Bengkalis	2.220.000	1.102.500			
81	Kab. Indragiri Hilir	2.719.907	2.014.200			
82	Kab. Indragiri Hulu	5.730.000		1.700.165		
83	Kab. Kampar	8.179.147	1.425.000			1.300.000
84	Kab. Kuantan Singingi		1.177.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
78	Kab. Solok Selatan				26.057.200	75.184.710
79	Provinsi Riau		2.734.658	2.734.658	88.576.431	308.779.222
80	Kab. Bengkalis				21.265.605	102.687.896
81	Kab. Indragiri Hilir				12.894.222	113.864.407
82	Kab. Indragiri Hulu				11.591.327	82.870.596
83	Kab. Kampar			1.300.000	30.242.615	138.802.551
84	Kab. Kuantan Singingi				11.964.813	69.640.424

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
85	Kab. Pelalawan	1.386.442	26.021.490	8.503.636		
86	Kab. Rokan Hilir	852.276	23.247.106	27.434.082		
87	Kab. Rokan Hulu	3.922.378	25.608.023	17.477.631		
88	Kab. Siak	1.425.894	14.177.253	17.694.979		
89	Kota Dumai	1.265.568	14.564.789	8.768.815		
90	Kota Pekanbaru	1.613.573	13.418.540	6.559.201		
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.784.027	26.074.617	10.458.136		

SK No 022238 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
85	Kab. Pelalawan				35.911.568	18.917.878
86	Kab. Rokan Hilir				51.533.464	15.969.100
87	Kab. Rokan Hulu				47.008.032	19.503.250
88	Kab. Siak			350.000	33.648.126	8.347.783
89	Kota Dumai			499.950	25.099.122	8.707.157
90	Kota Pekanbaru	445.000		300.000	22.336.314	2.000.000
91	Kab. Kepulauan Meranti			199.000	39.515.780	4.450.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
85	Kab. Pelalawan		2.068.587		1.024.413	22.010.878
86	Kab. Rokan Hilir	5.200.000	5.449.852	702.837	1.140.793	28.462.582
87	Kab. Rokan Hulu	11.067.327	7.784.537	3.769.218	1.136.302	43.260.634
88	Kab. Siak	17.841.477	4.213.241	1.476.152	1.223.361	33.102.014
89	Kota Dumai	3.000.000	3.473.211	4.116.621	1.134.074	20.431.063
90	Kota Pekanbaru	11.669.800	5.555.453	1.323.905	1.298.534	21.847.692
91	Kab. Kepulauan Meranti		2.858.415	336.916	730.080	8.375.411

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
85	Kab. Pelalawan	31.784.001			89.706.447
86	Kab. Rokan Hilir	20.658.938	5.350.024		106.005.008
87	Kab. Rokan Hulu	23.390.324			113.658.990
88	Kab. Siak	50.194.904			116.945.044
89	Kota Dumai	15.036.566	4.300.000		64.866.751
90	Kota Pekanbaru	35.785.346			79.969.352
91	Kab. Kepulauan Meranti	11.124.471	4.669.112		63.684.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
85	Kab. Pelalawan	650.000	12.372.363	140.000	13.162.363	
86	Kab. Rokan Hilir	500.000	12.187.213	290.000	12.977.213	
87	Kab. Rokan Hulu			280.000	280.000	
88	Kab. Siak	1.100.000		416.149	1.516.149	
89	Kota Dumai		35.476.160		35.476.160	
90	Kota Pekanbaru	4.053.590		144.000	4.197.590	
91	Kab. Kepulauan Meranti		8.217.537	433.000	8.650.537	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
85	Kab. Pelalawan				5.283.935	5.283.935
86	Kab. Rokan Hilir	6.317.222	6.317.222	10.498.779	6.333.918	16.832.697
87	Kab. Rokan Hulu			8.069.067	5.719.190	13.788.257
88	Kab. Siak				5.543.633	5.543.633
89	Kota Dumai	4.806.527	4.806.527		5.177.994	5.177.994
90	Kota Pekanbaru				1.637.066	1.637.066
91	Kab. Kepulauan Meranti	3.795.137	3.795.137	1.758.437	5.061.846	6.820.283

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
85	Kab. Pelalawan	5.498.625		5.498.625		
86	Kab. Rokan Hilir	16.228.582	3.523.285	19.751.867	2.739.650	1.305.856
87	Kab. Rokan Hulu	3.034.223	2.642.914	5.677.137		
88	Kab. Siak		1.932.050	1.932.050		15.283.531
89	Kota Dumai		1.660.237	1.660.237	1.571.315	
90	Kota Pekanbaru		1.969.201	1.969.201	1.319.810	
91	Kab. Kepulauan Meranti	5.454.985	2.428.670	7.883.655	1.278.174	3.430.265

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
85	Kab. Pelalawan		1.045.035			
86	Kab. Rokan Hilir	1.500.806	1.167.512			
87	Kab. Rokan Hulu	6.173.216	1.607.500			916.220
88	Kab. Siak		1.423.400			3.625.505
89	Kota Dumai		740.000			
90	Kota Pekanbaru		778.000	2.549.248		
91	Kab. Kepulauan Meranti	2.671.337	1.425.000	3.294.320		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
85	Kab. Pelalawan				24.989.958	114.696.405
86	Kab. Rokan Hilir				62.592.823	168.597.831
87	Kab. Rokan Hulu			916.220	28.442.330	142.101.320
88	Kab. Siak			3.625.505	29.324.268	146.269.312
89	Kota Dumai				49.432.233	114.298.984
90	Kota Pekanbaru				12.450.915	92.420.267
91	Kab. Kepulauan Meranti				39.248.708	102.933.482

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
92	Provinsi Jambi				36.524.871	85.988.530
93	Kab. Batanghari		16.558.634	2.203.971		
94	Kab. Bungo	721.042	6.923.110	2.871.547		
95	Kab. Kerinci	1.124.500	8.225.630	12.040.417		
96	Kab. Merangin	3.022.066	19.580.442	7.054.518		
97	Kab. Muaro Jambi	510.445	8.421.258	17.962.893		
98	Kab. Sarolangun	436.863	22.872.274	5.313.619		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
92	Provinsi Jambi		1.940.890	4.254.002	128.708.293	
93	Kab. Batanghari			10.000.000	28.762.605	31.122.175
94	Kab. Bungo			496.700	11.012.399	5.431.774
95	Kab. Kerinci				21.390.547	3.711.050
96	Kab. Merangin	1.311.212		300.000	31.268.238	14.792.094
97	Kab. Muaro Jambi				26.894.596	5.114.125
98	Kab. Sarolangun			4.500.000	33.122.756	2.100.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
92	Provinsi Jambi	15.666.342	548.542	7.685.772		23.900.656
93	Kab. Batanghari	27.293.759	4.886.748	332.994	1.261.717	64.897.393
94	Kab. Bungo	4.054.428	4.868.482	4.947.957	1.145.639	20.448.280
95	Kab. Kerinci	3.000.000	3.678.357	2.901.715	1.059.842	14.350.964
96	Kab. Merangin	3.000.000	4.435.245	5.429.579	1.261.717	28.918.635
97	Kab. Muaro Jambi	8.246.075	3.084.720	613.030	1.261.717	18.319.667
98	Kab. Sarolangun	7.288.983	3.759.484	200.000	1.245.365	14.593.832

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
92	Provinsi Jambi	10.434.140			163.043.089
93	Kab. Batanghari	16.640.619			110.300.617
94	Kab. Bungo	7.205.616	3.700.000		42.366.295
95	Kab. Kerinci	14.922.656			50.664.167
96	Kab. Merangin	11.956.565			72.143.438
97	Kab. Muaro Jambi	12.965.261			58.179.524
98	Kab. Sarolangun	13.156.259			60.872.847

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
92	Provinsi Jambi	3.296.698			3.296.698	
93	Kab. Batanghari					
94	Kab. Bungo					
95	Kab. Kerinci	790.000		325.500	1.115.500	
96	Kab. Merangin	1.950.000	15.174.155	290.000	17.414.155	
97	Kab. Muaro Jambi					
98	Kab. Sarolangun					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
92	Provinsi Jambi	27.894.888	27.894.888			
93	Kab. Batanghari				2.402.437	2.402.437
94	Kab. Bungo	2.597.826	2.597.826		7.095.264	7.095.264
95	Kab. Kerinci			1.973.061	2.992.152	4.965.213
96	Kab. Merangin				7.870.174	7.870.174
97	Kab. Muaro Jambi				8.701.374	8.701.374
98	Kab. Sarolangun				5.984.468	5.984.468

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
92	Provinsi Jambi					2.000.000
93	Kab. Batanghari		2.170.041	2.170.041		
94	Kab. Bungo		2.588.257	2.588.257		4.603.353
95	Kab. Kerinci		1.546.772	1.546.772		5.730.000
96	Kab. Merangin	1.934.867	2.429.805	4.364.672		2.298.000
97	Kab. Muaro Jambi		1.756.638	1.756.638		9.500.000
98	Kab. Sarolangun		2.017.383	2.017.383		2.947.194

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
92	Provinsi Jambi	6.183.849	5.760.236			
93	Kab. Batanghari	3.738.657	1.400.908			
94	Kab. Bungo		706.000			
95	Kab. Kerinci	6.285.000	1.844.500			1.300.000
96	Kab. Merangin	4.655.000	720.000			1.300.000
97	Kab. Muaro Jambi	3.409.597	1.678.000			
98	Kab. Sarolangun	6.135.000	1.079.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
92	Provinsi Jambi		3.888.641	3.888.641	49.024.312	212.067.401
93	Kab. Batanghari				9.712.043	120.012.660
94	Kab. Bungo				17.590.700	59.956.995
95	Kab. Kerinci			1.300.000	22.786.985	73.451.152
96	Kab. Merangin			1.300.000	38.622.001	110.765.439
97	Kab. Muaro Jambi				25.045.609	83.225.133
98	Kab. Sarolangun				18.163.045	79.035.892

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat		11.877.236	7.705.516		
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.188.966	19.264.352	23.137.258		
101	Kab. Tebo	252.449	13.122.027	13.762.463		
102	Kota Jambi		22.149.067	7.098.186		
103	Kota Sungai Penuh	592.846	8.174.553	2.509.432		
104	Provinsi Sumatera Selatan				32.260.333	80.791.021
105	Kab. Lahat	742.094	27.205.603	12.351.847		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat			4.500.000	24.082.752	4.350.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur			300.000	45.890.576	7.572.048
101	Kab. Tebo				27.136.939	13.098.231
102	Kota Jambi				29.247.253	3.354.000
103	Kota Sungai Penuh				11.276.831	3.003.000
104	Provinsi Sumatera Selatan		1.161.465	2.500.000	116.712.819	
105	Kab. Lahat	618.000			40.917.544	4.517.350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	10.635.309	3.043.747	508.573	1.261.515	19.799.144
100	Kab. Tanjung Jabung Timur		2.083.011		1.059.842	10.714.901
101	Kab. Tebo	44.096.000	3.360.764		1.059.842	61.614.837
102	Kota Jambi	48.075.462	2.759.677	200.000	1.110.311	55.499.450
103	Kota Sungai Penuh		2.075.897	4.407.796	1.059.842	10.546.535
104	Provinsi Sumatera Selatan	23.804.611	1.074.601			24.879.212
105	Kab. Lahat	10.839.603	5.436.050		1.216.800	22.009.803

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	15.943.231			59.825.127
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	11.865.846			68.471.323
101	Kab. Tebo	11.489.599			100.241.375
102	Kota Jambi	9.771.105			94.517.808
103	Kota Sungai Penuh	11.036.459			32.859.825
104	Provinsi Sumatera Selatan	12.488.983			154.081.014
105	Kab. Lahat	13.415.068	2.500.000		78.842.415

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.150.000		425.500	1.575.500	
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	200.000	16.604.739	425.500	17.230.239	
101	Kab. Tebo	1.137.500		20.000	1.157.500	
102	Kota Jambi	200.000		276.500	476.500	
103	Kota Sungai Penuh					
104	Provinsi Sumatera Selatan	6.413.379			6.413.379	36.023.379
105	Kab. Lahat	2.702.586		215.500	2.918.086	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat			3.500.000	4.283.952	7.783.952
100	Kab. Tanjung Jabung Timur				3.936.040	3.936.040
101	Kab. Tebo				5.844.150	5.844.150
102	Kota Jambi				5.669.225	5.669.225
103	Kota Sungai Penuh				1.599.438	1.599.438
104	Provinsi Sumatera Selatan		36.023.379			
105	Kab. Lahat			4.999.418	6.393.140	11.392.558

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	500.000		500.000		
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.578.874		8.578.874		10.650.000
101	Kab. Tebo		2.399.602	2.399.602		800.170
102	Kota Jambi		2.024.822	2.024.822	2.589.458	
103	Kota Sungai Penuh		1.463.865	1.463.865		7.287.603
104	Provinsi Sumatera Selatan					35.645.000
105	Kab. Lahat	3.363.908	2.789.340	6.153.248		

SK No 022262 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.755.000	1.406.000			
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.465.000	1.790.000	1.045.101		
101	Kab. Tebo	2.807.332	721.608			
102	Kota Jambi		1.458.102	225.098		
103	Kota Sungai Penuh		588.900			
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.534.804	9.769.507			
105	Kab. Lahat	2.535.750	816.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
99	Kab. Tanjung Jabung Barat				14.020.452	73.845.579
100	Kab. Tanjung Jabung Timur				45.695.254	114.166.577
101	Kab. Tebo				13.730.362	113.971.737
102	Kota Jambi				12.443.205	106.961.013
103	Kota Sungai Penuh				10.939.806	43.799.631
104	Provinsi Sumatera Selatan				89.386.069	243.467.083
105	Kab. Lahat				23.815.642	102.658.057

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
106	Kab. Musi Banyuasin	3.793.682	25.553.226	22.023.668		
107	Kab. Musi Rawas	595.644	25.978.732	14.824.420		
108	Kab. Muara Enim	1.304.269	20.660.076	7.372.226		
109	Kab. Ogan Komering Ilir	870.032	17.475.014	16.316.202		
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.272.869	28.052.498	11.036.920		
111	Kota Palembang	906.758	27.373.943	33.764.313		
112	Kota Prabumulih	807.947	14.313.010	7.734.551		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
106	Kab. Musi Banyuasin			300.000	51.670.576	4.874.568
107	Kab. Musi Rawas			10.000.000	51.398.796	2.000.000
108	Kab. Muara Enim	730.000			30.066.571	2.000.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir			300.000	34.961.248	3.941.939
110	Kab. Ogan Komering Ulu	998.100			41.360.387	8.996.944
111	Kota Palembang	1.590.200			63.635.214	5.157.066
112	Kota Prabumulih			500.000	23.355.508	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
106	Kab. Musi Banyuasin	12.406.393	3.971.974	793.202	1.110.311	23.156.448
107	Kab. Musi Rawas	16.810.505	3.872.878	46.326.225	1.059.842	70.069.450
108	Kab. Muara Enim	19.549.047	4.820.530	3.614.594	158.976	30.143.147
109	Kab. Ogan Komering Ilir	10.954.069	6.781.040	434.311	1.029.561	23.140.920
110	Kab. Ogan Komering Ulu		2.976.664	1.415.947	963.952	14.353.507
111	Kota Palembang	6.385.838	10.568.869	335.317	1.268.857	23.715.947
112	Kota Prabumulih	3.403.716	2.194.784	1.954.893	1.399.396	10.952.789

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
106	Kab. Musi Banyuasin	12.889.225			87.716.249
107	Kab. Musi Rawas	37.350.072	4.800.000		163.618.318
108	Kab. Muara Enim	10.798.667			71.008.385
109	Kab. Ogan Komering Ilir	13.346.175			71.448.343
110	Kab. Ogan Komering Ulu	10.829.975			66.543.869
111	Kota Palembang	6.146.599			93.497.760
112	Kota Prabumulih	5.417.757			39.726.054

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
106	Kab. Musi Banyuasin	2.976.456	22.059.643	483.999	25.520.098	
107	Kab. Musi Rawas	1.600.000		275.500	1.875.500	
108	Kab. Muara Enim	850.000		234.000	1.084.000	
109	Kab. Ogan Komering Ilir	2.950.000			2.950.000	9.747.627
110	Kab. Ogan Komering Ulu	2.383.700	14.015.874	305.500	16.705.074	
111	Kota Palembang	2.747.220			2.747.220	
112	Kota Prabumulih					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
106	Kab. Musi Banyuasin				6.621.315	6.621.315
107	Kab. Musi Rawas				4.800.601	4.800.601
108	Kab. Muara Enim			3.764.362	1.921.915	5.686.277
109	Kab. Ogan Komering Ilir		9.747.627	2.299.734	5.931.132	8.230.866
110	Kab. Ogan Komering Ulu				5.949.454	5.949.454
111	Kota Palembang			10.607.671		10.607.671
112	Kota Prabumulih				5.746.016	5.746.016

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
106	Kab. Musi Banyuasin		3.453.392	3.453.392		8.160.560
107	Kab. Musi Rawas		2.722.099	2.722.099	3.162.735	5.600.000
108	Kab. Muara Enim	7.818.812		7.818.812	1.690.234	1.008.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	3.030.926	5.013.066	8.043.992	1.763.723	3.707.459
110	Kab. Ogan Komering Ulu		1.093.019	1.093.019	2.296.514	
111	Kota Palembang	6.684.085	3.236.167	9.920.252	987.604	8.795.656
112	Kota Prabumulih		1.669.109	1.669.109	869.967	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
106	Kab. Musi Banyuasin	2.490.000	1.676.000			
107	Kab. Musi Rawas	2.331.348	2.165.000			924.600
108	Kab. Muara Enim	4.455.000	1.294.050			
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.880.000	1.706.200			
110	Kab. Ogan Komering Ulu					
111	Kota Palembang		1.215.400			
112	Kota Prabumulih		632.000	600.058		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
106	Kab. Musi Banyuasin				47.921.365	135.637.614
107	Kab. Musi Rawas			924.600	23.581.883	187.200.201
108	Kab. Muara Enim				23.036.373	94.044.758
109	Kab. Ogan Komering Ilir				38.029.867	109.478.210
110	Kab. Ogan Komering Ulu				26.044.061	92.587.930
111	Kota Palembang				34.273.803	127.771.563
112	Kota Prabumulih				9.517.150	49.243.204

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
113	Kota Pagar Alam		6.420.017	7.725.316		
114	Kota Lubuk Linggau	354.711	17.298.477	7.290.905		
115	Kab. Banyuasin	604.296	26.019.449	25.859.926		
116	Kab. Ogan Ilir		23.804.885	24.955.840		
117	Kab. OKU Timur	3.779.560	23.778.435	13.692.124		
118	Kab. OKU Selatan	1.780.254	20.340.532	6.447.337		
119	Kab. Empat Lawang		23.078.423	14.608.904		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
113	Kota Pagar Alam				14.145.333	3.009.887
114	Kota Lubuk Linggau			690.000	25.634.093	6.266.731
115	Kab. Banyuasin				52.483.671	5.520.000
116	Kab. Ogan Ilir				48.760.725	6.000.000
117	Kab. OKU Timur				41.250.119	2.000.000
118	Kab. OKU Selatan				28.568.123	8.391.869
119	Kab. Empat Lawang			300.000	37.987.327	3.776.925

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
113	Kota Pagar Alam	6.642.753	3.003.220	2.603.931	1.354.373	16.614.164
114	Kota Lubuk Linggau	24.807.989	2.816.012	1.123.152	1.000.491	36.014.375
115	Kab. Banyuasin	5.020.000	2.739.564		1.241.253	14.520.817
116	Kab. Ogan Ilir	12.176.548	4.695.586	528.132	1.261.717	24.661.983
117	Kab. OKU Timur	18.267.000	6.186.187	2.691.175	686.374	29.830.736
118	Kab. OKU Selatan	6.206.463	5.107.475	400.687	1.261.717	21.368.211
119	Kab. Empat Lawang	63.359.000	4.232.083		1.011.443	72.379.451

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
113	Kota Pagar Alam	8.835.747			39.595.244
114	Kota Lubuk Linggau	7.033.624			68.682.092
115	Kab. Banyuasin	11.607.363	5.400.000		84.011.851
116	Kab. Ogan Ilir	13.567.094	4.100.000		91.089.802
117	Kab. OKU Timur	8.840.877			79.921.732
118	Kab. OKU Selatan	9.421.951			59.358.285
119	Kab. Empat Lawang	7.983.872			118.350.650

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
113	Kota Pagar Alam					
114	Kota Lubuk Linggau					
115	Kab. Banyuasin	1.950.000	8.419.864	366.150	10.736.014	10.859.432
116	Kab. Ogan Ilir			99.999	99.999	
117	Kab. OKU Timur	4.042.660		368.000	4.410.660	
118	Kab. OKU Selatan					
119	Kab. Empat Lawang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
113	Kota Pagar Alam				2.799.016	2.799.016
114	Kota Lubuk Linggau				1.243.750	1.243.750
115	Kab. Banyuasin		10.859.432	10.488.590	8.164.220	18.652.810
116	Kab. Ogan Ilir	4.340.310	4.340.310		5.977.899	5.977.899
117	Kab. OKU Timur				5.109.256	5.109.256
118	Kab. OKU Selatan				2.781.055	2.781.055
119	Kab. Empat Lawang				5.490.914	5.490.914

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
113	Kota Pagar Alam		1.958.322	1.958.322	1.530.729	1.300.000
114	Kota Lubuk Linggau		1.828.396	1.828.396	1.506.974	1.400.000
115	Kab. Banyuasin	1.750.000	4.724.207	6.474.207	866.496	10.518.570
116	Kab. Ogan Ilir	909.164	3.202.976	4.112.140		4.551.000
117	Kab. OKU Timur		3.058.759	3.058.759		
118	Kab. OKU Selatan		3.092.103	3.092.103		2.952.000
119	Kab. Empat Lawang		2.632.405	2.632.405		6.489.020

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
113	Kota Pagar Alam	1.470.000	897.000			
114	Kota Lubuk Linggau	1.490.000	351.410			
115	Kab. Banyuasin	3.472.738	1.452.600	3.400.331		1.300.000
116	Kab. Ogan Ilir	3.097.500	894.500			1.300.000
117	Kab. OKU Timur	2.574.197	1.265.000			
118	Kab. OKU Selatan		306.000			
119	Kab. Empat Lawang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
113	Kota Pagar Alam				9.955.067	49.550.311
114	Kota Lubuk Linggau				7.820.530	76.502.622
115	Kab. Banyuasin			1.300.000	67.733.198	151.745.049
116	Kab. Ogan Ilir			1.300.000	24.373.348	115.463.150
117	Kab. OKU Timur				16.417.872	96.339.604
118	Kab. OKU Selatan				9.131.158	68.489.443
119	Kab. Empat Lawang				14.612.339	132.962.989

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	333.325	10.213.220	6.607.469		
121	Kab. Musi Rawas Utara		13.201.721	2.715.787		
122	Provinsi Bengkulu				61.914.932	49.511.419
123	Kab. Bengkulu Selatan	2.649.671	25.097.433	15.128.914		
124	Kab. Bengkulu Utara	332.323	22.076.198	15.902.535		
125	Kab. Rejang Lebong	280.946	9.232.395	2.822.689		
126	Kota Bengkulu	346.984	6.119.240	2.000.700		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir			114.600	17.268.614	5.362.905
121	Kab. Musi Rawas Utara			492.200	16.409.708	2.000.000
122	Provinsi Bengkulu		3.573.780	4.500.000	119.500.131	
123	Kab. Bengkulu Selatan			500.000	43.376.018	8.862.865
124	Kab. Bengkulu Utara			500.000	38.811.056	16.818.489
125	Kab. Rejang Lebong	1.228.640		750.000	14.314.670	9.580.361
126	Kota Bengkulu				8.466.924	14.355.463

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	10.000.000	4.256.680		1.189.143	20.808.728
121	Kab. Musi Rawas Utara	3.000.000	7.478.412		1.017.449	13.495.861
122	Provinsi Bengkulu	6.200.000		17.425.355		23.625.355
123	Kab. Bengkulu Selatan	5.688.528	2.706.296	409.151	1.362.654	19.029.494
124	Kab. Bengkulu Utara	7.098.000	4.752.715	489.978	1.261.717	30.420.899
125	Kab. Rejang Lebong	4.420.921	4.201.275	1.518.222	1.059.842	20.780.621
126	Kota Bengkulu	3.000.000	2.452.656	2.438.413	1.074.983	23.321.515

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	7.941.425			46.018.767
121	Kab. Musi Rawas Utara	11.338.017	6.322.755		47.566.341
122	Provinsi Bengkulu	10.836.075			153.961.561
123	Kab. Bengkulu Selatan	13.523.477			75.928.989
124	Kab. Bengkulu Utara	8.678.827	4.830.000		82.740.782
125	Kab. Rejang Lebong	9.085.535			44.180.826
126	Kota Bengkulu	7.565.037			39.353.476

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.068.528		190.000	1.258.528	
121	Kab. Musi Rawas Utara		2.696.452		2.696.452	
122	Provinsi Bengkulu	2.390.500			2.390.500	
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.324.037		276.500	1.600.537	
124	Kab. Bengkulu Utara		26.974.733	260.000	27.234.733	
125	Kab. Rejang Lebong					
126	Kota Bengkulu					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir				2.649.069	2.649.069
121	Kab. Musi Rawas Utara	3.741.775	3.741.775		4.660.394	4.660.394
122	Provinsi Bengkulu	22.008.081	22.008.081			
123	Kab. Bengkulu Selatan			3.664.574	5.684.893	9.349.467
124	Kab. Bengkulu Utara	3.073.552	3.073.552		5.629.233	5.629.233
125	Kab. Rejang Lebong				6.760.237	6.760.237
126	Kota Bengkulu				3.763.128	3.763.128

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		1.815.574	1.815.574		3.082.419
121	Kab. Musi Rawas Utara				1.152.270	
122	Provinsi Bengkulu					9.171.011
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.202.824	1.929.025	3.131.849	1.511.335	4.835.051
124	Kab. Bengkulu Utara	8.865.261	2.247.330	11.112.591		8.430.000
125	Kab. Rejang Lebong		2.445.985	2.445.985	2.981.737	3.629.774
126	Kota Bengkulu		1.868.846	1.868.846	551.250	3.235.767

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir					
121	Kab. Musi Rawas Utara			3.500.340		
122	Provinsi Bengkulu	7.332.382	6.426.000			
123	Kab. Bengkulu Selatan	2.530.500	1.914.250			
124	Kab. Bengkulu Utara	4.530.750	1.260.000	392.038		
125	Kab. Rejang Lebong		542.000	1.471.863		
126	Kota Bengkulu		1.175.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir				8.805.590	54.824.357
121	Kab. Musi Rawas Utara				15.751.231	63.317.572
122	Provinsi Bengkulu				47.327.974	201.289.535
123	Kab. Bengkulu Selatan				24.872.989	100.801.978
124	Kab. Bengkulu Utara				61.662.897	144.403.679
125	Kab. Rejang Lebong				17.831.596	62.012.422
126	Kota Bengkulu				10.593.991	49.947.467

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
127	Kab. Kaur	1.038.572	24.611.717	15.250.907		
128	Kab. Seluma	703.255	21.318.173	17.476.277		
129	Kab. Mukomuko	609.488	9.949.620	8.451.183		
130	Kab. Lebong	1.583.033	9.997.042	15.843.114		
131	Kab. Kepahiang	402.339	24.410.664	16.679.588		
132	Kab. Bengkulu Tengah		5.163.149	11.680.030		
133	Provinsi Lampung				114.809.573	102.332.138

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
127	Kab. Kaur	1.082.098		4.500.000	46.483.294	15.311.637
128	Kab. Seluma			196.655	39.694.360	12.750.369
129	Kab. Mukomuko			446.290	19.456.581	7.983.650
130	Kab. Lebong				27.423.189	8.287.467
131	Kab. Kepahiang				41.492.591	8.775.073
132	Kab. Bengkulu Tengah				16.843.179	11.795.288
133	Provinsi Lampung		4.085.960	200.000	221.427.671	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
127	Kab. Kaur	5.550.000	1.949.554		1.261.717	24.072.908
128	Kab. Seluma	3.000.000	2.671.369	299.935	566.056	19.287.729
129	Kab. Mukomuko	3.000.000	2.645.556	552.049	1.195.744	15.376.999
130	Kab. Lebong	5.956.376	1.151.746	204.827	1.059.842	16.660.258
131	Kab. Kepahiang	3.000.000	2.316.355	1.053.540	1.059.842	16.204.810
132	Kab. Bengkulu Tengah	3.000.000	2.323.325	391.427	1.261.717	18.771.757
133	Provinsi Lampung	16.051.803		5.842.408		21.894.211

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
127	Kab. Kaur	17.304.234			87.860.436
128	Kab. Seluma	12.913.162	5.880.000		77.775.251
129	Kab. Mukomuko	11.293.703			46.127.283
130	Kab. Lebong	10.863.795			54.947.242
131	Kab. Kepahiang	9.436.940			67.134.341
132	Kab. Bengkulu Tengah	6.982.905			42.597.841
133	Provinsi Lampung	9.476.712			252.798.594

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
127	Kab. Kaur			280.000	280.000	
128	Kab. Seluma	1.630.000	2.702.763		4.332.763	
129	Kab. Mukomuko					
130	Kab. Lebong					
131	Kab. Kepahiang		14.954.230		14.954.230	
132	Kab. Bengkulu Tengah					
133	Provinsi Lampung	3.254.776			3.254.776	38.586.183

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
127	Kab. Kaur	5.363.485	5.363.485	300.000	3.103.909	3.403.909
128	Kab. Seluma			900.796	5.845.592	6.746.388
129	Kab. Mukomuko				4.411.194	4.411.194
130	Kab. Lebong				4.665.212	4.665.212
131	Kab. Kepahiang				4.168.535	4.168.535
132	Kab. Bengkulu Tengah				4.062.042	4.062.042
133	Provinsi Lampung		38.586.183			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
127	Kab. Kaur	1.479.665	500.000	1.979.665		4.480.000
128	Kab. Seluma	5.273.153	2.019.388	7.292.541	2.678.414	5.069.382
129	Kab. Mukomuko					1.694.945
130	Kab. Lebong		1.855.468	1.855.468		6.035.660
131	Kab. Kepahiang		1.967.290	1.967.290		5.182.679
132	Kab. Bengkulu Tengah		999.853	999.853		2.235.000
133	Provinsi Lampung					5.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
127	Kab. Kaur		1.186.000	2.300.224		
128	Kab. Seluma		205.000	2.500.243		
129	Kab. Mukomuko		949.000			
130	Kab. Lebong		1.154.000	5.900.574		
131	Kab. Kepahiang		1.326.700			
132	Kab. Bengkulu Tengah		1.055.000	1.500.146		
133	Provinsi Lampung	7.576.882	7.333.270			2.584.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
127	Kab. Kaur				18.993.283	106.853.719
128	Kab. Seluma				28.824.731	106.599.982
129	Kab. Mukomuko				7.055.139	53.182.422
130	Kab. Lebong				19.610.914	74.558.156
131	Kab. Kepahiang				27.599.434	94.733.775
132	Kab. Bengkulu Tengah				9.852.041	52.449.882
133	Provinsi Lampung		19.177.604	21.761.604	84.012.715	336.811.309

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
134	Kab. Lampung Barat	491.450	23.470.849	6.253.850		
135	Kab. Lampung Selatan	724.229	15.487.965	9.011.749		
136	Kab. Lampung Tengah	407.897	25.549.213	4.783.152		
137	Kab. Lampung Utara	471.708	8.254.265	2.197.101		
138	Kab. Lampung Timur		22.331.499	7.930.068		
139	Kab. Tanggamus	202.594	25.217.044	15.938.927		
140	Kab. Tulang Bawang	438.797	19.547.504	2.492.736		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
134	Kab. Lampung Barat	200.000		500.000	30.916.149	2.000.000
135	Kab. Lampung Selatan	703.570			25.927.513	2.887.374
136	Kab. Lampung Tengah	445.000		211.054	31.396.316	7.425.264
137	Kab. Lampung Utara				10.923.074	7.435.244
138	Kab. Lampung Timur			248.050	30.509.617	7.502.668
139	Kab. Tanggamus			500.000	41.858.565	4.903.714
140	Kab. Tulang Bawang			500.000	22.979.037	8.501.388

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
134	Kab. Lampung Barat	3.000.000	2.443.540		1.261.717	8.705.257
135	Kab. Lampung Selatan	3.000.000	7.816.601	1.205.171	623.377	15.532.523
136	Kab. Lampung Tengah	3.376.042	3.979.696	2.893.390	1.233.455	18.907.847
137	Kab. Lampung Utara	7.670.250	5.350.123	575.280	637.419	21.668.316
138	Kab. Lampung Timur	3.000.000	5.932.877		1.111.421	17.546.966
139	Kab. Tanggamus	3.000.000	4.879.407		359.740	13.142.861
140	Kab. Tulang Bawang	5.729.019	3.186.405		1.291.427	18.708.239

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
134	Kab. Lampung Barat	15.710.841	5.155.477		60.487.724
135	Kab. Lampung Selatan	14.587.920			56.047.956
136	Kab. Lampung Tengah	14.832.782			65.136.945
137	Kab. Lampung Utara				32.591.390
138	Kab. Lampung Timur	22.392.822			70.449.405
139	Kab. Tanggamus	39.183.444			94.184.870
140	Kab. Tulang Bawang	12.965.553	4.280.023		58.932.852

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
134	Kab. Lampung Barat					
135	Kab. Lampung Selatan			254.000	254.000	8.649.579
136	Kab. Lampung Tengah	1.400.000		40.000	1.440.000	9.215.897
137	Kab. Lampung Utara			522.999	522.999	
138	Kab. Lampung Timur			474.000	474.000	10.766.252
139	Kab. Tanggamus	300.000		434.000	734.000	
140	Kab. Tulang Bawang	1.974.096		483.999	2.458.095	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
134	Kab. Lampung Barat				6.067.761	6.067.761
135	Kab. Lampung Selatan		8.649.579	1.692.601	5.227.067	6.919.668
136	Kab. Lampung Tengah		9.215.897	3.599.584	4.948.271	8.547.855
137	Kab. Lampung Utara			8.118.587	5.219.320	13.337.907
138	Kab. Lampung Timur		10.766.252	9.795.444	7.990.009	17.785.453
139	Kab. Tanggamus			7.399.145	5.808.811	13.207.956
140	Kab. Tulang Bawang	4.260.259	4.260.259		4.913.501	4.913.501

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
134	Kab. Lampung Barat		2.784.380	2.784.380	2.995.050	7.774.000
135	Kab. Lampung Selatan	2.181.994	3.310.988	5.492.982		8.722.916
136	Kab. Lampung Tengah	3.488.781		3.488.781		3.201.621
137	Kab. Lampung Utara	9.586.385	1.756.638	11.343.023	2.939.538	1.917.751
138	Kab. Lampung Timur	10.150.819		10.150.819		1.649.192
139	Kab. Tanggamus	8.926.771	3.599.570	12.526.341		3.606.168
140	Kab. Tulang Bawang		2.199.676	2.199.676		3.961.492

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
134	Kab. Lampung Barat	4.557.000	1.642.550	659.470		
135	Kab. Lampung Selatan	5.405.000	1.506.526	1.030.100		
136	Kab. Lampung Tengah	4.340.000	945.000			1.300.000
137	Kab. Lampung Utara		1.129.000			
138	Kab. Lampung Timur	4.160.000	266.000			
139	Kab. Tanggamus	2.117.716	789.500			
140	Kab. Tulang Bawang	3.133.759	1.085.000	500.048		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
134	Kab. Lampung Barat				26.480.211	86.967.935
135	Kab. Lampung Selatan				37.980.771	94.028.727
136	Kab. Lampung Tengah			1.300.000	32.479.154	97.616.099
137	Kab. Lampung Utara				31.190.218	63.781.608
138	Kab. Lampung Timur				45.251.716	115.701.121
139	Kab. Tanggamus				32.981.681	127.166.551
140	Kab. Tulang Bawang				22.511.830	81.444.682

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
141	Kab. Way Kanan	261.902	10.672.000	13.337.338		
142	Kota Bandar Lampung		1.313.248	1.703.493		
143	Kota Metro	384.849	1.298.998	4.072.930		
144	Kab. Pesawaran	311.141	18.502.593	3.932.639		
145	Kab. Pringsewu	723.571	19.441.882	10.937.576		
146	Kab. Mesuji	5.509.190	3.839.586	25.698.030		
147	Kab. Tulang Bawang Barat		19.879.544	1.190.996		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
141	Kab. Way Kanan			10.000.000	34.271.240	6.821.507
142	Kota Bandar Lampung				3.016.741	7.988.431
143	Kota Metro				5.756.777	6.281.250
144	Kab. Pesawaran				22.746.373	2.000.000
145	Kab. Pringsewu	674.200			31.777.229	2.000.000
146	Kab. Mesuji			10.000.000	45.046.806	7.354.389
147	Kab. Tulang Bawang Barat				21.070.540	2.465.168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
141	Kab. Way Kanan	3.324.935	3.657.137		1.261.717	15.065.296
142	Kota Bandar Lampung	3.000.000	6.131.849	521.110	1.278.379	18.919.769
143	Kota Metro	4.722.000	2.282.689	391.581	657.269	14.334.789
144	Kab. Pesawaran	3.000.000	5.262.025		511.752	10.773.777
145	Kab. Pringsewu	3.000.000	2.599.148	351.418	1.562.212	9.512.778
146	Kab. Mesuji		2.062.483	351.418	958.496	10.726.786
147	Kab. Tulang Bawang Barat	3.000.000	4.372.992		1.261.717	11.099.877

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
141	Kab. Way Kanan	41.358.002			90.694.538
142	Kota Bandar Lampung	27.844.876			49.781.386
143	Kota Metro	27.942.738			48.034.304
144	Kab. Pesawaran	31.757.638			65.277.788
145	Kab. Pringsewu	41.918.090			83.208.097
146	Kab. Mesuji	9.762.530	3.800.000		69.336.122
147	Kab. Tulang Bawang Barat	39.474.497			71.644.914

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
141	Kab. Way Kanan	3.414.768		200.000	3.614.768	
142	Kota Bandar Lampung	1.550.352	13.281.991	472.999	15.305.342	
143	Kota Metro					
144	Kab. Pesawaran			200.000	200.000	
145	Kab. Pringsewu	1.649.090	64.559.853	280.000	66.488.943	
146	Kab. Mesuji		19.496.634		19.496.634	
147	Kab. Tulang Bawang Barat					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
141	Kab. Way Kanan				7.504.588	7.504.588
142	Kota Bandar Lampung				871.501	871.501
143	Kota Metro				2.014.292	2.014.292
144	Kab. Pesawaran			5.039.417	5.779.311	10.818.728
145	Kab. Pringsewu			2.499.709	4.816.454	7.316.163
146	Kab. Mesuji	3.355.125	3.355.125		3.993.629	3.993.629
147	Kab. Tulang Bawang Barat				5.831.806	5.831.806

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
141	Kab. Way Kanan		3.058.219	3.058.219		5.258.099
142	Kota Bandar Lampung		2.947.113	2.947.113	2.199.902	
143	Kota Metro		1.563.920	1.563.920	1.233.544	
144	Kab. Pesawaran	7.343.699	2.629.380	9.973.079		7.449.762
145	Kab. Pringsewu	1.718.320	2.249.669	3.967.989	1.365.546	4.465.000
146	Kab. Mesuji		2.261.872	2.261.872	2.781.572	5.112.392
147	Kab. Tulang Bawang Barat		2.444.581	2.444.581		5.845.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
141	Kab. Way Kanan	4.490.000		5.200.506		
142	Kota Bandar Lampung		525.000	5.326.959		2.920.000
143	Kota Metro		940.000	950.670		
144	Kab. Pesawaran	5.355.000	735.000			
145	Kab. Pringsewu	5.540.000	1.252.750	2.250.219		
146	Kab. Mesuji	2.285.000	545.000			
147	Kab. Tulang Bawang Barat	2.380.000				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
141	Kab. Way Kanan				29.126.180	119.820.718
142	Kota Bandar Lampung			2.920.000	30.095.817	79.877.203
143	Kota Metro				6.702.426	54.736.730
144	Kab. Pesawaran				34.531.569	99.809.357
145	Kab. Pringsewu				92.646.610	175.854.707
146	Kab. Mesuji				39.831.224	109.167.346
147	Kab. Tulang Bawang Barat				16.501.387	88.146.301

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
148	Kab. Pesisir Barat	296.929	4.660.629	3.900.227		
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat				265.524.415	219.183.783
151	Kab. Bandung	266.104	19.967.769	11.083.261		
152	Kab. Bekasi					
153	Kab. Bogor		21.140.487	13.537.485		
154	Kab. Ciamis	442.141	24.936.382	20.593.868		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
148	Kab. Pesisir Barat				8.857.785	3.259.517
149	Provinsi DKI Jakarta					2.000.000
150	Provinsi Jawa Barat		7.766.510	200.000	492.674.708	
151	Kab. Bandung	653.900			31.971.034	2.000.000
152	Kab. Bekasi					
153	Kab. Bogor				34.677.972	2.000.000
154	Kab. Ciamis			500.000	46.472.391	2.237.960

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
148	Kab. Pesisir Barat	3.000.000	4.323.392	200.000	1.554.435	12.337.344
149	Provinsi DKI Jakarta		37.375.591	358.306		39.733.897
150	Provinsi Jawa Barat	71.678.700				71.678.700
151	Kab. Bandung	45.596.270	13.882.704		1.258.689	62.737.663
152	Kab. Bekasi				1.362.654	1.362.654
153	Kab. Bogor	16.089.300	20.533.427	998.796	1.117.604	40.739.127
154	Kab. Ciamis		9.222.342	5.392.617	1.450.470	18.303.389

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
148	Kab. Pesisir Barat	35.348.672	5.207.000		61.750.801
149	Provinsi DKI Jakarta				39.733.897
150	Provinsi Jawa Barat	7.842.801			572.196.209
151	Kab. Bandung	11.262.035			105.970.732
152	Kab. Bekasi				1.362.654
153	Kab. Bogor	7.594.201			83.011.300
154	Kab. Ciamis	33.217.575			97.993.355

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
148	Kab. Pesisir Barat					
149	Provinsi DKI Jakarta	20.806.780	14.076.172	1.680.000	36.562.952	
150	Provinsi Jawa Barat		7.213.662		7.213.662	40.594.189
151	Kab. Bandung		1.000.000	448.000	1.448.000	
152	Kab. Bekasi	4.172.622	2.208.884	280.000	6.661.506	
153	Kab. Bogor	650.000	8.095.167	522.999	9.268.166	
154	Kab. Ciamis		4.882.402	516.000	5.398.402	8.739.659

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
148	Kab. Pesisir Barat	10.253.170	10.253.170		4.626.870	4.626.870
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat		40.594.189			
151	Kab. Bandung				7.715.573	7.715.573
152	Kab. Bekasi			2.361.771	8.488.054	10.849.825
153	Kab. Bogor			3.793.591	7.003.959	10.797.550
154	Kab. Ciamis		8.739.659		7.691.403	7.691.403

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
148	Kab. Pesisir Barat		1.802.479	1.802.479	1.259.012	7.850.000
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat					120.122.361
151	Kab. Bandung	6.859.982	9.173.551	16.033.533	2.928.679	
152	Kab. Bekasi	3.754.848	7.634.647	11.389.495		
153	Kab. Bogor	3.891.223	8.998.673	12.889.896		5.391.144
154	Kab. Ciamis	4.925.115	600.000	5.525.115	1.242.572	5.852.570

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
148	Kab. Pesisir Barat		1.156.100	1.500.146		
149	Provinsi DKI Jakarta					
150	Provinsi Jawa Barat	11.174.794	10.525.100			
151	Kab. Bandung	8.935.000	526.100			
152	Kab. Bekasi	2.615.000	735.000			
153	Kab. Bogor	4.010.000	978.000			
154	Kab. Ciamis	4.420.000	301.500			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
148	Kab. Pesisir Barat				28.447.777	90.198.578
149	Provinsi DKI Jakarta				36.562.952	76.296.849
150	Provinsi Jawa Barat		58.960.671	58.960.671	248.590.777	820.786.986
151	Kab. Bandung				37.586.885	143.557.617
152	Kab. Bekasi				32.250.826	33.613.480
153	Kab. Bogor				43.334.756	126.346.056
154	Kab. Ciamis				39.171.221	137.164.576

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
155	Kab. Cianjur	829.516	17.126.313	23.116.298		
156	Kab. Cirebon	3.594.924	23.729.226	17.410.430		
157	Kab. Garut	263.044	15.221.147	3.262.711		
158	Kab. Indramayu	672.763	25.755.928	13.426.280		
159	Kab. Karawang	335.853	14.529.734	11.151.434		
160	Kab. Kuningan	2.447.086	17.747.848	17.705.590		
161	Kab. Majalengka	1.597.826	23.384.350	14.297.336		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
155	Kab. Cianjur	576.600		4.500.000	46.148.727	2.000.000
156	Kab. Cirebon				44.734.580	5.937.026
157	Kab. Garut			300.000	19.046.902	5.094.570
158	Kab. Indramayu			500.000	40.354.971	6.986.135
159	Kab. Karawang	198.970			26.215.991	12.118.001
160	Kab. Kuningan	1.268.400			39.168.924	5.239.000
161	Kab. Majalengka			10.000.000	49.279.512	6.789.619

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
155	Kab. Cianjur	8.686.576	9.417.132		1.488.826	21.592.534
156	Kab. Cirebon	31.500.000	8.977.461	602.195	1.488.826	48.505.508
157	Kab. Garut		9.555.527	692.797	1.358.514	16.701.408
158	Kab. Indramayu	38.998.631	12.517.134	710.857	1.493.873	60.706.630
159	Kab. Karawang	22.820.919	11.012.960		1.110.311	47.062.191
160	Kab. Kuningan	11.247.932	6.741.958	1.245.906	1.488.826	25.963.622
161	Kab. Majalengka	5.400.000	8.380.169		1.233.455	21.803.243

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
155	Kab. Cianjur				67.741.261
156	Kab. Cirebon	30.958.897			124.198.985
157	Kab. Garut	27.686.521			63.434.831
158	Kab. Indramayu				101.061.601
159	Kab. Karawang	11.380.915			84.659.097
160	Kab. Kuningan	29.855.872			94.988.418
161	Kab. Majalengka	35.118.208			106.200.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
155	Kab. Cianjur	1.850.000	15.403.590	523.000	17.776.590	4.249.605
156	Kab. Cirebon	200.000	14.859.765	398.000	15.457.765	
157	Kab. Garut	3.500.000	16.936.502	516.000	20.952.502	13.707.563
158	Kab. Indramayu		14.716.995	515.999	15.232.994	
159	Kab. Karawang	200.000	8.348.576	329.999	8.878.575	
160	Kab. Kuningan		7.970.708	506.000	8.476.708	
161	Kab. Majalengka		9.972.795	478.000	10.450.795	13.990.743

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
155	Kab. Cianjur		4.249.605	1.771.328	8.949.044	10.720.372
156	Kab. Cirebon				6.050.002	6.050.002
157	Kab. Garut		13.707.563	2.034.222	8.989.924	11.024.146
158	Kab. Indramayu			629.927	1.889.336	2.519.263
159	Kab. Karawang			6.099.290	6.982.436	13.081.726
160	Kab. Kuningan			2.399.723	6.679.608	9.079.331
161	Kab. Majalengka		13.990.743	2.927.659		2.927.659

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
155	Kab. Cianjur	3.636.657	8.848.696	12.485.353		10.847.992
156	Kab. Cirebon	12.045.792	4.899.278	16.945.070		6.498.807
157	Kab. Garut	6.090.766	4.534.332	10.625.098	1.292.475	10.650.000
158	Kab. Indramayu	1.111.453		1.111.453	1.306.895	5.439.790
159	Kab. Karawang	4.677.650	8.067.949	12.745.599	880.726	4.454.351
160	Kab. Kuningan	7.713.082	3.544.342	11.257.424	2.738.238	11.537.000
161	Kab. Majalengka				2.997.982	6.100.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
155	Kab. Cianjur	1.940.000	1.068.000		2.489.999	1.300.000
156	Kab. Cirebon	7.535.000				
157	Kab. Garut	4.736.130	1.318.500	1.200.116	2.945.264	1.300.000
158	Kab. Indramayu	6.702.627	2.158.756			
159	Kab. Karawang	3.885.000	1.319.970			3.150.000
160	Kab. Kuningan	3.182.025	1.175.000	5.000.487		1.000.000
161	Kab. Majalengka	4.880.000	875.000	5.000.487		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
155	Kab. Cianjur			1.300.000	62.877.911	130.619.172
156	Kab. Cirebon				52.486.644	176.685.629
157	Kab. Garut			1.300.000	79.751.794	143.186.625
158	Kab. Indramayu				34.471.778	135.533.379
159	Kab. Karawang			3.150.000	48.395.947	133.055.044
160	Kab. Kuningan			1.000.000	53.446.213	148.434.631
161	Kab. Majalengka				47.222.666	153.423.629

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
162	Kab. Purwakarta	673.041	25.928.850	10.750.816		
163	Kab. Subang	253.910	23.123.812	11.471.047		
164	Kab. Sukabumi		23.047.264	7.849.477		
165	Kab. Sumedang	1.709.052	25.995.807	23.079.105		
166	Kab. Tasikmalaya	275.385	22.919.143	17.185.100		
167	Kota Bandung	830.107	21.743.430	17.703.136		
168	Kota Bekasi	2.626.509	4.099.974	4.696.708		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
162	Kab. Purwakarta				37.352.707	5.219.650
163	Kab. Subang	859.800			35.708.569	9.500.000
164	Kab. Sukabumi				30.896.741	33.520.000
165	Kab. Sumedang				50.783.964	3.256.793
166	Kab. Tasikmalaya	198.970			40.578.598	2.628.234
167	Kota Bandung				40.276.673	2.000.000
168	Kota Bekasi				11.423.191	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
162	Kab. Purwakarta	6.300.000	5.434.170	3.992.118	1.483.779	22.429.717
163	Kab. Subang	15.149.730	5.309.180	10.597.789	1.261.717	41.818.416
164	Kab. Sukabumi	3.000.000	10.194.880	6.654.965	1.423.116	54.792.961
165	Kab. Sumedang		5.439.307		1.064.889	9.760.989
166	Kab. Tasikmalaya	3.000.000	10.772.435	4.354.940	1.176.021	21.931.630
167	Kota Bandung	3.000.000	15.078.069	243.925	1.110.291	21.432.285
168	Kota Bekasi	13.819.749	13.916.402	1.321.452	1.110.311	32.167.914

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
162	Kab. Purwakarta	10.124.702			69.907.126
163	Kab. Subang	30.753.841			108.280.826
164	Kab. Sukabumi	11.104.719			96.794.421
165	Kab. Sumedang	4.306.679			64.851.632
166	Kab. Tasikmalaya	10.101.087			72.611.315
167	Kota Bandung	21.047.370			82.756.328
168	Kota Bekasi	2.268.582			45.859.687

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
162	Kab. Purwakarta	650.000	12.543.193	526.150	13.719.343	
163	Kab. Subang		3.816.951	369.999	4.186.950	12.684.375
164	Kab. Sukabumi	2.131.755	32.215.099	280.000	34.626.854	8.822.963
165	Kab. Sumedang	550.000	30.525.525	320.000	31.395.525	
166	Kab. Tasikmalaya	3.016.337	23.020.803	477.999	26.515.139	10.160.633
167	Kota Bandung	2.983.875	10.296.740	403.999	13.684.614	
168	Kota Bekasi	4.082.558	17.203.507	478.000	21.764.065	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
162	Kab. Purwakarta			15.848.168	4.048.577	19.896.745
163	Kab. Subang		12.684.375	2.499.709	5.680.027	8.179.736
164	Kab. Sukabumi		8.822.963	6.120.189	8.267.957	14.388.146
165	Kab. Sumedang			2.730.797	5.701.576	8.432.373
166	Kab. Tasikmalaya		10.160.633		6.497.717	6.497.717
167	Kota Bandung				6.713.443	6.713.443
168	Kota Bekasi			4.924.431	5.783.335	10.707.766

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
162	Kab. Purwakarta	16.819.538	1.349.801	18.169.339	883.691	8.112.650
163	Kab. Subang					4.900.000
164	Kab. Sukabumi	7.773.354	600.000	8.373.354	877.489	7.669.450
165	Kab. Sumedang		3.779.677	3.779.677	1.075.827	3.322.303
166	Kab. Tasikmalaya	4.636.738	4.599.322	9.236.060	1.075.328	2.828.000
167	Kota Bandung	350.000	683.137	1.033.137	2.689.564	
168	Kota Bekasi		3.955.014	3.955.014	1.001.607	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
162	Kab. Purwakarta	4.180.000	913.000			5.876.000
163	Kab. Subang	5.130.000	2.352.000			
164	Kab. Sukabumi	7.478.500	1.578.400	3.100.302		1.300.000
165	Kab. Sumedang	7.245.000	864.000			
166	Kab. Tasikmalaya	4.053.000	2.424.000			
167	Kota Bandung			300.029		3.608.559
168	Kota Bekasi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
162	Kab. Purwakarta			5.876.000	71.750.768	141.657.894
163	Kab. Subang				37.433.061	145.713.887
164	Kab. Sukabumi			1.300.000	88.215.458	185.009.879
165	Kab. Sumedang				56.114.705	120.966.337
166	Kab. Tasikmalaya				62.789.877	135.401.192
167	Kota Bandung			3.608.559	28.029.346	110.785.674
168	Kota Bekasi				37.428.452	83.288.139

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
169	Kota Bogor					
170	Kota Cirebon		22.774.627	22.567.588		
171	Kota Depok		1.928.682	5.911.094		
172	Kota Sukabumi	499.815	20.903.389	5.270.751		
173	Kota Tasikmalaya	332.994	4.975.529	2.762.356		
174	Kota Cimahi	242.162	6.439.711	1.177.919		
175	Kota Banjar					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
169	Kota Bogor					2.000.000
170	Kota Cirebon				45.342.215	2.000.000
171	Kota Depok				7.839.776	2.000.000
172	Kota Sukabumi				26.673.955	2.000.000
173	Kota Tasikmalaya	881.936			8.952.815	7.305.613
174	Kota Cimahi				7.859.792	4.990.096
175	Kota Banjar					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
169	Kota Bogor	17.433.000	4.368.648	647.614	1.110.311	25.559.573
170	Kota Cirebon	8.563.714	3.369.890	630.545	1.085.884	15.650.033
171	Kota Depok		13.581.570	2.930.686	1.110.311	19.622.567
172	Kota Sukabumi	10.082.737	3.042.733	200.000	1.130.498	16.455.968
173	Kota Tasikmalaya	4.961.570	10.262.563	391.581	1.354.579	24.275.906
174	Kota Cimahi		1.441.143			6.431.239
175	Kota Banjar		1.880.422		1.482.265	3.362.687

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
169	Kota Bogor	9.771.460			35.331.033
170	Kota Cirebon				60.992.248
171	Kota Depok				27.462.343
172	Kota Sukabumi	13.451.522			56.581.445
173	Kota Tasikmalaya	28.991.638			62.220.359
174	Kota Cimahi	6.142.613			20.433.644
175	Kota Banjar	26.688.322			30.051.009

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
169	Kota Bogor	464.202		318.000	782.202	
170	Kota Cirebon					
171	Kota Depok	850.000	2.955.004	429.999	4.235.003	
172	Kota Sukabumi		8.536.682		8.536.682	
173	Kota Tasikmalaya	2.218.638	6.329.283	516.000	9.063.921	
174	Kota Cimahi	832.000	9.919.295	182.000	10.933.295	
175	Kota Banjar		8.260.358		8.260.358	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
169	Kota Bogor				1.625.000	1.625.000
170	Kota Cirebon					
171	Kota Depok				5.000.000	5.000.000
172	Kota Sukabumi				4.835.327	4.835.327
173	Kota Tasikmalaya				3.938.414	3.938.414
174	Kota Cimahi				1.000.000	1.000.000
175	Kota Banjar				4.445.525	4.445.525

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
169	Kota Bogor		4.259.846	4.259.846	911.103	
170	Kota Cirebon					
171	Kota Depok	1.454.663		1.454.663		
172	Kota Sukabumi		2.199.676	2.199.676	1.269.751	3.996.481
173	Kota Tasikmalaya		5.010.986	5.010.986	1.463.801	1.848.000
174	Kota Cimahi		3.499.484	3.499.484	1.206.893	
175	Kota Banjar		500.000	500.000		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
169	Kota Bogor					
170	Kota Cirebon		638.400			
171	Kota Depok					
172	Kota Sukabumi	1.233.672	788.610			
173	Kota Tasikmalaya		1.261.800	14.601.422		
174	Kota Cimahi					
175	Kota Banjar					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
169	Kota Bogor				7.578.151	42.909.184
170	Kota Cirebon				638.400	61.630.648
171	Kota Depok				10.689.666	38.152.009
172	Kota Sukabumi				22.860.199	79.441.644
173	Kota Tasikmalaya				37.188.344	99.408.703
174	Kota Cimahi				16.639.672	37.073.316
175	Kota Banjar				13.205.883	43.256.892

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
176	Kab. Bandung Barat		15.132.766	12.975.186		
177	Kab. Pangandaran		22.975.075	16.185.944		
178	Provinsi Jawa Tengah				56.213.112	168.291.945
179	Kab. Banjarnegara	282.161	15.807.122	9.553.460		
180	Kab. Banyumas	214.762	23.343.909	10.405.919		
181	Kab. Batang	1.135.041	14.217.588	14.845.398		
182	Kab. Blora	339.614	23.156.250	9.314.312		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
176	Kab. Bandung Barat				28.107.952	2.000.000
177	Kab. Pangandaran			364.828	39.525.847	4.754.640
178	Provinsi Jawa Tengah		8.395.710	300.000	233.200.767	
179	Kab. Banjarnegara	200.000			25.842.743	9.636.000
180	Kab. Banyumas	570.447			34.535.037	5.786.780
181	Kab. Batang	1.033.460			31.231.487	2.000.000
182	Kab. Blora	1.084.350			33.894.526	13.507.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
176	Kab. Bandung Barat	8.623.678	8.882.046	1.204.391	1.252.734	21.962.849
177	Kab. Pangandaran		6.225.571	1.118.458	1.034.608	13.133.277
178	Provinsi Jawa Tengah	63.069.522		1.556.082		64.625.604
179	Kab. Banjarnegara	7.888.000	6.515.597	2.167.300	1.261.717	27.468.614
180	Kab. Banyumas		9.876.185	3.640.776	635.905	19.939.646
181	Kab. Batang	3.000.000	4.973.084	505.041	1.578.257	12.056.382
182	Kab. Blora		4.642.319	391.581	1.059.842	19.600.942

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
176	Kab. Bandung Barat				50.070.801
177	Kab. Pangandaran	28.350.872			81.009.996
178	Provinsi Jawa Tengah	7.957.843			305.784.214
179	Kab. Banjarnegara	6.940.902			60.252.259
180	Kab. Banyumas	12.186.015			66.660.698
181	Kab. Batang	30.749.324			74.037.193
182	Kab. Blora	12.574.132			66.069.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
176	Kab. Bandung Barat	3.411.525	47.789.729	388.000	51.589.254	
177	Kab. Pangandaran		34.583.485		34.583.485	
178	Provinsi Jawa Tengah	24.844.514	25.276.619		50.121.133	37.483.801
179	Kab. Banjarnegara	3.542.000		280.000	3.822.000	
180	Kab. Banyumas		103.230.622	280.000	103.510.622	
181	Kab. Batang	945.000	18.996.195	280.000	20.221.195	
182	Kab. Blora		42.548.128	229.500	42.777.628	7.956.164

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
176	Kab. Bandung Barat					
177	Kab. Pangandaran				3.755.896	3.755.896
178	Provinsi Jawa Tengah		37.483.801			
179	Kab. Banjarnegara				5.485.509	5.485.509
180	Kab. Banyumas			2.214.158	7.115.774	9.329.932
181	Kab. Batang				6.082.731	6.082.731
182	Kab. Blora		7.956.164	13.898.383	4.798.314	18.696.697

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
176	Kab. Bandung Barat				933.069	
177	Kab. Pangandaran		2.446.810	2.446.810	1.512.521	3.026.605
178	Provinsi Jawa Tengah					14.168.369
179	Kab. Banjarnegara		4.999.263	4.999.263	2.792.077	4.960.000
180	Kab. Banyumas	2.672.943	7.235.300	9.908.243	2.794.613	15.650.964
181	Kab. Batang		4.211.552	4.211.552	2.388.374	2.965.129
182	Kab. Blora	12.000.968	3.149.536	15.150.504	2.983.411	12.273.289

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
176	Kab. Bandung Barat	3.176.462	805.000			
177	Kab. Pangandaran	2.435.000	2.206.450		2.061.663	
178	Provinsi Jawa Tengah	4.658.099	17.231.549		10.997.052	
179	Kab. Banjarnegara	2.160.000	926.750			
180	Kab. Banyumas	5.695.000	784.900			6.406.687
181	Kab. Batang	4.645.000	640.000			
182	Kab. Blora	7.735.361				1.300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
176	Kab. Bandung Barat				56.503.785	106.574.586
177	Kab. Pangandaran				52.028.430	133.038.426
178	Provinsi Jawa Tengah		30.292.260	30.292.260	164.952.263	470.736.477
179	Kab. Banjarnegara				25.145.599	85.397.858
180	Kab. Banyumas			6.406.687	154.080.961	220.741.659
181	Kab. Batang				41.153.981	115.191.174
182	Kab. Blora			1.300.000	108.873.054	174.942.654

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
183	Kab. Boyolali		17.366.105	12.696.869		
184	Kab. Brebes	390.086	26.778.099	16.420.985		
185	Kab. Cilacap		16.618.050	16.123.984		
186	Kab. Demak	1.566.593	15.109.580	12.923.975		
187	Kab. Grobogan	290.640	23.662.168	26.732.041		
188	Kab. Jepara	636.014	11.484.231	10.173.129		
189	Kab. Karanganyar		7.893.350	1.559.104		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
183	Kab. Boyolali			10.000.000	40.062.974	9.825.018
184	Kab. Brebes	724.200		152.600	44.465.970	2.000.000
185	Kab. Cilacap	198.970			32.941.004	2.098.530
186	Kab. Demak			300.000	29.900.148	5.127.700
187	Kab. Grobogan	1.079.800		800.000	52.564.649	6.075.566
188	Kab. Jepara	972.225		182.500	23.448.099	6.516.472
189	Kab. Karanganyar	200.000		1.000.000	10.652.454	11.193.422

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
183	Kab. Boyolali	47.637.421	6.513.135	208.365	1.257.957	65.441.896
184	Kab. Brebes	3.000.000	8.666.724	4.160.170	1.261.717	19.088.611
185	Kab. Cilacap	7.904.225	9.317.872	893.327	1.111.320	21.325.274
186	Kab. Demak		5.005.479	5.441.505	1.059.842	16.634.526
187	Kab. Grobogan	3.000.000	7.636.563	1.372.092	1.059.842	19.144.063
188	Kab. Jepara	6.715.820	9.245.819	409.654	1.278.271	24.166.036
189	Kab. Karanganyar	3.709.000	5.063.591	964.361	1.239.965	22.170.339

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
183	Kab. Boyolali	7.246.058			112.750.928
184	Kab. Brebes	10.198.875			73.753.456
185	Kab. Cilacap	9.110.885			63.377.163
186	Kab. Demak	7.948.333			54.483.007
187	Kab. Grobogan	11.517.272			83.225.984
188	Kab. Jepara	32.622.948		12.393.000	92.630.083
189	Kab. Karanganyar	9.047.239			41.870.032

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
183	Kab. Boyolali	430.372	26.067.066	280.000	26.777.438	
184	Kab. Brebes	200.000	30.123.172	280.000	30.603.172	
185	Kab. Cilacap		9.796.736	280.000	10.076.736	7.182.639
186	Kab. Demak	650.000	25.890.632	280.000	26.820.632	7.184.302
187	Kab. Grobogan		33.609.078	329.999	33.939.077	8.296.733
188	Kab. Jepara			280.000	280.000	
189	Kab. Karanganyar	204.277		280.000	484.277	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
183	Kab. Boyolali	2.672.433	2.672.433		5.040.229	5.040.229
184	Kab. Brebes			10.428.794	6.672.538	17.101.332
185	Kab. Cilacap		7.182.639	3.283.639	6.884.245	10.167.884
186	Kab. Demak		7.184.302	4.799.442	6.404.771	11.204.213
187	Kab. Grobogan		8.296.733		6.003.670	6.003.670
188	Kab. Jepara			3.527.592	7.183.725	10.711.317
189	Kab. Karanganyar				5.594.314	5.594.314

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
183	Kab. Boyolali		2.688.791	2.688.791	2.980.796	4.230.000
184	Kab. Brebes	8.000.645		8.000.645	2.803.980	5.850.000
185	Kab. Cilacap	1.657.225	6.190.950	7.848.175	2.214.591	8.084.613
186	Kab. Demak	615.639	2.944.169	3.559.808	2.842.734	3.500.000
187	Kab. Grobogan		4.614.143	4.614.143	1.306.528	7.550.000
188	Kab. Jepara	5.182.236	6.631.181	11.813.417	3.341.381	28.850.000
189	Kab. Karanganyar		2.087.337	2.087.337	2.068.463	11.423.742

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
183	Kab. Boyolali	5.185.000	1.047.500	2.500.243	6.672.662	
184	Kab. Brebes	3.506.737	1.257.500			
185	Kab. Cilacap	6.106.892	750.000	3.650.355		5.450.000
186	Kab. Demak	5.046.398	1.093.000			
187	Kab. Grobogan	8.945.000		1.260.122		
188	Kab. Jepara	4.364.850	1.102.560		9.232.025	
189	Kab. Karanganyar	4.600.000	615.950		1.399.999	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
183	Kab. Boyolali				59.795.092	172.546.020
184	Kab. Brebes				69.123.366	142.876.822
185	Kab. Cilacap			5.450.000	61.531.885	124.909.048
186	Kab. Demak				61.251.087	115.734.094
187	Kab. Grobogan				71.915.273	155.141.257
188	Kab. Jepara				69.695.550	162.325.633
189	Kab. Karanganyar				28.274.082	70.144.114

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
190	Kab. Kebumen		6.927.787	6.882.088		
191	Kab. Kendal	300.784	12.951.995	1.248.550		
192	Kab. Klaten		11.660.183	1.134.888		
193	Kab. Kudus	252.708	14.768.084	4.281.659		
194	Kab. Magelang	273.472	18.605.806	5.546.178		
195	Kab. Pati	436.512	24.155.907	11.660.597		
196	Kab. Pekalongan	1.140.090	23.043.599	10.756.002		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
190	Kab. Kebumen			300.000	14.109.875	8.996.146
191	Kab. Kendal			10.000.000	24.501.329	7.306.500
192	Kab. Klaten	240.455			13.035.526	4.691.000
193	Kab. Kudus				19.302.451	2.000.000
194	Kab. Magelang	1.256.993		300.000	25.982.449	2.682.107
195	Kab. Pati	1.045.000			37.298.016	6.914.395
196	Kab. Pekalongan				34.939.691	8.914.598

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
190	Kab. Kebumen	14.444.000	7.741.089	2.554.320	1.189.042	34.924.597
191	Kab. Kendal	3.000.000	5.790.498	1.541.122	1.299.266	18.937.386
192	Kab. Klaten		5.084.366	734.559	1.122.313	11.632.238
193	Kab. Kudus		4.542.707	200.000	1.018.206	7.760.913
194	Kab. Magelang	52.527.470	10.811.718	10.001.470		76.022.765
195	Kab. Pati		6.450.978	7.789.262	1.059.842	22.214.477
196	Kab. Pekalongan	10.703.200	6.059.995	1.390.068	975.156	28.043.017

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
190	Kab. Kebumen	9.935.662			58.970.134
191	Kab. Kendal	9.136.573		3.001.450	55.576.738
192	Kab. Klaten	10.894.271			35.562.035
193	Kab. Kudus	6.053.054			33.116.418
194	Kab. Magelang	10.927.132			112.932.346
195	Kab. Pati	8.276.380			67.788.873
196	Kab. Pekalongan	7.555.973			70.538.681

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
190	Kab. Kebumen			280.000	280.000	
191	Kab. Kendal	1.405.234	8.199.791	244.000	9.849.025	
192	Kab. Klaten		6.358.658	230.000	6.588.658	
193	Kab. Kudus	1.140.000	11.410.878	252.000	12.802.878	
194	Kab. Magelang	635.000		244.000	879.000	
195	Kab. Pati	1.700.000	13.676.426	184.000	15.560.426	7.534.423
196	Kab. Pekalongan			244.000	244.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
190	Kab. Kebumen				5.199.754	5.199.754
191	Kab. Kendal				5.130.598	5.130.598
192	Kab. Klaten				2.489.125	2.489.125
193	Kab. Kudus				5.204.962	5.204.962
194	Kab. Magelang				6.414.654	6.414.654
195	Kab. Pati		7.534.423		2.529.111	2.529.111
196	Kab. Pekalongan			999.884	4.457.693	5.457.577

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
190	Kab. Kebumen	2.267.228	1.999.705	4.266.933	2.715.051	2.396.064
191	Kab. Kendal		7.416.152	7.416.152	15.271.599	3.800.000
192	Kab. Klaten	2.727.493	2.399.646	5.127.139	2.809.017	1.865.417
193	Kab. Kudus		1.074.842	1.074.842	1.212.376	4.700.000
194	Kab. Magelang		4.662.819	4.662.819	1.160.142	3.846.091
195	Kab. Pati		2.412.145	2.412.145	2.811.586	3.485.296
196	Kab. Pekalongan	1.136.455	3.458.938	4.595.393	2.827.615	3.250.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
190	Kab. Kebumen	3.875.000	1.391.000	1.360.398		
191	Kab. Kendal	6.070.000	1.063.300			
192	Kab. Klaten	8.170.000	700.400	1.373.333	1.751.716	1.300.000
193	Kab. Kudus	1.300.000				
194	Kab. Magelang	5.595.236	981.000	600.058	9.873.996	
195	Kab. Pati	4.550.000	1.377.267			4.839.000
196	Kab. Pekalongan	975.000	1.277.000	6.000.584		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
190	Kab. Kebumen				21.484.200	80.454.334
191	Kab. Kendal				48.600.674	104.177.412
192	Kab. Klaten			1.300.000	32.174.805	67.736.840
193	Kab. Kudus				26.295.058	59.411.476
194	Kab. Magelang	3.800.000		3.800.000	37.812.996	150.745.342
195	Kab. Pati			4.839.000	45.099.254	112.888.127
196	Kab. Pekalongan				24.627.169	95.165.850

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
197	Kab. Pemalang	660.449	10.518.064	29.131.135		
198	Kab. Purbalingga	360.930	15.957.249	17.082.474		
199	Kab. Purworejo	305.330	5.856.192	9.954.142		
200	Kab. Rembang	747.715	22.877.295	8.427.826		
201	Kab. Semarang	712.703	19.908.114	3.094.393		
202	Kab. Sragen	252.560	8.780.502	8.480.579		
203	Kab. Sukoharjo	637.605	4.863.720	7.880.376		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
197	Kab. Pemalang	1.377.900		500.000	42.187.548	3.751.800
198	Kab. Purbalingga			556.225	33.956.878	5.600.000
199	Kab. Purworejo			9.956.680	26.072.344	8.167.593
200	Kab. Rembang				32.052.836	3.552.927
201	Kab. Semarang	810.704			24.525.914	2.000.000
202	Kab. Sragen			499.966	18.013.607	9.874.721
203	Kab. Sukoharjo				13.381.701	2.470.310

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
197	Kab. Pemalang	3.000.000	7.762.636	1.484.704	1.497.002	17.496.142
198	Kab. Purbalingga		5.268.752	773.121	1.433.311	13.075.184
199	Kab. Purworejo	20.759.200	5.287.825	391.581	1.255.762	35.861.961
200	Kab. Rembang		6.397.039	2.008.107	1.059.842	13.017.915
201	Kab. Semarang	19.301.745	6.315.250	2.235.862	1.195.906	31.048.763
202	Kab. Sragen	3.000.000	5.643.878	1.394.238	1.665.467	21.578.304
203	Kab. Sukoharjo	11.721.000	5.456.523	446.261	1.359.893	21.453.987

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
197	Kab. Pemalang	9.241.601			68.925.291
198	Kab. Purbalingga	10.130.110			57.162.172
199	Kab. Purworejo	30.011.039			91.945.344
200	Kab. Rembang	12.094.309			57.165.060
201	Kab. Semarang	10.679.903			66.254.580
202	Kab. Sragen	8.036.605			47.628.516
203	Kab. Sukoharjo	6.140.771			40.976.459

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
197	Kab. Pemalang	625.000	11.549.552	244.000	12.418.552	
198	Kab. Purbalingga		10.501.424	290.000	10.791.424	
199	Kab. Purworejo	650.000		280.000	930.000	
200	Kab. Rembang	2.030.000	10.895.822	277.525	13.203.347	
201	Kab. Semarang	2.300.000		280.000	2.580.000	
202	Kab. Sragen	1.200.000	10.580.327	190.000	11.970.327	7.822.922
203	Kab. Sukoharjo	947.990		274.000	1.221.990	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
197	Kab. Pemalang			797.907	8.255.074	9.052.981
198	Kab. Purbalingga			3.824.558	6.712.888	10.537.446
199	Kab. Purworejo	8.964.310	8.964.310		5.171.942	5.171.942
200	Kab. Rembang				4.488.971	4.488.971
201	Kab. Semarang				5.319.205	5.319.205
202	Kab. Sragen		7.822.922		5.992.228	5.992.228
203	Kab. Sukoharjo				2.599.087	2.599.087

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
197	Kab. Pemalang	2.227.452	3.799.440	6.026.892	34.152.026	1.792.343
198	Kab. Purbalingga	4.273.072	949.860	5.222.932	551.250	7.817.158
199	Kab. Purworejo		3.574.102	3.574.102	1.033.128	5.741.568
200	Kab. Rembang		500.000	500.000	918.750	10.113.386
201	Kab. Semarang		2.982.838	2.982.838	1.618.618	10.095.620
202	Kab. Sragen		2.934.268	2.934.268	1.124.456	5.000.000
203	Kab. Sukoharjo		2.085.757	2.085.757	2.775.218	930.922

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
197	Kab. Pemalang	6.150.000	1.496.750			2.691.466
198	Kab. Purbalingga	1.715.000	1.063.500	25.002.435		1.300.000
199	Kab. Purworejo	1.990.000	1.113.140		6.870.394	
200	Kab. Rembang	5.995.000	476.000			
201	Kab. Semarang	7.425.000	1.093.000		11.455.505	1.690.500
202	Kab. Sragen	5.689.358	672.959		6.804.997	
203	Kab. Sukoharjo	5.355.000	926.000			4.337.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
197	Kab. Pemalang			2.691.466	73.781.010	142.706.301
198	Kab. Purbalingga			1.300.000	64.001.145	121.163.317
199	Kab. Purworejo				35.388.584	127.333.928
200	Kab. Rembang				35.695.454	92.860.514
201	Kab. Semarang			1.690.500	44.260.286	110.514.866
202	Kab. Sragen				48.011.515	95.640.031
203	Kab. Sukoharjo			4.337.000	20.230.974	61.207.433

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
204	Kab. Tegal	869.338	25.847.069	21.681.980		
205	Kab. Temanggung	728.247	16.953.345	17.475.203		
206	Kab. Wonogiri	1.575.283	20.912.678	16.584.232		
207	Kab. Wonosobo		15.484.321	13.143.393		
208	Kota Magelang			1.042.528		
209	Kota Pekalongan	689.136	13.034.642	17.382.665		
210	Kota Salatiga					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
204	Kab. Tegal	1.775.300			50.173.687	10.261.000
205	Kab. Temanggung				35.156.795	29.088.000
206	Kab. Wonogiri				39.072.193	11.871.039
207	Kab. Wonosobo				28.627.714	8.410.000
208	Kota Magelang				1.042.528	5.500.000
209	Kota Pekalongan				31.106.443	2.000.000
210	Kota Salatiga					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
204	Kab. Tegal		7.823.547	1.606.486	1.355.935	21.046.968
205	Kab. Temanggung	22.612.480	5.578.634	4.533.193	1.261.717	63.074.024
206	Kab. Wonogiri	8.860.000	5.515.709	542.189	1.444.414	28.233.351
207	Kab. Wonosobo	7.266.641	6.104.715	3.359.373	1.144.226	26.284.955
208	Kota Magelang	17.548.525	3.092.477	3.313.377	513.771	29.968.150
209	Kota Pekalongan	9.756.000	2.633.538	2.878.446	459.769	17.727.753
210	Kota Salatiga	5.758.625	2.139.759		1.194.617	9.093.001

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
204	Kab. Tegal	6.760.647			77.981.302
205	Kab. Temanggung	10.192.148			108.422.967
206	Kab. Wonogiri	8.421.296			75.726.840
207	Kab. Wonosobo	9.356.259			64.268.928
208	Kota Magelang	7.400.669			38.411.347
209	Kota Pekalongan	5.742.608			54.576.804
210	Kota Salatiga	22.077.859			31.170.860

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
204	Kab. Tegal	681.365	71.143.711	280.000	72.105.076	
205	Kab. Temanggung	2.189.500		280.000	2.469.500	
206	Kab. Wonogiri	650.000		280.000	930.000	
207	Kab. Wonosobo	1.050.000		280.000	1.330.000	
208	Kota Magelang					
209	Kota Pekalongan					
210	Kota Salatiga					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
204	Kab. Tegal				5.686.202	5.686.202
205	Kab. Temanggung				5.503.605	5.503.605
206	Kab. Wonogiri				5.566.967	5.566.967
207	Kab. Wonosobo			1.007.883	5.759.975	6.767.858
208	Kota Magelang					
209	Kota Pekalongan				1.040.475	1.040.475
210	Kota Salatiga				2.666.792	2.666.792

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
204	Kab. Tegal		4.869.599	4.869.599	2.773.056	1.525.480
205	Kab. Temanggung		2.099.691	2.099.691	1.228.249	10.634.300
206	Kab. Wonogiri		2.229.290	2.229.290	2.716.421	7.136.020
207	Kab. Wonosobo	4.473.088	6.154.805	10.627.893	1.300.464	6.988.519
208	Kota Magelang		1.596.229	1.596.229	1.222.305	
209	Kota Pekalongan				2.666.960	
210	Kota Salatiga		1.609.786	1.609.786	1.432.548	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
204	Kab. Tegal	1.359.953	1.059.550	3.050.297		
205	Kab. Temanggung	5.348.000	1.171.696			
206	Kab. Wonogiri	5.490.000			14.554.594	
207	Kab. Wonosobo	2.394.000	942.000		13.918.194	1.300.000
208	Kota Magelang					
209	Kota Pekalongan	285.000	685.000			
210	Kota Salatiga	1.540.000				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
204	Kab. Tegal				92.429.213	170.410.515
205	Kab. Temanggung				28.455.041	136.878.008
206	Kab. Wonogiri				38.623.292	114.350.132
207	Kab. Wonosobo			1.300.000	45.568.928	109.837.856
208	Kota Magelang	4.890.000		4.890.000	7.708.534	46.119.881
209	Kota Pekalongan				4.677.435	59.254.239
210	Kota Salatiga				7.249.126	38.419.986

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
211	Kota Semarang	475.186	4.889.482	8.366.727		
212	Kota Surakarta	653.282	13.231.093	3.012.120		
213	Kota Tegal	261.030	8.549.533	1.532.677		
214	Provinsi DI Yogyakarta				15.195.182	68.063.624
215	Kab. Bantul	228.524	2.934.734	4.887.537		
216	Kab. Gunung kidul	2.168.084	26.268.295	24.838.201		
217	Kab. Kulon Progo	354.314	9.461.742	15.727.467		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
211	Kota Semarang	897.752		201.656	14.830.803	2.365.000
212	Kota Surakarta	456.636			17.353.131	2.000.000
213	Kota Tegal	1.074.040		492.000	11.909.280	4.550.000
214	Provinsi DI Yogyakarta		2.201.820	300.000	85.760.626	
215	Kab. Bantul	730.800			8.781.595	8.135.232
216	Kab. Gunung kidul	4.478.000		10.000.000	67.752.580	10.940.000
217	Kab. Kulon Progo	890.800			26.434.323	16.104.264

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
211	Kota Semarang		12.933.722	8.805.313	1.345.152	25.449.187
212	Kota Surakarta	9.724.000	5.882.617	251.013	962.291	18.819.921
213	Kota Tegal	7.597.711	3.987.294	572.310	1.591.066	18.298.381
214	Provinsi DI Yogyakarta	7.959.330		3.263.175		11.222.505
215	Kab. Bantul	3.000.000	5.616.334		1.013.567	17.765.133
216	Kab. Gunung kidul		4.806.107	810.422	1.067.815	17.624.344
217	Kab. Kulon Progo	4.700.000	4.140.855	3.312.825		28.257.944

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
211	Kota Semarang	8.228.397			48.508.387
212	Kota Surakarta	6.457.335			42.630.387
213	Kota Tegal	6.226.338			36.433.999
214	Provinsi DI Yogyakarta	10.540.678			107.523.809
215	Kab. Bantul	10.177.939			36.724.667
216	Kab. Gunung kidul	13.089.577			98.466.501
217	Kab. Kulon Progo	31.707.388			86.399.655

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
211	Kota Semarang	952.956	11.007.141	244.000	12.204.097	
212	Kota Surakarta	1.839.060		280.000	2.119.060	
213	Kota Tegal					
214	Provinsi DI Yogyakarta	2.452.634			2.452.634	
215	Kab. Bantul	650.000	14.746.535	280.000	15.676.535	
216	Kab. Gunung kidul		23.630.598	280.000	23.910.598	
217	Kab. Kulon Progo	650.000		280.000	930.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
211	Kota Semarang				250.000	250.000
212	Kota Surakarta				1.265.000	1.265.000
213	Kota Tegal				3.000.000	3.000.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	25.824.672	25.824.672			
215	Kab. Bantul			2.989.652	5.247.987	8.237.639
216	Kab. Gunung kidul			6.076.639	2.387.757	8.464.396
217	Kab. Kulon Progo	15.251.526	15.251.526	2.460.178	5.678.392	8.138.570

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
211	Kota Semarang		1.049.845	1.049.845	2.913.147	1.183.507
212	Kota Surakarta		2.500.000	2.500.000	22.373.432	
213	Kota Tegal		1.715.758	1.715.758	1.234.871	
214	Provinsi DI Yogyakarta					18.163.988
215	Kab. Bantul	1.118.272	2.208.771	3.327.043	2.665.167	7.299.857
216	Kab. Gunung kidul	1.407.176		1.407.176		12.685.589
217	Kab. Kulon Progo	1.145.547	1.249.816	2.395.363	3.149.353	10.295.487

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
211	Kota Semarang	1.635.000	635.000	28.607.062	713.927	4.337.000
212	Kota Surakarta			8.865.163	4.218.958	3.688.000
213	Kota Tegal	1.310.000	790.000	2.168.016		
214	Provinsi DI Yogyakarta		2.472.332			2.413.400
215	Kab. Bantul	2.880.000	495.000			
216	Kab. Gunung kidul	6.290.000	1.312.160		6.560.650	
217	Kab. Kulon Progo	2.870.000	1.265.600	347.533		3.075.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
211	Kota Semarang			4.337.000	53.528.585	102.036.972
212	Kota Surakarta			3.688.000	45.029.613	87.660.000
213	Kota Tegal				10.218.645	46.652.644
214	Provinsi DI Yogyakarta		4.746.520	7.159.920	56.073.546	163.597.355
215	Kab. Bantul				40.581.241	77.305.908
216	Kab. Gunung kidul				60.630.569	159.097.070
217	Kab. Kulon Progo			3.075.000	47.718.432	134.118.087

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
218	Kab. Sleman		7.268.441	3.289.863		
219	Kota Yogyakarta		1.729.033	1.661.145		
220	Provinsi Jawa Timur				278.057.764	200.060.077
221	Kab. Bangkalan	407.929	14.704.684	7.708.001		
222	Kab. Banyuwangi		5.318.408	5.255.053		
223	Kab. Blitar	379.130	5.238.977	1.764.629		
224	Kab. Bojonegoro		4.708.489	8.096.345		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
218	Kab. Sleman	600.000		375.000	11.533.304	7.530.000
219	Kota Yogyakarta	198.970			3.589.148	6.776.800
220	Provinsi Jawa Timur		14.893.665		493.011.506	
221	Kab. Bangkalan				22.820.614	14.913.000
222	Kab. Banyuwangi				10.573.461	5.129.819
223	Kab. Blitar				7.382.736	2.000.000
224	Kab. Bojonegoro				12.804.834	5.901.228

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
218	Kab. Sleman	3.780.000	5.617.279	591.950	1.004.327	18.523.556
219	Kota Yogyakarta	3.259.921	1.763.907	1.663.566	949.215	14.413.409
220	Provinsi Jawa Timur	271.977.985				271.977.985
221	Kab. Bangkalan	9.950.000	6.045.105		1.110.311	32.018.416
222	Kab. Banyuwangi	18.679.994	7.936.716	1.427.070	732.805	33.906.404
223	Kab. Blitar	46.705.119	6.417.891	627.533	1.459.252	57.209.795
224	Kab. Bojonegoro	16.097.400	3.051.439		607.814	25.657.881

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
218	Kab. Sleman	6.989.345			37.046.205
219	Kota Yogyakarta	11.216.082			29.218.639
220	Provinsi Jawa Timur	7.210.871			772.200.362
221	Kab. Bangkalan	8.093.819	6.322.755		69.255.604
222	Kab. Banyuwangi	37.762.433			82.242.298
223	Kab. Blitar	11.247.833			75.840.364
224	Kab. Bojonegoro	6.260.133			44.722.848

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
218	Kab. Sleman	3.059.050		280.000	3.339.050	
219	Kota Yogyakarta	1.864.500		280.000	2.144.500	
220	Provinsi Jawa Timur	24.079.795			24.079.795	44.422.308
221	Kab. Bangkalan		1.731.965	220.000	1.951.965	
222	Kab. Banyuwangi	2.250.000	1.000.000	486.700	3.736.700	16.599.948
223	Kab. Blitar	1.748.272		280.000	2.028.272	
224	Kab. Bojonegoro	2.395.800	8.338.743		10.734.543	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
218	Kab. Sleman				5.643.734	5.643.734
219	Kota Yogyakarta	5.974.955	5.974.955			
220	Provinsi Jawa Timur		44.422.308			
221	Kab. Bangkalan			1.469.830	17.090.644	18.560.474
222	Kab. Banyuwangi		16.599.948		1.500.000	1.500.000
223	Kab. Blitar				6.440.237	6.440.237
224	Kab. Bojonegoro				4.654.905	4.654.905

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
218	Kab. Sleman		2.286.385	2.286.385	3.082.242	9.318.807
219	Kota Yogyakarta		1.503.389	1.503.389	2.755.817	
220	Provinsi Jawa Timur					105.529.463
221	Kab. Bangkalan	700.000	6.427.492	7.127.492	2.239.536	
222	Kab. Banyuwangi				893.277	7.845.433
223	Kab. Blitar		2.099.691	2.099.691	2.798.464	5.291.308
224	Kab. Bojonegoro		3.780.311	3.780.311	983.301	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
218	Kab. Sleman	1.447.379	915.000		1.598.102	
219	Kota Yogyakarta				3.586.597	
220	Provinsi Jawa Timur	7.382.603	16.468.249		3.073.368	1.845.190
221	Kab. Bangkalan	6.300.880	390.000	21.002.045		
222	Kab. Banyuwangi	2.450.000	1.157.211		3.319.979	
223	Kab. Blitar	8.705.000	756.500			
224	Kab. Bojonegoro	2.798.343	684.949			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
218	Kab. Sleman				27.630.699	64.676.904
219	Kota Yogyakarta				15.965.258	45.183.897
220	Provinsi Jawa Timur		40.884.031	42.729.221	243.685.007	1.015.885.369
221	Kab. Bangkalan				57.572.392	126.827.996
222	Kab. Banyuwangi				37.502.548	119.744.846
223	Kab. Blitar				28.119.472	103.959.836
224	Kab. Bojonegoro				23.636.352	68.359.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
225	Kab. Bondowoso	1.603.110	22.490.918	9.419.334		
226	Kab. Gresik	677.354	2.093.500	18.098.876		
227	Kab. Jember	717.399	13.643.031	1.714.252		
228	Kab. Jombang	334.005	16.694.898	20.258.139		
229	Kab. Kediri		22.754.057	11.832.916		
230	Kab. Lamongan	1.000.110	21.847.908	36.024.803		
231	Kab. Lumajang		9.002.887	7.275.833		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
225	Kab. Bondowoso	440.920		681.116	34.635.398	6.706.690
226	Kab. Gresik	1.273.109		2.500.000	24.642.839	2.000.000
227	Kab. Jember				16.074.682	3.848.735
228	Kab. Jombang				37.287.042	13.392.000
229	Kab. Kediri				34.586.973	2.000.000
230	Kab. Lamongan			500.000	59.372.821	2.000.000
231	Kab. Lumajang			2.500.000	18.778.720	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
225	Kab. Bondowoso		2.714.640	1.269.348	1.059.842	11.750.520
226	Kab. Gresik	26.161.702	8.618.781	768.946	1.165.830	38.715.259
227	Kab. Jember	3.000.000	15.010.974	4.378.968	1.059.842	27.298.519
228	Kab. Jombang	8.650.000	7.019.497	742.999	1.059.842	30.864.338
229	Kab. Kediri		4.544.779		184.715	6.729.494
230	Kab. Lamongan	23.530.000	6.482.198	489.978	1.184.500	33.686.676
231	Kab. Lumajang	3.000.000	5.228.606	4.847.260	577.527	15.653.393

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
225	Kab. Bondowoso	12.818.826	6.500.000		65.704.744
226	Kab. Gresik	11.556.272			74.914.370
227	Kab. Jember	9.644.942			53.018.143
228	Kab. Jombang	8.513.801			76.665.181
229	Kab. Kediri	4.063.152			45.379.619
230	Kab. Lamongan	29.913.232			122.972.729
231	Kab. Lumajang	7.989.154			42.421.267

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
225	Kab. Bondowoso		30.076.058	307.525	30.383.583	
226	Kab. Gresik	797.052	7.275.043	200.000	8.272.095	7.839.899
227	Kab. Jember	950.000	38.761.704	240.000	39.951.704	
228	Kab. Jombang	2.645.000	20.091.587	427.524	23.164.111	7.234.619
229	Kab. Kediri	650.000	9.843.563	150.000	10.643.563	
230	Kab. Lamongan	650.000		280.000	930.000	5.579.532
231	Kab. Lumajang	1.934.400	8.853.261	277.525	11.065.186	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
225	Kab. Bondowoso	11.814.440	11.814.440	7.730.101	4.709.181	12.439.282
226	Kab. Gresik		7.839.899		6.326.665	6.326.665
227	Kab. Jember			287.190	1.201.845	1.489.035
228	Kab. Jombang		7.234.619		5.717.094	5.717.094
229	Kab. Kediri				2.377.260	2.377.260
230	Kab. Lamongan		5.579.532	1.199.860	6.438.744	7.638.604
231	Kab. Lumajang	12.717.046	12.717.046		6.224.668	6.224.668

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
225	Kab. Bondowoso	6.955.106	5.099.249	12.054.355	1.443.716	12.800.001
226	Kab. Gresik		595.305	595.305	1.699.842	5.328.187
227	Kab. Jember	350.000	1.399.794	1.749.794	954.731	3.185.951
228	Kab. Jombang		3.412.191	3.412.191	3.002.117	673.894
229	Kab. Kediri	1.909.245	1.799.735	3.708.980	1.039.689	2.990.000
230	Kab. Lamongan	2.181.994	2.267.630	4.449.624	2.551.104	748.771
231	Kab. Lumajang		4.206.022	4.206.022	3.001.484	2.595.736

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
225	Kab. Bondowoso	4.012.500	1.473.000	1.000.097	4.030.662	
226	Kab. Gresik	7.700.000	502.235			
227	Kab. Jember	485.698	1.168.500			
228	Kab. Jombang	3.849.800	800.000	25.238.883		
229	Kab. Kediri	2.377.004	773.926			
230	Kab. Lamongan	6.790.000	1.252.500			1.300.000
231	Kab. Lumajang	6.140.000	666.964		3.977.929	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
225	Kab. Bondowoso				91.451.636	157.156.380
226	Kab. Gresik				38.264.228	113.178.598
227	Kab. Jember				48.985.413	102.003.556
228	Kab. Jombang				73.092.709	149.757.890
229	Kab. Kediri				23.910.422	69.290.041
230	Kab. Lamongan			1.300.000	31.240.135	154.212.864
231	Kab. Lumajang				50.595.035	93.016.302

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
232	Kab. Madiun		15.922.014	17.427.851		
233	Kab. Magetan	560.296	12.815.949	19.402.593		
234	Kab. Malang	958.589	14.804.948	11.268.162		
235	Kab. Mojokerto	2.997.712	26.433.910	10.550.627		
236	Kab. Nganjuk	564.415	25.739.400	17.054.531		
237	Kab. Ngawi		18.102.015	19.700.975		
238	Kab. Pacitan	970.692	26.389.408	23.021.104		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
232	Kab. Madiun			258.988	33.608.853	6.103.678
233	Kab. Magetan			10.000.000	42.778.838	2.000.000
234	Kab. Malang	1.612.014		500.000	29.143.713	7.661.572
235	Kab. Mojokerto	484.500			40.466.749	
236	Kab. Nganjuk	606.600			43.964.946	7.479.353
237	Kab. Ngawi			584.300	38.387.290	9.149.476
238	Kab. Pacitan			3.410.668	53.791.872	11.245.347

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
232	Kab. Madiun	30.532.344	3.797.275		1.231.688	41.664.985
233	Kab. Magetan		3.508.060	2.007.319	815.644	8.331.023
234	Kab. Malang	3.200.000	12.998.864	833.515	1.254.954	25.948.905
235	Kab. Mojokerto	20.335.246	5.280.346	627.533	999.280	27.242.405
236	Kab. Nganjuk	57.378.430	5.101.038	501.186	1.299.698	71.759.705
237	Kab. Ngawi	21.050.000	4.203.801	45.333.034	201.874	79.938.185
238	Kab. Pacitan	20.230.300	2.982.412	648.572	1.188.537	36.295.168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
232	Kab. Madiun	10.356.809			85.630.647
233	Kab. Magetan				51.109.861
234	Kab. Malang	13.041.414			68.134.032
235	Kab. Mojokerto	7.358.017			75.067.171
236	Kab. Nganjuk	11.271.967			126.996.618
237	Kab. Ngawi	7.327.659			125.653.134
238	Kab. Pacitan	11.910.322			101.997.362

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
232	Kab. Madiun	2.030.000		280.000	2.310.000	
233	Kab. Magetan	1.100.000	2.742.944	280.000	4.122.944	
234	Kab. Malang		33.028.770	280.000	33.308.770	
235	Kab. Mojokerto	2.540.000	7.039.962	280.000	9.859.962	
236	Kab. Nganjuk	650.000		280.000	930.000	8.012.221
237	Kab. Ngawi	1.300.000		277.525	1.577.525	
238	Kab. Pacitan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
232	Kab. Madiun				4.811.156	4.811.156
233	Kab. Magetan				2.549.104	2.549.104
234	Kab. Malang	28.565.414	28.565.414		5.569.608	5.569.608
235	Kab. Mojokerto				5.440.155	5.440.155
236	Kab. Nganjuk		8.012.221		3.697.226	3.697.226
237	Kab. Ngawi			9.148.942	5.278.145	14.427.087
238	Kab. Pacitan				3.608.732	3.608.732

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
232	Kab. Madiun		1.498.997	1.498.997	2.248.891	5.685.200
233	Kab. Magetan		2.099.691	2.099.691	2.409.526	
234	Kab. Malang	5.772.559	1.199.823	6.972.382	2.863.059	2.396.065
235	Kab. Mojokerto		3.207.342	3.207.342	1.329.599	4.773.996
236	Kab. Nganjuk		3.479.098	3.479.098	3.043.322	4.895.026
237	Kab. Ngawi	4.397.424	1.707.842	6.105.266		17.638.125
238	Kab. Pacitan		3.488.926	3.488.926	1.177.990	5.559.674

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
232	Kab. Madiun	1.554.232				
233	Kab. Magetan	6.160.000	120.000	3.800.370	4.815.428	
234	Kab. Malang	4.200.000	1.749.992			
235	Kab. Mojokerto	1.068.535	684.332			
236	Kab. Nganjuk	6.063.200	1.039.000			1.300.000
237	Kab. Ngawi	5.334.000	825.000	538.227		
238	Kab. Pacitan	3.248.783	1.473.350			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
232	Kab. Madiun				18.108.476	103.739.123
233	Kab. Magetan				26.077.063	77.186.924
234	Kab. Malang	8.807.000		8.807.000	94.432.290	162.566.322
235	Kab. Mojokerto				26.363.921	101.431.092
236	Kab. Nganjuk			1.300.000	32.459.093	159.455.711
237	Kab. Ngawi				46.445.230	172.098.364
238	Kab. Pacitan				18.557.455	120.554.817

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
239	Kab. Pamekasan	424.347	24.830.745	12.366.972		
240	Kab. Pasuruan		10.306.700	1.333.800		
241	Kab. Ponorogo	392.689	25.912.963	8.212.121		
242	Kab. Probolinggo	330.785	14.753.300	5.394.312		
243	Kab. Sampang	442.659	20.436.622	12.272.469		
244	Kab. Sidoarjo			1.477.665		
245	Kab. Situbondo	328.082	12.240.282	3.615.180		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
239	Kab. Pamekasan	200.000			37.822.064	4.185.913
240	Kab. Pasuruan				11.640.500	2.000.000
241	Kab. Ponorogo			195.000	34.712.773	6.540.006
242	Kab. Probolinggo	532.500		500.000	21.510.897	14.531.829
243	Kab. Sampang				33.151.750	17.542.657
244	Kab. Sidoarjo				1.477.665	
245	Kab. Situbondo			300.000	16.483.544	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
239	Kab. Pamekasan	11.203.713	6.673.631		1.110.311	23.173.568
240	Kab. Pasuruan	3.000.000	6.560.045	2.359.526	1.009.368	14.928.939
241	Kab. Ponorogo	15.727.147	4.053.886	2.134.116	949.316	29.404.471
242	Kab. Probolinggo	9.870.000	6.779.967	1.676.413	1.096.180	33.954.389
243	Kab. Sampang		5.061.978		1.110.311	23.714.946
244	Kab. Sidoarjo		10.118.222		192.184	10.310.406
245	Kab. Situbondo	11.335.451	5.220.741	983.752	1.059.842	20.599.786

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
239	Kab. Pamekasan	11.167.865			72.163.497
240	Kab. Pasuruan	10.119.292			36.688.731
241	Kab. Ponorogo	7.870.344			71.987.588
242	Kab. Probolinggo	9.467.598			64.932.884
243	Kab. Sampang	7.091.870	7.875.000		71.833.566
244	Kab. Sidoarjo	6.668.195			18.456.266
245	Kab. Situbondo	6.800.072	4.800.000		48.683.402

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
239	Kab. Pamekasan			280.000	280.000	
240	Kab. Pasuruan	650.000	14.037.458	280.000	14.967.458	
241	Kab. Ponorogo	4.060.000		198.000	4.258.000	
242	Kab. Probolinggo	650.000	7.683.141	277.525	8.610.666	
243	Kab. Sampang	880.000	7.317.274	486.700	8.683.974	
244	Kab. Sidoarjo	200.000	4.430.705	280.000	4.910.705	
245	Kab. Situbondo	1.856.309	22.122.082	277.525	24.255.916	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
239	Kab. Pamekasan			4.534.476	200.000	4.734.476
240	Kab. Pasuruan	19.153.997	19.153.997		5.211.963	5.211.963
241	Kab. Ponorogo				5.890.305	5.890.305
242	Kab. Probolinggo	13.507.983	13.507.983		3.008.943	3.008.943
243	Kab. Sampang			3.956.540	6.460.044	10.416.584
244	Kab. Sidoarjo				5.205.595	5.205.595
245	Kab. Situbondo	9.756.601	9.756.601		4.563.296	4.563.296

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
239	Kab. Pamekasan	14.001.129	1.659.755	15.660.884	1.275.266	1.026.964
240	Kab. Pasuruan		2.634.957	2.634.957	3.009.683	7.690.754
241	Kab. Ponorogo		2.967.565	2.967.565	1.653.490	4.100.000
242	Kab. Probolinggo	1.909.245	2.329.657	4.238.902	1.078.527	16.535.397
243	Kab. Sampang	2.004.707	4.745.366	6.750.073	2.761.886	900.000
244	Kab. Sidoarjo		2.974.562	2.974.562		2.617.634
245	Kab. Situbondo		1.049.845	1.049.845	1.784.834	2.324.889

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
239	Kab. Pamekasan	2.477.058	1.436.000	1.500.146		
240	Kab. Pasuruan	921.854	851.500			
241	Kab. Ponorogo	5.549.630	210.335			
242	Kab. Probolinggo	6.780.000	1.117.800		11.540.752	
243	Kab. Sampang	2.100.000	927.000	3.088.567		3.420.000
244	Kab. Sidoarjo	550.000	1.281.000	3.370.328		
245	Kab. Situbondo	4.970.000	669.198		2.668.561	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
239	Kab. Pamekasan				28.390.794	100.554.291
240	Kab. Pasuruan				54.442.166	91.130.897
241	Kab. Ponorogo				24.629.325	96.616.913
242	Kab. Probolinggo				66.418.970	131.351.854
243	Kab. Sampang			3.420.000	39.048.084	110.881.650
244	Kab. Sidoarjo				20.909.824	39.366.090
245	Kab. Situbondo				52.043.140	100.726.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
246	Kab. Sumenep	410.173	8.844.610	11.481.654		
247	Kab. Trenggalek	821.662	22.970.739	13.209.793		
248	Kab. Tuban		7.126.822	7.768.460		
249	Kab. Tulungagung	223.681	18.382.588	22.367.647		
250	Kota Blitar		1.054.745			
251	Kota Kediri	290.375	20.473.628	5.791.500		
252	Kota Madiun		2.227.200			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
246	Kab. Sumenep				20.736.437	12.962.914
247	Kab. Trenggalek	198.970			37.201.164	4.540.474
248	Kab. Tuban				14.895.282	
249	Kab. Tulungagung				40.973.916	2.000.000
250	Kota Blitar			176.250	1.230.995	2.000.000
251	Kota Kediri	480.000		200.000	27.235.503	2.173.598
252	Kota Madiun			421.039	2.648.239	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
246	Kab. Sumenep	8.182.000	6.294.389	4.602.445	1.231.940	33.273.688
247	Kab. Trenggalek	19.599.400	3.850.421	200.000	1.503.462	29.693.757
248	Kab. Tuban	5.375.430	5.119.264		374.831	10.869.525
249	Kab. Tulungagung	7.164.000	5.198.111	200.000	468.310	15.030.421
250	Kota Blitar	17.642.895	815.998	513.650	1.078.011	22.050.554
251	Kota Kediri	18.080.000	2.329.058		908.436	23.491.092
252	Kota Madiun	3.000.000	833.889		1.096.180	4.930.069

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
246	Kab. Sumenep	35.132.455	1.640.000		90.782.580
247	Kab. Trenggalek	8.821.796			75.716.717
248	Kab. Tuban				25.764.807
249	Kab. Tulungagung	11.767.180			67.771.517
250	Kota Blitar	3.042.984			26.324.533
251	Kota Kediri				50.726.595
252	Kota Madiun				7.578.308

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
246	Kab. Sumenep	650.000		280.000	930.000	
247	Kab. Trenggalek			212.000	212.000	
248	Kab. Tuban	2.970.000		236.700	3.206.700	
249	Kab. Tulungagung		14.502.227	222.000	14.724.227	
250	Kota Blitar					
251	Kota Kediri					
252	Kota Madiun					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
246	Kab. Sumenep			1.700.062	2.644.071	4.344.133
247	Kab. Trenggalek			180.000	5.482.573	5.662.573
248	Kab. Tuban				4.670.000	4.670.000
249	Kab. Tulungagung				3.132.076	3.132.076
250	Kota Blitar				919.917	919.917
251	Kota Kediri				1.815.626	1.815.626
252	Kota Madiun					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
246	Kab. Sumenep	13.014.686	5.004.263	18.018.949	955.145	4.013.400
247	Kab. Trenggalek	5.091.320	3.514.936	8.606.256	2.802.653	6.256.592
248	Kab. Tuban		3.445.200	3.445.200	2.808.666	1.361.685
249	Kab. Tulungagung		3.659.649	3.659.649	2.423.993	8.575.912
250	Kota Blitar		1.086.820	1.086.820	2.911.287	3.344.730
251	Kota Kediri		2.700.000	2.700.000	8.023.577	2.195.993
252	Kota Madiun					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
246	Kab. Sumenep	13.690.000	1.280.000			
247	Kab. Trenggalek	3.987.112	1.181.000			
248	Kab. Tuban	3.147.320	1.448.005			6.637.000
249	Kab. Tulungagung	3.885.581	1.253.000			4.849.000
250	Kota Blitar	450.000				
251	Kota Kediri	582.837		1.000.097		
252	Kota Madiun			1.400.136		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
246	Kab. Sumenep				43.231.627	134.014.207
247	Kab. Trenggalek				28.708.186	104.424.903
248	Kab. Tuban			6.637.000	26.724.576	52.489.383
249	Kab. Tulungagung			4.849.000	42.503.438	110.274.955
250	Kota Blitar				8.712.754	35.037.287
251	Kota Kediri				16.318.130	67.044.725
252	Kota Madiun				1.400.136	8.978.444

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
253	Kota Malang		13.163.315	1.406.503		
254	Kota Mojokerto	199.268	6.673.099	3.655.276		
255	Kota Pasuruan		1.187.428	1.583.668		
256	Kota Probolinggo		3.237.061	2.844.628		
257	Kota Surabaya		2.387.244	1.333.258		
258	Kota Batu	239.084	1.357.880	1.019.308		
259	Provinsi Kalimantan Barat				113.768.273	99.431.869

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
253	Kota Malang				14.569.818	2.000.000
254	Kota Mojokerto				10.527.643	11.432.770
255	Kota Pasuruan				2.771.096	
256	Kota Probolinggo				6.081.689	2.000.000
257	Kota Surabaya	198.970			3.919.472	2.000.000
258	Kota Batu			2.750.000	5.366.272	
259	Provinsi Kalimantan Barat		3.692.910	796.908	217.689.960	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
253	Kota Malang	3.000.000	2.969.950	391.427	902.380	9.263.757
254	**Kota Mojokerto**	5.268.552	2.874.013	509.903	111.286	20.196.524
255	**Kota Pasuruan**	9.327.000	2.684.955		587.253	12.599.208
256	Kota Probolinggo	31.620.000	3.318.599	353.288	573.937	37.865.824
257	Kota Surabaya		9.409.880		1.550.398	12.960.278
258	Kota Batu		1.709.898		490.522	2.200.420
259	Provinsi Kalimantan Barat	91.646.586		20.081.078		111.727.664

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
253	Kota Malang	26.917.071			50.750.646
254	Kota Mojokerto	2.832.552			33.556.719
255	Kota Pasuruan	8.595.532			23.965.836
256	Kota Probolinggo	7.899.427			51.846.940
257	Kota Surabaya	5.246.578			22.126.328
258	Kota Batu	6.438.790			14.005.482
259	Provinsi Kalimantan Barat	11.665.450			341.083.074

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
253	Kota Malang	407.000		229.500	636.500	
254	Kota Mojokerto					
255	Kota Pasuruan					
256	Kota Probolinggo					
257	Kota Surabaya		1.792.044	483.999	2.276.043	
258	Kota Batu					
259	Provinsi Kalimantan Barat	4.374.938			4.374.938	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
253	Kota Malang				1.250.000	1.250.000
254	Kota Mojokerto				1.198.313	1.198.313
255	Kota Pasuruan				3.045.000	3.045.000
256	Kota Probolinggo				1.371.921	1.371.921
257	Kota Surabaya					
258	Kota Batu				2.190.856	2.190.856
259	Provinsi Kalimantan Barat	50.436.199	50.436.199			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
253	Kota Malang		2.439.775	2.439.775	1.052.107	
254	Kota Mojokerto		1.565.512	1.565.512	1.878.901	
255	Kota Pasuruan		819.764	819.764		
256	Kota Probolinggo		1.869.681	1.869.681	367.500	2.737.050
257	Kota Surabaya		1.070.728	1.070.728		
258	Kota Batu		1.641.582	1.641.582		2.448.833
259	Provinsi Kalimantan Barat					14.985.719

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
253	Kota Malang					
254	Kota Mojokerto	1.340.000				
255	Kota Pasuruan	550.000				
256	Kota Probolinggo					
257	Kota Surabaya					
258	Kota Batu	783.916		3.937.883		
259	Provinsi Kalimantan Barat	11.219.614	7.834.100			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
253	Kota Malang				5.378.382	56.129.028
254	Kota Mojokerto				5.982.726	39.539.445
255	Kota Pasuruan				4.414.764	28.380.600
256	Kota Probolinggo				6.346.152	58.193.092
257	Kota Surabaya				3.346.771	25.473.099
258	Kota Batu				11.003.070	25.008.552
259	Provinsi Kalimantan Barat				88.850.570	429.933.644

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
260	Kab. Bengkayang	409.002	18.710.184	14.816.879		
261	Kab. Landak	647.155	18.439.096	1.287.322		
262	Kab. Kapuas Hulu	908.349	7.568.186	13.336.817		
263	Kab. Ketapang	1.360.318	24.025.886	32.134.752		
264	Kab. Mempawah	572.398	23.099.543	5.216.268		
265	Kab. Sambas	460.000	16.450.351	21.316.653		
266	Kab. Sanggau	810.438	17.140.476	5.008.964		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
260	Kab. Bengkayang			500.000	34.436.065	
261	Kab. Landak				20.373.573	26.623.735
262	Kab. Kapuas Hulu			251.550	22.064.902	19.340.469
263	Kab. Ketapang				57.520.956	24.567.387
264	Kab. Mempawah				28.888.209	2.794.446
265	Kab. Sambas			10.000.000	48.227.004	24.185.120
266	Kab. Sanggau			500.000	23.459.878	12.613.599

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
260	Kab. Bengkayang	11.461.159	3.173.905		1.417.968	16.053.032
261	Kab. Landak	10.769.085	5.248.811		1.429.273	44.070.904
262	Kab. Kapuas Hulu	3.022.457	3.010.700	300.094	1.145.639	26.819.359
263	Kab. Ketapang	3.500.000	3.491.366	52.100.358	1.159.770	84.818.881
264	Kab. Mempawah	10.697.200	4.509.657		529.012	18.530.315
265	Kab. Sambas	13.461.755	4.909.109	3.262.171	1.514.061	47.332.216
266	Kab. Sanggau	3.000.000	3.360.295	424.855	1.234.464	20.633.213

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
260	Kab. Bengkayang	13.631.581	5.641.843		69.762.521
261	Kab. Landak	11.511.956	7.964.358		83.920.791
262	Kab. Kapuas Hulu	18.111.829	6.825.000		73.821.090
263	Kab. Ketapang	35.994.387	4.863.658		183.197.882
264	Kab. Mempawah	10.345.299			57.763.823
265	Kab. Sambas	16.738.746	8.200.000	5.401.270	125.899.236
266	Kab. Sanggau	14.394.125	4.600.000		63.087.216

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
260	Kab. Bengkayang					
261	Kab. Landak	1.979.859		40.000	2.019.859	
262	Kab. Kapuas Hulu	1.650.000	96.010.334	225.000	97.885.334	
263	Kab. Ketapang		74.216.911	461.699	74.678.610	
264	Kab. Mempawah					5.900.145
265	Kab. Sambas		81.331.793	40.500	81.372.293	13.134.080
266	Kab. Sanggau	2.194.000	28.700.887	32.000	30.926.887	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
260	Kab. Bengkayang	9.318.025	9.318.025		6.125.778	6.125.778
261	Kab. Landak				5.725.709	5.725.709
262	Kab. Kapuas Hulu	11.723.811	11.723.811	3.759.563	5.051.202	8.810.765
263	Kab. Ketapang	21.279.456	21.279.456	7.499.133	7.432.434	14.931.567
264	Kab. Mempawah		5.900.145		5.279.063	5.279.063
265	Kab. Sambas		13.134.080	1.149.867	5.291.275	6.441.142
266	Kab. Sanggau	13.641.663	13.641.663		5.796.679	5.796.679

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
260	Kab. Bengkayang		2.446.121	2.446.121	1.655.170	2.393.501
261	Kab. Landak		5.229.193	5.229.193	3.205.038	7.055.981
262	Kab. Kapuas Hulu	3.436.641	2.708.513	6.145.154	1.213.004	2.281.860
263	Kab. Ketapang	12.819.216	2.830.688	15.649.904	1.472.551	7.368.888
264	Kab. Mempawah		600.000	600.000		5.513.140
265	Kab. Sambas	1.569.880	2.546.571	4.116.451	1.096.174	4.270.000
266	Kab. Sanggau		3.201.210	3.201.210	1.842.408	2.551.248

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
260	Kab. Bengkayang		1.920.000	3.100.302		
261	Kab. Landak	5.793.635	980.000		1.239.740	
262	Kab. Kapuas Hulu		1.640.300	1.000.097		1.300.000
263	Kab. Ketapang	4.290.000	1.630.000			1.791.000
264	Kab. Mempawah	2.920.000	525.930			
265	Kab. Sambas	3.230.000	1.837.000	4.600.448		
266	Kab. Sanggau	4.490.000	1.201.250	5.350.521		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
260	Kab. Bengkayang				26.958.897	96.721.418
261	Kab. Landak				31.249.155	115.169.946
262	Kab. Kapuas Hulu			1.300.000	132.000.325	205.821.415
263	Kab. Ketapang			1.791.000	143.091.976	326.289.858
264	Kab. Mempawah				20.738.278	78.502.101
265	Kab. Sambas				120.097.588	245.996.824
266	Kab. Sanggau				69.001.866	132.089.082

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
267	Kab. Sintang	395.718	19.774.869	6.675.490		
268	Kota Pontianak		4.648.212	11.734.830		
269	Kota Singkawang	3.201.118	5.878.377	3.284.810		
270	Kab. Sekadau	304.047	11.255.636	2.634.554		
271	Kab. Melawi	883.255	17.601.069	15.422.067		
272	Kab. Kayong Utara	505.450	25.518.102	17.661.147		
273	Kab. Kubu Raya	1.148.976	24.851.077	16.656.461		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
267	Kab. Sintang	935.000		186.977	27.968.054	33.297.417
268	Kota Pontianak				16.383.042	9.833.487
269	Kota Singkawang				12.364.305	8.150.683
270	Kab. Sekadau				14.194.237	13.433.878
271	Kab. Melawi				33.906.391	13.219.140
272	Kab. Kayong Utara			285.000	43.969.699	22.465.039
273	Kab. Kubu Raya			500.000	43.156.514	12.393.002

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
267	Kab. Sintang	8.174.875	7.910.887	5.411.850	1.261.111	56.056.140
268	Kota Pontianak	25.742.000	4.884.127	587.841	1.115.023	42.162.478
269	Kota Singkawang	14.424.108	3.284.042		1.096.583	26.955.416
270	Kab. Sekadau	3.000.000	2.355.713		1.216.447	20.006.038
271	Kab. Melawi		2.302.638	2.487.118	1.049.748	19.058.644
272	Kab. Kayong Utara	3.300.000	5.725.056	351.418	617.736	32.459.249
273	Kab. Kubu Raya	3.000.000	4.735.418	385.978	972.229	21.486.627

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
267	Kab. Sintang	45.062.110	6.600.000		135.686.304
268	Kota Pontianak	6.890.038			65.435.558
269	Kota Singkawang	8.768.965			48.088.686
270	Kab. Sekadau	9.176.917			43.377.192
271	Kab. Melawi	12.701.695	5.500.100		71.166.830
272	Kab. Kayong Utara	7.707.820	4.474.566		88.611.334
273	Kab. Kubu Raya	8.345.516	3.696.380		76.685.037

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
267	Kab. Sintang	200.000	44.309.845	365.025	44.874.870	
268	Kota Pontianak	246.215		43.500	289.715	
269	Kota Singkawang					
270	Kab. Sekadau					
271	Kab. Melawi	200.000	16.005.193	315.025	16.520.218	
272	Kab. Kayong Utara		41.829.658		41.829.658	
273	Kab. Kubu Raya	1.195.500	10.548.753	33.542	11.777.795	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
267	Kab. Sintang	19.223.732	19.223.732	7.584.118	7.045.524	14.629.642
268	Kota Pontianak				2.529.111	2.529.111
269	Kota Singkawang				5.825.820	5.825.820
270	Kab. Sekadau				5.059.300	5.059.300
271	Kab. Melawi			1.649.809	5.713.060	7.362.869
272	Kab. Kayong Utara				4.293.924	4.293.924
273	Kab. Kubu Raya	11.040.208	11.040.208		2.172.666	2.172.666

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
267	Kab. Sintang	5.727.735	3.077.964	8.805.699	1.230.736	
268	**Kota Pontianak**				1.083.329	
269	**Kota Singkawang**		1.543.460	1.543.460	2.443.823	2.956.680
270	Kab. Sekadau		812.500	812.500		4.811.631
271	Kab. Melawi	2.818.409	2.234.219	5.052.628	1.230.056	2.700.000
272	Kab. Kayong Utara		1.861.552	1.861.552	1.535.039	6.892.567
273	Kab. Kubu Raya		2.399.296	2.399.296	1.654.175	8.017.029

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
267	Kab. Sintang		770.000	4.560.444		1.300.000
268	Kota Pontianak		139.500			
269	Kota Singkawang		1.364.000			
270	Kab. Sekadau	2.945.000	220.000			
271	Kab. Melawi		1.350.000			
272	Kab. Kayong Utara		1.169.000			
273	Kab. Kubu Raya	2.920.000	1.530.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
267	Kab. Sintang			1.300.000	95.395.123	231.081.427
268	Kota Pontianak				4.041.655	69.477.213
269	Kota Singkawang				14.133.783	62.222.469
270	Kab. Sekadau				13.848.431	57.225.623
271	Kab. Melawi				34.215.771	105.382.601
272	Kab. Kayong Utara				57.581.740	146.193.074
273	Kab. Kubu Raya				41.511.169	118.196.206

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah				81.652.589	109.296.844
275	Kab. Barito Selatan	539.712	2.274.425	7.184.649		
276	Kab. Barito Utara	752.432	22.975.565	19.869.945		
277	Kab. Kapuas	1.078.109	21.243.374	10.961.492		
278	Kab. Kotawaringin Barat	688.089	19.888.629	3.458.622		
279	Kab. Kotawaringin Timur	373.399	5.987.201	12.516.017		
280	Kota Palangkaraya	1.026.088	14.277.849	6.985.972		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah		1.142.430	4.800.000	196.891.863	
275	Kab. Barito Selatan	1.300.300		526.300	11.825.386	5.995.627
276	Kab. Barito Utara			3.212.749	46.810.691	6.610.000
277	Kab. Kapuas	200.000		408.710	33.891.685	7.698.802
278	Kab. Kotawaringin Barat			300.000	24.335.340	18.482.000
279	Kab. Kotawaringin Timur				18.876.617	10.587.158
280	Kota Palangkaraya	200.000			22.489.909	10.022.840

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah	12.921.415	1.507.714	3.363.580		17.792.709
275	Kab. Barito Selatan	12.084.045	2.105.061	5.648.516	812.546	26.645.795
276	Kab. Barito Utara	4.701.051	1.642.650	552.229	1.261.717	14.767.647
277	Kab. Kapuas	9.470.000	2.239.143	623.493	1.261.717	21.293.155
278	Kab. Kotawaringin Barat		3.259.005	2.309.324	1.261.717	25.312.046
279	Kab. Kotawaringin Timur	10.711.915	3.034.321	4.641.578	1.034.608	30.009.580
280	Kota Palangkaraya	4.667.713	4.724.041	391.581	1.328.336	21.134.511

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah	15.463.964			230.148.536
275	Kab. Barito Selatan	17.086.797			55.557.978
276	Kab. Barito Utara	16.830.782			78.409.120
277	Kab. Kapuas	41.715.894			96.900.734
278	Kab. Kotawaringin Barat	37.158.271		7.041.400	93.847.057
279	Kab. Kotawaringin Timur	23.878.306			72.764.503
280	Kota Palangkaraya	11.300.295			54.924.715

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah	5.800.178			5.800.178	
275	**Kab. Barito Selatan**			315.000	315.000	
276	**Kab. Barito Utara**					
277	**Kab. Kapuas**			315.000	315.000	
278	Kab. Kotawaringin Barat		100.231.734		100.231.734	
279	Kab. Kotawaringin Timur		39.386.273	125.000	39.511.273	
280	Kota Palangkaraya					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah	34.886.722	34.886.722			
275	Kab. Barito Selatan				3.995.362	3.995.362
276	Kab. Barito Utara				1.057.129	1.057.129
277	Kab. Kapuas			18.832.823		18.832.823
278	Kab. Kotawaringin Barat	20.041.329	20.041.329		4.773.014	4.773.014
279	Kab. Kotawaringin Timur				4.426.445	4.426.445
280	Kota Palangkaraya				5.132.165	5.132.165

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah					12.750.000
275	**Kab. Barito Selatan**	1.792.872	1.099.838	2.892.710		6.585.410
276	**Kab. Barito Utara**		899.867	899.867		7.021.801
277	Kab. Kapuas	18.611.659		18.611.659		2.300.000
278	Kab. Kotawaringin Barat		2.348.995	2.348.995		7.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	875.000		875.000	1.333.952	6.346.698
280	Kota Palangkaraya		1.637.710	1.637.710	1.263.710	2.593.390

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah	5.805.058	8.898.000			
275	Kab. Barito Selatan		946.800			
276	Kab. Barito Utara		1.052.000	2.200.214		
277	Kab. Kapuas	3.862.559	1.645.000			
278	Kab. Kotawaringin Barat		1.208.000	312.430		7.313.811
279	Kab. Kotawaringin Timur	2.399.346	1.506.250			
280	Kota Palangkaraya		570.750			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
274	Provinsi Kalimantan Tengah		3.657.537	3.657.537	71.797.495	**301.946.031**
275	**Kab. Barito Selatan**				14.735.282	70.293.260
276	**Kab. Barito Utara**				12.231.011	90.640.131
277	**Kab. Kapuas**				45.567.041	142.467.775
278	Kab. Kotawaringin Barat			7.313.811	143.229.313	237.076.370
279	Kab. Kotawaringin Timur				56.398.964	129.163.467
280	Kota Palangkaraya				11.197.725	66.122.440

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
281	Kab. Katingan	708.238	7.279.654	1.479.566		
282	Kab. Seruyan	751.030	11.068.149	2.715.376		
283	Kab. Sukamara	715.859	1.447.212	1.509.639		
284	Kab. Lamandau	275.480	3.232.163	5.240.728		
285	Kab. Gunung Mas	1.355.950	19.912.591	10.144.340		
286	Kab. Pulang Pisau	1.107.231	4.867.346	6.218.294		
287	Kab. Murung Raya	1.872.817	5.239.849	2.056.408		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
281	Kab. Katingan				9.467.458	2.000.000
282	Kab. Seruyan			99.653	14.634.208	3.903.212
283	Kab. Sukamara				3.672.710	8.252.855
284	Kab. Lamandau				8.748.371	2.482.349
285	Kab. Gunung Mas				31.412.881	14.066.961
286	Kab. Pulang Pisau			300.000	12.492.871	2.000.000
287	Kab. Murung Raya				9.169.074	17.872.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
281	Kab. Katingan	7.450.000	2.099.602	42.361.035	1.294.421	55.205.058
282	Kab. Seruyan	16.595.102	1.299.210		1.080.030	22.877.554
283	Kab. Sukamara	3.494.475	1.541.000		905.913	14.194.243
284	Kab. Lamandau	3.320.000	1.859.248	391.427	1.143.620	9.196.644
285	Kab. Gunung Mas	5.331.210	3.451.005	400.749	1.064.889	24.314.814
286	Kab. Pulang Pisau	6.677.372	1.875.176		1.054.795	11.607.343
287	Kab. Murung Raya	3.000.000	2.203.923		1.062.103	24.138.026

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
281	Kab. Katingan	33.822.774			98.495.290
282	Kab. Seruyan	16.182.510	5.350.024		59.044.296
283	Kab. Sukamara	12.166.419			30.033.372
284	Kab. Lamandau	8.071.104	4.700.000		30.716.119
285	Kab. Gunung Mas	15.334.091			71.061.786
286	Kab. Pulang Pisau	11.274.908			35.375.122
287	Kab. Murung Raya	21.506.703			54.813.803

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
281	Kab. Katingan					
282	Kab. Seruyan					
283	Kab. Sukamara					
284	Kab. Lamandau					4.947.964
285	Kab. Gunung Mas	596.000		227.500	823.500	
286	Kab. Pulang Pisau					
287	Kab. Murung Raya		14.029.924		14.029.924	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
281	Kab. Katingan				5.126.796	5.126.796
282	Kab. Seruyan				5.182.200	5.182.200
283	Kab. Sukamara				3.895.631	3.895.631
284	Kab. Lamandau		4.947.964		12.652.406	12.652.406
285	Kab. Gunung Mas			3.549.587	1.674.412	5.223.999
286	Kab. Pulang Pisau				3.645.630	3.645.630
287	Kab. Murung Raya				4.245.858	4.245.858

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
281	Kab. Katingan		2.105.965	2.105.965		1.306.400
282	Kab. Seruyan		1.986.999	1.986.999	2.583.247	3.580.000
283	Kab. Sukamara		1.651.334	1.651.334		3.051.293
284	Kab. Lamandau		9.431.441	9.431.441		
285	Kab. Gunung Mas	2.462.558		2.462.558		12.342.947
286	Kab. Pulang Pisau		2.096.065	2.096.065		14.940.000
287	Kab. Murung Raya		1.014.576	1.014.576		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
281	Kab. Katingan		946.118			
282	Kab. Seruyan		567.000	11.508.201		
283	Kab. Sukamara	1.308.800	1.156.000			
284	Kab. Lamandau	1.020.000				
285	Kab. Gunung Mas	4.435.000	999.400			1.300.000
286	Kab. Pulang Pisau		1.034.000			
287	Kab. Murung Raya			4.142.403		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
281	Kab. Katingan				9.485.279	107.980.569
282	Kab. Seruyan				25.407.647	84.451.943
283	Kab. Sukamara				11.063.058	41.096.430
284	Kab. Lamandau				28.051.811	58.767.930
285	Kab. Gunung Mas			1.300.000	27.587.404	98.649.190
286	Kab. Pulang Pisau				21.715.695	57.090.817
287	Kab. Murung Raya				23.432.761	78.246.564

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
288	Kab. Barito Timur	830.478	18.246.505	15.936.976		
289	~~Provinsi~~ Kalimantan Selatan				41.233.122	44.439.995
290	Kab. Banjar	2.304.753	16.076.345	6.016.215		
291	Kab. Barito Kuala	726.529	6.583.117	12.631.293		
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		1.196.378	1.950.574		
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	385.760	10.478.919	4.284.324		
294	Kab. Hulu Sungai Utara	283.070	2.819.027	1.832.602		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
288	Kab. Barito Timur			300.000	35.313.959	10.928.804
289	**Provinsi Kalimantan Selatan**		3.340.070	4.500.000	93.513.187	
290	**Kab. Banjar**			299.900	24.697.213	13.704.749
291	Kab. Barito Kuala				19.940.939	13.867.639
292	Kab. Hulu Sungai Selatan				3.146.952	9.618.575
293	Kab. Hulu Sungai Tengah			216.000	15.365.003	12.047.490
294	Kab. Hulu Sungai Utara			227.000	5.161.699	11.217.003

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
288	Kab. Barito Timur	9.094.835	2.259.871		1.260.607	23.544.117
289	Provinsi Kalimantan Selatan	57.081.555				57.081.555
290	Kab. Banjar	5.912.282	6.263.778	896.504	1.160.780	27.938.093
291	Kab. Barito Kuala	5.278.430	3.953.752	435.122	1.059.842	24.594.785
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	8.315.768	3.056.884		765.610	21.756.837
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	6.574.000	4.048.910		555.155	23.225.555
294	Kab. Hulu Sungai Utara		3.478.734	351.418	1.059.842	16.106.997

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
288	Kab. Barito Timur	9.669.703			68.527.779
289	Provinsi Kalimantan Selatan	10.374.896			160.969.638
290	Kab. Banjar	14.899.715			67.535.021
291	Kab. Barito Kuala	15.749.646	4.200.000		64.485.370
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	12.874.090			37.777.879
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	12.959.027			51.549.585
294	Kab. Hulu Sungai Utara	8.174.960	5.355.000		34.798.656

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
288	Kab. Barito Timur	650.000		125.000	775.000	
289	Provinsi Kalimantan Selatan	9.568.185			9.568.185	30.520.626
290	Kab. Banjar	500.000		361.700	861.700	8.142.486
291	Kab. Barito Kuala	3.499.989		340.025	3.840.014	9.954.479
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		1.000.000		1.000.000	7.564.465
293	Kab. Hulu Sungai Tengah					7.520.289
294	Kab. Hulu Sungai Utara	645.080	31.500.349	402.524	32.547.953	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
288	Kab. Barito Timur			3.399.605	4.810.870	8.210.475
289	Provinsi Kalimantan Selatan		30.520.626			
290	Kab. Banjar		8.142.486		8.227.031	8.227.031
291	Kab. Barito Kuala		9.954.479		6.650.387	6.650.387
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		7.564.465		5.483.557	5.483.557
293	Kab. Hulu Sungai Tengah		7.520.289		5.657.665	5.657.665
294	Kab. Hulu Sungai Utara			3.999.538	4.861.848	8.861.386

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
288	Kab. Barito Timur	1.431.934	1.982.484	3.414.418		1.996.721
289	Provinsi Kalimantan Selatan					79.627.923
290	Kab. Banjar		3.375.152	3.375.152	2.279.093	5.941.884
291	Kab. Barito Kuala		3.141.987	3.141.987	2.881.481	5.339.210
292	Kab. Hulu Sungai Selatan		2.097.726	2.097.726	2.809.103	16.375.326
293	Kab. Hulu Sungai Tengah		2.220.744	2.220.744	2.728.003	5.366.883
294	Kab. Hulu Sungai Utara	5.317.977	2.129.976	7.447.953	1.268.764	5.109.995

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
288	Kab. Barito Timur	5.139.750	1.046.867			
289	Provinsi Kalimantan Selatan	4.411.416	1.117.020			
290	Kab. Banjar	3.090.000	1.194.250	1.400.136		3.867.000
291	Kab. Barito Kuala	2.825.000	1.390.000			6.413.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	956.824	1.155.000			
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.943.327	55.000	2.495.743		
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.282.242	665.400	2.390.232		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
288	Kab. Barito Timur				20.583.231	89.111.010
289	Provinsi Kalimantan Selatan		3.148.456	3.148.456	128.393.626	289.363.264
290	Kab. Banjar			3.867.000	38.378.732	105.913.753
291	Kab. Barito Kuala			6.413.000	42.435.558	106.920.928
292	Kab. Hulu Sungai Selatan				37.442.001	75.219.880
293	Kab. Hulu Sungai Tengah				28.987.654	80.537.239
294	Kab. Hulu Sungai Utara				59.573.925	94.372.581

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
295	Kab. Kotabaru	1.173.560	15.521.189	1.168.200		
296	Kab. Tabalong	303.517	18.986.433	5.069.216		
297	Kab. Tanah Laut	199.213	6.449.370	3.286.785		
298	Kab. Tapin	395.359	8.128.874	17.627.752		
299	Kota Banjarbaru	225.584	1.835.572	2.000.700		
300	Kota Banjarmasin	237.384	3.613.621	3.099.426		
301	Kab. Balangan	1.185.105	7.722.574	6.852.672		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
295	Kab. Kotabaru				17.862.949	22.298.663
296	Kab. Tabalong			1.693.173	26.052.339	5.850.217
297	Kab. Tanah Laut				9.935.368	15.076.425
298	Kab. Tapin	200.000			26.351.985	12.107.012
299	Kota Banjarbaru			998.671	5.060.527	14.987.538
300	Kota Banjarmasin	198.970			7.149.401	2.000.000
301	Kab. Balangan	686.000			16.446.351	7.031.052

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
295	Kab. Kotabaru		3.122.957	46.089.654	1.110.311	72.621.585
296	Kab. Tabalong	6.194.000	2.435.596		1.160.780	15.640.593
297	Kab. Tanah Laut	8.981.500	3.935.471	307.304	605.624	28.906.324
298	Kab. Tapin	4.872.151	3.140.383		1.261.717	21.381.263
299	Kota Banjarbaru	10.850.000	2.523.675		783.274	29.144.487
300	Kota Banjarmasin	5.497.200	13.820.202	533.947	529.921	22.381.270
301	Kab. Balangan		1.479.037		1.059.842	9.569.931

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
295	Kab. Kotabaru	17.102.713			107.587.247
296	Kab. Tabalong	7.444.831			49.137.763
297	Kab. Tanah Laut	15.443.780			54.285.472
298	Kab. Tapin	9.359.467			57.092.715
299	Kota Banjarbaru	12.911.747			47.116.761
300	Kota Banjarmasin	7.810.151			37.340.822
301	Kab. Balangan	13.393.418			39.409.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
295	Kab. Kotabaru	4.426.100	12.593.431	461.700	17.481.231	
296	Kab. Tabalong	849.708		176.500	1.026.208	5.739.523
297	Kab. Tanah Laut	1.550.000		225.000	1.775.000	
298	Kab. Tapin	1.545.950		327.525	1.873.475	5.945.644
299	Kota Banjarbaru	1.166.000			1.166.000	
300	Kota Banjarmasin			315.000	315.000	
301	Kab. Balangan		9.286.565		9.286.565	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
295	Kab. Kotabaru	13.531.411	13.531.411		15.724.873	15.724.873
296	Kab. Tabalong		5.739.523		6.779.285	6.779.285
297	Kab. Tanah Laut				7.046.793	7.046.793
298	Kab. Tapin		5.945.644	1.789.792	6.985.434	8.775.226
299	Kota Banjarbaru				1.701.802	1.701.802
300	Kota Banjarmasin					
301	Kab. Balangan				5.471.959	5.471.959

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
295	Kab. Kotabaru		4.693.685	4.693.685	11.068.513	4.805.162
296	Kab. Tabalong	1.431.934	1.886.017	3.317.951		11.581.640
297	Kab. Tanah Laut		2.631.288	2.631.288	2.793.665	8.550.000
298	Kab. Tapin	2.291.094	2.043.677	4.334.771		6.667.500
299	Kota Banjarbaru		1.836.437	1.836.437	918.750	4.249.856
300	Kota Banjarmasin		2.360.886	2.360.886	1.077.122	
301	Kab. Balangan		1.751.145	1.751.145		2.748.165

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
295	Kab. Kotabaru	1.530.000	1.613.000	500.048		
296	Kab. Tabalong	1.822.337	1.150.600			2.350.000
297	Kab. Tanah Laut	3.113.322	620.000	500.048		
298	Kab. Tapin	2.467.344	1.097.089			
299	Kota Banjarbaru		733.550	750.073		2.028.600
300	Kota Banjarmasin					4.827.000
301	Kab. Balangan		709.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
295	Kab. Kotabaru				70.947.923	178.535.170
296	Kab. Tabalong			2.350.000	33.767.544	82.905.307
297	Kab. Tanah Laut				27.030.116	81.315.588
298	Kab. Tapin				31.161.049	88.253.764
299	Kota Banjarbaru			2.028.600	13.385.068	60.501.829
300	Kota Banjarmasin			4.827.000	8.580.008	45.920.830
301	Kab. Balangan				19.966.834	59.376.534

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
302	Kab. Tanah Bumbu	1.721.034	4.741.159	10.044.678		
303	Provinsi Kalimantan Timur				69.100.996	90.054.450
304	Kab. Berau	780.496	4.221.255	7.590.235		
305	Kab. Kutai Kartanegara	3.259.096	16.038.895	21.970.261		
306	Kab. Kutai Barat	450.781	15.775.643	7.571.751		
307	Kab. Kutai Timur	986.491	16.833.653	2.144.145		
308	Kab. Paser	749.875	19.850.556	17.270.079		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
302	Kab. Tanah Bumbu				16.506.871	9.750.455
303	Provinsi Kalimantan Timur		6.065.340	495.800	165.716.586	
304	Kab. Berau			200.000	12.791.986	5.946.282
305	Kab. Kutai Kartanegara				41.268.252	4.327.411
306	Kab. Kutai Barat				23.798.175	2.000.000
307	Kab. Kutai Timur			200.000	20.164.289	9.084.104
308	Kab. Paser				37.870.510	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
302	Kab. Tanah Bumbu	3.236.000	4.550.994	1.486.142	1.160.780	20.184.371
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.008.385				6.008.385
304	Kab. Berau	3.000.000	2.589.588	871.176	1.488.826	13.895.872
305	Kab. Kutai Kartanegara	6.135.771	4.014.339	200.000	1.499.929	16.177.450
306	Kab. Kutai Barat	6.101.570	3.064.371		1.488.826	12.654.767
307	Kab. Kutai Timur	6.432.176	4.200.228	9.421.174	1.312.186	30.449.868
308	Kab. Paser	3.000.000	2.700.355	913.630	1.510.029	10.124.014

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
302	Kab. Tanah Bumbu	40.815.048			77.506.290
303	Provinsi Kalimantan Timur	37.917.031			209.642.002
304	Kab. Berau	41.585.479	4.600.000		72.873.337
305	Kab. Kutai Kartanegara	23.804.332			81.250.034
306	Kab. Kutai Barat				36.452.942
307	Kab. Kutai Timur	38.541.088	4.700.000		93.855.245
308	Kab. Paser	38.656.909	4.600.000		91.251.433

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
302	Kab. Tanah Bumbu			361.700	361.700	
303	Provinsi Kalimantan Timur	2.375.595			2.375.595	
304	Kab. Berau		11.563.290		11.563.290	
305	Kab. Kutai Kartanegara	650.000	25.786.310	315.000	26.751.310	
306	Kab. Kutai Barat			315.000	315.000	
307	Kab. Kutai Timur	650.000		227.500	877.500	17.552.040
308	Kab. Paser		16.340.903		16.340.903	26.810.820

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
302	Kab. Tanah Bumbu	19.636.683	19.636.683	15.548.324	3.873.336	19.421.660
303	Provinsi Kalimantan Timur	82.779.488	82.779.488			
304	Kab. Berau	25.574.695	25.574.695		6.065.195	6.065.195
305	Kab. Kutai Kartanegara			1.960.000	7.763.919	9.723.919
306	Kab. Kutai Barat				6.139.443	6.139.443
307	Kab. Kutai Timur		17.552.040	5.045.417	5.997.892	11.043.309
308	Kab. Paser		26.810.820		3.898.219	3.898.219

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
302	Kab. Tanah Bumbu	22.173.607	2.655.781	24.829.388		11.504.300
303	Provinsi Kalimantan Timur					5.607.249
304	Kab. Berau		1.792.383	1.792.383	2.141.801	3.750.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	1.300.105	3.108.951	4.409.056	1.265.696	7.485.748
306	Kab. Kutai Barat	2.091.078		2.091.078		2.120.438
307	Kab. Kutai Timur	601.412	944.861	1.546.273		
308	Kab. Paser		2.235.921	2.235.921	2.814.464	12.617.102

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
302	Kab. Tanah Bumbu	2.400.000	1.335.000	1.500.146		1.500.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.442.196	11.610.300			
304	Kab. Berau		1.492.500			
305	Kab. Kutai Kartanegara	3.270.000	1.379.000			1.300.000
306	Kab. Kutai Barat	3.521.308	1.358.250			
307	Kab. Kutai Timur		1.330.000			3.824.873
308	Kab. Paser		1.477.775			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
302	Kab. Tanah Bumbu			1.500.000	82.488.877	159.995.167
303	Provinsi Kalimantan Timur				108.814.828	318.456.830
304	Kab. Berau				52.379.864	125.253.201
305	Kab. Kutai Kartanegara			1.300.000	55.584.729	136.834.763
306	Kab. Kutai Barat				15.545.517	51.998.459
307	Kab. Kutai Timur			3.824.873	36.173.995	130.029.240
308	Kab. Paser				66.195.204	157.446.637

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
309	Kota Balikpapan		1.682.900	25.931.463		
310	Kota Bontang		1.529.000	1.723.217		
311	Kota Samarinda	1.800.379	2.371.378	6.507.875		
312	Kab. Penajam Paser Utara		1.074.425	3.768.351		
313	Kab. Mahakam Ulu		4.286.745	1.234.030		
314	Provinsi Sulawesi Utara				55.588.557	102.873.764
315	Kab. Bolaang Mongondow		4.212.018	1.510.368		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
309	Kota Balikpapan	2.434.300			30.048.663	2.000.000
310	Kota Bontang				3.252.217	2.000.000
311	Kota Samarinda			10.000.000	20.679.632	2.000.000
312	Kab. Penajam Paser Utara			10.000.000	14.842.776	2.000.000
313	Kab. Mahakam Ulu				5.520.775	8.296.706
314	Provinsi Sulawesi Utara		1.445.960	1.000.000	160.908.281	
315	Kab. Bolaang Mongondow				5.722.386	21.135.079

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
309	Kota Balikpapan	3.193.000	3.763.105	2.961.959	1.112.128	13.030.192
310	Kota Bontang	3.000.000	2.165.898	2.983.112	1.428.567	11.577.577
311	Kota Samarinda	7.450.000	5.559.420		1.110.311	16.119.731
312	Kab. Penajam Paser Utara	3.000.000	2.381.987		1.519.612	8.901.599
313	Kab. Mahakam Ulu	6.287.106	3.686.869		1.514.061	19.784.742
314	Provinsi Sulawesi Utara	44.315.289	2.690.538	1.204.391		48.210.218
315	Kab. Bolaang Mongondow	5.400.000	1.734.404		1.110.311	29.379.794

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
309	Kota Balikpapan	8.743.291			51.822.146
310	Kota Bontang				14.829.794
311	Kota Samarinda	30.754.616			67.553.979
312	Kab. Penajam Paser Utara	13.257.102			37.001.477
313	Kab. Mahakam Ulu	37.124.068	10.200.000		72.629.585
314	Provinsi Sulawesi Utara	8.037.788			217.156.287
315	Kab. Bolaang Mongondow	8.194.816			43.296.996

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
309	Kota Balikpapan	3.240.000		315.000	3.555.000	
310	Kota Bontang					
311	Kota Samarinda	4.853.200		315.000	5.168.200	
312	Kab. Penajam Paser Utara	2.442.887		315.000	2.757.887	
313	Kab. Mahakam Ulu					
314	Provinsi Sulawesi Utara	3.720.900			3.720.900	
315	Kab. Bolaang Mongondow			377.500	377.500	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
309	Kota Balikpapan				4.100.083	4.100.083
310	Kota Bontang				7.691.684	7.691.684
311	Kota Samarinda				4.625.172	4.625.172
312	Kab. Penajam Paser Utara			17.597.966		17.597.966
313	Kab. Mahakam Ulu	15.846.458	15.846.458			
314	Provinsi Sulawesi Utara	25.728.749	25.728.749			
315	Kab. Bolaang Mongondow			1.589.815	5.334.675	6.924.490

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
309	Kota Balikpapan		1.853.467	1.853.467	1.837.211	
310	Kota Bontang		3.721.292	3.721.292	28.564.744	
311	Kota Samarinda		1.414.161	1.414.161	984.702	1.335.730
312	Kab. Penajam Paser Utara	8.165.204		8.165.204		9.354.674
313	Kab. Mahakam Ulu		1.384.796	1.384.796	1.126.725	
314	Provinsi Sulawesi Utara					6.749.999
315	Kab. Bolaang Mongondow	6.818.732		6.818.732		682.150

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
309	Kota Balikpapan			4.541.784		
310	Kota Bontang					
311	Kota Samarinda					
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.155.960	1.601.610			
313	Kab. Mahakam Ulu					
314	Provinsi Sulawesi Utara	2.894.152	15.122.870		3.919.694	
315	Kab. Bolaang Mongondow	2.410.000	1.400.000	8.621.666		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
309	Kota Balikpapan				15.887.545	67.709.691
310	Kota Bontang				39.977.720	54.807.514
311	Kota Samarinda				13.527.965	81.081.944
312	Kab. Penajam Paser Utara				40.633.301	77.634.778
313	Kab. Mahakam Ulu				18.357.979	90.987.564
314	Provinsi Sulawesi Utara		13.634.731	13.634.731	71.771.095	288.927.382
315	Kab. Bolaang Mongondow				27.234.538	70.531.534

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
316	Kab. Minahasa		9.884.000	2.143.636		
317	Kab. Sangihe		2.296.973	4.063.261		
318	Kota Bitung	283.249	4.409.322	3.864.405		
319	Kota Manado		20.481.663	4.267.479		
320	Kab. Kepulauan Talaud		7.676.815	13.698.921		
321	Kab. Minahasa Selatan	856.838	16.546.648	8.554.035		
322	Kota Tomohon		6.306.238	4.117.722		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
316	Kab. Minahasa	680.536			12.708.172	29.463.160
317	Kab. Sangihe				6.360.234	15.804.250
318	Kota Bitung	843.329		300.000	9.700.305	2.000.000
319	Kota Manado			293.864	25.043.006	3.830.282
320	Kab. Kepulauan Talaud				21.375.736	20.021.832
321	Kab. Minahasa Selatan				25.957.521	12.200.000
322	Kota Tomohon	968.395			11.392.355	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
316	Kab. Minahasa	17.339.800	2.620.433	391.427	1.059.842	50.874.662
317	Kab. Sangihe	16.451.110	2.045.082	341.697	1.160.780	35.802.919
318	Kota Bitung		3.070.717	45.574.007	1.488.826	52.133.550
319	Kota Manado		5.832.772	681.485	1.110.311	11.454.850
320	Kab. Kepulauan Talaud	16.750.000	3.365.224	3.922.750	1.110.311	45.170.117
321	Kab. Minahasa Selatan	3.200.000	5.136.281		1.160.780	21.697.061
322	Kota Tomohon	13.100.000	2.368.897		1.261.717	18.730.614

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
316	Kab. Minahasa	9.579.840			73.162.674
317	Kab. Sangihe	6.375.704	6.200.000		54.738.857
318	Kota Bitung	5.814.250			67.648.105
319	Kota Manado	5.344.733			41.842.589
320	Kab. Kepulauan Talaud	30.801.159	6.711.848	52.651.177	156.710.037
321	Kab. Minahasa Selatan	8.637.240		15.850.000	72.141.822
322	Kota Tomohon	6.757.370			36.880.339

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
316	Kab. Minahasa					
317	Kab. Sangihe					
318	Kota Bitung					
319	Kota Manado					
320	Kab. Kepulauan Talaud		36.321.791		36.321.791	
321	Kab. Minahasa Selatan					
322	Kota Tomohon					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
316	Kab. Minahasa				5.740.856	5.740.856
317	Kab. Sangihe	6.599.152	6.599.152		3.977.179	3.977.179
318	Kota Bitung				5.736.181	5.736.181
319	Kota Manado				1.375.000	1.375.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	12.921.411	12.921.411		3.398.806	3.398.806
321	Kab. Minahasa Selatan				4.472.565	4.472.565
322	Kota Tomohon				4.160.566	4.160.566

SK No 022540 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
316	Kab. Minahasa		1.761.789	1.761.789	992.094	3.035.377
317	Kab. Sangihe		1.852.387	1.852.387	2.106.939	
318	Kota Bitung		4.209.474	4.209.474	22.071.182	1.716.000
319	Kota Manado		1.974.349	1.974.349	1.078.431	
320	Kab. Kepulauan Talaud				1.237.865	
321	Kab. Minahasa Selatan		975.910	975.910		3.012.400
322	Kota Tomohon		1.461.424	1.461.424	1.170.865	763.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
316	Kab. Minahasa	4.370.000	2.106.670			
317	Kab. Sangihe	6.955.683	3.405.250			
318	Kota Bitung		1.200.000	8.880.865	2.672.197	
319	Kota Manado		786.000	5.500.535	3.504.211	
320	Kab. Kepulauan Talaud		2.842.500	1.150.112		
321	Kab. Minahasa Selatan	3.805.000	1.872.000			
322	Kota Tomohon		1.195.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
316	Kab. Minahasa				18.006.786	91.169.460
317	Kab. Sangihe				24.896.590	79.635.447
318	Kota Bitung				46.485.899	114.134.004
319	Kota Manado				14.218.526	56.061.115
320	Kab. Kepulauan Talaud				57.872.485	214.582.522
321	Kab. Minahasa Selatan				14.137.875	86.279.697
322	Kota Tomohon				8.751.455	45.631.794

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
323	Kab. Minahasa Utara	359.360	4.710.845	5.695.409		
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		2.826.210	1.848.056		
325	Kota Kotamobagu		7.614.919	2.656.022		
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	323.302	12.493.000	3.990.422		
327	Kab. Minahasa Tenggara	396.390	11.980.332	8.116.242		
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	269.093	18.461.545	1.601.936		
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	267.591	13.646.310	4.896.759		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
323	Kab. Minahasa Utara	852.100			11.617.714	2.000.000
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro			10.000.000	14.674.266	3.663.481
325	Kota Kotamobagu	726.200			10.997.141	2.000.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.785.000			20.591.724	29.954.190
327	Kab. Minahasa Tenggara			300.000	20.792.964	4.564.341
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur				20.332.574	3.722.564
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan				18.810.660	3.906.285

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
323	Kab. Minahasa Utara	15.691.000	2.998.759		1.488.826	22.178.585
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.750.000	3.470.651	200.000	1.009.374	12.093.506
325	Kota Kotamobagu	9.959.850	2.340.580	324.309	1.059.842	15.684.581
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara		2.588.959	301.216	1.110.311	33.954.676
327	Kab. Minahasa Tenggara		2.191.222		1.362.654	8.118.217
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur		2.546.212		1.160.780	7.429.556
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.000.000	3.956.545		1.362.654	12.225.484

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
323	Kab. Minahasa Utara	6.299.786	5.252.751		45.348.836
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9.513.739	2.003.827	5.700.000	43.985.338
325	Kota Kotamobagu	5.510.708			32.192.430
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6.352.561	3.842.290		64.741.251
327	Kab. Minahasa Tenggara	12.183.736			41.094.917
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	9.600.157			37.362.287
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10.424.834			41.460.978

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
323	Kab. Minahasa Utara	800.000		501.150	1.301.150	
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro					
325	Kota Kotamobagu					
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.755.000	27.489.181	476.149	29.720.330	
327	Kab. Minahasa Tenggara					
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur					
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		25.223.168	182.500	25.405.668	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
323	Kab. Minahasa Utara	9.595.950	9.595.950	2.834.125	3.843.362	6.677.487
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	6.636.087	6.636.087		1.510.601	1.510.601
325	Kota Kotamobagu				5.438.074	5.438.074
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.801.891	5.801.891	3.908.792	2.899.585	6.808.377
327	Kab. Minahasa Tenggara					
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur				2.100.000	2.100.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			5.931.814	3.678.977	9.610.791

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
323	Kab. Minahasa Utara		1.644.596	1.644.596	1.398.416	1.749.377
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		1.426.319	1.426.319	1.015.465	
325	Kota Kotamobagu		1.874.344	1.874.344	1.506.513	675.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.772.870		1.772.870	864.039	3.488.000
327	Kab. Minahasa Tenggara					1.400.504
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur		1.784.430	1.784.430		1.022.400
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	7.591.521	1.049.845	8.641.366		1.707.332

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
323	Kab. Minahasa Utara		2.052.500			
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.770.000	1.632.000			
325	Kota Kotamobagu	485.000	427.000			
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.157.750	1.315.000			
327	Kab. Minahasa Tenggara		1.932.000	2.575.250		
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.123.036	1.735.200	1.100.107		
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.020.000	1.668.206			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
323	Kab. Minahasa Utara	7.923.500		7.923.500	32.342.976	77.691.812
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro				15.990.472	59.975.810
325	Kota Kotamobagu				10.405.931	42.598.361
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara				51.928.257	116.669.508
327	Kab. Minahasa Tenggara				5.907.754	47.002.671
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur				10.865.173	48.227.460
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan				48.053.363	89.514.341

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah				119.973.223	124.028.566
331	Kab. Banggai	320.000	18.341.460	3.783.546		
332	Kab. Banggai Kepulauan		8.032.056	16.537.188		
333	Kab. Buol	992.995	16.301.191	2.562.895		
334	Kab. Toli-Toli		16.627.376	5.309.313		
335	Kab. Donggala	752.704	4.068.895	13.614.171		
336	Kab. Morowali	714.947	9.382.408	8.352.808		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah		4.848.385		248.850.174	
331	Kab. Banggai				22.445.006	21.075.942
332	Kab. Banggai Kepulauan				24.569.244	22.783.300
333	Kab. Buol				19.857.081	8.149.150
334	Kab. Toli-Toli			7.005.000	28.941.689	9.958.131
335	Kab. Donggala	1.726.596		266.000	20.428.366	18.260.404
336	Kab. Morowali				18.450.163	18.201.009

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah	18.383.670		1.835.410		20.219.080
331	Kab. Banggai	12.500.000	4.738.605	391.581	403.749	39.109.877
332	Kab. Banggai Kepulauan	20.023.585	3.044.705		1.463.592	47.315.182
333	Kab. Buol	5.486.665	2.520.302		1.429.273	17.585.390
334	Kab. Toli-Toli	23.175.500	4.519.069		1.415.879	39.068.579
335	Kab. Donggala	11.823.280	6.790.049	1.144.621	1.145.538	39.163.892
336	Kab. Morowali	40.090.328	1.688.616		1.059.842	61.039.795

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah	15.540.225			284.609.479
331	Kab. Banggai	12.912.515			74.467.398
332	Kab. Banggai Kepulauan	12.885.320	6.300.000		91.069.746
333	Kab. Buol	12.351.675	7.100.000		56.894.146
334	Kab. Toli-Toli	13.048.350	9.660.000		90.718.618
335	Kab. Donggala	39.507.035	10.500.000		109.599.293
336	Kab. Morowali	12.995.443	5.000.000		97.485.401

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.287.555			3.287.555	
331	Kab. Banggai	1.300.000		157.500	1.457.500	7.826.131
332	Kab. Banggai Kepulauan	3.710.720	9.385.284	325.000	13.421.004	
333	Kab. Buol		50.286.688		50.286.688	
334	Kab. Toli-Toli		4.418.882		4.418.882	9.732.564
335	Kab. Donggala		46.177.877		46.177.877	
336	Kab. Morowali	1.150.000		325.000	1.475.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah	50.856.080	50.856.080			
331	Kab. Banggai		7.826.131	8.529.014		8.529.014
332	Kab. Banggai Kepulauan				4.256.865	4.256.865
333	Kab. Buol	8.465.070	8.465.070		4.580.474	4.580.474
334	Kab. Toli-Toli		9.732.564		4.350.986	4.350.986
335	Kab. Donggala	17.446.617	17.446.617		4.854.023	4.854.023
336	Kab. Morowali	13.474.735	13.474.735			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah					16.234.000
331	Kab. Banggai	9.164.376		9.164.376		2.245.732
332	Kab. Banggai Kepulauan		1.963.307	1.963.307	1.446.174	2.349.290
333	Kab. Buol		2.107.651	2.107.651	2.516.614	10.786.970
334	Kab. Toli-Toli		2.386.761	2.386.761	1.603.834	8.465.000
335	Kab. Donggala		2.817.780	2.817.780	2.569.651	8.242.720
336	Kab. Morowali	7.005.401	1.765.480	8.770.881		11.861.391

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah	20.166.762	12.368.122			
331	Kab. Banggai	2.620.000	1.343.750			
332	Kab. Banggai Kepulauan	4.410.000	2.292.000	13.577.922		
333	Kab. Buol	2.541.000	1.400.000	8.802.857		
334	Kab. Toli-Toli	2.800.000	1.156.719			
335	Kab. Donggala	4.765.000	2.300.000	3.650.355		
336	Kab. Morowali	5.362.101	1.912.900	7.945.774		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
330	Provinsi Sulawesi Tengah		10.235.339	10.235.339	113.147.858	397.757.337
331	Kab. Banggai				33.186.503	107.653.901
332	Kab. Banggai Kepulauan				43.716.562	134.786.308
333	Kab. Buol				91.487.324	148.381.470
334	Kab. Toli-Toli				34.914.746	125.633.364
335	Kab. Donggala				92.824.023	202.423.316
336	Kab. Morowali				50.802.782	148.288.183

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
337	Kab. Poso	449.517	18.937.022	3.743.715		
338	Kota Palu		1.670.814	1.016.830		
339	Kab. Parigi Moutong	662.302	24.466.763	21.710.873		
340	Kab. Tojo Una Una	767.210	25.753.869	6.257.618		
341	Kab. Sigi	552.333	8.342.277	4.778.030		
342	Kab. Banggai Laut		1.042.983	3.305.824		
343	Kab. Morowali Utara	211.710	8.840.658	4.642.678		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
337	Kab. Poso	684.220			23.814.474	8.853.596
338	Kota Palu			9.500.000	12.187.644	30.529.449
339	Kab. Parigi Moutong				46.839.938	16.276.858
340	Kab. Tojo Una Una	857.000		500.000	34.135.697	15.075.991
341	Kab. Sigi			564.833	14.237.473	22.748.839
342	Kab. Banggai Laut				4.348.807	6.199.461
343	Kab. Morowali Utara				13.695.046	37.285.431

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
337	Kab. Poso	27.583.521	3.788.955	391.581	1.271.811	41.889.464
338	Kota Palu	17.817.499	3.802.296	630.545	787.311	53.567.100
339	Kab. Parigi Moutong	31.569.420	8.578.701		1.429.778	57.854.757
340	Kab. Tojo Una Una	14.622.000	4.772.570		1.488.826	35.959.387
341	Kab. Sigi	4.445.463	5.241.873		1.373.758	33.809.933
342	Kab. Banggai Laut	3.000.000	2.122.894		1.428.264	12.750.619
343	Kab. Morowali Utara	3.000.000	4.349.957		1.499.929	46.135.317

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
337	Kab. Poso	21.437.753	4.935.000		92.076.691
338	Kota Palu	10.205.780			75.960.524
339	Kab. Parigi Moutong	12.924.200	11.380.959		128.999.854
340	Kab. Tojo Una Una	9.000.000	7.800.000	2.817.800	89.712.884
341	Kab. Sigi	16.500.000	12.700.000		77.247.406
342	Kab. Banggai Laut	8.760.723	3.355.924		29.216.073
343	Kab. Morowali Utara	14.090.852	7.500.000		81.421.215

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
337	Kab. Poso					
338	Kota Palu					
339	Kab. Parigi Moutong	650.000		325.000	975.000	9.717.967
340	Kab. Tojo Una Una					
341	Kab. Sigi	334.875	25.169.315	325.000	25.829.190	12.096.299
342	Kab. Banggai Laut		18.285.331		18.285.331	
343	Kab. Morowali Utara					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
337	Kab. Poso				5.049.224	5.049.224
338	Kota Palu	12.464.156	12.464.156		4.417.660	4.417.660
339	Kab. Parigi Moutong		9.717.967	1.250.000	5.937.913	7.187.913
340	Kab. Tojo Una Una	11.719.639	11.719.639		6.011.932	6.011.932
341	Kab. Sigi		12.096.299	7.601.252	14.556.494	22.157.746
342	Kab. Banggai Laut				3.492.420	3.492.420
343	Kab. Morowali Utara	9.499.680	9.499.680		4.492.540	4.492.540

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
337	Kab. Poso		1.874.534	1.874.534	862.833	8.899.889
338	Kota Palu		1.652.690	1.652.690	974.869	
339	Kab. Parigi Moutong	3.636.657	3.947.542	7.584.199	983.618	5.105.500
340	Kab. Tojo Una Una		2.098.705	2.098.705	1.503.005	
341	Kab. Sigi	5.238.738	2.419.475	7.658.213	2.254.656	6.337.214
342	Kab. Banggai Laut		1.882.196	1.882.196	1.068.012	
343	Kab. Morowali Utara		2.061.192	2.061.192	1.291.629	9.700.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
337	Kab. Poso	5.560.000	1.917.500			
338	Kota Palu		1.075.250			
339	Kab. Parigi Moutong	4.340.000	2.981.750	3.000.292		
340	Kab. Tojo Una Una	3.565.000	1.494.600	3.080.300		
341	Kab. Sigi	2.855.000	1.320.000			1.150.000
342	Kab. Banggai Laut	2.450.000	1.295.000			
343	Kab. Morowali Utara		1.529.600			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
337	Kab. Poso				24.163.980	116.240.671
338	Kota Palu				20.584.625	96.545.149
339	Kab. Parigi Moutong				41.876.239	170.876.093
340	Kab. Tojo Una Una				29.473.181	119.186.065
341	Kab. Sigi			1.150.000	81.658.318	158.905.724
342	Kab. Banggai Laut				28.472.959	57.689.032
343	Kab. Morowali Utara				28.574.641	109.995.856

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan				64.844.439	95.582.280
345	Kab. Bantaeng	938.978	24.647.423	7.725.090		
346	Kab. Barru		4.712.656	1.687.788		
347	Kab. Bone	1.905.826	18.169.512	8.165.779		
348	Kab. Bulukumba	4.325.317	9.695.337	19.268.848		
349	Kab. Enrekang		24.809.962	28.018.815		
350	Kab. Gowa	5.252.460	24.174.691	9.856.889		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan		7.885.880	4.800.000	173.112.599	
345	Kab. Bantaeng			764.875	34.076.366	14.822.782
346	Kab. Barru	198.970			6.599.414	8.118.474
347	Kab. Bone	200.000		10.000.000	38.441.117	26.035.199
348	Kab. Bulukumba	1.696.900			34.986.402	12.859.328
349	Kab. Enrekang				52.828.777	7.290.757
350	Kab. Gowa			10.000.000	49.284.040	44.190.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan	107.230.598				107.230.598
345	Kab. Bantaeng	37.594.435	4.952.962		1.110.311	58.480.490
346	Kab. Barru	11.322.346	3.177.138		585.436	23.203.394
347	Kab. Bone	45.051.075	5.662.877	1.214.905	1.463.491	79.427.547
348	Kab. Bulukumba	6.970.000	3.423.679	35.031.441	1.334.026	59.618.474
349	Kab. Enrekang	7.909.153	2.728.952		1.334.158	19.263.020
350	Kab. Gowa	3.000.000	8.623.839	32.613.114	1.441.587	89.869.082

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan	17.515.166		45.135.674	342.994.037
345	Kab. Bantaeng	8.410.541			100.967.397
346	Kab. Barru	7.792.967		2.890.304	40.486.079
347	Kab. Bone	14.663.586			132.532.250
348	Kab. Bulukumba	11.975.494			106.580.370
349	Kab. Enrekang	14.299.933			86.391.730
350	Kab. Gowa	13.875.445			153.028.567

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan	11.284.168			11.284.168	41.822.585
345	Kab. Bantaeng					
346	Kab. Barru					
347	Kab. Bone			53.000	53.000	10.101.169
348	Kab. Bulukumba	2.129.870	44.741.808	53.000	46.924.678	
349	Kab. Enrekang		18.928.161	44.000	18.972.161	
350	Kab. Gowa	5.319.052	24.965.824	49.750	30.334.626	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan		41.822.585			
345	Kab. Bantaeng	7.793.447	7.793.447		4.394.048	4.394.048
346	Kab. Barru					
347	Kab. Bone		10.101.169	10.212.162	2.249.260	12.461.422
348	Kab. Bulukumba				5.486.752	5.486.752
349	Kab. Enrekang			738.053	5.633.533	6.371.586
350	Kab. Gowa			4.399.488	3.496.771	7.896.259

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan					31.947.518
345	Kab. Bantaeng		1.858.922	1.858.922	1.435.219	7.049.692
346	Kab. Barru		1.555.115	1.555.115		6.411.223
347	Kab. Bone	6.909.014	2.806.177	9.715.191	1.809.329	6.600.000
348	Kab. Bulukumba		1.659.047	1.659.047	1.826.420	13.030.300
349	Kab. Enrekang	4.629.919	1.795.965	6.425.884		3.866.948
350	Kab. Gowa	3.675.296	2.082.847	5.758.143	1.036.481	14.878.751

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan	4.793.400	13.956.000		3.889.468	
345	Kab. Bantaeng	6.666.480	1.309.200		4.106.202	
346	Kab. Barru	3.911.250	1.120.500		1.919.999	3.611.000
347	Kab. Bone	7.275.000	2.185.000			
348	Kab. Bulukumba	3.507.000	1.953.000		2.765.999	3.942.050
349	Kab. Enrekang	6.683.199	988.480	700.068	7.087.669	
350	Kab. Gowa	7.005.000	1.198.600			1.300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
344	Provinsi Sulawesi Selatan		24.086.145	24.086.145	131.779.284	474.773.321
345	Kab. Bantaeng				34.613.210	135.580.607
346	Kab. Barru			3.611.000	18.529.087	59.015.166
347	Kab. Bone				50.200.111	182.732.361
348	Kab. Bulukumba			3.942.050	81.095.246	187.675.616
349	Kab. Enrekang				51.095.995	137.487.725
350	Kab. Gowa			1.300.000	69.407.860	222.436.427

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
351	Kab. Jeneponto	216.142	23.681.271	14.837.643		
352	Kab. Luwu	208.847	25.038.014	16.975.653		
353	Kab. Luwu Utara	2.378.782	9.415.630	23.845.474		
354	Kab. Maros	893.530	21.182.062	5.144.897		
355	Kab. Pangkajene Kepulauan		6.310.594	2.496.394		
356	Kota Palopo	830.241	18.891.468	12.284.856		
357	Kab. Luwu Timur		20.855.176	2.039.459		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
351	Kab. Jeneponto	870.000			39.605.056	26.131.240
352	Kab. Luwu			500.000	42.722.514	10.076.618
353	Kab. Luwu Utara			300.000	35.939.886	9.802.381
354	Kab. Maros	300.000		2.200.000	29.720.489	14.055.731
355	Kab. Pangkajene Kepulauan			200.000	9.006.988	5.579.375
356	Kota Palopo				32.006.565	11.110.282
357	Kab. Luwu Timur			10.000.000	32.894.635	4.481.235

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
351	Kab. Jeneponto	3.000.000	3.135.347		1.255.156	33.521.743
352	Kab. Luwu	7.271.122	5.946.001		1.549.349	24.843.090
353	Kab. Luwu Utara	45.999.471	3.183.447	391.581	1.348.295	60.725.175
354	Kab. Maros	13.000.000	2.443.854	511.063	1.359.107	31.369.755
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	10.986.580	3.873.200		1.441.386	21.880.541
356	Kota Palopo	43.331.593	2.936.412	4.915.848	1.433.613	63.727.748
357	Kab. Luwu Timur	45.815.327	1.733.942		1.446.428	53.476.932

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
351	Kab. Jeneponto	9.557.712	5.447.297		88.131.808
352	Kab. Luwu	31.719.204			99.284.808
353	Kab. Luwu Utara	6.632.899	5.442.000		108.739.960
354	Kab. Maros	9.088.328			70.178.572
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	8.666.175			39.553.704
356	Kota Palopo	8.945.837			104.680.150
357	Kab. Luwu Timur	12.045.337	4.900.000		103.316.904

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
351	Kab. Jeneponto	650.000	28.849.354	31.000	29.530.354	
352	Kab. Luwu	1.149.999		52.250	1.202.249	13.811.979
353	Kab. Luwu Utara	1.540.000		52.000	1.592.000	
354	Kab. Maros	650.000		44.000	694.000	
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	400.000	1.042.254	53.000	1.495.254	
356	Kota Palopo					
357	Kab. Luwu Timur					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
351	Kab. Jeneponto			2.874.668	3.665.735	6.540.403
352	Kab. Luwu		13.811.979	4.567.532	4.686.705	9.254.237
353	Kab. Luwu Utara	8.168.634	8.168.634		4.890.916	4.890.916
354	Kab. Maros				4.910.248	4.910.248
355	Kab. Pangkajene Kepulauan			1.682.760	5.031.927	6.714.687
356	Kota Palopo				5.418.735	5.418.735
357	Kab. Luwu Timur	11.324.843	11.324.843		3.981.333	3.981.333

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
351	Kab. Jeneponto	5.417.985	2.227.926	7.645.911	1.120.881	8.338.801
352	Kab. Luwu	11.983.694	2.339.115	14.322.809		14.248.132
353	Kab. Luwu Utara		1.959.862	1.959.862		13.875.821
354	Kab. Maros		2.041.289	2.041.289	1.618.767	6.321.410
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	6.727.180	1.399.794	8.126.974		1.653.778
356	Kota Palopo		683.137	683.137	1.396.706	
357	Kab. Luwu Timur		2.241.884	2.241.884		10.104.903

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
351	Kab. Jeneponto	6.965.613	2.600.000		2.502.411	
352	Kab. Luwu	6.210.844	1.668.575			
353	Kab. Luwu Utara	3.720.000	1.567.135			
354	Kab. Maros	2.540.000	1.251.563	2.371.981	3.265.492	4.301.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.595.000	2.221.428		1.999.999	
356	Kota Palopo		315.000			3.920.570
357	Kab. Luwu Timur	2.870.000	1.547.250			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
351	Kab. Jeneponto				65.244.374	153.376.182
352	Kab. Luwu				60.718.825	160.003.633
353	Kab. Luwu Utara				35.774.368	144.514.328
354	Kab. Maros			4.301.000	29.315.750	99.494.322
355	Kab. Pangkajene Kepulauan				24.807.120	64.360.824
356	Kota Palopo			3.920.570	11.734.148	116.414.298
357	Kab. Luwu Timur				32.070.213	135.387.117

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
358	Kab. Pinrang	374.266	5.970.663	2.430.004		
359	Kab. Sinjai	3.705.235	23.133.556	14.030.468		
360	Kab. Kepulauan Selayar	550.089	15.212.491	3.736.905		
361	Kab. Sidenreng Rappang	2.375.397	23.586.827	17.342.977		
362	Kab. Soppeng	2.587.700	28.466.214	24.150.196		
363	Kab. Takalar		17.274.268	11.498.651		
364	Kab. Tana Toraja		14.466.348	1.526.688		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
358	Kab. Pinrang			572.655	9.347.588	7.262.531
359	Kab. Sinjai				40.869.259	17.935.060
360	Kab. Kepulauan Selayar			304.781	19.804.266	26.092.356
361	Kab. Sidenreng Rappang				43.305.201	26.968.139
362	Kab. Soppeng			2.485.604	57.689.714	19.613.910
363	Kab. Takalar	200.000			28.972.919	4.249.700
364	Kab. Tana Toraja			10.000.000	25.993.036	17.002.975

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
358	Kab. Pinrang	25.951.344	4.814.671		1.322.009	39.350.555
359	Kab. Sinjai	5.149.415	3.634.988	46.207.820	1.519.647	74.446.930
360	Kab. Kepulauan Selayar	31.750.680	2.302.392	4.673.857	777.214	65.596.499
361	Kab. Sidenreng Rappang	45.569.328	3.633.607		1.339.773	77.510.847
362	Kab. Soppeng	45.631.278	2.851.884	3.514.188	1.152.755	72.764.015
363	Kab. Takalar	3.782.500	3.235.209	2.409.729	849.388	14.526.526
364	Kab. Tana Toraja	30.778.219	2.553.554	857.462	1.444.915	52.637.125

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
358	Kab. Pinrang	12.745.498			61.443.641
359	Kab. Sinjai	16.295.307			131.611.496
360	Kab. Kepulauan Selayar	11.875.893			97.276.658
361	Kab. Sidenreng Rappang	13.915.451			134.731.499
362	Kab. Soppeng	11.251.562			141.705.291
363	Kab. Takalar	8.669.536			52.168.981
364	Kab. Tana Toraja	14.084.345			92.714.506

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
358	Kab. Pinrang	650.000		50.499	700.499	8.469.439
359	Kab. Sinjai	350.000	35.309.984	56.500	35.716.484	
360	Kab. Kepulauan Selayar			53.000	53.000	
361	Kab. Sidenreng Rappang					8.029.081
362	Kab. Soppeng					
363	Kab. Takalar	650.000		52.000	702.000	
364	Kab. Tana Toraja	2.050.000		43.499	2.093.499	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
358	Kab. Pinrang		8.469.439	1.919.777	1.934.320	3.854.097
359	Kab. Sinjai			1.144.000	3.263.468	4.407.468
360	Kab. Kepulauan Selayar			7.499.133		7.499.133
361	Kab. Sidenreng Rappang		8.029.081		4.571.983	4.571.983
362	Kab. Soppeng				3.782.174	3.782.174
363	Kab. Takalar			4.439.487	2.349.175	6.788.662
364	Kab. Tana Toraja	9.365.627	9.365.627	1.380.946	5.026.890	6.407.836

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
358	Kab. Pinrang	3.000.242	799.882	3.800.124	1.833.033	3.161.600
359	Kab. Sinjai	7.487.877	1.753.576	9.241.453	1.244.622	17.588.693
360	Kab. Kepulauan Selayar	8.409.133		8.409.133	1.622.038	
361	Kab. Sidenreng Rappang		1.672.178	1.672.178	1.149.810	8.774.916
362	Kab. Soppeng		1.770.253	1.770.253		17.167.304
363	Kab. Takalar	4.409.447	1.651.695	6.061.142		2.218.481
364	Kab. Tana Toraja	769.549	1.873.132	2.642.681		2.300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
358	Kab. Pinrang	8.425.000	2.313.000			4.746.050
359	Kab. Sinjai	2.680.000	1.871.150	31.785.796		
360	Kab. Kepulauan Selayar	2.550.000	2.188.800		1.070.120	4.278.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	4.420.000	1.030.100		1.183.999	
362	Kab. Soppeng	6.215.000	1.017.200	1.547.814		
363	Kab. Takalar	4.645.000	2.938.125			2.600.000
364	Kab. Tana Toraja	4.458.704	973.120		3.875.998	1.300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
358	Kab. Pinrang			4.746.050	37.302.842	98.746.483
359	Kab. Sinjai				104.535.666	236.147.162
360	Kab. Kepulauan Selayar			4.278.000	27.670.224	124.946.882
361	Kab. Sidenreng Rappang				30.832.067	165.563.566
362	Kab. Soppeng				31.499.745	173.205.036
363	Kab. Takalar			2.600.000	25.953.410	78.122.391
364	Kab. Tana Toraja			1.300.000	33.417.465	126.131.971

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
365	Kab. Wajo	1.940.944	23.270.701	23.448.129		
366	Kota Pare-pare		1.855.000	5.481.929		
367	Kota Makassar		5.932.051	1.649.189		
368	Kab. Toraja Utara		14.519.647	12.914.032		
369	Provinsi Sulawesi Tenggara				75.274.398	97.832.226
370	Kab. Buton	5.490.040	15.987.745	18.032.107		
371	Kab. Konawe	586.456	24.002.661	11.583.839		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
365	Kab. Wajo	474.000			49.133.774	3.234.580
366	Kota Pare-pare			200.000	7.536.929	2.745.329
367	Kota Makassar			10.000.000	17.581.240	8.463.648
368	Kab. Toraja Utara				27.433.679	6.880.328
369	Provinsi Sulawesi Tenggara		1.896.550	500.000	175.503.174	
370	Kab. Buton			8.481.000	47.990.892	8.460.707
371	Kab. Konawe				36.172.956	15.414.212

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
365	Kab. Wajo	45.492.160	5.581.373		1.110.311	55.418.424
366	Kota Pare-pare	21.082.200	2.986.830	742.999	1.111.320	28.668.678
367	Kota Makassar	26.214.231	10.031.643		868.566	45.578.088
368	Kab. Toraja Utara	3.000.000	3.032.559		545.048	13.457.935
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	24.571.910		2.495.074		27.066.984
370	Kab. Buton	5.720.000	3.340.618	441.783	1.514.061	19.477.169
371	Kab. Konawe	6.721.835	4.570.754	1.248.519	1.453.498	29.408.818

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
365	Kab. Wajo	13.597.605	4.600.000		122.749.803
366	Kota Pare-pare	8.688.401			44.894.008
367	Kota Makassar	6.368.217			69.527.545
368	Kab. Toraja Utara	5.313.498			46.205.112
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	14.107.208		61.243.000	277.920.366
370	Kab. Buton	9.667.450		22.000.000	99.135.511
371	Kab. Konawe	8.166.909	6.500.000		80.248.683

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
365	Kab. Wajo	2.760.000		93.500	2.853.500	9.941.832
366	Kota Pare-pare					
367	Kota Makassar	200.000		44.000	244.000	
368	Kab. Toraja Utara	334.875	13.744.595	44.000	14.123.470	
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.092.438			2.092.438	
370	Kab. Buton		13.081.343	520.874	13.602.217	
371	Kab. Konawe					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
365	Kab. Wajo		9.941.832	1.520.824	3.681.706	5.202.530
366	Kota Pare-pare				3.875.821	3.875.821
367	Kota Makassar				3.056.506	3.056.506
368	Kab. Toraja Utara	6.975.960	6.975.960	5.499.364	4.916.436	10.415.800
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	35.284.745	35.284.745			
370	Kab. Buton			11.667.178	4.363.543	16.030.721
371	Kab. Konawe	10.459.058	10.459.058		2.946.994	2.946.994

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
365	Kab. Wajo	1.131.909	2.049.035	3.180.944	2.009.616	9.500.000
366	Kota Pare-pare		1.620.931	1.620.931	2.728.514	2.725.940
367	Kota Makassar		2.174.680	2.174.680	1.349.281	
368	Kab. Toraja Utara	4.773.112	1.902.286	6.675.398	2.855.734	3.048.991
369	Provinsi Sulawesi Tenggara					14.348.808
370	Kab. Buton	6.156.394	1.366.274	7.522.668		4.780.440
371	Kab. Konawe		1.197.371	1.197.371	1.038.317	11.730.729

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
365	Kab. Wajo	9.359.393	1.510.275	8.250.803		3.933.000
366	Kota Pare-pare	1.630.000	995.000			
367	Kota Makassar		994.000			9.042.187
368	Kab. Toraja Utara	5.160.000	1.178.800		7.378.189	1.300.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	6.369.472	10.746.490		5.299.457	
370	Kab. Buton		2.366.000	6.600.542	4.451.040	
371	Kab. Konawe	2.632.481	1.356.805			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
365	Kab. Wajo			3.933.000	55.741.893	178.491.696
366	Kota Pare-pare				13.576.206	58.470.214
367	Kota Makassar			9.042.187	16.860.654	86.388.199
368	Kab. Toraja Utara			1.300.000	59.112.342	105.317.454
369	Provinsi Sulawesi Tenggara		12.675.710	12.675.710	86.817.120	364.737.486
370	Kab. Buton				55.353.628	154.489.139
371	Kab. Konawe				31.361.755	111.610.438

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
372	Kab. Kolaka	1.577.940	23.529.935	7.552.349		
373	Kab. Muna	2.550.813	24.068.727	30.567.020		
374	Kota Kendari	1.720.832	26.140.321	17.712.686		
375	Kota Bau-Bau		4.138.944	14.011.088		
376	Kab. Konawe Selatan	4.815.064	25.065.553	13.469.869		
377	Kab. Bombana		23.207.918	9.924.170		
378	Kab. Wakatobi	251.969	11.328.088	15.638.186		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
372	Kab. Kolaka			256.727	32.916.951	13.111.954
373	Kab. Muna			700.000	57.886.560	12.224.787
374	Kota Kendari				45.573.839	8.446.284
375	Kota Bau-Bau			496.648	18.646.680	9.542.532
376	Kab. Konawe Selatan				43.350.486	7.065.911
377	Kab. Bombana				33.132.088	15.263.600
378	Kab. Wakatobi	881.760		4.500.000	32.600.003	15.690.035

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
372	Kab. Kolaka	3.000.000	5.173.224	1.606.486	1.488.826	24.380.490
373	Kab. Muna	12.458.000	3.585.898	752.362	1.459.050	30.480.097
374	Kota Kendari	10.881.201	8.216.534	1.706.221	1.403.029	30.653.269
375	Kota Bau-Bau	13.650.000	2.644.861	391.581	1.322.279	27.551.253
376	Kab. Konawe Selatan	4.900.000	5.765.863		1.507.701	19.239.475
377	Kab. Bombana		2.480.546	1.706.891	1.297.045	20.748.082
378	Kab. Wakatobi	13.701.753	2.449.025	546.707	1.488.826	33.876.346

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
372	Kab. Kolaka	13.369.218			70.666.659
373	Kab. Muna	12.060.965	5.300.000	6.700.000	112.427.622
374	Kota Kendari	9.671.903			85.899.011
375	Kota Bau-Bau	6.284.969			52.482.902
376	Kab. Konawe Selatan	10.334.636	5.200.000		78.124.597
377	Kab. Bombana	7.680.501	7.976.429		69.537.100
378	Kab. Wakatobi	14.192.132			80.668.481

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
372	Kab. Kolaka		54.067.800	426.150	54.493.950	
373	Kab. Muna	2.800.000		520.875	3.320.875	
374	Kota Kendari					
375	Kota Bau-Bau					
376	Kab. Konawe Selatan		68.536.143		68.536.143	
377	Kab. Bombana		37.118.164		37.118.164	
378	Kab. Wakatobi	2.499.000		225.000	2.724.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
372	Kab. Kolaka	11.708.116	11.708.116	1.328.495	5.514.357	6.842.852
373	Kab. Muna	8.694.283	8.694.283	6.291.076	4.624.655	10.915.731
374	Kota Kendari				5.163.639	5.163.639
375	Kota Bau-Bau				3.463.532	3.463.532
376	Kab. Konawe Selatan	11.037.212	11.037.212		5.084.393	5.084.393
377	Kab. Bombana	6.953.250	6.953.250		4.804.025	4.804.025
378	Kab. Wakatobi	8.645.438	8.645.438	350.000	3.995.596	4.345.596

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
372	Kab. Kolaka	4.230.322	1.611.162	5.841.484	2.710.889	12.416.871
373	Kab. Muna	29.175.080	1.719.005	30.894.085	1.653.069	8.500.000
374	Kota Kendari		1.549.908	1.549.908	2.000.901	4.100.909
375	Kota Bau-Bau		1.976.540	1.976.540	1.860.511	
376	Kab. Konawe Selatan		1.340.464	1.340.464	734.884	7.460.000
377	Kab. Bombana		1.345.915	1.345.915	2.938.027	5.286.298
378	Kab. Wakatobi	5.254.969		5.254.969		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
372	Kab. Kolaka	2.290.000	1.650.250	1.000.097		
373	Kab. Muna		2.693.104			
374	Kota Kendari		532.900	8.700.797	4.279.400	
375	Kota Bau-Bau		1.155.000	1.200.116	6.538.220	
376	Kab. Konawe Selatan	3.590.000	1.297.500			
377	Kab. Bombana	5.896.480	1.938.000			
378	Kab. Wakatobi	3.045.000	1.219.040		36.650.819	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
372	Kab. Kolaka				98.954.509	169.621.168
373	Kab. Muna				66.671.147	179.098.769
374	Kota Kendari				26.328.454	112.227.465
375	Kota Bau-Bau				16.193.919	68.676.821
376	Kab. Konawe Selatan				99.080.596	177.205.193
377	Kab. Bombana				66.280.159	135.817.259
378	Kab. Wakatobi	4.821.950		4.821.950	66.706.812	147.375.293

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
379	Kab. Kolaka Utara	1.811.031	24.368.592	10.958.478		
380	Kab. Konawe Utara	839.760	24.599.884	6.779.738		
381	Kab. Buton Utara	2.944.710	18.138.190	8.024.164		
382	Kab. Konawe Kepulauan	539.742	15.963.115	10.769.098		
383	Kab. Kolaka Timur	1.176.640	19.769.677	4.903.948		
384	Kab. Muna Barat	234.429	23.412.901	14.444.784		
385	Kab. Buton Tengah	4.965.040	10.038.897	8.893.378		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
379	Kab. Kolaka Utara				37.138.101	14.054.400
380	Kab. Konawe Utara	2.049.200		500.000	34.768.582	9.212.300
381	Kab. Buton Utara	491.800			29.598.864	2.833.440
382	Kab. Konawe Kepulauan			200.000	27.471.955	2.905.267
383	Kab. Kolaka Timur				25.850.265	8.177.500
384	Kab. Muna Barat				38.092.114	5.367.995
385	Kab. Buton Tengah			299.994	24.197.309	7.333.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
379	Kab. Kolaka Utara	13.671.259	3.536.877	3.614.594	1.271.811	36.148.941
380	Kab. Konawe Utara	3.000.000	1.944.502		1.259.698	15.416.500
381	Kab. Buton Utara	3.000.000	3.337.054		1.207.211	10.377.705
382	Kab. Konawe Kepulauan	14.867.250	3.119.092	414.611	1.166.331	22.472.551
383	Kab. Kolaka Timur	4.856.271	3.856.469	200.000	984.139	18.074.379
384	Kab. Muna Barat	14.503.713	4.331.845	200.000	1.668.898	26.072.451
385	Kab. Buton Tengah	9.350.000	2.510.779	376.520	1.298.458	20.868.757

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
379	Kab. Kolaka Utara	9.195.212			82.482.254
380	Kab. Konawe Utara	9.406.891			59.591.973
381	Kab. Buton Utara	11.034.914		11.000.000	62.011.483
382	Kab. Konawe Kepulauan	30.591.612	8.300.200	2.755.000	91.591.318
383	Kab. Kolaka Timur	9.566.288			53.490.932
384	Kab. Muna Barat	12.872.041		4.865.000	81.901.606
385	Kab. Buton Tengah	6.637.753		15.800.000	67.503.819

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
379	Kab. Kolaka Utara					7.393.408
380	Kab. Konawe Utara		3.001.454		3.001.454	
381	Kab. Buton Utara		9.844.727		9.844.727	
382	Kab. Konawe Kepulauan	670.000		277.500	947.500	
383	Kab. Kolaka Timur	1.122.000		44.000	1.166.000	
384	Kab. Muna Barat					
385	Kab. Buton Tengah					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
379	Kab. Kolaka Utara		7.393.408			
380	Kab. Konawe Utara	6.949.276	6.949.276		4.031.937	4.031.937
381	Kab. Buton Utara				4.526.289	4.526.289
382	Kab. Konawe Kepulauan				4.035.151	4.035.151
383	Kab. Kolaka Timur					
384	Kab. Muna Barat				3.606.181	3.606.181
385	Kab. Buton Tengah					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
379	Kab. Kolaka Utara		1.694.139	1.694.139		4.115.646
380	Kab. Konawe Utara		1.673.389	1.673.389		4.988.900
381	Kab. Buton Utara		1.977.915	1.977.915		11.500.000
382	Kab. Konawe Kepulauan		1.938.191	1.938.191	2.811.230	6.021.200
383	Kab. Kolaka Timur	1.145.547		1.145.547		10.607.646
384	Kab. Muna Barat		1.977.614	1.977.614		4.273.000
385	Kab. Buton Tengah		1.576.696	1.576.696		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
379	Kab. Kolaka Utara	3.395.000	1.285.607			8.744.600
380	Kab. Konawe Utara	1.612.516	2.352.500			
381	Kab. Buton Utara	1.596.000	1.643.500			
382	Kab. Konawe Kepulauan		1.247.600	4.900.477		
383	Kab. Kolaka Timur	4.383.750				
384	Kab. Muna Barat	5.586.000	1.549.152			
385	Kab. Buton Tengah	3.995.250	3.234.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
379	Kab. Kolaka Utara			8.744.600	26.628.400	109.110.654
380	Kab. Konawe Utara				24.609.972	84.201.945
381	Kab. Buton Utara				31.088.431	93.099.914
382	Kab. Konawe Kepulauan				21.901.349	113.492.667
383	Kab. Kolaka Timur				17.302.943	70.793.875
384	Kab. Muna Barat				16.991.947	98.893.553
385	Kab. Buton Tengah				8.805.946	76.309.765

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
386	Kab. Buton Selatan	3.810.238	11.954.437	8.635.439		
387	Provinsi Bali				6.921.079	22.993.306
388	Kab. Badung					
389	Kab. Bangli	3.870.010	16.642.545	8.678.656		
390	Kab. Buleleng	4.676.385	18.270.565	17.272.324		
391	Kab. Gianyar	240.000	1.940.820	1.667.250		
392	Kab. Jembrana		21.312.126	9.301.222		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
386	Kab. Buton Selatan				24.400.114	7.351.802
387	Provinsi Bali		1.119.500	500.000	31.533.885	
388	Kab. Badung			223.300	223.300	
389	Kab. Bangli	743.000			29.934.211	2.406.224
390	Kab. Buleleng			499.999	40.719.273	2.000.000
391	Kab. Gianyar				3.848.070	5.223.360
392	Kab. Jembrana				30.613.348	5.026.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
386	Kab. Buton Selatan	5.910.300	2.800.459		1.403.029	17.465.590
387	Provinsi Bali	8.806.300		931.149		9.737.449
388	Kab. Badung	17.986.393	3.751.613		238.010	21.976.016
389	Kab. Bangli	3.000.000	3.094.194	4.601.218	984.058	14.085.694
390	Kab. Buleleng	4.386.026	2.339.753	8.153.592	767.670	17.647.041
391	Kab. Gianyar	21.100.000	3.302.247	552.229	407.484	30.585.320
392	Kab. Jembrana	3.000.000	2.878.921	200.000		11.105.521

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
386	Kab. Buton Selatan	7.146.879			49.012.583
387	Provinsi Bali	9.730.422			51.001.756
388	Kab. Badung	30.408.416			52.607.732
389	Kab. Bangli	32.438.151			76.458.056
390	Kab. Buleleng	31.437.579			89.803.893
391	Kab. Gianyar	7.091.237			41.524.627
392	Kab. Jembrana	10.406.967			52.125.836

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
386	Kab. Buton Selatan	1.521.042	10.122.427	295.875	11.939.344	
387	Provinsi Bali	2.215.512			2.215.512	
388	Kab. Badung	1.409.192		74.999	1.484.191	
389	Kab. Bangli	650.000	11.672.793	177.525	12.500.318	
390	Kab. Buleleng	2.250.000	23.172.112	190.000	25.612.112	
391	Kab. Gianyar	649.708		125.000	774.708	
392	Kab. Jembrana					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
386	Kab. Buton Selatan					
387	Provinsi Bali	32.688.331	32.688.331		30.000.000	30.000.000
388	Kab. Badung					
389	Kab. Bangli	14.325.341	14.325.341		3.741.642	3.741.642
390	Kab. Buleleng	12.188.883	12.188.883	921.140	5.996.873	6.918.013
391	Kab. Gianyar	11.897.811	11.897.811		3.640.936	3.640.936
392	Kab. Jembrana				4.070.876	4.070.876

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
386	Kab. Buton Selatan	2.181.994		2.181.994		
387	Provinsi Bali					11.171.791
388	Kab. Badung		650.000	650.000		2.071.598
389	Kab. Bangli	4.318.530	1.907.676	6.226.206		8.643.650
390	Kab. Buleleng	6.434.523	2.693.362	9.127.885	2.943.238	8.498.850
391	Kab. Gianyar		1.588.202	1.588.202	3.008.554	4.521.971
392	Kab. Jembrana					6.452.103

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
386	Kab. Buton Selatan	2.920.000	1.495.892			
387	Provinsi Bali	1.068.535	5.196.941			
388	Kab. Badung	1.685.371			1.196.325	
389	Kab. Bangli		315.000		1.369.999	
390	Kab. Buleleng	2.404.203	1.132.500		2.146.092	
391	Kab. Gianyar	1.220.000	300.000		1.601.999	5.502.554
392	Kab. Jembrana	3.318.000	1.650.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
386	Kab. Buton Selatan				18.537.230	67.549.813
387	Provinsi Bali		8.836.095	8.836.095	91.177.205	142.178.961
388	Kab. Badung				7.087.485	59.695.217
389	Kab. Bangli				47.122.156	123.580.212
390	Kab. Buleleng				70.971.776	160.775.669
391	Kab. Gianyar			5.502.554	34.056.735	75.581.362
392	Kab. Jembrana				15.490.979	67.616.815

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
393	Kab. Karangasem	2.204.953	4.790.858	8.131.907		
394	Kab. Klungkung	240.000	6.885.268	1.139.154		
395	Kab. Tabanan		20.476.657	6.038.292		
396	Kota Denpasar		2.058.394	1.766.911		
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat				62.891.729	80.188.879
398	Kab. Bima	825.203	26.188.815	11.907.967		
399	Kab. Dompu	1.033.861	10.985.460	6.344.499		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
393	Kab. Karangasem			793.300	15.921.018	5.993.906
394	Kab. Klungkung	218.700			8.483.122	2.000.000
395	Kab. Tabanan				26.514.949	8.416.000
396	Kota Denpasar	2.434.199			6.259.504	2.000.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		6.383.955	500.000	149.964.563	
398	Kab. Bima			8.679.990	47.601.975	8.984.090
399	Kab. Dompu	540.000			18.903.820	14.461.992

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
393	Kab. Karangasem	4.180.064	4.315.989	903.648	675.271	16.068.878
394	Kab. Klungkung	5.361.285	3.224.972		612.185	11.198.442
395	Kab. Tabanan	3.000.000	3.608.223	200.000	656.093	15.880.316
396	Kota Denpasar	16.032.268	4.395.521	200.000	351.262	22.979.051
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	118.522.898		15.484.519		134.007.417
398	Kab. Bima	5.116.093	5.839.437		1.564.529	21.504.149
399	Kab. Dompu	6.873.600	2.930.322		1.490.330	25.756.244

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
393	Kab. Karangasem	37.698.981			69.688.877
394	Kab. Klungkung	6.852.739		8.242.218	34.776.521
395	Kab. Tabanan	29.897.868			72.293.133
396	Kota Denpasar	9.378.557			38.617.112
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	11.099.232			295.071.212
398	Kab. Bima	15.437.940	7.300.000		91.844.064
399	Kab. Dompu	10.589.711	6.510.000		61.759.775

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
393	Kab. Karangasem		8.994.959		8.994.959	
394	Kab. Klungkung					
395	Kab. Tabanan		45.814.813		45.814.813	
396	Kota Denpasar	1.320.000		75.999	1.395.999	
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8.088.118			8.088.118	36.496.034
398	Kab. Bima		67.857.764	520.875	68.378.639	11.101.595
399	Kab. Dompu			377.500	377.500	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
393	Kab. Karangasem				9.866.766	9.866.766
394	Kab. Klungkung	6.729.702	6.729.702		4.525.911	4.525.911
395	Kab. Tabanan				5.820.666	5.820.666
396	Kota Denpasar				3.873.335	3.873.335
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		36.496.034			
398	Kab. Bima		11.101.595	7.754.054	4.427.685	12.181.739
399	Kab. Dompu			1.799.791	4.634.504	6.434.295

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
393	Kab. Karangasem					8.308.018
394	Kab. Klungkung		1.234.818	1.234.818	1.290.131	6.469.968
395	Kab. Tabanan		1.852.888	1.852.888		7.058.405
396	Kota Denpasar		1.693.940	1.693.940		
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat					35.037.210
398	Kab. Bima	4.909.487	2.751.574	7.661.061	2.992.049	5.800.000
399	Kab. Dompu	3.818.490	2.176.854	5.995.344	1.318.586	5.835.999

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
393	Kab. Karangasem	946.139			3.967.498	
394	Kab. Klungkung	2.090.000	767.627		9.403.308	
395	Kab. Tabanan	2.750.000	958.000		1.400.599	
396	Kota Denpasar	752.831	420.000			
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	14.839.452	13.868.800			2.264.500
398	Kab. Bima	7.555.000	2.405.000			
399	Kab. Dompu	6.280.502	2.327.625			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
393	Kab. Karangasem				32.083.380	101.772.257
394	Kab. Klungkung				32.511.465	67.287.986
395	Kab. Tabanan				65.655.371	137.948.504
396	Kota Denpasar				8.136.105	46.753.217
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat		11.989.908	14.254.408	122.584.022	417.655.234
398	Kab. Bima				118.075.083	209.919.147
399	Kab. Dompu				28.569.851	90.329.626

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
400	Kab. Lombok Barat	1.450.459	23.435.785	12.304.193		
401	Kab. Lombok Tengah	704.502	25.196.532	10.760.780		
402	Kab. Lombok Timur	2.449.692	13.912.580	34.678.640		
403	Kab. Sumbawa	1.112.132	19.597.537	4.129.635		
404	Kota Mataram	1.131.637	14.345.727	11.252.367		
405	Kota Bima	3.954.204	9.335.781	3.912.364		
406	Kab. Sumbawa Barat	1.873.437	7.799.283	7.887.116		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
400	Kab. Lombok Barat	1.643.500			38.833.937	3.481.933
401	Kab. Lombok Tengah	600.000			37.261.814	21.660.936
402	Kab. Lombok Timur	748.400		434.000	52.223.312	8.897.249
403	Kab. Sumbawa				24.839.304	23.823.431
404	Kota Mataram				26.729.731	2.000.000
405	Kota Bima			9.941.000	27.143.349	13.661.501
406	Kab. Sumbawa Barat	575.000			18.134.836	18.363.524

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
400	Kab. Lombok Barat	16.450.000	10.317.203	2.078.814	1.503.866	33.831.816
401	Kab. Lombok Tengah		5.744.570	1.619.604	1.501.948	30.527.058
402	Kab. Lombok Timur	3.000.000	7.042.072	451.824	1.438.679	20.829.824
403	Kab. Sumbawa	3.000.000	5.145.729	391.581	1.418.860	33.779.601
404	Kota Mataram	51.751.809	4.301.775		1.479.839	59.533.423
405	Kota Bima	4.700.000	2.953.180	3.012.161	1.505.127	25.831.969
406	Kab. Sumbawa Barat	3.000.000	2.751.993		1.074.232	25.189.749

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
400	Kab. Lombok Barat	8.777.523	13.812.787	5.554.126	100.810.189
401	Kab. Lombok Tengah	12.727.888	10.700.047		91.216.807
402	Kab. Lombok Timur	33.832.188	12.000.080		118.885.404
403	Kab. Sumbawa	9.780.240	11.672.779		80.071.924
404	Kota Mataram	8.845.062			95.108.216
405	Kota Bima	5.936.248			58.911.566
406	Kab. Sumbawa Barat	9.198.629	9.827.351		62.350.565

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
400	Kab. Lombok Barat			208.000	208.000	
401	Kab. Lombok Tengah	1.195.000	63.498.770	301.150	64.994.920	10.743.427
402	Kab. Lombok Timur	200.000	91.653.606	316.000	92.169.606	14.804.450
403	Kab. Sumbawa			349.199	349.199	9.407.194
404	Kota Mataram			415.000	415.000	
405	Kota Bima					
406	Kab. Sumbawa Barat	1.408.092		352.500	1.760.592	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
400	Kab. Lombok Barat	10.743.611	10.743.611	2.157.751	3.797.730	5.955.481
401	Kab. Lombok Tengah		10.743.427	2.530.206	6.780.406	9.310.612
402	Kab. Lombok Timur		14.804.450	6.107.238	4.571.540	10.678.778
403	Kab. Sumbawa		9.407.194	3.726.563	4.157.374	7.883.937
404	Kota Mataram					
405	Kota Bima				4.087.845	4.087.845
406	Kab. Sumbawa Barat	9.298.484	9.298.484	2.584.699	5.692.999	8.277.698

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
400	Kab. Lombok Barat	809.156	3.922.247	4.731.403	2.894.960	24.471.798
401	Kab. Lombok Tengah	5.727.735	3.900.694	9.628.429	1.533.572	11.278.971
402	Kab. Lombok Timur	6.591.441	4.430.793	11.022.234	2.613.035	18.500.000
403	Kab. Sumbawa	4.727.654	2.795.564	7.523.218	2.987.928	21.240.980
404	Kota Mataram	1.072.972		1.072.972	1.087.169	
405	Kota Bima		1.844.456	1.844.456	3.150.595	1.135.440
406	Kab. Sumbawa Barat	2.881.051	1.604.391	4.485.442	2.805.518	12.820.603

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
400	Kab. Lombok Barat	3.650.000	2.905.250	1.468.143	2.920.639	
401	Kab. Lombok Tengah	2.815.000	2.474.836	10.000.974	9.420.996	
402	Kab. Lombok Timur	8.235.000	2.315.211	3.684.360		
403	Kab. Sumbawa	6.143.318	2.160.419	1.650.160		1.300.000
404	Kota Mataram		2.147.000		16.987.083	
405	Kota Bima		1.384.000			
406	Kab. Sumbawa Barat	6.890.000	2.375.893			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
400	Kab. Lombok Barat				59.949.285	160.759.474
401	Kab. Lombok Tengah	7.220.000		7.220.000	139.421.737	230.638.544
402	Kab. Lombok Timur				164.022.674	282.908.078
403	Kab. Sumbawa			1.300.000	60.646.353	140.718.277
404	Kota Mataram				21.709.224	116.817.440
405	Kota Bima				11.602.336	70.513.902
406	Kab. Sumbawa Barat				48.714.230	111.064.795

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
407	Kab. Lombok Utara	404.597	13.064.079	2.283.560		
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur				107.185.025	144.683.985
409	Kab. Alor	588.426	8.523.890	5.422.134		
410	Kab. Belu	626.443	18.526.619	4.092.860		
411	Kab. Ende	351.675	17.648.508	4.523.089		
412	Kab. Flores Timur	1.322.375	18.852.497	9.663.186		
413	Kab. Kupang		13.975.324	2.312.597		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
407	Kab. Lombok Utara			10.000.000	25.752.236	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur		2.479.060	2.494.000	256.842.070	
409	Kab. Alor	211.405		398.500	15.144.355	30.959.200
410	Kab. Belu				23.245.922	2.000.000
411	Kab. Ende			2.017.000	24.540.272	22.543.900
412	Kab. Flores Timur				29.838.058	10.536.700
413	Kab. Kupang			300.000	16.587.921	9.647.354

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
407	Kab. Lombok Utara		4.750.968		1.236.483	5.987.451
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	50.437.491		18.127.970		68.565.461
409	Kab. Alor	60.507.485	6.667.385		1.409.792	99.543.862
410	Kab. Belu	14.478.670	2.650.657		1.364.068	20.493.395
411	Kab. Ende	9.955.840	2.941.458		1.441.101	36.882.299
412	Kab. Flores Timur	20.567.850	5.265.561		1.514.061	37.884.172
413	Kab. Kupang	3.000.000	6.646.431	3.560.985	1.367.701	24.222.471

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
407	Kab. Lombok Utara	8.760.201	12.099.100		52.598.988
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	20.591.860		11.184.000	357.183.391
409	Kab. Alor	13.405.376	8.462.765		136.556.358
410	Kab. Belu	8.366.781	7.665.000		59.771.098
411	Kab. Ende	13.378.551	8.400.000		83.201.122
412	Kab. Flores Timur	11.171.252		3.279.523	82.173.005
413	Kab. Kupang	7.311.565	7.300.000	2.250.000	57.671.957

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
407	Kab. Lombok Utara	200.000	48.061.636	314.000	48.575.636	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	15.761.612			15.761.612	
409	Kab. Alor	1.099.708		350.000	1.449.708	
410	Kab. Belu			349.999	349.999	
411	Kab. Ende			350.000	350.000	
412	Kab. Flores Timur	1.000.000		350.000	1.350.000	
413	Kab. Kupang	1.983.200	24.031.655	350.000	26.364.855	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
407	Kab. Lombok Utara	6.869.796	6.869.796	5.131.931		5.131.931
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	42.627.432	42.627.432			
409	Kab. Alor	10.568.661	10.568.661	1.980.443	3.906.772	5.887.215
410	Kab. Belu	8.710.289	8.710.289	1.893.750	4.298.105	6.191.855
411	Kab. Ende				4.311.124	4.311.124
412	Kab. Flores Timur			17.459.982	2.408.154	19.868.136
413	Kab. Kupang	9.724.387	9.724.387	7.984.875	5.541.401	13.526.276

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
407	Kab. Lombok Utara	6.718.724		6.718.724	1.069.218	6.529.303
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur					29.927.600
409	Kab. Alor	1.591.037	1.595.469	3.186.506	954.893	
410	Kab. Belu	1.909.245	1.561.939	3.471.184	981.504	4.152.291
411	Kab. Ende	4.379.835	1.489.818	5.869.653	1.367.974	4.400.000
412	Kab. Flores Timur	2.727.493	1.551.935	4.279.428		
413	Kab. Kupang	2.856.567	1.688.427	4.544.994	2.451.253	4.991.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
407	Kab. Lombok Utara		1.870.000		4.558.845	
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8.901.075	14.537.000		1.849.999	
409	Kab. Alor	8.485.840	2.112.000			
410	Kab. Belu		1.032.813			
411	Kab. Ende		950.000		13.945.800	
412	Kab. Flores Timur		2.256.000		5.359.498	
413	Kab. Kupang		1.588.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
407	Kab. Lombok Utara				81.323.453	133.922.441
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur		13.770.421	13.770.421	127.375.139	484.558.530
409	Kab. Alor				32.644.823	169.201.181
410	Kab. Belu				24.889.935	84.661.033
411	Kab. Ende				31.194.551	114.395.673
412	Kab. Flores Timur				33.113.062	115.286.067
413	Kab. Kupang				63.191.565	120.863.522

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
414	Kab. Lembata	874.869	5.511.452	3.355.728		
415	Kab. Manggarai		13.750.564	1.672.111		
416	Kab. Ngada	574.840	6.299.692	25.063.024		
417	Kab. Sikka	844.709	8.583.179	6.762.250		
418	Kab. Sumba Barat		21.577.017	2.722.245		
419	Kab. Sumba Timur	267.057	10.794.297	2.715.372		
420	Kab. Timor Tengah Selatan	579.911	18.100.215	10.637.146		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
414	Kab. Lembata				9.742.049	2.000.000
415	Kab. Manggarai				15.422.675	9.240.000
416	Kab. Ngada	769.200			32.706.756	14.628.300
417	Kab. Sikka				16.190.138	21.106.800
418	Kab. Sumba Barat				24.299.262	10.504.800
419	Kab. Sumba Timur			356.570	14.133.296	9.624.400
420	Kab. Timor Tengah Selatan				29.317.272	17.945.509

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
414	Kab. Lembata	20.729.560	6.333.820		1.441.101	30.504.481
415	Kab. Manggarai	32.796.885	5.688.165	391.581	772.877	48.889.508
416	Kab. Ngada	13.259.364	2.298.622	391.581	1.228.685	31.806.552
417	Kab. Sikka	9.902.422	5.356.323	11.695.220	1.580.912	49.641.677
418	Kab. Sumba Barat	34.934.151	4.376.963	3.012.161	1.385.870	54.213.945
419	Kab. Sumba Timur	15.354.546	6.114.153	200.000	1.379.814	32.672.913
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.000.000	7.240.913		1.321.371	29.507.793

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
414	Kab. Lembata	11.874.094	8.754.584	9.424.769	70.299.977
415	Kab. Manggarai	12.805.650	6.000.000		83.117.833
416	Kab. Ngada	13.109.885			77.623.193
417	Kab. Sikka	8.034.362		8.300.000	82.166.177
418	Kab. Sumba Barat	8.641.437	6.800.000		93.954.644
419	Kab. Sumba Timur	13.603.900	5.500.000	10.000.000	75.910.109
420	Kab. Timor Tengah Selatan	15.985.689	6.400.000		81.210.754

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
414	Kab. Lembata			350.000	350.000	
415	Kab. Manggarai	1.517.760		350.000	1.867.760	8.775.608
416	Kab. Ngada	750.000		350.000	1.100.000	
417	Kab. Sikka	2.691.000		349.999	3.040.999	
418	Kab. Sumba Barat	365.000		349.999	714.999	
419	Kab. Sumba Timur			350.000	350.000	
420	Kab. Timor Tengah Selatan	600.000	2.918.739	340.000	3.858.739	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
414	Kab. Lembata	7.629.878	7.629.878	8.359.034	4.534.156	12.893.190
415	Kab. Manggarai		8.775.608	13.286.464	2.299.192	15.585.656
416	Kab. Ngada			5.774.328	5.895.424	11.669.752
417	Kab. Sikka			4.959.718	4.908.975	9.868.693
418	Kab. Sumba Barat	7.260.868	7.260.868	5.789.327	3.740.590	9.529.917
419	Kab. Sumba Timur	10.895.421	10.895.421	2.778.427	4.509.287	7.287.714
420	Kab. Timor Tengah Selatan	10.557.722	10.557.722	9.173.939	5.288.664	14.462.603

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
414	Kab. Lembata	4.617.296		4.617.296	1.054.763	1.940.713
415	Kab. Manggarai	9.014.363	1.890.438	10.904.801	2.645.160	4.600.000
416	Kab. Ngada	6.627.807		6.627.807	1.158.109	4.193.112
417	Kab. Sikka	14.269.642	1.409.418	15.679.060	3.078.154	3.805.673
418	Kab. Sumba Barat	7.955.187	1.544.874	9.500.061	1.250.776	2.035.250
419	Kab. Sumba Timur	1.360.337	1.763.234	3.123.571	1.943.593	3.500.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	954.622	2.112.987	3.067.609	1.361.716	2.260.559

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
414	Kab. Lembata		1.430.000			
415	Kab. Manggarai	2.467.500	1.479.000		1.370.372	
416	Kab. Ngada		1.153.200	6.200.604	540.000	
417	Kab. Sikka		1.700.000		3.852.513	
418	Kab. Sumba Barat		1.169.000			
419	Kab. Sumba Timur	2.120.000	1.821.694	763.856		
420	Kab. Timor Tengah Selatan	4.610.000	1.125.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
414	Kab. Lembata				29.915.840	100.215.817
415	Kab. Manggarai				49.695.857	132.813.690
416	Kab. Ngada				32.642.584	110.265.777
417	Kab. Sikka				41.025.092	123.191.269
418	Kab. Sumba Barat				31.460.871	125.415.515
419	Kab. Sumba Timur				31.805.849	107.715.958
420	Kab. Timor Tengah Selatan				41.303.948	122.514.702

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
421	Kab. Timor Tengah Utara	284.746	4.107.547	2.164.828		
422	Kota Kupang		5.407.590	6.537.473		
423	Kab. Rote Ndao	351.745	2.313.982	3.126.403		
424	Kab. Manggarai Barat	717.637	10.811.738	3.181.272		
425	Kab. Nagekeo		10.448.277	3.367.890		
426	Kab. Sumba Barat Daya	1.345.510	17.982.828	2.546.730		
427	Kab. Sumba Tengah	421.294	10.936.473	1.551.090		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
421	Kab. Timor Tengah Utara				6.557.121	12.802.163
422	Kota Kupang				11.945.063	5.221.584
423	Kab. Rote Ndao				5.792.130	5.703.254
424	Kab. Manggarai Barat	527.270			15.237.917	13.076.404
425	Kab. Nagekeo			10.000.000	23.816.167	12.606.387
426	Kab. Sumba Barat Daya				21.875.068	18.373.536
427	Kab. Sumba Tengah			200.000	13.108.857	8.467.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
421	Kab. Timor Tengah Utara	5.010.150	5.559.200	250.914	1.459.270	25.081.697
422	Kota Kupang	41.567.180	5.865.133	391.581	1.489.836	54.535.314
423	Kab. Rote Ndao	18.091.027	6.600.448		1.476.714	31.871.443
424	Kab. Manggarai Barat	8.203.110	4.580.498		1.317.031	27.177.043
425	Kab. Nagekeo	14.887.934	1.617.711		1.383.851	30.495.883
426	Kab. Sumba Barat Daya		7.026.140		1.514.061	26.913.737
427	Kab. Sumba Tengah	12.200.000	2.467.388		1.441.101	24.575.889

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
421	Kab. Timor Tengah Utara	12.093.629	7.626.216		51.358.663
422	Kota Kupang	10.343.827			76.824.204
423	Kab. Rote Ndao	10.511.785	12.799.999		60.975.357
424	Kab. Manggarai Barat	12.491.421	7.000.000		61.906.381
425	Kab. Nagekeo	9.186.624	6.030.936	8.400.000	77.929.610
426	Kab. Sumba Barat Daya	10.665.802	6.300.000		65.754.607
427	Kab. Sumba Tengah	9.999.131	6.700.000		54.383.877

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
421	Kab. Timor Tengah Utara			350.000	350.000	
422	Kota Kupang					
423	Kab. Rote Ndao	715.000		520.875	1.235.875	
424	Kab. Manggarai Barat			350.000	350.000	9.435.427
425	Kab. Nagekeo	445.854		350.000	795.854	
426	Kab. Sumba Barat Daya		31.902.678	170.000	32.072.678	
427	Kab. Sumba Tengah	1.450.000		350.000	1.800.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
421	Kab. Timor Tengah Utara	9.940.134	9.940.134		5.000.000	5.000.000
422	Kota Kupang				1.936.668	1.936.668
423	Kab. Rote Ndao	8.989.438	8.989.438		1.799.368	1.799.368
424	Kab. Manggarai Barat		9.435.427		3.371.982	3.371.982
425	Kab. Nagekeo				4.575.197	4.575.197
426	Kab. Sumba Barat Daya	6.597.992	6.597.992	8.059.542	2.130.335	10.189.877
427	Kab. Sumba Tengah	7.439.376	7.439.376		4.336.054	4.336.054

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
421	Kab. Timor Tengah Utara	1.431.362	1.484.315	2.915.677	3.103.030	4.250.000
422	Kota Kupang		1.503.509	1.503.509	2.933.115	1.750.000
423	Kab. Rote Ndao	1.336.471	1.698.420	3.034.891	1.537.871	4.934.999
424	Kab. Manggarai Barat	5.417.627		5.417.627	1.359.178	6.798.253
425	Kab. Nagekeo	3.909.406	1.336.030	5.245.436	993.764	5.148.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	8.937.084	500.000	9.437.084	1.782.460	6.085.004
427	Kab. Sumba Tengah	2.227.452	1.274.752	3.502.204	3.258.334	2.201.385

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
421	Kab. Timor Tengah Utara		331.350	500.048		
422	Kota Kupang		1.197.250	3.187.661		
423	Kab. Rote Ndao		1.293.000	7.459.976		
424	Kab. Manggarai Barat	2.050.000	1.052.100		2.131.091	
425	Kab. Nagekeo	2.685.000	512.570	1.700.165	1.000.232	
426	Kab. Sumba Barat Daya	4.623.841	1.280.000	6.350.618		
427	Kab. Sumba Tengah	2.268.208	1.140.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
421	Kab. Timor Tengah Utara				26.390.239	77.748.902
422	Kota Kupang				12.508.203	89.332.407
423	Kab. Rote Ndao				30.285.418	91.260.775
424	Kab. Manggarai Barat	5.048.500		5.048.500	37.014.158	98.920.539
425	Kab. Nagekeo				22.656.218	100.585.828
426	Kab. Sumba Barat Daya				78.419.554	144.174.161
427	Kab. Sumba Tengah				25.945.561	80.329.438

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
428	Kab. Manggarai Timur	557.635	15.642.757	5.653.690		
429	Kab. Sabu Raijua		7.421.231	2.917.155		
430	Kab. Malaka		12.451.865	10.769.081		
431	Provinsi Maluku				77.168.001	94.972.792
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	683.899	13.529.369	8.967.018		
433	Kab. Maluku Tengah		17.246.744	11.770.626		
434	Kab. Maluku Tenggara	1.954.716	20.431.926	16.442.936		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
428	Kab. Manggarai Timur				21.854.082	21.844.000
429	Kab. Sabu Raijua				10.338.386	2.353.819
430	Kab. Malaka				23.220.946	9.502.612
431	Provinsi Maluku		1.880.635	798.729	174.820.157	
432	Kab. Kepulauan Tanimbar				23.180.286	17.121.597
433	Kab. Maluku Tengah			4.365.193	33.382.563	14.837.256
434	Kab. Maluku Tenggara				38.829.578	15.216.958

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
428	Kab. Manggarai Timur		8.548.124	45.182.426	1.332.373	76.906.923
429	Kab. Sabu Raijua	12.341.126	3.705.920	228.834	462.005	19.091.704
430	Kab. Malaka	49.178.237	4.702.464		1.198.453	64.581.766
431	Provinsi Maluku	61.669.113		11.534.069		73.203.182
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	32.370.000	4.274.186		1.397.377	55.163.160
433	Kab. Maluku Tengah	40.540.000	1.803.115	45.182.426	1.407.572	103.770.369
434	Kab. Maluku Tenggara		3.799.384	351.418	1.262.726	20.630.486

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
428	Kab. Manggarai Timur	13.353.035	6.700.000		118.814.040
429	Kab. Sabu Raijua	9.460.411	9.300.000		48.190.501
430	Kab. Malaka	5.187.218	7.700.000		100.689.930
431	Provinsi Maluku	14.573.913			262.597.252
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	12.440.230	7.684.579	14.486.072	112.954.327
433	Kab. Maluku Tengah	11.342.263	7.300.000	11.346.220	167.141.415
434	Kab. Maluku Tenggara	18.003.083	8.700.000		86.163.147

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
428	Kab. Manggarai Timur	625.000		396.999	1.021.999	11.113.174
429	Kab. Sabu Raijua	1.521.603		350.000	1.871.603	
430	Kab. Malaka	825.620		350.000	1.175.620	
431	Provinsi Maluku	10.620.058			10.620.058	
432	Kab. Kepulauan Tanimbar		58.655.913		58.655.913	
433	Kab. Maluku Tengah		31.070.761	300.000	31.370.761	
434	Kab. Maluku Tenggara	1.625.000	20.327.196	280.000	22.232.196	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
428	Kab. Manggarai Timur		11.113.174	7.194.163	4.966.924	12.161.087
429	Kab. Sabu Raijua	8.407.285	8.407.285	2.164.956	2.324.001	4.488.957
430	Kab. Malaka	9.309.163	9.309.163	4.054.469	3.548.227	7.602.696
431	Provinsi Maluku	29.841.552	29.841.552			
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	10.001.333	10.001.333		5.574.355	5.574.355
433	Kab. Maluku Tengah	14.534.903	14.534.903	6.649.231	4.678.594	11.327.825
434	Kab. Maluku Tenggara	9.745.993	9.745.993	2.257.239	5.505.017	7.762.256

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
428	Kab. Manggarai Timur	5.345.886	1.898.720	7.244.606	1.715.291	7.986.879
429	Kab. Sabu Raijua	1.309.197	420.000	1.729.197	1.352.790	
430	Kab. Malaka	3.182.075	1.296.506	4.478.581	981.386	3.799.388
431	Provinsi Maluku					60.107.030
432	Kab. Kepulauan Tanimbar		1.789.806	1.789.806	1.675.791	6.968.097
433	Kab. Maluku Tengah	5.091.320	2.500.442	7.591.762	2.866.210	2.500.000
434	Kab. Maluku Tenggara	3.341.179	1.867.336	5.208.515	3.104.229	883.230

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
428	Kab. Manggarai Timur	2.016.000	1.092.000	3.000.292	5.149.578	
429	Kab. Sabu Raijua	2.670.000	1.012.500	2.200.214		
430	Kab. Malaka	2.400.000	834.690			
431	Provinsi Maluku		21.008.522			
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	5.013.750	2.980.000			1.017.750
433	Kab. Maluku Tengah		2.603.884			
434	Kab. Maluku Tenggara		2.815.672			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
428	Kab. Manggarai Timur				52.500.906	171.314.946
429	Kab. Sabu Raijua				23.732.546	71.923.047
430	Kab. Malaka				30.581.524	131.271.454
431	Provinsi Maluku		9.147.254	9.147.254	130.724.416	393.321.668
432	Kab. Kepulauan Tanimbar			1.017.750	93.676.795	206.631.122
433	Kab. Maluku Tengah				72.795.345	239.936.760
434	Kab. Maluku Tenggara				51.752.091	137.915.238

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
435	Kab. Buru	764.713	15.692.990	7.207.595		
436	Kota Ambon		24.524.042	1.783.704		
437	Kab. Seram Bagian Barat	2.018.327	26.437.342	15.175.386		
438	Kab. Seram Bagian Timur	904.731	12.872.324	9.712.264		
439	Kab. Kepulauan Aru	531.033	10.939.953	2.247.777		
440	Kota Tual	489.323	19.953.295	17.926.816		
441	Kab. Maluku Barat Daya		17.387.183	9.492.227		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
435	Kab. Buru			500.000	24.165.298	12.232.200
436	Kota Ambon				26.307.746	14.232.016
437	Kab. Seram Bagian Barat				43.631.055	15.845.620
438	Kab. Seram Bagian Timur				23.489.319	14.759.023
439	Kab. Kepulauan Aru				13.718.763	8.105.301
440	Kota Tual				38.369.434	20.853.692
441	Kab. Maluku Barat Daya			500.000	27.379.410	16.131.222

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
435	Kab. Buru	3.000.000	4.171.189	391.427	1.303.202	21.098.018
436	Kota Ambon		5.761.830	4.016.215	1.347.009	25.357.070
437	Kab. Seram Bagian Barat	6.900.000	3.260.324	200.000	1.248.090	27.454.034
438	Kab. Seram Bagian Timur	10.793.052	5.375.688		1.564.529	32.492.292
439	Kab. Kepulauan Aru	3.000.000	5.137.621	975.099	802.452	18.020.473
440	Kota Tual	49.539.858	1.701.334	2.399.688	1.346.202	75.840.774
441	Kab. Maluku Barat Daya	3.000.000	5.834.404	702.837	1.223.411	26.891.874

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
435	Kab. Buru	22.909.847	10.400.000	3.500.000	82.073.163
436	Kota Ambon	27.786.306			79.451.122
437	Kab. Seram Bagian Barat	31.366.688	9.921.862	2.094.057	114.467.696
438	Kab. Seram Bagian Timur	30.575.312	10.500.000		97.056.923
439	Kab. Kepulauan Aru	8.094.347	2.918.195	3.700.000	46.451.778
440	Kota Tual	30.093.997		25.650.000	169.954.205
441	Kab. Maluku Barat Daya	13.086.941	9.600.000	16.234.998	93.193.223

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
435	Kab. Buru		41.935.092		41.935.092	
436	Kota Ambon	2.150.000		380.000	2.530.000	
437	Kab. Seram Bagian Barat	361.000		300.000	661.000	
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.950.000	18.265.571	310.000	20.525.571	
439	Kab. Kepulauan Aru	3.562.500		309.000	3.871.500	
440	Kota Tual					
441	Kab. Maluku Barat Daya	742.244	56.477.546	198.000	57.417.790	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
435	Kab. Buru				4.696.653	4.696.653
436	Kota Ambon				7.267.717	7.267.717
437	Kab. Seram Bagian Barat	13.170.920	13.170.920	3.569.585	650.000	4.219.585
438	Kab. Seram Bagian Timur	12.988.304	12.988.304		6.325.187	6.325.187
439	Kab. Kepulauan Aru	9.002.742	9.002.742	326.136	6.406.943	6.733.079
440	Kota Tual				5.110.105	5.110.105
441	Kab. Maluku Barat Daya	10.047.240	10.047.240	13.717.958	9.402.005	23.119.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
435	Kab. Buru		2.141.786	2.141.786	1.849.828	4.728.830
436	Kota Ambon	2.454.743	1.499.779	3.954.522	3.191.893	
437	Kab. Seram Bagian Barat	1.963.795	2.323.073	4.286.868	2.123.281	5.685.000
438	Kab. Seram Bagian Timur		1.752.928	1.752.928	1.091.023	2.785.000
439	Kab. Kepulauan Aru	500.000		500.000	1.607.482	
440	Kota Tual		5.812.649	5.812.649	30.102.325	
441	Kab. Maluku Barat Daya	3.669.153	250.000	3.919.153	1.373.779	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
435	Kab. Buru		2.503.512			
436	Kota Ambon		900.000	5.500.535		
437	Kab. Seram Bagian Barat		2.518.000	18.851.836		
438	Kab. Seram Bagian Timur		2.932.700			
439	Kab. Kepulauan Aru	2.964.698	2.470.880			
440	Kota Tual		2.690.000	1.700.165		
441	Kab. Maluku Barat Daya	4.580.128	3.165.000			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
435	Kab. Buru				57.855.701	139.928.864
436	Kota Ambon				23.344.667	102.795.789
437	Kab. Seram Bagian Barat				51.516.490	165.984.186
438	Kab. Seram Bagian Timur				48.400.713	145.457.636
439	Kab. Kepulauan Aru				27.150.381	73.602.159
440	Kota Tual				45.415.244	215.369.449
441	Kab. Maluku Barat Daya				103.623.053	196.816.276

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
442	Kab. Buru Selatan	7.007.991	10.917.941	7.371.211		
443	Provinsi Papua				49.459.359	95.461.742
444	Kab. Biak Numfor		10.869.221	3.315.985		
445	Kab. Jayapura	276.403	7.708.395	4.786.782		
446	Kab. Jayawijaya		17.158.626	2.138.605		
447	Kab. Merauke		13.516.520	2.568.930		
448	Kab. Mimika	2.070.200	10.008.166	10.296.876		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
442	Kab. Buru Selatan	965.000			26.262.143	20.444.700
443	Provinsi Papua		1.095.700	500.000	146.516.801	
444	Kab. Biak Numfor	2.215.900			16.401.106	33.108.950
445	Kab. Jayapura			500.000	13.271.580	21.441.640
446	Kab. Jayawijaya			700.000	19.997.231	12.414.737
447	Kab. Merauke				16.085.450	22.634.975
448	Kab. Mimika			300.000	22.675.242	25.862.684

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
442	Kab. Buru Selatan	3.000.000	4.362.048	391.581	1.507.601	29.705.930
443	Provinsi Papua	121.505.180				121.505.180
444	Kab. Biak Numfor	53.850.000	4.552.689		1.498.112	93.009.751
445	Kab. Jayapura	3.000.000	2.890.500	843.405	580.390	28.755.935
446	Kab. Jayawijaya	65.000.000	6.455.214		1.110.311	84.980.262
447	Kab. Merauke	3.000.000	2.871.493	391.581	911.262	29.809.311
448	Kab. Mimika		3.795.390		1.488.826	31.146.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
442	Kab. Buru Selatan	10.958.202	6.420.028		73.346.303
443	Provinsi Papua	21.299.820			289.321.801
444	Kab. Biak Numfor	21.125.000	8.200.000	4.293.700	143.029.557
445	Kab. Jayapura	10.013.991	5.700.000		57.741.506
446	Kab. Jayawijaya	34.038.670	7.245.000		146.261.163
447	Kab. Merauke	6.049.006	12.353.691		64.297.458
448	Kab. Mimika	7.543.252	2.237.283		63.602.677

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
442	Kab. Buru Selatan		31.840.734		31.840.734	
443	Provinsi Papua	29.315.229			29.315.229	
444	Kab. Biak Numfor	2.275.000		391.875	2.666.875	
445	Kab. Jayapura			340.150	340.150	
446	Kab. Jayawijaya			300.700	300.700	
447	Kab. Merauke	500.000		264.000	764.000	
448	Kab. Mimika		75.662.592	378.150	76.040.742	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
442	Kab. Buru Selatan	7.085.929	7.085.929		3.283.731	3.283.731
443	Provinsi Papua	62.324.424	62.324.424			
444	Kab. Biak Numfor	16.835.130	16.835.130	900.000	3.487.588	4.387.588
445	Kab. Jayapura				4.313.173	4.313.173
446	Kab. Jayawijaya	16.706.032	16.706.032		5.998.610	5.998.610
447	Kab. Merauke	10.810.222	10.810.222		4.772.788	4.772.788
448	Kab. Mimika	22.390.472	22.390.472		3.950.902	3.950.902

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
442	Kab. Buru Selatan		1.761.018	1.761.018	1.332.869	
443	Provinsi Papua					10.046.520
444	Kab. Biak Numfor	2.550.506	1.843.973	4.394.479	5.608.291	
445	Kab. Jayapura		1.713.515	1.713.515	6.332.678	2.841.871
446	Kab. Jayawijaya	8.509.777	3.491.619	12.001.396	1.257.985	4.154.323
447	Kab. Merauke		1.545.126	1.545.126	6.778.097	9.749.065
448	Kab. Mimika		850.000	850.000	1.154.598	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
442	Kab. Buru Selatan	2.930.000	2.375.000			
443	Provinsi Papua	9.597.384	21.288.199			
444	Kab. Biak Numfor	5.145.000	6.422.000	2.000.194	11.966.253	7.862.550
445	Kab. Jayapura		3.905.282	7.500.730	2.408.232	5.639.600
446	Kab. Jayawijaya		2.795.000			
447	Kab. Merauke	4.560.000	1.178.657		2.213.083	8.490.450
448	Kab. Mimika		3.523.750			8.399.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
442	Kab. Buru Selatan				50.609.281	123.955.584
443	Provinsi Papua		975.343	975.343	133.547.099	422.868.900
444	Kab. Biak Numfor			7.862.550	67.288.360	210.317.917
445	Kab. Jayapura			5.639.600	34.995.231	92.736.737
446	Kab. Jayawijaya				43.214.046	189.475.209
447	Kab. Merauke			8.490.450	50.861.488	115.158.946
448	Kab. Mimika			8.399.460	116.309.924	179.912.601

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
449	Kab. Nabire		28.244.550	5.179.148		
450	Kab. Paniai	1.028.547	14.562.317	10.278.741		
451	Kab. Puncak Jaya		9.451.466	3.348.405		
452	Kab. Kepulauan Yapen		9.843.398	4.125.047		
453	Kota Jayapura		24.396.683	24.404.443		
454	Kab. Sarmi		11.406.437	11.439.501		
455	Kab. Keerom	407.214	4.331.746	2.486.629		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
449	Kab. Nabire				33.423.698	22.826.522
450	Kab. Paniai			500.000	26.369.605	49.399.633
451	Kab. Puncak Jaya				12.799.871	34.052.893
452	Kab. Kepulauan Yapen				13.968.445	19.048.143
453	Kota Jayapura				48.801.126	19.709.905
454	Kab. Sarmi				22.845.938	14.316.587
455	Kab. Keerom			500.000	7.725.589	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
449	Kab. Nabire	19.126.952	4.469.209		469.358	46.892.041
450	Kab. Paniai	51.240.338	5.253.041		1.110.311	107.003.323
451	Kab. Puncak Jaya	3.000.000	3.224.162		1.564.529	41.841.584
452	Kab. Kepulauan Yapen	13.785.125	2.715.981	391.581	1.009.374	36.950.204
453	Kota Jayapura		5.518.349		354.794	25.583.048
454	Kab. Sarmi		2.244.838	200.000	1.236.483	17.997.908
455	Kab. Keerom	20.950.000	5.486.506	582.122	1.358.213	28.376.841

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
449	Kab. Nabire	10.557.428	11.186.413		102.059.580
450	Kab. Paniai	6.706.122	11.380.959		151.460.009
451	Kab. Puncak Jaya	13.128.929	9.046.404		76.816.788
452	Kab. Kepulauan Yapen	9.755.648	7.500.000	2.352.000	70.526.297
453	Kota Jayapura	6.072.240	5.900.000		86.356.414
454	Kab. Sarmi	10.460.226	7.600.000		58.904.072
455	Kab. Keerom	9.484.907	12.500.000		58.087.337

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
449	Kab. Nabire	850.000		516.150	1.366.150	
450	Kab. Paniai	650.000		264.000	914.000	
451	Kab. Puncak Jaya			124.000	124.000	
452	Kab. Kepulauan Yapen			363.874	363.874	
453	Kota Jayapura	1.050.000		332.700	1.382.700	
454	Kab. Sarmi	1.450.000		96.000	1.546.000	
455	Kab. Keerom			224.000	224.000	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
449	Kab. Nabire	9.319.066	9.319.066	19.681.408		19.681.408
450	Kab. Paniai	7.708.772	7.708.772		3.224.479	3.224.479
451	Kab. Puncak Jaya	11.075.435	11.075.435		4.866.041	4.866.041
452	Kab. Kepulauan Yapen			2.499.709	5.165.639	7.665.348
453	Kota Jayapura	11.027.305	11.027.305		5.872.936	5.872.936
454	Kab. Sarmi	7.296.372	7.296.372			
455	Kab. Keerom	11.434.354	11.434.354		4.558.557	4.558.557

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
449	Kab. Nabire	2.440.570	950.000	3.390.570	3.694.620	13.005.885
450	Kab. Paniai		2.330.909	2.330.909	5.891.458	
451	Kab. Puncak Jaya		2.528.040	2.528.040	1.577.057	
452	Kab. Kepulauan Yapen		1.001.304	1.001.304	4.557.040	
453	Kota Jayapura		2.374.639	2.374.639	14.131.660	
454	Kab. Sarmi				4.040.400	
455	Kab. Keerom	810.000	1.785.010	2.595.010	4.660.595	2.881.790

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
449	Kab. Nabire		999.250	5.500.535		
450	Kab. Paniai		5.492.500	1.000.097		
451	Kab. Puncak Jaya		3.743.250			
452	Kab. Kepulauan Yapen		2.504.643			
453	Kota Jayapura		3.804.896		21.463.073	9.157.450
454	Kab. Sarmi		1.925.000	7.500.730		
455	Kab. Keerom	3.820.000	2.604.250			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
449	Kab. Nabire				56.957.484	159.017.064
450	Kab. Paniai				26.562.215	178.022.224
451	Kab. Puncak Jaya				23.913.823	100.730.611
452	Kab. Kepulauan Yapen				16.092.209	86.618.506
453	Kota Jayapura			9.157.450	69.214.659	155.571.073
454	Kab. Sarmi				22.308.502	81.212.574
455	Kab. Keerom				32.778.556	90.865.893

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
456	Kab. Yahukimo		13.656.967	1.935.192		
457	Kab. Pegunungan Bintang	1.788.968	24.038.508	6.786.458		
458	Kab. Tolikara	1.478.250	15.247.296	8.424.911		
459	Kab. Boven Digoel		3.144.749	4.504.532		
460	Kab. Mappi		14.543.986	7.760.828		
461	Kab. Asmat	808.581	14.341.076	3.517.857		
462	Kab. Waropen		5.523.028	2.935.970		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
456	Kab. Yahukimo				15.592.159	36.479.972
457	Kab. Pegunungan Bintang				32.613.934	21.441.875
458	Kab. Tolikara			6.595.600	31.746.057	18.729.589
459	Kab. Boven Digoel				7.649.281	4.312.000
460	Kab. Mappi			200.000	22.504.814	32.182.445
461	Kab. Asmat				18.667.514	13.788.635
462	Kab. Waropen				8.458.998	8.574.662

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
456	Kab. Yahukimo	37.115.521	3.900.734		1.319.756	78.815.983
457	Kab. Pegunungan Bintang	16.483.838	4.661.094		985.956	43.572.763
458	Kab. Tolikara	5.000.000	5.453.934		1.110.311	30.293.834
459	Kab. Boven Digoel	6.109.987	4.747.350	200.000	784.081	16.153.418
460	Kab. Mappi		5.589.972		1.443.404	39.215.821
461	Kab. Asmat	3.000.000	5.499.353		1.261.717	23.549.705
462	Kab. Waropen	4.800.000	6.841.983	291.299	1.104.860	21.612.804

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
456	Kab. Yahukimo	7.974.605	8.085.000		110.467.747
457	Kab. Pegunungan Bintang	10.610.833	9.921.862		96.719.392
458	Kab. Tolikara	14.501.212	8.610.000		85.151.103
459	Kab. Boven Digoel		11.000.000		34.802.699
460	Kab. Mappi	13.388.769	9.135.000		84.244.404
461	Kab. Asmat	23.588.761	7.704.034		73.510.014
462	Kab. Waropen	7.644.662	9.870.000		47.586.464

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
456	Kab. Yahukimo			204.000	204.000	
457	Kab. Pegunungan Bintang	650.000		222.000	872.000	
458	Kab. Tolikara			300.700	300.700	
459	Kab. Boven Digoel			125.000	125.000	
460	Kab. Mappi	2.353.472	86.615.096	185.000	89.153.568	
461	Kab. Asmat		23.233.975	286.000	23.519.975	
462	Kab. Waropen	2.850.000		476.700	3.326.700	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
456	Kab. Yahukimo	7.938.912	7.938.912		5.622.059	5.622.059
457	Kab. Pegunungan Bintang	11.615.667	11.615.667		4.372.993	4.372.993
458	Kab. Tolikara	10.845.895	10.845.895	5.879.320	5.691.889	11.571.209
459	Kab. Boven Digoel	5.177.954	5.177.954	1.400.158	1.419.724	2.819.882
460	Kab. Mappi	9.100.976	9.100.976		4.503.318	4.503.318
461	Kab. Asmat	12.273.028	12.273.028		4.052.181	4.052.181
462	Kab. Waropen	7.067.274	7.067.274		3.816.441	3.816.441

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
456	Kab. Yahukimo		2.454.774	2.454.774	1.748.570	
457	Kab. Pegunungan Bintang		1.612.554	1.612.554	1.337.258	5.655.635
458	Kab. Tolikara	700.000	2.509.750	3.209.750	7.351.541	
459	Kab. Boven Digoel	2.550.506		2.550.506	6.746.823	
460	Kab. Mappi		1.829.576	1.829.576	1.175.514	5.548.966
461	Kab. Asmat		2.166.837	2.166.837	5.306.902	
462	Kab. Waropen				4.557.191	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
456	Kab. Yahukimo	3.806.250	3.361.250			
457	Kab. Pegunungan Bintang		4.287.063			
458	Kab. Tolikara	5.600.000	5.015.250	6.850.852		
459	Kab. Boven Digoel		1.122.250			
460	Kab. Mappi		2.233.000			
461	Kab. Asmat		1.453.100			
462	Kab. Waropen	4.777.500	1.848.400			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
456	Kab. Yahukimo				25.135.815	135.603.562
457	Kab. Pegunungan Bintang				29.753.170	126.472.562
458	Kab. Tolikara				50.745.197	135.896.300
459	Kab. Boven Digoel				18.542.415	53.345.114
460	Kab. Mappi				113.544.918	197.789.322
461	Kab. Asmat				48.772.023	122.282.037
462	Kab. Waropen				25.393.506	72.979.970

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
463	Kab. Supiori	278.898	7.233.537	5.321.744		
464	Kab. Mamberamo Raya		3.997.922	2.313.814		
465	Kab. Mamberamo Tengah		16.027.118	1.830.565		
466	Kab. Yalimo		15.097.657	1.359.163		
467	Kab. Lanny Jaya	2.662.811	16.846.868	12.402.690		
468	Kab. Nduga	773.628	7.532.850	4.609.465		
469	Kab. Dogiyai		16.392.821	1.090.243		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
463	Kab. Supiori				12.834.179	2.000.000
464	Kab. Mamberamo Raya				6.311.736	25.797.114
465	Kab. Mamberamo Tengah				17.857.683	6.396.048
466	Kab. Yalimo				16.456.820	
467	Kab. Lanny Jaya				31.912.369	11.021.656
468	Kab. Nduga			200.000	13.115.943	2.134.300
469	Kab. Dogiyai			500.000	17.983.064	20.305.733

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
463	Kab. Supiori	3.574.104	1.708.433		641.961	7.924.498
464	Kab. Mamberamo Raya	3.500.000	4.875.070		1.324.803	35.496.987
465	Kab. Mamberamo Tengah	11.447.770	3.262.363		1.108.797	22.214.978
466	Kab. Yalimo		4.023.944		1.110.311	5.134.255
467	Kab. Lanny Jaya	6.185.220	6.733.035		1.029.561	24.969.472
468	Kab. Nduga		6.684.603		1.488.826	10.307.729
469	Kab. Dogiyai	14.390.000	5.858.265	351.280	1.261.717	42.166.995

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
463	Kab. Supiori	4.831.433	13.226.717		38.816.827
464	Kab. Mamberamo Raya		8.365.492		50.174.215
465	Kab. Mamberamo Tengah	12.009.640	10.200.000		62.282.301
466	Kab. Yalimo	8.362.032	7.600.000		37.553.107
467	Kab. Lanny Jaya	8.606.475	8.400.000		73.888.316
468	Kab. Nduga		9.612.500		33.036.172
469	Kab. Dogiyai	32.545.386	8.600.000		101.295.445

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
463	Kab. Supiori	1.465.000		397.874	1.862.874	
464	Kab. Mamberamo Raya			204.000	204.000	
465	Kab. Mamberamo Tengah			286.000	286.000	
466	Kab. Yalimo	889.625		264.000	1.153.625	
467	Kab. Lanny Jaya			35.000	35.000	
468	Kab. Nduga			340.149	340.149	
469	Kab. Dogiyai	1.500.000		300.700	1.800.700	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
463	Kab. Supiori	7.344.221	7.344.221	5.313.984		5.313.984
464	Kab. Mamberamo Raya	3.078.043	3.078.043	2.900.000	3.318.391	6.218.391
465	Kab. Mamberamo Tengah	10.069.984	10.069.984		4.767.611	4.767.611
466	Kab. Yalimo	8.958.511	8.958.511	4.895.431	4.916.601	9.812.032
467	Kab. Lanny Jaya	8.629.546	8.629.546		6.318.436	6.318.436
468	Kab. Nduga	2.818.201	2.818.201		4.404.475	4.404.475
469	Kab. Dogiyai	14.853.365	14.853.365	6.249.373	4.460.082	10.709.455

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
463	Kab. Supiori	703.588		703.588	4.898.869	
464	Kab. Mamberamo Raya		865.463	865.463	1.042.731	9.983.599
465	Kab. Mamberamo Tengah		1.682.134	1.682.134	1.586.788	
466	Kab. Yalimo	4.227.614	1.691.550	5.919.164	1.363.391	
467	Kab. Lanny Jaya		1.177.030	1.177.030	6.688.636	
468	Kab. Nduga		1.994.908	1.994.908	18.141.419	
469	Kab. Dogiyai	2.672.943	2.057.505	4.730.448	3.025.265	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
463	Kab. Supiori		3.700.500			
464	Kab. Mamberamo Raya		2.672.310			
465	Kab. Mamberamo Tengah					
466	Kab. Yalimo		1.601.956			
467	Kab. Lanny Jaya		2.085.500			
468	Kab. Nduga		3.850.750			
469	Kab. Dogiyai		2.793.313			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
463	Kab. Supiori				23.824.036	62.640.863
464	Kab. Mamberamo Raya				24.064.537	74.238.752
465	Kab. Mamberamo Tengah				18.392.517	80.674.818
466	Kab. Yalimo				28.808.679	66.361.786
467	Kab. Lanny Jaya				24.934.148	98.822.464
468	Kab. Nduga				31.549.902	64.586.074
469	Kab. Dogiyai				37.912.546	139.207.991

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
470	Kab. Puncak	2.398.148	11.407.556	5.704.509		
471	Kab. Intan Jaya		3.977.393	5.558.821		
472	Kab. Deiyai		15.334.138	2.377.840		
473	Provinsi Maluku Utara				79.516.349	85.348.345
474	Kab. Halmahera Tengah	1.019.604	9.269.222	5.527.455		
475	Kota Ternate	736.053	12.736.093	8.708.682		
476	Kab. Halmahera Barat	1.017.307	15.311.601	2.226.335		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
470	Kab. Puncak				19.510.213	16.339.717
471	Kab. Intan Jaya			300.000	9.836.214	16.229.291
472	Kab. Deiyai			746.500	18.458.478	16.945.450
473	Provinsi Maluku Utara		5.543.920	500.000	170.908.614	
474	Kab. Halmahera Tengah				15.816.281	13.442.739
475	Kota Ternate	1.758.100			23.938.928	7.287.200
476	Kab. Halmahera Barat				18.555.243	8.490.649

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
470	Kab. Puncak				1.110.311	17.450.028
471	Kab. Intan Jaya	39.926.359	4.996.579		832.733	61.984.962
472	Kab. Deiyai	17.532.055	3.567.531		1.019.467	39.064.503
473	Provinsi Maluku Utara	45.760.000				45.760.000
474	Kab. Halmahera Tengah	37.211.276	4.818.723	469.147	1.568.267	57.510.152
475	Kota Ternate		2.218.468	3.212.972	1.465.611	14.184.251
476	Kab. Halmahera Barat	3.000.000	3.456.973		1.129.893	16.077.515

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
470	Kab. Puncak		8.122.309		45.082.550
471	Kab. Intan Jaya	14.335.130	9.135.000		95.291.306
472	Kab. Deiyai	9.095.179	9.660.000		76.278.160
473	Provinsi Maluku Utara	36.776.042			253.444.656
474	Kab. Halmahera Tengah	28.527.919	4.600.000	7.900.000	114.354.352
475	Kota Ternate	8.188.090		1.756.500	48.067.769
476	Kab. Halmahera Barat	7.768.518	6.400.000	2.250.500	51.051.776

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
470	Kab. Puncak	1.051.489		289.500	1.340.989	
471	Kab. Intan Jaya	1.050.000		63.999	1.113.999	
472	Kab. Deiyai	1.350.000		476.700	1.826.700	
473	Provinsi Maluku Utara	12.138.187			12.138.187	
474	Kab. Halmahera Tengah	200.000		415.000	615.000	
475	Kota Ternate					
476	Kab. Halmahera Barat		42.789.865		42.789.865	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
470	Kab. Puncak	2.734.877	2.734.877		4.697.091	4.697.091
471	Kab. Intan Jaya	10.898.668	10.898.668	2.501.211	5.441.223	7.942.434
472	Kab. Deiyai	7.802.129	7.802.129		4.049.438	4.049.438
473	Provinsi Maluku Utara	46.761.419	46.761.419			
474	Kab. Halmahera Tengah	15.943.860	15.943.860		3.579.650	3.579.650
475	Kota Ternate				3.727.165	3.727.165
476	Kab. Halmahera Barat				3.291.439	3.291.439

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
470	Kab. Puncak		1.756.638	1.756.638	6.146.923	
471	Kab. Intan Jaya	7.182.397	2.089.774	9.272.171	18.443.505	
472	Kab. Deiyai	1.871.060	1.944.582	3.815.642	12.698.547	
473	Provinsi Maluku Utara					15.420.000
474	Kab. Halmahera Tengah	15.637.625	500.000	16.137.625	3.322.068	5.519.628
475	Kota Ternate		3.109.295	3.109.295	8.155.434	
476	Kab. Halmahera Barat		1.752.679	1.752.679	1.960.334	3.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
470	Kab. Puncak					
471	Kab. Intan Jaya		2.652.500	6.500.633		
472	Kab. Deiyai		2.006.750			
473	Provinsi Maluku Utara		16.067.500		6.297.157	
474	Kab. Halmahera Tengah	3.441.900	1.680.000	3.150.306		
475	Kota Ternate		1.910.000			
476	Kab. Halmahera Barat	7.345.000	2.100.000	5.000.487		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
470	Kab. Puncak				16.676.518	61.759.068
471	Kab. Intan Jaya				56.823.910	152.115.216
472	Kab. Deiyai				32.199.206	108.477.366
473	Provinsi Maluku Utara		9.157.426	9.157.426	105.841.689	359.286.345
474	Kab. Halmahera Tengah				53.390.037	167.744.389
475	Kota Ternate				16.901.894	64.969.663
476	Kab. Halmahera Barat				67.239.804	118.291.580

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
477	Kab. Halmahera Timur	1.829.798	22.803.150	6.937.651		
478	Kab. Halmahera Selatan	269.846	17.856.376	6.181.292		
479	Kab. Halmahera Utara		3.932.611	4.179.976		
480	Kab. Kepulauan Sula	1.107.762	15.254.278	8.720.210		
481	Kota Tidore Kepulauan	868.321	26.686.428	11.164.205		
482	Kab. Pulau Morotai		17.702.012	7.236.879		
483	Kab. Pulau Taliabu	1.110.441	21.973.797	24.557.492		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
477	Kab. Halmahera Timur				31.570.599	16.598.000
478	Kab. Halmahera Selatan			499.950	24.807.464	25.762.750
479	Kab. Halmahera Utara			10.000.000	18.112.587	5.519.968
480	Kab. Kepulauan Sula				25.082.250	3.314.000
481	Kota Tidore Kepulauan				38.718.954	4.676.400
482	Kab. Pulau Morotai			500.000	25.438.891	16.825.064
483	Kab. Pulau Taliabu				47.641.730	5.217.764

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
477	Kab. Halmahera Timur	32.250.000	2.708.217		1.514.061	53.070.278
478	Kab. Halmahera Selatan	53.447.687	3.632.930		1.515.321	84.358.688
479	Kab. Halmahera Utara		5.807.476	200.000	1.569.879	13.097.323
480	Kab. Kepulauan Sula	3.000.000	5.714.565	561.771	1.443.404	14.033.740
481	Kota Tidore Kepulauan		2.489.852		789.498	7.955.750
482	Kab. Pulau Morotai	54.854.502	2.611.581		1.315.718	75.606.865
483	Kab. Pulau Taliabu	13.699.098	2.836.117		1.514.061	23.267.040

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
477	Kab. Halmahera Timur	8.017.554	6.825.000	2.354.678	101.838.109
478	Kab. Halmahera Selatan	17.188.297	9.100.000	27.436.067	162.890.516
479	Kab. Halmahera Utara	5.321.460		7.395.949	43.927.319
480	Kab. Kepulauan Sula	5.745.526	8.170.945		53.032.461
481	Kota Tidore Kepulauan	11.070.747		29.250.000	86.995.451
482	Kab. Pulau Morotai	5.659.174	8.190.000		114.894.930
483	Kab. Pulau Taliabu	5.296.141	5.100.000	7.200.000	88.504.911

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
477	Kab. Halmahera Timur	489.600		190.000	679.600	
478	Kab. Halmahera Selatan			295.875	295.875	
479	Kab. Halmahera Utara		62.588.790		62.588.790	
480	Kab. Kepulauan Sula	995.000	21.235.408	100.000	22.330.408	
481	Kota Tidore Kepulauan		24.100.933		24.100.933	
482	Kab. Pulau Morotai					
483	Kab. Pulau Taliabu					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
477	Kab. Halmahera Timur	6.717.129	6.717.129	2.701.266	3.453.643	6.154.909
478	Kab. Halmahera Selatan	10.557.999	10.557.999	3.107.021	4.867.016	7.974.037
479	Kab. Halmahera Utara				562.500	562.500
480	Kab. Kepulauan Sula	7.790.392	7.790.392			
481	Kota Tidore Kepulauan				4.451.223	4.451.223
482	Kab. Pulau Morotai	12.011.781	12.011.781		3.521.644	3.521.644
483	Kab. Pulau Taliabu	5.272.840	5.272.840			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
477	Kab. Halmahera Timur	500.000	2.082.121	2.582.121	2.452.910	10.740.000
478	Kab. Halmahera Selatan	2.318.369	2.748.690	5.067.059	2.598.220	8.794.100
479	Kab. Halmahera Utara		1.079.841	1.079.841		10.020.000
480	Kab. Kepulauan Sula	5.091.320	1.865.097	6.956.417	1.129.604	2.012.044
481	Kota Tidore Kepulauan		1.199.823	1.199.823	1.267.301	
482	Kab. Pulau Morotai		1.880.233	1.880.233	3.094.657	5.429.821
483	Kab. Pulau Taliabu		1.772.142	1.772.142	1.765.129	5.580.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
477	Kab. Halmahera Timur	2.805.000	4.295.313			
478	Kab. Halmahera Selatan	6.325.000	1.567.000			
479	Kab. Halmahera Utara	3.125.000	1.799.000	2.000.194		
480	Kab. Kepulauan Sula	5.299.980	2.294.298			
481	Kota Tidore Kepulauan		5.040.000	3.200.311		
482	Kab. Pulau Morotai	5.654.250	3.165.000		36.357.743	
483	Kab. Pulau Taliabu		1.737.500			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
477	Kab. Halmahera Timur				36.426.982	138.265.091
478	Kab. Halmahera Selatan				43.179.290	206.069.806
479	Kab. Halmahera Utara				81.175.325	125.102.644
480	Kab. Kepulauan Sula				47.813.143	100.845.604
481	Kota Tidore Kepulauan				39.259.591	126.255.042
482	Kab. Pulau Morotai				71.115.129	186.010.059
483	Kab. Pulau Taliabu				16.127.611	104.632.522

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
484	Provinsi Banten				37.515.306	52.260.481
485	Kab. Lebak	829.165	23.773.052	19.091.875		
486	Kab. Pandeglang	3.925.478	21.749.834	20.457.049		
487	Kab. Serang	383.890	19.265.391	17.505.143		
488	Kab. Tangerang		14.072.156	8.998.220		
489	Kota Cilegon	752.205	6.683.594	3.192.293		
490	Kota Tangerang			5.665.920		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
484	Provinsi Banten		2.194.780		91.970.567	
485	Kab. Lebak	722.300		200.000	44.616.392	4.131.641
486	Kab. Pandeglang				46.132.361	12.339.598
487	Kab. Serang	1.249.800		470.000	38.874.224	2.511.016
488	Kab. Tangerang	910.600			23.980.976	2.000.000
489	Kota Cilegon				10.628.092	2.000.000
490	Kota Tangerang				5.665.920	2.126.099

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
484	Provinsi Banten	6.802.907				6.802.907
485	Kab. Lebak		5.320.785		1.110.311	10.562.737
486	Kab. Pandeglang		4.969.776		1.110.311	18.419.685
487	Kab. Serang		8.498.837	6.184.926	1.487.817	18.682.596
488	Kab. Tangerang	24.903.050	6.898.463	649.659	1.488.826	35.939.998
489	Kota Cilegon	3.000.000	1.963.985		1.488.826	8.452.811
490	Kota Tangerang		9.319.053	3.205.408		14.650.560

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
484	Provinsi Banten	3.938.798			102.712.272
485	Kab. Lebak	30.978.254	5.800.000		91.957.383
486	Kab. Pandeglang	9.971.994	6.205.618		80.729.658
487	Kab. Serang	27.105.046	1.640.000		86.301.866
488	Kab. Tangerang	7.056.690			66.977.664
489	Kota Cilegon	2.623.645			21.704.548
490	Kota Tangerang	2.008.007			22.324.487

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
484	Provinsi Banten	3.493.441			3.493.441	22.134.909
485	Kab. Lebak	650.000	7.122.793	340.000	8.112.793	12.646.818
486	Kab. Pandeglang		56.939.018	280.000	57.219.018	9.499.026
487	Kab. Serang	415.000	2.334.124	526.149	3.275.273	
488	Kab. Tangerang		4.638.385	252.000	4.890.385	
489	Kota Cilegon		6.985.685		6.985.685	
490	Kota Tangerang	3.738.000	1.722.896	310.000	5.770.896	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
484	Provinsi Banten		22.134.909			
485	Kab. Lebak		12.646.818	9.578.893	9.378.940	18.957.833
486	Kab. Pandeglang		9.499.026		5.972.901	5.972.901
487	Kab. Serang			3.884.548	7.292.437	11.176.985
488	Kab. Tangerang				1.157.000	1.157.000
489	Kota Cilegon					
490	Kota Tangerang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
484	Provinsi Banten					
485	Kab. Lebak	8.863.717	3.699.455	12.563.172	2.786.139	3.559.000
486	Kab. Pandeglang	3.182.075	7.902.157	11.084.232	2.794.940	2.533.450
487	Kab. Serang	3.818.490		3.818.490		1.509.492
488	Kab. Tangerang		1.330.000	1.330.000	6.905.700	
489	Kota Cilegon					
490	Kota Tangerang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
484	Provinsi Banten	5.122.816	6.408.420			
485	Kab. Lebak	6.370.000	1.158.425		2.462.799	
486	Kab. Pandeglang	9.790.000	1.656.695	500.048		
487	Kab. Serang	3.875.000	1.613.670			
488	Kab. Tangerang	1.374.524				
489	Kota Cilegon					
490	Kota Tangerang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
484	Provinsi Banten		9.280.743	9.280.743	46.440.329	149.152.601
485	Kab. Lebak				68.616.979	160.574.362
486	Kab. Pandeglang				101.050.310	181.779.968
487	Kab. Serang				25.268.910	111.570.776
488	Kab. Tangerang				15.657.609	82.635.273
489	Kota Cilegon				6.985.685	28.690.233
490	Kota Tangerang				5.770.896	28.095.383

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
491	Kota Serang	520.000	10.444.840	8.652.319		
492	Kota Tangerang Selatan	1.046.852	8.485.669	2.698.904		
493	Provinsi Bangka Belitung				27.114.482	22.421.068
494	Kab. Bangka	283.157	3.263.770	7.603.631		
495	Kab. Belitung	537.361	8.115.131	16.510.081		
496	Kota Pangkal Pinang	648.231	3.377.048	7.631.987		
497	Kab. Bangka Selatan	281.362	7.526.658	9.080.771		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
491	Kota Serang			10.000.000	29.617.159	2.000.000
492	Kota Tangerang Selatan	200.000		800.000	13.231.425	2.531.651
493	Provinsi Bangka Belitung		2.672.830	518.500	52.726.880	
494	Kab. Bangka			2.357.461	13.508.019	19.326.639
495	Kab. Belitung			500.000	25.662.573	7.174.414
496	Kota Pangkal Pinang				11.657.266	19.898.197
497	Kab. Bangka Selatan				16.888.791	15.366.261

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
491	Kota Serang		3.315.114	625.977	1.054.089	6.995.180
492	Kota Tangerang Selatan		3.985.097		1.048.234	7.564.982
493	Provinsi Bangka Belitung	26.607.403		1.651.668		28.259.071
494	Kab. Bangka	30.044.023	2.746.603	793.202	1.342.447	54.252.914
495	Kab. Belitung		2.391.700	200.000	1.059.842	10.825.956
496	Kota Pangkal Pinang	64.624.068	2.871.944	2.058.310	845.552	90.298.071
497	Kab. Bangka Selatan	4.368.652	2.135.131	1.867.902	730.786	24.468.732

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
491	Kota Serang	5.153.929			41.766.268
492	Kota Tangerang Selatan				20.796.407
493	Provinsi Bangka Belitung	9.028.052			90.014.003
494	Kab. Bangka	9.635.498			77.396.431
495	Kab. Belitung	9.413.089		9.282.200	55.183.818
496	Kota Pangkal Pinang	8.957.792			110.913.129
497	Kab. Bangka Selatan	12.111.461	3.900.000	32.851.574	90.220.558

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
491	Kota Serang	1.853.947	67.999.004	296.500	70.149.451	
492	Kota Tangerang Selatan	350.000	24.513.754	250.000	25.113.754	
493	Provinsi Bangka Belitung	991.550			991.550	
494	Kab. Bangka			280.000	280.000	
495	Kab. Belitung		10.641.436		10.641.436	
496	Kota Pangkal Pinang					
497	Kab. Bangka Selatan	950.000	1.874.752	280.000	3.104.752	10.248.482

SK No 022764 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
491	Kota Serang				1.364.521	1.364.521
492	Kota Tangerang Selatan					
493	Provinsi Bangka Belitung	32.940.051	32.940.051			
494	Kab. Bangka			5.196.396	7.219.851	12.416.247
495	Kab. Belitung	3.345.904	3.345.904		3.243.919	3.243.919
496	Kota Pangkal Pinang				5.575.040	5.575.040
497	Kab. Bangka Selatan		10.248.482	350.000	7.195.240	7.545.240

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
491	Kota Serang		2.786.031	2.786.031	865.134	
492	Kota Tangerang Selatan		600.000	600.000		
493	Provinsi Bangka Belitung					15.888.165
494	Kab. Bangka	480.000	1.854.229	2.334.229	771.750	5.321.972
495	Kab. Belitung		1.706.761	1.706.761		
496	Kota Pangkal Pinang		1.300.000	1.300.000	1.017.355	
497	Kab. Bangka Selatan	2.548.221	1.900.839	4.449.060	1.269.188	7.603.454

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
491	Kota Serang	1.805.000	680.000			
492	Kota Tangerang Selatan					
493	Provinsi Bangka Belitung	3.000.000	9.160.000		400.000	
494	Kab. Bangka	2.415.000	1.401.597			
495	Kab. Belitung	2.100.000	1.590.000		3.680.220	
496	Kota Pangkal Pinang		513.000			
497	Kab. Bangka Selatan	2.745.750	1.698.750		1.489.771	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
491	Kota Serang				77.650.137	119.416.405
492	Kota Tangerang Selatan				25.713.754	46.510.161
493	Provinsi Bangka Belitung		1.267.804	1.267.804	63.647.570	153.661.573
494	Kab. Bangka	6.800.000		6.800.000	31.740.795	109.137.226
495	Kab. Belitung				26.308.240	81.492.058
496	Kota Pangkal Pinang				8.405.395	119.318.524
497	Kab. Bangka Selatan				40.154.447	130.375.005

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
498	Kab. Bangka Tengah	856.002	17.455.737	6.502.500		
499	Kab. Bangka Barat	1.791.025	5.201.778	6.026.699		
500	Kab. Belitung Timur	770.550	2.120.128	2.679.821		
501	Provinsi Gorontalo				27.944.726	22.253.197
502	Kab. Boalemo	3.166.583	21.730.956	11.360.249		
503	Kab. Gorontalo	497.275	12.781.357	6.918.715		
504	Kota Gorontalo	1.978.746	13.778.156	16.342.384		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
498	Kab. Bangka Tengah				24.814.239	2.960.351
499	Kab. Bangka Barat				13.019.502	2.000.000
500	Kab. Belitung Timur			408.600	5.979.099	
501	Provinsi Gorontalo		1.376.570	4.291.200	55.865.693	
502	Kab. Boalemo	1.064.589			37.322.377	19.656.356
503	Kab. Gorontalo	3.218.100		2.500.000	25.915.447	8.167.499
504	Kota Gorontalo	939.138			33.038.424	3.879.229

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
498	Kab. Bangka Tengah	10.940.700	2.359.079		368.421	16.628.551
499	Kab. Bangka Barat	16.213.618	2.814.119	391.581	983.130	22.402.448
500	Kab. Belitung Timur	3.000.000	2.187.173	1.224.465	538.299	6.949.937
501	Provinsi Gorontalo	7.115.000		3.512.809		10.627.809
502	Kab. Boalemo	11.627.022	3.177.690	391.581	1.169.460	36.022.109
503	Kab. Gorontalo	14.113.686	4.470.336	1.435.797	1.059.842	29.247.160
504	Kota Gorontalo	11.283.757	605.668	391.427	1.153.714	17.313.795

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
498	Kab. Bangka Tengah	7.799.050			49.241.840
499	Kab. Bangka Barat	31.704.640			67.126.590
500	Kab. Belitung Timur	9.403.859			22.332.895
501	Provinsi Gorontalo	9.093.047			75.586.549
502	Kab. Boalemo	6.959.400	6.000.000		86.303.886
503	Kab. Gorontalo	17.653.267	4.700.000		77.515.874
504	Kota Gorontalo	5.041.618			55.393.837

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
498	Kab. Bangka Tengah					
499	Kab. Bangka Barat			200.000	200.000	
500	Kab. Belitung Timur		36.466.629		36.466.629	
501	Provinsi Gorontalo	633.189			633.189	
502	Kab. Boalemo		15.792.390	315.000	16.107.390	
503	Kab. Gorontalo	947.000		302.525	1.249.525	
504	Kota Gorontalo					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
498	Kab. Bangka Tengah				4.749.151	4.749.151
499	Kab. Bangka Barat			2.171.589		2.171.589
500	Kab. Belitung Timur	3.314.860	3.314.860		3.730.499	3.730.499
501	Provinsi Gorontalo	17.233.860	17.233.860			
502	Kab. Boalemo	6.447.262	6.447.262	8.522.056	4.988.624	13.510.680
503	Kab. Gorontalo	11.285.304	11.285.304	9.298.918	200.000	9.498.918
504	Kota Gorontalo				3.365.722	3.365.722

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
498	Kab. Bangka Tengah		1.674.383	1.674.383		1.120.000
499	Kab. Bangka Barat	4.133.413	600.000	4.733.413	2.347.922	6.620.937
500	Kab. Belitung Timur		1.811.652	1.811.652	1.427.867	2.136.390
501	Provinsi Gorontalo					15.073.254
502	Kab. Boalemo	7.636.980	2.300.677	9.937.657	873.172	7.390.549
503	Kab. Gorontalo	3.636.657		3.636.657	2.005.613	15.831.800
504	Kota Gorontalo		1.560.005	1.560.005	2.303.148	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
498	Kab. Bangka Tengah	1.270.000	2.627.000	3.156.007	2.405.999	
499	Kab. Bangka Barat		1.265.000			
500	Kab. Belitung Timur	2.640.000	970.856			
501	Provinsi Gorontalo	3.571.800	11.950.890			
502	Kab. Boalemo		2.028.750			
503	Kab. Gorontalo	2.772.525	1.866.600	16.401.597		1.300.000
504	Kota Gorontalo		1.104.650	850.082		1.375.643

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
498	Kab. Bangka Tengah				17.002.540	66.244.380
499	Kab. Bangka Barat				17.338.861	84.465.451
500	Kab. Belitung Timur				52.498.753	74.831.648
501	Provinsi Gorontalo		9.929.234	9.929.234	58.392.227	133.978.776
502	Kab. Boalemo				56.295.460	142.599.346
503	Kab. Gorontalo			1.300.000	65.848.539	143.364.413
504	Kota Gorontalo			1.375.643	10.559.250	65.953.087

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
505	Kab. Pohuwato	252.496	4.244.944	3.856.182		
506	Kab. Bone Bolango		27.868.108	27.814.602		
507	Kab. Gorontalo Utara	238.384	10.172.944	1.966.862		
508	Provinsi Kepulauan Riau				55.685.079	43.500.896
509	Kab. Natuna		3.058.861	1.752.006		
510	Kab. Kepulauan Anambas	670.091	9.972.460	5.322.974		
511	Kab. Karimun	4.239.726	21.004.119	9.496.328		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
505	Kab. Pohuwato			4.500.000	12.853.622	21.749.503
506	Kab. Bone Bolango	200.000		300.000	56.182.710	12.279.136
507	Kab. Gorontalo Utara			10.000.000	22.378.190	9.741.286
508	Provinsi Kepulauan Riau		1.993.590	900.000	102.079.565	
509	Kab. Natuna			190.000	5.000.867	17.253.606
510	Kab. Kepulauan Anambas				15.965.525	2.000.000
511	Kab. Karimun			286.246	35.026.419	7.888.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
505	Kab. Pohuwato	3.000.000	4.350.056		1.214.882	30.314.441
506	Kab. Bone Bolango	7.569.465	3.375.453	391.581	1.352.258	24.967.893
507	Kab. Gorontalo Utara	5.120.628	2.355.110		1.095.574	18.312.598
508	Provinsi Kepulauan Riau	3.286.494				3.286.494
509	Kab. Natuna	3.000.000	3.673.016	680.284	1.414.435	26.021.341
510	Kab. Kepulauan Anambas	5.083.992	3.316.831	391.427	1.448.451	12.240.701
511	Kab. Karimun		2.369.227	351.418	959.455	11.568.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
505	Kab. Pohuwato	8.012.445	6.300.000		57.480.508
506	Kab. Bone Bolango	9.458.902			90.609.505
507	Kab. Gorontalo Utara	6.774.024	7.976.399		55.441.211
508	Provinsi Kepulauan Riau	12.860.940		19.597.008	137.824.007
509	Kab. Natuna	9.145.732	5.900.000		46.067.940
510	Kab. Kepulauan Anambas	9.867.592	5.600.000		43.673.818
511	Kab. Karimun	13.378.936	6.322.755		66.296.210

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
505	Kab. Pohuwato		19.637.821	305.000	19.942.821	
506	Kab. Bone Bolango		18.664.249	305.000	18.969.249	
507	Kab. Gorontalo Utara					
508	Provinsi Kepulauan Riau	1.321.518			1.321.518	
509	Kab. Natuna			62.500	62.500	
510	Kab. Kepulauan Anambas					
511	Kab. Karimun	300.000	11.115.006	37.999	11.453.005	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
505	Kab. Pohuwato			2.499.711	5.196.080	7.695.791
506	Kab. Bone Bolango			6.484.250	3.870.701	10.354.951
507	Kab. Gorontalo Utara	7.907.537	7.907.537		4.231.051	4.231.051
508	Provinsi Kepulauan Riau	45.601.800	45.601.800			
509	Kab. Natuna	3.508.183	3.508.183	276.000	5.704.126	5.980.126
510	Kab. Kepulauan Anambas	3.759.425	3.759.425		4.800.756	4.800.756
511	Kab. Karimun	4.479.879	4.479.879	1.722.124	3.730.965	5.453.089

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
505	Kab. Pohuwato	5.909.568	2.162.328	8.071.896	2.219.475	4.850.000
506	Kab. Bone Bolango	6.156.394	1.937.770	8.094.164		7.489.962
507	Kab. Gorontalo Utara		1.904.606	1.904.606	2.463.198	12.925.125
508	Provinsi Kepulauan Riau					
509	Kab. Natuna	7.313.796		7.313.796	1.070.703	2.573.587
510	Kab. Kepulauan Anambas		1.916.620	1.916.620		4.880.883
511	Kab. Karimun	2.990.249	1.738.202	4.728.451		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
505	Kab. Pohuwato		2.215.400	1.078.305		
506	Kab. Bone Bolango		1.295.000	2.640.257		2.600.000
507	Kab. Gorontalo Utara	2.480.000	1.605.700			1.132.175
508	Provinsi Kepulauan Riau		9.992.040			
509	Kab. Natuna	700.000	1.355.000	7.589.739	2.983.824	
510	Kab. Kepulauan Anambas	1.245.000	2.713.000	10.861.063	6.908.945	
511	Kab. Karimun	1.129.248	2.644.794		2.447.473	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
505	Kab. Pohuwato				46.073.688	103.554.196
506	Kab. Bone Bolango			2.600.000	51.443.583	142.053.088
507	Kab. Gorontalo Utara			1.132.175	34.649.392	90.090.603
508	Provinsi Kepulauan Riau		1.032.516	1.032.516	57.947.874	195.771.881
509	Kab. Natuna				33.137.458	79.205.398
510	Kab. Kepulauan Anambas				37.085.692	80.759.510
511	Kab. Karimun				32.335.939	98.632.149

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
512	Kota Batam	3.181.905	25.546.528	22.590.547		
513	Kota Tanjung Pinang	275.390	10.515.054	7.387.427		
514	Kab. Lingga	1.080.747	4.594.708	6.420.486		
515	Kab. Bintan		22.760.093	12.312.543		
516	Provinsi Papua Barat				75.199.607	79.529.992
517	Kab. Fak Fak		2.280.201	4.899.471		
518	Kab. Manokwari	857.303	16.296.209	7.098.151		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
512	Kota Batam	3.666.800		699.800	55.685.580	12.625.492
513	Kota Tanjung Pinang	335.888			18.513.759	2.000.000
514	Kab. Lingga				12.095.941	16.230.940
515	Kab. Bintan	1.357.000		300.000	36.729.636	11.549.793
516	Provinsi Papua Barat		2.318.550	700.000	157.748.149	
517	Kab. Fak Fak			500.000	7.679.672	2.000.000
518	Kab. Manokwari	1.766.050			26.017.713	8.288.927

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
512	Kota Batam	5.900.000	5.570.176	200.000	962.236	25.257.904
513	Kota Tanjung Pinang	6.000.000	2.994.198	200.000	1.281.904	12.476.102
514	Kab. Lingga	6.650.000	1.591.890		1.289.677	25.762.507
515	Kab. Bintan	8.208.142	3.057.147	391.581	1.322.279	24.528.942
516	Provinsi Papua Barat					
517	Kab. Fak Fak		2.079.957	391.427	1.401.818	5.873.202
518	Kab. Manokwari	3.000.000	3.555.973		201.874	15.046.774

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
512	Kota Batam	7.400.087	972.732	2.934.054	92.250.357
513	Kota Tanjung Pinang	8.021.796			39.011.657
514	Kab. Lingga	15.375.326		6.500.000	59.733.774
515	Kab. Bintan	9.466.698	4.800.000	6.000.000	81.525.276
516	Provinsi Papua Barat	12.432.600			170.180.749
517	Kab. Fak Fak	30.499.163	6.400.000		50.452.037
518	Kab. Manokwari	13.221.889	6.689.156		60.975.532

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
512	Kota Batam	740.165	20.846.015		21.586.180	
513	Kota Tanjung Pinang					
514	Kab. Lingga	650.000		40.000	690.000	
515	Kab. Bintan					
516	Provinsi Papua Barat	4.797.246			4.797.246	
517	Kab. Fak Fak		6.015.566	516.150	6.531.716	
518	Kab. Manokwari	1.280.000		276.150	1.556.150	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
512	Kota Batam				6.735.890	6.735.890
513	Kota Tanjung Pinang				1.200.000	1.200.000
514	Kab. Lingga			12.561.439	4.031.051	16.592.490
515	Kab. Bintan	3.398.889	3.398.889		3.773.674	3.773.674
516	Provinsi Papua Barat	53.910.741	53.910.741			
517	Kab. Fak Fak	19.071.786	19.071.786		3.679.816	3.679.816
518	Kab. Manokwari			1.000.000	4.208.463	5.208.463

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
512	Kota Batam		2.549.624	2.549.624	1.625.320	
513	Kota Tanjung Pinang		1.854.753	1.854.753	973.909	
514	Kab. Lingga	14.476.646	1.886.088	16.362.734		
515	Kab. Bintan				1.003.858	
516	Provinsi Papua Barat					
517	Kab. Fak Fak		1.044.007	1.044.007	6.493.928	21.259.949
518	Kab. Manokwari	2.863.867	1.910.067	4.773.934	5.196.593	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
512	Kota Batam		960.324			
513	Kota Tanjung Pinang		616.000		12.084.020	
514	Kab. Lingga	1.146.500	1.155.000	1.201.117		
515	Kab. Bintan	1.627.087	2.369.000	5.000.487		
516	Provinsi Papua Barat	9.900.000	22.023.853		15.871.951	
517	Kab. Fak Fak		3.417.500			
518	Kab. Manokwari	3.350.000	2.916.000	4.730.460		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
512	Kota Batam				33.457.338	125.707.695
513	Kota Tanjung Pinang				16.728.682	55.740.339
514	Kab. Lingga				37.147.841	96.881.615
515	Kab. Bintan				17.172.995	98.698.271
516	Provinsi Papua Barat		1.219.179	1.219.179	107.722.970	277.903.719
517	Kab. Fak Fak				61.498.702	111.950.739
518	Kab. Manokwari				27.731.600	88.707.132

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
519	Kab. Sorong	229.942	4.875.968	2.271.869		
520	Kota Sorong		3.743.416	2.611.519		
521	Kab. Raja Ampat	777.917	10.633.170	6.055.634		
522	Kab. Sorong Selatan	624.353	8.352.683	2.672.207		
523	Kab. Teluk Bintuni	997.206	8.067.333	2.146.999		
524	Kab. Teluk Wondama	1.054.637	8.792.283	2.891.151		
525	Kab. Kaimana		3.831.388	1.985.217		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
519	Kab. Sorong			10.064.760	17.442.539	25.287.554
520	Kota Sorong				6.354.935	5.700.000
521	Kab. Raja Ampat			4.800.000	22.266.721	22.431.780
522	Kab. Sorong Selatan				11.649.243	17.537.737
523	Kab. Teluk Bintuni			300.000	11.511.538	18.381.287
524	Kab. Teluk Wondama			300.000	13.038.071	20.755.044
525	Kab. Kaimana			540.300	6.356.905	3.992.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
519	Kab. Sorong		6.195.706		1.488.826	32.972.086
520	Kota Sorong	12.642.918	3.428.208	391.581	761.875	22.924.582
521	Kab. Raja Ampat	3.000.000	3.890.850		1.412.114	30.734.744
522	Kab. Sorong Selatan	13.750.000	5.585.125		1.312.186	38.185.048
523	Kab. Teluk Bintuni		4.658.380	309.500		23.349.167
524	Kab. Teluk Wondama	5.941.903	3.608.479		1.262.020	31.567.446
525	Kab. Kaimana	6.000.000	1.791.332	391.427	1.198.631	13.373.467

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
519	Kab. Sorong	14.049.266	9.700.000		74.163.891
520	Kota Sorong	8.739.558		2.150.000	40.169.075
521	Kab. Raja Ampat	6.889.519	9.240.000	7.500.000	76.630.984
522	Kab. Sorong Selatan	29.712.171	8.170.945		87.717.407
523	Kab. Teluk Bintuni	10.599.945	7.400.000		52.860.650
524	Kab. Teluk Wondama	5.887.024	10.710.000		61.202.541
525	Kab. Kaimana	8.234.328	5.700.000		33.664.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
519	Kab. Sorong	400.000	42.322.721	516.150	43.238.871	
520	Kota Sorong	1.000.000		296.000	1.296.000	
521	Kab. Raja Ampat	650.000		36.200	686.200	
522	Kab. Sorong Selatan	1.720.000		391.874	2.111.874	
523	Kab. Teluk Bintuni	2.631.264	6.714.369	439.999	9.785.632	
524	Kab. Teluk Wondama	555.000		391.875	946.875	
525	Kab. Kaimana	849.725		550.874	1.400.599	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
519	Kab. Sorong	12.407.079	12.407.079		4.378.418	4.378.418
520	Kota Sorong				5.038.986	5.038.986
521	Kab. Raja Ampat	9.041.241	9.041.241			
522	Kab. Sorong Selatan	11.226.099	11.226.099			
523	Kab. Teluk Bintuni	15.117.328	15.117.328			
524	Kab. Teluk Wondama	9.969.267	9.969.267		3.746.412	3.746.412
525	Kab. Kaimana				4.488.697	4.488.697

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
519	Kab. Sorong		1.523.781	1.523.781	1.018.121	5.156.607
520	Kota Sorong	525.000	1.816.326	2.341.326	2.895.367	
521	Kab. Raja Ampat		1.600.294	1.600.294	5.422.399	3.653.676
522	Kab. Sorong Selatan		1.069.710	1.069.710		
523	Kab. Teluk Bintuni		1.430.571	1.430.571	955.232	
524	Kab. Teluk Wondama		1.671.480	1.671.480	4.418.055	9.206.785
525	Kab. Kaimana		1.487.910	1.487.910	3.822.216	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
519	Kab. Sorong		2.505.500	1.500.146	7.715.522	
520	Kota Sorong		4.040.000		16.612.216	
521	Kab. Raja Ampat		975.000			
522	Kab. Sorong Selatan		1.820.000	1.000.097		
523	Kab. Teluk Bintuni		4.000.000	900.087		
524	Kab. Teluk Wondama	1.710.000	2.257.500		4.713.101	
525	Kab. Kaimana		2.869.700			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
519	Kab. Sorong				79.444.045	153.607.936
520	Kota Sorong				32.223.895	72.392.970
521	Kab. Raja Ampat				21.378.810	98.009.794
522	Kab. Sorong Selatan				17.227.780	104.945.187
523	Kab. Teluk Bintuni				32.188.850	85.049.500
524	Kab. Teluk Wondama				38.639.475	99.842.016
525	Kab. Kaimana				14.069.122	47.733.822

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
526	Kab. Maybrat		4.538.789	5.951.639		
527	Kab. Tambrauw		12.022.170	3.485.160		
528	Kab. Manokwari Selatan		4.420.897	3.529.309		
529	Kab. Pegunungan Arfak		13.617.709	11.311.348		
530	Provinsi Sulawesi Barat				66.090.660	79.051.235
531	Kab. Majene	245.386	5.325.048	1.206.135		
532	Kab. Mamuju	1.070.606	22.722.290	15.446.818		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
526	Kab. Maybrat				10.490.428	15.331.804
527	Kab. Tambrauw				15.507.330	16.432.946
528	Kab. Manokwari Selatan				7.950.206	2.459.000
529	Kab. Pegunungan Arfak				24.929.057	18.377.273
530	Provinsi Sulawesi Barat		4.265.313	15.000.000	164.407.208	
531	Kab. Majene				6.776.569	9.941.054
532	Kab. Mamuju	371.682		200.000	39.811.396	12.717.096

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
526	Kab. Maybrat		3.128.280		1.110.311	19.570.395
527	Kab. Tambrauw		1.712.546		1.365.137	19.510.629
528	Kab. Manokwari Selatan		5.527.209		1.266.126	9.252.335
529	Kab. Pegunungan Arfak		5.757.066		1.110.311	25.244.650
530	Provinsi Sulawesi Barat	12.996.639		4.768.446		17.765.085
531	Kab. Majene	7.009.962	3.088.711	200.000	1.433.311	21.673.038
532	Kab. Mamuju	6.000.000	4.158.085		1.564.731	24.439.912

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
526	Kab. Maybrat	10.014.011	8.190.000		48.264.834
527	Kab. Tambrauw	12.418.632	9.000.000		56.436.591
528	Kab. Manokwari Selatan	8.375.594	9.135.000		34.713.135
529	Kab. Pegunungan Arfak	14.846.268	8.268.218		73.288.193
530	Provinsi Sulawesi Barat	5.280.854			187.453.147
531	Kab. Majene	8.616.655			37.066.262
532	Kab. Mamuju	9.182.656			73.433.964

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
526	Kab. Maybrat			286.000	286.000	
527	Kab. Tambrauw	400.000		190.000	590.000	
528	Kab. Manokwari Selatan			172.000	172.000	
529	Kab. Pegunungan Arfak	1.232.000		352.500	1.584.500	
530	Provinsi Sulawesi Barat	4.006.083			4.006.083	
531	Kab. Majene	999.750	6.569.422	315.000	7.884.172	
532	Kab. Mamuju	650.000	7.313.194	315.000	8.278.194	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
526	Kab. Maybrat	7.514.992	7.514.992		3.627.752	3.627.752
527	Kab. Tambrauw	9.705.471	9.705.471		3.459.426	3.459.426
528	Kab. Manokwari Selatan	6.497.478	6.497.478			
529	Kab. Pegunungan Arfak	8.624.935	8.624.935	1.784.105	4.057.798	5.841.903
530	Provinsi Sulawesi Barat	12.704.337	12.704.337			
531	Kab. Majene			3.499.595	5.364.653	8.864.248
532	Kab. Mamuju			1.997.665	3.582.855	5.580.520

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
526	Kab. Maybrat				1.041.800	
527	Kab. Tambrauw		1.500.000	1.500.000	5.141.298	
528	Kab. Manokwari Selatan		783.425	783.425	4.847.460	
529	Kab. Pegunungan Arfak	400.000	881.780	1.281.780	1.045.515	
530	Provinsi Sulawesi Barat					4.867.580
531	Kab. Majene	3.818.490	2.047.411	5.865.901	1.768.779	3.450.000
532	Kab. Mamuju		2.480.773	2.480.773		2.385.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
526	Kab. Maybrat	2.299.500	4.151.563			
527	Kab. Tambrauw		4.365.000			
528	Kab. Manokwari Selatan		2.553.500			
529	Kab. Pegunungan Arfak		1.984.750			
530	Provinsi Sulawesi Barat	4.458.887	9.428.069			
531	Kab. Majene	5.024.250	1.285.800			
532	Kab. Mamuju		1.405.400			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
526	Kab. Maybrat				18.921.607	67.186.441
527	Kab. Tambrauw				24.761.195	81.197.786
528	Kab. Manokwari Selatan				14.853.863	49.566.998
529	Kab. Pegunungan Arfak				20.363.383	93.651.576
530	Provinsi Sulawesi Barat		4.652.555	4.652.555	40.117.511	227.570.658
531	Kab. Majene				34.143.150	71.209.412
532	Kab. Mamuju				20.130.487	93.564.451

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
533	Kab. Polewali Mandar	440.000	21.829.279	10.796.022		
534	Kab. Mamasa	2.136.685	21.101.738	14.072.602		
535	Kab. Pasangkayu	2.464.497	23.134.761	11.433.114		
536	Kab. Mamuju Tengah	2.523.397	17.806.942	1.643.048		
537	Provinsi Kalimantan Utara				30.634.752	52.386.688
538	Kab. Bulungan	4.736.562	24.856.797	26.027.623		
539	Kab. Malinau	881.164	3.429.991	2.133.036		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
533	Kab. Polewali Mandar				33.065.301	10.393.348
534	Kab. Mamasa	810.200			38.121.225	14.974.249
535	Kab. Pasangkayu			300.000	37.332.372	9.607.850
536	Kab. Mamuju Tengah				21.973.387	13.511.385
537	Provinsi Kalimantan Utara		2.496.555		85.517.995	
538	Kab. Bulungan			393.215	56.014.197	8.475.120
539	Kab. Malinau				6.444.191	2.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
533	Kab. Polewali Mandar	4.302.416	7.800.946	2.926.817	1.488.826	26.912.353
534	Kab. Mamasa	7.250.000	2.393.060		1.488.826	26.106.135
535	Kab. Pasangkayu	19.799.049	2.354.569		1.513.556	33.275.024
536	Kab. Mamuju Tengah	8.339.440	3.885.437		1.337.420	27.073.682
537	Provinsi Kalimantan Utara	6.572.500		4.173.852		10.746.352
538	Kab. Bulungan	5.041.368	4.029.357	747.098	1.514.061	19.807.004
539	Kab. Malinau	3.286.192	2.661.685		1.434.320	9.382.197

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
533	Kab. Polewali Mandar	8.161.160	6.300.000		74.438.814
534	Kab. Mamasa				64.227.360
535	Kab. Pasangkayu	37.340.000	4.830.000		112.777.396
536	Kab. Mamuju Tengah	8.053.050	7.500.000		64.600.119
537	Provinsi Kalimantan Utara	10.337.904			106.602.251
538	Kab. Bulungan	10.469.312	3.885.000		90.175.513
539	Kab. Malinau	13.994.566	5.040.000		34.860.954

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
533	Kab. Polewali Mandar	500.000	25.014.663	501.149	26.015.812	
534	Kab. Mamasa	270.000		365.000	635.000	
535	Kab. Pasangkayu					
536	Kab. Mamuju Tengah	499.750		315.000	814.750	
537	Provinsi Kalimantan Utara	1.231.830			1.231.830	
538	Kab. Bulungan		51.155.813	320.000	51.475.813	
539	Kab. Malinau		8.214.438	270.000	8.484.438	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
533	Kab. Polewali Mandar			11.467.626	6.551.277	18.018.903
534	Kab. Mamasa			3.936.284	4.354.465	8.290.749
535	Kab. Pasangkayu	16.117.356	16.117.356		4.519.584	4.519.584
536	Kab. Mamuju Tengah	6.158.896	6.158.896	7.707.492	4.495.832	12.203.324
537	Provinsi Kalimantan Utara	21.547.161	21.547.161			
538	Kab. Bulungan	10.072.561	10.072.561	5.249.393	5.600.309	10.849.702
539	Kab. Malinau	9.882.015	9.882.015		5.298.493	5.298.493

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
533	Kab. Polewali Mandar	2.110.764	2.626.743	4.737.507	1.812.596	2.693.156
534	Kab. Mamasa	6.798.418	2.342.153	9.140.571		5.343.000
535	Kab. Pasangkayu		1.910.459	1.910.459		3.312.863
536	Kab. Mamuju Tengah	9.863.798	1.232.650	11.096.448	2.110.826	8.422.345
537	Provinsi Kalimantan Utara					9.411.339
538	Kab. Bulungan	1.846.918	1.552.164	3.399.082		5.054.824
539	Kab. Malinau		1.643.433	1.643.433	952.008	1.767.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
533	Kab. Polewali Mandar	6.080.733	1.316.550	3.000.292		6.942.550
534	Kab. Mamasa	4.750.000	1.222.200			
535	Kab. Pasangkayu	1.080.000	1.950.943	1.947.610		
536	Kab. Mamuju Tengah		1.220.000	600.058		
537	Provinsi Kalimantan Utara		10.435.700			
538	Kab. Bulungan	2.735.000	1.988.379			
539	Kab. Malinau	3.515.000	650.341			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
533	Kab. Polewali Mandar			6.942.550	70.618.099	145.056.913
534	Kab. Mamasa				29.381.520	93.608.880
535	Kab. Pasangkayu				30.838.815	143.616.211
536	Kab. Mamuju Tengah				42.626.647	107.226.766
537	Provinsi Kalimantan Utara		731.520	731.520	43.357.550	149.959.801
538	Kab. Bulungan				85.575.361	175.750.874
539	Kab. Malinau				32.192.728	67.053.682

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				
		PAUD	SD	SMP	SMA	SMK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
540	Kab. Nunukan		6.783.269	1.199.512		
541	Kota Tarakan	289.566	2.547.587	17.687.763		
542	Kab. Tana Tidung	526.078	3.571.001	1.859.162		
Jumlah Nasional		398.343.537	7.005.996.737	4.657.844.711	2.436.845.368	3.050.037.717

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pendidikan				Kesehatan dan KB
		SKB	SLB	Perpustakaan Daerah	Subtotal Pendidikan	Pelayanan Dasar
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)*	*(12)*
540	Kab. Nunukan			300.000	8.282.781	10.142.430
541	Kota Tarakan			291.500	20.816.416	2.000.000
542	Kab. Tana Tidung				5.956.241	2.000.000
Jumlah Nasional		110.152.342	125.379.588	550.000.000	18.334.600.000	4.779.390.300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				
		Pelayanan Rujukan	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)=(12)+(13)+(14)+(15)+(16)*
540	Kab. Nunukan	4.804.038	5.124.482		1.404.644	21.475.594
541	Kota Tarakan	20.815.817	3.339.607	1.395.087	1.488.826	29.039.337
542	Kab. Tana Tidung		795.915	391.427	1.488.826	4.676.168
Jumlah Nasional		6.798.336.200	2.293.437.100	1.085.329.500	575.000.000	15.531.493.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. DAK REGULER

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan	Transportasi Perdesaan	Transportasi Laut	TOTAL DAK REGULER
(1)	*(2)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)=(11)+(17)+(18)+(19)+(20)*
540	Kab. Nunukan	6.320.972	9.660.000	4.500.000	50.239.347
541	Kota Tarakan	6.413.027			56.268.780
542	Kab. Tana Tidung	9.459.929			20.092.338
Jumlah Nasional		7.282.400.000	1.250.000.000	611.014.000	43.009.507.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Kesehatan dan KB				Jalan
		Penguatan Intervensi Stunting	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Keluarga Berencana	Subtotal Kesehatan dan KB	Tematik Ketahanan Pangan
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)=(22)+(23)+(24)*	*(26)*
540	Kab. Nunukan	1.000.000	51.529.250	320.000	52.849.250	
541	Kota Tarakan					
542	Kab. Tana Tidung		12.207.433		12.207.433	
Jumlah Nasional		615.920.400	4.533.786.500	100.000.000	5.249.706.900	1.138.986.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Jalan		Air Minum		
		Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Subtotal Jalan	Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Air Minum
(1)	*(2)*	*(27)*	*(28)=(26)+(27)*	*(29)*	*(30)*	*(31)=(29)+(30)*
540	Kab. Nunukan	12.231.118	12.231.118	4.500.000	5.703.805	10.203.805
541	Kota Tarakan				5.677.679	5.677.679
542	Kab. Tana Tidung				3.084.304	3.084.304
Jumlah Nasional		2.370.153.000	3.509.139.000	828.979.000	2.171.021.000	3.000.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Sanitasi			Perumahan dan Permukiman	Irigasi
		Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting	Tematik Penanggulangan Kemiskinan	Subtotal Sanitasi		
(1)	*(2)*	*(32)*	*(33)*	*(34)=(32)+(33)*	*(35)*	*(36)*
540	Kab. Nunukan	8.182.478	1.872.443	10.054.921	926.482	7.846.188
541	Kota Tarakan		1.911.835	1.911.835	1.088.091	
542	Kab. Tana Tidung		1.481.281	1.481.281		6.561.457
Jumlah Nasional		1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Pertanian	Kelautan dan Perikanan	Industri Kecil dan Menengah	Pariwisata	Lingkungan Hidup
						Lingkungan Hidup Tematik Penurunan Angka Kematian Ibu dan Stunting
(1)	*(2)*	*(37)*	*(38)*	*(39)*	*(40)*	*(41)*
540	Kab. Nunukan	3.400.000	2.054.250	2.040.755		
541	Kota Tarakan		1.292.181			
542	Kab. Tana Tidung	1.029.679	714.750			
Jumlah Nasional		1.400.000.000	1.000.000.000	750.000.000	629.847.000	272.645.050

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.11
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

B. DAK PENUGASAN

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Lingkungan Hidup			TOTAL DAK PENUGASAN	TOTAL DAK FISIK
		Lingkungan Hidup Tematik Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kehutanan Tematik Ketahanan Pangan	Subtotal Lingkungan Hidup		
(1)	*(2)*	*(42)*	*(43)*	*(44)=(41)+(42)+(43)*	*(45)=(25)+(28)+(31)+(34)+(35)+(36)+(37)+(38)+(39)+(40)+(44)*	*(46)=(21)+(45)*
540	Kab. Nunukan				101.606.769	151.846.116
541	Kota Tarakan				9.969.786	66.238.566
542	Kab. Tana Tidung				25.078.904	45.171.242
Jumlah Nasional		77.354.950	350.000.000	700.000.000	22.238.692.900	65.248.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
I	***Provinsi Aceh***	1.016.592.370	2.220.000	13.440.000	0	0
1	Kab. Aceh Barat	0	0	0	4.012.800	1.129.900
2	Kab. Aceh Besar	0	0	0	5.878.200	830.700
3	Kab. Aceh Selatan	0	0	0	6.763.800	890.800
4	Kab. Aceh Singkil	0	0	0	3.415.800	2.621.200
5	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	4.102.800	213.300
6	Kab. Aceh Tenggara	0	0	0	4.570.200	1.660.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
I	***Provinsi Aceh***	403.092.407	2.265.000	996.934	3.186.400	1.750.000
1	Kab. Aceh Barat	43.582.882	1.008.000	7.237.336	0	0
2	Kab. Aceh Besar	87.142.752	570.000	0	0	0
3	Kab. Aceh Selatan	79.271.302	639.000	0	0	0
4	Kab. Aceh Singkil	25.269.798	678.000	4.955.386	0	0
5	Kab. Aceh Tengah	59.641.022	753.000	4.542.706	600.000	0
6	Kab. Aceh Tenggara	52.282.174	450.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
I	***Provinsi Aceh***	7.000.423	0	0	0
1	Kab. Aceh Barat	12.440.204	894.004	0	539.785
2	Kab. Aceh Besar	31.960.225	1.955.582	0	958.173
3	Kab. Aceh Selatan	21.768.904	1.425.197	0	1.420.646
4	Kab. Aceh Singkil	11.310.258	810.216	0	615.858
5	Kab. Aceh Tengah	15.819.318	1.033.919	0	509.563
6	Kab. Aceh Tenggara	18.759.849	1.266.572	0	1.453.377

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
I	***Provinsi Aceh***	0	0	2.352.080	1.584.941	0
1	Kab. Aceh Barat	485.141	3.754.638	0	1.532.117	0
2	Kab. Aceh Besar	489.559	7.385.826	0	1.639.770	0
3	Kab. Aceh Selatan	489.559	4.394.633	0	1.118.575	0
4	Kab. Aceh Singkil	461.622	2.549.298	0	1.627.744	100.000
5	Kab. Aceh Tengah	505.783	4.579.628	0	1.341.332	0
6	Kab. Aceh Tenggara	487.687	5.080.762	0	1.106.171	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
I	***Provinsi Aceh***	0	413.732	507.467	0	1.455.401.754
1	Kab. Aceh Barat	0	0	326.122	613.000	77.555.929
2	Kab. Aceh Besar	0	510.721	326.122	324.500	139.972.130
3	Kab. Aceh Selatan	0	0	370.982	674.500	119.227.898
4	Kab. Aceh Singkil	0	0	326.122	490.000	55.231.302
5	Kab. Aceh Tengah	0	0	326.122	490.000	94.458.493
6	Kab. Aceh Tenggara	0	0	370.982	304.000	87.792.474

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
7	Kab. Aceh Timur	0	0	0	6.260.400	2.140.600
8	Kab. Aceh Utara	0	0	0	10.202.400	4.705.200
9	Kab. Bireuen	0	0	0	7.515.600	2.517.000
10	Kab. Pidie	0	0	0	4.763.400	633.600
11	Kab. Simeulue	0	0	0	2.157.000	265.500
12	Kota Banda Aceh	0	0	0	5.432.400	457.500
13	Kota Sabang	0	0	0	882.600	410.700
14	Kota Langsa	0	0	0	2.680.200	950.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7	Kab. Aceh Timur	83.729.768	1.083.000	3.105.893	0	0
8	Kab. Aceh Utara	150.525.761	1.065.000	32.057.649	600.000	0
9	Kab. Bireuen	98.803.025	810.000	23.470.445	0	0
10	Kab. Pidie	96.394.174	786.000	3.306.835	0	0
11	Kab. Simeulue	19.134.400	612.000	1.247.188	0	0
12	Kota Banda Aceh	56.135.137	240.000	0	0	0
13	Kota Sabang	16.215.908	99.000	0	0	0
14	Kota Langsa	37.087.421	333.000	0	600.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7	Kab. Aceh Timur	22.581.494	1.741.638	293.838	2.869.165
8	Kab. Aceh Utara	33.672.103	2.193.115	0	2.829.864
9	Kab. Bireuen	17.863.173	1.447.977	293.838	1.008.276
10	Kab. Pidie	25.276.457	1.592.772	0	1.284.433
11	Kab. Simeulue	12.814.781	880.174	0	381.738
12	Kota Banda Aceh	7.249.948	758.968	0	276.781
13	Kota Sabang	4.578.585	437.647	293.838	86.606
14	Kota Langsa	4.183.830	256.242	293.838	255.734

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
7	Kab. Aceh Timur	489.559	7.195.073	0	1.253.340	0
8	Kab. Aceh Utara	489.559	9.344.958	0	1.687.039	0
9	Kab. Bireuen	505.783	6.528.083	0	1.681.114	0
10	Kab. Pidie	505.783	7.707.343	0	1.567.686	0
11	Kab. Simeulue	0	3.125.123	0	881.811	0
12	Kota Banda Aceh	505.783	1.851.835	390.304	1.089.981	0
13	Kota Sabang	469.110	644.963	390.304	620.205	0
14	Kota Langsa	489.559	1.357.333	390.304	996.455	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
7	Kab. Aceh Timur	0	0	326.122	386.000	133.455.890
8	Kab. Aceh Utara	0	547.095	326.122	396.250	250.642.115
9	Kab. Bireuen	0	469.078	326.122	664.250	163.903.764
10	Kab. Pidie	0	0	326.122	375.750	144.520.355
11	Kab. Simeulue	0	0	326.122	242.500	42.068.337
12	Kota Banda Aceh	0	527.785	326.122	0	75.242.544
13	Kota Sabang	0	0	370.982	490.000	25.990.448
14	Kota Langsa	0	0	326.122	490.000	50.690.738

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Kota Lhokseumawe	0	0	0	2.911.200	301.100
16	Kab. Gayo Lues	0	0	0	1.297.800	358.800
17	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	0	2.946.600	338.100
18	Kab. Aceh Jaya	0	0	0	2.917.200	504.900
19	Kab. Nagan Raya	0	0	0	2.607.600	1.316.800
20	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	3.720.600	858.900
21	Kab. Bener Meriah	0	0	0	2.911.200	331.800
22	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	2.450.400	144.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
15	Kota Lhokseumawe	37.643.985	303.000	0	0	0
16	Kab. Gayo Lues	17.688.045	462.000	1.691.684	0	0
17	Kab. Aceh Barat Daya	38.714.634	360.000	0	0	0
18	Kab. Aceh Jaya	23.303.177	501.000	1.703.518	0	0
19	Kab. Nagan Raya	39.197.880	624.000	3.808.811	0	0
20	Kab. Aceh Tamiang	64.025.665	660.000	0	0	0
21	Kab. Bener Meriah	34.347.258	591.000	2.954.861	0	0
22	Kab. Pidie Jaya	39.957.331	348.000	3.787.663	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
15	Kota Lhokseumawe	3.583.845	456.356	0	174.649
16	Kab. Gayo Lues	12.034.552	712.599	0	2.297.292
17	Kab. Aceh Barat Daya	10.184.621	894.004	0	0
18	Kab. Aceh Jaya	10.131.146	745.138	0	481.221
19	Kab. Nagan Raya	12.553.146	945.252	0	513.625
20	Kab. Aceh Tamiang	12.932.945	963.961	0	1.327.320
21	Kab. Bener Meriah	13.221.603	731.308	0	1.327.909
22	Kab. Pidie Jaya	10.962.988	777.677	0	439.507

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
15	Kota Lhokseumawe	485.334	1.217.453	390.304	997.973	0
16	Kab. Gayo Lues	0	3.279.373	0	893.226	0
17	Kab. Aceh Barat Daya	469.110	2.406.373	0	957.538	0
18	Kab. Aceh Jaya	469.110	2.516.743	0	867.637	0
19	Kab. Nagan Raya	469.110	3.537.903	0	989.677	0
20	Kab. Aceh Tamiang	489.559	3.824.798	0	1.192.840	0
21	Kab. Bener Meriah	489.559	3.588.298	390.304	978.560	0
22	Kab. Pidie Jaya	469.110	2.590.498	390.304	1.260.540	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
15	Kota Lhokseumawe	0	0	326.122	490.000	49.281.321
16	Kab. Gayo Lues	0	0	370.982	252.750	41.339.103
17	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	326.122	582.250	58.179.352
18	Kab. Aceh Jaya	0	0	370.982	582.250	45.094.022
19	Kab. Nagan Raya	0	0	370.982	242.500	67.177.286
20	Kab. Aceh Tamiang	0	0	370.982	252.750	90.620.320
21	Kab. Bener Meriah	0	0	326.122	490.000	62.679.782
22	Kab. Pidie Jaya	0	0	326.122	572.000	64.476.140

SK No 022916 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
23	Kota Subulussalam	0	0	0	3.021.600	490.300
II	***Provinsi Sumatera Utara***	3.338.953.850	19.620.000	35.280.000	0	0
1	Kab. Asahan	0	0	0	7.438.800	1.286.500
2	Kab. Dairi	0	0	0	2.733.600	15.000
3	Kab. Deli Serdang	0	0	0	17.456.400	7.693.100
4	Kab. Karo	0	0	0	3.646.800	599.400
5	Kab. Labuhanbatu	0	0	0	5.752.800	2.640.200
6	Kab. Langkat	0	0	0	11.842.200	4.200.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
23	Kota Subulussalam	19.595.999	426.000	0	0	0
II	***Provinsi Sumatera Utara***	627.207.840	3.090.000	19.940.535	1.593.200	0
1	Kab. Asahan	118.066.722	621.000	0	0	0
2	Kab. Dairi	71.378.032	747.000	724.170	0	0
3	Kab. Deli Serdang	266.204.551	1.158.000	0	600.000	0
4	Kab. Karo	85.761.843	672.000	0	0	0
5	Kab. Labuhanbatu	80.053.621	405.000	0	0	0
6	Kab. Langkat	219.485.858	780.000	1.021.652	600.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
23	Kota Subulussalam	6.658.914	423.817	0	432.277
II	***Provinsi Sumatera Utara***	9.492.240	0	0	0
1	Kab. Asahan	11.208.327	1.755.468	0	2.972.325
2	Kab. Dairi	14.632.464	1.182.785	0	1.839.060
3	Kab. Deli Serdang	31.289.092	2.458.308	293.838	5.085.374
4	Kab. Karo	15.950.138	1.331.651	0	1.865.427
5	Kab. Labuhanbatu	11.486.139	931.422	0	3.191.259
6	Kab. Langkat	26.961.511	2.155.697	0	3.447.293

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
23	Kota Subulussalam	469.110	2.046.653	0	1.119.145	0
II	***Provinsi Sumatera Utara***	0	0	2.352.080	1.746.507	862.578
1	Kab. Asahan	505.783	6.745.691	0	1.961.246	0
2	Kab. Dairi	0	4.594.182	0	1.231.882	862.578
3	Kab. Deli Serdang	489.559	7.188.481	390.304	3.539.998	0
4	Kab. Karo	489.559	5.293.513	390.304	1.366.443	862.578
5	Kab. Labuhanbatu	0	3.220.721	0	1.487.845	0
6	Kab. Langkat	505.783	6.732.703	0	2.311.705	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
23	Kota Subulussalam	0	0	370.982	490.000	35.544.797
II	***Provinsi Sumatera Utara***	0	558.332	533.102	0	4.061.230.264
1	Kab. Asahan	0	0	326.122	334.750	153.222.734
2	Kab. Dairi	0	289.036	326.122	0	100.555.911
3	Kab. Deli Serdang	0	550.505	326.122	633.500	345.357.132
4	Kab. Karo	0	287.125	326.122	0	118.842.903
5	Kab. Labuhanbatu	0	377.444	326.122	232.250	110.104.823
6	Kab. Langkat	0	292.565	326.122	725.750	282.252.117

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
7	Kab. Mandailing Natal	0	0	0	5.443.200	3.106.300
8	Kab. Nias	0	0	0	2.451.000	1.412.500
9	Kab. Simalungun	0	0	0	8.143.800	775.200
10	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	4.233.000	520.800
11	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	4.544.400	684.300
12	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	3.295.800	945.700
13	Kab. Toba	0	0	0	3.334.200	127.200
14	Kota Binjai	0	0	0	2.795.400	1.288.400

SK No 022922 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7	Kab. Mandailing Natal	123.268.245	510.000	24.148.181	0	0
8	Kab. Nias	23.382.104	648.000	15.454.717	0	0
9	Kab. Simalungun	201.612.501	1.053.000	5.729	0	0
10	Kab. Tapanuli Selatan	76.493.006	396.000	6.605.281	0	0
11	Kab. Tapanuli Tengah	69.718.434	735.000	9.766.730	0	0
12	Kab. Tapanuli Utara	83.823.387	879.000	7.791.821	0	0
13	Kab. Toba	63.625.802	549.000	7.283.511	0	0
14	Kota Binjai	66.383.348	354.000	0	0	0

SK No 022923 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7	Kab. Mandailing Natal	23.876.746	1.788.007	0	4.667.643
8	Kab. Nias	11.798.844	810.216	0	1.228.566
9	Kab. Simalungun	38.479.123	2.715.358	0	2.684.557
10	Kab. Tapanuli Selatan	14.024.133	1.145.366	0	1.217.243
11	Kab. Tapanuli Tengah	20.175.029	1.606.602	0	3.669.203
12	Kab. Tapanuli Utara	16.206.594	1.317.821	0	2.220.037
13	Kab. Toba	15.406.320	1.201.494	0	1.439.700
14	Kota Binjai	6.474.478	507.605	0	306.854

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
7	Kab. Mandailing Natal	0	7.316.222	390.304	1.532.700	0
8	Kab. Nias	463.494	3.721.934	390.304	1.765.420	0
9	Kab. Simalungun	0	9.072.911	0	2.349.978	862.578
10	Kab. Tapanuli Selatan	489.559	4.459.863	0	1.222.604	0
11	Kab. Tapanuli Tengah	489.559	5.789.840	390.304	1.325.752	0
12	Kab. Tapanuli Utara	489.559	4.856.237	0	1.233.331	862.578
13	Kab. Toba	489.559	4.617.615	0	982.730	862.578
14	Kota Binjai	0	1.608.784	390.304	1.128.278	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
7	Kab. Mandailing Natal	0	0	326.122	375.750	196.749.420
8	Kab. Nias	0	0	326.122	242.500	64.095.721
9	Kab. Simalungun	0	0	326.122	818.000	268.898.857
10	Kab. Tapanuli Selatan	0	288.211	326.122	643.750	112.064.938
11	Kab. Tapanuli Tengah	0	287.065	326.122	232.250	119.740.590
12	Kab. Tapanuli Utara	0	0	326.122	293.750	124.541.737
13	Kab. Toba	0	0	326.122	654.000	100.899.831
14	Kota Binjai	0	0	326.122	490.000	82.053.573

SK No 022926 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15	Kota Medan	0	0	0	20.125.800	7.978.400
16	Kota Pematang Siantar	0	0	0	3.420.000	1.017.000
17	Kota Sibolga	0	0	0	1.866.000	280.200
18	Kota Tanjung Balai	0	0	0	2.058.600	993.000
19	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	2.440.800	557.100
20	Kota Padang Sidempuan	0	0	0	1.918.800	1.434.400
21	Kab. Pakpak Bharat	0	0	0	1.028.400	541.700
22	Kab. Nias Selatan	0	0	0	4.068.000	270.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
15	Kota Medan	219.601.092	1.089.000	0	0	0
16	Kota Pematang Siantar	58.203.080	270.000	0	0	0
17	Kota Sibolga	19.892.452	276.000	0	0	0
18	Kota Tanjung Balai	30.738.381	180.000	0	0	0
19	Kota Tebing Tinggi	35.976.439	174.000	0	0	0
20	Kota Padang Sidempuan	57.644.561	240.000	0	0	0
21	Kab. Pakpak Bharat	16.274.935	372.000	0	0	0
22	Kab. Nias Selatan	29.497.117	987.000	26.955.487	0	0

SK No 022928 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
15	Kota Medan	27.896.872	2.589.273	293.838	2.237.200
16	Kota Pematang Siantar	12.250.548	1.201.494	0	755.071
17	Kota Sibolga	4.064.828	288.781	0	342.783
18	Kota Tanjung Balai	5.113.390	507.605	0	675.647
19	Kota Tebing Tinggi	5.596.858	623.932	0	905.072
20	Kota Padang Sidempuan	7.598.361	610.102	293.838	470.490
21	Kab. Pakpak Bharat	5.561.493	572.683	0	300.334
22	Kab. Nias Selatan	45.717.610	2.184.165	0	2.760.167

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
15	Kota Medan	550.883	5.031.801	390.304	4.475.166	0
16	Kota Pematang Siantar	489.559	2.206.956	390.304	1.122.056	0
17	Kota Sibolga	469.110	1.290.783	390.304	843.140	0
18	Kota Tanjung Balai	489.559	1.721.371	390.304	979.449	0
19	Kota Tebing Tinggi	489.559	1.547.022	390.304	964.283	0
20	Kota Padang Sidempuan	489.559	2.570.213	390.304	1.053.445	0
21	Kab. Pakpak Bharat	0	2.701.449	0	936.802	962.578
22	Kab. Nias Selatan	0	8.978.161	390.304	2.190.907	862.578

SK No 022930 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
15	Kota Medan	0	546.095	326.122	0	293.131.846
16	Kota Pematang Siantar	0	0	326.122	490.000	82.142.190
17	Kota Sibolga	0	0	326.122	490.000	30.820.503
18	Kota Tanjung Balai	0	0	326.122	490.000	44.663.428
19	Kota Tebing Tinggi	0	0	326.122	490.000	50.481.491
20	Kota Padang Sidempuan	0	0	326.122	490.000	75.530.195
21	Kab. Pakpak Bharat	0	0	326.122	0	29.578.496
22	Kab. Nias Selatan	0	0	370.982	345.000	125.578.178

SK No 022931 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
23	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	4.450.800	99.000
24	Kab. Serdang Bedagai	0	0	0	7.273.200	2.490.700
25	Kab. Samosir	0	0	0	2.109.000	330.900
26	Kab. Batu Bara	0	0	0	4.411.200	842.100
27	Kab. Padang Lawas	0	0	0	4.987.800	2.728.800
28	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	3.186.000	568.500
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	4.070.400	671.700
30	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	3.296.400	456.300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
23	Kab. Humbang Hasundutan	64.408.385	987.000	1.357.804	0	0
24	Kab. Serdang Bedagai	118.556.505	570.000	0	0	0
25	Kab. Samosir	48.242.082	642.000	2.070.528	0	0
26	Kab. Batu Bara	79.013.106	405.000	0	0	0
27	Kab. Padang Lawas	55.911.202	309.000	2.952.671	0	0
28	Kab. Padang Lawas Utara	53.229.230	408.000	14.095.744	0	0
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	46.905.129	360.000	0	0	0
30	Kab. Labuhanbatu Utara	73.881.163	477.000	4.004.040	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
23	Kab. Humbang Hasundutan	12.998.266	777.677	0	1.095.045
24	Kab. Serdang Bedagai	17.442.857	1.382.899	0	3.083.732
25	Kab. Samosir	10.077.881	745.138	0	1.268.539
26	Kab. Batu Bara	12.000.124	963.961	0	2.293.237
27	Kab. Padang Lawas	15.635.076	982.671	0	3.569.868
28	Kab. Padang Lawas Utara	14.165.117	1.131.536	0	1.987.934
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	13.706.128	1.131.536	0	1.388.353
30	Kab. Labuhanbatu Utara	15.414.256	1.150.246	0	2.321.220

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
23	Kab. Humbang Hasundutan	469.110	3.441.802	0	1.038.414	862.578
24	Kab. Serdang Bedagai	0	5.427.177	390.304	2.146.504	0
25	Kab. Samosir	0	2.782.192	390.304	934.889	962.578
26	Kab. Batu Bara	489.559	3.805.016	390.304	1.242.705	0
27	Kab. Padang Lawas	469.110	4.749.861	0	1.134.544	0
28	Kab. Padang Lawas Utara	469.110	5.157.803	0	1.147.024	0
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	488.311	2.189.677	0	1.203.856	0
30	Kab. Labuhanbatu Utara	485.191	2.991.143	0	1.319.870	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
23	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	326.122	242.500	92.554.503
24	Kab. Serdang Bedagai	0	429.466	326.122	201.500	159.720.966
25	Kab. Samosir	0	0	326.122	490.000	71.372.153
26	Kab. Batu Bara	0	0	326.122	211.750	106.394.184
27	Kab. Padang Lawas	0	0	326.122	0	93.756.725
28	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	326.122	263.000	96.135.120
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	326.122	490.000	72.931.212
30	Kab. Labuhanbatu Utara	0	527.005	326.122	222.000	106.871.956

SK No 022936 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
31	Kab. Nias Utara	0	0	0	2.725.800	453.800
32	Kab. Nias Barat	0	0	0	1.009.200	168.000
33	Kota Gunungsitoli	0	0	0	2.555.400	1.144.300
III	***Provinsi Sumatera Barat***	1.212.372.310	4.740.000	14.160.000	0	0
1	Kab. Limapuluh Kota	0	0	0	4.713.000	2.145.100
2	Kab. Agam	0	0	0	6.159.000	2.333.200
3	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	539.400	1.171.500
4	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	5.107.800	2.144.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
31	Kab. Nias Utara	22.431.758	645.000	16.594.042	0	0
32	Kab. Nias Barat	15.220.274	462.000	21.932.203	0	0
33	Kota Gunungsitoli	35.839.037	426.000	4.025.330	0	0
III	***Provinsi Sumatera Barat***	491.120.226	1.662.000	1.556.709	1.593.200	1.750.000
1	Kab. Limapuluh Kota	138.131.223	756.000	0	0	0
2	Kab. Agam	158.218.515	783.000	0	600.000	0
3	Kab. Kepulauan Mentawai	16.630.412	540.000	8.642.742	0	0
4	Kab. Padang Pariaman	143.310.082	843.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
31	Kab. Nias Utara	12.617.733	693.889	0	1.548.734
32	Kab. Nias Barat	10.191.584	475.066	0	1.012.882
33	Kota Gunungsitoli	5.891.145	437.647	0	1.288.683
III	***Provinsi Sumatera Barat***	6.308.153	0	0	0
1	Kab. Limapuluh Kota	17.228.098	1.322.700	0	2.279.223
2	Kab. Agam	19.162.821	1.373.949	0	2.057.423
3	Kab. Kepulauan Mentawai	11.366.728	712.599	0	1.480.135
4	Kab. Padang Pariaman	23.473.720	1.704.220	293.838	1.117.573

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
31	Kab. Nias Utara	0	3.634.770	0	1.765.776	862.578
32	Kab. Nias Barat	482.071	3.032.320	0	1.666.110	0
33	Kota Gunungsitoli	0	2.678.184	390.304	647.251	0
III	***Provinsi Sumatera Barat***	0	0	2.784.800	1.353.535	862.578
1	Kab. Limapuluh Kota	505.783	3.569.644	390.304	1.284.322	0
2	Kab. Agam	534.487	4.103.645	390.304	1.510.208	862.578
3	Kab. Kepulauan Mentawai	485.334	2.239.254	390.304	2.033.966	0
4	Kab. Padang Pariaman	485.334	4.421.568	390.304	1.379.847	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
31	Kab. Nias Utara	0	0	370.982	602.750	64.947.612
32	Kab. Nias Barat	0	0	326.122	572.000	56.549.832
33	Kota Gunungsitoli	0	0	326.122	541.250	56.190.653
III	***Provinsi Sumatera Barat***	0	399.259	507.467	0	1.741.170.237
1	Kab. Limapuluh Kota	0	292.175	326.122	273.250	173.216.944
2	Kab. Agam	0	400.266	326.122	304.000	199.119.518
3	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	370.982	490.000	47.093.356
4	Kab. Padang Pariaman	0	0	326.122	314.250	186.174.936

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	Kab. Pasaman	0	0	0	5.691.600	2.756.700
6	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	7.086.000	2.485.500
7	Kab. Sijunjung	0	0	0	6.461.400	1.358.000
8	Kab. Solok	0	0	0	6.252.000	3.866.200
9	Kab. Tanah Datar	0	0	0	5.367.600	1.167.300
10	Kota Bukit Tinggi	0	0	0	2.712.000	807.700
11	Kota Padang Panjang	0	0	0	1.407.000	445.400
12	Kota Padang	0	0	0	10.799.400	6.182.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5	Kab. Pasaman	86.999.360	741.000	0	600.000	0
6	Kab. Pesisir Selatan	150.052.821	750.000	2.235.817	0	0
7	Kab. Sijunjung	65.752.688	492.000	0	0	0
8	Kab. Solok	120.828.379	720.000	8.084.658	0	0
9	Kab. Tanah Datar	130.498.046	567.000	0	600.000	0
10	Kota Bukit Tinggi	31.109.056	237.000	0	1.200.000	0
11	Kota Padang Panjang	19.047.510	102.000	0	0	0
12	Kota Padang	176.586.544	1.101.000	0	0	0

SK No 022943 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
5	Kab. Pasaman	15.129.433	1.080.288	0	1.749.062
6	Kab. Pesisir Selatan	17.172.030	1.220.203	0	1.815.992
7	Kab. Sijunjung	10.904.453	731.308	0	1.270.927
8	Kab. Solok	15.523.111	1.234.033	0	2.556.869
9	Kab. Tanah Datar	16.541.420	1.308.870	0	1.026.466
10	Kota Bukit Tinggi	4.398.415	423.817	0	240.953
11	Kota Padang Panjang	3.096.237	204.994	0	100.140
12	Kota Padang	15.856.234	1.439.027	0	925.897

SK No 022944 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
5	Kab. Pasaman	469.110	3.190.922	390.304	1.391.972	0
6	Kab. Pesisir Selatan	489.559	4.413.582	390.304	1.221.357	862.578
7	Kab. Sijunjung	469.110	2.595.281	390.304	1.052.030	862.578
8	Kab. Solok	485.334	3.795.709	390.304	1.298.616	862.578
9	Kab. Tanah Datar	521.383	3.129.578	390.304	1.265.012	862.578
10	Kota Bukit Tinggi	505.783	943.495	390.304	565.256	862.578
11	Kota Padang Panjang	469.110	725.620	390.304	756.871	862.578
12	Kota Padang	563.987	3.403.637	459.181	2.044.019	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
5	Kab. Pasaman	0	0	326.122	263.000	120.778.873
6	Kab. Pesisir Selatan	0	551.910	326.122	293.750	191.367.525
7	Kab. Sijunjung	0	0	326.122	572.000	93.238.201
8	Kab. Solok	0	286.616	326.122	283.500	166.794.029
9	Kab. Tanah Datar	0	432.075	326.122	633.500	164.637.254
10	Kota Bukit Tinggi	0	357.045	326.122	490.000	45.569.524
11	Kota Padang Panjang	0	0	326.122	0	27.933.886
12	Kota Padang	0	433.605	326.122	0	220.984.031

SK No 022946 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
13	Kota Payakumbuh	0	0	0	3.739.200	691.600
14	Kota Sawahlunto	0	0	0	1.479.000	243.600
15	Kota Solok	0	0	0	1.536.600	217.100
16	Kota Pariaman	0	0	0	1.788.000	639.100
17	Kab. Pasaman Barat	0	0	0	5.850.000	1.999.700
18	Kab. Dharmasraya	0	0	0	4.609.800	916.000
19	Kab. Solok Selatan	0	0	0	2.484.600	1.474.500
IV	***Provinsi Riau***	1.448.911.210	18.060.000	13.980.000	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
13	Kota Payakumbuh	40.011.608	213.000	0	0	0
14	Kota Sawahlunto	26.471.901	135.000	0	1.300.000	0
15	Kota Solok	25.830.105	186.000	0	0	0
16	Kota Pariaman	33.334.812	207.000	0	0	0
17	Kab. Pasaman Barat	90.508.043	690.000	0	0	0
18	Kab. Dharmasraya	60.448.236	381.000	3.298.565	0	0
19	Kab. Solok Selatan	56.316.222	492.000	0	0	0
IV	***Provinsi Riau***	275.564.331	1.473.000	892.302	1.300.000	1.400.000

SK No 022948 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
13	Kota Payakumbuh	5.181.987	442.527	0	185.947
14	Kota Sawahlunto	4.679.939	372.569	0	56.705
15	Kota Solok	3.404.437	204.994	0	120.259
16	Kota Pariaman	5.282.182	456.356	0	342.240
17	Kab. Pasaman Barat	16.246.896	1.317.821	0	2.550.389
18	Kab. Dharmasraya	13.032.239	912.713	0	1.075.195
19	Kab. Solok Selatan	8.251.646	493.775	0	1.026.123
IV	***Provinsi Riau***	5.396.188	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
13	Kota Payakumbuh	505.783	1.466.964	390.304	886.527	100.000
14	Kota Sawahlunto	485.334	1.168.899	390.304	775.275	862.578
15	Kota Solok	469.110	711.220	390.304	781.113	862.578
16	Kota Pariaman	469.110	1.365.041	459.181	744.373	862.578
17	Kab. Pasaman Barat	521.383	2.939.165	390.304	1.974.410	0
18	Kab. Dharmasraya	505.783	2.476.047	390.304	1.022.096	0
19	Kab. Solok Selatan	489.559	1.712.218	390.304	1.393.505	0
IV	***Provinsi Riau***	0	0	2.352.080	1.225.554	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
13	Kota Payakumbuh	0	357.045	326.122	490.000	54.988.614
14	Kota Sawahlunto	0	290.145	326.122	0	39.037.371
15	Kota Solok	0	441.100	326.122	0	35.481.042
16	Kota Pariaman	0	0	326.122	490.000	46.766.095
17	Kab. Pasaman Barat	0	551.910	326.122	252.750	126.118.893
18	Kab. Dharmasraya	0	0	326.122	602.750	89.996.850
19	Kab. Solok Selatan	0	0	326.122	211.750	75.062.324
IV	***Provinsi Riau***	0	454.595	533.102	0	1.771.542.362

SK No 022951 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Kab. Bengkalis	0	0	0	7.853.400	1.372.000
2	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	5.014.200	1.275.300
3	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	5.063.400	1.538.000
4	Kab. Kampar	0	0	0	11.384.400	1.797.900
5	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	5.744.400	698.300
6	Kab. Pelalawan	0	0	0	4.477.200	895.400
7	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	7.509.600	2.931.800
8	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	9.178.800	2.365.200

SK No 022952 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Kab. Bengkalis	112.812.546	993.000	0	0	0
2	Kab. Indragiri Hilir	108.979.816	1.212.000	19.787.170	0	0
3	Kab. Indragiri Hulu	89.143.263	735.000	0	0	0
4	Kab. Kampar	175.673.027	804.000	7.275.298	0	0
5	Kab. Kuantan Singingi	94.758.633	549.000	2.228.449	0	0
6	Kab. Pelalawan	70.156.702	636.000	4.882.745	0	0
7	Kab. Rokan Hilir	90.079.224	1.293.000	2.183.403	0	0
8	Kab. Rokan Hulu	95.236.021	1.125.000	2.308.648	0	0

SK No 022953 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Kab. Bengkalis	13.653.155	1.085.167	0	4.409.431
2	Kab. Indragiri Hilir	25.832.298	1.755.468	293.838	4.885.566
3	Kab. Indragiri Hulu	16.677.969	1.220.203	0	975.739
4	Kab. Kampar	24.395.262	1.979.171	0	4.468.066
5	Kab. Kuantan Singingi	19.783.348	1.373.949	0	1.699.647
6	Kab. Pelalawan	12.712.052	847.635	0	3.171.900
7	Kab. Rokan Hilir	16.859.366	1.266.572	0	3.906.566
8	Kab. Rokan Hulu	19.791.416	1.271.452	293.838	5.161.890

SK No 022954 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
1	Kab. Bengkalis	521.383	3.430.253	390.304	2.584.749	0
2	Kab. Indragiri Hilir	505.783	5.244.502	0	2.102.061	100.000
3	Kab. Indragiri Hulu	489.559	4.005.718	390.304	1.368.888	0
4	Kab. Kampar	505.783	6.075.194	390.304	1.873.768	0
5	Kab. Kuantan Singingi	489.559	3.529.936	390.304	1.218.953	0
6	Kab. Pelalawan	505.783	3.593.376	390.304	1.673.070	0
7	Kab. Rokan Hilir	505.783	3.971.897	390.304	2.113.070	0
8	Kab. Rokan Hulu	489.559	4.176.532	390.304	1.576.030	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
1	Kab. Bengkalis	0	374.976	326.122	222.000	150.028.486
2	Kab. Indragiri Hilir	0	353.505	326.122	222.000	177.889.629
3	Kab. Indragiri Hulu	0	0	326.122	283.500	122.217.665
4	Kab. Kampar	0	362.427	326.122	355.250	237.665.972
5	Kab. Kuantan Singingi	0	0	326.122	643.750	133.434.350
6	Kab. Pelalawan	0	0	326.122	263.000	104.531.289
7	Kab. Rokan Hilir	0	0	326.122	191.250	133.527.957
8	Kab. Rokan Hulu	0	0	326.122	602.750	144.293.562

SK No 022956 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
9	Kab. Siak	0	0	0	8.074.200	725.500
10	Kota Dumai	0	0	0	3.191.400	322.500
11	Kota Pekanbaru	0	0	0	10.338.600	4.438.900
12	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	3.489.600	732.100
V	***Provinsi Jambi***	710.312.680	4.140.000	8.760.000	0	0
1	Kab. Batanghari	0	0	0	6.508.800	3.250.900
2	Kab. Bungo	0	0	0	5.826.000	1.926.600
3	Kab. Kerinci	0	0	0	6.660.600	2.504.700

SK No 022957 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9	Kab. Siak	87.150.139	957.000	0	600.000	0
10	Kota Dumai	55.565.896	528.000	0	0	0
11	Kota Pekanbaru	138.873.250	1.005.000	0	0	0
12	Kab. Kepulauan Meranti	38.422.050	600.000	6.794.725	0	0
V	***Provinsi Jambi***	179.011.897	1.194.000	308.679	3.100.000	1.750.000
1	Kab. Batanghari	65.680.271	657.000	0	0	0
2	Kab. Bungo	62.936.007	717.000	0	0	0
3	Kab. Kerinci	74.083.223	528.000	0	0	0

SK No 022958 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
9	Kab. Siak	11.434.382	1.029.040	0	2.504.916
10	Kota Dumai	7.231.081	512.484	0	1.022.258
11	Kota Pekanbaru	13.119.442	1.336.530	0	1.853.714
12	Kab. Kepulauan Meranti	8.582.637	610.102	0	1.458.295
V	***Provinsi Jambi***	5.320.529	0	0	0
1	Kab. Batanghari	14.295.678	1.001.380	0	1.631.487
2	Kab. Bungo	16.723.679	1.201.494	293.838	2.782.400
3	Kab. Kerinci	19.438.261	1.303.991	0	1.287.214

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
9	Kab. Siak	505.783	3.605.500	390.304	1.362.046	0
10	Kota Dumai	505.783	1.852.956	390.304	1.527.405	100.000
11	Kota Pekanbaru	505.783	3.275.100	390.304	2.062.733	100.000
12	Kab. Kepulauan Meranti	485.334	2.952.579	0	1.808.975	0
V	***Provinsi Jambi***	0	0	2.352.080	1.192.149	0
1	Kab. Batanghari	469.110	2.144.373	0	1.140.792	0
2	Kab. Bungo	505.783	3.693.738	390.304	1.488.220	0
3	Kab. Kerinci	469.110	4.797.499	0	991.524	0

SK No 022960 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
9	Kab. Siak	0	511.524	326.122	283.500	119.459.956
10	Kota Dumai	0	575.671	326.122	490.000	74.141.860
11	Kota Pekanbaru	0	530.132	326.122	490.000	178.645.610
12	Kab. Kepulauan Meranti	0	577.966	326.122	582.250	67.422.735
V	***Provinsi Jambi***	0	357.881	507.467	0	918.307.362
1	Kab. Batanghari	0	0	326.122	490.000	97.595.913
2	Kab. Bungo	0	0	326.122	664.250	99.475.435
3	Kab. Kerinci	0	0	326.122	304.000	112.694.244

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
4	Kab. Merangin	0	0	0	6.579.000	2.775.100
5	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	5.184.600	745.100
6	Kab. Sarolangun	0	0	0	8.739.000	1.999.900
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	5.806.200	955.100
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	4.899.600	371.100
9	Kab. Tebo	0	0	0	4.936.800	1.810.900
10	Kota Jambi	0	0	0	7.204.200	1.896.700
11	Kota Sungai Penuh	0	0	0	2.727.600	534.800

SK No 022962 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4	Kab. Merangin	75.322.006	954.000	3.992.840	0	0
5	Kab. Muaro Jambi	92.550.576	654.000	0	0	0
6	Kab. Sarolangun	53.196.187	603.000	3.445.137	0	0
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	58.659.751	513.000	2.589.513	0	0
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	60.862.874	501.000	2.576.113	0	0
9	Kab. Tebo	59.454.986	720.000	0	0	0
10	Kota Jambi	95.823.397	726.000	0	0	0
11	Kota Sungai Penuh	36.583.376	243.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
4	Kab. Merangin	24.565.413	1.676.560	0	1.641.707
5	Kab. Muaro Jambi	17.123.466	1.322.700	0	3.076.097
6	Kab. Sarolangun	13.288.328	963.961	0	1.775.809
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	15.421.848	1.047.749	0	1.620.528
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	16.427.378	968.841	0	1.076.529
9	Kab. Tebo	15.394.444	1.187.664	0	1.646.484
10	Kota Jambi	12.345.553	1.317.821	0	954.563
11	Kota Sungai Penuh	8.889.770	628.811	0	258.753

SK No 022964 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
4	Kab. Merangin	489.559	5.670.264	0	1.267.669	0
5	Kab. Muaro Jambi	521.383	2.763.228	0	1.216.248	0
6	Kab. Sarolangun	489.559	2.625.625	0	1.117.702	0
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	485.334	3.581.339	390.304	1.181.276	0
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	469.110	3.052.441	0	1.021.550	0
9	Kab. Tebo	489.559	3.321.395	0	1.186.421	0
10	Kota Jambi	534.487	2.962.166	390.304	1.602.455	0
11	Kota Sungai Penuh	485.334	1.871.009	390.304	826.860	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
4	Kab. Merangin	0	0	326.122	334.750	125.594.990
5	Kab. Muaro Jambi	0	0	326.122	490.000	125.973.520
6	Kab. Sarolangun	0	0	326.122	592.500	89.162.830
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	326.122	273.250	92.851.314
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	416.386	326.122	252.750	93.221.794
9	Kab. Tebo	0	0	326.122	263.000	90.737.775
10	Kota Jambi	0	551.650	326.122	0	126.635.418
11	Kota Sungai Penuh	0	0	326.122	561.750	54.327.489

SK No 022966 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
VI	***Provinsi Sumatera Selatan***	1.700.019.590	8.220.000	16.920.000	0	0
1	Kab. Lahat	0	0	0	5.946.000	1.508.000
2	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	11.065.800	1.685.400
3	Kab. Musi Rawas	0	0	0	4.890.000	1.695.500
4	Kab. Muara Enim	0	0	0	6.622.200	2.982.800
5	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	0	11.089.200	1.179.300
6	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	0	4.035.000	1.657.200
7	Kota Palembang	0	0	0	16.382.400	3.820.600

SK No 022967 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
VI	***Provinsi Sumatera Selatan***	315.777.737	2.085.000	0	3.100.000	1.750.000
1	Kab. Lahat	96.379.268	831.000	9.950	0	0
2	Kab. Musi Banyuasin	112.675.501	1.002.000	8.211.978	0	0
3	Kab. Musi Rawas	82.393.088	879.000	640.638	0	0
4	Kab. Muara Enim	116.815.726	936.000	0	0	0
5	Kab. Ogan Komering Ilir	145.943.541	1.158.000	3.340.427	0	0
6	Kab. Ogan Komering Ulu	77.657.973	714.000	0	0	0
7	Kota Palembang	223.397.377	960.000	0	600.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
VI	***Provinsi Sumatera Selatan***	6.171.721	0	0	0
1	Kab. Lahat	29.258.882	2.114.207	0	3.333.666
2	Kab. Musi Banyuasin	25.318.469	1.695.269	0	2.962.061
3	Kab. Musi Rawas	16.625.461	1.136.416	0	2.650.749
4	Kab. Muara Enim	18.413.426	1.485.396	0	2.291.899
5	Kab. Ogan Komering Ilir	28.821.156	2.011.710	0	3.370.752
6	Kab. Ogan Komering Ulu	16.321.130	1.085.167	0	1.217.940
7	Kota Palembang	24.973.695	2.426.577	0	3.526.407

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
VI	***Provinsi Sumatera Selatan***	0	0	2.352.080	1.368.941	0
1	Kab. Lahat	485.334	6.538.063	0	1.390.905	100.000
2	Kab. Musi Banyuasin	505.783	4.370.796	390.304	2.073.068	100.000
3	Kab. Musi Rawas	485.334	4.350.860	390.304	2.102.612	100.000
4	Kab. Muara Enim	485.334	5.066.852	390.304	1.596.565	0
5	Kab. Ogan Komering Ilir	521.383	5.676.119	0	1.830.099	0
6	Kab. Ogan Komering Ulu	521.383	3.375.248	390.304	1.248.254	0
7	Kota Palembang	563.987	4.283.449	390.304	3.042.312	0

SK No 022970 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
VI	***Provinsi Sumatera Selatan***	0	460.006	533.102	0	2.058.758.177
1	Kab. Lahat	0	0	326.122	283.500	148.504.897
2	Kab. Musi Banyuasin	0	0	326.122	293.750	172.676.301
3	Kab. Musi Rawas	0	0	326.122	283.500	118.949.584
4	Kab. Muara Enim	0	0	326.122	273.250	157.685.874
5	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	326.122	324.500	205.592.309
6	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	326.122	0	108.549.721
7	Kota Palembang	0	479.616	326.122	0	285.172.846

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
8	Kota Prabumulih	0	0	0	2.427.600	1.002.400
9	Kota Pagar Alam	0	0	0	1.706.400	567.900
10	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	2.257.800	1.193.400
11	Kab. Banyuasin	0	0	0	11.197.800	3.073.800
12	Kab. Ogan Ilir	0	0	0	8.553.000	1.659.300
13	Kab. OKU Timur	0	0	0	10.072.200	1.130.400
14	Kab. OKU Selatan	0	0	0	4.986.000	589.200
15	Kab. Empat Lawang	0	0	0	2.043.000	733.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
8	Kota Prabumulih	43.036.343	231.000	0	0	0
9	Kota Pagar Alam	29.950.107	249.000	0	0	0
10	Kota Lubuk Linggau	45.368.045	528.000	0	0	0
11	Kab. Banyuasin	149.402.397	1.332.000	2.434.056	0	0
12	Kab. Ogan Ilir	103.354.413	768.000	0	0	0
13	Kab. OKU Timur	126.430.035	1.245.000	0	0	0
14	Kab. OKU Selatan	51.577.293	948.000	9.104.958	0	0
15	Kab. Empat Lawang	36.395.248	543.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
8	Kota Prabumulih	6.382.458	558.853	0	813.868
9	Kota Pagar Alam	5.189.874	423.817	0	683.172
10	Kota Lubuk Linggau	6.780.331	642.641	0	802.231
11	Kab. Banyuasin	27.821.771	2.179.285	0	3.418.948
12	Kab. Ogan Ilir	22.817.345	1.606.602	0	1.634.706
13	Kab. OKU Timur	23.059.328	1.290.161	0	2.793.419
14	Kab. OKU Selatan	18.084.391	1.168.955	0	3.303.230
15	Kab. Empat Lawang	7.962.651	577.563	0	2.232.716

SK No 022974 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
8	Kota Prabumulih	469.110	1.587.242	390.304	967.563	0
9	Kota Pagar Alam	485.334	1.359.131	390.304	762.731	0
10	Kota Lubuk Linggau	489.559	2.066.919	390.304	1.021.601	0
11	Kab. Banyuasin	505.783	6.021.548	0	2.225.617	0
12	Kab. Ogan Ilir	485.334	4.897.247	0	1.597.832	0
13	Kab. OKU Timur	505.783	5.932.351	390.304	1.936.125	0
14	Kab. OKU Selatan	469.110	4.742.666	0	1.351.035	100.000
15	Kab. Empat Lawang	463.494	2.812.541	0	1.197.209	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
8	Kota Prabumulih	0	0	326.122	490.000	58.682.863
9	Kota Pagar Alam	0	0	326.122	490.000	42.583.892
10	Kota Lubuk Linggau	0	500.035	326.122	490.000	62.856.988
11	Kab. Banyuasin	0	0	326.122	355.250	210.294.377
12	Kab. Ogan Ilir	0	0	326.122	654.000	148.353.901
13	Kab. OKU Timur	0	0	326.122	345.000	175.456.228
14	Kab. OKU Selatan	0	0	326.122	684.750	97.435.710
15	Kab. Empat Lawang	0	0	326.122	592.500	55.879.844

SK No 022976 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	2.346.600	5.454.500
17	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	2.444.400	2.136.600
VII	***Provinsi Bengkulu***	418.446.190	720.000	5.160.000	0	0
1	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	3.844.800	1.891.200
2	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	4.401.000	1.952.800
3	Kab. Rejang Lebong	0	0	0	2.455.200	693.600
4	Kota Bengkulu	0	0	0	6.778.200	3.740.200
5	Kab. Kaur	0	0	0	2.983.800	1.774.000

SK No 022977 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	21.329.172	216.000	1.343.856	0	0
17	Kab. Musi Rawas Utara	21.722.847	288.000	527.820	0	0
VII	***Provinsi Bengkulu***	137.652.287	1.497.000	0	1.800.000	1.750.000
1	Kab. Bengkulu Selatan	64.240.625	318.000	0	0	0
2	Kab. Bengkulu Utara	76.611.357	447.000	0	0	0
3	Kab. Rejang Lebong	73.192.859	576.000	1.573.109	0	0
4	Kota Bengkulu	82.215.079	480.000	0	0	0
5	Kab. Kaur	35.333.455	417.000	2.721.252	0	0

SK No 022978 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	6.886.609	423.817	0	1.408.056
17	Kab. Musi Rawas Utara	7.920.171	507.605	0	1.333.637
VII	***Provinsi Bengkulu***	5.455.123	0	0	0
1	Kab. Bengkulu Selatan	13.491.008	912.713	293.838	1.498.806
2	Kab. Bengkulu Utara	20.728.130	1.257.622	293.838	2.602.042
3	Kab. Rejang Lebong	17.207.412	1.303.991	0	1.341.452
4	Kota Bengkulu	11.870.404	1.317.821	293.838	846.745
5	Kab. Kaur	14.010.095	950.131	0	1.145.658

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	469.110	2.143.531	390.304	1.422.625	0
17	Kab. Musi Rawas Utara	469.110	1.805.914	0	1.769.391	0
VII	***Provinsi Bengkulu***	0	0	2.352.080	1.168.855	0
1	Kab. Bengkulu Selatan	485.334	3.138.328	390.304	1.215.390	100.000
2	Kab. Bengkulu Utara	469.110	4.595.902	390.304	1.819.461	0
3	Kab. Rejang Lebong	500.934	3.110.727	390.304	1.129.490	0
4	Kota Bengkulu	505.783	1.847.665	390.304	1.238.182	0
5	Kab. Kaur	469.110	3.898.268	0	906.403	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	326.122	0	44.160.302
17	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	326.122	490.000	41.741.617
VII	***Provinsi Bengkulu***	0	340.538	507.467	0	576.849.540
1	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	326.122	232.250	92.378.718
2	Kab. Bengkulu Utara	0	0	326.122	334.750	116.229.438
3	Kab. Rejang Lebong	0	483.892	326.122	592.500	104.877.592
4	Kota Bengkulu	0	0	326.122	490.000	112.340.343
5	Kab. Kaur	0	0	326.122	232.250	65.167.544

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
6	Kab. Seluma	0	0	0	2.562.600	1.386.800
7	Kab. Mukomuko	0	0	0	3.579.000	623.100
8	Kab. Lebong	0	0	0	2.188.200	1.005.100
9	Kab. Kepahiang	0	0	0	2.410.200	1.108.200
10	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	1.856.400	912.900
VIII	***Provinsi Lampung***	1.593.765.290	4.020.000	17.340.000	0	0
1	Kab. Lampung Barat	0	0	0	3.255.600	1.176.000
2	Kab. Lampung Selatan	0	0	0	14.833.200	4.072.800

SK No 022982 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6	Kab. Seluma	56.128.825	237.000	451.910	0	0
7	Kab. Mukomuko	47.073.973	483.000	0	0	0
8	Kab. Lebong	28.144.162	570.000	259.429	0	0
9	Kab. Kepahiang	36.971.386	627.000	0	0	0
10	Kab. Bengkulu Tengah	41.093.716	234.000	187.453	0	0
VIII	***Provinsi Lampung***	307.879.685	1.479.000	126.622	3.100.000	1.750.000
1	Kab. Lampung Barat	64.073.900	492.000	599.789	0	0
2	Kab. Lampung Selatan	156.861.275	1.218.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
6	Kab. Seluma	20.244.553	1.322.700	0	1.704.383
7	Kab. Mukomuko	15.100.831	1.066.458	0	1.077.351
8	Kab. Lebong	10.586.288	815.095	0	977.688
9	Kab. Kepahiang	12.244.934	880.174	0	1.243.878
10	Kab. Bengkulu Tengah	17.016.095	1.220.203	0	355.111
VIII	***Provinsi Lampung***	6.032.243	0	0	0
1	Kab. Lampung Barat	13.375.149	898.883	0	2.187.219
2	Kab. Lampung Selatan	25.385.018	1.722.929	0	3.818.324

SK No 022984 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
6	Kab. Seluma	469.110	3.793.342	0	1.821.817	0
7	Kab. Mukomuko	489.559	3.070.256	390.304	982.698	0
8	Kab. Lebong	464.118	2.405.548	0	858.956	0
9	Kab. Kepahiang	469.110	1.906.785	0	908.077	0
10	Kab. Bengkulu Tengah	469.110	2.468.340	0	866.137	0
VIII	***Provinsi Lampung***	0	0	2.352.080	1.247.150	0
1	Kab. Lampung Barat	469.110	3.717.441	0	1.454.426	0
2	Kab. Lampung Selatan	489.559	5.317.755	0	2.234.407	0

SK No 022985 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
6	Kab. Seluma	0	365.145	326.122	232.250	91.046.557
7	Kab. Mukomuko	0	0	326.122	643.750	74.906.402
8	Kab. Lebong	0	0	326.122	252.750	48.853.456
9	Kab. Kepahiang	0	0	326.122	572.000	59.667.866
10	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	326.122	242.500	67.248.087
VIII	***Provinsi Lampung***	0	462.330	507.467	0	1.940.061.867
1	Kab. Lampung Barat	0	0	326.122	643.750	92.669.389
2	Kab. Lampung Selatan	0	373.406	326.122	314.250	216.967.045

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3	Kab. Lampung Tengah	0	0	0	19.767.000	4.934.400
4	Kab. Lampung Utara	0	0	0	7.584.000	1.574.100
5	Kab. Lampung Timur	0	0	0	19.789.800	4.008.600
6	Kab. Tanggamus	0	0	0	9.906.600	2.837.300
7	Kab. Tulang Bawang	0	0	0	6.735.000	3.454.200
8	Kab. Way Kanan	0	0	0	7.656.600	2.073.800
9	Kota Bandar Lampung	0	0	0	15.423.600	3.216.000
10	Kota Metro	0	0	0	4.522.200	1.853.100

SK No 022987 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3	Kab. Lampung Tengah	233.934.691	1.404.000	0	0	0
4	Kab. Lampung Utara	131.747.165	1.068.000	0	0	0
5	Kab. Lampung Timur	189.693.225	924.000	0	0	0
6	Kab. Tanggamus	130.527.053	726.000	5.065.361	0	0
7	Kab. Tulang Bawang	60.236.531	753.000	3.295.061	0	0
8	Kab. Way Kanan	93.158.741	912.000	6.177.892	0	0
9	Kota Bandar Lampung	152.026.769	708.000	0	0	0
10	Kota Metro	43.811.123	369.000	0	0	0

SK No 022988 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3	Kab. Lampung Tengah	28.801.638	2.616.932	293.838	5.628.230
4	Kab. Lampung Utara	23.029.986	1.774.177	0	2.696.280
5	Kab. Lampung Timur	30.671.874	2.067.838	0	3.634.927
6	Kab. Tanggamus	21.450.943	1.587.893	0	1.353.294
7	Kab. Tulang Bawang	16.424.911	1.280.402	0	2.548.484
8	Kab. Way Kanan	17.505.268	1.168.955	0	2.486.845
9	Kota Bandar Lampung	20.174.385	1.732.688	0	0
10	Kota Metro	8.387.370	614.981	0	457.902

SK No 022989 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
3	Kab. Lampung Tengah	521.383	6.437.848	0	2.877.551	0
4	Kab. Lampung Utara	505.783	6.347.931	0	1.630.616	0
5	Kab. Lampung Timur	534.487	5.949.775	390.304	2.361.367	0
6	Kab. Tanggamus	500.934	6.033.037	0	1.651.842	0
7	Kab. Tulang Bawang	485.334	4.404.744	390.304	1.566.557	0
8	Kab. Way Kanan	485.334	4.573.474	0	1.651.090	0
9	Kota Bandar Lampung	521.383	4.383.401	390.304	2.435.582	0
10	Kota Metro	505.783	1.349.281	390.304	895.393	100.000

SK No 022990 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
3	Kab. Lampung Tengah	0	0	326.122	427.000	307.970.633
4	Kab. Lampung Utara	0	0	326.122	375.750	178.659.910
5	Kab. Lampung Timur	0	0	326.122	386.000	260.738.319
6	Kab. Tanggamus	0	386.293	326.122	345.000	182.697.672
7	Kab. Tulang Bawang	0	0	326.122	293.750	102.194.400
8	Kab. Way Kanan	0	0	326.122	283.500	138.459.621
9	Kota Bandar Lampung	0	591.670	326.122	0	201.929.904
10	Kota Metro	0	0	326.122	541.250	64.123.809

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
11	Kab. Pesawaran	0	0	0	7.143.000	1.018.200
12	Kab. Pringsewu	0	0	0	6.491.400	1.547.000
13	Kab. Mesuji	0	0	0	4.145.400	1.495.900
14	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	4.311.000	1.733.300
15	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	1.835.400	244.500
IX	***Provinsi DKI Jakarta***	1.839.526.630	60.000	10.140.000	93.404.400	35.075.600
X	***Provinsi Jawa Barat***	9.342.155.410	2.040.000	71.280.000	0	0
1	Kab. Bandung	0	0	0	37.754.400	15.268.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
11	Kab. Pesawaran	101.061.828	591.000	1.522.162	0	0
12	Kab. Pringsewu	111.558.653	663.000	0	0	0
13	Kab. Mesuji	30.906.435	606.000	1.118.823	0	0
14	Kab. Tulang Bawang Barat	54.747.613	453.000	0	0	0
15	Kab. Pesisir Barat	33.201.377	606.000	5.082.441	0	0
IX	***Provinsi DKI Jakarta***	1.269.013.578	5.934.000	0	5.400.000	0
X	***Provinsi Jawa Barat***	1.069.276.935	2.814.000	0	3.100.000	1.750.000
1	Kab. Bandung	461.345.453	1.122.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
11	Kab. Pesawaran	12.851.895	828.925	0	1.993.645
12	Kab. Pringsewu	12.190.526	861.464	0	2.599.570
13	Kab. Mesuji	10.290.281	796.386	0	600.059
14	Kab. Tulang Bawang Barat	11.655.336	1.047.749	0	1.208.857
15	Kab. Pesisir Barat	8.415.432	661.350	0	1.206.514
IX	***Provinsi DKI Jakarta***	19.562.371	0	0	0
X	***Provinsi Jawa Barat***	5.823.691	0	0	0
1	Kab. Bandung	43.480.164	3.828.185	293.838	13.601.834

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
11	Kab. Pesawaran	469.110	3.624.128	390.304	933.576	0
12	Kab. Pringsewu	505.783	3.204.523	0	1.256.442	0
13	Kab. Mesuji	485.334	2.238.249	0	1.260.510	0
14	Kab. Tulang Bawang Barat	467.862	2.423.549	0	1.030.480	100.000
15	Kab. Pesisir Barat	0	2.591.680	390.304	2.169.586	0
IX	***Provinsi DKI Jakarta***	0	19.916.017	2.784.800	0	0
X	***Provinsi Jawa Barat***	0	0	2.352.080	1.683.639	862.578
1	Kab. Bandung	652.487	8.856.225	0	6.671.884	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
11	Kab. Pesawaran	0	373.298	326.122	252.750	133.379.943
12	Kab. Pringsewu	0	0	326.122	232.250	141.436.733
13	Kab. Mesuji	0	0	326.122	561.750	54.831.249
14	Kab. Tulang Bawang Barat	0	382.133	326.122	582.250	80.469.251
15	Kab. Pesisir Barat	0	0	326.122	602.750	57.333.456
IX	***Provinsi DKI Jakarta***	0	2.646.103	523.322	0	3.303.986.821
X	***Provinsi Jawa Barat***	0	565.103	523.322	0	10.504.226.758
1	Kab. Bandung	0	487.599	372.462	807.750	595.405.459

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
2	Kab. Bekasi	0	0	0	27.802.800	2.770.700
3	Kab. Bogor	0	0	0	53.484.000	42.680.200
4	Kab. Ciamis	0	0	0	15.754.200	3.549.100
5	Kab. Cianjur	0	0	0	28.910.400	12.861.100
6	Kab. Cirebon	0	0	0	21.790.200	11.739.700
7	Kab. Garut	0	0	0	46.973.400	15.173.600
8	Kab. Indramayu	0	0	0	24.232.200	10.219.500
9	Kab. Karawang	0	0	0	31.799.400	13.377.400

SK No 022997 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	Kab. Bekasi	260.758.159	1.212.000	0	0	0
3	Kab. Bogor	378.441.743	1.611.000	0	0	0
4	Kab. Ciamis	264.758.229	681.000	0	0	0
5	Kab. Cianjur	332.274.137	930.000	0	0	0
6	Kab. Cirebon	332.535.151	834.000	0	600.000	0
7	Kab. Garut	398.252.317	1.320.000	0	0	0
8	Kab. Indramayu	235.580.995	1.038.000	0	0	0
9	Kab. Karawang	278.665.330	1.224.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
2	Kab. Bekasi	26.204.176	3.003.331	0	4.650.852
3	Kab. Bogor	67.320.869	5.859.413	0	16.113.087
4	Kab. Ciamis	30.911.629	2.286.662	0	2.497.225
5	Kab. Cianjur	37.622.861	2.794.266	0	13.927.742
6	Kab. Cirebon	45.256.174	3.725.688	0	6.033.957
7	Kab. Garut	51.545.992	4.209.705	0	15.766.171
8	Kab. Indramayu	33.920.226	3.096.878	293.838	2.915.021
9	Kab. Karawang	37.619.980	3.017.969	0	3.938.344

SK No 022999 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
2	Kab. Bekasi	535.283	5.742.062	0	4.514.827	0
3	Kab. Bogor	0	8.864.231	390.304	7.849.219	862.578
4	Kab. Ciamis	563.987	7.703.745	0	2.580.463	0
5	Kab. Cianjur	0	9.029.109	0	4.067.354	862.578
6	Kab. Cirebon	0	8.586.296	0	3.847.586	0
7	Kab. Garut	550.883	11.503.492	390.304	4.558.575	862.578
8	Kab. Indramayu	521.383	8.696.488	0	3.488.248	0
9	Kab. Karawang	0	8.512.995	390.304	4.617.890	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
2	Kab. Bekasi	0	0	372.462	725.750	338.292.402
3	Kab. Bogor	0	0	372.462	613.000	584.462.106
4	Kab. Ciamis	0	0	372.462	766.750	332.425.452
5	Kab. Cianjur	0	0	372.462	818.000	444.470.009
6	Kab. Cirebon	0	457.523	372.462	654.000	436.432.737
7	Kab. Garut	0	0	372.462	920.500	552.399.979
8	Kab. Indramayu	0	0	372.462	807.750	325.182.989
9	Kab. Karawang	0	0	372.462	797.500	384.333.574

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
10	Kab. Kuningan	0	0	0	19.940.400	6.575.700
11	Kab. Majalengka	0	0	0	16.614.000	10.195.200
12	Kab. Purwakarta	0	0	0	8.797.800	2.441.700
13	Kab. Subang	0	0	0	22.977.000	6.702.100
14	Kab. Sukabumi	0	0	0	54.856.200	14.160.500
15	Kab. Sumedang	0	0	0	16.870.200	4.988.200
16	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	26.564.400	5.579.700
17	Kota Bandung	0	0	0	29.969.400	14.939.200

SK No 023002 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
10	Kab. Kuningan	270.640.424	630.000	0	600.000	0
11	Kab. Majalengka	254.712.323	1.284.000	0	0	0
12	Kab. Purwakarta	167.051.886	585.000	0	0	0
13	Kab. Subang	263.788.636	1.038.000	0	0	0
14	Kab. Sukabumi	280.775.360	843.000	0	600.000	0
15	Kab. Sumedang	264.218.044	1.176.000	0	0	0
16	Kab. Tasikmalaya	344.669.804	1.179.000	0	0	0
17	Kota Bandung	304.029.336	1.518.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
10	Kab. Kuningan	29.523.066	2.221.583	0	3.188.783
11	Kab. Majalengka	24.258.959	1.965.341	0	7.470.324
12	Kab. Purwakarta	16.770.710	1.285.282	0	3.952.389
13	Kab. Subang	28.042.426	2.472.946	0	2.789.457
14	Kab. Sukabumi	42.680.551	3.785.887	0	9.309.269
15	Kab. Sumedang	26.134.978	2.216.704	0	3.179.016
16	Kab. Tasikmalaya	32.744.901	2.798.337	293.838	9.943.612
17	Kota Bandung	41.081.202	4.782.388	0	1.930.127

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
10	Kab. Kuningan	0	8.128.635	390.304	2.462.411	0
11	Kab. Majalengka	20.449	7.824.538	0	2.642.822	0
12	Kab. Purwakarta	505.783	4.550.575	390.304	2.072.079	0
13	Kab. Subang	550.883	7.917.108	0	3.066.913	0
14	Kab. Sukabumi	0	12.000.260	0	5.128.741	862.578
15	Kab. Sumedang	500.934	7.512.456	390.304	2.436.950	0
16	Kab. Tasikmalaya	505.783	7.920.440	390.304	3.411.318	962.578
17	Kota Bandung	609.883	5.677.379	459.181	4.406.255	862.578

SK No 023005 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
10	Kab. Kuningan	0	0	372.462	654.000	345.327.768
11	Kab. Majalengka	0	0	372.462	756.500	328.116.918
12	Kab. Purwakarta	0	0	372.462	664.250	209.440.220
13	Kab. Subang	0	0	372.462	797.500	340.515.431
14	Kab. Sukabumi	0	542.312	372.462	971.750	426.888.870
15	Kab. Sumedang	0	0	372.462	756.500	330.752.748
16	Kab. Tasikmalaya	0	0	372.462	889.750	438.226.227
17	Kota Bandung	0	545.406	372.462	490.000	411.672.797

SK No 023006 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
18	Kota Bekasi	0	0	0	26.125.200	4.340.600
19	Kota Bogor	0	0	0	8.464.200	9.179.100
20	Kota Cirebon	0	0	0	4.808.400	4.178.700
21	Kota Depok	0	0	0	20.106.600	7.833.600
22	Kota Sukabumi	0	0	0	4.854.000	4.024.500
23	Kota Tasikmalaya	0	0	0	8.980.800	3.492.200
24	Kota Cimahi	0	0	0	6.382.200	3.201.700
25	Kota Banjar	0	0	0	4.795.200	1.708.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
18	Kota Bekasi	211.961.360	750.000	0	0	0
19	Kota Bogor	125.859.842	426.000	0	0	0
20	Kota Cirebon	68.190.220	408.000	0	0	0
21	Kota Depok	126.071.650	672.000	0	0	0
22	Kota Sukabumi	55.191.230	195.000	0	0	0
23	Kota Tasikmalaya	146.548.296	552.000	0	0	0
24	Kota Cimahi	80.156.252	597.000	0	0	0
25	Kota Banjar	40.944.144	261.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
18	Kota Bekasi	22.293.533	2.356.619	0	0
19	Kota Bogor	15.087.120	1.443.906	0	0
20	Kota Cirebon	13.285.773	1.517.935	0	570.557
21	Kota Depok	15.561.952	2.030.419	293.838	905.929
22	Kota Sukabumi	10.735.195	898.883	0	655.439
23	Kota Tasikmalaya	14.719.754	1.596.843	0	2.287.592
24	Kota Cimahi	9.118.942	763.847	0	1.086.876
25	Kota Banjar	6.576.407	610.102	293.838	272.137

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
18	Kota Bekasi	0	4.149.069	390.304	4.261.272	0
19	Kota Bogor	521.383	2.460.706	0	2.193.673	862.578
20	Kota Cirebon	0	1.780.404	390.304	1.145.798	0
21	Kota Depok	0	3.511.818	390.304	3.406.692	0
22	Kota Sukabumi	505.783	2.267.289	390.304	1.164.966	862.578
23	Kota Tasikmalaya	0	3.534.407	390.304	1.722.542	862.578
24	Kota Cimahi	0	1.836.265	390.304	1.453.025	862.578
25	Kota Banjar	500.934	1.578.941	390.304	935.969	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
18	Kota Bekasi	0	0	372.462	490.000	277.490.419
19	Kota Bogor	0	378.000	372.462	490.000	167.738.970
20	Kota Cirebon	0	0	372.462	490.000	97.138.553
21	Kota Depok	0	488.151	372.462	490.000	182.135.415
22	Kota Sukabumi	0	0	372.462	490.000	82.607.629
23	Kota Tasikmalaya	0	0	372.462	531.000	185.590.778
24	Kota Cimahi	0	0	372.462	490.000	106.711.451
25	Kota Banjar	0	0	372.462	531.000	59.770.638

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
26	Kab. Bandung Barat	0	0	0	18.932.400	8.311.600
27	Kab. Pangandaran	0	0	0	5.058.000	1.149.000
XI	***Provinsi Jawa Tengah***	5.822.923.060	840.000	61.260.000	0	0
1	Kab. Banjarnegara	0	0	0	14.795.400	3.018.400
2	Kab. Banyumas	0	0	0	23.267.400	7.364.500
3	Kab. Batang	0	0	0	14.928.000	4.013.900
4	Kab. Blora	0	0	0	17.158.200	2.070.400
5	Kab. Boyolali	0	0	0	17.314.200	1.699.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
26	Kab. Bandung Barat	228.182.540	756.000	0	0	0
27	Kab. Pangandaran	87.697.514	570.000	0	0	0
XI	***Provinsi Jawa Tengah***	1.098.687.112	2.331.000	0	1.800.000	1.750.000
1	Kab. Banjarnegara	184.236.951	888.000	0	0	0
2	Kab. Banyumas	286.792.251	1.167.000	0	600.000	0
3	Kab. Batang	130.888.161	261.000	0	0	0
4	Kab. Blora	171.363.158	930.000	0	0	0
5	Kab. Boyolali	190.470.851	990.000	0	600.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
26	Kab. Bandung Barat	24.493.761	2.030.419	0	8.950.162
27	Kab. Pangandaran	11.765.583	931.422	0	859.426
XI	***Provinsi Jawa Tengah***	7.448.975	0	0	0
1	Kab. Banjarnegara	26.925.437	2.184.165	0	5.427.440
2	Kab. Banyumas	30.716.439	2.063.767	0	6.544.015
3	Kab. Batang	15.092.299	1.271.452	293.838	1.756.718
4	Kab. Blora	22.822.462	1.332.459	0	2.443.833
5	Kab. Boyolali	19.401.808	1.411.367	0	2.434.884

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
26	Kab. Bandung Barat	550.883	5.191.307	390.304	3.143.369	862.578
27	Kab. Pangandaran	505.783	3.018.876	0	2.398.834	862.578
XI	***Provinsi Jawa Tengah***	0	0	2.784.800	1.726.355	862.578
1	Kab. Banjarnegara	521.383	6.410.486	0	2.184.693	0
2	Kab. Banyumas	563.987	8.058.313	0	3.327.578	0
3	Kab. Batang	505.783	5.329.768	390.304	1.839.791	0
4	Kab. Blora	505.783	5.770.979	390.304	2.003.781	0
5	Kab. Boyolali	505.783	6.533.375	390.304	2.236.346	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
26	Kab. Bandung Barat	0	0	372.462	654.000	302.821.785
27	Kab. Pangandaran	0	0	372.462	592.500	115.781.978
XI	***Provinsi Jawa Tengah***	0	556.538	523.322	0	7.003.493.740
1	Kab. Banjarnegara	0	0	372.462	0	246.964.817
2	Kab. Banyumas	0	451.830	372.462	0	371.289.542
3	Kab. Batang	0	0	372.462	0	176.943.476
4	Kab. Blora	0	0	372.462	304.000	227.467.821
5	Kab. Boyolali	0	376.140	372.462	365.500	245.964.798

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
6	Kab. Brebes	0	0	0	25.380.000	9.176.700
7	Kab. Cilacap	0	0	0	22.906.200	4.227.200
8	Kab. Demak	0	0	0	20.662.800	4.266.300
9	Kab. Grobogan	0	0	0	25.243.800	5.379.400
10	Kab. Jepara	0	0	0	25.363.200	7.335.100
11	Kab. Karanganyar	0	0	0	17.588.400	5.102.100
12	Kab. Kebumen	0	0	0	20.310.000	2.044.700
13	Kab. Kendal	0	0	0	20.442.600	5.782.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6	Kab. Brebes	223.468.620	1.587.000	0	0	0
7	Kab. Cilacap	265.054.495	1.140.000	0	0	0
8	Kab. Demak	162.060.289	789.000	1.266.733	600.000	0
9	Kab. Grobogan	202.309.853	1.008.000	0	600.000	0
10	Kab. Jepara	169.549.600	990.000	2.647.565	600.000	0
11	Kab. Karanganyar	205.869.801	843.000	0	0	0
12	Kab. Kebumen	255.174.218	1.383.000	0	0	0
13	Kab. Kendal	181.304.543	534.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
6	Kab. Brebes	28.333.177	2.825.997	0	5.883.115
7	Kab. Cilacap	29.785.912	2.500.606	293.838	3.579.791
8	Kab. Demak	21.329.183	1.644.021	0	1.345.343
9	Kab. Grobogan	23.765.039	1.765.227	0	4.654.425
10	Kab. Jepara	16.413.060	1.108.756	0	2.647.089
11	Kab. Karanganyar	16.064.524	1.303.991	0	2.513.142
12	Kab. Kebumen	28.044.924	1.793.695	0	3.706.483
13	Kab. Kendal	22.619.253	1.830.305	0	1.973.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
6	Kab. Brebes	505.783	5.970.703	0	3.477.201	100.000
7	Kab. Cilacap	500.934	7.188.197	390.304	3.505.410	0
8	Kab. Demak	505.783	5.090.711	0	2.321.411	862.578
9	Kab. Grobogan	505.783	6.352.763	0	2.846.882	0
10	Kab. Jepara	521.383	5.279.394	390.304	2.429.269	862.578
11	Kab. Karanganyar	521.383	5.232.071	0	2.032.097	862.578
12	Kab. Kebumen	521.383	8.399.343	390.304	2.749.437	0
13	Kab. Kendal	521.383	6.302.473	390.304	2.158.322	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
6	Kab. Brebes	0	451.830	372.462	664.250	308.196.838
7	Kab. Cilacap	0	451.830	372.462	365.500	342.262.679
8	Kab. Demak	0	451.830	372.462	283.500	223.851.944
9	Kab. Grobogan	0	406.798	372.462	334.750	275.545.182
10	Kab. Jepara	0	376.140	372.462	0	236.885.900
11	Kab. Karanganyar	0	376.140	372.462	314.250	258.995.939
12	Kab. Kebumen	0	450.455	372.462	406.500	325.746.904
13	Kab. Kendal	0	451.830	372.462	0	244.683.635

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
14	Kab. Klaten	0	0	0	19.994.400	1.287.200
15	Kab. Kudus	0	0	0	13.876.800	3.571.600
16	Kab. Magelang	0	0	0	17.743.800	4.445.900
17	Kab. Pati	0	0	0	21.695.400	2.115.400
18	Kab. Pekalongan	0	0	0	19.912.200	4.122.800
19	Kab. Pemalang	0	0	0	21.150.000	4.127.700
20	Kab. Purbalingga	0	0	0	10.899.600	3.593.300
21	Kab. Purworejo	0	0	0	12.658.200	1.732.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
14	Kab. Klaten	217.369.395	993.000	0	0	0
15	Kab. Kudus	149.419.748	390.000	0	1.200.000	0
16	Kab. Magelang	188.392.269	513.000	0	0	0
17	Kab. Pati	217.316.704	981.000	0	0	0
18	Kab. Pekalongan	165.150.776	591.000	0	0	0
19	Kab. Pemalang	222.429.812	810.000	0	0	0
20	Kab. Purbalingga	172.145.574	579.000	0	600.000	0
21	Kab. Purworejo	174.426.817	429.000	0	600.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
14	Kab. Klaten	25.625.466	2.100.377	293.838	2.338.452
15	Kab. Kudus	13.153.996	973.720	0	773.725
16	Kab. Magelang	21.351.161	1.713.978	0	3.032.083
17	Kab. Pati	20.260.162	1.486.204	0	1.585.364
18	Kab. Pekalongan	20.865.620	1.774.177	0	4.376.107
19	Kab. Pemalang	18.801.183	1.606.602	0	4.408.527
20	Kab. Purbalingga	15.923.600	1.355.239	0	3.340.105
21	Kab. Purworejo	19.690.202	1.383.707	0	2.022.661

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
14	Kab. Klaten	505.783	7.808.973	390.304	2.627.279	862.578
15	Kab. Kudus	521.383	3.534.247	390.304	1.920.388	0
16	Kab. Magelang	563.987	6.847.251	390.304	2.524.031	862.578
17	Kab. Pati	521.383	7.208.059	390.304	3.035.150	0
18	Kab. Pekalongan	505.783	6.242.377	390.304	819.381	0
19	Kab. Pemalang	505.783	5.088.988	0	1.784.275	0
20	Kab. Purbalingga	521.383	5.845.355	390.304	2.150.657	0
21	Kab. Purworejo	505.783	6.747.032	390.304	1.840.250	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
14	Kab. Klaten	0	406.798	372.462	756.500	283.732.805
15	Kab. Kudus	0	0	372.462	0	190.098.373
16	Kab. Magelang	0	451.830	372.462	490.000	249.694.634
17	Kab. Pati	0	0	372.462	355.250	277.322.842
18	Kab. Pekalongan	0	376.140	372.462	334.750	225.833.877
19	Kab. Pemalang	0	403.787	372.462	633.500	282.122.619
20	Kab. Purbalingga	0	406.798	372.462	0	218.123.377
21	Kab. Purworejo	0	376.140	372.462	304.000	224.342.036

SK No 023026 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
22	Kab. Rembang	0	0	0	17.180.400	2.511.000
23	Kab. Semarang	0	0	0	16.891.200	3.336.700
24	Kab. Sragen	0	0	0	16.642.200	2.322.800
25	Kab. Sukoharjo	0	0	0	13.347.000	1.583.300
26	Kab. Tegal	0	0	0	22.882.800	7.060.300
27	Kab. Temanggung	0	0	0	12.677.400	3.724.000
28	Kab. Wonogiri	0	0	0	13.186.800	1.922.800
29	Kab. Wonosobo	0	0	0	15.745.800	5.287.800

SK No 023027 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
22	Kab. Rembang	127.082.766	318.000	0	600.000	0
23	Kab. Semarang	179.668.805	705.000	0	0	0
24	Kab. Sragen	176.471.209	606.000	0	0	0
25	Kab. Sukoharjo	177.138.780	735.000	0	0	0
26	Kab. Tegal	220.602.142	663.000	3.070.008	0	0
27	Kab. Temanggung	137.860.455	270.000	0	0	0
28	Kab. Wonogiri	226.368.037	930.000	0	600.000	0
29	Kab. Wonosobo	161.607.041	591.000	688.090	0	0

SK No 023028 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
22	Kab. Rembang	13.387.029	903.762	293.838	1.408.521
23	Kab. Semarang	18.596.565	1.462.616	0	2.315.246
24	Kab. Sragen	20.020.843	1.443.906	0	2.308.607
25	Kab. Sukoharjo	8.395.073	614.981	0	1.142.127
26	Kab. Tegal	23.402.631	1.648.900	0	2.885.586
27	Kab. Temanggung	18.903.857	1.364.998	293.838	3.095.941
28	Kab. Wonogiri	24.837.858	2.067.838	0	2.632.982
29	Kab. Wonosobo	20.123.291	1.457.736	0	3.533.625

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
22	Kab. Rembang	521.383	5.365.078	390.304	1.752.971	0
23	Kab. Semarang	521.383	6.046.400	390.304	2.196.019	962.578
24	Kab. Sragen	0	6.141.679	390.304	2.152.327	962.578
25	Kab. Sukoharjo	521.383	4.423.887	390.304	1.990.005	862.578
26	Kab. Tegal	550.883	6.066.266	390.304	2.913.977	0
27	Kab. Temanggung	534.487	6.147.290	0	1.846.110	862.578
28	Kab. Wonogiri	505.783	7.389.249	390.304	2.286.754	962.578
29	Kab. Wonosobo	534.487	5.427.587	390.304	1.975.037	862.578

SK No 023030 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
22	Kab. Rembang	0	376.140	372.462	0	172.463.654
23	Kab. Semarang	0	403.787	372.462	0	233.869.065
24	Kab. Sragen	0	0	372.462	345.000	230.179.915
25	Kab. Sukoharjo	0	451.830	372.462	263.000	212.231.710
26	Kab. Tegal	0	376.140	372.462	324.500	293.209.899
27	Kab. Temanggung	0	0	372.462	345.000	188.298.416
28	Kab. Wonogiri	0	0	372.462	396.250	284.849.695
29	Kab. Wonosobo	0	451.830	372.462	0	219.048.668

SK No 023031 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
30	Kota Magelang	0	0	0	3.123.000	1.365.800
31	Kota Pekalongan	0	0	0	6.835.800	2.158.600
32	Kota Salatiga	0	0	0	3.975.600	1.802.700
33	Kota Semarang	0	0	0	29.523.000	5.697.800
34	Kota Surakarta	0	0	0	10.959.000	2.563.100
35	Kota Tegal	0	0	0	4.959.600	1.923.500
XII	***Provinsi DI Yogyakarta***	676.395.400	60.000	6.780.000	0	0
1	Kab. Bantul	0	0	0	24.887.400	4.129.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
30	Kota Magelang	34.585.577	108.000	0	600.000	0
31	Kota Pekalongan	50.921.109	357.000	0	700.000	0
32	Kota Salatiga	40.314.619	390.000	0	0	0
33	Kota Semarang	177.397.288	978.000	0	0	0
34	Kota Surakarta	117.341.186	630.000	0	1.300.000	0
35	Kota Tegal	55.765.678	444.000	0	0	0
XII	***Provinsi DI Yogyakarta***	262.327.807	609.000	0	0	0
1	Kab. Bantul	168.750.967	987.000	0	0	0

SK No 023033 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
30	Kota Magelang	3.637.675	256.242	0	355.822
31	Kota Pekalongan	8.653.311	815.095	293.838	688.558
32	Kota Salatiga	3.772.610	307.491	293.838	311.713
33	Kota Semarang	21.403.258	1.993.809	0	715.828
34	Kota Surakarta	11.454.676	903.762	0	356.272
35	Kota Tegal	5.500.482	409.987	0	246.287
XII	***Provinsi DI Yogyakarta***	2.727.505	0	0	0
1	Kab. Bantul	20.120.299	1.383.707	293.838	3.192.229

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
30	Kota Magelang	505.783	1.383.848	390.304	743.731	862.578
31	Kota Pekalongan	505.783	1.744.994	390.304	1.160.560	100.000
32	Kota Salatiga	485.334	1.667.869	390.304	800.000	862.578
33	Kota Semarang	593.487	5.267.138	390.304	3.126.168	862.578
34	Kota Surakarta	505.783	2.608.544	390.304	1.491.896	862.578
35	Kota Tegal	521.383	1.656.948	390.304	1.071.325	0
XII	***Provinsi DI Yogyakarta***	0	0	3.650.480	1.053.705	962.578
1	Kab. Bantul	550.883	4.241.532	459.181	2.075.667	862.578

SK No 023035 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
30	Kota Magelang	0	376.140	326.462	490.000	49.110.962
31	Kota Pekalongan	0	0	372.462	490.000	76.187.414
32	Kota Salatiga	0	0	326.462	490.000	56.191.118
33	Kota Semarang	0	502.930	372.462	490.000	249.314.050
34	Kota Surakarta	0	523.958	372.462	490.000	152.753.521
35	Kota Tegal	0	376.140	326.462	490.000	74.082.096
XII	***Provinsi DI Yogyakarta***	0	275.452	500.021	0	955.341.948
1	Kab. Bantul	0	570.617	326.462	314.250	233.146.510

SK No 023036 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
2	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	16.386.000	2.033.200
3	Kab. Kulon Progo	0	0	0	11.746.200	1.002.000
4	Kab. Sleman	0	0	0	24.883.200	2.391.200
5	Kota Yogyakarta	0	0	0	9.710.400	2.475.500
XIII	***Provinsi Jawa Timur***	6.404.835.360	3.720.000	68.520.000	0	0
1	Kab. Bangkalan	0	0	0	15.191.400	3.007.800
2	Kab. Banyuwangi	0	0	0	28.882.200	9.478.100
3	Kab. Blitar	0	0	0	21.506.400	1.279.100

SK No 023037 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2	Kab. Gunung Kidul	190.196.047	921.000	0	0	0
3	Kab. Kulon Progo	126.682.573	861.000	0	0	0
4	Kab. Sleman	176.486.198	1.182.000	0	0	0
5	Kota Yogyakarta	75.187.706	246.000	0	0	0
XIII	***Provinsi Jawa Timur***	1.282.017.855	3.372.000	0	1.593.200	1.750.000
1	Kab. Bangkalan	149.430.104	693.000	0	600.000	0
2	Kab. Banyuwangi	248.086.776	753.000	0	600.000	0
3	Kab. Blitar	221.944.463	960.000	0	600.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
2	Kab. Gunung Kidul	21.083.719	1.797.766	293.838	2.932.921
3	Kab. Kulon Progo	17.248.218	1.076.217	0	1.849.390
4	Kab. Sleman	16.893.035	1.281.211	0	1.976.648
5	Kota Yogyakarta	10.399.439	922.472	293.838	288.356
XIII	***Provinsi Jawa Timur***	7.801.415	0	0	0
1	Kab. Bangkalan	16.985.911	1.615.553	0	4.304.339
2	Kab. Banyuwangi	30.078.916	2.859.345	0	2.224.348
3	Kab. Blitar	18.060.603	1.620.432	0	3.372.296

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
2	Kab. Gunung Kidul	521.383	4.682.442	459.181	921.584	862.578
3	Kab. Kulon Progo	534.487	3.458.037	459.181	1.339.627	862.578
4	Kab. Sleman	573.038	4.275.755	459.181	2.265.128	962.578
5	Kota Yogyakarta	521.383	2.727.203	459.181	1.306.152	862.578
XIII	***Provinsi Jawa Timur***	0	0	3.217.520	2.080.888	862.578
1	Kab. Bangkalan	489.559	6.123.847	390.304	3.139.370	0
2	Kab. Banyuwangi	0	6.828.660	459.181	3.293.531	962.578
3	Kab. Blitar	0	6.530.563	459.181	2.548.590	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
2	Kab. Gunung Kidul	0	489.966	326.462	674.500	244.582.587
3	Kab. Kulon Progo	0	471.453	326.462	263.000	168.180.423
4	Kab. Sleman	0	566.961	326.462	222.000	234.744.595
5	Kota Yogyakarta	0	571.941	326.462	490.000	106.788.611
XIII	***Provinsi Jawa Timur***	0	597.526	523.322	0	7.780.891.664
1	Kab. Bangkalan	0	0	372.462	744.500	203.088.149
2	Kab. Banyuwangi	0	390.978	372.462	345.000	335.615.075
3	Kab. Blitar	0	434.930	372.462	365.500	280.054.520

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
4	Kab. Bojonegoro	0	0	0	31.410.600	5.397.300
5	Kab. Bondowoso	0	0	0	22.762.800	19.557.400
6	Kab. Gresik	0	0	0	30.453.600	2.075.200
7	Kab. Jember	0	0	0	42.893.400	1.865.000
8	Kab. Jombang	0	0	0	22.969.800	4.349.500
9	Kab. Kediri	0	0	0	34.593.000	4.985.900
10	Kab. Lamongan	0	0	0	32.103.600	1.762.900
11	Kab. Lumajang	0	0	0	21.902.400	3.986.600

SK No 023042 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4	Kab. Bojonegoro	210.762.696	834.000	0	0	0
5	Kab. Bondowoso	136.216.200	1.512.000	0	0	0
6	Kab. Gresik	150.755.383	483.000	0	0	0
7	Kab. Jember	290.084.216	1.155.000	0	0	0
8	Kab. Jombang	198.721.218	858.000	0	0	0
9	Kab. Kediri	241.748.963	708.000	0	0	0
10	Kab. Lamongan	198.435.270	519.000	0	600.000	0
11	Kab. Lumajang	164.785.985	384.000	0	600.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
4	Kab. Bojonegoro	25.409.686	2.105.256	293.838	1.551.134
5	Kab. Bondowoso	20.654.249	1.281.211	0	3.350.033
6	Kab. Gresik	21.064.391	1.900.263	0	4.111.846
7	Kab. Jember	40.769.238	3.310.822	0	6.773.626
8	Kab. Jombang	24.260.067	1.970.220	293.838	2.659.051
9	Kab. Kediri	28.536.128	2.449.357	293.838	4.485.692
10	Kab. Lamongan	25.861.167	2.049.129	293.838	1.987.278
11	Kab. Lumajang	18.731.071	1.541.524	0	1.887.408

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
4	Kab. Bojonegoro	550.883	8.693.746	459.181	951.451	0
5	Kab. Bondowoso	0	6.751.480	459.181	2.723.136	962.578
6	Kab. Gresik	550.883	6.523.848	390.304	2.615.235	0
7	Kab. Jember	550.883	8.456.229	390.304	5.071.412	0
8	Kab. Jombang	0	6.155.182	459.181	2.709.877	0
9	Kab. Kediri	622.987	7.826.140	459.181	3.184.939	0
10	Kab. Lamongan	563.987	8.777.315	459.181	2.768.215	0
11	Kab. Lumajang	521.383	6.189.473	459.181	2.393.683	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
4	Kab. Bojonegoro	0	0	372.462	427.000	289.219.233
5	Kab. Bondowoso	0	374.620	372.462	211.750	217.189.100
6	Kab. Gresik	0	408.918	372.462	304.000	222.009.333
7	Kab. Jember	0	390.887	372.462	242.500	402.325.979
8	Kab. Jombang	0	437.570	372.462	355.250	266.571.216
9	Kab. Kediri	0	0	372.462	406.500	330.673.087
10	Kab. Lamongan	0	374.620	372.462	416.750	277.344.712
11	Kab. Lumajang	0	0	372.462	355.250	224.972.998

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
12	Kab. Madiun	0	0	0	12.645.000	760.400
13	Kab. Magetan	0	0	0	11.335.200	1.535.600
14	Kab. Malang	0	0	0	42.981.600	8.191.400
15	Kab. Mojokerto	0	0	0	21.321.000	1.156.200
16	Kab. Nganjuk	0	0	0	20.256.600	1.505.100
17	Kab. Ngawi	0	0	0	12.768.600	3.214.800
18	Kab. Pacitan	0	0	0	11.390.400	2.527.600
19	Kab. Pamekasan	0	0	0	16.829.400	2.212.500

SK No 023047 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
12	Kab. Madiun	152.704.737	837.000	0	0	0
13	Kab. Magetan	180.288.951	675.000	0	0	0
14	Kab. Malang	287.632.579	1.074.000	0	600.000	0
15	Kab. Mojokerto	176.112.450	480.000	0	0	0
16	Kab. Nganjuk	215.683.238	549.000	0	700.000	0
17	Kab. Ngawi	191.072.273	822.000	0	600.000	0
18	Kab. Pacitan	150.984.057	462.000	0	0	0
19	Kab. Pamekasan	155.360.856	570.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
12	Kab. Madiun	18.657.084	1.690.390	0	1.507.617
13	Kab. Magetan	14.217.733	1.322.700	0	1.315.352
14	Kab. Malang	30.035.687	2.389.158	0	5.321.176
15	Kab. Mojokerto	21.144.198	1.709.099	293.838	3.755.827
16	Kab. Nganjuk	14.067.904	1.057.508	0	1.753.539
17	Kab. Ngawi	18.370.956	1.522.815	0	2.876.379
18	Kab. Pacitan	18.369.945	1.425.197	0	2.100.059
19	Kab. Pamekasan	15.440.271	1.350.360	0	2.777.287

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
12	Kab. Madiun	521.383	5.203.060	390.304	835.000	0
13	Kab. Magetan	500.934	5.917.165	459.181	1.742.674	0
14	Kab. Malang	622.987	9.490.510	459.181	4.980.658	862.578
15	Kab. Mojokerto	20.449	6.260.130	459.181	2.398.560	0
16	Kab. Nganjuk	550.883	6.372.332	390.304	2.388.161	0
17	Kab. Ngawi	0	6.003.576	459.181	2.055.979	0
18	Kab. Pacitan	521.383	3.876.285	528.058	1.570.742	0
19	Kab. Pamekasan	485.334	4.771.132	459.181	809.486	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
12	Kab. Madiun	0	0	372.462	713.750	196.838.187
13	Kab. Magetan	0	0	372.462	324.500	220.007.452
14	Kab. Malang	0	394.707	372.462	478.250	395.886.933
15	Kab. Mojokerto	0	390.978	372.462	324.500	236.198.872
16	Kab. Nganjuk	0	0	372.462	345.000	265.992.031
17	Kab. Ngawi	0	461.843	372.462	334.750	240.935.614
18	Kab. Pacitan	0	0	372.462	683.000	194.811.188
19	Kab. Pamekasan	0	374.620	372.462	693.250	202.506.139

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
20	Kab. Pasuruan	0	0	0	23.943.000	3.554.500
21	Kab. Ponorogo	0	0	0	13.204.800	953.100
22	Kab. Probolinggo	0	0	0	22.035.000	5.187.500
23	Kab. Sampang	0	0	0	16.657.200	6.543.500
24	Kab. Sidoarjo	0	0	0	39.767.400	3.354.100
25	Kab. Situbondo	0	0	0	13.281.600	2.378.900
26	Kab. Sumenep	0	0	0	16.089.600	5.931.300
27	Kab. Trenggalek	0	0	0	11.917.800	2.430.900

SK No 023052 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
20	Kab. Pasuruan	216.303.663	1.161.000	0	0	0
21	Kab. Ponorogo	200.277.489	972.000	0	0	0
22	Kab. Probolinggo	148.221.400	783.000	0	0	0
23	Kab. Sampang	125.142.488	948.000	0	0	0
24	Kab. Sidoarjo	238.677.239	879.000	0	0	0
25	Kab. Situbondo	142.306.367	558.000	0	0	0
26	Kab. Sumenep	164.838.056	822.000	8.148.565	600.000	0
27	Kab. Trenggalek	161.203.514	753.000	0	0	0

SK No 023053 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
20	Kab. Pasuruan	24.108.621	2.309.442	0	3.326.997
21	Kab. Ponorogo	23.599.913	1.946.632	0	2.712.451
22	Kab. Probolinggo	24.701.497	1.723.737	0	4.086.956
23	Kab. Sampang	13.649.552	1.238.913	0	5.558.963
24	Kab. Sidoarjo	18.777.350	1.592.772	0	2.714.855
25	Kab. Situbondo	15.404.772	1.024.968	0	2.361.717
26	Kab. Sumenep	24.857.091	1.797.766	293.838	2.605.692
27	Kab. Trenggalek	17.462.511	1.387.779	0	2.256.754

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
20	Kab. Pasuruan	521.383	7.456.609	459.181	1.692.945	862.578
21	Kab. Ponorogo	550.883	6.840.023	459.181	2.143.298	0
22	Kab. Probolinggo	500.934	7.525.328	459.181	2.436.606	862.578
23	Kab. Sampang	485.334	4.908.366	459.181	3.198.850	0
24	Kab. Sidoarjo	563.987	5.253.844	390.304	3.552.905	0
25	Kab. Situbondo	0	5.276.213	459.181	2.943.466	862.578
26	Kab. Sumenep	521.383	8.119.433	459.181	1.423.659	0
27	Kab. Trenggalek	563.987	4.780.931	459.181	1.802.485	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
20	Kab. Pasuruan	0	390.978	372.462	386.000	286.849.359
21	Kab. Ponorogo	0	374.620	372.462	355.250	254.762.102
22	Kab. Probolinggo	0	390.978	372.462	386.000	219.673.157
23	Kab. Sampang	0	0	372.462	703.500	179.866.309
24	Kab. Sidoarjo	0	581.645	372.462	324.500	316.802.363
25	Kab. Situbondo	0	0	372.462	314.250	187.544.474
26	Kab. Sumenep	0	0	372.462	836.750	237.716.776
27	Kab. Trenggalek	0	374.620	372.462	283.500	206.049.424

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
28	Kab. Tuban	0	0	0	25.915.200	3.772.100
29	Kab. Tulungagung	0	0	0	20.333.400	2.987.700
30	Kota Blitar	0	0	0	3.434.400	1.567.900
31	Kota Kediri	0	0	0	6.999.600	2.057.400
32	Kota Madiun	0	0	0	4.329.000	662.800
33	Kota Malang	0	0	0	17.248.200	3.843.400
34	Kota Mojokerto	0	0	0	3.482.400	180.600
35	Kota Pasuruan	0	0	0	5.302.200	846.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
28	Kab. Tuban	186.675.232	426.000	0	700.000	0
29	Kab. Tulungagung	231.496.578	858.000	0	0	0
30	Kota Blitar	40.477.075	201.000	0	0	0
31	Kota Kediri	59.019.491	177.000	0	600.000	0
32	Kota Madiun	57.055.872	162.000	0	0	0
33	Kota Malang	108.736.710	687.000	0	1.200.000	0
34	Kota Mojokerto	33.133.248	96.000	0	0	0
35	Kota Pasuruan	38.888.087	159.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
28	Kab. Tuban	23.988.347	2.081.668	293.838	2.962.188
29	Kab. Tulungagung	23.310.597	2.030.419	0	2.269.402
30	Kota Blitar	2.308.964	153.745	0	0
31	Kota Kediri	5.545.121	461.236	0	0
32	Kota Madiun	4.057.539	307.491	0	0
33	Kota Malang	10.701.366	852.514	0	1.227.044
34	Kota Mojokerto	3.939.446	307.491	0	246.323
35	Kota Pasuruan	4.936.297	442.527	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
28	Kab. Tuban	505.783	6.742.129	459.181	2.504.551	0
29	Kab. Tulungagung	550.883	6.340.425	459.181	2.365.700	0
30	Kota Blitar	521.383	1.485.689	459.181	914.364	0
31	Kota Kediri	521.383	1.593.924	459.181	1.118.850	0
32	Kota Madiun	0	1.507.430	528.058	835.000	0
33	Kota Malang	593.487	2.722.102	459.181	1.944.921	962.578
34	Kota Mojokerto	505.783	1.374.343	459.181	886.111	0
35	Kota Pasuruan	485.334	1.711.488	459.181	995.135	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
28	Kab. Tuban	0	424.830	372.462	345.000	258.168.509
29	**Kab. Tulungagung**	**0**	**420.955**	**372.462**	**334.750**	**294.130.452**
30	Kota Blitar	0	390.887	372.462	560.000	52.847.050
31	Kota Kediri	0	390.978	372.462	560.000	79.876.626
32	Kota Madiun	0	0	372.462	560.000	70.377.652
33	Kota Malang	0	424.830	372.462	560.000	152.535.795
34	Kota Mojokerto	0	0	372.462	560.000	45.543.388
35	Kota Pasuruan	0	0	372.462	560.000	56.021.089

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
36	Kota Probolinggo	0	0	0	4.953.000	538.000
37	Kota Surabaya	0	0	0	71.405.200	6.157.500
38	Kota Batu	0	0	0	4.142.400	421.900
XIV	***Provinsi Kalimantan Barat***	1.261.307.940	54.360.000	15.780.000	0	0
1	Kab. Bengkayang	0	0	0	2.306.400	1.043.500
2	Kab. Landak	0	0	0	3.826.800	265.900
3	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	2.346.000	843.300
4	Kab. Ketapang	0	0	0	6.189.000	2.405.100

SK No 023062 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
36	Kota Probolinggo	43.316.200	132.000	0	600.000	0
37	Kota Surabaya	258.158.206	888.000	0	700.000	0
38	Kota Batu	39.127.565	195.000	0	0	0
XIV	***Provinsi Kalimantan Barat***	155.909.019	1.992.000	3.234.588	1.800.000	1.400.000
1	Kab. Bengkayang	50.337.722	1.155.000	6.792.135	0	0
2	Kab. Landak	51.541.194	1.083.000	18.026.312	0	0
3	Kab. Kapuas Hulu	61.113.385	1.212.000	13.226.863	0	0
4	Kab. Ketapang	103.226.785	1.158.000	14.229.780	0	0

SK No 023063 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
36	Kota Probolinggo	3.997.857	307.491	0	282.535
37	Kota Surabaya	35.888.052	3.228.651	0	2.938.518
38	Kota Batu	3.243.562	256.242	0	197.140
XIV	***Provinsi Kalimantan Barat***	6.555.519	0	0	0
1	Kab. Bengkayang	18.696.318	1.033.919	0	3.105.159
2	Kab. Landak	17.998.618	917.592	0	2.910.264
3	Kab. Kapuas Hulu	29.164.951	1.406.488	0	3.668.657
4	Kab. Ketapang	27.865.303	1.490.275	0	3.367.070

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
36	Kota Probolinggo	500.934	1.945.007	390.304	1.043.817	862.578
37	Kota Surabaya	0	5.913.140	459.181	5.134.936	0
38	Kota Batu	500.934	1.504.795	459.181	991.072	862.578
XIV	***Provinsi Kalimantan Barat***	0	0	2.352.080	1.313.367	862.578
1	Kab. Bengkayang	469.110	3.928.091	0	2.362.772	0
2	Kab. Landak	462.870	3.992.368	0	1.900.069	0
3	Kab. Kapuas Hulu	0	6.340.152	390.304	2.325.512	0
4	Kab. Ketapang	505.783	5.745.728	390.304	2.408.107	0

SK No 023065 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
36	**Kota Probolinggo**	0	0	372.462	560.000	59.802.185
37	**Kota Surabaya**	0	507.815	326.462	560.000	392.265.661
38	Kota Batu	0	0	326.462	560.000	52.788.831
XIV	***Provinsi Kalimantan Barat***	0	393.144	569.703	0	1.507.829.938
1	Kab. Bengkayang	0	0	381.383	560.000	92.171.509
2	Kab. Landak	0	0	381.383	0	103.306.370
3	Kab. Kapuas Hulu	0	0	381.383	283.500	122.702.495
4	Kab. Ketapang	0	0	335.173	0	169.316.408

SK No 023066 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	**Kab. Mempawah**	0	0	0	3.282.600	1.893.900
6	**Kab. Sambas**	0	0	0	**7.366.200**	**1.689.400**
7	Kab. Sanggau	0	0	0	**3.431.400**	**2.188.800**
8	Kab. Sintang	0	0	0	3.547.200	1.616.700
9	Kota Pontianak	0	0	0	6.639.600	1.171.800
10	Kota Singkawang	0	0	0	2.044.800	766.700
11	Kab. Sekadau	0	0	0	2.266.200	301.500
12	Kab. Melawi	0	0	0	2.099.400	775.900

SK No 023067 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5	**Kab. Mempawah**	62.415.403	645.000	0	0	0
6	Kab. Sambas	124.372.941	876.000	4.742.960	600.000	0
7	Kab. Sanggau	73.132.978	1.101.000	13.859.369	0	0
8	Kab. Sintang	78.817.119	1.326.000	29.592.033	700.000	0
9	Kota Pontianak	69.709.851	789.000	0	0	0
10	Kota Singkawang	39.878.397	492.000	0	0	0
11	Kab. Sekadau	28.097.053	1.152.000	10.276.396	0	0
12	Kab. Melawi	34.400.553	1.338.000	22.115.799	0	0

SK No 023068 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
5	**Kab. Mempawah**	13.466.580	912.713	0	1.779.426
6	**Kab. Sambas**	32.866.560	1.760.347	0	3.478.240
7	Kab. Sanggau	22.266.310	1.201.494	0	2.861.522
8	Kab. Sintang	24.339.736	1.285.282	0	2.631.357
9	Kota Pontianak	14.709.465	1.536.644	0	1.123.389
10	Kota Singkawang	6.627.727	577.563	0	604.693
11	Kab. Sekadau	11.556.913	777.677	0	1.405.606
12	Kab. Melawi	12.673.873	758.968	293.838	1.360.693

SK No 023069 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
5	Kab. Mempawah	469.110	2.277.516	0	1.100.000	0
6	**Kab. Sambas**	**489.559**	**5.291.525**	**390.304**	**3.151.010**	**862.578**
7	**Kab. Sanggau**	**489.559**	**4.423.130**	**390.304**	**1.844.318**	**0**
8	Kab. Sintang	489.559	5.378.902	0	2.085.540	100.000
9	Kota Pontianak	505.783	2.274.209	390.304	1.678.297	0
10	Kota Singkawang	20.449	1.435.759	390.304	1.033.425	862.578
11	Kab. Sekadau	462.246	2.005.154	390.304	1.009.651	100.000
12	Kab. Melawi	0	3.693.465	0	1.856.432	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
5	Kab. Mempawah	0	290.012	335.173	560.000	89.427.433
6	**Kab. Sambas**	**0**	**290.012**	**381.383**	**334.750**	**188.943.769**
7	Kab. Sanggau	0	0	335.173	293.750	127.819.107
8	Kab. Sintang	0	0	381.383	0	152.290.811
9	Kota Pontianak	0	351.723	335.173	0	101.215.238
10	Kota Singkawang	0	290.012	335.173	560.000	55.919.580
11	Kab. Sekadau	0	0	381.383	560.000	60.742.083
12	Kab. Melawi	0	0	381.383	560.000	82.308.304

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
13	Kab. Kayong Utara	0	0	0	1.599.600	337.700
14	**Kab. Kubu Raya**	**0**	**0**	**0**	**4.873.200**	**2.161.400**
XV	***Provinsi Kalimantan Tengah***	562.867.880	20.460.000	9.480.000	0	0
1	Kab. Barito Selatan	0	0	0	1.974.000	907.500
2	Kab. Barito Utara	0	0	0	2.799.000	1.112.100
3	Kab. Kapuas	0	0	0	8.333.400	2.232.500
4	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	5.491.800	1.251.500
5	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	7.237.200	1.638.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
13	**Kab. Kayong Utara**	24.875.223	819.000	3.177.951	0	0
14	Kab. Kubu Raya	98.803.963	1.248.000	5.993.619	0	0
XV	***Provinsi Kalimantan Tengah***	143.193.508	1.950.000	0	1.300.000	1.750.000
1	Kab. Barito Selatan	47.236.792	546.000	7.188.876	0	0
2	Kab. Barito Utara	60.110.930	669.000	7.163.216	0	0
3	Kab. Kapuas	116.920.330	582.000	17.715.421	0	0
4	Kab. Kotawaringin Barat	56.578.529	681.000	1.112.983	0	0
5	Kab. Kotawaringin Timur	78.999.845	1.353.000	0	600.000	0

SK No 023073 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
13	**Kab. Kayong Utara**	10.306.596	558.853	0	1.349.106
14	Kab. Kubu Raya	22.558.065	1.285.282	0	3.953.417
XV	***Provinsi Kalimantan Tengah***	7.165.397	0	0	0
1	Kab. Barito Selatan	13.483.203	712.599	293.838	1.455.624
2	Kab. Barito Utara	18.084.428	982.671	293.838	481.127
3	Kab. Kapuas	28.084.631	1.625.311	0	3.105.204
4	Kab. Kotawaringin Barat	15.460.841	1.020.089	0	1.080.317
5	Kab. Kotawaringin Timur	21.155.702	1.238.913	0	2.673.312

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
13	Kab. Kayong Utara	0	1.616.832	0	1.341.032	0
14	**Kab. Kubu Raya**	**0**	**3.197.859**	**0**	**1.875.475**	**0**
XV	***Provinsi Kalimantan Tengah***	0	0	2.352.080	1.336.764	0
1	Kab. Barito Selatan	469.110	2.099.019	0	884.217	0
2	Kab. Barito Utara	500.934	1.864.163	0	937.140	0
3	Kab. Kapuas	469.110	4.234.659	0	1.626.212	0
4	Kab. Kotawaringin Barat	505.783	1.586.334	390.304	1.055.357	0
5	Kab. Kotawaringin Timur	489.559	3.603.345	390.304	1.360.970	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
13	Kab. Kayong Utara	0	0	335.173	560.000	46.877.066
14	Kab. Kubu Raya	0	308.727	335.173	232.250	146.826.430
XV	***Provinsi Kalimantan Tengah***	0	362.068	541.468	0	752.759.165
1	Kab. Barito Selatan	0	0	335.173	201.500	77.787.451
2	Kab. Barito Utara	0	374.195	335.173	621.500	96.329.415
3	Kab. Kapuas	0	0	335.173	273.250	185.537.201
4	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	335.173	621.500	87.171.510
5	Kab. Kotawaringin Timur	0	323.604	335.173	263.000	121.662.727

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
6	Kota Palangkaraya	0	0	0	3.453.000	2.183.600
7	Kab. Katingan	0	0	0	2.964.000	1.100.700
8	Kab. Seruyan	0	0	0	3.323.400	838.600
9	Kab. Sukamara	0	0	0	1.387.800	190.200
10	Kab. Lamandau	0	0	0	2.524.800	303.300
11	Kab. Gunung Mas	0	0	0	2.855.400	221.400
12	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	2.286.000	238.200
13	Kab. Murung Raya	0	0	0	3.439.800	2.255.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6	Kota Palangkaraya	78.734.426	831.000	0	0	0
7	Kab. Katingan	53.631.031	1.005.000	10.346.566	0	0
8	Kab. Seruyan	28.366.530	774.000	0	0	0
9	Kab. Sukamara	13.794.534	459.000	1.343.757	0	0
10	Kab. Lamandau	26.024.966	597.000	3.921.996	0	0
11	Kab. Gunung Mas	48.998.504	792.000	4.537.528	0	0
12	Kab. Pulang Pisau	55.823.153	555.000	4.612.739	0	0
13	Kab. Murung Raya	41.321.241	711.000	7.587.644	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
6	**Kota Palangkaraya**	7.575.434	628.811	0	539.067
7	Kab. Katingan	18.360.549	950.131	0	2.671.629
8	Kab. Seruyan	10.912.090	647.520	293.838	1.062.661
9	Kab. Sukamara	5.372.878	321.320	0	195.972
10	Kab. Lamandau	9.426.779	726.428	293.838	596.649
11	Kab. Gunung Mas	17.743.190	1.098.997	0	689.692
12	Kab. Pulang Pisau	14.283.413	745.138	0	862.101
13	Kab. Murung Raya	17.235.018	898.883	0	761.910

SK No 023079 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
6	**Kota Palangkaraya**	505.783	1.182.089	390.304	1.073.184	0
7	**Kab. Katingan**	469.110	2.820.149	390.304	956.860	0
8	Kab. Seruyan	469.110	2.119.764	0	1.729.440	0
9	Kab. Sukamara	469.110	1.047.291	0	777.664	0
10	Kab. Lamandau	469.110	1.756.282	0	1.096.428	0
11	Kab. Gunung Mas	469.110	2.826.966	0	1.807.993	0
12	Kab. Pulang Pisau	0	1.731.920	0	896.080	100.000
13	Kab. Murung Raya	469.110	1.503.079	0	444.111	0

SK No 023080 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
6	**Kota Palangkaraya**	0	293.992	335.173	560.000	98.285.863
7	Kab. Katingan	0	0	335.173	693.250	96.694.452
8	Kab. Seruyan	0	0	381.383	242.500	51.160.836
9	Kab. Sukamara	0	0	335.173	611.250	26.305.949
10	Kab. Lamandau	0	0	335.173	642.000	48.714.749
11	Kab. Gunung Mas	0	0	335.173	560.000	82.935.953
12	Kab. Pulang Pisau	0	0	335.173	222.000	82.690.917
13	Kab. Murung Raya	0	0	381.383	560.000	77.568.579

SK No 023081 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
14	Kab. Barito Timur	0	0	0	2.641.800	1.112.400
XVI	***Provinsi Kalimantan Selatan***	699.877.680	3.540.000	9.540.000	**0**	**0**
1	Kab. Banjar	0	0	0	9.112.200	5.131.800
2	Kab. Barito Kuala	0	0	0	6.986.400	1.547.500
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	4.801.200	4.046.500
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	4.874.400	2.459.600
5	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	4.095.600	2.016.400
6	Kab. Kotabaru	0	0	0	5.482.800	1.486.300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
14	Kab. Barito Timur	47.297.308	627.000	1.707.602	0	0
XVI	***Provinsi Kalimantan Selatan***	**180.420.370**	**1.311.000**	**1.053.195**	**3.100.000**	**1.750.000**
1	Kab. Banjar	114.845.826	972.000	6.927.302	0	0
2	Kab. Barito Kuala	89.924.169	732.000	765.155	0	0
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	70.769.661	486.000	1.216.780	600.000	0
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	77.497.838	414.000	2.014.116	0	0
5	Kab. Hulu Sungai Utara	73.053.013	474.000	9.447.746	0	0
6	Kab. Kotabaru	60.113.687	795.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
14	**Kab. Barito Timur**	12.325.565	661.350	0	3.197.364
XVI	***Provinsi Kalimantan Selatan***	6.247.493	0	0	0
1	Kab. Banjar	23.742.604	1.457.736	0	3.081.180
2	Kab. Barito Kuala	20.048.754	1.168.955	0	2.457.409
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	16.559.270	1.206.373	0	0
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	14.912.630	1.168.955	0	731.722
5	Kab. Hulu Sungai Utara	11.814.394	828.925	0	693.698
6	Kab. Kotabaru	26.818.137	1.695.269	0	1.839.619

SK No 023084 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
14	**Kab. Barito Timur**	**462.870**	2.705.216	390.304	875.836	0
XVI	***Provinsi Kalimantan Selatan***	**0**	**0**	**2.352.080**	**1.245.052**	**0**
1	Kab. Banjar	521.383	5.455.315	0	1.554.048	0
2	Kab. Barito Kuala	485.334	4.499.691	390.304	1.459.906	0
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	500.934	2.901.827	0	1.046.325	0
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	505.783	2.995.550	390.304	1.021.802	0
5	Kab. Hulu Sungai Utara	485.334	3.667.336	0	1.842.226	0
6	Kab. Kotabaru	0	5.075.136	390.304	1.231.444	0

SK No 023085 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
14	**Kab. Barito Timur**	0	0	335.173	662.500	75.002.288
XVI	***Provinsi Kalimantan Selatan***	**0**	**352.959**	**541.468**	**0**	**911.331.297**
1	Kab. Banjar	0	290.142	335.173	345.000	173.771.709
2	Kab. Barito Kuala	0	0	335.173	314.250	131.115.000
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	335.173	462.750	104.932.793
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	335.173	462.750	109.784.623
5	Kab. Hulu Sungai Utara	0	374.191	335.173	232.250	109.360.286
6	Kab. Kotabaru	0	295.142	335.173	211.750	105.769.761

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
7	**Kab. Tabalong**	0	0	0	6.322.200	1.930.500
8	Kab. Tanah Laut	0	0	0	7.699.800	2.914.800
9	Kab. Tapin	0	0	0	4.162.800	2.737.400
10	Kota Banjarbaru	0	0	0	5.608.200	2.983.900
11	Kota Banjarmasin	0	0	0	11.561.400	5.052.100
12	Kab. Balangan	0	0	0	4.116.600	2.778.300
13	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	7.974.600	1.930.000
XVII	***Provinsi Kalimantan Timur***	892.064.490	6.180.000	7.380.000	0	0

SK No 023087 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7	Kab. Tabalong	73.933.627	606.000	0	0	0
8	**Kab. Tanah Laut**	**99.243.920**	**594.000**	**0**	**0**	**0**
9	Kab. Tapin	55.302.213	726.000	733.465	0	0
10	Kota Banjarbaru	53.614.749	330.000	0	0	0
11	Kota Banjarmasin	94.762.953	777.000	0	0	0
12	Kab. Balangan	48.394.510	405.000	3.128.968	0	0
13	Kab. Tanah Bumbu	62.046.602	681.000	178.505	0	0
XVII	***Provinsi Kalimantan Timur***	165.055.047	1.281.000	1.427.468	1.593.200	1.750.000

SK No 023088 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7	**Kab. Tabalong**	14.839.134	1.098.997	0	1.011.372
8	Kab. Tanah Laut	16.206.266	1.201.494	293.838	1.490.153
9	Kab. Tapin	11.431.172	861.464	0	405.196
10	Kota Banjarbaru	6.661.796	545.023	0	235.695
11	Kota Banjarmasin	15.623.012	1.332.459	0	1.577.757
12	Kab. Balangan	10.563.685	680.059	0	208.749
13	Kab. Tanah Bumbu	13.119.179	847.635	293.838	663.681
XVII	***Provinsi Kalimantan Timur***	5.327.876	0	0	0

SK No 023089 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
7	**Kab. Tabalong**	489.559	2.992.340	0	1.064.795	0
8	**Kab. Tanah Laut**	**0**	**3.432.414**	**390.304**	**1.221.514**	**0**
9	Kab. Tapin	505.783	3.588.897	0	984.193	0
10	Kota Banjarbaru	521.383	1.835.361	390.304	1.027.859	0
11	Kota Banjarmasin	20.449	1.993.164	390.304	1.672.554	0
12	Kab. Balangan	485.334	2.020.075	0	885.638	0
13	Kab. Tanah Bumbu	0	3.252.974	0	1.173.834	0
XVII	***Provinsi Kalimantan Timur***	0	0	2.352.080	1.326.175	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
7	Kab. Tabalong	0	0	335.173	211.750	104.835.447
8	**Kab. Tanah Laut**	**0**	**285.072**	**335.173**	**252.750**	**135.561.498**
9	Kab. Tapin	0	0	335.173	473.000	82.246.756
10	Kota Banjarbaru	0	363.698	335.173	350.000	74.803.141
11	Kota Banjarmasin	0	302.212	335.173	350.000	135.750.537
12	Kab. Balangan	0	0	335.173	432.000	74.434.091
13	Kab. Tanah Bumbu	0	0	335.173	232.250	92.729.271
XVII	***Provinsi Kalimantan Timur***	0	397.070	569.703	0	1.087.566.687

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	**Kab. Berau**	0	0	0	5.098.800	1.532.300
2	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	12.774.600	2.101.900
3	Kab. Kutai Barat	0	0	0	2.701.200	400.000
4	Kab. Kutai Timur	0	0	0	8.890.200	1.663.300
5	Kab. Paser	0	0	0	4.234.200	386.000
6	Kota Balikpapan	0	0	0	8.800.800	2.786.900
7	Kota Bontang	0	0	0	4.578.000	1.516.600
8	Kota Samarinda	0	0	0	8.569.200	4.073.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Kab. Berau	42.987.415	777.000	651.787	600.000	0
2	**Kab. Kutai Kartanegara**	**207.507.140**	**1.443.000**	**9.892.006**	**600.000**	**0**
3	Kab. Kutai Barat	25.094.514	648.000	3.947.475	0	0
4	Kab. Kutai Timur	56.860.334	897.000	3.564.319	0	0
5	Kab. Paser	65.216.816	609.000	3.323.238	600.000	0
6	Kota Balikpapan	77.845.154	573.000	0	0	0
7	Kota Bontang	25.668.097	279.000	0	0	0
8	Kota Samarinda	129.923.241	1.158.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	**Kab. Berau**	19.185.563	1.024.968	293.838	1.331.882
2	**Kab. Kutai Kartanegara**	**32.764.153**	**1.802.645**	**0**	**2.618.060**
3	Kab. Kutai Barat	18.420.828	1.234.033	0	702.974
4	Kab. Kutai Timur	22.611.285	1.271.452	293.838	2.565.245
5	Kab. Paser	17.648.993	1.234.033	0	1.011.587
6	Kota Balikpapan	18.611.862	1.416.247	0	1.196.663
7	Kota Bontang	4.510.027	307.491	0	253.161
8	Kota Samarinda	19.597.713	1.657.851	0	1.015.328

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
1	**Kab. Berau**	505.783	2.063.410	0	1.921.485	862.578
2	**Kab. Kutai Kartanegara**	**505.783**	**4.546.612**	**0**	**1.814.711**	**0**
3	Kab. Kutai Barat	489.559	3.863.747	0	1.045.448	0
4	Kab. Kutai Timur	505.783	3.495.614	390.304	1.707.626	0
5	Kab. Paser	489.559	1.958.824	390.304	973.182	0
6	Kota Balikpapan	534.487	1.842.376	390.304	1.722.112	0
7	Kota Bontang	500.934	1.027.244	390.304	1.023.808	0
8	Kota Samarinda	521.383	2.738.850	390.304	1.944.887	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
1	Kab. Berau	0	532.673	335.173	0	79.704.655
2	**Kab. Kutai Kartanegara**	**0**	**462.960**	**335.173**	**334.750**	**279.503.493**
3	Kab. Kutai Barat	0	0	335.173	0	58.882.951
4	Kab. Kutai Timur	0	0	335.173	350.000	105.401.473
5	Kab. Paser	0	425.380	335.173	211.750	99.048.039
6	Kota Balikpapan	0	496.473	335.173	350.000	116.901.551
7	Kota Bontang	0	339.788	335.173	350.000	41.079.627
8	Kota Samarinda	0	539.141	335.173	350.000	172.814.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
9	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	2.982.000	230.100
10	**Kab. Mahakam Ulu**	**0**	**0**	**0**	**906.000**	**265.500**
XVIII	***Provinsi Sulawesi Utara***	566.462.350	2.280.000	8.340.000	0	0
1	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	2.569.200	1.544.700
2	Kab. Minahasa	0	0	0	4.205.400	2.536.000
3	Kab. Sangihe	0	0	0	1.944.000	1.062.900
4	Kota Bitung	0	0	0	1.635.000	1.151.900
5	Kota Manado	0	0	0	4.448.400	1.958.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9	Kab. Penajam Paser Utara	44.972.031	426.000	0	0	0
10	Kab. Mahakam Ulu	3.104.295	105.000	442.688	0	0
XVIII	***Provinsi Sulawesi Utara***	190.530.593	816.000	1.349.018	1.300.000	0
1	Kab. Bolaang Mongondow	52.982.897	264.000	1.128.422	0	0
2	Kab. Minahasa	97.491.885	282.000	0	0	0
3	Kab. Sangihe	43.042.240	282.000	7.828.693	0	0
4	Kota Bitung	34.901.407	201.000	0	0	0
5	Kota Manado	89.362.744	336.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
9	Kab. Penajam Paser Utara	9.822.318	628.811	0	433.672
10	**Kab. Mahakam Ulu**	**5.676.224**	**256.242**	**0**	**434.209**
XVIII	***Provinsi Sulawesi Utara***	6.621.128	0	0	0
1	Kab. Bolaang Mongondow	14.049.730	1.131.536	0	737.441
2	Kab. Minahasa	18.541.021	1.257.622	0	1.004.538
3	Kab. Sangihe	13.856.687	1.033.919	0	799.239
4	Kota Bitung	6.679.709	656.471	0	283.581
5	Kota Manado	10.219.694	982.671	0	674.612

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
9	Kab. Penajam Paser Utara	521.383	1.764.482	0	1.008.039	0
10	**Kab. Mahakam Ulu**	**463.494**	**1.256.913**	**0**	**2.002.754**	**0**
XVIII	***Provinsi Sulawesi Utara***	0	0	2.352.080	1.354.945	862.578
1	Kab. Bolaang Mongondow	469.110	4.236.557	0	1.153.685	0
2	Kab. Minahasa	521.383	5.128.661	0	1.304.900	0
3	Kab. Sangihe	0	3.438.057	0	1.779.410	0
4	Kota Bitung	469.110	1.880.688	390.304	1.088.809	862.578
5	Kota Manado	521.383	2.462.651	390.304	1.453.811	862.578

SK No 023100 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
9	Kab. Penajam Paser Utara	0	345.055	335.173	380.750	63.849.814
10	**Kab. Mahakam Ulu**	**0**	**0**	**381.383**	**350.000**	**15.644.702**
XVIII	***Provinsi Sulawesi Utara***	0	337.112	502.968	0	783.108.772
1	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	322.573	293.750	80.883.601
2	Kab. Minahasa	0	0	322.573	396.250	132.992.233
3	Kab. Sangihe	0	0	367.383	560.000	75.994.528
4	Kota Bitung	0	412.165	322.573	0	50.935.295
5	Kota Manado	0	453.371	322.573	0	114.449.592

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
6	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0	1.747.800	371.400
7	Kab. Minahasa Selatan	0	0	0	2.218.800	803.700
8	Kota Tomohon	0	0	0	1.221.600	561.300
9	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	2.256.000	1.932.100
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	0	999.600	271.200
11	Kota Kotamobagu	0	0	0	1.457.400	579.800
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	2.307.000	897.100
13	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	2.619.000	1.450.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6	Kab. Kepulauan Talaud	36.533.271	261.000	1.555.024	0	0
7	Kab. Minahasa Selatan	68.093.611	177.000	795.540	0	0
8	Kota Tomohon	31.756.715	138.000	0	0	0
9	Kab. Minahasa Utara	51.745.329	243.000	664.168	0	0
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	21.651.601	195.000	0	0	0
11	Kota Kotamobagu	29.122.580	99.000	0	0	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	21.634.580	228.000	0	0	0
13	Kab. Minahasa Tenggara	33.959.359	165.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
6	Kab. Kepulauan Talaud	24.547.279	1.303.991	293.838	671.676
7	Kab. Minahasa Selatan	15.873.927	968.841	0	1.626.409
8	Kota Tomohon	6.220.518	423.817	0	501.183
9	Kab. Minahasa Utara	11.909.721	661.350	0	1.046.770
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	12.433.739	796.386	0	480.233
11	Kota Kotamobagu	3.481.069	288.781	0	316.434
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	11.142.690	712.599	0	817.429
13	Kab. Minahasa Tenggara	11.126.055	777.677	0	547.010

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
6	Kab. Kepulauan Talaud	464.742	3.863.633	0	1.728.765	0
7	Kab. Minahasa Selatan	469.110	3.880.939	0	1.135.422	0
8	Kota Tomohon	485.334	1.248.192	390.304	884.155	0
9	Kab. Minahasa Utara	469.110	3.145.614	0	1.484.609	862.578
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	2.267.401	0	1.262.708	0
11	Kota Kotamobagu	489.559	1.024.560	390.304	920.268	0
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	485.334	2.310.801	0	871.782	0
13	Kab. Minahasa Tenggara	0	2.875.636	0	938.942	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
6	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	367.383	0	73.709.802
7	Kab. Minahasa Selatan	0	0	322.573	314.250	96.680.122
8	Kota Tomohon	0	412.165	322.573	0	44.565.856
9	Kab. Minahasa Utara	0	0	322.573	0	76.742.922
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	367.383	0	40.725.251
11	Kota Kotamobagu	0	281.335	322.573	181.000	38.954.663
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	322.573	201.500	41.931.388
13	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	322.573	0	54.781.852

SK No 023106 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	1.448.400	738.300
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	1.388.400	416.100
XIX	***Provinsi Sulawesi Tengah***	647.929.890	13.440.000	10.320.000	0	0
1	Kab. Banggai	0	0	0	5.996.400	477.900
2	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	2.782.800	1.033.600
3	Kab. Buol	0	0	0	3.048.000	463.800
4	Kab. Toli-Toli	0	0	0	3.648.600	1.136.400
5	Kab. Donggala	0	0	0	5.855.400	1.227.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	16.903.979	135.000	0	0	0
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16.025.360	117.000	0	0	0
XIX	***Provinsi Sulawesi Tengah***	169.591.390	1.332.000	654.577	1.300.000	0
1	Kab. Banggai	99.295.524	663.000	2.281.012	600.000	0
2	Kab. Banggai Kepulauan	33.226.725	621.000	1.593.798	0	0
3	Kab. Buol	35.451.267	426.000	0	0	0
4	Kab. Toli-Toli	44.807.114	579.000	3.502.721	0	0
5	Kab. Donggala	77.199.265	849.000	6.228.539	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7.277.493	442.527	0	408.896
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	8.763.625	475.066	0	1.928.056
XIX	***Provinsi Sulawesi Tengah***	6.546.327	0	0	0
1	Kab. Banggai	27.798.922	2.048.320	0	3.447.216
2	Kab. Banggai Kepulauan	15.398.359	861.464	0	2.063.564
3	Kab. Buol	9.499.340	758.968	0	542.778
4	Kab. Toli-Toli	13.841.617	945.252	0	2.411.680
5	Kab. Donggala	16.667.125	1.052.628	0	3.319.235

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	469.110	1.709.400	0	878.135	0
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	2.342.319	0	855.160	0
XIX	***Provinsi Sulawesi Tengah***	0	0	2.352.080	1.428.600	0
1	Kab. Banggai	505.783	6.149.625	390.304	1.392.235	0
2	Kab. Banggai Kepulauan	467.862	3.496.180	0	1.776.409	0
3	Kab. Buol	469.110	2.599.725	0	2.064.654	0
4	Kab. Toli-Toli	0	2.426.445	390.304	2.589.207	0
5	Kab. Donggala	469.110	3.634.770	390.304	2.344.286	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	322.573	0	30.733.813
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	322.573	0	32.633.659
XIX	***Provinsi Sulawesi Tengah***	0	334.743	527.703	0	855.757.310
1	Kab. Banggai	0	302.085	367.383	375.750	152.091.459
2	Kab. Banggai Kepulauan	0	295.355	367.383	560.000	64.544.499
3	Kab. Buol	0	408.983	322.573	252.750	56.307.948
4	Kab. Toli-Toli	0	0	322.573	242.500	76.843.413
5	Kab. Donggala	0	0	322.573	713.750	120.273.585

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
6	Kab. Morowali	0	0	0	4.198.800	519.600
7	Kab. Poso	0	0	0	4.039.800	607.000
8	Kota Palu	0	0	0	4.957.800	1.540.500
9	Kab. Parigi Moutong	0	0	0	12.588.000	2.873.100
10	Kab. Tojo Una Una	0	0	0	3.664.200	1.295.100
11	Kab. Sigi	0	0	0	4.888.200	1.323.000
12	Kab. Banggai Laut	0	0	0	1.878.600	571.500
13	Kab. Morowali Utara	0	0	0	3.349.800	789.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6	Kab. Morowali	32.706.407	387.000	4.975.723	0	0
7	Kab. Poso	71.410.156	768.000	749.631	0	0
8	Kota Palu	94.886.126	528.000	0	0	0
9	Kab. Parigi Moutong	94.907.730	693.000	3.369.861	0	0
10	Kab. Tojo Una Una	33.208.288	867.000	8.344.336	0	0
11	Kab. Sigi	64.610.317	720.000	8.441.040	0	0
12	Kab. Banggai Laut	15.272.066	210.000	2.128.169	0	0
13	Kab. Morowali Utara	35.728.876	348.000	3.828.726	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
6	Kab. Morowali	9.639.047	558.853	0	1.057.435
7	Kab. Poso	21.244.945	1.425.197	0	1.856.882
8	Kota Palu	9.211.821	698.769	0	908.136
9	Kab. Parigi Moutong	25.742.883	1.569.184	0	3.364.390
10	Kab. Tojo Una Una	14.306.966	763.847	0	2.041.172
11	Kab. Sigi	22.342.615	1.136.416	0	2.931.987
12	Kab. Banggai Laut	8.625.580	642.641	0	1.526.366
13	Kab. Morowali Utara	14.441.848	796.386	0	1.816.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
6	Kab. Morowali	505.783	2.972.580	0	1.245.015	0
7	Kab. Poso	505.783	4.124.640	0	1.189.614	100.000
8	Kota Palu	505.783	1.856.100	390.304	1.323.947	0
9	Kab. Parigi Moutong	489.559	5.885.755	390.304	1.806.802	0
10	Kab. Tojo Una Una	485.334	2.909.350	0	1.838.711	0
11	Kab. Sigi	485.334	4.125.250	0	2.257.013	0
12	Kab. Banggai Laut	469.110	1.742.240	0	1.671.554	100.000
13	Kab. Morowali Utara	469.110	2.498.575	0	1.726.686	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
6	Kab. Morowali	0	0	367.383	652.250	59.785.876
7	Kab. Poso	0	366.485	367.383	754.750	109.510.266
8	Kota Palu	0	494.835	322.573	560.000	118.184.694
9	Kab. Parigi Moutong	0	364.455	367.383	795.750	155.208.156
10	Kab. Tojo Una Una	0	0	322.573	560.000	70.606.877
11	Kab. Sigi	0	275.555	322.573	273.250	114.132.550
12	Kab. Banggai Laut	0	0	367.383	560.000	35.765.209
13	Kab. Morowali Utara	0	0	367.383	242.500	66.403.050

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
XX	***Provinsi Sulawesi Selatan***	1.831.172.650	7.860.000	22.500.000	0	0
1	Kab. Bantaeng	0	0	0	3.192.600	2.676.100
2	Kab. Barru	0	0	0	4.025.400	4.157.600
3	Kab. Bone	0	0	0	12.954.000	8.331.300
4	Kab. Bulukumba	0	0	0	8.323.200	4.149.000
5	Kab. Enrekang	0	0	0	4.384.800	680.800
6	Kab. Gowa	0	0	0	8.633.400	2.671.400
7	Kab. Jeneponto	0	0	0	6.550.800	1.829.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
XX	***Provinsi Sulawesi Selatan***	550.633.660	2.841.000	3.036.634	3.100.000	0
1	Kab. Bantaeng	69.309.450	357.000	0	0	0
2	Kab. Barru	75.966.085	582.000	0	0	0
3	Kab. Bone	212.746.795	798.000	764.662	600.000	0
4	Kab. Bulukumba	118.447.502	474.000	0	0	0
5	Kab. Enrekang	82.821.118	432.000	5.122.597	0	0
6	Kab. Gowa	149.239.832	747.000	0	600.000	0
7	Kab. Jeneponto	85.489.188	852.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
XX	***Provinsi Sulawesi Selatan***	8.834.316	0	0	0
1	Kab. Bantaeng	11.380.282	894.004	0	711.571
2	Kab. Barru	10.238.173	777.677	0	696.369
3	Kab. Bone	38.344.151	2.402.988	0	3.152.197
4	Kab. Bulukumba	18.636.241	1.285.282	0	1.774.661
5	Kab. Enrekang	13.190.292	815.095	0	1.439.142
6	Kab. Gowa	25.416.365	1.625.311	293.837	4.033.335
7	Kab. Jeneponto	20.167.940	1.103.877	0	1.727.174

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
XX	***Provinsi Sulawesi Selatan***	0	0	2.352.080	1.618.809	862.578
1	Kab. Bantaeng	469.110	2.091.604	390.304	1.032.231	962.578
2	Kab. Barru	489.559	1.849.760	390.304	997.997	862.578
3	Kab. Bone	505.783	7.560.321	0	2.019.503	0
4	Kab. Bulukumba	489.559	3.395.207	390.304	1.396.438	862.578
5	Kab. Enrekang	469.110	3.708.702	390.304	1.099.163	862.578
6	Kab. Gowa	489.559	4.965.665	0	1.917.280	862.578
7	Kab. Jeneponto	489.559	3.457.166	0	2.160.079	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
XX	***Provinsi Sulawesi Selatan***	0	522.657	502.968	0	2.435.837.352
1	Kab. Bantaeng	0	0	322.573	560.000	94.349.407
2	Kab. Barru	0	291.177	322.573	631.750	102.279.002
3	Kab. Bone	0	383.117	322.573	836.750	291.722.140
4	Kab. Bulukumba	0	466.448	322.573	452.500	160.865.493
5	Kab. Enrekang	0	291.177	322.573	350.000	116.379.451
6	Kab. Gowa	0	454.070	322.573	744.500	203.016.705
7	Kab. Jeneponto	0	334.944	322.573	560.000	125.907.078

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
8	Kab. Luwu	0	0	0	4.607.400	2.985.800
9	Kab. Luwu Utara	0	0	0	4.335.000	4.439.800
10	Kab. Maros	0	0	0	5.001.600	1.191.000
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	0	0	6.153.000	3.402.200
12	Kota Palopo	0	0	0	2.385.000	3.368.300
13	Kab. Luwu Timur	0	0	0	4.736.400	3.982.500
14	Kab. Pinrang	0	0	0	4.413.000	4.135.000
15	Kab. Sinjai	0	0	0	6.614.400	2.066.600

SK No 023122 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
8	Kab. Luwu	82.690.943	885.000	13.597.830	0	0
9	Kab. Luwu Utara	68.805.990	585.000	8.424.520	0	0
10	Kab. Maros	98.186.495	372.000	1.315.179	600.000	0
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	103.961.726	459.000	6.276.090	0	0
12	Kota Palopo	48.459.210	306.000	0	0	0
13	Kab. Luwu Timur	48.837.505	714.000	0	0	0
14	Kab. Pinrang	101.901.241	648.000	5.181.021	0	0
15	Kab. Sinjai	88.971.181	573.000	0	0	0

SK No 023123 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
8	Kab. Luwu	21.555.883	1.355.239	0	2.091.914
9	Kab. Luwu Utara	16.010.598	815.095	293.837	1.706.361
10	Kab. Maros	14.074.088	847.635	0	1.060.032
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	22.545.028	1.276.331	0	2.061.780
12	Kota Palopo	11.690.699	680.059	293.837	647.735
13	Kab. Luwu Timur	13.926.491	968.841	0	508.996
14	Kab. Pinrang	17.365.466	871.223	0	1.535.414
15	Kab. Sinjai	14.964.336	1.015.210	0	1.213.900

SK No 023124 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
8	Kab. Luwu	505.783	5.717.740	0	1.351.183	0
9	Kab. Luwu Utara	505.783	4.434.602	0	1.529.112	0
10	Kab. Maros	505.783	3.945.259	0	1.331.896	862.578
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	505.783	3.626.621	390.304	1.370.718	962.578
12	Kota Palopo	505.783	2.187.025	390.304	928.221	0
13	Kab. Luwu Timur	505.783	2.985.271	0	1.464.614	0
14	Kab. Pinrang	489.559	3.622.164	0	983.657	0
15	Kab. Sinjai	469.110	2.956.425	390.304	1.045.151	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
8	Kab. Luwu	0	286.177	322.573	785.500	138.738.965
9	Kab. Luwu Utara	0	410.806	367.383	713.750	113.377.637
10	Kab. Maros	0	337.659	322.573	493.500	130.447.277
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	319.384	322.573	652.250	154.285.366
12	Kota Palopo	0	0	322.573	560.000	72.724.746
13	Kab. Luwu Timur	0	337.659	367.383	462.750	79.798.193
14	Kab. Pinrang	0	0	322.573	683.000	142.151.318
15	Kab. Sinjai	0	282.348	322.573	642.000	121.526.538

SK No 023126 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
16	Kab. Kepulauan Selayar	0	0	0	3.232.800	2.039.500
17	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	0	6.200.400	2.291.700
18	Kab. Soppeng	0	0	0	3.296.400	2.156.000
19	Kab. Takalar	0	0	0	5.541.000	2.738.700
20	Kab. Tana Toraja	0	0	0	3.178.200	1.337.600
21	Kab. Wajo	0	0	0	8.214.000	1.505.200
22	Kota Pare-pare	0	0	0	1.792.200	873.200
23	Kota Makassar	0	0	0	13.905.600	4.516.900

SK No 023127 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
16	Kab. Kepulauan Selayar	52.514.735	390.000	7.623.410	600.000	0
17	Kab. Sidenreng Rappang	93.222.202	291.000	0	0	0
18	Kab. Soppeng	99.951.180	585.000	0	0	0
19	Kab. Takalar	89.323.148	345.000	0	0	0
20	Kab. Tana Toraja	70.182.483	804.000	6.335.562	0	0
21	Kab. Wajo	124.064.249	540.000	0	0	0
22	Kota Pare-pare	51.243.259	405.000	0	0	0
23	Kota Makassar	206.709.646	1.101.000	0	700.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
16	Kab. Kepulauan Selayar	14.771.359	847.635	0	507.805
17	Kab. Sidenreng Rappang	13.988.203	782.556	293.837	479.893
18	Kab. Soppeng	13.953.566	903.762	0	412.404
19	Kab. Takalar	15.966.015	898.883	293.838	1.444.910
20	Kab. Tana Toraja	18.662.113	1.238.913	293.837	1.969.805
21	Kab. Wajo	20.029.263	1.406.488	0	840.395
22	Kota Pare-pare	4.721.002	307.491	0	472.805
23	Kota Makassar	28.435.950	2.552.662	0	964.174

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
16	Kab. Kepulauan Selayar	485.334	3.325.281	0	955.320	862.578
17	Kab. Sidenreng Rappang	469.110	2.800.635	0	1.219.024	862.578
18	Kab. Soppeng	521.383	2.106.004	390.304	1.080.580	0
19	Kab. Takalar	489.559	3.148.079	0	1.170.237	862.578
20	Kab. Tana Toraja	469.110	5.015.788	390.304	1.206.040	862.578
21	Kab. Wajo	489.559	4.367.613	390.304	1.575.712	0
22	Kota Pare-pare	489.559	1.164.775	390.304	938.836	0
23	Kota Makassar	505.783	4.329.548	390.304	2.984.837	862.578

SK No 023130 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
16	Kab. Kepulauan Selayar	0	0	322.573	350.000	88.828.330
17	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	322.573	672.750	123.896.461
18	Kab. Soppeng	0	337.659	322.573	642.000	126.658.815
19	Kab. Takalar	0	286.177	322.573	652.250	123.482.947
20	Kab. Tana Toraja	0	291.177	322.573	350.000	112.910.083
21	Kab. Wajo	0	297.517	322.573	703.500	164.746.373
22	Kota Pare-pare	0	454.070	322.573	560.000	64.135.074
23	Kota Makassar	0	551.368	322.573	560.000	269.392.923

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
24	Kab. Toraja Utara	0	0	0	2.851.200	1.140.100
XXI	***Provinsi Sulawesi Tenggara***	657.018.240	4.320.000	8.880.000	0	0
1	Kab. Buton	0	0	0	2.745.600	979.800
2	Kab. Konawe	0	0	0	5.845.800	4.562.000
3	Kab. Kolaka	0	0	0	4.729.200	2.748.200
4	Kab. Muna	0	0	0	6.275.400	1.823.200
5	Kota Kendari	0	0	0	4.788.000	2.380.900
6	Kota Bau-bau	0	0	0	2.530.200	2.439.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
24	Kab. Toraja Utara	65.754.065	639.000	0	600.000	0
XXI	***Provinsi Sulawesi Tenggara***	234.700.240	999.000	1.576.679	1.300.000	1.400.000
1	Kab. Buton	35.947.292	315.000	1.023.827	0	0
2	Kab. Konawe	72.066.193	450.000	4.483.071	0	0
3	Kab. Kolaka	53.287.483	585.000	1.963.946	0	0
4	Kab. Muna	90.159.437	450.000	10.060.171	600.000	0
5	Kota Kendari	90.712.809	507.000	0	0	0
6	Kota Bau-bau	49.414.037	408.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
24	Kab. Toraja Utara	24.291.305	1.625.311	0	1.038.395
XXI	***Provinsi Sulawesi Tenggara***	7.318.812	0	0	0
1	Kab. Buton	14.260.064	880.174	0	1.387.111
2	Kab. Konawe	28.511.308	1.779.057	293.837	2.915.699
3	Kab. Kolaka	14.742.072	880.174	0	1.789.491
4	Kab. Muna	30.068.501	1.811.596	0	1.985.006
5	Kota Kendari	10.766.483	996.500	293.837	1.213.939
6	Kota Bau-bau	11.248.508	1.131.536	0	293.709

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
24	Kab. Toraja Utara	469.110	5.408.319	0	1.169.961	862.578
XXI	***Provinsi Sulawesi Tenggara***	0	0	2.352.080	1.429.655	862.578
1	Kab. Buton	469.110	2.350.259	390.304	913.911	862.578
2	Kab. Konawe	489.559	6.246.115	0	1.996.718	0
3	Kab. Kolaka	489.559	3.295.251	390.304	1.104.830	0
4	Kab. Muna	0	4.978.580	0	1.397.720	0
5	Kota Kendari	505.783	2.174.048	390.304	1.254.024	862.578
6	Kota Bau-bau	489.559	1.640.098	390.304	972.190	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
24	Kab. Toraja Utara	0	287.677	322.573	560.000	107.019.594
XXI	***Provinsi Sulawesi Tenggara***	0	343.630	527.703	0	923.028.617
1	Kab. Buton	0	0	367.383	0	62.892.413
2	Kab. Konawe	0	284.437	322.573	857.250	131.103.617
3	Kab. Kolaka	0	0	322.573	263.000	86.591.083
4	Kab. Muna	0	0	367.383	0	149.976.994
5	Kota Kendari	0	284.372	322.573	560.000	118.013.150
6	Kota Bau-bau	0	0	322.573	560.000	72.702.292

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
7	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	4.509.600	2.712.300
8	Kab. Bombana	0	0	0	3.706.800	1.909.000
9	Kab. Wakatobi	0	0	0	2.659.800	2.080.700
10	Kab. Kolaka Utara	0	0	0	2.624.400	1.816.700
11	Kab. Konawe Utara	0	0	0	2.391.000	1.883.600
12	Kab. Buton Utara	0	0	0	3.006.600	928.200
13	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	1.229.400	720.000
14	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	2.405.400	912.900

SK No 023137 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7	Kab. Konawe Selatan	76.377.600	912.000	6.127.224	0	0
8	Kab. Bombana	42.399.209	357.000	7.157.329	0	0
9	Kab. Wakatobi	36.439.697	654.000	0	0	0
10	Kab. Kolaka Utara	31.106.453	372.000	2.926.687	0	0
11	Kab. Konawe Utara	19.370.686	207.000	291.993	0	0
12	Kab. Buton Utara	21.807.675	261.000	1.737.296	0	0
13	Kab. Konawe Kepulauan	7.303.236	168.000	0	0	0
14	Kab. Kolaka Timur	27.063.836	249.000	1.437.310	0	0

SK No 023138 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7	Kab. Konawe Selatan	26.628.040	1.490.275	0	3.666.515
8	Kab. Bombana	22.546.197	1.322.700	587.675	2.358.363
9	Kab. Wakatobi	19.549.793	1.220.203	0	1.085.889
10	Kab. Kolaka Utara	16.209.005	1.015.210	293.837	1.308.214
11	Kab. Konawe Utara	18.843.471	1.355.239	0	1.582.022
12	Kab. Buton Utara	11.355.216	577.563	0	595.372
13	Kab. Konawe Kepulauan	9.524.128	475.066	0	370.638
14	Kab. Kolaka Timur	12.513.956	777.677	0	1.806.994

SK No 023139 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
7	Kab. Konawe Selatan	500.934	5.777.461	0	1.542.759	100.000
8	Kab. Bombana	489.559	3.701.916	0	1.135.944	0
9	Kab. Wakatobi	469.110	2.524.039	0	905.546	962.578
10	Kab. Kolaka Utara	0	3.152.506	390.304	968.764	0
11	Kab. Konawe Utara	0	2.795.515	0	1.124.631	100.000
12	Kab. Buton Utara	0	1.533.600	0	827.333	0
13	Kab. Konawe Kepulauan	0	2.326.967	0	1.587.323	0
14	Kab. Kolaka Timur	469.110	3.273.946	0	1.205.710	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
7	Kab. Konawe Selatan	0	0	322.573	816.250	131.483.531
8	Kab. Bombana	0	0	367.383	355.250	88.394.325
9	Kab. Wakatobi	0	0	367.383	0	68.918.738
10	Kab. Kolaka Utara	0	0	367.383	652.250	63.203.713
11	Kab. Konawe Utara	0	0	322.573	560.000	50.827.730
12	Kab. Buton Utara	0	0	367.383	0	42.997.238
13	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	322.573	560.000	24.587.331
14	Kab. Kolaka Timur	0	0	322.573	252.750	52.691.162

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
15	Kab. Muna Barat	0	0	0	3.320.400	1.006.800
16	Kab. Buton Tengah	0	0	0	2.435.400	1.762.600
17	Kab. Buton Selatan	0	0	0	2.028.000	78.600
XXII	***Provinsi Bali***	1.028.064.700	0	7.740.000	0	0
1	Kab. Badung	0	0	0	7.590.600	1.087.300
2	Kab. Bangli	0	0	0	2.103.000	169.500
3	Kab. Buleleng	0	0	0	6.551.400	1.435.400
4	Kab. Gianyar	0	0	0	6.004.200	607.900

SK No 023142 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
15	Kab. Muna Barat	26.973.753	120.000	3.295.793	0	0
16	Kab. Buton Tengah	25.313.830	156.000	1.795.034	0	0
17	Kab. Buton Selatan	21.951.835	186.000	243.567	0	0
XXII	***Provinsi Bali***	218.252.425	1.056.000	0	3.186.400	1.750.000
1	Kab. Badung	98.081.540	897.000	0	600.000	0
2	Kab. Bangli	51.806.670	552.000	0	0	0
3	Kab. Buleleng	155.445.361	1.311.000	0	600.000	0
4	Kab. Gianyar	95.896.237	1.275.000	0	0	0

SK No 023143 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
15	Kab. Muna Barat	15.169.003	963.961	0	906.158
16	Kab. Buton Tengah	13.294.534	880.174	0	971.677
17	Kab. Buton Selatan	10.021.072	558.853	0	1.176.827
XXII	***Provinsi Bali***	4.564.208	0	0	0
1	Kab. Badung	9.191.145	666.229	0	561.526
2	Kab. Bangli	9.556.998	810.216	0	393.319
3	Kab. Buleleng	14.435.668	1.122.586	0	1.111.654
4	Kab. Gianyar	10.163.843	796.386	0	834.550

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
15	Kab. Muna Barat	0	2.097.673	0	871.943	0
16	Kab. Buton Tengah	469.110	1.632.567	0	910.662	0
17	Kab. Buton Selatan	469.110	2.188.121	0	882.886	0
XXII	***Provinsi Bali***	0	0	3.217.520	1.273.779	862.578
1	Kab. Badung	489.559	2.313.261	390.304	1.445.697	862.578
2	Kab. Bangli	469.110	2.133.780	459.181	1.116.099	862.578
3	Kab. Buleleng	20.449	3.513.117	390.304	1.964.399	962.578
4	Kab. Gianyar	489.559	2.845.134	597.028	1.466.266	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
15	Kab. Muna Barat	0	0	367.383	0	55.092.867
16	Kab. Buton Tengah	0	0	367.383	560.000	50.548.971
17	Kab. Buton Selatan	0	0	367.383	0	40.152.254
XXII	***Provinsi Bali***	0	389.464	530.543	0	1.270.887.617
1	Kab. Badung	0	413.732	343.813	191.250	125.125.534
2	Kab. Bangli	0	0	343.813	191.250	70.967.514
3	Kab. Buleleng	0	401.124	343.813	232.250	189.841.103
4	Kab. Gianyar	0	401.124	343.813	211.750	122.795.368

SK No 023146 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	Kab. Jembrana	0	0	0	2.647.200	387.000
6	Kab. Karangasem	0	0	0	3.689.400	1.675.000
7	Kab. Klungkung	0	0	0	3.058.800	555.400
8	Kab. Tabanan	0	0	0	5.428.200	851.100
9	Kota Denpasar	0	0	0	9.899.400	2.838.700
XXIII	***Provinsi Nusa Tenggara Barat***	974.541.440	1.860.000	11.940.000	0	0
1	Kab. Bima	0	0	0	15.261.000	11.845.600
2	Kab. Dompu	0	0	0	6.962.400	4.248.000

SK No 023147 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5	Kab. Jembrana	49.318.507	450.000	0	0	0
6	Kab. Karangasem	131.344.366	1.392.000	0	0	0
7	Kab. Klungkung	64.437.838	552.000	0	600.000	0
8	Kab. Tabanan	107.626.152	720.000	0	700.000	0
9	Kota Denpasar	74.291.203	939.000	0	0	0
XXIII	***Provinsi Nusa Tenggara Barat***	237.352.588	963.000	0	1.593.200	1.750.000
1	Kab. Bima	124.916.843	693.000	6.845.191	600.000	0
2	Kab. Dompu	51.719.147	447.000	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
5	Kab. Jembrana	7.582.907	512.484	0	0
6	Kab. Karangasem	9.343.220	842.755	0	595.913
7	Kab. Klungkung	7.419.775	526.314	0	302.253
8	Kab. Tabanan	18.969.175	1.220.203	0	1.166.854
9	Kota Denpasar	6.566.459	661.350	0	1.032.921
XXIII	***Provinsi Nusa Tenggara Barat***	5.377.441	0	0	0
1	Kab. Bima	20.911.483	1.271.452	0	3.763.345
2	Kab. Dompu	9.485.281	591.392	0	1.929.096

SK No 023149 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
5	Kab. Jembrana	0	1.758.979	0	1.208.722	862.578
6	Kab. Karangasem	489.559	2.337.273	390.304	1.512.205	962.578
7	Kab. Klungkung	489.559	1.474.596	390.304	1.036.766	862.578
8	Kab. Tabanan	489.559	2.959.035	390.304	1.405.261	862.578
9	Kota Denpasar	505.783	2.039.102	459.181	1.686.674	862.578
XXIII	***Provinsi Nusa Tenggara Barat***	0	0	2.352.080	1.284.560	862.578
1	Kab. Bima	505.783	5.044.070	390.304	2.379.000	0
2	Kab. Dompu	500.934	2.767.280	390.304	1.858.216	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
5	Kab. Jembrana	0	0	343.813	611.250	65.683.440
6	Kab. Karangasem	0	0	343.813	642.000	155.560.386
7	Kab. Klungkung	0	0	343.813	181.000	82.230.996
8	Kab. Tabanan	0	401.124	343.813	662.500	144.195.858
9	Kota Denpasar	0	537.365	343.813	601.000	103.264.529
XXIII	***Provinsi Nusa Tenggara Barat***	0	404.432	530.543	0	1.240.811.862
1	Kab. Bima	0	371.925	392.223	744.500	195.935.719
2	Kab. Dompu	0	368.550	392.223	642.000	82.301.823

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3	Kab. Lombok Barat	0	0	0	11.983.800	3.842.100
4	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	25.309.800	6.605.300
5	Kab. Lombok Timur	0	0	0	28.323.000	6.074.800
6	Kab. Sumbawa	0	0	0	14.736.600	4.704.900
7	Kota Mataram	0	0	0	5.441.400	714.400
8	Kota Bima	0	0	0	3.712.800	2.203.300
9	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	4.281.000	253.200
10	Kab. Lombok Utara	0	0	0	4.111.200	1.447.600

SK No 023152 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3	Kab. Lombok Barat	117.888.200	531.000	0	0	0
4	Kab. Lombok Tengah	165.941.787	984.000	0	0	0
5	Kab. Lombok Timur	225.651.202	879.000	0	0	0
6	Kab. Sumbawa	104.764.801	714.000	5.063.599	600.000	0
7	Kota Mataram	73.913.611	387.000	0	0	0
8	Kota Bima	42.213.111	432.000	0	0	0
9	Kab. Sumbawa Barat	42.195.013	309.000	0	0	0
10	Kab. Lombok Utara	34.642.234	510.000	0	0	0

SK No 023153 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3	Kab. Lombok Barat	16.691.954	973.720	293.838	3.344.989
4	Kab. Lombok Tengah	23.408.521	1.792.887	293.838	5.012.602
5	Kab. Lombok Timur	32.392.831	1.965.341	0	5.298.038
6	Kab. Sumbawa	20.208.054	1.541.524	0	2.820.058
7	Kota Mataram	6.999.085	563.733	293.838	1.233.755
8	Kota Bima	5.217.236	423.817	0	664.185
9	Kab. Sumbawa Barat	7.926.011	526.314	0	715.955
10	Kab. Lombok Utara	6.457.799	409.987	0	1.516.949

SK No 023154 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
3	Kab. Lombok Barat	505.783	3.478.222	390.304	2.601.583	862.578
4	Kab. Lombok Tengah	521.383	3.987.569	390.304	3.090.152	862.578
5	Kab. Lombok Timur	489.559	6.217.741	390.304	3.521.074	862.578
6	Kab. Sumbawa	505.783	6.123.121	390.304	2.640.353	0
7	Kota Mataram	521.383	2.286.468	390.304	1.359.968	862.578
8	Kota Bima	489.559	1.441.137	390.304	941.151	0
9	Kab. Sumbawa Barat	469.110	2.713.700	390.304	1.581.000	0
10	Kab. Lombok Utara	469.110	2.069.217	390.304	1.871.406	862.578

SK No 023155 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
3	Kab. Lombok Barat	0	417.322	392.223	452.500	164.650.116
4	Kab. Lombok Tengah	0	428.705	392.223	473.000	239.494.649
5	Kab. Lombok Timur	0	0	392.223	765.000	313.222.691
6	Kab. Sumbawa	0	519.091	392.223	806.000	166.530.411
7	Kota Mataram	0	0	343.813	621.500	95.932.836
8	Kota Bima	0	417.230	343.813	561.250	59.450.893
9	Kab. Sumbawa Barat	0	368.550	392.223	642.000	62.763.380
10	Kab. Lombok Utara	0	417.230	392.223	611.250	56.179.087

SK No 023156 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
XXIV	***Provinsi Nusa Tenggara Timur***	1.556.749.130	21.720.000	19.080.000	0	0
1	Kab. Alor	0	0	0	2.915.400	2.314.200
2	Kab. Belu	0	0	0	4.371.000	1.514.500
3	Kab. Ende	0	0	0	3.853.800	947.100
4	Kab. Flores Timur	0	0	0	5.106.600	467.600
5	Kab. Kupang	0	0	0	4.777.200	1.650.600
6	Kab. Lembata	0	0	0	1.677.000	492.500
7	Kab. Manggarai	0	0	0	4.042.800	1.561.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
XXIV	***Provinsi Nusa Tenggara Timur***	224.343.948	2.673.000	7.671.381	1.300.000	1.750.000
1	Kab. Alor	22.389.035	912.000	2.150.878	600.000	0
2	Kab. Belu	37.423.136	777.000	2.169.854	0	0
3	Kab. Ende	52.042.917	891.000	10.840.751	0	0
4	Kab. Flores Timur	50.113.426	1.410.000	3.105.299	0	0
5	Kab. Kupang	64.666.632	1.200.000	4.751.303	0	0
6	Kab. Lembata	23.586.991	726.000	4.082.424	0	0
7	Kab. Manggarai	60.343.396	825.000	7.677.346	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
XXIV	***Provinsi Nusa Tenggara Timur***	9.891.925	0	0	0
1	Kab. Alor	31.243.474	1.657.851	0	3.131.194
2	Kab. Belu	19.128.789	1.131.536	0	2.498.408
3	Kab. Ende	26.326.467	1.490.275	0	2.214.127
4	Kab. Flores Timur	25.924.238	1.336.530	0	2.701.354
5	Kab. Kupang	32.917.799	1.690.390	0	4.409.461
6	Kab. Lembata	9.077.776	526.314	0	1.393.597
7	Kab. Manggarai	24.136.837	1.336.530	0	2.956.093

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
XXIV	***Provinsi Nusa Tenggara Timur***	0	0	2.352.080	1.621.005	962.578
1	Kab. Alor	469.110	4.918.129	0	2.731.530	0
2	Kab. Belu	488.311	3.294.474	390.304	2.333.116	0
3	Kab. Ende	469.110	5.790.239	390.304	2.035.912	862.578
4	Kab. Flores Timur	469.110	4.971.223	390.304	1.239.454	862.578
5	Kab. Kupang	485.334	5.260.804	390.304	2.613.930	0
6	Kab. Lembata	469.110	3.152.669	390.304	1.779.334	0
7	Kab. Manggarai	489.559	3.735.814	390.304	2.086.383	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
XXIV	***Provinsi Nusa Tenggara Timur***	0	331.125	556.013	0	1.851.002.185
1	Kab. Alor	0	0	392.223	0	75.825.024
2	Kab. Belu	0	380.769	392.223	560.000	76.853.420
3	Kab. Ende	0	419.957	392.223	0	108.966.760
4	Kab. Flores Timur	0	0	392.223	0	98.489.939
5	Kab. Kupang	0	0	392.223	560.000	125.765.980
6	Kab. Lembata	0	0	392.223	560.000	48.306.242
7	Kab. Manggarai	0	0	392.223	683.000	111.518.863

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
8	Kab. Ngada	0	0	0	1.942.200	405.800
9	Kab. Sikka	0	0	0	5.799.600	110.100
10	Kab. Sumba Barat	0	0	0	3.394.200	468.200
11	Kab. Sumba Timur	0	0	0	2.902.800	122.700
12	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0	5.554.200	977.700
13	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	4.884.600	302.400
14	Kota Kupang	0	0	0	5.751.000	2.511.200
15	Kab. Rote Ndao	0	0	0	1.467.600	756.800

SK No 023162 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
8	Kab. Ngada	33.789.507	705.000	4.140.912	0	0
9	Kab. Sikka	49.327.789	1.122.000	17.042.852	0	0
10	Kab. Sumba Barat	10.917.517	441.000	0	0	0
11	Kab. Sumba Timur	39.362.782	1.221.000	2.477.673	0	0
12	Kab. Timor Tengah Selatan	50.282.737	1.431.000	2.495.987	0	0
13	Kab. Timor Tengah Utara	48.937.963	1.008.000	4.210.178	0	0
14	Kota Kupang	67.479.209	1.047.000	0	0	0
15	Kab. Rote Ndao	31.641.267	831.000	9.013.749	0	0

SK No 023163 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
8	Kab. Ngada	16.815.308	973.720	0	1.615.672
9	Kab. Sikka	27.090.422	1.574.063	0	2.387.497
10	Kab. Sumba Barat	8.879.071	461.236	293.838	1.501.426
11	Kab. Sumba Timur	22.689.310	1.490.275	0	2.775.490
12	Kab. Timor Tengah Selatan	36.983.879	1.993.001	0	6.063.450
13	Kab. Timor Tengah Utara	27.494.487	1.657.851	293.838	3.154.852
14	Kota Kupang	8.456.340	921.663	0	1.575.424
15	Kab. Rote Ndao	14.970.448	745.138	0	2.183.289

SK No 023164 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
8	Kab. Ngada	468.486	3.628.139	0	1.037.886	862.578
9	Kab. Sikka	469.110	4.375.099	390.304	1.311.287	862.578
10	Kab. Sumba Barat	469.110	2.321.609	0	1.787.251	0
11	Kab. Sumba Timur	0	5.227.699	0	2.262.369	0
12	Kab. Timor Tengah Selatan	0	7.147.313	0	2.411.557	0
13	Kab. Timor Tengah Utara	485.334	5.696.594	390.304	2.712.675	0
14	Kota Kupang	521.383	1.710.514	390.304	1.409.951	0
15	Kab. Rote Ndao	0	3.162.229	0	2.863.779	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
8	Kab. Ngada	0	0	392.223	683.000	67.460.431
9	Kab. Sikka	0	0	392.223	0	112.254.924
10	Kab. Sumba Barat	0	0	392.223	222.000	31.548.681
11	Kab. Sumba Timur	0	380.769	392.223	365.500	81.670.590
12	Kab. Timor Tengah Selatan	0	419.957	392.223	0	116.153.004
13	Kab. Timor Tengah Utara	0	419.957	392.223	0	102.041.256
14	Kota Kupang	0	380.769	343.813	560.000	93.058.570
15	Kab. Rote Ndao	0	0	392.223	242.500	68.270.022

SK No 023166 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
16	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	2.013.600	345.900
17	Kab. Nagekeo	0	0	0	2.029.800	614.500
18	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	3.973.200	640.600
19	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	2.658.000	392.500
20	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	2.426.400	126.000
21	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	2.375.400	370.500
22	Kab. Malaka	0	0	0	2.241.000	114.000
XXV	***Provinsi Maluku***	562.988.620	23.040.000	7.020.000	0	0

SK No 023167 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
16	Kab. Manggarai Barat	46.341.966	657.000	7.482.541	0	0
17	Kab. Nagekeo	30.214.960	1.008.000	4.021.024	0	0
18	Kab. Sumba Barat Daya	28.757.203	708.000	12.274.695	0	0
19	Kab. Sumba Tengah	9.833.498	378.000	4.550.838	0	0
20	Kab. Manggarai Timur	41.354.197	1.107.000	8.376.488	0	0
21	Kab. Sabu Raijua	12.317.323	819.000	747.885	0	0
22	Kab. Malaka	24.867.422	663.000	11.581.216	0	0
XXV	***Provinsi Maluku***	124.484.849	1.677.000	6.612.849	1.593.200	1.750.000

SK No 023168 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
16	Kab. Manggarai Barat	21.092.554	1.238.913	293.838	3.497.639
17	Kab. Nagekeo	8.456.546	456.356	0	1.829.073
18	Kab. Sumba Barat Daya	14.641.605	931.422	0	5.095.382
19	Kab. Sumba Tengah	10.292.021	540.144	0	1.720.837
20	Kab. Manggarai Timur	29.436.739	1.508.985	0	5.157.423
21	Kab. Sabu Raijua	7.825.036	470.186	0	1.685.573
22	Kab. Malaka	25.294.298	1.415.438	0	3.925.758
XXV	***Provinsi Maluku***	5.823.055	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
16	Kab. Manggarai Barat	0	3.723.879	0	1.994.835	862.578
17	Kab. Nagekeo	0	2.650.954	390.304	2.073.559	862.578
18	Kab. Sumba Barat Daya	464.742	3.589.519	390.304	2.082.921	0
19	Kab. Sumba Tengah	0	2.119.919	0	1.685.593	0
20	Kab. Manggarai Timur	0	3.312.364	390.304	1.997.497	862.578
21	Kab. Sabu Raijua	469.110	2.257.134	0	2.496.961	0
22	Kab. Malaka	0	2.935.753	0	1.607.525	0
XXV	***Provinsi Maluku***	0	0	2.352.080	1.439.398	100.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
16	Kab. Manggarai Barat	0	0	392.223	683.000	90.620.466
17	Kab. Nagekeo	0	0	392.223	211.750	55.211.627
18	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	392.223	672.750	74.614.566
19	Kab. Sumba Tengah	0	0	392.223	191.250	34.754.823
20	Kab. Manggarai Timur	0	0	392.223	652.250	97.100.448
21	Kab. Sabu Raijua	0	0	392.223	560.000	32.786.331
22	Kab. Malaka	0	0	392.223	0	75.037.633
XXV	***Provinsi Maluku***	0	325.337	590.703	0	739.797.091

SK No 023171 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	936.000	2.031.900
2	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	4.551.600	949.600
3	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	2.851.200	1.189.700
4	Kab. Buru	0	0	0	3.697.800	571.000
5	Kota Ambon	0	0	0	3.949.200	3.408.900
6	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	2.398.800	483.900
7	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	1.823.400	45.000
8	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	1.977.000	52.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	20.677.659	456.000	4.052.667	0	0
2	Kab. Maluku Tengah	102.307.662	1.380.000	5.482.149	0	0
3	Kab. Maluku Tenggara	17.574.433	624.000	7.285.426	0	0
4	Kab. Buru	37.476.179	732.000	5.379.064	0	0
5	Kota Ambon	82.364.999	879.000	0	0	0
6	Kab. Seram Bagian Barat	41.284.859	918.000	6.880.717	0	0
7	Kab. Seram Bagian Timur	9.461.210	480.000	11.055.913	0	0
8	Kab. Kepulauan Aru	12.293.674	927.000	14.979.683	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	17.454.242	796.386	0	2.145.478
2	Kab. Maluku Tengah	44.940.910	2.211.824	0	5.426.819
3	Kab. Maluku Tenggara	22.439.918	1.052.628	0	2.702.081
4	Kab. Buru	12.791.129	693.889	0	2.574.375
5	Kota Ambon	10.774.427	1.355.239	0	912.879
6	Kab. Seram Bagian Barat	24.642.536	1.033.919	0	2.717.039
7	Kab. Seram Bagian Timur	27.441.815	1.071.337	0	2.702.349
8	Kab. Kepulauan Aru	39.113.011	1.695.269	0	2.581.336

SK No 023174 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	464.742	2.030.922	0	2.639.241	0
2	Kab. Maluku Tengah	488.935	4.416.679	0	2.602.047	0
3	Kab. Maluku Tenggara	469.110	3.339.577	390.304	1.442.040	0
4	Kab. Buru	469.110	2.023.593	0	1.848.821	0
5	Kota Ambon	489.559	2.000.874	390.304	1.343.011	0
6	Kab. Seram Bagian Barat	465.990	2.874.149	0	1.978.737	100.000
7	Kab. Seram Bagian Timur	467.238	3.783.738	0	1.750.246	0
8	Kab. Kepulauan Aru	469.110	2.497.444	0	2.605.144	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	393.383	560.000	54.638.620
2	Kab. Maluku Tengah	0	0	393.383	314.250	175.465.858
3	Kab. Maluku Tenggara	0	426.155	393.383	0	62.179.955
4	Kab. Buru	0	0	393.383	642.000	69.292.343
5	Kota Ambon	0	426.155	393.383	560.000	109.247.930
6	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	393.383	252.750	86.424.779
7	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	393.383	421.750	60.897.379
8	Kab. Kepulauan Aru	0	0	393.383	350.000	79.934.254

SK No 023176 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
9	Kota Tual	0	0	0	1.532.400	105.300
10	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	1.366.800	90.600
11	Kab. Buru Selatan	0	0	0	2.113.200	365.500
XXVI	***Provinsi Papua***	1.195.498.110	47.100.000	8.820.000	0	0
1	Kab. Biak Numfor	0	0	0	1.131.600	904.100
2	Kab. Jayapura	0	0	0	3.483.000	1.992.800
3	Kab. Jayawijaya	0	0	0	928.800	2.001.100
4	Kab. Merauke	0	0	0	3.450.000	1.872.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
9	Kota Tual	9.482.421	231.000	656.741	0	0
10	Kab. Maluku Barat Daya	10.781.277	609.000	7.847.757	0	0
11	Kab. Buru Selatan	6.620.294	528.000	6.044.273	0	0
XXVI	***Provinsi Papua***	115.039.065	1.365.000	9.530.839	1.300.000	0
1	Kab. Biak Numfor	19.862.357	519.000	4.373.144	0	0
2	Kab. Jayapura	29.725.353	504.000	2.422.290	0	0
3	Kab. Jayawijaya	12.513.576	285.000	3.186.422	0	0
4	Kab. Merauke	39.400.942	768.000	6.156.940	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
9	Kota Tual	9.175.956	866.344	293.837	433.237
10	Kab. Maluku Barat Daya	29.878.984	1.173.834	0	2.017.051
11	Kab. Buru Selatan	16.384.601	712.599	0	815.169
XXVI	***Provinsi Papua***	11.565.987	0	0	0
1	Kab. Biak Numfor	20.074.168	1.150.246	0	1.349.818
2	Kab. Jayapura	23.836.684	1.187.664	0	1.342.487
3	Kab. Jayawijaya	16.411.970	959.082	0	2.014.098
4	Kab. Merauke	32.894.754	1.476.445	0	2.072.367

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
9	Kota Tual	467.862	1.048.547	390.304	958.259	0
10	Kab. Maluku Barat Daya	465.366	2.904.944	0	2.576.086	0
11	Kab. Buru Selatan	462.870	1.408.315	0	1.745.546	0
XXVI	***Provinsi Papua***	0	0	1.519.360	2.528.200	862.578
1	Kab. Biak Numfor	469.110	4.763.949	0	3.022.174	862.578
2	Kab. Jayapura	485.334	3.286.759	390.304	2.260.242	862.578
3	Kab. Jayawijaya	469.110	5.560.380	0	3.304.771	0
4	Kab. Merauke	485.334	3.615.400	390.304	4.216.901	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
9	Kota Tual	0	426.155	393.383	350.000	26.811.746
10	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	393.383	350.000	60.455.082
11	Kab. Buru Selatan	0	0	393.383	350.000	37.943.750
XXVI	***Provinsi Papua***	0	251.739	849.903	0	1.396.230.781
1	Kab. Biak Numfor	0	0	538.183	350.000	59.370.427
2	Kab. Jayapura	0	0	538.183	350.000	72.667.678
3	Kab. Jayawijaya	0	0	538.183	350.000	48.522.492
4	Kab. Merauke	0	435.625	538.183	442.250	99.078.823

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
5	Kab. Mimika	0	0	0	3.045.000	3.374.400
6	Kab. Nabire	0	0	0	2.328.000	1.483.300
7	Kab. Paniai	0	0	0	765.600	1.077.600
8	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	231.600	332.400
9	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	640.800	817.300
10	Kota Jayapura	0	0	0	3.237.000	1.786.400
11	Kab. Sarmi	0	0	0	911.400	145.500
12	Kab. Keerom	0	0	0	1.383.000	645.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5	Kab. Mimika	21.524.474	687.000	4.806.338	0	0
6	Kab. Nabire	26.671.219	339.000	1.868.680	0	0
7	Kab. Paniai	5.952.100	102.000	1.468.596	0	0
8	Kab. Puncak Jaya	1.189.411	150.000	284.808	0	0
9	Kab. Kepulauan Yapen	15.586.053	303.000	5.848.353	0	0
10	Kota Jayapura	39.599.005	768.000	0	0	0
11	Kab. Sarmi	7.759.398	192.000	686.997	0	0
12	Kab. Keerom	18.173.275	189.000	4.636.903	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
5	Kab. Mimika	20.840.404	637.761	0	2.166.470
6	Kab. Nabire	34.366.861	1.885.625	0	1.991.514
7	Kab. Paniai	22.085.233	1.401.608	0	2.305.907
8	Kab. Puncak Jaya	10.678.296	1.378.020	0	1.334.844
9	Kab. Kepulauan Yapen	16.411.163	926.543	0	2.055.315
10	Kota Jayapura	10.036.340	861.465	0	1.877.937
11	Kab. Sarmi	12.655.315	596.272	0	672.631
12	Kab. Keerom	11.142.262	610.102	0	325.186

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
5	Kab. Mimika	20.449	3.019.108	0	2.462.417	862.578
6	Kab. Nabire	489.559	2.846.398	0	3.039.748	0
7	Kab. Paniai	0	4.170.989	0	2.989.867	0
8	Kab. Puncak Jaya	0	4.784.072	0	3.147.421	0
9	Kab. Kepulauan Yapen	469.110	3.401.521	0	2.503.550	0
10	Kota Jayapura	505.783	1.745.833	0	1.949.924	862.578
11	Kab. Sarmi	0	2.529.605	0	2.815.318	0
12	Kab. Keerom	0	2.371.117	0	3.520.457	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
5	Kab. Mimika	0	435.625	538.183	350.000	64.770.207
6	Kab. Nabire	0	0	538.183	350.000	78.198.087
7	Kab. Paniai	0	0	538.183	350.000	43.207.683
8	Kab. Puncak Jaya	0	0	538.183	350.000	24.399.055
9	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	538.183	350.000	49.850.891
10	Kota Jayapura	0	436.625	474.433	350.000	64.491.323
11	Kab. Sarmi	0	0	538.183	350.000	29.852.619
12	Kab. Keerom	0	530.895	538.183	350.000	44.416.080

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
13	Kab. Yahukimo	0	0	0	84.600	208.200
14	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	244.800	15.000
15	Kab. Tolikara	0	0	0	5.400	15.000
16	Kab. Boven Digoel	0	0	0	749.400	365.000
17	Kab. Mappi	0	0	0	32.400	277.500
18	Kab. Asmat	0	0	0	1.306.200	196.600
19	Kab. Waropen	0	0	0	5.400	231.600
20	Kab. Supiori	0	0	0	832.200	89.700

SK No 023187 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
13	Kab. Yahukimo	1.690.029	117.000	3.089.080	0	0
14	Kab. Pegunungan Bintang	5.113.369	99.000	4.422.399	0	0
15	Kab. Tolikara	704.661	51.000	915.789	0	0
16	Kab. Boven Digoel	6.185.382	372.000	975.462	0	0
17	Kab. Mappi	7.630.354	207.000	1.848.361	0	0
18	Kab. Asmat	6.470.564	294.000	4.528.336	0	0
19	Kab. Waropen	5.491.737	81.000	1.449.050	0	0
20	Kab. Supiori	4.958.782	249.000	2.802.094	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
13	Kab. Yahukimo	48.072.127	2.602.294	0	2.687.511
14	Kab. Pegunungan Bintang	42.668.221	2.202.066	0	1.723.823
15	Kab. Tolikara	33.663.079	2.145.938	0	1.830.301
16	Kab. Boven Digoel	26.487.062	1.285.282	0	625.371
17	Kab. Mappi	17.380.834	712.599	0	2.279.326
18	Kab. Asmat	21.674.629	828.925	0	1.692.636
19	Kab. Waropen	15.277.705	805.337	0	975.190
20	Kab. Supiori	6.158.838	321.320	0	343.333

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
13	Kab. Yahukimo	0	8.162.236	0	3.459.184	0
14	Kab. Pegunungan Bintang	469.110	4.794.652	0	3.328.868	0
15	Kab. Tolikara	0	7.348.682	0	3.266.858	0
16	Kab. Boven Digoel	469.110	3.101.566	0	3.299.666	0
17	Kab. Mappi	465.990	3.371.987	0	2.948.834	0
18	Kab. Asmat	464.742	3.214.712	0	2.963.595	0
19	Kab. Waropen	469.110	2.436.358	0	2.811.918	0
20	Kab. Supiori	0	1.771.566	0	3.563.230	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
13	Kab. Yahukimo	0	0	538.183	350.000	71.060.444
14	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	538.183	350.000	65.969.491
15	Kab. Tolikara	0	0	538.183	350.000	50.834.891
16	Kab. Boven Digoel	0	0	538.183	350.000	44.803.484
17	Kab. Mappi	0	0	538.183	350.000	38.043.368
18	Kab. Asmat	0	435.625	538.183	350.000	44.958.747
19	Kab. Waropen	0	0	538.183	350.000	30.922.588
20	Kab. Supiori	0	0	538.183	350.000	21.978.246

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
21	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	13.200	343.100
22	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	154.200	192.300
23	Kab. Yalimo	0	0	0	138.600	15.000
24	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	216.000	980.700
25	Kab. Nduga	0	0	0	69.000	15.000
26	Kab. Dogiyai	0	0	0	54.600	15.000
27	Kab. Puncak	0	0	0	194.400	292.100
28	Kab. Intan Jaya	0	0	0	81.000	15.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
21	Kab. Mamberamo Raya	0	48.000	1.353.659	0	0
22	Kab. Mamberamo Tengah	0	42.000	1.251.279	0	0
23	Kab. Yalimo	0	135.000	1.700.626	0	0
24	Kab. Lanny Jaya	0	66.000	3.469.765	0	0
25	Kab. Nduga	0	99.000	932.324	0	0
26	Kab. Dogiyai	3.422.073	99.000	1.431.744	0	0
27	Kab. Puncak	226.503	51.000	859.425	0	0
28	Kab. Intan Jaya	0	84.000	942.604	0	0

SK No 023193 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
21	Kab. Mamberamo Raya	13.170.673	824.046	0	727.921
22	Kab. Mamberamo Tengah	9.585.208	372.569	0	1.506.124
23	Kab. Yalimo	11.415.615	521.435	0	1.040.626
24	Kab. Lanny Jaya	15.454.797	707.719	0	2.344.399
25	Kab. Nduga	8.474.612	637.761	0	1.697.792
26	Kab. Dogiyai	13.027.324	805.337	0	2.497.904
27	Kab. Puncak	13.102.507	670.301	0	1.644.945
28	Kab. Intan Jaya	8.372.222	437.647	0	1.427.183

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
21	Kab. Mamberamo Raya	0	1.684.586	0	2.798.596	0
22	Kab. Mamberamo Tengah	0	1.626.480	0	2.798.601	0
23	Kab. Yalimo	0	3.093.985	0	3.152.568	0
24	Kab. Lanny Jaya	0	5.342.688	0	3.188.884	0
25	Kab. Nduga	0	4.440.915	0	3.028.951	0
26	Kab. Dogiyai	469.110	2.236.209	0	2.921.714	0
27	Kab. Puncak	0	3.853.591	0	3.097.213	0
28	Kab. Intan Jaya	0	1.787.571	0	2.938.702	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
21	Kab. Mamberamo Raya	0	0	538.183	350.000	21.851.964
22	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	538.183	350.000	18.416.944
23	Kab. Yalimo	0	0	538.183	350.000	22.101.638
24	Kab. Lanny Jaya	0	0	538.183	350.000	32.659.135
25	Kab. Nduga	0	0	538.183	350.000	20.283.538
26	Kab. Dogiyai	0	0	538.183	350.000	27.868.198
27	Kab. Puncak	0	0	538.183	350.000	24.880.168
28	Kab. Intan Jaya	0	0	538.183	350.000	16.974.112

SK No 023196 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
29	Kab. Deiyai	0	0	0	1.009.200	15.000
XXVII	***Provinsi Maluku Utara***	372.968.980	17.880.000	5.340.000	0	0
1	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	1.185.000	502.100
2	Kota Ternate	0	0	0	2.593.800	1.046.500
3	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	2.212.200	261.900
4	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	2.089.800	561.600
5	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0	4.087.800	1.879.700
6	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	4.905.000	2.317.200

SK No 023197 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
29	Kab. Deiyai	2.402.149	93.000	0	0	0
XXVII	***Provinsi Maluku Utara***	70.153.150	774.000	5.817.452	0	0
1	Kab. Halmahera Tengah	10.243.070	441.000	4.846.176	0	0
2	Kota Ternate	44.396.802	765.000	0	0	0
3	Kab. Halmahera Barat	28.847.401	897.000	10.291.198	0	0
4	Kab. Halmahera Timur	9.672.615	702.000	6.087.985	0	0
5	Kab. Halmahera Selatan	26.449.228	765.000	15.490.027	0	0
6	Kab. Halmahera Utara	23.060.124	645.000	4.069.742	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
29	Kab. Deiyai	13.543.460	772.798	0	1.748.451
XXVII	***Provinsi Maluku Utara***	6.129.513	0	0	0
1	Kab. Halmahera Tengah	13.140.113	726.428	0	659.071
2	Kota Ternate	8.247.150	661.350	293.838	1.066.314
3	Kab. Halmahera Barat	15.189.359	847.635	0	1.233.852
4	Kab. Halmahera Timur	20.157.656	1.015.210	0	1.801.592
5	Kab. Halmahera Selatan	42.815.654	2.258.193	0	2.669.368
6	Kab. Halmahera Utara	17.852.537	1.168.955	0	1.602.931

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
29	Kab. Deiyai	0	1.669.778	0	2.868.099	0
XXVII	***Provinsi Maluku Utara***	0	0	2.352.080	1.407.210	862.578
1	Kab. Halmahera Tengah	469.110	2.581.603	0	928.161	100.000
2	Kota Ternate	521.383	1.748.637	390.304	1.161.566	0
3	Kab. Halmahera Barat	0	2.413.747	0	1.473.698	0
4	Kab. Halmahera Timur	465.990	2.790.738	0	1.789.966	100.000
5	Kab. Halmahera Selatan	469.110	6.161.447	0	2.124.722	0
6	Kab. Halmahera Utara	469.110	3.359.696	390.304	1.185.415	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
29	Kab. Deiyai	0	0	538.183	350.000	25.010.118
XXVII	***Provinsi Maluku Utara***	0	238.702	590.703	0	484.514.368
1	Kab. Halmahera Tengah	0	0	393.383	222.000	36.437.215
2	Kota Ternate	0	417.604	345.663	350.000	64.005.911
3	Kab. Halmahera Barat	0	417.604	393.383	442.250	64.921.227
4	Kab. Halmahera Timur	0	0	393.383	242.500	47.871.035
5	Kab. Halmahera Selatan	0	417.604	393.383	304.000	106.285.236
6	Kab. Halmahera Utara	0	0	393.383	473.000	61.892.397

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
7	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	2.119.200	241.800
8	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	2.237.400	196.800
9	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	2.158.800	161.400
10	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	3.030.600	149.900
XXVIII	***Provinsi Banten***	2.247.308.310	1.500.000	18.060.000	0	0
1	Kab. Lebak	0	0	0	15.923.400	4.686.500
2	Kab. Pandeglang	0	0	0	14.605.200	7.254.000
3	Kab. Serang	0	0	0	21.898.200	12.160.800

SK No 023202 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7	Kab. Kepulauan Sula	17.119.178	315.000	6.103.023	0	0
8	Kota Tidore Kepulauan	29.754.760	609.000	816.334	0	0
9	Kab. Pulau Morotai	5.626.537	351.000	1.449.283	0	0
10	Kab. Pulau Taliabu	5.026.726	135.000	3.238.579	0	0
XXVIII	***Provinsi Banten***	232.287.662	897.000	1.058.124	1.300.000	0
1	Kab. Lebak	229.926.362	1.146.000	16.131.762	600.000	0
2	Kab. Pandeglang	245.267.639	1.125.000	15.235.017	0	0
3	Kab. Serang	203.529.135	1.338.000	0	0	0

SK No 023203 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7	Kab. Kepulauan Sula	14.102.377	731.308	0	1.821.274
8	Kota Tidore Kepulauan	8.841.105	675.180	0	1.150.935
9	Kab. Pulau Morotai	13.251.666	894.004	0	850.645
10	Kab. Pulau Taliabu	7.253.552	507.605	0	900.676
XXVIII	***Provinsi Banten***	0	0	0	0
1	Kab. Lebak	34.482.706	2.705.599	0	6.706.860
2	Kab. Pandeglang	31.034.623	2.495.726	0	7.076.021
3	Kab. Serang	23.773.224	1.946.632	293.838	3.592.401

SK No 023204 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
7	Kab. Kepulauan Sula	469.110	2.957.606	0	2.079.954	0
8	Kota Tidore Kepulauan	469.110	1.796.503	390.304	1.276.345	0
9	Kab. Pulau Morotai	465.990	1.331.596	0	1.530.575	862.578
10	Kab. Pulau Taliabu	463.494	1.602.751	0	1.727.695	0
XXVIII	***Provinsi Banten***	0	0	2.352.080	1.119.382	0
1	Kab. Lebak	489.559	8.364.960	390.304	3.376.509	962.578
2	Kab. Pandeglang	505.783	9.562.114	390.304	2.780.199	862.578
3	Kab. Serang	0	7.824.293	390.304	2.850.080	0

SK No 023205 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
7	Kab. Kepulauan Sula	0	0	393.383	350.000	48.803.213
8	Kota Tidore Kepulauan	0	0	393.383	350.000	48.957.159
9	Kab. Pulau Morotai	0	0	393.383	350.000	29.677.457
10	Kab. Pulau Taliabu	0	0	393.383	350.000	24.779.961
XXVIII	***Provinsi Banten***	0	408.330	523.322	0	2.506.814.210
1	Kab. Lebak	0	383.515	372.462	847.000	327.496.076
2	Kab. Pandeglang	0	0	372.462	918.750	339.485.416
3	Kab. Serang	0	430.355	372.462	857.250	281.256.974

SK No 023206 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
4	Kab. Tangerang	0	0	0	29.019.600	10.259.700
5	Kota Cilegon	0	0	0	6.497.400	1.289.900
6	Kota Tangerang	0	0	0	15.855.600	6.454.500
7	Kota Serang	0	0	0	7.995.000	3.380.600
8	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	15.786.000	3.532.900
XXIX	***Provinsi Bangka Belitung***	316.564.620	60.000	2.880.000	0	0
1	Kab. Bangka	0	0	0	5.220.600	1.392.000
2	Kab. Belitung	0	0	0	2.314.200	717.800

SK No 023207 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4	Kab. Tangerang	237.721.896	900.000	0	0	0
5	Kota Cilegon	76.264.964	441.000	0	0	0
6	Kota Tangerang	164.117.617	729.000	0	0	0
7	Kota Serang	100.874.669	534.000	0	0	0
8	Kota Tangerang Selatan	98.657.106	705.000	0	0	0
XXIX	***Provinsi Bangka Belitung***	60.516.948	837.000	0	0	0
1	Kab. Bangka	54.708.910	825.000	0	0	0
2	Kab. Belitung	41.670.189	405.000	0	600.000	0

SK No 023208 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
4	Kab. Tangerang	28.515.211	2.840.635	0	6.056.714
5	Kota Cilegon	5.796.605	475.066	293.838	552.803
6	Kota Tangerang	19.610.677	2.189.044	0	0
7	Kota Serang	10.114.454	1.112.827	0	945.711
8	Kota Tangerang Selatan	15.891.590	1.811.596	293.838	487.825
XXIX	***Provinsi Bangka Belitung***	4.701.486	0	0	0
1	Kab. Bangka	10.447.140	614.981	0	1.152.402
2	Kab. Belitung	7.268.268	558.853	0	202.881

SK No 023209 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
4	Kab. Tangerang	535.283	7.109.972	390.304	5.175.911	0
5	Kota Cilegon	0	1.912.612	390.304	1.263.244	0
6	Kota Tangerang	0	3.473.470	390.304	3.212.368	0
7	Kota Serang	505.783	2.789.187	0	1.595.110	0
8	Kota Tangerang Selatan	485.334	2.612.074	390.304	2.500.394	0
XXIX	***Provinsi Bangka Belitung***	0	0	2.352.080	1.128.482	862.578
1	Kab. Bangka	505.783	2.441.785	390.304	1.159.643	862.578
2	Kab. Belitung	505.783	1.113.302	390.304	925.380	962.578

SK No 023210 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
4	Kab. Tangerang	0	383.515	372.462	642.000	329.923.203
5	Kota Cilegon	0	619.682	372.462	490.000	96.659.880
6	Kota Tangerang	0	509.985	372.462	490.000	217.405.027
7	Kota Serang	0	383.515	372.462	551.500	131.154.818
8	Kota Tangerang Selatan	0	0	372.462	490.000	144.016.423
XXIX	***Provinsi Bangka Belitung***	0	272.461	507.467	0	390.683.122
1	Kab. Bangka	0	0	326.122	0	80.047.248
2	Kab. Belitung	0	428.375	326.122	350.000	58.739.035

SK No 023211 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	2.991.600	1.509.500
4	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	2.857.200	1.147.700
5	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	3.726.600	1.079.800
6	Kab. Bangka Barat	0	0	0	4.215.600	773.900
7	Kab. Belitung Timur	0	0	0	2.395.200	592.100
XXX	***Provinsi Gorontalo***	246.663.230	600.000	3.480.000	0	0
1	Kab. Boalemo	0	0	0	4.774.800	682.100
2	Kab. Gorontalo	0	0	0	8.314.200	3.299.900

SK No 023212 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3	Kota Pangkal Pinang	29.604.728	510.000	0	0	0
4	Kab. Bangka Selatan	37.330.869	588.000	0	0	0
5	Kab. Bangka Tengah	39.888.122	411.000	0	0	0
6	Kab. Bangka Barat	36.470.882	690.000	0	0	0
7	Kab. Belitung Timur	41.591.723	414.000	0	0	0
XXX	***Provinsi Gorontalo***	78.887.020	558.000	0	1.300.000	0
1	Kab. Boalemo	36.097.682	402.000	2.887.535	0	0
2	Kab. Gorontalo	92.051.488	387.000	644.661	0	0

SK No 023213 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3	Kota Pangkal Pinang	6.192.569	526.314	0	268.795
4	Kab. Bangka Selatan	8.325.810	577.563	293.838	461.599
5	Kab. Bangka Tengah	6.724.250	493.775	0	719.627
6	Kab. Bangka Barat	7.255.876	475.066	0	787.307
7	Kab. Belitung Timur	5.851.660	488.896	0	249.337
XXX	***Provinsi Gorontalo***	4.496.686	0	0	0
1	Kab. Boalemo	11.503.867	628.811	293.837	1.670.795
2	Kab. Gorontalo	19.413.531	1.238.913	0	1.910.050

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
3	Kota Pangkal Pinang	505.783	1.446.443	390.304	996.903	862.578
4	Kab. Bangka Selatan	485.334	2.293.411	0	1.103.367	862.578
5	Kab. Bangka Tengah	500.934	1.457.490	390.304	951.394	962.578
6	Kab. Bangka Barat	469.110	2.058.961	390.304	799.336	962.578
7	Kab. Belitung Timur	0	1.483.586	390.304	866.060	962.578
XXX	***Provinsi Gorontalo***	0	0	2.352.080	1.129.792	100.000
1	Kab. Boalemo	469.110	2.216.495	0	1.085.654	0
2	Kab. Gorontalo	489.559	4.480.955	390.304	1.657.689	0

SK No 023215 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
3	Kota Pangkal Pinang	0	417.845	326.122	0	46.549.484
4	Kab. Bangka Selatan	0	0	326.122	191.250	56.844.641
5	Kab. Bangka Tengah	0	509.121	326.122	350.000	58.491.117
6	Kab. Bangka Barat	0	0	326.122	350.000	56.025.042
7	Kab. Belitung Timur	0	0	326.122	350.000	55.961.566
XXX	***Provinsi Gorontalo***	0	233.474	502.968	0	340.303.250
1	Kab. Boalemo	0	292.150	322.573	631.750	63.959.159
2	Kab. Gorontalo	0	288.296	322.573	334.750	135.223.869

SK No 023216 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
3	Kota Gorontalo	0	0	0	3.488.400	2.009.300
4	Kab. Pohuwato	0	0	0	5.854.200	1.520.200
5	Kab. Bone Bolango	0	0	0	5.112.000	882.300
6	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	3.787.800	1.315.900
XXXI	***Provinsi Kepulauan Riau***	557.890.240	4.140.000	3.900.000	0	0
1	Kab. Natuna	0	0	0	2.173.800	307.400
2	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	1.021.800	159.600
3	Kab. Karimun	0	0	0	3.417.600	1.123.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
3	Kota Gorontalo	56.374.248	294.000	0	0	0
4	Kab. Pohuwato	36.099.510	495.000	0	0	0
5	Kab. Bone Bolango	47.834.153	396.000	0	0	0
6	Kab. Gorontalo Utara	31.151.872	252.000	2.709.477	0	0
XXXI	***Provinsi Kepulauan Riau***	71.792.970	600.000	0	0	0
1	Kab. Natuna	20.390.477	378.000	1.463.259	0	0
2	Kab. Kepulauan Anambas	9.568.764	267.000	1.798.507	0	0
3	Kab. Karimun	49.016.510	372.000	1.899.612	0	0

SK No 023218 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3	Kota Gorontalo	8.228.338	610.102	0	368.585
4	Kab. Pohuwato	14.107.917	950.131	0	1.081.415
5	Kab. Bone Bolango	22.730.506	1.220.203	0	832.627
6	Kab. Gorontalo Utara	14.400.683	866.344	0	946.461
XXXI	***Provinsi Kepulauan Riau***	4.619.399	0	0	0
1	Kab. Natuna	12.366.773	861.464	0	427.069
2	Kab. Kepulauan Anambas	7.393.483	521.435	0	442.805
3	Kab. Karimun	9.733.692	796.386	0	770.213

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
3	Kota Gorontalo	521.383	1.746.270	390.304	1.051.556	0
4	Kab. Pohuwato	469.110	3.145.007	0	2.053.484	0
5	Kab. Bone Bolango	469.110	4.175.333	0	1.031.695	100.000
6	Kab. Gorontalo Utara	467.862	2.366.268	0	2.016.432	0
XXXI	***Provinsi Kepulauan Riau***	0	0	2.352.080	1.096.279	862.578
1	Kab. Natuna	469.110	3.051.169	390.304	1.636.833	862.578
2	Kab. Kepulauan Anambas	485.334	1.916.533	0	1.163.352	862.676
3	Kab. Karimun	489.559	2.488.177	0	1.400.000	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
3	Kota Gorontalo	0	441.195	322.573	560.000	76.406.254
4	Kab. Pohuwato	0	0	322.573	273.250	66.371.797
5	Kab. Bone Bolango	0	486.763	322.573	0	85.593.263
6	Kab. Gorontalo Utara	0	288.296	322.573	672.750	61.564.718
XXXI	***Provinsi Kepulauan Riau***	0	334.212	533.102	0	648.120.860
1	Kab. Natuna	0	0	370.982	350.000	45.499.218
2	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	370.982	350.000	26.322.271
3	Kab. Karimun	0	335.081	370.982	350.000	73.425.890

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN ./ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
4	Kota Batam	0	0	0	10.295.400	3.517.600
5	Kota Tanjung Pinang	0	0	0	2.008.200	788.400
6	Kab. Lingga	0	0	0	1.557.000	258.000
7	Kab. Bintan	0	0	0	2.890.200	636.100
XXXII	***Provinsi Papua Barat***	317.063.850	12.660.000	3.840.000	0	0
1	Kab. Fak Fak	0	0	0	922.200	943.800
2	Kab. Manokwari	0	0	0	1.993.800	560.700
3	Kab. Sorong	0	0	0	1.077.600	237.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4	Kota Batam	71.929.196	822.000	0	0	0
5	Kota Tanjung Pinang	33.675.090	294.000	0	700.000	0
6	Kab. Lingga	32.314.137	870.000	7.507.408	700.000	0
7	Kab. Bintan	36.613.552	390.000	493.755	700.000	0
XXXII	***Provinsi Papua Barat***	53.931.286	801.000	4.898.654	0	0
1	Kab. Fak Fak	17.495.219	507.000	3.386.617	0	0
2	Kab. Manokwari	25.801.221	363.000	2.028.987	0	0
3	Kab. Sorong	32.313.629	447.000	6.583.373	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
4	Kota Batam	10.326.446	1.415.438	0	1.949.717
5	Kota Tanjung Pinang	5.298.959	358.739	0	614.111
6	Kab. Lingga	9.606.135	726.428	0	449.850
7	Kab. Bintan	12.368.807	1.029.040	0	709.703
XXXII	***Provinsi Papua Barat***	8.441.954	0	0	0
1	Kab. Fak Fak	11.616.047	707.719	0	1.079.251
2	Kab. Manokwari	14.742.398	815.095	0	1.420.139
3	Kab. Sorong	19.821.813	1.345.481	0	1.571.839

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
4	Kota Batam	521.383	3.345.347	390.304	3.122.935	862.578
5	Kota Tanjung Pinang	521.383	901.901	390.304	1.008.441	862.578
6	Kab. Lingga	500.934	2.471.931	0	858.920	0
7	Kab. Bintan	485.334	1.703.968	390.304	1.728.850	862.578
XXXII	***Provinsi Papua Barat***	0	0	2.352.080	1.761.637	862.578
1	Kab. Fak Fak	0	3.455.939	0	2.415.850	0
2	Kab. Manokwari	489.559	2.960.823	0	1.710.300	0
3	Kab. Sorong	0	5.123.294	459.181	3.058.577	862.578

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
4	Kota Batam	0	549.435	326.122	350.000	109.723.901
5	Kota Tanjung Pinang	0	521.614	326.122	350.000	48.619.842
6	Kab. Lingga	0	0	370.982	350.000	58.541.725
7	Kab. Bintan	0	333.081	326.122	350.000	62.011.394
XXXII	***Provinsi Papua Barat***	0	306.405	849.903	0	407.769.347
1	Kab. Fak Fak	0	447.176	538.183	350.000	43.865.001
2	Kab. Manokwari	0	535.213	538.183	401.250	54.360.668
3	Kab. Sorong	0	0	538.183	350.000	73.790.148

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
4	Kota Sorong	0	0	0	1.613.400	364.300
5	Kab. Raja Ampat	0	0	0	1.090.200	306.300
6	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	465.000	174.600
7	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	1.033.200	294.000
8	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	825.000	532.100
9	Kab. Kaimana	0	0	0	1.073.400	228.000
10	Kab. Maybrat	0	0	0	56.400	99.000
11	Kab. Tambrauw	0	0	0	52.800	154.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
4	Kota Sorong	27.814.157	558.000	192.212	0	0
5	Kab. Raja Ampat	8.128.441	387.000	3.497.073	0	0
6	Kab. Sorong Selatan	10.650.428	366.000	5.343.135	0	0
7	Kab. Teluk Bintuni	6.407.282	240.000	1.614.204	0	0
8	Kab. Teluk Wondama	3.439.509	351.000	2.141.346	0	0
9	Kab. Kaimana	11.858.939	249.000	4.575.424	0	0
10	Kab. Maybrat	6.374.084	147.000	0	0	0
11	Kab. Tambrauw	2.805.969	156.000	10.778	0	0

SK No 023228 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
4	Kota Sorong	10.537.229	577.563	0	1.375.286
5	Kab. Raja Ampat	21.481.827	1.266.572	0	977.654
6	Kab. Sorong Selatan	22.818.846	931.422	0	845.863
7	Kab. Teluk Bintuni	21.933.055	1.480.517	0	1.722.612
8	Kab. Teluk Wondama	9.454.720	340.030	0	959.278
9	Kab. Kaimana	11.118.658	507.605	0	425.268
10	Kab. Maybrat	18.909.330	1.042.869	0	1.191.803
11	Kab. Tambrauw	9.454.765	675.180	0	575.645

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
4	Kota Sorong	505.783	2.363.214	0	1.404.284	862.578
5	Kab. Raja Ampat	469.110	3.986.921	0	3.204.500	962.578
6	Kab. Sorong Selatan	469.110	3.042.592	0	2.890.679	0
7	Kab. Teluk Bintuni	467.862	3.453.381	0	2.968.643	0
8	Kab. Teluk Wondama	464.742	2.888.974	0	3.131.403	862.578
9	Kab. Kaimana	0	1.868.305	0	2.068.515	0
10	Kab. Maybrat	0	3.829.701	0	2.913.661	0
11	Kab. Tambrauw	0	4.818.524	0	2.916.433	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
4	Kota Sorong	0	0	474.433	350.000	48.992.439
5	Kab. Raja Ampat	0	0	538.183	350.000	46.646.359
6	Kab. Sorong Selatan	0	0	538.183	350.000	48.885.858
7	Kab. Teluk Bintuni	0	0	538.183	350.000	42.502.939
8	Kab. Teluk Wondama	0	0	538.183	350.000	26.278.863
9	Kab. Kaimana	0	447.176	538.183	350.000	35.308.473
10	Kab. Maybrat	0	0	538.183	350.000	35.452.031
11	Kab. Tambrauw	0	0	538.183	350.000	22.508.677

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
12	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	45.600	15.600
13	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	51.000	15.000
XXXIII	***Provinsi Sulawesi Barat***	309.821.920	6.120.000	4.800.000	0	0
1	Kab. Majene	0	0	0	4.563.000	3.255.900
2	Kab. Mamuju	0	0	0	4.939.800	2.472.600
3	Kab. Polewali Mandar	0	0	0	11.686.200	5.102.900
4	Kab. Mamasa	0	0	0	4.146.600	4.327.800
5	Kab. Pasangkayu	0	0	0	2.849.400	1.685.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
12	Kab. Manokwari Selatan	2.468.270	30.000	0	0	0
13	Kab. Pegunungan Arfak	0	54.000	1.695.692	0	0
XXXIII	***Provinsi Sulawesi Barat***	65.693.086	528.000	1.710.753	0	0
1	Kab. Majene	61.871.987	804.000	7.023.559	600.000	0
2	Kab. Mamuju	54.795.962	537.000	7.031.230	0	0
3	Kab. Polewali Mandar	101.382.443	891.000	3.043.605	0	0
4	Kab. Mamasa	30.773.252	552.000	11.851.630	0	0
5	Kab. Pasangkayu	23.714.088	717.000	1.019.965	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
12	Kab. Manokwari Selatan	4.842.544	372.569	0	363.938
13	Kab. Pegunungan Arfak	12.154.579	493.775	0	744.824
XXXIII	***Provinsi Sulawesi Barat***	4.868.460	0	0	0
1	Kab. Majene	13.243.669	628.811	0	948.149
2	Kab. Mamuju	21.992.767	1.192.544	587.675	1.757.712
3	Kab. Polewali Mandar	20.787.090	1.317.821	0	1.708.626
4	Kab. Mamasa	18.037.051	1.033.919	0	2.125.987
5	Kab. Pasangkayu	12.454.806	898.883	0	1.106.947

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
12	Kab. Manokwari Selatan	0	1.641.433	0	2.019.485	0
13	Kab. Pegunungan Arfak	0	2.269.224	0	2.039.334	0
XXXIII	***Provinsi Sulawesi Barat***	0	0	1.919.360	1.156.071	0
1	Kab. Majene	469.110	2.340.984	0	1.030.683	0
2	Kab. Mamuju	469.110	2.823.507	0	1.504.480	0
3	Kab. Polewali Mandar	489.559	3.818.801	0	2.390.698	0
4	Kab. Mamasa	464.118	3.929.106	0	1.027.278	0
5	Kab. Pasangkayu	489.559	2.216.341	0	1.443.939	0

SK No 023235 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
12	Kab. Manokwari Selatan	0	0	538.183	350.000	12.687.622
13	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	538.183	350.000	20.405.611
XXXIII	***Provinsi Sulawesi Barat***	0	318.748	502.968	0	397.439.366
1	Kab. Majene	0	362.907	322.573	432.000	97.897.332
2	Kab. Mamuju	0	371.385	322.573	452.500	101.250.845
3	Kab. Polewali Mandar	0	285.251	322.573	724.000	153.950.567
4	Kab. Mamasa	0	0	367.383	734.250	79.370.374
5	Kab. Pasangkayu	0	350.425	322.573	611.250	49.880.576

SK No 023236 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
6	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	2.648.400	774.900
XXXIV	***Provinsi Kalimantan Utara***	174.935.670	2.520.000	1.860.000	0	0
1	Kab. Bulungan	0	0	0	2.724.000	1.863.000
2	Kab. Malinau	0	0	0	1.543.200	551.800
3	Kab. Nunukan	0	0	0	3.081.000	1.658.000
4	Kota Tarakan	0	0	0	3.021.600	1.687.500
5	Kab. Tana Tidung	0	0	0	742.200	222.300
	DANA CADANGAN	100.048.710	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
6	Kab. Mamuju Tengah	22.662.988	321.000	2.254.818	0	0
XXXIV	***Provinsi Kalimantan Utara***	33.759.757	798.000	824.758	0	0
1	Kab. Bulungan	39.890.564	627.000	0	0	0
2	Kab. Malinau	17.682.954	792.000	2.908.507	0	0
3	Kab. Nunukan	29.666.010	1.014.000	6.532.366	0	0
4	Kota Tarakan	35.843.752	393.000	0	600.000	0
5	Kab. Tana Tidung	4.622.931	315.000	232.265	0	0
	DANA CADANGAN	155.818.004	80.002.000	641.540.201	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
6	Kab. Mamuju Tengah	10.875.682	577.563	0	2.112.634
XXXIV	***Provinsi Kalimantan Utara***	4.624.655	0	0	0
1	Kab. Bulungan	14.003.563	745.138	293.838	815.168
2	Kab. Malinau	18.461.683	982.671	0	380.857
3	Kab. Nunukan	18.161.834	1.015.210	0	1.996.042
4	Kota Tarakan	5.136.315	358.739	0	627.212
5	Kab. Tana Tidung	4.943.659	288.781	0	369.481
	DANA CADANGAN	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
6	Kab. Mamuju Tengah	469.110	1.790.952	0	2.039.247	0
XXXIV	***Provinsi Kalimantan Utara***	0	0	1.919.360	1.100.340	0
1	Kab. Bulungan	489.559	2.091.545	390.304	1.217.518	0
2	Kab. Malinau	469.110	2.474.951	390.304	1.285.712	0
3	Kab. Nunukan	469.110	3.801.573	0	1.728.370	0
4	Kota Tarakan	505.783	793.238	0	1.065.336	0
5	Kab. Tana Tidung	469.110	917.116	0	761.211	0
	DANA CADANGAN	0	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
6	Kab. Mamuju Tengah	0	0	322.573	191.250	47.041.117
XXXIV	***Provinsi Kalimantan Utara***	0	314.855	541.468	0	223.198.863
1	Kab. Bulungan	0	0	381.383	211.750	65.744.330
2	Kab. Malinau	0	0	381.383	350.000	48.655.132
3	Kab. Nunukan	0	273.409	381.383	452.500	70.230.807
4	Kota Tarakan	0	535.082	381.383	350.000	51.298.940
5	Kab. Tana Tidung	0	0	381.383	350.000	14.615.437
	DANA CADANGAN	0	0	0	0	977.408.915

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
		REGULER	AFIRMASI	KINERJA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	JUMLAH PROVINSI	52.504.969.290	320.100.000	534.000.000	93.404.400	35.075.600
	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	3.921.319.600	1.160.232.400
	NASIONAL	52.605.018.000	320.100.000	534.000.000	4.014.724.000	1.195.308.000

SK No 023242 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA	
					MUSEUM	TAMAN BUDAYA
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	JUMLAH PROVINSI	11.095.158.278	55.854.000	74.278.750	57.032.000	32.200.000
	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	44.109.387.531	318.348.000	1.269.188.049	46.800.000	0
	NASIONAL	55.360.363.813	454.204.000	1.985.007.000	103.832.000	32.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
		BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	AKREDITASI PUSKESMAS	AKREDITASI LABKESDA	JAMINAN PERSALINAN
(1)	*(2)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	JUMLAH PROVINSI	224.262.214	0	0	0
	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	8.671.836.036	610.350.750	21.744.000	1.000.000.000
	NASIONAL	8.896.098.250	610.350.750	21.744.000	1.000.000.000

SK No 023244 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN
		PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA			
(1)	*(2)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
	JUMLAH PROVINSI	0	19.916.017	82.600.000	46.531.721	16.788.982
	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	204.939.000	1.947.451.983	109.400.000	926.650.529	125.361.018
	NASIONAL	204.939.000	1.967.368.000	192.000.000	973.182.250	142.150.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.12
RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
MENURUT PROVINSI / KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN BIAYA LAYANAN PENGOLAHAN SAMPAH	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL	DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	TOTAL DAK NON FISIK T.A. 2021
(1)	*(2)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*
	JUMLAH PROVINSI	0	15.260.062	18.623.240	0	65.226.054.554
	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	0	86.486.938	185.290.697	204.000.000	64.918.786.531
	NASIONAL	53.095.000	101.747.000	203.913.937	204.000.000	131.175.345.000

SK No 023246 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
I	**Provinsi Aceh**	**6.728.200**
1	Kab. Aceh Barat	7.148.713
2	Kab. Aceh Besar	38.384.703
3	Kab. Aceh Selatan	9.103.430
4	Kab. Aceh Singkil	25.827.190
5	Kab. Aceh Tengah	42.865.889
6	Kab. Aceh Tenggara	8.055.037
7	Kab. Aceh Timur	17.979.983
8	Kab. Aceh Utara	28.920.030
9	Kab. Bireuen	27.803.658
10	Kab. Pidie	-
11	Kab. Simeulue	-
12	Kota Banda Aceh	10.998.041
13	Kota Sabang	17.145.258
14	Kota Langsa	15.224.797
15	Kota Lhokseumawe	16.156.027
16	Kab. Gayo Lues	20.622.820
17	Kab. Aceh Barat Daya	33.260.089
18	Kab. Aceh Jaya	47.386.753
19	Kab. Nagan Raya	26.023.813
20	Kab. Aceh Tamiang	15.868.483
21	Kab. Bener Meriah	63.865.968
22	Kab. Pidie Jaya	39.790.452
23	Kota Subulussalam	-
II	**Provinsi Sumatera Utara**	**-**
1	Kab. Asahan	16.152.614
2	Kab. Dairi	38.154.676
3	Kab. Deli Serdang	43.678.973
4	Kab. Karo	20.751.024
5	Kab. Labuhanbatu	-
6	Kab. Langkat	-
7	Kab. Mandailing Natal	-
8	Kab. Nias	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
9	Kab. Simalungun	-
10	Kab. Tapanuli Selatan	11.057.750
11	Kab. Tapanuli Tengah	-
12	Kab. Tapanuli Utara	29.706.794
13	Kab. Toba	43.039.330
14	Kota Binjai	-
15	Kota Medan	-
16	Kota Pematang Siantar	-
17	Kota Sibolga	9.173.013
18	Kota Tanjung Balai	-
19	Kota Tebing Tinggi	42.967.913
20	Kota Padang Sidempuan	-
21	Kab. Pakpak Bharat	-
22	Kab. Nias Selatan	-
23	Kab. Humbang Hasundutan	49.112.901
24	Kab. Serdang Bedagai	36.478.058
25	Kab. Samosir	55.859.573
26	Kab. Batu Bara	10.193.399
27	Kab. Padang Lawas	24.336.141
28	Kab. Padang Lawas Utara	-
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	-
30	Kab. Labuhanbatu Utara	7.369.788
31	Kab. Nias Utara	-
32	Kab. Nias Barat	-
33	Kota Gunungsitoli	8.511.835
III	**Provinsi Sumatera Barat**	**50.715.542**
1	Kab. Limapuluh Kota	30.442.552
2	Kab. Agam	8.146.329
3	Kab. Kepulauan Mentawai	-
4	Kab. Padang Pariaman	-
5	Kab. Pasaman	9.118.148
6	Kab. Pesisir Selatan	34.744.705
7	Kab. Sijunjung	33.087.409

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
8	Kab. Solok	40.029.310
9	Kab. Tanah Datar	50.671.183
10	Kota Bukit Tinggi	45.531.556
11	Kota Padang Panjang	22.015.680
12	Kota Padang	25.381.995
13	Kota Payakumbuh	17.694.330
14	Kota Sawahlunto	37.290.036
15	Kota Solok	9.206.716
16	Kota Pariaman	7.148.713
17	Kab. Pasaman Barat	8.347.189
18	Kab. Dharmasraya	17.000.339
19	Kab. Solok Selatan	8.567.934
IV	**Provinsi Riau**	**32.468.699**
1	Kab. Bengkalis	62.269.396
2	Kab. Indragiri Hilir	19.390.867
3	Kab. Indragiri Hulu	15.179.842
4	Kab. Kampar	50.290.844
5	Kab. Kuantan Singingi	17.011.096
6	Kab. Pelalawan	39.876.644
7	Kab. Rokan Hilir	-
8	Kab. Rokan Hulu	9.173.013
9	Kab. Siak	19.735.831
10	Kota Dumai	31.603.245
11	Kota Pekanbaru	22.238.212
12	Kab. Kepulauan Meranti	9.712.602
V	**Provinsi Jambi**	**18.433.747**
1	Kab. BatangHari	9.620.263
2	Kab. Bungo	26.086.766
3	Kab. Kerinci	15.110.208
4	Kab. Merangin	28.659.359
5	Kab. Muaro Jambi	20.040.234
6	Kab. Sarolangun	8.086.243
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	25.251.347

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	29.915.703
9	Kab. Tebo	8.806.688
10	Kota Jambi	40.519.528
11	Kota Sungai Penuh	31.312.186
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**	**-**
1	Kab. Lahat	16.150.591
2	Kab. Musi Banyuasin	53.704.586
3	Kab. Musi Rawas	52.341.267
4	Kab. Muara Enim	7.519.190
5	Kab. Ogan Komering Ilir	-
6	Kab. Ogan Komering Ulu	14.515.922
7	Kota Palembang	8.153.205
8	Kota Prabumulih	28.549.395
9	Kota Pagar Alam	12.314.768
10	Kota Lubuk Linggau	24.434.975
11	Kab. Banyuasin	27.300.175
12	Kab. Ogan Ilir	34.874.186
13	Kab. OKU Timur	9.656.904
14	Kab. OKU Selatan	11.630.614
15	Kab. Empat Lawang	-
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	32.831.516
17	Kab. Musi Rawas Utara	7.369.788
VII	**Provinsi Bengkulu**	**18.831.248**
1	Kab. Bengkulu Selatan	-
2	Kab. Bengkulu Utara	32.470.551
3	Kab. Rejang Lebong	15.951.233
4	Kota Bengkulu	21.269.540
5	Kab. Kaur	35.797.084
6	Kab. Seluma	-
7	Kab. Mukomuko	25.714.260
8	Kab. Lebong	28.655.392
9	Kab. Kepahiang	30.083.342
10	Kab. Bengkulu Tengah	24.939.850

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
VIII	**Provinsi Lampung**	**17.389.748**
1	Kab. Lampung Barat	31.611.420
2	Kab. Lampung Selatan	15.393.383
3	Kab. Lampung Tengah	9.907.524
4	Kab. Lampung Utara	-
5	Kab. Lampung Timur	31.277.579
6	Kab. Tanggamus	-
7	Kab. Tulang Bawang	35.656.078
8	Kab. Way Kanan	9.865.812
9	Kota Bandar Lampung	34.272.707
10	Kota Metro	40.105.386
11	Kab. Pesawaran	-
12	Kab. Pringsewu	16.789.915
13	Kab. Mesuji	-
14	Kab. Tulang Bawang Barat	25.608.771
15	Kab. Pesisir Barat	8.511.835
IX	**Provinsi DKI Jakarta**	**43.370.860**
X	**Provinsi Jawa Barat**	**88.165.762**
1	Kab. Bandung	54.951.301
2	Kab. Bekasi	48.514.024
3	Kab. Bogor	75.266.303
4	Kab. Ciamis	29.260.265
5	Kab. Cianjur	24.337.798
6	Kab. Cirebon	40.875.268
7	Kab. Garut	43.042.894
8	Kab. Indramayu	17.616.005
9	Kab. Karawang	83.241.697
10	Kab. Kuningan	25.819.515
11	Kab. Majalengka	53.540.146
12	Kab. Purwakarta	17.669.117
13	Kab. Subang	58.229.689
14	Kab. Sukabumi	37.507.793
15	Kab. Sumedang	45.061.971

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
16	Kab. Tasikmalaya	29.749.130
17	Kota Bandung	48.660.924
18	Kota Bekasi	58.641.867
19	Kota Bogor	57.017.287
20	Kota Cirebon	-
21	Kota Depok	54.239.257
22	Kota Sukabumi	41.690.471
23	Kota Tasikmalaya	19.040.718
24	Kota Cimahi	52.247.274
25	Kota Banjar	18.377.579
26	Kab. Bandung Barat	46.578.825
27	Kab. Pangandaran	43.625.156
XI	**Provinsi Jawa Tengah**	**68.710.605**
1	Kab. Banjarnegara	17.199.334
2	Kab. Banyumas	19.361.734
3	Kab. Batang	26.237.653
4	Kab. Blora	-
5	Kab. Boyolali	36.015.506
6	Kab. Brebes	23.291.740
7	Kab. Cilacap	50.399.460
8	Kab. Demak	55.119.926
9	Kab. Grobogan	34.342.200
10	Kab. Jepara	28.872.945
11	Kab. Karanganyar	42.634.697
12	Kab. Kebumen	46.433.860
13	Kab. Kendal	36.634.400
14	Kab. Klaten	10.729.894
15	Kab. Kudus	24.112.366
16	Kab. Magelang	27.942.576
17	Kab. Pati	43.847.328
18	Kab. Pekalongan	33.289.185
19	Kab. Pemalang	27.895.120
20	Kab. Purbalingga	16.385.091

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
21	Kab. Purworejo	20.734.044
22	Kab. Rembang	7.369.788
23	Kab. Semarang	42.194.747
24	Kab. Sragen	28.073.662
25	Kab. Sukoharjo	46.509.519
26	Kab. Tegal	18.742.708
27	Kab. Temanggung	17.149.213
28	Kab. Wonogiri	43.823.239
29	Kab. Wonosobo	10.459.270
30	Kota Magelang	63.685.699
31	Kota Pekalongan	21.529.525
32	Kota Salatiga	47.151.521
33	Kota Semarang	64.614.342
34	Kota Surakarta	78.136.398
35	Kota Tegal	19.587.765
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**	**77.593.507**
1	Kab. Bantul	30.323.619
2	Kab. Gunung Kidul	37.040.948
3	Kab. Kulon Progo	71.381.762
4	Kab. Sleman	36.985.385
5	Kota Yogyakarta	72.692.053
XIII	**Provinsi Jawa Timur**	**52.437.560**
1	Kab. Bangkalan	18.986.222
2	Kab. Banyuwangi	42.442.282
3	Kab. Blitar	38.397.307
4	Kab. Bojonegoro	25.924.063
5	Kab. Bondowoso	37.542.241
6	Kab. Gresik	26.521.034
7	Kab. Jember	-
8	Kab. Jombang	66.719.047
9	Kab. Kediri	56.604.427
10	Kab. Lamongan	16.542.801
11	Kab. Lumajang	44.818.891

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
12	Kab. Madiun	35.650.863
13	Kab. Magetan	48.475.301
14	Kab. Malang	100.580.588
15	Kab. Mojokerto	88.878.204
16	Kab. Nganjuk	47.069.631
17	Kab. Ngawi	35.286.568
18	Kab. Pacitan	28.354.469
19	Kab. Pamekasan	20.457.920
20	Kab. Pasuruan	52.967.720
21	Kab. Ponorogo	19.357.185
22	Kab. Probolinggo	24.357.504
23	Kab. Sampang	25.464.708
24	Kab. Sidoarjo	18.188.371
25	Kab. Situbondo	36.261.547
26	Kab. Sumenep	9.118.148
27	Kab. Trenggalek	29.652.969
28	Kab. Tuban	17.831.074
29	Kab. Tulungagung	39.722.914
30	Kota Blitar	36.309.878
31	Kota Kediri	46.996.613
32	Kota Madiun	53.024.863
33	Kota Malang	78.789.402
34	Kota Mojokerto	53.916.856
35	Kota Pasuruan	-
36	Kota Probolinggo	34.727.027
37	Kota Surabaya	48.197.603
38	Kota Batu	49.861.061
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**	**16.638.945**
1	Kab. Bengkayang	-
2	Kab. Landak	6.809.468
3	Kab. Kapuas Hulu	24.826.331
4	Kab. Ketapang	25.095.689
5	Kab. Mempawah	7.148.713

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
6	Kab. Sambas	6.728.200
7	Kab. Sanggau	7.519.190
8	Kab. Sintang	7.519.190
9	Kota Pontianak	31.906.879
10	Kota Singkawang	-
11	Kab. Sekadau	6.809.468
12	Kab. Melawi	19.391.653
13	Kab. Kayong Utara	-
14	Kab. Kubu Raya	22.599.104
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**	**18.725.767**
1	Kab. Barito Selatan	-
2	Kab. Barito Utara	26.028.179
3	Kab. Kapuas	17.867.218
4	Kab. Kotawaringin Barat	-
5	Kab. Kotawaringin Timur	-
6	Kota Palangkaraya	8.305.453
7	Kab. Katingan	-
8	Kab. Seruyan	8.806.688
9	Kab. Sukamara	20.617.442
10	Kab. Lamandau	36.683.360
11	Kab. Gunung Mas	40.134.798
12	Kab. Pulang Pisau	33.207.666
13	Kab. Murung Raya	9.865.812
14	Kab. Barito Timur	19.753.148
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**8.086.243**
1	Kab. Banjar	17.484.179
2	Kab. Barito Kuala	42.228.578
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	53.518.401
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	27.929.200
5	Kab. Hulu Sungai Utara	9.638.926
6	Kab. Kotabaru	35.023.661
7	Kab. Tabalong	42.691.528
8	Kab. Tanah Laut	19.072.439

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
9	Kab. Tapin	63.219.134
10	Kota Banjarbaru	16.245.528
11	Kota Banjarmasin	34.585.555
12	Kab. Balangan	34.187.576
13	Kab. Tanah Bumbu	41.922.400
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**	**37.454.311**
1	Kab. Berau	46.650.509
2	Kab. Kutai Kartanegara	40.517.992
3	Kab. Kutai Barat	30.084.502
4	Kab. Kutai Timur	-
5	Kab. Paser	34.102.035
6	Kota Balikpapan	84.211.816
7	Kota Bontang	44.114.434
8	Kota Samarinda	27.384.618
9	Kab. Penajam Paser Utara	55.643.691
10	Kab. Mahakam Ulu	48.175.427
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**	**53.529.221**
1	Kab. Bolaang Mongondow	-
2	Kab. Minahasa	17.194.722
3	Kab. Sangihe	43.565.933
4	Kota Bitung	20.697.243
5	Kota Manado	9.118.148
6	Kab. Kepulauan Talaud	21.997.588
7	Kab. Minahasa Selatan	-
8	Kota Tomohon	60.544.971
9	Kab. Minahasa Utara	75.160.294
10	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	17.163.248
11	Kota Kotamobagu	10.709.918
12	Kab. Bolaang Mongondow Utara	33.796.934
13	Kab. Minahasa Tenggara	48.252.878
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	25.721.357
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	10.385.066
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**	**45.034.998**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Banggai	76.993.734
2	Kab. Banggai Kepulauan	-
3	Kab. Buol	7.235.060
4	Kab. Toli-Toli	17.620.125
5	Kab. Donggala	6.728.200
6	Kab. Morowali	57.280.042
7	Kab. Poso	48.380.417
8	Kota Palu	15.485.527
9	Kab. Parigi Moutong	10.946.460
10	Kab. Tojo Una Una	10.946.460
11	Kab. Sigi	37.013.835
12	Kab. Banggai Laut	11.708.206
13	Kab. Morowali Utara	24.170.410
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**	**24.505.833**
1	Kab. Bantaeng	16.116.704
2	Kab. Barru	52.320.458
3	Kab. Bone	25.925.549
4	Kab. Bulukumba	18.489.310
5	Kab. Enrekang	8.367.416
6	Kab. Gowa	33.743.810
7	Kab. Jeneponto	-
8	Kab. Luwu	17.862.280
9	Kab. Luwu Utara	40.739.533
10	Kab. Maros	35.840.162
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	7.803.305
12	Kota Palopo	28.986.517
13	Kab. Luwu Timur	-
14	Kab. Pinrang	27.713.245
15	Kab. Sinjai	19.096.547
16	Kab. Kepulauan Selayar	21.085.165
17	Kab. Sidenreng Rappang	21.883.939
18	Kab. Soppeng	38.510.481
19	Kab. Takalar	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
20	Kab. Tana Toraja	-
21	Kab. Wajo	11.851.173
22	Kota Pare-pare	55.370.042
23	Kota Makassar	30.304.767
24	Kab. Toraja Utara	-
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**	**31.458.677**
1	Kab. Buton	28.222.780
2	Kab. Konawe	24.734.585
3	Kab. Kolaka	34.101.216
4	Kab. Muna	17.292.959
5	Kota Kendari	35.425.590
6	Kota Bau-bau	18.158.538
7	Kab. Konawe Selatan	-
8	Kab. Bombana	51.259.009
9	Kab. Wakatobi	35.727.907
10	Kab. Kolaka Utara	38.264.117
11	Kab. Konawe Utara	24.862.239
12	Kab. Buton Utara	-
13	Kab. Konawe Kepulauan	-
14	Kab. Kolaka Timur	24.016.080
15	Kab. Muna Barat	9.206.716
16	Kab. Buton Tengah	10.791.779
17	Kab. Buton Selatan	28.612.758
XXII	**Provinsi Bali**	**37.584.263**
1	Kab. Badung	104.167.785
2	Kab. Bangli	89.588.187
3	Kab. Buleleng	28.837.016
4	Kab. Gianyar	40.152.672
5	Kab. Jembrana	28.389.744
6	Kab. Karangasem	58.326.553
7	Kab. Klungkung	60.268.825
8	Kab. Tabanan	31.792.769
9	Kota Denpasar	65.629.720

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**68.522.247**
1	Kab. Bima	37.470.839
2	Kab. Dompu	26.437.628
3	Kab. Lombok Barat	35.571.106
4	Kab. Lombok Tengah	36.052.724
5	Kab. Lombok Timur	10.193.399
6	Kab. Sumbawa	26.387.801
7	Kota Mataram	30.244.134
8	Kota Bima	30.025.143
9	Kab. Sumbawa Barat	25.054.942
10	Kab. Lombok Utara	36.840.880
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**	**7.439.612**
1	Kab. Alor	-
2	Kab. Belu	-
3	Kab. Ende	-
4	Kab. Flores Timur	-
5	Kab. Kupang	-
6	Kab. Lembata	-
7	Kab. Manggarai	15.136.480
8	Kab. Ngada	20.041.970
9	Kab. Sikka	26.695.841
10	Kab. Sumba Barat	-
11	Kab. Sumba Timur	28.172.519
12	Kab. Timor Tengah Selatan	-
13	Kab. Timor Tengah Utara	-
14	Kota Kupang	6.936.271
15	Kab. Rote Ndao	-
16	Kab. Manggarai Barat	21.674.262
17	Kab. Nagekeo	8.410.250
18	Kab. Sumba Barat Daya	-
19	Kab. Sumba Tengah	-
20	Kab. Manggarai Timur	33.338.574
21	Kab. Sabu Raijua	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
22	Kab. Malaka	39.953.862
XXV	**Provinsi Maluku**	**9.173.013**
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	-
2	Kab. Maluku Tengah	27.020.321
3	Kab. Maluku Tenggara	38.020.028
4	Kab. Buru	-
5	Kota Ambon	26.922.782
6	Kab. Seram Bagian Barat	-
7	Kab. Seram Bagian Timur	-
8	Kab. Kepulauan Aru	-
9	Kota Tual	18.485.495
10	Kab. Maluku Barat Daya	40.940.542
11	Kab. Buru Selatan	-
XXVI	**Provinsi Papua**	**15.684.418**
1	Kab. Biak Numfor	-
2	Kab. Jayapura	25.218.278
3	Kab. Jayawijaya	-
4	Kab. Merauke	-
5	Kab. Mimika	-
6	Kab. Nabire	-
7	Kab. Paniai	-
8	Kab. Puncak Jaya	-
9	Kab. Kepulauan Yapen	-
10	Kota Jayapura	8.681.775
11	Kab. Sarmi	-
12	Kab. Keerom	39.207.492
13	Kab. Yahukimo	-
14	Kab. Pegunungan Bintang	-
15	Kab. Tolikara	-
16	Kab. Boven Digoel	-
17	Kab. Mappi	-
18	Kab. Asmat	-
19	Kab. Waropen	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
20	Kab. Supiori	-
21	Kab. Mamberamo Raya	-
22	Kab. Mamberamo Tengah	-
23	Kab. Yalimo	40.911.361
24	Kab. Lanny Jaya	-
25	Kab. Nduga	-
26	Kab. Dogiyai	-
27	Kab. Puncak	-
28	Kab. Intan Jaya	-
29	Kab. Deiyai	-
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**	**-**
1	Kab. Halmahera Tengah	39.028.184
2	Kota Ternate	43.125.447
3	Kab. Halmahera Barat	17.930.474
4	Kab. Halmahera Timur	7.569.225
5	Kab. Halmahera Selatan	34.877.785
6	Kab. Halmahera Utara	6.728.200
7	Kab. Kepulauan Sula	24.577.175
8	Kota Tidore Kepulauan	15.645.310
9	Kab. Pulau Morotai	-
10	Kab. Pulau Taliabu	-
XXVIII	**Provinsi Banten**	**44.965.885**
1	Kab. Lebak	18.211.284
2	Kab. Pandeglang	15.359.600
3	Kab. Serang	42.934.885
4	Kab. Tangerang	67.576.212
5	Kota Cilegon	46.986.663
6	Kota Tangerang	60.895.952
7	Kota Serang	7.803.305
8	Kota Tangerang Selatan	63.242.239
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**	**56.438.997**
1	Kab. Bangka	46.055.747
2	Kab. Belitung	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
3	Kota Pangkal Pinang	37.880.456
4	Kab. Bangka Selatan	-
5	Kab. Bangka Tengah	51.256.068
6	Kab. Bangka Barat	29.857.710
7	Kab. Belitung Timur	17.102.842
XXX	**Provinsi Gorontalo**	**39.742.780**
1	Kab. Boalemo	-
2	Kab. Gorontalo	28.850.674
3	Kota Gorontalo	48.980.868
4	Kab. Pohuwato	42.082.902
5	Kab. Bone Bolango	54.186.573
6	Kab. Gorontalo Utara	26.221.152
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**	**44.437.322**
1	Kab. Natuna	41.587.990
2	Kab. Kepulauan Anambas	65.907.002
3	Kab. Karimun	26.844.670
4	Kota Batam	24.018.361
5	Kota Tanjung Pinang	33.232.338
6	Kab. Lingga	27.899.745
7	Kab. Bintan	44.420.166
XXXII	**Provinsi Papua Barat**	-
1	Kab. Fak Fak	25.006.031
2	Kab. Manokwari	35.302.353
3	Kab. Sorong	-
4	Kota Sorong	33.296.918
5	Kab. Raja Ampat	41.536.654
6	Kab. Sorong Selatan	-
7	Kab. Teluk Bintuni	-
8	Kab. Teluk Wondama	39.396.919
9	Kab. Kaimana	16.983.890
10	Kab. Maybrat	-
11	Kab. Tambrauw	-
12	Kab. Manokwari Selatan	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.13
RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI
(1)	(2)	(3)
13	Kab. Pegunungan Arfak	-
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**	**16.441.664**
1	Kab. Majene	24.920.508
2	Kab. Mamuju	16.224.752
3	Kab. Polewali Mandar	32.388.098
4	Kab. Mamasa	7.148.713
5	Kab. Pasangkayu	-
6	Kab. Mamuju Tengah	-
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**	**72.296.373**
1	Kab. Bulungan	25.444.230
2	Kab. Malinau	19.625.186
3	Kab. Nunukan	35.842.921
4	Kota Tarakan	20.142.449
5	Kab. Tana Tidung	53.650.228
Jumlah Alokasi DID Provinsi		**1.123.006.047**
Jumlah Alokasi DID Kabupaten		**9.524.907.743**
Jumlah Alokasi DID Kota		**2.852.086.210**
Jumlah Alokasi DID Nasional		**13.500.000.000**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.14
RINCIAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
MENURUT PROVINSI TA 2021

(dalam ribuan rupiah)

No	Nama Daerah	Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta				
		Dana Otonomi Khusus			Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	Total Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
		Dana Otsus	Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rangka Otonomi Khusus	Total Dana Otonomi Khusus		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)=(3)+(4)*	*(6)*	*(7)=(5)+(6)*
1	Provinsi Aceh	7.805.827.805	-	7.805.827.805	-	7.805.827.805
2	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	-	1.320.000.000	1.320.000.000
3	Provinsi Papua	5.464.079.464	2.622.758.143	8.086.837.607	-	8.086.837.607
4	Provinsi Papua Barat	2.341.748.341	1.748.505.429	4.090.253.770	-	4.090.253.770
JUMLAH		15.611.655.610	4.371.263.572	19.982.919.182	1.320.000.000	21.302.919.182

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
I	**Provinsi Aceh**			
1	Kab. Aceh Barat	322	182.986.823	343.182
2	Kab. Aceh Besar	604	345.830.698	-
3	Kab. Aceh Selatan	260	153.849.240	1.715.911
4	Kab. Aceh Singkil	116	68.742.585	2.917.047
5	Kab. Aceh Tengah	295	169.824.331	-
6	Kab. Aceh Tenggara	385	219.165.988	343.182
7	Kab. Aceh Timur	513	299.127.463	171.591
8	Kab. Aceh Utara	852	489.421.048	5.652.514
9	Kab. Bireuen	609	350.798.564	3.775.005
10	Kab. Pidie	730	415.549.014	1.544.319
11	Kab. Simeulue	138	79.337.213	1.029.546
12	Kota Banda Aceh	90	57.661.668	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
I	**Provinsi Aceh**			
1	Kab. Aceh Barat	9.220.896	58.081.427	250.632.328
2	Kab. Aceh Besar	15.560.262	76.164.888	437.555.848
3	Kab. Aceh Selatan	7.491.978	42.210.921	205.268.050
4	Kab. Aceh Singkil	3.457.836	32.962.815	108.080.283
5	Kab. Aceh Tengah	8.644.590	44.881.627	223.350.548
6	Kab. Aceh Tenggara	10.949.814	54.102.269	284.561.253
7	Kab. Aceh Timur	13.255.038	75.233.846	387.787.938
8	Kab. Aceh Utara	21.899.628	109.355.022	626.338.212
9	Kab. Bireuen	15.560.262	85.389.254	455.523.085
10	Kab. Pidie	18.729.945	88.892.478	524.715.756
11	Kab. Simeulue	4.034.142	35.283.429	119.684.330
12	Kota Banda Aceh	2.881.530	17.159.244	77.702.442

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
13	Kota Sabang	18	11.228.333	-
14	Kota Langsa	66	41.863.892	171.591
15	Kota Lhokseumawe	68	43.387.043	-
16	Kab. Gayo Lues	136	78.854.064	343.182
17	Kab. Aceh Barat Daya	152	90.799.248	343.182
18	Kab. Aceh Jaya	172	97.950.727	-
19	Kab. Nagan Raya	222	129.309.426	1.029.547
20	Kab. Aceh Tamiang	213	128.895.268	514.773
21	Kab. Bener Meriah	232	134.365.164	857.955
22	Kab. Pidie Jaya	222	128.429.428	-
23	Kota Subulussalam	82	48.929.070	-
II	**Provinsi Sumatera Utara**			
1	Kab. Asahan	177	115.398.630	514.773

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
13	Kota Sabang	576.306	14.993.388	26.798.027
14	Kota Langsa	2.017.071	16.653.787	60.706.341
15	Kota Lhokseumawe	2.017.071	16.579.035	61.983.149
16	Kab. Gayo Lues	4.034.142	31.150.321	114.381.709
17	Kab. Aceh Barat Daya	4.322.295	24.358.563	119.823.288
18	Kab. Aceh Jaya	4.898.601	32.216.467	135.065.795
19	Kab. Nagan Raya	6.339.366	39.193.056	175.871.395
20	Kab. Aceh Tamiang	6.051.213	36.211.713	171.672.967
21	Kab. Bener Meriah	6.627.519	40.983.901	182.834.539
22	Kab. Pidie Jaya	6.339.366	31.093.671	165.862.465
23	Kota Subulussalam	2.593.377	18.900.087	70.422.534
II	**Provinsi Sumatera Utara**			
1	Kab. Asahan	5.186.754	30.983.553	152.083.710

SK No 023286 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2	Kab. Dairi	161	100.493.415	171.591
3	Kab. Deli Serdang	380	247.318.281	-
4	Kab. Karo	259	155.607.672	-
5	Kab. Labuhanbatu	75	49.798.083	343.182
6	Kab. Langkat	240	156.297.807	1.029.546
7	Kab. Mandailing Natal	377	223.793.398	1.887.504
8	Kab. Nias	170	100.187.580	22.821.642
9	Kab. Simalungun	386	244.207.587	343.182
10	Kab. Tapanuli Selatan	211	125.292.114	343.182
11	Kab. Tapanuli Tengah	159	95.690.265	6.863.650
12	Kab. Tapanuli Utara	241	145.579.333	1.029.548
13	Kab. Toba	231	134.443.594	514.773
14	Kota Padang Sidempuan	42	25.666.108	-

SK No 023287 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
2	Kab. Dairi	4.610.448	24.463.276	129.738.730
3	Kab. Deli Serdang	10.949.814	54.278.871	312.546.966
4	Kab. Karo	7.491.978	35.309.623	198.409.273
5	Kab. Labuhanbatu	2.305.224	22.030.928	74.477.417
6	Kab. Langkat	6.915.672	49.016.724	213.259.749
7	Kab. Mandailing Natal	10.949.814	50.215.148	286.845.864
8	Kab. Nias	4.898.601	51.636.202	179.544.025
9	Kab. Simalungun	10.949.814	41.300.257	296.800.840
10	Kab. Tapanuli Selatan	6.051.213	38.068.004	169.754.513
11	Kab. Tapanuli Tengah	4.610.448	35.466.659	142.631.022
12	Kab. Tapanuli Utara	6.915.672	38.492.264	192.016.817
13	Kab. Toba	6.627.519	35.488.966	177.074.852
14	Kota Padang Sidempuan	1.440.765	14.693.175	41.800.048

SK No 023288 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
15	Kab. Pakpak Bharat	52	30.961.848	-
16	Kab. Nias Selatan	459	266.882.464	7.206.838
17	Kab. Humbang Hasundutan	153	93.280.822	514.773
18	Kab. Serdang Bedagai	237	148.133.075	-
19	Kab. Samosir	128	75.721.472	1.029.546
20	Kab. Batu Bara	141	89.741.941	857.955
21	Kab. Padang Lawas	303	175.196.914	343.182
22	Kab. Padang Lawas Utara	386	219.567.535	1.372.728
23	Kab. Labuhanbatu Selatan	52	35.441.876	-
24	Kab. Labuhanbatu Utara	82	54.369.094	1.715.911
25	Kab. Nias Utara	112	68.256.288	19.389.818
26	Kab. Nias Barat	105	62.085.270	17.845.512
27	Kota Gunungsitoli	98	58.954.252	3.431.820

SK No 023289 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
15	Kab. Pakpak Bharat	1.728.918	18.280.217	50.970.983
16	Kab. Nias Selatan	11.814.273	65.235.176	351.138.751
17	Kab. Humbang Hasundutan	4.322.295	26.816.615	124.934.505
18	Kab. Serdang Bedagai	6.915.672	30.690.701	185.739.448
19	Kab. Samosir	3.745.989	27.432.741	107.929.748
20	Kab. Batu Bara	4.034.142	26.437.699	121.071.737
21	Kab. Padang Lawas	8.644.590	46.090.514	230.275.200
22	Kab. Padang Lawas Utara	10.949.814	57.455.350	289.345.427
23	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.728.918	30.617.316	67.788.110
24	Kab. Labuhanbatu Utara	2.593.377	27.344.459	86.022.841
25	Kab. Nias Utara	3.169.683	45.570.400	136.386.189
26	Kab. Nias Barat	3.169.683	34.296.788	117.397.253
27	Kota Gunungsitoli	2.881.530	24.040.706	89.308.308

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
III	**Provinsi Sumatera Barat**			
1	Kab. Limapuluh Kota	79	53.804.385	171.591
2	Kab. Agam	82	56.609.120	-
3	Kab. Kepulauan Mentawai	43	27.507.684	686.364
4	Kab. Padang Pariaman	103	69.042.162	171.591
5	Kab. Pasaman	37	27.018.279	514.773
6	Kab. Pesisir Selatan	182	117.806.491	686.364
7	Kab. Sijunjung	61	40.656.033	-
8	Kab. Solok	74	49.956.515	1.201.138
9	Kab. Tanah Datar	75	50.838.084	-
10	Kota Sawahlunto	27	17.082.499	-
11	Kota Pariaman	55	33.926.570	-
12	Kab. Pasaman Barat	19	14.829.939	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
III	**Provinsi Sumatera Barat**			
1	Kab. Limapuluh Kota	2.593.377	25.152.999	81.722.352
2	Kab. Agam	2.593.377	20.774.550	79.977.047
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.440.765	31.221.065	60.855.878
4	Kab. Padang Pariaman	2.881.530	27.610.645	99.705.928
5	Kab. Pasaman	1.152.612	22.976.884	51.662.548
6	Kab. Pesisir Selatan	5.186.754	46.122.618	169.802.227
7	Kab. Sijunjung	2.017.071	19.668.970	62.342.074
8	Kab. Solok	2.305.224	27.794.442	81.257.319
9	Kab. Tanah Datar	2.305.224	18.037.490	71.180.798
10	Kota Sawahlunto	864.459	12.162.805	30.109.763
11	Kota Pariaman	1.728.918	14.103.043	49.758.531
12	Kab. Pasaman Barat	576.306	34.588.400	49.994.645

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
13	Kab. Dharmasraya	52	34.641.866	-
14	Kab. Solok Selatan	39	26.061.399	-
IV	**Provinsi Riau**			
1	Kab. Bengkalis	136	87.894.085	-
2	Kab. Indragiri Hilir	197	122.550.093	343.182
3	Kab. Indragiri Hulu	178	111.240.179	857.955
4	Kab. Kampar	242	155.020.946	857.957
5	Kab. Kuantan Singingi	218	132.583.136	343.182
6	Kab. Pelalawan	104	65.923.701	-
7	Kab. Rokan Hilir	159	103.130.296	1.201.137
8	Kab. Rokan Hulu	139	91.338.816	1.544.322
9	Kab. Siak	122	78.272.045	-
10	Kab. Kepulauan Meranti	96	59.991.106	1.887.501

SK No 023293 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
13	Kab. Dharmasraya	1.728.918	20.169.282	56.540.066
14	Kab. Solok Selatan	1.152.612	20.474.361	47.688.372
IV	**Provinsi Riau**			
1	Kab. Bengkalis	4.034.142	42.764.908	134.693.135
2	Kab. Indragiri Hilir	5.763.060	47.066.738	175.723.073
3	Kab. Indragiri Hulu	5.186.754	41.618.880	158.903.768
4	Kab. Kampar	6.915.672	55.301.023	218.095.598
5	Kab. Kuantan Singingi	6.339.366	36.743.530	176.009.214
6	Kab. Pelalawan	2.881.530	41.099.421	109.904.652
7	Kab. Rokan Hilir	4.610.448	39.774.031	148.715.912
8	Kab. Rokan Hulu	4.034.142	50.417.619	147.334.899
9	Kab. Siak	3.457.836	36.764.597	118.494.478
10	Kab. Kepulauan Meranti	2.881.530	32.180.581	96.940.718

SK No 023294 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
V	**Provinsi Jambi**			
1	Kab. Batanghari	110	69.693.143	-
2	Kab. Bungo	141	88.141.937	343.182
3	Kab. Kerinci	285	166.448.590	-
4	Kab. Merangin	205	124.002.675	171.591
5	Kab. Muaro Jambi	150	94.796.113	343.182
6	Kab. Sarolangun	149	91.034.526	343.182
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	114	71.379.440	1.029.546
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	73	45.794.902	171.591
9	Kab. Tebo	107	68.728.434	1.029.546
10	Kota Sungai Penuh	65	39.782.311	-
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**			
1	Kab. Lahat	360	212.486.641	3.088.638

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
V	**Provinsi Jambi**			
1	Kab. Batanghari	3.169.683	28.485.307	101.348.133
2	Kab. Bungo	4.034.142	26.591.628	119.110.889
3	Kab. Kerinci	8.356.437	39.415.968	214.220.995
4	Kab. Merangin	6.051.213	42.919.164	173.144.643
5	Kab. Muaro Jambi	4.322.295	28.439.587	127.901.177
6	Kab. Sarolangun	4.322.295	36.916.552	132.616.555
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.169.683	33.609.079	109.187.748
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.305.224	28.376.455	76.648.172
9	Kab. Tebo	3.169.683	38.522.147	111.449.810
10	Kota Sungai Penuh	2.017.071	14.711.838	56.511.220
VI	**Provinsi Sumatera Selatan**			
1	Kab. Lahat	10.373.508	76.909.469	302.858.256

SK No 023296 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2	Kab. Musi Banyuasin	227	143.397.311	1.715.910
3	Kab. Musi Rawas	186	116.852.766	343.182
4	Kab. Muara Enim	245	153.905.642	-
5	Kab. Ogan Komering Ilir	314	197.854.255	171.591
6	Kab. Ogan Komering Ulu	143	86.945.088	4.804.549
7	Kota Prabumulih	12	7.538.888	-
8	Kab. Banyuasin	288	181.733.330	4.976.139
9	Kab. Ogan Ilir	227	141.717.298	2.917.047
10	Kab. OKU Timur	305	192.880.077	514.773
11	Kab. OKU Selatan	252	154.716.649	2.573.865
12	Kab. Empat Lawang	147	92.551.381	1.029.546
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	65	40.822.311	2.230.683
14	Kab. Musi Rawas Utara	82	51.969.070	686.364

SK No 023297 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
2	Kab. Musi Banyuasin	6.627.519	81.774.545	233.515.285
3	Kab. Musi Rawas	5.474.907	66.695.757	189.366.612
4	Kab. Muara Enim	7.203.825	75.213.115	236.322.582
5	Kab. Ogan Komering Ilir	8.932.743	90.705.700	297.664.289
6	Kab. Ogan Komering Ulu	4.034.142	40.265.019	138.048.798
7	Kota Prabumulih	288.153	14.815.529	22.642.570
8	Kab. Banyuasin	8.356.437	102.608.059	297.673.965
9	Kab. Ogan Ilir	6.627.519	50.880.753	202.142.617
10	Kab. OKU Timur	8.932.743	43.584.061	245.911.654
11	Kab. OKU Selatan	7.203.825	51.937.359	216.431.698
12	Kab. Empat Lawang	4.322.295	32.821.648	130.724.870
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.017.071	32.861.141	77.931.206
14	Kab. Musi Rawas Utara	2.593.377	45.607.155	100.855.966

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
VII	**Provinsi Bengkulu**			
1	Kab. Bengkulu Selatan	142	83.183.508	-
2	Kab. Bengkulu Utara	215	128.738.412	-
3	Kab. Rejang Lebong	122	75.152.029	3.088.638
4	Kab. Kaur	192	110.382.208	-
5	Kab. Seluma	182	108.446.468	-
6	Kab. Mukomuko	148	89.672.952	-
7	Kab. Lebong	93	55.026.382	171.591
8	Kab. Kepahiang	105	62.005.270	-
9	Kab. Bengkulu Tengah	142	82.463.508	-
VIII	**Provinsi Lampung**			
1	Kab. Lampung Barat	131	82.046.198	-
2	Kab. Lampung Selatan	256	169.523.021	1.201.137

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
VII	**Provinsi Bengkulu**			
1	Kab. Bengkulu Selatan	4.034.142	23.757.545	110.975.195
2	Kab. Bengkulu Utara	6.339.366	35.849.681	170.927.459
3	Kab. Rejang Lebong	3.457.836	31.500.633	113.199.136
4	Kab. Kaur	5.474.907	31.167.852	147.024.967
5	Kab. Seluma	5.186.754	27.452.011	141.085.233
6	Kab. Mukomuko	4.322.295	29.166.965	123.162.212
7	Kab. Lebong	2.881.530	21.758.410	79.837.913
8	Kab. Kepahiang	3.169.683	21.516.122	86.691.075
9	Kab. Bengkulu Tengah	4.034.142	25.958.730	112.456.380
VIII	**Provinsi Lampung**			
1	Kab. Lampung Barat	3.745.989	40.585.860	126.378.047
2	Kab. Lampung Selatan	7.491.978	84.541.893	262.758.029

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
3	Kab. Lampung Tengah	301	201.433.882	1.372.728
4	Kab. Lampung Utara	232	145.245.180	5.147.730
5	Kab. Lampung Timur	264	175.455.613	4.461.366
6	Kab. Tanggamus	299	188.870.637	2.230.683
7	Kab. Tulang Bawang	147	94.391.394	686.364
8	Kab. Way Kanan	221	139.067.859	1.029.546
9	Kab. Pesawaran	144	93.746.684	514.773
10	Kab. Pringsewu	126	81.158.335	-
11	Kab. Mesuji	105	66.725.272	1.372.728
12	Kab. Tulang Bawang Barat	93	59.826.392	514.773
13	Kab. Pesisir Barat	116	70.182.583	2.917.049
IX	**Provinsi DKI Jakarta**			
X	**Provinsi Jawa Barat**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
3	Kab. Lampung Tengah	8.644.590	101.935.501	313.386.701
4	Kab. Lampung Utara	6.627.519	88.632.396	245.652.825
5	Kab. Lampung Timur	7.491.978	93.661.696	281.070.653
6	Kab. Tanggamus	8.644.590	90.705.411	290.451.321
7	Kab. Tulang Bawang	4.322.295	35.970.461	135.370.514
8	Kab. Way Kanan	6.339.366	39.583.838	186.020.609
9	Kab. Pesawaran	4.034.142	58.311.797	156.607.396
10	Kab. Pringsewu	3.745.989	43.395.596	128.299.920
11	Kab. Mesuji	3.169.683	32.693.455	103.961.138
12	Kab. Tulang Bawang Barat	2.881.530	28.226.468	91.449.163
13	Kab. Pesisir Barat	3.457.836	43.197.629	119.755.097
IX	**Provinsi DKI Jakarta**			
X	**Provinsi Jawa Barat**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Kab. Bandung	270	205.785.387	-
2	Kab. Bekasi	180	134.043.552	-
3	Kab. Bogor	416	311.375.341	686.364
4	Kab. Ciamis	258	172.646.181	-
5	Kab. Cianjur	354	245.997.432	2.230.683
6	Kab. Cirebon	412	279.768.681	343.182
7	Kab. Garut	421	286.262.856	5.319.321
8	Kab. Indramayu	309	214.726.573	-
9	Kab. Karawang	297	208.147.698	4.118.184
10	Kab. Kuningan	361	232.888.252	343.182
11	Kab. Majalengka	330	217.239.492	-
12	Kab. Purwakarta	183	122.048.100	686.364
13	Kab. Subang	245	169.185.781	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Bandung	7.780.131	120.481.058	334.046.576
2	Kab. Bekasi	5.186.754	125.101.841	264.332.147
3	Kab. Bogor	10.661.661	200.670.399	523.393.765
4	Kab. Ciamis	7.491.978	83.477.576	263.615.735
5	Kab. Cianjur	10.085.355	171.932.614	430.246.084
6	Kab. Cirebon	10.661.661	163.801.283	454.574.807
7	Kab. Garut	10.661.661	204.587.715	506.831.553
8	Kab. Indramayu	8.932.743	172.502.797	396.162.113
9	Kab. Karawang	8.644.590	128.434.013	349.344.485
10	Kab. Kuningan	10.373.508	61.424.392	305.029.334
11	Kab. Majalengka	9.509.049	164.919.973	391.668.514
12	Kab. Purwakarta	5.186.754	42.434.665	170.355.883
13	Kab. Subang	7.203.825	43.686.636	220.076.242

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
14	Kab. Sukabumi	381	268.359.994	1.201.137
15	Kab. Sumedang	270	178.905.057	-
16	Kab. Tasikmalaya	351	237.832.632	3.946.593
17	Kota Banjar	16	11.385.198	-
18	Kab. Bandung Barat	165	123.619.932	-
19	Kab. Pangandaran	93	62.386.416	-
XI	**Provinsi Jawa Tengah**			
1	Kab. Banjarnegara	266	175.058.745	3.431.820
2	Kab. Banyumas	301	205.753.932	-
3	Kab. Batang	239	155.016.211	343.182
4	Kab. Blora	271	175.226.584	3.431.820
5	Kab. Boyolali	261	171.930.870	-
6	Kab. Brebes	292	203.899.820	3.260.229

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
14	Kab. Sukabumi	10.949.814	96.873.070	377.384.015
15	Kab. Sumedang	7.780.131	40.634.432	227.319.620
16	Kab. Tasikmalaya	10.085.355	151.023.081	402.887.661
17	Kota Banjar	576.306	13.408.070	25.369.574
18	Kab. Bandung Barat	4.898.601	128.862.736	257.381.269
19	Kab. Pangandaran	2.881.530	25.335.619	90.603.565
XI	**Provinsi Jawa Tengah**			
1	Kab. Banjarnegara	7.780.131	79.474.632	265.745.328
2	Kab. Banyumas	8.644.590	166.848.577	381.247.099
3	Kab. Batang	6.915.672	33.446.457	195.721.522
4	Kab. Blora	7.780.131	80.632.805	267.071.340
5	Kab. Boyolali	7.491.978	37.558.610	216.981.458
6	Kab. Brebes	8.356.437	276.962.018	492.478.504

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
7	Kab. Cilacap	269	187.943.601	514.773
8	Kab. Demak	243	162.622.567	7.206.823
9	Kab. Grobogan	273	186.269.841	2.745.456
10	Kab. Jepara	184	128.769.755	-
11	Kab. Karanganyar	162	110.015.064	686.364
12	Kab. Kebumen	449	290.866.770	1.544.319
13	Kab. Kendal	266	174.738.740	-
14	Kab. Klaten	391	253.495.467	1.372.728
15	Kab. Kudus	123	86.833.702	-
16	Kab. Magelang	367	240.417.734	2.230.683
17	Kab. Pati	401	261.591.242	-
18	Kab. Pekalongan	272	175.388.153	1.029.546
19	Kab. Pemalang	211	147.532.269	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
7	Kab. Cilacap	7.780.131	103.328.693	299.567.198
8	Kab. Demak	6.915.672	107.718.325	284.463.387
9	Kab. Grobogan	7.780.131	106.543.824	303.339.252
10	Kab. Jepara	5.186.754	116.215.124	250.171.633
11	Kab. Karanganyar	4.610.448	54.002.188	169.314.064
12	Kab. Kebumen	11.526.120	101.323.244	405.260.453
13	Kab. Kendal	7.780.131	68.541.159	251.060.030
14	Kab. Klaten	11.237.967	114.740.439	380.846.601
15	Kab. Kudus	3.457.836	60.878.050	151.169.588
16	Kab. Magelang	10.661.661	137.734.031	391.044.109
17	Kab. Pati	10.373.508	154.416.084	426.380.834
18	Kab. Pekalongan	7.780.131	79.199.276	263.397.106
19	Kab. Pemalang	6.051.213	174.432.397	328.015.879

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
20	Kab. Purbalingga	224	148.672.638	1.372.728
21	Kab. Purworejo	469	285.938.208	171.591
22	Kab. Rembang	287	181.971.748	171.591
23	Kab. Semarang	208	138.007.453	343.182
24	Kab. Sragen	196	131.268.573	514.773
25	Kab. Sukoharjo	150	102.156.174	-
26	Kab. Tegal	281	192.522.448	5.147.731
27	Kab. Temanggung	266	170.258.699	-
28	Kab. Wonogiri	251	163.355.103	-
29	Kab. Wonosobo	236	152.931.490	686.364
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**			
1	Kab. Bantul	75	56.918.160	-
2	Kab. Gunung Kidul	144	98.066.727	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
20	Kab. Purbalingga	6.339.366	90.498.608	246.883.340
21	Kab. Purworejo	12.102.426	65.781.000	363.993.225
22	Kab. Rembang	8.356.437	70.024.038	260.523.814
23	Kab. Semarang	6.051.213	43.937.672	188.339.520
24	Kab. Sragen	5.763.060	37.819.243	175.365.649
25	Kab. Sukoharjo	4.322.295	41.564.637	148.043.106
26	Kab. Tegal	8.068.284	153.715.413	359.453.876
27	Kab. Temanggung	7.780.131	69.842.995	247.881.825
28	Kab. Wonogiri	7.203.825	54.122.429	224.681.357
29	Kab. Wonosobo	6.915.672	58.195.139	218.728.665
XII	**Provinsi DI Yogyakarta**			
1	Kab. Bantul	2.305.224	50.175.688	109.399.072
2	Kab. Gunung Kidul	4.034.142	42.513.540	144.614.409

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
3	Kab. Kulon Progo	87	59.096.979	-
4	Kab. Sleman	86	65.095.488	-
XIII	**Provinsi Jawa Timur**			
1	Kab. Bangkalan	273	178.669.764	-
2	Kab. Banyuwangi	189	135.897.669	-
3	Kab. Blitar	220	149.386.383	-
4	Kab. Bojonegoro	419	271.059.543	-
5	Kab. Bondowoso	209	136.809.005	-
6	Kab. Gresik	330	216.199.496	-
7	Kab. Jember	226	168.836.022	-
8	Kab. Jombang	302	201.755.450	-
9	Kab. Kediri	343	231.020.024	-
10	Kab. Lamongan	462	297.687.227	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
3	Kab. Kulon Progo	2.881.530	33.907.488	95.885.997
4	Kab. Sleman	2.593.377	42.867.495	110.556.360
XIII	**Provinsi Jawa Timur**			
1	Kab. Bangkalan	7.780.131	141.489.860	327.939.755
2	Kab. Banyuwangi	5.474.907	78.707.883	220.080.459
3	Kab. Blitar	6.339.366	38.865.613	194.591.362
4	Kab. Bojonegoro	10.661.661	80.951.973	362.673.177
5	Kab. Bondowoso	6.051.213	93.356.790	236.217.008
6	Kab. Gresik	9.509.049	61.713.830	287.422.375
7	Kab. Jember	6.627.519	136.959.367	312.422.908
8	Kab. Jombang	8.644.590	70.190.694	280.590.734
9	Kab. Kediri	9.797.202	80.681.907	321.499.133
10	Kab. Lamongan	11.814.273	58.357.516	367.859.016

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
11	Kab. Lumajang	198	135.511.758	-
12	Kab. Madiun	198	129.991.692	-
13	Kab. Magetan	207	133.685.833	-
14	Kab. Malang	378	265.075.254	-
15	Kab. Mojokerto	299	195.830.688	-
16	Kab. Nganjuk	264	174.255.604	-
17	Kab. Ngawi	213	142.015.330	-
18	Kab. Pacitan	166	108.821.315	-
19	Kab. Pamekasan	178	118.520.230	-
20	Kab. Pasuruan	341	227.416.842	-
21	Kab. Ponorogo	281	182.602.329	-
22	Kab. Probolinggo	325	212.671.610	171.591
23	Kab. Sampang	180	120.843.389	-

SK No 023313 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
11	Kab. Lumajang	5.763.060	56.346.460	197.621.278
12	Kab. Madiun	5.763.060	28.018.415	163.773.167
13	Kab. Magetan	6.051.213	31.481.688	171.218.734
14	Kab. Malang	10.949.814	112.581.759	388.606.827
15	Kab. Mojokerto	8.644.590	34.087.521	238.562.799
16	Kab. Nganjuk	7.491.978	104.367.326	286.114.908
17	Kab. Ngawi	6.051.213	50.529.904	198.596.447
18	Kab. Pacitan	4.898.601	37.388.105	151.108.021
19	Kab. Pamekasan	5.186.754	80.259.719	203.966.703
20	Kab. Pasuruan	9.797.202	128.449.518	365.663.562
21	Kab. Ponorogo	8.068.284	64.551.273	255.221.886
22	Kab. Probolinggo	9.509.049	206.843.162	429.195.412
23	Kab. Sampang	5.186.754	105.858.651	231.888.794

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
24	Kab. Sidoarjo	322	219.226.988	-
25	Kab. Situbondo	132	88.607.818	-
26	Kab. Sumenep	330	214.519.477	-
27	Kab. Trenggalek	152	102.559.311	-
28	Kab. Tuban	311	203.929.573	-
29	Kab. Tulungagung	257	169.924.582	-
30	Kota Batu	19	13.869.927	-
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**			
1	Kab. Bengkayang	122	76.352.041	-
2	Kab. Landak	156	100.565.560	13.727.286
3	Kab. Kapuas Hulu	278	162.277.572	1.201.137
4	Kab. Ketapang	253	157.358.237	1.201.138
5	Kab. Mempawah	60	39.854.457	171.591

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
24	Kab. Sidoarjo	9.220.896	70.515.252	298.963.136
25	Kab. Situbondo	3.745.989	48.489.288	140.843.095
26	Kab. Sumenep	9.509.049	113.691.574	337.720.100
27	Kab. Trenggalek	4.322.295	49.540.168	156.421.774
28	Kab. Tuban	8.932.743	51.093.516	263.955.832
29	Kab. Tulungagung	7.491.978	60.189.925	237.606.485
30	Kota Batu	576.306	17.011.795	31.458.028
XIV	**Provinsi Kalimantan Barat**			
1	Kab. Bengkayang	3.457.836	31.978.188	111.788.065
2	Kab. Landak	4.610.448	67.567.402	186.470.696
3	Kab. Kapuas Hulu	8.068.284	104.800.180	276.347.173
4	Kab. Ketapang	7.203.825	102.485.469	268.248.669
5	Kab. Mempawah	2.017.071	27.460.069	69.503.188

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
6	Kab. Sambas	193	125.823.809	171.591
7	Kab. Sanggau	163	105.056.575	1.372.728
8	Kab. Sintang	390	229.813.861	5.147.730
9	Kab. Sekadau	87	56.136.946	-
10	Kab. Melawi	169	103.466.011	1.544.319
11	Kab. Kayong Utara	43	27.747.685	-
12	Kab. Kubu Raya	117	78.184.211	857.955
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**			
1	Kab. Barito Selatan	86	50.375.364	514.773
2	Kab. Barito Utara	93	54.866.380	171.591
3	Kab. Kapuas	214	130.416.839	-
4	Kab. Kotawaringin Barat	81	49.487.500	-
5	Kab. Kotawaringin Timur	168	101.944.435	1.201.138

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
6	Kab. Sambas	5.474.907	71.421.727	202.892.034
7	Kab. Sanggau	4.610.448	48.298.497	159.338.248
8	Kab. Sintang	11.237.967	102.404.704	348.604.262
9	Kab. Sekadau	2.881.530	28.581.546	87.600.022
10	Kab. Melawi	4.898.601	49.573.984	159.482.915
11	Kab. Kayong Utara	1.440.765	25.191.594	54.380.044
12	Kab. Kubu Raya	3.457.836	54.173.181	136.673.183
XV	**Provinsi Kalimantan Tengah**			
1	Kab. Barito Selatan	2.593.377	33.908.027	87.391.541
2	Kab. Barito Utara	2.881.530	36.557.198	94.476.699
3	Kab. Kapuas	6.051.213	55.076.249	191.544.301
4	Kab. Kotawaringin Barat	2.593.377	33.220.456	85.301.333
5	Kab. Kotawaringin Timur	4.898.601	54.311.032	162.355.206

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
6	Kab. Katingan	154	89.602.396	343.182
7	Kab. Seruyan	97	57.512.679	-
8	Kab. Sukamara	29	17.725.647	-
9	Kab. Lamandau	85	49.893.789	-
10	Kab. Gunung Mas	114	66.419.436	-
11	Kab. Pulang Pisau	95	57.349.532	-
12	Kab. Murung Raya	116	66.022.582	-
13	Kab. Barito Timur	101	59.278.974	171.591
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**			
1	Kab. Banjar	277	171.876.006	343.182
2	Kab. Barito Kuala	195	119.826.934	171.591
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	144	88.866.658	-
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	161	99.693.415	171.591

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
6	Kab. Katingan	4.322.295	56.372.953	150.640.826
7	Kab. Seruyan	2.881.530	50.961.597	111.355.806
8	Kab. Sukamara	864.459	21.163.069	39.753.175
9	Kab. Lamandau	2.593.377	28.271.306	80.758.472
10	Kab. Gunung Mas	3.169.683	36.504.230	106.093.349
11	Kab. Pulang Pisau	2.881.530	36.512.922	96.743.984
12	Kab. Murung Raya	3.457.836	64.125.348	133.605.766
13	Kab. Barito Timur	2.881.530	24.536.723	86.868.818
XVI	**Provinsi Kalimantan Selatan**			
1	Kab. Banjar	8.068.284	36.256.335	216.543.807
2	Kab. Barito Kuala	5.763.060	28.293.636	154.055.221
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	4.034.142	25.402.732	118.303.532
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	4.610.448	24.844.514	129.319.968

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
5	Kab. Hulu Sungai Utara	214	127.056.836	-
6	Kab. Kotabaru	198	121.191.661	686.364
7	Kab. Tabalong	121	75.070.454	-
8	Kab. Tanah Laut	130	82.364.623	-
9	Kab. Tapin	126	76.358.324	-
10	Kab. Balangan	154	88.722.396	-
11	Kab. Tanah Bumbu	144	89.346.670	-
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**			
1	Kab. Berau	100	59.597.397	-
2	Kab. Kutai Kartanegara	193	122.303.806	343.182
3	Kab. Kutai Barat	190	109.579.056	-
4	Kab. Kutai Timur	139	87.418.803	1.029.546
5	Kab. Paser	139	84.698.791	514.773

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
5	Kab. Hulu Sungai Utara	6.051.213	39.281.228	172.389.277
6	Kab. Kotabaru	5.763.060	43.007.256	170.648.341
7	Kab. Tabalong	3.457.836	30.529.213	109.057.503
8	Kab. Tanah Laut	3.745.989	23.963.129	110.073.741
9	Kab. Tapin	3.745.989	22.869.578	102.973.891
10	Kab. Balangan	4.322.295	26.569.134	119.613.825
11	Kab. Tanah Bumbu	4.034.142	29.410.539	122.791.351
XVII	**Provinsi Kalimantan Timur**			
1	Kab. Berau	2.881.530	59.758.768	122.237.695
2	Kab. Kutai Kartanegara	5.474.907	63.049.032	191.170.927
3	Kab. Kutai Barat	5.474.907	66.488.464	181.542.427
4	Kab. Kutai Timur	4.034.142	102.002.758	194.485.249
5	Kab. Paser	4.034.142	38.471.543	127.719.249

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
6	Kab. Penajam Paser Utara	30	19.407.223	-
7	Kab. Mahakam Ulu	50	28.718.699	-
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**			
1	Kab. Bolaang Mongondow	200	120.554.800	-
2	Kab. Minahasa	227	136.917.299	-
3	Kab. Sangihe	145	84.068.230	-
4	Kab. Kepulauan Talaud	142	80.303.508	-
5	Kab. Minahasa Selatan	167	103.222.858	343.182
6	Kab. Minahasa Utara	125	75.956.752	-
7	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	83	47.010.642	-
8	Kota Kotamobagu	15	9.463.610	-
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	106	61.206.844	-
10	Kab. Minahasa Tenggara	135	77.892.490	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
6	Kab. Penajam Paser Utara	864.459	18.503.429	38.775.111
7	Kab. Mahakam Ulu	1.728.918	52.695.743	83.143.360
XVIII	**Provinsi Sulawesi Utara**			
1	Kab. Bolaang Mongondow	5.763.060	35.244.634	161.562.494
2	Kab. Minahasa	6.627.519	27.165.303	170.710.121
3	Kab. Sangihe	4.322.295	25.540.945	113.931.470
4	Kab. Kepulauan Talaud	4.034.142	29.646.881	113.984.531
5	Kab. Minahasa Selatan	4.898.601	30.047.986	138.512.627
6	Kab. Minahasa Utara	3.745.989	23.560.334	103.263.075
7	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2.593.377	19.724.253	69.328.272
8	Kota Kotamobagu	576.306	13.276.714	23.316.630
9	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.169.683	21.985.586	86.362.113
10	Kab. Minahasa Tenggara	4.034.142	24.188.264	106.114.896

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	81	48.287.494	-
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	81	47.887.494	-
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**			
1	Kab. Banggai	291	171.418.033	-
2	Kab. Banggai Kepulauan	141	81.901.934	171.591
3	Kab. Buol	108	64.729.992	171.591
4	Kab. Toli-Toli	103	63.122.122	-
5	Kab. Donggala	158	98.088.692	2.573.868
6	Kab. Morowali	126	74.998.326	343.182
7	Kab. Poso	142	85.343.508	857.956
8	Kab. Parigi Moutong	278	171.637.574	686.364
9	Kab. Tojo Una Una	134	79.330.916	2.573.869
10	Kab. Sigi	176	106.997.029	1.201.137

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2.593.377	18.061.487	68.942.358
12	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2.593.377	20.529.572	71.010.443
XIX	**Provinsi Sulawesi Tengah**			
1	Kab. Banggai	8.356.437	54.417.965	234.192.435
2	Kab. Banggai Kepulauan	4.034.142	28.007.282	114.114.949
3	Kab. Buol	3.169.683	26.501.563	94.572.829
4	Kab. Toli-Toli	2.881.530	25.676.169	91.679.821
5	Kab. Donggala	4.610.448	37.575.943	142.848.951
6	Kab. Morowali	3.745.989	25.779.478	104.866.975
7	Kab. Poso	4.034.142	43.268.950	133.504.556
8	Kab. Parigi Moutong	8.068.284	57.124.375	237.516.597
9	Kab. Tojo Una Una	3.745.989	37.141.827	122.792.601
10	Kab. Sigi	5.186.754	35.072.522	148.457.442

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
11	Kab. Banggai Laut	63	37.139.162	171.591
12	Kab. Morowali Utara	122	71.472.028	343.182
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**			
1	Kab. Bantaeng	46	29.512.405	-
2	Kab. Barru	40	25.582.960	-
3	Kab. Bone	328	207.876.274	6.005.685
4	Kab. Bulukumba	109	70.091.568	171.591
5	Kab. Enrekang	112	69.936.288	3.260.231
6	Kab. Gowa	121	79.630.482	-
7	Kab. Jeneponto	82	53.169.075	171.591
8	Kab. Luwu	207	127.925.818	7.035.243
9	Kab. Luwu Utara	166	103.381.287	2.402.274
10	Kab. Maros	80	51.805.929	514.773

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
11	Kab. Banggai Laut	2.017.071	17.801.088	57.128.912
12	Kab. Morowali Utara	3.457.836	40.646.891	115.919.937
XX	**Provinsi Sulawesi Selatan**			
1	Kab. Bantaeng	1.440.765	15.029.154	45.982.324
2	Kab. Barru	1.152.612	26.541.769	53.277.341
3	Kab. Bone	9.509.049	110.396.848	333.787.856
4	Kab. Bulukumba	3.169.683	37.102.809	110.535.651
5	Kab. Enrekang	3.169.683	39.584.362	115.950.564
6	Kab. Gowa	3.457.836	64.244.544	147.332.862
7	Kab. Jeneponto	2.593.377	49.998.133	105.932.176
8	Kab. Luwu	6.051.213	51.993.166	193.005.440
9	Kab. Luwu Utara	4.898.601	62.280.205	172.962.367
10	Kab. Maros	2.593.377	33.596.274	88.510.353

SK No 023328 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	65	41.462.312	514.773
12	Kab. Luwu Timur	124	79.075.183	343.182
13	Kab. Pinrang	69	44.508.609	2.230.687
14	Kab. Sinjai	67	42.985.459	686.364
15	Kab. Kepulauan Selayar	81	50.127.494	4.289.777
16	Kab. Sidenreng Rappang	68	43.387.034	514.773
17	Kab. Soppeng	49	31.597.128	171.591
18	Kab. Takalar	76	49.079.629	857.955
19	Kab. Tana Toraja	112	70.576.288	12.354.569
20	Kab. Wajo	142	88.783.508	171.591
21	Kab. Toraja Utara	111	69.054.714	15.443.195
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**			
1	Kab. Buton	83	49.330.642	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.017.071	27.667.722	71.661.878
12	Kab. Luwu Timur	3.457.836	34.663.446	117.539.647
13	Kab. Pinrang	2.305.224	21.179.410	70.223.930
14	Kab. Sinjai	2.017.071	27.338.807	73.027.701
15	Kab. Kepulauan Selayar	2.593.377	28.511.867	85.522.515
16	Kab. Sidenreng Rappang	2.017.071	21.794.443	67.713.321
17	Kab. Soppeng	1.440.765	19.582.693	52.792.177
18	Kab. Takalar	2.305.224	32.245.295	84.488.103
19	Kab. Tana Toraja	3.169.683	38.673.494	124.774.034
20	Kab. Wajo	4.034.142	28.558.594	121.547.835
21	Kab. Toraja Utara	3.169.683	48.572.151	136.239.743
XXI	**Provinsi Sulawesi Tenggara**			
1	Kab. Buton	2.593.377	21.964.162	73.888.181

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2	Kab. Konawe	291	166.138.030	171.591
3	Kab. Kolaka	100	60.397.400	-
4	Kab. Muna	124	75.715.176	5.662.506
5	Kab. Konawe Selatan	336	196.688.863	-
6	Kab. Bombana	121	71.070.454	343.182
7	Kab. Wakatobi	75	44.198.050	171.591
8	Kab. Kolaka Utara	127	75.399.898	4.976.142
9	Kab. Konawe Utara	159	89.370.266	-
10	Kab. Buton Utara	78	44.442.771	171.591
11	Kab. Konawe Kepulauan	89	50.140.086	171.591
12	Kab. Kolaka Timur	117	67.624.158	171.591
13	Kab. Muna Barat	81	47.727.494	1.544.319
14	Kab. Buton Tengah	67	40.505.458	1.201.137

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
2	Kab. Konawe	8.356.437	48.783.322	223.449.380
3	Kab. Kolaka	2.881.530	23.975.843	87.254.773
4	Kab. Muna	3.457.836	39.348.839	124.184.357
5	Kab. Konawe Selatan	9.797.202	45.367.501	251.853.566
6	Kab. Bombana	3.457.836	31.295.180	106.166.652
7	Kab. Wakatobi	2.305.224	20.633.356	67.308.221
8	Kab. Kolaka Utara	3.745.989	43.067.110	127.189.139
9	Kab. Konawe Utara	4.610.448	31.780.829	125.761.543
10	Kab. Buton Utara	2.593.377	22.820.568	70.028.307
11	Kab. Konawe Kepulauan	2.881.530	22.064.960	75.258.167
12	Kab. Kolaka Timur	3.457.836	25.428.581	96.682.166
13	Kab. Muna Barat	2.593.377	27.930.371	79.795.561
14	Kab. Buton Tengah	2.017.071	21.969.050	65.692.716

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
15	Kab. Buton Selatan	60	37.294.440	1.201.137
XXII	**Provinsi Bali**			
1	Kab. Badung	46	31.912.434	-
2	Kab. Bangli	68	44.347.051	-
3	Kab. Buleleng	129	88.923.123	-
4	Kab. Gianyar	64	45.460.791	-
5	Kab. Jembrana	41	28.544.562	-
6	Kab. Karangasem	75	52.598.106	-
7	Kab. Klungkung	53	34.883.435	-
8	Kab. Tabanan	133	87.009.364	-
9	Kota Denpasar	27	20.922.543	-
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**			
1	Kab. Bima	191	122.380.650	7.378.414

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
15	Kab. Buton Selatan	2.017.071	21.837.305	62.349.953
XXII	**Provinsi Bali**			
1	Kab. Badung	1.440.765	25.133.347	58.486.546
2	Kab. Bangli	2.017.071	18.749.141	65.113.263
3	Kab. Buleleng	3.745.989	37.711.059	130.380.171
4	Kab. Gianyar	2.017.071	17.718.593	65.196.455
5	Kab. Jembrana	1.440.765	24.554.356	54.539.683
6	Kab. Karangasem	2.305.224	30.385.918	85.289.248
7	Kab. Klungkung	1.728.918	19.242.460	55.854.813
8	Kab. Tabanan	3.745.989	33.359.618	124.114.971
9	Kota Denpasar	864.459	18.361.465	40.148.467
XXIII	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**			
1	Kab. Bima	5.474.907	54.380.074	189.614.045

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2	Kab. Dompu	72	45.873.331	-
3	Kab. Lombok Barat	119	82.507.383	-
4	Kab. Lombok Tengah	127	91.640.025	-
5	Kab. Lombok Timur	239	162.696.304	-
6	Kab. Sumbawa	157	101.767.137	514.773
7	Kab. Sumbawa Barat	57	35.929.718	-
8	Kab. Lombok Utara	43	30.947.724	-
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**			
1	Kab. Alor	158	94.088.692	13.727.292
2	Kab. Belu	69	43.228.610	5.147.732
3	Kab. Ende	255	146.801.369	1.887.502
4	Kab. Flores Timur	229	136.200.447	171.591
5	Kab. Kupang	160	100.251.846	11.839.791

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
2	Kab. Dompu	2.305.224	27.280.721	75.459.276
3	Kab. Lombok Barat	3.457.836	76.515.104	162.480.323
4	Kab. Lombok Tengah	3.745.989	115.476.080	210.862.094
5	Kab. Lombok Timur	6.915.672	145.188.558	314.800.534
6	Kab. Sumbawa	4.610.448	43.470.399	150.362.757
7	Kab. Sumbawa Barat	1.728.918	25.932.318	63.590.954
8	Kab. Lombok Utara	1.440.765	48.169.376	80.557.865
XXIV	**Provinsi Nusa Tenggara Timur**			
1	Kab. Alor	4.610.448	52.395.723	164.822.155
2	Kab. Belu	2.305.224	37.081.448	87.763.014
3	Kab. Ende	7.491.978	43.549.819	199.730.668
4	Kab. Flores Timur	6.627.519	31.471.348	174.470.905
5	Kab. Kupang	4.610.448	48.700.154	165.402.239

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
6	Kab. Lembata	144	83.426.656	6.005.687
7	Kab. Manggarai	145	91.748.230	2.745.456
8	Kab. Ngada	135	80.212.490	343.182
9	Kab. Sikka	147	92.711.378	13.898.888
10	Kab. Sumba Barat	63	39.299.162	8.064.778
11	Kab. Sumba Timur	140	84.220.360	1.544.319
12	Kab. Timor Tengah Selatan	266	165.538.686	29.513.671
13	Kab. Timor Tengah Utara	160	96.011.840	13.727.283
14	Kab. Rote Ndao	112	68.096.288	3.088.638
15	Kab. Manggarai Barat	164	101.938.138	7.378.415
16	Kab. Nagekeo	97	59.592.679	2.917.051
17	Kab. Sumba Barat Daya	173	108.832.304	20.419.337
18	Kab. Sumba Tengah	65	40.102.310	3.946.595

SK No 023338 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
6	Kab. Lembata	4.034.142	39.980.703	133.447.188
7	Kab. Manggarai	4.322.295	48.749.958	147.565.939
8	Kab. Ngada	4.034.142	26.170.413	110.760.227
9	Kab. Sikka	4.322.295	41.831.671	152.764.232
10	Kab. Sumba Barat	2.017.071	38.405.456	87.786.467
11	Kab. Sumba Timur	4.034.142	40.717.846	130.516.667
12	Kab. Timor Tengah Selatan	7.780.131	87.007.640	289.840.128
13	Kab. Timor Tengah Utara	4.610.448	49.192.421	163.541.992
14	Kab. Rote Ndao	3.169.683	32.102.174	106.456.783
15	Kab. Manggarai Barat	4.610.448	35.575.114	149.502.115
16	Kab. Nagekeo	2.881.530	23.829.832	89.221.092
17	Kab. Sumba Barat Daya	4.898.601	105.441.996	239.592.238
18	Kab. Sumba Tengah	2.017.071	26.871.403	72.937.379

SK No 023339 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
19	Kab. Manggarai Timur	159	99.130.266	12.354.552
20	Kab. Sabu Raijua	58	35.771.292	8.407.962
21	Kab. Malaka	127	78.199.900	3.431.821
XXV	**Provinsi Maluku**			
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	80	48.605.922	686.364
2	Kab. Maluku Tengah	186	114.132.778	1.887.502
3	Kab. Maluku Tenggara	190	108.779.060	343.182
4	Kab. Buru	82	50.129.070	1.201.140
5	Kota Ambon	30	20.367.240	-
6	Kab. Seram Bagian Barat	92	56.384.824	1.372.729
7	Kab. Seram Bagian Timur	198	112.631.648	514.773
8	Kab. Kepulauan Aru	117	66.824.158	686.364
9	Kota Tual	27	16.522.501	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
19	Kab. Manggarai Timur	4.610.448	80.201.829	196.297.095
20	Kab. Sabu Raijua	1.728.918	38.658.689	84.566.861
21	Kab. Malaka	3.745.989	27.290.808	112.668.518
XXV	**Provinsi Maluku**			
1	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.593.377	36.220.847	88.106.510
2	Kab. Maluku Tengah	5.474.907	59.168.132	180.663.319
3	Kab. Maluku Tenggara	5.474.907	32.429.017	147.026.166
4	Kab. Buru	2.593.377	33.550.392	87.473.979
5	Kota Ambon	864.459	17.679.305	38.911.004
6	Kab. Seram Bagian Barat	2.881.530	47.327.090	107.966.173
7	Kab. Seram Bagian Timur	5.763.060	42.468.886	161.378.367
8	Kab. Kepulauan Aru	3.457.836	41.537.655	112.506.013
9	Kota Tual	864.459	20.051.257	37.438.217

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
10	Kab. Maluku Barat Daya	117	66.984.158	514.773
11	Kab. Buru Selatan	79	46.524.345	3.946.596
XXVI	**Provinsi Papua**			
1	Kab. Biak Numfor	254	140.719.761	2.917.049
2	Kab. Jayapura	139	80.138.788	857.956
3	Kab. Jayawijaya	328	188.436.271	3.431.822
4	Kab. Merauke	179	103.321.743	5.662.510
5	Kab. Mimika	133	74.449.312	4.976.147
6	Kab. Nabire	72	42.513.330	4.632.958
7	Kab. Paniai	216	122.099.976	11.153.445
8	Kab. Puncak Jaya	302	172.395.336	11.668.219
9	Kab. Kepulauan Yapen	160	90.731.839	2.059.095
10	Kota Jayapura	14	8.422.037	514.773

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
10	Kab. Maluku Barat Daya	3.457.836	36.963.607	107.920.374
11	Kab. Buru Selatan	2.593.377	35.818.082	88.882.400
XXVI	**Provinsi Papua**			
1	Kab. Biak Numfor	7.203.825	56.097.843	206.938.478
2	Kab. Jayapura	4.034.142	49.484.460	134.515.346
3	Kab. Jayawijaya	9.509.049	80.616.577	281.993.719
4	Kab. Merauke	5.186.754	124.040.638	238.211.645
5	Kab. Mimika	3.745.989	67.896.002	151.067.450
6	Kab. Nabire	2.305.224	48.222.833	97.674.345
7	Kab. Paniai	6.339.366	61.494.540	201.087.327
8	Kab. Puncak Jaya	8.644.590	98.115.564	290.823.709
9	Kab. Kepulauan Yapen	4.610.448	41.318.973	138.720.355
10	Kota Jayapura	576.306	18.427.158	27.940.274

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
11	Kab. Sarmi	92	51.344.797	171.591
12	Kab. Keerom	91	51.663.221	2.917.052
13	Kab. Yahukimo	510	292.722.740	2.745.463
14	Kab. Pegunungan Bintang	277	155.315.981	1.887.506
15	Kab. Tolikara	541	302.051.482	1.201.140
16	Kab. Boven Digoel	112	62.176.275	1.029.546
17	Kab. Mappi	162	91.854.986	9.437.530
18	Kab. Asmat	221	123.307.836	8.579.550
19	Kab. Waropen	100	55.597.384	514.773
20	Kab. Supiori	38	21.659.812	171.591
21	Kab. Mamberamo Raya	60	34.254.439	171.591
22	Kab. Mamberamo Tengah	59	34.412.866	4.118.195
23	Kab. Yalimo	300	168.392.198	686.366

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
11	Kab. Sarmi	2.881.530	56.408.367	110.806.285
12	Kab. Keerom	2.881.530	42.223.889	99.685.692
13	Kab. Yahukimo	13.255.038	100.422.847	409.146.088
14	Kab. Pegunungan Bintang	8.068.284	99.179.749	264.451.520
15	Kab. Tolikara	13.831.344	105.242.912	422.326.878
16	Kab. Boven Digoel	3.169.683	85.432.207	151.807.711
17	Kab. Mappi	4.610.448	87.517.031	193.419.995
18	Kab. Asmat	6.339.366	117.030.710	255.257.462
19	Kab. Waropen	2.881.530	46.110.526	105.104.213
20	Kab. Supiori	1.152.612	21.183.731	44.167.746
21	Kab. Mamberamo Raya	2.017.071	80.770.726	117.213.827
22	Kab. Mamberamo Tengah	1.728.918	57.706.212	97.966.191
23	Kab. Yalimo	8.644.590	68.905.042	246.628.196

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
24	Kab. Lanny Jaya	354	200.397.196	26.939.815
25	Kab. Nduga	248	139.670.349	2.230.683
26	Kab. Dogiyai	79	49.644.346	16.472.778
27	Kab. Puncak	206	118.884.222	5.662.519
28	Kab. Intan Jaya	97	59.672.678	12.182.994
29	Kab. Deiyai	67	41.145.458	5.147.733
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**			
1	Kab. Halmahera Tengah	61	35.856.014	-
2	Kab. Halmahera Barat	169	97.946.006	171.591
3	Kab. Halmahera Timur	102	59.920.548	1.715.911
4	Kab. Halmahera Selatan	249	146.551.927	-
5	Kab. Halmahera Utara	196	115.428.506	-
6	Kab. Kepulauan Sula	78	47.162.774	514.773

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
24	Kab. Lanny Jaya	10.085.355	108.640.219	346.062.585
25	Kab. Nduga	7.203.825	67.352.406	216.457.263
26	Kab. Dogiyai	2.593.377	50.688.012	119.398.513
27	Kab. Puncak	6.051.213	89.053.499	219.651.453
28	Kab. Intan Jaya	2.881.530	74.490.712	149.227.914
29	Kab. Deiyai	2.017.071	48.001.106	96.311.368
XXVII	**Provinsi Maluku Utara**			
1	Kab. Halmahera Tengah	2.017.071	25.145.616	63.018.701
2	Kab. Halmahera Barat	4.898.601	29.377.899	132.394.097
3	Kab. Halmahera Timur	2.881.530	36.468.021	100.986.010
4	Kab. Halmahera Selatan	7.203.825	42.686.069	196.441.821
5	Kab. Halmahera Utara	5.763.060	32.515.846	153.707.412
6	Kab. Kepulauan Sula	2.593.377	28.055.463	78.326.387

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
7	Kota Tidore Kepulauan	49	28.717.126	-
8	Kab. Pulau Morotai	88	51.098.512	-
9	Kab. Pulau Taliabu	71	41.471.754	-
XXVIII	**Provinsi Banten**			
1	Kab. Lebak	340	223.015.221	3.775.006
2	Kab. Pandeglang	326	212.673.168	3.431.821
3	Kab. Serang	326	218.113.236	171.591
4	Kab. Tangerang	246	180.787.491	-
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**			
1	Kab. Bangka	62	40.417.598	-
2	Kab. Belitung	42	27.426.117	-
3	Kab. Bangka Selatan	50	32.158.703	-
4	Kab. Bangka Tengah	56	36.008.147	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
7	Kota Tidore Kepulauan	1.440.765	19.341.117	49.499.008
8	Kab. Pulau Morotai	2.881.530	24.012.993	77.993.035
9	Kab. Pulau Taliabu	2.305.224	23.412.633	67.189.611
XXVIII	**Provinsi Banten**			
1	Kab. Lebak	9.797.202	57.646.079	294.233.508
2	Kab. Pandeglang	9.509.049	45.372.662	270.986.700
3	Kab. Serang	9.509.049	40.737.302	268.531.178
4	Kab. Tangerang	7.203.825	113.289.219	301.280.535
XXIX	**Provinsi Bangka Belitung**			
1	Kab. Bangka	2.017.071	22.037.128	64.471.797
2	Kab. Belitung	1.440.765	21.260.855	50.127.737
3	Kab. Bangka Selatan	1.728.918	20.585.529	54.473.150
4	Kab. Bangka Tengah	1.728.918	19.109.320	56.846.385

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
5	Kab. Bangka Barat	60	38.574.444	-
6	Kab. Belitung Timur	39	25.341.392	-
XXX	**Provinsi Gorontalo**			
1	Kab. Boalemo	82	51.649.069	1.201.138
2	Kab. Gorontalo	191	119.900.634	4.289.775
3	Kab. Pohuwato	101	62.718.974	-
4	Kab. Bone Bolango	160	94.811.840	1.544.319
5	Kab. Gorontalo Utara	123	73.233.602	171.591
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**			
1	Kab. Natuna	70	40.430.180	-
2	Kab. Kepulauan Anambas	52	29.921.848	-
3	Kab. Karimun	42	26.306.108	-
4	Kab. Lingga	75	44.518.050	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
5	Kab. Bangka Barat	2.017.071	20.705.699	61.297.214
6	Kab. Belitung Timur	1.152.612	20.821.184	47.315.188
XXX	**Provinsi Gorontalo**			
1	Kab. Boalemo	2.593.377	36.399.596	91.843.180
2	Kab. Gorontalo	5.474.907	82.137.828	211.803.144
3	Kab. Pohuwato	2.881.530	24.724.372	90.324.876
4	Kab. Bone Bolango	4.610.448	41.210.133	142.176.740
5	Kab. Gorontalo Utara	3.457.836	26.147.172	103.010.201
XXXI	**Provinsi Kepulauan Riau**			
1	Kab. Natuna	2.305.224	23.286.881	66.022.285
2	Kab. Kepulauan Anambas	1.728.918	21.501.860	53.152.626
3	Kab. Karimun	1.440.765	17.993.752	45.740.625
4	Kab. Lingga	2.305.224	23.949.572	70.772.846

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
5	Kab. Bintan	36	22.536.666	-
XXXII	**Provinsi Papua Barat**			
1	Kab. Fak Fak	142	79.183.493	1.887.502
2	Kab. Manokwari	164	91.538.113	686.366
3	Kab. Sorong	226	119.395.626	171.591
4	Kab. Raja Ampat	117	65.704.155	-
5	Kab. Sorong Selatan	121	67.710.446	343.183
6	Kab. Teluk Bintuni	115	64.340.995	343.183
7	Kab. Teluk Wondama	75	42.038.043	171.591
8	Kab. Kaimana	84	47.412.216	-
9	Kab. Maybrat	259	140.407.603	-
10	Kab. Tambrauw	216	112.739.875	-
11	Kab. Manokwari Selatan	57	32.329.717	857.955

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
5	Kab. Bintan	1.152.612	17.018.731	40.708.009
XXXII	**Provinsi Papua Barat**			
1	Kab. Fak Fak	4.034.142	51.880.098	136.985.235
2	Kab. Manokwari	4.610.448	46.695.660	143.530.587
3	Kab. Sorong	6.627.519	50.147.227	176.341.963
4	Kab. Raja Ampat	3.457.836	38.387.473	107.549.464
5	Kab. Sorong Selatan	3.457.836	37.328.604	108.840.069
6	Kab. Teluk Bintuni	3.457.836	52.164.768	120.306.782
7	Kab. Teluk Wondama	2.305.224	30.099.488	74.614.346
8	Kab. Kaimana	2.593.377	54.043.923	104.049.516
9	Kab. Maybrat	7.491.978	47.384.740	195.284.321
10	Kab. Tambrauw	6.339.366	57.142.365	176.221.606
11	Kab. Manokwari Selatan	1.728.918	29.913.281	64.829.871

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
12	Kab. Pegunungan Arfak	166	92.741.278	343.183
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**			
1	Kab. Majene	62	38.417.588	3.088.642
2	Kab. Mamuju	88	54.858.515	-
3	Kab. Polewali Mandar	144	92.146.669	6.005.685
4	Kab. Mamasa	168	100.344.432	6.005.697
5	Kab. Pasangkayu	59	38.012.873	686.364
6	Kab. Mamuju Tengah	54	34.725.003	-
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**			
1	Kab. Bulungan	74	44.036.478	-
2	Kab. Malinau	109	62.091.561	-
3	Kab. Nunukan	232	125.725.084	-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
12	Kab. Pegunungan Arfak	4.898.601	44.964.551	142.947.613
XXXIII	**Provinsi Sulawesi Barat**			
1	Kab. Majene	2.017.071	22.336.758	65.860.059
2	Kab. Mamuju	2.881.530	25.470.280	83.210.325
3	Kab. Polewali Mandar	4.034.142	59.146.567	161.333.063
4	Kab. Mamasa	4.898.601	35.628.765	146.877.495
5	Kab. Pasangkayu	1.728.918	21.631.439	62.059.594
6	Kab. Mamuju Tengah	1.728.918	20.648.727	57.102.648
XXXIV	**Provinsi Kalimantan Utara**			
1	Kab. Bulungan	2.305.224	47.323.332	93.665.034
2	Kab. Malinau	3.169.683	105.884.405	171.145.649
3	Kab. Nunukan	6.627.519	61.399.866	193.752.469

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
4	Kab. Tana Tidung	32	18.450.369	-
Jumlah		**74.961**	**46.799.999.664**	**719.996.473**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V.15
RINCIAN DANA DESA
MENURUT KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
4	Kab. Tana Tidung	1.152.612	24.876.329	44.479.310
Jumlah		2.159.994.888	22.320.008.975	72.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

SK No 051940 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	APBN 2021
1.	**Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat**	**184.535.583.514**
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	160.485.583.514
1.1.1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	81.534.001.080
1.1.2	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	1.478.383.621
1.1.3	Kementerian Agama	55.885.467.898
1.1.4	Kementerian Keuangan	2.315.590.286
1.1.5	Kementerian Pertanian	396.689.864
1.1.6	Kementerian Perindustrian	1.418.981.642
1.1.7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	92.223.966
1.1.8	Kementerian Perhubungan	2.017.536.133
1.1.9	Kementerian Kesehatan	2.302.739.356
1.1.10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76.000.000
1.1.11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	233.516.890
1.1.12	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	994.159.210
1.1.13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	32.800.000
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	441.300.000
1.1.15	Kementerian Pertahanan	487.242.545
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	3.712.039.617
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	445.802.380
1.1.18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	117.600.000
1.1.19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	128.037.455
1.1.20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	291.233.571
1.1.21	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.084.238.000
1.1.22	Kementerian Perdagangan	-
1.1.23	Kepolisian Negara Republik Indonesia	-
1.1.24	Kementerian Sosial	-
1.1.25	Badan Intelijen Negara	-
1.1.26	Kejaksaan Republik Indonesia	-
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	24.050.000.000
2.	**Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa**	**299.064.317.735**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN VI
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	APBN 2021
2.1	DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	156.588.085.167
2.2	Dana Transfer Khusus	135.131.356.813
2.2.1	DAK Fisik	18.334.600.000
2.2.2	DAK Non Fisik	116.796.756.813
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	55.360.363.813
2.2.2.2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	454.204.000
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	53.459.118.000
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.014.724.000
2.2.2.5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	192.000.000
2.2.2.6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.195.308.000
2.2.2.7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	136.032.000
2.2.2.8	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.985.007.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	5.994.875.755
2.4	DID Sektor Pendidikan	1.350.000.000
3.	**Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan**	**66.405.702.440**
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	20.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	3.000.000.000
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	4.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	37.405.702.440
	Jumlah	**550.005.603.689**

Keterangan:
Rincian Anggaran Pendidikan belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBN 2021 oleh DPR RI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 051957 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2020
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

SK No 051941 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
A. Pembiayaan Utang	**1.177.350.880.761**
I. Surat Berharga Negara (Neto)	1.207.267.144.000
II. Pinjaman (Neto)	(29.916.263.239)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	978.326.772
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2.729.126.772
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(1.750.800.000)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.894.590.011)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	51.377.409.989
i. Pinjaman Tunai	21.900.000.000
ii. Pinjaman Kegiatan	29.477.409.989
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	26.019.178.983
(1) Pinjaman Kegiatan K/L	21.508.672.796
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	4.510.506.187
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	3.458.231.006
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(82.272.000.000)
B. Pembiayaan Investasi	**(184.459.515.221)**
I. Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	(37.385.000.000)
1. PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(5.000.000.000)
2. PMN kepada PT Hutama Karya (Persero)	(6.208.000.000)
3. PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(2.250.000.000)
4. PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	(20.000.000.000)
5. PMN kepada PT Pelindo III (Persero)	(1.200.000.000)
6. PMN kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC (Persero)	(470.000.000)
7. PMN kepada PT PAL Indonesia (Persero)	(1.280.000.000)
8. PMN kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	(977.000.000)
II. Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	(5.000.000.000)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
1. PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(5.000.000.000)
III. Investasi kepada Badan Layanan Umum	(60.743.000.000)
1. Dana Bergulir	(18.620.000.000)
a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(16.620.000.000)
b. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	(2.000.000.000)
2. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(20.000.000.000)
3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(11.123.000.000)
4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	(2.000.000.000)
5. Dana Abadi Penelitian	(3.000.000.000)
6. Dana Abadi Kebudayaan	(2.000.000.000)
7. Dana Abadi Perguruan Tinggi	(4.000.000.000)
IV. Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(925.812.781)
1. Islamic Development Bank (IDB)	(80.491.260)
2. International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(58.400.000)
3. International Development Association (IDA)	(169.000.000)
4. International Finance Corporation (IFC)	(332.651.267)
5. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(241.470.254)
6. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	(43.800.000)
V. Investasi Pemerintah	(10.000.000.000)
1. Pinjaman PEN Daerah	(10.000.000.000)
VI. Pembiayaan Investasi Lainnya	(70.405.702.440)
1. Pembiayaan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional	(33.000.000.000)
2. Pembiayaan Pendidikan	(37.405.702.440)
C. Pemberian Pinjaman	**448.056.564**
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/ Badan Lainnya	448.056.564

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	448.056.564
a. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(3.458.231.006)
b. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	3.906.287.570
D. Kewajiban Penjaminan	**(2.715.736.000)**
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(715.736.000)
1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(15.616.000)
2. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(173.711.000)
3. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(5.394.000)
4. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(100.000.000)
5. Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit* /LRT Jabodebek	(420.504.000)
6. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(511.000)
II. Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan	(2.000.000.000)
1. Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN	(2.000.000.000)
a. Penjaminan *Loss Limit* UMKM	(1.000.000.000)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
b. Penjaminan *Backstop Loss Limit* Korporasi	(1.000.000.000)
E. Pembiayaan Lainnya	**15.755.785.000**
I. Saldo Anggaran Lebih	15.755.785.000
JUMLAH	**1.006.379.471.104**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 051958 A